

BUPATI KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
 Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
- 6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun.
- 7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
- 9. Prioritas dan Plafon Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

BAB II

RKPD

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKP Tahun 2026, program strategis nasional yang

ditetapkan oleh pemerintah pusat dan rencana kerja daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja-PD Tahun 2026; dan
- b. pedoman penyusunan rancangan KUA serta rancangan
 PPAS sementara Daerah Tahun 2026.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2026 memuat:
 - a. kerangka ekonomi Daerah;
 - b. prioritas pembangunan Daerah; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKPD Tahun 2026 memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - g. BAB VII : Penutup.
- (4) Ketentuan mengenai rincian RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan RKPD Tahun 2026 dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB IV PERUBAHAN RKPD

Pasal 6

- (1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat dan keadaan luar biasa serta perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana pembangunan jangka menengah Daerah ditetapkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

> Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 25 Juli 2025 BUPATI KUTAI KARTANEGARA

> > ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 25 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 NOMOR 77

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Kepala Bagian Hukum

> <u>PURNOMO, SH</u> NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 29 TAHUN 2025 **TENTANG** RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH **TAHUN 2026**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan RKPD merupakan langkah strategis dalam memastikan pembangunan Daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Sebagai salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara memiliki posisi strategis yang didukung oleh kekayaan sumber daya alam, baik di sektor pertambangan, kehutanan, maupun pertanian. Potensi ini menjadikan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu pusat ekonomi penting di wilayah Kalimantan Timur yang harus dikelola secara bijaksana untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. RKPD menjadi panduan utama untuk menyelaraskan visi dan misi pembangunan Daerah dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Dokumen ini juga merupakan instrumen perencanaan tahunan yang berfungsi untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pembangunan dan optimalisasi alokasi sumber daya.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut, seperti sektor perikanan dan kelautan yang didukung oleh garis pantai yang panjang, sektor pariwisata dengan keberadaan Taman Nasional Kutai dan budaya khas lokal, serta sektor industri yang dapat berkembang melalui hilirisasi sumber daya alam. Pengelolaan potensi ini membutuhkan perencanaan yang matang dan sinergi antar-sektor untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, RKPD tahun ini difokuskan pada upaya pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing ekonomi Daerah, dan perlindungan lingkungan hidup. Penyusunan RKPD ini diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang adaptif terhadap tantangan pembangunan serta mendukung

pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah dan panjang Daerah.

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Sesuai amanat Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas: Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) untuk jangka 20 (dua puluh) Tahun, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) untuk jangka 5 (lima) Tahunan, dan RKPD untuk jangka tahunan. Secara beruntun RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD dalam 4 (empat) tahapan pembangunan tiap 5 (lima) tahun. Begitu juga dengan RPJMD dilaksanakan melalui RKPD dalam 5 (lima) tahap pembangunan tiap 1 (satu) tahun. RKPD harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RKP dan Program/Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

RKPD Tahun 2026 merupakan pelaksanaan RPJMD pada tahun ke 5 (lima) dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026. Dengan pelaksanaan pembangunan berbagai capaian pembangunan telah dapat dilihat dan dirasakan masyarakat Kutai Kartanegara. Capaian pembangunan ini menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan di tahun mendatang. Dengan capaian yang sudah ada juga dapat menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja, dan sebagai dasar dalam memperbaiki kinerja dan mencapai capaian pembangunan yang ditargetkan.

Merujuk pada penjelasan di atas, RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan pendekatan:

- Teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- 2) Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi, kesetaraan, adanya transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan, terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan

- keputusan dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan Daerah;
- 3) Politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan memperhatikan pula pokok-pokok pikiran yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- 4) Atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan. Pendekatan bottom-up (bawah-atas) dilakukan dengan memperhatikan usulan prioritas dari desa/kelurahan, kecamatan hasil dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan.

Dengan pendekatan ini maka dalam penyusunan RKPD antara program, kegiatan, dan sub-kegiatan dari tiap Perangkat Daerah diharapkan mampu mendukung pencapaian program lain dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. RKPD Tahun 2026 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu pada arahan pembangunan tahunan yang termuat dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi penjabaran visi, misi dan kebijakan Bupati yang penyusunannya merujuk pada RPJMD Tahun 2021 - 2026, RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, serta RKP Tahun 2026. Perumusan kebijakan pembangunan Tahun 2026 yang tertuang pada RKPD Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 termasuk dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026. Selain itu **RKPD** menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai salah satu dokumen evaluasi pembangunan Tahun 2026.

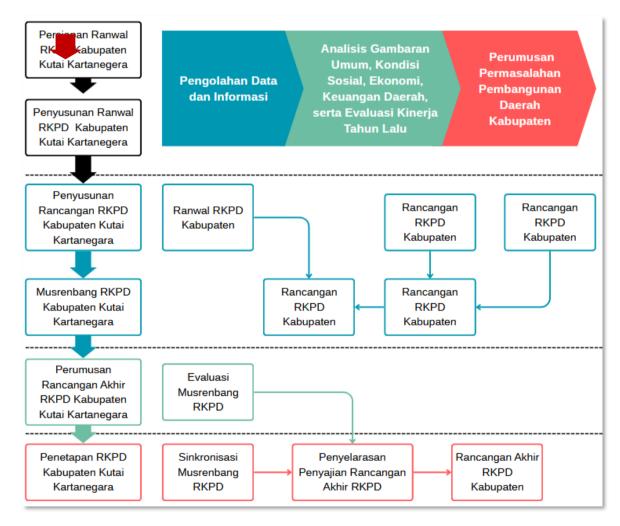
Dokumen RKPD Tahun 2026 disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dan berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta *top-down* dan *bottom-up*. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu anatara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan.

Dokumen RKPD Tahun 2026 disusun melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) Persiapan Penyusunan RKPD;
- 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
- 3) Penyusunan Rancangan RKPD;
- 4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- 5) Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
- 6) Penetapan RKPD.

Tahapan penyusunan RKPD tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar I.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Tahun 2026



Selanjutnya, rumusan RKPD Tahun 2026 akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 termasuk penyusunan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026. Selain itu, RKPD Tahun 2026 juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), sebagai salah satu evaluasi pembangunan tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tiap akhir tahun.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, RKPD merupakan jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi Daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah. Dengan RKPD Tahun 2026 pelaksanaan program dan kegiatan mampu menghasilkan capaian yang optimal dan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara secara bertahap dapat segera terwujud.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Adapun dasar hukum penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
- 11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);
- Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 177);
- 24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
- 25. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 7 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun

- 2023–2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 77);
- 26. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 16 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 180, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 90);

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, arah kebijakan dan isu strategis RKP Tahun 2026. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan di daerah berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan lingkungan internal maupun eksternal baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2026 berpedoman pada RKP Tahun 2026 yang terkait dengan program strategis, kegiatan serta tujuan dan sasaran. pembangunan, selain itu juga menyangkut penyelarasan, sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

RKPD memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen rencana maupun anggaran, terutama dengan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Renja-PD, dan rancangan APBD. Uraian hubungan antar dokumen perencanaan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut.

- Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, mencakup perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- 2. Perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem pembangunan nasional; serta
- 3. Sistem perencanaan pembangunan Daerah juga merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggarannya.

Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Masing-masing dokumen merupakan hierarki yang saling berhubungan. RPJPD adalah dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap 5 (lima) tahun dalam bentuk RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk 1 (satu) tahun dalam bentuk RKPD sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait. RKPD juga diselaraskan dengan RKP yang diperoleh dari forum musrenbang nasional. Selanjutnya, RKPD menjadi acuan Renja-PD dan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen KUA dan PPAS. KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD), yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hubungan RP.IM RKP Antar Dokumen Nasional Diacu Diperhatikan : Pedoman Dijabarkan Pedoman **RPJM** RKP **RPJP** RAPBD APBD Daerah Daerah Daerah Bahan Bahan Pedomar Pedoman Renstra Renja **RKA** DPA SKPD SKPD SKPD SKPD

Gambar I - 2 Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran

1.4. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari penyusunan RKPD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
 - 1. Penjabaran dan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
 - 2. Pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja-PD; dan
 - 3. Pedoman penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS.
- b. Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, yaitu:

- 1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan Daerah;
- 2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2026;
- 3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
- 4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- 5. Sebagai instrumen dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- 6. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada sub-bab latar belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja-PD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada bub-bab dasar hukum, penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada sub-bab hubungan antar dokumen menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada sub-bab maksud dan tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi Daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi Daerah. Pada sub bab sistematika mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan serta menjelaskan gambaran kondisi umum kondisi daerah meliputi aspek geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi Daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah Daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian Daerah meliputi pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat Daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas Daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Daerah bertujuan untuk
memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun
Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan RKPD Tahun 2026.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026 merupakan tahun terakhir pelaksanaan pembangunan jangka menengah periode 2021-2026. Sebagai periode pembangunan pada akhir pelaksanaan pembangunan jangka menengah, berbagai program pembangunan tahun 2026 diharapkan mampu menjadi penentu akhir dalam mewujudkan visi "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia". Adapun pada periode pembangunan tersebut, selain berfokus menyelesaikan pembangunan jangka menengah Daerah, diharapkan mendukung proses pembangunan Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang bertempat di perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, proyek nasional tersebut mengharuskan perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sinkronisasi dan kesiapan sebagai pendukung setiap aktivitas pembangunan Ibu Kota Negara sebagai pusat pemerintahan.

Sebagai daerah yang memiliki wilayah perdesaan cukup banyak dengan daerah-daerah yang jangkauannya sulit, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki "pekerjaan rumah" dalam melaksanakan pembangunan Daerah yang merata dengan memfokuskan pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu saja menjadi suatu dorongan dalam penyusunan setiap rumusan perencanaan pembangunan agar memiliki fokus dan arah yang sama dalam menapaki koridor pembangunan baik Daerah, Provinsi Kalimantan Timur maupun nasional.

Sebagai pondasi dalam perumusan berbagai kebijakan pembangunan, maka perlu ditelaah dan dikaji terkait fenomena-fenomena yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan yang telah berlangsung sehingga dapat terlihat permasalahan yang nantinya akan diantisipasi dan diselesaikan melalui pelaksanaan pembangunan Daerah. Selain analisis dan data informasi pembangunan yang akan disajikan, evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah juga akan menjadi titik tolak dalam perencanaan pembangunan berikutnya. Oleh karena itu, gambaran umum kondisi Daerah ini akan memberikan gambaran atau potret hasil pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini, untuk selanjutnya menjadi pijakan dalam pemenuhan kebijakan yang terlihat dari isu strategis dan permasalahan pembangunan yang dirumuskan. Berikut berbagai analisis dan kajian dalam

meningkatkan kualitas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tahun 2026.

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI KUTAI KARTANEGARA

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

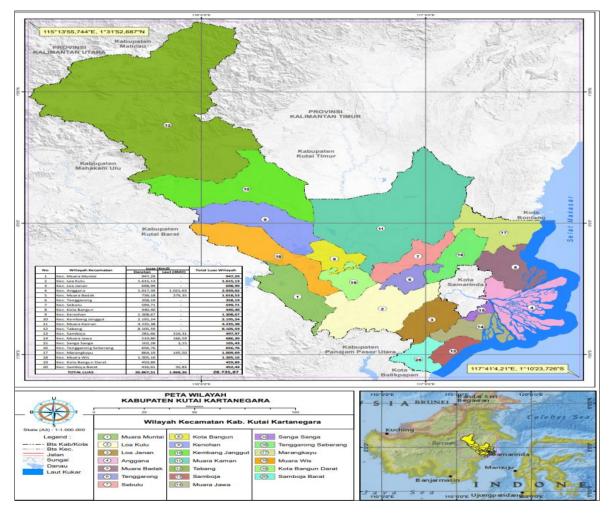
Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki karakteristik wilayah yang terbagi menjadi 3 (tiga) zona, yakni: pertama, zona hulu dengan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai dengan potensi ekonomi pertanian, perkebunan dan perikanan tangkap dan budidaya perairan sungai, yang terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, yakni Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Wis dan Kota Bangun Darat. Kedua, zona tengah dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai, potensi ekonomi didominasi pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni, Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan Loa Janan. Ketiga, zona pesisir dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan laut dan muara, potensi wilayah didominasi oleh pertanian dan perikanan, terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, yakni Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Jawa, Samboja dan Samboja Barat.

a. Letak, Batas, dan Luas Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah daratan 26.867,51 km² (dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma lima puluh satu kilo meter persegi) dan laut 1.868,51 km² (seribu delapan ratus enam puluh delapan koma lima puluh satu kilometer persegi), terletak antara 115°26′ Bujur Timur dan 117°36′ Bujur Timur serta diantara 1°28′ Lintang Utara dan 1°08′ Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 20 (dua puluh) kecamatan. Kedua puluh kecamatan tersebut adalah Samboja, Samboja Barat, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Tenggarong, Sebulu, Tenggarong Seberang, Anggana, Muara Badak, Marang Kayu, Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang.

Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai belasan sungai yang tersebar pada hampir semua kecamatan dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam dengan panjang sekitar 920 km (sembilan ratus dua puluh kilometer). Kutai Kartanegara merupakan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di sebelah utara, Selat Makasar sebelah timur, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan di sebelah selatan, dan dengan Kabupaten Kutai Barat di sebelah barat.

Daratan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari gugusan gunung dan pegunungan yang terdapat hampir di seluruh Kecamatan, yaitu ada sekitar 10 (sepuluh) gunung. Gunung yang paling tinggi di Kutai Kartanegara adalah Gunung Lengkup dengan ketinggian 485 m (empat ratus delapan puluh lima meter) yang terletak di Kecamatan Loa Kulu. Danau di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 16 (enam belas) buah dengan danau yang paling luas Danau Semayang sekitar 13.000 ha (tiga belas ribu hektar).



Gambar II-1 Peta Kabupaten Kutai Kartanegara

Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka

Tabel II - 1 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan

No	Vacamatan	Ibulanta Vacamatan	Total Luas Wilayah					
NO	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	(Km2)					
1	Samboja	Kampung Lama	284.93					
2	Samboja Barat	Tani Bakti	416.46					
3	Muara Jawa	Muara Jawa Ulu	615.76					
4	Sanga Sanga	Sanga Sanga Dalam	105.38					
5	Loa Janan	Loa Janan Ulu	699.04					
6	Loa Kulu	Loh Sumber	1614.96					
7	Muara Muntai	Muara Muntai Ilir	946.43					
8	Muara Wis	Muara Wis	1315.78					
9	Kota Bangun	Kota Bangun Ulu	440.35					
10	Kota Bangun Darat	Kedang Ipil	459.90					
11	Tenggarong	Melayu	358.34					
12	Sebulu	Sebulu Ilir	599.70					
13	Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	656.76					
14	Anggana	Sungai Meriam	1882.21					
15	Muara Badak	Muara Badak Ulu	783.18					
16	Marangkayu	Sebuntal	866.07					
17	Muara Kaman	Muara Kaman Ulu	4,235.47					
18	Kenohan	Kahala	1,308.47					
19	Kembang Janggut	Kembang Janggut	2195.25					
20	Tabang	Sidomulyo	8106.71					
	Total	1	27,891.13					
Symbon - Vystoi Vontanagana Dalam Anglea 2005								

Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2025

b. Topografi

Topografi wilayah sebagian besar bergelombang dan berbukit dengan kemiringan landai sampai curam. Daerah dengan kemiringan datar sampai landai terdapat di beberapa bagian, yaitu wilayah pantai dan daerah aliran sungai Mahakam. Pada wilayah pedalaman dan perbatasan pada umumnya merupakan kawasan pegunungan dengan ketinggian antara 500 m (lima ratus meter) hingga 2.000 m (dua ribu meter) di atas permukaan laut.

Geologi c.

Sesuai dengan kondisi iklim di Kabupaten Kutai Kartanegara yang tergolong dalam tipe iklim tropika humida, maka jenis-jenis tanah yang terdapat di daerah ini pada umumnya tergolong kedalam tanah yang bereaksi

asam. Pada dasarnya jenis-jenis tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari: podsolik (ultisol), aluvial (entisol), gleisol (entisol), organosol (histosol), lithosol (entisol), latosol (ultisol), andosol (inceptisol), regosol (entisol), renzina (mollisol) dan mediteran (inceptisol).

Hampir seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh kompleks podsolik merah kuning, dan organosol glei humus. Organosol glei humus terdapat di daerah cekungan di sekitar Sungai Mahakam yang tergenang air, yaitu terdapat di Kecamatan Muara Muntai, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong dan Loa Kulu. Tanah podsolik merah kuning di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 8.618,63 Km2 (delapan ribu enam ratus delapan belas koma enam puluh tiga kilometer persegi) atau 27,72% (dua puluh tujuh koma tujuh puluh dua persen) dari luas wilayah. Podsolik merah kuning terbentuk dari batuan beku dan endapan pada daerah bukit dengan pegunungan lipatan.

d. Hidrologi

Potensi hidrologi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat besar terutama oleh adanya aliran sungai utama (Sungai Mahakam) beserta anakanak sungainya. Aliran Sungai Mahakam yang lebar dan tenang memberikan pengaruh yang sangat besar terutama bagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

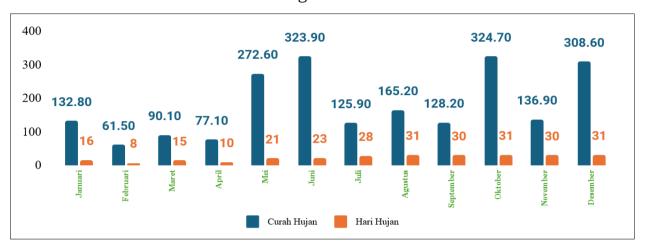
Besarnya potensi air sungai yang mengalir sepanjang sungai dan anak Sungai Mahakam ini dapat diakibatkan oleh penggunaan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan kawasan hutan, sehingga sangat berpotensi untuk daya resap air (infiltrasi) di wilayah ini dan selanjutnya menghasilkan volume/debit air yang sangat besar di daerah hulu. Bagi kepentingan sosial ekonomi masyarakat sungai/anak Sungai Mahakam hingga saat ini dimanfaatkan sebagai air baku bagi penyediaan air minum penduduk di sepanjang wilayah yang dilaluinya, sedangkan lebar dan dalamnya sungai dijadikan sarana esensial bagi kegiatan transportasi air sebagai transportasi lokal maupun antar wilayah (transportasi regional).

e. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara beriklim tropis yang memiliki dua musim yakni musim penghujan dan musim kemarau, yang terlihat dari curah hujan yang tidak merata setiap tahun, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu 324,7 mm (tiga ratus dua puluh empat koma tujuh milimeter) dengan jumlah hari hujan 31 (tiga puluh satu) hari. Sedangkan hari hujan tertinggi di Kutai Kartanegara berada di bulan Agustus, Oktober

dan Desember dengan jumlah 31 (tiga puluh satu) hari hujan.

Gambar II - 2 Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

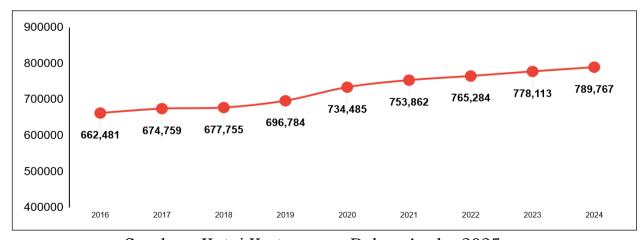


Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2025

f. Demografi

Penduduk merupakan titik sentral dalam proses pembangunan Daerah, terutama terhadap pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Penduduk merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan, sehingga proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh kapasitas penduduk yang bermukim di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah, pertumbuhan dan pola sebaran penduduk menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan pembangunan Daerah. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2024 (Semester II) sejumlah 789.767 (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) jiwa, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,50 % (satu koma lima puluh persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar II - 3 Jumlah Penduduk (Jiwa) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2024



Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka 2025

Jika dilihat dari sebaran penduduk, maka cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan dengan tingkat distribusi terbesar pada kecamatan Tenggarong sebesar 14,30 % (empat belas koma tiga puluh persen), Loa Janan 9,36 % (sembilan koma tiga puluh enam persen) dan Tenggarong Seberang 9,11 % (sembilan koma sebelas persen) sedangkan distribusi penduduk yang paling kecil berada di Kecamatan Muara Wis sebesar 1,26 % (satu koma dua puluh enam persen). Kepadatan penduduk di Kutai Kartanegara mencapai 28,32 (dua puluh delapan koma tiga puluh dua) jiwa per km2 (kilometer persegi). Jika dilihat kepadatan penduduk menurut kecamatannya, tertinggi di Kecamatan Tenggarong sebesar 315,17 (tiga ratus lima belas koma tujuh belas) jiwa per km2 (kilometer persegi), diikuti Kecamatan Loa janan 110,48 (seratus sepuluh koma empat puluh delapa) jiwa per km2 (kilometer persegi) dan Kecamatan Tenggarong Seberang sebesar 109,54 (seratus sembilan koma lima puluh empat) jiwa per km2 (kilometer persegi). Sedangkan terendah di kecamatan Tabang dengan kepadatan penduduk sebesar 1,52 (satu koma lima puluh dua) jiwa per km2 (kilometer persegi). Adapun rasio jenis kelamin di Kutai Kartanegara sebesar 107,90 (seratus tujuh koma sembilan puluh empat) yang mengindikasikan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan (di antara 100 penduduk perempuan terdapat 107,90 (seratus tujuh koma sembilan puluh) penduduk laki-laki).

Tabel II - 2 Jumlah Penduduk dan Distribusi Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

No	Nama Kecamatan	Jui	mlah Pendudu	Distribusi Penduduk		
NO		Laki - Laki	Perempuan	L + P	(%)	
1	Samboja	-	-	42.253	5,35	
2	Samboja Barat	-	-	31.165	3,95	
3	Muara Jawa	-	-	45.850	5,81	
4	Sanga Sanga	-	-	21.033	2,66	
5	Loa Janan	-	-	73.917	9,36	
6	Loa Kulu	-	-	58.169	7,37	
7	Muara Muntai	-	-	20.668	2,62	
8	Muara Wis	-	-	9.938	1,26	
9	Kota Bangun	-	-	25.368	3,21	
10	Kota Bangun Darat	-	-	14.374	1,82	
11	Tenggarong	-	-	112.937	14,3	
12	Sebulu	-	-	43.663	5,53	
13	Tenggarong Seberang	-	-	71.942	9,11	
14	Anggana	-	-	34.369	4,35	

No	Nama Kecamatan	Jui	mlah Pendudu	Distribusi Penduduk		
110		Laki - Laki	Perempuan	L + P	(%)	
15	Muara Badak	-	-	50.582	6,40	
16	Marangkayu	-	-	28.841	3,65	
17	Muara Kaman	-	-	52.606	6,66	
18	Kenohan	-	-	12.579	1,59	
19	Kembang Janggut	-	-	27.153	3,44	
20	Tabang	-	-	12.360	1,57	
JUMLAH		-	-	789.767	100,00	

Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka 2025

Jika dibandingkan dengan daerah kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Timur, jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi yang terbesar kedua setelah Kota Samarinda. Sehubungan dengan hal tersebut, tantangan lima tahun ke depan lebih ditekankan kepada penyediaan fasilitas publik, penguatan solidaritas dan ketahanan sosial, dan peningkatan keterampilan dan keahlian menghadapi persaingan penduduk dari luar dalam membangun Ibu Kota Negara.

g. Wilayah Rawan Bencana

Pembangunan terus berkembang seiring kebutuhan dari waktu ke waktu, juga dapat memberikan dampak negatif jika tidak mendapat pengelolaan yang baik. Salah satunya adalah kerusakan pada alam yang dapat meningkatkan ancaman terhadap adanya bencana. Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu wilayah yang sedang berkembang jika dilihat dari faktor alamnya, juga memiliki potensi terhadap ancaman bencana.

Berdasarkan hasil indeks pada data BNPB mengenai Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024, Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk dalam kerawanan bencana kategori Sedang dengan skor kerawanan adalah 118,80 (seratus delapab belas koma delapan puluh) dengan peringkat 314 (tiga ratus empat belas) nasional. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara juga telah mengidentifikasi beberapa jenis ancaman bencana yang terdiri atas 12 (dua belas ancaman) ancaman bencana. Adapun jenis bencana yang telah diidentifikasi di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk bencana alam adalah bencana banjir dan banjir bandang, cuaca ekstrim, epidemi dan wabah penyakit, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, multi bahaya, kekeringan, konflik sosial, kebakaran hutan dan lahan. Adapun kelas risiko bencana terdiri dari kategori rendah, sedang dan tinggi. Untuk kategori tinggi tersebar di 9 (sembilan) kecamatan dan 17 (tujuh

belas) Desa dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel II - 2 Tabel Kajian Risiko Bencana Kelas Risiko Tinggi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025

No	Kecamatan	Desa	Jenis Bahaya	Kelas Risiko		
1	Anggana	Sungai Mariam	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi		
2	Kembang Janggut	Genting Tanah	Banjir Bandang	Tinggi		
3	Kenohan	Teluk Muda	Banjir Bandang	Tinggi		
4	Kota Bangun	Muhuran	Banjir Bandang	Tinggi		
5	Kota Bangun	Sebelimbingan	Banjir Bandang	Tinggi		
		Loa Kulu Kota	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi		
6	Loa Kulu	Rempanga	Rempanga Kebakaran Hutan dan Lahan			
		Sepakat	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi		
7	Samboja	Argosari	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi		
	Tenggarong	Loa Tebu	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi		
8	renggarong	Maluhu	Konflik Sosial	Tinggi		
		Bukit Raya	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi		
		Karang Tunggal	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi		
9	Tenggarong	Loa Lepu	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi		
	Seberang	Loa Pari Kebakaran Hutan dan Lal		Tinggi		
		Loa Raya	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi		
		Teluk Dalam	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi		

Sumber: BPBD Kutai Kartanegara, 2021

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat akan menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial. Pada aspek ini akan terlihat sebuah "potret kehidupan" masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara serta analisis dan kajian singkat terkait kehidupan sosial ekonomi secara umum yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi maupun kesejahteraan sosial.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,

memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Daerah.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini masih sangat bergantung pada sektor pertambangan yang mayoritas diekspor ke pasar global. Hal ini menyebabkan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum dipengaruhi oleh perekonomian global. Secara umum, perekonomian Kutai Kartanegara yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar konstan pada tahun 2019 sebesar Rp126.272.372,44 (seratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua koma empat puluh empat Rupiah), mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Namun dikarenakan pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak signifikan pada gejolak perekonomian nasional maupun internasional, maka PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 turun cukup drastis mencapai Rp. 120.952.008,58 (seratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan koma lima puluh delapan Rupiah). Hal ini tentu saja berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Kutai Kartanegara dimana pada tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -4,21 % (minus empat koma dua puluh satu persen).

Namun seiring pemulihan perekonomian nasional yang diikuti oleh berbagai upaya pemulihan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara, maka pada tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara tumbuh sebesar 3,70 % (tiga koma tujuh puluh persen, 5,13 % (lima koma tiga belas persen) dan 5,62 % (lima koma enam puluh dua persen). Performa perekonomian yang mulai menguat saat ini diharapkan menjadi pijakan bagi pencapaian stabilitas perekonomian Kutai Kartanegara pasca pandemi COVID-19.

Gambar II - 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2012-2024



Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

Berdasarkan data realisasi tahun 2024, Ada empat sektor dominan yang berpengaruh tinggi terhadap PDRB dengan migas yaitu sektor pertambangan (berperan 57,73 % (lima puluh tujuh koma tujuh puluh tiga persen) terhadap perekonomian Kutai Kartanegara); sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan (14,48 % (empat belas koma empat puluh delapan persen)); sektor konstruksi (10,03 % (sepuluh koma nol tiga persen)) dan sektor industri pengolahan (5,04 % (lima koma nol empat persen)). Sedangkan sektor-sektor yang lain secara keseluruhan berperan sebesar 12,72 % (dua belas koma tujuh puluh dua persen) terhadap perekonomian Kutai Kartanegara.

Sedangkan jika dihitung dengan mengeluarkan sektor pertambangan dan penggalian, maka pertumbuhan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara justru semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang mempunyai keterkaitan erat baik keterkaitan ke depan maupun ke belakang (forward and backward linkage). Pada tabel berikut akan ditunjukkan bagaimana pentingnya kontribusi kategori pertambangan dan penggalian dalam peningkatan perekonomian di Kutai Kartanegara.

Tabel II - 3 Distribusi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2024

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan	12,89	12.0	12 / 1	14 01	13 /0	10.72	12 12	14,48
Perikanan	12,09	12,9	15,+1	14,91	13,49	10,72	15,12	14,40
B. Pertambangan dan Penggalian	65,58	65,37	63,26	59,93	64,06	70,77	62,55	57,73
C. Industri Pengolahan	4,1	4,08	4,26	4,49	4,24	3,47	4,16	5,04
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,05	0,05	0,06	0,05	0,04	0,06	0,08

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04
F. Konstruksi	7,55	7,64	8,18	8,54	7,54	6,35	8,89	10,03
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,52	3,59	3,92	4,25	3,71	3,11	4,07	4,52
H. Transportasi dan Pergudangan	0,97	0,99	1,08	1,2	1,06	0,91	1,24	1,39
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,27	0,29	0,33	0,34	0,28	0,23	0,32	0,37
J. Informasi dan Komunikasi	0,64	0,65	0,73	0,86	0,79	0,63	0,79	0,87
K. Jasa Keuangan	0,3	0,31	0,33	0,37	0,33	0,28	0,35	0,38
L. Real Estate	0,47	0,46	0,48	0,53	0,44	0,34	0,45	0,49
M,N. Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,04
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,65	1,57	1,67	1,76	1,51	1,19	1,49	1,83
P. Jasa Pendidikan	1,12	1,14	1,22	1,36	1,19	0,92	1,17	1,32
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,61	0,66	0,76	1,04	0,99	0,77	0,98	1,08
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,22	0,23	0,26	0,28	0,25	0,21	0,27	0,32
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka 2025

Secara umum PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara menduduki peringkat pertama terhadap pembentukan PDRB Kalimantan Timur. Hal ini tentu menjadi dorongan serta tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan perekonomian dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada. Tantangan lima tahun ke depan adalah optimalisasi manfaat kegiatan ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat; memperluas akses masyarakat terhadap pengembangan Ibu Kota Negara.

b. PDRB per Kapita

Pertumbuhan PDRB per kapita selama kurun waktu 2017-2024 terus mengalami tren positif yang memberikan gambaran bahwa rata-rata Kutai Kartanegara terus meningkat. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan, mengingat jumlah penduduk yang bertambah dan pada tahun 2020 juga terjadi perlambatan ekonomi akibat gejolak perekonomian global serta tak lepas dari efek pandemi Covid-19 yang melemahkan aktivitas perekonomian Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya.

Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan PDRB per Kapita di Kabupaten Kutai Kartanegara dimana pada tahun 2020 menurun menjadi Rp204.500.000,00 (dua ratus empat juta lima ratus ribu Rupiah) per kapita. Pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan

diiringi dengan implementasi di Kabupaten Kutai Kartanegara berimbas positif bagi pembangunan ekonomi wilayah dengan meningkat pesat PDRB per kapita Kutai Kartanegara sebesar Rp322.080.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta delapan puluh ribu Rupiah) per kapita pada tahun 2022 serta angka ini menjadi capaian tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan, yaitu PDRB per Kapita Kutai Kartanegara sebesar Rp259.190.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah).

Gambar II - 5 PDRB per Kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2024



Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka 2025

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia

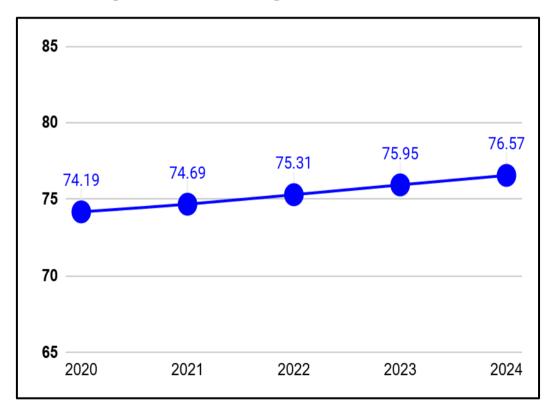
Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) dan horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah sendiri akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketerampilan serta mampu mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia salah satunya dilakukan dengan menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

IPM adalah indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap paling mendasar dilihat dari kualitas fisik dan non-fisik yang meliputi indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks ekonomi. Indeks pendidikan dilihat dari rata-rata lama sekolah (RLS) dan

harapan lama sekolah (HLS), indeks kesehatan dilihat dari angka harapan hidup (AHH), dan indeks ekonomi dilihat dari paritas daya beli atau kemampuan daya beli masyarakat.

Secara umum, perkembangan angka IPM berdasarkan hasil *long form* SP2020 di Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, IPM Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebesar 74,69 (tujuh puluh empat koma enam puluh sembilan) dan termasuk ke dalam kategori tinggi. Angka IPM 2021 ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 74,19 (tujuh puluh empat koma sembilan belas) dengan pertumbuhan sebesar 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) poin. Pada tahun berikutnya terus mengalami peningkatan IPM Kutai Kartanegara yaitu mencapai 75,31 (tujuh puluh lima koma tiga puluh satu) pada tahun 2022, pada tahun 2023 menjadi 75,95 (tujuh puluh lima koma sembilan puluh lima) dan diikuti dengan kenaikan pada tahun 2024 menjadi 76,57 (tujuh puluh enam koma lima puluh tujuh).

Gambar II - 6 Indeks Pembangunan Manusia Hasil Long Form SP2020 Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2025

Kenaikan IPM Kabupaten Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh meningkatnya seluruh indikator penyusun IPM pada tahun 2024 baik angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, maupun pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan, yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel II - 4 Indeks Pembangunan Manusia Hasil Long Form SP2020 Beserta Indikator Kompositnya Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup	73,64	73,99	74	74,12	74,33
Harapan Lama Sekolah	13,59	13,6	13,63	13,64	13,65
Rata-rata Lama Sekolah	9,22	9,23	9,24	9,26	9,27
Pengeluaran Perkapita Riil yang disesuaikan	10.720	11.048	11.677	12.323	12.957
IPM	74,19	74,69	75,31	75,95	76,57
Peringkat IPM di Kalimantan Timur	5	5	5	5	5

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2024

Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi salah satu kunci kemampuan daya saing dan kemampuan menjaga kesinambungan pembangunan. Dilihat dari pencapaian IPM, Kabupaten Kutai Kartanegara peringkat kelima yang termasuk menengah bawah dibanding kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur. Jika dilihat dari indikator kompositnya, tahun 2024 AHH sebesar 74,33 (tujuh puluh empat koma tiga puluh tiga), HLS sebesar 13,65 (tiga belas koma enam puluh lima), RLS 9,27 (sembilan koma dua puluh tujuh) dan pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan sebesar 12.957 (dua belas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh).

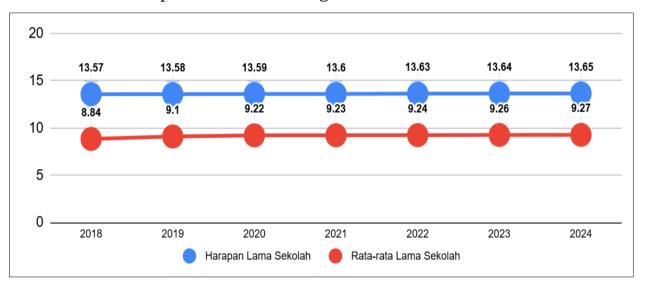
Jika melihat cukup tingginya angka IPM selama beberapa tahun terakhir, maka tantangan lima tahun ke depan Kabupaten Kartanegara adalah peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia yang unggul, profesional, terampil dan terdidik terutama yang menguasai pengetahuan dan teknologi, dan keahlian manajemen keuangan, manajemen informasi, manajemen transportasi, dan kemampuan manajerial lainnya, dan revitalisasi inovasi dan kewirausahaan di tingkat desa dan kecamatan sebagai bagian utama dari pengembangan Ibu Kota Negara. Berikut dapat dijelaskan komposit dari pembentuk IPM di Kabupaten Kutai Kartanegara:

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan potensi dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan, dengan memiliki pendidikan yang berkualitas maka setiap penduduk akan memiliki lebih banyak kesempatan dalam memperbaiki kualitas kehidupan keluarga dari mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pendapatan lebih layak, hingga kehidupan yang lebih sejahtera. Beberapa indikator kinerja pembangunan Daerah pada bidang

pendidikan pada fokus kesejahteraan sosial ini akan lebih menyoroti tentang HLS dan angka RLS. Pada tahun 2024 angka RLS Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 9,27 (sembilan koma dua puluh tujuh) tahun yang mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga 9 (sembilan) tahun atau bersekolah hingga duduk di jenjang awal sekolah menengah atas.

Gambar II - 7 Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2025

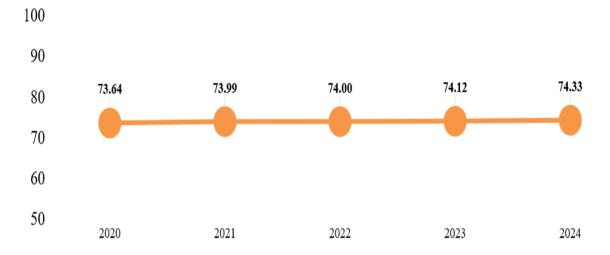
Berbeda dengan rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah lebih mengarah pada kondisi yang ingin diwujudkan dalam masyarakat mengenyam pendidikan. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). Angka harapan lama sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan secara linier dimana pada tahun 2023 mencapai titik tertinggi dengan capaian 13,65 tahun, atau dapat dikatakan mengenyam jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi.

2) Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor utama dalam meningkatkan kapasitas seseorang dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Dengan derajat kesehatan yang baik, maka masyarakat mampu bekerja dengan optimal sehingga menghasilkan output yang berkualitas. Dalam melihat derajat kesehatan masyarakat, terdapat beberapa indikator yang mampu merepresentasikannya seperti AHH. AHH merupakan indikator penyusun IPM dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut

mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

Gambar II - 8 Angka Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020 Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2025

Pada tahun 2024, AHH berdasarkan hasil *long form* SP2020 Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 74,33 (tujuh puluh empat koma tiga puluh tiga) tahun yang berarti bayi yang lahir pada tahun 2024 akan mempunyai harapan hidup hingga usia 74-75 tahun lamanya. Peningkatan angka usia harapan hidup dipengaruhi oleh berbagai faktor penentu seperti lingkungan, sarana dan prasarana umum termasuk kesehatan. AHH yang terus meningkat ini mengindikasikan tingkat kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara semakin baik dan lingkungan tempat tinggal yang semakin baik pula.

b. Kemiskinan

Mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Head Count Index (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Data persentase penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah garis kemiskinan disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel II - 5 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2018-2024

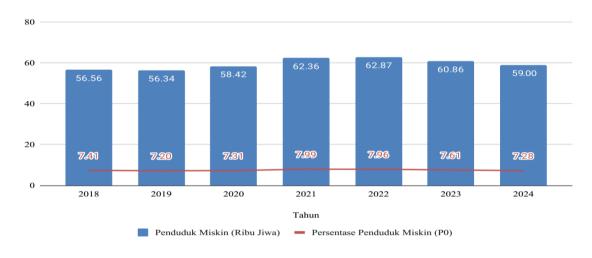
Tahun	Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Garis Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (P0)
2018	56.56	485,435	7.41
2019	56.34	503,968	7.20
2020	58.42	548,423	7.31
2021	62.36	569,640	7.99
2022	62.87	605,321	7.96
2023	60.86	644,570	7.61
2024	59.00	682,490	7.28

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara (2024)

Jumlah penduduk miskin Kutai Kartanegara periode 2018-2019 mengalami tren penurunan dengan garis kemiskinan terus meningkat, kondisi ini tentunya memberikan gambaran bahwa periode 2018-2019 kondisi kesejahteraan masyarakat pada periode tersebut mengalami perbaikan, namun pada tahun 2024, garis kemiskinan meningkat disertai dengan penurunan jumlah penduduk miskin yang mencapai 59.000 (lima puluh sembilan ribu) jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 7,28 % (tujuh koma dua puluh delapan persen).

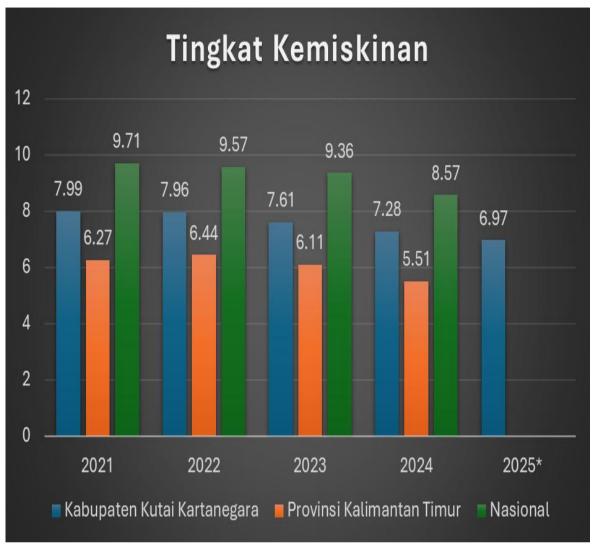
Kondisi ini memperlihatkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dimana angka kemiskinan terlihat menurun pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2020 dan 2021, kenaikan angka kemiskinan disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Namun pada tahun 2024, upaya pemulihan dampak pandemi dalam peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat dan perbaikan dan penguatan sektor perekonomian mulai tampak dan memberikan dampak dengan menurunnya angka kemiskinan menjadi 7,28 % (tujuh koma dua puluh delapan) persen.

Gambar II - 9 Tingkat Garis Kemiskinan (%) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 - 2024



Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

Gambar II - 10 Perbandingan Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2021-2024



Dari gambar di atas terlihat posisi Kabupaten Kutai Kartanegara masih lebih baik jika dibandingkan dengan nasional dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga diperlukan upaya yang sinergis untuk mengentaskan angka kemiskinan melibatkan berbagai strategi dan terpadu. Pemerintah Daerah dan berbagai program yang lembaga/stakeholders terkait berupaya untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat perlindungan sosial. Selain itu, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemerataan distribusi pendapatan juga menjadi fokus dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir dimana terjadi kenaikan hingga tahun 2019 dan mulai kembali menurun pada tahun 2020 hingga

2022. Pola meningkat terlihat sejak tahun 2018 dimana angka pengangguran meningkat menjadi 5,96 % (lima koma sembilan puluh enam persen) dan meningkat kembali sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) poin menjadi 5,98 % (lima koma sembilan puluh delapan) persen. Namun pada tahun 2022 dan 2023, terjadi penurunan angka pengangguran menjadi sebesar 4,14 % (empat koma empat belas persen) dan terakhir menurun cukup drastis mencapai 4,05 % (empat koma nol lima persen). Tahun 2024 kembali naik 4,11 % (empat koma sebelas persen).

Namun, disisi lain peningkatan jumlah penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja harus diwaspadai pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara karena hal ini bisa menjadi dua sisi mata pisau. Di satu sisi besarnya jumlah penduduk yang tergabung dalam angkatan kerja dapat menjadi modal pembangunan karena berarti masyarakat Kabupaten Kutai kartanegara sedang berada dalam usia yang sedang produktif. Peningkatan jumlah angkatan kerja (bonus demografi) bisa mendongkrak perekonomian secara cepat jika dikelola dengan tepat. Namun di sisi lain jika penduduk angkatan kerja ini tidak memiliki modal dan bekal kemampuan/keterampilan untuk masuk dalam pasar kerja maka akan menjadi beban dan masuk dalam katagori pengangguran dan tentunya menambah beban bagi Daerah.

Upaya kesiapan sumber daya manusia aparat, tenaga kerja, dan pelaku usaha merupakan salah satu prasyarat dalam optimalisasi manfaat pembangunan Ibu Kota Negara. Merujuk hal tersebut, terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk peringkat menengah dibanding kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur. Tingkat angkatan partisipasi kerja juga termasuk menengah dibanding kabupaten/kota lainnya. Oleh karena itu, potensi sumber daya manusia Kartanegara cukup tinggi dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan lima tahun ke depan adalah penyiapan tenaga kerja terampil dan terdidik terutama yang menguasai pengetahuan dan teknologi, dan keahlian manajemen keuangan, manajemen informasi, manajemen transportasi, dan kemampuan manajerial lainnya, dan revitalisasi inovasi dan kewirausahaan di tingkat desa dan kecamatan sebagai bagian utama dari pengembangan Ibu Kota Negara.

8 5.79 5.74 5.7 5.66 4.14 4.05 4.11 4 2 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Gambar II - 11 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2024

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum dibagi menjadi 2 (dua) urusan yakni urusan pelayanan wajib dan urusan pelayanan pilihan.

2.1.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan yang wajib diselenggarakan oleh setiap pemerintah daerah tak terkecuali Kabupaten Kutai Kartanegara dengan fokus utama pada penyempurnaan pelayanan dasar. Pencapaian kinerja pelayanan dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara masih perlu ditingkatkan melalui pengoptimalan aspek-aspek pelayanan kepada masyarakat yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, serta urusan pembangunan lainnya. Berikut indikator kinerja hasil pembangunan Daerah yang merupakan gambaran pelayanan urusan wajib pemerintah hingga saat ini.

a. Pendidikan

Gambaran perkembangan pelayanan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan, namun di beberapa indikator mengalami perkembangan yang baik. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan sebuah pekerjaan yang perlu mendapat perhatian bersama, berbagai persoalan telah memperburuk

kualitas pendidikan mulai dari kualitas, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana, tidak meratanya tenaga pendidik hingga perubahan kurikulum yang terkadang membuat bingung bagi sebagian pelaku pendidikan. Untuk Pemerintah itu. Kabupaten Kutai Kartanegara selalu berupaya meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan dari berbagai sisi. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik hingga menciptakan berbagai ajang kompetensi dalam upaya untuk membangun prestasi pendidikan di Kutai Kartanegara. Peningkatan kualitas pendidik adalah salah satu fokus utama salah satu program kerja dalam beberapa tahun terakhir.

Permasalahan angka putus sekolah menjadi perhatian walaupun mengalami penurunan dimana tahun 2024 untuk tingkat SD/MI sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) orang dibanding tahun sebelumnya sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) orang. Disebabkan beberapa faktor antara lain, pernikahan dini, banyaknya pendatang dari luar daerah yang menetap di Kutai Kartanegara yang memang sudah putus sekolah saat datang, serta mereka yang berhenti sekolah karena keterbatasan ekonomi. Berikut Indikator capaian layanan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel II - 6 Capaian Pelayanan Urusan Wajib Dasar Bidang Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2024

n. T	I 1'1 / D 1' 1'1		CAPAIAN KINERJA						
No	Indikator Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	PAUD	77.87	79.3	77.99	64.47	66,00	79,33		
2	APK SD/MI/Paket A	107.77	102	104,75	107,13	104,44	105,1		
3	APK SMP/MTs/paket B	101,92	96,69	105,86	105,95	101,67	105,8		
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96,98	96,72	96,41	97,27	97,12	96		
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	77,51	86,19	85,94	87,79	87,06	81		
6	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi (S1/D-IV)	82,53	83,86	85,93	86,14	98,11	95,63		
7	Rasio Ketersediaan Sekol	lah Terhad	lap Murid						
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	0,161	0,176	0,170	0,128	0,128	0,128		
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	0,193	0,240	0,206	0,126	0,126	0,126		
8	Rasio Murid Terhadap G	uru							
	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	1:16	1:16	1:16	1:16	01:16	01:16		

N.T.	T 1'1 / D 1' 1'1			CAPAIAN K	INERJA			
No	Indikator Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	1:17	1:16	1:17	1:17	01:17	01:17	
9	Angka Putus Sekolah							
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	65	194	248	479	176	277	
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	68	145	26	154	41	257	
10	Angka Kelulusan (%)							
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100	
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	98,73	99,56	99,45	99,65	99,70	99,70	

b. Kesehatan

Perkembangan penyelenggaraan urusan wajib kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat dari progres pencapaian indikator kinerja kunci yang diasumsikan sebagai representasi tingkat pelayanan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara umum pelayanan di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup baik, namun di beberapa indikator mengalami penurunan seperti cakupan kunjungan bayi dan pertolongan persalinan terhadap tenaga kesehatan, kondisi ini menjadi salah satu perhatian serius dalam upaya menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut perkembangan gambaran layanan kesehatan tahun 2019-2023.

Tabel II - 7 Capaian Pelayanan Umum Bidang Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2023

No	Indikator Pelayanan Umum Bidang Kesehatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Posyandu Per 100 Balita	1,00	1,00	1,4	1,3	1,29	1,4
2	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk	92,0	-	2,89	27,3	41,8	0,33
3	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,0038	0,004	0,0038	0,0039	0,38	0,37
4	Rasio Tenaga Medis/Keperawatan Per 100.000 Penduduk						
	Dokter Spesialis	9	5	6	8.8	8,9	11,2
	Dokter Umum	25,2	9	12	26.5	24,3	39,95
	Bidan	85,7	82	92,3	84.9	88,7	119,7
	Perawat	140,1	82	92,3	157.1	121,3	202,9
5	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	117	142	125		98,42%	100%
	Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan	2.891	1.233	1.358	3.140	2.744	3.626
	Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan	2.891	3.444	2.437	3.140	2.744	3.626

No	Indikator Pelayanan Umum Bidang Kesehatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan	97,00	108	96	94,5	96,55	89,4
	Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan	2.891	12.576	12.317	12.385	12.360	11.541
	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	14.456	12.576	12.317	13.101	12.801	12.913
7	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization	80,2	72,6	64,6	74	67,1	24,1
	Jumlah Desa/ Kelurahan UCI	195	172	153	176	159	57
	Jumlah seluruh Desa/ Kelurahan	237	237	237	237	237	237
8	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100	100
	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan	69	76	22	47	82	340
	Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan	69	76	22	47	82	340
9	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB BTA Positif (%)	94,90	92,8	87,3	94,8		96,16
	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati	1,221	935	550	589		1.003
	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	n.a	n.a	n.a	1.076		1.043
10	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	1075	307	186	843	1.555	2.802
	Jumlah Penderita DBD yang ditemukan	1075	307	186	843	1.555	2.802
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)	100	100	100	100	100	100
12	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	109,7	104,1	76,9	93,7	98,1	90,82
	Jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan	13.737	10.483	9.341	11.686	12.224	11.169
13	Jumlah seluruh bayi lahir hidup	13.470	12.862	12.526	12.825	12.458	12.298

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

c.1. Panjang dan Kondisi Jalan Daerah

Panjang jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan atas status jalan terbagi atas; jalan negara; jalan provinsi; dan jalan kabupaten, panjang jalan kabupaten sampai tahun 2020 mencapai 2.193,02 km (dua ribu seratus sembilan puluh tiga koma dua kilometer), Jalan Provinsi Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 622 Tahun 2018 tentang Jalan Provinsi, yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah

sepanjang 246,19 km (dua ratus empat puluh enam kilometer), dan Jalan Nasional Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 290 Tahun 2015 tentang Jalan Nasional, yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sepanjang 335,95 km (tiga ratus tiga puluh lima koma sembilan puluh lima kilometer).

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir sejak 2022 proporsi tingkat kemantapan jalan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 61,49 % (enam puluh satu koma empat puluh sembilan persen) dengan panjang jalan dalam kondisi mantap 829 km (delapan ratus dua puluh sembilan kilometer) dan meningkat pada tahun 2023 sebesar 65,50 % (enam puluh lima koma lima puluh persen) dengan panjang jalan dalam kondisi mantap 1.436 km (seribu empat ratus tiga puluh enam kilometer), tahun 2024 tingkat kemantapan jalan turun menjadi 63,20 % (enam puluh tiga koma dua puluh persen) atau sekitar 1.387 km (seribu tiga ratus delapan puluh tujuh kilometer). Kondisi ini menjadi gambaran pelayanan infrastruktur dasar terkait konektivitas di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel II - 9 Kondisi jalan dalam kondisi mantap Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 - 2024

	Uraian		Capaian					
No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Jalan	2010	2015	2020	2021	2022	2020	2024
	Tingkat							
	Kemantapan							
1	Jalan	66,85	69,87	63,39	57,52	61,49	65.50	63,20
	Kabupaten/							
	Kota (%)							
	Jumlah							
	Panjang Jalan							
	Kewenangan							
2	Kab/Kota	1.465,94	1.532,25	1.390,34	1.261,44	1.348,54	2.193	2.196,94
	Dalam							
	Kondisi							
	Mantap (km)							

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara, 2025

c.2. Indeks Kesulitas Geografis

Kabupaten Kutai Kartanegara seperti yang telah diuraikan di atas merupakan Kabupaten yang memiliki keragaman karakteristik geografis. Wilayah Kabupaten yang luas menjadi tantangan besar untuk memeratakan kegiatan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terutama di daerah pedesaan. Karakteristik geografis yang beragam membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaan pembangunan. Pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar berlokasi di zona perkotaan yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi.

Kondisi tersebut menyebabkan sarana dan infrastruktur yang diukur dari ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan aksesibilitas/transportasi di hampir sebagian desa lebih banyak tertinggal dibandingkan di wilayah perkotaan. Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu kunci utama pembangunan wilayah. Infrastruktur menjadi media kegiatan berbagai sektor di suatu wilayah. Ketersediaan infrastruktur akan memperlancar aksesibilitas, arus produksi dan kegiatan lainnya.

Untuk menggambarkan tingkat kesulitan geografis yang dialami masyarakat desa dalam mengakses layanan dasar dapat dilihat melalui Indeks Kesulitan Geografis (IKG). Semakin tinggi nilai IKG, maka semakin tinggi pula tingkat kesulitan geografisnya. Tingkat IKG Kutai Kartanegara disajikan seperti gambar berikut:

39.25 39.24 37.80 37.80 2018 2019 2020 2021

Gambar II - 12 Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2021

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara, 2022

c.2. Kondisi Irigasi

Irigasi menjadi bagian penting dari proses pembangunan sektor pertanian. Luas irigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2024 dalam kondisi baik mencapai 70,11 % (tujuh puluh koma sebelas persen) dengan total luas wilayah irigasi sebesar 13.429,43 ha (tiga belas ribu empat ratus dua puluh sembilan hektar). Semakin membaiknya luasan daerah irigasi dalam kondisi baik dari tahun sebelumnya disebabkan sebagai berikut:

- a) Berkurangnya alih fungsi lahan yang tidak terkendali (perkebunan sawit, pembukaaan tambang baatu bara ilegal, perumahan warga);
- Beberapa daerah irigasi Kabupaten Kutai Kartanegara di ambil alih oleh Provinsi sehingga luas kewenangan irigasi kabupaten menjadi berkurang;
- c) Hasil survey kondisi daerah irigasi dengan memakai aplikasi E-Paksi (survey data E-paksi baru sekitar 68 (enam puluh delapan) daerah irigasi dari 126 (seratus dua puluh enam) daerah irigasi kewenangan kabupaten) yang baru didata 8.606,88 ha (delapan ribu enam ratus enam ribu koma delapan puluh depalan hektar) dari 13.429,43 ha (tiga belas ribu empat ratus dua puluh sembilan ribu koma empat puluh tiga hektar). Sehingga jika didasarkan atas data yang tersedia bahwa luas irigasi dalam kondisi baik sebesar 70,11 % (tujuh puluh koma sebelas persen).
- d) Masih adanya beberapa jaringan irigasi yang mengalami kondisi rusak sedang dan ringan yang belum tertangani karena terbatasnya anggaran.

Tabel II - 10 Kondisi Irigasi Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2020-2024

URAIAN INDIKATOR IRIGASI	2020	2021	2022	2023	2024
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (ha)	17.925.92	18,098.92	6,409.35	8.606,88	9.415,37
Luas irigasi kabupaten (ha)	23.154,13	23.154,12	13.891,64	13.429,43	13.429,43
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (persen)	77,42	78,17	46,06	64,09	70,11

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara, 2025

c.3. Penataan Ruang

Perhitungan ruang terbuka hijau di Kabupaten Kutai Kartanegara, dihitung berdasarkan atas luasan wilayah daratan yakni sebesar 27.263,10 km² (dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga ribu koma sepuluh kilometer persegi). Pada rasio luas ruang terbuka hijau pada tahun 2022 per satuan luas wilayah ber HPL/HGB sebesar 18,03 (delapan belas koma tiga). Sedangkan indikator luasan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan pada tahun 2022 sebesar 65,81 % (enam puluh lima koma delapan puluh satu) persen.

Tabel II - 11 Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2019-2024

No	Bidang Urusan / Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	17,63	18,03	18,03	18,03	Kewenangan Dinas	Kewenangan Dinas
2.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	64 35	65,81	65,81	65,81	65,81	65,81

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023

d. Perumahan Rakvat dan Kawasan Permukiman

Perkembangan layanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, secara umum terus mengalami perbaikan, hal menandakan kesadaran masyarakat akan lingkungan perumahan yang sehat telah mengalami peningkatan. Berikut gambaran perkembangan layanan umum perumahan Kutai Kartanegara 2019-2024.

Tabel II - 82 Kondisi Fasilitas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2019-2024

Tratar ra	110gara,		017 404	•		
Indikator Layanan Dasar Perumahan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga Pengguna Air	85,39	87,90	70.85	76,68	82,18	80,20
Bersih (%)						
Rumah Tangga Ber-Sanitasi	86,52	81,71	69.8	76,14	83,48	89,10
(%)						
Lingkungan Pemukiman	0,01	0,01	0.01	0,01	0,01	0,01
Kumuh (%)						
Rumah Layak Huni (%)	89,53	89,90	92.76	93,25	93,49	98,64
5 Rasio rumah layak huni		0,25	0.24	0,23	0,22	0,22
Cakupan ketersediaan rumah	91,03	88,84	92.76	93,25	93,49	98,64
layak huni						
Persentase lingkungan	0,0053	0,0053	0,0062	0,62	0,50	0,49
pemukiman kumuh						
Persentase luasan	19,78	21,89	50.25	47,70	45,87	77,42
permukiman kumuh di						
kawasan perkotaan						
Proporsi rumah tangga	1,24	1,24	0.81	0,81	2,68	2,68
kumuh perkotaan						
	Indikator Layanan Dasar Perumahan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%) Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%) Lingkungan Pemukiman Kumuh (%) Rumah Layak Huni (%) Rasio rumah layak huni Cakupan ketersediaan rumah layak huni Persentase lingkungan pemukiman kumuh Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Proporsi rumah tangga	Indikator Layanan Dasar Perumahan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%) Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%) Lingkungan Pemukiman 0,01 Kumuh (%) Rumah Layak Huni (%) Rumah Layak Huni (%) Rasio rumah layak huni Cakupan ketersediaan rumah layak huni Persentase lingkungan pemukiman kumuh Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan Proporsi rumah tangga 1,24	Indikator Layanan Dasar Perumahan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%) Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%) Lingkungan Pemukiman 0,01 0,01 Kumuh (%) Rumah Layak Huni (%) 89,53 89,90 Rasio rumah layak huni 0,25 0,25 Cakupan ketersediaan rumah layak huni Persentase lingkungan pemukiman kumuh Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan Proporsi rumah tangga 1,24 1,24	Indikator Layanan Dasar Perumahan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%) Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%) Lingkungan Pemukiman (%) Rumah Layak Huni (%) Rasio rumah layak huni O,25 O,25 O,24 Cakupan ketersediaan rumah layak huni Persentase lingkungan (0,0053) Persentase lingkungan (0,0053) Persentase luasan (0,0053) Persentase (0,0053)	Perumahan 2019 2020 2021 2022 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%) 85,39 87,90 70.85 76,68 Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%) 86,52 81,71 69.8 76,14 (%) Lingkungan Pemukiman Kumuh (%) 0,01 0,01 0,01 0,01 Rumah Layak Huni (%) 89,53 89,90 92.76 93,25 Rasio rumah layak huni 0,25 0,25 0.24 0,23 Cakupan ketersediaan rumah layak huni 91,03 88,84 92.76 93,25 layak huni 0,0053 0,0053 0,0062 0,62 Persentase lingkungan pemukiman kumuh 19,78 21,89 50.25 47,70 Permukiman kumuh di kawasan perkotaan 1,24 1,24 0.81 0,81	Indikator Layanan Dasar Perumahan 2019 2020 2021 2022 2023

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, 2023

Berdasarkan tabel diatas kondisi pelayanan air bersih dan sanitasi bagi rumah tangga selama kurun waktu 5 (lima tahun) tahun terakhir berfluktuatif, kondisi ini menggambarkan semakin meningkat pula kawasan perumahan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tahun 2024 rumah tangga pengguna air bersih mencapai 80,20% (delapan puluh koma dua puluh persen) dan rumah tangga bersanitasi sebesar 89,10 % (delapan puluh sembilan koma sepuluh persen) masih ada 10-11 % (sepuluh sampai dengan sebelas persen) rumah tangga yang belum menggunakan air bersih sebagai sumber air baku untuk rumah tangga dan kondisi sanitasi yang belum baik. kondisi ini menandakan bahwa salah satu masalah pokok yang dihadapi adalah kurang tersedianya sumber air bersih, belum meratanya pelayanan penyediaan air bersih terutama di pedesaan dan sumber air bersih yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal. Begitu juga dengan kondisi sanitasi, masih diperlukan peningkatan agar lingkungan rumah tangga yang bersih dan sehat dapat tercapai.

Kawasan kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kriteria kawasan kumuh ini, meliputi bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan pengamanan kebakaran. Termasuk juga pemenuhan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Kawasan kumuh di Kutai Kartanegara sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 105/SK-BUP/HK/2023 Tentang Penetapan Lokasi Rumah Kumuh dan Permukiman Kumuh Kutai Kartanegara seluas 144,63 ha (seratus empat puluh empat koma enam puluh tiga hektar). Sampai dengan tahun 2023 kawasan kumuh yang sudah tertangani seluas 77,42 % (tujuh puluh tujuh koma empat puluh dua persen). Ada 7 (tujuh) lokasi kawasan kumuh sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan Kumuh Kutai Kartanegara antara lain, Kecamatan Tenggarong, Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Muara Jawa dan Kecamatan Anggana.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan layanan urusan ketentraman dan ketertiban umum di Kutai Kartanegara merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Ketertiban umum merupakan modal utama sebagai bentuk rasa aman agar para pengusaha dan investor untuk bisa datang dan berinvestasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam rangka menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah Kutai Kartanegara selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi kenaikan signifikan pada tahun 2023 sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) sedangkan persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan selama 5 (lima) tahun sangat memuaskan dengan persentase

100 % (seratus persen). Pada tahun 2024 peratuan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakan sekitar 61,67 % (enam puluh satu koma enam puluh tujuh persen) dan gangguan ketetraman dan ketertiban umum yang diselesaikan 100 % (seratus persen). Kondisi ini memberikan gambaran bahwa kondisi ketertiban dan keamanan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat terjaga dengan baik. Berdasarkan hal tersebut untuk menjaga kondisi stabilitas keamanan tetap terjaga diperlukan kebijakan-kebijakan terkait ketentraman dan ketertiban umum terus dilakukan dalam rangka mencegah resiko kejahatan di Kutai Kartanegara. Berikut perkembangan indikator kinerja trantibun Kutai Kartanegara 2019-2023.

Tabel II - 9 Indikator Kinerja Trantibum, Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja Trantibum	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan	3,70	22,03	34,69	75	61,67

Sumber: LPPD Tahun 2025

f. Sosial

Masalah kesejahteraan sosial merupakan permasalahan yang cukup kompleks, banyak faktor yang dapat memunculkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), diantaranya adalah kemiskinan. Hal tersebut bukan sekedar disebabkan masalah keterampilan dan lapangan kerja, tetapi yang faktor utama seseorang menjadi PMKS adalah masalah sikap mental. Esensi dari permasalahan gelandangan adalah ketiadaan tempat tinggal bagi mereka yang terpaksa harus tinggal di kawasan itu sehubungan dengan pekerjaan yang harus mereka lakukan di sekitar tempat tersebut. Penanganan kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan masyarakat dan dunia usaha juga mempunyai andil dan tanggung jawab dalam penanganan PMKS.

Data yang bersumber dari Dinas Sosial bahwa pada Tahun 2024 penanganan PMKS dan penyaluran bantuan sosial kepada penerima manfaat dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan dasar terus tercapai. Walaupun demikian kedepannya Pemerintah Daerah dan Dinas Sosial tetap meningkatkan kinerjanya dengan mengurangi lebih banyak PMKS. Salah satu yang dapat dijadikan solusi dalam melakukan penanganan PMKS adalah dengan memberikan rehabilitasi sosial dengan sistem balai, rehabilitasi ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan keterampilan. Berikut perkembangan indikator kinerja urusan pelayanan dasar sosial Kutai

Kartanegara 2019-2024.

Tabel II - 10 Indikator Kinerja Urusan Pelayanan Dasar Sosial, Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Sosial	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti (Indikator SPM)	100	91,31	97,63	100	100
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	70,37	90,02	97,04	98,72	97,68

Sumber: Dinas Sosial Tahun 2025

2.1.3.2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari proses pembangunan daerah, perluasan lapangan pekerjaan dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten menjadi prasyarat utama dalam penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan. Angka pengangguran Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 sebesar 4,11 % (empat koma sebelas persen) mengalami kenaikan kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 4,04 % (empat koma nol empat persen). Dari tingkat partisipasi angkatan kerja, capaian pengangguran di Kutai Kartanegara terlihat cukup baik dan kedepannya diharapkan mampu untuk lebih meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Gambar II - 13 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kutai Kartanegara Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

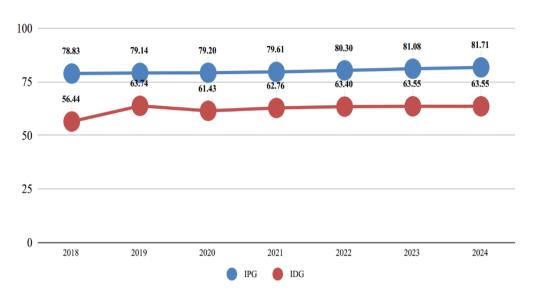
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. TPAK ini merupakan indikator yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/provinsi/kabupaten/kota. Perkembangan TPAK Kutai Kartanegara menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2023 TPAK Kutai Kartanegara sebesar 65,32 % (enam puluh lima koma tiga puluh dua persen), tahun 2024 TPAK meningkat menjadi 65,19 % (enam puluh lima koma sembilan belas persen). Jumlah pekerja rentan di Kutai Kartanegara tahun 2023 dan 2024 sebesar 35.440 (tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh) orang. Pekerja rentan adalah mereka yang berisiko tinggi mengalami kondisi kerja yang tidak aman, tidak terlindungi, atau memiliki penghasilan rendah, serta rentan terhadap dampak negatif dari perubahan ekonomi dan sosial. Kelompok ini mencakup berbagai jenis pekerja informal, seperti buruh tani, nelayan, pedagang kaki lima, tukang ojek, dan pekerja sektor informal lainnya.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan anak masih menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Pencapaian pemberdayaan perempuan ini diupayakan agar partisipasi perempuan dalam pembangunan meningkat dan mampu mengakselerasi perwujudan visi pembangunan Daerah.

Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) tahun terakhir (2018-2024) kondisi kesetaraan dan keadilan gender terus membaik walaupun pada aspek pemberdayaan gender di tahun 2021 sempat mengalami penurunan namun kembali meningkat dan terus menunjukkan tren positif, kondisi ini menggambarkan bahwa konsentrasi pembangunan manusia berbasis gender terus ditingkatkan. Tahun 2024 capaian IPG dan IDG Kutai Kartanegara 81,71 % (delapan puluh satu koma tujuh puluh satu persen) dan 63,55 % (enam puluh tiga koma lima puluh lima persen).

Gambar II - 14 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2024

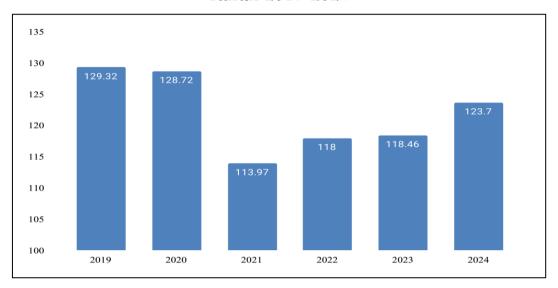


Sumber: BPS, 2025

c. Pangan

Ketersediaan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup memadai hal ini terlihat dari jumlah ketersediaan pangan setiap penduduk pertahun cukup besar, pada tahun 2019 sebesar 129,32 (seratus dua puluh sembilan koma tiga puluh dua) ton/tahun. Pada tahun 2020 menurun kembali menjadi sebesar 128,72 (seratus dua puluh delapan koma tujuh puluh dua) ton/tahun. Sedangkan tahun 2021 turun menjadi 113,97 (seratus tiga belas koma sembilan puluh tujuh) ton/tahun dan tahun 2022 meningkat kembali menjadi 118 (seratus delapan belas) ton/tahun dan tahun 2023 meningkat kembali sebesar 118,46 (seratus delapa belas koma empat puluh enam) ton/tahun. Dan tahun 2024 meningkat kembali sebesar 127,70 (seratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh) ton/tahun. Untuk skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2024 sebesar 88,46 (delapan puluh delapan koma empat puluh enam). Untuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun 2024 sebesar 87.17 (delapan puluh tujuh koma tujuh belas) dan berada diperingkat 2 (dua) setelah Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 88.11 (delapan puluh delapan koma sebelas). Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan tahun 2024 sebesar 8,06 % (delapa koma nol enam persen) merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penduduk yang secara rutin mengonsumsi makanan dengan energi di bawah kebutuhan minimum untuk hidup sehat dan aktif. Ini digunakan untuk memantau kerawanan pangan dan gizi di tingkat nasional maupun daerah. Berikut perkembangan ketersediaan pangan utama sampai dengan tahun 2019-2024.

Gambar II - 15 Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2017-2024



Sumber: Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

d. Pertanahan

Tanda kepemilikan lahan menjadi bagian penting dari tertib hak kepemilikan lahan, untuk tahun 2022 Jumlah penerima tanah Obyek *Landreform* dengan luasan yang diterima lebih besar atau sama dengan 0,5 ha (nol koma lima hektar) sebanyak 85 orang. Dalam hal penyelesaian kasus tanah negara tahun 2023 sebesar 100 % (seratus persen) dan penyelesaian izin lokasi sebesar 100 % (seratus persen).

e. Lingkungan Hidup

Pengelolaan persampahan, penanganan sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami perkembangan positif, volume sampah yang tercatat tahun 2023 sebanyak 490.378 m³ (empat ratus sembilan puluh tiga ratus tujuh puluh delapan meter kubik) telah tertangani sebesar 67,40 % (enam puluh tujuh koma empat puluh persen) penanganan sampah. Kinerja penanganan sampah ini harus menjadi perhatian serius mengingat volume sampah akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.

Tabel II - 11 Pengelolaan Persampahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2024

Tahun	Volume (ribu m³)	Persentase Penanganan
2019	255,50	81,25
2020	322,47	78,05
2021	81.243,53	79,02
2022	114.524,75	86,63
2023	117.121,18	87,74
2024	136.061,62	57,66

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan LPPD, 2024 Indikator lain yang biasa digunakan dalam rangka mengukur kondisi lingkungan Hidup yang baik adalah menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Kutai Kartanegara pada tahun 2016 sampai dengan 2019 kecenderungan meningkat walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 68,76 (enam puluh delapan koma tujuh puluh enam) dan di tahun 2022 kembali mengalami peningkatan dengan nilai indeks sebesar 71,77 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh tujuh). Meningkatnya IKLH tahun 2022 dikarenakan adanya perbaikan pada Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Air (IKA). Selain itu, adanya perubahan pembobotan dalam rumus untuk tahun 2022 juga berpengaruh dalam peningkatan IKLH. Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 72,41 (tujuh puluh dua koma empat puluh satu).

Gambar II - 16 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2018-2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

f. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Perkembangan Kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahun terus mengalami perkembangan positif, peningkatan jumlah penduduk dan proporsi kepemilikan KTP menjadi bagian penting dari komitmen pelayanan tertib administrasi kependudukan, hingga tahun 2024 mencapai 99,38 % (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh delapan persen). Perbaikan sistem pelayanan harus terus dilakukan agar seluruh warga Kutai Kartanegara dapat memiliki KTP dan akta kelahiran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel II - 16 Capaian Pelayanan Tertib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2023

Indikator Kependudukan & Catatan Sipil	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kepemilikan KTP	87.58%	97.97%	98.28%	97.62%	99.00%	99,38%
Jumlah penduduk yang memiliki KTP	427.005	484.889	502.055	532.420	541.117	556.386
Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau pernah/sudah menikah)	487.559	494.922	510.822	545.347	545.340	559.85
Kepemilikan Akta Kelahiran	93.75%	96.14%	94.80%	95.78%	99.00%	99,16%
Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran	649.522	235.683	236.652	236.769	251.830	254.269
Jumlah penduduk	692.776	734.485	753.862	765.284	788.113	806.964

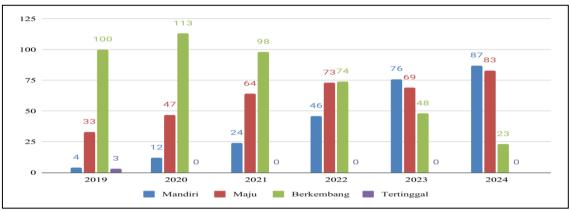
Sumber: BPS, 2016-2018, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2023

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu upaya dalam memerataan kesejahteraan masyarakat untuk menurunkan kesenjangan. Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks kesehatan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi yang disusun untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa, serta untuk menyediakan data dan informasi untuk pembangunan desa.

Berdasarkan tren perkembangan IDM di Kutai Kartanegara tahun 2019-2024, dimana dalam setiap tahunnya, perkembangan IDM terus memperlihatkan grafik yang menanjak dan kondisi ini menjadi keberhasilan bersama. Hal itu terbukti dari peningkatan status sejumlah desa di Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana sampai pada tahun 2024 sudah tidak ada lagi desa yang berstatus sangat tertinggal dan tertinggal. Capaian desa mandiri di tahun 2024 sebanyak 87 (delapan puluh tujuha) desa, Desa Maju sebanyak 83 (delapan puluh tiga) desa dan Desa Berkembang sebanyak 23 (dua puluh tiga) desa. Keberhasilan capaian peningkatan IDM ini merupakan adanya kerjasama yang baik dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan hingga tingkat desa dan tentu juga partisipasi dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Gambar II - 17 Status Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2024



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara rata-rata mencapai 1,52 % (satu koma lima puluh dua persen) per tahun. Tingginya angka pertumbuhan penduduk tersebut, salah satunya disebabkan karena tingginya angka kelahiran di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Keluarga Berencana (KB) dalam jangka panjang menjadi bagian kebijakan pemerintah dalam menekan pertumbuhan penduduk. Perkembangan program KB di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini masih dalam kategori baik, dimana tahun 2024 prevalensi peserta KB aktif mencapai 71,70 % (tujuh puluh satu koma tujuh puluh persen). Belum optimalnya capaian program KB ini disebabkan karena keterbatasan tenaga penyuluh KB di setiap desa, dimana tahun 2024 rasio petugas lapangan hanya sebesar 0,28 (nol koma dua puluh delapan), atau terdapat beberapa desa/kel yang tidak memiliki tenaga penyuluh KB. Jumlah peserta program KB aktif sebesar 82.600 (delapan puluh ribu enam ratus) peserta dan jumlah pasangan usia subur sebesar 115.210 (seratus lima belas ribu dua ratus sepuluh) pasangan.

Tabel II - 17 Tingkat Capaian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2024

Indikator Keluarga	2010	2020	0001	2022	0000	0004
Berencana	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi peserta KB aktif	76,4	76,41	79,95	79,95	74,00	71,70
Rasio petugas lapangan KB/	0,3	0,3	0,28	0,28	0,28	0,28
penyuluh KB (PLKB/PKB) di						
setiap desa						
Jumlah peserta program KB	113.022	113.560	108.614	108.614	74.505	82.600
aktif						
Jumlah pasangan usia	148.008	148.615	145.549	165.305	111.358	115.210
subur						

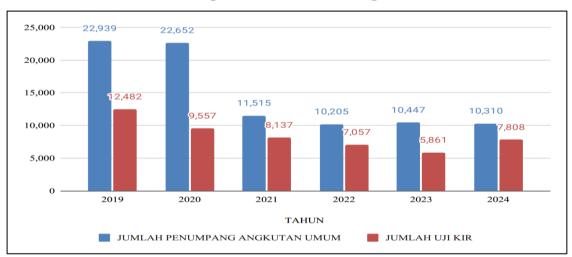
Sumber: DP2KB Kutai Kartanegara, 2025



i. Perhubungan

Aksesibilitas perhubungan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, saat ini secara umum dilalui melalui dua jalur transportasi yakni jalan darat dan perairan, dari aspek kemudahan aksesibilitas jalan darat menjadi pilihan terbaik, mengingat biaya dan waktu tempuh yang lebih singkat, dengan demikian untuk memberikan pelayanan terhadap aksesibilitas masyarakat maka keberadaan angkutan darat menjadi tolok ukur tingkat aksesibilitas masyarakat, jumlah penumpang angkutan umum Kabupaten Kutai Kartanegara hingga tahun 2023 mencapai 10.447 (sepuluh ribu empat ratus empat puluh tujuh) penumpang dengan jumlah Uji KIR Kendaraan sebesar 5.861 (lima ribu delapan ratus enam puluh satu). Untuk Kinerja lalu lintas kabupaten/kota pada tahun 2024 Kutai Kartanegara sebesar 0,50 (nol koma lima puluh) yang diukur dengan VC Ratio (Volume to Capacity Ratio). Mengukur tingkat kejenuhan lalu lintas, nilai VC Ratio > 1 menunjukkan kemacetan, sedangkan < 0,75 dianggap lancar.

Gambar II - 18 Jumlah Penumpang Angkutan Umum dan Jumlah Uji KIR Kendaraan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2024



Sumber: Dinas Perhubungan, Tahun 2025

j. Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta berkualitas dan terpercaya. Maka dari itu, diperlukan beberapa faktor agar tujuan SPBE dapat terwujud. Selain penerapan SPBE dalam aspek internal manajemen pemerintahan, pengaruh SPBE ini juga membawa dampak besar kepada masyarakat pengguna layanan.

Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik memberikan kemudahan kepada pengguna layanan. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi pada tahun 2024 meningkat sebesar 100 % (seratus persen) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 87,50 % (delapan puluh tujuh koma lima puluh persen). Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dengan informasi yang disajikan secara terbuka melalui teknologi informasi, masyarakat mudah mengetahui standar operasional prosedur, persyaratan, biaya dan jangka waktu yang dibutuhkan. Hal ini dapat mencegah terjadinya maladministrasi berupa penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, pungli dan sebagainya. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan Pemerintah Daerah pada tahun 2024 meningkat sebesar 92,21 % (sembilan puluh dua koma dua puluh satu persen) dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 68,69 % (enam puluh delapan koma enam puluh sembilan persen).

Diharapkan dengan diterapkannya transformasi digital dalam pemerintahan, mampu memberikan nilai manfaat yang optimal, baik pada bidang administrasi pemerintahan, maupun pada bidang pelayanan publik. Sehingga mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

Tabel II - 18 12 Presentase Akses terhadap Layanan Publik

INDIKATOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	100	98,28	100	100	96,61	100
Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	35,29	55,56	73,68	73,91	87,50	100
Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	67,43	99,03	71,50	70,43	68,69	92,21

Sumber: LPPD, Tahun 2024

k. Koperasi dan Usaha Miko dan Kecil (UMK)

Koperasi dan UMK merupakan penyangga perekonomian daerah yang memiliki peran strategis dalam penguatan ekonomi kerakyatan, proporsi koperasi aktif sampai dengan tahun 2024 sebesar 83,43 % (delapan puluh tiga empat puluh tiga persen) dari jumlah total koperasi sebanyak 676 (enam ratus tujuh puluh enam) koperasi. Sedangkan persentase perkembangan

usaha mikro yang naik kelas hingga tahun 2024 berjumlah 74,85 % (tujuh puluh empat koma delapan puluh persen). Kondisi ini menjadi bagian penting dalam proses penguatan ekonomi berbasis masyarakat.

Tabel II - 19 Jumlah Koperasi dan UMK Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2019-2023

INDIKATOR KOPERASI DAN UKM	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	57.935	58.225	68.413	58.720	59.120	59.304
Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	2,97%	3,23%	3,23%	73,11%	73,82%	74,85%
Jumlah Koperasi Aktif	505	514	528	273	548	564
Jumlah Seluruh Koperasi	617	626	640	542	660	676
Persentase Koperasi Aktif	81,85%	82,11%	82,50%	50,37%	83,03%	83,43%

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM dan LPPD 2024

1. Penanaman Modal

Investasi merupakan salah satu variabel pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat investasi juga menjadi salah satu ukuran tingkat daya saing daerah dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan investasi yang kondusif. Perkembangan investasi Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) cukup baik. Pada tahun 2024, PMDN di Kutai Kartanegara sebanyak 3.563 (tiga ribu lima ratus enam puluh tiga) proyek. Modal yang ditanamkan sebesar Rp8.340.000.000.000,00 (delapan ribu tiga ratus empat puluh miliar rupiah) yang terinci ke dalam sektor pertambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit, industri minyak makan nabati, tenaga listrik, dan jasa penunjang pertambangan umum. Sementara penanaman modal asing mengalami peningkatan dari 245 (dua ratus empat puluh lima) proyek pada tahun 2023 menjadi 305 (tiga ratus lima) proyek pada tahun 2024 dengan modal yang ditanamkan sebesar Rp8.060.000.000.000.000,00 (delapan enam puluh miliar rupiah).

Semakin banyak penanaman modal yang dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, akan semakin tinggi tingkat kesempatan kerja masyarakat. Berikut perkembangan investasi Kabupaten Kutai Kartanegara dan daya serap tenaga kerja hingga tahun 2023.

Tabel II - 130 Investasi dan Daya Serap Tenaga Kerja PMDN Kabupaten Kutai Kartanegara 2019-2024

Tahun	Jumlah Proyek	Modal (Rp)	Tenaga K	lerja
Tanun	Tanun Juman Proyek	wodar (Kp)	Indonesia	Asing
2019	214	5.873.632.920.000	5.289	112
2020	466	2.284.878.700.000	3.674	9
2021	545	1,930,034,800,000	1,540	2

Tahun	Jumlah Proyek	Modal (Rp)	Tenaga Kerja		
Tanun Juman Froyek		wodai (Kp)	Indonesia	Asing	
2022	537	8,432,830,800,000	7,507	11	
2023	2.073	9,440,538,200,000	5,993	10	
2024	3,563	8,346,870,226,939	5,830	3	

Sumber: Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

Tabel II - 21 Jumlah Proyek dan Investasi serta Daya Serap Tenaga Kerja PMA Kabupaten Kutai

Tahun	Jumlah Proyek Investasi (Rp.)		Tenaga I	Kerja
Tailuii	Juillan Hoyek	mvestasi (Kp.)	Indonesia	Asing
2019	116	733.477.500.000	5.766	16
2020	136	947.851.500.000	965	20
2021	145	1,913,074,860,100	982	6
2022	104	1,350,004,725,026	950	63
2023	245	5.004.650.534.555	5976	37
2024	305	8,069,017,988,494	6205	120

Sumber: Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

m. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, terus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan. Pembangunan dan pembinaan olahraga disamping optimalisasi olahraga prestasi, dilakukan juga upaya membangun budaya olahraga dalam masyarakat. Untuk meningkatkan pembinaan olahraga dimaksud masih diperlukan dukungan sarana dan prasarana olahraga, baik olahraga masyarakat maupun sarana olahraga terpadu dengan standar internasional. Sarana dan prasarana olahraga dan pemuda di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

Tabel II - 22 Fasilitas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2024

No	Fasilitas	2022	2023	2024
1	Lapangan Sepakbola	187	187	197
2	Lapangan Basket	2	2	16
3	Lapangan Volley	207	207	207
4	Lapangan Bulu Tangkis	172	172	172
5	Kolam Renang	1	1	3
6	Lapangan Tenis	5	5	5
7	Lapangan Tenis Meja	15	15	20
8	Lapangan Sepak Takraw	20	20	20
9	Lapangan Futsal	24	24	24
10	Gelanggang/Balai Remaja	187	187	187

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2025

Sebaran jumlah pemuda yang berwirausaha pada tahun 2024 di

wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah 204.088 (dua ratus empat ribu delapan puluh delapan) dengan jumlah terbesar berada di kecamatan Tenggarong berjumlah 29.815 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima belas), kecamatan Tenggarong Seberang berjumlah 18.122 (delapan belas ribu seratus dua puluh dua) dan kecamatan Loa Janan berjumlah 21.414 (dua puluh satu ribu empat ratus empat belas) sedangkan terendah di kecamatan Muara Wis berjumlah 2.488 (dua ribu empat ratus delapan puluh delapan) dan kecamatan Kenohan berjumlah 3.210 (tiga ribu dua ratus sepuluh). Untuk jumlah atlet berpestasi di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 sebanyak 8 (delapan) orang dan tahun 2024 sebanyak 865 (delapan ratus enam puluh lima) orang. Hal ini mengindikasikan program pembinaan atlet lokal sudah berjalan dengan baik dan perlu peningkatan sarana prasarana olahraga di kecamatan. Jumlah pemuda usia 16 s.d 30 (enam belas sampai dengan tiga puluh) tahun yang berwirausaha di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut:

Tabel II - 23 Jumlah pemuda usia 16 s.d 30 tahun yang berwirausaha di Kabupaten Kutai Kartanegara 2024

NO	Kecamatan	Jumlah Pemuda Usia 16 s.d 30 Tahun
1	Muara Muntai	5.211
2	Loa Kulu	14.86
3	Loa Janan	21.414
4	Anggana	9.864
5	Muara Badak	12.934
6	Tenggarong	29.815
7	Sebulu	10.987
8	Kota Bangun	6.180
9	Kenohan	3.210
10	Kembang Janggut	7.321
11	Muara Kaman	12.006
12	Tabang	3.903
13	Samboja	10.520
14	Muara Jawa	11.170
15	Sanga Sanga	5.403
16	Tenggarong Seberang	18.112
17	Marang Kayu	7.230
18	Muara Wis	2.488
19	Kota Bangun Darat	3.505
20	Samboja Barat	7.965
	TOTAL	204.088

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2025



n. Statistik

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan urusan statistik berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan, khususnya publikasi dari instansi Badan Pusat Statistik. Beberapa publikasi yang menjadi landasan dalam melihat indikator pembangunan daerah seperti:

- 1. Buku "Kutai Kartanegara Dalam Angka"
- 2. Buku "PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara"

Kedua dokumen di atas tersedia di Kabupaten Kutai Kartanegara dan disusun oleh Badan Pusat Statistik Kutai Kartanegara yakni Kutai Kartanegara Dalam Angka dan PDRB Kutai Kartanegara Menurut Lapangan Usaha maupun Pengeluaran. Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

Berdasarkan hasil EPSS (Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral) yang dilakukan oleh BPS nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 adalah 2,31 (dua koma tiga puluh satu) dengan predikat Cukup. Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan dan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, serta implementasi Satu Data Indonesia (SDI).

o. Kebudayaan

Kebudayaan menjadi bagian penting dalam proses pembangunan daerah, khususnya dalam rangka mengedepankan kearifan lokal daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah yang memiliki catatan sejarah dan keunikan budaya saat ini menjadi ikon kekayaan budaya daerah dan nasional, sehingga upaya pelestarian dan penguatan nilai-nilai budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara terus didorong dengan meningkatkan frekuensi penyelenggaraan festival seni dan budaya, serta meningkatkan ketersediaan sarana penyelenggaraan seni dan budaya Daerah. Berikut perkembangan seni dan budaya Daerah tahun 2019 sampai dengan 2024.

Tabel II - 24 Seni dan Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara 2019-2024

Uraian Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan	78	3	2	15	23	37
Budaya (Kali)						
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Dan	2	4	4	4	20	20
Budaya (Unit)						
Jumlah Benda, Situs Dan Kawasan Cagar	37	37	37	95	12	15
Budaya Yang Dilestarikan (Unit)						

Uraian Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Total Benda, Situs Dan Kawasan Yang Dimiliki	39	39	39	39	95	95
Daerah (Unit)						

Sumber: LPPD, 2025

p. Perpustakaan

Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan menggambarkan tingginya budaya baca di Daerah. Dengan jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator kinerja pelayanan perpustakaan di Daerah. Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagai peluang untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan mutu pendidikan. Data jumlah pengunjung perpustakaan di Daerah dirinci per kunjungan setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II - 25 Perkembangan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara 2019-2024

Uraian Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Koleksi Judul Buku	31.068	25.722	26.320	22.673	22.706	44.550
Yang Tersedia Di						
Perpustakaan Daerah						
Jumlah Koleksi Jumlah Buku	66.484	95.989	530.304	47.152	47.138	242.041
Yang Tersedia Di						
Perpustakaan Daerah						
Jumlah Kunjungan Ke	363.317	13.963	4.493	12.484	15.736	16.613
Perpustakaan Selama 1 Tahun						

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2025

2.1.3.3. Urusan Pilihan

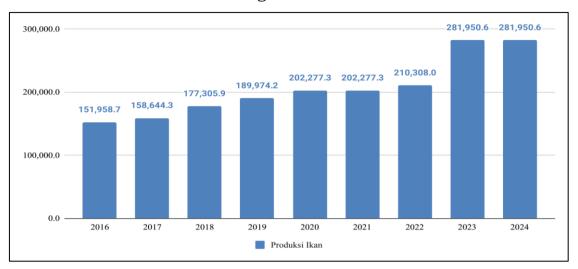
Urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut adalah urusan pilihan yang merupakan bagian dari hasil pembangunan daerah dalam berbagai bidang.

a. Kelautan dan Perikanan

Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup melimpah, yang ditunjukkan dengan tingginya produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya, hingga tahun 2024 produksi perikanan terus meningkat sebesar 281.950 (dua ratus delapan puluh satu ribu sembila ratus lima puluh) ton dibandingkan dengan produksi di tahun 2022 sebesar 209.358 (dua ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan) ton, Tahun 2023 Produksi Perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan menjadi sebesar 215.448 (dua ratus lima belas ribu

empat ratus empat puluh delapan) ton.

Gambar II - 19 Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2024



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2024

b. Pariwisata

Kabupaten Kutai Kartanegara terus mendorong sektor pariwisata menjadi trigger dalam proses transformasi struktur ekonomi dari dominasi sektor ekonomi tak terbarukan ke sektor ekonomi terbarukan. Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup memiliki potensi yang berdampak pada percepatan perekonomian daerah. Pasca pandemi COVID-19 dan perbaikan kondisi ekonomi dan kondisi sosial masyarakat, kunjungan wisatawan cenderung menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan dimana pada tahun 2024, sebanyak 1.022.905 (satu juta dua puluh dua ribu sembilan ratus lima) wisatawan yang berkunjung di 49 (empat puluh sembila) destinasi pariwisata Kutai kartanegara. Jika dibanding tahun 2023 yang hanya mencapai 883.082 (delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh dua) wisatawan.

Tabel II - 26 Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Kutai Kartanegara 2019-2024

No	Kunjungan Wisatawan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tamu Hotel	97.119	60.7	68.175	80.335	92.023	101.696
2	Bukit Bangkirai Samboja	20.522	10.671	7.234	14.963	15.234	11.679
3	BOSF Samboja	3.68	591	n.a	n.a	n.a	2.587
4	Sungai Hitam Samboja	280	216	201	n.a	n.a	579
5	Museum Mulawarman Tenggarong	46.099	20.603	14.316	48.892	59.888	59.639

No	Kunjungan Wisatawan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	d'kukarzone	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	0
7	Ladaya (Ladang Budaya)	256.923	118.297	86.66	122.168	76.534	48.714
8	Lamin Etam Ambors	106.456	28.262	41.448	101.280	100.150	33.385
9	Pulau Kumala	174.036	37.861	n.a	19.893	37.215	21.916
10	Waduk Panji Sukarame	15.951	5.118	2.295	8.492	4.419	2.397
11	Waterboom HRD 77 Muara Jawa Ilir	n.a	5.219	n.a	n.a	n.a	0
12	Pantai Tanah Merah Samboja	41.214	22.808	21.345	74.472	90.928	102.399
13	Pantai Ambalat Samboja	14.873	31.727	65.81	67.605	78.997	90.502
14	Pantai Pangempang Muara Badak	126.903	79.795	104.771	110.985	129.57	139.102
15	Pantai Sambera Muara badak	21.821	4.217	2.515	2.855	2.074	4.982
16	Pantai pemedas Samboja	61.596	31.508	n.a	20.853	n.a	n.a
17	Pantai Malabar Muara Badak	n.a	971	16.027	25.563	29.86	27.142
18	Batu Dinding Samboja	1.058	2.485	541	1.365	2.104	1.557
19	Pantai Duta Pemedas	n.a	n.a	8.874	20.853	n.a	-
20	Kaltim Park Samboja	n.a	18.703	16.612	12.786	10.845	10.15
21	Planetarium Jagad Raya Tenggarong	4.297	2.679	n.a	n.a	n.a	28.989
22	Waterboom Mahalani Muara Badak	3.382	n.a	n.a	n.a	n.a	0
23	Istana Bunga Jembayan	33.169	7.991	15.65	18.171	19.543	20.657
24	Family Waterpark Tenggarong	5.553	2.589	2.877	4.234	4.999	5.383
25	Family Waterpark Tenggarong Seberang	n.a	2.174	3.288	3.276	9.044	5.629
26	Museum Kayu	6.296	1.331	n.a	4.217	4.461	3.557
27	Situs Makam	138.639	28.118	13.941	73.053	117.716	107.749



No	Kunjungan Wisatawan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Raja-raja Kutai						
28	Makam Pangeran Notoigomo	19.496	5.567	n.a	n.a	n.a	0
29	Makam Senopati Aw.Long	1.204	388	n.a	366	476	683
30	Makam Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa Jembayan	613	223	n.a	n.a	n.a	0
31	Situs Lesung Batu Muara Kaman	3.368	787	n.a	n.a	n.a	0
32	Tugu Pembantaian Loa kulu	572	n.a	n.a	n.a	n.a	0
33	Situs Makan Raja Aji Mahkota dan Aji dilanggar Anggana	40.087	22.046	16.957	43.328	50.896	50.602
34	Situs Makam Syekh Tunggang Parangan Anggana	35.175	21.14	14.659	33.921	37.974	37.308
35	Situs Makam Pangeran Mangkunegor o Tenggarong	751	n.a	n.a	1.348	1.382	1.611
36	Situs Sanga- sanga	852	n.a	n.a	n.a	n.a	0
37	Situs Gunung Selendang Sanga-sanga	n.a	n.a	5	n.a	n.a	2.224
38	Tugu Equator Marang Kayu	807	233	n.a	167	1.269	1.078
39	Wisata Sungai Mahakam	301	26	n.a	72	15	160
40	Kembang Jaong	n.a	28.683	15.227	11.826	6.1	2.254
41	Desa Wisata Pela Kota Bangun	6.242	2.217	1.627	2.776	9.929	5.05
42	Desa Wisata Kedang Ipil Kota Bangun	6.591	19.039	2.219	5.064	2.870	4.094
43	Air Terjun Suka Lama Kota Bangun	n.a	2.254	3.994	n.a	765	859
44	Desa Wisata	35.355	51.024	43.033	33.173	n.a	24.789



No	Kunjungan Wisatawan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Kersik						
45	Desa Wisata	n.a	4.226	n.a	n.a	n 0	9.057
73	Sumber Sari	II.a	4.220	II.a	II.a	n.a	9.031
	Taman						
46	Gubang	n.a	10.336	26.763	45.765	18.516	10.858
40	Tenggarong	II.a	10.550	20.703	43.703	18.310	10.838
	Seberang						
47	Desa Budaya	75	423	n.a	no	n 0	0
77	Leqak Kidau	73	723	II.a	n.a	n.a	U
	Event						
48	Budaya/	266.91	n.a	n.a	37.564	11.879	55.568
	Festival						
49	Mice	n.a	n.a	n.a	n.a	4.933	-
Juml	ah	1.354.735	614.127	465.756	1.051.681	883.082	1.022.905

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

Kekuatan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini terbagi menjadi 3 (tiga) kategori daya tarik, yakni: daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan dan daya tarik wisata budaya dan sejarah. Kunjungan wisatawan pada tahun 2024 terbesar pada destinasi wisata buatan dan alam sebesar 55,94 % (lima puluh lima koma sembilan puluh empat persen), wisata budaya dan sejarah 28,85 % (dua puluh delapan koma delapan puluh lima persen), dan kunjungan tamu hotel dan event budaya/festival sebesar 18,21 % (delapan belas koma dua puluh satu persen). Adapun kontribusi terbesar dalam kunjungan wisatawan terdapat pada Pantai Pangempang dan Situs Makam Raja Kutai.

Pariwisata diupayakan akan menjadi penopang perekonomian Daerah pada masa yang akan datang, pendekatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menjadi salah satu bagian penting dari keberhasilan pencapaian pembangunan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Laju Pertumbuhan Ekonomi pariwisata tahun 2024 sebesar 7,85% (tujuh koma delapan puluh lima persen) meningkat dibanding pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 6,65% (enam koma enam puluh lima persen).

Diharapkan sektor pariwisata akan terus berkembang dan memberikan pengaruh yang kuat terhadap perekonomian Daerah, salah satu kekuatan pariwisata yang terus didorong adalah dengan memperkuat ekonomi kreatif daerah sebagai titik krusial dalam proses pembangunan pariwisata Daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi kreatif sebesar 7,85 % (tujuh koma delapan puluh lima persen) pada tahun 2024 meningkat dibanding pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 7,4 % (tujuh koma empat persen).

Tabel II - 27 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Kartanegara 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	7,28	- /				
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	7,41	4,44	6,23	6,96	7,4	7,70

Sumber: BPS Kutai Kartanegara, 2025 (Diolah)

c. Pertanian

Upaya pemulihan dampak Pandemi Covid-19 memiliki pengaruh yang cukup signifikan pada perekonomian sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sehingga sektor ini memiliki peningkatan pertumbuhan mencapai 2,94 % (dua koma sembilan puluh empat persen) pada tahun 2024. Berikut adalah laju pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel II - 28 Struktur Ekonomi dan Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara 2019-2024

Tahun	Struktur Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
2019	13,41	5,96
2020	14,91	0,60
2021	13,49	1,02
2022	10,72	1,91
2023	13,12	2,91
2024	14.48	2,94

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara selain kaya sumberdaya mineral (batubara dan migas), mempunyai potensi yang cukup luas untuk pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, seperti halnya komoditi; padi, palawija dan hortikultura. Luas panen pengembangan padi (padi sawah dan padi lahan kering) tahun 2023 mengalami penurunan dari 27.697 ha (dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh hektar) di tahun 2023 menjadi 26.031 ha (dua puluh enam ribu tiga puluh satu hektar) di tahun 2024, hal ini memberikan gambaran bahwa terjadi perubahan luas panen yang cukup signifikan. Jika dilihat dari sisi produktivitas masih memperoleh nilai sebesar 4,09 ton/ha (empat koma nol sembilan ton per hektar).

Tabel II - 29 Jumlah Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Beras

	Uraian Produktivitas dan Produksi Beras					
Tahun	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)			
2024	26.031	4,09	106.553			
2023	27.697	3,97	106.418			
2022	31.557	3,77	119.254			
2021	34.145	3,47	118.551			
2020	31.953	3,47	110.940			
2019	31.358	3,86	121.203			

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan dan LPPD, 2023

Selain padi, komoditi pangan lain yang dikembangkan petani yaitu jagung dan ubi kayu ; jagung dan ubi kayu secara umum mengalami penurunan produksi dan produktivitas dalam lima tahun terakhir. Produksi Komoditi jagung pada tahun 2023 sebesar 7.179 (tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan) ton dan turun menjadi 4.290 (empar ribu dua ratus sembilan puluh) ton pada tahun 2024. Namun pada produksi Komoditi ubi kayu mulai mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 18.037 (delapan belas ribu tiga puluh tujuh) ton dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 13.601 (tiga belas ribu enam ratus satu) ton. Penurunan produksi pada komoditi jagung dikarenakan berkurangnya luas panen dalam kurun waktu lima tahun terakhir dan kenaikan pada komoditi ubi kayu mulai mengalami peningkatan dikarenakan bertambahnya luas panen pada tahun 2024.

Tabel II - 30 Jumlah Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung dan Ubi Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2024

		Jagung		Ubi Kayu			
Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	
2019	3.882	23.391	6,02	807	23.269	28,83	
2020	1.745	9.297	5,33	834	22.244	26,68	
2021	1,060	5,646	5.33	797	21,257	26.69	
2022	1,634	8,889	5.44	585	13,650	23.32	
2023	1.507	7.179	4,76	441	13.601	30,87	
2024	842,15	4.290	5,09	576,6	18.037	31,28	

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan, 2025

Komoditi hortikultura khususnya bawang merah dan cabai dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara umum mengalami peningkatan produksi produktivitas. Pada komoditi bawang merah pada tahun 2019 produktivitas mencapai 4 ton/ha (empat ton per hektar) dan meningkat hingga 6,11 (enam koma sebelas) ton/ha pada tahun 2024 dengan produksi pada tahun 2019 sebesar 60 (enam puluh) ton kemudian di tahun 2024 mengalami peningkatan produksi menjadi 200 (dua ratus) ton. Sedangkan pada komoditi cabai pada tahun 2019 produktivitas mencapai sampai 6,5 ton/ha (enam koma lima ton per hektar), produksi sebesar 5.179 (lima ribu seratus tujuh puluh sembilan) ton dan luas panen 782 ha (tujuh ratus delapan puluh dua hektar). Namun mengalami penurunan produktivitas pada tahun 2024 sebesar 5,96 ton/ha (lima koma sembilan puluh enam ton per hektar) dengan produksi 3.704 (tiga ribu tujuh ratus empat) ton dan luas panen sebesar 621,71 ha (enam ratus dua puluh satu koma tujuh puluh satu hektar).

Tabel II - 31 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Bawang Merah dan Cabai Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2024

m 1	Ва	awang Merah	l	Cabai			
Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	
2019	17	60	4	782	5.179	6,50	
2020	30	146	5	450	3,926	8.7	
2021	6,99	395	5	417,16	3.793	9.09	
2022	11	82	7.46	964.45	3.169	3.29	
2023	21,75	47	2,16	441,87	3.581	8,10	
2024	32,75	200	6,11	621,72	3.704	5,96	

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan, 2025

c.1 Peternakan

Pembangunan peternakan, menjadi bagian penting dalam pencapaian pembangunan pertanian dalam arti luas, peternakan Daerah secara umum terus meningkat, seiring dengan meningkatnya konsumsi daging di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam rangka mendorong swasembada ternak, maka diperlukan upaya-upaya konkret dan terobosan yang tepat dengan berpegang pada potensi pengembangan peternakan di masingmasing kecamatan.

Pada populasi ternak secara umum mengalami penurunan dalam 5 (lima) tahun terakhir, dimana pada tahun 2019 populasi ternak sapi sebanyak 526.475 (lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima ekor), populasi kerbau sebanyak 13.529 (tiga belas ribu lima ratus dua puluh sembilan ekor), populasi ternak kambing sebanyak 22.352 (dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua ekor), ternak babi sebanyak 26.021 (dua puluh enam ribu dua puluh satu) ekor, dan unggas sebanyak 12.352.806 (dua belas juga tiga ratus lima puluh dua delapan ratus enam) ekor. Namun di 2024 populasi ternak mengalami penurunan yang cukup signifikan dimana jumlah populasi ternak sapi sebanyak 20.979 (dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) ekor, populasi kerbau sebanyak 2.117 (dua ribu seratus tujuh belas) ekor, populasi ternak kambing sebanyak 11.440 (sebelas ribu empat ratus empat puluh) ekor, ternak babi sebanyak 1.696 (seribu enam ratus sembilan puluh enam) ekor dan unggas sebanyak 462.902 (empat ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua) ekor. Berikut perkembangan produksi ternak di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel II - 32 Populasi Ternak Kabupaten Kutai Kartanegara 2019-2024

Tahun	Sapi	Kerbau	Kambing	Babi	Unggas
2019	526.475	13.529	22.352	26.021	12.352.806
2020	718.357	1.546	33.549	55.575	15.534.000
2021	30.495	2.738	12.439	4.539	15.033.168
2022	27.868	2.755	10.807	3.665	6.353.219
2023	23.672	2.689	11.702	3.199	5.459.252
2024	20,979	2,117	11,44	1,696	462,902

Sumber: BPS Kutai Kartanegara, 2024

Dari sisi produksi daging ternak, daging sapi, kerbau dan babi mengalami perkembangan cukup fluktuatif selama 5 (lima) tahun terakhir di tahun 2019 sampai tahun 2023, dimana produksi daging sapi pada tahun 2023 sebanyak 569.775 Kg (lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima Kilogram) sembilan menurun menjadi 272.160 Kg (dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus enam puluh Kilogram) pada tahun 2024, untuk daging kerbau pada tahun 2022 sebanyak 4.253 Kg (empat ribu dua ratus lima puluh tiga Kilogram) menurun menjadi 2.716 Kg (dua ribu tujuh ratus enam belas Kilogram), daging kambing pada tahun 2022 sebanyak 44.024 Kg (empat puluh empat ribu dua puluh empat Kilogram) kemudian menurun menjadi 30.798 Kg (tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan Kilogram) pada tahun 2023, untuk daging babi pada tahun 2022 sebanyak 11.474 Kg (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh empat Kilogram) meningkat menjadi 15.235 Kg (lima belas ribu dua ratus tiga puluh lima Kilogram) pada tahun 2023 dan daging unggas pada tahun 2023 sebanyak 20.894.342 Kg (dua puluh juga delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh dua Kilogram) meningkat menjadi 23.200.908 Kg (dua puluh tiga juga dua ratus ribu sembilan ratus delapan Kilogram) pada tahun 2024. Berikut perkembangan produksi daging di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019-2024.

Tabel II - 33 Produksi Daging Ternak Kabupaten Kutai Kartanegara 2019-2024 (Kg)

Tahun	Sapi	Kerbau	Kambing	Babi	Unggas
2019	27.509	2.394	3.553	3.594	14.786.963

2020	30.03	2.728	815.397	4.336	15.083.412
2021	762.425	3.866	47.118	11.668	12.582.761
2022	712.039	4.253	44.024	11.474	10.014.506
2023	569.775	2.716	30.798	15.235	20.894.342
2024	272,160	NA	NA	NA	23.200.908

Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2024

Berkenaan dengan program pengembangan peternakan berbasis *mini ranch* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesungguhnya telah menjalankan pengembangan peternakan dengan model yang serupa yaitu model padang umbaran/pengembalaan ternak sapi pada lahan yang luas. Dimana program tersebut dapat dikatakan sebagai embrio dari konsep *mini ranch* yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang tertuang dalam revisi RPJMD 2018-2023.

Dalam pelaksanaan model padang penggembalaan sapi pada lahan yang luas atau *mini ranch* sederhana/tradisional di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, sempat mengalami pasang surut di dalam pelaksanaannya. Dimana sejak tahun 2008 – 2015 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan saat itu, sebelum bergabung dengan Dinas Pertanian telah memberikan bantuan pengadaan prasarana peternakan berupa pagar, kandang, dan kalang kepada kelompok peternak sapi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hingga kini pengembangan peternakan pola padang penggembalaan sapi tersebut telah berkembang secara mandiri melalui kelompok-kelompok ternak yang banyak terfokus pada wilayah hulu yakni di Kecamatan Kembang Janggut, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai dan Kota Bangun.

Selain di wilayah hulu, juga terdapat pengembangan konsep *mini ranch* di wilayah tengah dan pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun pengembangan konsep *mini ranch* di wilayah tengah dan pesisir tersebut berada pada kawasan lahan perusahaan tambang dan sawit, sehingga pengembangannya banyak disponsori oleh perusahaan sehingga membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam memberikan kebijakan bagi peternak yang mengembangkan konsep *mini ranch* di areal lahan perusahaan, seperti pada pengembangan *mini ranch* seluas 200 ha (dua ratus hektar) di Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu pada kawasan eks tambang milik PT. Multi Harapan Utama (MHU).

c.2. Perkebunan

Potensi perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara cukup tinggi yang

didominasi oleh komoditas kelapa sawit, kelapa dalam dan karet. Sebagian besar komoditas terdapat pada perkebunan rakyat, sedangkan untuk perkebunan besar terdapat komoditas karet dan kelapa sawit. Produksi perkebunan hingga tahun 2024 mengalami perbaikan daripada tahun-tahun sebelumnya, sedangkan dari aspek penyerapan tenaga kerja, jumlah rumah tangga petani untuk perkebunan rakyat memang menurun, namun dengan bantuan teknologi informasi maka optimalisasi produksi perkebunan dapat ditingkatkan. Kondisi ini diharapkan akan terus meningkat seiring dengan penguatan subsektor perkebunan sebagai bagian dari sasaran proses transformasi struktur ekonomi daerah.

Tabel II - 34 Produksi Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2024

Komoditi Crops	Luas Areal <i>Planted</i> <i>Area</i> (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah Petani (Farmer)
Kelapa Sawit	21.788,55	107.697.218,24	6.029.184,82	9.958,00
Karet	7.912,54	7.140.586,31	1.585.000,62	4.394,00
Lada	1.868,85	223,03	149,33	1.119,00
Kelapa Dalam	1.559,97	2.639,52	2.708.26	1.980,00
Kopi	65,70	3.371,88	146.285,47	99,00
Kakao	82,65	4.893,96	152.222,71	69,00
Aren	191,05	74.026,22	596.504,59	326,00
Kemiri	n.a	n.a	n.a	n.a
Kutai Kartanegara	33.469,31	114.922,95	8.512.055,80	17.945,00

Sumber: Data input pada Aplikasi BECIK pada Dinas Perkebunan, 2024

d. Perindustrian

Sektor industri (industri pengolahan) dalam Struktur Perekonomian Kutai Kartanegara termasuk sektor yang cukup berkontribusi terhadap pembentukan nilai PDRB setelah sektor pertambangan dan penggalian, pertanian dan konstruksi. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang menjadi fokus pembangunan Daerah dalam upaya penguatan struktur ekonomi Daerah dalam konteks peningkatan nilai tambah. selama ini potensi dan sumber daya di Kabupaten Kutai Kartanegara lebih banyak di pasarkan dalam bentuk mentah, dimana proses hilirisasi dalam bentuk industri pengolahan belum berjalan dengan optimal. Potensi pengolahan hasil pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan lainnya bisa mendorong perkembangan sektor ini menjadi sektor yang lebih pesat pertumbuhan dan kontribusinya terhadap perekonomian Daerah. Secara distribusi dan pertumbuhan sektor industri pengolahan merupakan sektor potensial untuk dikembangkan dan mempunyai keunggulan komparatif. Kondisi tersebut

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II - 35 PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 – 2024

Tahun	Nilai PDRB Industri Pengolahan (juta Rupiah)	Distribusi (%)	Pertumbuhan (%)
2019	4.377.522,56	4,26	4,68
2020	4.222.773,89	4,49	(3,54)
2021	4.267.098,07	4,24	0,69
2022	4.386.595,02	3,47	2,92
2023	4.478.945,04	4,16	2,11
2024	5.310.255,74	5,04	18,56

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir nilai tambah dari sektor pengolahan trendnya terus meningkat, seiring pertumbuhannya juga yang terus meningkat, hanya pada tahun 2020 pertumbuhan disektor ini mengalami kontraksi dengan nilai pertumbuhan sampai dengan minus 3,54 % (tiga koma lima puluh empat persen) kondisi ini sama dengan perekonomian kutai kartanegara secara keseluruhan setelah dampak pandemi covid-19. Namun setelah terkena perekonomin pasca pandemi covid-19 sektor industri kembali tumbuh positif dengan capaian nilai pertumbuhan sebesar 18,56 % (delapan belas koma lima puluh enam persen) di tahun 2024.

e. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kutai Kartanegara lebih kecil dibandingkan dengan sektor industri pengolahan. Hal ini disebabkan oleh masih belum optimalnya daya saing produk dan masih terbatasnya pasar produk, karena kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk belum optimal dan belum luasnya jangkauan jaringan perdagangan (local value chain) dan belum berjalan dengan baik. Namun selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sektor perdagangan juga terus tumbuh sama seperti sektor industri pengolahan terlihat dari nilai tambah bruto serta pertumbuhan sektor ini dari tahun ke tahun. Hanya pada tahun 2020 sektor ini juga sempat melemah akibat dari efek pandemi covid-19. Namun secara kinerja sektor ini merupakan sektor yang terus memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian daerah.

Tabel II - 36 PDRB Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 – 2024

Tahun	Nilai PDRB Perdagangan	Distribusi	Pertumbuhan
2019	4.148.117,69	3,83	5,99
2020	4.219.350,75	4,25	1,72
2021	4.380.718,55	3,71	3,82

2022	4.612.649,16	3,11	5,29
2023	4.965.951,33	4,07	7,66
2024	5.443.159,23	4,52	9,61

Sumber BPS Kutai Kartanegara Tahun 2024

Dari sisi pengembangan ekonomi regional sektor perdagangan menjadi ukuran penting dalam mengukur keunggulan komparatif dan kompetitif atas komposit ekspor sebuah daerah. Indikator pengukur hal tersebut dapat dilihat dari nilai ekspor bersih yang merupakan komponen PDRB dari sisi pengeluaran. Nilai ekspor bersih Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 mencapai Rp80.581.338,30 (delapan puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma tiga puluh rupiah) sedangkan kondisi di tahun 2024 mencapai Rp4.066.732.487.248,00 (empat triliun enam puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

Tabel II - 37 Nilai Ekspor Bersih Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2019 – 2024

Tahun	Nilai Ekspor Bersih (Rp)
2019	80.581.338,30
2020	67.339.462,35
2021	88.160.590,86
2022	140.259.568,53
2023	8.844.353.000
2024	4.066.732.487.248

Sumber BPS Kutai Kartanegara Tahun 2025

f. Transmigrasi

Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan Daerah, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian, dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

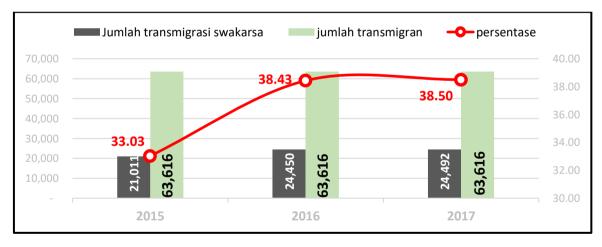
Penyelenggaraan pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi di kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instrumen pembangunan dari pinggiran berupa pembangunan dan/atau pengembangan kawasan perdesaan menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan kota-kota kecil dan menengah sebagai pusat

kegiatan perekonomian.

Setiap rencana pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi memuat rencana kegiatan bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya alam dalam satu kesatuan untuk mencapai sasaran pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi. Rencana pengembangan tersebut harus memperhatikan budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.

Transmigrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2017 berjumlah sebesar 63.616 (enam puluh tiga ribu enam ratus enam belas) orang, sedangkan untuk transmigrasi swakarsa tahun 2017 sekitar 24.400 (dua puluh empat ribu empat ratus) orang. Transmigrasi swakarsa merupakan transmigrasi yang dilakukan karena keinginan sendiri, tanpa adanya paksaan. Hal ini menggambarkan bahwa Kutai Kartanegara dianggap cukup baik dalam melakukan pelayanan bagi seluruh transmigran. Periode tahun 2018-2024 tidak ada penyelenggaraan transmigrasi di Kab. Kutai Kartanegara.

Gambar II - 20 Perkembangan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2015-2017



Sumber: LPPD, 2015-2018

2.1.4. Aspek Daya Saing

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a) Pengeluaran Komsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka Komsumsi RT Per Kapita)

Konsumsi rumah tangga per kapita adalah pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk keperluan makanan dan bukan makanan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat menggambarkan pendapatan suatu rumah tangga, sehingga dengan kata lain pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat digunakan untuk

mengetahui kesejahteraan suatu rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga di negara berkembang seperti Indonesia banyak digunakan untuk kategori makanan, berbeda dengan di negara maju yang pengeluaran untuk makanan lebih sedikit.

Pengeluaran per Kapita disesuaikan daya beli menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dimana pada tahun 2024 sebesar 12.957 (dua belas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) di bandingkan tahun sebelumnya yaitu 12.323 (dua belas ribu tiga ratus dua puluh tiga).

Tabel II - 148 Pengeluaran per Kapita disesuaikan Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2020-2024

	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan						
Kabupaten/Kota	(Ribu Rupiah/Kapita/Tahun)						
	2020	2021	2022	2023	2024		
Kutai Kartanegara	10.720	11.048	11.677	12.323	12,957		

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus kedua yang dibahas dari aspek daya saing daerah adalah fokus fasilitas wilayah/infrastruktur. Fokus ini menganalisa upaya penyedian sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah dalam rangka menarik investor usaha agar berinvestasi dan membuka usahanya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari data yang tersedia untuk menganalisa fokus fasilitas wilayah/infrastruktur diukur dari subfokus otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang di detailkan lagi pada Jenis, kelas dan jumlah kamar hotel. Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu fasilitas yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing Daerah. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah

akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan.

a. Perhubungan

1) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Status jalan yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari Jalan Kabupaten sepanjang 2.196,94 km (dua ribu seratus sembilan puluh enam koma sembilan puluh empat kilometer), Jalan Provinsi sepanjang 246,19 km (dua ratus empat puluh enam koma sembilan belas kilometer), dan Jalan Nasional sepanjang 335,95 km (tiga ratus tiga puluh lima koma sembilan puluh lima kilometer). Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin menurun, artinya bahwa dengan panjang jalan tetap, jumlah kendaraan semakin kepadatan kendaraan semakin bertambah. bertambah. kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 yaitu sebesar 1,82 % (satu koma delapann puluh dua persen), hingga rasionya menjadi sebesar 0,00382 (nol koma nol nol tiga ratus delapan puluh dua).

Tabel II - 39 Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jalan	2.196,94	2.196,94	2.196,94	2.196,94	2.196,94	2.196,94
2	Jumlah Kendaraan	582.336	513.935	522.913	713.369	586.007	575.368
3	Rasio	0,00377	0,00427	0,00420	0,00308	0,00375	0,00382

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

2) Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga

Transportasi air di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui 10 buah dermaga yang tersebar di beberapa kecamatan, mengalami perkembangan fluktuatif jumlah orang dan barang yang tiba dan berangkat melalui dermaga dengan angkutan sungai selama 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2019 terangkut sebanyak 68.848 (enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan) orang dan 85.668 (delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh delapan) barang, sedangkan tahun 2023 mengalami peningkatan jumlah orang yang terangkut sebanyak 81.812 (delapan puluh satu ribu delapan ratus dua belas) orang dan 42.581 (empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu) barang.

b. Penyediaan Air Bersih

Kebutuhan akan air bersih merupakan hal penting yang harus diperhatikan ketersediaannya, mengingat sumber air baku di Kabupaten Kutai Kartanegara bersumber dari Sungai Mahakam yang di dalamnya juga mengalir air limbah baik dari perusahaan maupun dari limbah rumah tangga. Besarnya persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih akan dapat menunjukkan gambaran tentang kondisi kesehatan suatu daerah. Sumber air bersih diantaranya adalah air dalam kemasan, air isi ulang, air ledeng, pompa, mata air terlindung dan sumur terlindung. Dengan melihat sumber air minum ini akan dapat menggambarkan tingkat kesehatan rumah tangga/masyarakat suatu daerah. Sesuai data terbaru, jumlah rumah tangga pengguna air bersih meningkat seiring dengan peningkatan jumlah total rumah tangga yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Peningkatan tersebut menyebabkan rasio rumah tangga pengguna air bersih juga mengalami peningkatan.

Tabel II - 40 Rasio Penduduk dan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	85,39	87,90	70,85	76,68	82,18	80,20
(%)						
Jumlah Total Rumah Tangga	189.995	201.174	121.932	131.966	161.911	156.924
Berakses Air Minum					ļ	
Jumlah Total Rumah Tangga	222.503	228.867	172.099	172.099	197.028	195.660
Penduduk Berakses Air Minum	486.22	508.7	525.597	546.842	647.645	782.640
Jumlah Penduduk	761.493	729.382	741.95	765.284	788.113	806.964
Rasio (%)	63,85	69,74	70,84	71,46	82,18	96.98
					[

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2023

2.1.4.3 Fokus Iklim Investasi

Fokus terakhir yang dibahas pada aspek daya saing Daerah adalah iklim investasi. Fokus iklim investasi melihat kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara apakah kondusif dalam mendukung investasi riil yang masuk ataukah tidak. Penilaian fokus investasi didukung oleh data angka kriminalitas yang dijabarkan dibawah ini. Peluang investasi di Kutai Kartanegara masih sangat terbuka, khususnya potensi investasi pangan (pertanian dalam arti luas) dan potensi investasi sektor energi (batubara dan migas). Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya minat para investor untuk menanamkan modalnya di Kutai Kartanegara.

a. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dihitung berdasarkan laporan polisi dalam periode 1 (satu) tahun. Angka kriminalitas juga dapat diartikan rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Kegiatan yang termasuk tindak kriminal adalah curanmor (pencurian kendaraan bermotor),

pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan lain sebagainya. Angka kriminalitas bermanfaat untuk menilai tingkat keamanan di Kabupaten Kutai Kartanegara, karena semakin tinggi angka kriminalitas maka Kabupaten Kutai Kartanegara semakin tidak aman, dan semakin rendah angka kriminalitas maka Kabupaten Kutai Kartanegara semakin aman. Dalam masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi rasa aman yang dimiliki masyarakat, dimana hal ini sangat diperlukan dalam menjamin iklim investasi.

Diukur dengan menggunakan pendekatan perhitungan resiko tindak kejahatan per 100.000 (seratus ribu) penduduk, yang disebut dengan Crime Rate. Tren Angka Crime Rate Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif, tahun 2022 angka crime rate sebesar 56 (lima puluh enam) per 100.000 (seratus ribu) penduduk dan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 82 (delapan puluh dua) per 100.000 (seratus ribu) penduduk. Berikut perkembangan crime rate Kutai Kartanegara 2019-2023.

Tabel II - 151 Crime Rate Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2019-2024

1450111 101 07.0700 11450	apaterr rre	tur rrur	turio Sur	a, -a	A	
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk	696.784	734.485	753.862	765.284	788.113	788.113
Jumlah Tindak Kejahatan Yang Dilaporkan (Crime Total)	619	460	n.a	430	646	646
Crime Rate/100.000 Penduduk	89	63	n.a	56	82	82

Sumber: Satpol PP 2020, Capil 2024

Kualitas Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 yang belum ditempatkan ada sebanyak 6.914 (enam ribu sembilan ratus empat belas) orang. Bila dirinci berdasarkan jenis kelamin 4.730 (empat ribu tujuh ratus tiga puluh) orang tercatat berjenis kelamin laki-laki dan 2.184 (dua ribu seratus delapan puluh empat) orang yang berjenis kelamin perempuan, jumlah ini meningkat dari tahun 2019 dimana jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebanyak 6.354 (enam ribu tiga ratus lima puluh empat) orang yang terdiri dari 4.425 (empat ribu empat ratus dua puluh lima) orang laki-laki dan 1.929 (seribu sembilan ratus dua puluh sembilan) orang perempuan. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel II - 162 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024

Pendidikan			Jumlah	Bukan	Jumlah Angkatan
Tertinggi yang	Bekerja	Pengangguran	Angkatan	Angkatan	Kerja dan Bukan
Ditamatkan			Kerja	Kerja	Angkatan Kerja
<= SD	111.441	840	112.281	72.871	185.152
SMP	59.263	1.022	60.285	63.843	124.128
SMA	151.494	12.274	163.768	65.299	229.067
Perguruan Tinggi	53.952	1.989	55.941	7.487	63.428
Jumlah	376.150	16.125	392.275	209.500	601.775

Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2025

Adapun capaian indikator kinerja daerah berdasarkan urusan sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel II - 173 Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019-2024

D.T.	BIDANG			CAPAIAN KI	NERJA		
No	URUSAN/INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ASPEK K	ESEJAHTERAAN MASYAR	AKAT			l		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,92	-4,21	2,67	3,71	5,13	5,62
2	Laju inflasi	2,21	1,33	2,61	4,17	3,37	1,50
3	PDRB ADHB	162.105,54	149.043,58	177.416,58	240.392,59	204.876,16	204.700,14
4	PDRB per kapita	206,104	185,649	241,7	254,5	270,72	259,19
5	Indeks Gini	0,278	0,294	0,283	0,269	0,284	0.307
8	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	7,2	7,31	7,99	7,96	7,61	7,28
9	Rasio kesenjangan kemiskinan (P1)	0,95	0,91	1,22	1,18	0,91	0,65
10	Jumlah penduduk miskin (000)	56,34	58,42	62,36	62,87	60,86	59,00
11	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	n.a	n.a	n.a	1,45%	n.a	n.a
12	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	n.a	74,19	74,69	75,31	75,95	76,57
	Angka Harapan Hidup	72,21	72,34	72,64	72,65	72,75	74,33
	Harapan Lama Sekolah	13,58	13,59	13,60	13,63	13,64	13,65
	Rata-rata lama sekolah	9,1	9,22	9,23	9,24	9,26	9,27
	Konsumsi per kapita yang disesuaikan (1996)	11,152	10,72	11,048	11,677	12,323	12,957
13	Angka melek huruf	99,52	99,94	99,95	98,76	98,47	98,47
14	Persentase balita gizi buruk	21,21	1,59	1,45	0,96	1,11	0,8
15	Prevalensi balita gizi kurang	7,18	5,42	6,45	6,48	6,28	6,3
16	Indeks Desa Membangun	0,641	0,684	0,713	0,747	0,779	0,797
17	Angka partisipasi angkatan kerja	54,00%	49,00%	64,46%	73,34%	65,77%	65,77%
18	Tingkat partisipasi angkatan kerja	64,36	65,74	61,98	61,95	65,32	65,19
19	Tingkat pengangguran terbuka	5,98	5,70	5,66	4,14	4,05	4,11

	BIDANG CAPAIAN KINERJA							
No	URUSAN/INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
20	Rasio penduduk yang bekerja	84,02	94,3	94,34	95,86	95,95	95,95	
21	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja	45,62	43,92	49,37	67,37	57,5	57,5	
22	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	0,000164	0,000162	0,000160	0,000160	0,000169	0,000169	
23	Tingkat kesempatan kerja	0,94	0,94	0,94	0,96	0,96	95,89	
24	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	11.793	11.793	n.a	n.a	n.a	n.a	
25	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,00	90,00	92,00	96,00	70,13	70,13	
26	Persentase PAD terhadap pendapatan	9.62%	4.21%	10.52%	7,67%	12,06%	6,20%	
27	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
28	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81,30	75,70	84,70	84,50	88,46	88,46	
29	Penguatan cadangan pangan	151,55 ton	125,00 Ton	128,00 Ton	118,00 Ton	250,00 Ton	250.000 Ton	
30	Penanganan daerah rawan pangan	1	1	5	5	44	44	
31	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku)	13,41	14,93	13,46	10,72	13,12	14,48	
32	Produksi sektor pertanian/perkebunan, kehutanan dan perikanan (Juta Rupiah) (atas dasar harga berlaku)	21.734.250,12	22.247.327,81	23.931.885,03	25.777.343,70	26.878.236,08	26.878.236,08	
33	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku)	7,31	8,13	7,56	6,11	6,11	6,11	
34	Produksi sektor perkebunan	6.275.202,90	6.322.353,20	6.391.060,25	6.579.492,51	6.579.492,51	6.579.492,51	
35	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	63,26	59,93	64,10	70,77	62,55	57,73	
36	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	7,28	-0,99	0,54	n.a		0,37	
37	Kontribusi sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	3,92	4,33	3,71	3,11	4,07	4,52	
38	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	4,26	4,49	4,24	3,48	4,16	5,04	
39	Predikat SAKIP	В	В	В	В	В	CC	
40	Nilai Lakip	64,88	65,60	66,35	67,40	67,86	65,93	
	ELAYANAN UMUM							
Layanan	Urusan Wajib Dasar							
1	Pendidikan							
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	77,87	79,30	77,99	64,47	66,00	80,7	
1.2.	Angka partisipasi kasar							



	BIDANG	CAPAIAN KINERJA							
No	URUSAN/INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.2.2001	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	107,77	102,00	104,75	107,13	104,44	105,06		
1.2.2002	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	101,92	96,69	105,86	105,95	101,67	104,74		
1.2.2003	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	84,05	85,35	84,89	89,81	91,30	91,30		
1.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan	9,11	9,22						
1.4.	Angka Partisipasi Murni				ı				
1.4.2001.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96,65	96,72	96,41	97,27	97,12	95,99		
1.4.2002.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	85,89	86,19	85,94	87,79	87,06	81		
1.4.2003.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka partisipasi	64,29	61,32	60,78	63,52	63,87	63,87		
1.5.	sekolah								
1.5.2001.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	103,00	100,99	100,10	99,83	99,95	99,78		
1.5.2002.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	107,91	100,20	100,01	98,73	99,73	99,46		
1.5.2003.	sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	82,07	81,88	82,10	81,43	81,50	81,50		
1.6.	Angka Putus Sekolah:								
1.6.2001.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	65,00	194,00	248,00	479,00	176,00	907,00		
1.6.2002.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	68,00	145,00	26,00	154,00	41,00	979,00		
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	90,00	276,00	20,00	96,00	37,00	37,00		
1.7.	Angka Kelulusan:	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
1.7.2001.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
1.7.2002.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Melanjutkan	98,73	99,56	99,45	99,65	99,70	99,80		
1.0.	(AM):								
1.8.2001.	(AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	91,02	99,05	99,38	99,48	99,48	99,48		
1.8.2002.	(AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	89,45	90,01	91,67	93,67	93,67	93,67		
1.9.	Fasilitas Pendidikan:								
1.9.2001.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	0,89	0,90	0,90	0,90	0,89	0,89		
1.9.2002.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	0,88	0,88	0,90	0,90	0,95	0,95		
1.10.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	0,16	0,18	0,17	0,13	0,15	0.15		
1.11.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	0,19	0,24	0,21	0,13	0,34	0.34		



	BIDANG			CAPAIAN KI	NERJA		
No	URUSAN/INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	pendidikan menengah						
1.12.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	1:16	1:16	1:16	1:16	1:17	1:17
1.13.	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	1:17	1:16	1:17	1:17	1:20	1:20
1.14.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	1:23	1:22	1:20	1:20	1:22	1:22
1.15.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	1:25	1:25	1:27	1:27	1:26	1:26
1.16.	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	99,12	98,42	99,83	99,88	99,90	99.90
1.17.	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 , perempuan dan laki- laki	99,93	99,94	99,95	99,96	99,97	99,97
1.18.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,93	99,94	99,95	99,96	99,97	99,97
1.19.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Kesehatan	82,53	83,86	85,93	86,14	98,11	98,11
2.1.	Angka Kematian Bayi	46	186	241	179	135	149
	(AKB) per 1000 kelahiran hidup						
2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi	13.47	12.862	12.526	12.825	12.458	11.675
2.3.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	14,60	16,30	207,00	16,10	10,80	17.10
2.4.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	121	210	169	121	7,7	10.80
2.5.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	24	30	38	24	12	13
2.6.	Rasio posyandu per satuan balita	1,0	1,0	1,4	1,3	1,3	2.7
2.7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	21.7	17.4	2.89	27.3	41.8	333
	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki sarana puskesmas	32	32	32	32	32	32
2.8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,0038	0,0041	0,0041	0,0041	0,0038	0.0037
2.9.	Rasio dokter per satuan penduduk	15.5	25.3	12	26.5	24.3	51
2.9.2001	-	9	5	6	8,8	8,9	11.17
2.9.2002		25,2	9	12	26,5	24,3	39.95
2.10.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk						
2.10.200	Bidan	85,7	82,0	92,3	84,9	88,7	119.7
2.10.200	Perawat	140,1	82	92,3	157,1	121,4	202.9
2.11.	Cakupan komplikasi kebidanan yang	117,00	142,00	125,00	114,00	98,42	134
2.12.	ditangani Cakupan pertolongan	117,00	108,00	96,00	94,50	96,55	89,40



N.	BIDANG	CAPAIAN KINERJA							
No	URUSAN/INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan								
2.13.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	97,00	108,00	64,60	74,00	67,00	57,00		
2.14.	Jumlah Balita Gizi kurang mendapat perawatan	69	76	22	47	82	340		
2.15.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	0	0	0	0	0	0		
2.16.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	93,10	99,20	117,00	83,70	81,40	67,48		
2.17.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	0,40%	1,20%	1,20%	10,00%	10,34%	9,5 %		
2.18.	Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	26,10%	15,90%	12,90%	32,60%	67,08%	54,5 %		
2.19.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	94,9	92,8	87,3	94,8	72,2	100		
2.20.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	155	102	102	164	192	143		
2.21.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	4,60%	3,50%	4,60%	5,30%	4,50%	1,3 %		
2.22.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	467	642	550	1.040	1.186	1.156		
2.23.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	90.8	63,70%	87.3	90,6	89,7	96.2		
2.24.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	1075	307	186	743	1.155	2.802		
2.25.	Penderita diare yang ditangani	51.70%	77,20%	73,7	27,8	38,8	36.2		
2.26.	Angka kejadian Malaria	111	89	41	93	66	62		
2.27.	Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	0	0	1		
2.28.	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	0	0	0	0	0	0		
2.29.	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	0	0	0	0	0	0		
2.30.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	n.a	0,82	0,81	0,87	0,78	0.35		
2.33.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat	0	0	0	0	0	0		



	BIDANG	BIDANG CAPAIAN KINERJA										
No	URUSAN/INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
	miskin											
2.34.	Cakupan kunjungan bayi	108,2	104,1	76,9	93,7	93,11	95,7					
2.35.	Cakupan puskesmas	32	32	32	32	32	32					
2.36.	Cakupan pembantu puskesmas	181	177	177	174	175	177					
2.37.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	89%	95%	84%	92%	91,4%	88,6%					
2.38.	Cakupan pelayanan nifas	62,3%	104%	93%	94,5%	96,5%	84,6%					
2.39.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	117,4	142	125,7	86,4	80,2	95					
2.40.	Cakupan pelayanan anak balita	40,98	28,29	35,95	50,92	54,54	86,35					
2.42.	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	99,8%	99,20%	100%	100%	100%	100%					
2.43.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100					
2.44.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	-	-	-	-	-	-					
2.45.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
2.46.	Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan	-	-	-	-	-	-					
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
3.1.2001.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	49,05	25,33	31,71	23,93	44,01	63,15					
3.1.2002.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,00317	0,00301	0,00296	0,00287	0,00279	0,00382					
3.1.2003.	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a					
3.1.2004.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	74,10	74,10	84,26	88,48	90,10	90,10					
3.1.2005.	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	0,62	0,65	0,65	0,65	0,66	0,66					
3.1.2006.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	86,52	81,71	69,8	76,14	88,70	89,10					
3.1.2007.	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a					
3.1.2008.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	21,01	21,5	21,47	21,44	21,76	21,76					
3.1.2009.		n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a					
3.1.10.	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a					



	BIDANG	CAPAIAN KINERJA							
No	URUSAN/INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor								
3.1.11.	Persentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	74,18	77,42	78,17	46,06	64,09	70,10		
3.1.12.	Rasio Jaringan Irigasi	0,74	0,77	0,78	0,46	0,64	0,70		
3.1.13.	Persentase penduduk berakses air minum	69,78	69,26	69,73	71,46	82,18	96,98		
3.1.14.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	85,39	87,9	70,85	76,68	82,18	82,18		
3.1.15.	Persentase areal kawasan kumuh	0,0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0053	0,0053		
3.1.16.	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a		
3.1.18.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,00247	0,00266	0,00267	0,00259	0,00274	0,00274		
3.2.	Penataan Ruang:								
3.2.2001.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	17,63	18,03	27,33	27,33	27,33	27,33		
3.2.2002.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58		
3.2.2003.		n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a		
3.2.2004.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	2,22	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65		
3.2.2005.		59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	93,48		
3.2.2006.	RTRW	75	78	80	91,32	96,99	96,59		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0.05	0.05	0.04	0.02	0.00	0.00		
4.1.	Rasio rumah layak huni Rasio permukiman	0,25	0,25	0,24	0,23	0,22	0,22		
4.2.	layak huni Cakupan ketersediaan	91,03	n.a 88,84	n.a 92,76	n.a 93,25	n.a 93,5	n.a 98,64		
4.4.	rumah layak huni Cakupan layanan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a		
	rumah layak huni yang terjangkau								
4.5. 4.6.	Persentase pemukiman yang tertata Persentase lingkungan	n.a 0,0053	n.a 0,0053	n.a 0,0062	n.a 0,62	n.a 0,50	n.a 0,49		
4.6.	pemukiman kumuh Persentase luasan	19,78	21,89	50,25	47,70	45,87	77,42		
4.1.	permukiman kumuh di kawasan perkotaan	19,78		30,23		+5,67			
4.8.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	1,24	1,24	0,81	0,81	2,68	2,68		
4.9.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a		



	BIDANG	CAPAIAN KINERJA							
No	URUSAN/INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	yang didukung dengan PSU								
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
5.1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	3,028	3,028	3,028	3,028	3,028	3,028		
5.2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5.3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5.4.	Jumlah desa yang mengalami bencana	50	44	31	24	26			
5.5.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit		
5.6.	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5.7.	Jumlah kejahatan yang dilaporkan	619	460	241	430	464	464		
5.8.	Resiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk	89	63	32	56	82	82		
5.9.	persentase penyelesaian kejahatan	97	99	99,59	97,03	93,49	93,49		
5.10.	selang waktu terjadinya kejahatan	14.6'	19.54'	n.a	n.a	n.a	n.a		
6	Sosial								
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	70,32	70,37	90,02	97,04	98,72	97,68		
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	70,32	70,37	90,02	97,04	98,72	97,68		
6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	70,32	70,37	90,02	97,04	98,72	97,68		
6.4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0	0	0	0	0	0		
6.5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	100	100	100	100	100	100		
6.6.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	0	0	0	0	0	0		
6.7.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan	100	100	100	100	100	100		



	BIDANG	CAPAIAN KINERJA							
No	URUSAN/INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	sosial selama masa tanggap darurat								
6.8.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100	100	100	100		
6.9.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100	100	100	100	100	100		
6.10.	Garis Kemiskinan	503.968	548.423	569.640	605.321	644.570	682.490		
6.11.	Jumlah anak terlantar	679	679	865	100	347	445		
6.12.	Jumlah pekerja sosial masyarakat (PSM)	216	46	29	57	30	30		
6.13.	Jumlah organisasi sosial	278	279	280	281	282	281		
Layanan	Urusan Wajib Non Dasar								
1	Tenaga Kerja								
1.1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	46	49	130	72	86	86		
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	46	49	63	24	35	42		
1.3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	3.343	578	247	335	1.333	1.333		
1.4.	Keselamatan dan perlindungan	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	1.769	1.81	1.81	98.2	99.169	110.748		
1.6.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0		
1.7.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	0	0	0	0	0	0		
1.8.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	0	0	0	0	0	0		
1.9.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	200	80	160	348	554	576		
1.10.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	138	16	0	198	540	728		
1.11.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100	28	72	198	540	728		
1.12	Rasio lulusan S1/S2/S3	21,72	19,25	15,17	14,01	15,91	15,91		
1.13	Jumlah angkatan kerja	377.924	359.866	380.889	372.271	371.349	371.349		
1.14	Upah minimum Kabupaten Kutai Kartanegara	2.930.304	3.179.673	3.317.967	3.199.654	3.394.514	3.536.506		
2	Pemberdayaan Perempuan dan								



No	BIDANG	CAPAIAN KINERJA							
No	URUSAN/INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	Perlindungan Anak								
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di parlemen	15,56	15,56	15,56	15,56	15,56	24,4		
2.2.	Indeks Pembangunan Gender	83,84	83,87	79,12	79,8	80,64	81,20		
2.3.	Indeks Pemberdayaan Gender	63,74	61,43	62,76	62,76	63,4	63,55		
2.4.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	4	7	7	7	7	11		
2.5.	Persentase perempuan sebagai tenaga profesional	49,21	n.a	43,72	43,72	50,59	0		
2.6.	Rasio KDRT	7.207	11.37	6,363	6,81	7,2	9,06		
2.7.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0	0	0	0	0	0		
2.8.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	45,73	44,10	44,97	39,04	39,04	45,20		
2.9.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100	100		
2.10.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100	100	100	100	100		
2.11.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	100	100	100	100	n.a	n.a		
2.12.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	98,35	96,95	96,83	96,85	n.a	20,30		
2.13.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	51,1	100	100	100		
2.14.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100	100		
2.15.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100	100		



	BIDANG			CAPAIAN KI	NERJA		
No	URUSAN/INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.16.	Rasio APM perempuan/laki-laki di	0,9162	0,9152	0,9177	0,9151	10,050	1,005
2.17.	Rasio APM perempuan/laki-laki di	0,9411	0,9398	0,9478	0,9365	0,8897	0,890
2.18.	SMP Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	0,8904	0,8748	0,8749	0,873	0,9622	0,9622
2.19.	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	n.a	n.a	n.a	n.a	3,86	3,86
3	Pangan						
3.1.	Ketersediaan pangan utama	129,32	128,72	113,97	118	118,46	109,29
3.2.	Ketersediaan energi dan protein per kapita	105,47	123,34	125,47	122,28	126,31	126,31
3.3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	76,25	90,77	91,21	95,35	95,35	95,35
3.4.	jumlah konsumsi kalori perkapita	1.851,00	1.983,50	1.971,00	1.933,00	1.970.000	1.970.000
4	Pertanahan						
4.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	1,2	0,57	50	60	66	67
4.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	91,89	100	100	100	100	100
4.3. 5	Penyelesaian izin lokasi Lingkungan Hidup	100	100	100	100	100	100
5.26.	Tersusunnya RPPLH	Tidak ada	ada	Tidak ada	ada	Ada	Ada
5.27.	Kabupaten/Kota Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	ada	Ada	Ada
5.28.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Tidak ada	ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada
5.29.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	84,08	52,73	52,98	53,08	50,53	52,05
5.30.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	91,68	85,94	91,69	88,78	91,53	92,73
5.31.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	62,93	64,5	70,89	71,38	74,62	74,62
5.32.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	76	80,50	54,23	60,47	60,4	60,4
5.33.	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah(PPLHD) di Kabupaten/Kota	10	10	9	9	9	9
5.34.	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada
5.35.	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada



	BIDANG	CAPAIAN KINERJA							
No	URUSAN/INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	pengetahuan tradisional								
5.36.	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada		
5.37.	Penetapan hak MHA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada		
5.38.	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada		
5.39.	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada		
5.40.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	2	2	1	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada		
5.41.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	Ada	Ada	Tidak ada	Ada	Ada		
5.42. 5.42.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.			100	Ada	Ada	Ada		
5.43.	Timbulan sampah yang ditangani (ton)	77,14	78,05	81,24	17,18	67,4	64,7		
5.44.	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	6,7	7,29	9,56	16,45	20,35	20,35		
5.45.	Persentase cakupan area pelayanan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	51,50	61,11	61,11		
5.46.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	77,15	78,05	79,02	86,63	87,67	87,67		
5.47.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Penilaian Belum Keluar Dari kementerian	Tidak ada Penilaian	Tidak ada Penilaian	86,55	87,67	87,67		
5.48.	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada		
5.49.	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang- undangan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada		
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
6.1.	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	98,65%	97,97%	98,28%	97,60%	99,23%	99,38%		
6.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	97%	96,14%	94,80%	95,64%	90,58%	99,16%		
6.3.	Rasio pasangan berakte nikah	37,02%	40,78%	91,54%	94,65%	91,94%	71,52%		
6.4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	TERSEDIA	TERSEDIA	TERSEDIA	TERSEDIA	TERSEDIA	TERSEDIA		
6.5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	SUDAH	SUDAH	SUDAH	SUDAH	SUDAH	SUDAH		



	BIDANG	CAPAIAN KINERJA							
No	URUSAN/INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
6.6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda	98,65%	97,97%	98,28%	97,60%	99,23%	99,38%		
6.7.	Penduduk(KTP) Cakupan penerbitan akta kelahiran	53,06%	56,55%	94,80%	95,64%	98,79%	99,16%		
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
7.1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100	100	100	100	100	100		
7.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0,20	0,21	0,19	0	0	0		
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	6.38	6.51	4.277	7.894	7.894	7.894		
7.4.	Persentase LPM aktif	0	0	0	0	0	100		
7.5.	Persentase LPM Berprestasi	0	0	0	0	0	0		
7.6.	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100	87		
7.7.	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	100	100		
7.8.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	0	0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	0	0	0	0	0	0		
	Rasio desa berlistrik	100	100	100	100	100	100		
7.9.	IKS (Indek Ketahanan Sosial)	0,7485	0,781	0,802	0,827	0,8337	8,419		
	IKE (indek Ketahanan Ekonomi)	0,5801	0,608	0,6294	0,6734	0,7085	7,285		
	IKL (Indek Ketahanan Lingkungan)	0,5949	0,664	0,707	0,7388	0,7759	8,204		
	Jumlah desa dengan status maju	18	47	64	73	69	83		
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,18	-7,22	0,58	0,62	6,76	6,76		
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)	2,45	2,24	2,53	2,39	2,13	2,24		
8.3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	75,00	75,00	75,00	37,25	50,89	50,89		
8.6.	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	3	3	1	1	1	1		
8.7.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	1	1	1	1	1	1		



	BIDANG			CAPAIAN KI	NERJA		
No	URUSAN/INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.8.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	3	3	2	2
8.9.	Rasio Akseptor KB	1:01	1:01	1:01	1:01	1:01	1:01
8.10.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	76,40	76,41	74,62	61,12	66,91	66,91
8.11.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15– 19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	9	18	22	22	21	17
	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	148.017	148.615	145.549	106.638	111.358	115.210
8.12.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	100,00	97,00	77,09	n.a	41,87	41,87
8.13.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	16,10	14,55	14,72	25	12,80	12,80
8.14.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	15,45	15,97	18,2	61,8	66,91	66,91
8.15.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	n.a	n.a	74,62	61,13	66,91	71,70
8.16.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	54,02	62,41	21,98	99	67,00	96,87
8.17.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)	26,06	68,99	7,64	70,04	76,00	76,00
8.18.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL)	42,89	53,70	17,86	60	58,00	58,00
8.19.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	1	1	1	1	1	1
8.20.	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	25,00	27,78	14,05	47,00	67,00	67,00
8.21.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100	100	100	100	100	100
8.22.	Cakupan Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS	54,65	57,7	76,16	61	61,00	72,23
8.23.	jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)]	237	237	237	237	237	237
8.24.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	40,40	45,10	45,25	45,50	45,50	45,50
8.25.	Persentase Faskes dan jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan	n.a	n.a	100	100	100	100



	BIDANG			CAPAIAN KI	NERJA		
No	URUSAN/INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan						
8.26.	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	n.a	n.a	36	36	36	36
8.27.	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	0	0	0	0	0	0
8.28.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	80	90	81	90	90	90
8.29.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	30	27	24	24	24	24
9	Perhubungan						
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	21.824	10.222	11.515	10.205	10.447	10.842
9.2.	Rasio ijin trayek	2,2	2,5	2,2	2,2	0,2	0
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	12.482	9.557	8.137	7.057	5.861	7.808
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus	50	52	52	52	54	54
	Terminal Bus	1	1	1	1	3	3
9.5.	Persentase layanan angkutan darat	0,1	0,1	1	0,1	0,1	0,1
9.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	2,14	1,86	16,1	15,21	15,17	37,78
9.7.	Pemasangan Rambu- rambu	Rambu = 934 unit Marka Jalan =	Rambu = 1253 unit Marka Jalan =	Rambu = 3.539 unit Marka Jalan =	Rambu = 107 unit Marka Jalan	Rambu = 166 Unit Marka Jalan	Rambu = 158 unit Marka Jalan
					=	=	=
		3.900 M2	11.186 M2	27.400 M2	1.371 M2	11.630 M2	47.398 M2
		Paku jalan = 466 Unit	Paku Jalan = 300 Unit	Paku Jalan = 4.200 unit	Paku Jalan = 0 Unit	Paku jalan = 874 Unit	Paku Jalan = 868 unit
		Barier = 100 Unit	Barier = 42 buah	Barier = 182 buah	Barier = 0 buah	Barier = 125 Unit	Barier = 20 Lokasi
9.8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,00377	0,00427	0,00420	0,00308	0,00375	382
	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	23.939	22.652	11.515	10.205	10.447	10.310
9.9.	Jumlah Barang yang terangkut angkutan umum	512.995	503.742	503.742	503.742	503.742	503.742
	Jumlah orang melalui dermaga terminal per tahun	68.848	48.193	111.685	48.119	81.812	108.420
	Jumlah barang melalui dermaga per tahun	85.668	59.968	154.909	48.561	42.581	57.659
9.10.	Jumlah orang melalui terminal per tahun	42.687	43.652	11.515	10.205	10.477	108.420
	Jumlah barang melalui terminal per tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
10	Jumlah kendaraan bermotor	582.366	513.935	417.982	516.413	586.007	575.368
10	Komunikasi dan						



	BIDANG			CAPAIAN KI	NERJA		
No	URUSAN/INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Informatika						
10.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	24,00%	29,53%	29,53%	44,30%	44,30%	90,00%
10.2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	88,61%	90,30%	90,30%	95,35%	100,00%	100,00%
10.4.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	100	100	96,61	100
10.5.	Jumlah desa/kelurahan menerima sinyal internet	210	214	214	226	237	237
10.6.	Jumlah menara telekomunikasi BTS	206	298	377	337	337	337
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah						
11.1.	Persentase koperasi aktif	81,85%	82,11%	82,5%	50,37 %	83,03 %	83,03%
11.2.	Persentase BPR/LKM aktif	100%	100%	n.a	n.a	n.a	n.a
11.3.	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha / Naik Kelas	2,97	3,23	3,48	73,11	73,82	73,82
12	Penanaman Modal						
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	331	466	791	729	2.073	2.073
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	2.278.976.621.970	2.642.111.509.508	3.319.584.600.000	8.432.830.800.000	9.804.607.469.680	8.346.870.226.93
12.3.	Jumlah tenaga kerja dalam negeri	n.a	4.544	2.772	8.802	13.699	12.035
	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	1,64	1,69	36,22	90,63	51,38	51,38
12.4.	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	159	135	179	138	245	245
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)	142.589.314.477	1.125.207.611.724	1.812.295.320.000	1.350.004.725.026	5.004.650.534.555	8.069.017.995.00
	Jumlah tenaga kerja Asing (TKA)	n.a	21	13	52	46	46
13	Kepemudaan dan Olahraga						
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	24,30%	26,80%	27,50%	43,90%	48,78%	50,69%
13.2.	Persentase wirausaha muda	11,99%	13,80%	13,80%	0,27%	0,29%	1,13%
13.3.	Cakupan pembinaan olahraga	88%	89%	89%	90%	90%	90%
13.4.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	37,80%	42,50%	59,92%	52,80%	52,80%	52,80%
					40.610/	46 450/	46,45%
13.5.	Cakupan pembinaan atlet muda	22%	34%	34%	42,61%	46,45%	40,43%
	Cakupan pembinaan	22% 76	34%	34%	8	8	865
13.5.	Cakupan pembinaan atlet muda Jumlah atlet						



	BIDANG			CAPAIAN KI	NERJA		
No	URUSAN/INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	data dan statistik yang terintegrasi						
14.2.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	ada	Ada	Ada	Ada
14.3.	Buku "PDRB"	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada
15	Persandian						
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	62,07%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Kebudayaan						
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	13	2	1	1	27	37
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	2	3	3	3	12	15
16.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	1	2	3	3	19	8
16.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	9	9	9	9	9	10
17	Perpustakaan						
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	231.688	9.14	8	12.484	15.376	16.613
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	73.468	74.632	45.383	47.152	47.138	242.041
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1,18	1,27	1,26	1,25	1,17	1,63
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	n.a	n.a	n.a	12.484	15.376	16.093
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	30.746	31.58	26.32	22.706	31.142	44.55
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	15	15	15	15	16	15
18	Kearsipan						
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	100	100	89,65	100	100	100
18.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	8	12	21	25	150	199
	Urusan Pilihan						
1	Pariwisata						
1.1.	Kunjungan wisata	1.596.777	693.246	617.064	1.041.886	1.531.974	1.207.768
1.2.	Lama kunjungan Wisata	1	1	1	1	1	1 207 760
1.3.	PAD sektor pariwisata Jumlah biro perjalanan	2.122.456.000	625.699.000 62	211.280.000	1.084.216.022	1.432.755.000	1.207.768
	wisata	33	33	33	44	44	44
0	Jumlah objek wisata	33	<i>აა</i>	33	44	44	44
2	Pertanian						
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar						
	Padi (Kwintal)	38,65	34,72	37,79	37,53	43,36	43,36
	Jagung	60,25	53,27	54,39	42,91	47,65	47,65



No. URUSAN/INDIATOR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2026 2026 2026 2027 2026	NI.	BIDANG			CAPAIAN KI	NERJA		
Recard Hajau	No	URUSAN/INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nacang Hijiat	2.5.	Kedelai	15,22	15,72	16,89	15,24	14,85	14,85
Ubi Kayu		kacang Tanah	11,14	12,86	12,09	10,1	10,44	10,44
Ubi Jalar		Kacang Hijau	10,58	13,26	13,26	8,27	16,65	16,65
2.6. Jumlah birna kelompok 2.367 2.533 2.756 2.911 3.051		Ubi Kayu	288,33	266,12	233,15	276,51	308,70	308,70
Detail		Ubi Jalar	136,47	164,88	179,1	183,15	163,60	163,60
3.1. Rehabilitasi hutan dan 235 990 n.a 175 483,3 483,3 3.2. Kerusakan Kawasan 1.390,96 3.742,66 5.170,43 2.518,00 1.391,92 1.391,92 3.3. Las kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati [IIa] 2.674,973,50 2.675,158,32 2.675,1	2.6.	_	2.367	2.533	2.756	2.911	3.051	3.051
lahan kritis [Ha]	3	Kehutanan						
Hutan (Ha)		lahan kritis (Ha)						·
Luntuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati (Ha)		Hutan (Ha)	·	·	·			
Daya Mineral	3.3.	untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati	2.674.973,50	2.675.158,32	2.675.158,32	2.075.158,32	2.075.158,32	2.073.138,32
Istrik	4	Daya Mineral						
Section Perdagangan Section		listrik						
Stape Stap		ESDM	89,59	90,12	86,64	86,62	89,43	89,43
Perdagangan								
Relompok Pediagang/usaha			\$.4.133.140.826,46	\$.2.073.658.433,16		\$793.881.737,34	\$2.072.242.698,40	\$2.072.242.698,40
Cakupan bina kelompok pengrajin 70 70 70 70 70 70 70 7	5.2.	kelompok pedagang/usaha	4.939	4.939	5.037	5.138	5.24	5.24
Relompok pengrajin Jumlah industri besar dan sedang	6	Perindustrian						
Jumlah industri besar dan sedang 121 1606 1878 2545 3009 3009			70	70	70	70	70	70
6.1. Jumlah tenaga kerja industri besar dan sedang 121 1606 1878 2545 3009 3009 Jumlah industri besar dan sedang Jumlah industri mikro 4777 2523 2559 2730 2795 2795 Jumlah tenaga kerja industri mikro dan kecil 9493 4935 5003 4989 5006 5006 7 Transmigrasi - 1 1 1 0 0 8.1. Presentase transmigran swakarsa - 1 1 1 0 0 8.1. Produksi perikanan 189974.2 Ton 202277.3 Ton 207521.5 Ton 209.358,3 281.950,7 281.950,7 281.950,7 70 Kg/Orang/ Ton 70 Ton Ton </td <td></td> <td>Jumlah industri besar</td> <td>2</td> <td>13</td> <td>16</td> <td>21</td> <td>29</td> <td>29</td>		Jumlah industri besar	2	13	16	21	29	29
Jumlah industri mikro dan kecil	6.1.	Jumlah tenaga kerja industri besar dan	121	1606	1878	2545	3009	3009
Industri mikro dan kecil		Jumlah industri mikro	4777	2523	2559	2730	2795	2795
T.1. Persentase transmigran Swakarsa		industri mikro dan kecil	9493	4935	5003	4989	5006	5006
Swakarsa		_						
Perikanan 189974.2 Ton 202277.3 Ton 207521.5 Ton 209.358,3 281.950,7 281.950,7 Ton T		swakarsa	-	1	1	1	0	0
8.1. Produksi perikanan 189974.2 Ton 202277.3 Ton 207521.5 Ton 209.358,3 Ton 281.950,7 Ton 281.950,7 Ton 8.2. Konsumsi ikan 75 Kg/Orang/ tahun 70 Kg/Orang/ tahun 76,1 Kg/Orang/ tahun n.a n.a n.a 8.3. Cakupan bina kelompok nelayan 412 Kelompok 538 Kelompok kelompok kelompok nelayan 563 Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Nelompok Ne	8							
Sample S	8.1.		189974.2 Ton	202277.3 Ton	207521.5 Ton			
8.3. Cakupan bina kelompok nelayan 412 Kelompok 538 Kelompok 563 Kelompok 591 720 720 8.4. Jumlah rumah tangga perikanan tangkap 18.966 19.16 19.16 19.16 21.901 21.901 21.901 8.7. Nilai tukar nelayan 103 100,3 104,82 100,35 103 103 8.8. Volume perikanan tangkap di Laut 42.203,2 Ton tangkap di Laut 43.676,2 Ton tangkap di Laut 47.470 Ton tangkap di Laut 61.886,7 Ton tangkap di Laut 2.804 2.451 1.709 1.745 2.523 2.523 8.10. Volume perikanan umum darat 34.748 Ton tangkap di A.092 Ton	8.2.	Konsumsi ikan			Kg/Orang/		-	
8.4. Jumlah rumah tangga perikanan tangkap 18.966 19.16 19.16 19.16 21.901 21.901 8.7. Nilai tukar nelayan 103 100,3 104,82 100,35 103 103 8.8. Volume perikanan tangkap di Laut 42.203,2 Ton tangkap di Laut 43.676,2 Ton tangkap di Laut 46.595,7 Ton tangkap di Laut 47.470 Ton tangkap di Laut 61.886,7 Ton tangkap tangkap di Laut 8.9. Nilai Perikanan tangkap (milyar) 2.804 2.451 1.709 1.745 2.523 2.523 8.10. Volume perikanan umum darat 34.748 Ton tangkap di Laut 34.092 Ton tangkap di Laut 34.152,7 Ton tangkap di Laut 37.237,1 Ton tangkap di Laut	8.3.		412 Kelompok	538 Kelompok				
8.7. Nilai tukar nelayan 103 100,3 104,82 100,35 103 103 8.8. Volume perikanan tangkap di Laut 42.203,2 Ton 43.676,2 Ton 46.595,7 Ton 47.470 Ton 47.470 Ton 61.886,7 Ton	8.4.	Jumlah rumah tangga	18.966	19.16	19.16			_
tangkap di Laut 8.9. Nilai Perikanan tangkap (milyar) 8.10. Volume perikanan umum darat 2.804 2.451 1.709 1.745 2.523 2.523 34.748 Ton 34.092 Ton 34.152,7 Ton 34.218 Ton 37.237,1 Ton	8.7.		103	100,3	104,82	100,35	103	103
8.9. Nilai Perikanan tangkap (milyar) 2.804 2.451 1.709 1.745 2.523 2.523 8.10. Volume perikanan umum darat 34.748 Ton 34.092 Ton 34.152,7 Ton 34.218 Ton 37.237,1 Ton 37.237,1 Ton	8.8.		42.203,2 Ton	43.676,2 Ton	46.595,7 Ton	47.470 Ton	61.886,7 Ton	61.886,7 Ton
8.10. Volume perikanan umum darat 34.748 Ton 34.092 Ton 34.152,7 Ton 34.218 Ton 37.237,1 Ton 37.	8.9.	Nilai Perikanan tangkap	2.804	2.451	1.709	1.745	2.523	2.523
8.11. Nilai Perikanan umum 1192 1031 1040 1050 1121 1121	8.10.	Volume perikanan	34.748 Ton	34.092 Ton	34.152,7 Ton	34.218 Ton	37.237,1 Ton	37.237,1 Ton
	8.11.	Nilai Perikanan umum	1192	1031	1040	1050	1121	1121



D.T.	BIDANG			CAPAIAN K	INERJA		
No	URUSAN/INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	darat						
Penunjar	ng Urusan						
1	Perencanaan Pembangunan						
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	99%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	99%	99%	99%	99%	100%	100%
1.7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100%	100%	100%	100%	100%	60%
2	Keuangan						
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2.	Persentase SILPA	10.71%	27.33%	27.00%	18.24%	26.49 %	2,07%
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD	10.71%	27.33%	27,00%	18.24%	26.49 %	2,07%
2.4.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	19.72%	21.36%	0	0	0	0,82%
2.5.	Persentase belanja pendidikan (20%)	26,58%	21,60%	21,80%	20,07%	21,15%	20,44%
2.6.	Persentase belanja kesehatan (10%)	11,84%	12,00%	24,78%	26,92%	12,90%	14,29%
2.7.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung						
	Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan total APBD	44,91%	28,32%	38,17%	28,96%	27,21%	51,14%
	Perbandingan antara belanja langsung dengan total APBD	55,09%	55,09%	55,09%	71,04%	72,79%	48,86%
2.8.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	11,03%	13,68%	13,57%	17.56%	8,29%	7,85%
2.9.	Penetapan APBD	27-Dec-18	31-Dec-19	30-Dec-20	29-Dec-22	12-Dec-22	22-Dec-23
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan						
3.1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	5,5 JP	4,88 JP	5.61 JP	1.53 JP	7.11 JP	19.09 JP
3.2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan	6,89	5,82	2,65	5,33	13,59	41,94



	BIDANG			CAPAIAN K	INERJA		
No	URUSAN/INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	dan pelatihan formal						
3.3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	54,87%	59,55%	62,09%	47,66%	55,81%	54,38%
3.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	38	34	36	36	36	28
3.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	5.838	5.62	5.379	4.951	4.951	734
3.6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	6.784	6.595	6.774	6.278	6.057	5.637
4	Penelitian dan						
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	92,31	91,67	100	100	100	90,39
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Penerapan SIDa:	92,31	75	100	100	100	100
4.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	100	100	100	100	100	100
4.4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	100	100	100	100	100	100
5	Pengawasan						
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	70,75	74,69	86,67	89,37	89,22	90,11
5.2.	Persentase pelanggaran pegawai	45	15	6	n.a	0,15	0,12
5.3.	Jumlah temuan BPK	1.436	1.462	1.53	611	640	673
6	Sekretariat Dewan						
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.3.	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



No ASPEK	BIDANG			CAPAIAN K	INERJA		
NO	URUSAN/INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ASPEK I	DAYA SAING DAERAH		•	1	1	•	I.
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	24.944.246	24.550.516	27.034.599	28.834.639	166.147.309	166.147.309
2	Nilai tukar petani	91,15	97,23	95,97	129,93	130,91	130,91
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	51,27	51,63	53,48	51,08	52,62	52,62
4	Produktivitas total daerah (juta rupiah)	283,40	256,69	300,26	400,04	360,39	360,39
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	6,25	5,70	8,29	11,40	14,51	16,06
6	Rasio net Ekspor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi)	49,71	45,12	49,6	58,28	43,17	43,17
7	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	63,69	71,12	77,54	52,21	70,52	70,52
8	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	65,22	63,89	67,64	68,05	71,87	71,87
9	Angka kriminalitas yang tertangani	64	52	240	196	604	604
10	Jumlah kegiatan demonstrasi	29	25	29	40	26	27
11	Rasio ketergantungan	37,43	25,62	24,16	22,84	44,83	44,83

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2024

Evaluasi hasil RKPD memiliki tujuan untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD dan prioritas dan sasaran. Realisasi capaian sasaran RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II - 44 Capaian Sasaran Prioritas RKPD Tahun 2024

	Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pe	Fokus mbangunan	Tuju	an/Sasa- ran	Indikator	Realisa- si 2023	Target RKPD 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
				Meni	ngkatkan	Indeks	60,12	В	BB	
				mana	ajemen	Reformasi		(64,00)	(71,51)	
				birok	rasi yang	Birokrasi				
				efekti	if, efisien,					
				inova	ıtif,					
				akun	tabel,					
				bersi	h dan					
				melay	yani					
1	Penataan	1	Penataan	1	Mening-	Nilai		BB	65.93	90.32
	dan		manajemen		katnya	SAKIP		(73,00)		
	Pengem-		organisasi		Kinerja					
	bangan		dan		Penye-					
	Tata Kelola		penguatan		lengga-					
	Pemerin-		koordinasi		raan					
	tahan		perangkat		Peme-					

	Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pe	Fokus mbangunan	Tuju	an/Sasa- ran	Indikator	Realisa- si 2023	Target RKPD 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
	dan Pelayanan Publik		daerah		rinta- han Daerah					
		2	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah	2	Mening- katnya akun- tabilitas penge- lolaan keuang- an daerah	Indeks Persepsi Anti Korupsi		8,4	8.38	99.59
		3	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerinta- han dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu berbasis IT	3	Mening- katnya kualitas pelaya- nan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik		9,85	9.81	99.59
				kuali pemb manu	ngkatkan tas pangunan usia yang aya saing	Indeks Pem- bangunan Manusia	75,95	75,51	76,57	100,05
2	Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	4	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu	4	Mening- katnya Kualitas Layanan Pendi- dikan, Ketaha- nan	Indeks Pendidika n	0,688	0,7	0.688	98.29
		5	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan		Sosial dan Pelesta- rian Kebu- dayaan	Indeks Pemba- ngunan Kebuda- yaan	53,23	51	57.42	105.36
		6	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	5	Mening- katnya Kualitas Layanan Kese- hatan Masya- rakat	Indeks Kese- hatan	0,812	0,817	0.836	102.33





	Prioritas Kabupaten Kutai artanegara	Pe	Fokus mbangunan	Tuju	an/Sasa- ran	Indikator	Realisa- si 2023	Target RKPD 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
		7	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak	б	Mening- katnya peran serta peremp uan dalam pemban gunan	Indeks Pemba- ngunan Gender		80	81.08	100.52
				kebal dan kesej	ngkatkan hagiaan ahteraan arakat	Tingkat Kebaha- giaan	78,83	79	79,60	108,30
3	Perce-patan pemba- ngunan desa dan kawasan perdesaan	8	Percepatan pemba- ngunan desa sebagai basis produksi pangan dan pember- dayaan masyarakat	7	Mening- katnya peme- rataan penda- patan masya- rakat dan kualitas	Indeks Gini		0,260- 0,280	0.307	109.64
		9	Penguatan kecamatan pusat pertum- buhan dan pengem- bangan kawasan strategis daerah		hidup masya- rakat	Indeks Desa Mem- bangun	0,779	0,765	0.797	104.18
				Perek Daera Berba Sekto	asis Pada	Laju Pertum- buhan PDRB Non Migas dan Batubara	7,69	5,81	7,88	135,63
4	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjut -an	10	Peningkatan produktivitas , nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan	8	Meningk atnya Pengelol aan Perta- nian Berbasis Potensi Unggul- an Daerah	Laju Pertumbu han PDRB Sektor Pertanian, Kehutan- an dan Perikanan		6,6	2.94	98.00
		11	Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam, sosial budaya,	9	Mening- katnya Daya Saing Pariwi- sata	Laju Pertum- buhan Ekonomi Sektor Pariwisata	6,6	4	7.85	196.25



	Prioritas Kabupaten Kutai Cartanegara	Pe	Fokus mbangunan	Tuju	an/Sasa- ran	Indikator	Realisa- si 2023	Target RKPD 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
			dan olah raga yang berkelan- jutan		Daerah					
		12	Peningkatan produktivitas industri kreatif	10	Berkem- bangnya Ekosis- tem Ekono- mi Kreatif	Laju Pertum- buhan Ekonomi Kreatif	6,8	7,09	7.7	108.60
		13	Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengem- bangan kerjasama investasi	11	Mening- katnya Daya Saing Inves- tasi Daerah	Tingkat Pertum- buhan Investasi		1,75	10.85	620.00
				Peme		Indeks Kesulitan Geografis		33,8		
5	Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	14	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman , air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman	12	Mening- katnya kualitas permu- kiman masya- rakat dan keter- sediaan air bersih	Cakupan Layanan Air Bersih		92,16	80.2	87.02
	nerata		diffair		Serom	Persen- tase Rumah Layak Huni		93,5	98.64	105.50
6	Penguatan Kesiapan Pemba- ngunan IKN	15	Penyiapan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan pemba- ngunan kawasan di lokasi IKN	13	Mening- katnya aksesi- bilitas dan konek- tivitas wilayah	Indeks Aksesi- bilitas Wilayah	76,49	86,18	76.49	98.06
		16	Pembangun- an prasarana dan sarana							



	Prioritas Kabupaten Fokus Kutai Pembangunan Kartanegara			Tujuan/Sasa- ran		Indikator	Realisa- si 2023	Target RKPD 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
			konektivitas (keterkaitan) wilayah							
				Pemb Berw	ngkatkan pangunan awasan kungan	Persentas e Penuruna n Emisi GRK	6,01	5	6,16	123,30
7	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelan- jutan	17	Pemulihan daya dukung lingkungan	14	Meningk atnya kualitas lingkun gan hidup	Indeks Kualitas Lingkung an Hidup		73,81	73.59	99.70

Secara umum capaian indikator sasaran pembangunan daerah yang tertuang pada RPJMD dan RKPD tahun 2024 dapat tercapai dengan rata-rata realisasi 130,17 % (seratus tiga puluh koma tujuh belas persen). Begitu juga pencapaian sasaran daerah tahun 2024 terhadap target akhir RPJMD (tahun 2026). Terdapat 2 sasaran daerah pada Misi ke-1 RPJMD yaitu Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien, dan Melayani dengan indikator sasaran Nilai SAKIP yang realisasinya masih rendah, dengan persentase realisasi capaian terhadap targetnya hanya sebesar 90,32 % (sembilan puluh koma tiga puluh dua persen, dan pada Misi ke-4 RPJMD yaitu Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah dengan indikator Cakupan Layanan Air Bersih yang realisasinya masih rendah, dengan persentase realisasi capaian terhadap targetnya hanya sebesar 87,02 % (delapan puluh tujuh koma nol dua) persen. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah dimana penguatan pada akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan programprogram sangat diperlukan. Guna peningkatan pelayanan penyediaan air bersih, pemerintah daerah harus mempunyai strategi dan berkolaborasi dengan stakeholder yang terlibat. Terkait hal ini disajikan pada tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

Tabel II - 185 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Per Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

No	Nama OPD	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran	Capaian Fisik (%)	Pelaksanaan (%)	
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	40.497.194.742	36.296.810.806	89,63%	89.6 %	98.1 %	
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	65.381.761.672	60.986.269.805	93,28%	93.3 %	100.0 %	
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	48.282.302.853	44.287.503.959	91,73%	91.7 %	90.3 %	
4	Badan Pendapatan Daerah	63.389.143.244	58.616.367.827	92,47%	92.5 %	100.0 %	
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	981.234.145.815	929.839.556.684	94,76%	94.8 %	92.1 %	
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	52.192.307.258	43.925.652.748	84,16%	84.2 %	100.0 %	
7	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	33.064.401.374	30.267.059.532	91,54%	91.5 %	100.0 %	
8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	41.270.320.028	37.823.726.171	91,65%	91.6 %	100.0 %	
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	500.299.743.472	472.922.234.366	94,53%	94.5 %	100.0 %	
10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	182.698.180.884	144.072.891.366	78,86%	78.9 %	98.5 %	
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	33.748.231.239	28.978.400.436	85,87%	85.9 %	98.6 %	
12	Dinas Kesehatan	559.711.710.364	505.158.919.921	90,25%	90.3 %	94.8 %	
13	Dinas Ketahanan Pangan	26.269.272.863	24.582.065.218	93,58%	93.6 %	100.0 %	
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	143.378.679.544	138.238.107.488	96,41%	96.4 %	100.0 %	
15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	31.974.081.148	27.690.772.443	86,60%	86.6 %	96.8 %	
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	79.052.826.157	70.408.657.776	89,07%	89.1 %	96.5 %	
17	Dinas Pariwisata	105.958.221.684	102.273.980.667	96,52%	96.5 %	100.0 %	
18	Dinas Pekerjaan Umum	1.729.359.439.187	1.335.086.956.841	77,20%	77.2 %	93.9 %	
19	Dinas Pemadam Kebakaran dan	57.101.599.082	53.445.065.485	93,60%	93.6 %	100.0 %	
	Penyelamatan						
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	82.143.249.681	77.524.560.884	94,38%	94.4 %	99.7 %	
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	21.520.596.403	17.854.352.450	82,96%	83.0 %	98.3 %	
	Perlindungan Anak						
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	26.734.438.040	20.705.934.598	77,45%	77.5 %	98.7 %	
	Terpadu Satu Pintu						
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.240.130.000.000	2.057.541.174.664	91,85%	91.8 %	91.5 %	



24	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	32.030.197.289	25.866.685.185	80,76%	80.8 %	95.4 %
25	Dinas Perhubungan	153.240.054.824	147.535.468.312	96,28%	96.3 %	98.9 %
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	48.098.053.858	40.704.164.284	84,63%	84.6 %	93.5 %
27	Dinas Perkebunan	52.389.844.136	45.806.555.527	87,43%	87.4 %	100.0 %
28	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	59.414.638.099	31.802.211.906	53,53%	53.5 %	97.7 %
29	Dinas Pertanian dan Peternakan	351.062.659.581	297.284.188.636	84,68%	84.7 %	92.4 %
30	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	750.831.314.137	678.312.430.456	90,34%	90.3 %	97.4 %
31	Dinas Sosial	49.049.882.101	40.427.401.671	0.427.401.671 82,42%		92.6 %
32	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	41.558.444.573	38.741.178.180	93,22%	93.2 %	93.9 %
33	Inspektorat Kabupaten	49.016.174.628	35.611.783.465	72,65%	72.7 %	100.0 %
34	Kecamatan Anggana	75.164.074.928	72.018.867.557	95,82%	95.8 %	100.0 %
35	Kecamatan Kembang Janggut	32.980.243.316	31.781.295.891	96,36%	96.4 %	100.0 %
36	Kecamatan Kenohan	30.635.484.520	28.109.819.993	91,76%	91.8 %	90.6 %
37	Kecamatan Kota Bangun	54.339.966.922	49.115.369.472	90,39%	90.4 %	96.9 %
38	Kecamatan Kota Bangun Darat	27.975.450.000	26.855.421.367	96,00%	96.0 %	100.0 %
39	Kecamatan Loa Janan	70.422.877.576	67.892.109.024	96,41%	96.4 %	100.0 %
40	Kecamatan Loa Kulu	85.544.241.793	83.413.732.203	97,51%	97.5 %	100.0 %
41	Kecamatan Marangkayu	37.353.215.072	35.228.761.903	94,31%	94.3 %	100.0 %
42	Kecamatan Muara Badak	57.896.066.526	54.580.265.037	94,27%	94.3 %	98.4 %
43	Kecamatan Muara Jawa	101.974.372.628	96.921.083.105	95,04%	95.0 %	100.0 %
44	Kecamatan Muara Kaman	47.210.520.582	45.616.198.558	96,62%	96.6 %	100.0 %
45	Kecamatan Muara Muntai	29.822.472.542	26.798.592.383	89,86%	89.9 %	100.0 %
46	Kecamatan Muara Wis	32.148.919.331	30.585.300.587	95,14%	95.1 %	99.9 %
47	Kecamatan Samboja	201.538.901.599	192.029.014.180	95,28%	95.3 %	98.5 %
48	Kecamatan Samboja Barat	54.153.670.750	53.534.920.062	98,86%	98.9 %	100.0 %
49	Kecamatan Sanga Sanga	63.314.037.709	61.378.271.300	96,94%	96.9 %	98.8 %
50	Kecamatan Sebulu	51.790.917.249	49.509.489.538	95,59%	95.6 %	99.0 %
51	Kecamatan Tabang	22.150.815.455	17.945.832.337	81,02%	81.0 %	100.0 %
52	Kecamatan Tenggarong	192.376.376.362	178.250.021.355	92,66%	92.7 %	99.8 %



53	Kecamatan Tenggarong Seberang	91.312.803.197	86.411.858.459	94,63%	94.6 %	81.6 %
54	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	213.677.953.898	191.856.249.685	89,79%	89.8 %	100.0 %
55	RSUD Aji Muhammad Parikesit	810.986.625.209	593.855.798.998	73,23%	73.2 %	100.0 %
56	RSUD Dayaku Raja	130.512.040.698	63.676.197.172	48,79%	48.8 %	100.0 %
57	Satuan Polisi Pamong Praja	42.677.162.536	35.878.460.	84,07%	84.1 %	99.4 %
			706			
58	Sekretariat Daerah	304.308.454.755	285.822.222.639	93,93%	93.9 %	100.0 %
59	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	191.383.061.987	174.427.058.178	91,14%	91.1 %	100.0 %
		11.785.733.837.100	10.334.111.301.446	87,68%	87.7 %	97.5 %

Tabel II - 46 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

	SASARAN DAERAH	PRIORITAS KUTAI KARTANE- GARA	FOKUS PEMBANGUNAN	PROGRAM			TAHUN 2024			PERANGKAT DAERAH
No						INDIKATOR <i>OUTCOME</i>	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penataan dan Pengembang an Tata Kelola Pemerintah-	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB dan A	80	32	40	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
		an dan Pelayanan Publik	Publik	2	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	100	93,74	94	Badan Perencanaan Pembangun- an Daerah
				3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI	Persentase Pelaksanaan rekomendasi	100	94,55	95	



				PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	100	93,65	94	
					Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD	100	92,98	93	
			4	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	94	100	106	BKPSDM
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah	5	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran	100	100	100	BPKAD
					Persentase pengelola keuangan Perangkat	100	100	100	



					Daerah				
					mendapatkan pembinaan				
					penatausahaan				
					keuangan				
		-		PROGRAM	_	100	100	100	
			6	PROGRAM PENGELOLAAN	Tingkat	100	100	100	
				BARANG MILIK	pemenuhan				
				DAERAH	peraturan dan				
				DAEKAH	pedoman				
					pengelolaan BMD sesuai				
					Permendagri				
1					19/2016	100	100	100	
					Persentase	100	100	100	
					Perangkat Daerah				
					Daeran melaksanakan				
					perencanaan dan penatausahaan				
					BMD sesuai				
					ketentuan				
					Persentase	100	100	100	-
					Perangkat	100	100	100	
					Daerah yang				
					aktif melakukan				
					rekonsiliasi				
					laporan BMD				
					Persentase	100	100	100	-
					pengelola BMD	100	100	100	
					Perangkat				
					Daerah				
					mendapatkan				
					pembinaan				
					penatausahaan				
					BMD				
			7	PROGRAM	Cakupan	96	103	107	Inspektorat
				PENYELENGGARAA	Penyelenggaraan				Kabupaten



					N PENGAWASAN	Pengawasan				
				8	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	75	97	129	
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan	9	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
			dan layanan publik yang lebih baik,	10	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Persentase Kepemilikan KTP- el	99	99,81	101	Dinas Kependu- dukan dan
			cepat, mudah, murah, dan			2. Persentase Kepemilikan KIA	90	68,37	76	Catatan Sipil
			bermutu berbasis IT	11	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	100	100	100	
				12	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Penyediaan Data Kependudukan	100	100	100	
				13	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Aplikasi	3	3	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan,	Pengem- bangan sumber daya	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	14	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD (Angka	88,43	73	83	Dinas Pendidikan dan



Ketahanan Sosial	manusia	pendidikan yang			Indeks Max 7)				Kebudayaan
dan Pelestarian	yang sehat,	bermutu			Consise Indoles	87,43	71,31	82	
Kebudayaan	produktif,				Capaian Indeks Mutu Pendidikan	87,43	71,31	84	
	terampil				(IMP) SMP (Angka				
					Indeks Max 7)				
						00.00	04.60	103	
					Capaian Indeks Mutu Pendidikan	82,02	84,62	103	
					(IMP) PAUD				
					(Angka Indeks				
					Max 100)	67.00	57.4 <i>C</i>	0.5	
					Capaian Indeks	67,38	57,46	85	
					Mutu Pendidikan				
					(IMP) Kesetaraan				
					(Angka Indeks				
					Max 100)				
					Jumlah Bantuan	3.000,00	2574	86	
					Beasiswa				
					Stimulan Kukar				
					IDAMAN				
					Pendidikan				
					Dasar				
			15	PROGRAM	Persentase	100	100	100	
				PENGEMBANGAN	Satuan				
				KURIKULUM	Pendidikan yang				
					Melaksanakan				
					Kurikulum				
					Muatan Lokal				
					(MuLok)				
			16	PROGRAM	Persentase	100	0	0	
				PENGENDALIAN	Satuan				
				PERIZINAN	Pendidikan yang				
				PENDIDIKAN	Memiliki Izin				
					Pendirian dan				
					Operasional				
		Penguatan	17	PROGRAM	Jumlah	20	40	200	
		modal sosial		PENGEMBANGAN	Pelaksanaan				



	budaya,		KEBUDAYAAN	Event Budaya di				
	solidaritas sosial			Wilayah				
	dan ketahanan			Kabupaten Kutai				
	sosial dalam			Kartanegara				
	kehidupan			Persentase Desa	100	100	100	
	kemasyarakatan			Budaya yang				
				Aktif (Existing 5				
				Desa Budaya)				
		18	PROGRAM	Presentase PSKS				Dinas Sosial
			PEMBERDAYAAN	yang berperan				
			SOSIAL	dalam Usaha				
				Kesejahteraan				
				Sosial				
		19	PROGRAM	Persentase (%)	100	100	100]
			REHABILITASI	penyandang				
			SOSIAL	disabilitas				
				terlantar, anak				
				terlantar, lanjut				
				usia terlantar				
				dan gelandangan				
				pengemis yang				
				terpenuhi				
				kebutuhan				
				dasarnya di luar				
				panti (Indikator				
				SPM)				
		20	PROGRAM	Presentase PMKS	96,66	97,26	101]
			PERLINDUNGAN	yang memperoleh				
			DAN JAMINAN	layanan				
			SOSIAL	Perlindungan				
				dan Jaminan				
				Sosial				
				Cakupan	97	97,26	100]
				Layanan				
				Jaminan Sosial				
				Bagi Masyarakat				
				Miskin Non				



					Potensial				
			21	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase Rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasi- kan	100	100	100	Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)
5	Meningkatnya Kualitas Layanan	Promosi dan penerapan	22	PROGRAM PEMENUHAN	Presentasi Balita Stunting	14,60	15,70	108	Dinas Kesehatan
	Kesehatan Masyarakat	perilaku hidup bersih, sehat,		UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Indeks Keluarga sehat	0,35	0,36	103	
		aman dan produktif		UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	0,75	0,91	121	
					Indeks Pelayanan kesehatan balita	0,76	0,76	100	
					Indeks Pelayanan Penyakit menular	0,61	0,91	149	
					Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	0,50	0,98	196	
					Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	0,88	0,90	102	
					Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,40	0,86	215	
					Indeks Perilaku kesehatan	0,47	0,52	111	
					Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama				
			23	PROGRAM PENINGKATAN	Persentase SDM yang Terlatih	75	75	100	





				24	KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Sesuai Kompetensinya Persentase Capaian RT- PHBS	34	52	153	_
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan		Peningkatan daya saing tenaga kerja, keterampilan perempuan dan	25	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	19,31	18,74	97	Dinas Pemberda- yaan Perempuan dan
			pemenuhan hak- hak anak	26	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	770	790	103	Perlindungan Anak
				27	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100	100	100	
7	Meningkatnya pemerataan	Percepatan pembangun-	Percepatan pembangunan	28	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Posyandu Aktif	70,35	86,76	123	Dinas Pemberda-
	pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	an desa dan kawasan perdesaan	desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat		LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100	100	100	yaan Masyarakat dan Desa
				29	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik	95	95	100	





						Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	30	30	100	
				30	PROGRAM PENINGKATAN	Kecukupan Konsumsi Energi	2.175,00	2.021,00	93	Dinas Ketahan
					DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kecukupan Konsumsi Protein	57,10	65,10	114	Pangan
			Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan	31	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	10,36	11,00	106	Dinas Pemberdaya- an Masyarakat dan Desa
			pengembangan kawasan strategis daerah	32	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	100	100	100	
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat		Peningkatan kapasitas dan komptensi angkatan kerja serta perluasan	33	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kepemudaan	76,83	77	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			kerja dan	34	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	20,50	22,77	111	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
					TENAGA KERJA	Penyediaan Pusat Latihan Tenaga Kerja KUKAR IDAMAN	3	3	100	
9	Meningkatnya	Penguatan	Peningkatan	35	PROGRAM	Luas Tanam Padi	40.641,30	40.641,00	100	Dinas
	pengelolaan pertanian	Daya Saing	produktivitas, nilai tambah		PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Luas Tanam Jagung	13.000,00	1,66	0	Pertanian dan
	berbasis potensi unggulan daerah	Ekonomi Daerah yang	dan pendapatan dari pertanian,		SARANA PERTANIAN	Luas Tanam Durian				Peternakan





Unggul, Bernilai Tambah dan Berkelanjut- an	perkebunan, peternakan, dan kehutanan			Luas Tanam Jahe Luas Tanam Bawang Merah Luas Tanam				_
		36	PROGRAM	Cabe Luas Areal	28.720	31.585	110	Dinas
		30	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Kelapa Sawit Rakyat	20.120	31.363	110	Perkebunan
			SARANA PERTANIAN	Luas Areal Kelapa Sawit PBS	268.526	222.940	83	
				Luas Areal Karet	17.958	17.543	98	
				Luas Areal Lada	3.427	1.879	55	
				Luas Areal Kelapa Dalam	7.301	6.796	93	
				Luas Areal Kopi	110	105	95	
				Luas Areal Kakao	95	141	148	
				Luas Areal Aren	248	266	107	
				Luas Areal Kelor	9	0	0	
		37	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Panjang Jalan Usaha Tani Yang Dibangun	20.000,00	20.000,00	100	Dinas Pertanian dan
			PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Embung Pertanian Yang Dibangun	23	22	96	Peternakan
				Panjang Jaringan Irigasi yang dibangun	17.000,00	0	0	
				Jumlah DAM Parit yang dibangun	6	0	0	
				Jumlah Pintu Air yang dibangun	33	0	0	
				Panjang Jalan Produksi				



	38	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN	Perkebunan Yang Dibangun Jumlah Embung Perkebunan Yang Dibangun Persentase Derajat Kesehatan	95	98	103	
		HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Ternak Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	5	5	100	
	39	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGA N BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	90	90	100	
	40	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	3	3	100	
	41	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	15	15	100	Dinas Perkebunan
	42	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan Pelaku Usaha Pertanian yang di Bina				
	43	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	95.172,00	11,636	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
	44	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	185.608,0 0	203,812	0	



	45	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Wilayah Sumberdaya Perikanan Yang Diawasi Persentase Penyelesaian Kasus Ilegal / Destruktif Fishing	95	100	105	
	46	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Jumlah Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan	25.095,00	1,911	0	
	47	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan di toko modern				Dinas Perindustri- an dan Perdagangan
	48	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya				
	50	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROGRAM	Jumlah Pengembangan Sentra IKM berbasis komoditi pertanian Persentase				Dinas
		PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,	Pemberdayaan UMKM				Koperasi dan UKM



				USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			51	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertumbuhan Omzet	0,85	1,09	128	
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam, sosial budaya,	52	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase DTW yang Memenuhi Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi	63,81	65	102	Dinas Pariwisata
		dan olah raga yang berkelanjutan	53	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Okupansi	29,28	34	116	
			54	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan Pelaku EKRAF	7	7	100	
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Peningkatan produktivitas industri kreatif	55	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Terfasilitasi	5	0	0	
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan	56	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1. Jumlah Proyek PMDN/PMA	652	3085	473	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
		pengembangan kerjasama investasi	57	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1. Jumlah Investor PMDN/PMA	310	281	91	Terpadu Satu Pintu





				58	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1. Jumlah Penerbitan izin	950	12,757	1	
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air	Pengem- bangan konektivitas dan pembangun-	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan	59	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana	100	100	100	Dinas Perumahan dan Permukiman
	bersih	an infrastruktur secara terpadu dan merata	sanitasi yang sehat, layak dan aman			Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	100	100	100	
				60	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	42,72	77,42	181	
				61	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	6,70	2,90	43	
					PERMUKIMAN KUMUH	Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN	517	617	119	
				62	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi	4,48	0,99	22	



		(PSU)	baik				
	63	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh	92,16	80,20	87	
			Rabupaten Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan (50 Unit)	1,03	1,02	99	
	64	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	86,68	89,1	103	
	65	PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Strategis Daerah	80	80	100	Dinas Pekerjaan Umum
	66	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun	1	2	200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan





						Timbulan sampah	97,64	45	46	
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas	Penguatan Kesiapan Pembangun-	Penyiapan perubahan Rencana Tata	67	PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	75	75	100	Dinas Pertanahan
	wilayah	an IKN	Ruang Wilayah sebagai acuan pembangunan kawasan di lokasi IKN	68	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,80	0,70	88	Dinas Pekerjaan Umum
						2. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten	0,06	0,17	283	
						3. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur	0,03	0,03	100	



				69	PROGRAM PENYELENGGARA- AN JALAN	pengaman pantai di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten 4. Kondisi Kemantapan Jalan	64,66	62	96	
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan	Pemulihan daya dukung lingkungan	70	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		berkelanjut- an		71	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi	200.000,0	200.000,00	100	
				72	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Dokumen Kajian timbulan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara	3	3	100	
				73	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	19,32	50,63	262	





				IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten				
			74	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama	5	6	120	
					Jumlah Penghargaan Yang Diberikan	128	116	91	
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	Penguatan mitigasi dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	75	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100	100	100	Dinas Sosial
			76	PROGRAM PENANGGULANG- AN BENCANA	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	15,11	44,80	296	Badan Penanggu- langan Bencana
					Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap	16,55	0	0	Daerah



				Bencana				
					100	100	100	
				Persentase	100	100	100	
				pelayanan				
				penyelamatan				
				dan evakuasi				
				korban bencana	100			
		77	PROGRAM	Persentase	100	87,72	88	Dinas
			PENCEGAHAN,	Pemenuhan				Pemadam
			PENANGGULANG-	Tingkat waktu				Kebakaran
			AN, PENYELAMAT-	tanggap				dan
			AN KEBAKARAN	(response time				Penyelamat-
			DAN	rate) daerah				an
			PENYELAMATAN	layanan Wilayah				
			NON KEBAKARAN	Manajemen				
				Kebakaran				
				(WMK)				
				Jumlah				
				pembentukan				
				Balakarcana				
				(Barisan	70	70	100	
				Sukarela				
				Pemadam				
				Kebakaran)				
				Cakupan				
				Layanan				
				Pemadaman,				
				Penyelamatan	100	87,20	87	
				dan Evakuasi				
				Korban				
				Kebakaran				

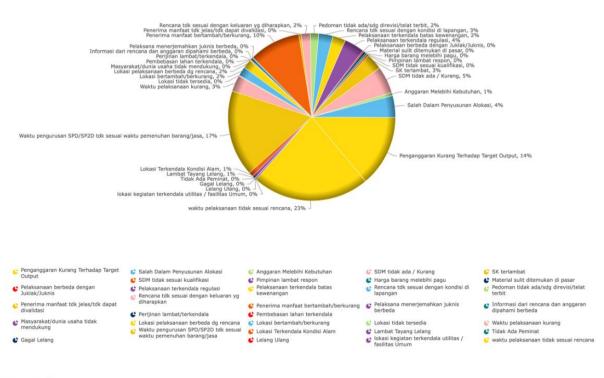


Pada akhir tahun 2024, upaya intensif dan akselerasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja program prioritas pembangunan RKPD telah menunjukkan hasil yang signifikan. Pencapaian rata-rata tahapan pelaksanaan program prioritas RKPD tahun 2024 meningkat menjadi 97,5 % (sembilan puluh tujuh koma lima persen). Dari 76 (tujuh puluh enam) program prioritas, kini 73 (tujuh puluh tiga) program telah melampaui tahapan pelaksanaan 90 % (sembila puluh persen), sebuah peningkatan yang mencerminkan komitmen kuat dan kerja keras dari semua pihak terkait. Akselerasi ini tidak hanya berhasil meningkatkan pencapaian target indikator yang merupakan outcome dari pelaksanaan program, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kesuksesan ini merupakan bukti nyata dari efektivitas strategi dan upaya bersama dalam mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

2.3. FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2024

Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui aplikasi e-Pantau melakukan penggalian informasi atas kendala atau permasalahan yang menjadi penghambat dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Berdasarkan hasil identifikasi, permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian output dan program dalam pelaksanaan RKPD 2024 hingga triwulan IV / Semester II disajikan pada gambar sebagai berikut:

Gambar II - 21 Progres Pelaksanaan dan Permasalahan



Di Kabupaten Kutai Kartanegara, upaya pemerintah dalam menjalankan RKPD tahun 2024 telah mengalami beberapa rintangan. Meskipun 87,7 % (delapan puluh tujuh koma tujuh persen) dari kegiatan tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan, ada permasalahan yang merintangi kelancaran pelaksanaan program. Salah satu isu yang muncul adalah fluktuasi jumlah penerima manfaat yang bertambah atau berkurang, mencerminkan kemungkinan ketidakpastian dalam pendataan atau perubahan dalam kondisi lapangan yang mempengaruhi kelayakan penerima.

Ditemukan pula bahwa kurangnya penganggaran sebesar 1% (satu persen) terhadap target *output* menandakan adanya kesenjangan antara perencanaan dan realisasi anggaran, yang dapat menghambat kemajuan kegiatan jika tidak segera ditanggulangi. Selain itu, waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana, serta kekurangan dalam alokasi waktu pelaksanaan, menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan waktu dan efisiensi pelaksanaan.

Isu teknis juga mencuat, seperti pelaksana yang berbeda pendapat dalam menafsirkan petunjuk teknis, yang menunjukkan potensi kebingungan dan ketidakseragaman dalam implementasi kegiatan. Pedoman yang belum tersedia atau sedang direvisi, bisa memperlambat proses administratif. Hal tersebut terjadi salah satunya dari perangkat Daerah yang kurang merencanakan regulasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga terkesan gagap dalam mengantisipasi persoalan tersebut dari tahun ke tahun.

Terkadang, kondisi alam menjadi penghambat, seperti lokasi yang tidak dapat diakses atau terpengaruh oleh bencana alam, mengharuskan adanya penyesuaian atau penundaan dalam pelaksanaan kegiatan. Kendala pembebasan lahan juga sering menjadi hambatan, memperlambat atau bahkan menghentikan proyek. Sedangkan dalam hal pengadaan, ketersediaan barang dan jasa yang belum terdaftar di e-Katalog atau harga yang melebihi pagu anggaran menjadi masalah yang memerlukan solusi kreatif dan negosiasi.

Kesalahpahaman informasi terkait rencana dan anggaran bisa berujung pada kesalahan eksekusi, membutuhkan upaya komunikasi yang lebih baik dan klarifikasi yang berkelanjutan. Sementara itu, variabilitas dan keterbatasan lokasi, baik karena perbedaan dengan rencana atau keterkaitan dengan utilitas umum, menuntut fleksibilitas dan adaptasi yang tinggi dari tim pelaksana.

Proses lelang yang gagal atau *e-procurement* yang tidak berjalan lancar dapat menghambat kemajuan dan harus segera ditangani untuk menghindari penundaan lebih lanjut dalam implementasi program.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus mengambil langkah proaktif untuk mengatasi kendala-kendala ini. Dibutuhkan koordinasi yang lebih baik antar instansi, peningkatan kapasitas para pelaksana, serta penyesuaian anggaran yang responsif. Selain itu, pengembangan rencana kontingensi yang solid untuk menghadapi kendala alam dan perubahan kondisi di lapangan juga sangat penting.

2.4. FAKTOR PENDORONG PELAKSANAAN RKPD 2024

Berdasarkan capaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun 2024, faktor-faktor pendorong yang memainkan peran penting dalam kesuksesan pelaksanaannya terdiri dari beberapa aspek kunci:

1) Peningkatan Kolaborasi

Ada peningkatan signifikan dalam kerjasama antara seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini vital dalam mendukung kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah, menciptakan lingkungan kerja yang lebih terintegrasi dan mendukung realisasi tujuan yang telah ditetapkan.

2) Perbaikan Dokumen Perencanaan

Penyesuaian atas hasil yang dicapai pada Triwulan IV atau Semester II pada RKPD 2023 Perubahan telah menghasilkan indikator yang lebih baik dan konsistensi dalam perencanaan. Pemutakhiran dokumen ini membantu dalam menciptakan alur kerja yang lebih terstruktur dan hasil yang dapat diprediksi.

3) Monitoring dan Evaluasi

Implementasi monitoring dan evaluasi yang teratur, bersama dengan rapat koordinasi dan meja pengendalian pembangunan, mendorong Perangkat Daerah untuk terus meningkatkan kinerjanya. Ini menunjukkan bahwa ada proses pengawasan yang berkelanjutan, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan.

4) Pemanfaatan Aplikasi e-Pantau:

Terdapat peningkatan pemahaman yang signifikan di antara aparatur di Perangkat Daerah mengenai pemanfaatan aplikasi e-Pantau. Aplikasi ini berperan sebagai alat yang memungkinkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pelaksanaan kegiatan.

5) Komitmen Pimpinan Daerah:

Tingginya komitmen dari Pimpinan Daerah serta Perangkat Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi landasan utama untuk peningkatan kinerja. Komitmen ini mencerminkan dedikasi yang kuat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RKPD.

Peningkatan ini merupakan buah dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan dan adaptasi dengan perubahan kondisi merupakan kunci untuk memastikan bahwa RKPD tidak hanya tetap relevan tetapi juga berhasil dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

2.5. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan analisa data aspek pembangunan daerah dan rumusan permasalahan pembangunan daerah, maka isu strategis pembangunan tahun 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut.

a. Implementasi Reformasi Birokrasi Secara Menyeluruh

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) serta melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Selain itu, reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Pada tahun 2023 ini, implementasi reformasi birokrasi lebih diarahkan kepada reformasi birokrasi tematik dan berdampak, dengan empat tema pelaksanaan reformasi birokrasi tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual presiden. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan pengendalian inflasi.

b. Peningkatan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia

Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki *values* dan berketerampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi. Hal ini menjadi penting mengingat sebagian besar tenaga kerja di Kutai Kartanegara hanya memiliki pendidikan sekolah dasar bahkan belum tamat sekolah dasar maupun belum pernah mengenyam pendidikan. Tentu saja ini menimbulkan keprihatinan tersendiri karena secara umum pendidikan/keterampilan tenaga kerja akan berbanding lurus dengan pendapatan yang diterima.

Pendidikan merupakan kunci utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat maupun daerah dalam memeratakan seluruh layanan pendidikan kepada masyarakat yang tinggal di suatu wilayah, dalam hal ini Kabupaten Kutai Kartanegara.

Masih rendahnya capaian pendidikan masyarakat, khususnya angkatan kerja, menjadikan pemerataan layanan pendidikan sebagai prioritas bagi stakeholder beserta perangkat daerah penunjangnya. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, perlu adanya koordinasi dan inovasi dalam perwujudan pemerataan layanan pendidikan ini, khususnya penggunaan teknologi informasi yang mempermudah setiap aktivitas pembangunan selama ini.

Sebagai daerah yang memiliki beberapa daerah dengan geografis sulit, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kendala dalam mengakses seluruh wilayah sehingga menyebabkan permasalahan bagi pelayanan publik yang seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tak terkecuali pelayanan kesehatan, dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu adanya pelayanan kesehatan yang berkualitas secara merata di seluruh wilayah Kutai Kartanegara tanpa terkecuali. Namun dalam kenyataannya, saat ini aksesibilitas seluruh masyarakat menuju fasilitas kesehatan cukup terbatas, bahkan meskipun penyediaan puskesmas dan puskesmas pembantu sudah tersebar, namun kualitas fasilitas kesehatan beberapa wilayah juga terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya strategi khusus dalam

penanganan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah terpencil/terpelosok demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat Kutai Kartanegara yang lebih baik.

c. Pemulihan dampak COVID-19 dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Saat ini dunia internasional mengalami suatu fenomena yang serius dimana suatu penyakit virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) menyebar ke berbagai negara di dunia dan menyebabkan timbulnya penyakit COVID-19 (Corona Virus Desease – 2019) pada hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara juga memiliki kasus positif COVID-19 dengan tingkat peningkatan pasien positif terus meningkat meskipun tingkat kesembuhan cukup baik. Meskipun begitu, antisipasi dan pencegahan terus diupayakan agar masyarakat mampu melawan COVID-19.

Secara umum, beberapa sektor cukup terdampak akibat terjadinya pandemi ini, khususnya perekonomian Kutai Kartanegara yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Kalimantan Timur. Hal ini berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat baik dikarenakan kesehatan menurun, keresahan masyarakat meningkat, iklim investasi tidak kondusif, hingga kondisi perekonomian yang tidak stabil. Oleh karena itu, dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu adanya perhatian khusus dalam penanganan dan pemulihan dampak wabah ataupun pandemi, khususnya COVID-19 untuk mengembalikan kehidupan masyarakat menjadi normal seperti sedia kala. Kondisi ini sejalan pula dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dengan target tahun 2024 sebesar 0%.

d. Pengembangan perekonomian berkelanjutan

Sebagai jantung dari pelaksanaan pembangunan, peningkatan berbagai sektor ekonomi Daerah akan memberikan daya dukung signifikan bagi pencapaian visi pembangunan Daerah. Namun adanya aktivitas perekonomian Daerah seringkali menimbulkan dampak ikutan yang negatif, dimana salah satunya adalah degradasi kualitas lingkungan hidup. Sebagai daerah yang memiliki dominasi pada sektor pertambangan dan penggalian, tentu saja memerlukan pengawasan melekat terhadap setiap upaya pemanfaatan sumber daya alam tak terbarukan tersebut.

Hal ini sejalan dengan konsep SDG's dimana isu lingkungan global lebih ditekankan dan diprioritaskan untuk pembangunan lebih baik. Adapun 3 (tiga) pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDG's yaitu, pertama indikator yang melekat pembangunan manusia (Human Development), diantaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan kecilnya (Social Economic Development), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (Environmental Development), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, tetapi ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan, diantaranya segala sesuatu itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip Environmental Sustainability, Economic Sustainability dan Social Sustainability, serta juga ditentukan apakah ini difokuskan pada negara berkembang atau negara maju.

Struktur ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh sektor perekonomian pertambangan dan penggalian yang merupakan sumber daya tak terbarukan. Hal ini tentu menjadi keresahan tersendiri disamping akan merusak lingkungan hidup, juga akan meninggalkan dampak negatif bagi daerah. Oleh karena itu, isu strategis ini perlu diupayakan menjadi salah satu fokus utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan, khususnya perekonomian dan lingkungan hidup.

e. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

Pada tanggal 18 Januari 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah menyetujui pengesahan undang-undang ibu kota negara. Adanya perkembangan ini maka proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dapat dilaksanakan. Setelah pengesahan ini, tentu saja banyak "Pekerjaan Rumah" yang harus dibenahi, khususnya Rencana Induk atau *Masterplan*. Pemindahan ibu kota negara ini merupakan proses panjang, sehingga penetapan undang-undang ibu kota negara ini menjadi batu pondasi bagi teknis pemindahan ibu kota negara hingga tahun 2045. Tak hanya pemindahan ibu kota negara saja, namun pada tahun 2045, ibu kota negara dengan nama "Nusantara" diharapkan menjadi "Kota Dunia Untuk Semua" baik sebagai kota terdepan di dunia dalam hal daya saing; menjadi 10 besar *livable city* di dunia; dan pencapaian *net zero-carbon emission* dan 100% (seratus persen) energi terbarukan pada kapasitas terpasang.

Pada kondisi pembangunan Daerah, pemindahan ibu kota negara ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara akan berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara umum, persoalan lingkungan, ekonomi, dan sosial kependudukan akan menjadi sektor terdampak pada pembangunan IKN. Meskipun hanya kecamatan Samboja yang direncanakan menjadi IKN, namun hal tersebut akan memberikan *multiplier effect* pada seluruh wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam merespon pemindahan Ibu Kota Negara tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kondisi dalam mempersiapkan pembangunan ibu kota negara seperti Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada dasarnya mendukung penuh pelaksanaan pembangunan IKN; Kabupaten Kutai Kartanegara akan menjadi daerah mitra IKN dengan standar dan peradaban baru; Keberhasilan pelaksanaan pembangunan IKN memerlukan koordinasi, kerjasama dan kemitraan berbagai pihak antara lain Pusat (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, pelaku usaha dan berbagai pihak lainnya; dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyiapkan beberapa langkah yang perlu dukungan dari Dewan Perwakilan Daerah terutama kompensasi fiskal dari berkurangnya wilayah Kabupaten Kukar untuk pembangunan IKN.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya melakukan percepatan sebagai pendukung Ibu Kota Negara melalui beberapa kebijakan sebagai berikut.

- 1. Penyelesaian Perda RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 2. Penyiapan SDM Aparatur dan Masyarakat;
- 3. Penataan Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- 4. Konsolidasi dan Penataan Manajemen Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 5. Komunikasi, Dialog dan Sosialisasi kepada Masyarakat; dan
- 6. Koordinasi, Komunikasi dan Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga.
- f. Pemerataan Ketersediaan Infrastruktur Dasar untuk Penguatan Wilayah Keberhasilan pemerataan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana serta infrastruktur pembangunan yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas- fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset infrastruktur

yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Pembangunan infrastruktur Kabupaten Kutai Kartanegara merujuk pada penyediaan sarana perhubungan/transportasi, kelistrikan, telekomunikasi, air bersih, perumahan layak huni, sanitasi yang sehat, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Peningkatan berbagai infrastruktur pembangunan daerah diharapkan akan berdampak langsung pada perekonomian daerah kesejahteraan masyarakat, terlebih pembangunan Ibu Kota Negara akan segera direalisasikan.

g. Transformasi dan Percepatan Pembangunan Desa dan Kecamatan

Tranformasi dan percepatan pembangunan desa dan kecamatan merupakan upaya untuk membentuk kemandirian desa. Kemandirian desa merupakan kemampuan yang dimiliki pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemandirian desa dilaksanakan melalui pembangunan desa yang sudah direncanakan cukup lama sehingga saat ini bergulir program dana desa untuk peningkatan kemampuan desa. Pada dasarnya, membangun desa dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Desa, setidaknya mencakup upaya-upaya mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat desa di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian pada transformasi dan percepatan pembangunan di Kutai Kartanegara pada level desa dan kecamatan seperti penguatan kinerja pelayanan desa dan kecamatan, pelaksanaan otonomi desa melalui penggunaan dana desa yang efektif dan efisien, serta menjadikan kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta pusat pemerintahan.

h. Penataan Ruang dan Sumber Daya Air (Air Baku dan Irigasi)

Dari sisi perencanaan tata ruang wilayah, persoalan mendasar pada perencanaan penataan ruang dikarenakan masih terdapatnya perbedaan pola ruang dan kurang harmonisnya dokumen perencanaan ruang antara RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota serta belum tersedianya rencana detil tata ruang provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini akan

menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan baik dari sisi kecenderungan penurunan kualitas lingkungan maupun dalam infrastruktur tata kota.

Irigasi menjadi bagian penting dari proses pembangunan sektor pertanian, kondisi pelayanan irigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2023 dalam kondisi baik mencapai 64,09 % (enam puluh empat koma nol sembilan persen) dengan total luas wilayah irigasi sebesar 13.429,43 ha (tiga belas ribu empat ratus dua puluh sembilan koma empat puluh tiga hektar). Pada tahun 2023 jumlah luas panen padi di Kutai Kartanegara seluas 27.697 ha (dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh hektar) dengan produksi sebesar 121.203 (seratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga ton) dan tingkat produktivitas sebesar 3,86 ton/ha (tiga koma delapan puluh enam ton per hektar).

2.6. CAPAIAN PENYELENGGARAAN SPM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik pemerintah provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

Setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masingmasing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Adapun petunjuk teknis urusan pemerintahan wajib yang berkaitan

dengan pelayanan dasar yaitu.

- SPM terkait urusan sosial melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di daerah Kabupaten/Kota.
- 2. SPM terkait urusan kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- 3. SPM terkait pekerjaan umum sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
- 4. SPM terkait urusan pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

Perlu untuk menerjemahkan dan mengintegrasikan SPM kedalam Renstra dan Renja-PD, terutama pengampu urusan wajib pelayanan dasar dan melaksanakan evaluasi capaian SPM secara berkala. Capaian pelaksanaan SPM yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut.

Tabel II - 197 Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

	Jenis					
No	Urusan	OPD	Jenis	Indikator	Capaian	Capaian
110	Pelayanan	Pelaksana	Layanan	mulkator	2023	2024
	Dasar					
1	Pendidikan	Dinas	Pendidikan	Jumlah Warga	88,23%	99,96%
		Pendidikan	Anak Usia	Negara Usia 5-6		
		dan	Dini	Tahun yang		
		Kebudayaan		berpartisipasi		
				Dalam PAUD		
2			Pendidikan	Jumlah Warga	104,74%	100%
			Dasar	Negara Usia 7-15		
				Tahun yang		
				berpartisipasi		
				Dalam Pendidikan		
				Dasar (SD/MI,		
				SMP/MTS)		

	Jenis					
No	Urusan	OPD	Jenis	Indikator	Capaian	Capaian
110	Pelayanan	Pelaksana	Layanan	mulkator	2023	2024
	Dasar					
3			Pendidikan	Jumlah Warga	81,28%	100%
			Kesetaraan	Negara Usia 7-18		
				Tahun yang		
				berpartisipasi		
				Dalam Pendidikan		
				Kesetaraan (yang		
				belum		
				menyelesaikan		
				pendidikan dasar		
				dan atau menengah		
				yang berpartisipasi		
				dalam pendidikan		
				kesetaraan)		

Tabel II - 208 Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

No	Jenis Urusan Pelayanan Dasar	OPD Pelaksana	Jenis Layanan	Indikator	Capaian 2023	Capaian 2024
1	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	91,79%	95,53%
2			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	95,46%	82,95%
3			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan	93,13%	90,94%
4			Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	87,66%	94,53%
5			Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	99,15%	94,54%
6			Pelayanan Kesehatan pada usia	Persentase orang berusia 15-59 tahun	95,32%	96,93%

No	Jenis Urusan Pelayanan Dasar	OPD Pelaksana	Jenis Layanan	Indikator	Capaian 2023	Capaian 2024
			produktif	yang mendapatkan layanan kesehatan		
7			Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan Layanan Kesehatan	91,54%	93,52%
8			Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	93,61%
9			Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	92,70%
10			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Jumlah orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	95,93%
11			Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis	Persentase Jumlah orang orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	94,61%
12			Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemah daya tahan tubuh manusia (HIV)	Persentase Jumlah orang orang dengan risiko terinfeksi virus yang Melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	94,20%





Tabel II - 219 Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Urusan Pelayanan Dasar	OPD Pelaksana	Jenis Layanan	Indikator	Capaian 2023	Capaian 2024
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100%	100%
2			Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda dan Perkada sesuai Mutu	Persentase Penegakan Perda dan Perkada Sesuai Mutu	100%	100%
3		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	78,21%	100%
4			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	49,22%	100%
5			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%

No	Jenis Urusan Pelayanan Dasar	OPD Pelaksana	Jenis Layanan	Indikator	Capaian 2023	Capaian 2024
6			Pelayanan	Jumlah	95,15%	100%
			Penyelamatan	Warga Negara		
			dan Evakuasi	Yang		
			Korban	Memperoleh		
			Kebakaran	Layanan		
				Pelayanan		
				Penyelamatan		
				dan Evakuasi		
				Korban		
				Kebakaran		

Tabel II - 50 Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

	Jenis					
N.T	Urusan	OPD		T 1'1 4	Capaian	Capaian
No	Pelayanan	Pelaksana	Jenis Layanan	Indikator	2023	2024
	Dasar					
1	Sosial	Dinas	Rehabilitasi	Persentase (%)	100%	100%
		Sosial	Sosial Dasar	Penyandang		
			Penyandang	Disabilitas		
			Disabilitas	Terlantar yang		
			Terlantar di	terpenuhi		
			Luar Panti	kebutuhan		
			Sosial	dasarnya di luar		
				panti		
2			Rehabilitasi	Persentase (%)	100%	100%
			Sosial Dasar	Anak Terlantar		
			Anak	yang terpenuhi		
			Terlantar di	kebutuhan		
			luar Panti	dasarnya di luar		
			Sosial	panti		
3	1		Rehabilitasi	Persentase (%)	100%	100%
			Sosial Dasar	Lanjut Usia		
			Lanjut Usia	Terlantar yang		
			Terlantar di	terpenuhi		
			luar Panti	kebutuhan		
			Sosial	dasarnya di luar		
				panti		
4			Rehabilitasi	Persentase (%)	100%	100%
			Sosial Dasar	Gelandangan dan		
			Tuna Sosial	Pengemis yang		
			Khususnya	terpenuhi		
			Gelandangan	kebutuhan		
			dan Pengemis	dasarnya di luar		
			di Luar Panti	panti		
			Sosial			
5	1		Perlindungan	Persentase (%)	100%	100%
			dan Jaminan	Korban Bencana		
			Sosial pada	alam dan Sosial		
			Saat dan	yang terpenuhi		
			Setelah	Kebutuhan		
			Tanggap	Dasarnya pada		
			Darurat	saat dan setelah		

No	Jenis Urusan Pelayanan Dasar	OPD Pelaksana	Jenis Layanan	Indikator	Capaian 2023	Capaian 2024
			Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten /	tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten		

Tabel II - 51 Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman

Jenis Urusan Pelayanan Dasar	OPD Pelaksana	Jenis Layanan	Indikator	Capaian 2023	Capaian 2024
Pekerjaan	Dinas	Pemenuhan	Jumlah Rumah	80,32%	100%
Umum					
			-		
			_		
	remukiman	Senan-nan	hari		
		Penyediaan	Jumlah Rumah	66,77%	100%
		Pelayanan	Tangga yang		
		Pengelolaan	mendapatkan		
		Air Limbah	layanan pengelolaan		
		Domestik	air limbah domestik		
		Penyediaan	Jumlah Warga	100%	100%
dan	Perumahan	dan			
Kawasan	dan				
Pemukiman			-		
	Pemukiman		Layak Huni		
		•	•	100%	100%
			0 0		
		•			
		_			
		•	-		
			Kulliali Layak Hulli		
		_			
	Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum Perumahan dan	Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Perumahan dan Pemukiman Perumahan dan An	Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman Pemukiman Penyediaan Pengelolaan Air Limbah Domestik Perumahan dan Perumahan dan Rehabilitasi Pemukiman Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Perumahan Rawasan Penyediaan Rehabilitasi Remukiman Rawasan Pemukiman Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Perumahan Rawasan Rehabilitasi Rumah	Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman Pemukiman Perumahan Air Limbah Domestik Perumahan dan Rawasan Pemukiman Perumahan dan Pemukiman Pemukiman Pemukiman Pengelolaan Air Limbah Domestik Perumahan dan Rehabilitasi Rorban Pemukiman Pemukiman Pemukiman Pemukiman Pemukiman Pemukiman Pemukiman Pemukiman Rawasan Pemukiman Pemukiman Pemukiman Rawasan Pemukiman Pemukiman Rawasan Pemukiman Pemukiman Rawasan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Relokasi Program Pemerintah Rawasan Rumah Layak Huni Rawasan Rumah Relokasi Program Pemerintah Rawasan Rumah Rawasan Rumah Rawasan Rumah Relokasi Program Pemerintah	Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman Perumahan dan Pemukiman Perumahan dan Pemukiman Penyediaan Perumahan dan Pemukiman Perumahan dan Pemukiman Penyediaan dan Perumahan dan Perumahan dan Pemukiman Pemukiman Pemukiman Pemukiman Pemukiman Penyediaan dan Rehabilitasi Rorban Pemukiman Pemukiman Penyediaan Rehabilitasi Rorban Bencana Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Tindikator 2023 80,32% 80,3

INOVASI PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan suatu inovasi yang berguna bagi

adanya inovasi diharapkan mampu masyarakat. Dengan Daerah meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kepuasan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang, wadah, peluang dan kesempatan kepada aparatur birokrasi dan masyarakat untuk mengembangkan ide, gagasan, dan kreativitas dalam rangka menciptakan inovasi yang bermanfaat untuk pembangunan Daerah dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Inovasi Daerah yang akan dilaksanakan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II - 52 Inovasi Kabupaten Kutai Kartanegara

	rabel II - 52 illovasi Kabupateli Kutai Kartanegara					
No	Nama Inovasi	Keterangan				
1.	"BECIK" BEBAYA ETAM CIPTAKAN INFORMASI KOLABORATIF KUTAI KARTANEGARA (SATU DATA KUTAI KARTANEGARA)	Becik merupakan aplikasi yang dibangun dalam rangka menyediakan sistem pendataan terintegrasi dalam pendekatan jenjang tanggung jawab pejabat struktural pada masing-masing perangkat Daerah dan dapat diintegrasikan ke jenjang kewilayahan. Sistem ini dibangun didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. a. Manfaat Internal dari aplikasi ini, yaitu Sebagai bahan evaluasi pembangunan daerah berdasarkan target-target pembangunan yang tercantum di dalam RPJMD dan Renstra; Mendistribusikan penanggung jawab data berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di Perangkat Daerah, yang dapat digunakan sebagai bagian dari evaluasi kinerja masing-masing pejabat structural dalam penyediaan data; Mempermudah proses analisis data dengan data yang terstandard dalam satu sumber, sehingga konsistensi data dapat dijaga dan dipertanggungjawabkan. Proses input dilaksanakan secara online, sehingga dapat dikontrol secara realtime b. Manfaat Internal dari aplikasi ini, yaitu Dapat diakses secara terbuka secara online data-data pembangunan dalam kategori data terbuka. Data terpublis secara series sehingga seluruh pengguna data dapat melakukan analisis sesuai dengan kebutuhan. Dalam pelaksanaannya aplikasi ini bergantung kepada keaktifan perangkat Daerah, sehingga keberhasilan pelaksanaan inovasi ini tergantung dari keaktifan perangkat Daerah.				
2	Kukar Asia Wonders Pembentukan Logo Branding Kabupaten Kutai Kartanegara	Pembentukan logo branding sangat relevan dengan adanya kekayaan SDM dan SDA Kutai Kartanegara sebagai penunjang keberagaman multikultural dari berbagai segi kehidupan masyarakat pesisir (hilir). Kesultanan (tengah) dan pedalaman (hulu), yang masing-masing punya ciri khas yang kuat pada setiap daerahnya dan kan tetap menjadi identitas yang patut untuk dipertahankan, dengan semakin mengangkat simbol kepercayaan lokal terhadap sosok yang juga diagungkan dalam mitologi dari kerajaan Kutai Ing Martadipura. Lembuswana merupakan penggabungan dari seluruh elemen kekuatan berbagai hewan yang dijadikan				

No	Nama Inovasi	Keterangan
		satu kesatuan sehingga sangat selaras dengan
		keanekaragaman suku dan budaya.
3	BangMUs Kebulan (Pengembangan Kemitraan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Berbasis Sistem Informasi Pendaftaran dan Kemitraan Usaha Perkebunan)	keanekaragaman suku dan budaya. Manfaat dari aplikasi ini, yaitu Mengangkat, mempromosikan dan mengoptimalkan potensi Kutai Kartanegara Potensi Alam. Adventure in nature. Tempat-tempat keindahan alam untuk berpetualang. Potensi Sejarah. Bangunan "PENINGGALAN" bersejarah. Candi & Situs, Rumah Adat, Kraton, Bangunan Kuno. Potensi Wisata. Objek wisata yang memiliki fungsi edukatif, wisata hiburan untuk keluarga, wisata adat/religi/ kepercayaan, wisata budaya, desa wisata (kampung tematik) Wisata Edukasi. Objek wisata yang memiliki fungsi edukatif. Museum (Arkeologi, Seni & Budaya), Kampung Tematik Edukatif Wisata Keluarga. Wisata yang sengaja dibuat untuk tujuan wahana hiburan & rekreasi bagi keluarga Wisata Keligi. Objek wisata yang berhubungan dengan tempat ibadah, tempat-tempat suci - bangunan masjid kuno, makam & petilasan raja, sunan, dll. Wisata Budaya. Event-event atau festival seni budaya contoh - Pameran Kerajinan, Carnival, Fashion, Tari, Musik Desa Wisata (Kampung Tematik). Objek wisata yang berbasis pada potensi lokal & inovasi meliputi. a. Desa Agro Wisata b. Desa Tenun c. Desa Adat Potensi Budaya. friendly people, creative people, exotic culture, arts & crafts, performing arts hub, cultural festival center, authentic culinary. I. Inovasi dimulai dengan upaya percepatan penerbitan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Budidaya Perkebunan Rakyat. Penyiapan konsep naskah Peraturan Bupati dilakukan oleh Tim Internal Dinas Perkebunan kemudian dibahas dengan melibatkan perangkat daerah/instansi terkait serta perwakilan lembaga pekebun dan asosiasi di bidang usaha perkebunan hemudian dibahas dengan melibatkan perangkat daerah/instansi terkait serta perwakilan lembaga pekebun dan asosiasi di bidang usaha perkebunan hemudian dibahas dengan melibatkan peraneangan dan melakukan uji coba penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran dan Kemitraan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (SiDa_RaKAT), yang kontennya mencakup (3) tiga sub aplikasi yaitu untuk . a. Pengajuan, proses dan pemberi
		yang terkait dengan kemitraan;



No	Nama Inovasi	Keterangan
		d. Implementasi inovasi, yang meliputi pelaksanaan pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan dan fasilitasi kemitraan usaha perkebunan berbasis aplikasi sistem informasi
4	"KIDUNG" KUTAI KARTANEGARA SIAP MENDAMPINGI DAN MELINDUNG	Inovasi Kidung adalah. Suatu pendekatan pendampingan dan perlindungan terhadap laporan kasus-kasus KDRT terhadap Perempuan dan Kekerasan pada anak secara proaktif melalui metode penjangkauan dengan memanfaatkan tekhnologi informasi (4.0) dan transportasi (Mobile) agar dapat direspon secara cepat dan tanggap dari laporan yang diterima untuk ditangani memeperhatikan hambatan dan tantangan sebagaimana kondisi geografis daerah serta dinamika perubahan kehidupan masyarakat yang kompleks, penuh desrupsi, terutama antisipasi terhadap Perpindahan ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan organisai penyelenggara termasuk Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA) berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
5	SIRUNI (SISTIM INFORMASI RUMAH LAYAK HUNI)	Deskripsi tentang inovasi yang menjelaskannya secara singkat. 1. Aplikasi Berbasis web dan Smartphone 2. Masalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Belum Bisa terverifikasi. 3. Pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 4. Membangun Aplikasi Data untuk Rumah Layak Huni. Penerima manfaat . Memperoleh Basis data RTLH Kab. Kutai Kartanegara Dampak/keuntungan/manfaat. Masyarakat Penerima Manfaat Sesuai program dedikasi
6	"SMART BIO VILLAGE"	LATAR BELAKANG DESA RAMAH LINGKUNGAN 1. Kondisi Kebersihan Kab.Kutai Kartanegara 2. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 3. Gotong Royong Masyarakat yang mulai Luntur Desa Ramah Lingkungan bertujuan untuk mendorong Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat untuk memahami permasalahan lingkungan dan dampaknya, serta melakukan tindakan nyata secara proaktif yang berkontribusi kepada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melibatkan 237 desa/kelurahan Dengan target 71 Desa/Kelurahan

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan perekonomian merupakan faktor utama dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam menentukan kebijakan ekonomi, langkah yang diambil tidak mudah karena perlu mengenali karakter ekonomi, sosial, fisik daerah serta interaksi dengan daerah sekitar. Menentukan kualitas perencanaan pembangunan daerah, perlu mengkaji pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai aspek sehingga membentuk kerangka ekonomi. Selain itu juga melihat kemampuan keuangan daerah yang didalamnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara keseluruhan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam menentukan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan perlu optimalisasi capaian pembangunan daerah dengan besaran anggaran yang telah direncanakan.

Rumusan perencanaan pembangunan Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, yang diharapkan mampu mewujudkan ketercapaian target pembangunan yang telah disusun dalam dokumen RPJMD untuk pelaksanaan pembangunan Tahun 2026. Oleh karena itu, rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah daerah diharapkan akan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi daerah pada tahun sebelumnya dan memperkirakan kondisi ekonomi dalam melaksanakan pembangunan pada Tahun 2026 untuk mewujudkan target pembangunan daerah. Analisis ekonomi melalui indikator makro ekonomi daerah dilakukan dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah. Analisis ekonomi makro diperlukan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan pada tahapan pembangunan daerah sehingga dapat melihat arah kebijakan perekonomian pada Tahun 2026.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1. Dinamika Perekonomian Global

Empat tahun paska Pandemi Covid-19, situasi perekonomian global masih diwarnai ketidakpastian. Berbagai peristiwa ekonomi dan persoalan geopolitik telah mendorong terjadinya perlambatan ekonomi di tingkat global. Hal tersebut menyebabkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2024 dan 2025 diperkirakan tetap stabil namun relatif lemah, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,2% (tiga koma dua persen). Perkiraan ini sejalan dengan pembaruan *World Economic Outlook* pada Juli 2024 dan laporan April 2024.

Pada negara maju, pertumbuhan ekonomi seperti di negara Amerika Serikat mengalami peningkatan, tetapi penurunan terjadi di negara-negara besar Eropa. Ekonomi negara maju cenderung lebih cepat mencapai target inflasi dibandingkan negara berkembang. Adapun pada negara berkembang, pertumbuhan di Asia berkembang meningkat berkat permintaan semikonduktor dan elektronik, yang didukung oleh investasi besar dalam teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Adapun sebaliknya, kawasan Timur Tengah, Asia Tengah, dan Afrika Sub-Sahara menghadapi revisi ke bawah akibat gangguan produksi dan distribusi komoditas, konflik, kerusuhan sipil, dan cuaca ekstrem.

Inflasi global diperkirakan turun dari 6,7 % (enam koma tujuh persen) pada 2023 menjadi 5,8 % (lima koma delapan persen) pada 2024 dan 4,3 % (empat koma tiga persen) pada 2025. Penurunan ini didorong oleh stabilnya harga barang, meskipun inflasi jasa tetap tinggi di beberapa wilayah. Kondisi ini dipicu oleh beberapa hal seperti ketegangan geopolitik dapat memicu lonjakan harga komoditas, memperlambat proses disinflasi, dan menunda pelonggaran kebijakan moneter; penurunan tajam atau berkepanjangan di sektor properti China dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan dan dampak negatif bagi perdagangan global; dan kebijakan proteksionis dapat memperburuk efisiensi pasar, mengganggu rantai pasokan, dan menekan pertumbuhan global.

Pertumbuhan ekonomi global 5 (lima) tahun mendatang diperkirakan tetap moderat pada 3,1 % (tiga koma satu) persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata sebelum pandemi. Hal ini disebabkan oleh hambatan struktural seperti penuaan populasi dan rendahnya produktivitas. Oleh karena itu dibutuhkan beberapa strategi kebijakan dalam rangka menghadapi tantangan perekonomian di masa mendatang seperti penyesuaian kebijakan

fiskal diperlukan untuk memastikan keberlanjutan utang publik, sambil memberikan perlindungan bagi kelompok rentan; reformasi struktural diperlukan untuk meningkatkan prospek pertumbuhan jangka menengah; dan kerja sama multilateral penting untuk mempercepat transisi hijau dan mendukung restrukturisasi utang, serta mengurangi risiko fragmentasi ekonomi global.

3.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Ekonomi di berbagai wilayah Republik Indonesia pada triwulan III 2024 tetap kuat. Ekonomi Kalimantan diprakirakan tumbuh meningkat didorong perbaikan investasi dan konsumsi pemerintah sejalan dengan percepatan pembangunan infrastruktur di IKN. Percepatan penyelesaian proyek infrastruktur juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di Sumatera. Pertumbuhan ekspor yang tetap positif menjadi penopang perekonomian Sulawesi, Maluku, dan Papua. Di Jawa, pertumbuhan ekonomi Jawa tetap solid, didukung kinerja perdagangan luar negeri yang positif, investasi yang meningkat seiring prospek ekspor yang lebih baik, dan belanja pemerintah daerah yang bertambah untuk persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak sebagaimana juga terjadi di Bali dan Nusa Tenggara. Berbagai kondisi tersebut terkonfirmasi dari kinerja Lapangan Usaha (LU) utama di masing-masing wilayah. Investasi IKN mendorong LU konstruksi di Kalimantan. Kinerja eksternal mendukung peningkatan LU Industri di Jawa dan di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sementara itu, aktivitas LU Akmamin di Bali dan Nusa Tenggara masih menjadi penopang ekonomi di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan tahun 2024, perekonomian di mayoritas wilayah diprakirakan membaik dan perlu terus didorong. Perbaikan ekonomi Bali dan Nusa Tenggara didukung oleh kinerja ekspor pasca-penerbitan izin ekspor tembaga, sementara terjaganya permintaan ekspor batu bara dari mitra dagang utama menopang perbaikan ekonomi di Kalimantan. Di Sulawesi, Maluku, dan Papua, perbaikan kinerja ekonomi didorong oleh peningkatan realisasi investasi PSN, pembangunan kawasan industri dan *smelter*. Sementara itu, kinerja ekonomi Sumatera yang lebih tinggi dari prakiraan dipengaruhi investasi dan kinerja ekspor komoditas CPO dan batu bara. Pertumbuhan ekonomi di Jawa ditopang belanja pemerintah dan investasi meski tidak sekuat prakiraan awal. Perbaikan ekonomi di daerah, terkonfirmasi dari kinerja LU utama di masing-masing wilayah. Perbaikan ekonomi di seluruh wilayah perlu terus didorong terutama melalui kebijakan

reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat struktur ekonomi, termasuk pada lapangan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja. Pembahasan mengenai strategi kebijakan dimaksud akan dibahas secara khusus pada Bab III Isu Strategis "Mendorong Pemulihan Sektor Padat Karya untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Inklusif".

Inflasi IHK pada triwulan III 2024 menurun di mayoritas provinsi. Secara nasional, inflasi IHK pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 1,84 % (satu koma delapan puluh empat persen) years on year (yoy), melambat dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya yakni 2,5±1% (dua koma lima plus minus satu persen) year on year (yoy). Realisasi inflasi tersebut masih berada pada rentang sasaran inflasi IHK nasional 2,5±1% (dua koma lima plus minus satu persen) year on year (yoy). Penurunan inflasi IHK pada triwulan III 2024 disumbang terutama oleh kelompok bergejolak (volatile food/VF), seiring dengan peningkatan pasokan pascapanen beberapa komoditas pangan strategis didukung kondisi cuaca yang kondusif untuk produksi. Selain itu, inflasi kelompok diatur pemerintah (administered price/AP) menurun di sebagian besar provinsi. Di sisi lain, inflasi inti meningkat di mayoritas daerah. Peningkatan tersebut dipengaruhi salah satunya oleh kenaikan harga emas perhiasan seiring dengan kenaikan harga emas global. Berdasarkan wilayahnya, hanya empat provinsi dengan capaian inflasi di atas rentang sasaran, dengan inflasi tertinggi di Papua Pegunungan sebesar 4,14% (empat koma empat belas persen) years on year (yoy).

Inflasi IHK keseluruhan tahun 2024 dalam 2,5±1% (dua koma lima plus minus satu persen) *year on year (yoy)*, didukung sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah. Secara spasial, inflasi di seluruh wilayah juga diprakirakan terkendali. Inflasi yang terkendali tersebut didukung oleh konsistensi kebijakan moneter dan eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan pemerintah (pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1% (dua koma lima plus minus satu persen) *year on year (yoy)* pada 2024 dan 2025.

Berbagai dinamika perekonomian global perlu terus dicermati. Ekonomi Amerika Serikat diprakirakan mulai melambat pada semester II-2024. Sementara itu, prospek ekonomi Tiongkok belum kuat dipengaruhi

permintaan domestik yang masih lemah. Di sisi lain, harga komoditas minyak dan pangan diprakirakan melambat di tengah perkiraan kenaikan harga logam. Faktor-faktor tersebut berpotensi meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan global dan berpengaruh terhadap prospek pertumbuhan ekonomi dunia, yang pada akhirnya berdampak pada prospek ekonomi di berbagai wilayah.

3.1.3. Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur

Ekonomi Kalimantan Timur pada triwulan III 2024 melanjutkan pertumbuhan positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan ekonomi nasional dan regional Kalimantan. Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 5,52% (lima koma lima puluh dua persen) pada year on year (yoy). Meskipun melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi Kalimantan Timur pada periode laporan tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan regional Kalimantan. LU pertambangan masih menjadi pendorong utama perkonomian Kalimantan Timur, meskipun melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya akibat produksi dan permintaan batu bara yang melandai. Selain itu, kinerja LU konstruksi juga melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, sejalan dengan komponen PMTB di komponen pengeluaran, seiring dengan progress pembangunan IKN yang termoderasi pasca pelaksanaan HUT RI ke-79 hingga akhir triwulan III 2024. Sementara itu, komponen ekspor tetap tumbuh positif didorong oleh kinerja ekspor fertilizers.

Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hingga triwulan III 2024 menunjukkan kinerja positif seiring dengan fokus pembangunan infrastruktur strategis di wilayah Kalimantan Timur. Realisasi pendapatan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan pertumbuhan positif hingga triwulan III 2024, terutama berasal dari komponen PAD yang pangsanya mencapai 44,62% (empat puluh empat koma enam puluh dua persen) terhadap total pendapatan. Secara spasial, Kota Samarinda memiliki realisasi pendapatan dan belanja terbesar, yaitu masing-masing sebesar 81,12% (delapan puluh satu koma dua belas persen) dan 49,65% (empat puluh sembila koma enam puluh lima persen). Tingginya realisasi belanja Kota Samarinda didorong oleh pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional XXX Tahun 2024. Sementara dari sisi pendapatan, tingginya realisasi pendapatan di Samarinda didorong oleh realisasi pajak serta TKDD (terutama realisasi DBH SDA Minerba, termasuk DAU). Dari sisi APBN,

realisasi pendapatan maupun belanja juga tumbuh, didorong terutama oleh peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sejalan dengan hal tersebut, belanja APBN juga mengalami peningkatan seiring dengan alokasi anggaran yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN).

Inflasi Kalimantan Timur terjaga dalam rentang target inflasi nasional dan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya seiring penurunan harga berbagai komoditas pangan dan angkutan udara. Pada triwulan III 2024, inflasi Kaltim tercatat sebesar 2,16% (dua koma enam belas persen) year on year (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan tekanan inflasi tersebut disebabkan oleh pasokan komoditas pangan yang melimpah seiring tibanya masa panen komoditas hortikultura di sentra produksi serta penurunan tarif angkutan udara seiring penambahan jadwal penerbangan. Namun demikian, penurunan inflasi yang lebih dalam pada periode laporan tertahan oleh kenaikan harga emas perhiasan seiring dengan kenaikan harga emas global. Adapun secara spasial, inflasi Kabupaten/Kota Kalimantan Timur tertinggi tercatat di Kabupaten Berau sebesar 3,34% (tiga koma tiga puluh empat persen) year on year (yoy) dan terendah di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 1,73% (satu koma tujuh puluh tiga persen) year on year (yoy), dengan tren laju inflasi di seluruh Kabupaten/Kota melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Kinerja intermediasi perbankan di Kalimantan Timur pada triwulan III 2024 melanjutkan pertumbuhan positif dengan risiko yang tetap terjaga. Penyaluran kredit tumbuh sebesar 7,25% (tujuh koma dua puluh lima persen) year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara sektoral, penyaluran kredit sektor pertambangan tumbuh sebesar 21,74% (dua puluh satu koma tujuh puluh empat persen) year on year (yoy), mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh 5,39% (lima koma tiga puluh sembilan persen) year on year (yoy). Adapun jika ditinjau berdasarkan penggunaannya, kredit konsumsi tumbuh sebesar 15,52% (lima belas koma lima puluh dua persen) year on year (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya, sejalan dengan pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Kinerja penyaluran kredit ini didukung oleh terjaganya risiko kredit (Non Performing Loan/NPL) di level rendah yakni sebesar 1,24% (satu koma dua puluh empat persen), yang menunjukkan pengelolaan risiko yang baik oleh perbankan di Kalimantan Timur. Di sisi lain, penghimpunan dana pihak

ketiga (DPK) tumbuh positif sebesar 5,08% (lima koma nol delapan persen) year on year (yoy), meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, namun masih berada di atas rata-rata nasional. Selain itu, inklusivitas keuangan di Kalimantan Timur juga terus didorong, seiring kredit UMKM yang terus tumbuh positif dengan risiko kredit yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sektor usaha mikro, kecil dan menengah di Kalimantan Timur terus berkembang dan mendapatkan dukungan yang kuat dari perbankan.

Transaksi sistem pembayaran nontunai mengalami kontraksi, sedangkan transaksi tunai mengalami *net outflow* dari wilayah Kalimantan Timur. Pada triwulan III tahun 2024, transaksi nontunai melalui infrastruktur Bank Indonesia (SKNBI dan BI RTGS) mengalami kontraksi baik dari sisi nominal maupun volume tranksaksi. Kontraksi transaksi tersebut sejalan dengan melambatnya beberapa LU di Kalimantan Timur. Pada periode yang sama, transaksi menggunakan instrumen pembayaran APMK berupa ATM/Debit, Kredit, Uang Elektronik (UE) juga mengalami pertumbuhan. Kanal pembayaran QRIS mengalami pertumbuhan signifikan sejalan dengan gencarnya kegiatan edukasi dan sosialisasi transaksi nontunai kepada masyarakat. Di sisi lain, transaksi tunai mencatatkan posisi *net outflow* sejalan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat Kalimantan Timur dan realisasi belanja Pemerintah Daerah, terutama dengan menggunakan transaksi nontunai.

Sejalan dengan kinerja ekonomi yang masih cukup tinggi, kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan turut menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja beberapa sektor utama seperti sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor industri pengolahan saat ini masih menjadi pendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sejalan dengan ketenagakerjaan yang membaik tersebut, kesejahteraan masyarakat juga lebih baik, terindikasi dari penurunan tingkat kemiskinan, penurunan ketimpangan pendapatan, serta kesejahteraan petani yang lebih baik.

Di tengah tekanan geopolitik dan fragmentasi perdagangan global serta transisi pemerintahan domestik, prospek perekonomian Kalimantan Timur diprakirakan masih tetap tumbuh solid, dengan tingkat inflasi yang diperkirakan berada pada rentang sasaran. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada 2024 diprakirakan tetap optimis tumbuh pada rentang 5,50% – 6,30% (lima koma lima puluh persen sampai dengan enam koma tiga puluh persen) year on year (yoy) dengan kecenderungan bias bawah dari prakiraan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut utamanya ditopang oleh permintaan batu bara yang masih tetap optimis, baik dari domestik maupun ekspor, di tengah melambatnya LU konstruksi seiring termoderasinya progres pembangunan IKN dan proyek swasta di penghujung tahun. Kondisi penyusutan alami sumur pengeboran turut menahan laju LU industri pengolahan, meskipun terdapat potensi peningkatan target penyerapan B30 dan uji coba B40. Kendati demikian, LU pertambangan sebagai penopang utama ekonomi Kalimantan Timur, diprakirakan masih tumbuh lebih tinggi, seiring dengan optimisme target produksi terhadap permintaan ekspor batu bara memasuki musim dingin. Lebih lanjut, koreksi pertumbuhan lebih dalam juga tertahan seiring potensi peningkatan aktivitas perdagangan menjelang HBKN, namun masih pada level yang terjaga yang sejalan dengan masifnya upaya pengendalian inflasi dengan target inflasi di kisaran 2,5±1% (dua koma lima plus minus satu persen) year on year (yoy).

3.1.4. Arah Kebijakan Ekonom Kabupaten Kutai Kartanegara

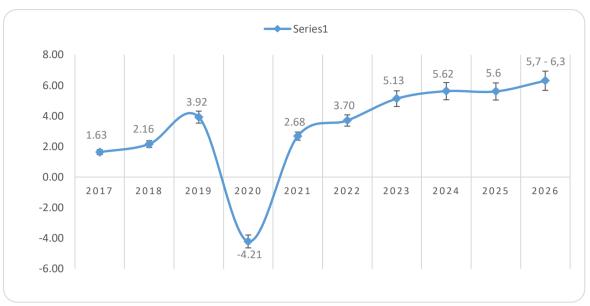
Secara umum arah kebijakan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan pada percepatan pemulihan ekonomi nasional serta akselerasi pertumbuhan pada sektor-sektor yang potensial. Hal ini sesuai dengan misi ke-3 (tiga) Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD dimana Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Hal ini sangat penting mengingat kinerja perekonomian Kutai Kartanegara selama ini masih sangat tergantung pada ekspor komoditas batu bara, minyak dan gas yang juga sangat tergantung dengan fluktuasi harga dan permintaan di tingkat global. Selain itu, aktivitas perekonomian Daerah, utamanya pertambangan dan penggalian, seringkali menimbulkan dampak ikutan yang negatif berupa degradasi kualitas lingkungan.

Untuk mengantisipasi hal ini, perlu upaya untuk menggali sekaligus mengoptimalkan sektor-sektor ekonomi yang berbasis wilayah dan memiliki dampak dan keberlangsungan dalam jangka panjang. Untuk itu, optimalisasi sektor ekonomi sekunder dan tersier menjadi sebuah alternatif agar keberlangsungan pertumbuhan ekonomi di Kutai Kartanegara terus terjaga. Penguatan pembangunan ekonomi diharapkan dapat dicapai melalui

peningkatan kemandirian dan inovasi ekonomi yang bertumpu pada upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dan mengalihkannya secara bertahap kepada pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbaharui.

Secara umum, kinerja perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara baik. sebelum pandemi tercatat cukup Pada masa (2017-2023),perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat tumbuh baik berkisar antara -4,21 % (minun empat koma dua puluh satu persen) hingga 5,13 % (lima koma tiga persen). Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 3,92 % (tiga koma sembilan puluh dua persen) dimana kondisi ini menurun signifikan hingga terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar -4,21 % (minus empat koma dua puluh satu persen) di tahun 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19. Sementara pada masa pemulihan dan pasca-pandemi, perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara juga tercatat tumbuh cukup baik, bahkan mampu tumbuh lebih tinggi dari perkiraan di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu. Hal itu terlihat dari kinerja ekonomi pada tahun 2021 yang mampu tumbuh positif sebesar 2,68 % (dua koma enam puluh delapan persen). Bahkan, pada tahun 2022, ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara mampu tumbuh menguat sebesar 3,70 % (tiga koma tujuh puluh persen), capaian tahun 2023 sebesar 5,13 % (lima koma tiga belas persen) dan capaian tahun 2024 meningkat menjadi 5,62 % (lima koma enam puluh dua persen). Capaian yang cukup baik ini menunjukkan bahwa meskipun situasi ekonomi global sedang tidak menentu, namun perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara mampu bertahan dan tumbuh di atas ekspektasi banyak pihak. Selain menunjukkan adanya perbaikan ekonomi yang terus menjadi sinyal optimisme dalam rangka perwujudan visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2026.

Gambar III - 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2024 dan Proyeksi Tahun 2024-2026



Sumber: BPS 2024, diolah

Dengan mempertimbangkan situasi ekonomi global dan nasional serta perencanaan pembangunan jangka panjang maupun rancangan teknokrat RPJMD, maka kinerja ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 hingga 2026 diperkirakan akan mengalami kenaikan hingga mencapai 6,91 % (enam koma sembilan puluh satu persen) pada tahun 2026. Meskipun begitu, terdapat beberapa catatan terkait kinerja ekonomi Kutai Kartanegara pada tahun 2024-2026 yakni pertama, aktivitas di sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan akan tumbuh melambat sebagai imbas dari melemahnya permintaan global akibat menurunnya harga komoditas energi pada tahun 2024 dan 2026. Pada tahun 2024 hingga tahun 2026, harga komoditas energi diperkirakan akan menurun seiring dengan melimpahnya stok pada tingkat global. Kedua, aktivitas ekspor komoditas andalan Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu batubara dan minyak bumi, diperkirakan akan menurun akibat telah terlewatinya masa puncak harga komoditas di tingkat global. Ketiga, situasi geopolitik global diperkirakan masih akan tetap bergejolak, yang diperkirakan juga akan menganggu aktivitas ekspor-impor komoditas energi dan permintaan global.

Untuk melihat seberapa besar perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024-2026, maka dapat melihat proyeksi kinerja ekonomi negara-negara mitra dagang Kalimantan Timur (termasuk mitra dagang Kabupaten Kutai Kartanegara). Pertama, pertumbuhan ekonomi China, yang merupakan mitra dagang utama Kalimantan Timur, diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,6 % (empat koma

enam persen) pada tahun 2024 dan kemudian sedikit melambat menjadi 4,1 % (empat koma satu persen) pada tahun 2025. Kedua, India yang menjadi negara tujuan ekspor terbesar kedua diperkirakan akan tumbuh melambat sebesar 6,5 % (enam koma lima persen) pada tahun 2024 dan tahun 2025. Ketiga, Filipina yang menjadi tujuan ekspor terbesar ketiga juga diperkirakan akan tumbuh menguat menjadi 6,0 % (enam persen) pada tahun 2024 dan kembali tumbuh menguat menjadi 6,1 % (enam koma satu persen) pada 2025. Kelima, Jepang diperkirakan akan tumbuh melambat sebesar 0,9 % (nol koma sembilan persen) pada 2024 dan 0,8 % (nol koma delapan persen) pada 2025. Keenam, Malaysia yang juga menjadi negara tujuan ekspor utama diperkirakan akan tumbuh menguat sebesar 4,3 % (empat koma tiga persen) pada 2024 dan kembali menguat menjadi 4,4 % (empat koma empat persen) pada tahun 2025.

Tabel III.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara Mitra Dagang Provinsi Kalimantan Timur, 2023-2025

Negara Tujuan Ekspor Utama Kalimantan Timur	Persentase Negara Tujuan Ekspor Kaltim	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)
China	32,25 %	5,2	4,6	4,1
India	15,05 %	6,7	6,5	6,5
Filipina	9,32 %	5,3	6,0	6,1
Jepang	9,02 %	1,9	0,9	0,8
Malaysia	5,42 %	4,0	4,3	4,4
ASEAN		4,2	4,7	4,4
Indonesia		5,1	5,0	5,0

Sumber: BPS dan WEO IMF Januari 2023, diolah

Dengan memperhatikan dinamika ekonomi Daerah dan proyeksi pertumbuhan negara-negara mitra dagang Kalimantan Timur dan Kutai Kartanegara di atas, maka kita optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026 diperkirakan masih akan mampu tumbuh positif dengan besaran antara hingga 6 % -7 % (enam hingga tujuh persen).

Kabupaten Kutai Kartanegara telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan eksternal, termasuk dampak pandemi COVID-19. Analisis laju pertumbuhan ekonomi dengan proyeksi untuk tahun 2025 sebesar 6,66 % (enam koma enam puluh enam persen) dan tahun 2026 sebesar 6,91 % (enam koma sembilan puluh satu persen) akan memberikan gambaran mengenai potensi dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan target pertumbuhan

ekonomi tersebut, sebagai berikut:

- a. Tahun 2025: Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,66 % (enam koma enam puluh enam persen), Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat mempertahankan momentum positif dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi hingga tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi yang stabil diharapkan didukung oleh investasi yang lebih baik dalam infrastruktur dan sektor-sektor ekonomi utama seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif; dan
- b. Tahun 2026: Proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,91 % (enam koma sembilan puluh satu persen) menunjukkan optimisme terhadap potensi ekonomi daerah untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi. Dengan terus meningkatnya investasi dan perbaikan kondisi ekonomi global, Kabupaten Kutai Kartanegara dapat memanfaatkan peluang ini untuk memperkuat daya saing ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terlebih sebagai wilayah penyangga IKN, diharapkan pembangunan infrastruktur akan mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kutai Kartanegara.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi tinggi, terutama pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Dengan mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang berfokus pada diversifikasi sumber daya ekonomi dan penguatan infrastruktur, diharapkan dapat memperkuat daya saing daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja baru. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan kebijakan makro ekonomi daerah:

1. Penguatan Sektor Pertanian:

- a. meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam sektor pertanian melalui penerapan teknologi modern dan praktik pertanian yang berkelanjutan; dan
- b. mendukung petani lokal dengan penyediaan akses terhadap pembiayaan, pelatihan, dan pasar yang stabil.

2. Penguatan Sektor Pariwisata:

 a. memanfaatkan potensi wisata alam dan budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menarik wisatawan domestik dan internasional; dan b. pengembangan infrastruktur pariwisata yang mendukung aksesibilitas dan pengalaman wisata yang memikat.

3. Stimulasi Sektor Ekonomi Kreatif:

- a. mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, seperti seni dan kerajinan, fashion, kuliner, dan industri kreatif digital; dan
- b. memberikan dukungan dalam hal pelatihan, akses ke pasar, dan promosi produk-produk lokal.

4. Diversifikasi Sumber Daya Ekonomi:

- a. mengurangi ketergantungan pada sektor ekspor batubara dan migas dengan diversifikasi ekonomi ke sektor-sektor yang lebih berkelanjutan dan berpotensi tinggi; dan
- b. mendorong investasi dalam industri pengolahan hasil pertanian dan pengembangan energi terbarukan.

5. Penguatan Infrastruktur Dasar:

pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan akses transportasi lainnya untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan memperlancar distribusi produk.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam pasal 285 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijabarkan pendapatan dan belanja daerah sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi daerah khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Dana transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara menerima pendapatan transfer

pemerintah pusat melalui Dana Perimbangan.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer yang diuraikan sebagai berikut:

- belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial;
- 2. belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, serta belanja aset lainnya;
- 3. belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- 4. belanja transfer merupakan pengeluaran uang dan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang terdiri atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

3.2.1. Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan Daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan Daerah melalui pendapatan asli daerah agar dalam jangka panjang proporsi dana dari pemerintah pusat dapat diturunkan, serta ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi Daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumber daya manusia dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender dan pranata sosial.

Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat serta reformasi sistem perpajakan daerah. Sedangkan ekstensifikasi difokuskan pada upaya penyesuaian regulasi atas pengelolaan retribusi daerah serta upaya penambahan objek retribusi berdasarkan potensi perkembangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

a. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah dan Upaya Pencapaian
Target

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan Daerah Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun;
- 2) seluruh pendapatan Daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil; dan
- 3) pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- b. Pendapatan Daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan Daerah yang terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a) target pendapatan daerah dari kelompok PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan;
 - b) dalam upaya peningkatan PAD, Pemerintahan Daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

- c) upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai dengan potensi pungutan;
- 2) Pendapatan Transfer
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Secara lebih rinci realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2023 dan APBD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.2 Realisasi Pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2024 dan APBD 2025

Uraian		Anggaran 2025			
Uraian	TA.2021	TA.2022	TA.2023	TA.2024	Aliggaran 2025
PENDAPATAN	3.689.893.245.759,00	6.773.479.020.245,00	7.735.629.987.008,89	12.586.549.868.076,60	11.500.000.000.000,00
PENDAPATAN ASLI	430.783.242.768,00	567.762.071.164,00	926.949.182.460,89	787.600.555.382,88	953.088.447.204,00
DAERAH (PAD)					
Pendapatan Pajak Daerah	114.967.277.996,00	142.595.205.607,00	141.989.565.534,00	165.870.568.096,40	364.451.980.000,00
Pendapatan Retribusi	4.008.704.812,00	5.332.179.084,00	6.278.232.985,00	5.879.733.796,00	487.820.481.700,00
Daerah					
Pendapatan Hasil	19.593.267.856,00	21.232.144.049,00	63.147.803.556,59	88.368.259.737,59	44.145.888.234,00
Pengelolaan Kekayaan					
Daerah yang Dipisahkan					
Lain-lain PAD Yang Sah	292.213.992.104,00	398.602.542.424,00	715.533.580.385,30	527.481.993.752,89	56.670.097.270,00
PENDAPATAN TRANSFER	3.259.110.002.991,00	6.205.716.949.081,00	6.800.950.076.148,00	11.718.016.357.386,00	10.296.911.552.796,00
Pendapatan Transfer	2.818.472.208.991,00	5.637.081.367.645,00	5.935.454.199.771,00	10.841.265.771.317,00	9.597.752.673.327,00
Pemerintah Pusat					
Pendapatan Transfer	40.517.992.000,00	-	-	229.896.073.000,00	
Pemerintah PusatLainnya					
Transfer Antar Daerah	400.119.802.000,00	568.635.581.436,00	865.495.876.377,00	646.854.513.069,00	699.158.879.469,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN	-	-	7.730.728.400,00	80.932.955.307,69	250.000.000.000,00
DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah	-	-	3.567.000.000,00	0,00	
Lain-lain Pendapatan	-	-	4.163.728.400,00	80.932.955.307,69	250.000.000.000,00
sesuai Ketentuan					
Peraturan Perundang-					
undangan					

Sumber: BAPENDA Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2024



3.2.2. Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip – prinsip penganggaran, belanja Daerah tahun anggaran 2025 tetap disusun dengan pendekatan anggaran berbasis prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja Daerah tahun 2026 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Kebijakan perencanaan belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran 2026 sebagai berikut:

- 1) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- 2) Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 3) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Daerah, termasuk investasi bidang pendidikan.
- 4) Penyusunan belanja Daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Selain urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud di atas, terdapat urusan penunjang yang juga diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, meliputi : a) perencanaan, b) keuangan, c) kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, d) penelitian dan pengembangan, dan juga e) fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Belanja secara kelompok terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Dalam perencanaan kebijakan belanja tersebut dilakukan dengan memproyeksikan berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Tahun Anggaran 2026, kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyusunan belanja tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, antara lain terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk mengalokasikan kompensasi yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi belanja pegawai tersebut antara lain berupa gaji/uang representasi dan tambahan penghasilan pegawai tunjangan, ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan umum lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan dan honorarium. Dalam merencanakan belanja pegawai diperhitungkan "accres" gaji paling tinggi 2,5% (dua koma lima persen) yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi.

b) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa dalam rangka program Pemerintah Daerah yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan

termasuk barang dan jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

c) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

d) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD) dan/atau badan usaha milik swasta yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

(e) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dengan kemampuan keuangan daerah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya termasuk partai politik. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(f) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja

bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- 2. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya dan memenuhi kriteria :
 - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) digunakan dalam kegiatan pemerintahan Daerah; dan
 - 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.
- 3. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga (BTT) dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.
- 4. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa dialokasikan dalam belanja bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus.

Secara lebih rinci realisasi belanja Daerah Tahun 2020-2023 dan anggaran Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.3 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2024 Dan APBD Tahun 2025

Uraian	Realisasi				Anggaran 2025
Oraian	TA.2021	TA.2022	TA.2023	TA.2024	Aliggaran 2025
BELANJA	4.714.130.498.075	5.475.960.549.797	8.738.964.430.237	12.692.749.948.841,20	12.000.000.000.000
BELANJA OPERASI	3.283.287.430.381	3.672.269.131.103	5.488.954.020.826	6.274.425.812.558,94	7.011.186.845.486
Belanja Pegawai	1.666.440.967.314	1.660.706.849.284	1.674.450.614.412	2.031.277.587.743,00	2.470.351.101.822
Belanja Barang dan Jasa	1.557.359.716.067	1.904.457.460.898	3.496.984.548.413	3.971.759.719.252,94	4.431.801.620.084
Belanja Subsidi	-	94.194.315	64.400.000	101.040.120,00	140.704.000
Belanja Hibah	58.453.247.000	90.036.576.606	276.561.083.001	246.099.465.443,00	105.602.869.580
Belanja Bantuan Sosial	1.033.500.000	16.974.050.000	40.893.375.000	25.188.000.000,00	3.290.550.000
BELANJA MODAL	1.026.367.434.969	1.171.734.721.350	3.250.010.409.411	5.298.641.625.823,25	3.749.518.315.711
Belanja Modal Tanah	15.358.489.143	22.828.252.727	48.525.311.811	62.606.649.543,00	80.059.485.319
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	234.889.069.195	273.027.320.038	1.140.595.589.153	1.286.285.840.180,00	665.128.413.534
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	221.986.615.076	187.440.891.917	758.677.243.101	1.646.496.068.022,73	1.155.012.549.945
Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan	548.105.072.658	672.563.911.292	1.259.065.569.347	2.281.781.596.417,52	1.736.639.784.173
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.028.188.897	15.874.345.376	42.482.642.499	5.811.543.160,00	23.320.170.250
Belanja Modal Aset Lainnya		-	664.053.500	15.659.928.500,00	89.357.912.490
BELANJA TAK TERDUGA	84.714.812.822	10.717.074.540	-	0,00	50.000.000.000
Belanja Tak Terduga	84.714.812.822	10.717.074.540	-	-	50.000.000.000
TRANSFER	319.760.819.903	621.239.622.804	-	1.119.682.510.459,00	1.189.294.838.803
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	319.760.819.903	621.239.622.804	-	1.119.682.510.459,00	1.189.294.838.803
Belanja Bagi Hasil			-	0,00	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	310.160.819.903	621.239.622.804	-	1.102.928.228.459	1.152.365.875.203
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	9.600.000.000	-	-	16.754.282.000,00	36.928.963.600

Sumber: BPKAD Kab. Kutai Kartanegara. 2024



3.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Daerah sebagaimana yang tergambar pada diarahkan pada:

- meningkatkan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa;
- 2) menggunakan Sisa Lebih Perhitngan Angaran (SiLPA) untuk pembayaran pembentukan dana cadangan;
- 3) SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran; dan
- 4) penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Secara lebih rinci realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2023 dan anggaran Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.4 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2021-2024 Dan APBD Tahun 2025

Uraian		Realisasi				
Oralan	TA.2021	TA.2022	TA. 2023	TA. 2024	2025	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.137.661.945.621	842.321.882.488	2.806.073.504.761	295.973.787.749	500.000.000.000	
Penggunaan SiLPA	1.137.661.945.621	842.321.882.488	2.806.073.504.761	295.973.787.749	500.000.000.000	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	24.400.000.000	3.750.000.000	105.874.000.000	24.045.000.000	0	
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	24.400.000.000	3.750.000.000	105.874.000.000	24.045.000.000	0	

PEMBIAYAAN	1.113.261.945.621	838.571.882.487	2.700.199.504.761	271.928.787.749	
NETTO					
SISA LEBIH	842.366.182.489	2.806.136.462.965	295.974.053.392	165.935.483.219	
PEMBIAYAAN					
ANGGARAN					
(SILPA)					

Sumber: BPKAD Kab. Kutai Kartanegara 2024

3.3. KERANGKA PENDANAAN

3.3.1. Proyeksi Pendanaan

Proyeksi penerimaan untuk Tahun 2026 diharapkan pendapatan Daerah yang akan datang dapat meningkat lebih tinggi dengan dilakukan upaya peningkatan pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk pelaksanaan pembangunan. Adapun upaya untuk meningkatkan pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pendapatan daerah dan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara intensif dan berkesinambungan;
- 2) pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi;
- 3) menetapkan dan membuat strategi baru dalam memungut pajak dan retribusi:
- 4) meningkatkan pelayanan dalam pembayaran pajak dan retribusi dengan sistem *online*;
- 5) peningkatan pengawasan terhadap perangkat Daerah penghasil PAD sehingga target PAD terpenuhi; dan
- 6) menggali potensi retribusi baru untuk meningkatkan penerimaan.

Proyeksi pendapatan tahun 2026 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut

Tabel III.5 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026

No	Uraian	Tahun 2026			
INO	Oraian	RPJMD	Rancangan RKPD		
1	PENDAPATAN	4.348.000.000.000,00	7.352.883.259.000		
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	668.227.105.022,00	737.494.503.850		
а	Pendapatan Pajak Daerah	221.120.560.982,00	277.500.000.000		
	Pendapatan Retribusi				
b	Daerah	4.902.861.180,00	356.319.550.000		
	Pendapatan Hasil				
С	Pengelolaan Kekayaan	32.120.806.628,00	80.045.000.000		

	Daerah Yang Dipisahkan		
	Lain-lain Pendapatan Asli		
d	Daerah yang Sah	410.082.876.232,00	23.629.953.850
2	PENDAPATAN TRANSFER	3.679.772.894.978,00	6.534.000.000.000
	TRANSFER PEMERINTAH		
2.1	PUSAT	3.340.994.836.978,00	5.684.000.000.000
а	Dana Perimbangan	3.315.660.680.978,00	5.684.000.000.000
	Dana Transfer Umum - Dana		
a.1.	Bagi Hasil (DBH)	2.715.660.680.978,00	5.684.000.000.000
	Dana Transfer Umum - Dana		
a.2.	Alokasi Umum	600.000.000.000,00	-
b	Dana Insentif Daerah	25.334.156.000,00	-
2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	338.778.058.000,00	850.000.000.000
а	Pendapatan Bagi Hasil	338.778.058.000,00	850.000.000.000
	LAIN-LAIN PENDAPATAN		
3	YANG SAH	0	81.388.755.150
3.1	Pendapatan Hibah	0,00	
3.2	Dana Darurat	0,00	
3.3	Lain-lain Pendapatan	0,00	81.388.755.150

Sumber Data: BAPENDA dan BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2024

3.3.2. Proyeksi Belanja Tahun 2026

Untuk menentukan pagu indikatif maka harus dibuat proyeksi atas belanja Daerah. Pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang perhitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun 2026 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026, sehingga kebijakan belanja tidak berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu pemenuhan belanja wajib yaitu belanja pemenuhan mandatory dan belanja mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa berupa operasional rutin perkantoran, serta belanja prioritas daerah yaitu belanja pemenuhan SPM, belanja program dedikasi dan belanja prioritas daerah lainnya dalam rangka pemenuhan prioritas provinsi dan nasional. Adapun gambaran tentang proyeksi belanja tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.6 Proyeksi Belanja 2026 (Rp Juta)

Urajan	Rancangan Akhir
Oraian	RKPD 2026
BELANJA	7.502.883.259.000,00
BELANJA OPERASI	5.201.974.962.960,80
Belanja Pegawai	2.443.779.624.721,98
Belanja Barang dan Jasa	2.699.358.504.238,82
Belanja Subsidi	150.000.000,00
Belanja Hibah	55.826.034.000,00
Belanja Bantuan Sosial	2.860.800.000,00
BELANJA MODAL	1.454.909.703.970,21
Belanja Modal Tanah	22.044.236.054,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	164.222.669.288,75
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	601.931.956.459,03
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	661.021.449.168,43
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.751.801.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	937.592.000,00
BELANJA TAK TERDUGA	27.827.637.058,00
Belanja Tak Terduga	27.827.637.058,00
TRANSFER	818.170.955.011,00
Belanja Bagi Hasil	63.381.955.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	754.789.000.011,00

Sumber Data: BPKAD Kutai Kartanegara Tahun 2024

3.3.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2026

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui. penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Tabel III.7 Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026

	Rancangan
Uraian	RKPD 2026
PEMBIAYAAN DAERAH	150.000.000.000,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	150.000.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	150.000.000.000,00
Sebelumnya (SiLPA)	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-

Sumber: BPKAD Kab. Kutai Kartanegara 2024

3.3.4. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2026

Perhitungan kerangka pendanaan digunakan untuk menilai seberapa banyak anggaran yang bisa dialokasikan untuk pelaksanaan pembangunan yang telah dikurangi dengan Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas. Secara rinci kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Table III - 8 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 (Rp)

	Τ .			
Urajan	Tahun 2026			
Oraidii	RPJMD	Rancangan Akhir RKPD 2026		
Pendapatan	4.348.000.000.000	7,352,883,259,000.00		
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	668.227.105.022	737,494,503,850.00		
Pendapatan Transfer	3.679.772.894.978	6,534,000,000,000.00		
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	81,388,755,150.00		
Total Penerimaan	4.348.000.000.000	7,352,883,259,000.00		
Dikurangi				
Belanja & Pengeluaran Pembiayaan yang	3.541.490.015.840	5.201.974.962.960,80		
Wajib dan Mengikat				
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN	806.509.984.160	2,150,908,296,040.00		
KEUANGAN				

Sumber: BPKAD Kab. Kutai Kartanegara 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja

langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagian besar belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas seperti belanja pegawai (gaji, Tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/sub kegiatan.

Kapasitas riil yang tersedia akan dialokasikan pada pendanaan pada pelaksanaan pembangunan Tahun 2026 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Prioritas I, merupakan program pemenuhan Standar Pelayanan a. Minimal (SPM) yang merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Terhadap belanja daerah ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut, maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat. Program ini berhubungan dengan program yang berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan. Berdasarkan hasil perhitungan RKPD Tahun 2026, alokasi bidang pendidikan sebesar Rp1.566.730.270.511,00 (satu triliun lima ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus sebelas rupiah) atau 21,58 % (dua puluh satu koma lima puluh alokasi bidang delapan persen), kesehatan sebesar 1.327.442.538.847,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh tujuh miliar

empat ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) atau 26 % (dua puluh enam persen), pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara (ASN) sebesar Rp13.950.000.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh juta) atau sebesar 0,18% (nol koma delapan belas persen) dan alokasi bidang infrastruktur sebesar Rp2.321.677.331.673,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau sebesar 45 % (empat puluh lima persen).

- b. Prioritas II, merupakan program pembangunan Daerah dengan Visi dan Misi atau program unggulan/dedicated Kepala Daerah yang definitif harus dilaksanakan oleh Daerah pada periode lima tahun mendatang. Program prioritas II berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, serta memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.
- c. Prioritas III, merupakan program penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya yaitu antara lain arah belanja Daerah yang merupakan dukungan belanja terhadap prioritas nasional dan provinsi dalam rangka mendukung keterkaitan pencapaian antara sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dengan sasaran nasional (RPJMN) dan prioritas provinsi (RPJMD Provinsi).

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD Tahun 2026 merupakan lanjutan pembangunan pada tahun 2025, yang sebagaimana tertuang dalam RPJMD periode 2021-2026. Dalam RKPD Tahun 2026, kebijakan pembangunan tahunan berpedoman pada pembangunan jangka menengah pembangunan Kutai Kartanegara periode 2021-2026. Dalam menyusun perencanaan tersebut, tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan rumusan perencanaan pembangunan jangka menengah sesuai dengan prioritas pembangunan Tahun 2026 yang tertuang dalam RPJMD. Prioritas pembangunan Kutai Kartanegara sendiri merupakan fokus atau agenda pembangunan yang bersifat strategis untuk mencapai sasaran dan berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara dalam RPJMD dari tahun ke tahun. Prioritas pembangunan daerah dalam RKPD harus memenuhi berbagai kriteria pokok maupun opsional sesuai perkembangan pembangunan saat ini. Kriteria yang digunakan dalam penyusunan prioritas untuk RKPD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1. Merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dalam mencapai visi dan misi KDH terpilih melalui tahapan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;
- 2. Selaras dengan prioritas pembangunan nasional untuk mencapai sasaran pembangunan provinsi dan nasional;
- 3. Mempedomani dan untuk mendukung pelaksanaan program strategis nasional sebagaimana diamanatkan dalam RKP 2026;
- 4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak pada tahun 2026; dan
- 5. Pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif Daerah.

Dalam penetapan prioritas pembangunan Kutai Kartanegara dengan mengacu pada indikator makro daerah. Indikator makro daerah adalah parameter yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi dan sosial di suatu wilayah tertentu. Indikator-indikator ini membantu Pemerintah Daerah dan pengambil kebijakan dalam merencanakan dan mengimplementasikan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Daerah. Secara keseluruhan, indikator makro daerah merupakan alat yang vital

dalam manajemen dan pengembangan wilayah, memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Table IV - 1 Realisasi dan Target Indikator Makro Kabupaten Kutai Kartanegara, 2023-2026

No ·	Indikator Makro	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Target 2026*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,13	5,62	5,60*	5,70-6,30
2	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	270,72	259,19	306,68*	265,00 - 270,00
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,95	76,57	76,86*	77,37
4	Tingkat Kemiskinan (%)	7,61	7,28	6,97*	6,10 - 6,60
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,05	4,11	3,85*	3,70 - 3,90
6	Indeks Gini	0,284	0,307	0,260*	0,274 - 0,290

*Angka Proyeksi

Sumber: BPS 2025, diolah

Seiring dengan mulai membaiknya perekonomian pada tahun 2024, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai kartanegara pada tahun 2026 juga diperkirakan akan mampu tumbuh pada kisaran 5,70-6,30 % (lima koma tujuh puluh persen sampai dengan enam koma tiga puluh persen). PDRB per Kapita akan berada pada kisaran Rp265.000.000,00 s.d Rp270.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah sampau dengan dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan naik di kisaran 77,37 (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh tujuh). Dengan kondisi ekonomi yang relatif stabil, maka tingkat kemiskinan diperkirakan akan dapat ditekan pada kisaran angka 6,10 % - 6,60 % (enam koma sepuluh persen sampai dengan enam koma enam puluh persen) dan tingkat pengangguran terbuka akan turun di kisaran 3,70-3,90 (tiga koma tujuh puluh sampai dengan tiga koma sembilan puluh). Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk (yang dicerminkan oleh Gini Rasio) akan menurun menjadi 0,274-0,290 (nol koma dua ratus tujuh puluh empat sampai dengan nol koma dua ratus sembilan puluh).

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RKPD Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahap kelima dalam RPJMD 2021-2026. pelaksanaan Dengan ini pembangunan Kartanegara tahun 2026 memedomani visi, misi dan tujuan sasaran beserta target pembangunan tahun 2026 dari dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya dalam upaya akselerasi capaian pembangunan. Dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah:

Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera Dan Berbahagia

Visi tersebut mengandung dua elemen utama pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Bupati dan wakil Bupati terpilih yaitu masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan masyarakat yang bahagia. Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

Masyarakat yang Sejahtera

pengertian sejahtera, kondisi Batasan masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi secara adil berkesinambungan. Diharapkan dari kemudahan mendapatkan kebutuhan dasar masyarakat dan akses terhadap sumber daya ekonomi maka masyarakat semakin sejahtera.

Masyarakat yang Berbahagia

Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketentraman diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong-royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan dari menjaga keharmonisan dan peningkatan terhadap pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat membuat warga Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berbahagia.

Selain visi dan Misi, pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan filosofi pembangunan Kukar tahun 2021-2026 yaitu KUKAR IDAMAN. IDAMAN secara etimologi berarti sesuatu yang diharapkan, yang didambakan, yang dicita-citakan. Sedangkan secara terminologi merupakan untuk akronim dari Inovatif, Daya saing dan Mandiri (IDAMAN). KUKAR IDAMAN adalah satu gerakan yang mengoptimalkan seluruh potensi Daerah, dengan mendorong kreativitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dalam menciptakan daya saing dan kemandirian Daerah yang didasari semangat kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mewujudkan Kutai Kartanegara yang lebih baik.

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, misi pembangunan sebagai berikut:

- 1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
- 2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
- 3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah; dan
- 5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan maka diperlukan rumusan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran dapat diterjemahkan sebagai sasaran tahunan melalui arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran tahunan (prioritas dan sasaran pembangunan RKPD).

Sesuai dengan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran dalam pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026. Berikut dijabarkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan target indikator dan target pembangunan pada tahun 2026, yang ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026

VISI/MISI/TUJUAN SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2024	TARGET 2026 (RPJMD)
VISI:"MEWUJUDKAN MASYARAKA	BERBAHAGIA"		
MISI 1: MEMANTAPKAN BIROKRASI YAI			
Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	BB (71,51)	BB (70,02)
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	CC(65,93)	B (70)
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Persepsi Anti Korupsi	8,40	7
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	9,85	9,05
MISI 2: MENINGKATKAN PEMBANGUNA UNGGUL DAN BERBUDAYA	IN SUMBER DAYA MANUSIA		
Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan,Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	Indeks Pembangunan Manusia	76,57	76,59
	Indeks Pendidikan	0,688	0,706
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	57,42	53
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,836	0,824
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	81,08	79,2
Meningkatkan tingkat kesejahteraan	Tingkat Kebahagiaan	79,60	75
masyarakat	Tingkat Kemiskinan	7,28	6,35
Meningkatnya pemerataan pendapatan	Indeks Gini	0,307	0,27
masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	Indeks Desa Membangun	0,797	0,785
Menurunnya Pengangguran di Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,11	4,1
	PDRB Per Kapita	259,19	204,69
MISI 3: MEMPERKUAT PEMBANGUNAN EKONOMI KREATIF	EKONOMI BERBASIS PERTA	ANIAN, PARIWI	SATA DAN
Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan	Laju Pertumbuhan PDRB Non Migas dan Batubara	7,88	5,89
Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,94	7,5
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	7,85	4,23
Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	7,7	7,56
Meningkatnya daya saing investasi daerah	Tingkat Pertumbuhan Investasi	10,85	1,79
MISI 4: MENINGKATKAN KUALITAS LAY ANTAR WILAYAH	ANAN INFRASTRUKTUR DAS	SAR DAN KONE	CKTIVITAS
Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis	16,183	31,8
	Persentase Kawasan Kumuh	0,0046	0,0054
Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air	Cakupan layanan air bersih	80,2	95,00

VISI/MISI/TUJUAN SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2024	TARGET 2026 (RPJMD)	
bersih	Persentase rumah layak huni	98,64	91,44	
Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Indeks Aksesibilitas Wilayah	76,49	88,18	
MISI 5: MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN				
Meningkatkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Persentase Penurunan Emisi GRK	6,16	5%	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,59	74,51	
Meningkatnya Ketahanan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	118,80	108,25	

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Penelaahan dokumen lainnya terutama dokumen perencanaan di atasnya di maksudkan agar terjadi keselarasan perencanaan pusat dan daerah. Pembangunan Daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

4.2.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026

Prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan pemerintah pusat tahun 2026 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana RKP Tahun 2026. Sesuai dengan tema RKP Tahun 2026 "Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif". Untuk mewujudkan tema RKP tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026, yaitu: 1). Laju Pertumbuhan Ekonomi; 2). PDRB per kapita (juta); 3). Kontribusi PDRB Provinsi; 4). Tingkat Kemiskinan; 5). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 6). Indeks Rasio Gini; 7). Indeks Modal Manusia; 8). Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK dan 9). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. Masing-masing sasaran makro pembangunan nasional tersebut dijabarkan ke dalam masing-masing provinsi yang menjadi acuan pemerintah daerah provinsi dalam menetapkan target sasaran makro pembangunan nasional dalam penyusunan RKPD Tahun 2026. Selanjutnya untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 perlu sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional.

Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 (tujuh belas) program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program hasil Terbaik Cepat (PHTC). Prioritas nasional meliputi:

Prioritas 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Prioritas 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Prioritas 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Prioritas 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.

Prioritas 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Prioritas 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

Prioritas 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

Prioritas 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Adapun Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.;
- 2) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten;

- 3) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional;
- 4) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
- 5) Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
- 6) Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara;
- 7) Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
- 8) Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23% (dua puluh tiga persen).

4.2.2. Rencana Kerja Pemerinta Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

Dengan memperhatikan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, maka rumusan awal tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah "Penguatan Fondasi Pelaksanaan Pembangunan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas". Tema RKPD Tahun 2026 merupakan upaya awal dalam mewujudkan Kalimantan Timur sebagai pusat perekonomian baru Nasional di Kawasan Timur Indonesia dan pembangunan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur menjadi generasi yang unggul dan produktif.

Sesuai tema di atas, berikut dijabarkan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 :

- 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera;
- 2. Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai pusat ekonomi baru yang inklusif berbasis industrialisasi komoditas unggulan daerah;
- 3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian, pelayanan publik dan kesehatan;
- 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan berintegritas berbasis teknologi informasi;
- 5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama serta penguatan budaya dan kearifan lokal;

6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan Adapun arah pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk Kabupaten/Kota Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.3 Arah Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Untuk Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Kabupaten/Kota	Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah
1	Paser	Mendorong pengembangan sektor pertanian TPH,
		perkebunan, perikanan, yang diiringi dengan
		peningkatan kapasitas SDM pertanian yang profesional
2	Kutai Barat	Mendorong pertumbuhan sektor perkebunan sawit dan
		karet sebagai hulu rantai pasok agroindustri Kaltim,
		dengan terus memperkuat infrastruktur ekonomi
3	Kutai	Mendorong pengembangan sektor pertanian TPH
	Kartanegara	sebagai lumbung pangan, perkebunan, perikanan,
		agroindustri dan pariwisata yang diiringi dengan
		peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi
4	Kutai Timur	Mengakselerasi pertumbuhan industri pengolahan
		eksisting (terutama agroindustri), pertanian pangan,
		perkebunan sawit dan pisang, serta mendukung upaya
		revitalisasi KEK Maloy
5	Berau	Mendorong pertumbuhan sektor pariwisata-ekraf dan
		UMKM, yang di-iringi dengan pengembangan sektor
		pertanian pangan, perkebunan, dan perikanan
6	Penajam Paser	Meningkatkan inklusi dampak pembangunan IKN
	Utara	melalui pengembangan Kawasan industri Buluminung,
		pengembangan sektor pertanian TPH, pariwisata, jasa
		dan perdagangan, yang di-iringi revitalisasi kawasan yang
		berbatasan dengan IKN
7	Mahakam Ulu	Akselerasi pembangunan konektivitas infrastruktur jalan
		& jembatan untuk membuka akses perdagangan produk-
		produk hasil pertanian TPH dan perkebunan
8	Balikpapan	Meningkatkan peran sebagai kota pusat MICE yang
		diiringi dengan pengembangan sektor UMKM-Ekraf, serta
		peningkatan investasi industri terutama di KIK
9	Samarinda	Mengakselerasi pertumbuhan sektor jasa dan
		perdagangan dengan mengoptimalkan peran sebagai
		bagian tri-city IKN-Samarinda-Balikpapan
10	Bontang	Mendorong inklusi industri eksisting dalam rangka
		membuka lapangan kerja, yang diiringi dengan

peningkatan	daya	saing	SDM	tenaga	kerja,	serta
memperkuat	peran s	sektor ja	asa dan	perdaga	ngan	

4.3. POKOK-POKOK PIKIRAN DEWA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dengan penyusunan RKPD Tahun 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara perlu memberikan masukan berupa pokok-pokok pikiran DPRD, untuk memastikan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan urgensi kebutuhan masyarakat Kutai Kartanegara, serta memenuhi ranah fungsi DPRD sebagai legislatif untuk melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Penelaahan tersebut dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan pokokpokok pikiran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2026 berdasarkan prioritas pembangunan Daerah. Berikut adalah pandangan DPRD dalam bentuk pokok-pokok DPRD sebagai berikut:

- 1. Terhadap RKPD 2026 dalam Mendukung Program Pemerintah Pusat RKPD 2026 harus disusun dengan mempertimbangkan sinkronisasi program antara daerah dan pusat, terutama dalam mendukung kebijakan strategis nasional seperti :
 - a. Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN): Kutai Kartanegara sebagai daerah penyangga harus mendapatkan prioritas dalam infrastruktur, ekonomi, dan sumber daya manusia.
 - b. Percepatan Transformasi Digital: Peningkatan layanan digital di sektor pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna mendukung agenda digitalisasi nasional.
 - c. Ketahanan Pangan dan Energi:

 Penguatan sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta
 pemanfaatan energi baru dan terbarukan di Daerah.
 - d. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM): Penyediaan pelatihan vokasi, sertifikasi keahlian, dan program beasiswa bagi tenaga kerja lokal agar mampu bersaing di era ekonomi global.
 - e. Program makan bergizi gratis merupakan program yang masuk dalam asta cita Presiden Republik Indonesia, dan program ini wajib masuk dalam RKPD Tahun 2026.

- f. Program cek kesehatan gratis yang harus segera dilakukan mengingat beberapa daerah sudah melaksanakan program tersebut maka sudah sepantasnya kita ikut mensukseskan program tersebut.
- 2. Isu Strategis Nasional yang Berpengaruh ke Daerah Beberapa isu strategis nasional yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD 2026, antara lain:
 - Dampak Pembangunan IKN:
 Potensi peningkatan investasi dan urbanisasi yang perlu diantisipasi dengan kebijakan perencanaan tata ruang dan infrastruktur yang
 - dengan kebijakan perencanaan tata ruang dan infrastruktur yang matang.
 - b. Perubahan Iklim dan Keberlanjutan Lingkungan:
 Diperlukan kebijakan yang mendukung mitigasi perubahan iklim,
 terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
 - c. Krisis Energi dan Peningkatan Investasi Hijau:
 Kutai Kartanegara perlu mengoptimalkan potensi energi terbarukan seperti biomassa dan tenaga surya.
- 3. Isu Strategis terhadap Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil reses dan musyawarah perencanaan pembangungan (musrenbang), terdapat beberapa isu utama dalam pembangunan Daerah yang harus menjadi fokus RKPD Tahun 2026:

- Ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah:
 Masih banyak desa yang belum memiliki akses jalan yang layak,
 jaringan listrik, jaringan internet dan air bersih.
- Tantangan di Sektor Pendidikan:
 Masih terjadi kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
- c. Lapangan Kerja dan Kesejahteraan Sosial:

 Tingkat pengangguran dan kemiskinan di beberapa kecamatan masih cukup tinggi, membutuhkan program pelatihan kerja dan bantuan sosial yang tepat sasaran.
- d. Dampak Eksploitasi Sumber Daya Alam:

 Kegiatan pertambangan dan perkebunan skala besar masih menjadi

 permasalahan dalam hal dampak lingkungan dan konflik lahan.
- e. Ketahanan Pangan:

Perlu kebijakan yang memperkuat produksi pertanian dan perikanan agar lebih mandiri dan tidak tergantung pada pasokan dari luar Daerah.

4. Langkah-Langkah Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2026 untuk Mendukung Program Nasional

Untuk memastikan sinergi dengan program nasional, DPRD mengusulkan beberapa langkah strategis:

- a. Peningkatan Infrastruktur Penunjang IKN
 - Pengembangan kawasan industri dan logistik yang mendukung kebutuhan IKN.
 - Revitalisasi infrastruktur transportasi untuk mempercepat konektivitas antar wilayah.
- b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan UMKM
 - Penguatan ekosistem UMKM melalui akses permodalan, pelatihan, dan digitalisasi.
 - Program pengembangan desa wisata sebagai bagian dari ekonomi kreatif.
- c. Peningkatan Kualitas SDM dan Kesehatan
 - Pembangunan pusat pelatihan kerja berbasis industri dan teknologi.
 - Program kesehatan preventif untuk mengurangi angka penyakit menular dan stunting.
- d. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan
 - Regulasi ketat terhadap industri yang berdampak pada lingkungan.
 - Program konservasi hutan dan rehabilitasi Daerah aliran sungai.

5. Hasil Reses Anggota DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, beberapa aspirasi masyarakat yang menjadi prioritas dalam RKPD Tahun 2026 meliputi:

- a. Pembangunan dan perbaikan jalan desa dan kecamatan serta jembatan penghubung antar wilayah.
- b. Penyediaan akses listrik dan air bersih bagi desa-desa yang belum teraliri jaringan listrik secara maksimal, terutama di wilayah pesisir dan pedalaman.
- c. Bantuan modal usaha bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM.

- d. Akses layanan kesehatan yang lebih baik, termasuk tenaga medis dan fasilitas rumah sakit.
- e. Keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan peran aparat dan sistem keamanan berbasis komunitas.
- 6. Hasil Musrenbang dalam Penyusunan RKPD Tahun 2026 Hasil Musrenbang menunjukkan beberapa program prioritas pembangunan Daerah:
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa serta jembatan di daerah pedalaman yang masih terisolasi, terutama di Kecamatan Muara Wis, Muara Muntai, kenohan, kembang janggut dan Tabang muara badak, marangkayu, dan anggana.
 - b. Pembangunan pasar rakyat dan rehab pasar rakyat yang sudah sangat tidak layak seperti pasar di kecamatan loa kulu, pembangunan sentra ekonomi baru di beberapa kecamatan guna meningkatkan daya saing produk lokal serta mempercepat pertumbuhan ekonomi Daerah.
 - c. Pembangunan pusat distribusi hasil pertanian dan perikanan untuk mempercepat rantai pasok.
 - d. Program peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan kerja dan sertifikasi profesi.
 - e. Pembangunan embung dan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan Daerah.
- 7. Hasil RDP dengan Masyarakat di DPRD Kutai Kartanegara Beberapa poin penting yang disampaikan dalam RDP antara DPRD dan masyarakat terkait RKPD Tahun 2026:
 - a. Masyarakat meminta keterbukaan dalam proses perencanaan dan penganggaran Daerah.
 - b. Penolakan terhadap eksploitasi tambang ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat lokal.
 - c. Usulan pemberian bantuan alat produksi bagi petani dan nelayan untuk meningkatkan hasil panen.
 - d. Percepatan legalisasi tanah bagi warga yang masih memiliki sengketa lahan dengan perusahaan besar.
 - e. Perlindungan terhadap tenaga kerja lokal agar memiliki kesempatan lebih besar dalam proyek investasi di Daerah.

- f. Pembangunan unit sekolah baru (USB) di Daerah yang mengalami keterbatasan fasilitas pendidikan, serta peningkatan kapasitas sekolah yang mengalami kelebihan daya tampung.
- g. Penyediaan tenaga pengajar yang merata di seluruh kecamatan, termasuk insentif bagi guru yang bertugas di daerah terpencil.
- h. Peningkatan kualitas layanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD, termasuk penambahan dokter spesialis di puskesmas serta fasilitas kesehatan yang lebih memadai.
- i. Program pencegahan stunting dan gizi buruk melalui peningkatan gizi ibu hamil dan anak, terutama di Daerah dengan angka kasus yang tinggi.

4.4. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2026 pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 berpedoman dengan mengimplementasi pada sasaran dan arah kebijakan yang berfokus pada agenda pembangunan di tahun 2026. Pada pembangunan tahun 2026 ini merupakan tahun kelima bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam merealisasikan RPJMD 2021-2026. Merujuk hal tersebut, RKPD Tahun 2026 ini memiliki arah pembangunan berdasarkan arahan pembangunan jangka menengah pada tema/fokus di tahun kelima pelaksanaan RPJMD 2021-2026.

Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan arah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD Tahun 2021-2026 pada tahap pembangunan ke-V di tahun 2026.

Dengan ini, tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026 adalah



"PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN"

Berdasarkan tema tersebut, pembangunan diarahkan pada Penataan kelembagaan Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Hal ini melibatkan optimalisasi peran Perangkat Daerah (PD), peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM),

serta sinergi antar-lembaga pemerintah dan masyarakat. Pemerataan infrastruktur pembangunan yang berkelanjutan mencakup pembangunan jalan, jembatan, penyediaan air bersih, sanitasi, serta pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Semua ini dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

4.4.1. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026

RKPD Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD periode 2021-2026 terutama pada poin sasaran dan target pembangunan khususnya di tahun berkenaan. Dokumen RKPD perlu memperhatikan kondisi aktual capaian kinerja pembangunan dan kebijakan pemerintah pusat (nasional) dalam dokumen RKP 2026. Selanjutnya dokumen RKPD juga harus selaras dengan pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tercantum dalam RKPD 2026 Provinsi Kalimantan Timur.

Prioritas pembangunan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara selain memedomani RPJMD namun juga mempertimbangkan kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah provinsi. Dengan ini sasaran dan prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara harus selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara mampu mendukung secara optimal pencapaian target pembangunan provinsi dan nasional.

Perumusan prioritas harus memahami kondisi aktual dan permasalahan pembangunan yang sedang terjadi, dengan memperhatikan kondisi yang terkini (update) dan rumusan kebijakan pembangunan dalam RPJMD terutama pada agenda pembangunan tahun 2026, sehingga dalam perumusan prioritas pembangunan diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan pembangunan. Dengan begitu target tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai dengan maksimal. Berikut disajikan keterkaitan permasalahan pembangunan dengan rumusan prioritas pembangunan tahun 2026.

Tabel IV.4 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Dengan Rumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2026

PERMASALAHAN POKOK	ISU STRATEGIS	STRATEGI/PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN/FOKUS PEMBANGUNAN
Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Optimalisasi tata kelola dan birokrasi pemerintahan, penguatan kehidupan berdemokrasi, dan perwujudan keamanan dan ketertiban berbasis pelayanan publik terdigitalisasi	Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif	Penguatan pengawasan, perbaikan regulasi dan kelembagaan organisasi perangkat Daerah dalam mengawal pelaksanaan arah kebijakan pembangunan yang terstruktur dan sistematis.
		Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	Peningkatan kualitas jaringan internet dan fasilitasi layanan data dan informasi serta perizinan hingga ke kecamatan/desa/ kelurahan.
Belum optimalnya pembangunan SDM yang merata dan kesejahteraan yang berkeadilan	Akselerasi peningkatan daya saing SDM yang sehat, cerdas dan sejahtera	Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan	Keterpaduan layanan pendidikan dalam menjamin keberlanjutan pendidikan dasar (SD-SMP) hingga ke pendidikan menengah dan tinggi
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas layanan kesehatan	Peningkatan Sarana dan Prasarana, Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan dan Integrasi dukungan kebijakan terhadap pelaksanaan Program Nasional Makan Bergizi Gratis.
Belum optimalnya ketahanan sosial dan pelestarian budaya dalam upaya menuju masyarakat berkebudayaan maju	Peningkatan ketahanan sosial dan pelestarian budaya	Penguatan nilai-nilai tradisional serta warisan budaya melalui pendekatan pembelajaran pendidikan sejak dini	Pengembangan kapasitas lembaga pelestarian budaya dan membangun kolaborasi antara sekolah, perguruan tinggi serta masyarakat penggiat budaya dalam satu kesatuan skema kerja yang terintegrasi.
Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis sektor ekonomi non-ekstraktif	Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	Membangun kelembagaan dan sumber daya manusia yang kuat berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah berbasis pendampingan dan kemitraan.
Belum meratanya pelayanan infrastruktur dasar dan perumahan layak huni	Pemerataan pelayanan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan handal	Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah	Penyediaan layanan transportasi perhubungan darat maupun perairan yang terintegrasi berbasis karakteristik wilayah dan Penyediaan perumahan layak huni bagi masyarakat miskin



PERMASALAHAN POKOK	ISU STRATEGIS	STRATEGI/PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN/FOKUS PEMBANGUNAN
Meningkatnya potensi kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas ekonomi dan resiliensi bencana daerah	berkelanjutan dan optimalisasi	pusat pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur desa	Penyediaan RDTR wilayah Kecamatan dan Tata Ruang Desa, pengembangan perumahan rakyat yang layak dan optimalisasi pelimpahan kewenangan kecamatan dan dana transfer ke Desa.

Berdasarkan rumusan prioritas pembangunan diatas, maka yang menjadi sasaran pembangunan pada tahun 2026 hanya sasaran yang terkait dengan prioritas pembangunan dengan indikator dan target yang telah disesuaikan berdasarkan capaian realisasi 2023 dan atau 2024 dan target RPJMD Tahun 2026. Prioritas , fokus, sasaran beserta target pembangunan tahun 2026 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.5 Prioritas, Fokus, Sasaran dan Target Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026

ASTA CITA RPJMN	PRIORITAS	FOKUS	TUJUAN/SASARAN (RPJMD)	INDIKATOR	REALISASI 2024	TARGET 2026 (RPJMD)	TARGET RKPD 2026
			Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	BB (71,51)	BB (70,02)	BB (71,60)
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)	Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif	Penguatan pengawasan, perbaikan regulasi dan kelembagaan organisasi perangkat daerah dalam mengawal pelaksanaan arah kebijakan pembangunan yang terstruktur dan sistematis.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	CC(65,93)	A (80,01)	В (70)

ASTA CITA RPJMN	PRIORITAS	FOKUS	TUJUAN/SASARAN (RPJMD)	INDIKATOR	REALISASI 2024	TARGET 2026 (RPJMD)	TARGET RKPD 2026
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta			Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah	Indeks Persepsi Anti Korupsi	8,38	7	8,50
memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	Peningkatan kualitas jaringan internet dan fasilitasi layanan data dan informasi serta perizinan hingga ke kecamatan/desa/ kelurahan.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Sudah dilakukan penyesuaian target	9,81	9,05	9,90
			Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	76,57	76.59	77,00- 77,47
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan	Keterpaduan layanan pendidikan dalam menjamin keberlanjutan pendidikan dasar (SD-SMP) hingga ke pendidikan menengah dan tinggi	Meningkatnya Kualitas	Indeks Pendidikan	0,688	0,706	0,706
perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Penguatan nilai-nilai tradisional serta warisan budaya melalui pendekatan pembelajaran pendidikan sejak dini	Pengembangan kapasitas lembaga pelestarian budaya dan membangun kolaborasi antara sekolah, perguruan tinggi serta masyarakat penggiat budaya dalam satu kesatuan skema kerja yang terintegrasi.	Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	Indeks Kebudayaan	57,42	53	58,00

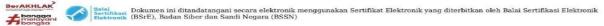


ASTA CITA RPJMN	PRIORITAS	FOKUS	TUJUAN/SASARAN (RPJMD)	INDIKATOR	REALISASI 2024	TARGET 2026 (RPJMD)	TARGET RKPD 2026
	Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas layanan kesehatan	Peningkatan Sarana dan Prasarana, Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan dan Integrasi dukungan kebijakan	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,836	0,824	0,840
	Rescriatari	erhadap pelaksanaan Mer Program Nasional per Makan Bergizi Gratis. pen	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	81,08	79,2	81,50
			Meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kebahagiaan	79,60	75	80
				Tingkat Kemiskinan	7,28	6,35	6,10 - 6,60
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur desa yang berkualitas;	Penyediaan RDTR wilayah Kecamatan dan Tata Ruang Desa, pengembangan perumahan rakyat yang layak dan optimalisasi pelimpahan kewenangan kecamatan dan dana transfer ke Desa.	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	Indeks Gini	0,307	0,270	0,274 - 0,290
Membangun dari desa dan dari bawah untuk				Indeks Desa Membangun	0,797	0,785	0,850
pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan			Menurunnya Pengangguran di Masyarakat	Tingkat Pengangguran	4,11	4,1	3,70 - 3,90



ASTA CITA RPJMN	PRIORITAS	FOKUS	TUJUAN/SASARAN (RPJMD)	INDIKATOR	REALISASI 2024	TARGET 2026 (RPJMD)	TARGET RKPD 2026
pemberantasan				Terbuka			
kemiskinan				PDRB Per Kapita	259,19	204,69	265,00 - 270,00
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam			Meningkatkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Persentase Penurunan Emisi GRK	6,01	5%	5%
dan budaya serta peningkatan toleransi anta rumat beragama untuk mencapai masyarakat			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,59	74,51	74,51
yang adil dan makmur			Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	118,80	100	108,25
			Meningkatkan perekonomian Daerah berbasis pada sektor terbarukan	Laju Pertumbuhan PDRB Non Migas dan Batubara	7,88	5,89	7,75
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	Membangun kelembagaan dan sumber daya manusia yang kuat berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah berbasis pendampingan dan kemitraan.	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan Daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,94	7.5	7,50
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan			Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	7,85	4.23	7,90
nilai tambah di dalam negeri			Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	7,7	7.56	7,90





ASTA CITA RPJMN	PRIORITAS	FOKUS	TUJUAN/SASARAN (RPJMD)	INDIKATOR	REALISASI 2024	TARGET 2026 (RPJMD)	TARGET RKPD 2026
			Meningkatnya daya saing investasi daerah	Tingkat Pertumbuhan Investasi	10,85	1.79	12,00
			Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis	16,183	31,8	31,8
				Persentase Kawasan Kumuh	0,0046	0,0054	0,0054
	Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah	Penyediaan layanan transportasi perhubungan darat maupun perairan yang	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	Cakupan layanan air bersih	80,2	95	95
	(necessarian) what	terintegrasi berbasis karakteristik wilayah		Persentase rumah layak huni	98,64	91,44	99,00
			Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Indeks Aksesibilitas Wilayah	76,49	88,18	88,18



Sesuai agenda pembangunan dan prioritas pembangunan kabupaten kutai kartanegara pada tahun 2026, maka berikut penjabaran program prioritas pembangunan dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel IV.6 Program prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026

No	Prioritas	Fokus	Program	Indikator	Satuan	Target	OPD
	Meningkatnya Kualitas La	iyanan Kesehatan Masya	rakat	Indeks Kesehatan	Nilai	0.840	
1	Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas layanan kesehatan;	Peningkatan Sarana dan Prasarana, Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan dan Integrasi dukungan kebijakan terhadap pelaksanaan Program Nasional Makan Bergizi Gratis.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Presentasi Balita Stunting	Persen	13.8	
				Indeks Keluarga sehat	Persen	0.5	
				Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen	0.77	
				Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen	0.78	Dinas Kesehatan
				Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persen	0.65	
				Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen	0.54	
				Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen	0.9	
				Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen	0.45	
				Indeks Perilaku kesehatan	Persen	0.49	
				Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persen		

No	Prioritas	Fokus	Program	Indikator	Satuan	Target	OPD
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan RS	Persen	90	RSUD AM Parikesit
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	Persen	83	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	Persen	93	RSUD Dayaku Raja
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM yang Terlatih Sesuai Kompetensinya	Persen	85	Dinas Kesehatan / RSUD
			Program Pemerintahan dan	Persentase kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	100	Bagian Kesra
			Kesejahteraan Rakyat	Presentase Rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan	Persen	100	(Sekretariat Daerah)



No	Prioritas	Fokus	Program	Indikator	Satuan	Target	OPD
				Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP)	Persen	100	
				Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	90	
			Program Kepegawaian Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Persen	96	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Program	Presentasi Balita Stunting	Persen	13.8	
			Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat I	Indeks Keluarga sehat	Persen	0.5	
				Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen	0.77	
				Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen	0.78	
				Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persen	0.65	
				Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen	0.54	Dinas Kesehatan
				Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen	0.9	
				Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen	0.45	
				Indeks Perilaku kesehatan	Persen	0.49	
				Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persen		
	Meningkatnya Kualitas Ko	ebudayaan Layanan Pend	lidikan	Indeks Pendidikan	Nilai	0.706	
2	Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas	Keterpaduan layanan pendidikan dalam menjamin	O	Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD (Angka Indeks Max 7)	Persen	90.71	Dinas Pendidikan
	layanan pendidikan;	keberlanjutan pendidikan dasar (SD- SMP) hingga ke pendidikan menengah		Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP (Angka Indeks Max 7)	Persen	89.71	dan Kebudayaan



No	Prioritas	Fokus	Program	Indikator	Satuan	Target	OPD
		dan tinggi	Program Pengelolaan Pendidikan (PAUD)	Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) PAUD (Angka Indeks Max 100)	Persen	83.92	
			Program Pengelolaan Pendidikan (SD)	Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD (Angka Indeks Max 7)	Persen	90.71	
			Program Pengelolaan Pendidikan (SMP)	Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP (Angka Indeks Max 7)	Persen	89.71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pengelolaan Pendidikan (PAUD)	Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) PAUD (Angka Indeks Max 100)	Persen	83.92	
			Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Persen	46.98	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Program Pengelolaan Pendidikan	Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD (Angka Indeks Max 7)	Persen	90.71	
				Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP (Angka Indeks Max 7)	Persen	89.71	
				Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) PAUD (Angka Indeks Max 100)	Persen	83.92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetaraan (Angka Indeks Max 100)	Persen	69.28	
				Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar IDAMAN Pendidikan Dasar	Orang	15000	



No	Prioritas	Fokus	Program	Indikator	Satuan	Target	OPD		
	Meningkatnya pengelolaa daerah	daerah		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	7.5			
	Meningkatnya Daya Saing	g Pariwisata Daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Person	4.23			
	Berkembangnya Ekonomi	Kreatif		Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	7.90			
	Menurunnya penganggura	an di masyarakat		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.70 – 3.90			
				PDRB per Kapita	Rp. (Juta)	265- 270			
				Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	7.90			
3	Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang	Membangun kelembagaan dan sumber daya manusia	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	berkelanjutan; berdasarkan potensi Penyediaan dan	Panjang Jalan Usaha Tani Yang Dibangun	Meter	10500					
		dan karakteristik wilayah berbasis	Prasarana	Prasarana	Prasarana	Jumlah Embung Pertanian Yang Dibangun	Unit	19	
		pendampingan dan kemitraan.				Pertanian	Panjang Jaringan Irigasi yang dibangun	Meter	7500
				Jumlah DAM Parit yang dibangun	Unit	3			
				Jumlah Pintu Air yang dibangun	Unit	19	DInas Pertanian dan		
			Program Penyediaan dan	Luas Tanam Jagung	Hektar (Ha)	0	Peternakan		
			Pengembangan	Populasi Ternak Kecil	Ekor	13.012			
			Sarana Pertanian	Luas Tanam Hortikultura	Hektar	15.125			
				Populasi Ternak Besar	Ekor	16.500			
				Populasi Ternak Unggas	Ekor	19.470.700			
		Luas Tanam Palawija	Hektar (Ha)	2.740					
				Luas Tanam Padi	Hektar	29.990			



No	Prioritas	Fokus	Program	Indikator	Satuan	Target	OPD	
					(Ha)			
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persen	5		
			Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase kepatuhan koperasi melaksanakan RAT	Persen	27,24	Dinas Koperasi dan	
			Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase pengurus dan pengawas yang memiliki sertifikasi pelatihan perkoperasian	Persen	100	Usaha Kecil Menengah	
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	115158		
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	232827	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Program Pengolahan dan	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	27668		
			Pemasaran Hasil Perikanan	Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan	Ton	1860		
			Program Penyediaan dan	Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	Meter	4800		
			Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Embung Perkebunan Yang Dibangun	Unit	4	Dinas Perkebunan	
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persen	24.6		
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi	Persentase DTW yang Memenuhi Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi	Persen	100	Dinas Pariwisata	



No	Prioritas	Fokus	Program	Indikator	Satuan	Target	OPD	
			Pariwisata					
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dokumen perencanaan dan pengembangan industri	Dokumen	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi	Persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola	Persen	86	Dinas Perindustrian	
			Perdagangan	Pertumbuhan pendapatan pasar	Persen	4.22	dan Perdagangan	
				Indeks Kualitas Pasar	Nilai	67		
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah		han Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	B (70)		
				Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	8.50		
4	Penguatan regulasi dan	Penguatan	Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81		
	tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif;	pengawasan, perbaikan regulasi dan kelembagaan	Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/Pimpinan	Persen	100	Sekretariat Daerah	
		organisasi perangkat daerah dalam mengawal		Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB dan A	Persen	100		
		pelaksanaan arah kebijakan pembangunan yang terstruktur dan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	Persen	97	Inspektorat	
	'	sistematis.	Program Kepegawaian Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Persen	96	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	100	Badan Riset dan Inovasi Daerah	



No	Prioritas	Fokus	Program	Indikator	Satuan	Target	OPD
				dan Pengkajian Peraturan			
				Persentase penelitian dan pengembangan yang			
				termanfaatkan oleh Perangkat	Persen	100	
				Daerah bidang Sosial Dan Kependudukan			
				Persentase penelitian dan			
				pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat	Persen	100	
				Daerah bidang Ekonomi dan	rerbeir	100	
				Pembangunan			
				Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi	Persen	100	
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	9.90		
	Meningkatnya daya saing	investasi daerah		Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	12	
5	Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik;	Peningkatan kualitas jaringan internet dan fasilitasi layanan data dan informasi serta	Pengelolaan Aplikasi	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	Persen	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	pasini,	perizinan hingga ke		Jumlah Penerbitan izin			
	kecamatar	kecamatan/desa/ kelurahan.	Pelayanan Penanaman Modal		Izin	1150	DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya Kualitas Ke	l ebudayaan dan Pelestaria	l an Budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	58.00	
6	Penguatan nilai-nilai tradisional serta warisan budaya melalui pendekatan	Pengembangan kapasitas lembaga pelestarian budaya dan membangun		Persentase Lembaga Seni Budaya yang Aktif	Persen	80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



No	Prioritas	Fokus	Program	Indikator	Satuan	Target	OPD
	pembelajaran pendidikan sejak dini;	kolaborasi antara sekolah, perguruan tinggi serta		Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal (MuLok)	Persen	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		masyarakat penggiat budaya dalam satu kesatuan skema kerja		Jumlah Pelaksanaan Event Budaya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	Event	30	Dinas Pendidikan
		yang terintegrasi.	J	Persentase Desa Budaya yang Aktif (Existing 5 Desa Budaya)	Persen	100	dan Kebudayaan
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Terfasilitasi	Persen	7	Dinas Pariwisata
			Program Pelestarian dan Pengelolaan	Persentase Cagar Budaya yang Dipelihara (Berdasarkan SK Penetapan)	Persen	100	
			Cagar Budaya	Persentase Penetapan Cagar Budaya Potensial (SK Bupati)	Persen	19.6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Museum yang Dikelola oleh Pemda (2 Museum)	Persen	100	
	Meningkatnya pemerataa hidup masyarakat	an pendapatan masyara	kat dan kualitas	Indeks Gini	Nilai	0.274 - 0.290	
				Indeks Desa Membangun	Nilai	0.785	
	Menurunnya pengangguran di masyarakat			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.70 – 3.90	
			PDRB per Kapita	Rp. (Juta)	265- 270		
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	74.51	
L	Meningkatnya ketahanan	bencana daerah		Indeks Risiko Bencana	Nilai	100	





No	Prioritas	Fokus	Program	Indikator	Satuan	Target	OPD
7	Penguatan kecamatan sebagai pusat	Penyediaan RDTR wilayah Kecamatan	Program Pengelolaan	1. Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun	Lokasi	1	Dinas Lingkungan Hidup dan
	pertumbuhan dan	dan Tata Ruang Desa,	Persampahan	2. Timbulan sampah	Persen	99.96	Kehutanan
	pengembangan infrastruktur desa yang berkualitas;	pengembangan perumahan rakyat yang layak dan optimalisasi pelimpahan kewenangan kecamatan dan dana	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	Persen	4.11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		transfer ke Desa.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Persen	95	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan (50 Unit)	Persen	1.48		
			Program Penataan Desa	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	Persen	38.86	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Persentase Desa Terti Administrasi Administrasi Pemerintaha		Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik	Persen	95	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Desa	Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Persen	10	masyarakat Desa
		Program Penyelenggaran Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	85	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	
			Program Penanggulangan	1. Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	21.1	Badan
	Bencan	Bencana	2. Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	22.6	Penanggulangan Bencana Daerah	



No	Prioritas	Fokus	Program	Indikator	Satuan	Target	OPD
				3. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	
	Meningkatnya kualitas p	ermukiman masyarakat	dan ketersediaan	Cakupan layanan air bersih	Persen	95.00	
	air bersih			Persentase rumah layak huni	Persen	99.00	
	Meningkatnya aksesibilita	as dan konektivitas wilay	ah	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	88.18	
8	Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas(keterkaitan)	Penyediaan layanan transportasi perhubungan darat	Program Penyelenggaraan Jalan	Kondisi Kemantapan Jalan	Persen	65.10	Dinas Pekerjaan Umum
	wilayah.	maupun perairan yang terintegrasi berbasis karakteristik		Prosentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pelayaran	Persen	52	Dinas Perhubungan
		wilayah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Prosentase Ketersediaan Sarana, Prasarana serta Fasilitas Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Persen	38.41	Dinas Perhubungan

Table. IV 7 Pemetaan dukungan program pemerintah daerah tahun 2026 terhadap program prioritas nasional

NO	PRIORITAS NASIONAL		NAMA PROGRAM	NAMA OPD
1	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber	1	PROGRAM PENANGGULANGAN	Badan Penanggulangan Bencana
	daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		BENCANA	Daerah
		2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	
			PEMERINTAHAN DAERAH	
			KABUPATEN/KOTA	
		3	PROGRAM PEMASARAN	Dinas Pariwisata
			PARIWISATA	
		4	PROGRAM PENGEMBANGAN	
			EKONOMI KREATIF MELALUI	
			PEMANFAATAN DAN	
			PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN	
			INTELEKTUAL	



NO	PRIORITAS NASIONAL		NAMA PROGRAM	NAMA OPD
		5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
		6	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
		7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		8	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		9	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
		10	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
		11	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
		12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		13	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
		14	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
		15	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
		16	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	



NO	PRIORITAS NASIONAL		NAMA PROGRAM	NAMA OPD
		17	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan
		18	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
		19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		20	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
		21	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
		22	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
		23	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
		24	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Marangkayu
		25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sebulu
2	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Kepemudaan dan Olahraga



NO	PRIORITAS NASIONAL		NAMA PROGRAM	NAMA OPD
		3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
		4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
		5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		6	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan
		7	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
		8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum
		9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
		10	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan
		11	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
		12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perkebunan
		13	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		14	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
		15	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	



NO	PRIORITAS NASIONAL		NAMA PROGRAM	NAMA OPD
		16	PROGRAM PERENCANAAN	
		17	TENAGA KERJA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Kecamatan Loa Janan
		18	PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Kecamatan Muara Wis
		19	PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kecamatan Sebulu
			MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		20	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		21	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
3	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		2	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan
		3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
		4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
		5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
		6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



NO	PRIORITAS NASIONAL		NAMA PROGRAM	NAMA OPD
		7	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan
		9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
		10	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
		11	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
		12	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Sebulu
4	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
		5	PROGRAM PENATAAN DESA	
		6	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	



NO	PRIORITAS NASIONAL		NAMA PROGRAM	NAMA OPD
		7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		8	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
		9	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	
		10	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	
		11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
		12	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
		13	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
		14	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Kembang Janggut
		16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kota Bangun Darat
		17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		18	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	



NO	PRIORITAS NASIONAL		NAMA PROGRAM	NAMA OPD
		19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Muara Kaman
5	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
		3	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
		4	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
		5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		6	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan
		7	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Sipil
		8	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
		9	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	



NO	PRIORITAS NASIONAL		NAMA PROGRAM	NAMA OPD
		10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		11	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		13	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
6	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	8	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
		3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
		4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	



NO	PRIORITAS NASIONAL		NAMA PROGRAM	NAMA OPD
		7	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
		8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perhubungan
		9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
		10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspektorat Kabupaten
		11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kembang Janggut
		12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		13	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
		14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Loa Janan
		15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sebulu
		16	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti



NO	PRIORITAS NASIONAL		NAMA PROGRAM	NAMA OPD
		17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD Aji Muhammad Parikesit
7	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah
	beragama untuk mencapai masyarakat yang aun dan makmur.	2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DAERAH A JANG URUSAN Kecamatan Loa Janan
		3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Loa Janan
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
		5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Loa Kulu
		6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Loa Kulu
		8	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Muara Kaman
8	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya



NO	PRIORITAS NASIONAL		NAMA PROGRAM	NAMA OPD
	penyeludupan.	2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Manusia
		3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
		6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Sosial
		7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Kabupaten
		9	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
		10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kota Bangun
		11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	



NO	PRIORITAS NASIONAL		NAMA PROGRAM	NAMA OPD
		12	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
		13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Muara Kaman
		14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Muara Muntai
		15	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		16	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
		17	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
		18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		19	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	



BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terencana dengan baik merupakan elemen kunci dalam penyusunan RKPD Tahun 2026. Dokumen RKPD tidak hanya berfungsi sebagai panduan pembangunan tahunan, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan tercapainya visi dan misi Daerah secara efektif. Dalam konteks ini, program dan kegiatan yang dirancang harus didasarkan pada hasil analisis kebutuhan masyarakat, potensi Daerah, serta tantangan yang dihadapi untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan yang berkelanjutan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi instrumen konkret untuk merealisasikan target pembangunan melalui alokasi sumber daya yang efisien dan akuntabel. Pelaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahunnya memiliki fokus/tema pembangunan yang berbeda. Fokus pembangunan pada tahun ini bertema "PENCAPAIAN PEMBANGUNAN KUKAR YANG INOVATIF, DAYA SAING DAN MANDIRI". Dengan fokus pembangunan ini diharapkan Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan secara lebih optimal, sehingga mampu mencapai target yang telah ditetapkan tahun 2026. Perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2026 harus merujuk pada program prioritas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 Tahun 2026 sehingga RKPD Tahun 2026 mengimplementasikan seluruh program yang telah direncanakan dalam RPJMD.

5.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan segala potensi dan kekayaan sumber dayanya, memerlukan pelaksanaan program yang bersifat inovatif, integratif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Setiap sub kegiatan yang dirancang dalam RKPD 2026 harus mampu mendukung penguatan daya saing ekonomi daerah, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, peningkatan kualitas layanan publik, serta pembangunan infrastruktur yang merata. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha perlu ditingkatkan untuk memastikan implementasi program berjalan optimal. Dengan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terarah, Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan sekaligus memanfaatkan peluang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada menyeluruh.Perencanaan pada dokumen RKPD Tahun 2026, sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing sektor dalam Perangkat Daerah provinsi bidang atau maupun Kabupaten/Kota. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program dan kegiatan sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas indikatif) adalah kemampuan pendanaan (pagu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja PD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara beserta rancangan pagu indikatif sebagai penunjang utama pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan tahun 2026 terlihat secara rinci pada lampiran dokumen ini. Dalam bab ini akan disajikan daftar program, kegiatan dan sub kegiatan yang meliputi nama program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, indikator kinerja program (outcome), kegiatan dan sub kegiatan (output), target setiap program dan kegiatan prioritas, pendanaan yang dibutuhkan pada tahun 2026, serta instansi/dinas/Perangkat Daerah penanggungjawab program, kegiatan dan sub kegiatan. Selanjutnya, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara beserta rancangan pagu indikatif sebagai penunjang utama pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026

										CENJA PEIVIEN	INTAH DAERAH KABUP								
					Urusan / Bidang Urusan / Program	Indikator Program / Kegiatan / Sub	Target Akhir	Realisasi Capaian				Capaian Kine	rja Dan Kerangka Pendanaa				Prakiraan M	aju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah
No		Koo	de		/ Outcome / Kegiatan / Sub	Kegiatan	Periode Renstra	RENJA OPD	Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
1					Kegiatan 3	4	OPD 5	Tahun 2024 6	RENJA OPD		9	10	11	Nasionai 12	Daerah 13	14	15	16	17
1						4			,	8	3	10	11	12	15	14	15		
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						1.471.954.943.951,00							2.447.230.375.499,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	L				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YA	ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANA	N DASAR				1.456.864.943.951,00							2.420.755.375.499,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
1	l 01	ı		1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	PENDIDIKAN					1.456.864.943.951,00							2.420.755.375.499,00	KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN
1 1	l 01	l 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1-	l		75 Nilai	920.213.719.384,00						-	1.496.810.986.832,00	KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN
					PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	This said Fernighat Sacran				75 1411.01	320122377 23130-1,000							11/30/02/30/032/30	KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			8 Dokumen	775.000.000,00			-	-	-	-	11.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	s	ab. Kutai Kartanegara, emua Kecamatan, emua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		3.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	S	ab. Kutai Kartanegara, emua Kecamatan, emua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		1.850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	s	ab. Kutai Kartanegara, emua Kecamatan, emua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				2 Dokumen	s	ab. Kutai Kartanegara, emua Kecamatan, emua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	l 01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				3 Data	s	ab. Kutai Kartanegara, emua Kecamatan, emua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		3.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bidang Urusan yang Diampu dalam				2 Berita Acara	S	ab. Kutai Kartanegara, emua Kecamatan, emua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	-			71894 Orang/Bulan	911.432.878.744,00			-	Membangun Infratruktur Konektivitas Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	-	1.364.484.418.440,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				71892 Orang/bulan		ab. Kutai Kartanegara, emua Kecamatan, emua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Membangun Infratruktur Konektivitas Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		1.361.509.418.440,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	s s	emua Kecamatan, emua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	s	ab. Kutai Kartanegara, emua Kecamatan, emua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	s	ab. Kutai Kartanegara, emua Kecamatan, emua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		975.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



1	01	01 2	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Aset - Perangkat Daerah	964 Dokumen	670.000.000,00			- Meningkatnya - transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	975.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
1	01	01 2	2.03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
1	01	01 2	2.03		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
1	01	01 2	2.03		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	72 Laporan	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
1	01	01 2	2.03		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
1	01	01 2	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Peningkatan Mutu - Pegawai PNS dan Non PNS Perangkat Daerah	771 Orang	290.000.000,00		-	- Meningkatnya - transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN D KEBUDAYAAN
1	01	01 2	2.05		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	560 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
1	01	01 2	2.05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	70 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN D KEBUDAYAAN
1	01	01 2	2.05		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	45 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN D KEBUDAYAAN
1	01	01 2	2.05		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	98 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
1	01	01 2	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan dasar - perangkat daerah	23708 Buah	1.872.000.000,00		-	- Meningkatnya - transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	7.440.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN I KEBUDAYAAN
1	01	01 2	2.06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	297.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
1	01	01 2	2.06		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN D KEBUDAYAAN
1	01	01 2	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN D KEBUDAYAAN
1	01	01 2	2.06		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN I KEBUDAYAAN
1	01	01 2	2.06	8000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN I KEBUDAYAAN
1	01	01 2	2.06		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	436 Laporan	475.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN E KEBUDAYAAN



1	L 01	1 01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	L 01	1 01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah	6335 Orang/bulan	3.483.840.640,00	-	- Meningkatnya - transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	107.431.568.392,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	L 01	1 01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	2.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	L 01	1 01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	L 01	1 01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6131 Laporan	1.233.840.640,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	103.386.478.364,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	L 01	1 01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana Prasarana yang dilakukan pemeliharaan	528 Unit	1.690.000.000,00	-	- Meningkatnya - transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	4.040.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	L 01	1 01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	1.055.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1.055.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	L 01	1 01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	960 Unit	135.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	135.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	L 01	1 01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	L 01	1 01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	L 01	1 01	2.09	0009	Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	225.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	2.325.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 1	01	1 02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar IDAMAN Pendidikan Dasar Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetraan (Angka Indeks Max 7) Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Paud (Angka Indeks Max 7) Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Paud (Angka Indeks Max 7) Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP (Angka Indeks Max 7) Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD (Angka Indeks Max 7) 7)	3000 Orang 69,28 Persen 83,92 Persen 89,71 Persen 90,71 Persen	533.131.224.567,00			906.074.388.667,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Standar isi Pendidikan Sekolah -	89,60 Persen	224.428.790.000,00		1. Membangun Sektor	Meningkatnya -	/33 750 110 7EC 00	DINAS PENDIDIKAN DAN
1 -	01	1 02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Standar isi Pendidikan Sekolah Dasar	93,89 Persen	224.426.790.000,00		1. Membangun Sektor Pendidikan	Meningkatnya - perluasan akses dan	433.739.110.756,00	KEBUDAYAAN
					Dasar	Standar kompetensi lulusan	93,89 Persen 90,03 Persen			2. Peningkatan pemenuhan	periuasan akses dan pemerataan		KEBUDAYAAN
						Pendidikan Sekolah Dasar	77,18 Persen			dan pemerataan kualitas	pendidikan yang		
						Standar pembiayaan Pendidikan	99,18 Persen			layanan pendidikan	berkualitas		
						Sekolah Dasar	87,03 Persen						
						Standar Pendidik dan Tenaga	96,18 Persen						
						Kependidikan Pendidikan Sekolah	86,60 Persen						
						Dasar							
						Standar pengelolaan Pendidikan							
						Sekolah Dasar							
						Standar penilaian Pendiidkan							
						Sekolah Dasar Standar proses Pendidikan Sekolah							
						Dasar							
						Standar sarana dan prasarana							
						Pendidikan Sekolah Dasar							
	+												
1	01	02	2.01	0001		Jumlah Sekolah Baru yang Telah	1 Unit	6.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	, DANA BAGI HASIL (DBH) -	1. Membangun Sektor	Meningkatnya	6.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
					(USB)	Dibangun		Semua Kecamatan,		Pendidikan	perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
								Semua Kel/Desa		Peningkatan pemenuhan	pemerataan		
										dan pemerataan kualitas	pendidikan yang		
										layanan pendidikan	berkualitas		
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala	Jumlah Ruang Guru/Kepala	4 Ruang	1.750.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA PAGLHASII (DBH)		Meningkatnya	1 500 000 000 00	DINAS PENDIDIKAN DAN
1	01	02	2.01	0003	Sekolah/TU	Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	Semua Kecamatan,	, DANA BAGITIASIE (DBII)	Ī	perluasan akses dan	1.300.000.000,00	KEBUDAYAAN
					Sekolally 10	Sekolali, 10 yang relah bibangun		Semua Kel/Desa			periuasan akses uan		KEBUDATAAN
								Schlad Kely Desa			pendidikan yang		
											berkualitas		
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit	Jumlah Ruang Unit Kesehatan	2 Ruang	400.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASII (DBH)		Meningkatnya	400,000,000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
-	01	02	2.01	0004	Kesehatan Sekolah	Sekolah yang Telah Dibangun	2 ruang	Semua Kecamatan,	, DAIN BAGITIASIE (DBIT)		perluasan akses dan	400.000.000,00	KEBUDAYAAN
					nesendan sekolan	Scholari yang relati Sisangan		Semua Kel/Desa			pemerataan		NED OD NI VIII
								Schlad Key Sesa			pendidikan yang		
											berkualitas		
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang	9 Ruang	3.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	, DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	Meningkatnya	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
					Sekolah	Telah Dibangun		Semua Kecamatan,	1 ' 1		perluasan akses dan	· ·	KEBUDAYAAN
								Semua Kel/Desa			pemerataan		
											pendidikan yang		
											berkualitas		
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana	Jumlah Sarana, Prasarana dan	13 Unit	3.964.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	, DANA BAGI HASIL (DBH) -	=	Meningkatnya	3.875.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
					dan Utilitas Sekolah	Utilitas Sekolah yang Telah		Semua Kecamatan,			perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
						Dibangun		Semua Kel/Desa			pemerataan		
											pendidikan yang		
											berkualitas		
1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah	Jumlah Rumah Dinas Kepala	6 Unit	2.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	, DANA BAGI HASIL (DBH) -	=	Meningkatnya	3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
					Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga	Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Semua Kecamatan,			perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
					Sekolah	yang Telah DiRehabilitasi		Semua Kel/Desa			pemerataan		
						Sedang/Berat					pendidikan yang		
											berkualitas		
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang	1500 Paket	3.735.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	, DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	Meningkatnya	20.763.823.611,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
						Tersedia		Semua Kecamatan,			perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
								Semua Kel/Desa			pemerataan		
											pendidikan yang		
											berkualitas		
1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang	4 Paket	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	, DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	Meningkatnya	5.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
						Tersedia		Semua Kecamatan,			perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
								Semua Kel/Desa			pemerataan		
											pendidikan yang		
											berkualitas		
1	01	02	2.01	0025		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang	489 Peserta	750.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	, DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	Meningkatnya	750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
	1	1			Kreativitas Siswa	Kompetisi/Lomba Akademik dan	Didik	Semua Kecamatan,			perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
1	1	1				Non Akademik		Semua Kel/Desa			pemerataan		
		1	1					1			pendidikan yang		
1											berkualitas		
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga	Jumlah Pendidik dan Tenaga	160 Orang	70.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	, DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	Meningkatnya	240.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
1		1	1		Kependidikan bagi Satuan	Kependidikan yang Tersedia pada		Semua Kecamatan,			perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
	1	1			Pendidikan Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Semua Kel/Desa			pemerataan		
	1	1									pendidikan yang		
				1		1					berkualitas		



1	01	. 02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Colongan, Pemberian	480 Orang	1.550.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang	3.455.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				berkualitas		
1	01	. 02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan	Jumlah Sekolah Dasar yang	2411 Satuan	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Meningkatnya	1.450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
					Manajemen Sekolah	Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen	Pendidikan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		perluasan akses dan pemerataan		KEBUDAYAAN
						sekolah				pendidikan yang		
	04	00	2.04	0000	Describing Description	Lundah Cahalah Danasana	407353 5-1	04.005.200.000.00 Wala Walat Walat	DANA DACILIACII (PRIII)	berkualitas	100 002 275 000 00	DINAS DENDIDIVAN DAN
1	01	. 02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	107252 Satuan Pendidikan	94.865.390.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Meningkatnya perluasan akses dan	180.993.375.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
								Semua Kel/Desa		pemerataan		
										pendidikan yang berkualitas		
1	01	. 02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan	Jumlah Tenaga Pengelola yang	944 Orang	44.598.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya	550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
					Dana BOS Sekolah Dasar	Meningkat Kapasitasnya dalam		Semua Kecamatan,		perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Semua Kel/Desa		pemerataan pendidikan yang		
						DdSdl				berkualitas		
1	01	. 02	2.01	0035		Jumlah Orang yang Mendapatkan	26 Orang	1.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya	5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
					Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		perluasan akses dan pemerataan		KEBUDAYAAN
					untuk r endidikan	untuk Pendidikan		Sellida Kel/ Desa		pendidikan yang		
										berkualitas		
1	01	. 02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah	40 Konten Digital	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya perluasan akses dan	350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					periolokari	dikembangkan		Semua Kel/Desa		pemerataan		KEBUDATAAN
										pendidikan yang		
1	01	. 02	2.01	0027	Pelatihan Penggunaan Aplikasi	Jumlah peserta pelatihan	567 Orang	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	berkualitas	600,000,000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
1	01	. 02	2.01	0037	Bidang Pendidikan	penggunaan aplikasi di bidang	567 Orang	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Meningkatnya perluasan akses dan	600.000.000,00	KEBUDAYAAN
						pendidikan yang dilaksanakan		Semua Kel/Desa		pemerataan		
										pendidikan yang berkualitas		
1	01	. 02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	400 Dokumen	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya	1.241.301.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
					dan Evaluasi Layanan di Bidang	Perencanaan, Supervisi dan		Semua Kecamatan,		perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
					Pendidikan	Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Semua Kel/Desa		pemerataan pendidikan yang		
						rendukan				berkualitas		
1	01	. 02	2.01	0039	,	Jumlah kegiatan sosialisasi dan	900 Dokumen	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya	700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
					Bidang Pendidikan	advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		perluasan akses dan pemerataan		KEBUDAYAAN
						r character yang anaksanakan		Serial Rey Sesa		pendidikan yang		
	1			L						berkualitas		
1	01	. 02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang	50 Komunitas	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya perluasan akses dan	350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					r endan dan renaga kependidikan	terfasilitasi		Semua Kel/Desa		pemerataan		NESOS/III VIII
										pendidikan yang		
1	01	. 02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan	Jumlah Buku Teks dan Non Teks	12679 Buku	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	berkualitas - Meningkatnya	19 117 958 000 00	DINAS PENDIDIKAN DAN
1 *	01	. 02	2.01	0043	Non Teks Peserta Didik	yang Diterima Peserta Didik	12073 Buku	Semua Kecamatan,	DANA BAGITIASIE (BBIT)	perluasan akses dan	15.117.536.660,60	KEBUDAYAAN
								Semua Kel/Desa		pemerataan		
										pendidikan yang berkualitas		
1	01	. 02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik	12679 Paket	500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya	3.169.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
					Didik	yang Tersedia		Semua Kecamatan,		perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
								Semua Kel/Desa		pemerataan pendidikan yang		
										berkualitas		
1	01	. 02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang	70 Ruang	26.780.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya	36.452.080.713,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
						Bertambah		Semua Kecamatan,		perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
								Semua Kel/Desa		pemerataan pendidikan yang		
										berkualitas		
1	01	. 02	2.01	0049		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis,	7 Orang	850.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya	350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
				1	dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang	Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		perluasan akses dan pemerataan		KEBUDAYAAN
		1			Pendidikan	Bidang Pendidikan yang		Seriod Rei/Desa		pendidikan yang		
1		1	l			dilaksanakan			1	berkualitas		1



1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar	Jumlah Satuan Pendidikan yang	2671 Satuan	1.250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya		DINAS PENDIDIKAN DAN
					Bagi Peserta Didik	Menyelenggarakan Proses Belajar	Pendidikan	Semua Kecamatan,		perluasan akses dan	K	KEBUDAYAAN
								Semua Kel/Desa		pemerataan		
										pendidikan yang berkualitas		
1	01	02 2	2.01	0051	Dahahilitasi Cadana/Darat Duana	Lumlah Duang Kalas Cakalah yang	70 Ruang	23.870.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)		22 420 944 129 00 (DINAS PENDIDIKAN DAN
1	01	02 .	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	70 Ruang	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Meningkatnya perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
					Kelas Sekolali	Telah Direnabilitasi Sedang/Berat		Semua Kel/Desa		perioasan akses dan pemerataan	,	KEBUDATAAN
								Sellida Kely Desa		pendidikan yang		
										berkualitas		
1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar	2000 Peserta	950.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- Meningkatnya	950,000,000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
1 *	01	02 .	2.01	0034	Didik Sekolah Dasar	yang Menerima Biaya Personil	Didik	Semua Kecamatan,	DAINA BAGITIASIE (BBIT)	perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
					Didik Sekolali Dasal	Peserta Didik	Didik	Semua Kel/Desa		pemerataan		REDODATAAN
										pendidikan yang		
										berkualitas		
1	01	02 2	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga	Jumlah Alat Praktik dan Peraga	1232 Paket	3.746.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya	97.895.977.694,00 [DINAS PENDIDIKAN DAN
					Peserta Didik	Peserta Didik yang Tersedia		Semua Kecamatan,		perluasan akses dan	k	KEBUDAYAAN
								Semua Kel/Desa		pemerataan		
										pendidikan yang		
										berkualitas		
1	01	02 2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Standar isi Pendidikan SMP -	86,89 Persen	154.518.418.400,00	-	- Meningkatnya -		DINAS PENDIDIKAN DAN
					Menengah Pertama	Standar kompetensi lulusan	91,32 Persen			perluasan akses dan	l l	KEBUDAYAAN
						Pendidikan SMP	88,32 Persen			pemerataan		
						Standar pembiayaan Pendidikan	77,75 Persen			pendidikan yang		
						SMP	94,46 Persen			berkualitas		
						Standar Pendidik dan Tenaga	82,46 Persen					
						Kependidikan SMP	93,89 Persen					
						Standar pengelolaan Pendidikan	81,75 Persen					
						SMP						
						Standar penilaian Pendidikan						
						SMP						
						Standar proses Pendidikan						
						Sivil						
						Standar sarana dan prasarana						
						Pendidikan SMP						
_	04	02 1	2.02	0000	D	Lumbah Buran Com Wanala	5.0	4 200 000 000 00 1/- 1/- 1/- 1/- 1/- 1/- 1/- 1/- 1/- 1/-	DANA DA CULIACII (DDIII)	Mary to all above	4 357 0 45 000 00 1	DINAS PENDIDIKAN DAN
1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 Ruang	1.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Meningkatnya perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
					Sekolarly TO	Sekolari/ TO yang Telah Dibangun		Semua Kel/Desa		pentuasan akses dan pemerataan	,	KEBUDATAAN
								Sellida Kely Desa		pendidikan yang		
										berkualitas		
1	01	02 :	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang	2 Ruang	1.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH) -	- Meningkatnya	1.810.450.000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN
_						Telah Dibangun		Semua Kecamatan,		perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
								Semua Kel/Desa		pemerataan		
										pendidikan yang		
										berkualitas		
1	01	02 2	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana	Jumlah Sarana, Prasarana dan	11 Unit	3.525.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya	2.902.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
				1	dan Utilitas Sekolah	Utilitas Sekolah yang Telah		Semua Kecamatan,		perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
				1		Dibangun		Semua Kel/Desa		pemerataan		
										pendidikan yang		
										berkualitas		
1	01	02 2	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	Jumlah Ruang kelas sekolah yang	10 Ruang	8.250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya	2.705.673.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
				1	Kelas Sekolah	Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Semua Kecamatan,		perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
								Semua Kel/Desa		pemerataan		
										pendidikan yang		
										berkualitas		
	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang	234 Paket	1.690.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya		DINAS PENDIDIKAN DAN
1		1 1		1		Tersedia		Semua Kecamatan,		perluasan akses dan	k	KEBUDAYAAN
1								Semua Kel/Desa		pemerataan		
1										pendidikan yang		
1										berkualitas		
						ł		3.125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya		DINAS PENDIDIKAN DAN
1	01	02 2	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang	207 Paket			perluasan akses dan	l Ir	KEBUDAYAAN
	01	02 2	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	207 Paket	Semua Kecamatan,				
	01	02 2	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		207 Paket			pemerataan		
	01	02 2	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		207 Paket	Semua Kecamatan,		pemerataan pendidikan yang		
1						Tersedia		Semua Kel/Desa		pemerataan pendidikan yang berkualitas		
					Penyediaan Biaya Personil Peserta	Tersedia Jumlah Peserta didik Sekolah	3015 Peserta	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2.960.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	pemerataan pendidikan yang berkualitas - Meningkatnya	2.960.000.000,00	
1						Tersedia Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2.960.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	pemerataan pendidikan yang berkualitas - Meningkatnya perlusaan akses dan	2.960.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1					Penyediaan Biaya Personil Peserta	Tersedia Jumlah Peserta didik Sekolah	3015 Peserta	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2.960.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	pemerataan pendidikan yang berkualitas - Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan	2.960.000.000,00	
1					Penyediaan Biaya Personil Peserta	Tersedia Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima	3015 Peserta	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2.960.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	pemerataan pendidikan yang berkualitas - Meningkatnya perlusaan akses dan	2.960.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



1 1	Ω1	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang	2069 Peserta	3.475.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya	3.925.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
1	01	02 1	2.02	0036	Kreativitas Siswa	Kompetisi/Lomba Akademik dan	Didik	Semua Kecamatan,	DANA BAGITIASIE (DBII)	perluasan akses dan	3.523.000.000,00	KEBUDAYAAN
					Kreativitas siswa	Non Akademik	Didik			perruasan akses dari pemerataan		KEBUDATAAN
						Non Akademik		Semua Kel/Desa				
										pendidikan yang berkualitas		
1	01	02 2	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan	Jumlah Pendidik dan Tenaga	817 Orang	5.495.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DRH) -	- Meningkatnya	5.820.000.000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN
*	01	02 1	2.02	0040	Tenaga Kependidikan pada Satuan	Kependidikan yang Mendapatkan	or orang	Semua Kecamatan,	DAIVA BAGITIASIE (BBIT)	perluasan akses dan	5.620.000.000,00	KEBUDAYAAN
					Pendidikan Sekolah Menengah	Fasilitasi Kenaikan		Semua Kel/Desa		pemerataan		REBUDATAAN
								Serilua Kei/ Desa				
					Pertama	Pangkat/Golongan, Pemberian				pendidikan yang		
						Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				berkualitas		
						uan kuannkasi						
1	01	02 2	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama	162 Satuan	400.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA PACLUACII (DDIII)	Maningkatarya	1 150 000 000 00	DINAS PENDIDIKAN DAN
1	01	02 .	2.02	0041	Manajemen Sekolah	yang Dilaksanakan Pembinaan	Pendidikan	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Meningkatnya perluasan akses dan	1.150.000.000,00	KEBUDAYAAN
					ivianajemen sekolan	yang bilaksanakan rembiliaan	rendukan	Semua Kel/Desa		pemerataan		REBUDATAAN
								Serilua Kei, Desa		pendidikan yang		
										berkualitas		
1	01	02 2	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah pertama	76089 Satuan	59.989.018.400,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya	101 492 466 000 00	DINAS PENDIDIKAN DAN
*	01	02 1	2.02	0042	Menengah Pertama	yang Mengelola Dana BOS	Pendidikan	Semua Kecamatan,	DAIVA BAGITIASIE (BBIT)	perluasan akses dan	101.452.400.000,00	KEBUDAYAAN
					Wellengali Pertama	yang Mengelola Dalia BOS	Pendidikan	Semua Kel/Desa		perruasan akses dari pemerataan		REBUDATAAN
								Serilua Kei, Desa		pendidikan yang		
										berkualitas		
1	01	02 2	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan	Jumlah Tenaga yang Meningkat	3945 Orang	31.239.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- Meningkatnya	2 200 000 000 00	DINAS PENDIDIKAN DAN
1	OI	02 4	2.02	0043	Dana BOS Sekolah Menengah	Kapasitasnya dalam Pengelolaan	Sata Oldik	Semua Kecamatan,	DAIN DAGITIASIL (DBII)	perluasan akses dan	2.200.000.000,00	KEBUDAYAAN
			J		Pertama	Dana BOS Sekolah Menengah		Semua Kel/Desa		perruasan akses dari pemerataan		REDUDATAAN
					reitailla	Pertama		Serilua Kei, Desa		pendidikan yang		
						reitailia				berkualitas		
1	01	02 2	2.02	0048	Dombinson Dongsunson Tolondosi	Lumlah Orang yang Mandanathan	192 Orang	4.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -		9 200 000 000 00	DINAS PENDIDIKAN DAN
1	01	02 .	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi,	Jumlah Orang yang Mendapatkan	192 Orang		DANA BAGI HASIL (DBH)	- Meningkatnya	9.200.000.000,00	
					Informasi dan Komunikasi (TIK)	Pembinaan Penggunaan Teknologi,		Semua Kecamatan,		perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
					untuk Pendidikan	Informasi dan Komunikasi (TIK)		Semua Kel/Desa		pemerataan		
						untuk Pendidikan				pendidikan ya ng berkualitas		
		L										
1	01	02	2.02	0049			100 Konten	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
					pendidikan	pendidikan yang telah	Digital	Semua Kecamatan,		perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
						dikembangkan		Semua Kel/Desa		pemerataan		
										pendidikan yang		
										berkualitas		
1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi	Jumlah peserta pelatihan	162 Orang	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya	647.704.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
					Bidang Pendidikan	penggunaan aplikasi di bidang		Semua Kecamatan,		perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
						pendidikan yang dilaksanakan		Semua Kel/Desa		pemerataan		
										pendidikan yang		
	-			0051					2.11.2.2.2.11.2.11	berkualitas		
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	2 Dokumen	900.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
					dan Evaluasi Layanan di Bidang	Perencanaan, Supervisi dan		Semua Kecamatan,		perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
					Pendidikan	Evaluasi Layanan di Bidang		Semua Kel/Desa		pemerataan		
						Pendidikan				pendidikan yang		
		L								berkualitas		
1	01	02	2.02	0054	,	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik	360 Komunitas	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya	1.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
					Pendidik dan Tenaga Kependidikan	dan Tenaga Pendidik yang		Semua Kecamatan,		perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
						terfasilitasi		Semua Kel/Desa		pemerataan		
										pendidikan yang berkualitas		
							100 11 1 1		244424444444444			
1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan	Jumlah kegiatan pendampingan	162 Kegiatan	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya	/50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
					bagi satuan pendidikan untuk	bagi satuan pendidikan untuk		Semua Kecamatan,		perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
					pencegahan perundungan,	pencegahan perundungan,		Semua Kel/Desa		pemerataan		
					kekerasan, dan intoleransi	kekerasan, dan intoleransi				pendidikan yang		
	1									berkualitas		
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar	Jumlah Peserta Didik yang	434 Satuan	400.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya	1.850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
			J		bagi Peserta Didik	Mengikuti Proses Belajar	Pendidikan	Semua Kecamatan,		perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
			J					Semua Kel/Desa		pemerataan		1
			J							pendidikan yang		1
	1				<u> </u>					berkualitas		
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang	24 Ruang	14.320.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya	9.754.356.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
1			J			Bertambah		Semua Kecamatan,		perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
			J					Semua Kel/Desa		pemerataan		1
			J					1		pendidikan yang		1
	<u> </u>	$oxed{oxed}$								berkualitas		
1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan,	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis,	600 Orang	6.400.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya	6.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
	1		J		dan/atau Magang/PKL untuk	Pelatihan, dan/atau Magang/PKL		Semua Kecamatan,		perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
					Peningkatan Kapasitas Bidang	untuk Peningkatan Kapasitas		Canaus Kal/Dasa	1	pemerataan		1
								Semua Kel/Desa				
					Pendidikan	Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		Semua Rely Desa		pendidikan yang berkualitas		



1		2			3	4	5	6	7	8	9 10	11	12	13	14	15	16	17
1	01	1 02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				45 Buku	2.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas		16.875.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	1 02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				324 Paket	2.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas		29.478.623.611,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	1 02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Standar Isi Pendidikan PAUD Standar Pembiayaan Pendidikan PAUD Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Standar Pengelolaan Pendidikan PAUD Standar Penjelolaan Pendidikan PAUD Standar Penilaian Pendidikan PAUD Standar Proses Pendidikan PAUD Standar Proses Pendidikan PAUD Standar Sarana Prasana Pendidikan PAUD Standar Sarana Prasana Pendidikan PAUD Standar Tingkat Pencapaian				92,53 Persen 84,50 Persen 44,79 Persen 93,80 Persen 93,80 Persen 89,04 Persen 74,93 Persen 90,78 Persen	128.978.588.167,00		•	-	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas		145.710.588.889,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	1 02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				9 Unit	4.925.434.667,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas		3.040.634.667,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	1 02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				1540 Paket	120.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas		21.204.323.611,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	1 02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenalikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				497 Orang	2.900.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas		2.975.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	1 02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				1502 Satuan Pendidikan	3.100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas		2.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	1 02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				20635 Satuan Pendidikan	39.150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas		44.594.847.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	1 02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				564 Orang	47.754.065.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	1 02	2.03	0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				100 Konten Digital	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	1 02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				567 Orang	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	1 02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				300 Dokumen	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



1													
	01	1 02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan	300 Dokur	nen 450.000.000,00 Kai	o. Kutai Kartanegara, DANA BAGI HA	ASIL (DBH) -	Meningkatnya	950.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
					Bidang Pendidikan	advokasi kebijakan di bidang			nua Kecamatan,		perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
						Pendidikan yang dilaksanakan			nua Kel/Desa		pemerataan		
						,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,					pendidikan yang		
											berkualitas		
1	01	1 02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik	780 Komu	nitas 150.000.000,00 Kai	. Kutai Kartanegara, DANA BAGI HA	ASIL (DBH)	Meningkatnya	1.450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
					Pendidik dan Tenaga Kependidikan	dan Tenaga Pendidik yang			nua Kecamatan,		perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
						terfasilitasi			nua Kel/Desa		pemerataan		
											pendidikan yang		
											berkualitas		
1	01	1 02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang	12 Ruang	5.650.000.000,00 Kai	o. Kutai Kartanegara, DANA BAGI HA	ASIL (DBH)	Meningkatnya	5,362,160,000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
		_				Bertambah			nua Kecamatan,	(==,	perluasan akses dan	0.000	KEBUDAYAAN
									nua Kel/Desa		pemerataan		
									,		pendidikan yang		
											berkualitas		
1	01	1 02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan,	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis,	380 Orang	850.000.000,00 Kai	. Kutai Kartanegara, DANA BAGI HA	ASIL (DBH)	Meningkatnya	2.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
					dan/atau Magang/PKL untuk	Pelatihan, dan/atau Magang/PKL			nua Kecamatan,	` '	perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
					Peningkatan Kapasitas Bidang	untuk Peningkatan Kapasitas			nua Kel/Desa		pemerataan		
					Pendidikan	Bidang Pendidikan yang			•		pendidikan yang		
						dilaksanakan					berkualitas		
1	01	1 02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru	Jumlah Sekolah Baru yang Telah	1 Unit	7.580.000.000.00 Kai	. Kutai Kartanegara, DANA BAGI HA	ASIL (DBH)	Meningkatnya	7,580,000,000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
1 -	1	1	1	1	(USB)	Dibangun]		nua Kecamatan,	· · ·	perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
1	ĺ		1	1	· '				nua Kel/Desa	1	pemerataan	1	
1	ĺ		1	1							pendidikan yang	1	
			1								berkualitas	ĺ	
1	01	1 02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik	49385 Pak	et 7.360.000.000,00 Kai	. Kutai Kartanegara, DANA BAGI HA	ASIL (DBH)	Meningkatnya	7.360.000.000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN
1	1		1	1	Didik	yang Tersedia			nua Kecamatan,		perluasan akses dan	1	KEBUDAYAAN
1	ĺ		1	1					nua Kel/Desa		pemerataan	1	
											pendidikan yang		
											berkualitas		
1	01	1 02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,	Jumlah Sarana, Prasarana dan	2 Unit	696.460.000.00 Kal	. Kutai Kartanegara, DANA BAGI HA	ASII (DBH)	Meningkatnya	696,460,000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
		_			Prasarana dan Utilitas PAUD	Utilitas PAUD yang Telah			nua Kecamatan,	(==::,	perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
						Direhabilitasi Sedang/Berat			nua Kel/Desa		pemerataan		
						bir chabintasi sedangi serat		56.	nda Kely Desa		pendidikan yang		
											berkualitas		
1	01	1 02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga	Jumlah Alat Praktik dan Peraga	641 Paket	6.725.000.000.00 Kal	o. Kutai Kartanegara, DANA BAGI HA	ASII (DRH)	Meningkatnya	40.011.906.611,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
		_			Peserta Didik PAUD	Peserta Didik PAUD yang Tersedia			nua Kecamatan,	(==,	perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
					reserta Blanci i i lo	r eserta sianti ritos yang rerseata			nua Kel/Desa		pemerataan		THE SOUTH THE THE SECOND THE SECO
								56.	nda Kely Desa		pendidikan yang		
											berkualitas		
1	01	1 02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar	Jumlah Peserta Didik PAUD yang	9164 Satu	an 400,000,000,00 Kal	o. Kutai Kartanegara, DANA BAGI HA	ASII (DRH) -	Meningkatnya	2.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
1 -	"	- 02	2.05	0017	PAUD	Mengikuti Proses Belajar	Pendidikar		nua Kecamatan.	Note (BBH)	perluasan akses dan	2.500.000.000,00	KEBUDAYAAN
					77.05	Wengikati 170505 Belajai	T CTIONAL		nua Kel/Desa		pemerataan		THE SOUTH THE THE SECOND THE SECO
								56.	nda Kely Desa		pendidikan yang		
											berkualitas		
1	01	1 02	2.03	0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang	Jumlah Ruang Guru/Kepala	2 Ruang	217.628.500.00 Kal	. Kutai Kartanegara, DANA BAGI HA	ASII (DBH)	Meningkatnya	435.257.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
					Guru/Kepala Sekolah/TU	Sekolah/TU yang Telah			nua Kecamatan.	* , ,	perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
						Direhabilitasi sedang/berat		Ser	nua Kel/Desa		pemerataan		
						g,					pendidikan yang		
											berkualitas		
1	01	1 02	2.04		Pengelolaan Pendidikan	Angka Melek Huruf -	99,99 Pers	en 25.205.428.000,00			Meningkatnya -	69.718.044.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
			1		Nonformal/Kesetaraan	Standar Isi Pendidikan	73,57 Pers				perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
			1			Kesetaraan	69,,67 Per				pemerataan	ĺ	
1	ĺ		1	1		Standar Kompetensi Kelulusan	63,33 Pers		[pendidikan yang	1	
		- 1	1			Pendidikan Kesetaraan	66,48 Pers				berkualitas	ĺ	
				1		Standar Pembiayaan Pendidikan	68,53 Pers					ĺ	
							68,38 Pers		[1	
						Kesetaraan							
						Kesetaraan Standar Pendidik dan Tenaga		en					
						Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan	73,53 Pers 68,24 Pers						
						Standar Pendidik dan Tenaga	73,53 Pers						
						Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan	73,53 Pers						
						Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan	73,53 Pers						
						Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan Standar Pengelolaan Pendidikan	73,53 Pers						
						Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan Standar Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan	73,53 Pers						
						Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan Standar Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Standar Penilaian Pendidikan	73,53 Pers						
						Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan Standar Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Standar Penilaian Pendidikan Kesetaraan	73,53 Pers						
						Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan Standar Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Standar Penilaian Pendidikan Kesetaraan Standar Proses Pendidikan	73,53 Pers						
						Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan Standar Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Standar Penilaian Pendidikan Kesetaraan Standar Proses Pendidikan Kesetaraan	73,53 Pers						
1	01	1 02	2.04	0010	Penyediaan Riaya Personil Peserta	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan Standar Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Standar Penilaian Pendidikan Kesetaraan Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Standar Sarana Prasana Pendidikan Kesetaraan	73,53 Pers 68,24 Pers	en	o. Kutai Kartanesara DANA RAGI HA	ASIL (DBH) -	Menjingkatnya	3350 000 000 00	DINAS PENDIDIKAN DAN
1	01	1 02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan Standar Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Standar Penilaian Pendidikan Kesetaraan Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Jumiah Peserta Didik	73,53 Pers 68,24 Pers	erta 3.350.000.000,00 Kal	o. Kutai Kartanegara, DANA BAGI HA	ASIL (DBH)	Meningkatnya perluasan akses dan	3.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
1	01	1 02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan Standar Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Standar Penilaian Pendidikan Kesetaraan Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Standar Sarana Prasana Pendidikan Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Jumlah Peserta Didik	73,53 Pers 68,24 Pers	erta 3.350.000.000,00 Kal Ser	nua Kecamatan,	ASIL (DBH)	perluasan akses dan	3.350,000,000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	1 02	2.04	0010		Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan Standar Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Standar Penilaian Pendidikan Kesetaraan Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Jumiah Peserta Didik	73,53 Pers 68,24 Pers	erta 3.350.000.000,00 Kal Ser		ASIL (DBH)		3.350,000,000,00	



				- 1		 		1					1
1	01	02 2.0	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	135 Satuan Pendidikan	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02 2.0	1 0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang	11800 Satuan Pendidikan	7.724.810.000,00	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	berkualitas Meningkatnya perluasan akses dan	12.717.240.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Mengelola Dana BOP			Semua Kel/Desa			pemerataan pendidikan yang berkualitas		
1	01	02 2.0	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaar Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	54 Orang	1.605.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
1	01	02 2.0	1 0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	60 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAI KEBUDAYAAN
1	01	02 2.0	1 0025	Pengembangan konten digital untu pendidikan	k Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	54 Konten Digital	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
1	01	02 2.0	1 0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	60 Orang	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
1	01	02 2.0	1 0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	27 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas	350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
1	01	02 2.0	0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	35 Kegiatan	140.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas	140.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
1	01	02 2.0	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas	75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
1	01	02 2.0	1 0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	10788 Buku	1.717.618.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas	1.717.618.000,00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
1	01	02 2.0	1 0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	354 Orang	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas	1.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
1	01	02 2.0	1 0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	14665 Peserta Didik	6.110.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas	8.860.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
1	01	02 2.0	1 0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	3 unit	2.783.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas	675.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
1	01	02 2.0	1 0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	5 Paket	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas	625.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN
1	01	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Satuan Pendidikan - Yang Melaksanakan Muatan Lokal (Mulok)	100 Persen	1.720.000.000,00				-	4.420.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DA KEBUDAYAAN



	1 0	01 03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan	Tersedianya kurikulum Muatan -	1 Dokumen	1.720.000.000,00	I	- Meningkatnya -	4 420 000 000 00	DINAS PENDIDIKAN DAN
	٠ ١ ٠	01 03	2.01					1.720.000.000,00	l '		4.420.000.000,00	
					Lokal Pendidikan Dasar	Lokal bagi jenjang pendidikan SD	1 Dokumen			perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
						Tersedianya kurikulum Muatan	1 Dokumen			pemerataan		
						Lokal bagi jenjang pendidikan	1 Dokumen			pendidikan yang		
						SMP				berkualitas		
						Tersedianya perangkat						
						pembelajaran kurikulum muatan						
						lokal jenjang SD						
						Tersedianya perangkat						
						pembelajaran kurikulum muatan						
						lokal jenjang SMP						
						lokal jenjang sim						
	1 0	01 03	2.04	0000	Penyediaan Buku Teks Pelajaran	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan	4151 Buku	670.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA DA CULIACII (DDU)	A A continual co	670,000,000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
	1 0	01 03	2.01	0003			4151 BUKU		DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya	670.000.000,00	KEBUDAYAAN
					Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Lokal Pendidikan Dasar yang		Semua Kecamatan,		perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
						Tersedia		Semua Kel/Desa		pemerataan		
										pendidikan yang		
										berkualitas		
	1 0	01 03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Jumlah Penyusun Kurikulum	215 Orang	1.050.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya	1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
					Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Semua Kecamatan,		perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
						yang Meningkat Kompetensinya		Semua Kel/Desa		pemerataan		
										pendidikan yang		
										berkualitas		
4	1 (01 04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA	Presentase terpenuhinya jumlah -	97 Persen	450.000.000,00			6.640.000.000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN
-	- -				KEPENDIDIKAN	guru						KEBUDAYAAN
	1 (01 04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas	Rasio Guru dengan Peserta didik -	1 :15 rasio	450.000.000,00	-	- Meningkatnya -	6.640.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
					Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1:24 rasio	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
					bagi Satuan Pendidikan Dasar,	Rasio Guru dengan Peserta didik	1:26 rasio			pemerataan		NEDOD/11/041
					PAUD, dan Pendidikan	cn	1.20 1030			pendidikan yang		
					Nonformal/Kesetaraan	Desire Commission Description of the				berkualitas		
					Nonionnal Resetal aan	Rasio Guru dengan Peserta didik				Dei Kuantas		
	1 0	04 04	2.04	0004	Dealth and deal Dealth	5.5.1	010 Delemen	450 000 000 00 K-b K-b-l K-b	DANA DA CULIACII (DDU)	A A control of the control	3 000 000 000 00	DINAS DENIDIDIKAN DAN
	1 0	01 04	2.01	0001		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan	819 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya	3.090.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
					Pendidik dan Tenaga Kependidikan	dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga		Semua Kecamatan,		perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
					Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,	Kependidikan Satuan Satuan		Semua Kel/Desa		pemerataan		
					dan Pendidikan	Pendidikan Dasar, PAUD, dan				pendidikan yang		
					Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				berkualitas		
	1 0	01 04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	1696 Laporan	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya	3,550,000,000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
	- -				dan Tenaga Kependidikan bagi	Penataan Pendistribusian Pendidik		Semua Kecamatan,		perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
					Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,	dan Tenaga Kependidikan Satuan		Semua Kel/Desa		pemerataan		REBUBATAAN
					dan Pendidikan	Pendidikan Dasar, PAUD, dan		Sellida Kely Desa		pendidikan yang		
					Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				berkualitas		
					Noniornal/Resetaradii	Pendidikan Noniormal/Kesetaraan				Dei Rudiitas		
_	_			-								
5	1 0	01 05			PROGRAM PENGENDALIAN	Persentase Satuan pendidikan -	100 Persen	530.000.000,00			1.950.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
					PERIZINAN PENDIDIKAN	yang memiliki izin pendirian dan						KEBUDAYAAN
						izin operasional						
- 1	1 0	01 05	2.01	1	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar	Penerbitan izin pendirian dan -	60	80.000.000,00	-	- Meningkatnya -	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
1		- 1	1	1	yang Diselenggarakan oleh	operasional sekolah	dokumen			perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
					Masyarakat					pemerataan		
					Ť					pendidikan yang		
										berkualitas		
	1 (01 05	2.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian	28 Dokumen	35.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH) -	- Meningkatnya	35,000,000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
	^ `	- 33	2.01	0001	Pendidikan Dasar yang	Kelayakan Usul Perizinan	20 DONAMIEM	Semua Kecamatan,	S. I. C.	perluasan akses dan	33.000.000,00	KEBUDAYAAN
			1	1	Diselenggarakan oleh Masyarakat							REDUDATAAN
					Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pendidikan Dasar yang		Semua Kel/Desa		pemerataan		
			1	1		Diselenggarakan oleh Masyarakat				pendidikan yang	I	
	_ _		-	1				45.000.000.000	David Da Guardia (DDI)	berkualitas		
	1 0	01 05	2.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan	30 Dokumen	45.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatnya	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
			1	1	Perizinan Pendidikan Dasar yang	Pengendalian dan Pengawasan		Semua Kecamatan,		perluasan akses dan	I	KEBUDAYAAN
		- 1	1	1	Diselenggarakan oleh Masyarakat	Perizinan Pendidikan Dasar yang		Semua Kel/Desa		pemerataan		
			1	1		Diselenggarakan oleh Masyarakat				pendidikan yang		
1										berkualitas		
	L			<u></u>								
	1 0	01 05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan	Penerbitan izin pendirian dan -	100 Dokumen	450.000.000,00	-	- Meningkatnya -	1.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
			1	1	Pendidikan Nonformal yang	operasional sekolah		•		perluasan akses dan		KEBUDAYAAN
		- 1	1	1	Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.				pemerataan		1
	1			1	you and it occurred you and t					pendidikan yang		
			1	1		1		- I		penuluikan yang		1
						1 1				berkualitas		

1	1 0	01 05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Periziianan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	950 Dokumen	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	perlu: peme	ngkatnya asan akses dan rataan dikan yang alitas	1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 0	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	550 Dokumen	200.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	perluc peme	ngkatnya asan akses dan rataan dikan yang alitas	850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6 1	1 0	01 06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Cakupan sekolah yang - menggunakan bahasa daerah sebagai mata pelajaran	100 Persentase	820.000.000,00			-	4.860.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 0	01 06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penutur muda bahasa daerah Publikasi Bahasa dan SastraDaerah Terlaksanannya program pembudayaan bahasa dan sastra daerah dijenjang sekolah SD Terlaksanannya program pembudayaan bahasa dan sastra daerah dijenjang sekolah	4060 orang 5 kali kegiatan 300 sekolah 106 sekolah	820.000.000,00	-	perluci peme	ngkatnya asan akses dan rataan dikan yang alitas	4.860.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 0	01 06	2.01	0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan	2 Orang	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	perlu: peme pendi	ngkatnya asan akses dan rataan dikan yang alitas	20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 0	01 06	2.01	0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	3550 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Menir perlu peme pendi	ngkatnya asan akses dan rataan dikan yang alitas	1.720.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 0	01 06	2.01	0008	Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah	Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan	3000 Buku	100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Menir perlu peme	ngkatnya asan akses dan rataan dikan yang	120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 0	01 06	2.01	0009	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah	Jumlah Kamus Bahasa Daerah kewenangan kabupaten/kota	1000 Buku	100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Menir perlu peme pendi	ngkatnya asan akses dan rataan dikan yang alitas	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 0	01 06	2.01	0010	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota	Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota	1150 Orang	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Menir perlu peme	ngkatnya asan akses dan rataan dikan yang	1.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 0	01 06	2.01	0011	Fasilitasi media publik berbahasa daerah	Jumlah media bahasa daerah terfasilitasi	602 Media	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	perlu: peme	ngkatnya asan akses dan rataan dikan yang alitas	·	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2						ANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		15.090.000.000,00					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	2 2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG H	KEBUDAYAAN		15.090.000.000,00				26.475.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7 2	2 2	22 02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Desa Budaya yang Aktif (Existing 5 Desa Budaya) Jumlah Pelaksanaan Event Budaya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	100 Persentase 30 Event	9.500.000.000,00			-	16.325.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	2 2	22 02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana pelestarian Seni dan Tradisi budaya lokal yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelakunya	5 Kegiatan	8.500.000.000,00	-	peles penge	ngkatkan - tarian dan elolaan aman warisan /a	15.325.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2	22	2 02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan,	Jumlah Objek Pemajuan	30 Objek	8.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatkan	14.425.000.000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN
					Pemanfaatan Objek Pemajuan	Kebudayaan yang Dilakukan		Semua Kecamatan,		pelestarian dan	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	KEBUDAYAAN
					Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan,		Semua Kel/Desa		pengelolaan		
						Pemanfaatan				keragaman warisan		
										budaya		
2	22	2 02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia,	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber	60 Orang	500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatkan	900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
-		-			Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Daya Manusia, Lembaga, dan		Semua Kecamatan.		pelestarian dan		KEBUDAYAAN
					Lembaga, dam ranata kebadayaan	Pranata Kebudayaan		Semua Kel/Desa		pengelolaan		KEBODATAAN
						Tranata Kebudayaan		Schlad Kely Desa		keragaman warisan		
										budaya		
-	22	2 02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional	Terlaksana pelestarian Seni dan -	15 Kegiatan	1.000.000.000,00		- Meningkatkan -	1 000 000 000 00	DINAS PENDIDIKAN DAN
	22	2 02	2.02			Tradisi budaya lokal yang	15 Kegiatan	1.000.000.000,00		pelestarian dan	1.000.000.000,00	KEBUDAYAAN
					yang Masyarakat Pelakunya dalam							KEBUDAYAAN
					Daerah Kabupaten/Kota	meningkatkan kesejahteraan				pengelolaan		
						masyarakat dan pelakunya				keragaman warisan		
		2 22	2.02	0004			4 Objet	4 000 000 000 00 14 1 14 1 14	DANA DACILIACII (DDIII)	budaya	4 000 000 000 00	
	22	2 02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan,	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi	1 Objek	1.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Meningkatkan	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
					Pemanfaatan Objek Pemajuan	Budaya yang Dilakukan		Semua Kecamatan,		pelestarian dan		KEBUDAYAAN
					Tradisi Budaya	Pelindungan, Pengembangan dan		Semua Kel/Desa		pengelolaan		
						Pemanfaatan				keragaman warisan		
										budaya		
8 2	22	2 03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase Lembaga Seni Budaya - Yang Aktif	80 Persen	390.000.000,00			3.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	2 03	2.01		Pembinaan Kesenian yang	Terlaksananya pelestarian -	15 Kegiatan	390.000.000,00	-	- Meningkatkan -	3.200.000.000,00	
-		- 05	2.01		Masyarakat Pelakunya dalam	kesenian daerah yang	13 Registari	330.000.000,00		pelestarian dan	3.200.000.000,00	KEBUDAYAAN
					Daerah Kabupaten/Kota	meningkatkan kesejahteraan				pengelolaan		REDODATAAN
					Daeran Kabupaten Kota	masyarakat dan pelakunya				keragaman warisan		
	1		l	l		masyarakat uan pelakunya				keragaman warisan budaya	1	1
2	22	2 03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan	Jumlah Sumber Daya Manusia	3286 Orang	190.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- Meningkatkan	200,000,000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
- 2	- 22	2 03	2.01	0001	Pelatihan Sumber Daya Manusia	Kesenian Tradisional yang	3280 Orang	Semua Kecamatan,	DANA BAGITIASIE (DBTI)	pelestarian dan	300.000.000,00	KEBUDAYAAN
												KEBUDATAAN
					Kesenian Tradisional	Mendapat Pendidikan dan		Semua Kel/Desa		pengelolaan		
						Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				keragaman warisan		
	_					<u> </u>				budaya		
2	22	03	2.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi	Jumlah Sumber Daya Manusia	60 Sertifikat	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatkan	750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
					Sumber Daya Manusia Kesenian	Kesenian Tradisonal yang Mengikuti		Semua Kecamatan,		pelestarian dan		KEBUDAYAAN
					Tradisional Sesuai dengan	Proses Standarisasi		Semua Kel/Desa		pengelolaan		
					Kebutuhan dan Tuntutan					keragaman warisan		
										budaya		
9 2	22	2 04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Presetase Sejarah lokal yang -	78,67 Persen	500.000.000,00		-	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
	+-					dilestarikan						KEBUDAYAAN
2	22	2 04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1	Terlaksananya pelestarian sejarah,	20 Kegiatan	500.000.000,00	-	- Meningkatkan -	500.000.000,00	
					(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	tradisi dan budaya lokal				pelestarian dan		KEBUDAYAAN
										pengelolaan		
										keragaman warisan		
										budaya		
2	22	2 04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan	2 Dokumen	500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Meningkatkan	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
					Terhadap Data dan Informasi	Informasi Sejarah yang Dapat		Semua Kecamatan,		pelestarian dan		KEBUDAYAAN
					Sejarah	Diakses Masyarakat		Semua Kel/Desa		pengelolaan		
										learness man marians		
										keragaman warisan		
10 2										budaya		
		2 05			PROGRAM PELESTARIAN DAN	Persentase Cagar Budaya yang -	100 Persen	3.900.000.000,00			3.850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
	22	2 05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	dipelihara (Berdasarkan SK	100 Persen 19.60 Persen	3.900.000.000,00			3.850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	22	2 05				dipelihara (Berdasarkan SK Penetapan)		3.900.000.000,00			3.850.000.000,00	
		2 05				dipelihara (Berdasarkan SK Penetapan) Presentase Penetapan Cagar		3.900.000.000,00			3.850.000.000,00	
					PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	dipelihara (Berdasarkan SK Penetapan) Presentase Penetapan Cagar Budaya Potensial (SK Bupati)	19.60 Persen			budaya -		KEBUDAYAAN
2			2.01		PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Penetapan Cagar Budaya Peringkat	dipelihara (Berdasarkan SK Penetapan) Presentase Penetapan Cagar Budaya Potensial (SK Bupati) Terlaksananya -		3.900.000.000,00 150.000.000,00		budaya		KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN
2			2.01		PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	dipelihara (Berdasarkan SK Penettapan) Presentase Penetapan Cagar Budaya Potensial (SK Bupati) Terlaksananya - perlindungan,pengembangan,	19.60 Persen			budaya Meningkatkan - pelestarian dan		KEBUDAYAAN
2			2.01		PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Penetapan Cagar Budaya Peringkat	dipelihara (Berdasarkan SK Penettapan) Presentase Penetapan Cagar Budaya Potensial (SK Bupati) Terlaksananya perlindungan,pengembangan, pemanfaatan Cagar Budaya yang	19.60 Persen			- Meningkatkan - pelestarian dan pengelolaan		KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN
2			2.01		PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Penetapan Cagar Budaya Peringkat	dipelihara (Berdasarkan SK Penettapan) Presentase Penetapan Cagar Budaya Potensial (SK Bupati) Terlaksananya - perlindungan,pengembangan,	19.60 Persen			- Meningkatkan - pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan		KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN
	22	2 05			PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	dipelihara (Berdasarkan SK Penettapan) Presentase Penetapan Cagar Budaya Potensial (SK Bupati) Terlaksananya - perlindungan,pengembangan, pemanfaatan Cagar Budaya yang telah ditetapkan	19.60 Persen 20 cagar budaya	150.000.000,00		- Meningkatkan - pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya	550.000.000,00	KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22			0002	PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Penetapan Cagar Budaya Peringkat	dipelihara (Berdasarkan SK Penettapan) Presentase Penetapan Cagar Budaya Potensial (SK Bupati) Terlaksananya - perlindungan,pengembangan, pemanfaatan Cagar Budaya yang telah ditetapkan Jumlah Objek Cagar Budaya yang	19.60 Persen	150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Meningkatkan - pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Meningkatkan	550.000.000,00	KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN
	22	2 05		0002	PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	dipelihara (Berdasarkan SK Penettapan) Presentase Penetapan Cagar Budaya Potensial (SK Bupati) Terlaksananya - perlindungan,pengembangan, pemanfaatan Cagar Budaya yang telah ditetapkan	19.60 Persen 20 cagar budaya	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Meningkatkan - pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya	550.000.000,00	KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	22	2 05		0002	PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	dipelihara (Berdasarkan SK Penettapan) Presentase Penetapan Cagar Budaya Potensial (SK Bupati) Terlaksananya - perlindungan,pengembangan, pemanfaatan Cagar Budaya yang telah ditetapkan Jumlah Objek Cagar Budaya yang	19.60 Persen 20 cagar budaya	150.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan	550.000.000,00	KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN
	22	2 05		0002	PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	dipelihara (Berdasarkan SK Penettapan) Presentase Penetapan Cagar Budaya Potensial (SK Bupati) Terlaksananya - perlindungan,pengembangan, pemanfaatan Cagar Budaya yang telah ditetapkan Jumlah Objek Cagar Budaya yang	19.60 Persen 20 cagar budaya	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Meningkatkan - pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan	550.000.000,00	KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN
2	22	2 05	2.01	0002	PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	dipelihara (Berdasarkan SK Penettapan) Presentase Penetapan Cagar Budaya Potensial (SK Bupati) Terlaksananya - perlindungan,pengembangan, pemanfaatan Cagar Budaya yang telah ditetapkan Jumlah Objek Cagar Budaya yang	19.60 Persen 20 cagar budaya	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan	\$50,000,000,000 \$50,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	2 05	2.01	0002	PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	dipelihara (Berdasarkan SK Penettapan) Presentase Penetapan Cagar Budaya Potensial (SK Bupati) Terlaksananya - perlindungan,pengembangan, pemanfaatan Cagar Budaya yang telah ditetapkan Jumlah Objek Cagar Budaya yang	19.60 Persen 20 cagar budaya	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Meningkatkan - pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan	\$50,000,000,000 \$50,000,000,000	KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN
2	22	2 05	2.01	0002	PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Penetapan Cagar Budaya	dipelihara (Berdasarkan SK Penetapan) Presentase Penetapan Cagar Budaya Potensial (SK Bupati) Terlaksananya perlindungan,pengembangan, pemanfaatan Cagar Budaya yang telah ditetapkan Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	19.60 Persen 20 cagar budaya 30 Objek	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya budaya - Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya	\$50,000,000,000 \$50,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	2 05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Penetapan Cagar Budaya Penetapan Cagar Budaya	dipelihara (Berdasarkan SK Penettapan) Presentase Penetapan Cagar Budaya Potensial (SK Bupati) Terlaksananya - perlindungan,pengembangan, pemanfaatan Cagar Budaya yang telah ditetapkan Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan Terlaksananya pelestarian Cagar -	19.60 Persen 20 cagar budaya 30 Objek	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Meningkatkan - Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya Meningkatkan - Meningkatkan -	\$50,000,000,000 \$50,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN
2	22	2 05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Penetapan Cagar Budaya Penetapan Cagar Budaya	dipelihara (Berdasarkan SK Penettapan) Presentase Penetapan Cagar Budaya Potensial (SK Bupati) Terlaksananya - perlindungan,pengembangan, pemanfaatan Cagar Budaya yang telah ditetapkan Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan Terlaksananya pelestarian Cagar -	19.60 Persen 20 cagar budaya 30 Objek	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Meningkatkan - pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Meningkatkan pelestarian dan	\$50,000,000,000 \$50,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN
2	22	2 05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Penetapan Cagar Budaya Penetapan Cagar Budaya	dipelihara (Berdasarkan SK Penettapan) Presentase Penetapan Cagar Budaya Potensial (SK Bupati) Terlaksananya - perlindungan,pengembangan, pemanfaatan Cagar Budaya yang telah ditetapkan Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan Terlaksananya pelestarian Cagar -	19.60 Persen 20 cagar budaya 30 Objek	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan pengelolaan	\$50,000,000,000 \$50,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN
2	22	2 05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Penetapan Cagar Budaya Pengelolaan Cagar Budaya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	dipelihara (Berdasarkan SK Penetapan) Presentase Penetapan Cagar Budaya Potensial (SK Bupati) Terlaksananya periindungan,pengembangan, pemanfaatan Cagar Budaya yang telah ditetapkan Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan Terlaksananya pelestarian Cagar Budaya yang sudah ditetapkan	19.60 Persen 20 cagar budaya 30 Objek	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		- Meningkatkan - pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan keragaman warisan keragaman warisan	\$50.000.000,00 \$50.000.000,00 3.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN
2	22	2 05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Penetapan Cagar Budaya Penetapan Cagar Budaya	dipelihara (Berdasarkan SK Penetapan) Presentase Penetapan Cagar Budaya Potensial (SK Bupati) Terlaksananya - perlindungan,pengembangan, pemanfaatan Cagar Budaya yang telah ditetapkan Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan Terlaksananya pelestarian Cagar Budaya yang sudah ditetapkan	19.60 Persen 20 cagar budaya 30 Objek 20 cagar budaya	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 3.750.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa		- Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Meningkatkan - Meningkatkan budaya - Meningkatkan	\$50.000.000,00 \$50.000.000,00 3.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	2 05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Penetapan Cagar Budaya Pengelolaan Cagar Budaya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	dipelihara (Berdasarkan SK Penetapan) Presentase Penetapan Cagar Budaya Potensial (SK Bupati) Terlaksananya periindungan,pengembangan, pemanfaatan Cagar Budaya yang telah ditetapkan Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan Terlaksananya pelestarian Cagar Budaya yang sudah ditetapkan	19.60 Persen 20 cagar budaya 30 Objek 20 cagar budaya	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.750.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa		Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya Meningkatkan pelestarian dan	\$50.000.000,00 \$50.000.000,00 3.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	2 05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Penetapan Cagar Budaya Pengelolaan Cagar Budaya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	dipelihara (Berdasarkan SK Penetapan) Presentase Penetapan Cagar Budaya Potensial (SK Bupati) Terlaksananya - perlindungan,pengembangan, pemanfaatan Cagar Budaya yang telah ditetapkan Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan Terlaksananya pelestarian Cagar Budaya yang sudah ditetapkan	19.60 Persen 20 cagar budaya 30 Objek 20 cagar budaya	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 3.750.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa		- Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya - Meningkatkan - Meningkatkan budaya - Meningkatkan	\$50.000.000,00 \$50.000.000,00 3.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



11 2	2 22	2 06			PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase musuem yang dikelola -	78.67 Persen	800.000.000,00			-	2.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
					PERMUSEUMAN								KEBUDAYAAN
2	2 22	2 06	2.01		Pengelolaan Museum	Terlaksananya pengelolaan koleksi -	2 museum	800.000.000,00	-	-	Meningkatkan -	2.600.000.000,00	
					Kabupaten/Kota	museum					pelestarian dan		KEBUDAYAAN
											pengelolaan		
											keragaman warisan		
							2115		2		budaya		
2	2 22	2 06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana	2 Unit	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	<u>-</u>	Meningkatkan	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN
					Sarana dan Prasarana Museum	Museum yang Tersedia dan		Semua Kecamatan,			pelestarian dan		KEBUDAYAAN
						Terpelihara		Semua Kel/Desa			pengelolaan		
											keragaman warisan budaya		
-	2 2	2 06	2.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	9 Unit	500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BACILIASII (DDII)		Meningkatkan	3 400 000 000 00	DINAS PENDIDIKAN DAN
'	·	2 00	2.01	0005	Museum	Museum yang Direvitalisasi	9 Offic	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	<u></u>	pelestarian dan		KEBUDAYAAN
					Wuseum	iviuseum yang birevitansasi		Semua Kel/Desa			pengelolaan		KLBODATAAN
								Jemai Kely Jesa			keragaman warisan		
											budaya		
					Dinas Kesehatan	!	<u>'</u>	791.563.878.370,00	J	<u>.</u>	· ·	751.883.160.367,00	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YA	ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		791.563.878.370,00				751.883.160.367,00	DINAS KESEHATAN
1	1 02	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG K	KESEHATAN		791.563.878.370,00				751.883.160.367,00	DINAS KESEHATAN
12 1	1 02	2 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP perangkat daerah -	80,01 Nilai	478.022.010.570,00			-	432.286.310.367,00	DINAS KESEHATAN
					PEMERINTAHAN DAERAH								
-	1 0	2 01	2.01		KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen rencana, -	4 Dokumen	775.000.000,00		2. Membangun Sektor		1 550 000 000 00	DINAS KESEHATAN
	. "	2 01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	anggaran, dan Evaluasi Kinerja	4 Dokumen	773.000.000,00		Kesehatan		1.330.000.000,00	DINAS RESERVATAN
					Evaluasi Killerja Peraligkat Daerali	Perangkat Daerah				2. Pengembangan sumber			
						r erangkat Daeran				daya manusia yang sehat,			
										produktif, terampil			
1	1 0:	2 01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	225.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DRH) -	Membangun Sektor	_	500,000,000,00	DINAS KESEHATAN
1	. "	_ 01	2.01	0001	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	2 Bokumen	Semua Kecamatan,	Britis to Horizona (BBH)	Kesehatan		300.000.000,00	DITO O RESERVITOR
								Semua Kel/Desa		2. Pengembangan sumber			
										daya manusia yang sehat,			
										produktif, terampil			
1	1 02	2 01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	1 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor	-	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
					Laporan Capaian Kinerja dan	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Semua Kecamatan,		Kesehatan			
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi		Semua Kel/Desa		2. Pengembangan sumber			
						Penyusunan Laporan Capaian				daya manusia yang sehat,			
						Kinerja dan Ikhtisar Realisasi				produktif, terampil			
						Kinerja SKPD							
1	1 02	2 01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor	-	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
						Perangkat Daerah		Semua Kecamatan,		Kesehatan			
								Semua Kel/Desa		2. Pengembangan sumber			
										daya manusia yang sehat,			
		2 04	2.04	0000			4 Polymon	F0.000.000.00	DAMA DA CILIACII (DDII)	produktif, terampil		50 000 000 00	DINIAC VECELIATANI
1	1 0	2 01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
					Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Semua Kecamatan,		Kesehatan			
						Peridukung Statistik Sektoral Daeran		Semua Kel/Desa		 Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, 			
										produktif, terampil			
1	1 0:	2 01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data	Jumlah Data Statistik Sektoral	130 Data	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Membangun Sektor	_	250,000,000,00	DINAS KESEHATAN
1	. "	_ 01	2.01	0003	Statistik Sektoral Daerah	Daerah yang Telah Dikumpulkan	150 5000	Semua Kecamatan,	Britis to Horizona (BBH)	Kesehatan		250.000.000,00	DITO O RESERVITOR
						dan Diperiksa Lingkup Perangkat		Semua Kel/Desa		2. Pengembangan sumber			
						Daerah				daya manusia yang sehat,			
										produktif, terampil			
1	1 02	2 01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat	Jumlah Berita Acara Hasil Forum	1 Berita Acara	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor	-	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
					Daerah Berdasarkan Bidang Urusan	Perangkat Daerah Berdasarkan		Semua Kecamatan,		Kesehatan			
					yang Diampu dalam Rangka	Bidang Urusan yang Diampu dalam		Semua Kel/Desa		2. Pengembangan sumber			
					Penyusunan Dokumen Perencanaan	Rangka Penyusunan Dokumen				daya manusia yang sehat,			
					Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah				produktif, terampil			
	+-		1 2 2 2	-	Administration of Manager Control	Landah Inggara Adada Salahara	 	452 450 204 540 05	ļ			200 === 0.00 ====	DINIAG KECELL
1	1 02	2 01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah laporan Administrasi	4 Dokumen	463.158.204.640,00	-	2. Membangun Sektor	- -	398.571.310.367,00	DINAS KESEHATAN
			1	1	Daerah	Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			1	Kesehatan			
			1	1	1	akuntaser			1	Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,			
			1							produktif, terampil			
1	1 02	2 01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaii	49.168	462.358.204.640,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor	-	396.961.662.227,00	DINAS KESEHATAN
	1					dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Semua Kecamatan,	`	Kesehatan	1		
			1		1	' *		Semua Kel/Desa		2. Pengembangan sumber	1		
								,	1	daya manusia yang sehat,			
	\perp									produktif, terampil			
1	1 02	2 01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor	-	700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			1		Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tahun SKPD dan Laporan Hasil		Semua Kecamatan,		Kesehatan	1		
			1		SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan		Semua Kel/Desa		2. Pengembangan sumber	1		
	1	1	Ì	1	ĺ	Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 1		i	daya manusia yang sehat,	1	ı	
										produktif, terampil			



1	02	01 2.0	02 00	nooramasi aani i ciiyasanan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	4 Laporan	750.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor	909.648.140,00 DINAS KESEHATAN
				Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	
					SKPD					
1	02	01 2.0)3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	250.000.000,00	-	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber	- 550.000.000,00 DINAS KESEHATAN
1	02	01 2.0	2 00	005 Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	1 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA PAGI HASII (DDH)	daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor -	350.000.000,00 DINAS KESEHATAN
	02	01 2.0		Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporett	Semua Kel/Desa	DANA DAGITIAGIE (DUIT)	Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	SSCOOLOGO SINGS RESERVAN
1	02	01 2.0	03 00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	200.000,000 DINAS KESEHATAN
1	02	01 2.0	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi - Kepegawaian	3 Dokumen	550.000.000,00	-	Nembangun sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,	- 1.775.000.000,00 DINAS KESEHATAN
1	02	01 2.0	05 00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 1. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas layanan kesehatan	200.000.000,00 DINAS KESEHATAN
1	02	01 2.0	05 00	NOVA Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,	200.000,000 DINAS KESEHATAN
1	02	01 2.0	05 00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaiar Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	200.000,000 DINAS KESEHATAN
1	02	01 2.0	05 00	009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	250.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	500.000.000,00 DINAS KESEHATAN
1	02	01 2.0	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi - Umum Perangkat Daerah	8 Layanan	1.250.139.814,00	-	2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	- 2.600.000.000,00 DINAS KESEHATAN
1	02	01 2.0	06 00	001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	150.000.000,00 DINAS KESEHATAN
1	02	01 2.0	06 00	002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampii	350.000.000,00 DINAS KESEHATAN
1	02	01 2.0	06 00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampii	300.000,000 DINAS KESEHATAN
1	02	01 2.0	06 00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor - Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,	225.000.000,00 DINAS KESEHATAN



1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Membangun Sektor -	100.000.000.00	DINAS KESEHATAN
1	1			1	Peraturan Perundang-undangan	dan Peraturan Perundang-		Semua Kecamatan,		Kesehatan		
					relatation of allowing allowing.	Undangan yang Disediakan		Semua Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
						ondangan yang bisedialah		Semantely Sesa		daya manusia yang sehat,		
1	1		1							produktif, terampil		
1	02	2 01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi	1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA RAGI HASII (DRH) -	2. Membangun Sektor -	175,000,000,00	DINAS KESEHATAN
1 1	02	. 01	2.00	0008	rasilitasi kurijurigan ramu		1 Laporati		DANA BAGITIASIC (DBIT)		173.000.000,00	DIINAS KESEHATAN
						Kunjungan Tamu		Semua Kecamatan,		Kesehatan		
								Semua Kel/Desa		Pengembangan sumber		
										daya manusia yang sehat,		
										produktif, terampil		
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	1 Laporan	350.139.814,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Membangun Sektor -	950.000.000,00	DINAS KESEHATAN
					dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Semua Kecamatan,		Kesehatan		
						SKPD		Semua Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
						3.4.5		Serial Key Sesa		daya manusia yang sehat,		
										produktif, terampil		
1	02	01	2.00	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada	Lucial Dalaman December	1 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH) -		350 000 000 00	DINAS KESEHATAN
1	02	. 01	2.00	0010			1 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)	2. Membangun Sektor	350.000.000,00	DIINAS KESEHATAIN
					SKPD	Arsip Dinamis pada SKPD		Semua Kecamatan,		Kesehatan		
								Semua Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
										daya manusia yang sehat,		
										produktif, terampil		
1	02	2 01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah -	22 Unit	500.000.000,00	-	2. Membangun Sektor -	3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
					Penunjang Urusan Pemerintah	penunjang urusan pemerintahan				Kesehatan		
					Daerah	yang diadakan				2. Pengembangan sumber		
					- Ductum	yang aladakan				daya manusia yang sehat,		
										produktif, terampil		
+ -							20.11.11					
1	02	2 01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	30 Unit	500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor -	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
						Disediakan		Semua Kecamatan,		Kesehatan		
								Semua Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
										daya manusia yang sehat,		
										produktif, terampil		
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah waktu penyediaan Jasa -	12 Bulan	9.988.666.116,00	-	2. Membangun Sektor -	22.260.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1 -	"-	. 01	2.00		Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	TE Suidi.	3130010001210,00		Kesehatan	22.200.000.000,00	Ditt/15 RESERVATION
					Penierintanan Daeran							
						Daerah yang disediakan				2. Pengembangan sumber		
										daya manusia yang sehat,		
										produktif, terampil		
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor -	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
						Surat Menyurat		Semua Kecamatan,		Kesehatan		
						·		Semua Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
										daya manusia yang sehat,		
										produktif, terampil		
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1100000	4.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor -	4 000 000 000 00	DINAS KESEHATAN
1	02	. 01	2.06	0002			1 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)		4.000.000.000,00	DIINAS KESEHATAIN
					Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan		Semua Kecamatan,		Kesehatan		
						Listrik yang Disediakan		Semua Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
										daya manusia yang sehat,		
										produktif, terampil		
1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor -	250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1			1		Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Semua Kecamatan,		Kesehatan	1	1
1			l	1		yang Disediakan		Semua Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		İ
1			1		1	70		Jemua Key Desa		daya manusia yang sehat,		1
1					1					produktif, terampil		
+-	-		0.00	000:							40.000	
1	02	01	2.08	0004		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	5.828.666.116,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor -	18.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1					Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang		Semua Kecamatan,		Kesehatan		
1			l	1		Disediakan		Semua Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		İ
										daya manusia yang sehat,		
										produktif, terampil		
1	02	01	2.00	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	95 Unit	1.550.000.000,00		2. Membangun Sektor -	1 480 000 000 00	DINAS KESEHATAN
1 -	"	. **	2.03	1		Samuel Salar Patrick Dactail		2.330.000.000,00	1		1.400.000,000	DAJ REJETATAN
1			l	1	Penunjang Urusan Pemerintahan					Kesehatan		İ
1			1		Daerah				1	2. Pengembangan sumber		1
1			1		1					daya manusia yang sehat,		1
1				1						produktif, terampil		
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan	6 Unit	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor -	210.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1					Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Dinas atau Kendaraan Dinas		Semua Kecamatan,		Kesehatan	<u> </u>	
1			l	1	Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jabatan yang Dipelihara dan		Semua Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		İ
			1		Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya		Jemaa neg Jesa	1	daya manusia yang sehat,		1
1					Kendardan Dinas Japatan	albayarkari i ajakiiya				produktif, terampil		
+-	+_		H		ļ				 			
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas	11 Unit	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor -	370.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1			1		Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Operasional atau Lapangan yang		Semua Kecamatan,	1	Kesehatan		1
1					Perizinan Kendaraan Dinas	Dipelihara dan dibayarkan Pajak		Semua Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
1			l	1	Operasional atau Lapangan	dan Perizinannya		,		daya manusia yang sehat,		İ
	1		1	1						produktif, terampil	1	1



1															
1 1	1 0	02 01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin		5 Unit	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 2. Membangun Sektor	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
					Lainnya	Lainnya yang Dipelihara			Semua Kecamatan,		Kesehatan				
									Semua Kel/Desa		2. Pengembangan sumb				
											daya manusia yang seha produktif, terampil	i,			
1	1 0	02 01	1 2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan		Unit	1.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA PACI HACII (DDH)	- 2. Membangun Sektor	-	_	750,000,000,00	DINAS KESEHATAN
	٠ ۱ ١	02 0.	2.03	0003	Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang		Onic	Semua Kecamatan,	DAINA BAGITIASIE (BBII)	Kesehatan			730.000.000,00	DINAS RESERVATAN
					Kantor dan bangunan Lamnya	Dipelihara/Direhabilitasi			Semua Kel/Desa		2. Pengembangan sumb	er .			
						Sipemara, Sirenasimasi			Schlad Neij Besa		daya manusia yang seha				
											produktif, terampil	,			
13 1	1 (02 02	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks Pelayanan Kesehatan -		,45 Persen	301.436.867.800,00				-	314.586.850.000,00	DINAS KESEHATAN
					KESEHATAN PERORANGAN DAN	Primer		,49 Persen	·					•	
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Perilaku Kesehatan		,50 Persen							
						Indeks Keluarga sehat		,54 Persen							
						Indeks pelayanan penyakit tidak		,65 Persen							
						menular		,77 Persen							
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular		,78 Persen ,90 Persen							
						Indeks pelayanan kesehatan		.3,8 Persen							
						reproduksi		4,38 Persen							
						Indeks pelayanan kesehatan balita		3 Persen							
						Indeks Pelayanan Kesehatan		0,50 Persen							
						Lingkungan		3 Persen							
						Presentasi Balita Stunting									
						Persentase Puskesmas Akreditasi									
						Paripurna dan Utama									
						Persentase Layanan Kesehatan									
						Rumah Sakit yang Memenuhi SPM Perentase Ketersediaan Sarana									
						dan Prasarana Pelayanan RS									
						Persentase Capaian Standar									
						Pelayanan Minimal (SPM) RS									
						,									
1	1 (02 02	2 2.01	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan	Terpenuhinya fasilitas pelayanan -		0 Persen	125.658.954.000,00		- 2. Membangun Sektor	-	-	94.835.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	- I -				Kesehatan untuk UKM dan UKP	kesehatan untuk UKM dan UKP					Kesehatan				
					Kewenangan Daerah	sesuai standar					2. Pengembangan sumb	er			
					Kabupaten/Kota						daya manusia yang seh	t,			
											produktif, terampil				
1	1 0	02 02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan		. Unit	11.300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 2. Membangun Sektor	=		12.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
						Masyarakat (Puskesmas) yang			Semua Kecamatan,		Kesehatan				
						Dibangun			Semua Kel/Desa		2. Pengembangan sumb				
										1	daya manusia yang seha	ι,			
-	1 0														
1	1 '	0.2	2 2.01	0002	Dombangunan Facilitas Kosobatan	Jumlah Facilitas Kosohatan Lainnya		Linit	0 E7E 022 000 00 Kah Kutai Kartanogara	DANA BAGI HASII (DBH)	produktif, terampil			11 700 000 000 00	DINIAS VESELIATANI
		02 02	2 2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya	9	Unit	9.575.922.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 2. Membangun Sektor	-		11.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		02 02	2 2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	9	Unit	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 2. Membangun Sektor Kesehatan	- er		11.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		02 02	2 2.01	0003			9	Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)	- 2. Membangun Sektor			11.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		02 02	2 2.01	0003				Unit	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumb				
1	1 0	02 02			Lainnya	yang Dibangun		Unit	Semua Kecamatan,		- 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumb daya manusia yang seh			11.700.000.000,00	
1	1 0				Lainnya	yang Dibangun			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan	-			
1	1 0				Lainnya Pembangunan Rumah Dinas Tenaga	yang Dibangun Jumlah Rumah Dinas Tenaga			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt	- er			
1	1 0				Lainnya Pembangunan Rumah Dinas Tenaga	yang Dibangun Jumlah Rumah Dinas Tenaga			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi	- er			
		02 02	2 2.01	0004	Lainnya Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	yang Dibangun Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun		l Unit	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil	- er		3.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			2 2.01	0004	Lainnya Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 7.382.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sek produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sek produktif, terampil 3. Membangun Sektor Kesehatan 4. Pengembangan sumt daya manusia yang sek	- er			DINAS KESEHATAN
		02 02	2 2.01	0004	Lainnya Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana,		l Unit	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 7.382.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 3. Membangun Sektor Kesehatan	- - - -		3.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		02 02	2 2.01	0004	Lainnya Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Alat Kesehatan dan SDM agar		l Unit	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 7.382.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt	- er t, -		3.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		02 02	2 2.01	0004	Lainnya Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana,		l Unit	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 7.382.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 3. Membangun Sektor Kesehatan	- er t, -		3.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1 0	02 02	2 2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengembangan Puskesmas	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		l Unit	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 7.382.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 3. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil	- er t, -		3.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN
	1 0	02 02	2 2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Alat Kesehatan dan SDM agar		- Unit '8 Unit	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 7.382.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seh	- er t, -		3.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN
	1 0	02 02	2 2.01	0004	Lainnya Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengembangan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesual Standar Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh		- Unit '8 Unit	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 7.382.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 3. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 3. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 3. Membangun Sektor Kesehatan 4. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 4. Membangun Sektor Kesehatan 3. Pengembangan sumt	- er - - -		3.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN
	1 0	02 02	2 2.01	0004	Lainnya Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengembangan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesual Standar Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan		- Unit '8 Unit	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 7.382.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sektor kesehatan 3. Membangun sektor kesehatan 4. Membangun Sektor Kesehatan 5. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 5. Membangun Sektor Kesehatan 5. Membangun Sektor Kesehatan 5. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 5. Membangun Sektor Kesehatan 5. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 5. Membangun Sektor Kesehatan 5. Pengembangan sumt daya manusia yang seh	- er - - -		3.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN
1	1 0	02 02	2 2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengembangan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesual Standar Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas		i Unit	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 7.382.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 1.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 1.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 3. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 3. Membangun Sektor Kesehatan 4. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 4. Membangun Sektor Kesehatan 5. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 5. Membangun Sektor Kesehatan 5. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil	- er - - -		3.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN
1	1 0	02 02	2 2.01	0004	Lainnya Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengembangan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesual Standar Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat		- Unit '8 Unit	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 7.382.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 1.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 3. Membangun Sektor Kesehatan 3. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 3. Membangun Sektor Kesehatan 4. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 5. Membangun Sektor Kesehatan 5. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 5. Membangun Sektor Kesehatan 5. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 5. Membangun Sektor Kesehatan 5. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 5. Membangun Sektor	- er - - -		3.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN
1	1 0	02 02	2 2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengembangan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesual Standar Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilatasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas		i Unit	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 7.382.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 1.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seken produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seken produktif, terampil 3. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 4. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 5. Membangun Sektor Kesehatan 6. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 6. Membangun Sektor Kesehatan 7. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 6. Kesehatan 7. Kesehatan 8. Kesehatan 8. Kesehatan 8. Kesehatan 9			3.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN
1	1 0	02 02	2 2.01	0004	Lainnya Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengembangan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh		i Unit	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 7.382.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 1.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	- 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil - 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil - 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil - 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil - 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil - 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil - 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil - 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil			3.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN
1	1 0	02 02	2 2.01	0004	Lainnya Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengembangan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesual Standar Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilatasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas		i Unit	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 7.382.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 1.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seku produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seku Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seki produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seh produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seh			3.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN
1	1 0	02 02 02	2 2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengembangan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		: Unit '8 Unit Unit	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 7.382.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 1.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 1.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 1.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil			3.300.000.000,00 3.000.000.000,00 2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN
1	1 0	02 02	2 2.01	0004	Lainnya Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengembangan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		i Unit	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 7.382.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 1.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	- 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil - 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 3. Membangun Sektor Kesehatan 4. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 3. Membangun Sektor Kesehatan 4. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 4. Membangun Sektor Kesehatan 5. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 5. Membangun Sektor Kesehatan 6. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 6. Membangun Sektor Kesehatan 6. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 6. Membangun Sektor Kesehatan 6. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 6. Membangun Sektor Kesehatan 6. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 6. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 6. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 6. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 6. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 6. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 6. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 7. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 7. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 7. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 7. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil			3.300.000.000,00 3.000.000.000,00 2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN
1	1 0	02 02 02	2 2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengembangan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		: Unit '8 Unit Unit	Semua Kezamatan, Semua Kel/Desa 4.450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 7.382.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 1.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seke produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang seke produktif, terampil 3. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sekior Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sekior Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sekior Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sekior Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sekior Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sekior Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sekior Kesehatan 3. Pengembangan sumt daya manusia yang sekior Kesehatan 3. Membangun Sektor Kesehatan 4. Membangun Sektor Kesehatan 5. Membangun Sektor Kesehatan 6. Membangun Sektor Kesehatan			3.300.000.000,00 3.000.000.000,00 2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN
1	1 0	02 02 02	2 2.01	0004	Lainnya Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengembangan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		: Unit '8 Unit Unit	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 7.382.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 1.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	- 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil - 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 3. Membangun Sektor Kesehatan 4. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 3. Membangun Sektor Kesehatan 4. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 4. Membangun Sektor Kesehatan 5. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 5. Membangun Sektor Kesehatan 6. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 6. Membangun Sektor Kesehatan 6. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 6. Membangun Sektor Kesehatan 6. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 6. Membangun Sektor Kesehatan 6. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 6. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 6. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 6. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 6. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 6. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 6. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 7. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 7. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 7. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil 7. Pengembangan sumt daya manusia yang sehi produktif, terampil			3.300.000.000,00 3.000.000.000,00 2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN



1	02 (2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat	Jumlah Alat Kesehatan/Alat		490 Unit	12.285.532.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Membangun Sektor	I-		30.000.000.000.00	DINAS KESEHATAN
				Penunjang Medik Fasilitas	Penunjang Medik Fasilitas		1.00 0.00	Semua Kecamatan,			Kesehatan				
				Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan yang			Semua Kel/Desa			Pengembangan sumber				
				i ciayanan kesenatan	Disediakan			Sema Key besa			daya manusia yang sehat,				
					Disculatari						produktif, terampil				
1	02 (2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat	Jumlah Penyediaan dan	 	3 Unit	500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	1_	Membangun Sektor	_		250,000,000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 (2.01	0013	Kalibrasi	Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi		3 Offic	Semua Kecamatan,	DANA BAGITIASIL (DBII)		Kesehatan	_		230.000.000,00	DINAS RESERVATAN
				KdliDidSi	Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas			Semua Kel/Desa							
								Semua Kei/ Desa			Pengembangan sumber				
					Kesehatan Regional/Regional						daya manusia yang sehat,				
					Maintainance Center						produktif, terampil				
						 						-			
1	02 (2.01	0020		Jumlah Alat Kesehatan/Alat		500 Unit	400.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Membangun Sektor	-		600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
				Alat Kesehatan/Alat Penunjang	Penunjang Medik Fasilitas Layanan			Semua Kecamatan,			Kesehatan				
				Medik Fasilitas Pelayanan	Kesehatan yang Terpelihara Sesuai			Semua Kel/Desa			Pengembangan sumber				
				Kesehatan	Standar						daya manusia yang sehat,				
											produktif, terampil				
1	02 (2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang		1 Unit	60.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Membangun Sektor	-		10.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
					ditingkatkan sarana, prasarana,			Semua Kecamatan,			Kesehatan				
					alat kesehatan dan SDM agar			Semua Kel/Desa			Pengembangan sumber				
					sesuai standar jenis pelayanan						daya manusia yang sehat,				
					rumah sakit berdasarkan kelas						produktif, terampil				
			1		rumah sakit yang memenuhi rasio]]]			1		ĺ	1			
			1		tempat tidur terhadap jumlah]]]			1		ĺ	1			
					penduduk minimal 1:1000]]]			1		1	1			
					dan/atau dalam rangka	1 l			İ	1	1	İ			
					peningkatan kapasitas pelayanan]]]			1		1	1			
					rumah sakit				ĺ		1	1			
1	02 (2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai,	†	92 Paket	16.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DRH)	1-	Membangun Sektor	İ-	1	17.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 1	, 2.01	0023	Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,,	Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,		32 Tance	Semua Kecamatan,	Driver Briding (BBH)		Kesehatan			17.000.000.000,00	SHO IS RESERVING
				Vaksin, Makanan dan Minuman di	Makanan dan Minuman di Fasilitas			Semua Kel/Desa			Pengembangan sumber				
								Sellida Kely Desa							
				Fasilitas Kesehatan	Kesehatan yang disediakan						daya manusia yang sehat, produktif, terampil				
-	00 (2.04	0024	Daniel de la Balancia de Marchatan	to a lab Walanaan a Condah		474000 K-L	7CF 000 000 00 K-1-	DANA DA CILIACII (DDII)	1				465,000,000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 (2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Keluarga yang Sudah		174980 Keluarga	765.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Membangun Sektor	-		465.000.000,00	DINAS KESEHATAN
				Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Dikunjungi dan Diintervensi			Semua Kecamatan,			Kesehatan				
					Masalah Kesehatannya oleh Tenaga			Semua Kel/Desa			2. Pengembangan sumber				
					Kesehatan Puskesmas						daya manusia yang sehat,				
											annual chalf Annual Co.				
											produktif, terampil				
1	02 (2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan	-	100 Persen	174.445.913.800,00		Memperkuat pembangunan	2. Membangun Sektor	Masyarakat dan	-	211.684.850.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 (2.02		untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang	-	95 Persen	174.445.913.800,00		sumber daya manusia (SDM),	2. Membangun Sektor Kesehatan	Masyarakat dan Aparatur	-	211.684.850.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 (2.02			oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di	-		174.445.913.800,00		sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber		-	211.684.850.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 (2.02		untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	-	95 Persen	174.445.913.800,00		sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,		-	211.684.850.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 (2.02		untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan Imunisasi Dasar lengkap (IDL)		95 Persen	174.445.913.800,00		sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber		-	211.684.850.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 (2.02		untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan		95 Persen	174.445.913.800,00		sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,		-	211.684.850.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 (2.02		untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan Imunisasi Dasar lengkap (IDL)		95 Persen	174.445.913.800,00		sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,		-	211.684.850.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 (2.02		untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan Imunisasi Dasar lengkap (IDL)		95 Persen	174.445.913.800,00		sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,		-	211.684.850.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 0	2.02		untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan Imunisasi Dasar lengkap (IDL)		95 Persen	174.445.913.800,00		sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,			211.684.850.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 (2.02		untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan Imunisasi Dasar lengkap (IDL)		95 Persen	174.445.913.800,00		sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,		-	211.684.850.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 (2.02		untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan Imunisasi Dasar lengkap (IDL)		95 Persen	174.445.913.800,00		sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,			211.684.850.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 (2.02		untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan Imunisasi Dasar lengkap (IDL)		95 Persen 70 Persen			sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,		-		
1		2 2.02		untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan Imunisasi Dasar lengkap (IDL) Persentase KB Aktif		95 Persen	174.445.913.800,00 2.296.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,		-		DINAS KESEHATAN
				untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan Imunisasi Dasar lengkap (IDL)		95 Persen 70 Persen		DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Aparatur	-		
				untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan Imunisasi Dasar lengkap (IDL) Persentase KB Aktif		95 Persen 70 Persen	2.296.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta perguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan	Aparatur Masyarakat dan	-		
				untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan Imunisasi Dasar lengkap (IDL) Persentase KB Aktif Jumlah Ibu Hamii yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		95 Persen 70 Persen	2.296.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidika, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber	Aparatur Masyarakat dan	-		
				untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan Imunisasi Dasar lengkap (IDL) Persentase KB Aktif Jumlah Ibu Hamii yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		95 Persen 70 Persen	2.296.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, sehatan	Aparatur Masyarakat dan	-		
				untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan Imunisasi Dasar lengkap (IDL) Persentase KB Aktif Jumlah Ibu Hamii yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		95 Persen 70 Persen	2.296.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidian, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber	Aparatur Masyarakat dan	-		
				untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan Imunisasi Dasar lengkap (IDL) Persentase KB Aktif Jumlah Ibu Hamii yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		95 Persen 70 Persen	2.296.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendisha, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, sehatan	Aparatur Masyarakat dan	-		
				untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan Imunisasi Dasar lengkap (IDL) Persentase KB Aktif Jumlah Ibu Hamii yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		95 Persen 70 Persen	2.296.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, sehatan	Aparatur Masyarakat dan	-		
				untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan Imunisasi Dasar lengkap (IDL) Persentase KB Aktif Jumlah Ibu Hamii yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		95 Persen 70 Persen	2.296.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generai 2), dan	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, sehatan	Aparatur Masyarakat dan	-		
				untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan Imunisasi Dasar lengkap (IDL) Persentase KB Aktif Jumlah Ibu Hamii yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		95 Persen 70 Persen	2.296.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, sehatan	Aparatur Masyarakat dan	-		
				untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan Imunisasi Dasar lengkap (IDL) Persentase KB Aktif Jumlah Ibu Hamii yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		95 Persen 70 Persen	2.296.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generai 2), dan	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, sehatan	Aparatur Masyarakat dan	-		
				untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan Imunisasi Dasar lengkap (IDL) Persentase KB Aktif Jumlah Ibu Hamii yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		95 Persen 70 Persen	2.296.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generai 2), dan	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, sehatan	Aparatur Masyarakat dan	-		
1	02 (02 2.02	0001	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan Imunisasi Dasar lengkap (IDL) Persentase KB Aktif Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		95 Persen 70 Persen	2.296.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendilakin, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Z. Membangun Sektor Kesehatan Z. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Aparatur Masyarakat dan Aparatur	-	3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 (0001	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan Imunisasi Dasar lengkap (IDL) Persentase KB Aktif Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		95 Persen 70 Persen	2.296.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi zi), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Membangun Sektor Membangun Sektor	Masyarakat dan Aparatur Masyarakat dan Aparatur		3.500.000.000,00	
1	02 (02 2.02	0001	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan Imunisasi Dasar lengkap (IDL) Persentase KB Aktif Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		95 Persen 70 Persen	2.296.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.038.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan,		sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidish, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Membangun Sektor Kesehatan	Aparatur Masyarakat dan Aparatur		3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 (02 2.02	0001	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan Imunisasi Dasar lengkap (IDL) Persentase KB Aktif Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		95 Persen 70 Persen	2.296.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, sains, teknologi, pendidikan,	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber	Masyarakat dan Aparatur Masyarakat dan Aparatur		3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 (02 2.02	0001	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan Imunisasi Dasar lengkap (IDL) Persentase KB Aktif Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		95 Persen 70 Persen	2.296.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.038.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan,		sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, sains, teknologi, pendidikan,	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Membangun Sektor Kesehatan	Masyarakat dan Aparatur Masyarakat dan Aparatur		3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 (02 2.02	0001	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan Imunisasi Dasar lengkap (IDL) Persentase KB Aktif Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		95 Persen 70 Persen	2.296.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.038.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan,		sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, sains, teknologi, pendidikan,	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber	Masyarakat dan Aparatur Masyarakat dan Aparatur		3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 (02 2.02	0001	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan Imunisasi Dasar lengkap (IDL) Persentase KB Aktif Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		95 Persen 70 Persen	2.296.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.038.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan,		sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidik, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta kesetaraan gender, serta	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,	Masyarakat dan Aparatur Masyarakat dan Aparatur		3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 (02 2.02	0001	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan Imunisasi Dasar lengkap (IDL) Persentase KB Aktif Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		95 Persen 70 Persen	2.296.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.038.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan,		sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan penguatan peran perempuan penguatan pender, serta penguatan peran perempuan peran perempuan penguatan peran perempuan peran perempuan peran perempuan peran perempuan,	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,	Masyarakat dan Aparatur Masyarakat dan Aparatur		3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 (02 2.02	0001	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan Imunisasi Dasar lengkap (IDL) Persentase KB Aktif Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		95 Persen 70 Persen	2.296.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.038.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan,		sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi milenial dan generasi milenial dan generasi milenial dan generasi milenial desertaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,	Masyarakat dan Aparatur Masyarakat dan Aparatur		3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 (02 2.02	0001	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan Imunisasi Dasar lengkap (IDL) Persentase KB Aktif Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		95 Persen 70 Persen	2.296.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.038.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan,		sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan merasi 2), dan disabilitas milenial dan generasi 2), dan milenial dan generasi 2), dan milenial dan generasi 2), dan	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,	Masyarakat dan Aparatur Masyarakat dan Aparatur		3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 (02 2.02	0001	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan Imunisasi Dasar lengkap (IDL) Persentase KB Aktif Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		95 Persen 70 Persen	2.296.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.038.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan,		sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi milenial dan generasi milenial dan generasi milenial dan generasi milenial desertaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,	Masyarakat dan Aparatur Masyarakat dan Aparatur		3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 (02 2.02	0001	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan Imunisasi Dasar lengkap (IDL) Persentase KB Aktif Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		95 Persen 70 Persen	2.296.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.038.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan,		sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan merasi 2), dan disabilitas milenial dan generasi 2), dan milenial dan generasi 2), dan milenial dan generasi 2), dan	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,	Masyarakat dan Aparatur Masyarakat dan Aparatur		3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 (02 2.02	0001	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan Imunisasi Dasar lengkap (IDL) Persentase KB Aktif Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		95 Persen 70 Persen	2.296.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.038.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan,		sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan merasi 2), dan disabilitas milenial dan generasi 2), dan milenial dan generasi 2), dan milenial dan generasi 2), dan	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,	Masyarakat dan Aparatur Masyarakat dan Aparatur		3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN



1	02	2 02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127	718 Orang	336.850.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	sains, teknologi, pendidikan,	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat dan Aparatur	370.550.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	2 02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	64:	561 Orang	458.319.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat dan Aparatur	1.350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2 02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	141	7205 Orang	473.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat dan Aparatur	477.700.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2 02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	552	2234 Orang	270.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat dan Aparatur	600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2 02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	565	576 Orang	724.880.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sumber	Masyarakat dan Aparatur	902.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2 02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	618	846 Orang	400.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat dan Aparatur	625.000.000,00	DINAS KESEHATAN

1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1	7748 Orang	834.040.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	sains, teknologi, pendidikan,	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat dan Aparatur	525.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	9	25 Orang	445.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat dan Aparatur	650,000,000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0011	Pengeiolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1)	8688 Orang	1.805.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat dan Aparatur	650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2 02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2	1134 Orang	742.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat dan Aparatur	650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2 02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2	Dokumen	185.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sumber	Masyarakat dan Aparatur	550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1	Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat dan Aparatur	450,000,000,00	DINAS KESEHATAN



1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		12 Dokumen	8.700.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat dan Aparatur	12.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		2 Dokumen	200.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat dan Aparatur	650.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		1 Dokumen	1.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat dan Aparatur	4.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		1 Dokumen	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat dan Aparatur	565.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		1 Dokumen	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat dan Aparatur	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sumber	Masyarakat dan Aparatur	1.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN



1	. 02	2 02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	206102 Orang	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	sains, teknologi, pendidikan,	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat dan Aparatur	1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	. 02	2 02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	342 Orang	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat dan Aparatur	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	. 02	2 02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3 Dokumen	200.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat dan Aparatur	1.100.000,000,00	DINAS KESEHATAN
1	. 02	2 02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	28 Dokumen	103.474.324.800,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM),	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat dan Aparatur	126.329.600.000,00	DINAS KESEHATAN
1	. 02	2 02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	120.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sumber	Masyarakat dan Aparatur	140.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	. 02	2 02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sumber	Masyarakat dan Aparatur	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN



1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		4 Dokumen	46.000.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	Membangun Sektor Kesehatan Z. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat dan Aparatur	45.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		2 Dokumen	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gendere, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat dan Aparatur	750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		36 Unit	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat dan Aparatur	1.550.000,000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		1 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat dan Aparatur	80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		1 Unit	500.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat dan Aparatur	800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		1000 Orang	900.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sumber	Masyarakat dan Aparatur	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN



1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	725 Orang	810.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	Membangun Sektor Kesehatan Z. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat dan Aparatur		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	75 Orang	53.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat dan Aparatur		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sumber	Masyarakat dan Aparatur		400.000,000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat dan Aparatur		550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat dan Aparatur		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersedia dan terselenggaranya - Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi pada faskes	30 Faskes	207.000.000,00		-	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	-	-	2.367.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	207.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	-		2.367.000.000,00	DINAS KESEHATAN



02	1 02 1	2.04	1	Donashitan Isin Domah Calda Wala	Townsets: was Belgianes	1400 0		1 135 000 000 00	T T	2 Manuhanana Calitan	F 700 000 000 00	DINIAC VECELIATAS:
02	02	2.04				100 Per	sen	1.125.000.000,00	-		- 5.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
					Kesehatan Rujukan							
				Kabupaten/Kota						daya manusia yang sehat,		
02	02	204	0004	December 1 and 1 a	Luciale Burnel Cella Keles C. B. den	457.11-1		350 000 000 00 K-F K-+- K-+-	DANIA DA CILIACII (DDIII)		200,000,000,00	DINIAC MECELIATAN
02	02	2.04	0001			157 Uni	t		DANA BAGI HASIL (DBH)		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
								Semua Kel/Desa				
					Ditindakianjuti Perizinannya							
				. /-					2444			
02	02	2.04	0002			4 Unit			DANA BAGI HASIL (DBH) -		5.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
								Semua Kel/Desa				
				Kabupaten/Kota	Socual Standar							
02	02	2.04	0004	Desired Desired des		21 Delu		275 000 000 00 1/2-1/2-1/2-1-2-2-2-2	DANIA BACILIASII (DBIII)		200,000,000,00	DINIAC VECELIATANI
02	02	2.04	0004			31 DOKU	imen		DANA BAGI HASIL (DBH)		300.000.000,00	DINAS RESERVATAIN
				Rujukan	Pelayanan Kesenatan Kujukan			Semua Kei/ Desa				
										nroduktif terampil		
			1	DDOCDANA DENUNCKATANI	December Comban December 1	400 0		4 350 000 000 00		produkti, terampii	3 550 000 000 00	DINIAC WESTLATAN
02	03							4.350.000.000,00			- 2.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
				WANGSIARESERATAN		os Perse	en					
					Sesuai Kompetensinya							
 	++		1									
02	03	2.01				1500 lzi	n	350.000.000,00	-		- 350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
					Kesehatan yang diberikan							
				Kabupaten/Kota						2. Pengembangan sumber		
									daya manusia yang senat,			
	1 1		1									
02	03	2.01	0002			2 Dokun	nen		DANA BAGI HASIL (DBH) -		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
								Semua Kel/Desa				
				Kesehatan	Praktik Tenaga Kesehatan							
	4											
02	03	2.02				85 Perse	en	3.500.000.000,00	-		- 1.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
					pendayagunaan tenaga kesehatan							
				UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								
	4											
02	03	2.02	0001			9 Dokun	nen		DANA BAGI HASIL (DBH) -		700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
				Kesehatan				Semua Kel/Desa				
					Kesehatan							
02	03	2.02	0002			50 Oran	R		DAINA BAGI HASIL (DBH)		500.000.000,00	DIINAS KESEHATAN
l			1	Standar				Semua Kei/Desa				
l			1		(rasyankes)							
000	- 02	2.02	0000	Seeklesse des Seeses	London Boloman Harl Bourblane	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		400,000,000,00	DANIA DA CILIACII (DDIII)		400000000	DINIAC MECELIATAT:
02	03	2.02	0003			1 Dokun	nen		DANA BAGI HASIL (DBH)		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
l			1	Sumber Daya Manusia Kesehatan								
1			1		ivianusia Kesehatan			Semua Kel/Desa	1			
1			1		1				1			
	+	2.00	1	 				500 000 000 00	 			DINIAC WECT:
02	03	2.03	1			50 Oran	ıR	500.000.000,00			- 1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
l			1		kompetensinya							
										2. Pengembangan sumber		
1	1 1		1	iingkat Daeran Kabupaten/Kota					1	gaya manusia yang sehat,		
000	100	2.02	0001	December of Marketine	Lundah Cumban Baran Manada	1000		500 000 000 00 Web Web 1	DANA DA CILIACII (DDII)		4,000,000,000	DINIAC MECELIATAL:
02	03	2.03	0001			150 Ora	ung		DAINA BAGI HASIL (DBH)	Z. Iviembangun Sektor	1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1			1	Peningkatan Kompetensi Teknis	Kesehatan Tingkat Daerah			Semua Kecamatan,	1	Kesehatan		
			1	Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan			Semua Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
			1	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mutu dan Kompetensinya					daya manusia yang sehat,		
									 	produktif, terampil		
											1 000 000 000 00	
02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI,	Terselenggaranya Pelayanan -	100 Per	sen	730.000.000,00			- 1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
02	04			ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN	Perizinan, Pengawasan dan	100 Per	sen	730.000.000,00			1.000.000,000	DINAS RESERVIAN
02	04					100 Per	sen	730.000.000,00			1.000.000,00	DINAS RESERVATAN
	02 02 02 02	02 02 02 02 02 02 02 03 02 03 02 03	02 02 2.04 02 2.2 2.04 02 02 2.04 02 03 2.04 02 03 2.01 02 03 2.01 02 03 2.02 02 03 2.02 02 03 2.02 02 03 2.02 02 03 2.02 02 03 2.02 02 03 2.02	02 02 2.04 0001 02 02 2.04 0002 02 02 2.04 0004 02 03 2.01 0002 02 03 2.01 0002 02 03 2.01 0002 02 03 2.02 0001 02 03 2.02 0001 02 03 2.02 0002 02 03 2.02 0003 02 03 2.02 0003 02 03 2.02 0003 02 03 2.02 0003	C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota O2 02 2.04 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya O2 02 2.04 0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Kabupaten/Kota O2 02 2.04 0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan O2 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN O2 03 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota O2 03 2.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota O2 03 2.02 0001 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota O2 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	C. D. dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rigiukan Resehatan Rigiukan Nabupaten/Kota	C. C. C. C. C. C. C. C.	Comment Comm	Column C	C	Part	Column C



1	02 04	4 2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memilki izin	100 Persen	80.000.000,00		2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, Ferampil	- 220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	85 Dokumen	80.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terselenggaranya proses - penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	15 Sertifikat	75.000.000,00		- 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	- 190.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 04	4 2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	190.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Wajib Sertifikat Sanitasi Laik Higiene yang dilakukan pengawasan	100 Persen	250.000.000,00		- 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	- 250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 04	4 2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	990 Dokumen	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 04	4 2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Tempat Pengelolaan - Makanan (TPM) Wajib Stiker Pembinaan yang dilakukan Pengawasan	100 Persen	250.000.000,00		2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	- 250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 04	4 2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	2 Dokumen	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil		DINAS KESEHATAN
1	02 04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terselenggaranya pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	40 Persen	75.000.000,00		- 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	- 150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02 04	4 2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Berdar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	55 Unit	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN

1	. 02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN	Indeks Pelayanan Kesehatan -	0,45 Persen	7.025.000.000,00			1.300.000,000	DINAS KESEHATAN
					MASYARAKAT BIDANG	Primer	0,49 Persen					
					KESEHATAN	Indeks Perilaku Kesehatan	0,50 Persen					
						Indeks Keluarga sehat	0,54 Persen					
						Indeks pelayanan penyakit tidak	0,65 Persen					
						menular	0,77 Persen					
						Indeks Pelayanan Penyakit	0,78 Persen					
						Menular	0,90 Persen 100 Persen					
						Indeks pelayanan kesehatan	13,8 Persen					
						reproduksi Indeks pelayanan kesehatan balita	34,38 Persen					
						Indeks Pelayanan Kesehatan	40 Persen					
						Lingkungan	101000					
						Persentase Penggalangan						
						Kerjasama RS dengan Pihak Ketiga						
						Presentasi Balita Stunting						
						Persentase Puskesmas Akreditasi						
						Paripurna dan Utama						
						Persentase Capaian RT-PHBS						
		\perp							ļ			
1	. 02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan,	Prosentase Puskesmas dengan -	60 Persen	5.400.000.000,00] - I-	2. Membangun Sektor	- 450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
					Kemitraan, Peningkatan Peran	Desa Germas				Kesehatan		
					serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1	Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,		
					migrat Daeran Kabupaten/Kota				1	produktif, terampil	1	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi	Jumlah Dokumen Promosi	5 Dokumen	5.400.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASII (DRH) -	2. Membangun Sektor -	450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	0.5	2.01	3001	Kesehatan, Advokasi, Kemitraan	Kesehatan, Advokasi, Kemitraan	3 DOKUMEN	Semua Kecamatan,	, S. W. SAGITIASIC (DDIT)	Kesehatan	430.300.000,00	S. U.S. KESEIMIAN
					dan Pemberdayaan Masyarakat	dan Pemberdayaan Masyarakat		Semua Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
					dan remberdayaan masyarahat	dan remocratyatin wasyaranat		Serial Key Sesa		daya manusia yang sehat,		
										produktif, terampil		
1	. 02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka	Prosentase Puskesmas dengan -	60 Persen	300.000.000,00	-	2. Membangun Sektor -	- 300.000.000,00 [DINAS KESEHATAN
					Promotif Preventif Tingkat Daerah	Memanfaatan Media Cetak,				Kesehatan		
					Kabupaten/Kota	Elektronik dan Media Sosial aktif				2. Pengembangan sumber		
										daya manusia yang sehat,		
										produktif, terampil		
1	. 02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor -	300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
					Kesehatan dan Gerakan Hidup	Penyelenggaraan Promosi		Semua Kecamatan,		Kesehatan		
					Bersih dan Sehat	Kesehatan dan Gerakan Hidup		Semua Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
						Bersih dan Sehat				daya manusia yang sehat, produktif, terampil		
-	02	05	2.02		Daniel Delaler	December 2 December 2	40 Persen	1.325.000.000,00	-		550,000,000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	US	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Prosentase Desa Siaga aktif - dengan UKBM aktif	40 Persen	1.323.000.000,00	-	2. Membangun Sektor Kesehatan	- 550.000.000,00	DINAS RESERVAIAN
					Masyarakat (UKBM) Tingkat	dengan okowi aktii				2. Pengembangan sumber		
					Daerah Kabupaten/Kota					daya manusia yang sehat,		
										produktif, terampil		
1	. 02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan	4 Dokumen	1.325.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor -	550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1					Pengembangan dan Pelaksanaan	Teknis dan Supervisi Upaya		Semua Kecamatan,	1 ' 1	Kesehatan		
					Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Kesehatan Bersumber Daya		Semua Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
					Masyarakat (UKBM)	Masyarakat (UKBM)				daya manusia yang sehat,		
	_									produktif, terampil		
_		$\downarrow \downarrow \downarrow$			Puskesmas Bunga Jadi	NG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2.020.265.812,00 2.020.265.812,00				PUSKESMAS BUNGA I PUSKESMAS BUNGA I
1		1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG P			2.020.265.812,00 2.020.265.812,00	+			PUSKESMAS BUNGA J <i>I</i> PUSKESMAS BUNGA J <i>I</i>
	02						90 04 Mila:	885.010.812,00	 			PUSKESMAS BUNGA J
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP perangkat daerah	80,01 Nilai	885.010.812,00	1		- 885.010.812,00 F	PUSKESIVIAS BUNGA
					KABUPATEN/KOTA				1			
1	. 02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD -	32 Puskesmas	885.010.812,00		2. Membangun Sektor -	- 885,010.812.00 F	PUSKESMAS BUNGA
1 -						meningkat kinerjanya				Kesehatan		
						mendapatkan nilai AA			1	2. Pengembangan sumber		
										daya manusia yang sehat,		
									1	produktif, terampil		
1	. 02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	885.010.812,00 Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN DARI BLUD -	2. Membangun Sektor -	885.010.812,00 F	PUSKESMAS BUNGA
					Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang		Muara Kaman, Semua		Kesehatan		
						Pelayanan		Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
										daya manusia yang sehat,		
										produktif, terampil		

1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks Pelayanan Kesehatan -	0,45 Persen	1.135.255.000,00			-	1.135.255.000,00 F	PUSKESMAS BUNGA JAD
				KESEHATAN PERORANGAN DAN	Primer	0,49 Persen						
				UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Perilaku Kesehatan	0,50 Persen						
					Indeks Keluarga sehat	0,54 Persen						
					Indeks pelayanan penyakit tidak	0,65 Persen						
					menular	0,77 Persen						
					Indeks Pelayanan Penyakit	0,78 Persen						
						0,78 Persen						
					Menular							
					Indeks pelayanan kesehatan	13,8 Persen						
					reproduksi	34,38 Persen						
					Indeks pelayanan kesehatan balita	83 Persen						
					Indeks Pelayanan Kesehatan	90,50 Persen						
					Lingkungan	93 Persen						
					Presentasi Balita Stunting							
					Persentase Puskesmas Akreditasi							
					Paripurna dan Utama							
					Persentase Layanan Kesehatan							
					Rumah Sakit yang Memenuhi SPM							
					Perentase Ketersediaan Sarana							
					dan Prasarana Pelayanan RS							
					Persentase Capaian Standar							
					Pelayanan Minimal (SPM) RS							
					r ciayanan minina (si m) ns							
1	02	02 2.0	02	Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan -	100 Persen	1.135.255.000,00	-	2. Membangun Sektor -	-	1.135.255.000,00 F	PUSKESMAS BUNGA JAI
				untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang	95 Persen			Kesehatan			
				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memiliki kompetensi kebidanan di	70 Persen			2. Pengembangan sumber			
				3	fasilitas kesehatan				daya manusia yang sehat,			
					Imunisasi Dasar lengkap (IDL)				produktif, terampil			
					Persentase KB Aktif				F			
					r ersentase na znam							
1	02	02 2.0	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	1.135.255.000,00 Kab. Kutai Kartanega	a, PENDAPATAN DARI BLUD, -	Membangun Sektor -		1.135.255.000,00 F	PUSKESMAS BUNGA JAD
					Pelayanan Puskesmas		Muara Kaman, Semu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Kesehatan			
							Kel/Desa	, ,	2. Pengembangan sumber			
									daya manusia yang sehat,			
									produktif, terampil			
				Puskesmas Prangat			1.475.363.984,00	I I				PUSKESMAS PRANGAT
1					ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1.475.363.984,00					PUSKESMAS PRANGAT
1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			1.475.363.984,00					PUSKESMAS PRANGAT
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah -	80,01 Nilai	623.922.984,00				623.922.984,00 F	PUSKESMAS PRANGAT
				Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD -	32 Puskesma	s 623.922.984,00	-	2. Membangun Sektor -	-	623.922.984,00 F	PUSKESMAS PRANGAT
1	02	01 2.1	10	rennigkatan relayanan blob					Kesehatan			
1	02	01 2.1	10	remingkatan relayanan blob	meningkat kinerjanya							
1	02	01 2.1	10	reimigkatan reiayanan bLOD	meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AA				2. Pengembangan sumber			
1	02	01 2.1	10	remigratan relayanan biob								
1	02	01 2.1	10	reilligkatali reidyalidii bLOD					Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil			
		01 2.1 01 2.1		Pelayanan dan Penunjang	mendapatkan nilai AA Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	623.922.984,00 Kab. Kutai Kartanega	a, PENDAPATAN DARI BLUD -	daya manusia yang sehat,		623.922.984,00 F	PUSKESMAS PRANGAT
					mendapatkan nilai AA	1 Unit Kerja	623.922.984,00 Kab. Kutai Kartanega Marang Kayu, Semua		daya manusia yang sehat, produktif, terampil		623.922.984,00 F	Puskesmas prangat
				Pelayanan dan Penunjang	mendapatkan nilai AA Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja			daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor		623.922.984,00 F	Puskesmas prangat
				Pelayanan dan Penunjang	mendapatkan nilai AA Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang	1 Unit Kerja	Marang Kayu, Semua		daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan		623.922.984,00 F	PUSKESMAS PRANGAT

ayanan Kesehatan -	0,45 Persen	851.441.000,00			- 851.441.000,00 PUSKESMA	MAS PRANGAT
-,	0,49 Persen					
rilaku Kesehatan	0,50 Persen					
luarga sehat	0,54 Persen					
layanan penyakit tidak	0,65 Persen					
ayanan penyakit tidak	0,77 Persen					
ayanan Penyakit	0,78 Persen					
	0,90 Persen					
ayanan kesehatan	13,8 Persen					
i	34,38 Persen					
ayanan kesehatan balita	83 Persen					
layanan Kesehatan	90,50 Persen					
n	93 Persen					
i Balita Stunting						
e Puskesmas Akreditasi						
dan Utama						
e Layanan Kesehatan						
kit yang Memenuhi SPM						
Ketersediaan Sarana						
rana Pelayanan RS						
e Capaian Standar						
n Minimal (SPM) RS						
pertolongan persalinan -	100 Persen	851.441.000,00	<u>_</u>	2. Membangun Sektor -	- 851.441.000,00 PUSKESMA	MAS PRANGAT
ga kesehatan yang	95 Persen	03211121000,000		Kesehatan	331-41-000,00 T 351C5111	
ompetensi kebidanan di	70 Persen					
	70 Persen			2. Pengembangan sumber		
esehatan				daya manusia yang sehat,		
Dasar lengkap (IDL)				produktif, terampil		
e KB Aktif						
kumen Operasional	1 Dokumen	851.441.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor -	851.441.000.00 PUSKESMA	AAS PRANGAT
Puskesmas		Marang Kayu, Semua	, ,	Kesehatan		
a distribution of the state of		Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
		icij Desa		daya manusia yang sehat,		
				produktif, terampil		
		2.229.981.685,00		produktii, terampii	2.229.981.685,00 PUSKESMA	MAS BADAK BAR
TAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2.229.981.685,00			2.229.981.685,00 PUSKESMA	
		2.229.981.685,00			2.229.981.685,00 PUSKESMA	
P perangkat daerah -	80,01 Nilai	1.165.679.685,00			- 1.165.679.685,00 PUSKESMA	/IAS BADAK BARI
skesmas BLUD -	32 Puskesmas	1.165.679.685,00	 _	2. Membangun Sektor -	- 1.165.679.685,00 PUSKESMA	MAS BADAK PAD
	32 ruskesillds	1.103.073.003,00			- 1.103.07 3.003,00 POSKESIVIA	AND DAVAK DAK
t kinerjanya				Kesehatan		
tkan nilai AA				2. Pengembangan sumber		
				daya manusia yang sehat, produktif, terampil		
UD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	1.165.679.685,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN DARI BLUD -	2. Membangun Sektor -	1.165.679.685,00 PUSKESMA	AS BADAK BARI
dan Penunjang		Muara Badak, Semua		Kesehatan	1	
, ,		Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
			1	10.70	1 1	
					Kel/Desa 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,	Kel/Desa 2. Pengembangan sumber

22 1	1 0	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks Pelayanan Kesehatan -		0,45 Persen	1.064.302.000,00			-	1.064.302.000,00	PUSKESMAS BADAK BARU
				KESEHATAN PERORANGAN DAN	Primer		0,49 Persen						
				UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Perilaku Kesehatan		0,50 Persen						
					Indeks Keluarga sehat		0,54 Persen						
					Indeks pelayanan penyakit tidak		0,65 Persen						
					menular		0,77 Persen						
					Indeks Pelayanan Penyakit		0,78 Persen						
					Menular		0,90 Persen						
					Indeks pelayanan kesehatan		13.8 Persen						
					reproduksi		34,38 Persen						
					Indeks pelayanan kesehatan balita		83 Persen						
					Indeks Pelayanan Kesehatan		90,50 Persen						
					Lingkungan		93 Persen						
					Presentasi Balita Stunting		33 Telsell						
					Persentase Puskesmas Akreditasi								
					Paripurna dan Utama								
					Persentase Layanan Kesehatan								
					Rumah Sakit yang Memenuhi SPM						1		
					Perentase Ketersediaan Sarana								
					dan Prasarana Pelayanan RS								
					Persentase Capaian Standar								
					Pelayanan Minimal (SPM) RS								
1	1 0	02	02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan -		100 Persen	1.064.302.000,00		- 2. Membangun Sektor -	-	1.064.302.000,00	PUSKESMAS BADAK BARU
				untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang		95 Persen			Kesehatan			
				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memiliki kompetensi kebidanan di		70 Persen			2. Pengembangan sumber			
					fasilitas kesehatan					daya manusia yang sehat,			
					Imunisasi Dasar lengkap (IDL)					produktif, terampil			
					Persentase KB Aktif								
1	1 0	02	02 2.02 0	033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional		1 Dokumen	1.064.302.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 2. Membangun Sektor -		1.064.302.000,00	PUSKESMAS BADAK BARU
					Pelayanan Puskesmas			Muara Badak, Semua		Kesehatan	1		
								Kel/Desa		2. Pengembangan sumber			
										daya manusia yang sehat,			
										produktif, terampil			
				Puskesmas Rimba Ayu				1.996.388.379,00					PUSKESMAS RIMBA AYU
1					ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DA	ASAR		1.996.388.379,00					PUSKESMAS RIMBA AYU
	1 0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I	KESEHATAN			1.996.388.379,00					PUSKESMAS RIMBA AYU
23 1	1 0	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP perangkat daerah -		80,01 Nilai	1.144.947.379,00			-	1.144.947.379,00	PUSKESMAS RIMBA AYU
				PEMERINTAHAN DAERAH									
				KABUPATEN/KOTA									
1	1 0	02	01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD -		32 Puskesmas	1.144.947.379,00	- - - - - - - - - -	- 2. Membangun Sektor -	[-	1.144.947.379,00	PUSKESMAS RIMBA AYU
					meningkat kinerjanya					Kesehatan	1		
					mendapatkan nilai AA					2. Pengembangan sumber	1		
										daya manusia yang sehat,	1		
										produktif, terampil	1		
1	1 0	02	01 2.10 0	001 Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan		1 Unit Kerja	1.144.947.379,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN DARI BLUD	- 2. Membangun Sektor -		1.144.947.379,00	PUSKESMAS RIMBA AYU
				Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang			Pulau Seluan, Semua		Kesehatan	1	·	
				,	Pelayanan			Kel/Desa		2. Pengembangan sumber	1		
					'			Kab. Kutai Kartanegara,		daya manusia yang sehat,	1		
								Kota Bangun Darat,		produktif, terampil	1		
								Semua Kel/Desa		F	1		
								Schilde Nei/ Desa			1		
1	- 1	- 1	1 1	1					l l				

24 1	1 (02 02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks Pelayanan Kesehatan -	0,45 Persen	851.441.000,00			- 851.441.000,00	PUSKESMAS RIMBA AYU
			1	1	KESEHATAN PERORANGAN DAN	Primer	0,49 Persen					
			1	1	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Perilaku Kesehatan	0,50 Persen					
						Indeks Keluarga sehat	0,54 Persen					
						Indeks pelayanan penyakit tidak	0,65 Persen					
						menular	0,77 Persen					
						Indeks Pelayanan Penyakit	0,78 Persen					
						Menular	0,90 Persen					
						Indeks pelayanan kesehatan	13,8 Persen					
						reproduksi	34,38 Persen					
						Indeks pelayanan kesehatan balita	83 Persen					
						Indeks Pelayanan Kesehatan	90,50 Persen					
						Lingkungan	93 Persen					
						Presentasi Balita Stunting						
						Persentase Puskesmas Akreditasi						
						Paripurna dan Utama						
						Persentase Layanan Kesehatan						
						Rumah Sakit yang Memenuhi SPM						
						Perentase Ketersediaan Sarana						
						dan Prasarana Pelayanan RS						
						Persentase Capaian Standar						
						Pelayanan Minimal (SPM) RS						
						i ciayanan minina (or m) no						
	. .	02 02	2.02	+	Daniel d'anni la constant de la batan	Column and description	400 0	054 444 000 00		2.84	054 444 000 00	DUCKECAAC DIAADA AMI
1 1	1 (02 02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan -	100 Persen	851.441.000,00		- 2. Membangun Sektor -	- 851.441.000,00	PUSKESMAS RIMBA AYU
					untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang	95 Persen			Kesehatan		
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memiliki kompetensi kebidanan di	70 Persen			2. Pengembangan sumber		
						fasilitas kesehatan				daya manusia yang sehat,		
						Imunisasi Dasar lengkap (IDL)				produktif, terampil		
						Persentase KB Aktif						
	_											
1 2	1 (02 02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	851.441.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	2. Membangun Sektor	851.441.000,00	PUSKESMAS RIMBA AYU
						Pelayanan Puskesmas		Pulau Seluan, Semua		Kesehatan		
								Kel/Desa		Pengembangan sumber		
								Kab. Kutai Kartanegara		daya manusia yang sehat,		
								Kota Bangun Darat,		produktif, terampil		
								Semua Kel/Desa				
	+				Puskesmas Jonggon Jaya			1.718.544.649,00		I	1.718.544.649,00	D PUSKESMAS JONGGON JAYA
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Y	ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1.718.544.649,00			1.718.544.649,00	D PUSKESMAS JONGGON JAYA
	1 (02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	KESEHATAN		1.718.544.649,00			1.718.544.649,00	D PUSKESMAS JONGGON JAYA
	- I '				GROSPAT I EMELANTIPAT BIBPATO	NEDE IN THE		217 2010 4 110 4 5 7 6 0			17.2037.110.15,01	o i concomino fortados sum
25 1	1 (02 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP perangkat daerah -	80,01 Nilai	779.839.649,00			- 779.839.649,00	PUSKESMAS JONGGON JAYA
			1	1	PEMERINTAHAN DAERAH			•				
			1	1	KABUPATEN/KOTA							
1	1 (02 01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD -	32 Puskesmas	779.839.649,00		- 2. Membangun Sektor -	- 779.839.649.00	PUSKESMAS JONGGON JAYA
		1	1	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	meningkat kinerjanya		• • •		Kesehatan	1	
			1	1		mendapatkan nilai AA				2. Pengembangan sumber		
			1	1						daya manusia yang sehat,		
			1	1						produktif, terampil		
—	1 (02 01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	779.839.649,00 Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN DARI RILID	- 2. Membangun Sektor -	779 839 649 O	PUSKESMAS JONGGON JAYA
	- I '		2.20	0001	Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang	2 ome kerju	Loa Kulu, Semua		Kesehatan	773.033.043,00	- III. EJII. E JOILEGON JAIA
			1	1	i ciayanan beob	Pelayanan		Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
		1	1	1	I	i ciayanan		Neij Desa				
							1 1			daya manusia yang sehat		
										daya manusia yang sehat, produktif, terampil		

1	02	2 0)2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks Pelayanan Kesehatan -	0,45 Persen	938.705.000,00			-	938.705.000,00	PUSKESMAS JONGGON JA
					KESEHATAN PERORANGAN DAN	Primer	0,49 Persen						
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Perilaku Kesehatan	0,50 Persen						
						Indeks Keluarga sehat	0,54 Persen						
						Indeks pelayanan penyakit tidak	0,65 Persen						
						menular	0,77 Persen						
						Indeks Pelayanan Penyakit	0,78 Persen						
						Menular	0,90 Persen						
						Indeks pelayanan kesehatan	13,8 Persen						
						reproduksi	34,38 Persen						
						Indeks pelayanan kesehatan balita	83 Persen						
						Indeks Pelayanan Kesehatan	90,50 Persen						
						Lingkungan	93 Persen						
						Presentasi Balita Stunting							
						Persentase Puskesmas Akreditasi							
						Paripurna dan Utama							
						Persentase Layanan Kesehatan							
						Rumah Sakit yang Memenuhi SPM							
						Perentase Ketersediaan Sarana							
						dan Prasarana Pelayanan RS							
						Persentase Capaian Standar							
						Pelayanan Minimal (SPM) RS							
1	02	, ,	2 2.0	,	Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan -	100 Persen	938.705.000,00		- 2. Membangun Sektor -		029 705 000 00	PUSKESMAS JONGGON
1 -	02	٠ ا ٠	2.0	<u> </u>	untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang	95 Persen	538.703.000,00		Kesehatan	I ⁻	938.703.000,00	POSKESIVIAS JOINGGOIN I
							70 Persen						
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memiliki kompetensi kebidanan di	70 Persen			2. Pengembangan sumber			
						fasilitas kesehatan				daya manusia yang sehat,			
						Imunisasi Dasar lengkap (IDL)				produktif, terampil			
						Persentase KB Aktif							
1	02	2 0	2.02	2 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	938.705.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 2. Membangun Sektor -		938.705.000,00	PUSKESMAS JONGGON JA
						Pelayanan Puskesmas		Loa Kulu, Semua		Kesehatan			
								Kel/Desa		2. Pengembangan sumber			
										daya manusia yang sehat,			
										produktif, terampil			
					Puskesmas Muara Badak			2.393.932.072,00				2.393.932.072,00	PUSKESMAS MUARA BAD
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YA	ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2.393.932.072,00				2.393.932.072,00	PUSKESMAS MUARA BAD
1	02	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	KESEHATAN		2.393.932.072,00				2.393.932.072,00	PUSKESMAS MUARA BAI
	1												
1	02	2 0)1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP perangkat daerah	80,01 Nilai	1.471.537.072,00			-	1.4/1.537.072,00	PUSKESMAS MUARA BAI
					KABUPATEN/KOTA								
1	02	2 0	1 2.10	0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD -	32 Puskesmas	1.471.537.072,00		- 2. Membangun Sektor -	-	1.471.537.072.00	PUSKESMAS MUARA BA
						meningkat kinerjanya		·		Kesehatan		1	
1				1		mendapatkan nilai AA				2. Pengembangan sumber			
		1			1					daya manusia yang sehat,			
	1	1			1					produktif, terampil			
1	02	2 0	1 2.10	0 0001	Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	1.471.537.072,00 Kab. Kutai Kartanegara	DENIDADATAN DARI DILID	- 2. Membangun Sektor -	- 	1 471 537 072 00	PUSKESMAS MUARA BA
1 *	02	٦١٠	2.10	0001	Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang	1 Oliic Kerja	Muara Badak, Semua	TENDALATAN DAM BLOD	Kesehatan		1.471.557.072,00	. CONLINING INIONNA BA
				1	relayarian blob	Pelayanan							
		1	1			relayariari		Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		1	
1	1	- 1		1						daya manusia yang sehat, produktif, terampil			

1 (02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks Pelayanan Kesehatan -	0,45 Persen	922.395.000,00			- 922.395.000,00	PUSKESMAS MUARA BAD
			KESEHATAN PERORANGAN DAN	Primer	0,49 Persen					
			UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Perilaku Kesehatan	0,50 Persen					
				Indeks Keluarga sehat	0,54 Persen					
				Indeks pelayanan penyakit tidak	0,65 Persen					
				menular	0,77 Persen					
				Indeks Pelayanan Penyakit	0,78 Persen					
				Menular	0,90 Persen					
					13,8 Persen					
				Indeks pelayanan kesehatan						
				reproduksi	34,38 Persen					
				Indeks pelayanan kesehatan balita	83 Persen					
				Indeks Pelayanan Kesehatan	90,50 Persen					
				Lingkungan	93 Persen					
				Presentasi Balita Stunting						
				Persentase Puskesmas Akreditasi						
				Paripurna dan Utama						
				Persentase Layanan Kesehatan						
1 1	J			Rumah Sakit yang Memenuhi SPM						
				Perentase Ketersediaan Sarana						
				dan Prasarana Pelayanan RS						
				Persentase Capaian Standar						
				Pelayanan Minimal (SPM) RS						
1 1	02	02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan -	100 Persen	922.395.000,00	-	2. Membangun Sektor -	- 922.395.000,00	PUSKESMAS MUARA BA
			untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang	95 Persen			Kesehatan		
			Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memiliki kompetensi kebidanan di	70 Persen			2. Pengembangan sumber		
				fasilitas kesehatan				daya manusia yang sehat,		
				Imunisasi Dasar lengkap (IDL)				produktif, terampil		
				Persentase KB Aktif						
1 (02	02 2.02	0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	922.395.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor -	922.395.000,00	PUSKESMAS MUARA BAD
				Pelayanan Puskesmas		Muara Badak, Semua		Kesehatan		
				1 . ,		Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
						,		daya manusia yang sehat,		
								produktif, terampil		
			Puskesmas Loa Duri			2.176.253.859,00				PUSKESMAS LOA DURI
1				ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2.176.253.859,00				PUSKESMAS LOA DURI
1 (URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			2.176.253.859,00				PUSKESMAS LOA DURI
1 (02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah -	80,01 Nilai	1.324.812.859,00			1.324.812.859,00	PUSKESMAS LOA DURI
1 (02	01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD -	32 Puskesmas	1.324.812.859,00	-	2. Membangun Sektor -	- 1.324.812.859,00	PUSKESMAS LOA DURI
1 1	J			meningkat kinerjanya				Kesehatan		
1 1	J			mendapatkan nilai AA				2. Pengembangan sumber		
								daya manusia yang sehat,		
1 1	J							produktif, terampil		
1 (02	01 2.10	0001 Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	1.324.812.859,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN DARI BLUD -	2. Membangun Sektor -	1.324.812.859,00	PUSKESMAS LOA DURI
1 1			Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang		Loa Janan, Semua		Kesehatan	1	
	J		,	Pelayanan		Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
1 1				Coperati		Nell Desa		daya manusia yang sehat,		
			l l	1 1			1			1
				The state of the s				produktif, terampil		

30	1 (02 02	:		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks Pelayanan Kesehatan -	0,45 Persen	851.441.000,00		-	851.441.000,00	PUSKESMAS LOA DURI
					KESEHATAN PERORANGAN DAN	Primer	0,49 Persen					
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Perilaku Kesehatan	0,50 Persen					
						Indeks Keluarga sehat	0,54 Persen					
						Indeks pelayanan penyakit tidak	0,65 Persen					
						menular	0,77 Persen					
						Indeks Pelayanan Penyakit	0,78 Persen					
						Menular	0,90 Persen					
							13,8 Persen					
						Indeks pelayanan kesehatan						
						reproduksi	34,38 Persen					
						Indeks pelayanan kesehatan balita	83 Persen					
						Indeks Pelayanan Kesehatan	90,50 Persen					
						Lingkungan	93 Persen					
						Presentasi Balita Stunting						
						Persentase Puskesmas Akreditasi						
						Paripurna dan Utama						
						Persentase Layanan Kesehatan						
						Rumah Sakit yang Memenuhi SPM						
						Perentase Ketersediaan Sarana						
						dan Prasarana Pelayanan RS						
						Persentase Capaian Standar						
						Pelayanan Minimal (SPM) RS						
						, (,						
			+						 			
	1 (02 02	2.02	:	Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan -	100 Persen	851.441.000,00	-	2. Membangun Sektor	851.441.000,00	PUSKESMAS LOA DURI
					untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang	95 Persen			Kesehatan		
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memiliki kompetensi kebidanan di	70 Persen			2. Pengembangan sumber		
						fasilitas kesehatan				daya manusia yang sehat,		
						Imunisasi Dasar lengkap (IDL)				produktif, terampil		
						Persentase KB Aktif						
	1 (02 02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas		1 Dokumen	851.441.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor -	851.441.000,00	PUSKESMAS LOA DURI
						Pelayanan Puskesmas		Loa Janan, Semua		Kesehatan		
								Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
										daya manusia yang sehat,		
										produktif, terampil		
					Puskesmas Rapak Mahang			3.387.073.387,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.387.073.387,00	PUSKESMAS RAPAK
								•			•	MAHANG
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YA	ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3.387.073.387,00			3.387.073.387,00	PUSKESMAS RAPAK
												MAHANG
	1 (02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	KESEHATAN		3.387.073.387,00			3.387.073.387,00	
												MAHANG
31	1 (02 01	.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP perangkat daerah -	80,01 Nilai	2.393.725.387,00			2.393.725.387,00	PUSKESMAS RAPAK
					PEMERINTAHAN DAERAH							MAHANG
					KABUPATEN/KOTA							
	1 (02 01	2.10	1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD -	32 Puskesmas	2.393.725.387,00	-	2. Membangun Sektor	2.393.725.387,00	PUSKESMAS RAPAK
			1			meningkat kinerjanya				Kesehatan		MAHANG
						mendapatkan nilai AA				2. Pengembangan sumber		
			1							daya manusia yang sehat,		
1			1							produktif, terampil		
	1 (02 01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	2.393.725.387,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN DARI BLUD -	2. Membangun Sektor -	2,393,725.387.00	PUSKESMAS RAPAK MAHANO
	` I `				Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang		Tenggarong, Timbau		Kesehatan		
			1		. c.ayanan beob	Pelayanan		Tenggarong, milibau		2. Pengembangan sumber		
	- 1	1				i ciayanan				daya manusia yang sehat,		
										produktif, terampil		

32	1 (02 02	:		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks Pelayanan Kesehatan -	0,45 Persen	993.348.000,00			- 993.348.000,00	PUSKESMAS RAPAK
					KESEHATAN PERORANGAN DAN	Primer	0,49 Persen					MAHANG
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Perilaku Kesehatan	0,50 Persen					
						Indeks Keluarga sehat	0,54 Persen					
						Indeks pelayanan penyakit tidak	0,65 Persen					
						menular	0,77 Persen					
						Indeks Pelayanan Penyakit	0,78 Persen					
						Menular	0,90 Persen					
						Indeks pelayanan kesehatan	13,8 Persen					
						reproduksi	34,38 Persen					
						Indeks pelayanan kesehatan balita	83 Persen					
						Indeks Pelayanan Kesehatan	90,50 Persen					
						Lingkungan	93 Persen					
						Presentasi Balita Stunting						
						Persentase Puskesmas Akreditasi						
						Paripurna dan Utama						
						Persentase Layanan Kesehatan						
						Rumah Sakit yang Memenuhi SPM						
						Perentase Ketersediaan Sarana						
						dan Prasarana Pelayanan RS						
						Persentase Capaian Standar						
						Pelayanan Minimal (SPM) RS						
	1 (02 02	2.02	,	Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan -	100 Persen	993.348.000,00		- 2. Membangun Sektor -	- 993 348 000 00	PUSKESMAS RAPAK
	- '	02 02		·	untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang	95 Persen	33313-161666)55		Kesehatan	333.3-0.000,00	MAHANG
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memiliki kompetensi kebidanan di	70 Persen			2. Pengembangan sumber		
					Tinghat Daeran Nabapateny Nota	fasilitas kesehatan				daya manusia yang sehat,		
						Imunisasi Dasar lengkap (IDL)				produktif, terampil		
						Persentase KB Aktif				productify tertainpin		
	1 (02 02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	993.348.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 2. Membangun Sektor -	993.348.000,00	PUSKESMAS RAPAK MAHANG
					· ·	Pelayanan Puskesmas		Tenggarong, Timbau	, ,	Kesehatan		
						,		3000		2. Pengembangan sumber		
										daya manusia yang sehat,		
										produktif, terampil		
					Puskesmas Sanga-Sanga	<u> </u>		2.182.538.115,00		<u> </u>	2.182.538.115,00	PUSKESMAS SANGA-SANGA
	_									, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YA	ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2.182.538.115,00			2.182.538.115,00	PUSKESMAS SANGA-SANGA
	1 (02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	KESEHATAN		2.182.538.115,00			2.182.538.115,00	PUSKESMAS SANGA-SANGA
33	1 (02 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP perangkat daerah -	80,01 Nilai	1.260.143.115,00			1 260 1/3 115 00	PUSKESMAS SANGA-SANGA
~	• '	- 01	1		PEMERINTAHAN DAERAH	Tribi Stati Petangaat auctui	50,01 Wildi	1.00.1.10.12.0,00			1.200.143.113,00	- SALSING SAITGA SAITGA
			1		KABUPATEN/KOTA							
 	1 (02 01	2,10	,	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD -	32 Puskesmas	1.260.143.115,00		- 2. Membangun Sektor -	- 1 260 143 115 00	PUSKESMAS SANGA-SANGA
	- I '	01	0	1		meningkat kinerjanya	SE i donesinas			Kesehatan	1.200.143.113,00	
			1			mendapatkan nilai AA				2. Pengembangan sumber		
			1			mendapatkan liliai AA				daya manusia yang sehat,		
			1							produktif, terampil		
-	1 '	02 01	2.10	0001	Delevenes des Descrieses	Lumbah DI LID yang Manyadiakan	1 Unit Kerja	1.260.143.115,00 Kab. Kutai Kartanegara	DENIDADATANI DADI DILID		1 200 1 42 115 00	PUSKESMAS SANGA-SANGA
	* ['	02 01	2.10	, 0001		Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Ollit Kelja		I LINDAFA IAN DANI BLUD		1.200.143.115,00	OSKESIVIAS SAINGA-SAINGA
			1		Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Sanga Sanga, Semua Kel/Desa		Kesehatan		
			1			relayariari		Kei/Desa		2. Pengembangan sumber		
			1							daya manusia yang sehat, produktif, terampil		
			1	1	1	1 1			1	produktii, teranipii		1

34	1 (02 02	: [PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks Pelayanan Kesehatan -	0,45 Persen	922.395.000,00			-	922.395.000,00	PUSKESMAS SANGA-SANGA
			1		KESEHATAN PERORANGAN DAN	Primer	0,49 Persen		ĺ				ĺ
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Perilaku Kesehatan	0,50 Persen						
			1			Indeks Keluarga sehat	0,54 Persen		ĺ				ĺ
						Indeks pelayanan penyakit tidak	0,65 Persen						
						menular	0,77 Persen						
						Indeks Pelayanan Penyakit	0,78 Persen						
						Menular	0,90 Persen						
						Indeks pelayanan kesehatan	13,8 Persen						
						reproduksi	34,38 Persen						
						Indeks pelayanan kesehatan balita	83 Persen						
						Indeks Pelayanan Kesehatan	90,50 Persen						
						Lingkungan	93 Persen						
						Presentasi Balita Stunting	35 Telsell						
						Persentase Puskesmas Akreditasi							
						Paripurna dan Utama							
						Persentase Layanan Kesehatan							
						Rumah Sakit yang Memenuhi SPM							
						Perentase Ketersediaan Sarana							
						dan Prasarana Pelayanan RS							
						Persentase Capaian Standar							
						Pelayanan Minimal (SPM) RS							
	1 (02 02	2.02	:	Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan -	100 Persen	922.395.000,00		- 2. Membangun Sektor	-	922.395.000,00	PUSKESMAS SANGA-SANGA
					untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang	95 Persen			Kesehatan			
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memiliki kompetensi kebidanan di	70 Persen			2. Pengembangan sumber			
						fasilitas kesehatan				daya manusia yang sehat,			
						Imunisasi Dasar lengkap (IDL)				produktif, terampil			
						Persentase KB Aktif							
	1 (02 02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	922.395.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 2. Membangun Sektor	-	922.395.000,00	PUSKESMAS SANGA-SANGA
						Pelayanan Puskesmas		Sanga Sanga, Semua		Kesehatan			
								Kel/Desa		2. Pengembangan sumber			
										daya manusia yang sehat,			
										produktif, terampil			
					Puskesmas Muara Kaman			2.116.079.564,00		<u> </u>		2.322.142.337,00	PUSKESMAS MUARA
													KAMAN
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Y	ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2.116.079.564,00				2.322.142.337,00	PUSKESMAS MUARA
													KAMAN
	1 (02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	KESEHATAN		2.116.079.564,00				2.322.142.337,00	PUSKESMAS MUARA
													KAMAN
35	1 (02 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP perangkat daerah -	80,01 Nilai	894.633.214,00			-	1.044.980.337,00	PUSKESMAS MUARA
					PEMERINTAHAN DAERAH								KAMAN
					KABUPATEN/KOTA								
	1 (02 01	2.10	1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD -	32 Puskesmas	894.633.214,00	1	- 2. Membangun Sektor	- -	1.044.980.337,00	PUSKESMAS MUARA
			1	1		meningkat kinerjanya			1	Kesehatan		1	KAMAN
			1			mendapatkan nilai AA			ĺ	2. Pengembangan sumber			ĺ
			1	1					1	daya manusia yang sehat,		1	ĺ
			1						ĺ	produktif, terampil			ĺ
	1 (02 01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	894.633.214,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN DARI BLUD		i-	1.044.980.337.00	PUSKESMAS MUARA KAMAN
			1	1	Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang		Muara Kaman, Semua	1	Kesehatan			1
			1	1	,	Pelayanan		Kel/Desa	ĺ	2. Pengembangan sumber			ĺ
			1	1				ney seed	1	daya manusia yang sehat,		1	ĺ
			1	1					1	produktif, terampil		1	ĺ
					1		1 1		I	produktii, terampii	1	1	I

1 02	2 0	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks Pelayanan Kesehatan -	0,45 Persen	1.221.446.350,00			- 1.277.162.000.00	PUSKESMAS MUARA
				KESEHATAN PERORANGAN DAN	Primer	0,49 Persen					KAMAN
				UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Perilaku Kesehatan	0,50 Persen					
					Indeks Keluarga sehat	0,54 Persen					
					Indeks pelayanan penyakit tidak	0,65 Persen					
					menular	0,77 Persen					
					Indeks Pelayanan Penyakit	0,78 Persen					
					Menular	0,90 Persen					
					Indeks pelayanan kesehatan	13.8 Persen					
					reproduksi	34,38 Persen					
					Indeks pelayanan kesehatan balita	83 Persen					
					Indeks Pelayanan Kesehatan	90,50 Persen					
					Lingkungan	93 Persen					
					Presentasi Balita Stunting	33 Telsell					
					Persentasi Banta Stunting Persentase Puskesmas Akreditasi						
					Paripurna dan Utama						
					Persentase Layanan Kesehatan						
					Rumah Sakit yang Memenuhi SPM						
					Perentase Ketersediaan Sarana						
					dan Prasarana Pelayanan RS						
					Persentase Capaian Standar						
					Pelayanan Minimal (SPM) RS						
	_										
1 02	2 0	02 2.02	2	Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan -	100 Persen	1.221.446.350,00	-	2. Membangun Sektor -	- 1.277.162.000,00	PUSKESMAS MUARA
				untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang	95 Persen			Kesehatan		KAMAN
				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memiliki kompetensi kebidanan di	70 Persen			2. Pengembangan sumber		
					fasilitas kesehatan				daya manusia yang sehat,		
					Imunisasi Dasar lengkap (IDL)				produktif, terampil		
					Persentase KB Aktif						
1 02	2 0	02 200	2 0022	0		4 Delivere	4 224 445 250 00 14 4 4 4 4 4	DANIA DA CULIACII (DDUI)		4 277 452 000 00	PUSKESMAS MUARA KAN
1 02	2 0	02 2.02	2 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	1.221.446.350,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	2. Membangun Sektor	1.2/7.162.000,00	PUSKESIVIAS IVIUARA KAI
					Pelayanan Puskesmas		Muara Kaman, Semua		Kesehatan		
							Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
									daya manusia yang sehat,		
	_								produktif, terampil		
				Puskesmas Marang Kayu			2.411.191.994,00			2.411.191.994,00	PUSKESMAS MARANG H
1	\top			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YA	ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2.411.191.994,00			2.411.191.994,00	PUSKESMAS MARANG R
1 02	2		+	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	KESEHATAN		2.411.191.994,00			2 411 101 004 00	PUSKESMAS MARANG I
				ONOSAN FEINERIN IARIAN BIDANG	NEGLICIAN	_	2.411.151.554,00			2.411.191.994,00	I OSKESIVIAS IVIARANO I
1 02	2 0	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP perangkat daerah -	80,01 Nilai	1.483.118.994,00			- 1.483.118.994,00	PUSKESMAS MARANG I
			1	PEMERINTAHAN DAERAH							
	_ -		_	KABUPATEN/KOTA							
1 02	2 0	01 2.10	7	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD -	32 Puskesmas	1.483.118.994,00	-	2. Membangun Sektor -	- 1.483.118.994,00	PUSKESMAS MARANG
			1		meningkat kinerjanya				Kesehatan		
			1		mendapatkan nilai AA				2. Pengembangan sumber		
			1						daya manusia yang sehat,		
			_						produktif, terampil		
1 02	2 0	01 2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	1.483.118.994,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN DARI BLUD -	2. Membangun Sektor -	1.483.118.994,00	PUSKESMAS MARANG
			1	Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang		Marang Kayu, Semua		Kesehatan		
					Pelayanan		Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
			1					1		1 1	1
									daya manusia yang sehat,		

38	1	02 02	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks Pelayanan Kesehatan -	0,45 Persen	928.073.000,00			-	928.073.000,00	PUSKESMAS MARANG KAYU
					KESEHATAN PERORANGAN DAN	Primer	0,49 Persen						
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Perilaku Kesehatan	0,50 Persen						
						Indeks Keluarga sehat	0,54 Persen						
						Indeks pelayanan penyakit tidak	0,65 Persen						
						menular	0,77 Persen						
						Indeks Pelayanan Penyakit	0,78 Persen						
						Menular	0,90 Persen						
						Indeks pelayanan kesehatan	13,8 Persen						
						reproduksi	34,38 Persen						
						Indeks pelayanan kesehatan balita	83 Persen						
						Indeks Pelayanan Kesehatan	90,50 Persen						
						Lingkungan	93 Persen						
						Presentasi Balita Stunting	33 reiseii						
						Persentase Puskesmas Akreditasi							
						Paripurna dan Utama							
						Persentase Layanan Kesehatan							
						Rumah Sakit yang Memenuhi SPM							
						Perentase Ketersediaan Sarana							
						dan Prasarana Pelayanan RS							
						Persentase Capaian Standar							
						Pelayanan Minimal (SPM) RS							
	1	02 02	2 2.02	2	Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan -	100 Persen	928.073.000,00		- 2. Membangun Sektor		928.073.000,00	PUSKESMAS MARANG KAYU
					untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang	95 Persen			Kesehatan			
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memiliki kompetensi kebidanan di	70 Persen			2. Pengembangan sumb	r		
					1 *	fasilitas kesehatan				daya manusia yang seha			
						Imunisasi Dasar lengkap (IDL)				produktif, terampil	´		
						Persentase KB Aktif				, , . ,			
	1	02 02	2 2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	928.073.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 2. Membangun Sektor	-	928.073.000.00	PUSKESMAS MARANG KAYU
	- 1					Pelayanan Puskesmas		Marang Kayu, Semua		Kesehatan			
						r ciayanan r askesmas		Kel/Desa		2. Pengembangan sumbe			
								ikely besa		daya manusia yang sehat			
										produktif, terampil			
+	-		-		Puskesmas Kahala		l .	1.626.683.268,00		produktir, terampii		1 626 683 268 00	PUSKESMAS KAHALA
\vdash	1		-	+		ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1.626.683.268,00					PUSKESMAS KAHALA
	1	02		-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			1.626.683.268,00					PUSKESMAS KAHALA
	1		1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP perangkat daerah -	80,01 Nilai	704.288.268,00				·	PUSKESMAS KAHALA
35	-	02 0.	-		PEMERINTAHAN DAERAH	Wilai SAKIF perangkat uaeran	80,01 IVIIdi	704.288.208,00				704.288.208,00	FOSKESIVIAS KARIALA
					KABUPATEN/KOTA								
-	1	02 0	1 2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD -	32 Puskesmas	704.288.268,00		- 2. Membangun Sektor	-	704 388 368 00	PUSKESMAS KAHALA
	1	02 0.	2.10	' I	Peningkatan Pelayanan BLUD		32 Puskesmas	704.288.268,00			- -	704.288.268,00	PUSKESIWAS KAHALA
						meningkat kinerjanya				Kesehatan			
						mendapatkan nilai AA				2. Pengembangan sumbe			
										daya manusia yang sehat			
$\vdash \vdash$				1			1			produktif, terampil			1
	1	02 0:	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	704.288.268,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN DARI BLUD		[-	704.288.268,00	PUSKESMAS KAHALA
				1	Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang		Kenohan, Semua		Kesehatan			
				1	1	Pelayanan		Kel/Desa		2. Pengembangan sumbe			
				1						daya manusia yang sehat			
1 1	- 1				<u> </u>		<u> </u>			produktif, terampil			
				-									

40	1 (02 02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks Pelayanan Kesehatan -	0,45 Persen	922.395.000,00			- 922.395.000,00	PUSKESMAS KAHALA
					KESEHATAN PERORANGAN DAN	Primer	0,49 Persen					
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Perilaku Kesehatan	0,50 Persen					
						Indeks Keluarga sehat	0,54 Persen					
						Indeks pelayanan penyakit tidak	0,65 Persen					
						menular	0,77 Persen					
						Indeks Pelayanan Penyakit	0,78 Persen					
						Menular	0,90 Persen					
						Indeks pelayanan kesehatan	13,8 Persen					
						reproduksi	34,38 Persen					
						Indeks pelayanan kesehatan balita	83 Persen					
						Indeks Pelayanan Kesehatan	90,50 Persen					
						Lingkungan	93 Persen					
						Presentasi Balita Stunting	55 Feiseil					
						Persentase Puskesmas Akreditasi						
						Paripurna dan Utama						
						Persentase Layanan Kesehatan						
						Rumah Sakit yang Memenuhi SPM						
						Perentase Ketersediaan Sarana						
						dan Prasarana Pelayanan RS						
						Persentase Capaian Standar						
						Pelayanan Minimal (SPM) RS						
	1 (02 02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan -	100 Persen	922.395.000,00	-	2. Membangun Sektor -	- 922.395.000.00	PUSKESMAS KAHALA
					untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang	95 Persen			Kesehatan		
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memiliki kompetensi kebidanan di	70 Persen			2. Pengembangan sumber		
					Tinghat Daci an Napapateny Nota	fasilitas kesehatan				daya manusia yang sehat,		
						Imunisasi Dasar lengkap (IDL)				produktif, terampil		
						Persentase KB Aktif				produktii, terainpii		
						reisentase RD Aktii						
	1 (02 02	2.02	0022	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	922.395.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA PAGLHASII (DPH)	2. Membangun Sektor -	022 205 000 00	PUSKESMAS KAHALA
	1 I '	02 02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesinas		1 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)		922.595.000,00	PUSKESIVIAS KARIALA
						Pelayanan Puskesmas		Kenohan, Semua		Kesehatan		
								Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
										daya manusia yang sehat,		
					Dl			1.491.806.275,00		produktif, terampil	4 404 005 275 00	PUSKESMAS RITAN
	1	_	-	<u> </u>	Puskesmas Ritan	ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1.491.806.275,00	T T			PUSKESMAS RITAN
	1 (0.2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			1.491.806.275,00				
		_	-					·				
41	1 (02 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP perangkat daerah -	80,01 Nilai	569.411.275,00			- 569.411.275,00	PUSKESMAS RITAN
					PEMERINTAHAN DAERAH							
	_				KABUPATEN/KOTA							
	1 (02 01	2.10	1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD -	32 Puskesmas	569.411.275,00	[-	2. Membangun Sektor -	- 569.411.275,00	PUSKESMAS RITAN
						meningkat kinerjanya				Kesehatan		
						mendapatkan nilai AA				2. Pengembangan sumber		
										daya manusia yang sehat,		
				1	ĺ				1	produktif, terampil		
	1 (02 01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	569.411.275,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN DARI BLUD -	2. Membangun Sektor -	569.411.275,00	PUSKESMAS RITAN
					Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang		Tabang, Semua		Kesehatan		
						Pelayanan		Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
								nely best				1
										daya manusia yang sehat		
										daya manusia yang sehat, produktif, terampil		

42	1	02 02	:		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks Pelayanan Kesehatan -	0,45 Persen	922.395.000,00			- 922.395.000,00	PUSKESMAS RITAN
					KESEHATAN PERORANGAN DAN	Primer	0,49 Persen					
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Perilaku Kesehatan	0,50 Persen					
						Indeks Keluarga sehat	0,54 Persen					
						Indeks pelayanan penyakit tidak	0,65 Persen					
						menular	0,77 Persen					
						Indeks Pelayanan Penyakit	0,78 Persen					
						Menular	0,90 Persen					
						Indeks pelayanan kesehatan	13,8 Persen					
						reproduksi	34,38 Persen					
						Indeks pelayanan kesehatan balita	83 Persen					
						Indeks Pelayanan Kesehatan	90,50 Persen					
						Lingkungan	93 Persen					
						Presentasi Balita Stunting						
						Persentase Puskesmas Akreditasi						
						Paripurna dan Utama						
						Persentase Layanan Kesehatan						
						Rumah Sakit yang Memenuhi SPM						
						Perentase Ketersediaan Sarana						
						dan Prasarana Pelayanan RS						
						Persentase Capaian Standar						
						Pelayanan Minimal (SPM) RS						
	1	02 02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan -	100 Persen	922.395.000,00	† †	2. Membangun Sektor -	- 922 395 000 00	PUSKESMAS RITAN
	- I '	02 02	2.02		untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang	95 Persen	322.333.000,00		Kesehatan	322.333.000,00	I OSKESIVIAS INTAIN
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memiliki kompetensi kebidanan di	70 Persen			2. Pengembangan sumber		
					Tiligkat Daerali Kabupateri Kota	fasilitas kesehatan	70 Feiseil			daya manusia yang sehat,		
						Imunisasi Dasar lengkap (IDL)				produktif, terampil		
						Persentase KB Aktif				produktii, terampii		
						Persentase ND AKTII						
-	1	02 02	2.02	0022	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	922.395.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA PAGLHASII (DPH)	2. Membangun Sektor -	933 395 000 00	PUSKESMAS RITAN
	1	02 02	2.02	0033	Operasional Felayanan Fuskesinas	Pelayanan Puskesmas	1 bokumen	Tabang, Semua	DANA BAGITIASIC (DBTI)	Z. Membangun sektor Kesehatan	322.333.000,00	POSKESIVIAS KITAIN
						Pelayanan Puskesinas		Kel/Desa				
								Kell/ Desd		Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,		
										produktif, terampil		
-	-		+		Puskesmas Muara Wis			1.463.031.968,00		produktii, teranipii	1 463 031 968 00	PUSKESMAS MUARA WIS
-	1		+	+		ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1.463.031.968,00	T I			PUSKESMAS MUARA WIS
	1	02	+		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			1.463.031.968,00	1			PUSKESMAS MUARA WIS
		02 01	+	+	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP perangkat daerah -	80,01 Nilai	398.729.968,00			- 398.729.968,00	
43	- I '	02 01			PEMERINTAHAN DAERAH	Milai SAKIF perangkat daeran	80,01 Iviidi	338.723.308,00			336.723.306,00	POSKESIVIAS IVIOAKA WIS
					KABUPATEN/KOTA							
-	1	02 01	2 10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD -	32 Puskesmas	398.729.968,00	 	2. Membangun Sektor -	398 729 968 00	PUSKESMAS MUARA WIS
	- '	02 01	2.10		Termingkacan Telayanan BLOD	meningkat kinerjanya	32 Fuskesiilas	330.723.300,00	[Kesehatan	358.725.508,00	OSKLSIVIAS WIDAKA WIS
			1			meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AA			1	2. Pengembangan sumber		
						mendapatkan nilai AA				daya manusia yang sehat,		
										produktif, terampil		
\vdash	1	02 01	210	0001	Pelayanan dan Penunjang	Lumlah DI I I Dunna Manuadiakan	1 Unit Kerja	398.729.968,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DENIDADATAN DARI RILID		200 720 000 00	PUSKESMAS MUARA WIS
	1	02 01	2.10	0001		Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Onit Kerja		FEINDAPATAIN DART BEUD	2. Membangun Sektor	398.729.968,00	FUSICISIVIAS IVIUARA WIS
			1		Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang		Muara Wis, Semua	1	Kesehatan		
			1			Pelayanan		Kel/Desa	1	Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,		
											1	1
										produktif, terampil		

44	1	02 02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks Pelayanan Kesehatan -	0,45 Persen	1.064.302.000,00		-	1.064.302.000,00	PUSKESMAS MUARA WIS
					KESEHATAN PERORANGAN DAN	Primer	0,49 Persen					
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Perilaku Kesehatan	0,50 Persen					
						Indeks Keluarga sehat	0,54 Persen					
						Indeks pelayanan penyakit tidak	0,65 Persen					
						menular	0,77 Persen					
						Indeks Pelayanan Penyakit	0,78 Persen					
						Menular	0,90 Persen					
						Indeks pelayanan kesehatan	13,8 Persen					
						reproduksi	34,38 Persen					
						Indeks pelayanan kesehatan balita	83 Persen					
						Indeks Pelayanan Kesehatan	90,50 Persen					
						Lingkungan	93 Persen					
						Presentasi Balita Stunting	95 Persen					
						Persentase Puskesmas Akreditasi						
						Paripurna dan Utama						
						Persentase Layanan Kesehatan						
						Rumah Sakit yang Memenuhi SPM						
						Perentase Ketersediaan Sarana						
						dan Prasarana Pelayanan RS						
						Persentase Capaian Standar						
						Pelayanan Minimal (SPM) RS						
	1	02 02	2.02	!	Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan -	100 Persen	1.064.302.000,00	-	2. Membangun Sektor	1.064.302.000,00	PUSKESMAS MUARA WIS
					untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang	95 Persen	· ·		Kesehatan	•	
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memiliki kompetensi kebidanan di	70 Persen			2. Pengembangan sumber		
						fasilitas kesehatan				daya manusia yang sehat,		
						Imunisasi Dasar lengkap (IDL)				produktif, terampil		
						Persentase KB Aktif				produktii, terainpii		
						reisentase KD AKIII						
	1	02 02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	1.064.302.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA RAGI HASII (DRH) -	2. Membangun Sektor -	1,064,302,000,00	PUSKESMAS MUARA WIS
	-	02 02	2.02	0033	operasional relayanan raskesmas	Pelayanan Puskesmas	2 Boltamen	Muara Wis, Semua	Britist Bright William	Kesehatan	1.004.502.000,00	TOSKESIVI O MOZIUT VIS
						relayallali ruskesillas		Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
								Rely Desa		daya manusia yang sehat,		
										produktif, terampil		
-	_		-		Darley or Committee of the Committee of		- I	2 044 004 200 00	LL	produktii, teranipii	2 044 004 200 00	PUSKESMAS SUNGAI
					Puskesmas Sungai Meriam			3.041.801.280,00			3.041.801.280,00	MERIAM
-	_		-									
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YA	ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3.041.801.280,00			3.041.801.280,00	PUSKESMAS SUNGAI MERIAM
	-		-	-								
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	KESEHATAN		3.041.801.280,00			3.041.801.280,00	PUSKESMAS SUNGAI MERIAM
	_					T	T					
45	1	02 01	· [PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP perangkat daerah -	80,01 Nilai	1.835.593.280,00			1.835.593.280,00	
					PEMERINTAHAN DAERAH							MERIAM
					KABUPATEN/KOTA							
	1	02 01	2.10	' [Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD -	32 Puskesmas	1.835.593.280,00	-	2. Membangun Sektor	1.835.593.280,00	
						meningkat kinerjanya				Kesehatan		MERIAM
						mendapatkan nilai AA				2. Pengembangan sumber		
										daya manusia yang sehat,		
			1							produktif, terampil		1
	1	02 01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	1.835.593.280,00 Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN DARI BLUD -	2. Membangun Sektor -	1.835.593.280,00	PUSKESMAS SUNGAI MERIAM
			1		Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang		Anggana, Semua		Kesehatan		1
			1			Pelayanan		Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		1
			1					,		daya manusia yang sehat,		1
1 I	- 1	1	1	1						produktif, terampil		1
1												

6 1	02	2 0	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks Pelayanan Kesehatan -	0,45 Persen	1.206.208.000,00			1.206.208.000,00 PUSKESMAS	S SUNGAI
				KESEHATAN PERORANGAN DAN	Primer	0,49 Persen				MERIAM	
				UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Perilaku Kesehatan	0,50 Persen					
					Indeks Keluarga sehat	0,54 Persen					
					Indeks pelayanan penyakit tidak	0,65 Persen					
					menular	0,77 Persen					
					Indeks Pelayanan Penyakit	0,78 Persen					
					Menular	0,90 Persen					
					Indeks pelayanan kesehatan	13,8 Persen					
					reproduksi	34.38 Persen					
					Indeks pelayanan kesehatan balita	83 Persen					
					Indeks Pelayanan Kesehatan Indeks Pelayanan Kesehatan	90,50 Persen					
					Lingkungan	93 Persen					
					Presentasi Balita Stunting						
					Persentase Puskesmas Akreditasi						
					Paripurna dan Utama						
	1				Persentase Layanan Kesehatan						
					Rumah Sakit yang Memenuhi SPM						
					Perentase Ketersediaan Sarana						
					dan Prasarana Pelayanan RS						
					Persentase Capaian Standar						
					Pelayanan Minimal (SPM) RS						
1	02	2 0	2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan -	100 Persen	1.206.208.000,00	-	2. Membangun Sektor -	1.206.208.000,00 PUSKESMAS	S SUNGAI
-	"	-	_	untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang	95 Persen	1.200.200.000,00		Kesehatan	MERIAM	.550.167.1
				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memiliki kompetensi kebidanan di	70 Persen			2. Pengembangan sumber	WENAW	
				Tingkat Daeran Kabupaten/Kota	fasilitas kesehatan	70 Feiseil			daya manusia yang sehat,		
					Imunisasi Dasar lengkap (IDL)				produktif, terampil		
					Persentase KB Aktif						
1	01	2 0	2 2.02 (0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Lundah Bahasan Oranadanah	1 Dokumen	1 206 208 000 00	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2 March Calden	1.206.208.000,00 PUSKESMAS	C CLINICAL MATRIA
1	02	2 0	2 2.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	1.206.208.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor	1.206.208.000,00 PUSKESIVIAS	S SUNGAI IVIERIA
					Pelayanan Puskesmas		Anggana, Semua		Kesehatan		
							Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
									daya manusia yang sehat,		
	4-			Puskesmas Loa Kulu			3.167.177.720,00		produktif, terampil	3.167.177.720,00 PUSKESMAS	ACTON MILLI
1	4	_			ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3.167.177.720,00	1		3.167.177.720,00 PUSKESMAS	
1		,		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I			3.167.177.720,00			3.167.177.720,00 PUSKESMAS	
	_	_				00.04.117-1	·				
7 1	02	2 0	1		Nilai SAKIP perangkat daerah -	80,01 Nilai	1.960.969.720,00			1.960.969.720,00 PUSKESMAS	AS LOA KULU
				PEMERINTAHAN DAERAH							
	4			KABUPATEN/KOTA							
1	02	2 0	1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD -	32 Puskesmas	1.960.969.720,00] - [-	2. Membangun Sektor -	1.960.969.720,00 PUSKESMAS	AS LOA KULU
	1				meningkat kinerjanya				Kesehatan		
	1				mendapatkan nilai AA				2. Pengembangan sumber		
									daya manusia yang sehat,		
	<u>L</u>								produktif, terampil		
1	02	2 0	1 2.10 (0001 Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	1.960.969.720,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN DARI BLUD -	2. Membangun Sektor -	1.960.969.720,00 PUSKESMAS	s loa kulu
	1			Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang		Loa Kulu, Semua	1	Kesehatan		
	1			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Pelayanan		Kel/Desa	1	2. Pengembangan sumber		
	1						,	1	daya manusia yang sehat,		
				1	1 1		1	1			
						1			produktif, terampil		

1 0	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Indeks Pelayanan Kesehatan	0,45 Persen 0,49 Persen	1.206.208.000,00			-	1.206.208.000,00	PUSKESMAS LOA KULU
					Primer							
				UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Perilaku Kesehatan	0,50 Persen						
					Indeks Keluarga sehat	0,54 Persen						
					Indeks pelayanan penyakit tidak	0,65 Persen						
					menular	0,77 Persen						
					Indeks Pelayanan Penyakit	0,78 Persen						
					Menular	0,90 Persen						
					Indeks pelayanan kesehatan	13,8 Persen						
					reproduksi	34,38 Persen						
					Indeks pelayanan kesehatan balita	83 Persen						
					Indeks Pelayanan Kesehatan	90,50 Persen						
					Lingkungan	93 Persen						
					Presentasi Balita Stunting	55 1 6.56.11						
					Persentase Puskesmas Akreditasi							
					Paripurna dan Utama							
					Persentase Layanan Kesehatan							
					Rumah Sakit yang Memenuhi SPM							
					Perentase Ketersediaan Sarana					1		
					dan Prasarana Pelayanan RS					1		
					Persentase Capaian Standar					1		
					Pelayanan Minimal (SPM) RS							
1 0	02	02 2.0)2	Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan -	100 Persen	1.206.208.000,00		- 2. Membangun Sektor -	- 	1.206.208.000,00	PUSKESMAS LOA KULU
				untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang	95 Persen			Kesehatan			
				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memiliki kompetensi kebidanan di	70 Persen			2. Pengembangan sumber			
					fasilitas kesehatan				daya manusia yang sehat,			
					Imunisasi Dasar lengkap (IDL)				produktif, terampil			
					Persentase KB Aktif							
1 0	02	02 2.0	02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	1.206.208.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 2. Membangun Sektor -		1.206.208.000.00	Puskesmas loa kulu
				.,,	Pelayanan Puskesmas		Loa Kulu, Semua	, i	Kesehatan			
					r clayarian askesmas		Kel/Desa		2. Pengembangan sumber			
							iciy Desa		daya manusia yang sehat,			
									produktif, terampil			
	-	_	_	Puskesmas Muara Muntai			2.113.795.797,00	I I	produkti, terampii		2 113 795 797 00	PUSKESMAS MUARA
							21223733737,00					MUNTAI
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YA	ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2.113.795.797,00					PUSKESMAS MUARA MUNTAI
1 0	02		-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	KESEHATAN		2.113.795.797,00					PUSKESMAS MUARA
	_											MUNTAI
1 0	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP perangkat daerah -	80,01 Nilai	907.795.797,00			-	907.795.797,00	PUSKESMAS MUARA
			1	PEMERINTAHAN DAERAH								MUNTAI
				KABUPATEN/KOTA	<u> </u>							
1 0	02	01 2.1	10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD -	32 Puskesmas	907.795.797,00		- 2. Membangun Sektor -	- 		PUSKESMAS MUARA
					meningkat kinerjanya				Kesehatan			MUNTAI
					mendapatkan nilai AA				2. Pengembangan sumber	1		
									daya manusia yang sehat, produktif, terampil			
1 0	02	01 2.:	10 0001	Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	907.795.797,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN DARI BLUD	- 2. Membangun Sektor -		907.795.797,00	PUSKESMAS MUARA MU
				Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang		Muara Muntai, Semua		Kesehatan		***	
				,	Pelayanan		Kel/Desa		2. Pengembangan sumber			
					Coperati		neij besa		daya manusia yang sehat,	1		
					1 1	1	1	1	produktif, terampil	1		

1 0	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks Pelayanan Kesehatan -	0,45 Persen	1.206.000.000,00			- 1.206.000.000,00 PUS	SKESMAS MUARA
				KESEHATAN PERORANGAN DAN	Primer	0,49 Persen				Mui	JNTAI
				UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Perilaku Kesehatan	0,50 Persen					
					Indeks Keluarga sehat	0,54 Persen					
					Indeks pelayanan penyakit tidak	0,65 Persen					
					menular	0,77 Persen					
					Indeks Pelayanan Penyakit	0,78 Persen					
					Menular	0,90 Persen					
					Indeks pelayanan kesehatan	13.8 Persen					
					reproduksi	34,38 Persen					
					Indeks pelayanan kesehatan balita	83 Persen					
					Indeks Pelayanan Kesehatan	90,50 Persen					
					Lingkungan	93 Persen					
					Presentasi Balita Stunting	35 1 613611					
					Persentase Puskesmas Akreditasi						
					Paripurna dan Utama						
					Persentase Layanan Kesehatan						
					Rumah Sakit yang Memenuhi SPM						
				1	Perentase Ketersediaan Sarana						
				1							
					dan Prasarana Pelayanan RS						
					Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS						
					Pelayanan Minimai (SPM) KS						
+ + + -											
1 0	02	02 2	.02	Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan -	100 Persen	1.206.000.000,00	-	- 2. Membangun Sektor -	- 1.206.000.000,00 PUS	
				untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang	95 Persen			Kesehatan	Mui	JNTAI
				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memiliki kompetensi kebidanan di	70 Persen			2. Pengembangan sumber		
					fasilitas kesehatan				daya manusia yang sehat,		
					Imunisasi Dasar lengkap (IDL)				produktif, terampil		
					Persentase KB Aktif						
1 0	22	02 2	02 0022	O		4.0-1	4 205 000 000 00 14 1 14 1 14	DANA DA CILIACII (DDII)		1.206.000.000,00 PUS	CUECHAAC AAUADA AAU
1 0	J2	02 2	.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	1.206.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara		2. Membangun Sektor	1.206.000.000,00 PUS	SKESIVIAS IVIUAKA IVII
					Pelayanan Puskesmas		Muara Muntai, Semua		Kesehatan		
							Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
									daya manusia yang sehat,		
	_			<u> </u>					produktif, terampil		
				Puskesmas Mangkurawang			2.573.615.404,00			2.573.615.404,00 PUS	SKESMAS ANGKURAWANG
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YA	ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2.573.615.404,00			2.573.615.404,00 PUS	
							•			MAI	ANGKURAWANG
1 0	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	KESEHATAN		2.573.615.404,00				SKESMAS
										I I	ANGKURAWANG
1 0	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP perangkat daerah -	80,01 Nilai	1.580.267.404,00			- 1.580.267.404,00 PUS	SKESMAS
				PEMERINTAHAN DAERAH						MAI	ANGKURAWANG
				KABUPATEN/KOTA							
1 0	02	01 2	.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD -	32 Puskesmas	1.580.267.404,00	j.	- 2. Membangun Sektor -	- 1.580.267.404,00 PUS	SKESMAS
					meningkat kinerjanya		•		Kesehatan		ANGKURAWANG
					mendapatkan nilai AA				2. Pengembangan sumber		
									daya manusia yang sehat,		
				1					produktif, terampil		
1 0	02	01 2	.10 0001	Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	1.580.267.404,00 Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN DARI BILID -	2. Membangun Sektor -	1.580.267.404,00 PUS	SKESMAS
1 1 1		-		Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang	2 Sincherju	Tenggarong,	,	Kesehatan		ANGKURAWANG
				1 Clayarian BLOD	Pelayanan Pelayanan		Mangkurawang		2. Pengembangan sumber	IVIAI	DVIAVVANO
					relayanan		IviangkundWdflg				
									daya manusia yang sehat, produktif, terampil		
			1	1	1		1	1	produktii, teranipii		

1	02	02	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks Pelayanan Kesehatan -	0,45 Persen	993.348.000,00			- 993.348.000	,00 PUSKESMAS
				KESEHATAN PERORANGAN DAN	Primer	0,49 Persen					MANGKURAWANG
				UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Perilaku Kesehatan	0,50 Persen					
					Indeks Keluarga sehat	0,54 Persen					
					Indeks pelayanan penyakit tidak	0,65 Persen					
					menular	0,77 Persen					
					Indeks Pelayanan Penyakit	0,78 Persen					
					Menular	0,90 Persen					
					Indeks pelayanan kesehatan	13,8 Persen					
					reproduksi	34,38 Persen					
					Indeks pelayanan kesehatan balita	83 Persen					
					Indeks Pelayanan Kesehatan	90,50 Persen					
					Lingkungan	93 Persen					
					Presentasi Balita Stunting						
					Persentase Puskesmas Akreditasi						
					Paripurna dan Utama						
					Persentase Layanan Kesehatan						
					Rumah Sakit yang Memenuhi SPM						
	l				Perentase Ketersediaan Sarana						
					dan Prasarana Pelayanan RS						
					Persentase Capaian Standar						
					Pelayanan Minimal (SPM) RS						
					r ciayanan minina (or m) no						
1	02	2 02	2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan -	100 Persen	993.348.000,00	-	2. Membangun Sektor -	- 993.348.000	,00 PUSKESMAS
				untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang	95 Persen			Kesehatan		MANGKURAWANG
				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memiliki kompetensi kebidanan di	70 Persen			2. Pengembangan sumber		
					fasilitas kesehatan				daya manusia yang sehat,		
					Imunisasi Dasar lengkap (IDL)				produktif, terampil		
					Persentase KB Aktif						
1	02	2 02	2 2.02	0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	993.348.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor -	993,348,000	,00 PUSKESMAS
-			_		Pelayanan Puskesmas		Tenggarong, Semua		Kesehatan		MANGKURAWANG
					r ciayanan askesmas		Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
							Key besa		daya manusia yang sehat,		
									produktif, terampil		
				Puskesmas Batuah			1.530.001.540,00		processing to compar		,00 PUSKESMAS BATUAH
1					ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1.530.001.540,00				,00 PUSKESMAS BATUAH
1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I			1.530.001.540,00				,00 PUSKESMAS BATUAH
1	02	2 01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP perangkat daerah -	80,01 Nilai	891.420.540,00			891.420.540	,00 PUSKESMAS BATUAH
				KABUPATEN/KOTA							
1	02	01	1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD -	32 Puskesmas	891.420.540,00	[-	2. Membangun Sektor -	- 891.420.540	,00 PUSKESMAS BATUAH
	1				meningkat kinerjanya				Kesehatan		
	1			1	mendapatkan nilai AA				2. Pengembangan sumber		
									daya manusia yang sehat, produktif, terampil		
1	02	01	1 2.10	0001 Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	891.420.540,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN DARI BLUD -	2. Membangun Sektor -	891.420.540	,00 PUSKESMAS BATUAH
	1			Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang		Loa Janan, Semua		Kesehatan		
	1		1 1	1 '	Pelayanan		Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
									daya manusia yang sehat, produktif, terampil		

54	1	02 ()2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks Pelayanan Kesehatan -	0,45 Persen	638.581.000,00			638.581.000,00	PUSKESMAS BATUAH
					KESEHATAN PERORANGAN DAN	Primer	0,49 Persen					
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Perilaku Kesehatan	0,50 Persen					
						Indeks Keluarga sehat	0,54 Persen					
						Indeks pelayanan penyakit tidak	0,65 Persen					
						menular	0,77 Persen					
						Indeks Pelayanan Penyakit	0,78 Persen					
						Menular	0,90 Persen					
						Indeks pelayanan kesehatan	13,8 Persen					
						reproduksi	34,38 Persen					
						Indeks pelayanan kesehatan balita	83 Persen					
						Indeks Pelayanan Kesehatan	90,50 Persen					
						Lingkungan	93 Persen					
						Presentasi Balita Stunting	33 1 613611					
						Persentase Puskesmas Akreditasi						
						Paripurna dan Utama						
						Persentase Layanan Kesehatan						
						Rumah Sakit yang Memenuhi SPM						
						Perentase Ketersediaan Sarana						
						dan Prasarana Pelayanan RS						
						Persentase Capaian Standar						
						Pelayanan Minimal (SPM) RS						
						relayanan willilina (Srivi) KS						
	_											
	1	02 0	2.0	12	Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan -	100 Persen	638.581.000,00	-	2. Membangun Sektor -	638.581.000,00	PUSKESMAS BATUAH
					untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang	95 Persen			Kesehatan		
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memiliki kompetensi kebidanan di	70 Persen			2. Pengembangan sumber		
						fasilitas kesehatan				daya manusia yang sehat,		
						Imunisasi Dasar lengkap (IDL)				produktif, terampil		
						Persentase KB Aktif						
	1	02 (2.0	003	3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	638.581.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Membangun Sektor -	638.581.000,00	PUSKESMAS BATUAH
						Pelayanan Puskesmas		Loa Janan, Semua		Kesehatan		
								Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
										daya manusia yang sehat,		
										produktif, terampil		
					Puskesmas Tabang			1.441.895.767,00				PUSKESMAS TABANG
	1	00			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1.441.895.767,00 1.441.895.767,00				PUSKESMAS TABANG PUSKESMAS TABANG
	1						1 1	· ·				
55	1	02 0	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP perangkat daerah -	80,01 Nilai	377.593.767,00			377.593.767,00	PUSKESMAS TABANG
					PEMERINTAHAN DAERAH							
					KABUPATEN/KOTA							
	1	02 0	2.1	.0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD -	32 Puskesmas	377.593.767,00	[-	2. Membangun Sektor -	377.593.767,00	PUSKESMAS TABANG
				1		meningkat kinerjanya				Kesehatan		
				1	1	mendapatkan nilai AA			1	2. Pengembangan sumber		
										daya manusia yang sehat,		
										produktif, terampil		
	1	02 (01 2.1	.0 000	1 Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	377.593.767,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN DARI BLUD -	2. Membangun Sektor -	377.593.767,00	PUSKESMAS TABANG
				1	Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang		Tabang, Semua		Kesehatan		
				1	1 '	Pelayanan		Kel/Desa	1	2. Pengembangan sumber		
				1						daya manusia yang sehat,		
	- 1								i I	produktif, terampil		

1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks Pelayanan Kesehatan	0,45 Persen	1.064.302.000,00			-	1.064.302.000,00	PUSKESMAS TABANG
					KESEHATAN PERORANGAN DAN	Primer	0,49 Persen						
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Perilaku Kesehatan	0,50 Persen						
						Indeks Keluarga sehat	0,54 Persen						
						Indeks pelayanan penyakit tidak	0,65 Persen						
						menular	0,77 Persen						
						Indeks Pelayanan Penyakit	0,78 Persen						
						Menular	0,90 Persen						
						Indeks pelayanan kesehatan	13,8 Persen						
						reproduksi	34,38 Persen						
						Indeks pelayanan kesehatan balita	83 Persen						
						Indeks Pelayanan Kesehatan	90,50 Persen						
						Lingkungan	93 Persen						
						Presentasi Balita Stunting							
						Persentase Puskesmas Akreditasi							
						Paripurna dan Utama							
1	1					Persentase Layanan Kesehatan					1		
1	1					Rumah Sakit yang Memenuhi SPM					1		
1	1					Perentase Ketersediaan Sarana					1		
						dan Prasarana Pelayanan RS							
1	1					Persentase Capaian Standar					1		
						Pelayanan Minimal (SPM) RS							
						r ciayanan minina (si m) ns							
4													
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan -	100 Persen	1.064.302.000,00		- 2. Membangun Sektor -	-	1.064.302.000,00	PUSKESMAS TABANG
					untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang	95 Persen			Kesehatan			
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memiliki kompetensi kebidanan di	70 Persen			2. Pengembangan sumber			
						fasilitas kesehatan				daya manusia yang sehat,			
						Imunisasi Dasar lengkap (IDL)				produktif, terampil			
						Persentase KB Aktif							
						reisentase RD Aktii							
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	1.064.302.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 2. Membangun Sektor -		1.064.302.000,00	PUSKESMAS TABANG
						Pelayanan Puskesmas		Tabang, Semua		Kesehatan			
						1 ,		Kel/Desa		2. Pengembangan sumber			
								iciy Desa		daya manusia yang sehat,			
										produktif, terampil			
4			1							produktir, terampii			
					Puskesmas Muara Jawa			2.880.842.476,00				2.880.842.476,00	PUSKESMAS MUARA JA
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Y	ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2.880.842.476,00				2.880.842.476,00	PUSKESMAS MUARA JA
1	02	1	+ +		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	KESEHATAN	+	2.880.842.476,00				2 880 842 476 00	PUSKESMAS MUARA JA
1 -					DIDANG							2.000.0-2.470,00	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP perangkat daerah -	80,01 Nilai	1.887.494.476,00			-	1.887.494.476,00	PUSKESMAS MUARA JA
1	1				PEMERINTAHAN DAERAH						1		
					KABUPATEN/KOTA								
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD -	32 Puskesmas	1.887.494.476,00		- 2. Membangun Sektor -	-	1,887,494,476.00	PUSKESMAS MUARA J
1 -		"-				meningkat kinerjanya	SE : USRESITIUS	_100711311170,00		Kesehatan	1	1.007.1-15-1.470,00	
1	1										1		
1	1					mendapatkan nilai AA				2. Pengembangan sumber	1		
										daya manusia yang sehat, produktif, terampil			
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	1.887.494.476,00 Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN DARI RIJID	- 2. Membangun Sektor -		1 887 494 476 00	PUSKESMAS MUARA J
1 *	02	01	2.10	3001			1 Ollit Kerja		,	Z. Ivierribangun sektor Kesehatan	1	1.007.454.470,00	. CONLONINO IVIOANA
1	1				Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang		Muara Jawa, Semua			1		
		1				Pelayanan		Kel/Desa		2. Pengembangan sumber	1	1	
										daya manusia yang sehat, produktif, terampil			

1 1 0	2 0	n I	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks Pelayanan Kesehatan -	0,45 Persen	993.348.000,00	1		002 249 000	,00 PUSKESMAS MUARA JA
1 1 0	2 0	,,,		KESEHATAN PERORANGAN DAN	Primer -	0,45 Persen	995.348.000,00			- 993.348.000	,00 PUSKESIVIAS IVIUAKA JA
				UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Perilaku Kesehatan	0,50 Persen					
				UPATA KESEHATAN WASTAKAKAT	Indeks Keluarga sehat	0,54 Persen					
					Indeks pelayanan penyakit tidak	0,65 Persen					
					menular	0,77 Persen					
						0,77 Persen					
					Indeks Pelayanan Penyakit						
					Menular	0,90 Persen					
					Indeks pelayanan kesehatan	13,8 Persen					
					reproduksi	34,38 Persen					
					Indeks pelayanan kesehatan balita	83 Persen					
					Indeks Pelayanan Kesehatan	90,50 Persen					
					Lingkungan	93 Persen					
					Presentasi Balita Stunting						
					Persentase Puskesmas Akreditasi						
					Paripurna dan Utama						
					Persentase Layanan Kesehatan						
					Rumah Sakit yang Memenuhi SPM						
					Perentase Ketersediaan Sarana						
					dan Prasarana Pelayanan RS						
					Persentase Capaian Standar						
					Pelayanan Minimal (SPM) RS						
1 0	2 0	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan -	100 Persen	993.348.000,00	1	- 2. Membangun Sektor -	- 993.348.000	,00 PUSKESMAS MUARA JA
- -	- "			untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang	95 Persen	33313-101000,00		Kesehatan	333.3-10.000	, concontra mornar ar
				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memiliki kompetensi kebidanan di	70 Persen			2. Pengembangan sumber		
				Tiligkat Daei ali Kabupateri/Kota	fasilitas kesehatan	70 1 613611			daya manusia yang sehat,		
					Imunisasi Dasar lengkap (IDL)				produktif, terampil		
					Persentase KB Aktif				produktii, terainpii		
					reiseillase RD ARtii						
1 0	2 0	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	993.348.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 2. Membangun Sektor -	993 348 000	,00 PUSKESMAS MUARA JAV
1 1 0	- "	2.02		operasional i ciayanan i askesmas	Pelayanan Puskesmas	2 bokumen	Muara Jawa, Semua	Britis Briding Siz (BBri)	Kesehatan	333.540.000	i oskesivi s iviorii v siti
					i ciayanani uskesinas		Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
							Key besa		daya manusia yang sehat,		
									produktif, terampil		
 	-			Puskesmas Teluk Dalam			2.436.458.875,00		produktif, terampii	2 426 459 975	,00 PUSKESMAS TELUK DAL
				Puskesmas Teluk Dalam			2.436.436.675,00			2.430.438.873	OU PUSKESIVIAS TELUK DAL
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Y	ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2.436.458.875,00			2.436.458.875	,00 PUSKESMAS TELUK DAL
1 0	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	KESEHATAN		2.436.458.875,00	1		2.436.458.875	,00 PUSKESMAS TELUK DAL
\vdash	_				I			1			
1 0	2 0	11		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP perangkat daerah -	80,01 Nilai	1.301.203.875,00			- 1.301.203.875	,00 PUSKESMAS TELUK DAL
	_			KABUPATEN/KOTA	1			 			
1 0	2 0	2.10	'	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD -	32 Puskesmas	1.301.203.875,00	1	- 2. Membangun Sektor -	- 1.301.203.875	,00 PUSKESMAS TELUK DAL
					meningkat kinerjanya				Kesehatan		
					mendapatkan nilai AA				2. Pengembangan sumber		
									daya manusia yang sehat,		
									produktif, terampil		
	2 0	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	1.301.203.875,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN DARI BLUD	- 2. Membangun Sektor -	1.301.203.875	,00 PUSKESMAS TELUK DAL
1 0				Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang		Tenggarong Seberang,		Kesehatan		
1 0					1	1 1		1	I	1	1
1 0					Pelayanan		Manunggal Jaya	l J	2. Pengembangan sumber	1	
1 0					Pelayanan		Manunggai Jaya		2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,		

1	02	02	DDOCDAN	A PEMENUHAN UPAYA	Indeks Pelayanan Kesehatan -		0,45 Persen	1.135.255.000,00			1 125 255 000 00	PUSKESMAS TELUK DALAM
′ <u>*</u>	02	02		AN PERORANGAN DAN	Primer		0,49 Persen	1.133.233.000,00			1.133.233.000,00	TOSKESIVIAS TELOK DALAWI
				SEHATAN MASYARAKAT	Indeks Perilaku Kesehatan		0,50 Persen					
			UPATAKE	SERATAN IVIASTAKAKAT			0,54 Persen					
					Indeks Keluarga sehat							
					Indeks pelayanan penyakit tidak		0,65 Persen					
					menular		0,77 Persen					
					Indeks Pelayanan Penyakit		0,78 Persen					
					Menular		0,90 Persen					
					Indeks pelayanan kesehatan		13,8 Persen					
					reproduksi		34,38 Persen					
					Indeks pelayanan kesehatan balita		83 Persen					
					Indeks Pelayanan Kesehatan		90,50 Persen					
					Lingkungan		93 Persen					
					Presentasi Balita Stunting							
					Persentase Puskesmas Akreditasi							
					Paripurna dan Utama							
					Persentase Layanan Kesehatan							
			1 1		Rumah Sakit yang Memenuhi SPM		1					
					Perentase Ketersediaan Sarana							
					dan Prasarana Pelayanan RS							
					Persentase Capaian Standar							
					Pelayanan Minimal (SPM) RS							
					r ciayanan wiiniina (Sr Wi) KS							
1	02	02 2.0		an Layanan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan -		100 Persen	1.135.255.000,00	l I-	2. Membangun Sektor	- 1.135.255.000,00	PUSKESMAS TELUK DALAM
				M dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang		95 Persen			Kesehatan		
			Tingkat Da	erah Kabupaten/Kota	memiliki kompetensi kebidanan di		70 Persen			2. Pengembangan sumber		
					fasilitas kesehatan					daya manusia yang sehat,		
					Imunisasi Dasar lengkap (IDL)					produktif, terampil		
					Persentase KB Aktif							
1	02	02 2.0	12 0033 Operasion	nal Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional		1 Dokumen	1.135.255.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor -	1.135.255.000,00	PUSKESMAS TELUK DALAM
					Pelayanan Puskesmas			Tenggarong Seberang,		Kesehatan		
								Semua Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
										daya manusia yang sehat,		
										produktif, terampil		
				is Loa Ipuh				2.632.706.706,00	-			PUSKESMAS LOA IPUH
1					ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.632.706.706,00				PUSKESMAS LOA IPUH
1				PEMERINTAHAN BIDANG				2.632.706.706,00				PUSKESMAS LOA IPUH
1	02	01		1 PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP perangkat daerah -		80,01 Nilai	1.781.265.706,00			- 1.781.265.706,00	PUSKESMAS LOA IPUH
				TAHAN DAERAH								
			KABUPATI	•								
1	02	01 2.1	.0 Peningkat	an Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD -		32 Puskesmas	1.781.265.706,00]-	2. Membangun Sektor -	- 1.781.265.706,00	PUSKESMAS LOA IPUH
			1 1		meningkat kinerjanya					Kesehatan		
			1 1		mendapatkan nilai AA					2. Pengembangan sumber		
					· ·					daya manusia yang sehat,		
			1 1				1 1			produktif, terampil		
	02	01 2.1	.0 0001 Pelayanan	dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 1	1 Unit Kerja	1.781.265.706,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN DARI BLUD -	2. Membangun Sektor -	1,781.265.706.00	PUSKESMAS LOA IPUH
1			Pelayanan		Pelayanan dan Penunjang			Tenggarong, Loa Ipuh		Kesehatan		
1		1 1	. c.c.yanan		Pelayanan	1 1		renggarong, coa ipun		2. Pengembangan sumber		
1												
1					relayariari							
1					relayanan					daya manusia yang sehat, produktif, terampil		

62	1 (02 02	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks Pelayanan Kesehatan -	0,45 Persen	851.441.000,00				- 851.441	.000,00 PUSKESMAS LOA IPUH
			1		KESEHATAN PERORANGAN DAN	Primer	0,49 Persen						
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Perilaku Kesehatan	0,50 Persen						
			1			Indeks Keluarga sehat	0,54 Persen						
						Indeks pelayanan penyakit tidak	0,65 Persen						
						menular	0,77 Persen						
						Indeks Pelayanan Penyakit	0,78 Persen						
						Menular	0,90 Persen						
						Indeks pelayanan kesehatan	13,8 Persen						
						reproduksi	34,38 Persen						
						Indeks pelayanan kesehatan balita	83 Persen						
						Indeks Pelayanan Kesehatan	90,50 Persen						
						Lingkungan	93 Persen						
						Presentasi Balita Stunting	33 Feiseil						
						Persentase Puskesmas Akreditasi							
						Paripurna dan Utama							
						Persentase Layanan Kesehatan							
						Rumah Sakit yang Memenuhi SPM							
						Perentase Ketersediaan Sarana							
						dan Prasarana Pelayanan RS							
						Persentase Capaian Standar							
						Pelayanan Minimal (SPM) RS							
	1 0	02 02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan -	100 Persen	851.441.000,00		-	2. Membangun Sektor -	- 851.441	.000,00 PUSKESMAS LOA IPUH
					untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang	95 Persen				Kesehatan		
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memiliki kompetensi kebidanan di	70 Persen				2. Pengembangan sumber		
						fasilitas kesehatan					daya manusia yang sehat,		
						Imunisasi Dasar lengkap (IDL)					produktif, terampil		
						Persentase KB Aktif					, , ,		
	1 0	02 02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	851 441 000 00	Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor -	851 441	.000,00 PUSKESMAS LOA IPUH
	- `	02 02	2.02	0033	operasional relayanan raskesmas	Pelayanan Puskesmas	2 bokumen	031.111.000,00	Tenggarong, Loa Ipuh	State Control of Control	Kesehatan	052.111	i oskestili s cort ii ori
						i ciayanani uskesinas			renggarong, coa ipan		2. Pengembangan sumber		
											daya manusia yang sehat, produktif, terampil		
		-		+	Puskesmas Handil Baru			2.332.170.995,00		l L	produkti, terampii	2 332 170	.995,00 PUSKESMAS HANDIL BARU
	1		-	-		ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2.332.170.995,00		ı			.995,00 PUSKESMAS HANDIL BARU
	1 0	02	-	-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			2.332.170.995,00		 			.995,00 PUSKESMAS HANDIL BARU
			+	-			90.01 ***-1			 			
63	1 0	02 01	· [PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP perangkat daeran -	80,01 Nilai	1.125.962.995,00				- 1.125.96	.995,00 PUSKESMAS HANDIL BARU
			1		PEMERINTAHAN DAERAH								
	<u>.</u>			1	KABUPATEN/KOTA								
	1 0	02 01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD -	32 Puskesmas	1.125.962.995,00]-	2. Membangun Sektor	- 1.125.962	.995,00 PUSKESMAS HANDIL BARU
			1			meningkat kinerjanya					Kesehatan		
			1			mendapatkan nilai AA					2. Pengembangan sumber		
			1								daya manusia yang sehat,		
											produktif, terampil		
	1 0	02 01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	1.125.962.995,00	Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN DARI BLUD -	2. Membangun Sektor -	1.125.962	.995,00 PUSKESMAS HANDIL BARU
			1		Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang			Samboja, Semua		Kesehatan		
			1		I '	Pelayanan			Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
		- 1	1	1					ĺ	1	daya manusia yang sehat,		
											produktif, terampil		

1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks Pelayanan Kesehatan	0,45 Persen	1.206.208.000,00			- 1.206.208.000,C	00 PUSKESMAS HANDIL BAR
1 1	J	1		KESEHATAN PERORANGAN DAN	Primer	0,49 Persen		1			1
				UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Perilaku Kesehatan	0,50 Persen		1			1
	J			1	Indeks Keluarga sehat	0,54 Persen					1
					Indeks pelayanan penyakit tidak	0,65 Persen					
					menular	0,77 Persen					
					Indeks Pelayanan Penyakit	0,78 Persen					
					Menular	0,90 Persen					
					Indeks pelayanan kesehatan	13,8 Persen					
					reproduksi	34,38 Persen					
					Indeks pelayanan kesehatan balita	83 Persen					
					Indeks Pelayanan Kesehatan	90,50 Persen					
					Lingkungan	93 Persen					
					Presentasi Balita Stunting	35 1 613611					
					Persentase Puskesmas Akreditasi						
					Paripurna dan Utama						
					Persentase Layanan Kesehatan						
					Rumah Sakit yang Memenuhi SPM						
1 1	J			1	Perentase Ketersediaan Sarana						
					dan Prasarana Pelayanan RS						
					Persentase Capaian Standar						
					Pelayanan Minimal (SPM) RS						
1	02	02 2.	02	Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan -	100 Persen	1.206.208.000,00		- 2. Membangun Sektor -	- 1.206.208.000,0	00 PUSKESMAS HANDIL B
				untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang	95 Persen			Kesehatan		
				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memiliki kompetensi kebidanan di	70 Persen			2. Pengembangan sumber		
					fasilitas kesehatan				daya manusia yang sehat,		
					Imunisasi Dasar lengkap (IDL)				produktif, terampil		
					Persentase KB Aktif						
1	02	02 2	02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	1.206.208.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 2. Membangun Sektor -	1.206.208.000,0	00 PUSKESMAS HANDIL BARI
				.,	Pelayanan Puskesmas		Samboja, Semua	ή ' ' Ι	Kesehatan		
					r cidyanan askesmas		Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
							incly Desa		daya manusia yang sehat,		
									produktif, terampil		
1 1	-			Puskesmas Kota Bangun			2.843.039.108,00	1	produkti, terampii	2 8/3 039 108 /	00 PUSKESMAS KOTA BANG
				ruskesiilas kota baliguii			2.043.035.100,00			•	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Y	'ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2.843.039.108,00			2.843.039.108,0	00 PUSKESMAS KOTA BANG
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	KESEHATAN		2.843.039.108,00			2.843.039.108,0	00 PUSKESMAS KOTA BANG
1	02	01	+	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP perangkat daerah -	80,01 Nilai	1.707.785.108,00			- 1.707.785.108,(00 PUSKESMAS KOTA BANG
				PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
1	02	01 2.	10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD -	32 Puskesmas	1.707.785.108,00		- 2. Membangun Sektor -	- 1.707.785.108/	00 PUSKESMAS KOTA BAN
1 1	J			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	meningkat kinerjanya		•		Kesehatan		
1 1	J	1			mendapatkan nilai AA			1	2. Pengembangan sumber		
1 1				1					daya manusia yang sehat,		
									produktif, terampil		
	02	01 2	10 0001		Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	1.707.785.108,00 Kab. Kutai Kartanegara	, PENDAPATAN DARI BLUD	- 2. Membangun Sektor -	1.707.785.108,0	00 PUSKESMAS KOTA BAN
1				Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang		Kota Bangun, Semua	1	Kesehatan		
1	J										
1					Pelayanan		Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
1				·	Pelayanan		Kel/Desa		Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,		

1	02	2 ()2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks Pelayanan Kesehatan -	0,45 Persen	1.135.254.000,00			- 1.135.254.000,0	0 PUSKESMAS KOTA BANGU
				KESEHATAN PERORANGAN DAN	Primer	0,49 Persen					
				UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Perilaku Kesehatan	0,50 Persen					
				OTATA RESERVATA MASTARARA	Indeks Keluarga sehat	0,54 Persen					
					Indeks pelayanan penyakit tidak	0,65 Persen					
					menular	0,77 Persen					
					Indeks Pelayanan Penyakit	0,78 Persen					
					Menular	0,90 Persen					
					Indeks pelayanan kesehatan	13,8 Persen					
					reproduksi	34,38 Persen					
					Indeks pelayanan kesehatan balita	83 Persen					
					Indeks Pelayanan Kesehatan	90,50 Persen					
					Lingkungan	93 Persen					
					Presentasi Balita Stunting						
					Persentase Puskesmas Akreditasi						
					Paripurna dan Utama						
					Persentase Layanan Kesehatan						
					Rumah Sakit yang Memenuhi SPM						
					Perentase Ketersediaan Sarana						
					dan Prasarana Pelayanan RS						
					Persentase Capaian Standar						
					Pelayanan Minimal (SPM) RS						
1	02	2 (2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan -	100 Persen	1.135.254.000,00	-	2. Membangun Sektor -	- 1.135.254.000,0	00 PUSKESMAS KOTA BANGL
				untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang	95 Persen			Kesehatan		
				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memiliki kompetensi kebidanan di	70 Persen			2. Pengembangan sumber		
				"	fasilitas kesehatan				daya manusia yang sehat,		
					Imunisasi Dasar lengkap (IDL)				produktif, terampil		
					Persentase KB Aktif						
1	02	2 (2.02	0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	1.135.254.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor -	1.135.254.000,0	0 PUSKESMAS KOTA BANGUN
					Pelayanan Puskesmas		Kota Bangun, Semua		Kesehatan		
							Kel/Desa		Pengembangan sumber		
									daya manusia yang sehat,		
									produktif, terampil		
				Puskesmas Separi 3			1.872.381.857,00				00 PUSKESMAS SEPARI 3
1		Ţ			ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1.872.381.857,00				00 PUSKESMAS SEPARI 3
	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	·		1.872.381.857,00				00 PUSKESMAS SEPARI 3
1	02	2 (01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah -	80,01 Nilai	952.591.857,00			952.591.857,0	00 PUSKESMAS SEPARI 3
1	02	2 (2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD -	32 Puskesmas	952.591.857,00	-	2. Membangun Sektor -	- 952.591.857,C	0 PUSKESMAS SEPARI 3
	1				meningkat kinerjanya				Kesehatan		
					mendapatkan nilai AA				2. Pengembangan sumber		
									daya manusia yang sehat,		
	1			1				1	produktif, terampil		
1	02	2 (2.10	0001 Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	952.591.857,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN DARI BLUD -	2. Membangun Sektor -	952.591.857.0	0 PUSKESMAS SEPARI 3
	1	- []		Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang		Tenggarong Seberang,	1	Kesehatan		
	1			,	Pelayanan		Semua Kel/Desa	1	2. Pengembangan sumber		
	1				Capatan		Schlad Kely Desa		daya manusia yang sehat,		
									produktif, terampil		

68	1	02 0	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks Pelayanan Kesehatan -	0,45 Persen	919.790.000,00			- 919.790.000,00	PUSKESMAS SEPARI 3
					KESEHATAN PERORANGAN DAN	Primer	0,49 Persen					
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Perilaku Kesehatan	0,50 Persen					
						Indeks Keluarga sehat	0,54 Persen					
						Indeks pelayanan penyakit tidak	0,65 Persen					
						menular	0,77 Persen					
						Indeks Pelayanan Penyakit	0,78 Persen					
						Menular	0,90 Persen					
						Indeks pelayanan kesehatan	13,8 Persen					
						reproduksi	34,38 Persen					
						Indeks pelayanan kesehatan balita	83 Persen					
						Indeks Pelayanan Kesehatan	90,50 Persen					
						Lingkungan	93 Persen					
						Presentasi Balita Stunting	33 Feiseil					
						Persentasi Panta Stunting Persentase Puskesmas Akreditasi						
						Paripurna dan Utama						
						Persentase Layanan Kesehatan						
						Rumah Sakit yang Memenuhi SPM						
						Perentase Ketersediaan Sarana						
						dan Prasarana Pelayanan RS						
						Persentase Capaian Standar						
						Pelayanan Minimal (SPM) RS						
	1	02 0	2 2.02	2	Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan -	100 Persen	919.790.000,00	-	2. Membangun Sektor -	- 919.790.000,00	PUSKESMAS SEPARI 3
					untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang	95 Persen			Kesehatan		
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memiliki kompetensi kebidanan di	70 Persen			2. Pengembangan sumber		
					1 *	fasilitas kesehatan				daya manusia yang sehat,		
						Imunisasi Dasar lengkap (IDL)				produktif, terampil		
						Persentase KB Aktif				, , ,		
	1	02 0	2 2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	919.790.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor -	919 790 000 00	PUSKESMAS SEPARI 3
	-	02 0	2.02	0000	operasional relayanan raskesinas	Pelayanan Puskesmas	2 Boltamen	Tenggarong Seberang,	Britter (Britains and (BBrit)	Kesehatan	313.7 30.000,00	i oskesiu o serviti s
						i ciayanani uskesinas		Semua Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
								Serriua Keij Desa		daya manusia yang sehat,		
										produktif, terampil		
-	-		_	-	Puskesmas Loa Janan	l		2.444.649.493,00		produkti, terampii	2 444 649 493 00	PUSKESMAS LOA JANAN
	1		_			ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2.444.649.493,00	1			PUSKESMAS LOA JANAN
	1	02		+	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			2.444.649.493,00				PUSKESMAS LOA JANAN
		02 0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP perangkat daerah -	80,01 Nilai	1.635.115.493,00			· ·	PUSKESMAS LOA JANAN
05	-	02 0			PEMERINTAHAN DAERAH	Milai SAKIF perangkat daeran	OU,UI IVIIAI	1.033.113.493,00			- 1.033.113.493,00	FOSKESIVIAS EOA JAIVAIN
					KABUPATEN/KOTA							
-	1	00 0				Ludah Budanna BUUD	22 Dudumu	4 525 445 402 00		2 March - College	4 525 445 403 00	DUCKECTATE LOS ISSUES
	1	02 0	1 2.10	'	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD -	32 Puskesmas	1.635.115.493,00	-	2. Membangun Sektor	1.635.115.493,00	PUSKESMAS LOA JANAN
				1		meningkat kinerjanya				Kesehatan		
						mendapatkan nilai AA				2. Pengembangan sumber		
										daya manusia yang sehat,		
			_	_	1					produktif, terampil		
	1	02 0	1 2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	1.635.115.493,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN DARI BLUD -	2. Membangun Sektor -	1.635.115.493,00	Puskesmas loa janan
				1	Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang		Loa Janan, Semua		Kesehatan		
				1	1	Pelayanan		Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
				1					1	daya manusia yang sehat,		
			- 1	1	1		I I		1		1 1	1
										produktif, terampil		

70 :	1 0	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks Pelayanan Kesehatan -	0,45 Persen	809.534.000,00			- 809.534.000,00	PUSKESMAS LOA JANAN
					KESEHATAN PERORANGAN DAN	Primer	0,49 Persen				'	
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Perilaku Kesehatan	0,50 Persen				'	
						Indeks Keluarga sehat	0,54 Persen				'	
						Indeks pelayanan penyakit tidak	0,65 Persen				'	
						menular	0,77 Persen				'	
						Indeks Pelayanan Penyakit	0,78 Persen					
						Menular	0,90 Persen				'	
						Indeks pelayanan kesehatan	13,8 Persen					
						reproduksi	34,38 Persen				'	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	83 Persen				'	
						Indeks Pelayanan Kesehatan	90,50 Persen				'	
						Lingkungan	93 Persen					
						Presentasi Balita Stunting	95 Persen				'	
						Persentase Puskesmas Akreditasi						
						Paripurna dan Utama						
						Persentase Layanan Kesehatan						
						Rumah Sakit yang Memenuhi SPM					'	
						Perentase Ketersediaan Sarana					'	
						dan Prasarana Pelayanan RS						
						Persentase Capaian Standar					'	
						Pelayanan Minimal (SPM) RS					'	
											'	
	1 0	02 02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan -	100 Persen	809.534.000,00	-	2. Membangun Sektor -	- 809.534.000.00	PUSKESMAS LOA JANAN
					untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang	95 Persen	,		Kesehatan		
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memiliki kompetensi kebidanan di	70 Persen			2. Pengembangan sumber	'	
					Tinghat Dacratt Napapateny Nota	fasilitas kesehatan	70 10.50			daya manusia yang sehat,		
						Imunisasi Dasar lengkap (IDL)				produktif, terampil	'	
						Persentase KB Aktif				produktii, terainpii		
						reisentase RD Aktii					'	
—	1 0	02 02	2.02	0022	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	809.534.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	2. Membangun Sektor -	900 524 000 00	PUSKESMAS LOA JANAN
l '	1 I U	02	2.02	0033	Operasional Felayanan Fuskesinas		1 bokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)		805.534.000,00	POSKESIVIAS EOA JAINAIN
						Pelayanan Puskesmas		Loa Janan, Semua		Kesehatan	'	
								Kel/Desa		Pengembangan sumber		
										daya manusia yang sehat,	'	
	_				Durlan Calada 2			2.715.162.195,00		produktif, terampil	2745 452 405 00	PUSKESMAS SEBULU 2
<u> </u>	. –			1	Puskesmas Sebulu 2	ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2.715.162.195,00	,			PUSKESMAS SEBULU 2 PUSKESMAS SEBULU 2
	1 1 0	12		<u> </u>	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YA			2.715.162.195,00	 			
	_	_		1					 			
71 :	1 0	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP perangkat daerah -	80,01 Nilai	1.911.942.195,00			- 1.911.942.195,00	PUSKESMAS SEBULU 2
	1				PEMERINTAHAN DAERAH				1			
					KABUPATEN/KOTA							
:	1 0	02 01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD -	32 Puskesmas	1.911.942.195,00]-	2. Membangun Sektor -	- 1.911.942.195,00	PUSKESMAS SEBULU 2
	1					meningkat kinerjanya			1	Kesehatan		
	1					mendapatkan nilai AA			1	2. Pengembangan sumber		
										daya manusia yang sehat,		
										produktif, terampil	'	
	1 0	02 01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	1.911.942.195,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN DARI BLUD -	2. Membangun Sektor -	1,911,942,195,00	PUSKESMAS SEBULU 2
	1 -				Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang		Sebulu, Semua	1	Kesehatan		
			1	1	1,						1 '	I
							1					
						Pelayanan		Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
						Pelayanan		Kel/Desa		Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil		

72	1	02 0)2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA		0,45 Persen	803.220.000,00			-	803.220.000,00	PUSKESMAS SEBULU 2
					KESEHATAN PERORANGAN DAN	Primer	0,49 Persen						
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Perilaku Kesehatan	0,50 Persen						
			1			Indeks Keluarga sehat	0,54 Persen						
						Indeks pelayanan penyakit tidak	0,65 Persen						
						menular	0,77 Persen						
						Indeks Pelayanan Penyakit	0,78 Persen						
						Menular	0,90 Persen						
						Indeks pelayanan kesehatan	13,8 Persen						
						reproduksi	34,38 Persen						
						Indeks pelayanan kesehatan balita	83 Persen						
						Indeks Pelayanan Kesehatan	90,50 Persen						
						Lingkungan	93 Persen						
						Presentasi Balita Stunting							
						Persentase Puskesmas Akreditasi							
						Paripurna dan Utama							
						Persentase Layanan Kesehatan							
						Rumah Sakit yang Memenuhi SPM							
						Perentase Ketersediaan Sarana							
						dan Prasarana Pelayanan RS							
						Persentase Capaian Standar							
						Pelayanan Minimal (SPM) RS							
	1	02 0	2 2.02	,	Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan -	100 Persen	803.220.000,00	 	2. Membangun Sektor -		902 220 000 00	PUSKESMAS SEBULU 2
	-	02 0	2.0	-	untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang	95 Persen	803.220.000,00		Kesehatan	[803.220.000,00	POSKESIVIAS SEBULU Z
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memiliki kompetensi kebidanan di	70 Persen			2. Pengembangan sumber			
					ringkat Daeran Kabupaten/Kota	fasilitas kesehatan	70 Feiseil			daya manusia yang sehat,			
						Imunisasi Dasar lengkap (IDL)				produktif, terampil			
						Persentase KB Aktif				produktit, terampii			
						Persentase RB ARtii							
-	1	02 0	2.02	2 003	3 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	803.220.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH) -	2. Membangun Sektor -		803 220 000 00	PUSKESMAS SEBULU 2
	-	02 0		- 005	operasional relayanan raskesmas	Pelayanan Puskesmas	2 Bokumen	Sebulu, Semua	Britario I II I I I I I I I I I I I I I I I I	Kesehatan		003.220.000,00	TOSKESIVI O SEBOLO E
						r ciayanan i uskesinas		Kel/Desa		2. Pengembangan sumber			
								Kely Desa		daya manusia yang sehat,			
										produktif, terampil			
 	_		_		Puskesmas Samboja			2.817.913.844,00	I	produkti, terampii	<u> </u>	2.817.913.844.00	PUSKESMAS SAMBOJA
	1	_	-	-		ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2.817.913.844,00					PUSKESMAS SAMBOJA
	1	02	_		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	KESEHATAN		2.817.913.844,00				2.817.913.844,00	PUSKESMAS SAMBOJA
73	1	02 0)1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP perangkat daerah -	80,01 Nilai	1.966.472.844,00			-	1.966.472.844,00	PUSKESMAS SAMBOJA
					PEMERINTAHAN DAERAH			•					
					KABUPATEN/KOTA								
	1	02 0	1 2.10	0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD -	32 Puskesmas	1.966.472.844,00	-	2. Membangun Sektor -	-	1.966.472.844,00	PUSKESMAS SAMBOJA
					1	meningkat kinerjanya		•		Kesehatan			
						mendapatkan nilai AA				2. Pengembangan sumber			
										daya manusia yang sehat,			
										produktif, terampil			
	1	02 n)1 2.10	0 000	Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	1.966.472.844,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN DARI BI UD -	2. Membangun Sektor -		1.966,472,844.00	PUSKESMAS SAMBOJA
					Pelavanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang		Samboja, Semua		Kesehatan			
					,	Pelayanan		Kel/Desa		2. Pengembangan sumber			
			1			/		ney seed		daya manusia yang sehat,			
			1							produktif, terampil			
	1			- 1	1				1	F		1	

1 02	02	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAY		0,45 Persen	851.441.000,00			- 851.441.000,00 PUSKESMAS SAMB
			KESEHATAN PERORANGAN DAI		0,49 Persen				
			UPAYA KESEHATAN MASYARAKA	AT Indeks Perilaku Kesehatan	0,50 Persen				
				Indeks Keluarga sehat	0,54 Persen				
				Indeks pelayanan penyakit tidak	0,65 Persen				
				menular	0,77 Persen				
				Indeks Pelayanan Penyakit	0,78 Persen				
				Menular	0,90 Persen				
				Indeks pelayanan kesehatan	13,8 Persen				
				reproduksi	34,38 Persen				
				Indeks pelayanan kesehatan balita	83 Persen				
				Indeks Pelayanan Kesehatan	90,50 Persen				
				Lingkungan	93 Persen				
				Presentasi Balita Stunting	33 1 613611				
				Persentase Puskesmas Akreditasi					
				Paripurna dan Utama					
				Persentase Layanan Kesehatan					
				Rumah Sakit yang Memenuhi SPM					
				Perentase Ketersediaan Sarana					
				dan Prasarana Pelayanan RS					
				Persentase Capaian Standar					
				Pelayanan Minimal (SPM) RS					
1 02	02	2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan -	100 Persen	851.441.000,00		2. Membangun Sektor -	- 851.441.000,00 PUSKESMAS SAMB
-			untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang	95 Persen			Kesehatan	
			Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		70 Persen			2. Pengembangan sumber	
			iligkat Daeran Kabupaten Kota	fasilitas kesehatan	70 1 615611			daya manusia yang sehat,	
				Imunisasi Dasar lengkap (IDL)				produktif, terampil	
				Persentase KB Aktif				produktii, terampii	
				Persentase KB AKtif					
1 02	02	2 2.02	0033 Operasional Pelayanan Puskesm	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	851.441.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor -	851.441.000,00 PUSKESMAS SAMBO
				Pelayanan Puskesmas		Samboja, Semua		Kesehatan	
						Kel/Desa		2. Pengembangan sumber	
						,		daya manusia yang sehat,	
								produktif, terampil	
			Puskesmas Kembang Janggut		·	2.289.595.641,00		•	2.289.595.641,00 PUSKESMAS KEMB. JANGGUT
1	+	+	URUSAN PEMERINTAHAN WAJI	B YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2.289.595.641,00			2.289.595.641,00 PUSKESMAS KEMB
						·			JANGGUT
1 02	!		URUSAN PEMERINTAHAN BIDAI	NG KESEHATAN		2.289.595.641,00			2.289.595.641,00 PUSKESMAS KEMB. JANGGUT
1 02	01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP perangkat daerah -	80,01 Nilai	1.083.387.641,00			- 1.083.387.641,00 PUSKESMAS KEMBA
			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						JANGGUT
	01	1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD -	32 Puskesmas	1.083.387.641,00	-	2. Membangun Sektor -	- 1.083.387.641,00 PUSKESMAS KEMB
1 02	. "			meningkat kinerjanya				Kesehatan	JANGGUT
1 02	"			mendapatkan nilai AA				2. Pengembangan sumber	
1 02							1	daya manusia yang sehat,	
1 02									
1 02								produktif, terampil	
	. 01	1 2.10	0001 Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	1.083.387.641,00 Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN DARI BLUD -		1.083.387.641,00 PUSKESMAS KEMB.
		1 2.10	0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	·	1 Unit Kerja	1.083.387.641,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut,	PENDAPATAN DARI BLUD -	produktif, terampil	1.083.387.641,00 PUSKESMAS KEMB/ JANGGUT
		1 2.10		Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja		PENDAPATAN DARI BLUD -	produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan	1.083.387.641,00 PUSKESMAS KEMBA JANGGUT
		1 2.10		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang	1 Unit Kerja	Kembang Janggut,	PENDAPATAN DARI BLUD -	produktif, terampil 2. Membangun Sektor -	

		1 1				10.000						
, 1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks Pelayanan Kesehatan		0,45 Persen	1.206.208.000,00			- 1		PUSKESMAS KEMBANG
			KESEHATAN PERORANGAN DAN	Primer		0,49 Persen					J#	IANGGUT
			UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Perilaku Kesehatan		0,50 Persen						
				Indeks Keluarga sehat		0,54 Persen						
				Indeks pelayanan penyakit tidak		0,65 Persen						
				menular		0,77 Persen						
				Indeks Pelayanan Penyakit		0,78 Persen						
				Menular		0,90 Persen						
				Indeks pelayanan kesehatan		13,8 Persen						
				reproduksi		34,38 Persen						
				Indeks pelayanan kesehatan balita		83 Persen						
				Indeks Pelayanan Kesehatan		90,50 Persen						
				Lingkungan		93 Persen						
				Presentasi Balita Stunting								
				Persentase Puskesmas Akreditasi								
				Paripurna dan Utama								
				Persentase Layanan Kesehatan								
				Rumah Sakit yang Memenuhi SPM								
	1		1	Perentase Ketersediaan Sarana	1						l	
	1		1	dan Prasarana Pelayanan RS	1						l	
	1		1	Persentase Capaian Standar	1						l	
				Pelayanan Minimal (SPM) RS								
1	02	02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan -		100 Persen	1.206.208.000,00	-	2. Membangun Sektor -	- 1	1.206.208.000,00 P	PUSKESMAS KEMBANG
			untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang		95 Persen			Kesehatan		J/	IANGGUT
			Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memiliki kompetensi kebidanan di		70 Persen			2. Pengembangan sumber			
			*	fasilitas kesehatan					daya manusia yang sehat,			
				Imunisasi Dasar lengkap (IDL)					produktif, terampil			
				Persentase KB Aktif					F			
1	02	02 2.02	0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional		1 Dokumen	1.206.208.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor -	1	1.206.208.000,00 P	PUSKESMAS KEMBANG
				Pelayanan Puskesmas			Kembang Janggut,		Kesehatan		J/	IANGGUT
							Semua Kel/Desa		2. Pengembangan sumber			
									daya manusia yang sehat,			
									produktif, terampil			
			Puskesmas Sei Merdeka				2.001.707.809,00					PUSKESMAS SEI MERDEKA
1				ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.001.707.809,00					PUSKESMAS SEI MERDEKA
1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG				2.001.707.809,00					PUSKESMAS SEI MERDEKA
7 1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP perangkat daerah -		80,01 Nilai	1.008.358.809,00			- 1	1.008.358.809,00 P	PUSKESMAS SEI MERDEKA
			PEMERINTAHAN DAERAH									
			KABUPATEN/KOTA									
1	02	01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD -	1	32 Puskesmas	1.008.358.809,00	-	2. Membangun Sektor -	- 1	008.358.809,00 P	PUSKESMAS SEI MERDEKA
	1		1	meningkat kinerjanya	1				Kesehatan		l	
	1		1	mendapatkan nilai AA	1				2. Pengembangan sumber		l	
	1								daya manusia yang sehat,		l	
لبلد	L.					ļ			produktif, terampil	\longrightarrow		
1	02	01 2.10	0001 Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1	1 Unit Kerja	1.008.358.809,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN DARI BLUD -	2. Membangun Sektor -	1	008.358.809,00 P	PUSKESMAS SEI MERDEKA
	1		Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang			Samboja Barat, Semua		Kesehatan		l	
1 1	1		1	Pelayanan	1		Kel/Desa		Pengembangan sumber		l	
	1		1		1		Kab. Kutai Kartanegara,		daya manusia yang sehat,		l	
l i		1 1				1	Kute Siantan, Semua	1	produktif, terampil			
							Kel/Desa					
							Kel/Desa					

1 02	12 (02		DDOCDAM DEMENUITAN ARAYA	Indels Delayana Kasabatan	0,45 Persen	993.349.000,00	1		- 993.349.000,00 PUSKESMA	AC CEI MEDDE
1 02	' '	02	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks Pelayanan Kesehatan -		993.349.000,00			- 993.349.000,00 PUSKESMA	AS SEI WERDER
				KESEHATAN PERORANGAN DAN	Primer	0,49 Persen					
				UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Perilaku Kesehatan	0,50 Persen					
					Indeks Keluarga sehat	0,54 Persen					
					Indeks pelayanan penyakit tidak	0,65 Persen					
					menular	0,77 Persen					
					Indeks Pelayanan Penyakit	0,78 Persen					
					Menular	0,90 Persen					
					Indeks pelayanan kesehatan	13,8 Persen					
					reproduksi	34,38 Persen					
					Indeks pelayanan kesehatan balita	83 Persen					
					Indeks Pelayanan Kesehatan	90,50 Persen					
					Lingkungan	93 Persen					
					Presentasi Balita Stunting						
					Persentase Puskesmas Akreditasi						
					Paripurna dan Utama						
					Persentase Layanan Kesehatan						
					Rumah Sakit yang Memenuhi SPM						
			1		Perentase Ketersediaan Sarana						
					dan Prasarana Pelayanan RS						
					Persentase Capaian Standar						
					Pelayanan Minimal (SPM) RS						
					,						
4 00		02 2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan -	100 Persen	993.349.000,00		- 2. Membangun Sektor -	- 993.349.000,00 PUSKESMA	4.C. C.E.I. & 4F.D.D.I
1 02	' '	02 2.02	4			95 Persen	993.349.000,00		Kesehatan	993.349.000,00 POSKESIVIA:	AS SEI WIERDER
				untuk UKM dan UKP Rujukan	oleh tenaga kesehatan yang	70 Persen					
				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memiliki kompetensi kebidanan di	70 Persen			2. Pengembangan sumber		
					fasilitas kesehatan				daya manusia yang sehat,		
					Imunisasi Dasar lengkap (IDL)				produktif, terampil		
					Persentase KB Aktif						
	_										
1 02	12 (02 2.02	2 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	1 Dokumen	993.349.000,00 Kab. Kutai Kartanegara		- 2. Membangun Sektor -	993.349.000,00 PUSKESMAS	AS SEI MERDE
					Pelayanan Puskesmas		Samboja Barat, Semua		Kesehatan		
							Kel/Desa		Pengembangan sumber		
							Kab. Kutai Kartanegara	,	daya manusia yang sehat,		
							Kute Siantan, Semua		produktif, terampil		
							Kel/Desa				
			1								
\bot											
+				Puskesmas Sebulu 1	ANG DEDVALTAN DENGAN DELAVANAN DAGAD		2.471.780.668,00 2.471.780.668,00	, ,		2.471.780.668,00 PUSKESMA	
1 02	12			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2.471.780.668,00			2.471.780.668,00 PUSKESMA: 2.471.780.668,00 PUSKESMA:	
1 02							-				
1 02	12 (01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP perangkat daerah -	80,01 Nilai	1.336.525.668,00			- 1.336.525.668,00 PUSKESMA	AS SEBULU 1
			1	PEMERINTAHAN DAERAH							
				KABUPATEN/KOTA				ļ			
1 02	12 (01 2.10)	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD -	32 Puskesmas	1.336.525.668,00		- 2. Membangun Sektor -	- 1.336.525.668,00 PUSKESMA	AS SEBULU 1
			1		meningkat kinerjanya				Kesehatan		
			1		mendapatkan nilai AA				2. Pengembangan sumber		
			1						daya manusia yang sehat,		
			1						produktif, terampil		
1 02	12 (01 2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit Kerja	1.336.525.668,00 Kab. Kutai Kartanegara	, PENDAPATAN DARI BLUD	- 2. Membangun Sektor -	1.336.525.668,00 PUSKESMAS	AS SEBULU 1
			1	Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang		Sebulu, Semua		Kesehatan		
			1		Pelayanan		Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		
			1		1		,		daya manusia yang sehat,		
	- 1		1						produktif, terampil		

	80	1 (02 02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Indeks Pelavanan Kesehatan -		0,45 Persen	1.135.255.000,00					- 1.135.255.000,00	PUSKESMAS SEBULU 1
1 1 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5									0,49 Persen							
No.						UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Perilaku Kesehatan		0,50 Persen							
Company																
No. Control																
Market																
No.																
Part																
A																
No.																
Superior Control Con																
Programmer for the process of the pr									93 Persen							
Part Part																
Value Valu							Persentase Puskesmas Akreditasi									
Particular Strategies Strategie																
Section Continue																
A																
Part Column Part Colum																
Part Part							,									
Part Part								1			1			1		1
Part Part		1 (02 02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan	Cakupan pertolongan persalinan -		100 Persen	1.135.255.000,00	İ	-	2. Membangun Sektor	1-	- 1.135.255.000.00	PUSKESMAS SEBULU 1
fallites is excluded. Femilian Service (Page (PUL) Assessment of Page (Page (PUL) Assessment of Antal Mark (Page (Pul) Ass																
Manufacture Manufacture						Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memiliki kompetensi kebidanan di		70 Persen				2. Pengembangan sumber			
							fasilitas kesehatan									
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2													produktif, terampil			
Schulu, Semia Sc							Persentase KB Aktif									
Schulu, Semia Sc		1 (00 00	2.02	0000	0			4 Polymore	4 425 255 000 00 14 1 14 1 14	DANIA DA CILIACII (DDIII)				4 425 255 000 00	DUCKECNAS CEDUILLA
Variable Variable		1 (02 02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)	-		-	1.135.255.000,00	POSKEZIMAZ ZEROTO I
Social Control of the Control of Control o							Pelayanan Puskesinas									
252.712.238.999,0 SSUD AII MUHAMMAD 398.716.238.698,0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										Key Desa						
SUD AJ MUHAMMAD PARKET 1 V V V V V V V V V V V V V V V V V V																
1 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5						RSUD Aji Muhammad Parikesit	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	J	349.716.238.698,00	ı	I		ı	262.712.238.969,00	RSUD AJI MUHAMMAD
1 1 1 2 1 2 2 2 2 2						-										
1 02 01 PROGRAM PENUMANG URLSAN PROGRAM PENUMANG URLSAN PROGRAM PENUMANG URLSAN PROGRAM PENUMANG URLSAN PROGRAM PENUMANG URLSAN PROGRAM PENUMANG URLSAN PROGRAM PENUMANG URLSAN PROGRAM PENUMANG URLSAN PROGRAM PENUMANG URLSAN PROGRAM PENUMANG URLSAN PROGRAM PENUMANG URLSAN PENUMANG URLSA		1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Y	ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DA	ASAR		349.716.238.698,00					262.712.238.969,00	
PARKESTT PROGRAM PENUNANG URUSAN PEMERIKTANA DAFRAM RAUDATTHY/KOTA Parkesit Program Penunang Urusan Pemerikana penungan penung		_														
RE 1 0 0 0 1 PROCRAM PENNANG URUSAN PARKEIT PROCRAM PENNANG URUSAN PARKEIT Administrasi Kesurgan Perangkat Daerah Parkeit Daerah Administrasi Kesungan Perangkat Daerah yang Akurtabel Administrasi Kesungan Perangkat Daerah yang Akurtabel 1 0 0 0 1 2.00		1 (02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	KESEHATAN			349.716.238.698,00					262.712.238.969,00	
PEMERNYAHAN DAERAH RAKSUPATRYINGYOTA 1 02 01 2.02 Administrasi keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel 1 uporan 300.000,000,000 300.000,000 300.000,000,000 300.000,000,000 300.000,000 300.000,000,000 300.000,	01	1 (02 01	-		DDOCDANA DENI INI ANIC LIDUCANI	Nile: CAKID DCLID All Manhammed		76 25 Porcon	257 260 800 040 00					262 712 228 969 00	
Naguerate Montage Perangkat Administrasi Kesuangan Perangkat Daerah Administrasi Kesuangan Perangkat Daerah	91	1 '	02 01						70,25 Persen	237.203.833.343,00					202.712.236.505,00	
Separation Sep						KABUPATEN/KOTA	T di IKESIC									Hukesii
Separation Sep		1 (02 01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Laporan Administrasi -		1 Laporan	300.000.000,00		Memperkuat pembangunan	2. Membangun Sektor	Masyarakat dan	- 300.000.000,00	RSUD AJI MUHAMMAD
kesehatan, prestasi olahvaga, kesetaran gender, serta penguntan peran perempuan, peruda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas. 1 20 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/										•					•	
kesetaran gender, serta penguatan peran permpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1 02 01 2.02 000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ SKPD							Akuntabel							Muhammad Parikesit		
penguatan peran permuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Bulanan/Triwul												kesehatan, prestasi olahraga	daya manusia yang sehat,			
perempuan, pemuda (generasi illenial dan generasi Z), dan penyadang disabilitas. DANA BAGI HASIL (DBH) Triwulanan/ Semesteran SKPD Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulanan/ Semesteran SKPD Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulanan/ Semesteran SKPD Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulanan/ Semesteran SKPD Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulanan/ Semesteran SKPD Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulanan/ Semesteran SKPD Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulanan/ Semesteran SKPD Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulanan/ Semesteran SKPD Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulanan/ Semesteran SKPD Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulanan/ Semesteran SKPD Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulanan/ Semesteran SKPD Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulanan/ Semesteran SKPD Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulanan/ Semesteran SKPD Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulanan/ Semesteran SKPD Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulanan/ Semesteran SKPD Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulanan/ Semesteran SKPD Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulanan/ Semesteran SKPD Dana Bagi Hasil (DBH													produktif, terampil			
1 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD Trivulanan/Semesteran SKPD Bulanan/Trivulanan/Semesteran SK																
a disabilitas. 1 Oz 01 2.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Dana dana Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dana dana Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dana dana Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dana dana Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dana dana Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dana dana Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dana dana Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dana dana Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dana dana Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dana dana Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dana dana Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dana dana Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dana dana Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dana dana dana Bulanan/ Triwulanan/ Semest	1															
disabilitas. 1 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Tr												perempuan, pemuda				
1 02 01 2.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan dan generan SKPD dan dan generan SKPD dan dan generan SKPD dan dan generan SKPD dan dan generan SKPD dan dan generan SKPD dan dan generan SKPD dan dan generan SKPD dan dan generan SKPD dan dan generan SKPD dan dan generan SKPD dan dan generan SKPD dan dan generan SKPD dan dan generan SKPD dan dan generan skebatan gunan generan												perempuan, pemuda (generasi milenial dan				
Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Kecangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Kecangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Kecangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kecangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kecangan Kesehatan, pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihan, kesehatan pengubangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil penguatan peran perempuan, penguatan peran perempuan, penguatan peran peran daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendudihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendudihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendudihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendudihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendudihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendudihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend												perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang				
Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Kecangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Kecangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Kecangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kecangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kecangan Kesehatan, pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihan, kesehatan pengubangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil penguatan peran perempuan, penguatan peran perempuan, penguatan peran peran daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendudihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendudihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendudihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendudihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendudihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendudihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend												perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang				
Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Kecangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Kecangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Kecangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kecangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kecangan Kesehatan, pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihan, kesehatan pengubangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil penguatan peran perempuan, penguatan peran perempuan, penguatan peran peran daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendudihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendudihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendudihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendudihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendudihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendudihangan kesehatan pengubangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pend												perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang				
Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Bulanan/ Semesteran Bulanan/ Semesteran Bulanan/ Semesteran Bulanan/ Semesteran Bulanan/ Semesteran Bulanan/ Semesteran Bulanan/ Semesteran Bulanan/ Semesteran Bulanan/ Semes		1 (02 01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan	lumlah laporan Keuangan Bulanan/		1 Laporan	300,000,000,00 Kab, Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DRH)	perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Membangun Sektor	Masyarakat dan	300 000 000 00	RSUD AII MUHAMMAD
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan Keuangan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan penguatan penguatan genderasi milenial dan generasi Z), dan		1 (02 01	2.02	0007				1 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)	perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan			300.000,000,00	
Bulanan/Triwulanari/Semesteran SKPD kesetaraan gender, serta produktif, terampil penguatan peran perempuan, pemuda (genrasi milenial dan generasi Z), dan		1 (02 01	2.02	0007	Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan		1 Laporan	Tenggarong Seberang,	DANA BAGI HASIL (DBH)	perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Kesehatan	Petugas RSUD Aji	00,000,000,000	
penuda (generasi milenial dan generasi Z), dan		1 (02 01	2.02	0007	Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan		1 Laporan	Tenggarong Seberang,	DANA BAGI HASIL (DBH)	perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Kesehatan 2. Pengembangan sumber	Petugas RSUD Aji	300,000,000,000	
dan generasi Z), dan		1 (02 01	2.02	0007	Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		1 Laporan	Tenggarong Seberang,	DANA BAGI HASIL (DBH)	perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetarana gender, serta	Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,	Petugas RSUD Aji	300.000,000,00	
		1 (02 01	2.02	0007	Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		1 Laporan	Tenggarong Seberang,	DANA BAGI HASIL (DBH)	perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,	Petugas RSUD Aji	300.000.000.000	
penyandang disabilitas.		1 (02 01	2.02	0007	Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		1 Laporan	Tenggarong Seberang,	DANA BAGI HASIL (DBH)	perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidian, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial	Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,	Petugas RSUD Aji	300,000,000	
		1 (02 01	2.02	0007	Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		1 Laporan	Tenggarong Seberang,	DANA BAGI HASIL (DBH)	perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,	Petugas RSUD Aji	300.000,000	
		1 (02 01	2.02	0007	Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		1 Laporan	Tenggarong Seberang,	DANA BAGI HASIL (DBH)	perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,	Petugas RSUD Aji	300.000.000	
		1 (02 01	2.02	0007	Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		1 Laporan	Tenggarong Seberang,	DANA BAGI HASIL (DBH)	perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,	Petugas RSUD Aji	300,000,000	
		1 (02 01	2.02	0007	Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		1 Laporan	Tenggarong Seberang,	DANA BAGI HASIL (DBH)	perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,	Petugas RSUD Aji	300.000,000	

		02 01			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	19.429.899.949,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat dan Petugas RSUD Aji Muhammad Parikesit	-		RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	19.429.899.949,00 Kab, Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Teluk Dalam	DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat dan Petugas RSUD Aji Muhammad Parikesit			RSUD AII MUHAMMAD PARIKESIT
	1 (01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Capaian Hasil Aspek Keuangan Kinerja BLUD Capaian Hasil Aspek Pelayanan Kinerja BLUD Jumlah dokumen/ laporan hasil pelaksanaan Model Asuhan Keperawatan Profesional (MAKP) Jumlah dokumen/laporan hasil supervisi keperawatan Nilai Survei kepuasan Karyawan RS Nilai Survei kepuasan Pelanggan/Masyarakat (SKM) Persentase Karyawan yang mendapat pelatihan 20 jam pertahun Persentase Kompetensi SDM keperawatan yang memiliki sertifikat kegawatdaruratan Skor penliaian Proper Lingkungan pada Kinerja BLUD		68 Bayi 4 Orang 23 Skor 67undefined Skor 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 87,50 Nilai 83 Nilai 45 Persen 100 Persen 1 Skor	237.540.000.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peram perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan 2. Pengembangan sumber	Masyarakat dan Petugas RSUD Aji Muhammad Parikesit		237,540.000.000,00	RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT
	1 (02 01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	237.540.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Teluk Dalam	PENDAPATAN DARI BLUD	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	2. Pengembangan sumber	Masyarakat dan Petugas RSUD Aji Muhammad Parikesit		237.540.000.000,00	RSUD AII MUHAMMAD PARIKESIT
82	1 (02 02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Rumah Sakit	-	89 Persen	92.446.338.749,00					-	0,00	RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT

	1 02		2.01	0022	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Essensial Jumlah Rumah sakit yang	89 Persen	92.446.338.749,00 92.446.338.749,00	Kab. Kutai Kartanegara.	DANA BAGI HASIL (DBH)	penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sumber	Masyarakat dan Petugas RSUD Aji Muhammad Parikesit Masyarakat dan	- 0,00	RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT
						ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit			Tenggarong Seberang, Teluk Dalam		sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Petugas RSUD Aji Muhammad Parikesit		PARIKESIT
					RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti			83.754.023.520,00						251.205.000.	000,00 RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YA	ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		83.754.023.520,00						251.205.000.	000,00 RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
	1 02	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I	KESEHATAN		83.754.023.520,00						251.205.000.	000,00 RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
83	1 02	2 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	74 Nilai	83.054.023.520,00						- 78.505.000.	000,00 RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
	1 02	2 01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	50.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan 2. Pengembangan sumber	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	- 150.000.	000,00 RSUD AII BATARA AGUNG DEWA SAKTI
	1 02	2 01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	50,000.	000,00 RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
	1 02	2 01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	100 Persen	335.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan 2. Pengembangan sumber	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	- 335.000.	000,000 RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	260.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
1	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	50.000.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan 2. Pengembangan sumber	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	2. Pengembangan sumber	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
1	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	20.000.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan 2. Pengembangan sumber	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

1	02	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 D	okumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	sains, teknologi, pendidikan,	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	10.000.000,00	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
1	02	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 D	okumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	10.000.000,00	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100) Persen	100.000.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan 2. Pengembangan sumber	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	- 800.000.000,00	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
1	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 D	okumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan 2. Pengembangan sumber	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	50.000.000,0	D RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 D	okumen	Samboja, Sungai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	2. Pengembangan sumber	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	50.000.000,0	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100) Persen	450.000.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan 2. Pengembangan sumber	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	- 1.200.000.000,0	0 RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

1 0	02 01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahaga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti		1200.000.000,00	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
1 0	02 01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	15.249.023.520,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan 2. Pengembangan sumber	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	-	11.800.000.000,00	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
1 0	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	1.800.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti		1.800.000.000,00	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
1 0	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	13.449.023.520,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta perguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti		10.000.000.000,00	RSUD AJIBATARA AGUNG DEWA SAKTI
1 0	02 01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persen	5.500.000,000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetarana gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan 2. Pengembangan sumber	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	-	1.000.000.000,00	RSUD AJIBATARA AGUNG DEWA SAKTI
1 0	02 01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1 Unit	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti		0,00	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

	1	02 0:	1 2.0	9 001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	5.200.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membangun Sektor Kesehatan Z- Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	1.000.000.000,0	0 RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
	1	02 0:	2.1	0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan BLUD	-	100 Persen	61.300.000,000		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan 2. Pengembangan sumber	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dan Masyarakat	- 61.400.000.000,0	D RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
	1	02 0:	1 2.1	0 000	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	61.300.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN DARI BLUD, RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dan Masyarakat	61.400.000.000,0	0 RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
84	1	02 02	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	-	50 Persen	700.000.000,00					- 170.700.000.000,0	0 RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
	1	02 02	2 2.0	11	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan yang Sesuai Standar	-	75,5 Persen	700.000.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan 2. Pengembangan sumber	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dan Masyarakat	- 170.700.000.000,0	0 RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
	1	02 02	2 2.0	002	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		1 Unit	500.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membangun Sektor Kesehatan Z- Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dan Masyarakat	700.000.000,0	0 RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

1 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4																
	1	02	N2 2	2.01	n22 Pana	embangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang		1 Unit	200 000 000 00 Kah Kutai Kartanegara	DENIDADATAN ASI I	Memnerkuat nembangunan	2 Membangun Sektor	PSLID Aii Batara Agung	160 000 000 000	O RSLID ALIBATARA AGLING
No.	1 *	02	02 2	2.01	UZZ ITCIIS	cinbangan Kuman Sakt			1 Oliic						100.000.000.000,	
																DEWA SAKTI
Part Part										Seluang				Masyarakat		
Confidence Con																
Main													produktif, terampil			
Part							rumah sakit yang memenuhi rasio									
							tempat tidur terhadap jumlah				KESEHATAN	pemuda (generasi milenial				
							penduduk minimal 1:1000					dan generasi Z), dan				
							dan/atau dalam rangka					penyandang disabilitas.				
1 1 2 1 2 2 2 2 2 2												, ,				
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1																
1							Tamansakie									
1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4		+ +			PSUI	D Davaku Paia			1	30 112 566 073 00		I	l	1	59 7/18 785 983	U BRIID DAVAKII BAIA
1 2 2	1	+ +					NG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	I DASAR		30.112.566.073.00	1					
	1	02								30.112.566.073.00				 		
			01					_	85 Nilai					 	l l	
	00 1	1 02	V1				Wildi SAKII Terangkat Daeran		os iviiai	23.112.300.073,00					40.750.765.565,	O KSOD DATAKO KAJA
1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4																
Control Control Principle Control Co	-	02	01 2	0.01			lumlah daluman ransan		24 Delumen	150 000 000 00	†		2 Mambanau Calstan	+	350 000 000	DO DELID DAVAKLI BAIA
Propagation Courts	1	UZ	01 2	1.01				-	24 Dokumen	150.000.000,00		I -			250.000.000,	NSOD DATAKO KAJA
					Evalu	uasi Kinerja Perangkat Daerah										
Value Valu							Perangkat Daerah		1		1					1
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2									1		1					1
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2					J				1	1	İ	1	Pemerintahan dan Pelayanan			
Part		\bot							1		ļ					
A	1	02	01 2	2.01 0	006 Koor	dinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja		4 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Membangun Sektor	-	50.000.000,	0 RSUD DAYAKU RAJA
A				1					1							1
No. No.									1		1					1
No. No.]				1	1	İ	1				
Part																
1 02 02 2.00 0.000							Kineria SKPD						Publik			
For a burger, Ling For a	_	00	04 3	204	007 5				43.1	400 000 000 00 W-b W-b-l W-b	DANIA DA CILIACII (DDIII)	1		+	50,000,000	O DOUB DAVAKUBATA
Part Part	1	02	01 2	2.01 0	007 Evalu	uasi Kinerja Perangkat Daerah			12 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)	-		I-	50.000.000,	U RSUD DAYAKU RAJA
Section Sect							Perangkat Daerah			Kota Bangun, Liang						
Part Control																
Section Part													Pengembangan Tata Kelola			
1 Q Q Q Q Q Q Q Q Q													Pemerintahan dan Pelayanan			
Company Comp													Publik			
County Français Careral years distributed with contraction of the product of the county of the count	1	02	01 2	2.02	Adm	inistrasi Keuangan Perangkat	Jumlah laporan Administrasi	-	1 laporan	181.271.953.00		1-	2. Membangun Sektor		4.181.271.953	00 RSUD DAYAKU RAJA
Section Sect	-		-													
Programman and a Kelola Programman and Management and According to the Programman Acco					Daci	an										
Comparison of the Proposition Propositio							akultabel									
1 Q2 D1 2.02 COV Noordinasi dan Penyasunan Lagoran Kosungan Bulman/ Timulaha/Semesteran SSPO dan Lagoran Kosungan Bulman/ Timulaha/Semesteran SSPO dan Lagoran Kosungan Bulman/ Timulaha/Semesteran SSPO dan Lagoran Kosungan Bulman/ Timulaha/Semesteran SSPO dan Lagoran Kosungan Bulman/ Timulaha/Semesteran SSPO dan Lagoran Kosungan Bulman/ Timulaha/Semesteran SSPO dan Lagoran Kosungan Bulman/ Lagoran Kosungan Bulman/ Timulaha/Semesteran SSPO dan Lagoran Kosungan Bulman/ SSPO dan Lagoran Kosungan Bulman/ SSPO dan Lagoran Kosungan Bulman/ SSPO dan Lagoran Kosungan Bulman/ SSPO dan Lagoran Kosungan Bulman/ SSPO dan Lagoran Kosungan Bulman/ SSPO dan Lagoran Kosungan Bulman/ SSPO dan Lagoran Kosungan Bulman/ SSPO dan Lagoran Kosungan Bulman/ SSPO dan Lagoran Kosungan Bulman/ SSPO dan Lagoran Kosungan Bulman/ SSPO dan Lagoran Kosungan Bulman/ SSPO dan Lagoran Kosungan Bulman/ SSPO dan Lagoran Kosungan Bulman/ SSPO dan Lagoran Kosungan Bulman/ SSPO dan Lagoran Kosungan Bulman/ Bulman Bulman/ Bulman Bulman/ Bulman Bulman/ Bulman Bulman/ Bulman Bulman/ Bulman Bulman/ Bulman Bulman/ Bulman																
1 02 01 2.02 000 0																
Laporan Recuragan Bulanar/ Triwularan/ Semesteran SSPO dan Laporan Recuragan Bulanar/ Triwularan/ Semesteran SSPO dan Laporan Recuragan Bulanar/ Triwularan/ Semesteran SSPO dan Laporan Recuragan Bulanar/ Triwularan/ Semesteran SSPO dan Laporan Recuragan Bulanar/ Triwularan/ Semesteran SSPO Dan Laporan Recuragan Bulanar/ Triwularan/ Semesteran SSPO Dan Laporan Recuragan Bulanar/ Triwularan/ Semesteran SSPO Dan Laporan Recuragan Bulanar/ Triwularan/ Semesteran SSPO Dan Laporan Recuragan Bulanar/ Triwularan/ Semesteran SSPO Dan Laporan Buraga Milk Daran Bulanar/ Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan																
Part Part	1	02	01 2	2.02 0					12 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)	-		-	181.271.953,	00 RSUD DAYAKU RAJA
Laporan Kesungan Balanan/Twokhani/Semesteran SOFO RSD DAYAKI RSD Q										Kota Bangun, Liang						
Second Control Seco					Triw	ulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan						1. Penataan dan			
In the control of t							Laporan Keuangan						Pengembangan Tata Kelola			
1 02 01 2.3 Administrasi Barrang Milik Deerah pada Perangkat Deerah Jumiah Dokumen Barrang Milik Deerah pada Perangkat Deerah Jumiah Dokumen Barrang Milik Deerah pada Perangkat Deerah Deerah Milik Deerah pada Perangkat Deerah Deerah Milik Deerah pada Perangkat Deerah Deerah Milik Dee							Bulanan/Triwulanan/Semesteran						Pemerintahan dan Pelayanan			
1 02 01 2.03 Administrasi Barrang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dakumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Da							SKPD						Publik			
Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Pengusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Pengusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Pengusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Pengusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengunan Pada Keloa Pengunan Pada Kel					J				1	1	İ	1				
Sephatan Perpendiangan Pata Kelola Perpendiangan Pat	1	02	01 2	2.03	Δdm	inistrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik	_	1 Dokumen	50.000.000.00	İ	-	2 Membangun Sektor	i. i.	50 000 000	0 RSUD DAYAKU RAIA
Le Parlament Le Pa	-		-							30.000.000,00	1			[30.000.000,	
Social Control of the Control of Control o					Pada	i ciangkat Daeran			1		1					1
Pemeritahan dan Pelayanan publik 1 02 01 2.03 0005 Rekonsiliai dan Penyusunan Laporan Barang Milik Derah pada SKPD 1 02 01 2.05 Pemeritahan dan Pelayanan Publik 1 1 aporan Barang Milik Derah pada SKPD 1 02 01 2.05 Pemeritahan dan Pelayanan Pemeritahan dan Pelayanan Pemeritahan dan Pelayanan Pemeritahan dan Pelayanan Pemeritahan dan Pelayanan Pemeritahan dan Pelayanan Pemeritahan dan Pelayanan Pemeritahan dan Pelayanan Pemeritahan dan Pelayanan Pemeritahan dan Pelayanan Pemeritahan dan Pelayanan Pemeritahan dan Pelayanan Pemeritahan dan Pelayanan Pemeritahan dan Pelayanan Pemeritahan dan Pelayanan Pemeritahan dan Pelayanan Pemeritahan dan Pelayanan Publik 1 02 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Danah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dan							Daciali		1		1					1
Variable Variable				1					1		1					1
1 02 01 2.03 000 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1					1		1					1
Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengembangan Tata Kelola Pengemb		+	_						1	ļ		 				
Pengambangan Tata Kelola Pengembangan Tata K	1	02	01 2	2.03					1 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)	-		-	50.000.000,	0 RSUD DAYAKU RAJA
Pengambangan Tata Kelola Pengembangan Tata K									1	Kota Bangun, Liang	1					1
Regembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Publik 1 VZ 01 2.05 VAMINISTRASI KEPEGAWAIAN Perangkat Daerah 1 VZ 02 01 2.05 VAMINISTRASI KEPEGAWAIAN Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata					SKPD)	Daerah pada SKPD		1		İ	1	1. Penataan dan			
Solution Parameter Param				1					1		1		Pengembangan Tata Kelola			1
Value Valu				1					1		1					1
Perangkat Daerah mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan fungsi				1					1		1					1
Perangkat Daerah mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan fungsi	1	02	01 2	2.05	Δdm	inistrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang	_	80 Orang	300.000.000.00	İ	-	2. Membangun Sektor		50,000 000	00 RSUD DAYAKU RAIA
Pelatinan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1. Penataan dan Pengemintahan dan Pelatinan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2. Nambar dan Pelatinan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3. Valuati Pengawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4. Valuati Pengawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5. Variati Kartanegara, Kota Bangun, Liang 5. Variati Kartanegara, Kota Bangun, Liang 6. Valuati Kartanegara, Kota Bangun, Liang 7. Valuati Pengawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 8. Valuati Kartanegara, Kota Bangun, Liang 8. Valuati Kartanegara, Kota Bangun, Liang 8. Valuati Kartanegara, Kota Bangun, Liang 9. Valuati Pengawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 9. Valuati Pengawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 9. Valuati Pengawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 9. Valuati Pengawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 9. Valuati Pengawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 9. Valuati Pengawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 9. Valuati Pengawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 9. Valuati Pengawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 9. Valuati Pengawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 9. Valuati Pengawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 9. Valuati Pengawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 9. Valuati Pengawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 9. Valuati Pengawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 9. Valuati Pengawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 9. Valuati Pengawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 9. Valuati Pengawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pengawai Berdasarkan Tugas dan Fun	1 -		~ ^						1		İ	1			55.500.000,	
Fungsi 1 V2 V1 V2 V2 V3 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4					rera				1	1	İ	1				
Variable Variable				1	1				1		İ	1				- 1
Registration of the control of the c					J		rungsi		1	1	İ	1				
1 02 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pendidikan				1	ı				1	1	İ	1				
Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kota Bangun, Liang Kesehatan 1. Penatasan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		1							1		ļ					
Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan I. Penatanan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	1	02	01 2	2.05			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas		50 Orang	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	I-	2. Membangun Sektor	-	0,00	RSUD DAYAKU RAJA
Pendidikan dan Pelatihan 1. Penatan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan									1			1				
Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan				1		5 5			1		1					1
Pemerintahan dan Pelayanan									1		1					1
Publik Pu									1		1					1
i unin					J				1		İ	1	Publik			- 1
		11_					l		1	L	I	1		L		_1



1	02	01 2	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	25 Orang	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Llang	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 2. Membangun Sektor Kesehatan 1. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas layanan kesehatan		50.000.000,00	RSUD DAYAKU RAJA
1	02	01 2	.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 layanan	852.500.000,00		- 2. Membangun Sektor Kesehatan 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1.237.500.000,00	RSUD DAYAKU RAJA
1	02	01 2	2.06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 2. Membangun Sektor Kesehatan 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	100.000.000,00	RSUD DAYAKU RAJA
1	02	01 2	2.06		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 2. Membangun Sektor Kesehatan 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	200.000.000,00	RSUD DAYAKU RAJA
1	02	01 2	2.06		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 2. Membangun Sektor Kesehatan 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		RSUD DAYAKU RAJA
1	02	01 2	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5000 Paket	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 2. Membangun Sektor Kesehatan 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		150.000.000,00	RSUD DAYAKU RAJA
1	02	01 2	.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 2. Membangun Sektor Kesehatan 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	290.000.000,00	RSUD DAYAKU RAJA
1	02	01 2	1.06		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 2. Membangun Sektor Kesehatan 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		135.000.000,00	RSUD DAYAKU RAJA
1	02	01 2	1.06		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	52.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 2. Membangun Sektor Kesehatan 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		112.500.000,00	RSUD DAYAKU RAJA
1	02	01 2	.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa - Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	7.278.794.120,00		- 2. Membangun Sektor Kesehatan 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		23.009.750.000,00	RSUD DAYAKU RAJA
		01 2			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.750.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang		- 2. Membangun Sektor Kesehatan 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		RSUD DAYAKU RAJA
1	02	01 2	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 2. Membangun Sektor Kesehatan 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1.000.000.000,00	RSUD DAYAKU RAJA



1	1 02	01	2.08	0002	I December to a December des	London London Bounding London		12 (2200	200 000 000 00	Web Watel Westerness	DANIA DACILIACII (DDII))		200,000,000,00	RSUD DAYAKU RAJA
	02	01	2.06	0003	B Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	DANA BAGI RASIL (DBR)	к 1 Р Р	2. Membangun Sektor Kesehatan L. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		200000.000,00	RSOD DATAKO KAJA
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	6.069.044.120,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	DANA BAGI HASIL (DBH)	K 1 F F	2. Membangun Sektor Kesehatan L. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	21.800.000.000,00	RSUD DAYAKU RAJA
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	-	58 unit	2.300.000.000,00			M 1 P P	2. Membangun Sektor Kesehatan L. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	3.170.264.030,00	RSUD DAYAKU RAJA
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	DANA BAGI HASIL (DBH)	K 1 F F	2. Membangun Sektor Kesehatan L. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	100.000.000,00	RSUD DAYAKU RAJA
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		16 Unit	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 2 K 1 F	2. Membangun Sektor Kesehatan I. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	600.000.000,00	RSUD DAYAKU RAJA
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12 Unit	1.200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	K 1 F F	2. Membangun Sektor Kesehatan I. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1.200.000.000,00	RSUD DAYAKU RAJA
1	02	01	2.09	0010	D Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		12 Unit	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	DANA BAGI HASIL (DBH)	K 1 F F	2. Membangun Sektor Kesehatan L. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1.270.264.030,00	RSUD DAYAKU RAJA
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD RSUD	-	1 Nilai	12.000.000.000,00			K 1 F F	2. Membangun Sektor Kesehatan L. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	12.000.000.000,00	RSUD DAYAKU RAJA
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		5 Unit Kerja	12.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	PENDAPATAN DARI BLUD	к 1 Р Р	2. Membangun Sektor Kesehatan L. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12.000.000.000,00	RSUD DAYAKU RAJA
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	-	93 persen	5.500.000.000,00						10.350.000.000,00	RSUD DAYAKU RAJA
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	-	70 Persen	5.500.000.000,00			M 1 P P	2. Membangun Sektor Kesehatan I. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai RSUD Dayaku - Raja dan Masyarakat	9.250.000.000,00	RSUD DAYAKU RAJA
1	02	02	2.01	0003	B Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun		4 Unit	5.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang	DANA BAGI HASIL (DBH)	K 1 F F	2. Membangun Sektor Kesehatan L. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai RSUD Dayaku Raja dan Masyarakat	500.000.000,00	RSUD DAYAKU RAJA
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penggalangan Kerjasama RS dengan pihak ke tiga	-	100 persen	1.500.000.000,00					-	2.500.000.000,00	RSUD DAYAKU RAJA



						T	T 1 1 1 1 1		. 1	1	T			
1	02	05 2	2.01		dvokasi, Pemberdayaan,	Jumlah Jenis Kerjasama Rumah -	1 jenis	1.500.000.000,00	9	-	2. Membangun Sektor	- -	2.500.000.000,00	RSUD DAYAKU RAJA
					emitraan, Peningkatan Peran	Sakit dengan Pihak Ketiga		(Kesehatan			
					erta Masyarakat dan Lintas Sektor	r		(1. Penataan dan			
				1	ingkat Daerah Kabupaten/Kota			1			Pengembangan Tata Kelola			
								1			Pemerintahan dan Pelayanan			
								(Publik			
1	02	05 2	2.01	0001	eningkatan Upaya Promosi	Jumlah Dokumen Promosi	2 Dokumen	1 500 000 000 00	Kah Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor	_	2 500 000 000 00	RSUD DAYAKU RAJA
1 - 1	02		2.01		esehatan, Advokasi, Kemitraan	Kesehatan, Advokasi, Kemitraan	2 bokumen	1.500.000.000,00	Kota Bangun, Liang	Britist British British British	Kesehatan		2.500.000,00	noob britished to di
								1	Kota Baliguli, Lialig					
				- '	an Pemberdayaan Masyarakat	dan Pemberdayaan Masyarakat		1			1. Penataan dan			
								1			Pengembangan Tata Kelola			
								(Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
					inas Pekerjaan Umum			712.181.023.485,00						DINAS PEKERJAAN UMUM
1						ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		712.181.023.485,00						DINAS PEKERJAAN UMUM
1						PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		712.181.023.485,00						DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01			ROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi -	72,5 Nilai	47.644.658.111,00				-	72.047.073.971,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
					EMERINTAHAN DAERAH	Pemerintahan (AKIP)		(
				- 1	ABUPATEN/KOTA			(
1	03	01 2	2.01		erencanaan, Penganggaran, dan	Persentase kineria perangkat -	100 persen	475.000.000,00)	-	7. Peningkatan tata kelola		1.350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
					valuasi Kinerja Perangkat Daerah			1			pemerintahan daerah yang			
				- 1				1			profesional dan akuntabel			
								1			untuk mendukung			
	- 1							ı	I	1				
1 1	J							ı	1		transformasi pelayanan			
	- 1							ı	I	1	publik			
	- 1							ı	I	1	1. Penataan dan			
1 1	J							ı	1		Pengembangan Tata Kelola			
								1			Pemerintahan dan Pelayanan			
								(Publik			
1	U3	01 3	2.01	0001	enyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	200,000,000,00	Kah Kutai Kartanogara	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola		400,000,000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 - 1	05	01 2	2.01			Described Described	2 bokumen	1	Semua Kecamatan,	DAINA DAGITIASIE (DDIT)			400.000.000,00	DIIVAS I EKEIGAAIV OIVIOIVI
				- 1	erangkat Daerah	Perangkat Daerah		1			pemerintahan daerah yang			
								1	Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
								1			untuk mendukung			
								1			transformasi pelayanan			
								1			publik			
								1			1. Penataan dan			
								1			Pengembangan Tata Kelola			
								1			Pemerintahan dan Pelayanan			
								(Publik			
4	00	04 -	2.04	0000			21	100.000.000,00		DANA BAGI HASIL (DBH) -			400 000 000 00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01 2	2.01		oordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	2 Laporan	100.000.000,00		DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola	-	400.000.000,00	DINAS PEREKJAAN UMUM
					aporan Capaian Kinerja dan	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1	Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			
				- 1	khtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi		1	Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
						Penyusunan Laporan Capaian		1			untuk mendukung			
						Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		1			transformasi pelayanan			
						Kinerja SKPD		ı						
											publik			
								·			publik 1. Penataan dan			
1 1								l			1. Penataan dan			
	J										Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
											Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
+_+	03	01	201	0007	Industri Vinerio Describito De	Lumbah Langara Funturai Wasaria		50,000,000,000	Koh Kutai V	DANA DACHASH (DPP)	 Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 		470,000	DINAS OFFEDAMAN A
1	03	01 2	2.01	0007	ivaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	50.000.000,00		DANA BAGI HASIL (DBH) -	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola	-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01 2	2.01	0007	ivaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	150,000,000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01 2	2.01	0007	ivaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	50.000.000,00		DANA BAGI HASIL (DBH)	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola	-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01 2	2.01	0007	ivaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01 2	2.01	0007	valuasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01 2	2.01	0007	ivaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	50,000,000,00	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01 2	2.01	0007	ivaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01 2	2.01	0007	ivaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01 2	2.01	0007	ivaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01 2	2.01	0007	valuasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
						Perangkat Daerah			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		
				0009	elaksanaan Pengumpulan Data	Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral	1 Laporan 91 Data		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) - DANA BAGI HASIL (DBH) -	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-		DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM
				0009		Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang	-		
				0009	elaksanaan Pengumpulan Data	Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,		Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-		
				0009	elaksanaan Pengumpulan Data	Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-		
				0009	elaksanaan Pengumpulan Data	Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-		
				0009	elaksanaan Pengumpulan Data	Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-		
				0009	elaksanaan Pengumpulan Data	Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		
				0009	elaksanaan Pengumpulan Data	Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-		
				0009	elaksanaan Pengumpulan Data	Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola	-		
				0009	elaksanaan Pengumpulan Data	Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			

1	03	01 2	2.01	1	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
		01 1	2.02				100	44.019.658.111,00		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		45 047 077 074 00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	03	01 2	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan - Perangkat Daerah	100 persen	44.019.658.111,00		- 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		45.847.073.971,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01 2	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4760 Orang/bulan	43.294.658.111,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		45.297.073.971,00	Dinas Pekerjaan umum
1	03	01 2	2.02	ı	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun KKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		50.000.000,00	Dinas Pekerjaan umum
1	03	01 2	2.02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	650.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		450.000.000,00	Dinas Pekerjaan umum
1	03	01 2	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		50.000.000,00	Dinas Pekerjaan umum
1	03	01 2	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	100 persen	125.000.000,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01 2	2.03		Pengamanan Barang Milik Daerah KKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

1 1														
1	03	01	2.03	0005	tekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan		2 Laporan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
			ļ		aporan Barang Milik Daerah pada	Penyusunan Laporan Barang Milik		'	Tenggarong, Semua		pemerintahan daerah yang			
					KPD	Daerah pada SKPD		'	Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
								ļ ļ			untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
								ļ ļ			publik			
								ļ ļ			1. Penataan dan			
								ļ ļ			Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
								ļ ļ			Publik			
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	Persentase Administrasi		100 persen	200.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola		3.000.000.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM
					Perangkat Daerah	Kepegawaian Perangkat Daerah		,			pemerintahan daerah yang			
					cranghat bacran	nepegawaiani erangkat baeran		ļ ļ			profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
								ļ ļ			publik			
								ļ ļ			1. Penataan dan			
								ļ ļ			Pengembangan Tata Kelola			
								ļ ļ			Pemerintahan dan Pelayanar			
											Publik			
	02	04	2.05	0044	Control of the Contro	hardele Ocean and Managhari		207.0	200 000 000 00	DANIA DA CILIACII (DDII)		-	2 000 000 000 00	DINIAC DEVEDIA ANI LINALINA
1	03	Ul	2.05		Simbingan Teknis Implementasi	Jumlah Orang yang Mengikuti		397 Orang	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DAINA RAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	[-]	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	1 1			Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi		1 '	Tenggarong, Semua		pemerintahan daerah yang	1		
	1	1 1				Peraturan Perundang-Undangan		1 '	Kel/Desa		profesional dan akuntabel	1		
	1							1			untuk mendukung			
	1							1			transformasi pelayanan			
	1							1			publik			
								ļ ļ			1. Penataan dan			
								ļ ļ			Pengembangan Tata Kelola			
								ļ ļ			Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Persentase Administrasi Umum		100 persen	995.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola		8.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
					Daerah	Perangkat Daerah		ļ ļ			pemerintahan daerah yang			
								ļ ļ			profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
								ļ ļ			transformasi pelayanan			
								ļ ļ			publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
								ļ ļ			Pemerintahan dan Pelayanar			
											Publik			
1	03	01	2.06	0001	enyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	- 	3 Paket	60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	_	1 500 000 000 00	DINAS PEKERJAAN UMUM
-	-				,	Listrik/Penerangan Bangunan			Tenggarong, Semua		pemerintahan daerah yang			
					istrik/Penerangan Bangunan	Kantor yang Disediakan		ļ ļ	Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
					Cantor	names yang bisealakan			ney besu		untuk mendukung			
								·						
							1							
								1 1			transformasi pelayanan			
								į			transformasi pelayanan publik			
											transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			
1											transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
											transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
											transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
1	03	01	2.06	0002	renyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan		5 Paket	300.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-	2.500,000,000,000	dinas pekerjaan umum
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang		5 Paket	Tenggarong, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang		2.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan umum
1	03	01	2.06	0002				5 Paket		DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		2.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan umum
1	03	01	2.06	0002		Perlengkapan Kantor yang		5 Paket	Tenggarong, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.06	0002		Perlengkapan Kantor yang		5 Paket	Tenggarong, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	2.500,000,000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.06	0002		Perlengkapan Kantor yang		5 Paket	Tenggarong, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.06	0002		Perlengkapan Kantor yang		5 Paket	Tenggarong, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.06	0002		Perlengkapan Kantor yang		5 Paket	Tenggarong, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	2.500,000,000,00	Dinas Pekerjaan umum
1	03	01	2.06	0002		Perlengkapan Kantor yang		5 Paket	Tenggarong, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan publik untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		2.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan umum
1	03	01	2.06	0002		Perlengkapan Kantor yang		5 Paket	Tenggarong, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	2.500,000,000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
		01		0002		Perlengkapan Kantor yang		5 Paket	Tenggarong, Semua		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan publik untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			DINAS PEKERJAAN UMUM
				0002	rerlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor			Tenggarong, Semua Kel/Desa Z00.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
				0002	rerlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Tenggarong, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dareah yang	-		
				0002	rerlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor			Tenggarong, Semua Kel/Desa Z00.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan akuntabel profesional dan akuntabel			
				0002	rerlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor			Tenggarong, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-		
				0002	rerlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor			Tenggarong, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dara Pelayanan Publik 1. Penataan dan Akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dareah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan			
				0002	rerlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor			Tenggarong, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		
				0002	rerlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor			Tenggarong, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Dabikana daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			
				0002	rerlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor			Tenggarong, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan publik transformasi pelayanan publik transformasi pelayanan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola			
				0002	rerlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor			Tenggarong, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Dabikana daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			

1													
	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1 Paket	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	200.000.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM
		-			Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan		Tenggarong, Semua		pemerintahan daerah yang			
					Cliggaridaari	r chiggandaan yang biscalakan		Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
								Kel/ Desa		untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
1	03	01	2.06	0009		Jumlah Laporan Penyelenggaraan	150 Laporan	235.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
					dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Tenggarong, Semua		pemerintahan daerah yang			
						SKPD		Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
1	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada	Jumlah Dokumen Penatausahaan	2 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	- 1	1.000.000.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 -				1	SKPD	Arsip Dinamis pada SKPD		Tenggarong, Semua		pemerintahan daerah yang			1
	1			1	5 5	Dinamis paud SKFD		Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
	1			1	1	l l		Kei/ Desa					
	1			1	1					untuk mendukung			I
	1			1	1					transformasi pelayanan			I
	1			1	1	l l				publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang -	100 Persen	555.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	- -	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
					Penunjang Urusan Pemerintah	Milik Daerah Penunjang Urusan				pemerintahan daerah yang			
					Daerah	Pemerintah Daerah				profesional dan akuntabel			
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
1										Pengembangan Tata Kelola			
1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	11 Unit	235,000,000,00 Kab. Kutai Kartanesara.	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1.500,000,000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.07	0002		Jumlah Unit Kendaraan Dinas	11 Unit	235.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola	-	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang	11 Unit	Tenggarong, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.07	0002			11 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.07	0002		Operasional atau Lapangan yang	11 Unit	Tenggarong, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.07	0002		Operasional atau Lapangan yang	11 Unit	Tenggarong, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.07	0002		Operasional atau Lapangan yang	11 Unit	Tenggarong, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.07	0002		Operasional atau Lapangan yang	11 Unit	Tenggarong, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.07	0002		Operasional atau Lapangan yang	11 Unit	Tenggarong, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.07	0002		Operasional atau Lapangan yang	11 Unit	Tenggarong, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.07	0002		Operasional atau Lapangan yang	11 Unit	Tenggarong, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
					Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Tenggarong, Semua Kel/Desa		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
		01			Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	11 Unit	Tenggarong, Semua Kel/Desa 320,000,000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
					Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		Tenggarong, Semua Kel/Desa 320.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang			
					Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana		Tenggarong, Semua Kel/Desa 320,000,000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola			
					Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		Tenggarong, Semua Kel/Desa 320.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang			
					Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		Tenggarong, Semua Kel/Desa 320.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung			
					Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		Tenggarong, Semua Kel/Desa 320.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			
					Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		Tenggarong, Semua Kel/Desa 320.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		
					Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		Tenggarong, Semua Kel/Desa 320.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-		
					Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		Tenggarong, Semua Kel/Desa 320.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daarah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
					Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		Tenggarong, Semua Kel/Desa 320.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang	-		
1	03	01	2.07	0010	Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		Tenggarong, Semua Kel/Desa 320.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03		2.07	0010	Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		Tenggarong, Semua Kel/Desa 320.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-	0,00	
1	03	01	2.07	0010	Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Persentase Penyediaan Jasa	5 Unit	Tenggarong, Semua Kel/Desa 320.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.07	0010	Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	5 Unit	Tenggarong, Semua Kel/Desa 320.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.07	0010	Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Persentase Penyediaan Jasa	5 Unit	Tenggarong, Semua Kel/Desa 320.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.07	0010	Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	5 Unit	Tenggarong, Semua Kel/Desa 320.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.07	0010	Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	5 Unit	Tenggarong, Semua Kel/Desa 320.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan transformasi pelayanan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.07	0010	Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	5 Unit	Tenggarong, Semua Kel/Desa 320.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.07	0010	Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	5 Unit	Tenggarong, Semua Kel/Desa 320.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan transformasi pelayanan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.07	0010	Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	5 Unit	Tenggarong, Semua Kel/Desa 320.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.07	0010	Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	5 Unit	Tenggarong, Semua Kel/Desa 320.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Pata Kelola	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.07	0010	Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	5 Unit	Tenggarong, Semua Kel/Desa 320.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	400.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan umum
											untuk mendukung transformasi pelayanan			
											publik 1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		1 Laporan	500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -		7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
					Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Tenggarong, Semua Kel/Desa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			
									1-1-4		untuk mendukung			
											transformasi pelayanan publik			
											publik 1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
1	03	01	2 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	lumlah BMD yang dinelihara	. + -	50 kali	375.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola -	_	2 000 000 000 00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	0.5	"	2.03		Penunjang Urusan Pemerintahan	yang apemara		30 Kuli	37310001000300		pemerintahan daerah yang		2.000.000,000	DITO I ENCIOPORT OFFICE
					Daerah						profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
1	03	01	2.09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan		22 unit Unit	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
					Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan			Tenggarong, Semua Kel/Desa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			
					Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya			kely Desa		untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik 1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
1	02	01	2.00	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas		22 Unit	175.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BACILIACII (DDII)	Publik - 7. Peningkatan tata kelola -		F00 000 000 00 II	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.09		Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Operasional atau Lapangan yang		22 UIIIL	Tenggarong, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang		500.000.000,00	DINAS PERENJAAN UIVIUIVI
					Perizinan Kendaraan Dinas	Dipelihara dan dibayarkan Pajak			Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
					Operasional atau Lapangan	dan Perizinannya					untuk mendukung			
											transformasi pelayanan publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan		3 Unit	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
					Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang			Tenggarong, Semua		pemerintahan daerah yang			
						Dipelihara/Direhabilitasi			Kel/Desa		profesional dan akuntabel untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
1											Pemerintahan dan Pelayanan			

91 1	03	102	1	1	PROGRAM PENGELOLAAN	Rasio luas kawasan permukimen	. 1 1	0.008 Rasio	45.312.170.934,00	1		I.	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUN
91 1	US	02			SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi		0,021 Rasio 0,12 Rasio	45.512.170.954,00			-	0,00	DINAS PERENAAN ONION
						oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio luas kawasan permukiman								
						rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten								
1	03	3 02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan pemukiman yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir dan abrasi Persentase Kawasan Permukiman Raman Banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendali Banjir		1307 ha 11,33 Persen	30.769.618.598,00	-		-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUN
1	03	3 02	2.01	0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi		1 Unit	1.000.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	3 02	2.01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara		7,75 KM	2.218.367.168,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	02	2.01	0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan		3 Lembaga	500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	3 02	2.01	0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara		3,76 KM	875.201.250,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	02	2.01	0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara		3 Unit	1.100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	3 02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi		17,07 KM	5.820.408.163,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	02	2.01		Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan		2,248 KM	1.050.490.400,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1		3 02			Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi		1,886 KM	10.830.151.617,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernial tambah dan Berkelanjutan	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1					Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun		14 Titik	5.875.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun		1 Dokumen	1.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	3 02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		284,80 Ha	14.542.552.336,00	-	5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUN
1	03	3 02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun		12,53 KM	4.245.283.500,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM



	1 0	03 02	2.02	8000	Peningkatan Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	1,76 KM	3.520.420.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	5. Penguatan Daya Saing	0,	00	DINAS PEKERJAAN UMUM
			1	1	Permukaan	yang Ditingkatkan		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan			
								Semua kei/Desa		Berkelanjutan			
	1 0	03 02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	0,85 KM	1.278.200.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	5. Penguatan Daya Saing -	0,	00	DINAS PEKERJAAN UMUM
					Permukaan	yang Direhabilitasi		Semua Kecamatan,		Ekonomi Daerah yang			
								Semua Kel/Desa		Unggul, Bernilai tambah dan			
										Berkelanjutan			
	1 0	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	6,63 KM	3.498.648.836,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	5. Penguatan Daya Saing -	0,	00	DINAS PEKERJAAN UMUM
					Irigasi Permukaan	yang Dioperasikan dan Dipelihara		Semua Kecamatan,		Ekonomi Daerah yang			
								Semua Kel/Desa		Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
	1 (03 02	2.02	0050	Penyusunan Dukungan Teknis	Jumlah Dukungan Teknis bidang	3 Dokumen	1.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	5. Penguatan Daya Saing -	10	00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1 0	,5 02	2.02	0030	bidang Irigasi dan Rawa	Irigasi dan Rawa yang Disusun	3 bokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGITIASIE (DBIT)	Ekonomi Daerah yang] ,	50	DINAS I EKEIGAAN ONIONI
								Semua Kel/Desa		Unggul, Bernilai tambah dan			
								, , , , , ,		Berkelanjutan			
	1 0	03 02	2.02	0054	Operasi dan Pemeliharaan Bendung		4 UNIT	500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	5. Penguatan Daya Saing -	0,	00	DINAS PEKERJAAN UMUM
					Irigasi	Dioperasikan dan Dipelihara		Semua Kecamatan,		Ekonomi Daerah yang			
								Semua Kel/Desa		Unggul, Bernilai tambah dan			
	_ _						1.55			Berkelanjutan			
92	1 0	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Persentase Kawasan Permukiman -	1,65 Persen	48.750.000.000,00			-	32.493.944.589,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
					PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rawan Banjir yang terlindungi oleh Sistem drainase							
					DIAMASE	Sistem di amase							
	1 0	3 06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan	Luas Kawasan Permukiman Rawan -	360 Ha	48.750.000.000,00	-		1-	32.493.944.589,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
					Sistem Drainase yang Terhubung	Banjir yang terlindungi oleh Sistem							
					Langsung dengan Sungai dalam	drainase							
					Daerah Kabupaten/Kota								
			221										
- 1	1 0	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	5 Sistem Drainase	43.000.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	0,	00	DINAS PEKERJAAN UMUM
					Perkotaan	yang Ditingkatkan	Perkotaan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					
							reikotaali	Sellida Kely Desa					
	1 0	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem	5.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	4. Membangun Infratruktur -		25.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
					Perkotaan	yang Dibangun	Drainase	Tenggarong, Semua		Konektivitas			
							Perkotaan	Kel/Desa		5. Penguatan Daya Saing			
										Ekonomi Daerah yang			
										Unggul, Bernilai tambah dan			
			221				10.0			Berkelanjutan			
	1 (06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	10 Sistem Drainase	750.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun Infratruktur Konektivitas		7.493.944.589,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
					Di alliase Perkotaali	yang beroperasi dan rerpennara	Perkotaan	Kel/Desa		5. Penguatan Daya Saing			
							Terkotaan	Kab. Kutai Kartanegara,		Ekonomi Daerah yang			
								Tenggarong, Semua		Unggul, Bernilai tambah dan			
								Kel/Desa		Berkelanjutan			
								Kab. Kutai Kartanegara,					
								Tenggarong Seberang,					
								Semua Kel/Desa					
93 :	1 0	3 08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN	Persentase Bangunan Negara -	62,37 Persen	20.993.501.200,00	1		1-	8.384.885.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
					GEDUNG	dalam Kondisi Baik							
:	1 0	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang -	3 unit	20.993.501.200,00	-	4. Membangun Infratruktur -	-	8.384.885.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
					Gedung di Wilayah Daerah	dapat digunakan				Konektivitas			
					Kabupaten/Kota, Pemberian Izin					6. Pengembangan			
					Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan					konektivitas dan pembangunan infrastruktur			
					Gedung					secara terpadu dan merata			
			1	1									
- 1:	1 0	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan	Jumlah Bangunan Gedung untuk	16 Bangunan	19.993.501.200,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	4. Membangun Infratruktur -		6.984.885.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
					Pemeriksaan Berkala Bangunan	Kepentingan Strategis	Gedung	Semua Kecamatan,		Konektivitas	1		
			1		Gedung untuk Kepentingan	Kabupaten/Kota yang Dipelihara,		Semua Kel/Desa	1	6. Pengembangan	1		
			1		Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dirawat, dan Diperiksa Berkala			1	konektivitas dan			
			1						1	pembangunan infrastruktur			
				1	I				1	secara terpadu dan merata			1
										' I			

1 (03 08			Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kébijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung		1 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	Membangun Infratruktur Konektivitas Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	-			DINAS PEKERJAAN UMUM
1 (03 08	2.01	0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya		30 Orang	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Membangun Infratruktur Konektivitas Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	-		350.000.000,00	Dinas Pekerjaan umum
1 (03 08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Suarat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungs (ISF), Surat Buktiti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penliik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		100 Dokumen	700.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Membangun Infratruktur Konektivitas Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	-		900.000.000,00	Dinas Pekerjaan umum
1 (03 09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan - dan Lingkungannya		72,25 Persen	136.699.437.240,00					-	16.165.115.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 (03 09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan dan Lingkungan - yang ditata		10 Unit	136.699.437.240,00		sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Konektivitas 6. Pengembangan	-		16.165.115.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 (03 09	2.01	0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan		15 Kawasan	136.699.437.240,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membangun Infratruktur Konektivitas Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata			16.165.115.000,00	Dinas Pekerjaan umum
1 (03 10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kondisi Kemantapan Jalan -		65,73 Persen	408.616.256.000,00					-	1.960.807.595.340,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 (03 10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kondisi Baik Persentase Kondisi Kemantapan Jalan		1211,424 KM 65,133 persen	408.616.256.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	masyarakat		1.960.807.595.340,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1 1 1 1	1 03 08 1 03 09 1 03 09 1 03 09	1 03 08 2.01 1 03 08 2.01 1 03 09 2.01 1 03 09 2.01	1 03 09 2.01 0011	Penyelenggaraan Bangunan Gedung 1 03 08 2.01 0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung 1 03 08 2.01 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Serlifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SRKBG), Rencana Teknish Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profest Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 1 03 09 2.01 O011 Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Bangunan Gedung 1 03 08 2.01 0022 Pembinaan dan Pengawasan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Fenibari Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalu SIMBG 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN Persentase Penataan Bangunan Gedung melalu SIMBG 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN Persentase Penataan Bangunan Gedung melalu SIMBG 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan dan Lin	Pervyelenggaraan Bangunan Gedung 1 03 08 2.01 0022 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik repusi (PBG), Sertifikat L	Penyelenggaraan Bangunan Gedung 1 03 08 2.01 0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung 1 03 08 2.01 0023 Penyelenggaraan Penyelitan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Penyelenggaraan Penyelitan Persetujuan Bangunan Gedung (PRG), Sertifikat talis Fungs (SEP), Sura takiti Kepenilikan Bangunan Gedung (PRG), Sertifikat talis Fungs (SEP), Sura takiti Kepenilikan Bangunan Gedung (PRG), Sertifikat talis Fungs (SEP), Sura takiti Kepenilikan Bangunan Gedung (PRG), Sertifikat talis Fungs (SEP), Sura takiti Kepenilikan Bangunan Gedung (PRG), Sertifikat talis Fungs (SEP), Sura takiti Kepenilikan Bangunan Gedung (PRG), Sertifikat talis Fungs (SEP), Sura takiti Kepenilikan Bangunan Gedung (PRG), Sertifikat talis Fungs (SEP), Sura takiti Kepenilikan Bangunan Gedung (PRG), Sertifikat talis Fungs (SEP), Sura takiti Kepenilikan Bangunan Gedung (PRG), Sertifikat talis Fungs (SEP), Sura takiti Kepenilikan Bangunan Gedung (PRG), Sertifikat talis Fungs (SEP), Sura takiti Kepenilikan Bangunan Gedung (PRG), Sertifikat talis Fungs (SEP), Sura takiti Kepenilikan Bangunan Gedung (PRG), Sertifikat talis Fungs (SEP), Sura takiti Kepenilikan Bangunan Gedung (PRG), Sertifikat talis Fungs (SEP), Sura takiti Kepenilikan Bangunan Gedung (PRG), Sertifikat talis Fungs (SEP), Sura takiti Kepenilikan Bangunan Gedung (PRG), Sertifikat talis Fungs (SEP), Sura takiti Kepenilikan Bangunan Gedung (PRG), Sertifikat talis Fungs (SEP), Sura takiti Kepenilikan Bangunan Gedung (PRG), Sertifikat talis Fungs (SEP), Sura takiti Kepenilikan Bangunan Gedung (PRG), Sertifikat talis Fungs (SEP), Sura takiti Kepenilikan Bangunan Gedung (PRG), Sertifikat talis Fungs (SEP), Sura takiti Kepenilikan Bangunan Gedung (PRG), Sertifikat talis Fungs (SEP), Sura takiti Kepenilikan Bangunan Gedung (PRG), Sertifikat talis Fungs (SEP), Sura takiti Kepenilikan Bangunan Gedung (PRG), Sertifikat talis Fungs (SEP), Sura takiti Kepenilikan Bangunan Gedung (PRG), Sertifikat talis Fungs (SEP), Sura takiti Kepenilikan Bangunan Gedung (PRG), Sertifikat talis Fungs (SEP	Pempelenggaraan Bangunan Gedurg Pempelenggaraan Bangunan Gedurg Semus Kel/Desa	Projektingsram Bungsram Projektingsram Bungsram Projektingsram Bungsram Projektingsram Bungsram Projektingsram Bungsram Projekting	Propriegram fragment Goding Propriegram fragment Goding Propriegram fragment Goding Propriegram fragment Goding Propriegram fragment Goding Propriegram fragment Goding Propriegram fragment Goding Propriegram fragment Fragment Goding Fragment Fragment Goding Fragment Goding Fragment Goding Fragment Goding Fragment Fragment Goding Fragment Fragment Goding Fragment Fragment Goding Fragment Fragme	Frey Cological part of Programs Sequence Cological Colog	Semina disconsistion delication desired desire	Property party p	Value

1	03	10 2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun		aporan uumen	9.600.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	masyarakat	9.450.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	10 2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2191	16,94 KM	2.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendigkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendgembangkan industri kreatif serta mengembangkan industri keratif serta mengembangkan jagromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	masyarakat	2.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	10 2.01	0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	0.5 1	KM	3.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Melanjutkan pengembangan infratruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	masyarakat	3.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	10 2.01	0052	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	8,5 1	KM	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Melanjutkan pengembangan infratruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	masyarakat	200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	10 2.01	0053	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	2,11	КМ	21.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Melanjutkan pengembangan infratruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	masyarakat	147.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM

1	0:	03 10	2.01	0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1,5 KM	10.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas 6, Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	masyarakat	40.000.000.000	,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
1	0:	03 10	2.01	0057	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	45 Meter	25.000.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun infratruktur Konektivitas G. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	masyarakat	240.000.000.000	,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
1	0:	03 10	2.01	0058	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	270 Meter	1.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewiraushaban, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas G. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	masyarakat	1.200.000.000	,00 dinas pekerjaan umum
1	0:	03 10	2.01	0059	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	4 KM	58.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Konektivitas 6. Pengembangan	masyarakat	934.657.595.344	,00 dinas pekerjaan umum
1	0:	03 10	2.01	0061	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	20 Meter	700.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	masyarakat	1.300,000.000	,00 dinas pekerjaan umum

	1	03 1	10	2.01	0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		2 Jemb	oatan	900.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Membangun infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	masyarakat		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03 1	10	2.01	0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar		0,36 к	М	14.277.031.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan menigkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	masyarakat		80.000.000.000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	10	2.01	0069	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun		35 Me	ter	262.439.225.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Konektivitas 6. Pengembangan	masyarakat		500.000.000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
96	1	03 1	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan Pengembangan Jasa Kontruksi (SOP, Data, Layanan, Instruktur dan Tenaga Terampil/ Ahli)	-	100 Pe	ersen	4.165.000.000,00					-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	11 :	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang bersertifikat	-	200 0	rang	2.590.000.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat Jasa Konstruksi	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	11	2.01		Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis			1 Doku	ımen	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pendidikan 2. Pengembangan sumber	Masyarakat Jasa Konstruksi		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

1	1 0	03 11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	310 Orang	1.070.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat Jasa Konstruksi	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	1 0	03 11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Olbina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	40 Lembaga	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat Jasa Konstruksi	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	1 0	03 11	2.01	0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	30 Orang	270.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Z. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat Jasa Konstruksi	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	1 0	03 11	2.01	0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	1 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Z. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat Jasa Konstruksi	0,00	DINAS PEKERIAAN UMUM
1	1 0	03 11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	220 Orang	800.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Membangun Sektor Pendidikan Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Masyarakat Jasa Konstruksi	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

1 0	3 1	1 2.02	2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah	Jumlah layanan Sistem Informasi - Jasa Konstruksi yang	1 Layanan 1.025. 3 buah	00,000,00	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan	Pendidikan	Mayarakat Jasa - Konstruksi	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
				Kabupaten/Kota	diselenggarakan Jumlan Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang telah buat			meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	 Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 			
1 0	3 1	1 2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen 650.1	000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Pendidikan	Mayarakat Jasa Konstruksi	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 0	3 1	1 2.02	2 0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang 100.	000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pendidikan 2. Pengembangan sumber	Mayarakat Jasa Konstruksi	0,00	DINAS PEKERIAAN UMUM
1 0	3 1	1 2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan 275 J Informasi	000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreati Serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pendidikan 2. Pengembangan sumber	Mayarakat Jasa Konstruksi	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 0	3 1	1 2.04	ı	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah badan usaha jasa konstruksi - yang tertib Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfastan Jasa Konstruksi Pengawasan Dokumen Badan Usaha yang Tertib Jasa Konstruksi	1 Laporan 550. 1 Dokumen	000.000,00	-	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUN
1 0	3 1	1 2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	75 Paket 250.i Pekerjaan	000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 0	3 1	1 2.04	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	75 Bangunan 100. Konstruksi	000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM



1	03	11	2.04	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	40 Lembaga	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	11	2.04		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	75 Badan Usaha	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	produktif, terampil 1. Membangun Sektor Pendidikan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
					Dinas Perumahan dan Kawasan Per	mukiman		381.875.685.757,00				•	835.022.634.34	,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Y	ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		381.875.685.757,00					835.022.634.34	,00 DINAS PERUMAHAN DAN
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		208.255.500.000,00					389.710.000.000	,00 DINAS PERUMAHAN DAN
	03					I	100.00	130.828.000.000,00					- 332.210.000.000	KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan di seluruh kabupaten	87.65 Persen	130.828.000.000,00					- 332.210.000.000	,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Jumlah Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Jumlah Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	5 Liter/Detik 110 Liter/Detik 1714 SR	130.828.000.000,00				Masyarakat	- 332.210.000.000	,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan		3 Unit	9.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	Masyarakat	9.000.000.000	,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen	1.900.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	Masyarakat	3.600.000.000	,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		110 Liter/Detik	28.495.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	Masyarakat	60.955.000.00	,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	03	2.01		Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	40 Desa	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	Masyarakat	1.980.000.000	,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	03	2.01		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	5 Liter/Detik	4.200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	Masyarakat	7.200.000.000	,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	03	2.01		Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	5 Unit	9.450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	Masyarakat	9.450.000.00	,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	03	2.01		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1714 SR	73.608.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	Masyarakat	236.450.000.00	0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	03	2.01	0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	91 Unit	3.275.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	Masyarakat	3.275.000.000	,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	03	2.01		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	40 Lembaga	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	Masyarakat	300.000.000	,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah yang - memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	90 Persen	77.427.500.000,00					- 57.500.000.000	,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah dengan Akses Unit Pengolahan Setempat / Terpusat	1685 Rumah	77.427.500.000,00	-	- Masyarakat -	57.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	05	2.01	0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit	600.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat	600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	111 Rumah Tangga	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Masyarakat	250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	05	2.01	0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	20 M³/Hari	11.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat	11.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	150 Orang	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat	350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	05	2.01	0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesusi SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	1685 Rumah Tangga	63.727.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat	45.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	05	2.01	0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	17 Dokumen	1.700.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		173.620.185.757,00			445.312.634.342,00	DINAS PERUMAHAN DAI KAWASAN PERMUKIMAI
9 1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 Persen	32.882.935.757,00		-	44.608.509.342,00	
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, - Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	475.000.000,00	-	- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	575.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMA
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	150.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	75.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	116 Data	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi - Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	21.796.331.853,00	-	- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	20.901.952.728,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



1	04	01 2.	00	D1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	2114	21.371.331.853,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Dinas Perumahan dan	20.451.952.728,00	DINAS PERUMAHAN DAN
					dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					Kawasan Permukiman		KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01 2.	00	Noordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	50.000.000,00		DANA BAGI HASIL (DBH)		Dinas Perumahan dan	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				SKPD	Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan						Kawasan Permukiman		KAWASAN PERIVIORIIVIAI
					Keuangan Akhir Tahun SKPD								
1	04 (01 2.	02 00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	6 Dokumen	25.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Pemeriksaan								
1	04	01 2.	00	77 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	12 Laporan	350.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAI
				Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan						Kawasan Ferniukinan		KAWASAN FERIVIORIIVIAI
					Laporan Keuangan								
					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
1	04 (01 2.	03	Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Layanan Administrasi -	100 Persen	80.000.000,00				Dinas Perumahan dan -	250.000.000.00	DINAS PERUMAHAN DA
		_ _		pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) pada						Kawasan Permukiman		KAWASAN PERMUKIMA
					Perangkat Daerah								
1	04 (01 2.	00	O3 Koordinasi dan Penilaian Barang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian	1 Laporan	30.000.000,00		DANA BAGI HASIL (DBH)		Dinas Perumahan dan	50.000.000,00	
				Milik Daerah SKPD	Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Kawasan Permukiman		KAWASAN PERMUKIMA
					Daerah SKPD			Sellida Kely Desa					
1	04 (01 2.	00	D5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	1 Laporan	50.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)		Dinas Perumahan dan	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAI
				SKPD	Daerah pada SKPD						Kawasan Permukiman		KAWASAN PERINUKINAI
1	04	01 2.	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi - Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	150.000.000,00			Ē	Dinas Perumahan dan - Kawasan Permukiman	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMA
				Perangkat Daeran							Kawasan Permukiman		
1	04	01 2.	05 00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	1 Dokumen	25.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAI
				Auministrasi kepegawaian	Kepegawaian						Kawasan Permukiman		KAWASAN PERIVIONIMA
1	04 (01 2.	05 00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian		1 Dokumen	25.000.000,00	=	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Dinas Perumahan dan	50.000.000,00	
				Kinerja Pegawai	Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						Kawasan Permukiman		KAWASAN PERMUKIMAN
1	04 (01 2.	05 00	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	15 Orang	100.000.000,00		DANA BAGI HASIL (DBH)		Dinas Perumahan dan	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN
				Berdasarkan Tugas dan Fungsi	dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Kawasan Permukiman		KAWASAN PERMUKIMAI
1	24		200			100 Persen	975.000.000,00					4 475 000 000 00	DINAS PERUMAHAN DA
1	04	01 2.	U6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi - Umum Perangkat Daerah	100 Persen	975.000.000,00			-	Dinas Perumahan dan - Kawasan Permukiman	4.175.000.000,00	KAWASAN PERMUKIMA
1	04 4	11 2	ne no	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lumiah Daliat Dahan Lagistik Kantar	1 Paket	200.000.000,00		DANA BAGI HASIL (DBH)		Dines Perumekan dan	350,000,000,00	DINAS PERUMAHAN DAN
1	04	J1 2.	001	14 Penyedidan Banan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	250.000.000,00	KAWASAN PERMUKIMA
	04 (01 2.	00	Denvedieen Bereng Catalian den	Lumlah Daliat Dayang Catalian dan	1 Paket	200.000.000,00		DANA BAGI HASIL (DBH)		Dinas Perumahan dan	500,000,000,00	DINAS PERUMAHAN DAI
1 1	04	J1 2.	06 00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)		Kawasan Permukiman	500.000.000,00	KAWASAN PERMUKIMA
1	04	01 2.	06 00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	1 Dokumen	75.000.000,00	<u> </u>	DANA BAGI HASIL (DBH)		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAI KAWASAN PERMUKIMA
oxdot					Undangan yang Disediakan			ļ					
1 1	04 (01 2.	06 00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	125 Laporan	350.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAI KAWASAN PERMUKIMA
		- 1			SKPD			ļ	ļ				
					Jumlah Dokumen Penatausahaan	250 Dokumen	150.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMA
1	04 (01 2.	06 00:	10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Arsip Dinamis pada SKPD			İ					
				SKPD	Arsip Dinamis pada SKPD								
		01 2.		SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah	Arsip Dinamis pada SKPD Barang Milik Daerah (BMD) -	7 Unit	1.800.000.000,00			-	Dinas Perumahan dan - Kawasan Permukiman	2.050.000.000,00	
1	04 (01 2.	07	SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Arsip Dinamis pada SKPD Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan					-	Kawasan Permukiman		KAWASAN PERMUKIMA
1	04 (01 2.		SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 22 Pengadaan Kendaraan Dinas	Arsip Dinamis pada SKPD Barang Milik Daerah (BMD) - Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas	7 Unit			DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan		KAWASAN PERMUKIMA DINAS PERUMAHAN DAI
1	04 (01 2.	07	SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Arsip Dinamis pada SKPD Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Kawasan Permukiman		KAWASAN PERMUKIM DINAS PERUMAHAN DA
1	04 (01 2.0 01 2.0	07 00	SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 22 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Arsip Dinamis pada SKPD Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.500.000.000,00	Semua Kecamatan,		-	Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.850.000.000,00	MAWASAN PERMUKIMA DINAS PERUMAHAN DAI KAWASAN PERMUKIMA
1	04 (01 2.0 01 2.0	07 00	SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 22 Pengadaan Kendaraan Dinas	Arsip Dinamis pada SKPD Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan Jumlah Unik Rendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang			Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)		Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan	1.850.000.000,00	KAWASAN PERMUKIMA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMA DINAS PERUMAHAN DAN
1 1 1	04 (01 2.0 01 2.0	07 000 07 000	SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Peralatan dan Mesin	Arsip Dinamis pada SKPD Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.500.000.000,00	Semua Kecamatan,			Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan	1.850.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAI DINAS PERUMAHAN DAN



1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.500.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.826.137.080,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.006.603.904,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.280.419.534,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		113 Unit	3.100.000,000		- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit	1.900.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.900.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.09	0006		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	100.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.000.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
100 1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan penyediaan rumah layak - huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	100 Persen	43.201.000.000,00		-	49.991.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	15 Dokumen	1.850.000.000,00		- Masyarakat -	3.050.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	6 Dokumen	500.000.000,000 Kab. Kutai Kartaneg Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ara, DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat	450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartaneg Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ara, DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat	250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartaneg Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ara, DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	500.000.000,00 Kab. Kutai Kartaneg Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ara, DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyrakat	1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartaneg Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ara, DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat	500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartaneg Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ara, DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	3 Dokumen	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartaneg Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ara, DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat	400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartaneg Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ara, DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan - Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Sosialisai	50.000.000,00	-	- Masyarakat -	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



1	04	02	2.02	0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Masyarakat	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten yang dibangun/rehab	128 Unit	41.201.000.000,00		-	- Masyarakat	- 46.541.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5 Unit Rumah	275.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat	275.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	25 Unit Rumah	6.250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat	6.250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.03	0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	94 Unit Rumah	5.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat	10.340.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.03	0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	12 Rumah Tangga	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	98 Unit Rumah	29.576.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat	29.576.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah koordinasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan yang dilaksanakan	1 Koordinasi	100.000.000,00		-		- 300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman - kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	53,67 Persen	4.875.000.000,00				- 7.300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan	1 Dokumen	600.000.000,00		-	- Masyarakat	- 650.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.02	8000	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat	250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	1 Kelompok Masyarakat	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat	250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Area -	1 Hektar (Ha)	4.275.000.000,00		-	- Masyarakat	- 6.650.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.03		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 Unit Rumah	1.250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat	1.250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	04	4 03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan	1 Laporan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Permukiman Kumuh	Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh						
1	04	4 03	2.03	0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan	10 Unit	1.350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat	2.650.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			Semua Kel/Desa				
1	04	4 03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan	Luas Permukiman Kumuh yang	1 Ha	1.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat	2.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN
					Permukiman Kumuh	Dipugar		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				KAWASAN PERMUKIMAN
102 1	04	4 04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani	6,1 Persen	40.300.000.000,00		-	33.600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	4 04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada	Jumlah rumah yang direnovasi -	3800 Rumah	40.300.000.000,00	-	- Masyarakat -	33.600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	4 04	2.01	0001	Daerah Kabupaten/Kota Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	350 Unit Rumah	35.850.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat	29,000,000,000,00	DINAS PERUMAHAN DAN
					untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh)	untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh)		Semua Kel/Desa				KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	4 04	2.01	0004	Ha Pembangunan Rumah Baru Layak	Ha yang Diperbaiki Jumlah Rumah Baru Layak Huni	30 Unit	4.250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH) -	- Masyarakat	4.250,000,000,00	DINAS PERUMAHAN DAN
					Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh		Semua Kel/Desa				KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	4 04	2.01	0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	150 Orang	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	4 04	2.01	0009	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	150 Orang	100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
103 1	04	4 05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	4,11 Persen	52.286.250.000,00		-	309.063.125.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	4 05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU	Jumlah perumahan yang -	19.68 Persen	52.286.250.000,00	-	- Masyarakat -	309.063.125.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN
1	04	4 05	2.01	0001	Perumahan Perencanaan Penyediaan PSU	terfasilitasi PSU Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	1.050.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH) -	- Masyarakat	1.200.000.000,00	DINAS PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN DAN
					Perumahan	Penyediaan PSU Perumahan		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	4 05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	4 05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	6 Laporan	200.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	4 05	2.01	0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	122 Lokasi	50.936.250.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat	307.563.125.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
104 1	04	4 06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase individu dan badan hukum yang telah tersertifikasi dan terregistrasi secara resmi	100 Persen	75.000.000,00			750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



						1					1		
1	04	1 06	2.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi -		1 Koordinasi	75.000.000,00		- - -	- 750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN
					Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan	Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan							KAWASAN PERMUKIMAN
					Perencanaan Rumah serta	dengan Kualifikasi Kecil							
					Perencanaan Prasarana, Sarana	dengan kuamikasi kecii							
					dan Utilitas Umum PSU Tingkat								
					Kemampuan Kecil								
1	. 04	1 06	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi		4 Laporan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN
					Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi	dan Sinkronisasi Penerbitan			Semua Kecamatan,				KAWASAN PERMUKIMAN
					Pengembang Perumahan dengan	Sertifikasi dan Registrasi			Semua Kel/Desa				
					Kualifikasi Kecil	Pengembang Perumahan dengan							
	_					Kualifikasi Kecil							
					Satuan Polisi Pamong Praja				39.679.659.345,00			27.938.063.427,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	_	+			LIRLISAN PEMERINTAHAN WALIR YA	ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DA	ISAR .		39.679.659.345,00			27 938 063 427 00	SATUAN POLISI PAMONG
-									35107 5103515-15,000			27.550.663.427,56	PRAJA
1	05	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUN	A SERTA PERLINDUNGAN MASYAI	RAKAT	39.679.659.345,00			27.938.063.427,00	SATUAN POLISI PAMONG
									·				PRAJA
105 1	05	01				Nilai SAKIP Perangkat Daerah -		82 Nilai	36.836.573.345,00			- 26.679.070.027,00	SATUAN POLISI PAMONG
					PEMERINTAHAN DAERAH								PRAJA
					KABUPATEN/KOTA								
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen rencana,		26 Dokumen	500.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola -	- 224.711.158,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah					pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		PKAJA
						perangkat daeran					untuk mendukung		
											transformasi pelayanan		
											publik		
											1. Penataan dan		
											Pengembangan Tata Kelola		
											Pemerintahan dan Pelayanan		
											Publik		
1	. 05	5 01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan		6 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG
					Perangkat Daerah	Perangkat Daerah			Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang		PRAJA
											profesional dan akuntabel		
											untuk mendukung transformasi pelayanan		
											publik		
											1. Penataan dan		
											Pengembangan Tata Kelola		
											Pemerintahan dan Pelayanan		
											Publik		
1	. 05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja		12 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG
					Laporan Capaian Kinerja dan	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang		PRAJA
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi					profesional dan akuntabel		
						Penyusunan Laporan Capaian					untuk mendukung		
						Kinerja dan Ikhtisar Realisasi					transformasi pelayanan		
						Kinerja SKPD					publik 1. Penataan dan		
											Pengembangan Tata Kelola		
											Pemerintahan dan Pelayanan		
											Publik		
1	. 05	5 01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja		1 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG
				l		Perangkat Daerah			Tenggarong, Timbau] ' '	pemerintahan daerah yang		PRAJA
				l	1						profesional dan akuntabel		
									1		untuk mendukung		
											transformasi pelayanan		
											publik		
											1. Penataan dan		
											Pengembangan Tata Kelola		
											Pemerintahan dan Pelayanan Puhlik		
1	. 05	5 01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data	Jumlah Data Statistik Sektoral		31 Data	200.000.000,00 Semua Kota/Kab,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	74 711 152 00	SATUAN POLISI PAMONG
1		. 01	2.01	0000	Statistik Sektoral Daerah	Daerah yang Telah Dikumpulkan		31 Data	Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang	74.711.138,00	PRAJA
				l	l de la constant	dan Diperiksa Lingkup Perangkat			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		1
				l	1	Daerah			Serial Key Sesa		untuk mendukung		
				l	1						transformasi pelayanan		
				l	1						publik		
				l	1						1. Penataan dan		
			i	ı	i	1	1	1 1			Pengembangan Tata Kelola		
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik		



1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	17 Laporan	27.375.581.153,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	- 17.340.857.569,00 SATUAN POL PRAJA	LISI PAMONG
	05		202	0001			4488	26.875.581.153,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DAMA DAGUAGU (DDI)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	16.969,051,969,00 SATUAN POLI	USUDAMONS
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumian Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4488 Orang/bulan	26.8/5.581.155,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	16.969.051.969,00 SATUAN POLI PRAJA	ISI PAMONG
		01			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	21.805.600,00 SATUAN POLI PRAJA	
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pemerintahan dan Pelayanan Publik	350.000.000,000 SATUAN POLI	Lisi Pamong
		01			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	25.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- 25.000.000,00 SATUAN POL	
1	05	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	25.000.000,00 SATUAN POLI PRAJA	ISI PAMONG
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi - Kepegawaian	12 Dokumen	219.580.000,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- 1.069.830.000,00 SATUAN POL	LISI PAMONG



Part Part	1	. 05	5 01	2.05	0003		Pengolahan Administrasi	10 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	19.580.000,	OO SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0											transformasi pelayanan publik		
Forgroup Trains of Target on Target											Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		
Personal for the process of the support of the supp	1	. 05	01	2.05	0009			25 Orang		DANA BAGI HASIL (DBH)		50.000.000,	00 SATUAN POLISI PAMONG
Part Part						Berdasarkan Tugas dan Fungsi	dan Fungsi yang Mengikuti		Tenggarong, Timbau				PRAJA
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							Pendidikan dan Pelatihan						
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2													
Part											publik		
Secondaries of infrastructures Secondaries Secondaries													
1 St. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2													
1 00 20 20													
Undergran Undergran	1	. 05	5 01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-	Jumlah Orang yang Mengikuti	50 Orang	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		25.000.000,	00 SATUAN POLISI PAMONG
United and programme programme in the contract of the contract						Undangan			Tenggarong, Timbau				PRAJA
Section Sect							Undangan						
I. Prostant des Programmes de la Section de Programmes de la Section de Programmes de la Section de Programmes de la Section de Programmes de la Section de Programmes de la Section de													
Programming Table School Programming Table S													
November November November November November National Control National Cont													
1 5 01 2.5 02 2.5 03 2.5 04 05 03 2.5 04 05 04 05 04 05 05 0													
Description Description													
gradiente de aleunabels until mendalung service de aleunabels until mendalung service de la selunabel until mendalung service de la selunabel until mendalung service de la selunabel until mendalung service de la selunabel until mendalung service de la selunabel until mendalung service de la selunabel until mendalung service de la selunabel until mendalung service de la selunabel until mendalung de la selunabel	1	. 05	01	2.06				6 layanan	1.055.000.000,00			- 313.576.500,	,00 SATUAN POLISI PAMONG
usurd ammondationing transformation playerame publish representation of Policy Transformation of						Daerah	Umum Perangkat Daerah						PRAJA
Transformace polysymane polysis product in the policy policy in the policy policy in the policy policy in the policy policy in the policy policy in the policy policy in the policy policy in the policy policy in the policy policy in the policy policy in the policy policy policy in the policy policy policy in the policy poli													
International Properties and Exemption International Properties and Exempt											transformasi pelayanan		
Programmen Pro													
Part 15,000,000 Perpedian Perlatan dan Perlampianan Part Perlatan dan Perlampianan Raham Perlampianan													
The content of the											Pemerintahan dan Pelayanan		
Perfengispan Kantor Description and an Authority and Description and an Authority and professional data Authority and professional data Authority and professional data Authority and professional data Authority and professional data Authority and Pergentination and an Authority and Pergentination a	1	01	- 01	2.00	0002	Denuediaan Develoten dan	Lumlah Dakat Davalatan dan	1 Daleat	13F 000 000 00 Kah Kutai Kartanagara	DANA DACILIACII (DDII)		90,000,000	OO CATUAN POUG PANAONG
Divediskan Pergertain publik Divediskan Divediskan Divediskan Divediskan Pergertain publik Divediskan Divediskan Divediskan Divediskan Pergertain publik Divediskan Divediskan Divediskan Divediskan Divediskan Divediskan Divediskan Divertification dam akuntabel untwik merduskua petratoria derah yang pergertain derah yang pergertain derah yang publik Divediskan Divertification dam akuntabel untwik merduskuang transformasi pelayanan publik Divertification dam akuntabel untwik merduskuang transformasi pelayanan publik Divertification dam akuntabel untwik merduskuang transformasi pelayanan publik Divertification dam akuntabel untwik merduskuang transformasi pelayanan publik Divertification dam akuntabel untwik merduskuang transformasi pelayanan publik Divertification dam akuntabel untwik merduskuang transformasi pelayanan publik Divertification dam akuntabel untwik merduskuang transformasi pelayanan publik Divertification dam akuntabel untwik merduskuang transformasi pelayanan publik Divertification dam akuntabel untwik merduskuang transformasi pelayanan publik Divertification dam akuntabel untwik merduskuang transformasi pelayanan publik Divertification dam akuntabel untwik merduskuang transformasi pelayanan publik Divertification dam akuntabel untwik merduskuang transformasi pelayanan publik Divertification dam akuntabel untwik merduskuang transformasi pelayanan publik Divertification dam akuntabel untwik merduskuang transformasi pelayanan publik Divertification dam akuntabel untwik merduskuang transformasi pelayanan publik Divertification dam akuntabel untwik merduskuang transformasi pelayanan publik Divertificat	1 1		01	2.00	0002	Perlengkapan Kantor		1 Faket		DANA BAGITIASIL (DBII)		80.000.000)	PRAJA
transformasi pelayanan publik 1. Penatanan dan Pengemhangan Tata Kelola Pengemhangan Tata Kelola Pengemhangan Tata Kelola Pengemintahan dan Pelayanan Publik 1. Pengemhangan Tata Kelola Pengemintahan dan Pelayanan Publik 1. Pengembatan tata Kelola Pengemintahan dan Pelayanan Publik 1. Penatanan dan Pengemhangan Tata Kelola Pengemintahan dan Pelayanan Publik 1. Penatanan dan Pengemhangan Tata Kelola Pengemintahan dan Pelayanan Publik 1. Pengandaan Penggandaan													
publik 1. Penatana dan Pengembangan Tas Kelola Pengerintahan dan Pelayanan Penganong, Timbau 1. OS 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Vang Disediakan 1. OS 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Vang Disediakan 1. OAAB AGGI HASIL (0BH) - Pennigatan tata kelola Pendintahan denah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penggandaan 2. Paleet 2.0.000.000,00 Xab, Kutal Kartanegara, Tenggarong, Timbau 3. Pengerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Penggandaan Penggandaan													
1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor vang Disediakan Pelaket Bahan Logistik Kantor vang Disediakan Pelaket Bahan Logistik Kantor vang Disediakan Pelaket S50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Penggarong, Timb													
Pemerintand and Pelayanan Publik 1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor vang Disediakan 1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor vang Disediakan 1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor vang Disediakan 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Pelayanan Publik 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, PRAL Penggandaan 2 Paket 20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, PRAL Penggandaan 2 Paket 20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, PRAL Penggandaan 2 Paket 20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, PRAL Penggandaan 2 Paket 20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, PRAL Penggandaan 3 Penggandaan 4 4.600.000,00 SATU PRAL PENGGANAN PRAL PENGGANAN													
1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan													
PRAI Tenggarong, Timbau Prescional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Penggandaan													
profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1 o 0 1 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Penggandaan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tata Kelola Pemerintahan darah yang Penggandaan yang Disediakan 3 Penggandaan Peng	1	. 05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		6 Paket		DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	44.600.000,	00 SATUAN POLISI PAMONG
untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penggandaan yang Disediakan Penggandaan yang Disediakan Penggandaan publik 1. Penataan dan Penggandaan publik 1. Penataan dan Penggandaan publik 1. Penataan dan Penggandaan publik 1. Penataan dan Penggandaan publik 1. Penataan dan Penggandaan publik 1. Penataan dan Penggandaan publik 1. Penataan dan Penggandaan publik 1. Penataan dan Penggandaan Penggandaan publik 1. Penataan dan Penggandaan Penggandaan publik 1. Penataan dan Penggandaan Penggandaan Penggandaan publik 1. Penataan dan Penggandaan Penggandaan publik 1. Penataan dan Penggandaan Penggandaan publik 1. Penataan dan Penggandaan Penggandaan publik 1. Penataan dan Penggandaan Tata Kelola							yang Disediakan		Tenggarong, Timbau				PRAJA
transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola													
publik 1. Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Penggandaan Publik 1. Pengembangan Tata Kelola Penggandaan Publik 1. Penggandaan Publik 1. Penggandaan Publik 1. Penggandaan Publik 1. Penggandaan Profesional dan akuntabel untus formasi pelayanan publik 1. Pengandaan Profesional dan akuntabel untus formasi pelayanan publik 1. Pengandaan Profesional dan akuntabel untus formasi pelayanan publik 1. Pengandaan adan Profesional dan akuntabel untus formasi pelayanan publik 1. Pengandaan adan Profesional dan akuntabel untus formasi pelayanan publik 1. Pengandaan adan Profesional dan akuntabel untus formasi pelayanan publik 1. Pengandaan adan Profesional dan akuntabel untus formasi pelayanan publik 1. Pengandaan adan Profesional dan akuntabel untus formasi pelayanan publik 1. Pengandaan adan Profesional dan akuntabel untus formasi pelayanan publik 1. Pengandaan adan Profesional dan akuntabel untus formasi pelayanan publik 1. Pengandaan adan Profesional dan akuntabel untus formasi pelayanan publik 1. Pengandaan adan Profesional dan akuntabel untus formasi pelayanan publik 1. Pengandaan adan Profesional dan akuntabel untus formasi pelayanan publik 1. Pengandaan adan Profesional dan akuntabel untus formasi pelayanan publik 1. Pengandaan adan Profesional dan akuntabel untus formasi pelayanan publik 1. Pengandaan adan Profesional dan akuntabel untus formasi pelayanan publik 1. Pengandaan adan Profesional dan akuntabel untus formasi pelayanan publik 1. Pengandaan adan Profesional dan akuntabel untus formasi pelayanan publik 1. Pengandaan adan Profesional dan akuntabel untus formasi pelayanan publik 1. Pengandaan adan													
Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola											publik		
Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penggan													
Publik 1 05 01 2.06 000 Penggandaan Parang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, DANA BAGI HASIL (DBH) Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, DANA BAGI HASIL (DBH) Penggandaan yang Disediakan 4 Publik 7 Pengiandaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Publik 8 Publik Penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Publik Pengiandaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6.031.500,00 SATU PRALI Pengarong, Timbau 1 Publik Penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Publik Penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Publik Pengandaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penggandaan yang Disediakan Penggandaan yang Disediakan Penggandaan yang Disediakan Penggandaan yang Disediakan Penggandaan yang Disediakan Penggandaan yang Disediakan Penggandaan yang Disediakan Penggandaan yang Disediakan Penggandaan yang Disediakan Penggandaan yang Disediakan Penggandaan yang Disediakan Penggandaan yang Disediakan Penggandaan yang Disediakan Penggandaan yang Disediakan Penggandaan yang Disediakan Penggandaan yang Disediakan Penggandaan yang Disediakan				1									
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Tenggarong, Timbau pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Pengembangan Tata Kelola											Publik		
profesional dan akuntabel untus formasi pelayanan publik 1. Pengentaan dan Pengembangan Tata Kelola	1	. 05	01	2.06	0005			2 Paket		DANA BAGI HASIL (DBH)		6.031.500	,00 SATUAN POLISI PAMONG
untuk mendukung transformasi pelayanan pulik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola				1		renggandaan	Penggandaan yang Disediakan		Tenggarong, Timbau				PRAJA
publik 1. Pengentaan dan Pengembangan Tata Kelola													
1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola				1									
Pengembangan Tata Kelola				1									
				1									
											Pemerintahan dan Pelayanan		
Publik				<u> </u>	<u> </u>						Publik		

1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan		12 Laporan	300.000.000,00 Semua Kota/Kab,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -		65.465.000,00 SA	TUAN POLISI PAMONG
					dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		PR	AJA.
						SKPD			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
						514 5			Serial Key Sesa		untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											nublik			
											P			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada	lumlah Dokumen Penatausahaan		3 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -		117.480.000.00 SA	TUAN POLISI PAMONG
-					SKPD	Arsip Dinamis pada SKPD			Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang			AJA
					SKI B	Arsip biriarriis pada Ski b			Tenggarong, Timbau		profesional dan akuntabel		113	
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang	-	100 persen	100.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola -	i-	100.000.000.00 SA	ATUAN POLISI PAMONG
1 -	1	1 1			Penunjang Urusan Pemerintah	Milik Daerah			1		pemerintahan daerah yang			RAJA
	1	1)	Į		Daerah	Sociali		1	1		profesional dan akuntabel	1 1	l _{LV}	
	1	1)	Į		Daciali	1		1	1		untuk mendukung	1 1	I	
	1	1)	Į			1		1	1			1 1	I	
	1	1 1				1		1	1		transformasi pelayanan		1	
	1					1		1			publik		1	
	1	1)	Į			1		1	1		1. Penataan dan	1 1	I	
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin		6 Unit	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -		100.000.000.00 SA	TUAN POLISI PAMONG
-					Lainnya	Lainnya yang Disediakan			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			RAJA
					cannya	cuming your Discondition			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
									Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
									Tenggarong, Timbau		transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa	-	12 Bulan	5.861.412.192,00		- 7. Peningkatan tata kelola -	_		ATUAN POLISI PAMONG
					Pemerintahan Daerah								7.152.685.800,00 SA	
						Penunjang Urusan Pemerintahan			5,0021-121152,00					RAJA
					Pemerintahan Daeran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan			5105211222500		pemerintahan daerah yang			RAJA
					Pemerintahan Daeran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan			3.602.712.132.300		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			RAJA
					rememitahan Daeran				3,03.1.2.2.2.00		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung			RAJA
					Pemerintanan Daeran				3.663.121.25,60		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan			RAJA
					Pemerintahan Daerah				3553.7.1.1.1.2.5.0		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik			RAJA
					Permerintahan Daeran				3553.7.1.1.1.2.00		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			RAJA
					Pemerintahan Daeran				3553.7.1.2.2.50		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			AJA
					Pemerintanan Daeran				3553.7.1.2.2.50		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			IAJA
						Daerah yang Disediakan					pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		PR	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Daerah yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		1 Laporan	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		PR	ITUAN POLISI PAMONG
1	05	01	2.08	0001		Daerah yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		1 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		4.015.000,00 SA	
1	05	01	2.08	0001		Daerah yang Disediakan		1 Laporan	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang		4.015.000,00 SA	NTUAN POLISI PAMONG
1	05	01	2.08	0001		Daerah yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		1 Laporan	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		4.015.000,00 SA	NTUAN POLISI PAMONG
1	05	01	2.08	0001		Daerah yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		1 Laporan	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		4.015.000,00 SA	NTUAN POLISI PAMONG
1	05	01	2.08	0001		Daerah yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		1 Laporan	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		4.015.000,00 SA	NTUAN POLISI PAMONG
1	05	01	2.08	0001		Daerah yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		1 Laporan	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		4.015.000,00 SA	NTUAN POLISI PAMONG
1	05	01	2.08	0001		Daerah yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		1 Laporan	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		4.015.000,00 SA	NTUAN POLISI PAMONG
1	05	01	2.08	0001		Daerah yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		1 Laporan	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola		4.015.000,00 SA	NTUAN POLISI PAMONG
1	05	01	2.08	0001		Daerah yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		1 Laporan	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		4.015.000,00 SA	NTUAN POLISI PAMONG
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Daerah yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		4.015.000,00 SA' PR.	ITUAN POLISI PAMONG IAIA
		01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,	Daerah yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		1 Laporan	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 2. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Peningkatan tata kelola		4.015.000,00 SA'PR	NTUAN POLISI PAMONG TAJA
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan			20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daen Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		4.015.000,00 SA'PR	ITUAN POLISI PAMONG IAIA
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,	Daerah yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa			20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 2. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Peningkatan tata kelola		4.015.000,00 SA'PR	NTUAN POLISI PAMONG TAJA
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan			20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel		4.015.000,00 SA'PR	NTUAN POLISI PAMONG TAJA
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan			20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik		4.015.000,00 SA'PR	NTUAN POLISI PAMONG TAJA
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan			20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		4.015.000,00 SA'PR	NTUAN POLISI PAMONG TAJA
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan			20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		4.015.000,00 SA'PR	NTUAN POLISI PAMONG TAJA
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan			20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 2. Penataan dan Pelayanan publik 3. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 4. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 5. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 5. Penataan dan Pelayanan publik 6. Penataan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Penataan dan		4.015.000,00 SA'PR	NTUAN POLISI PAMONG TAJA
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan			20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola		4.015.000,00 SA'PR	NTUAN POLISI PAMONG TAJA
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan			20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 2. Penataan dan Pelayanan publik 3. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 4. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 5. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 5. Penataan dan Pelayanan publik 6. Penataan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Penataan dan		4.015.000,00 SA'PR	NTUAN POLISI PAMONG TAJA

1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	69.440.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG
					Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang			PRAJA
						yang Disediakan					profesional dan akuntabel		'	
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan		'	
											publik 1. Penataan dan		'	
											Pengembangan Tata Kelola		'	
											Pemerintahan dan Pelayanan		'	
											Publik		'	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	5.621.972.192,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	7.023.670.800,00	SATUAN POLISI PAMONG
					Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang			Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang		'	PRAJA
						Disediakan					profesional dan akuntabel		'	
											untuk mendukung		'	
											transformasi pelayanan publik		'	
											1. Penataan dan		'	
											Pengembangan Tata Kelola		'	
											Pemerintahan dan Pelayanan		'	
											Publik			
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah -		85 unit	1.700.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	-	- 452.409.000,00	SATUAN POLISI PAMONG
					Penunjang Urusan Pemerintahan						pemerintahan daerah yang		'	PRAJA
					Daerah						profesional dan akuntabel		'	
											untuk mendukung transformasi pelayanan		'	
											nublik		'	
											1. Penataan dan		'	
											Pengembangan Tata Kelola		'	
											Pemerintahan dan Pelayanan		'	
L .											Publik			
1 1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas		84 Unit	1.170.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola	=	354.355.000,00	SATUAN POLISI PAMONG
					Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak			Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		'	PRAJA
					Operasional atau Lapangan	dan Perizinannya					untuk mendukung		'	
					Character and arbangen						transformasi pelayanan		'	
											publik		'	
											1. Penataan dan		'	
											Pengembangan Tata Kelola		'	
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik		'	
1	05	01	2.00	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang		1 Unit	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DRH)	- 7. Peningkatan tata kelola	_	20,000,000,00	SATUAN POLISI PAMONG
	03	01	2.03	0000	Terremaraan 7 isee rak serwajaa	Dipelihara		2 01110	Tenggarong, Timbau	DATE (DDIT)	pemerintahan daerah yang		25.555.555,55	PRAJA
						· ·					profesional dan akuntabel		'	
											untuk mendukung		'	
											transformasi pelayanan		'	
											publik 1. Penataan dan		'	
											Pengembangan Tata Kelola		'	
											Pemerintahan dan Pelayanan		'	
											Publik		'	
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan		1 Unit	500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	78.054.000,00	SATUAN POLISI PAMONG
		1 1		l	Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang			Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang]		PRAJA
		1 1				Dipelihara/Direhabilitasi					profesional dan akuntabel	j J	<u> </u>	Ì
		1 1									untuk mendukung transformasi pelayanan	j J	<u> </u>	Ì
											publik		,	1
											1. Penataan dan		'	1
											Pengembangan Tata Kelola		'	1
											Pemerintahan dan Pelayanan		'	1
105	-	1_1									Publik			
106 1	05	02		l	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase Penanganan Gangguan - K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan		100 persen	2.843.086.000,00]	1.258.993.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1 1		l	UMUM	Keindahan)]		I NAVA
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan	jumlah penurunan angka -		800 kasus	1.993.086.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	Meningkatnya	- 778.703.500,00	SATUAN POLISI PAMONG
		1 1		l	Ketenteraman dan Ketertiban	penanganan gangguan trantibum					pemerintahan daerah yang	kesadaran hukum		PRAJA
		1		l	Umum dalam 1 (Satu) Daerah						profesional dan akuntabel	masyarakat terhadap		1
					Kabupaten/Kota						untuk mendukung	produk hukum daerah	'	1
			J				1 1	1	1		transformasi pelayanan	1	1	1
									l l		LIII.	!		
											publik		ı	
											1. Penataan dan			



1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kesadaran hukum masyaraka terhadap produk hukum daerah		ITUAN POLISI PAMONG KAJA
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	382.694.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah		ITUAN POLISI PAMONG IAJA
1	05	02	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	21 Orang	500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	PR.	ITUAN POLISI PAMONG IAJA
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	800.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah		ITUAN POLISI PAMONG KAJA
1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kesadaran hukum masyaraka terhadap produk hukum daerah		ITUAN POLISI PAMONG KAJA
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	10.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kesadaran hukum masyaraka terhadap produk hukum daerah		ITUAN POLISI PAMONG KAJA
1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	24 Unit	150.392.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah		ITUAN POLISI PAMONG IAJA

					1		, .					,		•
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah perda yang ditegakkan -		2 perda	700.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya - kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	420.289.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		25 Laporan	150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	97.767.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP		240 Laporan	350.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kezamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	202.522.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		240 Laporan	200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kezamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	120,000,000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina		1 orang	150.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya - kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda		4 Laporan	150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kezamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Publik	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Badan Penanggulangan Bencana Da			·	24.447.757.748,00					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1						ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASA			24.447.757.748,00					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	05					KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM S	erta Perlindungan Masyarai		24.447.757.748,00					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
107 1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -		75 Nilai	20.282.757.748,00				19.184.000.875,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



1	05	01	2.01	1	Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan -	5 Dokumen	700.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan	7. Peningkatan tata kelola	Aparatur Badan	950 000 000 00	BADAN PENANGGULANGAN
	US	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, can Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	5 Dokumen	700.000.000,00			weianjurkan inurisas dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	- 990,000,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7-Deningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	11.696.450.293,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	- 8.596.284.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	735 Orang/bulan	11.256.450.293,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.070.284.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	360.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	360.000.000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



1	05	5 (2.02	2 00		enyusunan Pelaporan dan Analisis rognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		4 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGA BENCANA DAERAH
												untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
1	05	5 (1 2.03	3		dministrasi Barang Millik Daerah ada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		1500 Unit	275.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	- 275.000.000,00	BADAN PENANGGULANG BENCANA DAERAH
1	05	5 (2.03	3 00	K	enyusunan Perencanaan ebutuhan Barang Milik Daerah (PD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Millik Daerah SKPD		1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.000.000,00	BADAN PENANGGULANG BENCANA DAERAH
1	05	5 (1 2.03	3 00		enatausahaan Barang Milik aerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANG BENCANA DAERAH
1	05	5 (1 2.09	5		dministrasi Kepegawaian erangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		5 Dokumen	280.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	- 705.000.000,00	BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH
1	05	5 (2.09	5 00		engadaan Pakaian Dinas beserta tribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		125 Paket	180.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	180.000.000,00	BADAN PENANGGULANG BENCANA DAERAH
1	05	5 (1 2.09	5 00		endidikan dan Pelatihan Pegawai erdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		7 Orang	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	300.000.000,00	BADAN PENANGGULANG BENCANA DAERAH



1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Umum Perangkat Daerah	100 Laporan	700.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	945.000.000,00	BADAN PENANGGULANGA BENCANA DAERAH
												publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	45 Paket	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50,000,000,00	BADAN PENANGGULANGA BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	120 Paket	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	110.000.000,00	BADAN PENANGGULANG/ BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGA BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	750 Paket	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANG/ BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1100 Paket	85.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	110.000.000,00	BADAN PENANGGULANG BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGA BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	300.000,000,00	BADAN PENANGGULANGA BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGA BENCANA DAERAH



1	05	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		6 01			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300 unit	3.138.807.455,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		5 01			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	1.983.807.455,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa		mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1		5 01			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	75 Unit	900.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	200 Unit	255.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	6 01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Layanan	717.500.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.212.716.475,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	7.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



					_	, -		1		1	1		, ,		. 1
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	260.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong Seberang, Perjiwa	, DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	260.000.000,0	0 BADAN PENANGGULANGA BENCANA DAERAH
												publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong Seberang, Perjiwa	, DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.945.216.475,0	D BADAN PENANGGULANGA BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Unit	2.775.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik	Aparatur Badan - Penanggulangan Bencana Daerah	- 1.750.000.000,0	0 BADAN PENANGGULANG/ BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		75 Unit	2.400.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong Seberang, Perjiwa	, DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilal tambah di dalam negeri.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.600.000.000,0	D BADAN PENANGGULANG BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		120 Unit	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong Seberang, Perjiwa	, DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilal tambah di dalam negeri.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	150.000.000,0	D BADAN PENANGGULANG BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong Seberang, Perjiwa	, DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pouningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	BADAN PENANGGULANG BENCANA DAERAH
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	-	21,1 Persen	4.165.000.000,00			TOURK	-	- 5.225.000.000,0	0 BADAN PENANGGULANG BENCANA DAERAH
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Informasi Rawan Bencana		21.11 Layanai	550.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan		- 200.000.000,0	0 BADAN PENANGGULANG BENCANA DAERAH

1	05	03	2.01		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan	500 Orang	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun			Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan			
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan - Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	50 Persen	1.300.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten - Kutai Kartanegara yang berada di daerah rawan bencana	1.950.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	275 Unit	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di daerah rawan bencana	375.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	500 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di daerah rawan bencana	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	3 Kawasan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di daerah rawan bencana	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awai darurat bencana	25 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di daerah rawan bencana	125.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	130.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di daerah rawan bencana	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	9 Kawasan	320.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di daerah rawan bencana	350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Dan Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana	100 Persen	1.485.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdampak bencana	1.800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	2 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdampak bencana	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



1	05	03	2.03		tespon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdampak bencana	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	E	Pencarian, Pertolongan dan Vakuasi Korban Bencana (abupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	7879 Orang	600.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdampak bencana	450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	p	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam benangananan keadaan darurat kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	10 Orang	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdampak bencana	300,000,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	d	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (abupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	7879 Orang	550.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdampak bencana	550,000,000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03		Respon Cepat Bencana Non Alam pidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdampak bencana	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	2 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdampak bencana	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tersediannya Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Tahun 2026	2 Dokumen	830.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten - Kutai Kartanegara	1.275.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04	P	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, PerJiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04	K	(erja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04	P	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	4 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



1	1 0	05 03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan		4 Kegiatan	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	1 0	05 03	2.04	0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana		30 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	125.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	1 0	05 03	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		2 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	1 0	05 03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (ITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		1 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	1 0	05 03	2.04	0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					Dinas Pemadam Kebakaran dan Pen	yelamatan	·		46.381.516.166,00					78.860.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YA	ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAI	1		46.381.516.166,00					78.860.000.000,00	
1	1 0)5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG N	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SI	erta Perlindungan masyarakat		46.381.516.166,00					78.860.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		05 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP organisasi -		72 Nilai	40.363.016.166,00					- 72.105.000.000,00	KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	1 0	05 01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		30 Dokumen	600.000.000,00		Memperkokoh ideologi Pancasia, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi	- 770.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	1 0.	05 01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh i deologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi	220.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi	150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi	120.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1					Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	3 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkokoh i deologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1		01			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	19 Data	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi	80,000,000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	284 Laporan	27.760.051.630,00		Memperkokoh i deologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi	- 17.820.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	27.465.051.630,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh i deologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi	17.000.000.000,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan	50 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi	7. Peningkatan tata kelola	Meningkatnya	120.000.000,00	DINAS PEMADAM
					Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi		KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
											Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Meningkatnya Transparansi dan	60.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
					Laporan Keuangan Aknir Tanun SKPD	Tanun SKPU dan Laporan Hasii Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Semua Kel/Desa		Pancasia, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	pemerntanan daeran yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi		PENYELAMATAN
1	05	01	2.02	0007		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	12 Laporan	180.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi	7. Peningkatan tata kelola	Meningkatnya	600.000.000,00	DINAS PEMADAM
					Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi		KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01			Prognosis Realisasi Anggaran	Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pancasila, demokrasi, dan hakasasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi - Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24 Dokumen	85.000.000,00		Memperkokoh i deologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi	- 120.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi	40.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi	40,000,000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



1	05	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	20 Laporan	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi	40.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
											Pemerintahan dan Pelayanan			
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	147 Dokumen	210.000.000,00		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi	- 1.285.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10 Unit	40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh i deologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas	300.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
											untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Organisasi		
1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi	60.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilalan Kinerja Pegawai	4 Dokumen	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh i deologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi	120.000.000,00	KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi	120.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	113 Laporan	600.000,000,00		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi	- 2.190.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
											Publik			
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1					Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi	750.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		01			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	55.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi	60.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi	50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi	400.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



1	05	01	2.06	8000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 L	Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas	150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
												untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Organisasi		
												Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	50 L	Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi	7. Peningkatan tata kelola	Meningkatnya	400.000.000,00	DINAS PEMADAM
					dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi		KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
												publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada	Jumlah Dokumen Penatausahaan	1 Do	okumen	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi	7. Peningkatan tata kelola	Meningkatnya	150.000.000,00	DINAS PEMADAM
				1	SKPD	Arsip Dinamis pada SKPD			Semua Kecamatan,		Pancasila, demokrasi, dan	pemerintahan daerah yang	Transparansi dan		KEBAKARAN DAN
									Semua Kel/Desa		hak asasi manusia (HAM).	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Akuntabilitas Organisasi		PENYELAMATAN
	0.5	04	200	0044	D. January D. January C. January			Dalaman.	50000000	DANA DAGULAGII (DDU)		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Markadak	450,000,000	DINAS PEMADAM
1	05	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	101	Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan	 Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang 	Meningkatnya Transparansi dan	150.000.000,00	KEBAKARAN DAN
					pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD			Semua Kel/Desa		hak asasi manusia (HAM).	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	Akuntabilitas Organisasi		PENYELAMATAN
												publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	177	' Unit	2.520.000.000,00		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi	34.470.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
												untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Organisasi		
												Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
1	05	01	2,07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	2 Ur	nit	830.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi	7. Peningkatan tata kelola	Meningkatnya	3.550.000.000,00	DINAS PEMADAM
			2.07	3302	Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Disediakan			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>5.11.1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.</i>	Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	Transparanya Transparanya Akuntabilitas Organisasi	33333000.000,00	KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
												Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
1	05	01	2.07	0006		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	5 Ur	nit	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi	7. Peningkatan tata kelola	Meningkatnya	300.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
					Lainnya	Lainnya yang Disediakan			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi		KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
												Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			



1	05	01	2.07	8000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		2 Unit	180.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas	120.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
									Served Rey Code		TORKOSOS MONIOSO (TVINI).	untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Organisasi		
												Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Gedung Kantor atau		1 Unit	1.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi	7. Peningkatan tata kelola	Meningkatnya	4.100.000.000,00	
					Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan			Muara Muntai, Kayu Batu		Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi		KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
												publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
	1											Publik			
1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau		1 Unit	500.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Meningkatnya Transparansi dan	1.500.000.000,00	dinas pemadam Kebakaran dan
					Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan			Semua Kel/Desa		hak asasi manusia (HAM).	profesional dan akuntabel	Akuntabilitas		PENYELAMATAN
												untuk mendukung transformasi pelayanan	Organisasi		
												publik			
												Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	-	60 Laporan	7.167.964.536,00		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Meningkatnya Transparansi dan	- 12.960.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
					Temerina decidi	Daerah					hak asasi manusia (HAM).	profesional dan akuntabel	Akuntabilitas		PENYELAMATAN
												untuk mendukung transformasi pelayanan	Organisasi		
												publik			
												Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	+	1 Laporan	5.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi	7. Peningkatan tata kelola	Meningkatnya	10.000.000,00	DINAS PEMADAM
						Surat Menyurat			Semua Kecamatan,		Pancasila, demokrasi, dan	pemerintahan daerah yang	Transparansi dan		KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
									Semua Kel/Desa		hak asasi manusia (HAM).	profesional dan akuntabel untuk mendukung	Akuntabilitas Organisasi		PENYELAMA IAN
												transformasi pelayanan			
												publik 1. Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
1	05	01	2.08	0002		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		48 Laporan	720.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi	7. Peningkatan tata kelola	Meningkatnya	950.000.000,00	
					Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Transparansi dan Akuntabilitas		KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
						Listrik yang Disculakan			Sema kely besa		nakasasi manasia (nawi).	untuk mendukung	Organisasi		LIVICEAWATAN
												transformasi pelayanan			
												Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	6.442.964.536,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi	7. Peningkatan tata kelola	Meningkatnya	12.000.000.000,00	
					Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Transparansi dan Akuntabilitas		KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
									Seriod Key Desd			untuk mendukung	Organisasi		
												transformasi pelayanan publik			
												1. Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
l l	1					ı	1 1		ı				·	1	



	1 0	05 01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	610 Unit	1.420.000.000,00		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1 0	05 01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh i deologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi	250.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1 0	05 01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh i deologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi	1.250.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1 0	05 01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi	70.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1 0	05 01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	660.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh i deologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi	170.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
110	1 0	05 04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		100 Persen	6.018.500.000,00					- 6.755.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1 0	05 04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	269 Dokumen	4.943.500.000,00		Memperkokoh i deologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	- 3.855.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan nuhlik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	60 Laporan	400.000.000.00 Kab. Kutai Kartanegara.	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	Meningkatkan Kualitas	450,000,000,00	DINAS PEMADAM
	03	04			reinauman uairreingenualian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	оо цароган	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Meniperkakun debugi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1			2.01		Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	70 Dokumen	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04			Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (83) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	80.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	79 Orang	675.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh i deologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	430.000.000,00	KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.01	8000	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	6 Desa/Kelurahan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh i deologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	80.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



1	05	04	2.01	001	B Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	270.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.01	001	Penyelenggaraan Jabatan	Jumlah dokumen hasil kegiatan	3 Dokumen	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	Meningkatkan Kualitas	25.000.000,00	DINAS PEMADAM
					Fungsional Analis Kebakaran	jabatan fungsional analis kebakaran		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
					5 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	5 Dokumen	37.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pancasila, demokrasi, dan hakasasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		04			Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	23 Unit	3.036.000.000,00 Kab, Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir Kab, Kutai Kartanegara, Anggana, Anggana Kab, Kutai Kartanegara, Anggana, Sidomulyo Kab, Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak, Mu Kab, Kutai Kartanegara, Muara Badak, Batu- Batu Kab, Kutai Kartanegara, Muara Badak, Batu- Batu Kab, Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab, Kutai Kartanegara, Sebulu, Selerong Kab, Kutai Kartanegara, Sebulu, Sanggulan Kab, Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Sangkuliman Kab, Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang Ulu Kab, Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Cipari Makmur Kab, Kutai Kartanegara,		Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.01	001	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	30 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh i deologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	400.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



1	05	04	2.01	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	100 Keluarga	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanggulangan	120.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
											untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kebakaran dan Penyelamatan		
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat - Data Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	22 Dokumen	145.000.000,00		Memperkokoh i deologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	- 320.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	10 Dokumen	85.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh i deologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	170.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	50.000.000,00		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	- 120.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh i deologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	120.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Pembentukan Relawan Kebakaran (Redkar)	74 Desa/Kelurahan	450.000.000,00		Memperkokoh i deologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	- 1.260.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	5800 Orang	Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	600,000,000,000	KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		04			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	20 Desa/Kelurahan	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu Kab. Kutai Kartanegara, Tengarong, Melayu Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ulu Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilii Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilii Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilii Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Senoni Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang Ulu Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Seberang Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Lebaho Ulaq Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Benua Puhun Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang,		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	160.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan - Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	350 Dokumen	430.000.000,00		Memperkokoh i deologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	- 1.200.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam	300 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh i deologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	250.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



	1	05 04	2.05	0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 Dokumen	5.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Keamatan, Semua Kel/Desa		Memperkokoh i deologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	60.000.000,00	KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		05 04			Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	3 Laporan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pancasila, demokrasi, dan hakasasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1 (05 04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	487 Unit	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	630.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	•		23.547.332.605,00	•	•	•		15.743.372.885,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			23.547.332.605,00					15.743.372.885,00	BADAN KESATUAN BANGSA
	8 (01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			23.547.332.605,00					15.743.372.885,00	
111	8 (01 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah -	90 Nilai	11.735.028.605,00					- 10.560.478.285,00	DAN POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		01 01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	400.000.000,00		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Badan Kesbangpol		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01 01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Badan Kesbangpol	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 (01 01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh i deologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Badan Kesbangpol	80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	0:	01 01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Badan Kesbangpol	150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01 01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dökumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PUDIIK 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Badan Kesbangpol	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0:	01 01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Badan Kesbangpol	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01 01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	20 laporan	8.926.686.502,00		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Badan Kesbangpol	- 8.677.912.208,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0:	01 01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	900 Orang/bulan	8.761.046.502,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Badan Kesbangpol	8.517.272.208,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	03	01 01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Badan Kesbangpol	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	03	01 01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	115.640.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Badan Kesbangpol	115.640.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	0	01 01	2.02	8000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis		1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI	Memperkokoh ideologi	7. Peningkatan tata kelola	ASN Badan Kesbangpol	25.000.000,00	
					Prognosis Realisasi Anggaran	Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)	Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			DAN POLITIK
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
8	0	01 01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	3 dokumen	115.800.000,00		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	ASN Badan Kesbangpol	115.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
											Publik			
	0				Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Badan Kesbangpol		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		01 01			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Badan Kesbangpol		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	0	01 01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Millik Daerah pada SKPD	3 Laporan	40.800.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Badan Kesbangpol	40.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	3 0	01 01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	50.000.000,00		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Badan Kesbangpol -	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	3 0	01 01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	75 Orang	50.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Badan Kesbangpol	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi - Umum Perangkat Daerah	6 layanan	790.000.000,00		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	ASN Badan Kesbangpol	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Badan Kesbangpol	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Poulik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Badan Kesbangpol	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 Paket	35.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Badan Kesbangpol	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Badan Kesbangpol	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	550.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Badan Kesbangpol	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2500 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Badan Kesbangpol	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		.00 persen	100.000.000,00		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	ASN Badan Kesbangpol	90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
												Publik			
8	000	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		8 Unit	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Badan Kesbangpol		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	3 03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		.2 bulan	932.542.103,00		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Badan Kesbangpol		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	3 01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		.2 Laporan	1.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Badan Kesbangpol	1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	3 00	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		.2 Laporan	224.084.183,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Badan Kesbangpol		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	3 03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2 Laporan	707.457.920,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Badan Kesbangpol		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	3 02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang - milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1	.00 persen	420.000.000,00		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Badan Kesbangpol		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	70.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Badan Kesbangpol	80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		01		0002	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	110.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DAERAH (PAD)	Memperkokoh i deologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Badan Kesbangpol		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Badan Kesbangpol		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Badan Kesbangpol	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
112 8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase aparatur dan - masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	2,34 Persen	5.560.000.000,00					- 650.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		02			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	12 dokumen/bulan	5.560.000.000,00		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Masyarakat, Pelajar, Kader Bela Negara, Paskibraka dan Forum Pembauran Kebangsaan		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	900 Orang	5.400.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Masyarakat, Pelajar, Kader Bela Negara, Paskibraka dan Forum Pembauran Kebangsaan	400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	160.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Masyarakat, Pelajar, Kader Bela Negara, Paskibraka dan Forum Pembauran Kebangsaan	250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



113	8	01	03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	-	14,75 Persen	4.002.304.000,00				-		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03 2	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri	-	12 dokumen/bulan	4.002.304.000,00		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Masyarakat, Pelajar dan Partai Politik	1.802.894.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03 2	2.01 000	3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politiki, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		1000 Orang	500.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh i deologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Masyarakat, Pelajar dan Partai Politik	250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03 2	2.01 000	4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		21 Orang	3.352.304.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh i deologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Masyarakat, Pelajar dan Partai Politik	1.402.894.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03 2	2.01 000		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		20 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh i deologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Masyarakat, Pelajar dan Partai Politik	150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
114	8	01	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang tertib administrasi	-	14,4 Persen	200.000.000,00				-	200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04 2	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		30 dokumen	200.000.000,00		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Organisasi - Kemasyarakatan	200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04 2	2.01 000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		200 Orang	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh i deologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Organisasi Kemasyarakatan	200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



115	8	01 05			PROGRAM PEMBINAAN DAN	Persentase aparatur dan	-	1,58 Persen	800.000.000					- 630.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA
					PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud									DAN POLITIK
					EKONOMI, SOSIAL, DAN BODATA	pernanaman ketanahan ekosossua									
	8	01 05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan	-	5	800.000.000,00		Memperkuat reformasi	7. Peningkatan tata kelola	Aparatur, Masyarakat,	- 630.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA
					Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Pembinaan Ketahanan Ekonomi,		dokumen/triwul			politik, hukum dan birokrasi,	pemerintahan daerah yang	Pelajar dan Forum		DAN POLITIK
					Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Sosial Dan Budaya		an			serta memperkuat pencegahan dan	profesional dan akuntabel untuk mendukung	Kerukunan Umat Beragama		
					budaya						pemberantasan korupsi,	transformasi pelayanan	beragama		
											narkoba, judi, dan	publik			
											penyeludupan.	1. Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
	8	01 05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti		870 Orang	600.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN ASLI	Memperkuat reformasi	7. Peningkatan tata kelola	Aparatur, Masyarakat,	500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA
					Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya				Semua Kecamatan,	DAERAH (PAD)	politik, hukum dan birokrasi,	pemerintahan daerah yang	Pelajar dan Forum		DAN POLITIK
					dan Fasilitasi Pencegahan	Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya			Semua Kel/Desa		serta memperkuat	profesional dan akuntabel	Kerukunan Umat		
					Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi					pencegahan dan pemberantasan korupsi,	untuk mendukung transformasi pelayanan	Beragama		
					Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kerukunan Umat Beragama dan					narkoba, judi, dan	publik			
						Penghayat Kepercayaan di Daerah					penyeludupan.	1. Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	8	01 05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring,		20 Laporan	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN ASLI	Memperkuat reformasi	7. Peningkatan tata kelola	Aparatur, Masyarakat,	130.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA
					dan Pelaporan di Bidang Ketahanan	Evaluasi dan Pelaporan di Bidang			Semua Kecamatan,	DAERAH (PAD)	politik, hukum dan birokrasi,	pemerintahan daerah yang	Pelajar dan Forum		DAN POLITIK
					Ekonomi, Sosial, Budaya dan	Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya			Semua Kel/Desa		serta memperkuat	profesional dan akuntabel	Kerukunan Umat		
					Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi					pencegahan dan pemberantasan korupsi,	untuk mendukung transformasi pelayanan	Beragama		
					Kerukunan Umat Beragama dan	Kerukunan Umat Beragama dan					narkoba, judi, dan	publik			
					Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penghayat Kepercayaan di Daerah					penyeludupan.	1. Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
116	8	01 06			PROGRAM PENINGKATAN	Persentase Penanganan Konflik	-	100 Persen	1.250.000.000,00			T don't		- 1.900.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA
					KEWASPADAAN NASIONAL DAN	dan Gejolak Masyarakat yang									DAN POLITIK
					PENINGKATAN KUALITAS DAN	ditindaklanjuti									
					FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL										
	8	01 06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan	-	12	1.250.000.000,00		Memperkokoh ideologi	7. Peningkatan tata kelola	Aparatur, Masyarakat,	- 1.900.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA
					Pelaksanaan Pemantapan	Pemantapan Kewaspadaan		dokumen/bulan			Pancasila, demokrasi, dan	pemerintahan daerah yang	Pelajar dan Forum		DAN POLITIK
					Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					hak asasi manusia (HAM).	profesional dan akuntabel untuk mendukung	Kewaspadaan Dini Masyarakat		
					Penanganan Kontilk Sosial	Sosiai						transformasi pelayanan	iviasyarakat		
												publik			
												1. Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
												Pemerintanan dan Pelayanan Publik			
	8	01 06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti		220 Orang	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN ASLI	Memperkokoh ideologi	7. Peningkatan tata kelola	Aparatur, Masyarakat,	400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA
					Kewaspadaan Dini, Kerja Sama	Koordinasi di Bidang Kewaspadaan			Semua Kecamatan,	DAERAH (PAD)	Pancasila, demokrasi, dan	pemerintahan daerah yang	Pelajar dan Forum		DAN POLITIK
					Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	Dini, Kerja Sama Intelijen,			Semua Kel/Desa		hak asasi manusia (HAM).	profesional dan akuntabel	Kewaspadaan Dini		
					Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,						untuk mendukung transformasi pelayanan	Masyarakat		
					antar Negara, Fasilitasi	Kewaspadaan Perbatasan antar						publik			
					Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	Negara, Fasilitasi Kelembagaan						1. Penataan dan			
					serta Penanganan Konflik di Daerah							Pengembangan Tata Kelola			
						Penanganan Konflik di Daerah						Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	8	01 06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan		30 Dokumen	1.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN ASLI	Memperkokoh ideologi	7. Peningkatan tata kelola	Aparatur, Masyarakat,	1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA
					Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah			Semua Kecamatan,	DAERAH (PAD)	Pancasila, demokrasi, dan	pemerintahan daerah yang	Pelajar dan Forum		DAN POLITIK
						Kabupaten/Kota			Semua Kel/Desa		hak asasi manusia (HAM).	profesional dan akuntabel	Kewaspadaan Dini		
										1		untuk mendukung transformasi pelayanan	Masyarakat		
												publik			
												Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola			
										1		Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
					Dinas Sosial	J	I		37.118.380.499,00	·	1			37.120.796.155,00	
	1	00			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	ANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	DASAR		37.118.380.499,00 37.118.380.499,00					37.120.796.155,00 37.120.796.155,00	
1 1	- 1	-	1		ONOSAN FEMIRINIAHAN BIDANG	JOJIAL			37.110.300.433,00		1	1		37.120./90.155,00	DIITAS SUSIAL



117	1 0	6 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	82 Nilai	15.387.210.499,00				-	13.335.796.155,00	DINAS SOSIAL
	1 0	6 01	2.01		KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Nilai SAKIP -	82 Nilai	600.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	650.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1 0	6 01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1 0	6 01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1 0	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1 0	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1 0	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1 0	6 01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	50.000.000,00	DINAS SOSIAL



1	06	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
										narkoba, judi, dan penyeludupan.	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Nilai SAKIP -	82 Nilai	12.413.587.375,00		-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PNS dan PPPK Pada - Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartaneagra	10.705.493.667,00	
	06		2.02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan	12.063.587.375,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PNS dan PPPK Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartaneagra	10.355.493.667,00	
1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PNS dan PPPK Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartaneagra	50.000.000,00	
		01			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	275.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	, ,		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PNS dan PPPK Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartaneagra	275.000.000,00	
		01			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PNS dan PPPK Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartaneagra	25.000.000,00	
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	4 Dokumen	200.000.000,00		-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	264.460.000,00	DINAS SOSIAL

1	06	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Barang Milik Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	25.000.000,00	DINAS SOSIAL
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
1	06	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
1			2.03		Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	89,460,000,00	
		01			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	100.000.000,00	
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial	2 Dokumen	150.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PNS dan PPPK Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartaneagra	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
		01			Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PNS dan PPPK Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartaneagra	50.000.000,00	
1	06	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PNS dan PPPK Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartaneagra	100.000.000,00	DINAS SOSIAL



1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial	8 Layanan	424.357.200,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	PNS dan PPPK Pada - Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartaneagra	449.357.200,00	DINAS SOSIAL
										Publik			
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.110.200,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daeral yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PNS dan PPPK Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartaneagra	5.110.200,00	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.247.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PNS dan PPPK Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartaneagra	59.247.000,00	
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PNS dan PPPK Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartaneagra	100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PNS dan PPPK Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartaneagra	60.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PNS dan PPPK Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartaneagra	75.000.000,00	
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PNS dan PPPK Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartaneagra	100.000.000,00	DINAS SOSIAL



1	06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	PNS dan PPPK Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartaneagra	30,000,000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	2 Dokumen	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	PNS dan PPPK Pada Dinas Sosial Kabupaten	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
					pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kutai Kartaneagra		
		01			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan	12 Bulan	815.315.296,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PNS dan PPPK Pada - Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartaneagra	816.485.288,00	
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PNS dan PPPK Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartaneagra	316.485.288,00	DINAS SOSIAL
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	565.315.296,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PNS dan PPPK Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartaneagra	500.000.000,00	
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah / Asset pada Dinas Sosial	100 Persen	783.950.628,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	300.000.000,00	
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang Millik Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	50.000.000,00	DINAS SOSIAL



1	06	01	2.09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelhara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	83.950.628,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Barang Milik Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	100.000,000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Barang Milik Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan nublik	Barang Milik Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	100.000.000,00	DINAS SOSIAL
3 1		02	2.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Pengumpulan Sumbangan dalam	Meningkatnya pemberdayaan - sosial Persentase PSKS Yang -	92 Persen 92 Persen	6.190.000.000,00 75.000.000,00		-	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola	- Lembaga -	7.470.000.000,00	DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL
					Daerah Kabupaten/Kota	Dikembangkan					pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Penyelenggara Undian dan Pengumpul Sumbangan		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Lembaga Penyelenggara Undian dan Pengumpul Sumbangan	75.000.000,00	
		02			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan - Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	285 Lembaga	6.115.000.000,00		-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Penatana dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	7.395.000.000,00	
		02			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	285 Lembaga		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Penatan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	5.245.000.000,00	
1	06	02	2.03		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang Orang	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	50.000.000,00	DINAS SOSIAL



1	. 0	06 02	2.03	0013	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	237 Lembaga	4.466.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 7. Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	1.500.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	. 0	06 02	2.03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	50 orang Orang	944.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	450.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	. 0	06 02	2.03	0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	20 orang Orang	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	produktif, terampil 4. Membangun Infratruktur Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
119 1	0	06 03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		100 Persen	25.000.000,00		,	-	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	. 0	06 03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terlayaninya Warga Negara Migran -	100 Persen	25.000.000,00		Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produkdif, terampil	Warga Negara Migran - Korban Tindak Kekerasan	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	. 0	06 03	2.01	0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	50,000,000,00	DINAS SOSIAL
120 1	0	06 04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial -	100 Persen	5.693.370.000,00			-	5.450.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	0	06 04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS di luar panti	2109 Orang	5.118.370.000,00		Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	-	4.100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	. 0	06 04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesual dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	355 Orang	3.575.850.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	-	3.000.000,000	DINAS SOSIAL
1	. 0		0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	287.520.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	-	150.000.000,00	DINAS SOSIAL	
1	0	06 04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	400.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	-	300.000.000,00	DINAS SOSIAL



1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan	25 Orang	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	5. Peningkatan kualitas hidup	-	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
					Keluarga	Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Semua Kecamatan,		masyarakat miskin terutama			
						Kewenangan Kabupaten/Kota		Semua Kel/Desa		pengentasan kemiskinan			
										ekstrem 2. Pengembangan sumber			
										daya manusia yang sehat,			
										produktif, terampil			
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,	50 Orang	130.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	5. Peningkatan kualitas hidup	-	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
					Spiritual, dan Sosial	Mental, Spiritual dan Sosial		Semua Kecamatan,	` '	masyarakat miskin terutama			
						Kewenangan Kabupaten/Kota		Semua Kel/Desa		pengentasan kemiskinan			
										ekstrem			
										2. Pengembangan sumber			
										daya manusia yang sehat, produktif, terampil			
	00	04	2.04	0000	Descharing Biochiana Carlot	Lundah Barata Birahirana Carial	50.0	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA DA CILIACII (DDIII)			100.000.000,00	DINIAC COCIAL
1	UБ	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang	50 Orang	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	 Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama 	-	100.000.000,00	DINAS SOSIAL
					Disabilitas Terlantar, Anak	Disabilitas Terlantar, Anak		Semua Ketamatan,		pengentasan kemiskinan			
					Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,				ekstrem			
					serta Gelandangan Pengemis dan	serta Gelandangan Pengemis dan				2. Pengembangan sumber			
					Masyarakat	Masyarakat Kewenangan				daya manusia yang sehat,			
						Kabupaten/Kota				produktif, terampil			
_	L	L											
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan	Jumlah Orang yang Mendapatkan	50 Orang	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	5. Peningkatan kualitas hidup	-	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
					Pengaduan	Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		Tenggarong, Melayu		masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan			
			J			New changan Kabupaten/ Kota				ekstrem			
]				2. Pengembangan sumber			
										daya manusia yang sehat,			
										produktif, terampil			
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan	30 Orang	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	5. Peningkatan kualitas hidup	-	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
						Pelayanan Kedaruratan		Semua Kecamatan,		masyarakat miskin terutama			
						Kewenangan Kabupaten/Kota		Semua Kel/Desa		pengentasan kemiskinan			
										ekstrem			
										 Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, 			
										produktif, terampil			
1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran	Jumlah Orang yang Mendapatkan	30 Orang	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH) -	5. Peningkatan kualitas hidup	-	50.000.000,00	DINAS SOSIAI
-					Keluarga	Pelayanan Penelusuran Keluarga		Semua Kecamatan,		masyarakat miskin terutama			
						Kewenangan Kabupaten/Kota		Semua Kel/Desa		pengentasan kemiskinan			
										ekstrem			
										2. Pengembangan sumber			
										daya manusia yang sehat,			
				0010						produktif, terampil			
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan	30 Orang	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	 Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama 	-	100.000.000,00	DINAS SOSIAL
						Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		Tenggarong, Melayu		pengentasan kemiskinan			
						nasapateny nota				ekstrem			
										2. Pengembangan sumber			
			1							daya manusia yang sehat,			
										produktif, terampil			
1	06	04	2.01	0015	Fasilitasi Pemberdayaan dan	Jumlah Penyandang Disabilitas	30 Orang	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	3. Membangun Ekonomi	-	0,00	DINAS SOSIAL
			- 1		Pelatihan Vokasional bagi	Miskin dan Rentan, Gelandangan		Semua Kecamatan,		Inklusif dan Berkelanjutan			
					Kemandirian Ekonomi Penyandang	dan Pengemis yang mendapatkan		Semua Kel/Desa		2. Peningkatan pemenuhan			
			- 1		Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian				dan pemerataan kualitas layanan pendidikan			
- 1			1		Gerandangan dan Pengerins	Ekonomi				iayanan penulukan			
						<u> </u>							
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang	Terpenuhinya pelayanan terhadap -	595 Orang	575.000.000,00	-	5. Peningkatan kualitas	PMKS Lainnya Di Luar -	1.350.000.000,00	DINAS SOSIAL
			- 1		Masalah Kesejahteraan Sosial	kelompok PMKS bukan korban				hidup masyarakat miskin	Panti		
					(PMKS) Lainnya Bukan Korban	HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti				terutama pengentasan			
			- 1		HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti]				kemiskinan ekstrem			
					Sosial					2. Pengembangan sumber			
										daya manusia yang sehat, produktif, terampil			
-	06	04	2.02	0001	Domhorian Lavanan Data de	Lumlah Orang yang Mandanatkan	3F Orang	F0 000 000 00 Kels Kutel //	DANIA DACILIACII (DDI.º)		DMAKE Lainerus Di Luca	F0.000.000.00	DINIAC COCIAI
1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	25 Orang	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH) -	 Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama 	PMKS Lainnya Di Luar Panti	50.000.000,00	DINAS SUSIAL
			- 1		rengauuari	Kewenangan Kabupaten/Kota		renggarong, welayu		pengentasan kemiskinan	i unu		
						gan nabapaten, nota				ekstrem			
	1	1				1				2. Pengembangan sumber			
										daya manusia yang sehat, produktif, terampil	l		



1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Pengembangan sumber	PMKS Lainnya Di Luar Panti	75.000.000,00	DINAS SOSIAL
										daya manusia yang sehat, produktif, terampil			
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,	PMKS Lainnya Di Luar Panti	700.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	produktif, terampil 5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	PMKS Lainnya Di Luar Panti	75.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	5. Peningkatan kualitas hidup	PMKS Lainnya Di Luar Panti	60.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	5. Peningkatan kualitas hidup	PMKS Lainnya Di Luar Panti	40.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	PMKS Lainnya Di Luar Panti	75.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH) -	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	PMKS Lainnya Di Luar Panti	75.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	PMKS Lainnya Di Luar Panti	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	PMKS Lainnya Di Luar Panti	100.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	5. Peningkatan kualitas hidup	PMKS Lainnya Di Luar Panti	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
1 1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN	Meningkatnya Perlindungan dan -	85 Persen	4.772.800.000,00			-	6.540.000.000,00	DINAS SOSIAL
. 1					JAMINAN SOSIAL	Jaminan Sosial							



-	1 0	06 05			Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		25 Orang	850.000.000,00	-	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Anak-Anak Terlantar -	990.000.000,00	
	1 0	06 05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	850.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH) -	S. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Anak-Anak Terlantar	990.000.000,00	
	1 0	06 05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Terpadu - Kesejahteraan Sosial	100 Persen	3.922.800.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- Fakir Miskin	5.550.000.000,00	DINAS SOSIAL
		06 05			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	175209 Orang	200.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Fakir Miskin	250.000.000,00	
	1 0	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Fakir Miskin	500.000.000,00	DINAS SOSIAL
:	1 0	06 05	2.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	529 Orang	3.372.800.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Dærah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Fakir Miskin	4.500.000.000,00	Dinas sosial
:		06 05		0008	Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverfikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	65403 Usulan	100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Fakir Miskin	300.000.000,00	
122	1 0	06 06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan sosial - korban bencana	100 Persen	1.550.000.000,00			-	2.775.000.000,00	DINAS SOSIAL
:	1 0	06 06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam - dan Bencana Sosial yang terlayani	100 Persen	900.000.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	1.250.000.000,00	DINAS SOSIAL



1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1200 Orang	500.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	550.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	300.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	250.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.01	0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel	Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	0,00	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan	Terlaksananya Kampung Siaga -	4 Desa	650.000.000,00		untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	Kampung Siaga -	1.525.000.000,00	DINAS SOSIAL
					Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Bencana				pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bencana dan Taruna Siaga Bencana		
1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kampung	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana	750.000.000,00	DINAS SOSIAL



	1 06	6 06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan	Jumlah Orang yang Melaksanakan	19 Orang	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	Kampung Siaga	675.000.000,00	DINAS SOSIAL
					Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				Semua Kecamatan,	, ,	pemerintahan daerah yang	Bencana dan Taruna		
						Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel	Siaga Bencana		
						Kewenangan Kabupaten/Kota			•		untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	1 06	6 06	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Relawan	Jumlah Relawan Taruna Siaga	19 Orang	100 000 000 00	Vah Vutai Vartanogara	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Penguatan nilai-nilai	Kampung Siaga	100.000.000,00	DINAS SOSIAI
	1 00	0 00	2.02	0003		Bencana Tingkat Muda yang	15 Orang	100.000.000,00		DAINA BAGI HASIL (DBH)	tradisional serta warisan	Bencana dan Taruna	100.000.000,00	DINAS SOSIAL
					Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Meningkat Kapasitasnya			Tenggarong, Melayu		budaya melalui pendekatan	Siaga Bencana		
					Iviuud	ivieningkat kapasitasnya						Siaga Belicalia		
											pembelajaran pendidikan sejak dini			
123	4 00			-	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN	Persentase Taman Makam -	100 Persen	3.500.000.000,00			sejak ulili		- 1.500.000.000,00	DINIAC COCIAI
123	1 06	6 0			MAKAM PAHLAWAN	Pahlawan (TMP) Yang Di Kelola	100 Persen	3.500.000.000,00					- 1.500.000.000,00	DINAS SOSIAL
				-										
	1 06	6 07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam	Persentase Taman Makam -	100 Persen	3.500.000.000,00		-	7. Peningkatan tata kelola	Taman Makam	- 1.500.000.000,00	DINAS SOSIAL
		Ì		1	Pahlawan Nasional	Pahlawan Yang Terpelihara				1	pemerintahan daerah yang	Pahlawan Kabupaten		
1				1	Kabupaten/Kota						profesional dan akuntabel			
		Ì		1						1	untuk mendukung			
				1							transformasi pelayanan			
											publik			
1				1							1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	1 06	6 07	2.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi	4 Dokumen	3.150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Peningkatan tata kelola	Taman Makam	1.250.000.000,00	DINAS SOSIAL
					Taman Makam Pahlawan Nasional	serta Pemeliharaan Sarana dan			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang	Pahlawan Kabupaten		
					Kabupaten/Kota	Prasarana Taman Makam Pahlawan			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
						Nasional Kabupaten/Kota					untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	1 06	6 07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam	Jumlah Makam yang Terpenuhi	91 Makam	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	Taman Makam	250.000.000,00	DINAS SOSIAI
	-	-			Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang	Pahlawan Kabupaten		
					Tamawan Nasional Rabapaten, Rota	Makam Pahlawan Kabupaten/Kota			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel	r amawan nabapaten		
						Iviakaiti i aliiawati kabapatetiy kota			Scilida Kcij Desa		untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
		Ì		1						1	Pengembangan Tata Kelola			
				1							Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
1				1							Publik			
		+		-	Di			33.369.494.450,00			FUDIK		27.500.447.200.00	DINAS TRANSMIGRASI DAN
					Dinas Transmigrasi dan Tenaga Ker	a		33.369.494.450,00					37.600.117.208,00	TENAGA KERJA
	_	+		-						T T	T	1		
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Y	ANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAI	1	33.269.494.450,00					36.400.117.208,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN
		_	1	1	ļ							1		TENAGA KERJA
- 1	2 07	7		1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Tenaga Kerja		33.269.494.450,00					36.400.117.208,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN
		_ _		1										TENAGA KERJA
124	2 07	7 01	.	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP -	75,30 Nilai	15.039.494.450,00					- 16.325.417.208,00	
1				1	PEMERINTAHAN DAERAH									TENAGA KERJA
				1	KABUPATEN/KOTA									
1	2 07	7 01	2.01	1	Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen rencana, -	3 Dokumen	550.000.000,00		Memperkuat reform		Aparatur Dinas	- 800.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN
1				1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					politik, hukum dan bii		Transmigrasi dan		TENAGA KERJA
- 1			1	1		Perangkat Daerah				serta memperkuat	profesional dan akuntabel	Tenaga Kerja		
1				1						pencegahan dan	untuk mendukung			
- 1			1	1						pemberantasan koru				
				1						narkoba, judi, dan	publik			
J		Ì		1						penyeludupan.	1. Penataan dan			
				1							Pengembangan Tata Kelola			
	1	1	1	1							Pemerintahan dan Pelayana		1	
- 1														
											Publik			

2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	200.000.000,000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	300,000,000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	100.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	150,000,000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan - Perangkat Daerah	1 Laporan	10.689.842.450,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	9.640.024.562,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERIA
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	10.439.842.450,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	9,440,024,562,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	C	,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		200.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.02	8000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	c	,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi - Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	100 Persen	100.000.000,00		Memperkuat reformasi politiki, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	-	150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Miliik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	C	,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politiki, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	c	.00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politiki, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

	1 -		2		In the second	In the second of the second	 100 D	405 000 000 00	I	T	Talanta di S		T	200 000 00	
2	07	7 01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	185.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	- 450.1		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	7 01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	0,00		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	7 01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	50.0		dinas transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	7 01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	50.0		Dinas transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	7 01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	70.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	150.0		Dinas transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	7 01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	96 Orang	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politiki, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	50.0		dinas transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	7 01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	410.000.000,00		Memperkuat reformasi politiki, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	- 1.330./		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA



2	07	01	2.06		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		TENAGA KERJA
2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	100.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	200.000,000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	150.000.000,00	Dinas transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan bir okrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA



2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	110.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		400.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Aparatur Dinas Transmigrasi dan		50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
										serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tenaga Kerja			
2					Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja			DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
		01			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	2 Unit	1.190.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	-	1.420.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
		01			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	990.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	0,00		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	0,00		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		200.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA



2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	1.088.492.000,00		Memperkuat reformasi politiki, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.659.232.646,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	350.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	70.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	70.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	666.492.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.235.232.646,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	4 Jenis	826.160.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	- 876.160.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	248.160.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	248.160.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA



The content of the																			
Part	1		2			3		5	6	7	8	-					15	16	17
Part		2	07 01	2.09	0002						11 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)					28.000.000,00	
Processing Process P												Tenggarong, Sukarame							TENAGA KERJA
Continue of the continue of																Tenaga Kerja			
Columbia Columbia						Operasional atau Lapangan	dan Perizinannya												
Committee Comm																			
Part Part																			
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0														penyeludupan.					
2 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0																			
Part																			
This control for the control f		2	07 01	2.00	0000	Domolihovoon Acet Tol: Dominiud	Lordan Assault Barrella Island				2 Unit	E0.000.000 W-b W-b-l W	DANA DACILIACII (DDII)			A D'		100 000 000 00	DINIAC TRANSPASSORACI DANI
Part Company			07 01	2.09	0008	Pemelinaraan Aset Tak Berwujuu					2 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)					100.000.000,00	
Part Part							Dipelinara					renggarong, sukarame							TENAGA KERJA
Professional Continues Professional Contin																renaga kerja			
Part Part																			
Part Part																			
Page Page																			
2 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														репуставаран.					
3 0 7 7 20 20 20 20 20																			
Part Part			1		1	1	1												
Part Part	-	2	07 01	2 00	0000	Demeliharaan/Rehabilitasi Cod	lumlah Gedung Kantor dan				1 Unit	300 000 000 00 Kah Kutai Kartanaana	DANA RAGI HASII (DPU)	Memperkuat reformaci		Anaratur Dinas	 	0.00	DINAS TRANSMICDASI DAN
Set memory tales perception and an abelian particular and an abelian p			01	2.09	0009						1 JIIIL		DAINA DAGI FIASIL (UBH)					0,00	
perception of the process of the pro						Kantor dan Bangunan Lainnya						renggarong, sukarame							TENAGA KERJA
Part Part							Dipelinara/ Direnabilitasi									renaga kerja			
Part Part																			
Processor Communication Processor Commun																			
Programmage That Acid a Programmage That Acid and Programmage That Aci																			
Part Part														penyeludupan.					
2 07 GL 209 000 Permithanan/Rehabilitasi sanas Amilia Sarana dan Pasar																			
Part Column Col																			
den Prasaras Gedung Canton atou Bangunan Lalinnya Bangunan Bangunan Lalinnya Bangunan Banguna		2	07 01	2.00	0010	Damaliharaan /Dahahilitasi Carana	Lumlah Carana dan Drassrana				1 Unit	100 000 000 00 Kah Kutai Kartan agara	DANA DACILIACII (DDII)	Mammadust reformed	Tublik	Anaratus Dinas		350,000,000,00	DINIAC TRANSPAICRACI DANI
Seguena Lamyya			07 01	2.09	0010						1 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)					250.000.000,00	
Dipetitive (Price Andrews Productions of the Price Andrews												renggarong, sukarame							TENAGA KERJA
pembrantasas korquis, function, judi din prayradiojum. 2 0 07 01 2.00 001 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sirana dan Prasarana dan Pr						Bangunan Lainnya										renaga kerja			
Particular Par							Dipelinara/ Direnabilitasi												
Perveludujum Perv																			
Pegembangan Tata Kefola Pemerintahan dan Pelayaran Pendukung Gedung Hari Pasaran dan Prasaran da																			
2 07 01 209 0011 Pemelhiarnan/Rehabilitissi Sarana dan Prasara dan Prasarana dan Prasara dan Prasarana dan Prasarana dan Prasarana dan Prasarana dan Prasarana dan Prasarana dan Prasarana dan Prasarana dan Prasarana dan Prasarana dan Prasarana dan Prasarana dan Prasarana dan Prasa														penyeludupan.					
2 07 01 2.09 031 Pemeliharann/fehabilitasi Sarana dan Prasarana dan Prasarana dan Prasarana dan Prasarana dan Prasarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Gelebara/Direhabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Gelebara/Direhabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Gelebara/Direhabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Gelebara/Direhabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Carbana Mangunan Lainnya Gelebara/Direhabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Carbana Mangunan Lainnya Gelebara/Direhabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Carbana Mangunan Lainnya Gelebara/Direhabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Carbana Mangunan Lainnya Gelebara/Direhabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Carbana Mangunan Lainnya Gelebara/Direhabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Carbana Mangunan Lainnya Gelebara/Direhabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Carbana Mangunan Lainnya Gelebara/Direhabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Carbana Mangunan Lainnya Gelebara/Direhabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Carbana Mangunan Lainnya Gelebara/Direhabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Carbana Mangunan Lainnya Gelebara Mangunan																			
2 07 01 20 02 1 Penelibraran/Rehabilitasi Sarana dan Prasa																			
Tengarong, Sukarame		2	07 01	2.00	0011	Romoliharaan/Rohahilitasi Sarana	Jumlah Sarana dan Brasarana				20 Unit	100 000 000 00 Kah Kutai Kartanogara	DANA BACI HACII (DBU)	Momporkust roformaci		Aparatur Dipas		250,000,000,00	DINIAS TRANSMICRASI DANI
serta memperkust profesional dan akuntabel unternduksung profesional dan akuntabel unternduksung profesional dan akuntabel unternduksung prandformas pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 2. Penataan dan Pelayanan publik 3. Penatan dan Pelayan		2	07 01	2.05	0011						36 OHL		DANA BAGITIASIL (DBII)					230.000.000,00	
Djelshars/Drehabilitasi Djelshars/Drehabilitasi Djelshars/Drehabilitasi Dpelshars/Drehabilitasi NASTRANSMIGRASIDAN TENAGA KERIA Dpersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Dpersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Dpersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Dpersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Dpersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Dpersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Dpersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Dpersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Dpersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Dpersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Dpersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Deersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Deersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Deersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Deersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Deersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Deersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Deersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Deersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Deersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Deersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Deersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Dishalitasi Deersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Deersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Deersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Deersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Deersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Deersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Deersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Deersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Deersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Deersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Deersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Deersen 75.000.000.00 Dinastransmigratasi Deersen 75.000.000.00 Dinas												renggarong, sukarame							TENAGA KERJA
Personan perpeludupan. Personan perpeludupan. Personan perpeludupan. Personan perpeludupan. Personan perpeludupan. Personan dan perpeludupan. Personan dan perpeludupan. Personan perpeludupan. Personan dan personan						Kantor atau Bangunan Lainnya										renaga kerja			
125 2 07 02 02 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja 0.00 0.000,000							Dipelinara/ Direnabilitasi												
Persentase Agenta Persentase Kegiatan yang diaksanakan mengacu pada Rencana Tenaga Kerja Persuntan dan Pelayanan Publik																			
Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kel																			
125 2 07 02 02 03 04 05 05 05 05 05 05 05														penyeludupan.					
125 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA Presentase Kegiatan yang diaksanakan mengacu pada Rencana Tenaga Kerja Melanjutkan pengembangkan infurstruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui se																			
PROGRAM PERICANAAN TENAGA Persentase Kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Rencana Tenaga Kerja Persentase Kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Rencana Tenaga Kerja Jumlah Data R																			
Control Cont	125	,	07 02	1	+-	DROGRAM DERENCANAAN TENAGA	Percentase Kegiatan yang	<u> </u>			100 Person	75 000 000 00		<u> </u>	1 diams	1	<u> </u>	0.00	DINAS TRANSMIGRASI DANI
Rencana Tenaga Kerja 2 07 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Jumlah Data Rencana Tenaga Kerja	123	^	3, 02		1						200 1 613611	75.000.000,00						0,00	
2 07 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Jumlah Data Rencana Tenaga Kerja Daerah 1 Dokumen 75.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui			1	1	1							1							TELLONG NEIVA
Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri keratif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui		2	07 02	2.01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Keria		l			1 Dokumen	75.000.000.00		Melaniutkan pengembangan	1. Membangun Sektor	Perusahaan dan	-	0.00	DINAS TRANSMIGRASI DAN
meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahanan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan gargambangkan agromatik in dustri di sentra produksi melalui		-	. V2	01	1							, 5,555,555,60					1	-,	
kerja yang berkualitas, mendorong kewiraushalan, mendorong kewiraushalan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromatin industri di sentra produksi melalui			1		1	[*****						1					1		
mendor ong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromatini industri di sentra produksi melalui												1							
mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui															peterior ungnaturi kerja				
kreatif serta mengembangkan agromatin industri di sentra produksi melalui																			
mengembangkan agromativi industri di sentra produksi melalui																			
agromaritim industri di sentra produksi melalui			1		1	1	1					1					1		
sentra produksi melalui																			
реганали лучегозі.							1												
							1							peran aktii kuperasi.					
				1			1												
	<u> </u>			1	1	1	ı		1		1	I I	l	1	1	1		ı	l



	2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro		10 Orang	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan menigkatkat lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		Perusahaan dan Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara	0,	00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
120	5 2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Bersertifikat Kompetensi	-	25,69 Persen	4.150.000.000,00					-	5.700.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan		320 Orang	4.020.000.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peraman perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan 4. Peningkatan kapasitas dan	Pencari Kerja Kab. Kutai Kartanegara	-	5.500.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		223 Orang	4.020.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	Membangun Sektor Pendidikan A. Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja	Pencari Kerja Kab. Kutai Kartanegara		5.500.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	03 :	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang tersedia		11 Lembaga	50.000,000		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan 4. Peningkatan kapasitas dan	Lembaga Pelatihan Kerja	-	50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERIA
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		15 Lembaga	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, seta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	Membangun Sektor Pendidikan A. Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja	Lembaga Pelatihan Kerja		50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

	2	07 0	3 2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang produktif		10 Per	rusahaan	30.000.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja	Perusahaan Kecil	- 50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07 0	3 2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas		10 Per	rusahaan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja	Perusahaan Kecil	50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07 0	3 2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas		1 Doku	umen	50.000.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan A. Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja	Perusahaan Kecil	- 100.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
				0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah		1 Doku		50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pendidikan 4. Peningkatan kapasitas dan	Perusahaan Kecil		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
127	2	07 0	1		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentasi Pecari Kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri melalui mekanisme Antar Kerja di kabupaten	-	14,33	Persen	3.405.000.000,00					- 2.800.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07 0	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan antar kerja		2 Laya	inan	3.030.000.000		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja	Pencari Kerja , Masyarakat dan Perusahaan Kab. Kutai Kartanegara	- 2.350.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

	07	7 04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	30 Orang	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Peningikatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja	Pencari Kerja , Masyarakat dan Perusahaan Kab. Kutai Kartanegara	300.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	7 04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	20 Orang	70.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja	Pencari Kerja , Masyarakat dan Perusahaan Kab. Kutai Kartanegara	150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	7 04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	120.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		Pencari Kerja , Masyarakat dan Perusahaan Kab. Kutai Kartanegara	200,000,000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	7 04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	25 Orang	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Pencari Kerja , Masyarakat dan Perusahaan Kab. Kutai Kartanegara	200.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	7 04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	249 Orang	2.490.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Pencari Kerja , Masyarakat dan Perusahaan Kab. Kutai Kartanegara	1.500.000.000,000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

2	07 04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Dokumen Izin LPTKS	2 Dokumen	50.000.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber	Pencari Kerja , Masyarakat dan Perusahaan Kab. Kutai	- 100.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
				Kabupaten/Kota					kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Kartanegara		
2				LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	2 Lembaga	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	produktif, terampil	Pencari Kerja , Masyarakat dan Perusahaan Kab. Kutai Kartanegara		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07 04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah informasi pasar kerja	1 Event	250.000.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan A. Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja	Pencari Kerja , Masyarakat dan Perusahaan Kab. Kutai Kartanegara	- 200.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	80 Orang	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan A. Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja	Pencari Kerja , Masyarakat dan Perusahaan Kab. Kutai Kartanegara	200.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07 04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	20 Orang	75.000.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan A. Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja	Pencari Kerja Kab. Kutai Kartanegara	- 150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

	2	07	04 2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		20 Orang	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	Pencari Kerja Kab. Kutai Kartanegara	150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
128	2	07	05		PROGRAM HUBUNGAN	Persentase Kasus Perselisihan	-	100 Persen	10.600.000.000,00		peran aktif koperasi.		- 11.574.700.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN
	2	07	05 2.01		INDUSTRIAL Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanijan Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Hubungan Industrial yang difasilitasi Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja (PKWT, Perjanjian Kerja Bersama) yang dicatatkan serta Perjanjian Kerja Bersama yang di daftarkan	-	20 Perusahaan	350.000.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perusahaan Kab. Kutai Kartanegara	- 600.000.000,00	TENAGA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	05 2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online		15 Perusahaan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkulitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perusahaan Kab. Kutai Kartanegara	100.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	05 2.01		Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama		15 Perusahaan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan 1. Membangun Sektor infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perusahaan Kab. Kutai Kartanegara	100.000,000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	05 2.01		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		12 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perusahaan Kab. Kutai Kartanegara	400.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA



2	07	05 2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan	100 Perus	ahaan	10.250.000.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perusahaan Kab. Kutai Kartanegara	- 10.974.700.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	05 2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	40 Perkara	1	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendgenbangkan industri kreatif serta mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan jaromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perusahaan Kab. Kutai Kartanegara	200.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	05 2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	40 Perkara		150.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan Infrastruktur dan menigkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perusahaan Kab. Kutai Kartanegara	150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	05 2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		6 Asosiasi Serikat Pel		150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan menigkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewiraushaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perusahaan Kab. Kutai Kartanegara	150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	05 2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	3	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perusahaan Kab. Kutai Kartanegara	150.000,000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA



2	07	05 2	2.02 0	005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	48729 Orang	9.650.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	Membangun Sektor Pendidikan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Perusahaan Kab. Kutai Kartanegara	10.324,700.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
									agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.				
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			100.000.000,00					1.200.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	TRANSMIGRASI		100.000.000,00					1.200.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
129 3	32	02		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan Persentase Pelaksanaan Tahapan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi 72,72 Persen	100.000.000,00				-	1.200.000.000,00	
3	32	02 2	2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Tratoringiasi Dokumen perencanaan kawasan transmigrasi.	1 Dokumen	100.000,000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Kawasan Transmigrasi - Kab. Kutai Kartanegara	1.200.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	32	02 2	2.01 0	002 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Kawasan Transmigrasi Kab. Kutai Kartanegara	300.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	32	02 2	2.01 0	004 Penatausahaan Pencadangan Tana untuk Kawasan Transmigrasi	h Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Kawasan Transmigrasi Kab. Kutai Kartanegara	300.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
				Dinas Pemberdayaan Perempuan o	dan Perlindungan Anak	<u>, </u>	15.094.373.547,00	1	1		1	34.628.821.308,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Y	'ANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		15.094.373.547,00					34.628.821.308,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANA	К	15.094.373.547,00					34.628.821.308,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
130 2	08	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah -	undefined undefined	10.944.373.547,00				-	22.078.821.308,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01 2	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		undefined undefined	550.000.000,00		-	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN DPPPA -	1.175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2		01 2		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN DPPPA		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01 2	2.01 0	006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN DPPPA	200.000.000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01 2	2.01 0	007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN DPPPA	225.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



2	08	01	2.01	8000	Penyelenggaraan Walidata	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	1. Penataan dan	ASN DPPPA	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
1 ~	00	01	2.01	0000	Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata	1 Bokumen	Semua Kecamatan,	British British British (BBI)	Pengembangan Tata Kelola	ASI SITIA	100.000.000,00	PEREMPUAN DAN
						Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Semua Kel/Desa		Pemerintahan dan Pelayanan			PERLINDUNGAN ANAK
										Publik			
2	08	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data	Jumlah Data Statistik Sektoral	1 Data	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	1. Penataan dan	ASN DPPPA	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
					Statistik Sektoral Daerah	Daerah yang Telah Dikumpulkan		Semua Kecamatan,		Pengembangan Tata Kelola			PEREMPUAN DAN
						dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		Semua Kel/Desa		Pemerintahan dan Pelayanan Publik			PERLINDUNGAN ANAK
2	no	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah laporan Administrasi -	undefined	6.908.364.933,00	 	1. Penataan dan	ASN DPPPA -	11 062 021 209 00	DINAS PEMBERDAYAAN
	08	01	2.02		Daerah	Keuangan Perangkat Daerah yang	undefined	0.508.304.533,00		Pengembangan Tata Kelola	ASN DEFEA	11.502.021.306,00	PEREMPUAN DAN
					Dacium .	akuntabel	and and and and and and and and and and			Pemerintahan dan Pelayanan			PERLINDUNGAN ANAK
										Publik			
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	40 Orang/bulan	6.717.168.933,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	1. Penataan dan	ASN DPPPA	11.562.021.308,00	
						dan Tunjangan ASN		Semua Kecamatan,		Pengembangan Tata Kelola			PEREMPUAN DAN
								Semua Kel/Desa		Pemerintahan dan Pelayanan Publik			PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1100000	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	1. Penataan dan	ASN DPPPA	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
	08	01	2.02	0003	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1 Laporan	Semua Kecamatan,	DANA BAGITIASIE (DBTI)	Pengembangan Tata Kelola	ASIN DEFFA	30.000.000,00	PEREMPUAN DAN
					SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan		Semua Kel/Desa		Pemerintahan dan Pelayanan			PERLINDUNGAN ANAK
						Keuangan Akhir Tahun SKPD		•		Publik			
2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	2 Laporan	116.196.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	1. Penataan dan	ASN DPPPA	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
					Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan		Semua Kecamatan,		Pengembangan Tata Kelola			PEREMPUAN DAN
					Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan		Semua Kel/Desa		Pemerintahan dan Pelayanan			PERLINDUNGAN ANAK
						Laporan Keuangan				Publik			
						Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
						514 5							
2	08	01	2.02	8000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan	1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	1. Penataan dan	ASN DPPPA	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
					Prognosis Realisasi Anggaran	Analisis Prognosis Realisasi		Semua Kecamatan,		Pengembangan Tata Kelola			PEREMPUAN DAN
						Anggaran		Semua Kel/Desa		Pemerintahan dan Pelayanan			PERLINDUNGAN ANAK
										Publik			
2	08	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat	undefined undefined	45.258.000,00	-	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	ASN DPPPA -	260.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
					pada Perangkat Daerah	Daerah	underined			Pemerintahan dan Pelayanan			PERLINDUNGAN ANAK
						Dacian				Publik			T EREINDONGAN ANAK
2	08	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	1 Dokumen	8.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	1. Penataan dan	ASN DPPPA	45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
					Kebutuhan Barang Milik Daerah	Milik Daerah SKPD		Semua Kecamatan,		Pengembangan Tata Kelola			PEREMPUAN DAN
					SKPD			Semua Kel/Desa		Pemerintahan dan Pelayanan			PERLINDUNGAN ANAK
-		-					<u> </u>	24 752 222 22		Publik			
2	08	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil	1 Laporan	21.758.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	1. Penataan dan	ASN DPPPA	85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
					Willik Daerali SKPD	Koordinasi Penilaian Barang Milik		Semua Kel/Desa		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			PERLINDUNGAN ANAK
						Daerah SKPD		Serial New Sesa		Publik			T ENEMBOTION IN THE IN
2	08	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	1 Laporan	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	1. Penataan dan	ASN DPPPA	130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
					Laporan Barang Milik Daerah pada	Penyusunan Laporan Barang Milik		Semua Kecamatan,		Pengembangan Tata Kelola			PEREMPUAN DAN
					SKPD	Daerah pada SKPD		Semua Kel/Desa		Pemerintahan dan Pelayanan Publik			PERLINDUNGAN ANAK
-	-00	01	2.05					754.724.250,00				200 000 000 00	
	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	undefined undefined	754.724.250,00		Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas	ľ	800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
					r erangkat Daeran	repegawaian	underned			layanan kesehatan			PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	40 Orang	500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	1. Peningkatan pemenuhan	[-	500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
					Berdasarkan Tugas dan Fungsi	dan Fungsi yang Mengikuti		Semua Kecamatan,		dan pemerataan kualitas			PEREMPUAN DAN
	1	1 1				Pendidikan dan Pelatihan		Semua Kel/Desa		layanan kesehatan			PERLINDUNGAN ANAK
1	00	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-	lumlah Orang yang Mangilusti	40 Orang	254.724.250,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	1. Penataan dan	+	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
2	08	01	2.05	0010	Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	40 Orang	Semua Kecamatan.	DAINA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		500.000.000,00	PEREMPUAN DAN
						Undangan		Semua Kel/Desa		Pemerintahan dan Pelayanan			PERLINDUNGAN ANAK
	L			<u>L</u>						Publik			
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Layanan Administrasi -	undefined	490.614.400,00	[-	1. Penataan dan	ASN DPPPA -	2.380.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
					Daerah	Umum Perangkat Daerah	undefined			Pengembangan Tata Kelola			PEREMPUAN DAN
	1	1 1								Pemerintahan dan Pelayanan Publik			PERLINDUNGAN ANAK
2	00	01	2.06	0002	Ponyadiaan Poralatan dan	Jumlah Bakot Boralatan dan	1 Pales	31.873.600,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA PAGI HASII (DBH)		ASN DPPPA	190,000,000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
2	US	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1 Paket	31.873.600,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DAINA DAGI FIASIL (DBH)	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	MOIN UPPPA	180.000.000,00	PEREMPUAN DAN
					. c. c. g.apan kantoi	Disediakan		Semua Kel/Desa		Pemerintahan dan Pelayanan			PERLINDUNGAN ANAK
	L	⊥ l		L	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	Publik			
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1 Paket	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	1. Penataan dan	ASN DPPPA	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
						yang Disediakan		Semua Kecamatan,		Pengembangan Tata Kelola			PEREMPUAN DAN
1		1 1						Semua Kel/Desa	1	Pemerintahan dan Pelayanan			PERLINDUNGAN ANAK
										Publik			



2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1 Paket	8.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Penataan dan	ASN DPPPA	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
					Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan		Semua Kecamatan,			Pengembangan Tata Kelola			PEREMPUAN DAN
								Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan			PERLINDUNGAN ANAK
											Publik			
2	08	01	2.06	0006		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	1 Dokumen	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)		1. Penataan dan	ASN DPPPA	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
					Peraturan Perundang-undangan	dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Criticaligan yang Disculation		Semua Key Desa			Publik			I EKEMPONGAN ANAK
2	08	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang	1 Paket	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan pemenuhan	ASN DPPPA	300,000,000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
					,	Disediakan		Semua Kecamatan,			dan pemerataan kualitas		·	PEREMPUAN DAN
								Semua Kel/Desa			layanan kesehatan			PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.06	8000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi	1 Laporan	38.087.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)		Penataan dan	ASN DPPPA	150.000.000,00	
						Kunjungan Tamu		Semua Kecamatan,			Pengembangan Tata Kelola			PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
								Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik			PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	1 Laporan	52.153.800,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASII (DBH)	-	Penataan dan	ASN DPPPA	850.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
~	-		2.00	0003	dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 20001011	Semua Kecamatan.	Driver Bright In Siz (BBI)		Pengembangan Tata Kelola	ASIA SITTA	030.000.000,00	PEREMPUAN DAN
						SKPD		Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan			PERLINDUNGAN ANAK
											Publik			
2	80	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada		1 Dokumen	40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Penataan dan	ASN DPPPA	300.000.000,00	
					SKPD	Arsip Dinamis pada SKPD		Semua Kecamatan,			Pengembangan Tata Kelola			PEREMPUAN DAN
								Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik			PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Lumlah Danasdaan Basana Milili	defined	400.000.000,00				ASN DPPPA -	3 300 000 000 00	DINAS PEMBERDAYAAN
	08	01 1	2.07		Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	undefined undefined	400.000.000,00			1. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas	ASIN DEFFA	3.300.000,00	PEREMPUAN DAN
					Daerah	Dacian	underned				layanan kesehatan			PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	30 Unit	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	=	1. Penataan dan	ASN DPPPA	500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
					Gedung Kantor atau Bangunan	Gedung Kantor atau Bangunan		Semua Kecamatan,			Pengembangan Tata Kelola			PEREMPUAN DAN
					Lainnya	Lainnya yang Disediakan		Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik			PERLINDUNGAN ANAK
				2011				450 000 000 00						
2	80	01 .	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	20 Unit	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)		Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas	ASN DPPPA	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
						Pendukung Gedung Kantor atau					dan pemerataan kualitas	l l		PEKEMPUAN DAN
														DEDITING AN ANAK
					Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan		Semua Kel/Desa			layanan kesehatan			PERLINDUNGAN ANAK
	08	01 2	2.08		Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan	undefined	Semua Kel/Desa			layanan kesehatan	ASN DPPPA -	1.600.000.000,00	
	08	01 2	2.08				undefined undefined			-		ASN DPPPA -	1.600.000.000,00	PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
	08	01 2	2.08		Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa -		Semua Kel/Desa		-	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	ASN DPPPA -	1.600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
2					Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	undefined	Semua Kel/Desa 1.050.635.964,00		-	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08		2.08	0002	Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi,	Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		Semua Kel/Desa 1.050.635.964,00 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan	ASN DPPPA -		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN
2				0002	Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	undefined	Semua Kel/Desa 1.050.635.964,00 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
2				0002	Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi,	Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	undefined	Semua Kel/Desa 1.050.635.964,00 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN
2	08	01	2.08		Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	undefined 1 Laporan	Semua Kel/Desa 1.050.635.964,00 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2		01			Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi,	Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	undefined	Semua Kel/Desa 1.050.635.964,00 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan,		-	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	ASN DPPPA	450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
2	08	01	2.08		Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan	Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	undefined 1 Laporan	Semua Kel/Desa 1.050.635.964,00 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara		-	Iayanan kesehatan 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola	ASN DPPPA	450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN
2 2	08	01 :	2.08	0003	Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	undefined 1 Laporan 1 Laporan	Semua Kel/Desa 1.050.635.964,00 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		Iayanan kesehatan 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN DPPPA ASN DPPPA	450.000.000,00 150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 2	08	01 :	2.08		Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	undefined 1 Laporan	Semua Kel/Desa 1.050.635.964,00 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 660.635.964,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan	ASN DPPPA	450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN DINAS PEMBERDAYAAN
2 2	08	01 :	2.08	0003	Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dun Perlengkapan Kantor yang Disediakan	undefined 1 Laporan 1 Laporan	Semua Kel/Desa 1.050.635.964,00 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 660.635.964,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		Iayanan kesehatan 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan	ASN DPPPA ASN DPPPA	450.000.000,00 150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK
2 2	08	01 :	2.08	0003	Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	undefined 1 Laporan 1 Laporan	Semua Kel/Desa 1.050.635.964,00 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 660.635.964,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan	ASN DPPPA ASN DPPPA	450.000.000,00 150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN DINAS PEMBERDAYAAN
2 2 2	08	01 :	2.08	0003	Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	undefined 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	Semua Kel/Desa 1.050.635.964,00 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 660.635.964,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA	150.000.000,00 150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN
2 2 2	08	01 :	2.08	0003	Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik	undefined 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan undefined	Semua Kel/Desa 1.050.635.964,00 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 660.635.964,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan	ASN DPPPA ASN DPPPA	150.000.000,00 150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN
2 2 2	08	01 :	2.08	0003	Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	undefined 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	Semua Kel/Desa 1.050.635.964,00 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 660.635.964,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan	ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA	150.000.000,00 150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN
2 2 2 2 2 2	08 08 08	01 :	2.08	0003	Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik	undefined 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan undefined undefined	Semua Kel/Desa 1.050.635.964,00 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 660.635.964,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kel/Desa 744.776.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan	ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA	150.000.000,00 150.000.000,00 1.000.000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK
2 2 2 2 2 2	08	01 :	2.08	0003	Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan	undefined 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan undefined	Semua Kel/Desa 1.050.635.964,00 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 660.635.964,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 744.776.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	layanan kesehatan 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan	ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA	150.000.000,00 150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN
2 2 2 2 2 2	08 08 08	01 :	2.08	0003	Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	undefined 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan undefined undefined	Semua Kel/Desa 1.050.635.964,00 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 660.635.964,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 744.776.000,00 72.740.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Iayanan kesehatan 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan	ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA	150.000.000,00 150.000.000,00 1.000.000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK
2 2 2 2 2 2	08 08 08	01 :	2.08	0003	Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	undefined 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan undefined undefined	Semua Kel/Desa 1.050.635.964,00 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 660.635.964,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 744.776.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Iayanan kesehatan 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan	ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA	150.000.000,00 150.000.000,00 1.000.000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREIMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK
2 2 2 2 2 2 2	08 08 08 08	01 : 01 : 01 : 01 : 01	2.08 2.08 2.08 2.09	0003	Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Pemeliharan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	undefined 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan undefined undefined undefined undefined	Semua Kel/Desa 1.050.635.964,00 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 660.635.964,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 744.776.000,00 72.740.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Iayanan kesehatan 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA - ASN DPPPA - ASN DPPPA	450.000.000,00 150.000.000,00 1.000.000.000,00 601.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN
2 2 2 2 2 2 2	08 08 08 08	01 :	2.08 2.08 2.08 2.09	0003	Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Pinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Iaporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Dinas	undefined 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan undefined undefined	Semua Kel/Desa 1.050.635.964,00 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 660.635.964,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kel/Desa 744.776.000,00 72.740.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Iayanan kesehatan 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan	ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA	150.000.000,00 150.000.000,00 1.000.000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN
2 2 2 2 2 2 2	08 08 08 08	01 : 01 : 01 : 01 : 01	2.08 2.08 2.08 2.09	0003	Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	undefined 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan undefined undefined undefined undefined	Semua Kel/Desa 1.050.635.964,00 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 660.635.964,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	layanan kesehatan 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan	ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA - ASN DPPPA - ASN DPPPA	450.000.000,00 150.000.000,00 1.000.000.000,00 601.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK
2 2 2 2 2 2 2	08 08 08 08	01 : 01 : 01 : 01 : 01	2.08 2.08 2.08 2.09	0003	Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas ababtan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Iaporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Dinas	undefined 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan undefined undefined undefined undefined	Semua Kel/Desa 1.050.635.964,00 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 660.635.964,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kel/Desa 744.776.000,00 72.740.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Iayanan kesehatan 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan	ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA - ASN DPPPA - ASN DPPPA	450.000.000,00 150.000.000,00 1.000.000.000,00 601.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN
2 2 2 2 2 2 2	08	01 : 01 : 01 : 01 : 01	2.08 2.08 2.09 2.09	0003	Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Bajak dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Dinas Japatan Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	undefined 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan undefined undefined undefined undefined	Semua Kel/Desa 1.050.635.964,00 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 660.635.964,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	layanan kesehatan 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 2. Penataan dan Pelayanan Publik 2. Penataan dan Pelayanan Publik 3. Penataan dan Pelayanan Publik 4. Penataan dan Pelayanan Publik	ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA -	450.000.000,00 150.000.000,00 1.000.000.000,00 601.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 2 2 2 2 2 2	08	01 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	2.08 2.08 2.09 2.09	0003	Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Diasa Bemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Daisa Bemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Isa Bemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Isa Bemel	Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakya	undefined 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan undefined undefined undefined 4 Unit	Semua Kel/Desa 1.050.635.964,00 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 660.635.964,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecl/Desa 744.776.000,00 72.740.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 22.036.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kel/Desa 22.036.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	layanan kesehatan 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan	ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA	450.000.000,00 150.000.000,00 1.000.000,000,00 601.800.000,00 450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 2 2 2 2 2 2	08	01 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	2.08 2.08 2.09 2.09	0003	Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharan/Rehabilitasi Gedung	Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Gedung Kantor dan	undefined 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan undefined undefined undefined 4 Unit	350.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	layanan kesehatan 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik	ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA	450.000.000,00 150.000.000,00 1.000.000,000,00 601.800.000,00 450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	08 08 08 08 08 08	01 : 01 : 01 : 01 : 01 : 01 : 01 : 01 :	2.08 2.08 2.09 2.09	0003	Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Derorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas dau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Diasa Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	undefined 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan undefined undefined undefined 4 Unit 3 Unit	350.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Iayanan kesehatan 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan	ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA	450.000.000,00 150.000.000,00 1.000.000,00 450.000,00 150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREIMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREIMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREIMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREIMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREIMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREIMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREIMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREIMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREIMPUAN DAN PEREIMPUAN DAN PEREIMPUAN DAN PEREIMPUAN DAN PEREIMPUAN DAN PEREIMPUAN DAN PEREIMPUAN DAN PEREIMPUAN DAN PEREIMPUAN DAN PEREIMPUAN DAN PEREIMPUAN DAN PEREIMPUAN DAN PEREIMPUAN DAN PEREIMPUAN DAN PEREIMPUAN DAN PEREIMPUAN DAN
2 2 2 2 2 2 2	08 08 08 08 08 08	01 : 01 : 01 : 01 : 01 : 01 : 01 : 01 :	2.08 2.08 2.09 2.09	0003 0004 0001 0002	Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Pinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Bajak dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Cakupan Pemberdayaan	undefined 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan undefined undefined undefined 30 Unit 4 Unit undefined undefined	Semua Kel/Desa 1.050.635.964,00	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	layanan kesehatan 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik	ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA	450.000.000,00 150.000.000,00 1.000.000,00 450.000,00 150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREIMPUAN DAN
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	08 08 08 08 08 08	01 : 01 : 01 : 01 : 01 : 01 : 01 : 01 :	2.08 2.08 2.09 2.09	0003 0004 0001 0002	Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Derorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas dau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Diasa Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	undefined 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan undefined undefined undefined 4 Unit 3 Unit	350.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	layanan kesehatan 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik	ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA ASN DPPPA	450.000.000,00 150.000.000,00 1.000.000,00 450.000,00 150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK



2	08				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelembagaan PUG pada lembaga Pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota	undefined undefined	250.000.000,00		-	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, Pokja PUG, Organisasi, Lembaga Masyarakat		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	2.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, Pokja PUG, Organisasi, Lembaga Masyarakat	350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, Pokja PUG, Organisasi, Lembaga Masyarakat		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	2.01	0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	28 Lembaga	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, Pokja PUG, Organisasi, Lembaga Masyarakat	600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang bergerak dlm bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	undefined undefined	1.050.000.000,00		-	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, - Pokja PUG, Organisasi, Lembaga Masyarakat	1.650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	2.02		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	28 Lembaga	950.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, Pokja PUG, Organisasi, Lembaga Masyarakat	500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	2.02	0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	20 orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, Pokja PUG, Organisasi, Lembaga Masyarakat	550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	2.02		Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	20 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, Pokja PUG, Organisasi, Lembaga Masyarakat	600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	undefined undefined	100.000.000,00		-	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, - Masyarakat	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	2.03	0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	28 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, Masyarakat	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02	2.03	8000	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, Masyarakat	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
132 2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100 Persen	925.000.000,00				-	2.550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan kekerasan - terhadap perempuan	undefined undefined	125.000.000,00		-	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, - Masyarakat		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03	2.01	0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, Masyarakat	400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



2	08	03	2.01	0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan	1	0 Lembaga	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Perangkat Daerah, Masyarakat	400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota			Schillatine, Seed		Publik			, Exchiborio, iiv iiv iii
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan	Jumlah penyediaan layanan - rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekersan yang memerlukan	1 1	ndefined ndefined	600.000.000,00		- 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Masyarakat	- 1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota					Publik			
2	08	03	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat	5	0 orang	500.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03	2.02	0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat	5	0 orang	100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Masyarakat	500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan	Kabupaten/Kota Jumlah penguatan dan -		ndefined	200.000.000,00		Publik - 1. Penataan dan	Perangkat Daerah,	- 750.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
					Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota	ľ	ndefined			Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03	2.03	0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat	1	0 Lembaga	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Perangkat Daerah, Masyarakat	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
					Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)			Semua Kel/Desa		Pemerintahan dan Pelayanan Publik			PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03	2.03	0008		jumlah SDM lembaga penyedia	3	0 orang	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 1. Penataan dan	Perangkat Daerah,	300.000.000,00	
					Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03	2.03	0009	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1	Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, Masyarakat	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
133 2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pusat pembelajaran - keluarga yang terbentuk dalam mewujudkan KG dan hak anak		ndefined ndefined	300.000.000,00				- 1.600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan kualitas - keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat daerah Kabupaten/Kota		ndefined ndefined	150.000.000,00		- 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, Masyarakat	- 900.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	04	2.02	0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	1	0 Lembaga	100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, Masyarakat	600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	04	2.02	0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	1	0 Lembaga	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, Masyarakat	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak		ndefined ndefined	150.000.000,00		- 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, Masyarakat	- 700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	04	2.03	0002	layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlak dilak Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	2	0 Orang	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, Masyarakat	400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	04	2.03	0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	2	0 Orang	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Perangkat Daerah, Masyarakat	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



134	2 (08 05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang - memiliki data gender dan anak	undefined undefined	50.000.000,00				- 150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 (08 05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengumpulan, pengolahan - analisis dan penyajian data gender dan anak dlam kelembagaan data tingkat Kabupaten/Kota	undefined undefined	50.000.000,00		- 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, Masyarakat	- 150.000.000,00	
		08 05	2.01	0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, Masyarakat		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
135	2 (08 06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Nilai Kabupaten Layak - Anak	undefined undefined	275.000.000,00				- 1.400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 (08 06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	undefined undefined	125.000.000,00		- 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	- 400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 (08 06	2.01	0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lembaga	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	250,000,000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 (08 06	2.01	0006	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 (08 06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	undefined undefined	150.000.000,00		- 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, Masyarakat	- 1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 (08 06	2.02	0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	20 Orang	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, Masyarakat	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 (08 06	2.02	0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, Masyarakat	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 (08 06	2.02	0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	10 Lembaga	50.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, Masyarakat	550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
136					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang memerlukan - perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	undefined undefined	1.200.000.000,00					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		08 07			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota	undefined undefined	150.000.000,00		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, Masyarakat		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2 (08 07	2.01	0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	2 Dokumen	100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, Masyarakat	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



	2 (08 07	2.01	0007	Advokasi dan sosialisasi	Jumlah pengambil kebijakan dan		1 Kegiatan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 1. Penataan dan	Perangkat Daerah,	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
	- -				pencegahan KtA kepada pengambil	pemangku kepentingan yang			Semua Kecamatan,		Pengembangan Tata Kelola	Masyarakat		PEREMPUAN DAN
					kebijakan dan pemangku	mendapatkan Advokasi dan			Semua Kel/Desa		Pemerintahan dan Pelayanan	Wasyarakat		PERLINDUNGAN ANAK
					kepentingan Kewenangan	sosialisasi pencegahan KtA			Serial Rely Sesa		Publik			- Exemportor at 7 at 7 at 7 at 7 at 7 at 7 at 7 at
					Kabupaten/Kota	tingkatKab/Kota					Tubik			
	2 0	08 07	2.02	2	Penyediaan Layanan bagi Anak	Jumlah penyediaan layanan bagi -		undefined	900.000.000,00		- 1. Penataan dan	Masyarakat	- 2,550,000,000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
	- -				yang Memerlukan Perlindungan	anak yang memerlukan		undefined			Pengembangan Tata Kelola	,		PEREMPUAN DAN
					Khusus yang Memerlukan	perlindungan khusus yang		andenned			Pemerintahan dan Pelayanan			PERLINDUNGAN ANAK
					Koordinasi Tingkat Daerah	memerlukan koordinasi tingkat					Publik			- English of the Father
					Kabupaten/Kota	daerah Kabupaten/Kota								
-	2 0	08 07	2.02	2 0008		Jumlah Anak Korban Kekerasan		100 Orang	700.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DRH)	- 1. Penataan dan	Masyarakat	1 500 000 000 00	DINAS PEMBERDAYAAN
	2	00 07	2.02	0000	Penjangkauan bagi Anak Korban	yang mendapatkan Layanan		100 Orang	Semua Kecamatan,	DAINA DAGITIASIE (DDII)	Pengembangan Tata Kelola	iviasyarakat	1.500.000.000,00	PEREMPUAN DAN
					Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			1	Semua Kel/Desa		Pemerintahan dan Pelayanan			PERLINDUNGAN ANAK
					Rekerasan inigkat kabupaten kota	korban Tingkat Kabupaten/Kota			Schlad Kely Desa		Publik			I EKEMPONGAN ANAK
	2 0	08 07	2.02	2 0011	layanan gelar kasus bagi Anak	Jumlah Anak Korban Kekerasan		50 Orang	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 1. Penataan dan	Masyarakat	250,000,000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
	- `	00 07	2.02	0011	Korban Kekerasan Tingkat	yang mendapatkan layanan gelar		30 014116	Semua Kecamatan,	Britis (BBI)	Pengembangan Tata Kelola	i via syarana c	250.000.000,00	PEREMPUAN DAN
					Kabupaten/Kota	kasus bagi Perempuan Korban			Semua Kel/Desa		Pemerintahan dan Pelayanan			PERLINDUNGAN ANAK
					na suparen y no a	Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			Serial Rey Sesa		Publik			T ENEMOSITORIUM
						nenerasan migrae nasapaten nota					T dom			
-	2 0	08 07	2.02	2 0013	Layanan pendampingan korban	Jumlah Anak Korban Kekerasan		50 Orang	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DRH)	- 1. Penataan dan	Masyarakat	800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
	- 1 '	3/	2.52	0013	bagi Anak Korban Kekerasan	yang mendapatkan pendampingan		30 0.0.5	Semua Kecamatan,		Pengembangan Tata Kelola	,	555.000.000,00	PEREMPUAN DAN
				1	Tingkat Kabupaten/Kota	korban Tingkat Kabupaten/Kota			Semua Kel/Desa		Pemerintahan dan Pelayanan			PERLINDUNGAN ANAK
				1	g.ac Rabapaterij Rota	nordan migkat kabapaten kota			Seriida Kel/ Desa		Publik			. E.E. IDOITOAN ANAK
 	2 0	08 07	2.03	3	Penguatan dan Pengembangan	Jumlah lembaga layanan anak yang -	+ +	undefined	150.000.000,00		- 1. Penataan dan	Perangkat Daerah,	- 650,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN
	- `		2.00	´	Lembaga Penyedia Layanan bagi	dibentuk		undefined	130,000,000,00		Pengembangan Tata Kelola	Masyarakat		PEREMPUAN DAN
					Anak yang Memerlukan	ulbertuk		undenned			Pemerintahan dan Pelayanan	iviasyarakat		PERLINDUNGAN ANAK
				1	Perlindungan Khusus Tingkat						Publik			. ELLINDONOMN MIVAR
				1	Daerah Kabupaten/Kota						FUJIK			
 	2 0	08 07	2 03	3 0011		Jumlah Lembaga penyedia layanan		10 Lembaga	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DRH)	- 1. Penataan dan	Perangkat Daerah,	350,000,000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
	2 0	08 07	2.03	0011	dan pengembangan lembaga	bagi Anak yang Memerlukan		10 Lerribaga	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola	Masyarakat	330.000.000,00	PEREMPUAN DAN
					penyedia layanan bagi Anak yang	Perlindungan Khusus Tingkat			Semua Kel/Desa		Pemerintahan dan Pelayanan	iviasyai akat		PERLINDUNGAN ANAK
					Memerlukan Perlindungan Khusus	Daerah Kabupaten/Kota tingkat			Serriua Keij Desa		Publik			FEREINDONGAN ANAK
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang mendapatkan					FUSIK			
					Tiligkat Daerali Kabupateli/Kota	advokasi dan sosialisasi (lembaga								
						pemerintah dan non pemerintah)								
						pemerintan dan non pemerintan)								
—	2 (
		no n7	2.02	0013		lumlah keriacama antar lembaga		1 Dokumon	E0 000 000 00 Kah Kutai Kartanogara	DAMA BACI HASII (DBH)	1 Ponataan dan	Borongkat Daorah	200,000,000,00	DINIAC DEMADED DAVAAN
	- `	08 07	2.03	3 0012		Jumlah kerjasama antar lembaga		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 1. Penataan dan	Perangkat Daerah,	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
1		08 07	2.03	3 0012	lembaga penyedia layanan bagi	penyedia layanan bagi Anak yang		1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola	Perangkat Daerah, Masyarakat	·	PEREMPUAN DAN
		08 07	2.03	3 0012	lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan	penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		1 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		·	
		08 07	2.03	3 0012	lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat	penyedia layanan bagi Anak yang		1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola		·	PEREMPUAN DAN
		08 07	2.03	3 0012	lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan	penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			PEREMPUAN DAN
	2	08 07	2.03	3 0012	lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan	penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	ian dasar	1 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		68.015.460.000,00	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGAN
	2		2.03	3 0012	lembaga penyédia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Y	penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	NAN DASAR	1 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		68.015.460.000,00 68.015.460.000,00	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGAP DINAS KETAHANAN PANGAP
:	2 2 0	09		3 0012	lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Y	penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAN.	IAN DASAR		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 68.015.460.000,00	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI
	2 2 0	09		0012	lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Y URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	IAN DASAR	1 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 68.015.460.000,00	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI
:	2 2 0	09		0012	lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Y URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAN.	IAN DASAR		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 68.015.460.000,00	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGAN
137	2 2 0 2 0	09 01			lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Y URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAN. PANGAN Nilai SAKIP perangkat daerah	NAN DASAR	81 Nilai	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 - 21.185.000.000,00	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
137	2 2 0 2 0	09			lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Y URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAN. PANGAN Nilai SAKIP perangkat daerah Jumlah dokumen -	IAN DASAR		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola		68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 - 21.185.000.000,00	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI
137	2 2 0 2 0	09 01			lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Y URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAN. PANGAN Nilai SAKIP perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan	IAN DASAR	81 Nilai	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang		68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 - 21.185.000.000,00	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI
137	2 2 0 2 0	09 01			lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Y URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAN. PANGAN Nilai SAKIP perangkat daerah Jumlah dokumen -	NAN DASAR	81 Nilai	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 - 21.185.000.000,00	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI
137	2 2 0 2 0	09 01			lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Y URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAN. PANGAN Nilai SAKIP perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan	IAN DASAR	81 Nilai	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 - 21.185.000.000,00	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI
137	2 2 0 2 0	09 01			lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Y URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAN. PANGAN Nilai SAKIP perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan	NAN DASAR	81 Nilai	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 - 21.185.000.000,00	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI
137	2 2 0 2 0	09 01			lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Y URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAN. PANGAN Nilai SAKIP perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan	IAN DASAR	81 Nilai	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 - 21.185.000.000,00	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI
137	2 2 0 2 0	09 01			lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Y URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAN. PANGAN Nilai SAKIP perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan	IAN DASAR	81 Nilai	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 - 21.185.000.000,00	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI
137	2 2 0 2 0	09 01			lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Y URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAN. PANGAN Nilai SAKIP perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan	NAN DASAR	81 Nilai	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 - 21.185.000.000,00	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
137	2 2 0 2 0	09 01			lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Y URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAN. PANGAN Nilai SAKIP perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan	IAN DASAR	81 Nilai	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dar Pelayanan		68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 - 21.185.000.000,00	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI
137	2 2 2 0	09 01 09 01 09 01	2.01	L .	lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Y URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAN. PANGAN Nilai SAKIP perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	IAN DASAR	81 Nilai 15 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00 11.775.265.612,00 500.000.000,00		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 - 21.185.000.000,00 - 1.000.000.000,00	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI
137	2 2 2 0	09 01 09 01 09 01	2.01	L .	lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Y URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan	penyedia layanan bagi Anak yang Memeriukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAN. PANGAN Nilai SAKIP perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan	NAN DASAR	81 Nilai	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00 11.775.265.612,00 500.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola		68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 - 21.185.000.000,00 - 1.000.000.000,00	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI
137	2 2 2 0	09 01 09 01 09 01	2.01	L .	lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Y URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAN. PANGAN Nilai SAKIP perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	IAN DASAR	81 Nilai 15 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00 11.775.265.612,00 500.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang publik		68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 - 21.185.000.000,00 - 1.000.000.000,00	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI
137	2 2 2 0	09 01 09 01 09 01	2.01	L .	lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Y URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan	penyedia layanan bagi Anak yang Memeriukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAN. PANGAN Nilai SAKIP perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan	IAN DASAR	81 Nilai 15 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00 11.775.265.612,00 500.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 - 21.185.000.000,00 - 1.000.000.000,00	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGA DINAS KETAHANAN PANGA DINAS KETAHANAN PANGA DINAS KETAHANAN PANGA DINAS KETAHANAN PANGA
137	2 2 2 0	09 01 09 01 09 01	2.01	L .	lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Y URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan	penyedia layanan bagi Anak yang Memeriukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAN. PANGAN Nilai SAKIP perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan	IAN DASAR	81 Nilai 15 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00 11.775.265.612,00 500.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 - 21.185.000.000,00 - 1.000.000.000,00	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGA DINAS KETAHANAN PANGA DINAS KETAHANAN PANGA DINAS KETAHANAN PANGA DINAS KETAHANAN PANGA
137	2 2 2 0	09 01 09 01 09 01	2.01	L .	lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Y URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan	penyedia layanan bagi Anak yang Memeriukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAN. PANGAN Nilai SAKIP perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan	IAN DASAR	81 Nilai 15 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00 11.775.265.612,00 500.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 - 21.185.000.000,00 - 1.000.000.000,00	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGA DINAS KETAHANAN PANGA DINAS KETAHANAN PANGA DINAS KETAHANAN PANGA DINAS KETAHANAN PANGA
137	2 2 2 0	09 01 09 01 09 01	2.01	L .	lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Y URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan	penyedia layanan bagi Anak yang Memeriukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAN. PANGAN Nilai SAKIP perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan	NAN DASAR	81 Nilai 15 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00 11.775.265.612,00 500.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 - 21.185.000.000,00 - 1.000.000.000,00	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI
137	2 2 2 0	09 01 09 01 09 01	2.01	L .	lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Y URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan	penyedia layanan bagi Anak yang Memeriukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAN. PANGAN Nilai SAKIP perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan	IAN DASAR	81 Nilai 15 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00 11.775.265.612,00 500.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 - 21.185.000.000,00 - 1.000.000.000,00	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI
137	2 2 2 0	09 01 09 01 09 01	2.01	L .	lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Y URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan	penyedia layanan bagi Anak yang Memeriukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAN. PANGAN Nilai SAKIP perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan	NAN DASAR	81 Nilai 15 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00 11.775.265.612,00 500.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Auntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 - 21.185.000.000,00 - 1.000.000.000,00	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI DINAS KETAHANAN PANGAI
137	2 2 2 0	09 01 09 01 09 01	2.01	L .	lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Y URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan	penyedia layanan bagi Anak yang Memeriukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAN. PANGAN Nilai SAKIP perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan	NAN DASAR	81 Nilai 15 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.868.585.612,00 52.868.585.612,00 11.775.265.612,00 500.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 68.015.460.000,00 - 21.185.000.000,00 - 1.000.000.000,00	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN



2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		5 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					untuk mendukung transformasi pelayanan publik			
											Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang	-	200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
									Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel untuk mendukung			
											transformasi pelayanan publik			
											Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
2	09	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
						Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel untuk mendukung			
											transformasi pelayanan publik			
											1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
2	09	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan		1 Data	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
						dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel untuk mendukung			
											transformasi pelayanan publik			
											1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
2	09	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan		1 Berita Acara	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
					yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan	Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel untuk mendukung			
					Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah					transformasi pelayanan publik			
											1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang	-	12 Dokumen	9.111.593.556,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	15.375.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
						akuntabel					profesional dan akuntabel untuk mendukung			
											transformasi pelayanan publik			
											1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		75 Orang/bulan	8.886.593.556,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang	-	15.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
									Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel untuk mendukung			
											transformasi pelayanan publik			
											1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	-					1	1	1 1	J		1	l		



	2 (09 01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
											transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	2 (09 01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/		12 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
					Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			
					Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
						Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran					untuk mendukung transformasi pelayanan			
						SKPD					publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	2 (09 01	2.02	8000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan		1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
					Prognosis Realisasi Anggaran	Analisis Prognosis Realisasi			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			
						Anggaran			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	2 0	09 01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah		-	12 Dokumen	200.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola		210.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
					pada Perangkat Daerah	Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah					pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			
						Dacian					untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik 1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
++	2 (09 01	2.02	0001	Penyusunan Perencanaan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	Publik - 7. Peningkatan tata kelola		50,000,000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	' `	05 01	2.03	0001	Kebutuhan Barang Milik Daerah	Milik Daerah SKPD		Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA DAGITIASIE (DDIT)	pemerintahan daerah yang		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN TANGAN
					SKPD				Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	2 (09 01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian		1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
			1		Milik Daerah SKPD	Barang Milik Daerah dan Hasil			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			
			1			Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel untuk mendukung			
			1			Ductur Ski D					transformasi pelayanan			
		l	1	1							publik			
											Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	2 (09 01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan		12 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		-	60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		l	1	1	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			
		l	1	1					Serial Key Sesa		untuk mendukung			
			1								transformasi pelayanan			
			1								publik 1. Penataan dan			
			1								Pengembangan Tata Kelola			
		l	1	1							Pemerintahan dan Pelayanan			
LI			1								Publik		1	1

2 09											T
	01	2.03 00		Jumlah Laporan Penatausahaan	1	Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola		50.000.000,00 DINAS KETAHANAN PAN
			Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		
							Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		
									untuk mendukung		
									transformasi pelayanan		
									publik		
									1. Penataan dan		
									Pengembangan Tata Kelola		
									Pemerintahan dan Pelayanan		
									Publik		
2 09	01	2.05	Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi -	9	Dokumen	145.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	-	1.000.000.000,00 DINAS KETAHANAN PA
			Perangkat Daerah	Kepegawaian					pemerintahan daerah yang		
			• • •						profesional dan akuntabel		
									untuk mendukung		
									transformasi pelayanan		
									publik		
									1. Penataan dan		
									Pengembangan Tata Kelola		
									Pemerintahan dan Pelayanan		
									Publik		
2 09	01	2.05 00	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	 	Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HACII (DDLI)	- 7. Peningkatan tata kelola	<u> </u>	50.000.000,00 DINAS KETAHANAN PAN
2 09	01	2.05 00				DOKUITIETT		DAINA BAGI HASIL (DBH)			SULUUULUUU,UU DIINAS KETAHANAN PAN
	1 1	1 1	Informasi Kepegawaian	dan Pelaksanaaan Sistem Informasi			Semua Kecamatan,	1	pemerintahan daerah yang		
J			1	Kepegawaian			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel	I	
	1 1	1 1						1	untuk mendukung		
	1 1	1 1						1	transformasi pelayanan		
J			1						publik	I	
	1 1	1 1						1	1. Penataan dan		
	1 1	1 1						1			
									Pengembangan Tata Kelola		
									Pemerintahan dan Pelayanan		
									Publik		
2 09	01	2.05 00	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	3	0 Orang	120.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola		300.000.000,00 DINAS KETAHANAN PAN
"	1 1	1 1	Berdasarkan Tugas dan Fungsi	dan Fungsi yang Mengikuti			Semua Kecamatan,	,,	pemerintahan daerah yang		
J				Pendidikan dan Pelatihan			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel	I	
J		1 1		rendunan dan Pelatinan			Serilua kel/Desa	1		l	
J		1 1						1	untuk mendukung	l	
J			1						transformasi pelayanan	I	
	1 1	1 1						1	publik		
J		1 1						1	1. Penataan dan	l	
J		1 1						1			
	1 1					1			Pengembangan Tata Kelola		
	1 1								Pengembangan Tata Kelola		
1									Pemerintahan dan Pelayanan		
									Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
2 09	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat	Jumlah layanan Administrasi -		2 Layanan	690.000.000,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola	-	1.500.000.000,00 DINAS KETAHANAN PA
2 09	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi - Umum Perangkat Daerah	1	2 Layanan	690.000.000		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	1.500.000.000,00 DINAS KETAHANAN PA
2 09	01	2.06			1	2 Layanan	690.000.000,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola	-	1.500.000.000,00 DINAS KETAHANAN PA
2 09	01	2.06			1	2 Layanan	690.000.000,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	1.500.000.000,00 DINAS KETAHANAN PA
2 09	01	2.06			1	2 Layanan	00,000.000.000		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	1.500.000.000,00 DINAS KETAHANAN PA
2 09	01	2.06			1	2 Layanan	690.000.000,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	1.500.000.000,00 DINAS KETAHANAN PAI
2 09	01	2.06			1	2 Layanan	690.000.000,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1.500.000.000,00 DINAS KETAHANAN PA
2 09	01	2.06			1	2 Layanan	690.000.000,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	1.500.000.000,00 DINAS KETAHANAN PA
2 09	01	2.06			1	2 Layanan	690.000.000,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	1.500.000.000,00 DINAS KETAHANAN PA
2 09	01	2.06			1	2 Layanan	690.000.000,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-	1.500.000.000,00 DINAS KETAHANAN PA
2 09	01	2.06			1	2 Layanan	690.000.000,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	1.500.000.000,00 DINAS KETAHANAN PA
			Daerah	Umum Perangkat Daerah		·		DAM DATIMEN (POS	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	
			Daerah Deerah Penyediaan Peralatan dan	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan		2 Layanan Paket	140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-	1.500.000.000,00 DINAS KETAHANAN PAI
			Daerah	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		·	140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	
			Daerah Deerah Penyediaan Peralatan dan	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan		·	140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel	-	
			Daerah Deerah Penyediaan Peralatan dan	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		·	140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	
			Daerah Deerah Penyediaan Peralatan dan	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		·	140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	
			Daerah Deerah Penyediaan Peralatan dan	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		·	140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	
			Daerah Deerah Penyediaan Peralatan dan	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		·	140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	
			Daerah Deerah Penyediaan Peralatan dan	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		·	140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	
2 09			Daerah Deerah Penyediaan Peralatan dan	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		·	140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola		
			Daerah Deerah Penyediaan Peralatan dan	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		·	140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-	
			Daerah Deerah Penyediaan Peralatan dan	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		·	140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola		
2 09	01	2.06 00	Daerah 22 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dareah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	100.000.000,000 DINAS KETAHANAN PAN
2 09	01	2.06 00	Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah		·	140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 2. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-	
2 09	01	2.06 00	Daerah 22 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 2. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 2. Penataan dan Pelayanan Publik - Penerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	100.000.000,000 DINAS KETAHANAN PAN
2 09	01	2.06 00	Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah		Paket	140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik	-	100.000.000,000 DINAS KETAHANAN PAR
2 09	01	2.06 00	Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah		Paket	140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pemerintahan daerah yang Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penagaman Tata Kelola Pemerintahan darah Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	100.000.000,000 DINAS KETAHANAN PAR
2 09	01	2.06 00	Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah		Paket	140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pemerintahan daerah yang Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penagaman Tata Kelola Pemerintahan darah Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	100.000.000,000 DINAS KETAHANAN PAR
2 09	01	2.06 00	Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah		Paket	140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	100.000.000,000 DINAS KETAHANAN PAN
2 09	01	2.06 00	Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah		Paket	140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 2. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		100.000.000,000 DINAS KETAHANAN PAN
2 09	01	2.06 00	Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah		Paket	140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penatasi dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	100.000.000,000 DINAS KETAHANAN PAN
2 09	01	2.06 00	Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah		Paket	140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		100.000.000,000 DINAS KETAHANAN PAN
2 09	01	2.06 00	Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah		Paket	140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penatasi dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		100.000.000,000 DINAS KETAHANAN PAN



2	0	9 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
										untuk mendukung transformasi pelayanan publik			
										Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	0	9 01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
										untuk mendukung transformasi pelayanan publik			
										1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	0	9 01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
										untuk mendukung transformasi pelayanan			
										publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	0	9 01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
								Schlad Key Sesa		untuk mendukung transformasi pelayanan			
										publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
1	0	9 01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2000 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
								Schlad Key Sesa		untuk mendukung transformasi pelayanan			
										publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	0	9 01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
										untuk mendukung transformasi pelayanan			
										publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	0	9 01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang - Diadakan	100 Unit	310.217.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	1.325.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
										untuk mendukung transformasi pelayanan			
										publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
										Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			



2 09											
	01 2.0	07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin		100 Unit	310.217.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	1.000.000.000,00 DINAS KETAHANAN PAN
			Lainnya	Lainnya yang Disediakan			Semua Kecamatan,	, ,	pemerintahan daerah yang		
					1		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		
					1		Serial Kely Sesa		untuk mendukung		
					1				transformasi pelayanan		
					1						
					1				publik		
									1. Penataan dan		
									Pengembangan Tata Kelola		
									Pemerintahan dan Pelayanan		
					1				Publik		
2 09	01 2.0	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah waktu penyediaan Jasa	-	12 Bulan	568.455.056,00		- 7. Peningkatan tata kelola		225.000.000,00 DINAS KETAHANAN PAN
			Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	1				pemerintahan daerah yang		
			remembanan baeran	Daerah yang disediakan	1				profesional dan akuntabel		
				Daeran yang disediakan					untuk mendukung		
					1						
					1				transformasi pelayanan		
									publik		
									1. Penataan dan		
					1				Pengembangan Tata Kelola		
									Pemerintahan dan Pelayanan		
					1				Publik		
2 09	01 2.0	08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	i i	12 Laporan	60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	60.000.000,00 DINAS KETAHANAN PAN
			Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan	1		Semua Kecamatan,	. ,	pemerintahan daerah yang		· 1
	1 1			Listrik yang Disediakan	1 1		Semua Kel/Desa	1	profesional dan akuntabel		
	1 1			LIST IN YOUR DISCUIRNAII	1 1		Selliua Kely DeSd	1	untuk mendukung		
					1						
	1 1			1	1 1			1	transformasi pelayanan		
				1	1				publik		
				1	1				1. Penataan dan		
									Pengembangan Tata Kelola		
									Pemerintahan dan Pelayanan		
					1				Publik		
2 09	01 2.0	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		4 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	50.000.000,00 DINAS KETAHANAN PAN
			Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1		Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		
				yang Disediakan			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		
				yang biscalakan			Schild Rely Sesa		untuk mendukung		
					1				transformasi pelayanan		
					1				publik		
					1						
									1. Penataan dan		
									Pengembangan Tata Kelola		
									Pemerintahan dan Pelayanan		
2 09	01 2.0	08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	458.455.056,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan	-	115.000.000,00 DINAS KETAHANAN PAN
2 09	01 2.0	08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang		12 Laporan	458.455.056,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	115.000.000,00 DINAS KETAHANAN PAN
2 09	01 2.0	08 0004		Pelayanan Umum Kantor yang		12 Laporan	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	115.000,000,00 DINAS KETAHANAN PAN
2 09	01 2.0	08 0004		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	115.000.000,00 DINAS KETAHANAN PAN
2 09	01 2.0	08 0004		Pelayanan Umum Kantor yang		12 Laporan	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	115.000.000,00 DINAS KETAHANAN PAN
2 09	01 2.0	08 0004		Pelayanan Umum Kantor yang		12 Laporan	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		115.000,000,00 DINAS KETAHANAN PAN
2 09	01 2.0	08 0004		Pelayanan Umum Kantor yang		12 Laporan	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	115.000.000,00 DINAS KETAHANAN PAN
2 09	01 2.0	08 0004		Pelayanan Umum Kantor yang		12 Laporan	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	115.000.000,00 DINAS KETAHANAN PAN
2 09	01 2.0	08 0004		Pelayanan Umum Kantor yang		12 Laporan	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	115,000,000,00 DINAS KETAHANAN PAN
2 09	01 2.0	08 0004		Pelayanan Umum Kantor yang		12 Laporan	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-	115.000.000,00 DINAS KETAHANAN PAN
			Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	
	01 2.0		Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan 13 Unit	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-	115.000.000,00 DINAS KETAHANAN PAN
			Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Barang Milik Daerah yang	-		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola		
			Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang	-	
			Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Barang Milik Daerah yang	-		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		
			Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Barang Milik Daerah yang	-		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		
			Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Barang Milik Daerah yang	-		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		
			Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Barang Milik Daerah yang	-		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik		
			Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Barang Milik Daerah yang	-		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	
			Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Barang Milik Daerah yang	-		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola		
			Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Barang Milik Daerah yang	-		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		
			Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Barang Milik Daerah yang	-		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola	-	
2 09		09	Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Barang Milik Daerah yang	-		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		
2 09	01 2.0	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	-	30 Unit	Semua Kezamatan, Semua Kel/Desa		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	550.000.000,000 DINAS KETAHANAN PAN
2 09	01 2.0	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	-	30 Unit	Semua Kezamatan, Semua Kel/Desa		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dara Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Palayanan Publik		550.000.000,000 DINAS KETAHANAN PAN
2 09	01 2.0	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	-	30 Unit	Semua Kezamatan, Semua Kel/Desa		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		550.000.000,00 DINAS KETAHANAN PAR
2 09	01 2.0	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	-	30 Unit	Semua Kezamatan, Semua Kel/Desa		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penatanan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Auntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	550.000.000,000 DINAS KETAHANAN PAN
2 09	01 2.0	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	-	30 Unit	Semua Kezamatan, Semua Kel/Desa		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dara Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan transformasi pelayanan publik		550.000.000,000 DINAS KETAHANAN PAN
2 09	01 2.0	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	-	30 Unit	Semua Kezamatan, Semua Kel/Desa		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung tansformasi pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		550.000.000,000 DINAS KETAHANAN PAN
2 09	01 2.0	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	-	30 Unit	Semua Kezamatan, Semua Kel/Desa		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan		550.000.000,000 DINAS KETAHANAN PAN
2 09	01 2.0	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	-	30 Unit	Semua Kezamatan, Semua Kel/Desa		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola	-	550.000.000,000 DINAS KETAHANAN PAN
2 09	01 2.0	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	-	30 Unit	Semua Kezamatan, Semua Kel/Desa		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan		550.000.000,000 DINAS KETAHANAN PAN



	2	09 01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		30 Unit	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		300.000.000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09 01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50 Unit	100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
138	2	09 02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Ketersediaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	-	10 Unit	15.770.000.000,00					-	21.075.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	09 02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		10 Unit	15.770.000.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Kelompok Tani - Gabungan Kelompok Tani	-	21.075.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	009 02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia		80 Unit	10.770.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Kelompok Tani - Gabungan Kelompok Tani		10.750.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

2	09	02	2.01													
				0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan	Jumlah Infrastruktur Cadangan		13 unit	5.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan	4. Membangun Infratruktur	Kelompok Tani -		10.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
					Pangan Pemerintah	Pangan Pemerintah			Loa Kulu, Semua		infrastruktur dan	Konektivitas	Gabungan Kelompok			
					Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang tersedia			Kel/Desa		meningkatkan lapangan kerja	5. Penguatan Daya Saing	Tani			
					, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			Kab. Kutai Kartanegara,		yang berkualitas, mendorong	Ekonomi Daerah yang				
									Anggana, Semua		kewirausahaan,	Unggul, Bernilai tambah dan				
									Kel/Desa		mengembangkan industri	Berkelanjutan				
									Kab. Kutai Kartanegara,		kreatif serta	berkelanjutan				
1 1 '									Muara Badak, Semua		mengembangkan					
									Kel/Desa		agromaritim industri di					
									Kab. Kutai Kartanegara,		sentra produksi melalui					
									Sebulu, Semua		peran aktif koperasi.					
									Kel/Desa							
									Kab. Kutai Kartanegara,							
									Kota Bangun, Semua							
									Kel/Desa							
									Kab. Kutai Kartanegara,							
									Muara Kaman, Semua							
									Kel/Desa							
									Kab. Kutai Kartanegara,							
									Tenggarong Seberang,							
									Semua Kel/Desa							
1 1 '	1								Kab. Kutai Kartanegara,							
'	1		l													
'	1		l						Marang Kayu, Semua							
1 1 '	1		l						Kel/Desa					1		
									Kab. Kutai Kartanegara,							
									Muara Wis, Semua							
									Kel/Desa							
139 2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN	Kecukupan Konsumsi Energi	-	2225	19.087.960.000,00					-	19.705.460.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
					DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN	Kecukupan Konsumsi Protein		Kkal/Kapita/Hari								
					PANGAN MASYARAKAT			57,25								
								Gram/Kapita/Ha								
								ri								
								"								
2	09	03	2 01		Penyediaan dan Penyaluran	Stabilitas Harga Pangan (Koefisien	_	5 Persen	8.322.960.000,00		1-	4. Membangun Infratruktur			11 305 460 000 00	DINAS KETAHANAN PANGAN
-	03	0.5	2.01		Pangan Pokok atau Pangan Lainnya	Variasi Harga Pangan / Beras)		J reiseil	0.322.300.000,00			Konektivitas			11.303.400.000,00	DINAS RETAINANTAINT ANGAIN
					sesuai dengan Kebutuhan Daerah	Variasi Haiga Faligati / Berasj										
												5. Penguatan Daya Saing				
					Kabupaten/Kota dalam rangka							Ekonomi Daerah yang				
					Stabilisasi Pasokan dan Harga							Unggul, Bernilai tambah dan				
					Pangan							Berkelanjutan				
	00	02	2.01	0002	Daniel de la Company de la Com	Daniel Barbaria Comban Barra Label		10 Laporan	1.080.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BACILIACII (DDII)		4.44		-	2 600 000 000 00	DINAS KETAHANAN PANGAN
'	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		10 Laporari		DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Membangun Infratruktur	-		3.600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
					Sumber Daya Lokal	yang Tersedia			Loa Kulu, Semua			Konektivitas				
									Kel/Desa			5. Penguatan Daya Saing				
									Kab. Kutai Kartanegara,			Ekonomi Daerah yang				
									Loa Janan, Semua			Unggul, Bernilai tambah dan				
									Kel/Desa			Berkelanjutan				
									Kab. Kutai Kartanegara,							
									Anggana, Semua							
									Kel/Desa							
1 1 '	1								Kab. Kutai Kartanegara,							
1 1 '	1								Tenggarong, Semua							
1 1 '	1	1 1	l			1			Kel/Desa	1	1			1		1
1 1 '	1								Kab. Kutai Kartanegara,							
1 1 '	1		l						Sebulu, Semua							
'	1															
1 1 '	1								Kel/Desa							
1 1 '	1	1 1	l			1			Kab. Kutai Kartanegara,	1	1			1		1
'	1		l						Kota Bangun, Semua							
'	1								Kel/Desa							
1 1 '	1								Kab. Kutai Kartanegara,							
1 1 '	1								Muara Kaman, Semua							
1 1 '	1		l						Kel/Desa							
	1		l						Kab. Kutai Kartanegara,							
1 1 1	1								Tenggarong Seberang,							
1 1									Semua Kel/Desa							
			l						Kab. Kutai Kartanegara,					1		
									Marang Kayu, Semua					1		
										1		1				
									Kel/Desa							
				2001											***************************************	
2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan		2 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.01	0003	Pelaksanaan Distribusi Pangan	Pelaksanaan Distribusi Pangan		2 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.01	0003				2 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

2 09	9 03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti		250 Keluarga	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 4. Membangun Infratruktur	-	500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
				Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan			Loa Kulu, Semua	, ,	Konektivitas			
				neradiga	Keluarga			Kel/Desa		5. Penguatan Daya Saing			
					Keldalga			Kab. Kutai Kartanegara,		Ekonomi Daerah yang			
								Nab. Nutai Nai tallegala,					
								Muara Kaman, Semua		Unggul, Bernilai tambah dan			
								Kel/Desa		Berkelanjutan			
								Kab. Kutai Kartanegara,					
								Samboja, Semua					
								Kel/Desa					
								Kab. Kutai Kartanegara,					
								Pulau Seluan, Semua					
								Kel/Desa					
								Kab. Kutai Kartanegara,					
								Kota Bangun Darat,					
								Semua Kel/Desa					
2 09	9 03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan		2 laporan	4.730.460.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA ALOKASI UMUM	≘ =	=	3.030.460.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
				Pangan Tingkat Produsen dan	dan Harga Pangan Tingkat			Semua Kecamatan,	(DAU)				
				Konsumen di Kabupaten/Kota	Produsen dan Konsumen di			Semua Kel/Desa	(5,10)				
				Konsumen ar Kabapateny Kota	Kabupaten/Kota			Schlad Kely Besa					
													
2 09	9 03	2.01	0009		Jumlah laporan pengembangan		6 Laporan	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 4. Membangun Infratruktur	Ī	2.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
				Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				Loa Kulu, Semua		Konektivitas			
					sumber daya lokal			Kel/Desa		5. Penguatan Daya Saing			
								Kab. Kutai Kartanegara,		Ekonomi Daerah yang			
								Loa Janan, Semua		Unggul, Bernilai tambah dan			
								Kel/Desa		Berkelanjutan			
								Kab. Kutai Kartanegara,		Der Keldinjatan			
								Muara Badak, Semua					
								Kel/Desa					
								Kab. Kutai Kartanegara,					
								Sebulu, Semua					
								Kel/Desa					
								Kab. Kutai Kartanegara,					
								Kota Bangun, Semua					
		1			l	1	1	Kel/Desa					
		1			l	1	1						
		1			l	1	1	Kab. Kutai Kartanegara,					
		1			l	1	1	Muara Kaman, Semua					
		1			l	1	1	Kel/Desa					
		1			l	1	1	Kab. Kutai Kartanegara,					
		1			l	1	1	Tenggarong Seberang,					
								Semua Kel/Desa					
		1			l	1	1	Jemaa Key Desa					
						1							
						1							
	1	1	1				1 1		l			I	l

2	09 03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan	Jumlah Kelembagaan Distribusi		15 Unit	1.362.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 4. Membangun Infratruktur	=	1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		1		Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Pangan			Loa Kulu, Semua		Konektivitas			
								Kel/Desa		5. Penguatan Daya Saing			
								Kab. Kutai Kartanegara,		Ekonomi Daerah yang			
		1						Loa Janan, Semua		Unggul, Bernilai tambah dan	1		
		1						Kel/Desa		Berkelanjutan			
								Kab. Kutai Kartanegara,					
								Muara Badak, Semua					
								Kel/Desa					
								Kab. Kutai Kartanegara,					
								Sebulu, Semua					
								Kel/Desa					
								Kab. Kutai Kartanegara,					
								Muara Kaman, Semua					
								Kel/Desa					
								Kab. Kutai Kartanegara,					
								Tabang, Semua					
								Kel/Desa					
								Kab. Kutai Kartanegara,					
								Samboja, Semua					
		1						Kel/Desa					1
		1						Kab. Kutai Kartanegara,					
		1						Muara Jawa, Semua					
		1						Kel/Desa					1
		1			1			Kab. Kutai Kartanegara,			1		
		1						Tenggarong Seberang,					
		1						Semua Kel/Desa					
\rightarrow		1	L			<u> </u>							
2	09 03	2.01	0011	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan		2 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 4. Membangun Infratruktur	-	150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		1						Semua Kecamatan,		Konektivitas			1
		1						Semua Kel/Desa		5. Penguatan Daya Saing			1
		1								Ekonomi Daerah yang	1		
		1								Unggul, Bernilai tambah dan			1
		<u></u>	<u> </u>							Berkelanjutan			
2	09 03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga	Informasi harga pangan tingkat		2 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 4. Membangun Infratruktur	-	150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		1		Pangan Tingkat Produsen dan	Produsen dan Konsumen wilayah			Loa Janan, Semua	l ' '	Konektivitas		,	
		1		Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota				Kel/Desa		5. Penguatan Daya Saing			
		1						Kab. Kutai Kartanegara,		Ekonomi Daerah yang			1
		1						Anggana, Semua		Unggul, Bernilai tambah dan			
		1						Kel/Desa		Berkelanjutan			
		1						Kab. Kutai Kartanegara,		berkelanjulan			1
								Muara Badak, Semua					
								Kel/Desa					
								Kab. Kutai Kartanegara,					
								Tenggarong, Semua					
								Kel/Desa					
								Kab. Kutai Kartanegara,					
		1						Sebulu, Semua					1
		1						Kel/Desa					1
		1			1			Kab. Kutai Kartanegara,			1		
		1			1			Kota Bangun, Semua			1		
		1			1			Kel/Desa			1		
		1						Kab. Kutai Kartanegara,		1	1		
		1								1	1		
		1						Kembang Janggut,					
		1						Semua Kel/Desa					
		1											
		1											
		1											
		1											
		1											
2	09 03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi		1 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		-	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		1		Pemantauan Stok, Pasokan dan	pemantauan stok pangan, pasokan			Semua Kecamatan,	l ' '		1	,	
		1		Harga Pangan Pokok Strategis	pangan dan harga pangan Pokok			Semua Kel/Desa		1	1		
		1			Strategis								
2	09 03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan	Informasi Neraca Bahan Makanan		1 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 4. Membangun Infratruktur	-	150.000,000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
-	-5 05	1 2.01	0010	Makanan (NBM)	(NBM)		2 DONAITICIT	Semua Kecamatan,		Konektivitas		250.550.550,00	
	1	1	1	iviandilali (IVDIVI)	(IADIAI)					5. Penguatan Daya Saing	1		
						1	1	Semua Kel/Desa	ı	5. Penguatan Daya Saing	i I	i i	1
										Ekonomi Daerah yang			



2	2 0	9 03	2.01	0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		Membangun Infratruktur Konektivitas Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	-	225.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	2 0	9 03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kota yang diadakan	300 Ton	9.305.000.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	20 Kecamatan	5.250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	. 0	9 03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Ton	1.900.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	20 Kecamatan		Dinas Ketahanan Pangan
2	2 0	9 03	2.02	0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	150 Ton	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	A. Membangun Infratruktur Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	20 Kecamatan	150.000,000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	. 0	9 03	2.02	0008	Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang terfasilitasi	16 kelompok	7.255.00.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing	20 Kecamatan	2.500,000,000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN



2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target	Jumlah Pembinaan -		30 Kelompok	1.460.000.000,00	-	4. Membangun Infratruktur -	- 3.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGA
1			l		Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	Penganekaragaman Konsumsi					Konektivitas		
					sesuai dengan Angka Kecukupan	Pangan					5. Penguatan Daya Saing		
					Gizi						Ekonomi Daerah yang		
											Unggul, Bernilai tambah dan		
											Berkelanjutan		
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target	Target Konsumsi Pangan Per Kapita		1 Dokumen	110.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	4. Membangun Infratruktur -	150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
					Konsumsi Pangan Per Kapita Per	Per Tahun			Semua Kecamatan,		Konektivitas		
					Tahun				Semua Kel/Desa		5. Penguatan Daya Saing		
											Ekonomi Daerah yang		
											Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan		
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam	Jumlah Pemberdayaan Kelompok		32 Laporan	1.300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	4. Membangun Infratruktur -	2.700,000,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAI
					Penganekaragaman Konsumsi	Masyarakat dalam		,	Loa Kulu, Semua	, ,	Konektivitas		
					Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				Kel/Desa		5. Penguatan Daya Saing		
						Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			Kab. Kutai Kartanegara,		Ekonomi Daerah yang		
						, ,			Loa Janan, Semua		Unggul, Bernilai tambah dan		
									Kel/Desa		Berkelanjutan		
									Kab. Kutai Kartanegara,		, in the second		
									Anggana, Semua				
									Kel/Desa				
									Kab. Kutai Kartanegara,				
									Muara Badak, Semua				
									Kel/Desa				
									Kab. Kutai Kartanegara,				
									Muara Kaman, Semua				
									Kel/Desa				
									Kab. Kutai Kartanegara,				
									Samboja, Semua				
									Kel/Desa				
									Kab. Kutai Kartanegara,				
									Tenggarong Seberang,				
									Semua Kel/Desa				
									Kab. Kutai Kartanegara,				
									Pulau Seluan, Semua				
									Kel/Desa				
									Kab. Kutai Kartanegara,				
									Kota Bangun Darat,				
									Semua Kel/Desa				
2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi		2 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	4. Membangun Infratruktur -	150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGA
					Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi	Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi			Semua Kecamatan,		Konektivitas		
					per Kapita per Tahun	Per Kapita Per Tahun			Semua Kel/Desa		5. Penguatan Daya Saing		
											Ekonomi Daerah yang		
											Unggul, Bernilai tambah dan		
											Berkelanjutan		
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan - pada Daerah yang terindikasi		5 Desa	2.200.000.000,00			- 3.350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGA
					KERAWANAN PANGAN	Rawan Pangan Prioritas I							
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan	Tersusunnya Peta Kerentanan dan -		1 Dokumen	200.000.000,00	-	4. Membangun Infratruktur -	- 300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGA
					Ketahanan Pangan Kecamatan	Ketahanan Pangan Kecamatan					Konektivitas		
											5. Penguatan Daya Saing		
											Ekonomi Daerah yang		
											Unggul, Bernilai tambah dan		
						<u> </u>		<u> </u>			Berkelanjutan		
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan	Peta dan Analisis Ketahanan dan		1 Dokumen	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	4. Membangun Infratruktur -	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGA
		1 1	ļ		Analisis Peta Ketahanan dan	Kerentanan Pangan yang		1	Semua Kecamatan,		Konektivitas		
					Kerentanan Pangan	Dimutahirkan		1	Semua Kel/Desa		5. Penguatan Daya Saing		
					-						Ekonomi Daerah yang		
											Unggul, Bernilai tambah dan		
		1 1								1	Berkelanjutan		
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan -	1 1	5	2.000.000.000,00	j -	4. Membangun Infratruktur -	- 3.050.000.000.00	DINAS KETAHANAN PANGA
1					Kewenangan Kabupaten/Kota	pangan Yang Tertangani		Desa/Kelurahan			Konektivitas		
		1	ļ]		1 1			5. Penguatan Daya Saing		
		1	ļ					1			Ekonomi Daerah yang		
		1 1				1				1	Unggul, Bernilai tambah dan		
											Berkelanjutan		

	2 09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan,	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan,		10 Dokumen	1.800.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 4. Membangun Infratruktu	-	1.800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
					Pengelolaan, dan Penyaluran	dan Penyaluran Cadangan Pangan			Muara Muntai, Semua	1	Konektivitas		•	
					Cadangan Pangan pada Kerawanan				Kel/Desa		5. Penguatan Daya Saing			
					Pangan yang Mencakup dalam 1	Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah			Kab. Kutai Kartanegara,		Ekonomi Daerah yang			
					(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota			Anggana, Semua		Unggul, Bernilai tambah d	n		
									Kel/Desa		Berkelanjutan			
									Kab. Kutai Kartanegara,					
									Muara Badak, Semua					
									Kel/Desa					
									Kab. Kutai Kartanegara,					
									Sebulu, Semua					
									Kel/Desa					
									Kab. Kutai Kartanegara,					
									Kota Bangun, Semua					
									Kel/Desa					
									Kab. Kutai Kartanegara,					
									Kenohan, Semua					
									Kel/Desa					
									Kab. Kutai Kartanegara,					
									Muara Kaman, Semua					
1 1		1 1	1	1					Kel/Desa	İ				
1 1		1 1	1	1						İ				
1 1	1		1	1					Kab. Kutai Kartanegara,	İ			1	1
1 1		1 1	1	1					Tabang, Semua	İ				
	1		1	1					Kel/Desa	İ			1	1
									Kab. Kutai Kartanegara,					
									Marang Kayu, Semua					
									Kel/Desa					
									Kel/ Desa					
	2 09	04	2.02	0005	Penyusunan Peta Situasi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan		1 Dokumen	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 4. Membangun Infratruktu	-	300.000.000.00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	- 03		2.02	0005	Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota		2 DONAITIEIT	Semua Kecamatan,	Britter Britain Siz (BBri)	Konektivitas		300.000.000,00	DIE DIE NEIVE DIE NOTE PORTO
						Parigan dan dizi Kabupaten/Kota								
					Kabupaten/Kota				Semua Kel/Desa		5. Penguatan Daya Saing			
											Ekonomi Daerah yang			
											Unggul, Bernilai tambah d	n		
											Berkelanjutan			
141	2 00	05			PROGRAM PENGAWASAN	Cakupan Keamanan Pangan Segar	_	93 Persen	4.035.360.000,00				2 700 000 000 00	DINAS KETAHANAN PANGAN
141	2 09	, 03					-	33 reiseii	4.033.300.000,00				2.700.000.000,00	DINAS KETAHANAN FANGAN
					KEAMANAN PANGAN	Asal Tumbuhan Yang Aman di								
						Konsumsi								
\vdash	2 09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan	Konsumsi Terciptanya Keamanan Pangan	-	93 Persen	4.035.360.000,00		- 4. Membangun Infratruktu		2.700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09	05	2.01			Terciptanya Keamanan Pangan	-	93 Persen	4.035.360.000,00		- 4. Membangun Infratruktu Konektivitas		2.700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09	05	2.01		Keamanan Pangan Segar Daerah		-	93 Persen	4.035.360.000,00		Konektivitas		2.700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09	05	2.01			Terciptanya Keamanan Pangan	-	93 Persen	4.035.360.000,00		Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing	-	2.700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09	05	2.01		Keamanan Pangan Segar Daerah	Terciptanya Keamanan Pangan	•	93 Persen	4.035.360.000,00		Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang		2.700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09	05	2.01		Keamanan Pangan Segar Daerah	Terciptanya Keamanan Pangan	-	93 Persen	4.035.360.000,00		Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di		2.700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
					Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat					Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan			
		0 05			Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan	Terciptanya Keamanan Pangan	-	93 Persen 20 Dokumen	4.035.360.000,00 4.035.360.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di			DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
					Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat Jumlah Rekomendasi Keamanan			350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan			
					Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	-		350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan 4. Membangun Infratruktu Konektivitas			
					Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat Jumlah Rekomendasi Keamanan	-		350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Konektivitas S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas S. Penguatan Daya Saing			
					Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	-		350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang	n -		
					Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	-		350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di	n -		
	2 09	05	2.01	0004	Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	-	20 Dokumen	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan	n -	350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09		2.01	0004	Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	-		350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di	n -	350.000.000,00	
	2 09	05	2.01	0004	Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	-	20 Dokumen	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan	n -	350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09	05	2.01	0004	Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Perizinan keamanan	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan Keamanan pangan segar asal	-	20 Dokumen	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas	n -	350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09	05	2.01	0004	Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Perizinan keamanan	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		20 Dokumen	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing	n -	350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09	05	2.01	0004	Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Perizinan keamanan	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan Keamanan pangan segar asal	-	20 Dokumen	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang	n	350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09	05	2.01	0004	Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Perizinan keamanan	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan Keamanan pangan segar asal	-	20 Dokumen	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan	n	350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09	05	2.01	0004	Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Perizinan keamanan	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan Keamanan pangan segar asal		20 Dokumen	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan	n	350.000.000,00 350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09	0 05	2.01	0004	Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Perizinan keamanan	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan Keamanan pangan segar asal		20 Dokumen	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan	n	350.000.000,00 350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09	0 05	2.01	0004	Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Penyediaan Sarana Pengujian	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah sarana pengujian keamanan		20 Dokumen 20 Dokumen	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM	Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan 4. Membangun Infratruktu Berkelanjutan Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan 4. Membangun Infratruktu	n	350.000.000,00 350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09	0 05	2.01	0004	Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal		20 Dokumen 20 Dokumen	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.000.000,000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas	n	350.000.000,00 350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09	0 05	2.01	0004	Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah sarana pengujian keamanan		20 Dokumen 20 Dokumen	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM	Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing	n	350.000.000,00 350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09	0 05	2.01	0004	Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal		20 Dokumen 20 Dokumen	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM	Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang	n	350.000.000,00 350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09	0 05	2.01	0004	Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal		20 Dokumen 20 Dokumen	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM	Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Unggul, Bernilai tambah d Unggul, Bernilai tambah d	n	350.000.000,00 350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09	0 05	2.01	0004	Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal		20 Dokumen 20 Dokumen	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM	Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang	n	350.000.000,00 350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09	0 05	2.01	0004	Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal		20 Dokumen 20 Dokumen	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM	Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Unggul, Bernilai tambah d Unggul, Bernilai tambah d	n	350.000.000,00 350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09	0 05	2.01	0004	Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal		20 Dokumen 20 Dokumen	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 3.000.000,000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kel/Desa Kab. Kel/Desa Kab. Kel/Desa Kab. Kel/Desa Kab. Kel/Desa Kab. Kel/Desa Kab. Kel/Desa Kab. Kel/Desa Kab	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM	Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Unggul, Bernilai tambah d Unggul, Bernilai tambah d	n	350.000.000,00 350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09	0 05	2.01	0004	Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal		20 Dokumen 20 Dokumen	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Semua Kel/Desa 3.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM	Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Unggul, Bernilai tambah d Unggul, Bernilai tambah d	n	350.000.000,00 350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09	0 05	2.01	0004	Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal		20 Dokumen 20 Dokumen	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM	Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Unggul, Bernilai tambah d Unggul, Bernilai tambah d	n	350.000.000,00 350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09	0 05	2.01	0004	Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal		20 Dokumen 20 Dokumen	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Semua Kel/Desa 3.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM	Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Unggul, Bernilai tambah d Unggul, Bernilai tambah d	n	350.000.000,00 350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09	0 05	2.01	0004	Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal		20 Dokumen 20 Dokumen	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM	Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Unggul, Bernilai tambah d Unggul, Bernilai tambah d	n	350.000.000,00 350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09	0 05	2.01	0004	Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal		20 Dokumen 20 Dokumen	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM	Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Unggul, Bernilai tambah d Unggul, Bernilai tambah d	n	350.000.000,00 350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09	0 05	2.01	0004	Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal		20 Dokumen 20 Dokumen	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Semua Kel/Desa 3.000.000,000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM	Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Unggul, Bernilai tambah d Unggul, Bernilai tambah d	n	350.000.000,00 350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09	0 05	2.01	0004	Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal		20 Dokumen 20 Dokumen	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM	Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Unggul, Bernilai tambah d Unggul, Bernilai tambah d	n	350.000.000,00 350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09	0 05	2.01	0004	Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal		20 Dokumen 20 Dokumen	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM	Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Unggul, Bernilai tambah d Unggul, Bernilai tambah d	n	350.000.000,00 350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
	2 09	0 05	2.01	0004	Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal		20 Dokumen 20 Dokumen	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM	Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah di Berkelanjutan 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Berkelanjutan - 4. Membangun Infratruktu Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah d Unggul, Bernilai tambah d Unggul, Bernilai tambah d	n	350.000.000,00 350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN



	2 0	09 05	2.01	8000	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	20	0 Laporan	50.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Membangun Infratruktur Konektivitas Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang	-	150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
												Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
	2 0	09 05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2	Dokumen	285.360.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Membangun Infratruktur Konektivitas Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	-	350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
					Dinas Pertanahan dan Penataan Rua	l l			49.714.753.689,00			ber keranjutan		73.054.689.898,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YA	ING BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.075.000.000,00					6.950.000.000,00	
	1 0)3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG F	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			5.075.000.000,00					6.950.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
142	1 0	03 12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap - RTRW	85	5 Persen	5.075.000.000,00					- 6.950.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1 0	03 12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Indeks Perencanaan Tata Ruang -	4	Persen	1.150.000.000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1 0	03 12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1	Dokumen	550.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1 0	03 12	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1	Dokumen	400.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	600.000.000,00	PENATAAN RUANG
	1 0	03 12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang- undangan bidang penataan ruang.	1	Laporan	200.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	350.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1 0	03 12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelaksanaan Tata Ruang -	15	9.09 Persen	2.100.000,000		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	- 2.500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG



1	03	12	2.02		Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	2 Peta	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1.600.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	1.600.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.02	0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Kegiatan	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	300.000,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1			2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pemanfaatan Tata Ruang -	5.03 Persen	1.125.000.000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	12 Layanan	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	2 Dokumen	700.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	750.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pengendalian Tata Ruang -	3.75 Persen	700.000.000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	- 1.650.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG



	0	03 12	2.04	0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang		10 Kasus	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	200.000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	. 0	03 12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		1 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	300.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	0	03 12	2.04	0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif		15 Kasus	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	250.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	. 0	03 12	2.04	8000	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		1 Dokumen	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	!				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YA	ANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELA	YANAN DASAR	1	44.639.753.689,00					66.104.689.898,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
:	1	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I	PERTANAHAN			44.639.753.689,00					66.104.689.898,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
143	! 1	10 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	78 Nilai	17.317.021.505,00					- 26.504.689.858,00	
	! 1	10 01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi		15 Dokumen	500.000.000,00			, pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel , untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan	Masyarakat dan stakeholder lainnya	1.500.000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	! 1	10 01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya	450.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG



2	10	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		100.000,000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		1 Data	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		250.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Berita Acara	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		12 Laporan	11.404.869.505,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Masyarakat dan stakeholder lainnya	-		DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG



2	10	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		74 Orang/bulan	11.104.869.505,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		9.534.840.898,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	Membangun Infratruktur Konektivitas Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		25.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2 Laporan	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		250.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membangun Infratruktur Konektivitas Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		25.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) Pada Perangkat Daerah	-	3 Dokumen	125.000.000,00		sumber daya manusia (SDM),	6. Pengembangan	Masyarakat dan stakeholder lainnya	-		DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membangun Infratruktur Konektivitas Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		25.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG



2	10	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilalan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	Membangun Infratruktur Konektivitas G. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya			DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Junlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	-	2 Dokumen	225.000.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.		Masyarakat dan stakeholder lainnya	-		DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		30 Orang	200.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7 Layanan	901.310.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Masyarakat dan stakeholder lainnya	-	1.121.310.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG



2	10 (2.06	5 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		66.410.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan perem perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya	66.410.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10 (2.06	6 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya	210.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10 (2.06	5 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		219.900.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya	219.900.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10 0	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya	60.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10 (2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokume	en	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya	15.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10 (2.06	5 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	Membangun Infratruktur Konektivitas Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya	150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG



2	10	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		15 Laporan	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusi (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		100 persen	1.742.000.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	6. Pengembangan	Masyarakat dan stakeholder lainnya	-	11.116.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		4 Unit	72.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	Membangun Infratruktur Konektivitas Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	1.670.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	Membangun Infratruktur Konektivitas Fengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		10.516.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 Bulan	2.016.342.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Masyarakat dan stakeholder lainnya	-	1.880.038.960,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG



2	10	01 2	08 000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	522.342.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		522.342.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	01 2.	08 000	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.494.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		1.357.696,960,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	01 2.	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	46 Unit	402.500.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan	Masyarakat dan stakeholder lainnya	-		DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	01 2.	09 000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	67.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		67.500.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	01 2.	09 000	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	S Unit	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		250.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	10	01 2.	09 000	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	85.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membangun Infratruktur Konektivitas G. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan stakeholder lainnya		85.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG



144	2	10	04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa - tanah garapan yang dilakukan melaui mediasi	100 Persen	1.600.000.000,00				-	1.050.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	04 2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penyelesaian - sengketaTanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	23 Dokumen	1.600.000,000		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Membangun Infratruktur Konektivitas Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan - Stakeholder Lainnya	1.050.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	04 2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	600.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	350.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	04 2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1.000.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	700.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
145	2	10	05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk - pembangunan fasilitas umum	90 Persen	22.972.732.184,00				-	36.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	05 2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	22.972.732.184,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	36.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	05 2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11 Dokumen	22.972.732.184,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	36.000.000.000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
146	2	10	06		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan	100 Persen	650.000.000,00				-	500.000.040,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	10	06 2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penetapan Subjek dan objek Redistribusi Tanah Serta Ganti kerugian Tanah kelebihan maksimum	4 Dokumen	350.000.000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	300.000.040,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG



2	2 10	0 06	2.01	0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		100.000.000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	2 10	0 06	2.01	1	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah		1 Dokumen	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan konektivitas dan secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		40,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	2 10	0 06	2.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	2 10	0 06	2.01	0008	inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	2 10	0 06	2.02	í	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		2 Dokumen	300.000.000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	-	200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	2 10	0 06	2.02	Į.	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan pubilik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya		100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG



	2 1	10 06	2.02	0002	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
147	2 1	10 08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Tanah Aset Pemerintah - Daerah yang Bersertifikat	75 Persen	950.000.000,00					- 250.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2 1	10 08	2.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah laporan hasil Penyelesaian masalah Tanah Kosong	1 Dokumen	100.000,000		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	- 100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2 1	10 08	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2 1	10 08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	2 Kegiatan	850.000.000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	- 150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2 1	10 08	2.02	0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	300.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	75.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2 1	10 08	2.02	0002	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	550.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	75.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG



2	2 10	0 09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah laporan penerbitan Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT	-	2 Doku	men	500.000.000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	- 850.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	2 10	0 09	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah		1 Dokui	men	500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	850.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
149 2	2 10	0 10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tersedianya Penatagunaan Tanah	-	80 Pers	sen	650.000.000,00					- 950.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
			2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	-	1 Doku		650.000.000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	- 950.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	2 10	0 10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		1 Lapon	ran	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pemangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	2 10	0 10	2.01	0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya		2 Dokul	men	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pemangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	350,000,000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	2 10	0 10	2.01	0005	Koordinasi dalam rangka Penegasan Status Tanah Timbul	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul		1 Dokur	men	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehuta	nan	<u>'</u>			214.593.710.838,00		•	•	1	219.664.715.884,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YA	ANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELA	YANAN DASAR			211.818.710.838,00					217.964.715.884,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	2 11	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	LINGKUNGAN HIDUP		•		211.818.710.838,00					217.964.715.884,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



150 2	2 11	1 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	61,9 Nilai	23.341.593.838,00				- 28.033.465.884,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	2 11	1 01	2.01		KABUPATEN KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	11 Dokumen	500.000.000,00			6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	- 1.050.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	2 1:	1 01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkélanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	2 11	1 01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	2 11	1 01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	2 1:	1 01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	2 11	1 01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	G. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan S. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	2 11	1 01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Peningkatan kualitas Ingkungan hidup secara berkelanjutan Rengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	2 11	1 01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi - Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12 Laporan	19.253.323.219,00			6. Peningkatan kualitas Ingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara Iestari dan berkelanjutan	- 16.346.809.296,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	2 11	1 01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	18.973.323.219,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	16.091.809.296,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	2 1:	1 01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkélanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



2 1	11	01 2.02	2 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	205.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	6. Peningkatan kualitas - lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	205.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HII DAN KEHUTANAN
2 1	11	01 2.02	2 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisi Prognosis Realisasi Anggaran	s Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	25.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HII DAN KEHUTANAN
2 1	11	01 2.03	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	2 Laporan	135.000.000,00	-	Feningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	546.400.000,00 DINAS LINGKUNGAN H DAN KEHUTANAN
2 1	11	01 2.03	3 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	25.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HII DAN KEHUTANAN
2 1	11	01 2.03	3 0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HII DAN KEHUTANAN
2 1	11	01 2.03	3 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsillasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	50.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	75.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HII DAN KEHUTANAN
2 1	11	01 2.03	3 0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HII DAN KEHUTANAN
2 1	11	01 2.04	1	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Prosentase Wajib Retribusi Daerah - yang diadministrasikan (Jlh yang diadministrasikan : Jlh Potensi Wajib Retribusi)	100 Persentase	100.000.000,00	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	250.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN H DAN KEHUTANAN
2 1	11	01 2.04	4 0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	G. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan B. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HII DAN KEHUTANAN
2 1	11	01 2.04	4 0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HII DAN KEHUTANAN



2	11	01	2.04		elaporan Pengelolaan Retribusi aerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	275.000.000,00	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	- 660.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDU DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.05		rendataan dan Pengolahan Idministrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Rengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	60.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.05		endidikan dan Pelatihan Pegawai Jerdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	450.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.05		osialisasi Peraturan Perundang- Indangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	10 Orang	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	150.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Jaerah	Jumlah Dokumen Laporan Layanan - Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	735.000.000,00	-	6. Peningkatan kualitas Ingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	- 1.685.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDU DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.06	L	enyediaan Komponen Instalasi istrik/Penerangan Bangunan antor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.06		enyediaan Peralatan dan erlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	300.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	30.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.06		renyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	40.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



2	11	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	200.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN I DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	600.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN I DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	250.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN I DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	250.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN I DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 persen	455.790.000,00	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	- 3.313.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	700.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN I DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	105.790.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	893.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN I DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	12 Bulan	708.150.569,00	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	- 2.877.926.538,00 DINAS LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	500.037.954,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	500.037.954,00 DINAS LINGKUNGAN I DAN KEHUTANAN
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	208.112.615,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	2.377.888.584,00 DINAS LINGKUNGAN I DAN KEHUTANAN



2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67,5 Persen	879.330.050,00	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara	- 954.330.050,00 DINAS LIN DAN KEHU	
2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumiah Kendaraan Perorangan	10 Unit	224.330.050,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RACILIASII (DDII)	lestari dan berkelanjutan 6. Peningkatan kualitas -	224.330.050,00 DINAS LING	NCKI INCAN LIIDUD
	11	01	2.05	0001	Penyedidan Jasa Pentelinarah, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Julinali Neruadadi Peruangari Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Out	Tenggarong, Sukarame	DANA BASH HASHE (UBH)	6. Peningkalan kudirlas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	DAN KEHU	
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	10.000.000,00 DINAS LING DAN KEHU	
2	11	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	20.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	20.000.000,00 DINAS LING DAN KEHU	
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	100.000.000,00 DINAS LING DAN KEHU	
2	11	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	100.000.000,00 DINAS LING DAN KEHU	
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	500.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	500.000.000,00 DINAS LING DAN KEHU	
2	11	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Produk Layanan Yang Terakreditasi	1 Produk	300.000.000,00	-	G. Peningkatan kualitas Ingkungan hidup secara berkelanjutan S. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	- 350.000.000,00 DINAS LINI DAN KEHU	
2	11	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	300.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH) -	G. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	350.000.000,00 DINAS LING DAN KEHU	
151 2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan - Lingkungan Hidup yang disusun	67 Persen	800.000.000,00			- 300.000.000,00 DINAS LING DAN KEHU	



	2 1	11 02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya RPPLH -	4 dokumen	650.000.000,00		6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2 1	11 02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2 1	11 02	2.01	0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2 1	11 02	2.01	0005	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan	1 Dokumen	300.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	-	300,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2 1	11 02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya KLHS -	1 dokumen	150.000.000,00		- 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2 1	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
152	2 1	11 03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah pohon yang ditanam pada - program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi	200000 Pohon	4.882.611.000,00			-	8.478.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2 1	11 03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4 dokumen	2.725.000.000,00		- 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	-	6.355.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2 1	11 03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen	400.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	-	425.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2 1	11 03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	-	300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2 1	11 03	2.01	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	19 Lokasi	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	-	375.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



2	11	03 2.0	01 00	13 Penyediaan sarana dan prasaran	Jumlah peralatan pemantau	3 Unit	175.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas -	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDU
				pemantau kualitas lingkungan di	kualitas lingkungan di		Tenggarong, Sukarame	, ,	lingkungan hidup secara		DAN KEHUTANAN
				kabupaten/kota	kabupaten/kota dalam rangka				berkelanjutan		
					pencegahan dan sebagai peringatan				8. Pengelolaan sumber daya		
					dini pencemaran lingkungan				alam dan lingkungan secara		
									lestari dan berkelanjutan		
2	11	03 2.0	01 00	15 Pengelolaan Laboratorium	Jumlah pengujian yang	1 Dokumen	1.550.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas -	1.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDU
				Lingkungan Hidup kabupaten/kota	dilaksanakan oleh laboratorium		Semua Kecamatan,		lingkungan hidup secara		DAN KEHUTANAN
					lingkungan		Semua Kel/Desa		berkelanjutan		
									8. Pengelolaan sumber daya		
									alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan		
									lestali dali berkelalijutali		
2	11	03 2.0)2	Penanggulangan Pencemaran	Jumlah laporan Penanggulangan -	1 laporan	223.000.000,00	-	6. Peningkatan kualitas -	- 273.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIE
				dan/atau Kerusakan Lingkungan	Pencemaran dan/atau Kerusakan				lingkungan hidup secara		DAN KEHUTANAN
				Hidup Kabupaten/Kota	Lingkungan Hidup				berkelanjutan		
									8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara		
									lestari dan berkelanjutan		
2	11	03 2.0	02 00	01 Pemberian Informasi Peringatan		1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas	80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDU
				Pencemaran dan/atau Kerusakan			Semua Kecamatan,		lingkungan hidup secara		DAN KEHUTANAN
				Lingkungan Hidup pada Masyara	kat dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di		Semua Kel/Desa		berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya		
					Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				alam dan lingkungan secara		
					radapatery rotal yang dilaloanakan				lestari dan berkelanjutan		
2	11	03 2.0	02 00	02 Pengisolasian Pencemaran	Jumlah Lokasi Pencemaran	25 Lokasi	88.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas	98.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDI
				dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		lingkungan hidup secara berkelanjutan		DAN KEHUTANAN
				nidup	ridup yang bilsolasi		Sellida Kel/ Desa		8. Pengelolaan sumber daya		
									alam dan lingkungan secara		
									lestari dan berkelanjutan		
2	11	03 2.0	2 00	03 Penghentian Pencemaran dan/ata	u Jumlah Sumber Pencemar dan/atau	10 Titik	85.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BACILIACII (DBIII)	6. Peningkatan kualitas -	05 000 000 00	DINAS LINGKUNGAN HIDU
2	11	03 2.0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Kerusakan Lingkungan Hidup	Kerusakan Lingkungan Hidup yang	10 Huk	Semua Kecamatan,	DANA BAGITIASIE (DBTI)	lingkungan hidup secara	33.000.000,00	DAN KEHUTANAN
				ner asakan Enighangan maap	Dihentikan		Semua Kel/Desa		berkelanjutan		DATE NELTO TATO TO
					Sinchardi		Serial Key Sesa		8. Pengelolaan sumber daya		
									alam dan lingkungan secara		
									lestari dan berkelanjutan		
2	11	03 2.0	13	Pemulihan Pencemaran dan/atau	Jumlah Dokumen Pemulihan -	1 dokumen	1.934.611.000,00	-	6. Peningkatan kualitas -	- 1.850.000.000.00	DINAS LINGKUNGAN HIE
_			-	Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencemaran dan/atau Kerusakan				lingkungan hidup secara		DAN KEHUTANAN
				Kabupaten/Kota	Lingkungan Hidup				berkelanjutan		
									8. Pengelolaan sumber daya		
									alam dan lingkungan secara		
									lestari dan berkelanjutan		
2	11	03 2.0	00	01 Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	1 Dokumen	760.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas -	770.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDU
				Penghentian Sumber Pencemaran	dan Sinkronisasi Penghentian		Semua Kecamatan,		lingkungan hidup secara		DAN KEHUTANAN
					Sumber Pencemaran Kewenangan		Semua Kel/Desa		berkelanjutan		
					Pemerintah dan/atau Provinsi				Pengelolaan sumber daya		
					dan/atau Sektor Lain hingga				alam dan lingkungan secara		
					Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				lestari dan berkelanjutan		
J.											
		03 2.0	00	07 Koordinasi dan Sinkronisasi	jumlah kegiatan koordinasi dan	15 Kegiatan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDU
2	11		1	restorasi	sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan		Semua Kecamatan,		lingkungan hidup secara		DAN KEHUTANAN
2	11				KADUDALEH/KOTA VANG GHAKSANAKAN	1 1	Semua Kel/Desa		berkelanjutan		1
2	11				,,				9. Bongololaan sumbor daya		
2	11								8. Pengelolaan sumber daya		
2	11								Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan		

	11	03	2.03	0009	Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang	5 Ha	604.146.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara		350.000.000,0	DINAS LINGKUNGAN HID DAN KEHUTANAN
						menjadi kewenangan		Kel/Desa		berkelanjutan			
						kabupaten/kota		Kab. Kutai Kartanegara		8. Pengelolaan sumber daya			
								Kota Bangun, Semua		alam dan lingkungan secara			
								Kel/Desa		lestari dan berkelanjutan			
								Kab. Kutai Kartanegara					
								Muara Kaman, Muara					
								Siran					
								Kab. Kutai Kartanegara					
								Tenggarong Seberang,					
								Semua Kel/Desa					
2	11	03	2.03	0010	Pelaksanaan Restorasi	luas area yang dilakukan restorasi	4 Ha	445.465.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 6. Peningkatan kualitas -		500,000,000.	00 DINAS LINGKUNGAN HID
1	_ [-				di kabupaten/kota yang menjadi		Tenggarong,		lingkungan hidup secara			DAN KEHUTANAN
						kewenangan kabupaten/kota		Mangkurawang		berkelanjutan			
						newerlangan kabapaten, kota		Thung Karamang		8. Pengelolaan sumber daya			
										alam dan lingkungan secara			
										lestari dan berkelanjutan			
2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi	jumlah kegiatan koordinasi dan	20 Kegiatan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 6. Peningkatan kualitas -		130.000.000,0	00 DINAS LINGKUNGAN HID
					rehabilitasi	sinkronisasi rehabilitasi di	1	Semua Kecamatan,		lingkungan hidup secara		1	DAN KEHUTANAN
						kabupaten/kota yang dilaksanakan		Semua Kel/Desa		berkelanjutan			
										8. Pengelolaan sumber daya			
										alam dan lingkungan secara			
										lestari dan berkelanjutan			
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemenuhan ruang - terbuka hijau terhadap luas perkotaan -	20 Persen	9.198.506.000,00			-	5.075.000.000,	DINAS LINGKUNGAN H DAN KEHUTANAN
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman	Jumlah Dokumen Pengelolaan -	0 Dokumen	9.198.506.000,00		- 6. Peningkatan kualitas -	=	5.075.000.000,	00 DINAS LINGKUNGAN HI
					Hayati Kabupaten/Kota	Keanekaragaman hayati	0 Persen			lingkungan hidup secara			DAN KEHUTANAN
						Tercapainya penanaman dan	100 Persen			berkelanjutan			
						pemeliharaan Pengelolaan				8. Pengelolaan sumber daya			
						keanekaragaman hayati				alam dan lingkungan secara			
						Tercapainya pengayaan pengelolaan kebun raya				lestari dan berkelanjutan			
2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan	Jumlah Dokumen Rencana Induk	1 Dokumen	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 6. Peningkatan kualitas -		0,00	DINAS LINGKUNGAN HII
					Rencana Pengelolaan	Pengelolaan Kehati yang Disusun		Tenggarong, Semua	, ,	lingkungan hidup secara			DAN KEHUTANAN
					Keanekaragaman Hayati			Kel/Desa		berkelanjutan			
								,		8. Pengelolaan sumber daya			
										alam dan lingkungan secara			
										lestari dan berkelanjutan			
2	11	04	2.01	0003	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola	5 Ha	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 6. Peningkatan kualitas -		150.000.000,0	00 DINAS LINGKUNGAN HI
						Lingkup Kewenangan	l l	Loa Kulu, Jembayan	1	lingkungan hidup secara		1	DAN KEHUTANAN
						Kabupaten/Kota	l l		1	berkelanjutan		1	
						1	1			8. Pengelolaan sumber daya		1	
						1	1			alam dan lingkungan secara		1	
										lestari dan berkelanjutan			
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang Dikelola Lingkup	15 Ha	7.898.506.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 6. Peningkatan kualitas -		4.250.000.000,	00 DINAS LINGKUNGAN HI
					(RTH)	Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Tenggarong, Semua		lingkungan hidup secara		1	DAN KEHUTANAN
						1	1	Kel/Desa		berkelanjutan		1	
							l l	Kab. Kutai Kartanegara		8. Pengelolaan sumber daya		1	
						1	1	Tenggarong Seberang,		alam dan lingkungan secara		1	
								Semua Kel/Desa		lestari dan berkelanjutan			
		1				ı	1		l l			1	1

	111	1 04 2.6	1 0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		15 Orang	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan		NAS LINGKUNGAN HIDUP AN KEHUTANAN
	2 11	1 04 2.0	1 0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola		15 Unit	650.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan		NAS LINGKUNGAN HIDUP AN KEHUTANAN
154	2 11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	limbah B3 dari kegiatan UMKM	-	3 Dokumen	475.000.000,00			-	INAS LINGKUNGAN HIDUP AN KEHUTANAN
	2 11	05 2.0	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha		50 pelaku usaha	100.000.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaku Usaha -	INAS LINGKUNGAN HIDUP AN KEHUTANAN

	2 11	1 05	5 2.01	0006 Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limb	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian ah B3 teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	50 Usaha	100.000.000,0	D Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, alir, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pelaku Usaha	100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN
2	2 11	1 05	5 2.02	Pengumpulan Limbah B3 dala (Satu) Daerah Kabupaten/Ko		50 pelak	usaha 375.000.000,0		- 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber day alam dan lingkungan secar lestari dan berkelanjutan		475.000.000,00 DINAS LINGKUNGA DAN KEHUTANAN
3	11	1 05	5 2.02	0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 deng Pemerintah Provinsi dalam ra Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbu	ngka B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka	1 Dokum	n 375.000.000,0	D Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan		275.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN
155 2	2 11	1 06	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZI LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah	19,32 Pe	sen 180.000.000,0	0			680.000.000,00 DINAS LINGKUNGA DAN KEHUTANAN
3	2 11	1 06	6 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Keg yang Izin Lingkungan dan Izin Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PPLH dilakukan terhadap jumah izin	20 Perse	180.000.000,0		6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber day alam dan lingkungan secar lestari dan berkelanjutan		680.000.000,00 DINAS LINGKUNGA DAN KEHUTANAN
2	2 11	1 06	6 2.01	0006 Pembentukan Pejabat Pengawi Lingkungan Hidup	is Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	1 Orang	30.000.000,0	D Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber day alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan		30.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN
	2 11	1 00	6 2.01	0009 Pengawasan Perizinan Berusa atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkunga yang diterbitkan oleh Pemerin Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undang bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidu	keglatan yang diawasi n Itah an di	35 Badar	Usaha 150.000.000,0	D Kab. Kutai Kartanegara, DANA BAGI HASIL (DBH Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber day alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan		350.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN
156 2	2 11	1 07	7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIF LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		66,67 Pe	sen 75.000.000,0	0			190.000.000,00 DINAS LINGKUNGA DAN KEHUTANAN
1	2 11	1 07	7 2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lo Pengetahuan Tradisional, dan MHA yang Terkait dengan PP	Hak terkait dengan PPLH yang berada	67 Perse	40.000.000,0		- 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber day alam dan lingkungan secar lestari dan berkelanjutan		40.000.000,00 DINAS LINGKUNGA DAN KEHUTANAN



	2	11 07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyedidan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	5 Dokumen	40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Feningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11 07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat	70 Persen	35.000.000,00		6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	- 150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUI DAN KEHUTANAN
	2	11 07	2.02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	35.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengeloliaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	150,000,000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
157	2	11 08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan pendidikan/pelatihan/penyuluhan	35 Lembaga	480.000.000,00			- 580.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUI DAN KEHUTANAN
	2	11 08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah diklat dan penyuluhan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	35 kali	480.000.000,00		6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	- 580.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUI DAN KEHUTANAN
	2	11 08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	20 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11 08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	150 Orang	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	300,000,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	11 08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	16 Lembaga	80.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
158	2	11 09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Penghargaan yang diberikan Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama	119 Penghargaan 6 Desa/Kelurahan	200.000.000,00			- 1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUE DAN KEHUTANAN
	2	11 09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penghargaan yang diberikan kepada Masyarakat/Dunia Usaha/Lembaga Lainnya	2 jenis	200.000.000,00		6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	- 1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDU DAN KEHUTANAN

	2 1	11 09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	80 Entitas	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengeloliaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	-	1.000.000.000,00	DAN KEHUTANAN
159	2 1	11 10			PROGRAM PENANCANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabuapten/Kota yang ditangani	100 Persen	280.000.000,00				330.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2 1	11 10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengaduan masyarakat di Bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	50 laporan	280.000.000,00		- 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan		330.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2 1	11 10	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	20 Perkara	180.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengeloliaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	-	180.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2 1	11 10	2.01	0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	15 Pengaduan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	-	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2 1	11 10	2.01	0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	10 Sanksi	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	-	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
160	2 1	11 11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun Timbulan sampah	1 Lokasi 99,96 Persen	171.906.000.000,00			-	172.723.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		11 11			Pengelolaan Sampah	Persentase cakupan area pelayanan Persentase Jumlah sampah yang ditangani Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	83.33 persen 70.00 persen 29.96 persen	171.906.000.000,00		Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2 1	11 11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	5 Kelompok	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Pengeloliaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan		4.095.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2 1	11 11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	2 Dokumen	1.900.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan		7.600,000,000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

	2 1	11 11	2.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	11411 Unit	Semua Kei/Desa		- 6. Peningkatan kualitas Ilingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2 1	11 11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	3 Dokumen	950.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan		2.525.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2 1	11 11	2.01	0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	25 Dokumen	150.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan		390.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2 1	11 11	2.01	0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	1252 Unit	6.000.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2 1	11 11	2.01	0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	41 Persentase	30.400.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan		1.345.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2 1	11 11	2.01	0030	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	21 Ton	30.030.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan		52.427.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	L L	1	2.775.000.000,00				1.700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3 2	28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG K	KEHUTANAN		2.775.000.000,00				1.700.000.000,00	
161	3 2	28 04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Penyelesaian - Perencanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)	16,67 Persen	2.775.000.000,00			-	1.700.000.000,00	
	3 2	28 04	2.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan kerjasama Kabupaten/Kota di daerah penyangga Tahura Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	1 Kegiatan 0 dokumen	2.775.000.000,00		6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan		1.700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3 2	28 04	2.01	0007	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	1 Dokumen	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Siran	DANA BAGI HASIL (DBH) -	G. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



3	28	04	2.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif		1 Desa	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan		300,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	04	2.01	0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan		1 Dokumen	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Langgut, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan		350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	04	2.01	0014	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan		3261 Ha	1.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	04	2.01	0016	Penataan kawasan Tahura Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Biok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota		1 Dokumen	500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	28	04	2.01	0017	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Kabupaten/Kota	Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi		25 Hektar	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 8. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan		350,000,000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	-				Dinas Kependudukan dan Catatan Si	pil			16.629.598.801,00				0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	╁	\dagger			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YA	NG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DA	ASAR		16.629.598.801,00				0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG A	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATAT	TAN SIPIL		16.629.598.801,00				0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
162 2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -		86undefined Nilaiundefined	15.414.598.801,00			-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL



2	2 1	2 01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	undefined Dokumenundefi ned	300.000.000,00		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	Masyarakat Kabupaten - Kutai Kartanegara	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
											transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
2	2 1	2 01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	2 1	2 01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pounik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	2 1	2 01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	2 1	2 01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Laporan 100 Orang/Bulan	11.394.115.305,00		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	2 1	2 01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	11.046.575.305,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	2 1	2 01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL



2	12	2 01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	297.540.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
											Pemerintahan dan Pelayanan				
2	12	2 01	2.03		Administrasi Barang Miliki Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporen	25.000.000,00		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Aelola	Perangkat Daerah terkait	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
											Publik				
			2.03		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah terkait		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	2 01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	15 Orang 100 Orang	100.000.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetarana gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	2 01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	100 Orang	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

:	2 12	2 01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peratatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peratatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2.139.807.600,00		penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Perangkat Daerah terkait	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	! 12	2 01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		950.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Duerah terkait	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	! 12	2 01	1 2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		33.750.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah terkait	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	! 12	2 01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		700.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Duerah terkait	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
:	! 12	2 01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	5400 D	okumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Duerah terkait	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

2	! 12	01	2.06		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	331.057.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah terkait	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2.06		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75000 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah terkait	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	! 12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit 4 Unit 6 Unit 50 Unit	620.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Perangkat Daerah terkait	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAR CATATAN SIPIL
2	! 12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahaga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah terkait	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	! 12	01	2.07		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan perampuan, pemuda (perara imilenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah terkait	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	12	01	2.07		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah terkait	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

	12 01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	355.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesestaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesehatan, prestasi olahraga,	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Perangkat Daerah terkait Perangkat Daerah terkait	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
										kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
2 1	12 01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah terkait		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2 1	12 01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	361.265.896,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah terkait		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2 1	12 01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit 8 Unit	69.410.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.		Perangkat Daerah terkait	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2 1	12 01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 Unit	49.410.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah terkait		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL



	2	12 01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah terkait		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
163		12 02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KTP-el	-		99 Persen	395.000.000,00		11	12	13		-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1		12 02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	6	8 300000 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	9 395.000.000,00	10	11	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	14 Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk yang Diterbitkan	-	16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12 02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			1 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk yang Diterbitkan		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12 02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk			152000 Dokumen	185.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk yang Diterbitkan		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12 02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk yang Diterbitkan		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
164	2	12 03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	-		99 Persen	470.000.000,00						-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12 03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaltan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam			1300 Dokumen 1 Laporan	300.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL



	2 1	12 03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		650 Dokumen	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2 1	12 03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		1 Layanan	100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2 1	12 03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		1 Laporan	170.000.000,00		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAF CATATAN SIPIL
	2 1	12 03	2.02	0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		1 Laporan	120.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2 1	12 03	2.02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil		1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
165	2 1	12 04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah dokumen PKS dan Penyajian Database Kependudukan	-	12 Dokumen	250.000.000,00					-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2 1	12 04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		1 Dokumen 11 Dokumen	150.000.000,00		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Kabupaten Kutaia Kartanegara		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAR CATATAN SIPIL
	2 1	12 04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Kabupaten Kutaia Kartanegara		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

	2	12 04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	S Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Perangkat Daerah di Kabupaten Kutaia Kartanegara	1,0	00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2 1	12 04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi - Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	100.000.000,00		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	. 0,1	00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2 :	12 04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	1,0	000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2 :	12 04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	0,4	00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
166	2 1	12 05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah dokumen Data Kependudukan dan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan	2 Dokumen	100.000.000,00					. 0,0	00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2 1	12 05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 Dokumen 1 Dokumen	100.000.000,00		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	. 0,1	00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2	12 05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh i deologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	0,0	00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2 :	12 05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profii Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	0,0	00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL



					Dinas Pemberdayaan Masyara	kat dan Desa		66.871.585.511,00					47.202.611.083,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DES
2	2				URUSAN PEMERINTAHAN WA	JIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		66.871.585.511,00					47.202.611.083,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DES
2	2 13	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIE	ANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		66.871.585.511,00					47.202.611.083,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DES
7 2	2 13	3 01			PROGRAM PENUNJANG URUS PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	AN Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi - Pemerintahan (AKIP)	80 Nilai	18.753.414.441,00					18.788.390.013,00	DINAS PEMBERDAYAA MASYARAKAT DAN DE
2	2 15	3 01	2.01	1	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Da		100 Persen	575.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	900.000.000,000	DINAS PEMBERDAYAA MASYARAKAT DAN DE
2	2 13	3 01	2.01	1 00	O1 Penyusunan Dokumen Perenca Perangkat Daerah	Juniah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAA MASYARAKAT DAN DE
2	2 13	3 01	2.01	1 00	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capajain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAA MASYARAKAT DAN DE
2	2 13	3 01	2.01	1 00	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Da		2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYA MASYARAKAT DAN DI
2	2 15	3 01	2.01	1 00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Da	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYA MASYARAKAT DAN DI
2	2 13	3 01	2.01	1 00	09 Pelaksanaan Pengumpulan Dat Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYA. MASYARAKAT DAN DE
2	2 15	3 01	2.01	1 00	10 Pelaksanaan Forum Perangka Daerah Berdasarkan Bidang U yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perenca Perangkat Daerah	usan Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam	1 Berita Acara	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYA MASYARAKAT DAN DI
2	2 13	3 01	2.02	2	Administrasi Keuangan Perang Daerah	kat Jumlah Laporan Administrasi - Keuangan yang Akuntabel	12 Laporan	16.467.676.941,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	14.290.280.193,00	DINAS PEMBERDAYA MASYARAKAT DAN D
2	2 15	3 01	2.02	2 00	01 Penyediaan Gaji dan Tunjanga	n ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2142 Orang/bulan	16.217.676.941,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	13.990.280.193,00	DINAS PEMBERDAYA MASYARAKAT DAN D
2	2 13	3 01	2.02	2 00	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahu SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYA MASYARAKAT DAN D

2	13	01 2.02	2 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13 (01 2.02	2 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13 (2.03	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	2 Laporan	50.000.000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	- 100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13 (01 2.03	3 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	25,000,000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13 (01 2.03	3 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	25,000,000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13 (2.05	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100.000.000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	- 418.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13 (2.05	5 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	170 Orang	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13 (2.06	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	660.000,000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	- 1.560.694.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13 (01 2.06	6 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	50,000,000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13 (01 2.06	6 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	820.694.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13 (01 2.06	5 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	40,000,000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13 (2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	\$0,000,000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



2	13	01 2	2.06	009 Penyelenggaraan Rapat Koordinas dan Konsultasi SKPD	i Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lapon	ran	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01 2	2.06	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	a Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200 Doku	kumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01 2	2.06 0	D11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokum	men	70.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01 2	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusar Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Pers	sen	400.000.000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	- 708.655.520,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01 2	2.08 0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapora	ran	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	308.655.520,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01 2	2.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporai	an	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01 2	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daeral Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		17 Perset	en	500.737.500,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	- 575.760.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01 2	2.09 (DO1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit		100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01 2	2.09	DO2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		275.737.500,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	275.760.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01 2	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesir Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 Unit		75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01 2	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
168 2	13	02		PROGRAM PENATAAN DESA	Prosentase Desa yang memiliki - Tata Ruang Desa -	38,36 Pe	ersen	2.550.000.000,00					- 850.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	02 2	2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam - penyelenggaraan penataan desa	33 Desa		2.550.000.000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Desa	- 850.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



2	1 13	02 1	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	7 Desa	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Jantur Selatan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Jantur Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jonggon Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Janan Ulu Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Tanjung Limau Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Juph Darat Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Juph Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Lamin	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Desa	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	! 13	3 02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	193 Desa	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Desa	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	3 02	2.01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	193 Desa	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Desa		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		02			Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	8 Desa	75.00.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Sungai Payang Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jembayan Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Illu Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sepatin Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sepatin Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ilir Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Seberang, Bangun Rejo		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Desa		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	! 13	3 02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	20 Unit	2.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Desa	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
					PROGRAM PENINGKATAN KERJA	Persentase Realisasi Kesepakatan -	 100 Persen	435.000.000,00						DINAS PEMBERDAYAAN



2	1	13 03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Kerjasama Desa yang difasilitasi	-	58 Desa	435.000.000,00	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Desa -		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	113	1.3 03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		5 Dokumen	125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Muara Muntai, Semua Kel/Oesa Kab. Kutai Kartanegara Muara Badak, Semua Kel/Oesa Kab. Kutai Kartanegara Sebulu, Semua Kel/Oesa Kab. Kutai Kartanegara Kembang Janggut, Semua Kel/Oesa Kab. Kutai Kartanegara Kembang Janggut, Semua Kel/Oesa Kab. Kutai Kartanegara Muara Kaman, Semua Kel/Oesa Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong Seberang, Semua Kel/Oesa Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong Seberang, Semua Kel/Oesa Kab. Kutai Kartanegara Marang Kayu, Semua Kel/Oesa	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Desa		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	11	3 03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota		5 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Sebulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Kenohan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Kenohan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Muara Kaman, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Tabang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Marang Kayu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Marang Kayu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Pulau Selauan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Kata Bangun Darat, Semua Kel/Desa	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Desa		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2 :	13	03 2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi		3 Dokumen	210.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan	4. Membangun Infratruktur	Desa	250.000.000.00	DINAS PEMBERDAYAAN
				Perdesaan	Pembangunan Kawasan Perdesaan			Muara Muntai, Semua	,	dari bawah untuk	Konektivitas		,	MASYARAKAT DAN DESA
				Cracadii	r embanganam kawasam eraesaan			Kel/Desa		pertumbuhan ekonomi.	Percepatan pembangunan			WW.D.F.W.W.W.C.F.D.F.W.D.E.D.C.
								Kab. Kutai Kartanegara,		pemerataan ekonomi dan	desa dan kawasan perdesaan			
								Muara Badak, Semua		pemberantasan kemiskinan.	desa dan kawasan perdesaan			
								Kel/Desa		pemberantasan kemiskinan.				
								Kab. Kutai Kartanegara,						
								Sebulu, Semua						
								Kel/Desa						
								Kab. Kutai Kartanegara,						
								Kembang Janggut,						
								Semua Kel/Desa						
								Kab. Kutai Kartanegara,						
								Muara Kaman, Semua						
								Kel/Desa						
								Kab. Kutai Kartanegara,						
								Tenggarong Seberang,						
								Semua Kel/Desa						
								Kab. Kutai Kartanegara,						
								Marang Kayu, Semua						
								Kel/Desa						
1		1			1	1			1		1	1	1	
1		1			1	1			1		1	1	1	
						1					1			
1		1			1	1			1		1	1	1	
						1					1			
											1			
											1			1
2 1	13	04		PROGRAM ADMINISTRASI	Pertumbuhan Pendapatan	-	10 Persen	21.194.043.870,00				-	23.646.693.870,00	DINAS PEMBERDAYAAN
				PEMERINTAHAN DESA	BUMDesa		95 Persen							MASYARAKAT DAN DESA
					Persentase Desa Tertib									
					Administrasi Pemerintahan Dalam									
					Kategori Baik									
2 .	12	04 2.01		Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Desa yang dibina dan	_	193 Desa	21.194.043.870,00		Membangun dari desa dan	4. Membangun Infratruktur	Deca -	23 646 693 870 00	DINAS PEMBERDAYAAN
1 - 1 -	15	2.01		Penyelenggaraan Administrasi	diawasi		133 Desa	21.154.045.070,00		dari bawah untuk	Konektivitas	Desa	23.040.033.070,00	MASYARAKAT DAN DESA
					diawasi									IVIASTARAKAT DAN DESA
				Pemerintahan Desa						pertumbuhan ekonomi,	3. Percepatan pembangunan			
										pemerataan ekonomi dan	desa dan kawasan perdesaan			
										pemberantasan kemiskinan.				
2 :	13	04 2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan		1 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan	Membangun Infratruktur	Desa	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
			1.	Administrasi Pemerintahan Desa	Administrasi Pemerintahan Desa			Semua Kecamatan,		dari bawah untuk	Konektivitas			MASYARAKAT DAN DESA
								Semua Kel/Desa		pertumbuhan ekonomi,	3. Percepatan pembangunan			
										pemerataan ekonomi dan	desa dan kawasan perdesaan			
										pemberantasan kemiskinan.	·			
2 '	13	04 2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi		7 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DRH)	Membangun dari desa dan	4. Membangun Infratruktur	Desa	100,000,000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
~ .		2.01	0002	Hukum Desa	Penyusunan Produk Hukum Desa		, bokumen	Tenggarong, Timbau	State Control of Control	dari bawah untuk	Konektivitas	Desa	200.000.000,00	MASYARAKAT DAN DESA
				ilakalii besa	i ciiyasanani rodak nakani besa			Teliggarong, Timbau		pertumbuhan ekonomi,				WAS TAICHICK! DAIN DESA
											3. Percepatan pembangunan			
										pemerataan ekonomi dan	desa dan kawasan perdesaan			
										pemberantasan kemiskinan.				
2 :	13	04 2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	1	15 Dokumen	125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan	4. Membangun Infratruktur	Desa	120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
1 1		1		Pembangunan Desa	Penyusunan Perencanaan	1		Semua Kecamatan,	1	dari bawah untuk	Konektivitas	1	1	MASYARAKAT DAN DESA
		1			Pembangunan Desa	1		Semua Kel/Desa	1	pertumbuhan ekonomi,	3. Percepatan pembangunan	1	1	
		1				1			1	pemerataan ekonomi dan	desa dan kawasan perdesaan	1	1	
						1				pemberantasan kemiskinan.				
		1					1			,	1			
2 .	13	04 2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	+ +	24 Dokumen	7.285.720.910,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII /DDIN	Membangun dari dasa dan	4. Membangun Infratruktur	Desa	7 005 730 010 00	DINAS PEMBERDAYAAN
2	13	2.01					24 DOKUITIETI		DAINA BAGI HASIL (DBH)			Desa	7.005.720.910,00	
1 1		1		Desa	Pengelolaan Keuangan Desa	1		Semua Kecamatan,	1	dari bawah untuk	Konektivitas	1	1	MASYARAKAT DAN DESA
		1						Semua Kel/Desa		pertumbuhan ekonomi,	3. Percepatan pembangunan			
		1			1	1			1	pemerataan ekonomi dan	desa dan kawasan perdesaan	1	1	
						1				pemberantasan kemiskinan.	1			
$oxed{oxed}$														
2 :	13	04 2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa	1	58 Orang	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan	4. Membangun Infratruktur	Desa	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
1 1		1		Aparatur Pemerintah Desa	yang Mengikuti Pembinaan			Semua Kecamatan,		dari bawah untuk	Konektivitas			MASYARAKAT DAN DESA
		1			Peningkatan Kapasitas			Semua Kel/Desa		pertumbuhan ekonomi,	3. Percepatan pembangunan			
						1]		pemerataan ekonomi dan	desa dan kawasan perdesaan			
	- 1	1			1	1			1	pemberantasan kemiskinan.	usun peruesaan	1	1	
		1			1	1				periocianasan kemiskildil.	1			
				Fuel used day Days	Lumlah Dalum an U - 9 Fusture 1		10 Del	E0 000 000 00 Web West-West	DANA DACILIACII (DE::)	Mambanasa dest desert	4 Mambanau - I-ft14	Dasa	450,000,000,000	DINIAC DEMPEDDAYA : : :
	12	04 001		Evaiuasi dan Pengawasan Peraturan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan		10 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		4. Membangun Infratruktur	Desa	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
2 :	13	04 2.01	0007						•	dari bawah untuk	Konektivitas			MASYARAKAT DAN DESA
2 :	13	04 2.01	0007	Desa	Pengawasan Peraturan Desa			Semua Kecamatan,				1		
2	13	04 2.01	0007	Desa	Pengawasan Peraturan Desa			Semua Kel/Desa		pertumbuhan ekonomi,	3. Percepatan pembangunan			
2 :	13	04 2.01	0007	Desa	Pengawasan Peraturan Desa									
2	13	04 2.01	0007	Desa	Pengawasan Peraturan Desa					pertumbuhan ekonomi,	3. Percepatan pembangunan			



	2 1	13 04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	23 Dokumen	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Desa	300.000.000,0	D DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
:	2 1	13 04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	25 Laporan	60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Desa	100.000.000,0	D DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 1	13 04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	18 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Desa	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
:	2 1	13 04	2.01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	12.058.472.960,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Desa	12.258.472.960,0	D DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 1	13 04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	54 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Desa	250,000,000,00	D DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
:	2 1	13 04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	60 Orang	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Desa	300.000.000,01	D DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 1	13 04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	15 Desa	180.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Desa	500.000,000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 1	13 04	2.01	0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	37 Laporan	179.850.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Desa	382.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
:	2 1	13 04	2.01	0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	1 Dokumen	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Desa	250,000,000,01	D DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 1	13 04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	18 Dokumen	180.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Desa	400.000,000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		13 05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga - Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Posyandu Aktif	100 Persen 70,35 Persen	23.939.127.200,00						D DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 1	13 05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Masyarakat - Aktif	4103 Lembaga	23.939.127.200,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Lembaga Kemasyarakatan	3.117.527.200,0	D DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



2	13	05	2.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Lembaga Kemasyarakatan	350.000.000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Lembaga Kemasyarakatan	100.000,000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4010 Lembaga	2.274.167.200,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Lembaga Kemasyarakatan	1.241.827.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13		2.01		Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1643 Unit	18.614.960.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Lembaga Kemasyarakatan		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	13		2.01		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asil Desa	3 Dokumen	400.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak, Muara Badak, Katu Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Batu-Batu Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Batu-Batu Kab. Kutai Kartanegara, Kumbang Janggut, Kembang Janggut, Kembang Janggut, Kembang Janggut, Kembang Janggut, Kembang Janggut, Kembang Janggut, Kembang Janggut, Genting Tanah Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Bukit Layang Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Perdana Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Muai Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Pulau Pinang		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Lembaga Kemasyarakatan		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	6 Laporan	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Lembaga Kemasyarakatan	120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Lembaga Kemasyarakatan	300,000,000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2	13	05	2.01	8000	Fasilitasi Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi		1 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan	4. Membangun Infratruktur	Lembaga	200.000.000,00	
					Ketentraman, Ketertiban dan	Penyelenggaraan Ketentraman,			Semua Kecamatan,		dari bawah untuk	Konektivitas	Kemasyarakatan		MASYARAKAT DAN DESA
					Perlindungan Masyarakat Desa	Ketertiban dan Perlindungan			Semua Kel/Desa		pertumbuhan ekonomi,	3. Percepatan pembangunan			
						Masyarakat Desa					pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	desa dan kawasan perdesaan			
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam		1 Dokumen	1.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk	Membangun Infratruktur Konektivitas	Lembaga Kemasyarakatan	245.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
					Pemberdayaan Masyarakat dan	Penyelenggaraan Gerakan			Semua Kel/Desa		pertumbuhan ekonomi.	Percepatan pembangunan	Kemasyarakatan		IVIASTARARAT DAIN DESA
					Kesejahteraan Keluarga	Pemberdayaan Masyarakat dan			Schlad Kel/ Desa		pemerataan ekonomi dan	desa dan kawasan perdesaan			
						Kesejahteraan Keluarga					pemberantasan kemiskinan.				
,	12	05	2.01	0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti		40 Keluarga	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan	Membangun Infratruktur	Lembaga	270 700 000 00	DINAS PEMBERDAYAAN
^	13	05	2.01	0010	dalam Membangun Kerja Sama	Peningkatan Kesadaran Keluarga		40 Keldalga	Semua Kecamatan,	DAINA DAGITIASIE (DDIT)	dari bawah untuk	Konektivitas	Kemasyarakatan	270.700.000,00	MASYARAKAT DAN DESA
					antar-Keluarga, Warga, dan	dalam Membangun Kerja Sama			Semua Kel/Desa		pertumbuhan ekonomi,	3. Percepatan pembangunan	,		
					Kelompok Masyarakat	antar-Keluarga, Warga, dan					pemerataan ekonomi dan	desa dan kawasan perdesaan			
						Kelompok Masyarakat					pemberantasan kemiskinan.				
					Dinas Pengendalian Penduduk dan k	Keluarga Berencana		1	17.092.873.076,00	1	I	<u> </u>	1	27.004.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN
															PENDUDUK DAN KELUAR BERENCANA
2	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YA	NG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASA	ıR		17.092.873.076,00					27.004.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN
									·						PENDUDUK DAN KELUAR
2	14	+			LIRUSAN PEMERINTAHAN RIDANG P	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERE	ΙζΩΝΔ		17.092.873.076,00			-		27.004.100.000,00	BERENCANA DINAS PENGENDALIAN
-					ONODARY EMERINA AND AND AND AND AND AND AND AND AND A				1710321070100					27.00-1120.000,00	PENDUDUK DAN KELUARO
172 2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -		62 Persen	9.983.073.076,00					15 355 000 000 00	BERENCANA DINAS PENGENDALIAN
1/2 2	14	01			PEMERINTAHAN DAERAH	Milai SAKIP Perangkat Daeran		62 Persen	9.983.073.076,00					15.555.000.000,00	PENDUDUK DAN KELUARO
					KABUPATEN/KOTA										BERENCANA
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan -		177 Dokumen	481.563.686,00		-	2. Membangun Sektor	-	- 1.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja DPPKB						Kesehatan			PENDUDUK DAN KELUARO BERENCANA
												2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,			BERENCANA
												produktif, terampil			
2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan		3 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Membangun Sektor	-	450.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN
					Perangkat Daerah	Perangkat Daerah			Semua Kecamatan,			Kesehatan			PENDUDUK DAN KELUARGA
									Semua Kel/Desa			 Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, 			BERENCANA
												produktif, terampil			
2	14	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja		12 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Membangun Sektor	-	200.000.000,00	
						Perangkat Daerah			Tenggarong, Semua			Kesehatan			PENDUDUK DAN KELUARG
									Kel/Desa			2. Pengembangan sumber			BERENCANA
												daya manusia yang sehat, produktif, terampil			
2	14	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata	Jumlah Dokumen Hasil		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola	-	50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN
					Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata			Tenggarong, Melayu	, ,		pemerintahan daerah yang		·	PENDUDUK DAN KELUARG
					-	Pendukung Statistik Sektoral Daerah						profesional dan akuntabel			BERENCANA
												untuk mendukung			
												transformasi pelayanan			
												1. Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
2	14	01	2.01	0009		Jumlah Data Statistik Sektoral		1 Data	151.563.686,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Membangun Sektor	-	250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN
					Statistik Sektoral Daerah	Daerah yang Telah Dikumpulkan			Semua Kecamatan,			Kesehatan			PENDUDUK DAN KELUARG
						dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			Semua Kel/Desa			 Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, 			BERENCANA
						Daeran						produktif, terampil			
2	14	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat	Jumlah Berita Acara Hasil Forum		1 Berita Acara	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	=	2. Membangun Sektor	=	50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN
	1				Daerah Berdasarkan Bidang Urusan	Perangkat Daerah Berdasarkan		1	Tenggarong, Melayu			Kesehatan			PENDUDUK DAN KELUARG
					yang Diampu dalam Rangka	Bidang Urusan yang Diampu dalam						Pengembangan sumber			BERENCANA
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						daya manusia yang sehat, produktif, terampil			
	_				Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah laporan Administrasi -	i 1	12 Laporan	8.122.622.612,00	1	-	2. Membangun Sektor	I-	- 8.550.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN
2	14	01	2.02			Keyangan Perangkat Daerah yang		'	·						DENIDLIN DAN VELLIAD
2	14	01	2.02		Daerah	Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			·			Kesehatan			
2	14	01	2.02			Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel									PENDUDUK DAN KELUAR BERENCANA



	1 1			To	1	110 0			Take I ali	
2	14	01 2.02	2 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	7.872.622.612,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	2. Membangun Sektor Kesehatan	8.300.000.000,00 DINAS PENGENDALI PENDUDUK DAN KEL
									Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	BERENCANA
2	14	01 2.02	2 0007	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	12 Laporan	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor -	250.000.000,00 DINAS PENGENDALIA
				Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan		Tenggarong, Melayu		Kesehatan	PENDUDUK DAN KELI
				Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan				2. Pengembangan sumber	BERENCANA
					Laporan Keuangan				daya manusia yang sehat,	
					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				produktif, terampil	
2	14	01 2.03	3	Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik -	1 Dokumen	55.000.000,00	-	2. Membangun Sektor -	- 300.000.000,00 DINAS PENGENDALI
				pada Perangkat Daerah	Daerah (BMD) pada Perangkat		•		Kesehatan	PENDUDUK DAN KE
					Daerah				1. Penataan dan	BERENCANA
									Pengembangan Tata Kelola	
									Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
2	14	01 2.03	3 0001	Penyusunan Perencanaan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor -	50.000.000,00 DINAS PENGENDALIA
				Kebutuhan Barang Milik Daerah	Milik Daerah SKPD		Tenggarong, Melayu		Kesehatan	PENDUDUK DAN KELI
				SKPD					1. Penataan dan	BERENCANA
									Pengembangan Tata Kelola	
									Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
2	14	01 2.03	3 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	2 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor -	200.000.000,00 DINAS PENGENDALIA
				Laporan Barang Milik Daerah pada	Penyusunan Laporan Barang Milik		Tenggarong, Melayu		Kesehatan	PENDUDUK DAN KELI
				SKPD	Daerah pada SKPD				1. Penataan dan	BERENCANA
									Pengembangan Tata Kelola	
									Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
2	14	01 2.06	6	Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Layanan Administrasi -	42 Layanan	398.403.200,00	-	2. Membangun Sektor -	- 1.325.000.000,00 DINAS PENGENDALI
				Daerah	Umum Perangkat Daerah				Kesehatan	PENDUDUK DAN KE
									1. Penataan dan	BERENCANA
									Pengembangan Tata Kelola	
									Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
2	14	01 2.06	6 0002	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	4 Paket	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor -	200.000.000,00 DINAS PENGENDALIA
				Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang		Tenggarong, Melayu		Kesehatan	PENDUDUK DAN KELI
					Disediakan				1. Penataan dan	BERENCANA
									Pengembangan Tata Kelola	
									Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
2	14	01 2.06	6 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		4 Paket	60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor -	150.000.000,00 DINAS PENGENDALIA
					yang Disediakan		Tenggarong, Melayu		Kesehatan	PENDUDUK DAN KELI
									1. Penataan dan	BERENCANA
									Pengembangan Tata Kelola	
									Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
2	14	01 2.06	6 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	3 Paket	19.999.800,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor -	25.000.000,00 DINAS PENGENDALIA
				Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan		Tenggarong, Melayu		Kesehatan	PENDUDUK DAN KELI
									1. Penataan dan	BERENCANA
									Pengembangan Tata Kelola	
									Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang	5 Paket	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor -	200.000.000,00 DINAS PENGENDALIA
2	14	01 2.06	5 0007				Semua Kecamatan,		Kesehatan	PENDUDUK DAN KEL
2	14	01 2.06	6 0007		Disediakan					
2	14	01 2.06	6 0007		Disediakan		Semua Kel/Desa		1. Penataan dan	BERENCANA
2	14	01 2.06	6 0007		Disediakan				Pengembangan Tata Kelola	BERENCANA
2	14	01 2.06	6 0007		Disediakan					BERENCANA
		01 2.06		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	40 Laporan	Semua Kel/Desa 93.403.400,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Membangun Sektor -	300.000.000,00 DINAS PENGENDALI
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	40 Laporan	Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Membangun Sektor Kesehatan	300.000.000,00 DINAS PENGENDALIA PENDUDUK DAN KEL
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan	40 Laporan	Semua Kel/Desa 93.403.400,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Membangun Sektor Kesehatan 1. Penataan dan	300.000.000,00 DINAS PENGENDALI
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	40 Laporan	Semua Kel/Desa 93.403.400,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Membangun Sektor Kesehatan 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	300.000.000,00 DINAS PENGENDALIA PENDUDUK DAN KEL
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	40 Laporan	Semua Kel/Desa 93.403.400,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Membangun Sektor Kesehatan 1. Penataan dan	300.000.000,00 DINAS PENGENDALIA PENDUDUK DAN KEL
	14		6 0009	dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan	40 Laporan 1 Dokumen	Semua Kel/Desa 93.403.400,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Membangun Sektor Kesehatan 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Membangun Sektor -	300.000.000,00 DINAS PENGENDALI PENDUDUK DAN KEL BERENCANA 100.000.000,00 DINAS PENGENDALI
	14	01 2.06	6 0009	dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Semua Kel/Desa 93.403.400,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Membangun Sektor Kesehatan 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Membangun Sektor Kesehatan	300.000.000,00 DINAS PENGENDALI, PENDUDUK DAN KEL BERENCANA 100.000.000,00 DINAS PENGENDALI, PENDUDUK DAN KEL
	14	01 2.06	6 0009	dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan		Semua Kel/Desa 93.403.400,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Membangun Sektor Keséhatan 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Membangun Sektor Keséhatan 1. Penataan dan	300.000.000,00 DINAS PENGENDALI PENDUDUK DAN KEL BERENCANA 100.000.000,00 DINAS PENGENDALI
	14	01 2.06	6 0009	dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan		Semua Kel/Desa 93.403.400,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Membangun Sektor Kesehatan 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Membangun Sektor Kesehatan	300.000.000,00 DINAS PENGENDALI, PENDUDUK DAN KEL BERENCANA 100.000.000,00 DINAS PENGENDALI, PENDUDUK DAN KEL



	- ,				1			1				r		1
1	2 1	14 01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Pada -		30 Unit	137.582.000,00		- 2. Membangun Sektor		2.230.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN
					Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPPKB					Kesehatan 1. Penataan dan			PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					Daeran						1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			BERENCANA
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	2 1	14 01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin		2 Unit	37.582.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 2. Membangun Sektor	-	200,000,000,00	DINAS PENGENDALIAN
	_ _	-			Lainnya	Lainnya yang Disediakan			Tenggarong, Melayu		Kesehatan			PENDUDUK DAN KELUARGA
					'	7-7-0			3 33 3 37		1. Penataan dan			BERENCANA
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	2 1	14 01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana		7 Unit	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 1. Membangun Sektor	-	200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN
					Pendukung Gedung Kantor atau	Pendukung Gedung Kantor atau			Tenggarong, Timbau		Pendidikan			PENDUDUK DAN KELUARGA
					Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan					1. Penataan dan			BERENCANA
											Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	2 1	14 01	2.08	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah waktu penyediaan Jasa -		12 Bulan	640.000.000,00		- 2. Membangun Sektor		1 100 000 000 00	DINAS PENGENDALIAN
	- -		2.00		Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan		TE Buildin	3-1313331333133		Kesehatan		1110010001000,00	PENDUDUK DAN KELUARGA
						Daerah yang disediakan					1. Penataan dan			BERENCANA
						, ,					Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	2 1	14 01	2.08	0002		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	420.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 2. Membangun Sektor	-	600.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN
					Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan			Tenggarong, Timbau		Kesehatan			PENDUDUK DAN KELUARGA
						Listrik yang Disediakan					1. Penataan dan			BERENCANA
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
—	2 1	14 01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	220.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 2. Membangun Sektor	_	500,000,000,00	DINAS PENGENDALIAN
'	<u> </u>	14 01	2.00	0004	Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang		12 Laporari	Tenggarong, Timbau	DANA BAGITIASIL (DBII)	Kesehatan		300.000.000,00	PENDUDUK DAN KELUARGA
						Disediakan			16.15581.01157.1111.000		1. Penataan dan			BERENCANA
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
1	2 1	14 01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah -		171 Unit	147.901.578,00		- 2. Membangun Sektor		375.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN
					Penunjang Urusan Pemerintahan						Kesehatan			PENDUDUK DAN KELUARGA
					Daerah						1. Penataan dan			BERENCANA
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
—	2 1	14 01	2.00	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas		126 Unit	97.901.578,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BACI HACII (DBH)	- 2. Membangun Sektor		175.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN
l '	<u> </u>	14 01	2.05	0002	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Operasional atau Lapangan yang		120 Offic	Tenggarong, Timbau	DANA BAGITIASIL (DBII)	Kesehatan		173.000.000,00	PENDUDUK DAN KELUARGA
					Perizinan Kendaraan Dinas	Dipelihara dan dibayarkan Pajak			Tenggarong, Timbuu		1. Penataan dan			BERENCANA
					Operasional atau Lapangan	dan Perizinannya					Pengembangan Tata Kelola			
						,					Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	2 1	14 01	2.09	0009		Jumlah Gedung Kantor dan		5 Unit	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 2. Membangun Sektor	-	200.000.000,00	
					Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang			Loa Kulu, Sumber Sari		Kesehatan			PENDUDUK DAN KELUARGA
						Dipelihara/Direhabilitasi			Kab. Kutai Kartanegara,		1. Penataan dan			BERENCANA
									Sebulu, Sebulu		Pengembangan Tata Kelola			
									Moderen		Pemerintahan dan Pelayanan Puhlik			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung		Publik			
									Lama					
									Kab. Kutai Kartanegara,					
									Tenggarong Seberang,					
									Manunggal Jaya					
									Kab. Kutai Kartanegara,					
									Marang Kayu, Sebuntal					
L	\perp		1	<u> </u>										
173	2 1	14 02	1		PROGRAM PENGENDALIAN	Cakupan stakeholder yang terlibat		50 Persen	900.000.000,00			-	2.200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN
			1		PENDUDUK	dalam program KKBPK								PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 	2 1	14 02	2 01	1	Pemaduan dan Sinkronisasi	Tersedianya dokumen grand design -	 	1 Dokumen	390.000.000,00		- 2. Membangun Sektor	_	800 000 000 00	DINAS PENGENDALIAN
'	٠ ١	02	2.01		Kebijakan Pemerintah Daerah	kependudukan		1 DOKUMEN	330.000.000,00		- Z. Wernbangun Sektor Kesehatan	- <u> </u> -	800.000.000,00	PENDUDUK DAN KELUARGA
1 1					Provinsi dengan Pemerintah	neperiodularii					2. Pengembangan sumber			BERENCANA
	- 1		1	1	Daerah Kabupaten/Kota dalam						daya manusia yang sehat,			1
					rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						produktif, terampil			



2	14	02 2	2.01		Rapat Pengendalian ngga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga		12 Kegiatan	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor Kesehatan		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
						Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			Semua Kel/Desa		Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil		BERENCANA
2	14	02 2	2.01 (0027 Advokasi, So	sialisasi dan Fasilitasi	Jumlah dokumen advokasi,		15 Satuan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor -	100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN
				Pelaksanaan	Pendidikan	Sosialisasi dan Fasilitasi		Pendidikan	Semua Kecamatan,		Kesehatan		PENDUDUK DAN KELUARGA
				Kependuduk	an Jalur Formal di	Pelaksanaan Pendidikan			Semua Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		BERENCANA
				Satuan Pendi	idikan Jenjang SD/MI	Kependudukan Jalur Formal di					daya manusia yang sehat,		
				dan SLTP/MT	TS, serta Jalur	Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI					produktif, terampil		
				Nonformal d	an Informal	dan SLTP/MTS, serta Jalur							
'						Nonformal dan Informal							
2	14	02 2	2.01	0028 Advokasi ten		Jumlah Organisasi yang Mengikuti		10 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor -	100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN
					ak Kependudukan	Advokasi tentang Pemanfaatan			Semua Kecamatan,		Kesehatan		PENDUDUK DAN KELUARGA
					lel Solusi Strategis	Kajian Dampak Kependudukan			Semua Kel/Desa		Pengembangan sumber		BERENCANA
					ngatan Dini Dampak	Beserta Model Solusi Strategis					daya manusia yang sehat,		
					an kepada Pemangku	Sebagai Peringatan Dini Dampak					produktif, terampil		
'				Kepentingan		Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan							
'						Kepentingan							
2	14	02 2	2.01 (0030 Sosialisasi te	ntang Pemanfaatan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti		10 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor -	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN
					ak Kependudukan	Sosialisasi tentang Pemanfaatan			Semua Kecamatan,	, ,	Kesehatan		PENDUDUK DAN KELUARGA
					lel Solusi Strategis	Kajian Dampak Kependudukan			Semua Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		BERENÇANA
					ngatan Dini Dampak	Beserta Model Solusi Strategis					daya manusia yang sehat,		
					an kepada Pemangku	Sebagai Peringatan Dini Dampak					produktif, terampil		
				Kepentingan		Kependudukan kepada Pemangku					, , ,		
						Kepentingan							
'													
2	14	02 2	2.01		dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN
					dikan Kependudukan	Pengembangan Materi Pendidikan			Semua Kecamatan,		Kesehatan		PENDUDUK DAN KELUARGA
					kan Formal di Satuan	Kependudukan Jalur Pendidikan			Semua Kel/Desa		Pengembangan sumber		BERENCANA
					enjang SD/MI dan	Formal Sesuai Isu Lokal					daya manusia yang sehat,		
'				SLTP/MTS Se Kabupaten/K	esuai Isu Lokal	Kabupaten/Kota					produktif, terampil		
				Kabupaten/K	ota								
2	14	02 2	2.01 (0033 Penvediaan o	dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	2. Membangun Sektor -	150,000,000,00	DINAS PENGENDALIAN
				Materi Pendi	dikan Kependudukan	Pengembangan Materi Pendidikan			Semua Kecamatan,	` '	Kesehatan		PENDUDUK DAN KELUARGA
					kan Nonformal dan	Kependudukan Jalur Pendidikan			Semua Kel/Desa		2. Pengembangan sumber		BERENÇANA
				informal Ses		Nonformal Sesuai Isu Lokal					daya manusia yang sehat,		
				Kabupaten/K	ota	Kabupaten/Kota					produktif, terampil		
	4.								510.000.000,00				
2	14	00 0										4 400 000 000 00	
		02 2	2.02		erkiraan Pengendalian	Persentase pemetaan perkiraan	-	100 Persen	510.000.000,00		2. Membangun Sektor		DINAS PENGENDALIAN
		02 2	2.02	Penduduk Ca	akupan Daerah	pengendalian penduduk di	-	100 Persen	510.000.000,00		Kesehatan		PENDUDUK DAN KELUARGA
1 1		02 2	2.02		akupan Daerah		-	100 Persen	\$10.000.000,00		Kesehatan 2. Pengembangan sumber		
		02 2	2.02	Penduduk Ca	akupan Daerah	pengendalian penduduk di	-	100 Persen	510.000.000,00		Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,		PENDUDUK DAN KELUARGA
2	14	02 2		Penduduk Ca	akupan Daerah Kota	pengendalian penduduk di	-	100 Persen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Kesehatan 2. Pengembangan sumber		PENDUDUK DAN KELUARGA
2	14			Penduduk Ca Kabupaten/K 0010 Pemanfaatar	akupan Daerah Kota	pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara				DANA BAGI HASIL (DBH)	Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	100.000.000,00	PENDUDUK DAN KELUARG <i>A</i> BERENCANA
2	14			Penduduk Ca Kabupaten/K 0010 Pemanfaatar	akupan Daerah Kota n Data Hasil	pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara Jumlah Data Hasil Pemutakhiran			50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber	100.000.000,00	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN
2	14			Penduduk Ca Kabupaten/K 0010 Pemanfaatar	akupan Daerah Kota n Data Hasil	pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara Jumlah Data Hasil Pemutakhiran	-		50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,	100.000.000,00	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
		02 2	2.02	Penduduk Ca Kabupaten/K 0010 Pemanfaatar Pemutakhira	akupan Daerah Kota n Data Hasil n Data Keluarga	pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	-	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	100.000,000	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		02 2	2.02	Penduduk Ca Kabupaten/K 0010 Pemanfaatar Pemutakhira	akupan Daerah Kota n Data Hasil n Data Keluarga	pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan Jumlah Data dan Informasi			50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor	100.000,000	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN
		02 2	2.02	Penduduk Ca Kabupaten/K 0010 Pemanfaatar Pemutakhira	akupan Daerah Kota n Data Hasil n Data Keluarga	pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	-	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan	100.000.000,00	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
		02 2	2.02	Penduduk Ca Kabupaten/K 0010 Pemanfaatar Pemutakhira	akupan Daerah Kota n Data Hasil n Data Keluarga	pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan Jumlah Data dan Informasi	-	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber	100.000.000,00	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN
		02 2	2.02	Penduduk Ca Kabupaten/K 0010 Pemanfaatar Pemutakhira	akupan Daerah Kota n Data Hasil n Data Keluarga	pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan Jumlah Data dan Informasi		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,	100.000.000,00	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
2	14	02 2	2.02 (Penduduk Ci Kabupaten/K 0010 Pemanfaatan Pemutakhira 0011 Penyediaan I Keluarga	akupan Daerah iota n Data Hasil n Data Keluarga Data dan Informasi	pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor - Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	100.000.000,000	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	14	02 2	2.02 (Penduduk Ci Kabupater/k 0010 Pemanfaatar Pemutakhira 0011 Penyediaan I Keluarga 0012 Pencatatan d	akupan Daerah Kota n Data Hasil n Data Keluarga	pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya Jumlah Laporan Pencatatan dan		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor	100.000.000,00	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN DINAS PENGENDALIAN
2	14	02 2	2.02 (Penduduk Ci Kabupaten/K 0010 Pemanfaatan Pemutakhira 0011 Penyediaan I Keluarga	akupan Daerah iota n Data Hasil n Data Keluarga Data dan Informasi	pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan	100.000.000,00	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02 2	2.02 (Penduduk Ci Kabupater/k 0010 Pemanfaatar Pemutakhira 0011 Penyediaan I Keluarga 0012 Pencatatan d	akupan Daerah iota n Data Hasil n Data Keluarga Data dan Informasi	pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya Jumlah Laporan Pencatatan dan		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor	100.000.000,00	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN DINAS PENGENDALIAN
2	14	02 2	2.02 (Penduduk Ci Kabupater/k 0010 Pemanfaatar Pemutakhira 0011 Penyediaan I Keluarga 0012 Pencatatan d	akupan Daerah iota n Data Hasil n Data Keluarga Data dan Informasi	pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya Jumlah Laporan Pencatatan dan		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Keamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) - DANA BAGI HASIL (DBH) -	Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber	100.000.000,00	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02 2	2.02 (Penduduk Ci Kabupater/k 0010 Pemanfaatar Pemutakhira 0011 Penyediaan (Keluarga 0012 Pencatatan d Keluarga	akupan Daerah iota n Data Hasil n Data Keluarga Data dan Informasi lan Pengumpulan Data	pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, panusia yang sehat,	100.000.000,00	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02 2	2.02 (Penduduk Ci Kabupater/K 0010 Pemanfaatar Pemutakhira 0011 Penyediaan I Keluarga 0012 Pencatatan d Keluarga	akupan Daerah iota n Data Hasil n Data Keluarga Data dan Informasi ian Pengumpulan Data dan Pengawasan ian Pelaporan Program	pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) - DANA BAGI HASIL (DBH) -	Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan	100.000.000,00 100.000.000,00 400.000.000,00	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02 2	2.02 (Penduduk Ci Kabupater/k 0010 Pemanfaatar Pemutakhira 0011 Penyediaan (Keluarga 0012 Pencatatan d Keluarga	akupan Daerah iota n Data Hasil n Data Keluarga Data dan Informasi ian Pengumpulan Data dan Pengawasan ian Pelaporan Program	pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) - DANA BAGI HASIL (DBH) -	Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber	100.000.000,00 100.000.000,00 400.000.000,00	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02 2	2.02 (Penduduk Ci Kabupater/K 0010 Pemanfaatar Pemutakhira 0011 Penyediaan I Keluarga 0012 Pencatatan d Keluarga	akupan Daerah iota n Data Hasil n Data Keluarga Data dan Informasi ian Pengumpulan Data dan Pengawasan ian Pelaporan Program	pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) - DANA BAGI HASIL (DBH) -	Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	100.000.000,00 100.000.000,00 400.000.000,00	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 2	14	02 2 02 2 02 2	2.02 (Penduduk Ci Kabupater/k 0010 Pemanfaatar Pemutakhira 0011 Penyediaan I Keluarga 0012 Pencatatan d Keluarga 0018 Pembinaan C Pencatatan d Bangga Kenc	akupan Daerah iota n Data Hasii n Data Keluarga Data dan Informasi lan Pengumpulan Data dan Pengawasan lan Pelaporan Program ana	pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) - DANA BAGI HASIL (DBH) - DANA BAGI HASIL (DBH) -	Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	100.000.000,00 100.000.000,00 400.000.000,00	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02 2 02 2 02 2	2.02 (Penduduk Ci Kabupater/k 0010 Pemanfaatar Pemutakhira 0011 Penyediaan I Keluarga 0012 Pencatatan d Keluarga 0018 Pembinaan o Pencatatan d Bangga Kenc	akupan Daerah iota n Data Hasil n Data Keluarga Data dan Informasi Ian Pengumpulan Data Ian Pengawasan Ian Pelaporan Program ana	pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) - DANA BAGI HASIL (DBH) - DANA BAGI HASIL (DBH) -	Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor - Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor - Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor - Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor - Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor - Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor	100.000.000,00 100.000.000,00 400.000.000,00	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 2	14	02 2 02 2 02 2	2.02 (Penduduk Ci Kabupaten/K 0010 Pemanfaatar Pemutakhira 0011 Penyediaan (Keluarga 0012 Pencatatan d Keluarga 0018 Pembinaan o Pencatatan d Bangga Kenc	akupan Daerah iota n Data Hasil n Data Keluarga Data dan Informasi Ian Pengumpulan Data dan Pengawasan Ian Pelaporan Program ana dan Pengolahan Data an, Keluarga Berencana	pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan,		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) - DANA BAGI HASIL (DBH) - DANA BAGI HASIL (DBH) -	Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 3. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan	100.000.000,00 100.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 2	14	02 2 02 2 02 2	2.02 (Penduduk Ci Kabupater/K 0010 Pemanfaatar Pemutakhira 0011 Penyediaan I Keluarga 0012 Pencatatan d Keluarga 0018 Pembinaan c Pencatatan d Bangga Kenc	akupan Daerah iota n Data Hasil n Data Keluarga Data dan Informasi Ian Pengumpulan Data Ian Pengawasan Ian Pelaporan Program ana Ian Pengolahan Data an, Keluarga Berencana gunan Keluarga Berencana	pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) - DANA BAGI HASIL (DBH) - DANA BAGI HASIL (DBH) -	Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	100.000.000,00 100.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 2	14	02 2 02 2 02 2	2.02 (Penduduk Ci Kabupater/K 0010 Pemanfaatar Pemutakhira 0011 Penyediaan I Keluarga 0012 Pencatatan d Keluarga 0018 Pembinaan o Pencatatan d Bangga Kenc 0023 Penyediaan I Kependuduki dan Pemban (Bangga Ken	akupan Daerah iota n Data Hasil n Data Keluarga Data dan Informasi Ian Pengumpulan Data Ian Pengawasan Ian Pelaporan Program ana Ian Pelaporan Program ana Idan Pengolahan Data an, Keluarga Berencana gunan Keluarga Berencana gunan Keluarga Berencana	pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) - DANA BAGI HASIL (DBH) - DANA BAGI HASIL (DBH) -	Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangan Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangan Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	100.000.000,00 100.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 2	14	02 2 02 2 02 2	2.02 (Penduduk Ci Kabupater/K 0010 Pemanfaatar Pemutakhira 0011 Penyediaan I Keluarga 0012 Pencatatan d Keluarga 0018 Pembinaan c Pencatatan d Bangga Kenc	akupan Daerah iota n Data Hasil n Data Keluarga Data dan Informasi Ian Pengumpulan Data Ian Pengawasan Ian Pelaporan Program ana Ian Pelaporan Program ana Idan Pengolahan Data an, Keluarga Berencana gunan Keluarga Berencana gunan Keluarga Berencana	pengendalian penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) - DANA BAGI HASIL (DBH) - DANA BAGI HASIL (DBH) -	Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	100.000.000,00 100.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



	2 1	14 02	2.02	0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencian (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	25 Unit	60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	PENDUI	S PENGENDALIAN I'UDUK DAN KELUARGA NCANA
	2 1	14 02	2.02	0027	Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Nembangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	100.000.000,00 DINAS I PENDU BERENC	UDUK DAN KELUARGA
174	2 1	14 03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan angka unmet need Persentase peserta KB Baru Persentase akseptor MKIP Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR) cara modern	10.00 Persen 15.23 Persen 16.16 Persen 77.25 1.Persen	2.075.000.000,00			- 2.925.000.000,00 DINAS PENDU BERENO	UDUK DAN KELUARGA
	2 1	14 03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya kegitaan advokasi - dan KIE	5 Event	375.000.000,00	-	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	- 525.000.000,00 DINAS PENDU BERENC	UDUK DAN KELUARGA
	2 1	14 03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	20 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil		S PENGENDALIAN IUDUK DAN KELUARGA NCANA
	2 1	14 03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil		S PENGENDALIAN IUDUK DAN KELUARGA NCANA
	2 1	14 03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	3 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	100.000.000,00 DINAS I PENDU BERENC	UDUK DAN KELUARGA
	2 1	14 03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 Organisasi	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	75.000.000,00 DINAS I PENDUI BERENC	UDUK DAN KELUARGA
	2 1	14 03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya kegiatan - operasional KB di Lapangan	237 Desa	115.000.000,00	-	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	- 1.050.000.000,00 DINAS PENDU BERENO	UDUK DAN KELUARGA
	2 1	14 03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	237 Orang	10.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil		S PENGENDALIAN IUDUK DAN KELUARGA NCANA
	2 1	14 03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	237 Organisasi	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil		S PENGENDALIAN DUDUK DAN KELUARGA NCANA

	2 1	14 03	2.02	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan	1 Laporan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber	150.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARG BERENCANA
					Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan		School Key School		daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Belletione
						Keluarga Berencana (PKB/PLKB)					
	2 1	14 03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat	Tersedianya alat, obat dan kontasepsi pada Fasilitas	40 Faskes	1.235.000.000,00	-	2. Membangun Sektor Kesehatan	900.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUAF
					Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan				Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	BERENCANA
	2 1	14 03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		2689 Orang	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun Sektor - Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	150.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARG BERENCANA
	2 1	14 03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	150 Unit	900.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	300.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARO BERENCANA
	2 1	14 03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduks di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	100.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARG BERENCANA
	2 1	14 03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	20 Orang	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Membangun Sektor Kesehatan Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas layanan kesehatan	150.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARG BERENCANA
	2 1	14 03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	20 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	200.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARG BERENCANA
	2 1	14 03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan ORMAS / POKJA -	80 Persen	350.000.000,00	-	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	450.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUAF BERENCANA
	2 1	14 03	2.04	0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	50 Unit	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	200.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARG BERENCANA
	2 1	14 03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	95 Kampung	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	150.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARG BERENCANA
	2 1	14 03	2.04	0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	100.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARG BERENCANA
175	2 1	14 04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Remaja Dalam PIK-R/M Cakupan Anggota BKL ber-KB Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS ber-KB Mandiri Cakupan Anggota BKB ber-KB Pusat Pelayanan KS (PPKS) Cakupan Anggota BKR ber-KB	100.00 Persen 64.63 Persen 73.18 Persen 73.48 Persen 9.00 Persen 91.97 Persen	4.134.800.000,00			6.524.100.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUAH BERENCANA



2	14	04 2	2.01	Ke Ke	elaksanaan Pembangunan Jeluarga Melalui Pembinaan Jetahanan dan Kesejahteraan Jeluarga	Cakupan pembinaan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	40.15 Persen	4.034.800.000,00	-	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04 2	2.01 (Ke Ke	enumbuhan dan Peningkatan esadaran Keluarga dalam eterlibatan Perencanaan ehidupan Menuju Keluarga erkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterilibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50 Keluarga	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	produktif, terampil 2. Membangun Sektor Kesehatan 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	·	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04 2	2.01 (embentukan dan operasional ekolah Lansia di Kelompok BKL	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	2 Kegiatan	75.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, ferampil		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04 2	2.01	M	engelolaan Ketahanan Keluarga Aelalui Pusat Pelayanan Keluarga ejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	2 Laporan / Dokumen	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04 2	2.01 (Ke Ke Bi	romosi dan Sosialisasi Kelompok egiatan Ketahanan dan esejahteraan Keluarga (BKB, BKR, KL, PPKS, PIK-R dan Usaha eningkatan Pendapatan Keluarga ıkseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanna dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04 2	2.01 (Ke BI Pe	engadaan Sarana Kelompok egiatan Ketahanan dan esejahteraan Keluarga (BKB, BKR, KK, PPKS, PIK-R dan Usaha eningkatan Pendapatan Keluarga kseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04 2	2.01	Pe Ke Bl	Orientasi/Pelatihan Teknis elaksana/Kader Ketahanan dan esejahteraan Keluarga (BKB, BKR, KL, PPKS, PIK-R dan Usaha eningkatan Pendapatan Keluarga kkseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	120 Orang	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04 2	2.01 (dvokasi dan Promosi iBangga Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	50 Orang	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04 2	2.01 (Pe Ke Bi	Drientasi dan Pelatihan Teknis engelola Ketahanan dan esejahteraan Keluarga (BKB, BKR, KL, PPKS, PIK-R dan Usaha eningkatan Pendapatan Keluarga kseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKA)	2 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	·	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04 2	2.01	Pe	enyerasian Kebijakan dalam elaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04 2	2.01	Pe Ke R Pe	renyediaan Biaya Operasional bagi engelola dan Pelaksana (Kader) letahanan dan Kesejaheraan leluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKtan Usaha Peningkatan endapatan Keluarga Akseptor UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	1.127 Orang	2.000.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	300.000,000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04 2	2.01	Pe	elaksanaan Koordinasi Evaluasi encapaian iBangga (Indeks embangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasii Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Laporan	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Membangun Sektor Kesehatan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



7 9 9 9 9 9 9 9 9 9																		
Part	2	14	04	2.01	0026	Penyediaan Biaya Operasional hagi	Jumlah Kelompok Kegiatan		151	1 Kelompok	824.800.000,00 Kab, Kutai Kartanegara.	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Membangun Sektor	-		600.000.000.00	DINAS PENGENDALIAN
Page	1 -	1			1							,==,			1			
Part																		
Part Part											Semaa key besa							BERENOANA
Part																		
Value Valu														produkti, teranipii				
Part Variable Part Variable Part						Akseptor (of FkA)												
Part	2	14	04	2 01	0027	Penyediaan dan Pengembangan		 	1.0	Ookumen	35,000,000,00 Kah Kutai Kartanegara	DANA RAGI HASII (DRH)	1_	2 Membangun Sektor	_		100 000 000 00	DINAS PENGENDALIAN
Part	-	1	0.1	2.01	0027	,				okumen		Driver Briding (BBI)					100.000.000,00	
Part Part																		
Part Continue Part Part Continue Part Part Continue Part						r embanganan kerdarga)	(macks rembangunan keluarga)				Semaa key besa							BERENOANA
1																		
See See See See See See See See See See	2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelomnok Ketahanan	lumlah Kelomnok Ketahanan dan		15	Kelomnok	150 000 000 00 Kah Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASII (DRH)	1_		-		250,000,000,00	DINAS PENGENDALIAN
Fig.																		
de la la la compartament participa france participa franc																		
International Control (Control (Control) International Control (Contro																		
Part																		
														, , ,				
Percent displaced Excorn Richards Percent displaced Committed States Percent di																		
Part Part																		
2 1 5 0 1 227 Project Control of the Control of Control																		
Process Series Digitalisas Security Series Series Digitalisas Security Series Series Digitalisas Security Series Series Digitalisas Security Series Serie							, , , , , , ,											
Person Forte Organisation Pe	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan	Cakupan peran ORMAS dalam	-	90	Persen	100.000.000,00		-	2. Membangun Sektor		-	3.224.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN
Refuge for five and member producting produc						Peran Serta Organisasi	pembinaan ketahanan dan				•						•	PENDUDUK DAN KELUARGA
Exposers (Acta dalam) Predissing rest (Acta d						Kemasyarakatan Tingkat Daerah	kesejahteraan keluarga							2. Pengembangan sumber				BERENCANA
Permissional Relations Methods Permissional Relations Permissiona							'											
Persistant Relations and Englanders Michage Persistant Michage Per																		
2 16 04 222 207 Penantakaan Data dari Informasi Kanapagan Penantakaan Data dari Informasi Kanapagan Penantakaan Data dari Informasi Kanapagan Penantakaan Data dari Informasi Kanapagan Penantakaan Data dari Informasi Kanapagan Penantakan Data Penantakan Da														, , , , ,				
Reduction for the continuency of the continuency						Kesejahteraan Keluarga												
Terminal terminal Calon Pergentric (Calon PUS, Data Part) Paca salin/technian, Paca	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi	Cakupan Pemantauan Data dan		1 la	aporan	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Membangun Sektor	-		1.500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN
Pengantin/Colon PUS, but Hamil, Pass saliny-febriary, Basin, Petrology (compiled) 2						Keluarga Berisiko Stunting	Informasi Keluarga Berisiko				Semua Kecamatan,			Kesehatan				PENDUDUK DAN KELUARGA
Pacca salin/helahiran, Pacca salin/helahiran,						(Termasuk remaja Calon	Stunting (Termasuk remaja Calon				Semua Kel/Desa			2. Pengembangan sumber				BERENCANA
2 14 04 2.02 000 Portugual perishian Soutura Balanian Soutura Balanian Soutura Balanian Soutura Balanian Sumiting (Termanuk remaja Calon Pergangarian Cal						Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil,	Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil,							daya manusia yang sehat,				
Part Part														produktif, terampil				
Semus Kezamatan, Semus Kezamatan, Semus Kezamatan, Semus Kezamatan, Semus Kezamatan, Semus Kezamatan, Semus Kezamatan, Semus Kezamatan, Semus Kezamatan, Semus Kezi-Jesas dipan manusia yang sebat, produktif, terampil pedapat pedapa						Baduta/Balita)	Baduta/Balita)											
Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko			1 la	aporan	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Membangun Sektor	-		1.574.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN
Pasca salin/kebhiran, Baduf-Sehiran,						Stunting (Termasuk remaja Calon	(Termasuk remaja Calon				Semua Kecamatan,			Kesehatan				PENDUDUK DAN KELUARGA
Baduty/Baltal yang mendapat pendampigan produktif, ferampil produktif, ferampil pendampigan pendampiga											Semua Kel/Desa							BERENCANA
Part Part																		
2 14 04 202 0007 Partispasi Mitra Kerja dan Operasina Mitra Kerja dan Operasina Membangan Penggerakan Operasinal P						Baduta/Balita)								produktif, terampil				
Pengeratan Querasional Pengera							, ,											
Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga Penggerakan Operasional Penge	2	14	04	2.02	0007	Partisipasi Mitra Kerja dan	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra		1 L	aporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Membangun Sektor	-		150.000.000,00	
Pembinaan Program Pembangunan Pengerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Pendang						Organisasi Kemasyarakatan dalam	Kerja dan Organisasi				Semua Kecamatan,							
Keluarga Pembinaan Program Pembangunan Keluarga Pembinagan Produktif, terampil						Penggerakan Operasional	Kemasyarakatan dalam				Semua Kel/Desa			2. Pengembangan sumber				BERENCANA
Dinas Perhubungan 42.596.656.672,00 DinAs PERHUBUNGAN 42.596.656.672,00 DinA						Pembinaan Program Pembangunan	Penggerakan Operasional											
Dinas Perhubungan 115.094.751.855,00 142.596.656.72,00 101AS PERHUBUNGAN 12.094.751.855,00 12.094.751.855,00 12.						Keluarga								produktif, terampil				
2 15 URUSAN PEMERINTAHAN WAIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PENDANAN DASAR							Keluarga											
2 15		1					ANC TIDAY DEDVALTAN DENCAN DEL	AVANAN DACAD				1	1	1				
176 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2 15 01 2.01 Perencanan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 2.511.326.672,00 DINAS PERHUBUNGAN 7 5 Nilai 46.345.726.331,00 8 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perenguan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang			-					AYANAN DASAR								<u> </u>		
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2 15 01 2.01 Perenanan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 15 01 2.01 Perenanan, Penganggaran dan evaluasi kinerja 3 10 Persen 700.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang generas					_				1 1	A171-1	-							
A S S S S S S S S S	1/6 2	15	01				Nilai SAKIP perangkat daeran	-	/5	Milai	46.345.726.331,00					-	32.511.326.6/2,00	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Dae																		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pengangan kesehatan, prestasi dahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang generasi Z), dan penyan	2	15	01	2 01			Tingkat kesesuaian antara	 -	100) Porcon	700 000 000 00		Memnerkust nembangunan	4 Membangun Infratruktur	Anaratur	-	650 000 000 00	DINAS PERHI IRLINGAN
evaluasi kinerja sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesehatan pender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi zi), dan penyandang		13	01	2.01					100	o reiseii	700.000.000,00				Aparacui		030.000.000,00	DINAS FERHOBONGAN
kesehatan, prestasi olahraga, konektivitas dan kesetarana gender, serta pembangunan infrastruktur pembangunan infrastruktur penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milanial dan generasi 2), dan penyandang						Evaluasi Killerja i eraligkat Daerali												
kesetaraan gender, serta penguatan peram secara terpadu dan merata peremuaan, peremuaan (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang							e variaus: kinerja											
penguatan peran secara terpadu dan merata perempuan, pemuda (generali dan generasi 2), dan penyandang																		
perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang																		
(generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang														secara terpada dan merata				
generasi 2), dan penyandang	1	1					1					ĺ			1			
	1		1 1		1		1					ĺ			1			
USAVITAS.																		

2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membangun Infratruktur Konektivitas G. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Aparatur	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	6 01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas G. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Aparatur	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	6 01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	Membangun infratruktur Konektivitas F. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Aparatur	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Aparatur	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		1 Data	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membangun Infratruktur Konektivitas Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Aparatur	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	6 01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Berita Acara	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membangun Infratruktur Konektivitas F. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Aparatur	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN



2	15	5 01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanannya administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	24.032.994.331,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangun infrastruktur secara terpadu dan merata	Aparatur	- 15.465.330.435,6	0 DINAS PERHUBUNGAN
2	15	6 01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	385 Orang/bulan	23.632.994.331,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Aparatur	14.965.330.435)	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	6 01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Konektivitas 6. Pengembangan	Aparatur	100.000.000,6	00 DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Konektivitas 6. Pengembangan	Aparatur	300.000.000,/	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Membangun infratruktur Konektivitas Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Aparatur	100.000.000,4	DINAS PERHUBUNGAN

2	19	5 01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya administrasi barang - milik daerah		100 Persen	275.000.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Aparatur .	215.248.129,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	: 15	5 01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Aparatur	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	5 01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun infratruktur Konektivitas G. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Aparatur	115.248.129,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	19	5 01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas O- Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Aparatur	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	5 01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Millik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Membangun Infratruktur Konektivitas Fengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Aparatur	0,00	DINAS PERHUBUNGAN

									1	1				T
	! 1	15 01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksanannya administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Pers	150.000.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas Fengembangan konektivitas dan pembangun infrastruktur secara terpadu dan merata	Wajib retribusi	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	2 1	15 01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporal	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Wajib retribusi	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	! 1	15 01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokum	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	, DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewiraushanan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Konektivitas 6. Pengembangan	Wajib retribusi	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	2 1	15 01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Pers	450.000.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	2 1	15 01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokum	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, Timbau	, DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	5 01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		5 01			Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	300.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur		Dinas Perhubungan
2	15	5 01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Penerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	5 01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.535.000.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Aparatur	1.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	5 01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas F. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Aparatur	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

2	1!	5 01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	185.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan menigkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Aparatur	100,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	: 19	15 01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Aparatur	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	19	5 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	550.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	infrastruktur dan	Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Aparatur	00,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	! 1!	5 01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Konektivitas 6. Pengembangan	Aparatur	75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	1!	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas Fengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Aparatur	0,00	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	15 01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Aparetur	500.0	0.000,00 DINA	AS PERHUBUNGAN
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Aparatur			AS PERHUBUNGAN
2	15	15 01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Aparatur	75.00	0.000,00 DINA	AS PERHUBUNGAN
2	15	15 01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang - Milik Daerah	100 Persen	300.000.000		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas Fengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Aparatur	- 100.0	0.000,00 DIN	AS PERHUBUNGAN
2	15	15 01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Membangun Infratruktur Konektivitas G. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Aparatur	100.0	0.000,00 DINA	AS PERHUBUNGAN

2	15	.5 01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan - Pemerintahan Daerah	100 Persen	16.346.724.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Aparatur	13.580.748.10	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	5 01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	14.745.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Konektivitas 6. Pengembangan	Aparatur	8.919.696.46	0,00 DINAS PERHUBUNGAN
2	15	5 01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.601.724.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Konektivitas 6. Pengembangan	Aparatur	4.661.051.64	8,00 DINAS PERHUBUNGAN
2	15	5 01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	2.556.008.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Aparatur	- 800.000.00	0,00 DINAS PERHUBUNGAN
2	15	5 01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Aparatur	200.000.00	0,00 DINAS PERHUBUNGAN

	2	15 01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	31 Unit	1.300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan	4. Membangun Infratruktur Konektivitas	Aparatur		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata				
	2	15 01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	167 Unit	105.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Aparatur		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15 01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	250.228.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Aparatur		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15 01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600.780.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun infratruktur Konektivitäs G. Pengembangan konektivitäs dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Aparatur		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15 01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Konektivitas 6. Pengembangan	Aparatur		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
177	2	15 02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas Darat -	100 Persen	62.274.035.525,00					-	8.600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	100 Persen	30.687.530.000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat Pengguna jalan	-	2.150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 Unit	1.417.830.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat Pengguna jalan		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1898 Unit	24.369.700.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua KecJDesa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas O. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat Pengguna jalan		750.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

2 1!	5 02	2.02	2 0000	3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	720 Unit	2.000.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat Pengguna jalan		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	5 02			4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3410 Unit	2.900.000.000,00 Kab, Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa Kab, Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab, Kutai Kartanegara, Loa Julu, Semua Kel/Desa Kab, Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab, Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab, Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab, Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab, Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab, Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa Kab, Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa Kab, Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab, Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab, Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat Pengguna jalan			DINAS PERHUBUNGAN
2 1!	5 02	2.03	3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksananya pengelolaan terminal tipe c	100 Persen	4.100.000,000		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat penguna jasa terminal tipe c	-	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

2	15 (02 2.03	3 0007	Revitalisasi Terminal Tipe C	Jumlah Terminal yang direvitalisasi		3 Unit	4.100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DRH)	Melanjutkan pengembangan	4. Membangun Infratruktur	Masyarakat penguna	1	150,000,000,00	DINAS PERHUBUNGAN
1 -	13 `	2.00	0007	(Fasilitas Utama dan Penunjang)	(Fasilitas Utama dan Penunjang)		5 Onic	Tenggarong, Semua	Britist British (BBI)	infrastruktur dan	Konektivitas	jasa terminal tipe c		130.000.000,00	511015 1 51111050110711
				(Fasilitas Otalila dali Felidiljalig)	(Fasilitas Otalila dali Felidiljalig)			Kel/Desa			6. Pengembangan	jasa terrimiai tipe c			
										meningkatkan lapangan kerja					
								Kab. Kutai Kartanegara,		yang berkualitas, mendorong	konektivitas dan				
								Kota Bangun, Semua		kewirausahaan,	pembangunan infrastruktur				
								Kel/Desa		mengembangkan industri	secara terpadu dan merata				
								Kab. Kutai Kartanegara,		kreatif serta					
								Muara Jawa, Semua		mengembangkan					
								Kel/Desa		agromaritim industri di					
								Kely Desa							
										sentra produksi melalui					
										peran aktif koperasi.					
2	15 (02 2.04	4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan	Terlaksananya Penerbitan Izin -		100 Persen	150.000.000,00		Membangun dari desa dan	4. Membangun Infratruktur	Penguna iasa parkir	-	200.000.000.00	DINAS PERHUBUNGAN
				dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penyelenggaraan dan			·		dari bawah untuk	Konektivitas			•	
				uan rembangunan rasintas raikii	Pembangunan Fasilitas Parkir					pertumbuhan ekonomi,	6. Pengembangan				
					rembangunan rasintas raikii										
										pemerataan ekonomi dan	konektivitas dan				
										pemberantasan kemiskinan.	pembangunan infrastruktur				
											secara terpadu dan merata				
				<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	l		
2	15 (02 2.04	4 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Laporan Koordinasi dan		2 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan	4. Membangun Infratruktur	Penguna jasa parkir		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
				Pengawasan Pelaksanaan Izin	Sinkronisasi Pengawasan			Tenggarong, Timbau	1	dari bawah untuk	Konektivitas			·	
				Penyelenggaraan dan	Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan	1			1	pertumbuhan ekonomi,	6. Pengembangan				
				Pembangunan Fasilitas Parkir	dan Terbangunnya Fasilitas Parkir					pemerataan ekonomi dan	konektivitas dan				
				Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota					pemberantasan kemiskinan.	pembangunan infrastruktur				
											secara terpadu dan merata				
2	15 (02 2.05	5	Pengujian Berkala Kendaraan	Terlaksanannya pengujian -		100 Persen	4.400.000.000,00		Melanjutkan pengembangan	4. Membangun Infratruktur	Wajib Uji	-	1.750.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
				Bermotor	kendaraan bermotor					infrastruktur dan	Konektivitas				
										meningkatkan lapangan	6. Pengembangan				
										kerja yang berkualitas,	konektivitas dan				
										mendorong kewirausahaan,	pembangunan infrastruktur				
										mengembangkan industri	pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata				
										mengembangkan industri					
										mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan					
										mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di					
										mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui					
										mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di					
										mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui					
										mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	secara terpadu dan merata				
2	15 (02 2.05	5 0001		Jumlah Sarana dan Prasarana		1 Unit	3.300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan	secara terpadu dan merata 4. Membangun Infratruktur	Wajib Uji		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 (02 2.05	5 0001	Pengujian Berkala Kendaraan	Pengujian Berkala Kendaraan		1 Unit	3.300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan	secara terpadu dan merata 4. Membangun Infratruktur Konektivitas	Wajib Uji		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 (02 2.05	5 0001				1 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan	secara terpadu dan merata 4. Membangun Infratruktur	Wajib Uji		1.000.000,000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 (02 2.05	5 0001	Pengujian Berkala Kendaraan	Pengujian Berkala Kendaraan		1 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	secara terpadu dan merata 4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan	Wajib Uji		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 (02 2.05	5 0001	Pengujian Berkala Kendaraan	Pengujian Berkala Kendaraan		1 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	secara terpadu dan merata 4. Membangun infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan	Wajib Uji		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 (02 2.05	5 0001	Pengujian Berkala Kendaraan	Pengujian Berkala Kendaraan		1 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur	Wajib Uji		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 (02 2.05	5 0001	Pengujian Berkala Kendaraan	Pengujian Berkala Kendaraan		1 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri	secara terpadu dan merata 4. Membangun infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan	Wajib Uji		1.000.000,000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 (02 2.05	5 0001	Pengujian Berkala Kendaraan	Pengujian Berkala Kendaraan		1 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur	Wajib Uji		1.000.000,000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 (02 2.05	5 0001	Pengujian Berkala Kendaraan	Pengujian Berkala Kendaraan		1 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur	Wajib Uji		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 (02 2.05	5 0001	Pengujian Berkala Kendaraan	Pengujian Berkala Kendaraan		1 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur	Wajib Uji		1.000.000,000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 (02 2.05	5 0001	Pengujian Berkala Kendaraan	Pengujian Berkala Kendaraan		1 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur	Wajib Uji		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 (02 2.05	5 0001	Pengujian Berkala Kendaraan	Pengujian Berkala Kendaraan		1 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur	Wajib Uji		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 (02 2.05	5 0001	Pengujian Berkala Kendaraan	Pengujian Berkala Kendaraan		1 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur	Wajib Uji		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 (02 2.05	5 0001	Pengujian Berkala Kendaraan	Pengujian Berkala Kendaraan		1 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur	Wajib Uji		1.000.000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia			Tenggarong, Timbau		mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata				
		02 2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Registrasi Kendaraan Wajib Uji	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia Jumlah Kendaraan Wajib Uji		1 Unit	Tenggarong, Timbau 250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas O- Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata 4. Membangun Infratruktur	Wajib Uji			DINAS PERHUBUNGAN
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang			Tenggarong, Timbau 250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua		mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas 6. Pengembangun infrastruktur secara terpadu dan merata 4. Membangun Infratruktur Konektivitas				
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Registrasi Kendaraan Wajib Uji	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia Jumlah Kendaraan Wajib Uji			Tenggarong, Timbau 250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas O- Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata 4. Membangun Infratruktur				
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Registrasi Kendaraan Wajib Uji	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang			Tenggarong, Timbau 250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa		mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja meningkatkan lapangan kerja	A. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangun infrastruktur secara terpadu dan merata 4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan				
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Registrasi Kendaraan Wajib Uji	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang			Tenggarong, Timbau 250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,		mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata 4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan				
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Registrasi Kendaraan Wajib Uji	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang			Tenggarong, Timbau 250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua		mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangun infrastruktur secara terpadu dan merata 4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur				
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Registrasi Kendaraan Wajib Uji	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang			Tenggarong, Timbau 250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,		mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata 4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan				
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Registrasi Kendaraan Wajib Uji	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang			Tenggarong, Timbau 250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua		mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangun infrastruktur secara terpadu dan merata 4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur				
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Registrasi Kendaraan Wajib Uji	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang			Tenggarong, Timbau 250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua		mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangun infrastruktur secara terpadu dan merata 4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur				
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Registrasi Kendaraan Wajib Uji	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang			Tenggarong, Timbau 250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua		mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangun infrastruktur secara terpadu dan merata 4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur				
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Registrasi Kendaraan Wajib Uji	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang			Tenggarong, Timbau 250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua		mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di agromaritim industri di	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangun infrastruktur secara terpadu dan merata 4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur				
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Registrasi Kendaraan Wajib Uji	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang			Tenggarong, Timbau 250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua		mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangun infrastruktur secara terpadu dan merata 4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur				
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Registrasi Kendaraan Wajib Uji	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang			Tenggarong, Timbau 250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua		mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di agromaritim industri di	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangun infrastruktur secara terpadu dan merata 4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur				
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Registrasi Kendaraan Wajib Uji	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang			Tenggarong, Timbau 250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua		mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangun infrastruktur secara terpadu dan merata 4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur				
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Registrasi Kendaraan Wajib Uji	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang			Tenggarong, Timbau 250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua		mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangun infrastruktur secara terpadu dan merata 4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur				

2	15	15 02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	7000 Dokumen	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Wajib Uji	350.000.00	DINAS PERHUBUNGAN
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	28 Unit	550.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Wajib Uji	300.000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	15 02	2.05	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Membangun Infratruktur Konektivitas G. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Wajib Uji	\$0,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	15 02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksanannya manajemen dan rekayasa lalu lintas	100 Persen	18.286.505.525,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat penguna jalan	- 3.050.000.00	0,00 DINAS PERHUBUNGAN
2	15	15 02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	1.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Membangun Infratruktur Konektivitas G. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat penguna jalan	1.500.000.00	D,00 DINAS PERHUBUNGAN

2	15 (2.06	0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	19 Unit	3.835.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat penguna jalan	400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 (2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	1.000.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas O- Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat penguna jalan	600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 (2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	6 Dokumen	9.151.505.525,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas O- Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat penguna jalan	400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 (2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	5 Laporan	500.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas O- Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat penguna jalan	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15 (2.06	0018	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	4 Unit	2.800.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat penguna jalan	0,00	DINAS PERHUBUNGAN



2	15	5 02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			100 Persen	100.000.000		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat penguna jasa	-	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	5 02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		1 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat penguna jasa		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	5 02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya angkutan umum dan jasa angkutan orang/barang		100 Persen	4.550.000.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat penguna jasa angkutan umum/barang	-	1.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	5 02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		2 Laporan	1.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Gunung Sari	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat penguna jasa angkutan umum/barang		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

	2	15 02	2 2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		11 Unit	3.350.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat penguna jasa angkutan umum/barang	1.000.000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
178	2	15 03	3		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektifitas sungai danau dan penyeberangan	-	100 Persen	6.475.000.000,00					- 1.485.330.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15 03	3 2.12		PELGYAKAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	penyeotrangan Teralaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		100 Persen	100.000,000		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat penguna jasa pelabuhan	- 150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15 03	3 2.12	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun		1 Unit	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat penguna jasa pelabuhan	150,000,000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15 0	3 2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		100 Persen	6.300.000,000		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat penguna jasa pelabuhan	- 1.185,330,000,00	DINAS PERHUBUNGAN

2	! 1				Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	1 Unit	2.450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 2.450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata 4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan konektivitas dan pembangunan infrastruktur	Masyarakat penguna jasa pelabuhan Masyarakat penguna jasa pelabuhan		435.330.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	! 1	15 03	2.13	0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	3 Unit	3.500.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	secara terpadu dan merata 4. Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan	Masyarakat penguna jasa pelabuhan		550,000,000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	! 1	15 03	2.13	0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungal, Danau dan Penyeberangan	1 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun infratruktur Konektivitas G. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat penguna Jasa pelabuhan		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	2 1	15 03	2.19		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya penerbitan izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	100 Persen	75.000.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun infratruktur Konektivitas Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat penguna jasa pelabuhan	-	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	6 03	2.19	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal		1 Laporan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegari Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	, DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Infratruktur Konektivitas 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Masyarakat penguna jasa pelabuhan	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
					Dinas Komunikasi dan Informatika		l		55.064.010.636,00				1	78.870.952.719,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YA	ANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAY	'ANAN DASAR		55.064.010.636,00					78.870.952.719,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG R	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			51.298.010.636,00					71.987.302.719,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
179 2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	75 Nilai	28.584.422.466,00					- 38.348.117.716,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10 Dokum	n 500.000.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	ASN Diskominfo	- 550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumer	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegari Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Diskominfo	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	6 01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegari Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Diskominfo	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegari Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Diskominfo	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2	16	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Diskominfo	50.000,000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	81 Data	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Diskominfo	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Diskominfo	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	2 Laporan	10.772.522.466,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	- 11.106.217.716,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1078 Orang/bulan	10.361.230.302,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.694.925.552,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	411.292.164,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	411.292.164,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



2	16	01	2.03		Administrasi Barang Millik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik - Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	2 Dok	umen .	125.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Dinas Komunikasi dan Informatika	125.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
											Publik			
2	16	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsillasi dan Penyusunan Laporan Barang Millik Daerah pada SKPD	2 Lapo	oran	125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dok	sumen	700.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Komunikasi - dan Informatika		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	43 Or.	rang	700.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika	950.000.000,00	Dinas komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum - Perangkat Daerah	5 Lays	anan	800.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Pake	et	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Pake	et	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2	16	6 01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika	300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
										publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
2	16	6 01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68 Laporan	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika	400.000,000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	6 01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	6 01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	15.005.100.000,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	16.405.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	6 01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.100.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	6 01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.000.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	6 01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	14.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2	16 01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah -	28 Unit	681.800.000,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Dinas Komunikasi dan Informatika	- 1.231.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16 01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	381.800.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Dinas Komunikasi dan Informatika	381.800.000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16 01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Publik 7. Peningkatan tata kelola 7. Peningkatan tata kelola 7. Peningkatan daerah yang 7. Peningkatan dan akuntabel 7. Penitansi pelayanan 7. Penatan dan 7. Pengembangan Tata Kelola 7. Pemitahan dan Pelayanan 7. Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	300,000,000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
180	2	16 02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Diseminasi Informasi dan - Komunikasi Publik	100 Persen	2.155.000.000,00			FUDIK		- 13.805.357.333,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16 02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Komunikasi - Publik yang dikelola	840 Informasi dan Komunikasi Publik	2.155.000.000,00		penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	- 13.805.357.333,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16 02	2.01	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	5 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16 02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	50 Komunitas	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



2	16 (02 2.01	0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik			1 Laporan	70.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16 (02 2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		5 Permohonan	200.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16 (02 2.01	0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik		1 Persentase	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, sert penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16 (2.01	. 0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah		10 Rekomendasi	1.000.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	1.900.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16 (02 2.01	0020	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik		2 Persentase	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	200.000.000,00	Dinas komunikasi dan Informatika
2	16 (2.01	. 0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		1 Media	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	10.530.357.333,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



2	2 10	16 02	2.01	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun		1 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2 10	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik		850 Konten	85.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2 10	16 02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan		10 Orang	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN IINFORMATIKA
181 2	2 10	16 03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Aplikasi yang dikelola - OPD	-	100 Persen	20.558.588.170,00					- 19.833.827.670,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2 10	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengelola e- government		56 OPD	20.558.588.170,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	- 19.833.827.670,00	
2	2 10	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		1 Dökumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2 10	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		56 Perangkat Daerah	6.807.278.842,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	4.487.278.842,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



2	16 03	2.02	0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	2 Layanan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16 03	2.02	0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	1 Aplikasi	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	profesional dan akuntabel	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	100.000,000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16 03	2.02	0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	profesional dan akuntabel	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	100,000,000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16 03	2.02	0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	56 Perangkat Daerah	12.851.309.328,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	14.121.548.828,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16 03	2.02	0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	2 Dökumen	300.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	profesional dan akuntabel	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	450.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16 03	2.02	0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	275.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



182	2 2	20 02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	100 Persen	2.281.000.000,00					3.598.650.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 2	20 02	2.01	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		58 OPD	2.281.000.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	- 3.598.650.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 2	20 02	2.01	1 001	7 Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100 %	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 2	20 02	2.01	1 001	8 Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100 %	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	350,000,000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 2	20 02	2.01	1 001	9 Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %	1.381.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	2.698.650.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 2	20 02	2.01	1 002	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	170 Orang	300.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2	20 02	2.01	0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral		100 %	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	100.000.000,0	D DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG F	PERSANDIAN		l	1.485.000.000,00					3.285.000.000,0	0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
183	2	21 02	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi	-	100 Persen	1.485.000.000,00					- 3.285.000.000,0	
	2		2 2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			56 OPD	1.335.000.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Pemerintah Daerah dan Masyarakat		O DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21 02	2 2.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		12 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	1.100.000.000,0	D DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21 02	2 2.01	0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Anallisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan		2 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	700.000.000,0	D DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21 02	2 2.01	0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian		56 Perangkat Daerah	985.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	1.135.000.000,0	D DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	. 2	02	2.01	0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumiah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian			1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan JKS Pemerintah - Daerah		1	1 Layanan JKS	150.000.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	- 200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 2	21 02	2.02	0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.		1	1 Kegiatan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah dan Masyarakat		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mer	nengah				27.085.435.394,00					35.703.266.799,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1	:				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YA	ANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYAN	IAN DASAR			27.085.435.394,00					35.703.266.799,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	1	17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1			27.085.435.394,00					35.703.266.799,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
184 2	! 1	17 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah -		7	77 Nilai	12.195.435.394,00					- 25.003.266.799,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	1	17 01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, - Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	4 Dokumen	200.000.000,00		-	-	-	- 400.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	! 1	17 01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	200.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	! 1	17 01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1	1	17 01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi - Keuangan yang Akuntabel		2	2 Laporan	10.139.437.534,00		-	-	-	- 16.413.827.639,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1	1	17 01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			1260 Orang/bulan	10.034.993.551,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	16.213.827.639,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	! 1	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			1 Laporan	104.443.983,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	200.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	1	17 01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik - Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi		1	1 Laporan	50.000.000,00		-	-	-	- 175.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH



2	17	7 01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	-	175.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
,	17	7 01	2.05		SKPD Administrasi Kepegawaian	Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Administrasi -	1 Dokumen	50.000.000,00	-	-		400.000.000,00	
					Perangkat Daerah	Kepegawaian Perangkat Daerah		-	DAMA DA CILIACII (ESC.)				USAHA KECIL MENENGAH
2	17	7 01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-		200.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	7 01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum - Perangkat Daerah	100 %	432.398.000,00	-	-		1.250.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	7 01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	-	50.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	7 01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	72.398.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	-	0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	7 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	-	75.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	7 01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	-	100.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	7 01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	84 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	-	75.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	7 01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	-	450.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	7 01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	-	300.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	7 01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	-	200.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	7 01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	299.648.000,00	-	-	-	4.500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	7 01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit	299.648.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	-	0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	7 01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa - Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	478.080.000,00	-	-	-	984.439.160,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	7 01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	225.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	-	225.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	7 01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	253.080.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	-	759.439.160,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	7 01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang - Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	545.871.860,00	-	-		880.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	7 01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	180.700.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-		300.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	7 01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	80.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	-	80.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2	17	7 01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	285.171.860,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	-	500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
185 2	17	7 03		1	PROGRAM PENGAWASAN DAN	Persentase kepatuhan koperasi -	27.24 Persen	1.250.000.000,00			†	1 000 000 000 00	DINAS KOPERASI DAN



						,							
	2	17 03			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengawasan dan - Pemeriksaan Koperasi	83.87 %	1.250.000.000,00	-		-		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17 03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	200 Unit Usaha	1.100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	-	500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17 03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	300 Unit Usaha	150.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	-	500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
186	2	17 04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi KSP/USP - berkategori sehat dan cukup sehat	18.5 Persen	865.000.000,00			-	1.000.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17 04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian dan Penghargaan - Kesehatan KSP/USP	180 Koperasi	865.000.000,00	-		-	1.000.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17 04	2.01	0001	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	80 Unit Usaha	65.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	-	500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17 04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	90 Unit Usaha	800.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	-	500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
187	2	17 05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengurus dan pengawas yang memiliki sertifikasi pelatihan perkoperasian	100 Persen	650.000.000,00			-	500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17 05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberikan Penididkan dan Pelatihan Perkoperasian	90 Koperasi	650.000.000,00	-		-	500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17 05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	300 Orang	650.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	-	500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		17 06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya - Volume Usaha Koperasi	4.86 Persen	230.000.000,00			-		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17 06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	10 Koperasi	230.000.000,00	-	-	-	2.200.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17 06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	10 Unit Usaha	130.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		300.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17 06	2.01	0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	30 Unit Usaha	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -		-	300.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
189	2	17 07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang telah difasilitasi	1,99 Persen	3.205.000.000,00			-	2.700.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17 07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang diberdayakan -	1121 UMKM	3.205.000.000,00	-	5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan		2.700.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

	2 17	07	2.01		Pemberdayaan Melalui Kemitraan	Jumlah Unit Usaha yang Telah	20 Unit Usaha	130.000.000,00	,,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 5. Penguatan Daya Saing	-	200.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA
					Usaha Mikro	Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan			KECIL MENENGAH
						ININ O			Semua Kely Desa		Berkelanjutan			
	2 17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah	720 Unit Usaha	950.000.000,00		DANA BAGI HASIL (DBH)	- 5. Penguatan Daya Saing	-	500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA
					Usaha Mikro	Mendapatkan Perizinan			Semua Kecamatan,		Ekonomi Daerah yang			KECIL MENENGAH
									Semua Kel/Desa		Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
	2 17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan	Jumlah SDM yang Telah Melakukan	150 Orang	250.000.000,00	Semua Kota/Kab,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 5. Penguatan Daya Saing	-	500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA
						Koordinasi dan Sinkronisasi dengan			Semua Kecamatan,	,	Ekonomi Daerah yang			KECIL MENENGAH
					Pemberdayaan Usaha Mikro	Para Pemangku Kepentingan dalam			Semua Kel/Desa		Unggul, Bernilai tambah dan			
						Pemberdayaan Usaha Mikro					Berkelanjutan			
	2 17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	15000 Unit	1.000.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 5. Penguatan Daya Saing	-	1,000,000,000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA
					Mikro		Usaha			, ,	Ekonomi Daerah yang			KECIL MENENGAH
											Unggul, Bernilai tambah dan			
	2 47	07	2.04	0045	Desiredates Describerates	Lundah CDM ara Manakani	200.0	075 000 000 00		DAMA DA CILIACII (DDIII)	Berkelanjutan		500,000,000	DINIAC KODEDACI DANI IICALIA
1	2 17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan	300 Orang	875.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang	-	500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
					Kapasitas dan Kompetensi SDM	Kewirausahaan					Unggul, Bernilai tambah dan			RECIEWENENGALI
					UMKM dan Kewirausahaan melalui						Berkelanjutan			
					Pendidikan dan Pelatihan									
190	2 17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN	Pertumbuhan Omset UMKM -	1,4 Persen	8.690.000.000,00					- 3.300.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN
	2 17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pengembangan Usaha -	320 UMKM	8.690.000.000.00	1		- 5. Penguatan Daya Saing	-	- 3,300.000.000.00	USAHA KECIL MENENGAH DINAS KOPERASI DAN
	_				dengan Orientasi Peningkatan	Mikro					Ekonomi Daerah yang			USAHA KECIL MENENGAH
					Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
1 3	2 17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	150 Unit Usaha	4.915.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	5. Penguatan Daya Saing	-	1.500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
						Terrasilitasi					Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan			KECIL MENENGAH
											Berkelanjutan			
	2 17	08	2.01	0003	Penumbuhan dan Pengembangan	Jumlah yang Difasilitasi	360 Orang	725.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 5. Penguatan Daya Saing	=	800.000.000,000	
					Kewirausahaan						Ekonomi Daerah yang			KECIL MENENGAH
											Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
	2 17	08	2.01	0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang	30 Unit Usaha	1.350.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 5. Penguatan Daya Saing	_	500,000,000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA
	_					Terfasilitasi					Ekonomi Daerah yang			KECIL MENENGAH
											Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
	2 17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan,	Jumlah Unit Usaha UMKM yang	400 Unit Usaha	1.700.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	5. Penguatan Daya Saing	-	500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
					Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber					Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan			KECIL MENENGAH
					seria sesam dan remologi	Daya Manusia, Serta Desain dan					Berkelanjutan			
						Teknologi								
					Dinas Penanaman Modal dan Pelaya	anan Terpadu Satu Pintu		23.534.440.481,00					30.872.290.057,00	DINAS PENANAMAN MODAL
														DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YA	ANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		23.534.440.481,00					30.872.290.057,00	DINAS PENANAMAN MODA
														DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18	+	+		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I	PENANAMAN MODAL		23.534.440.481,00					30.872.290.057.00	DINAS PENANAMAN MODAL
	_													DAN PELAYANAN TERPADU
191	2 40		 		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi -	78,50 Nilai	16.934.440.481,00	 			1	24 472 202 222 22	SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL
191	2 18	01			PEMERINTAHAN DAERAH	Pemerintahan (AKIP)	78,50 Nilai	16.934.440.481,00					- 21.172.290.057,00	DAN PELAYANAN TERPADU
					KABUPATEN/KOTA	remember (AKIT)								SATU PINTU
T	2 18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan -	11 Dokumen	753.671.500,00			- 7. Peningkatan tata kelola	Aparatur DPMPTSP	- 1.464.935.850,00	DINAS PENANAMAN MODAL
1					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penganggaran dan Evaluasi Kinerja			ĺ		pemerintahan daerah yang	İ		DAN PELAYANAN TERPADU
1		1							1		profesional dan akuntabel untuk mendukung			SATU PINTU
1		1							1		transformasi pelayanan			1
											publik			
		1							1		5. Penguatan Daya Saing			1
1		1							1		Ekonomi Daerah yang			1
											Unggul, Bernilai tambah dan	1		1
											Berkelanjutan			

2	18	.8 01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	Aparatur DPMPTSP	292.852.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL
					Perangkat Daerah	Perangkat Daerah		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung			DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
										transformasi pelayanan publik			
										5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang			
										Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
2	18	.8 01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	2 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	Aparatur DPMPTSP	376.728.800,00	DINAS PENANAMAN MODAI
					Laporan Capaian Kinerja dan	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			DAN PELAYANAN TERPADU
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel untuk mendukung			SATU PINTU
						Kinerja dan Ikhtisar Realisasi				transformasi pelayanan			
						Kinerja SKPD				publik 5. Penguatan Daya Saing			
										Ekonomi Daerah yang			
										Unggul, Bernilai tambah dan			
2	11	.8 01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1 Laporan	60.343.200,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DRH)	Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola	Aparatur DPMPTSP	61 550 000 00	DINAS PENANAMAN MODAL
-	1	01	2.01	0007	Evaluasi kilicija i craligkat Daciali	Perangkat Daerah	Laporan	Semua Kecamatan,	DANA BAGTTASIE (DBT)	pemerintahan daerah yang	Aparatur Di Wii 131	01.550.000,00	DAN PELAYANAN TERPADU
								Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			SATU PINTU
										untuk mendukung transformasi pelayanan			
										publik			
										5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang			
										Unggul, Bernilai tambah dan			
										Berkelanjutan			
2	18	.8 01	2.01	8000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Aparatur DPMPTSP	53.060.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
					rendukung statistik sektoral baeran	Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			SATU PINTU
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan publik			
										5. Penguatan Daya Saing			
										Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan			
										Berkelanjutan			
2	1	.8 01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan	1 Data	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Aparatur DPMPTSP	265.302.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
					Statistik Sektoral Daeran	dan Diperiksa Lingkup Perangkat		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			SATU PINTU
						Daerah				untuk mendukung			
										transformasi pelayanan publik			
										5. Penguatan Daya Saing			
										Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan			
										Berkelanjutan			
2	18	.8 01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat	Jumlah Berita Acara Hasil Forum	1 Berita Acara	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	Aparatur DPMPTSP	58.366.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL
					Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Penyusunan Dokumen Perencanaan	Rangka Penyusunan Dokumen				untuk mendukung			
					Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah				transformasi pelayanan			
										5. Penguatan Daya Saing			
										Ekonomi Daerah yang			
										Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
2	18	.8 01	2.01	0011			3 Dokumen	293.328.300,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	Aparatur DPMPTSP	299.194.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL
			1		Urusan Selain Renstra PD dan Renja	Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			1	1		. S yang alsasan		Settida Nely Desd		untuk mendukung			3OT INTO
			1							transformasi pelayanan			
			1	1						publik 5. Penguatan Daya Saing			
			1	1						Ekonomi Daerah yang			
										Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
			1	1	I	1				ber keranjutan	l l		l



	15	- 04	2.00			Colonia Administrative Norman		02 0	11.850.949.029.00	1	[= - · · · · · · · · · ·	A DRAADTCD	44 076 222 172 22	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Cakupan Administrasi Keuangan -		83 Persen	11.850.949.029,00		7. Peningkatan tata kelola	Aparatur DPMPTSP -	11.076.229.473,00	DINAS PENANAMAN MODAL
					Daerah						pemerintahan daerah yang			DAN PELAYANAN TERPADU
											profesional dan akuntabel			SATU PINTU
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											5. Penguatan Daya Saing			
											Ekonomi Daerah yang			
											Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaii		104 Orang/bulan	11.381.533.629,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	Aparatur DPMPTSP	10.499.916.623.00	DINAS PENANAMAN MODAL
					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	dan Tunjangan ASN			Semua Kecamatan,	, ,	pemerintahan daerah yang	,		DAN PELAYANAN TERPADU
						dan ranjangan risit			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			SATU PINTU
									Jerrad Rely Best		untuk mendukung			5/1101 11110
											transformasi pelayanan			
											publik			
											5. Penguatan Daya Saing			
											Ekonomi Daerah yang			
											Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
											,			
2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan		43 Dokumen	33.750.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	Aparatur DPMPTSP	34.728.750,00	DINAS PENANAMAN MODAL
						dan Pengujian/Verifikasi Keuangan			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			DAN PELAYANAN TERPADU
					Pengujian/Verifikasi Keuangan	SKPD			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			SATU PINTU
					SKPD						untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											5. Penguatan Daya Saing			
											Ekonomi Daerah yang			
											Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
2	10	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan		1 Dokumen	33.750.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	Aparatur DPMPTSP	24 729 750 00	DINAS PENANAMAN MODAL
	10	01	2.02	0004	Akuntansi SKPD	Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 DOKUITIETI	Semua Kecamatan,	DANA BAGITIASIL (DBIT)	pemerintahan daerah yang	Aparatur Drivir 13F	34.728.730,00	DAN PELAYANAN TERPADU
					AKUNTANSI SKPD	Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
									Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			SATU PINTU
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											5. Penguatan Daya Saing			
											Ekonomi Daerah yang			
											Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir		1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	Aparatur DPMPTSP	115,762,500,00	DINAS PENANAMAN MODAL
					Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tahun SKPD dan Laporan Hasil			Semua Kecamatan,	, ,	pemerintahan daerah yang	,		DAN PELAYANAN TERPADU
					SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			SATU PINTU
						Keuangan Akhir Tahun SKPD					untuk mendukung			
						Redangan Akili Tahun Ski D					transformasi pelayanan			
											nublik			
											P==			
											5. Penguatan Daya Saing			
											Ekonomi Daerah yang			
											Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
2	18	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan		1 Dokumen	18.703.800,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	Aparatur DPMPTSP	57.881.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL
					Tanggapan Pemeriksaan	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			DAN PELAYANAN TERPADU
						Pemeriksaan			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			SATU PINTU
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											5. Penguatan Daya Saing			
											Ekonomi Daerah yang			
											Unggul, Bernilai tambah dan			
	4										Berkelanjutan			
2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/		2 Laporan	299.461.600,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	Aparatur DPMPTSP	299.461.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL
	1		1		Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang	1		DAN PELAYANAN TERPADU
	1		1		Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel	1		SATU PINTU
						Laporan Keuangan					untuk mendukung			
	1		1			Bulanan/Triwulanan/Semesteran					transformasi pelayanan	1		1
	1		1			SKPD					publik	1		1
	1		1								5. Penguatan Daya Saing	1		1
	1		1								Ekonomi Daerah yang			[
	1		1								Unggul, Bernilai tambah dan			[
- 1	1	1	1	1			1 1				Berkelanjutan	1		I

2	18 (2.02	8000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan		1 Dokumen	33.750.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	Aparatur DPMPTSP	33.750.000,00	
				Prognosis Realisasi Anggaran	Analisis Prognosis Realisasi			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			DAN PELAYANAN TERPADU
					Anggaran			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			SATU PINTU
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										5. Penguatan Daya Saing			
										Ekonomi Daerah yang			
										Unggul, Bernilai tambah dan			
										Berkelanjutan			
2	18 (2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	Cakupan Administrasi BMD -		2 Dokumen	164.999.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	- -	360.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODA
				pada Perangkat Daerah						pemerintahan daerah yang			DAN PELAYANAN TERPADU
										profesional dan akuntabel			SATU PINTU
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										5. Penguatan Daya Saing			
										Ekonomi Daerah yang			
										Unggul, Bernilai tambah dan			
										Berkelanjutan			
2	18 (2.03	0001		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang		1 Dokumen	14.999.000,00 Semua Kota/Kab,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL
	1 1	- 1		Kebutuhan Barang Milik Daerah	Milik Daerah SKPD		1	Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			DAN PELAYANAN TERPADU
	1 1			SKPD				Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			SATU PINTU
	1 1			1				1		untuk mendukung			
	1 1			1						transformasi pelayanan			
	1 1			1						publik			
										5. Penguatan Daya Saing			
										Ekonomi Daerah yang			
										Unggul, Bernilai tambah dan			
										Berkelanjutan			
2	18 (2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian		1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL
				Milik Daerah SKPD	Barang Milik Daerah dan Hasil		'	Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			DAN PELAYANAN TERPADU
					Koordinasi Penilaian Barang Milik			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			SATU PINTU
					Daerah SKPD			Serial Rey Sesa		untuk mendukung			5,110110
					Daeran SKrD					transformasi pelayanan			
										publik			
										5. Penguatan Daya Saing			
										Ekonomi Daerah yang			
										Unggul, Bernilai tambah dan			
										Berkelanjutan			
2	18 (1 2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan		2 Laporan	40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL
1 -				Laporan Barang Milik Daerah pada	Penyusunan Laporan Barang Milik			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			DAN PELAYANAN TERPADU
				SKPD	Daerah pada SKPD			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			SATU PINTU
				SKED	Daeran pada SKFD			Sellida Kely Desa					SATOFINTO
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										6. Pengembangan			
										konektivitas dan			
										pembangunan infrastruktur			
	1 1	- 1		1			1			secara terpadu dan merata			
2	18 (2.03	nnnc	Penatausahaan Barang Milik	Jumlah Laporan Penatausahaan	- 	12 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HACII (DDIA	- 7. Peningkatan tata kelola		225 000 000 00	DINAS PENANAMAN MODAL
2	10	2.03	JUUO				12 LapUldII		DAINA BAGI HASIL (DBH)		-	225.000.000,00	
	1 1	- 1		Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD		1	Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			DAN PELAYANAN TERPADU
	1 1			1				Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			SATU PINTU
	1 1	- 1		1	1		1			untuk mendukung			
	1 1	- 1		1	1		1			transformasi pelayanan			
	1 1			1						publik			
	1 1	- 1		1	1		1			5. Penguatan Daya Saing			
	1 1			1						Ekonomi Daerah yang			
	1 1	- 1		1			1			Unggul, Bernilai tambah dan			
	1 1	- 1		1	1		1			Berkelanjutan			
_	10	11 3.00	000-	Domonfooton Dos \$499- Do	Lumlah Dakuman II9	+ +	12 Dele	10,000,000,00	DANA BACILIACII (BB::)	,		20,000,000,00	DINIAC DENIANIA AAAAAAAA
2	18 (2.03	0007		Jumlah Dokumen Hasil		12 Dokumen	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DAMA RAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL
	1 1			SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			DAN PELAYANAN TERPADU
	1 1			1	SKPD			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			SATU PINTU
	1 1		1	l						untuk mendukung			1
	1 1		1	l						transformasi pelayanan			1
	1 1	- 1		1			1			publik			
	i 1	1		1			1			5. Penguatan Daya Saing			
				i e		1 1	1		1		i l	1	1
										Ekonomi Daerah yang			
										Ekonomi Daerah yang			
										Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			



2	18	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah -	1	20.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola -	- 11.576.250	.00 DINAS PENANAMAN MODAL
					Kewenangan Perangkat Daerah					pemerintahan daerah yang		DAN PELAYANAN TERPADU
										profesional dan akuntabel		SATU PINTU
										untuk mendukung		
										transformasi pelayanan		
										publik		
										5. Penguatan Daya Saing		
										Ekonomi Daerah yang		
										Unggul, Bernilai tambah dan		
										Berkelanjutan		
2	18	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi	Jumlah Laporan Pengelolaan	1 Dokume	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegar	DANA BAGI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	11 576 250	00 DINAS PENANAMAN MODAL
-	10	01	2.04	0007			1 bokume		DAINA BAGITIASIE (BBIT)		11:570:230	DAN PELAYANAN TERPADU
					Daerah	Retribusi Daerah		Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		
								Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		SATU PINTU
										untuk mendukung		
										transformasi pelayanan		
										publik		
										5. Penguatan Daya Saing		
										Ekonomi Daerah yang		
										Unggul, Bernilai tambah dan		
										Berkelanjutan		
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	Cakupan Administrasi -	100 Persei	175.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola -	- 2.050.000.000	.00 DINAS PENANAMAN MODAL
					Perangkat Daerah	Kepegawaian				pemerintahan daerah yang		DAN PELAYANAN TERPADU
					•	' - ' '	1			profesional dan akuntabel		SATU PINTU
							1			untuk mendukung		1
										transformasi pelayanan		
										publik		
										5. Penguatan Daya Saing		
										Ekonomi Daerah yang		
										Unggul, Bernilai tambah dan		
										Berkelanjutan		
									<u> </u>			
2	18	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian		4 Dokume		, DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	150.000.000	00 DINAS PENANAMAN MODAL
					Kinerja Pegawai	Evaluasi, dan Penilaian Kinerja		Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		DAN PELAYANAN TERPADU
						Pegawai		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		SATU PINTU
										untuk mendukung		
										transformasi pelayanan		
										publik		
										5. Penguatan Daya Saing		
										Ekonomi Daerah yang		
										Unggul, Bernilai tambah dan		
										Berkelanjutan		
2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	10 Orang	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegar	, DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	750,000,000	00 DINAS PENANAMAN MODAL
	10	01	2.03	0005	Berdasarkan Tugas dan Fungsi	dan Fungsi yang Mengikuti	10 Orang	Semua Kecamatan,	DAINA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang	730.000.000	DAN PELAYANAN TERPADU
					beruasarkan rugas uan rungsi							
						Pendidikan dan Pelatihan		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		SATU PINTU
										untuk mendukung		
										transformasi pelayanan		
										publik		
										5. Penguatan Daya Saing		
										Ekonomi Daerah yang		
							1			Unggul, Bernilai tambah dan		1
									1	Berkelanjutan		
2	18	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah Orang yang Mengikuti	5 Orang	50.000.000,00 Semua Kota/Kab,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	250.000.000	00 DINAS PENANAMAN MODAL
	1				Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi		Semua Kecamatan,	- ,,	pemerintahan daerah yang		DAN PELAYANAN TERPADU
						Peraturan Perundang-Undangan	1	Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		SATU PINTU
						r cracaran r cranading oriodingan		Schild Kely Desa				50111110
							1			untuk mendukung		1
							1	1		transformasi pelayanan		
							1			publik		1
										5. Penguatan Daya Saing		1
							1			Ekonomi Daerah yang		1
							1			Unggul, Bernilai tambah dan		1
										Berkelanjutan		1
	4	+				<u> </u>			1			
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Cakupan Administrasi Umum -	100 Perse	1.175.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola -	- 2.125.000.000	00 DINAS PENANAMAN MODAL
					Daerah		1			pemerintahan daerah yang		DAN PELAYANAN TERPADU
										profesional dan akuntabel		SATU PINTU
										untuk mendukung		
										transformasi pelayanan		1
												1
										publik		1
1							1			5. Penguatan Daya Saing		1
	1	1 1								Ekonomi Daerah yang		1
												i contract of the contract of
										Unggul. Bernilai tambah dan	l I	
										Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan		

2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan		1 Paket	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL
1	1				Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang			Semua Kecamatan,	·	pemerintahan daerah yang		DAN PELAYANAN TERPADU
						Disediakan			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		SATU PINTU
											untuk mendukung		
											transformasi pelayanan		
											publik		
											5. Penguatan Daya Saing		
											Ekonomi Daerah yang		
											Unggul, Bernilai tambah dan		
											Berkelanjutan		
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor		2 Paket	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	300.000.000,0	DINAS PENANAMAN MODAL
						yang Disediakan			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		DAN PELAYANAN TERPADU
									Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		SATU PINTU
									•		untuk mendukung		
											transformasi pelayanan		
											publik		
											5. Penguatan Daya Saing		
											Ekonomi Daerah yang		
											Unggul, Bernilai tambah dan		
											Berkelanjutan		
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1	2 Paket	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	250.000.000,0	O DINAS PENANAMAN MODAL
	1				Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		DAN PELAYANAN TERPADU
	1						1		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		SATU PINTU
	1						1		' ' ' '		untuk mendukung		
											transformasi pelayanan		
											publik		
											5. Penguatan Daya Saing		
											Ekonomi Daerah yang		
											Unggul, Bernilai tambah dan		
											Berkelanjutan		
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan		12 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL
					Peraturan Perundang-undangan	dan Peraturan Perundang-			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		DAN PELAYANAN TERPADU
						Undangan yang Disediakan			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		SATU PINTU
											untuk mendukung		
											transformasi pelayanan		
											publik		
											5. Penguatan Daya Saing		
											Ekonomi Daerah yang		
											Unggul, Bernilai tambah dan		
											Berkelanjutan		
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan		12 Laporan	250.000.000,00 Semua Kota/Kab,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	950.000.000,0	DINAS PENANAMAN MODAL
					dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		DAN PELAYANAN TERPADU
						SKPD			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		SATU PINTU
									·		untuk mendukung		
											transformasi pelayanan		
											publik		
											5. Penguatan Daya Saing		
											Ekonomi Daerah yang		
											Unggul, Bernilai tambah dan		
											Berkelanjutan		
2	18	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada	Jumlah Dokumen Penatausahaan		500 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	300.000.000,0	O DINAS PENANAMAN MODAL
	1				SKPD	Arsip Dinamis pada SKPD	1		Semua Kecamatan,	· ' !	pemerintahan daerah yang		DAN PELAYANAN TERPADU
	1	1 1				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 1		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		SATU PINTU
											untuk mendukung		
	1						1				transformasi pelayanan		
	1	1					1 1				publik		
	1	1					1 1				5. Penguatan Daya Saing		
	1									I	Ekonomi Daerah yang		
	1									I	Unggul, Bernilai tambah dan		
	L	<u>1</u>									Berkelanjutan		
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Cakupan Penyediaan Jasa -		100 Persen	1.639.110.952,00		- 7. Peningkatan tata kelola -	- 2.933.548.484.0	0 DINAS PENANAMAN MODAI
	1	1			Pemerintahan Daerah	1	1 1				pemerintahan daerah yang		DAN PELAYANAN TERPADU
	1						1				profesional dan akuntabel		SATU PINTU
	1									I	untuk mendukung		5511110
	1	1 1					1 1						
	1						1				transformasi pelayanan		
	1	1					1 1				publik		
	1						1				5. Penguatan Daya Saing		
							1	1			Ekonomi Daerah yang		1
											Ekonomi Daeran yang		
											Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan		

2													
	18	01 2	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	2.550.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	3.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL
- 1					•	Surat Menyurat		Semua Kecamatan,	l ' '	pemerintahan daerah yang			DAN PELAYANAN TERPADU
						,		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			SATU PINTU
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										5. Penguatan Daya Saing			
										Ekonomi Daerah yang			
										Unggul, Bernilai tambah dan			
										Berkelanjutan			
2	18	01 2	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	266.766.216,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	266.766.216,00	DINAS PENANAMAN MODAL
				I.	Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan		Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			DAN PELAYANAN TERPADU
				l l		Listrik yang Disediakan		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			SATU PINTU
						Elst in yang biscalalan		Semanticy Sesa		untuk mendukung			5,110111110
										transformasi pelayanan			
										publik			
										5. Penguatan Daya Saing			
										Ekonomi Daerah yang			
										Unggul, Bernilai tambah dan			
										Berkelanjutan			
2	18	01 2	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	36.421.200,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	136.242.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL
- 1	1				Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Semua Kecamatan,	1	pemerintahan daerah yang	1		DAN PELAYANAN TERPADU
- 1	1				O - F	yang Disediakan		Semua Kel/Desa	1	profesional dan akuntabel	1		SATU PINTU
- 1	1					, 0 - 15001011011		Sellida Kely Desa	1	untuk mendukung	1		1
		ı		J									
		ı		J						transformasi pelayanan			
		ı		J						publik			
		ı		J						5. Penguatan Daya Saing			
										Ekonomi Daerah yang			
										Unggul, Bernilai tambah dan			
										Berkelanjutan			
2	18	01 2	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	1.333.373.536,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	i-	2.527.540.268.00	DINAS PENANAMAN MODAL
-		-			Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang		Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			DAN PELAYANAN TERPADU
						Disediakan		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			SATU PINTU
						Diseulakan		Selfiua Kei/ Desa					SATUPINTO
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										publik 5. Penguatan Daya Saing			
										5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang			
										5. Penguatan Daya Saing			
2	18	01 2	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD -	100 Persen	1.155.710.000.00		5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan		640,000,000,00	DINAS PENANAMAN MODAL
2	18	01 2	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pemeliharaan BMD -	100 Persen	1.155.710.000,00		5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola		640.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL
2	18	01 2	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pemeliharaan BMD -	100 Persen	1.155.710.000,00		5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang		640.000.000,00	DAN PELAYANAN TERPADU
2	18	01 2	2.09			Cakupan Pemeliharaan BMD -	100 Persen	1.155.710.000,00		5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Berniliai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		640,000,000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01 2	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pemeliharaan BMD -	100 Persen	1.155.710.000,00		5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		640.000.000,00	DAN PELAYANAN TERPADU
2	18	01 2	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pemeliharaan BMD -	100 Persen	1.155.710.000,00		5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Junggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		640.000.000,00	DAN PELAYANAN TERPADU
2	18	01 2	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pemeliharaan BMD -	100 Persen	1.155.710.000,00		5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		640,000,000,00	DAN PELAYANAN TERPADU
2	18	01 2	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pemeliharaan BMD -	100 Persen	1.155.710.000,00		S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing	-	640.000.000,00	DAN PELAYANAN TERPADU
2	18	01 2	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pemeliharaan BMD -	100 Persen	1.155.710.000,00		5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		640,000,000,00	DAN PELAYANAN TERPADU
2	18	01 2	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pemeliharaan BMD -	100 Persen	1.155.710.000,00		S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing		640.000,000,00	DAN PELAYANAN TERPADU
2	18	01 2	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pemeliharaan BMD -	100 Persen	1.155.710.000,00		5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang		640.000.000,00	DAN PELAYANAN TERPADU
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				DANA BAGI HASII (POUL	5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan	100 Persen	565.710.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola			DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		565.710.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang			DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
				0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		565.710.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		565.710.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang			DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
				0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		565.710.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-		DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
				0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		565.710.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung			DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
				0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		565.710.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik			DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
				0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		565.710.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing			DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
				0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		565.710.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Bernilai tambah dan Berkelanjutan			DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
				0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		565.710.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Unggul, Bernilai tambah dan Unggul, Bernilai tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Unggul, Bernilai tambah dan Unggul, Bernilai tambah dan Unggul, Bernilai tambah dan Unggul, Bernilai tambah dan Unggul, Bernilai tambah dan Unggul, Bernilai tambah dan Unggul, Bernilai tambah dan Unggul, Bernilai tambah dan Unggul, Bernilai tambah dan Daya Saing Unggul, Bernilai tambah dan Daya Sain			DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
2	18	01 2	2.09	0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	565.710.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan		500.000.000,00	DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18		2.09	0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		565,710.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola		500.000.000,00	DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL
2	18	01 2	2.09	0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	565.710.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 90.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang ungeningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang demerintahan demerintahan daerah yang demerintahan daerah yang demerintahan daerah yang demerintahan daerah yang demerintahan demerintahan demerintahan daerah yang demerintahan demerintahang demerintahan demeri		500.000.000,00	DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
2	18	01 2	2.09	0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	565,710.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola		500.000.000,00	DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL
2	18	01 2	2.09	0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	565.710.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 90.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang ungeningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang demerintahan demerintahan daerah yang demerintahan daerah yang demerintahan daerah yang demerintahan daerah yang demerintahan demerintahan demerintahan daerah yang demerintahan demerintahang demerintahan demeri		500.000.000,00	DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
2	18	01 2	2.09	0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	565.710.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 90.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan atata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		500.000.000,00	DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
2	18	01 2	2.09	0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	565.710.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 90.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		500.000.000,00	DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
2	18	01 2	2.09	0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	565.710.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 90.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang unguk, Bernilai tambah dan berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing tansformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan		500.000.000,00	DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
2	18	01 2	2.09	0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	565.710.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 90.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing		500.000.000,00	DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
2	18	01 2	2.09	0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	565.710.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 90.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang ungul, gernilai tambah dan berkelanjutan - 8. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang ungul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 9. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 17. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 18. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang ungul dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang ungul Daya Saing Ekonomi Daerah yang untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang ungul Daya Saing Ekonomi Daerah yang untuk mendukung transformasi pelayanan publik		500.000.000,00	DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
2	18	01 2	2.09	0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	565.710.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 90.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing		500.000.000,00	DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU



		0 0:	2.00	0046	Ta /a	I		Tau-5 T	500 000 000 00 14 1 14 1 17	DAMA DA CILIACII (CC::)				
2	18	8 01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		2 Unit	500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-		DINAS PENANAMAN MODA DAN PELAYANAN TERPADL
					Bangunan Lainnya				Semua Kel/Desa		pernermanan daeran yang profesional dan akuntabel			SATU PINTU
					Bangunan Lainnya	Lainnya yang			Semua Kei/Desa					SATUPINTU
						Dipelihara/Direhabilitasi					untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											Penguatan Daya Saing			
											Ekonomi Daerah yang			
											Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
2 2	13	8 02			PROGRAM PENGEMBANGAN	Jumlah Proyek PMDN/PMA	1-	685 Proyek	2.500.000.000,00				- 2.850.000.000.00	DINAS PENANAMAN MODA
					IKLIM PENANAMAN MODAL	· · ·		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	·				· ·	DAN PELAYANAN TERPADU
					INCLINITE ENVIRONMENT MODELE									SATU PINTU
2	11	8 N2	2.01	1	Penetapan Pemberian	Jumlah Kebijakan yang menjadi		1 Perda	450.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	DPMPTSP, Pelaku		DINAS PENANAMAN MOD
1 -	` -	J 52			Fasilitas/Insentif Dibidang	Kewenangan Daerah		11000	-13010001000)00		pemerintahan daerah yang	Usaha, Masyakarat		DAN PELAYANAN TERPAL
					Penanaman Modal yang Menjadi	Kabupaten/Kota					profesional dan akuntabel	dan Stakeholder		SATU PINTU
					Kewenangan Daerah	Kabupateny Kota					untuk mendukung	dali stakelioidei		SATOFINIO
					Kabupaten/Kota						transformasi pelayanan			
											publik			
											5. Penguatan Daya Saing			
											Ekonomi Daerah yang			
			1		ĺ	1					Unggul, Bernilai tambah dan			
1			1		ĺ	1					Berkelanjutan	1		
2	11	8 02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan	Jumlah Kesepakatan Kemitraan	i i i	70 Dokumen	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	DPMPTSP, Pelaku	550,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODA
1	1	1	1	1	oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	antara Usaha Besar (PMA/PMDN)			Semua Kecamatan,	,==,	pemerintahan daerah yang	Usaha, Masyakarat dan		DAN PELAYANAN TERPAD
1			1			dengan UMKM di daerah			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel	Stakeholder		SATU PINTU
						dengan omini ar aderan			Serial Kely Sesa		untuk mendukung	Stationaci		5/110111110
											transformasi pelayanan			
											publik			
											5. Penguatan Daya Saing			
											Ekonomi Daerah yang			
											Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
2	18	8 02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi	Jumlah Kajian dan Peta Potensi	l- l	3 Dokumen	2.050.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	DPMPTSP, Pelaku	- 2.300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODA
					Kabupaten/Kota	Investasi					pemerintahan daerah yang	Usaha, Masyakarat		DAN PELAYANAN TERPAD
											profesional dan akuntabel	dan Stakeholder		SATU PINTU
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											5. Penguatan Daya Saing			
											Ekonomi Daerah yang			
											Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
+-	٠.										l			
2	18	8 02	2.02	0001		Jumlah Peraturan Daerah (Perda)		2 Dokumen	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DAINA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	DPMPTSP, Pelaku		DINAS PENANAMAN MODA
1			1	1	Penanaman Modal Daerah	Rencana Umum Penanaman Modal	1 1	1	Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang	Usaha, Masyakarat dan		DAN PELAYANAN TERPAD
	1	- [1	1	Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota	1 1		Semua Kel/Desa	1	profesional dan akuntabel	Stakeholder		SATU PINTU
1			1		ĺ	1					untuk mendukung	1		
			1		ĺ	1					transformasi pelayanan			
l	1	- [1	1	1	1	1 1			1	publik	1		
1			1		ĺ	1					5. Penguatan Daya Saing	1		
			1		ĺ	1					Ekonomi Daerah yang	1		
	1	- [1	1	1	1	1 1			1	Unggul, Bernilai tambah dan	1		
			1		ĺ	1					Berkelanjutan	1		
_		0 02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi	Jumlah Dokumen Peta Potensi	 	3 Dokumen	1.800.000.000,00 Semua Kota/Kab,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	DPMPTSP. Pelaku	1 900 000 000 00	DINAS PENANAMAN MOD
	1 1	0 02	2.02	0004				3 DUKUMEN		DAINA BAGI HASIL (DBH)				DAN PELAYANAN TERPAL
2			1		Kabupaten/Kota	Investasi Kabupaten/Kota			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang	Usaha, Masyakarat dan		
2			1	1	1	1	1 1		Semua Kel/Desa	1	profesional dan akuntabel	Stakeholder		SATU PINTU
2					ĺ	1					untuk mendukung	1		
2					ĺ	1					transformasi pelayanan	1		
2					1	1	1 1			1	publik	1		
2						1	1 1				5. Penguatan Daya Saing	1		
2										1	Ekonomi Daerah yang			
2														
2											Unggul, Bernilai tambah dan			
2														
	: 11	8 03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN	Jumlah Investor PMDN/PMA		350 Investor	1.050.000.000,00		Unggul, Bernilai tambah dan		- 2.100.000.000.00	DINAS PENANAMAN MOD
	: 11	8 03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMDN/PMA	-	350 Investor	1.050.000.000,00		Unggul, Bernilai tambah dan			
	11	8 03				Jumlah Investor PMDN/PMA	-	350 Investor	1.050.000.000,00		Unggul, Bernilai tambah dan			DINAS PENANAMAN MODAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18 03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor (PMDN/PMA) -	350 Investor	1.050.000,000,00		Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	DPMPTSP, Pelaku Usaha, Masyakarat dan Stakeholder	2.100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
										5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
		18 03			Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	750.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	DPMPTSP, Pelaku Usaha, Masyakarat dan Stakeholder		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		18 03		0003	Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	DPMPTSP, Pelaku Usaha, Masyakarat dan Stakeholder		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
194	2	18 04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Penerbitan Izin -	1150 Izin	1.300.000.000,00				2.050.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		18 04			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat - (IKM)	91,76 Persentase	1.300.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	DPMPTSP, Pelaku Usaha, Masyakarat dan Stakeholder		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	DPMPTSP, Pelaku Usaha, Masyakarat dan Stakeholder		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18 04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	400.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	DPMPTSP, Pelaku Usaha, Masyakarat dan Stakeholder	500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18 04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	DPMPTSP, Pelaku Usaha, Masyakarat dan Stakeholder	450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



2	18	04	2.01	8000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				1000 Kegiatan Usaha	500.000.000,000 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	DPMPTSP, Pelaku Usaha, Masyakarat dan Stakeholder	750.000.000	00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha								transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang			
														Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
195 2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi (PMDN)	-			2,18 Persen	750.000.000,00			oci kadiyatan		- 1.700.000.000	00 DINAS PENANAMAN MODA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Profil dan Informasi Pelaku Usaha	-			900 Perusahaan	750.000.000,00		-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang	DPMPTSP, Pelaku Usaha, Masyakarat dan Stakeholder	- 1.700.000.000	00 DINAS PENANAMAN MODA DAN PELAYANAN TERPADL SATU PINTU
														Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				400 Pelaku Usaha	450.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	DPMPTSP, Pelaku Usaha, Masyakarat dan Stakeholder	750.000.000	00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
														Berkelanjutan			
1 2	10	2	2.01	0006	3 Pengawasan Penanaman Modal	4 Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku	5	6	7	8 150 Kegiatan	9 10 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA PAGUHASU (DPH)	12	13 7. Peningkatan tata kelola	14 DPMPTSP, Pelaku	15 16	17 00 DINAS PENANAMAN MODAL
			2.01	0000		Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				Usaha	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	, bank dadi iadi. (bdi)		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Usaha, Masyakarat dan Stakeholder		DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
196 2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Aplikasi	-			3 Aplikasi	1.000.000.000,00					1.000.000.000	00 DINAS PENANAMAN MODA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		06			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-			91.76 Persentase	1.000.000,000		-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	DPMPTSP, Pelaku Usaha, Masyakarat dan Stakeholder		00 DINAS PENANAMAN MODA DAN PELAYANAN TERPADL SATU PINTU
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				10 Dokumen	1.000.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	DPMPTSP, Pelaku Usaha, Masyakarat dan Stakeholder	1.000.000.000	OD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga			•	•		86.099.615.063,00	•	•			41.777.575.305	00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1		$\perp \perp$			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YA		VANIANI DACAD				00 000 045 000 00			1	1	44 777 575 205	
2					OKOSANT EWEKINTAHAN WADID TA	ING TIDAK BERKAITAN DENGAN PELA	YANAN DASAK				86.099.615.063,00					41.777.575.305	OLAHRAGA OLAHRAGA OLAHRAGA

197 2	19	9 01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	77 Nilai	25.394.615.063,00			-	24.477.575.305,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	15	9 01	1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	118 Dokumen	600.000,000		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta a mengembangkan agromaritim industri di agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Aparatur -		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	9 01	1 2.01 000:	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di agromaritim industri di peran aktif koperasi.	Aparatur	400.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	9 01	1 2.01 0000	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Aparatur	50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	9 01	1 2.01 0007	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Aparatur	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	9 01	1 2.01 0001	8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Aparatur	50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



2	19	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	400.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	0 01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	71 Laporan	12.787.294.148,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendor ong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dal an akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	11.919.065.226,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1104 Orang/bulan	12.387.294.148,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	11.519.065.226,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2	2 19	9 01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	41 Laporan	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	350.000	0.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	2 19	9 01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	25.000	0.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	2 19	9 01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	17 Dokumen	95.000.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	- 95.000	0.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2 19	9 01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	25.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	2 19	9 01	2.03	0005	Rekonsillasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	70.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	70.000	0.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2	19	9 01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		2 Dokume	50.000.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dalan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	50.000.000,	00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19				Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		1 Dokume	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	25,000.000)	OLAHRAGA
2	19	19 01	2.04	1 000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		1 Dokume	a 25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegar. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	, DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	P. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	25.000.000)	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	9 01	2.05	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	-	7 Dokume	175.000.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	- 375.000.000,	O DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	9 01	2.05	6 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 Dokume	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegar. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	, DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	25.000.000)	OD DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2	19	9 01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	, DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	9 01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	40 Orang	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	9 01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Layanan	93,000.000,000		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dalan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	9 01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	70.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	9 01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	120.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	, DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	120.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2	19	9 01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	45.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	45.0	INAS KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA
2	19	19 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100.0	inas kepemudaan dan Ilahraga
2	19	9 01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewiraushaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	45.00	INAS KEPEMUDAAN DAN LAHRAGA
2	19	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100.00	inas kepemudaan dan Ilahraga
2	19	.9 01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	400.00	inas kepemudaan dan Ilahraga

2	19	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100 Dokum	n 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	, DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dalan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	45.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	9 01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		2 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	, DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100.000,000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	9 01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	-	8 Unit	100.000,000		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	9 01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	, DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 Bulan	6.682.000.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2	19	9 01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.000.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4.000.00	0.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	9 01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.682.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparetur	1518.18	9.164,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	9 01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3,08 Persen	3.975.320.915,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3.775.32	0.915,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	300.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Penerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	300.00	0.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	9 01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	60.00	0.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

	2 1	9 01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan menigkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	200.000.000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2 1	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	3.515.320.915,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3.215.320.915,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
198	2 1	19 02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kepemudaan	81,71 Persen	6.650.000.000,00					- 4.450.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2 1	19 02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Kepemudaan	100 Persen	5.250.000.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	- 4.050.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2 1	19 02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Akis Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	1.000.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahan, mengembangkan industri kreati serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produki melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Peningikatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	2.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2 1	9 02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	255 Orang	1.300.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan A. Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2	19	02	2.01	1	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	20 Ora	ng	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan linfrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	an kapasitas dan	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	02	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	2 Kegis	itan	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendgembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	an kapasitas dan	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	02	2.01		Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	120 0	ang	300.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan I. Membangu infrastruktur dan meningkathan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	an kapasitas dan	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	02	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	60 Ora	ng	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkathan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewiraushaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	an kapasitas dan	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	02	2.01	1	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Ingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	22 Uni	t	2.150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	infrastruktur dan Pendidikan	an kapasitas dan	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	300.000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

	2		02 2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, sinkronisasi, dan pengelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	-	63,41 Persen 1 Organisasi	1.400.000.000,00 1.150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					kabupaten/kota						yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	ja		
	2	19	02 2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaran Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota		1 Orang	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan memingkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		100,000,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
199	2	19	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prestasi dan Peran serta Masyarakat dalam Olahraga	-	35,85 Persen	52.885.000.000,00				- 10.550.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03 2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perkumpulan Olahraga yang Difasilitasi	-	21,05 Persen	18.500.000.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produkti melalui peran aktif koperasi.		- 1.300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19	03 2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyedidan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia		46 Unit	18.425.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		1.200.000.000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2	19	03	2.01	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	15 Dokumen	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Z. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Organisasi dan Pelaku Olahraga	100.000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Kejuaraan olahraga	100 Persen	26.885.000.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif seta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Organisasi dan Pelaku Olahraga	- 3.250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	21 Kegiatan	4.285.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Z. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Organisasi dan Pelaku Olahraga	2.850.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	03	2.02	0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	1 Kegiatan	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Organisasi dan Pelaku Olahraga	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	1300 Orang	22.400.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Organisasi dan Pelaku Olahraga	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



2 1	19 03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Atlet Lokal Yang Dibina -	54,67 Persen	4.150.000.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Organisasi dan Pelaku Olahraga	- 2.650.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
									mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.				
				Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	65 Orang	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	produktif, terampil	Organisasi dan Pelaku Olahraga		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
				Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	10 Orang	100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Z. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Organisasi dan Pelaku Olahraga		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 1	19 03	2.03	0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	1 Pelatda	2.800.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Z. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Organisasi dan Pelaku Olahraga	2.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 1	19 03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	120 Orang	1.025.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Pendidikan 2. Pengembangan sumber	Organisasi dan Pelaku Olahraga	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2	19	9 03	2.03	0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1 Dokumen	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Z. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Organisasi dan Pelaku Olahraga	100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	9 03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan Organisasi Keolahragaan	3,51 Persen	1.400.000,000		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Organisasi dan Pelaku Olahraga	- 1.200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	03	2.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	2 Dokumen	1.100.000.000,00 Kab. Kutal Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Z. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Organisasi dan Pelaku Olahraga	200.000.000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	9 03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidiklan Z. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Organisasi dan Pelaku Olahraga	1.000.000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	9 03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase masyarakat yang berolahraga	0,0095 Persen	1.950.000.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Organisasi dan Pelaku Olahraga	- 2.150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2	19	9 03	2.05	0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		1 Laporan	100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastrukur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Organisasi dan Pelaku Olahraga		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	9 03	2.05	0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan		3 Laporan	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Organisasi dan Pelaku Olahraga	900,000,000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	9 03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat		1 Dokumen	100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Z. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Organisasi dan Pelaku Olahraga	100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	9 03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		5 Unit	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Pendidikan Pendembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Organisasi dan Pelaku Olahraga	50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	9 03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		5 Lembaga	1.250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Organisasi dan Pelaku Olahraga	1.000.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
200 2	19	9 04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Pembinaan Kepramukaan	-	100 Persen	1.170.000.000,00					- 2.300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

		19 04			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	15,61 Persen	1.170.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Pendidikan	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif Cakupan Organisasi Kepramukaan yang	150,000,000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2 1	19 04	201	0002	Kepramukaan Berbasis Elektronik Peningkatan Kapasitas Organisasi	yang Tersedia dan Termanfaatkan Jumlah Organisasi Kepramukaan	2 Organisasi	Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGIHASII (PODI)	meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil Membangun Sektor Membangun Sektor	aktif Cakupan Organisasi	150,000,000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN
					Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumian organisasi kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	2 Urganisasi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pendidikan 2. Pengembangan sumber	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif		OLAHRAGA
2	2 1	19 04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	40 Orang	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	2 1	19 04	2.01	0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupater/Kota yang Berkualitas	2 Unit	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Z. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



	2	19 04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	3 Laporan	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegar Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	a, DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	700.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19 04	2.01	0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegar Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	a, DANA BAGI HASIL (DBH)	infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19 04	2.01	0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	70.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegar Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	a, DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	19 04	2.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	2 Organis:	si 350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegar Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	B, DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pendidikan 2. Pengembangan sumber	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	700.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			1		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	<u> </u>	<u> </u>	25.023.409.853,00	1		<u> </u>	1	35.049.038.194,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YA	ING TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		25.023.409.853,00					35.049.038.194,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG F	PERPUSTAKAAN		6.950.000,000					8.400.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
201	2	23 02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	46,98 per	en 6.695.000.000,00					- 7.350.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23 02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	2,64 Pers	n 2.035.000.000,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	3.450.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional	Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional	3 Perpustakaan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	250.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
					Perpustakaan	Perpustakaan				transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	7 Perpustakaan	910.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.000.000.000,000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	2.01	0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	48 Layanan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	250.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	2.01	0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesual kewenangan kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	6 Perpustakaan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	200.000,000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat serifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	300.000,000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	2 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	200.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	52965 Eksemplar	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	500.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



2	23	02	2.01	0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1500 Eksemplar	100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	250.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DI PERPUSTAKAAN
										transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	
										Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	2 Perpustakaan	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola - pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	500.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DI PERPUSTAKAAN
										transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	
										Publik	
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembudayaan Gemar Membaca	5 kali	4.660.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	- 3.900.000.000,00 DINAS KEARSIPAN I PERPUSTAKAAN
										publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	
										Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
2	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan	3 Orang	60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	150.000.000,00 DINAS KEARSIPAN D PERPUSTAKAAN
					, .	didukung kegiatannya				untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	
										Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	3 Perpustakaan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola - pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	300.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DI PERPUSTAKAAN
										transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	
										Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi	11 Perpustakaan	4.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola - pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	3.000.000,000 DINAS KEARSIPAN D. PERPUSTAKAAN
					Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	
	20	02	200	0000	Durbain Burbana G	Lucki Constantini	12.0	4500000000	DAMA DAGUNASH (TTT)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	200,000,000
	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	12 Orang	150.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	200.000.000,00 DINAS KEARSIPAN D. PERPUSTAKAAN
										transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	
										Pemerintahan dan Pelayanan Publik	

	2 2	23 02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	4 Lokus	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		250.000.000,000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
										Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		
202	2 2	23 03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI	Persentase naskah kuno dan -	100 persen	255.000.000,00			-	1.050.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DA
					NASIONAL DAN NASKAH KUNO	koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan						PERPUSTAKAAN
	2 2	23 03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno -	5 Eksemplar	150.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		600.000.000,000 DINAS KEARSIPAN DA PERPUSTAKAAN
										publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
	2 2	23 03	2.01	0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	130 Orang	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		400.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2 2	23 03	2.01	0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	5 Eksemplar	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		200.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2 2	23 03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya	300 Eksemplar	105.000.000,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		450.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DA PERPUSTAKAAN
	2 2	23 03	2.02	0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	300 Eksemplar	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		300.000.000,000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2 2	23 03	2.02	0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	2000 Eksemplar	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		150.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



2	2	24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	KEARSIPAN		18.073.409.853,00			26.649.038.194,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3 2	! 2	24 0	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	74 nilai	17.178.409.853,00		-		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24	24 0	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	550.000.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2		24 0		0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegar Tenggarong, Panji		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24	24 0	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegar Tenggarong, Panji	, DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	! 24	24 0	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, Panji	, DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	24 0	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegari Tenggarong, Panji	, DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		DINAS KEARSIPAN DAP PERPUSTAKAAN
2	24	24 0	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegari Tenggarong, Panji	, DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Residence in Processing Control of the Control of Contr	
Part	DINAS KEARSIPAN DAN
Part Part	PERPUSTAKAAN
Part	
Part	
Part Part	
Part Part	
Part Part	
Part Part	
2	
del Transport 600 del Transpor	
A	0 DINAS KEARSIPAN DAN
Part Part	PERPUSTAKAAN
2 24 25 26 27 28 28 29 29 29 29 29 29	I EN OSTANDAN
Part Part	
Part Part	
Part	
Part Part	
Part Part	
Procedure of Programmer Contract of Contract of Programmer Contract of Contract	
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
2 24 01 202 200 00 00 00 00	
Commentation and control state of the control of th	
Part	DINAS KEARSIPAN DAN
For Control Co	
Manual Processes Manual Proc	PERPUSTAKAAN
The contract of the contract o	
To Company of the Com	
2 2 4 01 20 000 Control on Projection (and Projection Control on P	
Posture of the Company of the Section of the Company of the Section of the Company of the Section of the Company of the Section of the Section of the Company of the Section of the Sect	
Programming Marketing Committed Appears Recording Marketing Committed Appears Recording Marketing Committed Appears Recording Marketing Committed Appears Recording Marketing Committed Co	
Part Part	
Part Part	
2 2 24 00 200 Coordinal dam Penyadanan Lamini Lagoran Featange Bellmany Location Featange Fea	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
Truggarong, Pany Lagaran Kacangan Malaban/ Trughanan/Semestaran SPO dan Lagaran Kacangan Malaban/ Trughanan/Semestaran SPO dan Lagaran Kacangan Malaban/ Trughanan/Semestaran SPO dan Lagaran Kacangan Malaban/ Trughanan/Semestaran SPO dan Lagaran Kacangan Malaban/ Trughanan Semestaran SPO dan Lagaran Kacangan Malaban/ Trughanan Semestaran SPO dan Lagaran Kacangan Malaban/ Trughanan Semestaran SPO dan Lagaran Kacangan Malaban/ Trughanan Semestaran SPO dan Lagaran Kacangan Malaban/ Trughanan Semestaran SPO dan Lagaran Malaban/ Trughanan Semestaran SPO dan Lagaran Semestaran SPO dan Lagaran Semestaran SPO dan Lagaran Semestaran SPO dan Lagaran SPO d	
Transparence (Secretaria SSFO dan Supramo Francesca SSFO dan Suprama Provisional Control (Secretaria SSFO dan Suprama Provisional Contr	O DINAS KEARSIPAN DAN
Trivularian femograms SPD Lapon Koordinal Pemputania Lapon Koordinal Pemput	PERPUSTAKAAN
Laplace in Kanagan Supplementation of the Personal Relangement Supplementation of the Suppl	FERFOSTARAGIN
Support Franchischer Support Franchischer Support Franchischer Support Franchischer Support Franchischer Support Franchischer Support Franchischer F	
SPD SPD	
SPD SPD	
1. Prostrator dan Programma Trais Récis Programma Palaporan dan Analisis Programs Realisas Angaran 2 2 24 01 202 0008 Programs Palaporan dan Analisis Programs Realisas Angaran Analisis Programs Realisas Angaran Analisis Programs Realisas Angaran Angaran 2 2 26 01 2.03 Administrasi Barang Milik Oserah Demonstration dan Programs Programs Realisas Angaran Angaran 1 Dokumen 1 D	
Pegembargan Tas Kelola Penginahan dan Pelaparan dan Kelola Penginahan dan Pelaparan dan Analisa Angaran Andrika Penginahan dan Pelaparan dan Analisa Penginahan Pelaparan dan Analisa Penginahan dan Pelaparan dan Analisa Penginahan Pelaparan dan Analisa Penginahan Pelaparan dan Analisa Penginahan Penginahan Penginahan Penginahan Pelaparan dan Analisa Penginahan P	
Permirchalan dan Pelaporan dan Analisis Jumiah Dokumen Pelaporan dan Analisis Jumiah Dokumen Pelaporan dan Analisis Progrosis Realisasi Anggaran Progrosis Realis	
2 24 01 200 000 Penyasunan Pelaporan dian Analisis Prognosis Redisasi Angaran Prognosis Redisasi Angar	
2 24 01 200 000 Penyasunan Pelaporan dian Analisis Prognosis Redisasi Angaran Prognosis Redisasi Angar	
2 24 01 202 0000 Pennyusuan Pelaporan dan Analisa Namiah Dokumen Pelaporan dan Analisa Namiah Dokumen Pelaporan dan Analisa Namiah Dokumen Pelaporan dan Prognosis Realisasi Anggaran Pakelalasi Anggaran Pakelalasi Anggaran Pakelalasi Anggaran Pakelalasi Anggaran Pakelalasi Anggaran Pakelalasi Anggaran Pakelalasi Anggaran Pakelalasi Anggaran Pakelalasi Anggaran Pakelalasi Anggaran Pakelalasi Anggaran Pakelalasi Anggaran Pakelalasi Anggaran Pakelalasi Pennyusuan pulik Pentamban dan Pengaran Pakelalasi Pennyusuan Pakelalasi Pennyusuan Pakelalasi Pennyusuan Pakelalasi Pennyusuan Pakelalasi Pennyusuan Pakelalasi Pennyusuan Pakelalasi Pennyusuan Pakelalasi Pennyusuan Pakelalasi Pennyusuan Perencanaan Pakelalasi Pennyusuan Perencanaan Pakelalasi Pennyusuan Perencanaan Pakelalasi Pennyusuan Perencanaan Pakelalasi Pennyusuan Perencanaan Pakelalasi Pennyusuan Perencanaan Pakelalasi Pennyusuan Pennyusuan Perencanaan Pakelalasi Pennyusuan Perencanaan Pakelalasi Pennyusuan Perencanaan Pakelalasi Pennyusuan Perencanaan Pakelalasi Pennyusuan Perencanaan Pakelalasi Pennyusuan Perencanaan Pakelalasi Pennyusuan Perencanaan Pakelalasi Pennyusuan	
Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Anggaran Analisis Anggaran Analisis Anggaran Analisis Anggaran Angg	
Anggaran Anggar	DINAS KEARSIPAN DAN
untout mendukung transformasi Belayanan publik 1. Pentakan dan Pengentahan Pen	PERPUSTAKAAN
untuk mendukung transformasi Belayanan publik 1. Peningkatan dan Pengenirahan dan Pengenira	
The service of the se	
publik 1. Penataan dan Pengembagan Tata Kelola Pengembagan Tata Kelola Pengembagan Tata Kelola Pengembagan Tata Kelola Pengembagan Tata Kelola Pengembagan Tata Kelola Pengembagan Tata Kelola Pengembagan Tata Kelola Pengembagan Tata Kelola Pengembagan Tata Kelola Pengembagan Tata Kelola Pengembagan Tata Kelola Pengembagan Tata Kelola Pengembagan Tata Kelola Pengembagan Tata Kelola Pengembagan Tata Kelola Pengembagan Tata Kelola Pengembagan Tata Kelola Pengembagan Tata Publik 1. Peningkatan tata kelola Pengembagan Tata Publik 1. Peningkatan tata kelola Pengembagan Tata Publik 1. Peningkatan tata kelola Pengembagan Tata Publik 1. Peningkatan penenuhan dan peneretaan kualitas Ngaran Keibutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1. Dokumen 2. S.000.000,00 Tengurunan Perencanaan Keibutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1. Dokumen 2. S.000.000,00 Tengurunan Perencanaan Keibutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1. Dokumen 2. S.000.000,00 Tengurunan Perencanaan Milik Daerah SKPD 1. Dokumen 2. S.000.000,00 Tengurunan Perencanaan Milik Daerah SKPD 1. Dokumen 2. S.000.000,00 Tengurunan Perencanaan Milik Daerah SKPD 1. Dokumen 2. S.000.000,00 Tengurunan Perencanaan Milik Daerah SKPD 1. Dokumen 2. S.000.000,00 Tengurunan Perencanaan Milik Daerah SKPD 1. Dokumen 2. S.000.000,00 Tengurunan Perencanaan Milik Daerah SKPD 1. Dokumen 2. S.000.000,00 Tengurunan Perencanaan Milik Daerah SKPD 1. Dokumen 2. S.000.000,00 Tengurunan Perencanaan Milik Daerah SKPD 1. Dokumen 2. S.000.000,00 Tengurunan Perencanaan Milik Daerah SKPD 1. Dokumen 2. S.000.000,00 Tengurunan Perencanaan Milik Daerah SKPD 1. Dokumen 2. S.000.000,00 Tengurunan Perencanaan Milik Daerah SKPD 1. Dokumen 2. S.000.000,00 Tengurunan Perencanaan Milik Daerah SKPD 1. Dokumen 2. S.000.000,00 Tengurunan Perencanaan Milik Daerah SKPD 1. Dokumen 2. S.000.000,00 Tengurunan Perencanaan Milik Daerah SKPD 1. Dokumen 2. S.000.000,00 Tengurunan Perencanaan Milik Daerah SKPD 1. Dokumen 2. S.000.000,00 Tengurunan Perencanaan Milik Daerah SKPD 1. Dokumen 2. S.000.000,00 Tengurunan Peren	
2 24 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	
Pengembangan Tata Kelola Pengembangan P	I
Pengembangan Tata Kelola Pengembangan P	
Pemerintahan dan Pelayanan	
2 24 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah (Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah (Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah (Daera	
2 24 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Milik Daerah Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Daerah Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Daera	
pada Perangkat Daerah Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah (
pada Perangkat Daerah Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah (O DINAS KEARSIPAN DAN
Daerah Daerah	PERPUSTAKAAN
untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Peningkatan pemenuhan dan pemeratan kualitas layanan kesehatan 2 2 4 01 2.03 001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 3 5 5 000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji 4 7 Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Peningkatan pemenuhan dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Peningkatan pemenuhan dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Peningkatan pemenuhan dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Peningkatan pemenuhan dan pemeratan kualitas	LICOSTANAAN
transformasi pelayanan publik 1. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas layanan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas layanan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1. Dokumen 2. 2. 4 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 3. Maka Kutai Kartanegara, DANA BAGI HASIL (DBH) Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas	
publik 1. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas layanan kesehatan 2 2 4 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 3 DANA BAGI HASIL (DBH) Tenggarong, Panji 4 DANA BAGI HASIL (DBH) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 5 DANA BAGI HASIL (DBH) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 6 DANA BAGI HASIL (DBH) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 7 Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas	
publik 1. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas layanan kesehatan 2 2 4 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 3 DANA BAGI HASIL (DBH) Tenggarong, Panji 4 DANA BAGI HASIL (DBH) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 5 DANA BAGI HASIL (DBH) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 6 DANA BAGI HASIL (DBH) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 7 Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas	
1. Peningkatan pemenuhan dan pemeratan kualitas layanan kesetatan dan pemeratan kualitas layanan kesetatan dan pemeratan kualitas layanan kesetatan dan pemeratan kualitas layanan kesetatan dan pemeratan kualitas layanan kesetatan dan pemeratan kualitas layanan kesetatan dan pemeratan kualitas layanan kesetatan dan pemeratan kualitas layanan kesetatan dan pemeratan kualitas layanan perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1. Dokumen 25.000.000,0 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Peningkatan pemenuhan dan pemeratan kualitas layanan kesetatan dan pemeratan kualitas layanan publik 1. Peningkatan pemenuhan dan pemeratan kualitas layanan kesetatan dan pemeratan kualitas layanan perencanaan publik 1. Peningkatan pemenuhan dan pemeratan kualitas layanan perencanaan publik 1. Peningkatan pemenuhan dan pemeratan kualitas layanan perencanaan publik 1. Peningkatan pemenuhan dan pemeratan kualitas layanan publik 1. Peningkatan pemenuhan dan pemeratan kualitas layanan perencanaan publik 1. Peningkatan pemenuhan dan pemeratan kualitas layanan perencanaan publik 1. Peningkatan pemenuhan dan pemeratan kualitas layanan perencanaan publik 1. Peningkatan pemenuhan dan pemeratan kualitas layanan perencanaan publik 1. Peningkatan pemenuhan dan pemeratan kualitas layanan perencanaan publik 1. Peningkatan pemenuhan dan pemeratan kualitas layanan perencanaan publik 1. Peningkatan pemenuhan dan pemeratan kualitas layanan perencanaan publik 1. Peningkatan pemenuhan dan pemeratan kualitas layanan perencanaan publik 1. Peningkatan pemenuhan dan pemeratan kualitas layanan perencanaan publik 1. Peningkatan pemenuhan dan pemeratan kualitas layanan pemenuhan dan pemeratan kualitas layanan pemenuhan dan pemeratan kualitas layanan pemenuhan dan pemeratan kualitas layanan pemenuhan dan pemeratan kualitas layanan pemenuhan dan pemeratan kualitas layanan pemenuhan dan pemeratan kualitas layanan pemenuhan dan pemeratan kualitas layanan pemenuhan dan pemeratan kualitas layanan pemeratan kualitas layanan pemenuhan dan pemeratan kualitas	
dan pemerataan kualitas layanan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 25.000.000,00 Fab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 DANA BAGI HASIL (DBH) - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk merangkatan publik 1. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas	I
2 24 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Numlah Rencana Kebutuhan Barang 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, DANA BAGI HASIL (DBH) - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas 1. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas 1. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas 1. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas 1. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas 1. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas 1. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas 1. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas 1. Peningkata	I
2 24 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD And Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD And Barang Milik Daera	
2 24 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD And Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD And Barang Milik Daera	I
Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Tenggarong, Panji Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukang transformasi pelayanan publik 1. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas	
Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Tenggarong, Panji pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukang transformasi pelayanan publik 1. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas	DINIAC VEACOURANT
SKPD profesional dan akuntabel untuk mendukung trunksformasi pelayanan publik 1. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas	DINAS KEARSIPAN DAN
untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas	PERPUSTAKAAN
untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas	
transformasi pelayanan publik 1. Pemenuhan dan pemerataan kualitas	
publik 1. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas	
1. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas	I
dan pemerataan kualitas	
dan pemerataan kualitas	I
	I



2	24	14 01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	82.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
										transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
2	24	4 01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	1 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -		DINAS KEARSIPAN DAN
					Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Tenggarong, Panji		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		PERPUSTAKAAN
										transformasi pelayanan publik		
										1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
2	24	4 01	2.05		Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi -	2 Dokumen	45.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola -		DINAS KEARSIPAN DAN
					Perangkat Daerah	Kepegawaian				pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		PERPUSTAKAAN
										untuk mendukung		
										transformasi pelayanan publik		
										1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		
2	24	4 01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	130 Orang	45.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola - pemerintahan daerah yang		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
					- Cridangan	Undangan		renggarong, ranji		profesional dan akuntabel		1211 031/1100111
										untuk mendukung transformasi pelayanan		
										publik		
										Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
2	24	4 01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah layanan Administrasi -	7 Layanan	843.704.800,00		- 7. Peningkatan tata kelola -		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
					Daerah	Umum Perangkat Daerah				pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		PERPUSTARAAN
										untuk mendukung		
										transformasi pelayanan publik		
										1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		
										Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
2	24	4 01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -		DINAS KEARSIPAN DAN
					Listrik/Penerangan Bangunan	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Tenggarong, Panji		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		PERPUSTAKAAN
					Kantor	,,,				untuk mendukung		
										transformasi pelayanan		
										1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		
2	24	4 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola - pemerintahan daerah yang		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
						, , ,		renggarong, ranji		profesional dan akuntabel		5577110 1111
										untuk mendukung transformasi pelayanan		
										publik		
										Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan		
			1	1	1				1	Publik		

2	24 (2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanega Tenggarong, Panji	ra, DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola - pemerintahan daerah yang	150.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
				rengganuaan	rengganuaan yang biseulakan		Tenggarong, Fanji		profesional dan akuntabel untuk mendukung	PERFOSIAINAIN
									transformasi pelayanan	
									publik	
									Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	
									Pemerintahan dan Pelayanan	
-	24 (1 200	0000	Danielland Bakan Barana dan	Lundah Dalaman Dahan Danam	4 Delever	467.500.000.00	DAMA DA CULIACII (DDII)	Publik 7. Pari in later to the later	250 000 000 00 DINAS VEADS DAN DAN
2	24 (1 2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	1 Dokum	en 167.509.800,00 Kab. Kutai Kartanega Tenggarong, Panji	ra, DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	350.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
					Undangan yang Disediakan				profesional dan akuntabel	
									untuk mendukung transformasi pelayanan	
									publik	
									1. Penataan dan	
									Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	
									Publik	
2	24 (2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang	1 Paket	181.195.000,00 Kab. Kutai Kartanega	ra, DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	400.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
					Disediakan		Tenggarong, Panji		profesional dan akuntabel	PERPOSTAKAAN
									untuk mendukung	
									transformasi pelayanan publik	
									1. Penataan dan	
									Pengembangan Tata Kelola	
									Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
2	24 (1 2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi		40 Lapora		ra, DANA BAGI HASIL (DBH)		550.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN
				dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tenggarong, Panji		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	PERPUSTAKAAN
					SKED				untuk mendukung	
									transformasi pelayanan	
									publik 1. Penataan dan	
									Pengembangan Tata Kelola	
									Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
2	24 (1 2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada	Jumlah Dokumen Penatausahaan	1 Dokum	en 90.000.000,00 Kab. Kutai Kartanega	ra, DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	250.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN
				SKPD	Arsip Dinamis pada SKPD		Tenggarong, Panji		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	PERPUSTAKAAN
									untuk mendukung	
									transformasi pelayanan	
									publik 1. Penataan dan	
									Pengembangan Tata Kelola	
									Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
2	24 (1 2.08	+	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah waktu penyediaan Jasa -	12 Bulan	2.572.694.425,00		- 7. Peningkatan tata kelola -	- 4.111.751.657,00 DINAS KEARSIPAN DAI
1 -	1 1			Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan				pemerintahan daerah yang	PERPUSTAKAAN
					Daerah yang disediakan				profesional dan akuntabel untuk mendukung	
									transformasi pelayanan	
- 1									publik	
									1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	
									Pemerintahan dan Pelayanan	
2	24 6	1 2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Lapora	n 586.091.705,00 Kab. Kutai Kartanega	ra DANA BAGI HASII (DRII)	Publik - 7. Peningkatan tata kelola -	586.091.705,00 DINAS KEARSIPAN DAN
2	24 (2.08	0002	Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12 Lapora	Tenggarong, Panji	I a, DAINA BAUI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang	586.091.705,00 DINAS KEAKSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
					Listrik yang Disediakan				profesional dan akuntabel	
- 1									untuk mendukung transformasi pelayanan	
- 1									publik	
- 1	i I								1. Penataan dan	
						1 1				
									Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	

2	24	01 2	2.08 0	004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	1.986.602.720,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	3.524.339.952,00 DINAS KEARSIPAN DAN
				Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang		Tenggarong, Panji	, ,	pemerintahan daerah yang	PERPUSTAKAAN
					Disediakan				profesional dan akuntabel	
									untuk mendukung	
									transformasi pelayanan	
									publik	
									1. Penataan dan	
									Pengembangan Tata Kelola	
									Pemerintahan dan Pelayanan	
									Publik	
		01 2	2.00	Daniel III. Daniel Britania	Lundah Danasa Milit Danash	132 Unit	180.500.000,00			- 1.700.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN
2	24	01 4	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumian Barang Milik Daeran -	132 Unit	180.500.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola -	
				Penunjang Urusan Pemerintahan					pemerintahan daerah yang	PERPUSTAKAAN
				Daerah					profesional dan akuntabel	
									untuk mendukung	
									transformasi pelayanan	
									publik	
									1. Penataan dan	
									Pengembangan Tata Kelola	
									Pemerintahan dan Pelayanan	
									Publik	
2	24	01 2	2.09 0	001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan	6 Unit	40.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	300.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN
				Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Dinas atau Kendaraan Dinas		Tenggarong, Panji		pemerintahan daerah yang	PERPUSTAKAAN
		1 1		Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jabatan yang Dipelihara dan				profesional dan akuntabel	
				Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya		[untuk mendukung	
							[transformasi pelayanan	
							[publik	
							[1. Penataan dan	
		1 1							Pengembangan Tata Kelola	
									Pemerintahan dan Pelayanan	
									Publik	
2	2/	01 2	2.00 0	002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas	6 Unit	40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	7. Peningkatan tata kelola -	300.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN
- 2	24	01 1	2.05	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Operasional atau Lapangan yang	O OTHE	Tenggarong, Panji	DANA BAGITIASIE (DBTI)	pemerintahan daerah yang	PERPUSTAKAAN
				Perizinan Kendaraan Dinas			renggarong, Panji		profesional dan akuntabel	PERPOSTANAAN
					Dipelihara dan dibayarkan Pajak					
				Operasional atau Lapangan	dan Perizinannya				untuk mendukung	
									transformasi pelayanan	
									publik	
									1. Penataan dan	
									Pengembangan Tata Kelola	
									Pemerintahan dan Pelayanan	
									Publik	
2	24	01	2.09 0	006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin	120 Unit	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	300.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN
				Lainnya	Lainnya yang Dipelihara		Tenggarong, Panji		pemerintahan daerah yang	PERPUSTAKAAN
									profesional dan akuntabel	
									untuk mendukung	
									transformasi pelayanan	
									publik	
									1. Penataan dan	
									Pengembangan Tata Kelola	
									Pemerintahan dan Pelayanan	
									Publik	
204 2	24	02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Prosentase Arsip yang dikelola -	100 persen	450.000.000,00			- 2.000.000,000 DINAS KEARSIPAN DAN
204 2	24	02		I NOGRAM FENGELOLAAN ARSIP	1 Tosentase Arsip yang uikelola	100 persen	-30.000.000,00			PERPUSTAKAAN
,	24				1				7. Peningkatan tata kelola -	- 1.200.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN
2	24	02 1	2.01							- I.ZUU.UUU.UUU.UU IDINAS KEARSIPAN DAN
		02 2	2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah	Jumlah Arsip Dinamis Yang dikelola -	68101 Berkas	300.000.000,00	l		
		02 2	2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis Yang dikelola	68101 Berkas	300.000.000,00		pemerintahan daerah yang	PERPUSTAKAAN
		02 2	2.01		Jumlah Arsip Dinamis Yang dikelola	68101 Berkas	300.000.000,00		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	
		02 2	2.01		Jumlah Arsip Dinamis Yang dikelola	68101 Berkas	300.000.000,00		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	
		02 2	2.01		Jumlah Arsip Dinamis Yang dikelola	68101 Berkas	300.000.000,00		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	
		02 2	2.01		Jumlah Arsip Dinamis Yang dikelola	68101 Berkas	300.000.000,00		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	
		02 2	2.01		Jumlah Arsip Dinamis Yang dikelola	68101 Berkas	300.000.000,00		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	
		02 2	2.01		Jumlah Arsip Dinamis Yang dikelola	68101 Berkas	300.000.000		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	
		02 2	2.01		Jumlah Arsip Dinamis Yang dikelola	68101 Berkas	300.000.000,00		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	
					Jumlah Arsip Dinamis Yang dikelola				pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PERPUSTAKAAN
2	24	02 2				68101 Berkas	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	PERPUSTAKAAN 200.000.000,00 DIINAS KEARSIPAN DAN
2	24			Kabupaten/Kota			50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PERPUSTAKAAN
2	24			Kabupaten/Kota Oo1 Penciptaan dan Penggunaan Arsip	Jumlah Naskah Dinas yang		50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) -	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	PERPUSTAKAAN 200.000.000,00 DIINAS KEARSIPAN DAN
2	24			Kabupaten/Kota Oo1 Penciptaan dan Penggunaan Arsip	Jumlah Naskah Dinas yang		50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	PERPUSTAKAAN 200.000.000,00 DIINAS KEARSIPAN DAN
2	24			Kabupaten/Kota Oo1 Penciptaan dan Penggunaan Arsip	Jumlah Naskah Dinas yang		50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) -	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	PERPUSTAKAAN 200.000.000,00 DIINAS KEARSIPAN DAN
2	24			Kabupaten/Kota Oo1 Penciptaan dan Penggunaan Arsip	Jumlah Naskah Dinas yang		50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) -	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	PERPUSTAKAAN 200.000.000,00 DIINAS KEARSIPAN DAN
2	24			Kabupaten/Kota Oo1 Penciptaan dan Penggunaan Arsip	Jumlah Naskah Dinas yang		50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) -	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	PERPUSTAKAAN 200.000.000,00 DIINAS KEARSIPAN DAN
2	24			Kabupaten/Kota Oo1 Penciptaan dan Penggunaan Arsip	Jumlah Naskah Dinas yang		50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) -	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	PERPUSTAKAAN 200.000.000,00 DIINAS KEARSIPAN DAN
2	24			Kabupaten/Kota Oo1 Penciptaan dan Penggunaan Arsip	Jumlah Naskah Dinas yang		50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) -	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	PERPUSTAKAAN 200.000.000,00 DIINAS KEARSIPAN DAN
2	24			Kabupaten/Kota Oo1 Penciptaan dan Penggunaan Arsip	Jumlah Naskah Dinas yang		50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) -	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	PERPUSTAKAAN 200.000.000,00 DIINAS KEARSIPAN DAN



	2 2	24 02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip	Jumlah Naskah Dinas yang		50 Berkas	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	200.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN
					Dinamis	Dilakukan Pemeliharaan dan			Tenggarong, Semua	,	pemerintahan daerah yang			PERPUSTAKAAN
						Penyusutan			Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
						Cityasatan			nei Desa		untuk mendukung		'	
											transformasi pelayanan		'	
											publik		'	
											1. Penataan dan		'	
											Pengembangan Tata Kelola		'	
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik		'	
\vdash	2 .	24 02	2.04	0000	December Andre Bisseria			4.1	200,000,000,00	DANIA DA CILIACII (DDII)			200 000 000 00	DINIAC KEADCIDAN DAN
	2	24 02	2.01	0003		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan		1 Laporan	200.000.000,00 Semua Kota/Kab,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
					Kewenangan Kabupaten/Kota	Arsip Dinamis Kewenangan			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		'	PERPUSTAKAAN
						Kabupaten/Kota			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		'	
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan publik			
											P		'	
											1. Penataan dan		'	
											Pengembangan Tata Kelola		'	
											Pemerintahan dan Pelayanan			
						<u> </u>					Publik			
	2 2	24 02	2.02	1	Pengelolaan Arsip Statis Daerah	Jumlah Arsip Statis yang dikelola -		24500 Berkas	75.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	- -		DINAS KEARSIPAN DAN
			1		Kabupaten/Kota			1 '			pemerintahan daerah yang			PERPUSTAKAAN
			1	1				1 '			profesional dan akuntabel			
								1 '	 		untuk mendukung			
1 1			1	1				1 '			transformasi pelayanan			
								1 '			publik			
			1	1				1 '			1. Penataan dan			
1 1			1	1				1 '			Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan		'	
											Publik		'	
	2 :	24 02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi,	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan		50 Arsip	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	400.000.000.00	DINAS KEARSIPAN DAN
	- -	-			dan Akses Arsip Statis	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan			Tenggarong, Panji		pemerintahan daerah yang			PERPUSTAKAAN
					dan moes many states	Akses Arsip Statis			renggarong, runji		profesional dan akuntabel		'	1 2.11 05 17 110 0 110
						Akses Alsip statis					untuk mendukung		'	
											transformasi pelayanan		'	
											nuhlik		'	
											poblik			
											1. Penataan dan		'	
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik		'	
	_			1		 								
	2 2	24 02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan	Jumlah OPD yang memasukkan -	,	59 perangkat	75.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola		400.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN
					Informasi Kearsipan Nasional	Arsip dalam SIKN melalui JIKN		daerah			pemerintahan daerah yang		'	PERPUSTAKAAN
					Tingkat Kabupaten/Kota						profesional dan akuntabel		'	
											untuk mendukung		'	
											transformasi pelayanan			
								·						
								1 6			publik			
								1 1			1. Penataan dan			
1 1											1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		· 	
1 1											1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
											1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	2 2	24 02	2.03	0002		Jumlah Laporan Hasil		2 Laporan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-	400.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN
	2 2	24 02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit		2 Laporan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH)	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang		400.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2 2	24 02	2.03	0002	Kearsipan dan Lembaga Kearsipan	Pemberdayaan Kapasitas Unit		2 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola		400.000.000,00	
	2 2	24 02	2.03	0002		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan		2 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		400.000.000,00	
	2 2	24 02	2.03	0002	Kearsipan dan Lembaga Kearsipan	Pemberdayaan Kapasitas Unit		2 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	400.000.000,00	
	2 2	24 02	2.03	0002	Kearsipan dan Lembaga Kearsipan	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan		2 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	400.000.000,00	
	2 1	24 02	2.03	0002	Kearsipan dan Lembaga Kearsipan	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan		2 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	400.000,000,00	
	2 2	24 02	2.03	0002	Kearsipan dan Lembaga Kearsipan	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan		2 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		400.000.000,00	
	2 2	24 02	2.03	0002	Kearsipan dan Lembaga Kearsipan	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan		2 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerirtahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	400.000.000,00	
	2 3	24 02	2.03	0002	Kearsipan dan Lembaga Kearsipan	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan		2 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-	400.000.000,00	
				0002	Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerirtahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-		PERPUSTAKAAN
		24 02		0002	Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PERLINDUNGAN DAN	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		2 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-		PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN
				0002	Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan			Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-		PERPUSTAKAAN
205	2 2	24 03			Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban		100 persen	Tenggarong, Panji 410.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	625.000.000,00	PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
205	2 2				Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Pemusnahan Arsip Dilingkungan	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban Jumlah arsip yang dimusnahkan			Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengerihahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		625.000.000,00	PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN
205	2 2	24 03			Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban		100 persen	Tenggarong, Panji 410.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		625.000.000,00	PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
205	2 2	24 03			Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Pemusahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban Jumlah arsip yang dimusnahkan		100 persen	Tenggarong, Panji 410.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	625.000.000,00	PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN
205	2 2	24 03			Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban Jumlah arsip yang dimusnahkan		100 persen	Tenggarong, Panji 410.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengerihahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daserah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan publik	-	625.000.000,00	PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN
205	2 2	24 03			Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Pemusahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban Jumlah arsip yang dimusnahkan		100 persen	Tenggarong, Panji 410.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	625.000.000,00	PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN
205	2 2	24 03			Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban Jumlah arsip yang dimusnahkan		100 persen	Tenggarong, Panji 410.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengerihahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daserah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan publik		625.000.000,00	PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN
205	2 2	24 03			Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban Jumlah arsip yang dimusnahkan		100 persen	Tenggarong, Panji 410.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		625.000.000,00	PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN
205	2 2	24 03			Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban Jumlah arsip yang dimusnahkan		100 persen	Tenggarong, Panji 410.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	625.000.000,00	PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN
205	2 2	24 03			Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban Jumlah arsip yang dimusnahkan		100 persen	Tenggarong, Panji 410.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengerihahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	625.000.000,00	PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN
205	2 2	24 03			Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban Jumlah arsip yang dimusnahkan		100 persen	Tenggarong, Panji 410.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	625.000.000,00	PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN



2														
	24	1 03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan	Jumlah Arsip yang Dilakukan		500 Arsip	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	150,000,000,00	DINAS KEARSIPAN DAN
					Pelaksanaan Pemusnahan Arsip	Penilaian, Penetapan dan			Tenggarong, Panji		pemerintahan daerah yang			PERPUSTAKAAN
					yang Memiliki Retensi di Bawah 10	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip			renggarong, ranji		profesional dan akuntabel			I EN OSTANAMI
					(Sepuluh) Tahun	yang Memiliki Retensi di Bawah 10					untuk mendukung			
					(Separari) randir									
						(Sepuluh) Tahun					transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
2	24	1 03	2 02		Perlindungan dan Penyelamatan	Jumlah arsip yang dilindungi dan		500 Berkas	50.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola		100 000 000 00	DINAS KEARSIPAN DAN
-		. 55			Arsip Akibat Bencana yang	diselamatkan sesuai dengan NSPK		Soo Serias	3010001000)00		pemerintahan daerah yang		100,000,000,00	PERPUSTAKAAN
					Berskala Kabupaten/Kota	diselalilatkali sesual deligali NSFK					profesional dan akuntabel			FERFOSTARAAN
					Berskala Kabupaten/Kota									
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
2	24	1 03	2.02	0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip	Jumlah Arsip yang Dilakukan		500 Arsip	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola		100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN
'	24	. 03	2.02	0001			1 1	JUU AISIP		DAINA BAGI HASIL (DBII)			100.000.000,00	PERPUSTAKAAN
				1	Akibat Bencana	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan	1		Tenggarong, Panji		pemerintahan daerah yang			PERPUSIAKAAN
				1		dan Penyimpanan Akibat Bencana	1 1		1		profesional dan akuntabel			
				1		1	1 1	i		1	untuk mendukung		1	
				1		1	1 1	j		1	transformasi pelayanan		1	
				1			1 1		1		publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
_ _														
2	24	1 03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat	Jumlah Arsip yang diselamatkan	·	1000 Berkas	200.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	- -	200.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN
					Daerah Kabupaten/Kota yang	dan diselamatkan sesuai dengan					pemerintahan daerah yang			PERPUSTAKAAN
					Digabung dan/atau Dibubarkan,	NSPK					profesional dan akuntabel			
					dan Pemekaran Daerah Kecamatan						untuk mendukung			
					dan Desa/Kelurahan						transformasi pelayanan			
					•						publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
2	24										Publik			
		1 03	2.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan			1 Daftar	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN
		1 03	2.03	0001	Penilaian serta Penyerahan atau	Pendataan, Penyusunan dan		1 Daftar	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		1 03	2.03	0001				1 Daftar		DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	100.000.000,00	
		1 03	2.03	0001	Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi	Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau		1 Daftar		DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	100.000,000,00	
		1 03	2.03	0001	Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah	Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi		1 Daftar		DANA BAGI HASIL (DBH)	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	100.000.000,00	
		1 03	2.03	0001	Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi	Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah		1 Daftar		DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	100.000.000,00	
		1 03	2.03	0001	Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah	Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi		1 Daftar		DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		100.000,000,00	
		1 03	2.03	0001	Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah	Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah		1 Daftar		DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		100.000.000,00	
		1 03	2.03	0001	Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah	Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah		1 Daftar		DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		100.000,000,00	
		1 03	2.03	0001	Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah	Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah		1 Daftar		DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		100.000.000,00	
					Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan, Penyusunan dan Penilailan serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			Tenggarong, Panji		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			PERPUSTAKAAN
2	: 24		2.03		Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Penusanahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		1 Daftar	Tenggarong, Panji 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola			PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN
2	24				Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan, Penyusunan dan Penilailan serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			Tenggarong, Panji		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			PERPUSTAKAAN
2	24				Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Penusanahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			Tenggarong, Panji 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola			PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN
2	24				Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi	Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumiah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau			Tenggarong, Panji 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN
2	24				Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah	Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Penusahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi			Tenggarong, Panji 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung			PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN
2	24				Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi	Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah			Tenggarong, Panji 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan			PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN
2	24				Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah	Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Penusahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi			Tenggarong, Panji 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN
2	24				Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah	Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah			Tenggarong, Panji 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-		PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN
2	24				Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah	Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah			Tenggarong, Panji 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola	-		PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN
2	24				Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah	Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah			Tenggarong, Panji 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik T. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN
		1 03	2.03		Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		500 Arsip	Tenggarong, Panji 100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100.000.000,00	PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
			2.03		Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Autentikasi Arsip Statis dan Arsip	Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Penilaian serta Penyerahan atau Pemusahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			Tenggarong, Panji 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah pelayanan Publik T. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik T. Peningkatan tata kelola		100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN
		1 03	2.03		Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		500 Arsip	Tenggarong, Panji 100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	100.000.000,00	PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		1 03	2.03		Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Autentikasi Arsip Statis dan Arsip	Pendataan, Penyusunan dan Penilailan serta Penyerahan atau Penilailan serta Penyerahan atau Pemusanhan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilailan serta Penyerahan atau Pemusanhan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media sesuai		500 Arsip	Tenggarong, Panji 100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang		100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN
		1 03	2.03		Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Autentikasi Arsip Statis dan Arsip	Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Penilaian serta Penyerahan atau Pemusahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		500 Arsip	Tenggarong, Panji 100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik T. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel dan akuntabel dan akuntahan dalan dan akuntahan darah yang dan dan akuntabel dan dan dan dan akuntabel dan dan dan dan dan akuntabel dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan		100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN DINAS KEARSIPAN DAN DINAS KEARSIPAN DAN
		1 03	2.03		Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Autentikasi Arsip Statis dan Arsip	Pendataan, Penyusunan dan Penilailan serta Penyerahan atau Penilailan serta Penyerahan atau Pemusanhan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilailan serta Penyerahan atau Pemusanhan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media sesuai		500 Arsip	Tenggarong, Panji 100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN DINAS KEARSIPAN DAN DINAS KEARSIPAN DAN
		1 03	2.03		Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Autentikasi Arsip Statis dan Arsip	Pendataan, Penyusunan dan Penilailan serta Penyerahan atau Penilailan serta Penyerahan atau Pemusanhan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilailan serta Penyerahan atau Pemusanhan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media sesuai		500 Arsip	Tenggarong, Panji 100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN DINAS KEARSIPAN DAN DINAS KEARSIPAN DAN
		1 03	2.03		Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Autentikasi Arsip Statis dan Arsip	Pendataan, Penyusunan dan Penilailan serta Penyerahan atau Penilailan serta Penyerahan atau Pemusanhan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilailan serta Penyerahan atau Pemusanhan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media sesuai		500 Arsip	Tenggarong, Panji 100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pelayanan Publik T. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN
		1 03	2.03		Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Autentikasi Arsip Statis dan Arsip	Pendataan, Penyusunan dan Penilailan serta Penyerahan atau Penilailan serta Penyerahan atau Pemusanhan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilailan serta Penyerahan atau Pemusanhan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media sesuai		500 Arsip	Tenggarong, Panji 100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik T. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Peningkatan tata kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Peningkatan tata pelayanan publik T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan		100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN
		1 03	2.03		Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Autentikasi Arsip Statis dan Arsip	Pendataan, Penyusunan dan Penilailan serta Penyerahan atau Penilailan serta Penyerahan atau Pemusanhan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilailan serta Penyerahan atau Pemusanhan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media sesuai		500 Arsip	Tenggarong, Panji 100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola	-	100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN
		1 03	2.03		Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Autentikasi Arsip Statis dan Arsip	Pendataan, Penyusunan dan Penilailan serta Penyerahan atau Penilailan serta Penyerahan atau Pemusanhan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilailan serta Penyerahan atau Pemusanhan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media sesuai		500 Arsip	Tenggarong, Panji 100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik T. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Peningkatan tata kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Peningkatan tata pelayanan publik T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan	-	100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DINAS KEARSIPAN DAN

	2 2	24 03	2.04	0001		Jumlah Daftar Autentisitas Arsip	500 Ars			-	7. Peningkatan tata kelola	-	100.0		KEARSIPAN DAN
				1	Autentisitas Arsip Statis Sesuai	Sesuai Persyaratan Penjaminan		Tenggarong, Par	nji		pemerintahan daerah yang			PERPUSTA	STAKAAN
					Persyaratan Penjaminan Keabsahan	Keabsahan Arsip yang Dinilai dan					profesional dan akuntabel				
				1	Arsip	Ditetapkan					untuk mendukung				
				1							transformasi pelayanan nublik				
				1							1. Penataan dan				
				1							Pengembangan Tata Kelola				
				1							Pemerintahan dan Pelayanan				
				1							Publik				
	2 2	24 03	2.05		Pencarian Arsip Statis	Jumlah arsip Statis yang ditemukan -	500 Be	kas 35.000.000,00		-	7. Peningkatan tata kelola	-	- 75.0	00.000,00 DINAS KE	KEARSIPAN DAN
					Kabupaten/Kota yang Dinyatakan	setelah dinyatakan hilang sesuai					pemerintahan daerah yang			PERPUST	STAKAAN
					Hilang	dengan NSPK					profesional dan akuntabel				
											untuk mendukung				
											transformasi pelayanan publik				
											1. Penataan dan				
											Pengembangan Tata Kelola				
											Pemerintahan dan Pelayanan				
											Publik				
- 1:	2 2	24 03	2.05	0001	Penilaian dan Penetapan	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip	1 Arsip	35.000.000,00 Kab. Kutai Kartai	negara, DANA BAGI HASIL (DBH)		7. Peningkatan tata kelola	-	75.0	000.000,00 DINAS KE	KEARSIPAN DAN
				1	Autentisitas Arsip Statis yang	Statis yang Dinyatakan Hilang yang		Tenggarong, Par			pemerintahan daerah yang			PERPUSTA	
				1	Dinyatakan Hilang	Dinilai dan Ditetapkan					profesional dan akuntabel				
				1							untuk mendukung				
				1							transformasi pelayanan				
				1							publik 1. Penataan dan				
				1							Penataan dan Pengembangan Tata Kelola				
											Pemerintahan dan Pelayanan				
											Publik				
206	2 2	24 04			PROGRAM PERIZINAN	Persentase Ijin Penggunaan Arsip -	100 per	sen 35.000.000,00					- 150.	000.000,00 DINAS KI	KEARSIPAN DAN
	2 2	24 04	2.01	-	PENGGUNAAN ARSIP Pelayanan Izin Penggunaan Arsip	yang diterbitkan Jumlah Izin Penggunaan Arsip yang -	5 Arsip	35.000.000,00			7. Peningkatan tata kelola		150	000.000,00 DINAS KE	STAKAAN KEARSIRAN DAN
	- -	24 04	2.01		yang Bersifat Tertutup di	Bersifat Tertutup di	5 Arsip	35.000.000,00		-	pemerintahan daerah yang	-	- 150.		TAKAAN
					Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota					profesional dan akuntabel			12 05	,,,,,,,,,,
						,					untuk mendukung				
											transformasi pelayanan				
											publik				
											1. Penataan dan				
											Pengembangan Tata Kelola				
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	2 2	24 04	2.01	0004	Daniel de la Defensión Describera	Luciale Defension Local	E Ausia	35 000 000 00 K-F K-t- K-t- K-	negara, DANA BAGI HASIL (DBH)				150	000.000,00 DINAS KE	(FADCIDANI DANI
	2 2	24 04	2.01	0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan	5 Arsip	Tenggarong, Par		-	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	150.	PERPUSTA	
					Tertutup	Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat		Tenggarong, Far	'y'		profesional dan akuntabel			FERFOSIA	TANAAN
					Tertatap	Tertutup					untuk mendukung				
				1		'					transformasi pelayanan				
				1							publik				
				1							1. Penataan dan				
				1							Pengembangan Tata Kelola				
				1							Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	+	-	1	₩	Dinas Kelautan dan Perikanan	I I		136.554.799.081,00		1	PUDIIK	L	184 404	893.921,00 DINAS KE	KELALITAN DAN
				1	Sinas Relautan udri Perikanari			130.334./33.061,00					144.484.	PERIKAN	
	3	_	1	1	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			136.554.799.081,00					144.484.		KELAUTAN DAN
								·						PERIKANA	NAN
	3 2	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	KELAUTAN DAN PERIKANAN		136.554.799.081,00					144.484.	893.921,00 DINAS KE PERIKAN	KELAUTAN DAN
	3 2	25 01	1	+	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Sakip Perangkat Daerah -	86 Angi	a 20.134.399.081,00					- 31.584.9		KELAUTAN DAN
207	- 1 -	1			PEMERINTAHAN DAERAH		00744						32.50	PERIKAN	
207			1		KABUPATEN/KOTA										
		_			Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Rencana,	5 Doku	nen 650.000.000,00			7. Peningkatan tata kelola	ASN Dislutkan	- 1.275.	000.000,00 DINAS KE	
	3 2	25 01	2.01			Anggaran dan Evaluasi Kinerja.				pertahanan keamanan	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			PERIKANA	NAN
	3 2	25 01	2.01		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 tinggaran dan Evaluasi kincijai			i i	negara dan mendorong	projesional dan akuntabel				
	3 2	25 01	2.01			A Special Control Cont									
	3 2	25 01	2.01			August and autopath and participation of the partic				kemandirian bangsa melalui	untuk mendukung				
	3 2	25 01	2.01							kemandirian bangsa melalui					
	3 2	25 01	2.01							kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,	untuk mendukung transformasi pelayanan				
	3 2	25 01	2.01							kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,	untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola				
	3 2	25 01	2.01							kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan				

3	2!	5 01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	150.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	ASN Dislutkan	350.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
											swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	publik 1. Penataan dan			
		- 01	201	2005	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja		5 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA DA CILIAGII (PRII)	Memantapkan sistem	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	ASN Dislutkan	7,000,000	DINAS KELAUTAN DAN
3	2.	3 01	2.01	0000	Laporan Cajain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jamiai Laporan Laporan Kirelja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Lajouan	Semua Keamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGITIASIL (DBT)	pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	ASN DISIUKAII	73.000.000	PERIKANAN
3	2!	5 01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	ASN Dislutkan	250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
												Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
3	2!	5 01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	ASN Dislutkan	250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2	21	5 01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data	Jumlah Data Statistik Sektoral		1 Data	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BACILIACII (DDII)	Memantapkan sistem	Publik 7. Peningkatan tata kelola	ASN Dislutkan	350,000,000,00	DINAS KELAUTAN DAN
3	2.	3 01	2.01	0009	Telaksalaan Felgun Juan Daa Statistik Sektoral Daerah	Julian Java Satsiri, Sekurian Jaban Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		1 Deta	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	ASN Distuted I		PERIKANAN
3	25	5 01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Berita Acara	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dislutkan	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	2!	5 01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah.	-	21 Dokumen	16.278.500.957,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dislutkan	- 15.534.893.921,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

3		_					 							
	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		120 Orang/bulan	16.003.500.957,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem	7. Peningkatan tata kelola	ASN Dislutkan	15.059.893.921,00	
	1		1			dan Tunjangan ASN	1 1			pertahanan keamanan	pemerintahan daerah yang			PERIKANAN
										negara dan mendorong	profesional dan akuntabel			
1	1		l	1	1	1				kemandirian bangsa melalui	untuk mendukung			
			1	1	1					swasembada pangan, energi,	transformasi pelayanan			
			1	1	1					air, ekonomi kreatif, ekonomi	publik			
	1		1		1	1				hijau, dan ekonomi biru	1. Penataan dan			
1	1		l	1	1	1					Pengembangan Tata Kelola			
1	1		l	1	1	1					Pemerintahan dan Pelayanan			
	1		1		1	1					Publik			
2	25	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	3 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HACII (DDII)	Memantapkan sistem	7. Peningkatan tata kelola	ASN Dislutkan	25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN
3	25	01	2.02	0005			3 LapuidII		DAINA DAGI FIASIL (UBH)		pemerintahan daerah yang	AJIN DISIULKIII	25.000.000,00	PERIKANAN
1	1		l	1	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tahun SKPD dan Laporan Hasil		Semua Kecamatan,		pertahanan keamanan	profesional dan akuntabel			FLRIKAINAIN
1	1		l	1	סעאט	Koordinasi Penyusunan Laporan		Semua Kel/Desa		negara dan mendorong				
			1	1	1	Keuangan Akhir Tahun SKPD				kemandirian bangsa melalui	untuk mendukung			
			1	1	1					swasembada pangan, energi,	transformasi pelayanan			
1	1		l	1	1	1				air, ekonomi kreatif, ekonomi				
										hijau, dan ekonomi biru	1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
				1						ļ	Publik			
3	25	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	18 Laporan	225.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem	7. Peningkatan tata kelola	ASN Dislutkan	450.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN
	1		1		Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan		Semua Kecamatan,		pertahanan keamanan	pemerintahan daerah yang			PERIKANAN
	1		1		Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan		Semua Kel/Desa		negara dan mendorong	profesional dan akuntabel			
	1		1		·	Laporan Keuangan				kemandirian bangsa melalui	untuk mendukung			
1	1		l	1	1	Bulanan/Triwulanan/Semesteran					transformasi pelayanan			
	1		1		1	SKPD				air, ekonomi kreatif, ekonomi				
1	1		l	1	1	1				hijau, dan ekonomi biru	1. Penataan dan			
	1		1		1	1				, . ,	Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
	1		1		1	1					Publik			
-	25	01	2.02		Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan -	2 Dokumen	55.000.000,00		Memantapkan sistem	7. Peningkatan tata kelola	ASN Dislutkan	100 000 000 00	DINAS KELAUTAN DAN
3	25	01	2.03				2 Dokumen	55.000.000,00				ASN DISIUTKAN	- 100.000.000,00	
1	1		l	1	pada Perangkat Daerah	Kebutuhan Barang Milik Daerah				pertahanan keamanan	pemerintahan daerah yang			PERIKANAN
			1	1	1	SKPD				negara dan mendorong	profesional dan akuntabel			
			1	1	1					kemandirian bangsa melalui	untuk mendukung			
	1		1		1	1				swasembada pangan, energi,	transformasi pelayanan			
1	1		l	1	1	1				air, ekonomi kreatif,	publik			
										ekonomi hijau, dan ekonomi	1. Penataan dan			
										biru	Pengembangan Tata Kelola			
	1									biru				
										biru	Pemerintahan dan Pelayanan			
3										biru				
	25	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan.	1 Laporan	25,000.000.00 Kab. Kutai Kartanegara.	DANA BAGI HASIL (DBH)		Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dislutkan	50,000,000,00	DINAS KELAUTAN DAN
	25	01	2.03	0004		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan,	1 Laporan	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	ASN Dislutkan	50.000.000,00	
	25	01	2.03	0004	Pengendalian Barang Milik Daerah	Pengawasan, dan Pengendalian	1 Laporan	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	ASN Dislutkan	50,000,000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	25	01	2.03	0004			1 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	ASN Dislutkan	50.000.000,00	
	25	01	2.03	0004	Pengendalian Barang Milik Daerah	Pengawasan, dan Pengendalian	1 Laporan	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	ASN Dislutkan	50.000.000,00	
	25	01	2.03	0004	Pengendalian Barang Milik Daerah	Pengawasan, dan Pengendalian	1 Laporan	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	ASN Dislutkan	50,000,000,00	
	25	01	2.03	0004	Pengendalian Barang Milik Daerah	Pengawasan, dan Pengendalian	1 Laporan	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN Dislutkan	50.000.000,00	
	25	01	2.03	0004	Pengendalian Barang Milik Daerah	Pengawasan, dan Pengendalian	1 Laporan	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	ASN Dislutkan	50.000.000,00	
	25	01	2.03	0004	Pengendalian Barang Milik Daerah	Pengawasan, dan Pengendalian	1 Laporan	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	ASN Dislutkan	50.000.000,00	
	25	01	2.03	0004	Pengendalian Barang Milik Daerah	Pengawasan, dan Pengendalian	1 Laporan	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	ASN Distutkan	50.000.000,00	
					Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			PERIKANAN
		01			Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan	Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	ASN Dislutkan	50.000.000,00	PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN
					Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang			PERIKANAN
					Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan	Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola			PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN
					Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi ireatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang			PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN
					Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung			PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN
					Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan			PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN
					Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik			PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN
					Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN
					Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola			PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN
					Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN
3	25	01	2.03		Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi ireatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dislutkan	50.000.000,00	PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25		2.03		Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Kepegawaian	Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Administrasi		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan dan Pelayanan Publik 8. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peniataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peniataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola		50.000.000,00	PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN
3	25	01	2.03		Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	ASN Dislutkan	50.000.000,00	PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	01	2.03		Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Kepegawaian	Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Administrasi	1 Laporan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi ireatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dareh yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan akuntabel profesional dan akuntabel	ASN Dislutkan	50.000.000,00	PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN
3	25	01	2.03		Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Kepegawaian	Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Administrasi	1 Laporan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui kanan mendorong kemandirian bangsa melalui	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	ASN Dislutkan	50.000.000,00	PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN
3	25	01	2.03		Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Kepegawaian	Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Administrasi	1 Laporan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi ireatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi biru	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	ASN Dislutkan	50.000.000,00	PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN
3	25	01	2.03		Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Kepegawaian	Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Administrasi	1 Laporan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung dan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN Dislutkan	50.000.000,00	PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN
3	25	01	2.03		Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Kepegawaian	Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Administrasi	1 Laporan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi ireatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi biru	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 8. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 9. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 2. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Peningkatan tata kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan	ASN Dislutkan	50.000.000,00	PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN
3	25	01	2.03		Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Kepegawaian	Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Administrasi	1 Laporan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	ASN Dislutkan	50.000.000,00	PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN
3	25	01	2.03		Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Kepegawaian	Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Administrasi	1 Laporan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 8. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 9. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 8. Penataan dan	ASN Dislutkan	50.000.000,00	PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN



3	25	6 01	2.05		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi	1 Dokumen	25.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang pengerint	ASN Dislutkan		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Kepegawaian				air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	25				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	25.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dislutkan		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		5 01			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	150.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dislutkan		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		5 01			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ASN Kelautan dan Perikanan Yang Mendapatkan Layanan	110 ASN	455.000.000,00		air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dislutkan		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	5 01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daeral yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dislutkan		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	6 01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	100.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dislutkan	250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



3 25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	2 Paket	40.000.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem	7. Peningkatan tata kelola	ASN Dislutkan	150.000.000.00	DINAS KELAUTAN DAN
					yang Disediakan					pertahanan keamanan	pemerintahan daerah yang			PERIKANAN
					yang biscalalan					negara dan mendorong	profesional dan akuntabel			T ENGINEERING
										kemandirian bangsa melalui	untuk mendukung			
										swasembada pangan, energi,				
										air, ekonomi kreatif, ekonomi				
										hijau, dan ekonomi biru	1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
3 25	01	2.06	OOOE	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1 Paket	50.000.000,00		DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem	7. Peningkatan tata kelola	ASN Dislutkan	100,000,000,00	DINAS KELAUTAN DAN
3 23	01	2.00	0003			1 raket	30.000.000,00	-	DANA BAGITIASIE (DBIT)			A3N DISIURAH	100.000.000,00	
				Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan					pertahanan keamanan	pemerintahan daerah yang			PERIKANAN
										negara dan mendorong	profesional dan akuntabel			
										kemandirian bangsa melalui	untuk mendukung			
										swasembada pangan, energi,	transformasi pelayanan			
										air, ekonomi kreatif, ekonomi	publik			
										hijau, dan ekonomi biru	1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	1							ļ		1				
3 25	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi	1 Laporan	50.000.000,00	l-	DANA BAGI HASIL (DBH)		7. Peningkatan tata kelola	ASN Dislutkan	100.000.000,00	
		1			Kunjungan Tamu					pertahanan keamanan	pemerintahan daerah yang			PERIKANAN
	1	1							1	negara dan mendorong	profesional dan akuntabel			
	1	1							1	kemandirian bangsa melalui	untuk mendukung			
	1	1							1	swasembada pangan, energi,	transformasi pelayanan			
		1								air, ekonomi kreatif, ekonomi				
										hijau, dan ekonomi biru	Penataan dan			
										nijau, dan ekonomi biru				
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
3 25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	40 Laporan	180.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem	7. Peningkatan tata kelola	ASN Dislutkan	600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAI
1		1		dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Semua Kecamatan,	. ,,	pertahanan keamanan	pemerintahan daerah yang			PERIKANAN
					SKPD			Semua Kel/Desa		negara dan mendorong	profesional dan akuntabel			
					SKED			Sellida Kel/ Desa						
										kemandirian bangsa melalui	untuk mendukung			
										swasembada pangan, energi,				
										air, ekonomi kreatif, ekonomi				
										hijau, dan ekonomi biru	1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
2 25	01	2.00	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada	Lumlah Daluman Banatausahaan	1 Dokumen	25.000.000,00	Vah Viitai Vartanagara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem	7. Peningkatan tata kelola	ASN Dislutkan	150,000,000,00	DINAS KELAUTAN DAN
3 23	01	2.00				1 Dokumen	25.000.000,00		DANA BAGI HASIL (DBH)			ASIN DISIULKATI	150.000.000,00	
				SKPD	Arsip Dinamis pada SKPD			Semua Kecamatan,		pertahanan keamanan	pemerintahan daerah yang			PERIKANAN
								Semua Kel/Desa		negara dan mendorong	profesional dan akuntabel			
										kemandirian bangsa melalui	untuk mendukung			
		1								swasembada pangan, energi,	transformasi pelayanan			
		1								air, ekonomi kreatif, ekonomi				
		1								hijau, dan ekonomi biru	Penataan dan			
	1	1							1	,50, 0011 01101111 0110	Pengembangan Tata Kelola			
		1								1				
		1								1	Pemerintahan dan Pelayanan			
	4	<u> </u>								1	Publik			
3 25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah -	5 Unit	950.000.000,00			Memantapkan sistem	4. Membangun Infratruktur	ASN Dislutkan -	10.750.000.000,00	DINAS KELAUTAN DA
	1	1		Penunjang Urusan Pemerintah	Penunjang Urusan Daerah				1	pertahanan keamanan	Konektivitas	1		PERIKANAN
	1	1		Daerah	Diadakan				1	negara dan mendorong	1. Penataan dan	1		
		1								kemandirian bangsa melalui	Pengembangan Tata Kelola			
	1									swasembada pangan, energi,	Pemerintahan dan Pelayanan			
	1													
	1	1							1	air, ekonomi kreatif,	Publik	1		
	1									ekonomi hijau, dan ekonomi	ĺ			
	1	<u> </u>								biru	<u> </u>			
3 25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	2 Unit	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem	4. Membangun Infratruktur	ASN Dislutkan	250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DA
	1	1			Disediakan			Semua Kecamatan,	1	pertahanan keamanan	Konektivitas	1		PERIKANAN
		1						Semua Kel/Desa		negara dan mendorong	Penataan dan			
	1	1						Jenius Neij Desa	1			1		
		1								kemandirian bangsa melalui				
			1					ı	1	swasembada pangan, energi,	Pemerintahan dan Pelayanan		1	1
										air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				



3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin		1 Unit	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem	7. Peningkatan tata kelola	ASN Dislutkan	500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN
					Lainnya	Lainnya yang Disediakan			Semua Kecamatan,		pertahanan keamanan	pemerintahan daerah yang			PERIKANAN
					•				Semua Kel/Desa		negara dan mendorong	profesional dan akuntabel			
											kemandirian bangsa melalui	untuk mendukung			
1	1		l					1			swasembada pangan, energi,				
											air, ekonomi kreatif, ekonomi	publik			
											hijau, dan ekonomi biru	Penataan dan			
											nijau, dan ekonomi biru				
												Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa -		3 Laporan	775.898.124,00		Memantapkan sistem	7. Peningkatan tata kelola	ASN Dislutkan	- 800.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN
					Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah					pertahanan keamanan	pemerintahan daerah yang			PERIKANAN
						Daerah.					negara dan mendorong	profesional dan akuntabel			
						Ducium .					kemandirian bangsa melalui	untuk mendukung			
											swasembada pangan, energi,	transformasi pelayanan			
											air, ekonomi kreatif,	publik			
											ekonomi hijau, dan ekonomi	1. Penataan dan			
											biru	Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DRH)	Memantapkan sistem	7. Peningkatan tata kelola	ASN Dislutkan	250.000.000.00	DINAS KELAUTAN DAN
	-	1 1			Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan			Semua Kecamatan,		pertahanan keamanan	pemerintahan daerah yang			PERIKANAN
	1		1		Jumper Daya All uall Listrik		1	1	Semua Kel/Desa		negara dan mendorong	profesional dan akuntabel			LIMMINAIN
	1		1			Listrik yang Disediakan	1	1	Semua kel/Desa						
	1		1			l		1			kemandirian bangsa melalui	untuk mendukung			
	1		1			l	1	1	 						
	1		1			l	1	1	 		air, ekonomi kreatif, ekonomi				
	1		1			l		1			hijau, dan ekonomi biru	1. Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
-	25	- 04	2.00	0000	December of the Control of the Contr	Lucial Lancaca Decorations Lanca		42.1	25 000 000 00	DANIA DA CILIACII (DDIII)	Managed and the state of the same	1 dbiik	ACM Distribution	F0 000 000 00	DINIAC VELALITANI DANI
3	25	01	2.08	0003		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	25.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem	7. Peningkatan tata kelola	ASN Dislutkan	50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN
	1		1		Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor					pertahanan keamanan	pemerintahan daerah yang			PERIKANAN
	1		1			yang Disediakan	1	1	 		negara dan mendorong	profesional dan akuntabel			
											kemandirian bangsa melalui	untuk mendukung			
											swasembada pangan, energi,	transformasi pelayanan			
											air, ekonomi kreatif, ekonomi				
											hijau, dan ekonomi biru	Penataan dan			
											Ilijau, uali ekoliolili bilu				
												Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		1 Laporan	400.898.124,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem	7. Peningkatan tata kelola	ASN Dislutkan	500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN
					Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang					pertahanan keamanan	pemerintahan daerah yang			PERIKANAN
						Disediakan					negara dan mendorong	profesional dan akuntabel			
											kemandirian bangsa melalui	untuk mendukung			
											swasembada pangan, energi,	transformasi pelayanan			
	1		1												
	1		1			l	1	1	j l		air, ekonomi kreatif, ekonomi				
	1		1			l	1	1	j l		hijau, dan ekonomi biru	1. Penataan dan			
	1		1									Pengembangan Tata Kelola			
1			1									Pemerintahan dan Pelayanan	1		1
	1		1			l		1				Publik			
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang -		90 Persen	745.000.000,00		Memantapkan sistem	7. Peningkatan tata kelola	ASN Dislutkan	- 1.200.000.000.00	DINAS KELAUTAN DAN
	-				Penunjang Urusan Pemerintahan	Milik Daerah Penunjnag Urusan	1				pertahanan keamanan	pemerintahan daerah yang			PERIKANAN
	1		1		Daerah	Pemerintahan.	1	1	j l		negara dan mendorong	profesional dan akuntabel			
	1		1		Dacian	rememballati.									
	1		1								kemandirian bangsa melalui	untuk mendukung			
	1		1			l	1	1	j l		swasembada pangan, energi,	transformasi pelayanan			
	1		1								air, ekonomi kreatif,	publik			
	1		1								ekonomi hijau, dan ekonomi	1. Penataan dan			
	1		1								biru	Pengembangan Tata Kelola			
	1		1			l	1	1	j l		1	Pemerintahan dan Pelayanan			
	1		1			l		1				Puhlik			
	+			00					445 000 000 00			T GIDIN			
3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan		23 Unit	115.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem	7. Peningkatan tata kelola	ASN Dislutkan	200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN
	1		1		Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Dinas atau Kendaraan Dinas					pertahanan keamanan	pemerintahan daerah yang			PERIKANAN
	1		1		Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jabatan yang Dipelihara dan	1	1	j l		negara dan mendorong	profesional dan akuntabel			
	1		1		Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya	1	1	j l		kemandirian bangsa melalui	untuk mendukung			
	1		1				1		 						
	1		1			l	1	1	j l						
	1		1								air, ekonomi kreatif, ekonomi				
	1		1			l	1	1	j l		hijau, dan ekonomi biru	1. Penataan dan			
			1	1			1	1	[Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan Publik	l l		
						l	l l		l			Pemerintahan dan Pelayanan	l I		



3	2!	5 01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	100.000,000,00 -	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		ASN Dislutkan	300.000.000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		5 01			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	250.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		ASN Dislutkan	100.000.000,00	PERIKANAN
		5 01			Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	230.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dislutkan		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	2!	5 01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		ASN Dislutkan	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
208 3	2!	5 03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap -	120000 Ton	34.510.400.000,00					- 47.100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	29	5 03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nelayan Terfasilitasi Sarana - Penangkapan Ikan.	2214 Nelayan	27.915.000.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nelayan	- 30.250.000.000,00	
3	2!	5 03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 Dokumen	150.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nelayan		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	2!	5 03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	8 Unit	2.800.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Infratruktur Konektivitas Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN	Nelayan		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	29	5 03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1250 Unit	24.965.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		Nelayan	25.000.000.000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



٠,	25	03	2.02	1	Domboudouson National Value	Jumlah KUB Naik Kelas -	8 KUB	5.250.000.000.00		Manage and a second	C. Dominghoton Inveller	Kalamaak III	46 000 000 000 00	DINIAC VELAVITANI D.C.
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KUB Naik Kelas Jumlah KuB yayan Miskin dan Rentan Miskin Terfasilitasi Sarana Penangkapan Ikan	8 KUB 600 orang	5.250.000.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja	Kelompok Usaha - Bersama	16.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	500 Orang	5.000.000,000 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru			15,000,000,000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	50 Kelompok	100.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		Kelompok Usaha Bersama	500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	100 Unit Usa	na 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegar Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	a, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Kelompok Usaha Bersama	500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI Beroperasi -	3 Unit	695.400.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Sektor Pendidikan Pentataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelompok Usaha Bersama	150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan ikan (TPI)	3 Layanan	695.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegar Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	a, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Sektor Pendidikan Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelompok Usaha Bersama	150,000,000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	03	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 Gr di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan diterbitkan	2000 Tanda Daftar	550.000.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Sektor Penddilkan Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelompok Usaha Bersama	400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	03	2.04	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegar Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	a, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Sektor Pendidikan Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelompok Usaha Bersama	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	03	2.04	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	2000 Rekomendas	500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegai Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	a, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Infratruktur Konektivitas Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Kelompok Usaha Bersama	300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



	3 2	5 03	2.06		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran - sampai 10 GT Terdaftar	1000 Kapal	100.000.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan	4. Membangun Infratruktur Konektivitas	Kelompok Usaha Bersama	- 300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sampa 2001 Returned				negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	sersama		TEMORY
	3 2	5 03	2.06	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampal dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00 kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		Kelompok Usaha Bersama		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3 2	5 03	2.06	0003	Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	5000 Rekomendasi	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Unggul, Bernilai tambah dan	Kelompok Usaha Bersama	200,000,000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
209	3 2	5 04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya -	232827 Ton	72.100.000.000,00					- 49.800.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3 2	5 04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah POKDAKAN Bermitra -	50 Pokdakan	3.300.000.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Kelompok Pembudidaya Ikan		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3 2	5 04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	15 Kelompok	400.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Kelompok Pembudidaya Ikan	1.000.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3 2	5 04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ilkan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	50 Kelompok	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Kelompok Pembudidaya Ikan	250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3 2	5 04	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	100 Kelompok	650.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Kelompok Pembudidaya Ikan	500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3 2	5 04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	500 Kelompok	2.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Kelompok Pembudidaya Ikan	2.000.000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3 2	5 04	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Pembudidaya - Ikan Diterbitkan	1000 TDPI	100.000.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Sektor Pendidikan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Kelompok Pembudidaya Ikan	- 500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



	3	25 04	2.03	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecli yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Rekomendasi	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Pembudidaya Ikan	500.000.000,00	PERIKANAN
	3 2	25 04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan - Terfasilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan.	4428 Pembudidaya	68.700.000.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Infratruktur Konektivitas 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelompok Pembudidaya Ikan	- 45.550.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3 2	25 04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	150.000.000,00 kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Infratruktur Konektivitas 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelompok Pembudidaya Ikan	250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3 2	25 04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit	30.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Tanjung Limau Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Infratruktur Konektivitas S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Kelompok Pembudidaya Ikan	10.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3 2	25 04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Kelompok Pembudidaya Ikan	300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25 04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1778 Unit	38.350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Kelompok Pembudidaya Ikan	35.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
210	3 2	25 05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	CAKUPAN WILAYAH SUMBERDAYA - PERIKANAN YANG DIAWASI PERSENTASE KASUS ILEGAL DAN DESTRUKTIF FISHING YANG DITUNTASKAN.	20 Kecamatan 98 Persen	3.250.000.000,00					- 8.850.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25 05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Difasilitasi	5 POKMASWAS	3.250.000.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Kelompok Masyarakat Pengawas	- 8.850.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25 05	2.01	0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	50 Pelaku Usaha	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Kelompok Masyarakat Pengawas	400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



3	25	05	2.01		Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	4 Unit	100.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Berkelanjutan	Kelompok Masyarakat Pengawas		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	05	2.01	0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	20 Pelaku Usaha	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Kelompok Masyarakat Pengawas	750.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan Ikan dan/atau usaha pengangkutan Ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan Ikan dan/atau usaha pengangkutan Ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	100 Pelaku Usaha	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Kelompok Masyarakat Pengawas	5.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	05	2.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	600 Orang	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Kelompok Masyarakat Pengawas	500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	05	2.01	0011	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	18 Unit	2.500.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Kelompok Masyarakat Pengawas	2.000.000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
211 3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Pengolahan Hasil - Perikanan	27668 Ton	6.560.000.000,00					- 7.150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan - Pemasaran Memiliki Tanda Daftar Usaha Pengolahan	10 Tanda Daftar Usaha Pengolahan	500.000.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Kelompok Pengolahan dan Pemasaran	- 900.000,000,00	
3	25	06	2.01	0004	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	5 Rekomendasi	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Kelompok Pengolahan dan Pemasaran	500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	8 Dokumen	400.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelompok Pengolahan dan Pemasaran		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Yang Menerapkan Standar Mutu	15 Unit Usaha	500.000.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Kelompok Pengolahan dan Pemasaran	- 750.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



3	25	5 06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko		15 Unit Usaha 50 POKLAHSAR	500.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Sektor Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan	Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Kelompok Pengolahan		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN
3	25				Penyediaan dan Penyaluran Banah Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Sarana Pengolahan dan		SU PUNLANSAR			memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tempangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	кеютрок Pengolanan dan Pemasaran		PERIKANAN
3	25	5 06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		50 Ton	300.000.000,000 Kab, Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Kelompok Pengolahan dan Pemasaran	3.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	5 06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam ((Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi		100 Pelaku Usaha	5.260.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Kelompok Pengolahan dan Pemasaran	2.500,000,000,000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Dinas Pariwisata URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		-		61.972.579.136,00						DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA
3	26	5			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG F	PARIWISATA			61.972.579.136,00 61.972.579.136,00						DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA
212 3					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Nilai SAKIP	-	75 Nilai 75 Persen	23.027.335.968,00					- 23.560.269.073,00	
3	26	5 01	2.01		KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		7 Dokumen	950.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Dinas Pariwisata	- 1.450.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	5 01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Dinas Pariwisata		DINAS PARIWISATA
3					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan	50.000.000,00 Kab, Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Dinas Pariwisata		DINAS PARIWISATA
		5 01			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Dinas Pariwisata		DINAS PARIWISATA
		5 01			Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Sektor Pendidikan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Dinas Pariwisata		DINAS PARIWISATA
3	26	5 01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		2 Data	550.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Sektor Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Dinas Pariwisata	600.000.000,000	DINAS PARIWISATA



3	26 01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Berita Acara	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Sektor Pendidikan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Dinas Pariwisata		DINAS PARIWISATA
	26 01			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah yang dibayarkan	-	12 Bulan	19.530.785.968,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Dinas Pariwisata		DINAS PARIWISATA
3	26 01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12 Orang/bulan	19.103.265.968,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Dinas Pariwisata	17.099.866.711,00	DINAS PARIWISATA
3	26 01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Sektor Pendidikan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Dinas Pariwisata	25,000,000,00	DINAS PARIWISATA
3	26 01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Laporan	377.520.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Dinas Pariwisata	377.520.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26 01		8000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Sektor Pendidikan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Dinas Pariwisata		DINAS PARIWISATA
3	26 01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah yang dibayarkan	-	12 Bulan	115.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Sektor Pendidikan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Dinas Pariwisata	- 115.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26 01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Sektor Pendidikan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Dinas Pariwisata	25.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26 01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Laporan	50.000.000,00 -	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Sektor Pendidikan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Dinas Pariwisata	50,000,000,00	DINAS PARIWISATA
3	26 01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Dinas Pariwisata	30,000,000,00	DINAS PARIWISATA
	26 01		0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Sektor Pendidikan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Dinas Pariwisata		DINAS PARIWISATA
3	26 01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	2 Dokumen	30.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Sektor Pendidikan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Dinas Pariwisata	20.000.000,00	DINAS PARIWISATA



3	26	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		1 Dokumen	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Membangun Sektor Pendidikan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang	Dinas Pariwisata	10.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		1 Dokumen	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi	Dinas Pariwisata	10.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi	-	2 Dokumen	100.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan	dan berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi	Dinas Pariwisata	- 100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
					Perangkat Daerah	Kepegawaian Perangkat Daerah					mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
3	26	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Dinas Pariwisata	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		20 Orang	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Dinas Pariwisata	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5 Dokumen	850.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Dinas Pariwisata	- 1.222.269,650,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Dinas Pariwisata	359.769.650,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Dinas Pariwisata	250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Dinas Pariwisata	200.000,000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		40 Laporan	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Dinas Pariwisata	300,000,000,000	DINAS PARIWISATA
		01		0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Dinas Pariwisata		DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Dokumen	850.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Dinas Pariwisata	2.524.062.712,00	DINAS PARIWISATA



	3 2	26 01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	850.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN ASLI	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Dinas Pariwisata	850,000,000,0	DINAS PARIWISATA
	J 2	20 01	2.00	0002	Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12 Euporan	Tenggarong, Semua	DAERAH (PAD)	mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	Dillas i aliwisata	830.000.000,0	DINASTANIVISATA
					Sumber Daya Air dan Eistrik	Listrik yang Disediakan		Kel/Desa	DALIKIT(I AD)	berbasis sumber daya alam	Penguatan Daya Saing			
						Listrik yang Diseulakan		ikely Desa		untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
				+										
1 1 3	3 2	26 01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah		1 Laporan	601.550.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Dinas Pariwisata	- 601.550.000,0	DINAS PARIWISATA
					Penunjang Urusan Pemerintahan	Barang Milik Daerah Penunjang				mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			
					Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah				berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
										untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
3	3 2	26 01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan	47 Unit	277.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Dinas Pariwisata	277.000.000,0	DINAS PARIWISATA
					Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Dinas atau Kendaraan Dinas		Tenggarong, Semua	DAERAH (PAD)	mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			
					Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jabatan yang Dipelihara dan		Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
					Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya				untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
3	3 2	26 01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas	9 Unit	175.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN ASLI	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Dinas Pariwisata	175.000.000,0	DINAS PARIWISATA
					Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Operasional atau Lapangan yang		Tenggarong, Semua	DAERAH (PAD)	mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan		,	
					Perizinan Kendaraan Dinas	Dipelihara dan dibayarkan Pajak		Kel/Desa	, ,	berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
					Operasional atau Lapangan	dan Perizinannya		1.04 = 2.02		untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
				1	asional and capangan					tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
				1	1	1				tarribari di dalam negeri.	Berkelanjutan			
.	2 2	26 01	2.09	0006	Damelikaraan Darelatan dan Masin	Lumiah Daralatan dan Masin	173 Unit	140 FEO 000 00 Keb Kutai Kartan agara	PENDAPATAN ASLI	Malaniukkan hilisiaasi dan	,	Dinas Pariwisata	140 550 000 0	DINAS PARIWISATA
1 1 5	ے _ا د	20 01	2.09	0000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin	1/3 UIIL	149.550.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Dirias FariWi5dld	149.550.000,01	DIIVAD FANIVVIDA IA
				1	Lainnya	Lainnya yang Dipelihara		Tenggarong, Semua	DAERAH (PAD)	mengembangkan industri				
1 1					ĺ			Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	 Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang 			
										untuk meningkatkan nilai				
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
L	_		1	<u> </u>							Berkelanjutan			
213	3 2	26 02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA	PRESEN TASI DTW YANG	68,09 Persen	15.720.243.168,00					- 13.830.000.000,00	DINAS PARIWISATA
					TARIK DESTINASI PARIWISATA	MEMENUHI AKSESBILITAS,								
L	_		1	<u> </u>		AMENITAS DAN ATRAKSI								
1 3	3 2	26 02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Jumlah daya tarik wisata yang -	0 Dokumen	7.125.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan	1. Membangun Sektor	Wisatawan		DINAS PARIWISATA
								7122310001000,00				** Data ** a	- 7.200.000.000,0	D. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
					Kabupaten/Kota	dikelola		7.1223100031000300		mengembangkan industri	Pendidikan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7.200.000.000,0	
					Kabupaten/Kota	dikelola		7.225000.000,00		mengembangkan industri berbasis sumber daya alam		Trisucarum.	7.200.000,000,0	
					Kabupaten/Kota	dikelola		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		mengembangkan industri	Pendidikan		7.200.000.000,0	
					Kabupaten/Kota	dikelola		7.123.003.000,00		mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Pendidikan 5. Penguatan Daya Saing		7.200.000,0	
					Kabupaten/Kota	dikelola		,		mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Pendidikan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang		7.200.000.000,0	
	3 2	26 02	2.01	0005			7 Lokasi		PENDAPATAN ASLI	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pendidikan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Wisatawan		DINAS PARIWISATA
:	3 2	26 02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan		5.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan	Pendidikan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor			
	3 2	26 02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan		5.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	Pendidikan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan			
:	3 2	26 02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan,		5.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Pendidikan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan 5. Penguatan Daya Saing			
	3 2	26 02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan,		5.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Pendidikan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang			
	3 2	26 02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan,		5.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Pendidikan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan			
					Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	7 Lokasi	5.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Pendidikan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang	Wisatawan	5.200.000.000,0	DINAS PARIWISATA
					Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Perencanaan dan Perancangan	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Dokumen Perancangan dan		5.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Pendidikan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan		5.200.000.000,0	
					Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya	7 Lokasi	5.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Pendidikan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	Wisatawan	5.200.000.000,0	DINAS PARIWISATA
					Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Perencanaan dan Perancangan	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan	7 Lokasi	5.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Pendidikan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	Wisatawan	5.200.000.000,0	DINAS PARIWISATA
					Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya	7 Lokasi	5.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Pendidikan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	Wisatawan	5.200.000.000,0	DINAS PARIWISATA
:	3 2	26 02	2.01	0009	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	7 Lokasi 2 Dokumen	5.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.925.000.000,00 -	DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Wisatawan Wisatawan	5.200.000.000,00 2.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA
:	3 2		2.01	0009	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan	7 Lokasi	5.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pendidikan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor	Wisatawan	5.200.000.000,00 2.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
:	3 2	26 02	2.01	0009	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan	7 Lokasi 2 Dokumen	5.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.925.000.000,00 -	DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	Pendidikan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan -	Wisatawan Wisatawan	5.200.000.000,00 2.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA
:	3 2	26 02	2.01	0009	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan	7 Lokasi 2 Dokumen	5.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.925.000.000,00 -	DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk sumberbasis sumber daya alam mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 1. Membangun Sektor Pendidikan 3. Pengembangan dan	Wisatawan Wisatawan	5.200.000.000,00 2.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA
:	3 2	26 02	2.01	0009	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan	7 Lokasi 2 Dokumen	5.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.925.000.000,00 -	DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di mengeri.	Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Penguatan Daya Saing Penguatan Daya Saing Longgul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Wisatawan Wisatawan	5.200.000.000,00 2.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA
:	3 2	26 02	2.01	0009	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan	7 Lokasi 2 Dokumen	5.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.925.000.000,00 -	DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk sumberbasis sumber daya alam mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Pendidikan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 1. Membangun Sektor Pendidikan 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi	Wisatawan Wisatawan	5.200.000.000,00 2.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA
:	3 2	26 02	2.01	0009	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan	7 Lokasi 2 Dokumen	5.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.925.000.000,00 -	DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di mengeri.	Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Penguatan Daya Saing Penguatan Daya Saing Longgul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Wisatawan Wisatawan	5.200.000.000,00 2.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA
:	3 2	26 02 26 02	2.01	0009	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	7 Lokasi 2 Dokumen 2 Dokumen	5.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.925.000.000,00 - 5.345.243.168,00	DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan A. Pengembangan dan Penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	Wisatawan Wisatawan Wisatawan	2.000.000.000,00 2.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA
:	3 2	26 02	2.01	0009	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Penetapan	7 Lokasi 2 Dokumen	5.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.925.000.000,00 - 5.345.243.168,00 75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan Melanjutkan hilirisasi dan	Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan Rengungun Sektor Pendidikan Rengungun Sektor Pendidikan Rengungungun Sektor Pendidikan Rengungungungungungungungungungungungungun	Wisatawan Wisatawan	2.000.000.000,00 2.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA
:	3 2	26 02 26 02	2.01	0009	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wistat Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	7 Lokasi 2 Dokumen 2 Dokumen	5.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.925.000.000,00 - 5.345.243.168,00 75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan,	DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri dambah di dalam negeri.	Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan	Wisatawan Wisatawan Wisatawan	2.000.000.000,00 2.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA
:	3 2	26 02 26 02	2.01	0009	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Penetapan	7 Lokasi 2 Dokumen 2 Dokumen	5.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.925.000.000,00 - 5.345.243.168,00 75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan Pengembangan dan Penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan 3. Pengembangan dan Penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan 3. Pengembangan dan	Wisatawan Wisatawan Wisatawan	2.000.000.000,00 2.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA
:	3 2	26 02 26 02	2.01	0009	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wistat Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	7 Lokasi 2 Dokumen 2 Dokumen	5.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.925.000.000,00 - 5.345.243.168,00 75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan,	DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Berniali tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 1. Membangun Sektor Pendidikan 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	Wisatawan Wisatawan Wisatawan	2.000.000.000,00 2.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA
:	3 2	26 02 26 02	2.01	0009	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wistat Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	7 Lokasi 2 Dokumen 2 Dokumen	5.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.925.000.000,00 - 5.345.243.168,00 75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan,	DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	Wisatawan Wisatawan Wisatawan	2.000.000.000,00 2.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA
:	3 2	26 02 26 02	2.01	0009	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wistat Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	7 Lokasi 2 Dokumen 2 Dokumen	5.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.925.000.000,00 - 5.345.243.168,00 75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan,	DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Berniali tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	Wisatawan Wisatawan Wisatawan	2.000.000.000,00 2.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA
:	3 2	26 02 26 02	2.01	0009	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wistat Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	7 Lokasi 2 Dokumen 2 Dokumen	5.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.925.000.000,00 - 5.345.243.168,00 75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan,	DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	Wisatawan Wisatawan Wisatawan	2.000.000.000,00 2.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA
:	33 2	26 02 26 02	2.02	0009	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wistat Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	7 Lokasi 2 Dokumen 2 Dokumen	5.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.925.000.000,00 - 5.345.243.168,00 75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 1. Membangun Sektor Pendidikan 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	Wisatawan Wisatawan Wisatawan	5.200.000.000,00 2.000.000.000,00 - 1.550.000.000,0	DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA
3	33 2	26 02 26 02 26 02	2.02	0009	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	7 Lokasi 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	5.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.925.000.000,00 - 5.345.243.168,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 5.270.243.168,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi	Wisatawan Wisatawan Wisatawan Wisatawan	5.200.000.000,00 2.000.000.000,00 - 1.550.000.000,0	DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA
	33 2	26 02 26 02 26 02	2.02	0009	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan - Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam	7 Lokasi 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	5.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.925.000.000,00 - 5.345.243.168,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan Pendidikan 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan 3. Membangun Sektor	Wisatawan Wisatawan Wisatawan Wisatawan	5.200.000.000,00 2.000.000.000,00 - 1.550.000.000,0	DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA
	33 2	26 02 26 02 26 02	2.02	0009	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wistat Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan - Tarik Wistat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan - Tarsedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	7 Lokasi 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	5.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.925.000.000,00 - 5.345.243.168,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 5.270.243.168,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 5.270.243.168,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing	Wisatawan Wisatawan Wisatawan Wisatawan	5.200.000.000,00 2.000.000.000,00 - 1.550.000.000,0	DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA
	33 2	26 02 26 02 26 02	2.02	0009	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan - Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam	7 Lokasi 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	5.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.925.000.000,00 - 5.345.243.168,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5.270.243.168,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kal-Desa Kab. Kutai Kartanegara, K	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan A. Pengembangan dan Penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan 3. Pengembangan dan Penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang	Wisatawan Wisatawan Wisatawan Wisatawan	5.200.000.000,00 2.000.000.000,00 - 1.550.000.000,0	DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA
3	33 2	26 02 26 02 26 02	2.02	0009	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wistat Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan - Tarik Wistat Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis	7 Lokasi 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	5.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.925.000.000,00 - 5.345.243.168,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5.270.243.168,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 1. Membangun Sektor Pendidikan 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan 3. Membangun Sektor Pendidikan 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi notensial yang terintegrasi dan berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	Wisatawan Wisatawan Wisatawan Wisatawan	5.200.000.000,00 2.000.000.000,00 - 1.550.000.000,0	DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA
3	33 2	26 02 26 02 26 02	2.02	0009	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wistat Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan - Tarik Wistat Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis	7 Lokasi 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	5.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.925.000.000,00 - 5.345.243.168,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5.270.243.168,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kal-Desa Kab. Kutai Kartanegara, K	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan A. Pengembangan dan Penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan 3. Pengembangan dan Penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang	Wisatawan Wisatawan Wisatawan Wisatawan	5.200.000.000,00 2.000.000.000,00 - 1.550.000.000,0	DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA
3	33 2	26 02 26 02 26 02	2.02	0009	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wistat Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan - Tarik Wistat Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis	7 Lokasi 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	5.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.925.000.000,00 - 5.345.243.168,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5.270.243.168,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 1. Membangun Sektor Pendidikan 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan 1. Membangun Sektor Pendidikan 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan 3. Membangun Sektor Pendidikan 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi notensial yang terintegrasi dan berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	Wisatawan Wisatawan Wisatawan Wisatawan	5.200.000.000,00 2.000.000.000,00 - 1.550.000.000,0	DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA



3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Dokumen Pengelolaan -		3 Dokumen	3.025.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Wisatawan	- 4.230.000.000,00	DINAS PARIWISATA
					Kabupaten/Kota	Destinasi Pariwisata					mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			
						Kabupaten/Kota					berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
											untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
											tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
												Berkelanjutan			
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilit	Jumlah Sarana dan Prasarana		4 Unit	2.350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN ASLI	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Wisatawan	3.225.000.000,00	DINAS PARIWISATA
					asi Sarana dan Prasarana dalam	Pengelolaan Destinasi Pariwisata			Tenggarong, Semua	DAERAH (PAD)	mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan		· ·	
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Kabupaten/Kota yang Tersedia dan			Kel/Desa	, ,	berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
					Kabupaten/Kota	Terpelihara					untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
					, ,	1 '					tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
												Berkelanjutan			
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam	Jumlah Laporan Hasil		10 Laporan	575.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN ASI I	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Wisatawan	430,000,000,00	DINAS PARIWISATA
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Pemberdayaan Masyarakat dalam			Tenggarong, Semua	DAERAH (PAD)	mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			
					Kabupaten/Kota	Pengelolaan Destinasi Pariwisata			Kel/Desa	, ,	berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Kabupaten/Kota			,		untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
											tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
												Berkelanjutan			
3	26	02	2.03	0010	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring		1 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	ΡΕΝΠΔΡΔΤΔΝ ΔSI I	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Wisatawan	100,000,000,00	DINAS PARIWISATA
	1 -0	02	2.03	0010	Pengelolaan Destinasi Pariwisata	dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi		Laporan	Tenggarong, Semua	DAERAH (PAD)	mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	Wisdawan	100.000.000,00	Silv is 17 il il visit in t
					Kabupaten/Kota	Pariwisata Kabupaten/Kota			Kel/Desa	Briefe (1718)	berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
					nabapatery nota	Turingula Rabapateriy Rota			nei Desa		untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
- 1			l	1]					tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan	İ		
]			 		tampan ur uaiam negeri.	Berkelanjutan	1		
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha	Jumlah Dokumen Penetapan -	+ +	3 Dokumen	225.000.000.00		Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Wisatawan	- 850 000 000 00	DINAS PARIWISATA
1	1 20	02	2.04		Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Tanda Daftar Usaha Pariwisata		3 Dokumen	223.000.000,00		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	wisatawan	330.000.000,00	DINASTANIVISATA
					Pariwisata Daeran Kabupaten, Kota										
	1			1		Daerah Kabupaten/Kota					berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang	1		
			l	1]					tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan	İ		
											tamban di dalam negeri.	Berkelanjutan			
3	26	02	2.04	0006	Pengawasan dan Pembinaan	lumlah usaha pariwisata yang tolah		30 Usaha	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DENIDADATAN ACI I	Melanjutkan hilirisasi dan	Membangun Ekonomi	Wisatawan	100,000,000,00	DINAS PARIWISATA
3	20	02	2.04	0006	Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan		Pariwisata		DAERAH (PAD)	mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	WisdldWdII	100.000.000,00	DINAS PARTIVISATA
					tersertifikasi CHSE (berdasarkan	diawasi		PdilWiSdld	Tenggarong, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)	berbasis sumber daya alam	Penguatan Daya Saing			
					Permenpar No 13 tahun 2020 dan	UldWdSI			Rel/ Desa						
											untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
					SNI 9042:2021) dalam						tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
					melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota							Berkelanjutan			
_									400.000.000.000						
3	26	02	2.04	8000	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021	Jumlah usaha pariwisata dan		5 Usaha	125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Melanjutkan hilirisasi dan	Membangun Sektor	Wisatawan	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
					(SNI CHSE) di Kabupaten Kota	ekonomi kreatif yang difasilitasi			Semua Kecamatan,	DAERAH (PAD)	mengembangkan industri	Pendidikan			
						sertifikasi SNI 9042:2021			Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
											untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
											tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
3												Berkelanjutan			
3	26	02	2.04	0009	Penyediaan Layanan Konsultasi	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi		25 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Melanjutkan hilirisasi dan	Membangun Ekonomi	Wisatawan	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
					Pendaftaran Perizinan Berusaha	Konsultasi Pendaftaran Perizinan			Tenggarong, Semua	DAERAH (PAD)	mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			
					Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di	Berusaha Sektor Pariwisata			Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
					Tingkat Kab/Kota	ditingkat Kab/Kota					untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
											tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
14 3	20	02		-	PROGRAM PEMASARAN	OKUPANSI -		35 Persen	6.575.000.000.00		-	berkelanjutan		1 125 000 000 00	DINAS PARIWISATA
14 3	20	US			PARIWISATA	OKUPANSI		35 Persen	6.575.000.000,00					- 1.125.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	03	2 01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan	Jumlah Dokumen emasaran -		4 Dokumen	6.575.000.000.00		Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Wisatawan	1 125 000 000 00	DINAS PARIWISATA
ا ا	20	33	2.01	1	Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi	Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		- Dokumen	0.57 5.000.000,000		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelaniutan	···isatavvall	1.125.000.000,00	Z.ITO I DILIVIDATA
			l	1	dan Kawasan Strategis Pariwisata	Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan					berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing	İ		
	1			1		Strategis Pariwisata			 		untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang	1		
							i l	1		1	untuk meningkatkan nilal		İ		1
					Kabupaten/Kota						tambah di dalam nagari	Unagul Pornilai tambah dan			
					Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota					tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
9	26	03	2.01	0005		Kabupaten/Kota		2 Dokumen	250 000 000 00 Kab Kutai Kastanasaa	DENIDADATAN ASI I		Berkelanjutan	Wisatawan	250,000,000,00	DINAS PARIMISATA
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran	Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan		2 Dokumen	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Melanjutkan hilirisasi dan	Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi	Wisatawan	250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata	Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran		2 Dokumen	Tenggarong, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Wisatawan	250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan	Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata		2 Dokumen			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing	Wisatawan	250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata	Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan		2 Dokumen	Tenggarong, Semua		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang	Wisatawan	250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan	Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata		2 Dokumen	Tenggarong, Semua		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	Wisatawan	250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
					Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			Tenggarong, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
		03		0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Peningkatan Kerja Sama dan	Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan		2 Dokumen 4 Dokumen	Tenggarong, Semua Kel/Desa 600.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara,	DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan	Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi	Wisatawan		DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA
					Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan	Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan			Tenggarong, Semua Kel/Desa 600.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan			
					Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Peningkatan Kerja Sama dan	Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan			Tenggarong, Semua Kel/Desa 600.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara,	DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilal tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing			
					Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan	Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan			Tenggarong, Semua Kel/Desa 600.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 6. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang			
					Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan	Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan			Tenggarong, Semua Kel/Desa 600.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan			
3	26	03	2.01	0004	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		4 Dokumen	Tenggarong, Semua Kel/Desa 600.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Wisatawan	400.000,000	DINAS PARIWISATA
	26	03			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			Tenggarong, Semua Kel/Desa 600.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa 4.625.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kel/Desa	DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan	Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi		400.000,000	
3	26	03	2.01	0004	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar	Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar		4 Dokumen	Tenggarong, Semua Kel/Desa 600.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa 4.625.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 1. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Wisatawan	400.000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	03	2.01	0004	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		4 Dokumen	Tenggarong, Semua Kel/Desa 600.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa 4.625.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kel/Desa	DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam berbasis sumber daya alam	Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing	Wisatawan	400.000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	03	2.01	0004	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar	Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar		4 Dokumen	Tenggarong, Semua Kel/Desa 600.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa 4.625.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai untuk meningkatkan nilai	Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang	Wisatawan	400.000,000	DINAS PARIWISATA
3	26	03	2.01	0004	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar	Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar		4 Dokumen	Tenggarong, Semua Kel/Desa 600.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa 4.625.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam berbasis sumber daya alam	Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing	Wisatawan	400.000,000	DINAS PARIWISATA



	3 2	26 03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	16 Promosi	1.100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Wisatawan	350.000.000,00	DINAS PARIWISATA
215	3 2	26 04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pelaku Ekonomi Kreatif yang - terfasilitasi	7 Persen	13.650.000.000,00			perkelanjutan		- 4.300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3 2	26 04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen PPenyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4.750.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Pelaku Ekraf	- 750.000.000,00	DINAS PARIWISATA
		26 04			Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	5 Unit	4.750.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Pelaku Ekraf		DINAS PARIWISATA
		26 04			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Ekosistem Ekonomi Kreatif	3 Dokumen	8.900.000,000		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Pelaku Ekraf		DINAS PARIWISATA
	3 2	26 04	2.02	0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Laporan	100.000.000,00 Kab, Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Pelaku Ekraf	250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3 2	26 04	2.02	0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	1 Kegiatan	200.000.000,00 Kab, Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Pelaku Ekraf	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3 2	26 04	2.02	0015	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	6 Dokumen	8.600.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Pelaku Ekraf	3,000,000,000,00	DINAS PARIWISATA
216	3 2	26 05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PERTUMBUHAN PELAKU EKRAF -	7 Persen	3.000.000,000					- 5.920.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3 2	26 05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	5 Dokumen	2.050.000,000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Pelaku Ekraf	- 4.200,000,000,00	DINAS PARIWISATA
	3 2	26 05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	500.000,000,00 Kab, Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Pelaku Ekraf		DINAS PARIWISATA
		26 05			Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100 Orang	750.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Pelaku Ekraf		DINAS PARIWISATA
	3 2	26 05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	50 Orang	250.000.000,00 Kab, Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Pelaku Ekraf	500.000,000,00	DINAS PARIWISATA



15,008.487,666,00 143,098,669,87,00 143,																
Part Part	3	3 2	26 05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi	Jumlah Orang yang Mengikuti		50 Orang	500.000.000.00 Kab. Kutai Kartanegara.	PENDAPATAN ASI I	Melaniutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Pelaku Ekraf	1,000,000,000,00	DINAS PARIWISATA
Part																
										1.04, 2.00						
Page Page																
Page Page	3	3 2	26 05	2.01	0011	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring		1 Laporan	50.000.000.00 Kab. Kutai Kartanegara.	PENDAPATAN ASI I	Melanjutkan hilirisasi dan	Membangun Ekonomi	Pelaku Ekraf	200,000,000,00	DINAS PARIWISATA
		Ĭ .	20 03	2.01	0011				2 caparan		DAFRAH (PAD)			T CIONA ENTAI	200.000.000,00	Silv S 17titti Stirt
Control of Control o											DALIGHT (FAD)					
						i ariwisata dan Ekonomi ki catii				ikely best						
							EKOHOHI KI CALII									
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2												tamban di dalam negeri.				
Part	-	2 -	26 05	2.02	-	D	Ludah Balanca Baranaharan		4 Delumen	050 000 000 00		Ad-landahan bilintari dan	,	Delalus Floref	1 730 000 000 00	DINIAC DADIMICATA
	,	" ["	20 03	2.02					4 Dokumen	950.000.000,00				relaku Eki ai	1.720.000.000,00	DINAS FARIWISATA
						EKOIOIII KI EALII	Kapasitas Felaku Ekolollii Kreatii									
Part Part																
A												tamban di dalam negeri.				
Part	2	2 -	26 05	2.02	0001	Deletiken Disebingen Teknis den	Iumlah Orang yang Mangilusti	+ + +	40 Orona	350 000 000 00 Kah Kutai Kartan agara	DENIDADA TANI ACI I	Malaniutkan hilisisasi dan		Doloku Eksef	F00 000 000 00	DINIAC DADIBAJICATA
Part	3	3 4	26 05	2.02	0001				40 Orang					Pelaku Ekraf	500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
						Pendampingan Ekonomi Kreatif					DAERAH (PAD)					
No. No.				1			Pendampingan Ekonomi Kreatif			Kel/Desa						
				1		1		1 1		1				1		
1				1		1				1		tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
Part		_		1										l		
A	3	3 2	26 05	2.02	0002]	1 Laporan					Pelaku Ekraf	320.000.000,00	DINAS PARIWISATA
				1				1 1			DAERAH (PAD)			1		
No. No.				1		Usaha		1 1		Kel/Desa				1		
				1			Usaha					untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
A												tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
March Marc													Berkelanjutan			
A	3	3 2	26 05	2.02	0006	Pelatihan Asesor	Jumlah Orang yang Mengikuti		40 Orang	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN ASLI	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Pelaku Ekraf	400.000.000,00	DINAS PARIWISATA
No. No. No						Kompetensi/Workplace Assesor	Pelatihan Asesor			Tenggarong, Semua	DAERAH (PAD)	mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			
Wind Wind						(WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Kompetensi/Workplace Assesor					berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
Math Math							(WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif						Ekonomi Daerah yang			
No. No.							, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,									
Professional Professional Communication P																
Profes Subsector Claimann Recognition and Profession Subsector Claimann Recognition and Profession Subsector Claimann Recognition and Profession Subsector Claimann Recognition and Profession Subsector Claimann Recognition and Profession Subsector Claimann Recognition and Profession Subsector Claimann Recognit	3	3 2	26 05	2.02	0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi	Jumlah Orang yang difasilitasi		50 Orang	250,000,000,00 Kab Kutai Kartanegara	ΡΕΝΠΔΡΔΤΔΝ ΔSI I	Melanjutkan hilirisasi dan	3 Membangun Ekonomi	Pelaku Ekraf	500,000,000,00	DINAS PARIWISATA
Exones Real Exones		· ·														
						Troiesi Subsektoi Ekonomi kireatii					DALIMIT(I AD)					
							Ekonomi ki eatii			Kely Desa						
Principle Prin																
1																
S S C USUSAN PENERNTAHAN PULHAN 159.006.487.666,00 148.089.669.276 148												tamban di dalam negeri.				
S S V V V V V V V V						Dinas Pertanian dan Peternakan				159.008.487.666.00		tamban di dalam negeri.			143.089.669.847.00	DINAS PERTANIAN DAN
S S V V V V V V V V	3					Dinas Pertanian dan Peternakan				159.008.487.666,00		tamban di dalam negeri.			143.089.669.847,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
No. No.		3										tamban di dalam negeri.				PETERNAKAN
27 28 27 01 2.01 PERCENTATIVANDA ERRAN Pertandan dan Pertenakan Perandak Daerah Pertandan Perandah Dalam Pertandan Perandah Dalam Pertandah dan Pertandah	3	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						tamban di dalam negeri.			143.089.669.847,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PETENTAMEN DARRAM Pertanian dan Peternakan Petranian dan Peternakan Petranian dan Peternakan Petranian dan Peternakan Petranian dan Peternakan Petranian dan Peternakan Petranian dan Peternakan Petranian dan Peternakan Pertanian dan Peternakan Petranian dan Peternakan Petranian dan Peternakan Petranian dan Peternakan Petranian dan Peternakan Petranian dan Peternakan Petranian dan Peternakan Petranian dan Peternakan Peranjakat Daerah Peranjakat D			27			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	PERTANIAN			159.008.487.666,00		tamban di dalam negeri.			143.089.669.847,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN
S V V V V V V V V V		3 2				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I				159.008.487.666,00 159.008.487.666,00		tamban di dalam negeri.			143.089.669.847,00 143.089.669.847,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3 27 01 2.01 Persencanan, Perganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penguatan para kelajatan nalau nutuk mengengkatan nalau nutu	217 3	3 2				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas -		68 Nilai	159.008.487.666,00 159.008.487.666,00		tamban ai dalam negeri.			143.089.669.847,00 143.089.669.847,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN
PETER Valuation	217 3	3 2				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas -		68 Nilai	159.008.487.666,00 159.008.487.666,00		tamoan di dalam negeri.			143.089.669.847,00 143.089.669.847,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Perangkat Daerah Pendukung Statistik Sektoral Daerah Pendukung S		3 2	27 01			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas - Pertanian dan Peternakan			159.008.487.666,00 159.008.487.666,00 70.652.087.666,00			Berkelanjutan		143.089.669.847,00 143.089.669.847,00 99.353.669.847,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
untuk meningkatan nilai tanbah dialam negeri. 3 27 01 201 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Dae		3 2	27 01			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas - Pertanian dan Peternakan - Jumlah Dokumen Perencanaan, -			159.008.487.666,00 159.008.487.666,00 70.652.087.666,00		Melanjutkan hilirisasi dan	Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi		143.089.669.847,00 143.089.669.847,00 99.353.669.847,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN
Solution Company Com		3 2	27 01			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi			159.008.487.666,00 159.008.487.666,00 70.652.087.666,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan		143.089.669.847,00 143.089.669.847,00 99.353.669.847,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Berkelanjutan 3 27 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 27 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 27 01 2.01 0008 Penyusunan Dokumen Perencanaan 3 27 01 2.01 0008 Penyusunan Dokumen Perencanaan 4 2 Dokumen 5 Dok		3 2	27 01			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi			159.008.487.666,00 159.008.487.666,00 70.652.087.666,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing		143.089.669.847,00 143.089.669.847,00 99.353.669.847,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN
2 Dokumen 150,000,000,00 Kab. Kutai Kartanegara, DaNa BAGi HASIL (DBH) Perangkat Daerah Pendukung Statistik Sektoral Daerah Pendukung St		3 2	27 01			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi			159.008.487.666,00 159.008.487.666,00 70.652.087.666,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang		143.089.669.847,00 143.089.669.847,00 99.353.669.847,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN
Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3 2	27 01			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi			159.008.487.666,00 159.008.487.666,00 70.652.087.666,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan		143.089.669.847,00 143.089.669.847,00 99.353.669.847,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN
Semua Kel/Desa berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 3 27 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3 2 3 3	27 01 27 01	2.01		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		9 Dokumen	159.008.487.666,00 159.008.487.666,00 70.652.087.666,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Kartanegara	143.089.669.847,00 143.089.669.847,00 99.353.669.847,00 800.000.000,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 1 201 Varia Vari	3	3 2 3 3	27 01 27 01	2.01		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		9 Dokumen	159.008.487.666,00 159.008.487.666,00 70.652.087.666,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi	Kartanegara	143.089.669.847,00 143.089.669.847,00 99.353.669.847,00 800.000.000,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN
tambah di dalam negeri. Semus Kecamatan, Semus Kecamatan, Semus Kel/Desa Dana BaGi HASIL (DBH) Dehasis sumber daya alam untuk menipkatkan nilai Tokumen Dana BaGi HASIL (DBH) Dana Berkelanjutan Dana BaGi HASIL (DBH) Dehasis sumber daya alam untuk menipkatkan nilai Dana Berkelanjutan Dana BaGi HASIL (DBH) Dehasis sumber daya alam untuk menipkatkan nilai Dana Berkelanjutan Dana BaGi HASIL (DBH) Dana Barik Sumber daya alam untuk menipkatkan nilai Dana Berkelanjutan Dana Barik Sektoral Daerah Dana Barik Sumber daya alam untuk menipkatkan nilai Dana Berkelanjutan Dana Barik Sektoral Daerah Dana Barik Sektoral Daerah Dana Barik Sektoral Daerah Dana Barik Sektoral Daerah Dana Berkelanjutan Dana Barik Sektoral Daerah Dana Barik Sektoral Daerah Dana Barik Sektoral Daerah Dana Barik Sektoral Daerah Dana Berkelanjutan Dana Barik Sektoral Daerah Dana Barik Barik Dana Berkelanjutan Dana Barik Barik Dana Berkelanjutan Dana Barik Barik Dana Barik Barik Dana Berkelanjutan Dana Barik Barik Dana Barik Barik Dana Barik Barik Dana Berkelanjutan Dana Barik Barik Dana Barik Barik Dana Barik Barik Dana Barik Barik Dana Barik Barik Dana Barik Barik Dana Barik Barik Dana Barik Barik Dana Barik Barik Dana Barik Barik Dana Barik Barik Dana Barik Barik Dana Bar	3	3 2 3 3	27 01 27 01	2.01		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan		9 Dokumen	159.008.487.666,00 159.008.487.666,00 70.652.087.666,00 550.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi	Kartanegara Aparatur Kab. Kutai	143.089.669.847,00 143.089.669.847,00 99.353.669.847,00 800.000.000,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
tambah di dalam negeri. Semus Kecamatan, Semus Kecamatan, Semus Kel/Desa Dana BaGi HASIL (DBH) Dehasis sumber daya alam untuk menipkatkan nilai Tokumen Dana BaGi HASIL (DBH) Dana Berkelanjutan Dana BaGi HASIL (DBH) Dehasis sumber daya alam untuk menipkatkan nilai Dana Berkelanjutan Dana BaGi HASIL (DBH) Dehasis sumber daya alam untuk menipkatkan nilai Dana Berkelanjutan Dana BaGi HASIL (DBH) Dana Barik Sumber daya alam untuk menipkatkan nilai Dana Berkelanjutan Dana Barik Sektoral Daerah Dana Barik Sumber daya alam untuk menipkatkan nilai Dana Berkelanjutan Dana Barik Sektoral Daerah Dana Barik Sektoral Daerah Dana Barik Sektoral Daerah Dana Barik Sektoral Daerah Dana Berkelanjutan Dana Barik Sektoral Daerah Dana Barik Sektoral Daerah Dana Barik Sektoral Daerah Dana Barik Sektoral Daerah Dana Berkelanjutan Dana Barik Sektoral Daerah Dana Barik Barik Dana Berkelanjutan Dana Barik Barik Dana Berkelanjutan Dana Barik Barik Dana Barik Barik Dana Berkelanjutan Dana Barik Barik Dana Barik Barik Dana Barik Barik Dana Berkelanjutan Dana Barik Barik Dana Barik Barik Dana Barik Barik Dana Barik Barik Dana Barik Barik Dana Barik Barik Dana Barik Barik Dana Barik Barik Dana Barik Barik Dana Barik Barik Dana Barik Barik Dana Barik Barik Dana Bar	3	3 2 3 3	27 01 27 01	2.01		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan		9 Dokumen	159.008.487.666,00 159.008.487.666,00 70.652.087.666,00 550.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Kartanegara Aparatur Kab. Kutai	143.089.669.847,00 143.089.669.847,00 99.353.669.847,00 800.000.000,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN
Berkelanjutan 3 27 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 27 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Pendukung Statistik Sektora	3	3 2 3 3	27 01 27 01	2.01		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan		9 Dokumen	159.008.487.666,00 159.008.487.666,00 70.652.087.666,00 550.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing	Kartanegara Aparatur Kab. Kutai	143.089.669.847,00 143.089.669.847,00 99.353.669.847,00 800.000.000,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN
Perangkat Daerah Perangkat Da	3	3 2 3 3	27 01 27 01	2.01		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan		9 Dokumen	159.008.487.666,00 159.008.487.666,00 70.652.087.666,00 550.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilal tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilal	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang	Kartanegara Aparatur Kab. Kutai	143.089.669.847,00 143.089.669.847,00 99.353.669.847,00 800.000.000,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN
Perangkat Daerah Perangkat Da	3	3 2 3 3	27 01 27 01	2.01		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan		9 Dokumen	159.008.487.666,00 159.008.487.666,00 70.652.087.666,00 550.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilal tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilal	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	Kartanegara Aparatur Kab. Kutai	143.089.669.847,00 143.089.669.847,00 99.353.669.847,00 800.000.000,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN
Semua Kel/Desa berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 3 27 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Pend	3	3 2 3 3 3 3	27 01 27 01 27 01	2.01	0001	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9 Dokumen 2 Dokumen	159.008.487.666,00 159.008.487.666,00 70.652.087.666,00 550.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Kartanegara Aparatur Kab. Kutai Kartanegara	143.089.669.847,00 143.089.669.847,00 99.353.669.847,00 800.000.000,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 2	3	3 2 3 3 3 3	27 01 27 01 27 01	2.01	0001	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja		9 Dokumen 2 Dokumen	159.008.487.666,00 159.008.487.666,00 70.652.087.666,00 550.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkar industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkar industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara Aparatur Kab. Kutai	143.089.669.847,00 143.089.669.847,00 99.353.669.847,00 800.000.000,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
tambah di dalam negeri. 3 27 01 2.01 008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	3	3 2 3 3 3 3	27 01 27 01 27 01	2.01	0001	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja		9 Dokumen 2 Dokumen	159.008.487.666,00 159.008.487.666,00 70.652.087.666,00 550.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara Aparatur Kab. Kutai	143.089.669.847,00 143.089.669.847,00 99.353.669.847,00 800.000.000,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN
a value of the control of the contro	3	3 2 3 3 3 3	27 01 27 01 27 01	2.01	0001	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja		9 Dokumen 2 Dokumen	159.008.487.666,00 159.008.487.666,00 70.652.087.666,00 550.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara Aparatur Kab. Kutai	143.089.669.847,00 143.089.669.847,00 99.353.669.847,00 800.000.000,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN
3 27 01 2.01 008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Pendukung Statistik Sekt	3	3 2 3 3 3 3	27 01 27 01 27 01	2.01	0001	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja		9 Dokumen 2 Dokumen	159.008.487.666,00 159.008.487.666,00 70.652.087.666,00 550.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara Aparatur Kab. Kutai	143.089.669.847,00 143.089.669.847,00 99.353.669.847,00 800.000.000,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN
Pendukung Statistik Sektoral Daerah Pendukung Statistik Sektoral D	3	3 2 3 3 3 3	27 01 27 01 27 01	2.01	0001	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja		9 Dokumen 2 Dokumen	159.008.487.666,00 159.008.487.666,00 70.652.087.666,00 550.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara Aparatur Kab. Kutai	143.089.669.847,00 143.089.669.847,00 99.353.669.847,00 800.000.000,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN DAN
Pendukung Statistik Sektoral Daerah Semua Kel/Desa berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai dan penerapan digitalisasi	3	3 2 3 3 2 3 3 3 2	27 01 27 01 27 01 27 01	2.01	0001	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9 Dokumen 2 Dokumen 3 Laporan	159.008.487.666,00 159.008.487.666,00 70.652.087.666,00 550.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara Aparatur Kab. Kutai Kartanegara Aparatur Kab. Kutai Kartanegara	143.089.669.847,00 143.089.669.847,00 99.353.669.847,00 800.000.000,00 300.000.000,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
untuk meningkatkan nilai dan penerapan digitalisasi	3	3 2 3 3 2 3 3 3 2	27 01 27 01 27 01 27 01	2.01	0001	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil		9 Dokumen 2 Dokumen 3 Laporan	159.008.487.666,00 159.008.487.666,00 70.652.087.666,00 550.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara Aparatur Kab. Kutai Kartanegara Aparatur Kab. Kutai Kartanegara Aparatur Kab. Kutai	143.089.669.847,00 143.089.669.847,00 99.353.669.847,00 800.000.000,00 300.000.000,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	3 2 3 3 2 3 3 3 2	27 01 27 01 27 01 27 01	2.01	0001	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata		9 Dokumen 2 Dokumen 3 Laporan	159.008.487.666,00 159.008.487.666,00 70.652.087.666,00 550.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara Aparatur Kab. Kutai Kartanegara Aparatur Kab. Kutai Kartanegara Aparatur Kab. Kutai	143.089.669.847,00 143.089.669.847,00 99.353.669.847,00 800.000.000,00 300.000.000,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
tambah di dalam negeri. pelayanan publik	3	3 2 3 3 2 3 3 3 2	27 01 27 01 27 01 27 01	2.01	0001	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata		9 Dokumen 2 Dokumen 3 Laporan	159.008.487.666,00 159.008.487.666,00 70.652.087.666,00 550.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam berbasis sumber daya alam berbasis sumber daya alam berbasis sumber daya alam berbasis sumber daya alam	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan infrastruktur	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara Aparatur Kab. Kutai Kartanegara Aparatur Kab. Kutai Kartanegara Aparatur Kab. Kutai	143.089.669.847,00 143.089.669.847,00 99.353.669.847,00 800.000.000,00 300.000.000,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	3 2 3 3 2 3 3 3 2	27 01 27 01 27 01 27 01	2.01	0001	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata		9 Dokumen 2 Dokumen 3 Laporan	159.008.487.666,00 159.008.487.666,00 70.652.087.666,00 550.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai turtuk meningkatkan nilai	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara Aparatur Kab. Kutai Kartanegara Aparatur Kab. Kutai Kartanegara Aparatur Kab. Kutai	143.089.669.847,00 143.089.669.847,00 99.353.669.847,00 800.000.000,00 300.000.000,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3	3 2 3 3 2 3 3 3 2	27 01 27 01 27 01 27 01	2.01	0001	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata		9 Dokumen 2 Dokumen 3 Laporan	159.008.487.666,00 159.008.487.666,00 70.652.087.666,00 550.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai turtuk meningkatkan nilai	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara Aparatur Kab. Kutai Kartanegara Aparatur Kab. Kutai Kartanegara Aparatur Kab. Kutai	143.089.669.847,00 143.089.669.847,00 99.353.669.847,00 800.000.000,00 300.000.000,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN



3	27	01 2.01	1 0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan		1 Data	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara	200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
					dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
3	27	01 2.01	1 0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan		1 Berita Acara	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
				yang Diampu dalam Rangka	Bidang Urusan yang Diampu dalam			Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	Penguatan infrastruktur	Kai ta negai a		FETERIVARAN
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	dan penerapan digitalisasi pelayanan publik			
				rei alignat Daelali	refericariaan refangkat Daeran					tamban di dalam negeri.	регауапап ривпк			
3	27	01 2.02	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang	-	14 Laporan	66.828.686.368,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara	- 92.289.571.669,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
				Ducian	Akuntabel					berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing	rai tanegara		FEILINGIA
										untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan			
										tamban di dalam negeri.	Berkelanjutan			
3	27	01 2.02	2 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		7672 Orang/bulan	66.086.686.368,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara	91.449.571.669,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
					uan runjangan Asiv		Orang/bulan	Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	Penguatan Daya Saing	Kar tariegara		PETERINANAN
										untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
3	27	01 2.02	2 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan		12 Dokumen	580.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	Membangun Ekonomi	Aparatur Kab. Kutai	580.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN
				Pengujian/Verifikasi Keuangan	dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing	Kartanegara		PETERNAKAN
				SKPD						untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
3	27	01 2.02	2 0007		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/		1 Laporan	162.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Aparatur Kab. Kutai	260.000.000,00	
				Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing	Kartanegara		PETERNAKAN
					Laporan Keuangan					untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
											·			
3	27	01 2.03	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat	-	1 Dokumen	125.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara	- 200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
					Daerah					berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
										untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
3	27	01 2.03	3 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
								Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
										untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan			
										_	Berkelanjutan			
3	27	01 2.03	3 0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil		1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan.	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
					Koordinasi Penilaian Barang Milik			Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
					Daerah SKPD					untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan			
										_	Berkelanjutan			
3	27	01 2.03	3 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik		1 Laporan	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
				SKPD	Daerah pada SKPD			Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
										untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan			
												1		1
										_	Berkelanjutan			
3	27	01 2.04	4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan	-	1 Dokumen	20.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Aparatur Kab. Kutai	- 20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3	27	01 2.04	4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	1 Dokumen	20.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara	- 20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3	27	01 2.04	4		Pendapatan Daerah Kewenangan		1 Dokumen	20.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang		- 20.000.000,00	
				Kewenangan Perangkat Daerah	Pendapatan Daerah Kewenangan	-	1 Dokumen	·		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing	Kartanegara		PETERNAKAN
		01 2.04		Kewenangan Perangkat Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi	Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan	-	1 Dokumen	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan Membangun Ekonomi	Kartanegara Aparatur Kab. Kutai		PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN
				Kewenangan Perangkat Daerah	Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			·	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing	Kartanegara		PETERNAKAN
				Kewenangan Perangkat Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi	Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan			20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Kartanegara Aparatur Kab. Kutai		PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN



- 1 -	1		2.0-	1	T	1	 12 D-1	454 224 000 00	1	1	Ta	1	200	I
3	27	7 01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi - Kepegawaian	3 Dokumen	151.231.000,00			Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara	- 308.471.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3	27	7 01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	481 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara	51.740.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3	27	7 01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	110.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara	240.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3	27	7 01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	15 Orang	16.231.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara	16.231.000,00	PETERNAKAN
3	27	7 01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Layanan	627.076.700,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara	- 1.495.551.700,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3	27	7 01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	47.076.700,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara	47.076.700,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3	27	7 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara	260.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3	27	7 01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara	49.475.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3	27	7 01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara	550.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3	27	7 01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	650 Dokumen	100.000.000,00 Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara		DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3	27	7 01			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.223.311.598,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara		DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3	27	7 01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	500.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara	895.905.400,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN



3	3 2	27 01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	723.311.598,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara	723.311.598,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3	3 2	27 01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah -	364 Unit	1.126.782.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara	- 1.532.676.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3	3 2	27 01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	278.212.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara	139.106.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3	3 2	27 01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	250 Unit	698.570.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara	698.570.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3	3 2	27 01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 Unit	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Aparatur Kab. Kutai Kartanegara	200.000,000	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
218 3	3 2	27 02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Populasi Ternak Unggas Peningkatan Populasi Ternak Kecil Luas Tanam Jagung Luas Tanam Hortikultura Peningkatan Populasi Ternak Besar Luas Tanam Padi Luas Tanam Padi Luas Tanam Palawija	18009000 Ekor 19375 Ekor 30000 Hektar (Ha) 30200,81 Hektar (Ha) 37988 Ekor 42576,6 Hektar (Ha) 65 Hektar (Ha)	52.492.400.000,00					- 6.575.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3	3 2	27 02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Unit Sarana Pertanian yang - Dimanfaatkan	11034 Unit	41.057.400.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara	3.450.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		27 02			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara		DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		27 02			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	8 Laporan	40.907.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara		DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3	3 2	27 02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benil/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengendalian dan - pengawasan	2 Data Pengawasan	105.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara	- 220.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3	3 2	27 02	2.05	0002	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	2 Dokumen	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara	55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN



3	27	7 02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan		2 Laporan	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara	55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3	27	7 02	2.05	0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat		1 Laporan	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara	55,000,000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3	27	7 02	2.05	0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar		1 Laporan	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara	55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3	27	7 02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Benih/Bibit Ternak Tersedianya Hijauan Pakan ternak		362 Ekor 15000 Stek/Pols	11.330.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara	- 2.905.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3	27	7 02	2.06	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		1 Ton	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3	27	7 02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain		3029 Ekor	11.230.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara	2.805.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
219 3	27	7 03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Panjang Jalan Usaha Tani Yang Dibangun Jumlah Embung Pertanian Yang Dibangun	-	10500 Meter 19 Unit	23.805.000.000,00					- 26.261.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3	27	7 03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan		1 Dokumen	350.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara	- 800.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3	27	7 03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		2 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara	200,000,000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3	27	7 03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola		1 Dokumen	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara	600,000,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3	27				Pembangunan Prasarana Pertanian	dibangun		139 Unit	23.455.000.000,00		-	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	-		DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3	27	7 03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		10 Unit	5.500.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	-	4.611.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN



	3 2	7 03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		0 Unit	3.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	10.900.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
									Semua Kel/Desa			5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan			
	3 2	7 03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan	Jumlah Balai Penyuluh di		1 Unit	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	_	Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi	-	400 000 000 00	DINAS PERTANIAN DAN
	" "	, 05	2.02	0000	Pemeliharaan Balai Penyuluh di	Kecamatan serta Sarana		1 One	Semua Kecamatan,	DANA BAGTTASIE (DBT)		Inklusif dan Berkelanjutan		400.000.000,00	PETERNAKAN
					Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			Semua Kel/Desa			 Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang 			
					Pendukungnya	Direnabilitasi dan Dipelinara						Unggul, Bernilai tambah dan			
												Berkelanjutan			
	3 2	7 03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun,		6 Unit	1.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	=	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	=	750.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
					Lainnya	Direhabilitasi dan Dipelihara			Semua Kel/Desa			Penguatan Daya Saing			I E I ERRANAIN
												Ekonomi Daerah yang			
												Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
	3 2	7 03	2.02	0010		Jumlah jaringan irigasi usaha tani		17 Unit	12.855.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	=	3. Membangun Ekonomi	=	6.900.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN
					Jaringan Irigasi Usaha Tani	yang direhabilitasi			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing			PETERNAKAN
									Selliua Kely Desa			Ekonomi Daerah yang			
												Unggul, Bernilai tambah dan			
	3 2	7 03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi,	Jumlah rumah potong hewan yang		1 Unit	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	_	Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi		200 000 000 00	DINAS PERTANIAN DAN
	J 2	, 05	2.02	0013	Pemeliharaan dan operasionalisasi	dibangun, direhabilitasi dan		1 Onit	Semua Kecamatan,	DANA BAGTTASIE (DBT)		Inklusif dan Berkelanjutan		200.000.000,00	PETERNAKAN
					Rumah Potong Hewan	dipelihara serta beroperasi			Semua Kel/Desa			5. Penguatan Daya Saing			
												Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan			
												Berkelanjutan			
220	3 2	7 04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN	Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	-	5 Jenis 97 Persen	505.000.000,00				-	700.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
					KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Derajat Kesehatan		37 Feiseii							FETERIVARAIN
					VETERINER	Ternak									
	3 2	7 04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan	-	100 Persen	175.000.000,00		-	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
					Wabah Penyakit Hewan Menular	menular						5. Penguatan Daya Saing			
					Dalam daerah Kabupaten/Kota							Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan			
												Berkelanjutan			
	3 2	7 04	2.01	0003		Jumlah Daerah Terdampak Wabah		1 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
					Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	yang Terkendali			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			5. Penguatan Daya Saing			PETERNAKAN
												Ekonomi Daerah yang			
												Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
	3 2	7 04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit	Jumlah wilayah yang dilakukan		20 Wilayah	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Membangun Ekonomi	-	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN
					Hewan dan Zoonosis pada Hewan	surveilans dan zoonosis pada			Semua Kecamatan,			Inklusif dan Berkelanjutan			PETERNAKAN
						Hewan			Semua Kel/Desa			Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang			
												Unggul, Bernilai tambah dan			
	2 2	7 04	2.01	0000	Domhorantasan Domyakit Howan	lumlah wilayah atau kawasan yang		1 Janoran	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		Berkelanjutan		50,000,000,00	DINAS PERTANIAN DAN
	3 2	/ 04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus		1 Laporan	Semua Kecamatan,	DAINA BAUI HASIL (DBH)	-	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	[-	50.000.000,00	PETERNAKAN
					(satu) Daerah Kabupaten/Kota	penyakit hewan menular dan			Semua Kel/Desa		1	5. Penguatan Daya Saing			
						zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota						Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan			
						Kabapatery kota						Berkelanjutan			
	3 2	7 04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa	Jumlah pelayanan Jasa	-	2 Jenis	230.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Masyarakat /	300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
					Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah	Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner					mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing	Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara		PETERNAKAN
					Kabupaten/Kota						untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
											tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
	3 2	7 04	2.03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa	Jumlah Pelayanan Jasa		1 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	Membangun Ekonomi	Masyarakat /	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN
			1		Laboratorium	Laboratorium			Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	Kelompok Masyarakat		PETERNAKAN
							1 1		Semua Kel/Desa	1	berbasis sumber daya alam	Penguatan Daya Saing	Kab. Kutai Kartanegara		1
									Sellida Kel/ Desa						
									Seniua key besa		untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			



3 27 04 2.0 3 27 04 2.0 3 27 04 2.0 3 27 05 2.0 3 27 05 2.0	2.04	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Penerapan dan Pengawasan Teknis Kesmavet Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana Pertanian Luas Pengendalian OPT Pertanian		3 Jenis 30 Laporan 7 Unit Usaha 95 Persen	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Membangun Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Nenguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan Nenguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara	150.000.000,00 75.000.000,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3 27 04 2.0 3 27 04 2.0 221 3 27 05 3 27 05 2.0 3 27 05 2.0	2.04	0002	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PERTANIAN PERTANIAN PERGENDALIAN DAN PERTANIAN PERGENDALIAN DAN PERGENDALIAN DAN PERGENDALIAN DAN PERGULANGAN BENCANA PERGENDALIAN DAN PERGENDALIAN	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Teknis Kesmavet Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		3 Jenis 30 Laporan 7 Unit Usaha 95 Persen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara	75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3 27 04 2.0 3 27 04 2.0 221 3 27 05 3 27 05 2.0 3 27 05 2.0	2.04	0002	Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PERTANIAN PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		30 Laporan 7 Unit Usaha 95 Persen	Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai untuk meningkatkan nilai untuk meningkatkan nilai untuk meningkatkan nilai untuk meningkatkan alam untuk meningkatkan alam untuk meningkatkan alam untuk meningkatkan nilai untuk meningkatkan n	S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 3. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Unggul, Bernilai tambah dan	Kab. Kutai Kartanegara Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara Masyarakat / Kelompok Masyarakat	75.000.000,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3 27 04 2.0 3 27 04 2.0 221 3 27 05 3 27 05 2.0 3 27 05 2.0	2.04	0002	Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PERTANIAN PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		30 Laporan 7 Unit Usaha 95 Persen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Unggul, Bernilai tambah dan Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara Masyarakat / Kelompok Masyarakat	75.000.000,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3 27 04 2.0 3 27 04 2.0 221 3 27 05 3 27 05 2.0 3 27 05 2.0	2.04	0002	Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PERTANIAN PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		30 Laporan 7 Unit Usaha 95 Persen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Indusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Indusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Indusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 6. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara Masyarakat / Kelompok Masyarakat	75.000.000,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3 27 04 2.0 3 27 04 2.0 221 3 27 05 3 27 05 2.0 3 27 05 2.0	2.04	0002	Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PERTANIAN PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		30 Laporan 7 Unit Usaha 95 Persen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Unggul, Bernilai tambah dan Unggul, Bernilai tambah dan	Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara Masyarakat / Kelompok Masyarakat	75.000.000,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3 27 04 2.0 3 27 04 2.0 3 27 05 2.0 3 27 05 2.0	2.04	0002	Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PERTANIAN PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		30 Laporan 7 Unit Usaha 95 Persen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Unggul, Bernilai tambah dan	Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara Masyarakat / Kelompok Masyarakat	75.000.000,00	PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3 27 04 2.0 221 3 27 05 3 27 05 2.0 3 27 05 2.0	2.04	0002	Masyarakat Veteriner Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PENGENDALIAN DAN PERTANIAN PENGENDALIAN DAN PERTANIAN PENGENDALIAN DAN PERTANIAN PENGENDALIAN DAN PERTANIAN	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana		7 Unit Usaha 95 Persen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan Membangun Ekonomi Iniklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan Membangun Ekonomi Iniklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Kab. Kutai Kartanegara Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara Masyarakat / Kelompok Masyarakat	75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3 27 04 2.0 221 3 27 05 3 27 05 2.0 3 27 05 2.0	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PERTANIAN PENGENDALIAN DAN BENCANA PERTANIAN PENGENDALIANGAN BENCANA PERTANIAN PE	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik Persentase Pengendalian dan Pertanian Pertanian		7 Unit Usaha 95 Persen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Unggul, Bernilai tambah dan Unggul, Bernilai tambah dan	Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara Masyarakat / Kelompok Masyarakat		PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
221 3 27 05 2.0: 3 27 05 2.0: 3 27 05 2.0:	2.04	0010	Produk Hewan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PERgendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik Persentase Pengendalian dan Pertanian Pertanian		7 Unit Usaha 95 Persen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara Masyarakat / Kelompok Masyarakat		PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3 27 04 2.0 221 3 27 05 3 27 05 2.0 3 27 05 2.0	2.04	0010	Produk Hewan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PERgendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik Persentase Pengendalian dan Pertanian Pertanian		7 Unit Usaha 95 Persen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara Masyarakat / Kelompok Masyarakat		PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3 27 04 2.0 221 3 27 05 3 27 05 2.0 3 27 05 2.0	2.04	0010	Produk Hewan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PERgendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik Persentase Pengendalian dan Pertanian Pertanian		7 Unit Usaha 95 Persen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara Masyarakat / Kelompok Masyarakat		PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3 27 04 2.0 221 3 27 05 3 27 05 2.0 3 27 05 2.0	2.04	0010	Produk Hewan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PERgendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik Persentase Pengendalian dan Pertanian Pertanian		7 Unit Usaha 95 Persen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara Masyarakat / Kelompok Masyarakat		PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3 27 05 2.0: 3 27 05 2.0: 3 27 05 2.0:		1	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana		95 Persen	Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	Kab. Kutai Kartanegara Masyarakat / Kelompok Masyarakat	75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3 27 05 2.0: 3 27 05 2.0: 3 27 05 2.0:		1	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		95 Persen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	Masyarakat / Kelompok Masyarakat	75.000.000,00	PETERNAKAN
3 27 05 2.0: 3 27 05 2.0: 3 27 05 2.0:		1	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		95 Persen	Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	Kelompok Masyarakat	75.000.000,00	PETERNAKAN
3 27 05 2.0: 3 27 05 2.0: 3 27 05 2.0:		1	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		95 Persen	Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	Kelompok Masyarakat	75.000.000,00	PETERNAKAN
3 27 05 2.0: 3 27 05 2.0: 3 27 05 2.0:		1	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		95 Persen	Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	Kelompok Masyarakat	75.000.000,00	PETERNAKAN
3 27 05 2.0: 3 27 05 2.0: 3 27 05 2.0:		1	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		95 Persen	Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	Kelompok Masyarakat	75.000.000,00	PETERNAKAN
3 27 05 2.0: 3 27 05 2.0: 3 27 05 2.0:	2.01		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	eara yang baik Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan			
3 27 05 2.0: 3 27 05 2.0: 3 27 05 2.0:	2.01		PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan - Penanggulangan Bencana Pertanian					untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	Nau. Kutai kaitailegaia		
3 27 05 2.0: 3 27 05 2.0: 3 27 05 2.0:	2.01		PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penanggulangan Bencana Pertanian			1.675.000.000,00			Unggul, Bernilai tambah dan			DINAS DEDTAL
3 27 05 2.0: 3 27 05 2.0: 3 27 05 2.0:	2.01		PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penanggulangan Bencana Pertanian			1.675.000.000,00		tamban ur ualam negeri.				DINIAC DEDTAL
3 27 05 2.0: 3 27 05 2.0: 3 27 05 2.0:	2.01		PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penanggulangan Bencana Pertanian			1.675.000.000,00				.		DINIAC DEDTAL
3 27 05 2.0: 3 27 05 2.0: 3 27 05 2.0:	2.01		PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penanggulangan Bencana Pertanian			1.073.000.000,00				I	2.250.000.000,00	
3 27 05 2.0	2.01		PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pertanian					ĺ			2.230.000.000,00	PETERNAKAN
3 27 05 2.0	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian					1					FETERIVARAIV
3 27 05 2.0		ļ ļ	Bencana Pertanian	zaas i engeriaanan or i i ertaman	l l	2400 Ha	1.675.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Masyarakat / -	2 250 000 000 00	DINAS PERTANIAN DAN
3 27 05 2.0						2400 110	1.07 3.000.000,00		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	Kelompok Masyarakat		PETERNAKAN
3 27 05 2.0			nabapate ny nota						berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing	Kab. Kutai Kartanegara		LILIMANAN
3 27 05 2.0									untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang	nasi nata nartanegara		
3 27 05 2.0									tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
3 27 05 2.0	1									Berkelanjutan			
3 27 05 2.0	2.01	0001	Pengendalian Organisme	Jumlah Luas Serangan Organisme		2.100 Ha	800.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	Membangun Ekonomi	Masyarakat /	1.100.000.000.00	DINAS PERTANIAN DAN
			Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Pengganggu Tumbuhan (OPT)			Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	Kelompok Masyarakat		PETERNAKAN
			Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	Tanaman Pangan, Hortikultura, dan			Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing	Kab. Kutai Kartanegara		
			Perkebunan	Perkebunan yang Dikendalikan					untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
				78					tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
										Berkelanjutan			
	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan	Jumlah Area Terdampak Perubahan		2.000 Ha	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Masyarakat /	500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN
3 27 05 2.0			Iklim (DPI) Tanaman Pangan,	Iklim (DPI) Tanaman Pangan,			Semua Kecamatan,	, ,	mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	Kelompok Masyarakat	·	PETERNAKAN
3 27 05 2.0			Hortikultura, dan Perkebunan	Hortikultura, dan Perkebunan yang			Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing	Kab. Kutai Kartanegara		
3 27 05 2.0			,	Ditangani					untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
3 27 05 2.0									tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
3 27 05 2.0										Berkelanjutan			
	2.01	0004	Penanggulangan Bencana Non	Jumlah Wilayah Penanggulangan		1 laporan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Masyarakat /	150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN
			Alam yang Bersifat Zoonosis	Bencana Non Alam yang Bersifat			Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	Kelompok Masyarakat		PETERNAKAN
				Zoonosis			Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing	Kab. Kutai Kartanegara		
									untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
1 1 1 1 1									tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
										Berkelanjutan			
3 27 05 2.03	2.01		Penanggulangan Pasca Bencana	Jumlah penanggulangan pasca		6 Laporan	500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Masyarakat /	500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN
		ļ.,	Alam Bidang Tanaman Pangan,	bencana alam bidang tanaman			Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	Kelompok Masyarakat		PETERNAKAN
			Hortikultura dan Perkebunan	pangan, hortikultura dan			Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing	Kab. Kutai Kartanegara		
1 1 1 1				perkebunan					untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
									tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan]		
										Berkelanjutan			
222 3 27 06			PROGRAM PERIZINAN USAHA	Jumlah Rekomendasi yang -		35 Rekomendasi	150.000.000,00				-	150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN
			PERTANIAN	dikeluarkan									PETERNAKAN
3 27 06 2.03	2.01	l T	Penerbitan Izin Usaha Pertanian	Fasilitasi Usaha Pertanian yang -		20 Surat	100.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Masyarakat / -	100.000.000,00	
1 1 1 1			yang Kegiatan Usahanya dalam	Kegiatan Usahanya dalam Daerah			1		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	Kelompok Masyarakat		PETERNAKAN
1 1 1 1			Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota			1		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing	Kab. Kutai Kartanegara		
1 1 1 1									untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang]		
			l				1		tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
										Berkelanjutan	 _		
3 27 06 2.03		0005	Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah izin usaha pertanian yang		4 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Masyarakat /	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN
	2.01	<u> </u>	Penerapan standar dan Izin Usaha	dibina dan diawasi			Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	Kelompok Masyarakat		PETERNAKAN
	2.01		Pertanian				Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	Penguatan Daya Saing	Kab. Kutai Kartanegara		
	2.01	Į,	l				1		untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
	2.01								tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan]		
	2.01								I	Berkelanjutan	1		



223 3 3	3 2	27 07 27 07	7 2.01	0001	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penerbitan Izin Usaha ternak -	15 Dokumen 1 Dokumen 4 Persen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	a, DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing	Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara Masyarakat / Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara	50.000.000,00	PETERNAKAN
223 3 3	3 2	27 07 27 07	7 2.01		Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani Cakupan Lembaga Petani yang		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa), DANA BAGI HASIL (DBH)	berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing	Kab. Kutai Kartanegara Masyarakat / Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	
223 3 3	3 2	27 07 27 07	7 2.01		Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeilharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan PROGRAM PENYUL	Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani Cakupan Lembaga Petani yang		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	I, DANA BAGI HASIL (DBH)	untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing	Masyarakat / Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN
223 3 3	3 2	27 07 27 07	7 2.01		Rumah Potong Hewan Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani Cakupan Lembaga Petani yang		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	p, DANA BAGI HASIL (DBH)	tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing	Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN
223 3 3	3 2	27 07 27 07	7 2.01		Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani Cakupan Lembaga Petani yang		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	p, DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing	Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN
223 3 3	3 2	27 07 27 07	7 2.01		Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani Cakupan Lembaga Petani yang		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	n, DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing	Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN
3	3 2	27 07 27 07	7 2.01		Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani Cakupan Lembaga Petani yang		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing	Kelompok Masyarakat		
3	3 2	27 07	7 2.01		Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani Cakupan Lembaga Petani yang	4 Persen					Kala Kutai Kartanagara		PETERNAKAN
3	3 2	27 07	7 2.01		Hewan, Rumah Potong Hewan PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani Cakupan Lembaga Petani yang	4 Persen	0.720.000.000		untuk meningkatkan nilai		Nab. Nutai Nartanegara		
3	3 2	27 07	7 2.01		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Potong Hewan Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani Cakupan Lembaga Petani yang	4 Persen	0.730.000.000.00			Ekonomi Daerah yang			
3	3 2	27 07	7 2.01		PERTANIAN	Persentase Kenaikan Kelas - Kelompok Tani Cakupan Lembaga Petani yang -	4 Persen	0.730.000.000.00		tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
3	3 2	27 07	7 2.01		PERTANIAN	Kelompok Tani Cakupan Lembaga Petani yang -	4 Persen				Berkelanjutan		7 000 000 000 00	DINIAC DEDTANIAN DAN
3					Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			9.729.000.000,00				-	7.800.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
	3 2	27 07	7 2.01			dibina	100 Persen	9.729.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Masyarakat / -	7.800.000.000,00	
	3 2	27 07	7 2.01			uipiila				mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	Kelompok Masyarakat		PETERNAKAN
	3 2	27 07	7 2.01							berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing	Kab. Kutai Kartanegara		
	3 2	27 07	7 2.01							untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
	3 2	27 07	7 2.01							tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
				0001	Peningkatan Kapasitas	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan	19 Unit	1.374.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASII (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	Membangun Ekonomi	Masyarakat /	3,000,000,000,00	DINAS PERTANIAN DAN
				1	Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	Pertanian di Kecamatan dan Desa		Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	Kelompok Masyarakat		PETERNAKAN
				1	di Kecamatan dan Desa	yang Ditingkatkan Kapasitasnya		Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing	Kab. Kutai Kartanegara		
				1		·				untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
	- 1			1						tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
	_										Berkelanjutan			
3	2	27 07	7 2.01	0002		Jumlah Kelembagaan Petani di	3049 Unit	1.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	a, DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	Membangun Ekonomi	Masyarakat /	2.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN
	1			1	Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing	Kelompok Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara		PETERNAKAN
					dan Desa	Ditingkatkan Kapasitasnya		Semua Kei/Desa		untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang	Kab. Kutai Kartanegara		
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
										tamban ur ualam negeri.	Berkelanjutan			
3	2	27 07	7 2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan	Jumlah Sarana dan Prasarana	19 Unit	1.800.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	, DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Masyarakat /	1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN
					Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Penyuluhan Pertanian		Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	Kelompok Masyarakat		PETERNAKAN
					Pertanian			Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	Penguatan Daya Saing	Kab. Kutai Kartanegara		
										untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
2	, ,	27 07	7 2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan	Lumlah Calcalah Lanana Kalampak	13 Unit	3.955.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA PACI HASII (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	Membangun Ekonomi	Masyarakat /	1 200 000 000 00	DINAS PERTANIAN DAN
	' [*]	27 07	, 2.01	0003	Sekolah Lapang Kelompok Tani	Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	13 01110	Semua Kecamatan.	DAINA BAGITIASIE (BBIT)	mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	Kelompok Masvarakat	1.500.000.000,00	PETERNAKAN
					Tingkat Kabupaten/Kota	ram yang respentan dan beroperasi		Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing	Kab. Kutai Kartanegara		
					0,,					untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
	4										Berkelanjutan			
3	2	27 07	7 2.01	8000	Pembentukan Kelembagaan	Jumlah Kelembagaan Ekonomi	3 Unit	500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	a, DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	Membangun Ekonomi	Masyarakat /	150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN
					Ekonomi Petani	Petani yang dibentuk		Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	Kelompok Masyarakat		PETERNAKAN
								Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang	Kab. Kutai Kartanegara		
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
3	2	27 07	7 2.01	0009		Jumlah diseminasi informasi teknis,	1 Dokumen	600.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	a, DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Masyarakat /	150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN
	1			1	Sosial, Ekonomi dan Inovasi	sosial, ekonomi dan inovasi		Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	Kelompok Masyarakat		PETERNAKAN
	1			1	Pertanian	pertanian		Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing	Kab. Kutai Kartanegara		
	1			1						untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
	t	士			Dinas Perkebunan		L	30.199.757.625,00	<u> </u>	1		ı <u>J</u>		DINAS PERKEBUNAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			30.199.757.625,00						DINAS PERKEBUNAN
	2		_		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG P			30.199.757.625,00		1	ļ		43.389.197.862,00	
224 3	2	27 01	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79.50 Nilai	19.569.757.625,00					36.289.197.862,00	DINAS PERKEBUNAN
					KABUPATEN/KOTA									
3	2	27 01	1 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen rencana, -	7 Dokumen	250.000.000,00		Melanjutkan pengembangan	3. Membangun Ekonomi	Kelompok Tani dan -	686.274.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	1			1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	anggaran, dan Evaluasi Kinerja				infrastruktur dan	Inklusif dan Berkelanjutan	ASN		
				1		Perangkat Daerah				meningkatkan lapangan	5. Penguatan Daya Saing			
	1			1						kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan			
	1			1						mengembangkan industri	Berkelanjutan			
	1			1						kreatif serta	oc. Acidinjucan			
	1			1						mengembangkan				
				1						agromaritim industri di				
	1			1						sentra produksi melalui				
1	1			1						peran aktif koperasi.				
1	1			1										
				1	1		i l	1	1	1	i	i l	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	1



3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000.000,00 kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan menigkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewiraushana, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Kelompok Tani dan ASN	320.898.000,00	DINAS PERKEBUNAN
3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan menigkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Pengustan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Kelompok Tani dan ASN	80.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Kelompok Tani dan ASN	235,376,000,00	DINAS PERKEBUNAN
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi - Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan	16.372.251.273,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	ASN	- 30.966.263.862,00	DINAS PERKEBUNAN
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.414 Orang/bulan	16.144.131.273,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	ASN	30.738.143.862,00	DINAS PERKEBUNAN
3	27	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinas! Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	228.120.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		ASN	228.120.000,00	DINAS PERKEBUNAN
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	150.000.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	ASN	- 296.660.000,00	DINAS PERKEBUNAN



3	_	_												
	2	27 01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan	1 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem	3. Membangun Ekonomi	ASN	150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
					SKPD	Barang Milik Daerah SKPD		Semua Kecamatan,		pertahanan keamanan	Inklusif dan Berkelanjutan			
								Semua Kel/Desa		negara dan mendorong	Penguatan Daya Saing			
										kemandirian bangsa melalui	Ekonomi Daerah yang			
										swasembada pangan, energi,	Unggul, Bernilai tambah dan			
										air, ekonomi kreatif, ekonomi	Berkelanjutan			
										hijau, dan ekonomi biru				
-	3.	7 04	2.02	0005			4.1	F0.000.000.00	DANA DA CILIACII (DDII)			ACAL	00.000.000	DINAS PERKEBUNAN
3	2	27 01	2.03	0005		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem	3. Membangun Ekonomi	ASN	86.660.000,00	DINAS PERKEBUNAN
					Laporan Barang Milik Daerah pada	Penyusunan Laporan Barang Milik		Tenggarong, Melayu		pertahanan keamanan	Inklusif dan Berkelanjutan			
					SKPD	Daerah pada SKPD				negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui	5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang			
										swasembada pangan, energi,	Unggul, Bernilai tambah dan			
										air, ekonomi kreatif, ekonomi				
										hijau, dan ekonomi biru	bei kelalijutali			
										,,				
3	2	27 01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik	Jumlah Laporan Penatausahaan	1 Laporan	50.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem	3. Membangun Ekonomi	ASN	60.000,000,00	DINAS PERKEBUNAN
					Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD			,	pertahanan keamanan	Inklusif dan Berkelanjutan			
										negara dan mendorong	5. Penguatan Daya Saing			
										kemandirian bangsa melalui	Ekonomi Daerah yang			
											Unggul, Bernilai tambah dan			
ı			1			1				air, ekonomi kreatif, ekonomi				İ
						1				hijau, dan ekonomi biru	i '			
3	2	7 01	2.04	1	Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi -	1 Dokumen	25.000.000,00		Memantapkan sistem	3. Membangun Ekonomi	Kebun Dinas	- 30.000.000,0	DINAS PERKEBUNAN
			1		Kewenangan Perangkat Daerah	Pendapatan Daerah Kewenangan				pertahanan keamanan	Inklusif dan Berkelanjutan			İ
						Perangkat Daerah				negara dan mendorong	5. Penguatan Daya Saing			
										kemandirian bangsa melalui	Ekonomi Daerah yang			
										swasembada pangan, energi,	Unggul, Bernilai tambah dan			
										air, ekonomi kreatif,	Berkelanjutan			
										ekonomi hijau, dan ekonomi				
-	3.	7 04	204	0007			4.0-1	25 000 000 00	DANA DA CILIACII (DDII)	biru		Kalana Diaga	20,000,000,00	DINAS PERKEBUNAN
3	2.	27 01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi	Jumlah Laporan Pengelolaan	1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem	Membangun Ekonomi	Kebun Dinas	30.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
					Daerah	Retribusi Daerah		Semua Kecamatan,		pertahanan keamanan	Inklusif dan Berkelanjutan			
								Semua Kel/Desa		negara dan mendorong	5. Penguatan Daya Saing			
										kemandirian bangsa melalui	Ekonomi Daerah yang			
										swasembada pangan, energi,	Unggul, Bernilai tambah dan			
										air, ekonomi kreatif, ekonomi	Berkelanjutan			
										hijau, dan ekonomi biru				
3	2									**	3. Membangun Ekonomi	ASN		
		7 01	2.05	+	Administrasi Kepegawajan	Jumlah Dokumen Administrasi -	2 Dokumen	210.000.000.00					- 370.000.000.0) IDINAS PERKEBUNAN
		27 01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi - Kepegawaian	2 Dokumen	210.000.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan	Inklusif dan Berkelanjutan	ASN	- 370.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
		27 01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	210.000.000,00		pertahanan keamanan	Inklusif dan Berkelanjutan	ASN	- 370.000.000,0	DINAS PERKEBUNAN
		27 01	2.05				2 Dokumen	210.000.000,00				ASIV	- 370.000.000,0	D DINAS PERKEBUNAN
		27 01	2.05				2 Dokumen	210.000.000,00		pertahanan keamanan negara dan mendorong	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing	ASIN	- 370.000.000,0	D DINAS PERKEBUNAN
		27 01	2.05				2 Dokumen	210.000.000,00		pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang	ASN	370.000.000,0	DINAS PERKEBUNAN
		27 01	2.05				2 Dokumen	210.000.000,00		pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	ASIN	370.000.000,0	D DINAS PERKEBUNAN
		27 01	2.05			Kepegawaian	2 Dokumen			pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	ASIN		
3	2'				Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		2 Dokumen 16 Orang	210.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi	ASN		D DINAS PERKEBUNAN
3	2'				Perangkat Daerah	Kepegawaian			DANA BAGI HASIL (DBH)	pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
3	2'				Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas		150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing			
3	2'				Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti		150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui	Indlusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang			
3	2				Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti		150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,	Indlusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan			
3	2'				Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti		150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi	Indlusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang			
3	2				Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti		150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,	Indlusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan			
		27 01	2.05	0009	Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Indlusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	ASN	300.000.000,00	D DINAS PERKEBUNAN
			2.05	0009	Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi	Kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang Mengikuti		150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi		300.000.000,00	
		27 01	2.05	0009	Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	16 Orang	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		pertahanan keamanan negara dan mendroong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan	Indlusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN	300.000.000,00	D DINAS PERKEBUNAN
		27 01	2.05	0009	Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi	Kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang Mengikuti	16 Orang	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing	ASN	300.000.000,00	D DINAS PERKEBUNAN
		27 01	2.05	0009	Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi	Kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	16 Orang	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui ekemandirian bangsa melalui	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang	ASN	300.000.000,00	D DINAS PERKEBUNAN
		27 01	2.05	0009	Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi	Kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	16 Orang	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		pertahanan keamanan negara dan mendrong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, amandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, emandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,	Indlusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	ASN	300.000.000,00	D DINAS PERKEBUNAN
		27 01	2.05	0009	Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi	Kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	16 Orang	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang	ASN	300.000.000,00	D DINAS PERKEBUNAN
		27 01	2.05	0009	Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi	Kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	16 Orang	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		pertahanan keamanan negara dan mendrong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, amandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, emandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,	Indlusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	ASN	300.000.000,00	D DINAS PERKEBUNAN
3	2	27 01	2.05	0009	Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi	Kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	16 Orang	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi	Indlusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	ASN	70.000.000,00	D DINAS PERKEBUNAN
3	2	27 01	2.05	0009	Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Keamatan, Semua Kel/Desa		pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem Memantapkan sistem Memantapkan sistem Memantapkan sistem kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Indlusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	ASN	70.000.000,00	D DINAS PERKEBUNAN D DINAS PERKEBUNAN
3	2	27 01	2.05	0009	Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Keamatan, Semua Kel/Desa		pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi sirut swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	ASN	70.000.000,00	D DINAS PERKEBUNAN D DINAS PERKEBUNAN
3	2	27 01	2.05	0009	Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Keamatan, Semua Kel/Desa		pertahanan keamanan negara dan mendrorng kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan	Indlusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Dacrah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN	70.000.000,00	D DINAS PERKEBUNAN D DINAS PERKEBUNAN
3	2	27 01	2.05	0009	Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Keamatan, Semua Kel/Desa		pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	Indlusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing	ASN	70.000.000,00	D DINAS PERKEBUNAN D DINAS PERKEBUNAN
3	2	27 01	2.05	0009	Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Keamatan, Semua Kel/Desa		pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasemalalui swasemandirian bangsa melalui swasembada pangangan swasemandirian bangsa melalui	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang	ASN	70.000.000,00	D DINAS PERKEBUNAN D DINAS PERKEBUNAN
3	2	27 01	2.05	0009	Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Keamatan, Semua Kel/Desa		pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hiru Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, swasembada pangan, energi, e	Indlusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	ASN	70.000.000,00	D DINAS PERKEBUNAN D DINAS PERKEBUNAN



3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	ASN	60.000.000,01	DINAS PERKEBUNAN
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	ASN	200.000.000,0	D DINAS PERKEBUNAN
3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	55.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	ASN	60.000.000,01	D DINAS PERKEBUNAN
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	70.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	ASN	80.000.000,01	DINAS PERKEBUNAN
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	ASN	610.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
3	27	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	ASN	165,000,000,0	D DINAS PERKEBUNAN
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Persen	280.000.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	ASN	- 900.000.000,0	D DINAS PERKEBUNAN
3	27	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	180.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	ASN	200.000.000,0	D DINAS PERKEBUNAN
3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	ASN	300.000.000,0	D DINAS PERKEBUNAN



	3 2				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.017.506.352,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	ASN		DINAS PERKEBUNAN
	3 2	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	400.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	ASN	400.000,000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	95.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	ASN	95.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3	27 01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	522.506.352,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	ASN	600.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3 2	27 01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah -	130 Unit	700.000.000,00		-	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	-	- 730.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3 2	27 01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	400.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	-	410.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3 2	27 01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	-	320.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
225	3 7	27 02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Areal Kakao Luas Areal Kopi Luas Areal Karet Luas Areal Karet Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat Luas Areal Lada Luas Areal Kelapa Sawit PBS Luas Areal Kelapa Dalam	100 Hektar (Ha) 125 Hektar (Ha) 18033 Hektar (Ha) 253 Hektar (Ha) 28880 Hektar (Ha) 3452 Hektar (Ha) 346255 Hektar (Ha) 7311 Hektar (Ha)	4.625.000.000,00						DINAS PERKEBUNAN
	3 7	27 02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Diawasi	252 Paket	4.500.000.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Kelompok Tani	- 2.500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN



3	3 2	27 02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	22 Laporan	4.500.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Kelompok Tani	2.500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3 2	27 02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sumber - Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan	1 Komoditi	125.000.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Aparatur dan Kelompok Tani	- 150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3 2	27 02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Aparatur dan Kelompok Tani	150,000,000,00	DINAS PERKEBUNAN
226	3 2	27 03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Embung Perkebunan Yang - Dibangun Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	0 Unit 2255 Meter	5.005.000.000,00					- 2.800.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
:	3 2	27 03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	1 Dokumen	100.000.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Kelompok Tani	- 150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3 2	27 03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Kelompok Tani	150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
3	3 2	27 03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	28 Unit	4.905.000.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Kelompok Tani	- 2.650.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
3	3 2	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	9 Unit	3.555.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		Kelompok Tani	2.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
3	3 2	27 03	2.02	0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Kelompok Tani	150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN

	3	27 03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun,		1 Unit	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Kelompok Tani	300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
					Lainnya	Direhabilitasi dan Dipelihara			Semua Kel/Desa		negara dan mendorong	5. Penguatan Daya Saing			
					,	· ·					kemandirian bangsa melalui	Ekonomi Daerah yang			
											swasembada pangan, energi,	Unggul, Bernilai tambah dan			
											air, ekonomi kreatif, ekonomi	Berkelanjutan			
											hijau, dan ekonomi biru				
	3	27 03	2.02	0010		Jumlah jaringan irigasi usaha tani		8 Unit	800.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		3. Membangun Ekonomi	Kelompok Tani	200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
					Jaringan Irigasi Usaha Tani	yang direhabilitasi			Marang Kayu, Santan		pertahanan keamanan	Inklusif dan Berkelanjutan			
									llir		negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui	 Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang 			
											air, ekonomi kreatif, ekonomi				
											hijau, dan ekonomi biru	berkelanjatan			
											,,				
227	3	27 05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN	Persentase Penurunan Gangguan	-	20 Persen	400.000.000,00					- 500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
					PENANGGULANGAN BENCANA	OPT Perkebunan									
					PERTANIAN										
	3	27 05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan	Luas Pengendalian OPT Dan	-	280 Ha	400.000.000,00		-	3. Membangun Ekonomi	Kelompok Tani	- 500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
					Bencana Pertanian	Bencana Perkebunan						Inklusif dan Berkelanjutan			
					Kabupaten/Kota							5. Penguatan Daya Saing			
												Ekonomi Daerah yang			
												Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
\vdash		27 05	2.04	0004	Daniel dell'en Orenelen e	turnlah turn Carana Orana lana		440.11-	200 000 000 00	DANA DA CULIACII (DDUI)			Walanca da Tani	200 000 000 00	DINAS PERKEBUNAN
1	3	2/ 05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)		140 Ha	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DAINA BAGI HASIL (DBH)		Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Kelompok Tani	200.000.000,00	DIIANO LELVEROINAIN
		1	1	1	Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	Tanaman Pangan, Hortikultura, dan			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Penguatan Daya Saing			İ
					Perkebunan	Perkebunan yang Dikendalikan			Sellida Kely Desa			Ekonomi Daerah yang			
					renebulan	r crkebarian yang bikendankan						Unggul, Bernilai tambah dan			
												Berkelanjutan			
	3	27 05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan	Jumlah Area Terdampak Perubahan		24200 Ha	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Membangun Ekonomi	Kelompok Tani	150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
					Iklim (DPI) Tanaman Pangan,	Iklim (DPI) Tanaman Pangan,			Semua Kecamatan,	, ,		Inklusif dan Berkelanjutan	·	·	
					Hortikultura, dan Perkebunan	Hortikultura, dan Perkebunan yang			Semua Kel/Desa			5. Penguatan Daya Saing			
						Ditangani						Ekonomi Daerah yang			
												Unggul, Bernilai tambah dan			
												Berkelanjutan			
	3	27 05	2.01	0003		Jumlah Luasan Pencegahan,		100 Ha	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Membangun Ekonomi	Kelompok Tani	150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
					Kebakaran Lahan, dan Gangguan	Penanganan Kebakaran Lahan, dan			Semua Kecamatan,			Inklusif dan Berkelanjutan			
					Usaha Tanaman Pangan,	Gangguan Usaha Tanaman Pangan,			Semua Kel/Desa			5. Penguatan Daya Saing			
					Hortikultura, dan Perkebunan	Hortikultura, dan Perkebunan						Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan			
												Berkelanjutan			
228	3	27 06			PROGRAM PERIZINAN USAHA	Jumlah Penerbitan STDB	-	200 Surat (STDB)	250.000.000.00			,		- 450.000.000.00	DINAS PERKEBUNAN
					PERTANIAN	Jumlah Perusahaan Yang		3 Surat (PUP)	,						
						Mendapat Sertifikat Penilaian									
						Usaha Perkebunan (PUP)									
	3	27 06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Pemegang Tanda Daftar	-	203 Pelaku	250.000.000,00		Memantapkan sistem	3. Membangun Ekonomi	Kelompok Tani dan	- 450.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
					yang Kegiatan Usahanya dalam	Budidaya dan Izin Usaha					pertahanan keamanan	Inklusif dan Berkelanjutan	Perusahaan Besar		
					Daerah Kabupaten/Kota	Perkebunan Yang Dibina					negara dan mendorong	5. Penguatan Daya Saing	Swasta		
											kemandirian bangsa melalui	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan			
											swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,	Berkelanjutan			
											ekonomi hijau, dan ekonomi	berkelanjutan			
											biru				
	3	27 06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah izin usaha pertanian yang		2 Laporan	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DRH)	Memantapkan sistem	Membangun Ekonomi	Kelompok Tani dan	450,000.000.00	DINAS PERKEBUNAN
		50	12	1	Penerapan standar dan Izin Usaha	dibina dan diawasi			Semua Kecamatan,		pertahanan keamanan	Inklusif dan Berkelanjutan	Perusahaan Besar	-135.000.000,00	
			1	1	Pertanian				Semua Kel/Desa		negara dan mendorong	5. Penguatan Daya Saing	Swasta		ĺ
		1	1	1							kemandirian bangsa melalui	Ekonomi Daerah yang			İ
	1	1	1	1								Unggul, Bernilai tambah dan			İ
, !		- 1	1	1							air, ekonomi kreatif, ekonomi	Berkelanjutan			İ
ı I				1							hijau, dan ekonomi biru				İ
					1					<u> </u>					L
								24,6 Persen	350.000.000,00		I			- 700.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
229	3	27 07			PROGRAM PENYULUHAN	Persentase Kenaikan Kelas	-	- 1,0 1 0.000.							
229					PERTANIAN	Kelompok Tani	-		350 000 000 00			2.84	Kalamash Tari	700 000 000 00	DINIAC DEDICEDIMAN
229		27 07 27 07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kelompok Tani Jumlah Kelembagaan Petani	-	48 Lembaga	350.000.000,00		Memantapkan sistem	3. Membangun Ekonomi	Kelompok Tani	- 700.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
229					PERTANIAN	Kelompok Tani Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial	-		350.000.000,00		pertahanan keamanan	Inklusif dan Berkelanjutan	Kelompok Tani	- 700.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
229					PERTANIAN	Kelompok Tani Jumlah Kelembagaan Petani	-		350.000.000,00		pertahanan keamanan negara dan mendorong	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing	Kelompok Tani	- 700.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
229					PERTANIAN	Kelompok Tani Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial			350.000.000,00		pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang	Kelompok Tani	- 700.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
229					PERTANIAN	Kelompok Tani Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial			350.000.000,00		pertahanan keamanan negara dan mendorong	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing	Kelompok Tani	- 700.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
229					PERTANIAN	Kelompok Tani Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial			350.000.000,00		pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	Kelompok Tani	- 700.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
229					PERTANIAN	Kelompok Tani Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial			350.000.000,00		pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	Kelompok Tani	- 700.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN



3	3 27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas	Jumlah Kelembagaan Petani di	34 Unit	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem	3. Membangun Ekonomi	Kelompok Tani	350.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
					Kelembagaan Petani di Kecamatan	Kecamatan dan Desa yang		Semua Kecamatan,		pertahanan keamanan	Inklusif dan Berkelanjutan			
					dan Desa	Ditingkatkan Kapasitasnya		Semua Kel/Desa		negara dan mendorong	5. Penguatan Daya Saing			
										kemandirian bangsa melalui	Ekonomi Daerah yang			
										swasembada pangan, energi,	Unggul, Bernilai tambah dan			
										air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Berkelanjutan			
										ilijau, dali ekoliolili bii d				
3	3 27	07	2.01	0009	Diseminasi Informasi Teknis.	lumlah diseminasi informasi teknis.	1 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DRH)	Memantapkan sistem	Membangun Ekonomi	Kelompok Tani	350,000,000,00	DINAS PERKEBUNAN
	,	0,	2.01	0003	Sosial, Ekonomi dan Inovasi	sosial, ekonomi dan inovasi	2 Bokumen	Semua Kecamatan,	Driver Bright Intole (BBH)	pertahanan keamanan	Inklusif dan Berkelanjutan	Kelompok ram	350.000.000,00	DII VID I EIIILEBOIVII V
					Pertanian	pertanian		Semua Kel/Desa		negara dan mendorong	5. Penguatan Daya Saing			
										kemandirian bangsa melalui	Ekonomi Daerah yang			
											Unggul, Bernilai tambah dan			
										air, ekonomi kreatif, ekonomi	Berkelanjutan			
										hijau, dan ekonomi biru				
	_	+ +			Dinas Perindustrian dan Perdaganga	an l		65.440.997.518,00			1	1	54 199 715 342 00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
					Dinas remidustrian dan rerdaganga			03.440.337.310,00					34.133.713.342,00	PERDAGANGAN
3	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			65.440.997.518,00					54.199.715.342,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
								•						PERDAGANGAN
3	3 30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG I	PERDAGANGAN		25.370.000.000,00					9.325.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
						T								PERDAGANGAN
231 3	3 30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Rekomendasi Perijinan - dan Pendaftaran Perusahaan	100 Persen	160.000.000,00					205.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					FENDAFIARAN PERUSAHAAN	uan remuartaidh Perusahadh								FERDAGANGAN
3	3 30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar	Jumlah dokumen rekomendasi ijin -	84 Dokumen	100.000.000,00	1	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Pelaku Usaha -	85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
					Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan	pengelolaan pasar rakyat, pusat				mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
					Izin Usaha Toko Swalayan	perbelanjaan dan izin usaha toko				berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
						swalayan yang diterbitkan				untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
					- 10. 10. 1						Berkelanjutan			
3	3 30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat,	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan	1 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha	85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Pusat Perbelanjaan, dan Toko	Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan,		Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			PERDAGANGAN
					Swalayan Melalui Sistem Pelayanan			Sellida Kely Desa		untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
					Perizinan Berusaha Terintegrasi	Pelayanan Perizinan Berusaha				tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
					Secara Elektronik	Terintegrasi Secara Elektronik					Berkelanjutan			
											,			
3	3 30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Surat Tanda Daftar Gudang -	78 Surat TDG	35.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Pelaku Usaha -	35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
						(TDG) yang diterbitkan per tahun				mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
										berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
										untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
3	3 30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar	Jumlah Dokumen Tanda Daftar	1 Dokumen	35.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DRH)	Melanjutkan hilirisasi dan	Membangun Ekonomi	Pelaku Usaha	35,000,000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
	, ,	02	2.02	0001	Gudang	Gudang	2 Bokumen	Semua Kecamatan,	Driver Correction (Corre	mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	r cioka osana	33.000.000,00	PERDAGANGAN
					Cudang	Sadang		Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			T END/IG/III G/III
										untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
3	30	02	2.03		Penerbitan Surat Tanda	Jumlah Surat Tanda Pendaftaran -	21 Dokumen	25.000.000,00	İ	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Pelaku Usaha -	85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
					Pendaftaran Waralaba (STPW)	Waralaba (STPW) untuk penerima			İ	mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	1		PERDAGANGAN
					untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	waralaba dari waralaba dalam			ĺ	berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang			1
					Waralaba Dalam Negeri	negeri yang diterbitkan				tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
										tamban ur uaram negen.	Berkelanjutan			
3	3 30	02	2.03	0004	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen	Jumlah dokumen yang di verifikasi	1 dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	Membangun Ekonomi	Pelaku Usaha	85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
					Perolehan Surat Tanda Pendaftaran	sebagai Pemenuhan Komitmen		Semua Kecamatan,	, ,	mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
					Waralaba (STPW) penerima	Perolehan Surat Tanda Pendaftaran		Semua Kel/Desa	İ	berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing	1		Ì
					waralaba Dalam Negeri dan	Waralaba (STPW) penerima			ĺ	untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			1
					penerima waralaba lanjutan dalam	waralaba Dalam Negeri dan			İ	tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan	1		Ì
					negeri melalui sistem yang	penerima waralaba lanjutan dalam			İ		Berkelanjutan	1		Ì
				l	terintegrasi secara elektronik	negeri melalui sistem yang			1]]
				l		terintegrasi secara elektronik		[1					1
232 3	3 30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA	Pertumbuhan Pendapatan Pasar -	4,22 Persen	20.250.000.000,00				-	5,700,000.000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
		~		l	DISTRIBUSI PERDAGANGAN	(Retribusi)	67 Persen		1]		3.7 33.333.300,00	PERDAGANGAN
					ĺ	Indeks Kualitas Pasar	86 Persen		1		1			1
			I				ou reiseii							
						Persentase sarana distribusi	oo reiseii							
						perdagangan di wilayah kerja yang	ou reisen							
							oo reiseii							



- 1	2 2	10 02	2.01	1	D b	Lundah Carras Bistaliani	F 11-14	30.000.000.000		Adultus Salara Editional des	2 **	Dalaku Hasha	F F00 000 000 00	DINIAC DEDINIDUCEDIANI DAN
	3 3	80 03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan	Jumlah Sarana Distribusi -	5 Unit	20.050.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Pelaku Usaha -	5.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
					Sarana Distribusi Perdagangan	Perdagangan yang dibangun dan				mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
						dikelola				berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
										untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
-	2 2	00 02	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi	Jumlah Sarana Distribusi	13 Unit	19.050.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BACI HASII (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	Membangun Ekonomi	Pelaku Usaha	E 000 000 000 00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
	3 3	03	2.01	0001	Perdagangan	Perdagangan	13 01110	Semua Kecamatan.	DANA BAGITIASIL (DBII)	mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	relaku Osalia	3.000.000.000,00	PERDAGANGAN
					reruagangan	i cruagarigari		Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	Penguatan Daya Saing			LIDAGANGAN
								Sellida Kely Desa		untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
										tamban di dalam negeri.	Berkelaniutan			
	3 3	N 03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan	1 Unit	1.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA RAGI HASII (DRH)	Melanjutkan hilirisasi dan	Membangun Ekonomi	Pelaku Usaha	500,000,000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
	, ,	03	2.01	0002	Distribusi Perdagangan	Sarana Distribusi Perdagangan	1 Onit	Semua Kecamatan,	DANA BAGITIASIE (DDII)	mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	i ciaka Osaria	300.000.000,00	PERDAGANGAN
					Distribusi Ferdagangan	Sarana Distribusi Ferdagangan		Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	Penguatan Daya Saing			FERDAGANGAN
								Sellida Kely Desa		untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
										tamban di dalam negeri.	Berkelaniutan			
	3 3	80 03	2 02	+	Pembinaan Terhadap Pengelola	Jumlah Pengelola Sarana -	5 Unit	200.000.000.00		Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Pelaku Usaha -	200,000,000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
	3 3	03	2.02		Sarana Distribusi Perdagangan	Distribusi Perdagangan Masyarakat	3 Offic	200.000.000,00		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	relaku Osalia	200.000.000,00	PERDAGANGAN
					Masyarakat di Wilayah Kerjanya	di Wilayah Kerja (Unit Pengelola				berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			FERDAGANGAN
					iviasyai akat ui vviiayaii kerjaiiya					untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
						Pasar) yang memperoleh pembinaan				tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
						pembinaan				tamban di dalam negeri.	Berkelanjutan			
	2 2	30 03	2.02	0001	Daniel and des Daniel della	Lucial Calculation (Calculation)	1 Dokumen	200 000 000 00 1/2 1/2	DANA BAGI HASIL (DBH)	Adoles Sales a Military of des	_	Pelaku Usaha	200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
1	3 3	03	2.02	0001		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan	1 Dokumen	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DAINA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	Membangun Ekonomi Membangun Ekonomi	reidKu USdild	200.000.000,00	
					Pengelola Sarana Distribusi	dan Pengendalian kepada Pengelola		Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
			1		Perdagangan	Sarana Distribusi Perdagangan		Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
										untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
			1	1						-	Berkelanjutan	 		
233	3 3	80 04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN	Koefisien variasi harga antar waktu -	3,52 Persen	2.360.000.000,00				-	995.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					BARANG PENTING									PERDAGANGAN
				1										
1	3 3	80 04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang	Jumlah barang kebutuhan pokok	13 jenis	210.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Pelaku Usaha -	300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
					Kebutuhan Pokok dan Barang	dan barang penting yang dijamin				mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
					Penting di Tingkat Daerah	ketersediaannya				berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
					Kabupaten/ Kota					untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
											+			
	3 3	80 04	2.01	0001		Jumlah Laporan Koordinasi dan	12 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Pelaku Usaha	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
					Ketersediaan Barang Kebutuhan	Sinkronisasi Ketersediaan Barang		Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
					Pokok dan Barang Penting di	Kebutuhan Pokok dan Barang		Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
					Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Penting di Tingkat Agen dan Pasar				untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
						Rakyat				tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
	3 3	30 04	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Laporan Koordinasi dan	4 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	Membangun Ekonomi	Pelaku Usaha	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
					Peningkatan Aksesibilitas Barang	Sinkronisasi Peningkatan		Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
					Kebutuhan Pokok dan Barang	Aksesibilitas Barang Kebutuhan		Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
					Penting di Tingkat Agen dan Pasar	Pokok dan Barang Penting di				untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
					Rakyat	Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
	3 3	80 04	2.01	0003		Jumlah Laporan Pengendalian Stok	1 Laporan	60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Pelaku Usaha	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
			1	1	Kebutuhan Pokok dan Barang	atau Ketersediaan Barang		Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
				1	Penting di Tingkat Agen dan Pasar	Kebutuhan Pokok dan Barang		Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
			1		Rakyat	Penting di Tingkat Agen dan Pasar				untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
						Rakyat				tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
	3 3	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok	Jumlah barang kebutuhan pokok -	75 Persen	1.800.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Pelaku Usaha -	475.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
					Barang Kebutuhan Pokok dan	dan Barang Penting di tingkat				mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
					Barang Penting di Tingkat Pasar	pasar kabupaten yang terkendali				berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
					Kabupaten/Kota	harga dan stoknya				untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
	3 3	30 04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang	Jumlah Laporan Pemantauan Harga	12 Laporan	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Pelaku Usaha	200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
			1		Kebutuhan Pokok dan Barang	dan Stok Barang Kebutuhan Pokok		Semua Kecamatan,	1	mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
				1	Penting pada Pelaku Usaha	dan Barang Penting pada Pelaku		Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
				1	Distribusi Barang dalam 1 (Satu)	Usaha Distribusi Barang dalam 1				untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
				1	Kabupaten/Kota	(Satu) Kabupaten/Kota		1		tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
						[Berkelanjutan			
	3 3	80 04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang	Jumlah Laporan Pemantauan Harga	12 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DRH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Pelaku Usaha	50.000.000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
	1 -	1 -	1	1	Kebutuhan Pokok dan Barang	dan Stok Barang Kebutuhan Pokok		Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan		22.222.300,00	PERDAGANGAN
				1		dan Barang Penting pada Pasar	1 1	I		berbasis sumber daya alam	Penguatan Daya Saing	1		1
					Penting pada Pasar Rakvat yang			Semila Kel/Hesa						
					Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi			Semua Kel/Desa		untuk meningkatkan nilai				
					Terintegrasi dalam Sistem Informasi	Rakyat yang Terintegrasi dalam		Semua Kel/Desa		untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
								Semua Kel/Desa						



	3	30 04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler	Jumlah Laporan Pelaksanaan	120 Laporan	1.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Pelaku Usaha	225.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
					dan Pasar Khusus yang Berdampak			Semua Kecamatan,	,	mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
					dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Khusus yang Berdampak dalam 1		Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	Penguatan Daya Saing			LIDAGAINGAIN
					dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			Seriiua keiy Desa						
						(Satu) Kabupaten/Kota				untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
—	_													
	3	30 04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Jumlah Pupuk dan Pestisida yang -	89091 Ton	350.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Pelaku Usaha	- 220.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
					Bersubsidi di Tingkat Daerah	tersalurkan				mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
					Kabupaten/Kota					berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
										untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
	3	30 04	2.03	0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas	Jumlah Dokumen Kelengkapan	20 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Pelaku Usaha	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
	-				Dokumen Perizinan	Legalitas Dokumen Perizinan		Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan		33.33.33.43	PERDAGANGAN
					DOKUMENT CHEMAN	Eeganta's Dokumen'i Enzinan		Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	Penguatan Daya Saing			LIDAGAINGAIN
								Selliua Kely Desa						
										untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
	3	30 04	2.03	0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan	Jumlah Laporan Pengawasan	4 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Pelaku Usaha	35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
					Pestisida Bersubsidi	Pengadaan Pupuk dan Pestisida		Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
						Bersubsidi		Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
			1	1		1			İ	untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang	1	1	1
			1	1		1			İ	tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan	1	1	1
			1			1			İ	compan or delatif fiegerl.	Berkelaniutan		1	
 	2	20 01	2.02	0003	Daniel Da	Lundah Lanana Barana	A 1	150 000 000 00 Web Web W	DANIA DA CILIACII (DDII)	Marian California Difference C		Dalalu Heaha	125 000 000 00	DINIAC DEDINIDUCTRIAL: 2
l 1 :	3	30 04	2.03	0003		Jumlah Laporan Pengawasan	4 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DAINA RAGI HASIT (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	Membangun Ekonomi	Pelaku Usaha	135.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
			1	1	Penggunaan Pupuk dan Pestisida	Penyaluran dan Penggunaan Pupuk		Semua Kecamatan,	1	mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
			1	1	Bersubsidi	dan Pestisida Bersubsidi dengan		Semua Kel/Desa	İ	berbasis sumber daya alam	Penguatan Daya Saing	1	1	1
						Realisasi Minimal 90%				untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
234	3	30 05	:		PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase pertumbuhan ekspor -	100 Persen	850.000.000,00	İ				- 950.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
	-				EKSPOR	produk unggulan								PERDAGANGAN
	3	30 05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang	Jumlah MoU Perdagangan Produk -	15 MoU	850.000.000.00		Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Pelaku Usaha	- 950.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
l 1 '	•	30 33			Melalui Pameran Dagang dan Misi	unggulan ekspor		05010001000,00		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	. Clara osana	350.0001000,00	PERDAGANGAN
						unggulan ekspol								FERDAGANGAN
					Dagang bagi Produk Ekspor					berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
					Unggulan yang Terdapat pada 1					untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
					(Satu) Daerah Kabupaten/Kota					tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
	3	30 05		0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang	8 Pelaku Usaha		DANA BAGI HASII (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Pelaku Usaha	400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
		30 05	2.01	0002			6 Pelaku Usalia	400.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara						
		30 05	2.01	0002			8 Pelaku Usana	400.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan.	DANA BAGITIASIE (BBIT)				400.000.000,00	
		30 05	2.01	0002		Difasilitasi dalam Pameran Dagang	8 Pelaku Usalia	Semua Kecamatan,	DANA BAGITIASIE (DBIT)	mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan		400.000.000,00	PERDAGANGAN
		30 05	2.01	0002			8 Pelaku Usalia		DANA BAGITIASIE (BBII)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing		400.000.000,00	
		30 05	2.01	0002			о генаки Озапа	Semua Kecamatan,	DANA BAGITIASIE (BBIT)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang		40000000000	
		30 05	2.01	0002			o Petaku Usalia	Semua Kecamatan,	DANA BAGITIASIE (BBIT)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan		40000000000	
						Difasilitasi dalam Pameran Dagang		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
	3	30 05			Pameran Dagang Lokal	Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang	8 Pelaku Usaha	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara		mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi	Pelaku Usaha	200.000.000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
	3				Pameran Dagang Lokal	Difasilitasi dalam Pameran Dagang		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, Semua		mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha		PERDAGANGAN
:	3				Pameran Dagang Lokal	Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara		mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi	Pelaku Usaha		PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
:	3				Pameran Dagang Lokal	Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, Semua Kel/Desa		mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing	Pelaku Usaha		PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
	3				Pameran Dagang Lokal	Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara		mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang	Pelaku Usaha		PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
	3				Pameran Dagang Lokal	Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Sanga Sanga, Semua		mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	Pelaku Usaha		PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
	3				Pameran Dagang Lokal	Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara		mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang	Pelaku Usaha		PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
	3				Pameran Dagang Lokal	Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Sanga Sanga, Semua		mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	Pelaku Usaha		PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
		30 05	2.01	0003		Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	8 Pelaku Usaha	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menigkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan		200,000,000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		30 05	2.01	0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor	Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri ber basis sumber daya alam untuk menigkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Pelaku Usaha	200,000,000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
		30 05	2.01	0003		Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	8 Pelaku Usaha	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menigkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan		200,000,000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		30 05	2.01	0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor	Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang	8 Pelaku Usaha	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri ber basis sumber daya alam untuk menigkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan		200,000,000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
		30 05	2.01	0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor	Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang	8 Pelaku Usaha	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Sanga Sanga, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam berbasis sumber daya alam	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing		200,000,000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
		30 05	2.01	0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor	Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang	8 Pelaku Usaha	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Sanga Sanga, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Ekonomi Daerah yang Ekonomi Daerah yang		200,000,000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
		30 05	2.01	0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor	Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang	8 Pelaku Usaha	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Sanga Sanga, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam berbasis sumber daya alam	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan		200,000,000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
	3	30 05	2.01	0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	8 Pelaku Usaha 6 Pelaku Usaha	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Sanga Sanga, Semua Kel/Desa 100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha	200,000,000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30 05	2.01	0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan Jumlah Produk Unggulan Ekspor	8 Pelaku Usaha	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Sanga Sanga, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 6. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Membangun Ekonomi		200,000,000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30 05	2.01	0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi	8 Pelaku Usaha 6 Pelaku Usaha	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Sanga Sanga, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha	200,000,000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30 05	2.01	0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan Jumlah Produk Unggulan Ekspor	8 Pelaku Usaha 6 Pelaku Usaha	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Sanga Sanga, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 6. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Membangun Ekonomi	Pelaku Usaha	200,000,000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30 05	2.01	0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi	8 Pelaku Usaha 6 Pelaku Usaha	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Sanga Sanga, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha	200,000,000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30 05	2.01	0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi	8 Pelaku Usaha 6 Pelaku Usaha	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Sanga Sanga, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam berbasis sumber daya alam berbasis sumber daya alam berbasis sumber daya alam berbasis sumber daya alam berbasis sumber daya alam berbasis sumber daya alam berbasis sumber daya alam	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing	Pelaku Usaha	200,000,000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30 05	2.01	0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi	8 Pelaku Usaha 6 Pelaku Usaha	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Sanga Sanga, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Ekonomi Daerah yang	Pelaku Usaha	200,000,000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30 05	2.01	0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi	8 Pelaku Usaha 6 Pelaku Usaha	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Sanga Sanga, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	Pelaku Usaha	200.000,000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30 05 30 05	2.01	0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Peningkatan Citra Produk Ekspor	Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	8 Pelaku Usaha 6 Pelaku Usaha 6 Pelaku Usaha	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Sanga Sanga, Semua Kel/Desa 100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 150.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	Pelaku Usaha	200.000,000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30 05 30 05	2.01	0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Peningkatan Citra Produk Ekspor PROGRAM STANDARDISASI DAN	Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi Pertumbuhan pelaku usaha yang	8 Pelaku Usaha 6 Pelaku Usaha 6 Pelaku Usaha	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Sanga Sanga, Semua Kel/Desa 100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 150.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	Pelaku Usaha	200.000,000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
235	3 3	30 05 30 05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Peningkatan Citra Produk Ekspor PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi Pertumbuhan pelaku usaha yang tertib niaga	6 Pelaku Usaha 6 Pelaku Usaha 31,00 Persen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Sanga Sanga, Semua Kel/Desa 100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 150.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 6. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Pelaku Usaha	200.000,000,000 200.000,000,000 150.000,000,000	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
235	3 3	30 05 30 05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Peningkatan Citra Produk Ekspor PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Pelaksanaan Metrologi Legal,	Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi Pertumbuhan pelaku usaha yang tertib niaga Persentase alat-alat ukur, takar,	8 Pelaku Usaha 6 Pelaku Usaha 6 Pelaku Usaha	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Sanga Sanga, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kel/Desa 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Beraliai tambah dan Berkelanjutan 6. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 6. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 6. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha	200.000,000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
235	3 3	30 05 30 05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Peningkatan Citra Produk Ekspor PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan	Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi Pertumbuhan pelaku usaha yang tertib niaga Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya	6 Pelaku Usaha 6 Pelaku Usaha 31,00 Persen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Sanga Sanga, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kel/Desa 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Pelaku Usaha	200.000,000,000 200.000,000,000 150.000,000,000	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
235	3 3	30 05 30 05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Peningkatan Citra Produk Ekspor PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Pelaksanaan Metrologi Legal,	Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi Pertumbuhan pelaku usaha yang tertib niaga Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang	6 Pelaku Usaha 6 Pelaku Usaha 31,00 Persen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Sanga Sanga, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kel/Desa 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing	Pelaku Usaha Pelaku Usaha	200.000,000,000 200.000,000,000 150.000,000,000	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
235	3 3	30 05 30 05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Peningkatan Citra Produk Ekspor PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan	Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi Pertumbuhan pelaku usaha yang tertib niaga Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya	6 Pelaku Usaha 6 Pelaku Usaha 31,00 Persen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Sanga Sanga, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kel/Desa 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Pelaku Usaha	200.000,000,000 200.000,000,000 150.000,000,000	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
235	3 3	30 05 30 05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Peningkatan Citra Produk Ekspor PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan	Difasilitasi dalam Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi Pertumbuhan pelaku usaha yang tertib niaga Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang	6 Pelaku Usaha 6 Pelaku Usaha 31,00 Persen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara Sanga Sanga, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kel/Desa 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing	Pelaku Usaha Pelaku Usaha	200.000,000,000 200.000,000,000 150.000,000,000	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



	3 3	30 0	06 2.0	000	Pelaksanaan Metrologi Legal,	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat	1500 Unit	850.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Pelaku Usaha	350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
					Berupa Tera, Tera Ulang	Timbang, dan Alat Perlengkapan			Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
						Ditera Ulang			Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
											untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Daerah yang			
											tamban di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
	3 3	30 C	06 2.0	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang	500 Orang	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Pelaku Usaha	150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
					Legal	Metrologi Legal yang Dibina			Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
									Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
											untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
											tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
236	2 :	20 0	17	_	PROGRAM PENGGUNAAN DAN	Persentase Produk dalam negeri -	99,04 Persen	550.000.000,00				berkelalijutali		600,000,000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
230	3 1	30 0	"		PEMASARAN PRODUK DALAM	yang dipasarkan di pasar rakyat	33,04 Feiseil	330.000.000,00						- 600.000.000,00	PERDAGANGAN
					NEGERI	dan di toko modern									
	3 3	30 0	07 2.0	1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran	Persentase realisasi promosi -	90 Persen	550.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Pelaku Usaha	- 600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
					dan Peningkatan Penggunaan						mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
					Produk Dalam Negeri						berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
											untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan			
											tamban di dalam negeri.	Berkelaniutan			
	3 3	30 C	07 2.0	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan	Jumlah UMKM yang memperoleh	20 UMKM	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	Membangun Ekonomi	Pelaku Usaha	250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
					Produk Dalam Negeri di Tingkat	fasilitasi Promosi Penggunaan			Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
					Kabupaten/Kota	Produk Dalam Negeri di Tingkat			Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	Penguatan Daya Saing			
						Kabupaten/Kota					untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
											tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
-+	2 :	20 0	7 20	1 000	Pemasaran dan Peningkatan	Jumlah UMKM yang memperoleh	10 UMKM	150.000.000,00	Kah Kutai Kartanagara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	,	Pelaku Usaha	350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
	3 .	30 0	2.0	1 0000	Penggunaan Produk Dalam Negeri	fasilitasi pemasaran produk dalam	10 OIVINIVI	130.000.000,00	Semua Kecamatan,	DANA BAGITIASIL (DBII)	mengembangkan industri	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	relaku Osalia	330.000.000,00	PERDAGANGAN
					di Tingkat Kabupaten/Kota	negeri melalui kemitraan dengan			Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	Penguatan Daya Saing			LIDAGANGAN
						retail, marketplace, perhotelan dan			,		untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
						jasa akomodasi					tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
												Berkelanjutan			
	3 3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	PERINDUSTRIAN		40.070.997.518,00						44.874.715.342,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
237	3 3	31 0)1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	85 nilai	38.220.997.518,00						- 33.324.715.342,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
					PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										PERDAGANGAN
-	, ,	21 0	01 2.0	14		Ludah dalaman mananan	7 Dokumen	800.000.000,00			Adulting to the second state of the second state of the second se	2 14	ASN Perindag	1 200 000 000 00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
	3 3	31 0	2.0	"	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana,anggaran - dan evaluasi kinerja perangkat	7 Dokumen	800.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN Perindag	- 1.200.000.000,00	PERDAGANGAN
					Evaluasi Kilierja i erangkat Daeran	daerah					berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			LIDAGANGAN
											untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
											untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
											tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
	٠, ١	31 0	01 2.0	01 000:	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	150.000.000,00		DANA BAGI HASIL (DBH)	tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi	ASN Perindag	350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
		31 0	01 2.0	01 000:	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN Perindag	350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1		31 0	01 2.0	01 000:			2 Dokumen	150.000.000,00		DANA BAGI HASIL (DBH)	tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing	ASN Perindag	350.000.000,00	
		31 0	01 2.0	01 000:			2 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang	ASN Perindag	350.000,000,00	
		31 0	01 2.0	01 000:			2 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing	ASN Perindag	350,000,000,00	
		31 0					2 Dokumen 2 Dokumen		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi	ASN Perindag ASN Perindag		PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
					Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja KPD			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkathan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	, and the second		PERDAGANGAN
					Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,		tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing	, and the second		PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
					Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Saing Ekonomi Daerah yang	, and the second		PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
					Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	, and the second		PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
	3 3	31 0	01 2.0	01 0000	Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SWPD	2 Laporan		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	, and the second	\$0.000.000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
	3 3	31 0		01 0000	Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi		50.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	ASN Perindag	\$0.000.000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3 3	31 0	01 2.0	01 0000	Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	2 Laporan	50.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Saing Berkelanjutan 5. Penguatan Saing	ASN Perindag	\$0.000.000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
	3 3	31 0	01 2.0	01 0000	Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	2 Laporan	50.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang	ASN Perindag	\$0.000.000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
	3 3	31 0	01 2.0	01 0000	Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	2 Laporan	50.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	ASN Perindag	\$0.000.000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
	3 3	31 0	01 2.0	0000	Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Per	2 Laporan 2 Laporan	50.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	ASN Perindag ASN Perindag	50.000.000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3 3	31 0	01 2.0	0000	Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil	2 Laporan	50.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 6. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Membangun Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Membangun Ekonomi	ASN Perindag	50.000.000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3 3	31 0	01 2.0	0000	Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata	2 Laporan 2 Laporan	50.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN Perindag ASN Perindag	50.000.000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3 3	31 0	01 2.0	0000	Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil	2 Laporan 2 Laporan	50.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Lambah dan Berkelanjutan	ASN Perindag ASN Perindag	50.000.000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3 3	31 0	01 2.0	0000	Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata	2 Laporan 2 Laporan	50.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN Perindag ASN Perindag	50.000.000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3 :	31 C	01 2.0	0000	Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata	2 Laporan 2 Laporan	50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 6. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 6. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berkonomi Daerah yang Berkonomi Daerah yang	ASN Perindag ASN Perindag ASN Perindag	100.000.000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3 :	31 C	01 2.0	0000	Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Pelaksanaan Pengumpulan Data	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Laporan 2 Laporan	50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 6. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN Perindag ASN Perindag	100.000.000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3 :	31 C	01 2.0	0000	Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan	2 Laporan 2 Laporan 1 Dokumen	50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN Perindag ASN Perindag ASN Perindag	100.000.000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3 :	31 C	01 2.0	0000	Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Pelaksanaan Pengumpulan Data	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Gan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Pendukung Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat	2 Laporan 2 Laporan 1 Dokumen	50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing	ASN Perindag ASN Perindag ASN Perindag	100.000.000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3 :	31 C	01 2.0	0000	Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Pelaksanaan Pengumpulan Data	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan	2 Laporan 2 Laporan 1 Dokumen	50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Daerah yang Unggul Daerah yang Daerah yan	ASN Perindag ASN Perindag ASN Perindag	100.000.000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3 :	31 C	01 2.0	0000	Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Pelaksanaan Pengumpulan Data	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Gan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Pendukung Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat	2 Laporan 2 Laporan 1 Dokumen	50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing	ASN Perindag ASN Perindag ASN Perindag	100.000.000,00	PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



,	31	Ω1 2	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat	Jumlah Berita Acara Hasil Forum	1 Berita Acara	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	ASN Perindag	100,000,000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
	31	01 2	2.01	0010	Daerah Berdasarkan Bidang Urusan	Perangkat Daerah Berdasarkan	I benta Acara	30.000.000,00	Semua Kecamatan.	DANA DAGITIASIE (DBII)	mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	ASIVI CIIIIdag	100.000.000,00	PERDAGANGAN
					yang Diampu dalam Rangka	Bidang Urusan yang Diampu dalam			Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
					Penyusunan Dokumen Perencanaan	Rangka Penyusunan Dokumen					untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
					Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah					tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
						-					-	Berkelanjutan			
3	31	01 2	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah laporan administrasi -	1 laporan	15.934.094.358,00			Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	ASN Perindag	- 15.363.240.339,00	DINAS PERINDUSTRIAN DA
					Daerah	keuangan perangkat daerah yang					mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
						akuntabel					berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
											untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
											tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
												Berkelanjutan			
3	31	01 2	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		115 Orang/bulan	15.534.094.358,00		DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	ASN Perindag	14.877.516.739,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
						dan Tunjangan ASN			Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
									Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	5. Penguatan Daya Saing			
											tambah di dalam negeri.	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan			
											tamban di dalam negeri.	Berkelanjutan			
2	21	01 2	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan	lumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melaniutkan hilirisasi dan	Membangun Ekonomi	ASN Perindag	25,000,000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
3	31	01 2	2.02		Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	ASIN Periffuag	25.000.000,00	PERDAGANGAN
					SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan			Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	Penguatan Daya Saing			FERDAGANGAN
				ľ	SKI B	Keuangan Akhir Tahun SKPD			Serrida Reij Desa		untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
						Redungan / Main Tanan Sid B					tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
											tamban ar adiam negeri.	Berkelanjutan			
3	31	01 2	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	1 Laporan	350.000.000.00	Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	Membangun Ekonomi	ASN Perindag	435.723.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
-		-			Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan			Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
					Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan			Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
						Laporan Keuangan					untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
						Bulanan/Triwulanan/Semesteran					tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
						SKPD						Berkelanjutan			
												-			
3	31	01 2	2.02	8000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	ASN Perindag	25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
					Prognosis Realisasi Anggaran	Analisis Prognosis Realisasi			Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
						Anggaran			Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
											untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
											tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
												Berkelanjutan			
3	31	01 2	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Barang Milik -	2 Dokumen	100.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	ASN Perindag	- 150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
					pada Perangkat Daerah	Daerah (BMD) pada Perangkat					mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
															FERDAGANGAN
						Daerah					berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			PERDAGANGAN
						Daerah					berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang			PENDAGANGAN
						Daerah					berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan			FENDAGAIVGAIV
											berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
3	31	01 2	2.03		Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	1 Laporan	50.000.000,00		DANA BAGI HASIL (DBH)	berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan Membangun Ekonomi	ASN Perindag	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
3	31	01 2	2.03		Laporan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN Perindag	50.000.000,00	
3	31	01 2	2.03			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	1 Laporan	50.000.000,00		DANA BAGI HASIL (DBH)	berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing	ASN Perindag	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
3	31	01 2	2.03		Laporan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Penguatan Daya Śaing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang	ASN Perindag	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
3	31	01 2	2.03		Laporan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	ASN Perindag	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
					Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		01 2		0006	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan	1 Laporan 1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yaen Lingui, Jennilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi 3. Membangun Ekonomi	ASN Perindag ASN Perindag		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
				0006	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilal tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				0006	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,		berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernila tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernila tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
				0006	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yaenilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
				0006	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernila tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernila tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
3	31	01 2	2.03	0006	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan dan dan dan dan dan dan dan dan dan d	ASN Perindag	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31		2.03	0006	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah dokumen Pendapatan			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Membangun Ekonomi		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01 2	2.03	0006	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat	1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN Perindag	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01 2	2.03	0006	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah dokumen Pendapatan	1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumbar daya alam berbasis sumbar daya sumber daya sumb	F. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yaen Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Senguatan Daya Saing Senguatan Daya Saing Senguatan Daya Saing Senguatan Daya Saing Senguatan Daya Saing Senguatan Daya Saing Senguatan Daya Saing	ASN Perindag	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01 2	2.03	0006	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat	1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan anilai untuk meningkatkan alam untuk meningkatkan anilai	S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Berniai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inakusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang	ASN Perindag	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01 2	2.03	0006	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat	1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumbar daya alam berbasis sumbar daya sumber daya sumb	F. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yaen Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Senguatan Daya Saing Senguatan Daya Saing Senguatan Daya Saing Senguatan Daya Saing Senguatan Daya Saing Senguatan Daya Saing Senguatan Daya Saing	ASN Perindag	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01 2	2.03	0006	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan anilai untuk m	S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Danilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Danilai tambah dan Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan Baya Baing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Baria tambah dan Berkelanjutan Baria tambah dan Berkelanjutan Baria tambah dan Berkelanjutan Baria tambah dan Berkelanjutan Baria tambah dan Berkelanjutan Baria Bariah dan Baria Bariah Baria	ASN Perindag	- 50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01 2	2.03	0006	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Laporan 2 Dokumen	50.000.000,00 50.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan Berkelanjutan Berkelanjutan Berkelanjutan Berkelanjutan Berkelanjutan	ASN Perindag ASN Perindag	- 50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAI PERDAGANGAN
3	31	01 2	2.03	0006	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Rencana	1 Laporan 2 Dokumen	50.000.000,00 50.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inikusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inikusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inikusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi	ASN Perindag ASN Perindag	- 50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01 2	2.03	0006	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Rencana	1 Laporan 2 Dokumen	50.000.000,00 50.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkat industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN Perindag ASN Perindag	- 50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAI PERDAGANGAN
3	31	01 2	2.03	0006	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Rencana	1 Laporan 2 Dokumen	50.000.000,00 50.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Indius fidan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Berkelanjutan S. Penguatan Berkelanjutan S. Penguatan Berkelanjutan S. Penguatan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan U	ASN Perindag ASN Perindag	- 50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	01 2	2.03	0006	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Rencana	1 Laporan 2 Dokumen	50.000.000,00 50.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkatan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkatan nilai tambah di dalam negeri.	S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Indigul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Indigul Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Ekonomi Daerah yang Bernilai Daerah yang Ekonomi Daerah yang Dae	ASN Perindag ASN Perindag	- 50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 3	31 31	01 2 01 2 01 2	2.04	0006	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Rencana	1 Laporan 2 Dokumen	50.000.000,00 50.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkatan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkatan nilai tambah di dalam negeri.	S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Indius fidan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Berkelanjutan S. Penguatan Berkelanjutan S. Penguatan Berkelanjutan S. Penguatan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan U	ASN Perindag ASN Perindag	- \$0.000.000,00 25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 3	31 31	01 2 01 2 01 2	2.04	0006	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan 2 Dokumen 1 Dokumen	50.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	berbasis sumber daya alam untuk meningkatan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan Berkelanjutan Berkelanjutan	ASN Perindag ASN Perindag ASN Perindag	- \$0.000.000,00 25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAI PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAI PERDAGANGAN
3 3	31 31	01 2 01 2 01 2	2.04	0006	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan 2 Dokumen 1 Dokumen	50.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkatan nilai tambah di dalam negeri.	S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inakusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Inakusif dan Berkelanjutan barkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi D	ASN Perindag ASN Perindag ASN Perindag	- \$0.000.000,00 25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 3	31 31	01 2 01 2 01 2	2.04	0006	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan 2 Dokumen 1 Dokumen	50.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Indius fidan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan S. Membangun Ekonomi Inklusif dan Barkelanjutan S. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Berkelanjutan Barkela	ASN Perindag ASN Perindag ASN Perindag	- \$0.000.000,00 25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 3	31 31	01 2 01 2 01 2	2.04	0006	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan 2 Dokumen 1 Dokumen	50.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Linkusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Indkusif dan Berkelanjutan S. Penguatan Daya Saing Saing Sai	ASN Perindag ASN Perindag ASN Perindag	- \$0.000.000,00 25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



3 31				Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi -	1 Dokumen	228.000.000,00			Melaniutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	ASN Perindag -	228 000 000 00	DINAS PERINDUSTRIAN DA
	01	2.05		Perangkat Daerah	kepegawaian	Dokumen	228.000.000,00			mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing	ASIN Fellillag	228.000.000,00	PERDAGANGAN
										untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
3 31	l 01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	5 Orang	153.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	ASN Perindag	153.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
				Berdasarkan Tugas dan Fungsi	dan Fungsi yang Mengikuti			Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan		'	PERDAGANGAN
					Pendidikan dan Pelatihan			Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	 Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang 			
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan		1	
3 31	l 01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah Orang yang Mengikuti	3 Orang	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	ASN Perindag	75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAI
				Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi			Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
					Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	 Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang 			
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan		'	
3 31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah layanan administrasi umum -	9 Impanan	1.000.000.000.00			Melanjutkan hilirisasi dan	Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi	ASN Perindag -	2 127 500 000 00	DINAS PERINDUSTRIAN DA
3 31	. 01	2.00		Daerah	perangkat daerah	8 Layanan	1.000.000.000,00			mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	ASN Perindag -	2.137.300.000,00	PERDAGANGAN
										berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing		'	
										untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan		'	
										tamban di dalam negeri.	Berkelanjutan		'	
3 31	l 01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	75.000.000,00		DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	ASN Perindag	75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
				Listrik/Penerangan Bangunan	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing			PERDAGANGAN
				Kantor	Kantor yang Disediakan			Serriua Kei/ Desa		untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang		'	
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan		'	
2 24		2.00	0004	December 2 Debendents Indiana	Luciale Dalest Dales and a statility of the	2.0-1	250 000 000 00	N-b N t-l N-t	DANA BAGI HASIL (DBH)	Adelest Alexa billiotect des	Berkelanjutan	ACM Device de la	450,000,000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
3 31	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	250.000.000,00	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN Perindag	150.000.000,00	PERDAGANGAN
					, ,			Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing		'	
										untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang		'	
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan		'	
3 31	l 01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	2 Paket	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	ASN Perindag	75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
				Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan			Semua Kecamatan,		mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing		'	PERDAGANGAN
								Semua Kel/Desa		untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang		'	
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan		'	
2 21	01	2.00	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang	1 Paket	150,000,000,00	Vala Vistai Vastanagasa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	Berkelanjutan 3. Membangun Ekonomi	ASN Perindag	150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
3 31	01	2.00	0007	Penyeulaan banan/ivialenai	Disediakan	1 Paket	150.000.000,00	Semua Kecamatan.	DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	ASN Perificag	150.000.000,00	PERDAGANGAN
								Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	3. Pengembangan dan		'	
										untuk meningkatkan nilai	penguatan kawasan ekonomi		'	
										tambah di dalam negeri.	potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan		'	
3 31	1 01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	100 Laporan	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	Membangun Ekonomi	ASN Perindag	650.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
				dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan		'	PERDAGANGAN
					SKPD			Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	 Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang 		'	
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan		'	
											Berkelanjutan			
3 31	01	2.06		Penatausahaan Arsip Dinamis pada	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00		DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN Perindag	262.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		1		JN D	Uraib Aurainia hana aven			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			LIDAGANGAN
										untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang		'	
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan		'	
3 31	l 01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem	Jumlah Dokumen Dukungan	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	Membangun Ekonomi	ASN Perindag	200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
		1		Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan			Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan		· '	PERDAGANGAN
		1		pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD			Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	 Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang 			
		1								tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
_	+-	1	.	D	Lucial tests Personales P	<u> </u>				Adalas tratas a tratas a tra	Berkelanjutan	ACM Particular		DINIAC DEDINATION OF THE PROPERTY OF THE PROPE
3 31	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang - Milik Daerah Penunjang Urusan	4 Jenis Pengadaan	1.414.044.400,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN Perindag -	1.740.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DA PERDAGANGAN
1		1		Daerah	Pemerintah Daerah					berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
	- 1	1	1							untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang	1		I
]					tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan	1		



3	3:	1 01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas		1 Unit	630.750.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	ASN Perindag	650.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
					Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang			Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
						Disediakan			Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
											untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
											tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
											tamban di dalam negeri.	Berkelanjutan			
2	2.	1 01	2.07	0005	Dongodoon Mohol	Lumlah Dakat Mahal yang		1 11min	475.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BACILIACII (DDII)	Malaniuskaa hilisiaasi dan		A CAL Dorin do a	200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAI
3	3.	1 01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang		1 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	Membangun Ekonomi	ASN Perindag	200.000.000,00	
						Disediakan			Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
									Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	Penguatan Daya Saing			
											untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
											tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
												Berkelanjutan			
3	3:	1 01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin		11 Unit	218.294.400,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	ASN Perindag	300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
	٠.	- 01	2.07	0000	Lainnya	Lainnya yang Disediakan		11 0	Semua Kecamatan,	State Control of Control	mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	715141 Cilliang	300.000.000,00	PERDAGANGAN
					Laiiiiya	Lailillya yalig Diseulakali						Pengembangan dan			FERDAGANGAN
									Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam				
											untuk meningkatkan nilai	penguatan kawasan ekonomi			
											tambah di dalam negeri.	potensial yang terintegrasi			
												dan berkelanjutan			
-	31	4 04	2.07	0011		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana		1 Unit	00 000 000 00 11 11 11 11	DANA DA CULIACII (DDU)			ASN Perindag	90.000.000,00	
3	3.	1 01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Pendukung Gedung Kantor atau		1 Unit	90.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan.	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	ASN Perindag	90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DA PERDAGANGAN
			1												LINDAGAINGAIN
			1		Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan			Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
			1				1 1				untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
			1				1 1				tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
			1				1					Berkelanjutan	1		
3	31	1 01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah waktu penyediaan jasa -		12 Bulan	17.475.309.050,00		Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	ASN Perindag -	11.236.425.293,00	DINAS PERINDUSTRIAN DA
					Pemerintahan Daerah	penunjang urusan pemerintahan					mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
						daerah yang disediakan					berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
						,,					untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
											tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
											tamban di dalam negeri.	Berkelaniutan			
_	- 2	4 04	2.00	0004	Daniel de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la co			4.1	2024 000 00 11 11 11 11 11	DANIA DA CILIACII (DDIII)			ACM Desired -	2 024 000 00	
3	3.	1 01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		1 Laporan	2.024.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	ASN Perindag	2.024.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
						Surat Menyurat			Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
									Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	Penguatan Daya Saing			
											untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
											tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
												Berkelanjutan			
3	3.	1 01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		3 Laporan	2.486.308.450,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	ASN Perindag	2,000,000,000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
,	٦.	1 01	2.00	0002				3 сароган		DAIVA BAGITIASIE (DDII)		Inklusif dan Berkelanjutan	ASIVICIIIIdag	2.000.000,000	PERDAGANGAN
					Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan			Semua Kecamatan,		mengembangkan industri				PERDAGANGAN
						Listrik yang Disediakan			Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	Penguatan Daya Saing			
											untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
											tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
												Berkelanjutan			
3	3:	1 01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	14.986.976.600,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	ASN Perindag	9.234.401.293,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
					Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang			Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	_		PERDAGANGAN
					1	Disediakan			Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
											untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
											tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
											tamban di dalam negeri.				
_	4	_										Berkelanjutan			
3	31	1 01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah -		1600 Unit	1.219.549.710,00		Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	ASN Perindag -	1.219.549.710,00	DINAS PERINDUSTRIAN DA
					Penunjang Urusan Pemerintahan						mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
					Daerah						berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
											untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
											tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
											tumbum ar aurum negern	Berkelaniutan			
3		1 01	2.00	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan	+	7 Unit	141.233.100,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA PACILIACII (DOII)	Melanjutkan hilirisasi dan	Membangun Ekonomi	ASN Perindag	141 222 400 00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
3	33	1 01	2.09	0001			1	/ Unit		DAINA BAGI HASIL (DBH)			ASIN PERITURE	141.253.100,00	
			1		Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Dinas atau Kendaraan Dinas			Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
			1		Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jabatan yang Dipelihara dan	1 1		Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
1	1	1	1		Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya	1				untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang	1		
	1		1								tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan	1		
			1				1					Berkelanjutan	1		
3	31	1 01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas		53 Unit	378.316.610,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DRH)	Melanjutkan hilirisasi dan	Membangun Ekonomi	ASN Perindag	378.316.610.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
1 -	1	1	1		Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Operasional atau Lapangan yang	1		Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	1	2. 2.2 22.320,00	PERDAGANGAN
	1	1	1			Dipelihara dan dibayarkan Pajak							1		LIDOGORIVAN
		1	1		Perizinan Kendaraan Dinas		1		Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing	1		
		1	1		Operasional atau Lapangan	dan Perizinannya	1				untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang	1		
			1						1		tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
				i l							1	Berkelanjutan	L		
						Jumlah Gedung Kantor dan		4 Unit	500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	ASN Perindag	500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DA
3	3:	1 01	2.09	0009											PERDAGANGAN
3	31	1 01	2.09	0009	Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang			Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			FERDAGANGAN
3	31	1 01	2.09	0009		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing			FERDAGANGAN
3	31	1 01	2.09	0009							berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			FERDAGANGAN
3	31	1 01	2.09	0009							berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang			PERDAGANGAN
3	31	1 01	2.09	0009							berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			FENDAGAINGAIN



3	31	. 01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	5 Unit	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	ASN Perindag	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
					dan Prasarana Gedung Kantor atau	Gedung Kantor atau Bangunan		Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
					Bangunan Lainnya	Lainnya yang		Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
					, ,	Dipelihara/Direhabilitasi				untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
										turibur ur udiam negeri.	Berkelanjutan			
2	31	01	2.00	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	E I Init	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BACILIASII (BBII)	Melanjutkan hilirisasi dan	· ·	ASN Perindag	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
3	31	- 01	2.09	0011			5 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)		Membangun Ekonomi	ASIN Perificag	100.000.000,00	
					dan Prasarana Pendukung Gedung	Pendukung Gedung Kantor atau		Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan			PERDAGANGAN
					Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang		Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	Penguatan Daya Saing			
						Dipelihara/Direhabilitasi				untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
238 3	31	. 02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dokumen perencanaan dan unit - sentra pengembangan industri	1 Dokumen	1.450.000.000,00					- 11.100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DA PERDAGANGAN
3	31	. 02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana	Jumlah dokumen perencanaan dan -	1 Sentra IKM	1.450.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Industri Kecil	- 11.100.000.000,00	
					Pembangunan Industri	jumlah sentra		,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	Menengah (IKM)		PERDAGANGAN
					Kabupaten/Kota					berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing	,		
										untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
										tamban di dalam negeri.	Berkelanjutan			
-	24	00	2.04	0004	_		4 Delemen	100 000 000 00 11 11 11 11 11	DANA DA CULIACII (DDUI)				0.00	
3	31	. 02	2.01	0001		Jumlah Dokumen Rencana	1 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	Membangun Ekonomi	Industri Kecil	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
			1	1	Pembangunan Industri	Pembangunan Industri		Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	Menengah (IKM)		PERDAGANGAN
			1	1	Kabupaten/Kota			Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			1
			1	1						untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			1
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
3	31	. 02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi.	1 Dokumen	1.150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Industri Kecil	750.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
_					Pelaksanaan Pemberdayaan	Sinkronisasi, dan Pelaksanaan		Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	Menengah (IKM)		PERDAGANGAN
					Industri dan Peran Serta	Pemberdayaan Industri dan Peran		Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	Penguatan Daya Saing	Wichengan (IKW)		LIDAGANGAN
								Serilua Kely Desa						
					Masyarakat	Serta Masyarakat				untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
						ļ .					,			
3	31	. 02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Evaluasi	1 Dokumen	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Industri Kecil	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
					Rencana Pembangunan Industri	Pelaksanaan Rencana		Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	Menengah (IKM)		PERDAGANGAN
						Pembangunan Industri		Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	Penguatan Daya Saing			
										untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
										_	Berkelanjutan			
239 3	31	. 04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM	Persentase IKM yang dalam SIINAS -	7,74 Persen	400.000.000,00					- 450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DA
					INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			·						PERDAGANGAN
3	31	. 04	2.01		Penyediaan Informasi Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan -	56 IKM	400.000.000.00		Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Industri Kecil	450 000 000 00	DINAS PERINDUSTRIAN DA
3	31	. 04	2.01				DO INIVI	400.000.000,00					- 450.000.000,00	
					untuk Informasi Industri untuk IUI,	informasi industri secara lengkap				mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	Menengah (IKM)		PERDAGANGAN
					IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan	dan terkini				berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing			
					Kabupaten/Kota					untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			
										tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
3	31	. 04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	1 Dokumen	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Industri Kecil	200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN
			1	1	dan Analisis Data Industri, Data	Pengumpulan, Pengolahan dan		Semua Kecamatan,		mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	Menengah (IKM)		PERDAGANGAN
	1		1	1	Kawasan Industri serta Data Lain	Analisis Data Industri, Data		Semua Kel/Desa		berbasis sumber daya alam	5. Penguatan Daya Saing	" '		
		1 1	l	1	Lingkup Kabupaten/Kota Melalui	Kawasan Industri serta Data Lain				untuk meningkatkan nilai	Ekonomi Daerah yang			1
					Sistem Informasi Industri Nasional	Lingkup Kabupaten/Kota Melalui				tambah di dalam negeri.	Unggul, Bernilai tambah dan			
										tamban di dalam negeri.				
											Berkelanjutan			
					(SIINas)	Sistem Informasi Industri Nasional				1	1			
					(SIINas)	(SIINas)								
3	31	. 04	2.01	0003	(SIINas) Pemantauan dan Evaluasi	(SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan	1 Dokumen	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan	3. Membangun Ekonomi	Industri Kecil	250.000.000,00	
3	31	. 04	2.01	0003	(SIINas) Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan	(SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan	1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri	Inklusif dan Berkelanjutan	Industri Kecil Menengah (IKM)	250.000.000,00	PERDAGANGAN
3	31	. 04	2.01	0003	(SIINas) Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri	(SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan	1 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing		250.000.000,00	
3	31	. 04	2.01	0003	(SIINas) Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam	(SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang		250.000.000,00	
3	31	. 04	2.01	0003	(SIINas) Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri	(SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan	1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan		250.000.000,00	
3	31	. 04	2.01	0003	(SIINas) Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam	(SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang		250.000.000,00	
3	31	. 04	2.01	0003	(SIINas) Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam	(SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan			
3			2.01	0003	(SIINas) Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Sekretariat Daerah UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMI	(SINas) Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 220.095.227.729,00 220.095.227.729,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan		147.090.526.083,00 147.090.526.083,00	PERDAGANGAN SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
4	01		2.01	0003	(SIINas) Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dan Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Sekretariat Daerah UNISUR PENDUKUNG URUSAN PEMI SEKRETARIAT DAERAH	(SiNas) Jumilah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SilNas		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 220.095.227.729,00 220.095.227.729,00 220.095.227.729,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan		147.090.526.083,00 147.090.526.083,00 147.090.526.083,00	PERDAGANGAN SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
4			2.01	0003	(SIINas) Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampalan Data ke SIINas Sekretariat Daerah UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMI SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN	(SINas) Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 220.095.227.729,00 220.095.227.729,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan		147.090.526.083,00 147.090.526.083,00	PERDAGANGAN SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
4	01		2.01	0003	(SIINas) Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dan Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Sekretariat Daerah UNISUR PENDUKUNG URUSAN PEMI SEKRETARIAT DAERAH	(SiNas) Jumilah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SilNas		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 220.095.227.729,00 220.095.227.729,00 220.095.227.729,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	Inklusif dan Berkelanjutan 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan		147.090.526.083,00 147.090.526.083,00 147.090.526.083,00	PERDAGANGAN SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH



4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	280.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Aparatur	-	195.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
											Publik				
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politiki, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	01				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur			Sekretariat daerah
4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politiki, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur		90.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan	78.624.414.562,00		-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		60.737.167.163,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	500 Orang/bulan	77.952.614.562,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		59.827.312.763,00	Sekretariat daerah
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		100.684.400,00	SEKRETARIAT DAERAH

4	01	01 2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	50.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
				Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tahun SKPD dan Laporan Hasil		Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang	
				SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel	
					Keuangan Akhir Tahun SKPD				untuk mendukung	
									transformasi pelayanan	
									publik	
									1. Penataan dan	
									Pengembangan Tata Kelola	
1 1									Pemerintahan dan Pelayanan	
$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}$									Publik	
4	01	01 2.02	0007	,	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	1 Laporan	521.800.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	521.800.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
				Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan		Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang	
1 1				Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel	
1 1					Laporan Keuangan				untuk mendukung	
					Bulanan/Triwulanan/Semesteran				transformasi pelayanan	
1 1					SKPD				publik	
									1. Penataan dan	
									Pengembangan Tata Kelola	
									Pemerintahan dan Pelayanan	
									Publik	
\rightarrow				 		+ + + +				
4	01	01 2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	50.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
				Prognosis Realisasi Anggaran	Analisis Prognosis Realisasi		Semua Kecamatan,	l l	pemerintahan daerah yang	
					Anggaran		Semua Kel/Desa	l l	profesional dan akuntabel	
							1		untuk mendukung	
					1			l l	transformasi pelayanan	
					1			l l	publik	
					1		1	1	1. Penataan dan	
									Pengembangan Tata Kelola	
1 1									Pemerintahan dan Pelayanan	
									Publik	
\rightarrow	04	04 3.00	,,	A desired and a second second	Lundah Dalaman Daman Milita		440 420 000 00		7. Peningkatan tata kelola -	- 492.950.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01 2.03	13	Administrasi Barang Milik Daerah		84 Dokumen	149.420.000,00	-		- 492.950.000,00 SERRETARIAT DAERAF
				pada Perangkat Daerah	Daerah (BMD) pada Perangkat				pemerintahan daerah yang	
					Daerah				profesional dan akuntabel	
									untuk mendukung	
									transformasi pelayanan	
									publik	
									1. Penataan dan	
									Pengembangan Tata Kelola	
									Pemerintahan dan Pelayanan	
									Publik	
4	01	01 2.03	3 0001	Penyusunan Perencanaan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	2 Dokumen	39.420.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	78.840.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
'	01	2.00	5 0001	Kebutuhan Barang Milik Daerah	Milik Daerah SKPD	2 Bokumen	Semua Kecamatan,	Britter Britain Britain	pemerintahan daerah yang	70.010.000,00
1 1				SKPD	William Bacifali Sia B		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel	
				SKED			Selliua Kely Desa			
									untuk mendukung	
1 1									transformasi pelayanan	
							1		publik	
					1		1	1	1. Penataan dan	
					1		1	l l	Pengembangan Tata Kelola	
					1		1	i I		
					1				Pemerintahan dan Pelayanan	
									Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
4	01	01 2.03	3 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan	1 Dokumen	35.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola -	60.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01 2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	35.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik	60.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01 2.03	03 0002			1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola - pemerintahan daerah yang	60.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01 2.03	03 0002			1 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	60.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01 2.03	03 0002			1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola - pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	60,000,000,000 SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01 2.03	03 0002			1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola - pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	60.000.000,000 SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01 2.03	03 0002			1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola - pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	60.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01 2.03	03 0002			1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	60.000.000,000 SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01 2.03	03 0002			1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	60.000.000,000 SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01 2.03	03 0002			1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	60.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
				SKPD	Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kel/Desa		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
		01 2.03		SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang	Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian	1 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola -	60.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 60.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
				SKPD	Barang Milik Daerah SKPD		Semua Kel/Desa		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang	Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilalan Barang Milik Daerah dan Hasil		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola -	
				SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang	Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	
				SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang	Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	
				SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang	Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	
				SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang	Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	
				SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang	Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	
				SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang	Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	
				SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang	Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	

1 4														
	01	01 7	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Lanoran Dakansiliasi da		1 Laporan	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HACII /DDIN	- 7. Peningkatan tata kelola	_ 1	142.660.000,00 SEKRETARIAT	AT DAFPAL
7	01	01 2	2.03	0005		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan		1 Laporani		DAINA BAGI HASIL (DBH)		-	142.000.000,00 SERRETARIAT	AT DAERAH
					Laporan Barang Milik Daerah pada	Penyusunan Laporan Barang Milik			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			
					SKPD	Daerah pada SKPD			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
4	01	01 2	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik	Jumlah Laporan Penatausahaan		1 Laporan	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	151.450.000,00 SEKRETARIAT	AT DAERAH
					Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD		· ·	Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			
					Ducton pada Sin B	barang willik bacran pada sia b			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
									Sellida Kely Desa		untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	+_+			<u></u>		 		1.5.		+				
4	01	01 2	2.05		Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi	=	1 Dokumen	25.000.000,00	I	- 7. Peningkatan tata kelola	-	45.000.000,00 SEKRETARIA	AT DAERAH
	1 1			J	Perangkat Daerah	Kepegawaian				İ	pemerintahan daerah yang		1	
				l		1				I	profesional dan akuntabel	1		
	1 1			l		1				İ	untuk mendukung		1	
											transformasi pelayanan			
	1 1			l		1				İ	publik		1	
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
4	01	01 1	2.05 (0002	Pendataan dan Pengolahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan		1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola		45.000.000,00 SEKRETARIAT	AT DAEDAH
	01	01 2	2.03					1 DOKUITIETI		DANA BAGITIASIL (DBIT)			45.000.000,00 SERRETARIAT	AT DALKAIT
					Administrasi Kepegawaian	Pengolahan Administrasi			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			
						Kepegawaian			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1 Danataan dan			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
											Pengembangan Tata Kelola			
4	01	01 2	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah layanan Administrasi		6 Layanan	6.775.000.000,00		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5.457.177.500,00 SEKRETARIA	AT DAERAH
4	01	01 2	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	•	6 Layanan	6.775.000.000,00		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola		5.457.177.500,00 SEKRETARIA [*]	at daerah
4	01	01 2	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		6 Layanan	6.775.000.000,00		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	5.457.177.500,00 SEKRETARIA	AT DAERAH
4	01	01 2	2.06				-	6 Layanan	6.775.000.000,00		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	•	5.457.177.500,00 SEKRETARIA'	AT DAERAH
4	01	01 2	2.06					6 Layanan	6.775.000.000,00		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		5.457.177.500,00 SEKRETARIA ¹	AT DAERAH
4	01	01 2	2.06				-	6 Layanan	6.775.000.000,00		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	5.457.177.500,00 SEKRETARIA*	at daerah
4	01	01 2	2.06				-	6 Layanan	6.775.000.000,00		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		5.457.177.500,00 SEKRETARIA'	at Daerah
4	01	01 2	2.06					6 Layanan	6.775.000.000,00		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	5.457.177.500,00 SEKRETARIA	AT DAERAH
4	01	01 2	2.06				-	6 Layanan	6.775.000.000,00		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		5.457.177.500,00 SEKRETARIA	AT DAERAH
4	01	01 2	2.06					6 Layanan	6.775.000.000,00		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		5.457.177.500,00 SEKRETARIA	at daerah
4	01	01 2	2.06				-	6 Layanan	6.775.000.000,00		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	•	5.457.177.500,00 SEKRETARIA [*]	at daerah
					Daerah	Umum Perangkat Daerah					Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
				0002	Daerah Penyediaan Peralatan dan		-	6 Layanan	6.775.000.000,00 1.140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-	5.457.177.500,00 SEKRETARIA*	
				0002	Daerah Penyediaan Peralatan dan	Umum Perangkat Daerah Jumiah Paket Peralatan dan				DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola			
				0002	Daerah	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang			1.140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang	-		
				0002	Daerah Penyediaan Peralatan dan	Umum Perangkat Daerah Jumiah Paket Peralatan dan	-		1.140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel	-		
				0002	Daerah Penyediaan Peralatan dan	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	-		1.140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-		
				0002	Daerah Penyediaan Peralatan dan	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang			1.140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-		
				0002	Daerah Penyediaan Peralatan dan	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	•		1.140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik			
				0002	Daerah Penyediaan Peralatan dan	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang			1.140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-		
				0002	Daerah Penyediaan Peralatan dan	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	•		1.140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			
				0002	Daerah Penyediaan Peralatan dan	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	-		1.140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-		
				0002	Daerah Penyediaan Peralatan dan	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang			1.140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang	-		
4	01	01 2	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	261 Paket	1.140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penatahan dan Pelayanan Publik 1. Penatahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1.140.000.000,00 SEKRETARIAT	AT DAERAH
4		01 2	2.06	0002	Daerah Penyediaan Peralatan dan	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor			1.140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Keamatan, Semua Kel/Desa 4.830.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - T. Peningkatan tata kelola	-		AT DAERAH
4	01	01 2	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	261 Paket	1.140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.830.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1.140.000.000,00 SEKRETARIAT	AT DAERAH
4	01	01 2	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor		261 Paket	1.140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Keamatan, Semua Kel/Desa 4.830.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - T. Peningkatan tata kelola		1.140.000.000,00 SEKRETARIAT	at daerah
4	01	01 2	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor		261 Paket	1.140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.830.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1 Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1 Antanan darah yang profesional dan akuntabel pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel		1.140.000.000,00 SEKRETARIAT	at daerah
4	01	01 2	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor		261 Paket	1.140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.830.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		1.140.000.000,00 SEKRETARIAT	at daerah
4	01	01 2	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	-	261 Paket	1.140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.830.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penatahan dan Pelayanan Publik 1. Penatahan dan Pelayanan publik 1. Penatahan dan Pelayanan publik 1. Penatahan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Palayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Palayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Palayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Palayanan Publik		1.140.000.000,00 SEKRETARIAT	at daerah
4	01	01 2	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor		261 Paket	1.140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.830.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan daerah yang transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		1.140.000.000,00 SEKRETARIAT	at daerah
4	01	01 2	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor		261 Paket	1.140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.830.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		1.140.000.000,00 SEKRETARIAT	at daerah
4	01	01 2	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor		261 Paket	1.140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.830.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		1.140.000.000,00 SEKRETARIAT	at daerah
4	01	01 2	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor		261 Paket	1.140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.830.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penatahan dan Pelayanan Publik 1. Penatahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Palayanan publik 1. Penataan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola		1.140.000.000,00 SEKRETARIAT	at daerah
4	01	01 2	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor		261 Paket	1.140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.830.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		1.140.000.000,00 SEKRETARIAT	at daerah



4 (
	01 01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	51 Paket	t 225.000.000,00 Kab. Kutai Karta	egara, DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	225.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
				Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan		Semua Kecama	in,	pemerintahan daerah yang		
					, , , ,		Semua Kel/Desa	*	profesional dan akuntabel		
									untuk mendukung		
									transformasi pelayanan		
									publik		
									1. Penataan dan		
									Pengembangan Tata Kelola		
									Pemerintahan dan Pelayanan		
									Publik		
4	01 01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	12401 E	Ookumen 30,000,000,00 Kab, Kutai Karta	egara, DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	100.627.500,00 SEKRETARIAT DAERAH
				Peraturan Perundang-undangan	dan Peraturan Perundang-		Semua Kecama		pemerintahan daerah yang		
				relaturan relunuang-unuangan			Semua Kel/Desa	III,	profesional dan akuntabel		
					Undangan yang Disediakan		Semua kei/Desa				
									untuk mendukung		
									transformasi pelayanan		
									publik		
									1. Penataan dan		
									Pengembangan Tata Kelola		
									Pemerintahan dan Pelayanan		
									Publik		
++	04 01	2.00	0000	Barratar and Barrat Karrat	Lucial Lancaca Sancalan and	2001	500 000 000 00 W 1 W 1 W 1 W 1	DANIA DA CILIACII (COLII		 	4 000 000 000 00 55405740117 5155111
4 (01 01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	2364 La				-	1.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
	1	1	1	dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Semua Kecama	in,	pemerintahan daerah yang		
		1	1		SKPD		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		
									untuk mendukung		
	1	1	1		1				transformasi pelayanan		
	1	1	1		1				publik		
		1	1		1				1. Penataan dan		
									Pengembangan Tata Kelola		
									Pemerintahan dan Pelayanan		
									Publik		
4 (01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada	Jumlah Dokumen Penatausahaan	600 Dok	kumen 50.000.000,00 Kab. Kutai Karta	egara, DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	131.550.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
				SKPD	Arsip Dinamis pada SKPD		Semua Kecama	ın,	pemerintahan daerah yang		
							Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		
							Schild Rely Sest		untuk mendukung		
									transformasi pelayanan		
									publik		
									1. Penataan dan		
									Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		
									Pengembangan Tata Kelola		
4 (01 01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik -	102 Unit	t 3,648,578,190,00		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	2.165.047.510.00 SEKRETARIAT DAFRAH
4 (01 01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	102 Unit	t 3.648.578.190,00		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola		2.165.047.510,00 SEKRETARIAT DAERAH
4 4	01 01	2.07		Penunjang Urusan Pemerintah	Daerah Penunjang Urusan	102 Unit	t 3.648.578.190,00		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	2.165.047.510,00 SEKRETARIAT DAERAH
4 (01 01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		102 Unit	t 3.648.578.190,00		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		2.165.047.510,00 SEKRETARIAT DAERAH
4 (01 01	2.07		Penunjang Urusan Pemerintah	Daerah Penunjang Urusan	102 Unif	t 3.648.578.190,00		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		2.165.047.510,00 SEKRETARIAT DAERAH
4	01 01	2.07		Penunjang Urusan Pemerintah	Daerah Penunjang Urusan	102 Unit	t 3.648.578.190,00		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	2.165.047.510,00 SEKRETARIAT DAERAH
4	01 01	2.07		Penunjang Urusan Pemerintah	Daerah Penunjang Urusan	102 Unit	t 3.648.578.190,00		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		2.165.047.510,00 SEKRETARIAT DAERAH
4	01 01	2.07		Penunjang Urusan Pemerintah	Daerah Penunjang Urusan	102 Unit	t 3.648.578.190,00		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	2.165.047.510,00 SEKRETARIAT DAERAH
4	01 01	2.07		Penunjang Urusan Pemerintah	Daerah Penunjang Urusan	102 Unit	t 3.648.578.190,00		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		2.165.047.510,00 SEKRETARIAT DAERAH
4	01	2.07		Penunjang Urusan Pemerintah	Daerah Penunjang Urusan	102 Unit	it 3.648.578.190,00		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		2.165.047.510,00 SEKRETARIAT DAERAH
4	01 01	2.07		Penunjang Urusan Pemerintah	Daerah Penunjang Urusan	102 Unit	t 3.648.578.190,00		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		2.165.047.510,00 SEKRETARIAT DAERAH
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
	D1 01			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan	102 Unit	3.000.000.000,00 Kab. Kutai Karta		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-	2.165.047.510,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.516.469.320,00 SEKRETARIAT DAERAH
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		3.000.000.000,00 Kab. Kutai Karta Semua Kecama		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan		3.000.000.000,00 Kab. Kutai Karta		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel	-	
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		3.000.000.000,00 Kab. Kutai Karta Semua Kecama		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		3.000.000.000,00 Kab. Kutai Karta Semua Kecama		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		3.000.000.000,00 Kab. Kutai Karta Semua Kecama		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel	-	
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		3.000.000.000,00 Kab. Kutai Karta Semua Kecama		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		3.000.000.000,00 Kab. Kutai Karta Semua Kecama		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		3.000.000.000,00 Kab. Kutai Karta Semua Kecama		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		3.000.000.000,00 Kab. Kutai Karta Semua Kecama		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dareah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		
4 (01 01	2.07	0001	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	3.000.000.000,00 Kab. Kutai Karta Semua Kecama Semua Kel/Desi	in,	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1.516.469.320,00 SEKRETARIAT DAERAH
4 (2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana		3.000.000.000,00 Kab. Kutai Karta Semua Kecama Semua Kel/Desi	iegara, DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan derah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-	
4 (01 01	2.07	0001	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	3.000.000.000,00 Kab. Kutai Karta Semua Kecama Semua Kel/Desi	iegara, DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan dan Patayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang	-	1.516.469.320,00 SEKRETARIAT DAERAH
4 (01 01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	2 Unit	3.000.000.000,00 Kab. Kutai Karta Semua Kecama Semua Kel/Desi t 648.578.190,00 Kab. Kutai Karta Semua Kecama	iegara, DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan derah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola		1.516.469.320,00 SEKRETARIAT DAERAH
4 (01 01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	2 Unit	3.000.000.000,00 Kab. Kutai Karta Semua Kecama Semua Kel/Desi	iegara, DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel demerintahan darah yang profesional dan akuntabel demerintahan darah yang profesional dan akuntabel		1.516.469.320,00 SEKRETARIAT DAERAH
4 (01 01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	2 Unit	3.000.000.000,00 Kab. Kutai Karta Semua Kecama Semua Kel/Desi t 648.578.190,00 Kab. Kutai Karta Semua Kecama	iegara, DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan derah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan derah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Auntabel untuk mendukung profesional dan akuntabel untuk mendukung		1.516.469.320,00 SEKRETARIAT DAERAH
4 (01 01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	2 Unit	3.000.000.000,00 Kab. Kutai Karta Semua Kecama Semua Kel/Desi t 648.578.190,00 Kab. Kutai Karta Semua Kecama	iegara, DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		1.516.469.320,00 SEKRETARIAT DAERAH
4 (01 01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	2 Unit	3.000.000.000,00 Kab. Kutai Karta Semua Kecama Semua Kel/Desi t 648.578.190,00 Kab. Kutai Karta Semua Kecama	iegara, DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		1.516.469.320,00 SEKRETARIAT DAERAH
4 (01 01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	2 Unit	3.000.000.000,00 Kab. Kutai Karta Semua Kecama Semua Kel/Desi t 648.578.190,00 Kab. Kutai Karta Semua Kecama	iegara, DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		1.516.469.320,00 SEKRETARIAT DAERAH
4 (01 01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	2 Unit	3.000.000.000,00 Kab. Kutai Karta Semua Kecama Semua Kel/Desi t 648.578.190,00 Kab. Kutai Karta Semua Kecama	iegara, DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola		1.516.469.320,00 SEKRETARIAT DAERAH
4 (01 01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	2 Unit	3.000.000.000,00 Kab. Kutai Karta Semua Kecama Semua Kel/Desi t 648.578.190,00 Kab. Kutai Karta Semua Kecama	iegara, DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		1.516.469.320,00 SEKRETARIAT DAERAH



4			_	1						,			
	01	01 2.08	18	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah waktu penyediaan Jasa -	11	2 Bulan	13.083.016.920,00		- 7. Peningkatan tata kelola	-	15.863.488.584,00 Si	EKRETARIAT DAERAH
				Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan					pemerintahan daerah yang			
					Daerah yang disediakan					profesional dan akuntabel			
					Daeran yang disediakan					untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
4	01 (01 2.08	8 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1	12 Laporan	5.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	45.000.000,00 S'	EKRETARIAT DAERAH
				, ,	Surat Menyurat		·	Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		· I	
					Suracivicilyarac			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
								Seriiua kei/ Desa					
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
	$oxed{oxed}$									Publik			
4	01 (01 2.08	18 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	11	12 Laporan	9.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	7.000.000.000,00 S	EKRETARIAT DAERAH
1				Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan			Semua Kecamatan,	. ,	pemerintahan daerah yang			
			1	united	Listrik yang Disediakan			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
1			1	l	LISU IK YANG DISEUIAKAN			Seriua kei/Desa					
1			1	l						untuk mendukung			
1			1	l						transformasi pelayanan			
1			1	l						publik			
			1	1	1					1. Penataan dan			
1			1	l									
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
4	01 (01 2.08	8 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1	12 Laporan	953.689.200,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	2.953.689.200,00 SE	FKRFTARIAT DAFRAH
1				Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			
			1	. C. Ciigkapaii kaiittii								l l	
1			1	l	yang Disediakan			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
1			1							untuk mendukung	l l		
			1	1						transformasi pelayanan		l l	
1			1	l						publik			
1			1							1. Penataan dan	l l		
1			1								l l		
			1	1	1					Pengembangan Tata Kelola			
1			1	l						Pemerintahan dan Pelayanan			
1			1	l						Publik			
4	01 (01 2.08	8 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1	12 Laporan	2.624.327.720,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	5.864.799.384,00 SE	EKRETARIAT DAFRAH
1	l l '			Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		3.554.755.554,000	
			1	Kalitui									
I			1		Disediakan			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel	l l		
I			1							untuk mendukung	l l		
			1							transformasi pelayanan	l l		
			1	1						publik		l l	
1		1	1	1								l l	
										1. Penataan dan	l l	1	
					l l						1		
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
	01	01 255	10	Daniella and Daniel and Market	Lundah Parana Milit Parana		22 11=2	13 212 173 249 00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik		C 200 704 770 72	ENDETADIAT DAFO
4	01 (01 2.09	19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah -	13	132 Unit	12.312.172.348,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola		6.338.704.778,00 Si	EKRETARIAT DAERAH
4	01 (01 2.09	19	Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah -	1:	32 Unit	12.312.172.348,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	6.338.704.778,00 St	EKRETARIAT DAERAH
4	01 (01 2.09	19		Jumlah Barang Milik Daerah -	11	32 Unit	12.312.172.348,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola		6.338.704.778,00 SI	EKRETARIAT DAERAH
4	01 (01 2.09	19	Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah -	1:	32 Unit	12.312.172.348,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	6.338.704.778,00 SI	ekretariat daerah
4	01 (01 2.09	19	Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah -	1	32 Unit	12.312.172.348,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		6.338.704.778,00 SI	ekretariat daerah
4	01 (01 2.09	9	Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah -	1	32 Unit	12.312.172.348,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	6.338.704.778,00 SI	ekretariat daerah
4	01 (01 2.09	19	Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah -	1	32 Unit	12.312.172.348,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		6.338.704.778,00 SI	ekretariat daerah
4	01 (01 2.09	19	Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah -	1	32 Unit	12.312.172.348,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	6.338.704.778,00 S.	ekretariat daerah
4	01	01 2.09	19	Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah -	1	32 Unit	12.312.172.348,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		6.338.704.778,00 S	ekretariat daerah
4	01 (01 2.09	19	Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah -	1	32 Unit	12.312.172.348,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		6.338.704.778,00 S	EKRETARIAT DAERAH
4	01 (01 2.09	9	Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah -	1	32 Unit	12.312.172.348,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		6.338.704.778,00 S	EKRETARIAT DAERAH
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		
		01 2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas		132 Unit	1.312.172.348,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola	-		ekretariat daerah
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang			1.312.172.348,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang pemerint	-		
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang			1.312.172.348,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang pemerint	-		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak			1.312.172.348,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-		
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang			1.312.172.348,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dal an akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak			1.312.172.348,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan transformasi pelayanan	-		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak			1.312.172.348,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak			1.312.172.348,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan transformasi pelayanan	-		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak			1.312.172.348,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak			1.312.172.348,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengambangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola	-		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak			1.312.172.348,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-		



4	0	01 01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan		16 Unit	8.800.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	3.224.968.250,00 SEKRETARIAT DAERAH
	1		1		Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang			Semua Kecamatan,	, ,	pemerintahan daerah yang		
	1	1	1		1	Dipelihara/Direhabilitasi			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		
						, ,					untuk mendukung		
	1		1		ĺ						transformasi pelayanan		
	1	1	1		1				1		publik		
	1	1	1		1				1		1. Penataan dan		
	1		1						1				
	1	1	1		1				1		Pengembangan Tata Kelola		1
	1		1		ĺ						Pemerintahan dan Pelayanan		
	_		1								Publik		1
4	0	01 01	2.09	0010		Jumlah Sarana dan Prasarana	[[15 Unit	1.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	1.401.564.180,00 SEKRETARIAT DAERAH
	1		1		dan Prasarana Gedung Kantor atau	Gedung Kantor atau Bangunan			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		
					Bangunan Lainnya	Lainnya yang			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		
	1	1	1		1	Dipelihara/Direhabilitasi			1		untuk mendukung		1
	1	1	1		1				1		transformasi pelayanan		1
	1		1		ĺ						publik		
	1	1	1		1				1		1. Penataan dan		1
	1	1	1		1				1		Pengembangan Tata Kelola		
	1		1		ĺ						Pemerintahan dan Pelayanan		
	1		1		ĺ						Publik		
	+-	01 01	3.00	0044	Demolihasaan/Dababilitaasi Ca	Lumlah Carana dan Danasara		240 Unit	1 200 000 000 00 1/2 1/2 1/2 1/2	DANA DACITIACII (DC)			000 000 000 00 05 05 05 05 05 05 05 05 0
4	10	01 01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana		[340 Unit	1.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	[-	900.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
	1		1		dan Prasarana Pendukung Gedung	Pendukung Gedung Kantor atau			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		
	1		1		Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		
	1	1	1		1	Dipelihara/Direhabilitasi			1		untuk mendukung		
	1	1	1		1				1		transformasi pelayanan		1
	1	1	1		1				1		publik		1
	1	1	1		1				1		1. Penataan dan		
	1	1	1		1				1		Pengembangan Tata Kelola		
											Pemerintahan dan Pelayanan		
	1	1	1		1				1		Publik		
4	١,	01 01	2 11		Administrasi Keuangan dan	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil -	 	2 Orang	1.972.080.388,00		- 7. Peningkatan tata kelola	 	1.918.153.965,00 SEKRETARIAT DAERAH
4	۱ °	01 01	2.11] [2 Ordrig	1.9/2.060.306,00			[1.916.153.905,00 SERRETARIAT DAERAH
	1	1	1		Operasional Kepala Daerah dan	Kepala Daerah			1		pemerintahan daerah yang		1
	1	1	1		Wakil Kepala Daerah				1		profesional dan akuntabel		
	1		1		ĺ						untuk mendukung		
	1	1	1		1				1		transformasi pelayanan		1
	1		1		ĺ						publik		
	1		1		ĺ						1. Penataan dan		
	1	1	1		1				1		Pengembangan Tata Kelola		1
	1	1		1	1	1			i l			i I	
	1										Pemerintahan dan Pelayanar		
Δ											Pemerintahan dan Pelayanar Publik		
1		01 01	2.11	0001	Penyediaan Gaii dan Tuniangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaii		24 Orang/Bulan	972,080,388,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASII (DRH)	Publik	-	918.153.965.00 SFKRFTARIAT DAFRAH
	0	01 01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan		24 Orang/Bulan	972.080.388,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan.	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik - 7. Peningkatan tata kelola	-	918.153.965,00 SEKRETARIAT DAERAH
	0	01 01	2.11	0001	Kepala Daerah dan Wakil Kepala	dan Tunjangan Kepala Daerah dan		24 Orang/Bulan	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	918.153.965,00 SEKRETARIAT DAERAH
	. 0	01 01	2.11	0001		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		24 Orang/Bulan		DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	918.153.965,00 SEKRETARIAT DAERAH
	0	01 01	2.11	0001	Kepala Daerah dan Wakil Kepala	dan Tunjangan Kepala Daerah dan		24 Orang/Bulan	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung - 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	918.153.965,00 SEKRETARIAT DAERAH
	0	01 01	2.11	0001	Kepala Daerah dan Wakil Kepala	dan Tunjangan Kepala Daerah dan		24 Orang/Bulan	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		918.153.965,00 SEKRETARIAT DAERAH
	. 0	01 01	2.11	0001	Kepala Daerah dan Wakil Kepala	dan Tunjangan Kepala Daerah dan		24 Orang/Bulan	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		918.153.965,00 SEKRETARIAT DAERAH
	. α	01 01	2.11	0001	Kepala Daerah dan Wakil Kepala	dan Tunjangan Kepala Daerah dan		24 Orang/Bulan	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	918.153.965,00 SEKRETARIAT DAERAH
	0	01 01	2.11	0001	Kepala Daerah dan Wakil Kepala	dan Tunjangan Kepala Daerah dan		24 Orang/Bulan	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		918.153.965,00 SEKRETARIAT DAERAH
	α	01 01	2.11	0001	Kepala Daerah dan Wakil Kepala	dan Tunjangan Kepala Daerah dan		24 Orang/Bulan	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		918.153.965,00 SEKRETARIAT DAERAH
	α	01 01	2.11	0001	Kepala Daerah dan Wakil Kepala	dan Tunjangan Kepala Daerah dan		24 Orang/Bulan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	
4		01 01			Kepala Daerah dan Wakii Kepala Daerah	dan Tunjangan Kepala Daerah dan		24 Orang/Bulan	Semua Kecamatan,		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		918.153.965,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
4					Kepala Daerah dan Wakii Kepala Daerah	dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
4					Kepala Daerah dan Wakii Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakii Kepala	dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.000.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darekal yang publik	-	
4					Kepala Daerah dan Wakii Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up	dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.000.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara,		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		
4					Kepala Daerah dan Wakii Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakii Kepala	dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.000.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		
4					Kepala Daerah dan Wakii Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakii Kepala	dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.000.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan transformasi pelayanan		
4					Kepala Daerah dan Wakii Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakii Kepala	dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.000.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	
4					Kepala Daerah dan Wakii Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakii Kepala	dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.000.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		
4					Kepala Daerah dan Wakii Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakii Kepala	dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.000.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Tansformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	
4					Kepala Daerah dan Wakii Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakii Kepala	dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.000.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-	
		01 01	2.11	0003	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 Orang	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dar Pelayanan Publik		1.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
			2.11	0003	Kepala Daerah dan Wakii Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakii Kepala	dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Daerah			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.000.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengemba	-	
		01 01	2.11	0003	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 Orang	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengemba		1.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
		01 01	2.11	0003	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Daerah		2 Orang	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dar Pelayanan Publik	-	1.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
		01 01	2.11	0003	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Daerah		2 Orang	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daren yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daran pengembangan Tata Kelola pemerintahan daran Publik	-	1.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
		01 01	2.11	0003	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Daerah		2 Orang	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	1.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
		01 01	2.11	0003	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Daerah		2 Orang	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan da Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	1.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
		01 01	2.11	0003	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Daerah		2 Orang	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Publik		1.000.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
		01 01	2.11	0003	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Daerah		2 Orang	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		1.000.000,000 SEKRETARIAT DAERAH
		01 01	2.11	0003	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Daerah		2 Orang	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola		1.000.000,000 SEKRETARIAT DAERAH
		01 01	2.11	0003	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Daerah		2 Orang	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	1.000.000,000 SEKRETARIAT DAERAH

Komunikasi Pimpinan Protokol dan Komunikasi Pimpinan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	4 01													
Manual Accordance Manu			2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan	Jumlah Dokumen Pengelolaan		3 Dokumen	250.000.000.00 Kah Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASII (DRH)	- 7 Peningkatan tata kelola -		550,000,000 00	SEKRETARIAT DAERAH
Seminated/place Comparison	1 1	01	2.13	3001				5 Sokumen		S (DBII)			330.000.000,00	Jenneralia i Daeriali
with recording properties of the control of the con					Alialisis Japatali	Keleliibagaali dali Alialisis Jabatali								
Service of the servic									Seriua kely Desa					
Section Programment Prog														
Section Sect														
Part Part														
Processing of the process of the p														
A COLUMN FOR THE PROPERTY FINE COLUMN FOR THE LANGE AND ADDRESS OF THE														
4 GS 20 233 000 Castitus refrequence Addition Tata Listance Notice and a Company of Company and Company Addition Tata Listance Notice and a Company of Company and Company of Company and Company of											Pemerintahan dan Pelayanan			
A Discrete A D											Publik			
A Discrete A D	4 01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi		3 Laporan	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
Somma AGA/Pleas Somma AGA/Pleas Somma AGA/Pleas Somma AGA/Pleas Somma AGA/Pleas Somma AGA/Pleas Somma AGA/Pleas Somma AGA/Pleas Somma AGA/Pleas Somma AGA/Pleas Perrigidation Keeps deep Reformable Anish Dollarmen Perrigidation Morely Again Anish Dollarmen Perrigidation Anish Dollarmen Perrigidation Morely Again Anish Dollarmen Perrigidation An								· ·					·	
The second secon					Landaria	r ciayanan rada caksana								
trunch many pulywane public and public publi									Schlad Kely Desa					
A D D D D D D D D D														
Part Part														
Pergentangs Tax Acida Programma (an Acida Prog														
4 01 01 02 23 000 Peringkrises Kineja dan Reformasi Sirvikasi Antala Peringkrises Kineja dan Reformasi Birchasi Antala Peringkrises Kineja dan Reformasi Birchasi Antala Peringkrises Kineja dan Reformasi Birchasi Antala Peringkrises Kineja dan Reformasi Birchasi Antala Peringkrises Kineja dan Reformasi Birchasi Antala Peringkrises Kineja dan Reformasi Birchasi Antala Peringkrises Kineja dan Reformasi Birchasi Antala Peringkrises Kineja dan Reformasi Birchasi Antala Peringkrises Kineja Peringkrises Kineja Peringkrises Kin														
4 05 01 2.3 000 Permyslatin Kinerja dan Reformasi Jumish Dolumen Permyslatin Lais kelida - permyslatin Kinerja dan Reformasi Jumish Dolumen Permyslatin Lais kelida - permysla														
4 01 01 02 2.3 000 Periophatan dis Registan di Regista														
Semula Recommanian, Semula Recommania, Semula Recommania, Semula Recommania, Semula Recommania, Semula Recommania, Semula Recommania, Semula Recommania, Semula Recommania, Semula Recommania, Semula Recommania, Semula Recommania, Semula Recommania, Semula Recommania,											Publik			
Semas Recommans, Semas Recommans Birodysal Semas Recommans Birodysal Semas Recommans, Semas	4 01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi	Jumlah Dokumen Peningkatan		2 Dokumen	600.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara.	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	1	1.196.620.000.00	SEKRETARIAT DAERAH
Semus Ke/Desa professional dan subtrabbel autruk mendukung transformasi pelagnan s. Pertuatan dan Pengembangan Tasa Kelola Pengembangan Tasa Kelol		1 1	-											
until mendulurg transformas jolegian public dan public dan Pergendian Kualitas Petayanan Public dan Tata Laksana 4 01 01 2.33 0004 Monitoring, Evaluasi dan Pergendian Kualitas Petayanan Public dan Tata Laksana Public dan Tata Laksana Pelaji dan Tata Laksana Pelaji dan Tata Laksana 4 01 01 02 2.33 0005 Goordinai dian Penyapuanan Japatik dan Tata Laksana Pergendian Kualitas Pelayanan Public dan Tata Laksana Pelaji dan Tata Laksana Pelaji dan Tata Laksana Pelaji dan Tata Laksana Pelaji dan Tata Laksana Pergendian Kualitas Pelayanan Public dan Tata Laksana Pelaji dan Tata Laksana Pengenbangan Tata Kedia Pengenbangan Tata Ked														
Transformans polysyman polysik 1. Pentalan dian Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pelaksanaan Publik dan Tata Laksana Pelaksanaan Publik dan Tata Laksana Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pelaksanaan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pelaksanaan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pengendalian Kualitas Pengendalian Kuali						l l			Serilua Kei/ Desa					
A OI OI 2.13 OOO Montoning, Evaluate dan Progremanagan Tata Keloba Pro						l l								
1. Pendatan dan Perperintahan dan Pelayanan Publik dan Tata Labansa Pengerintahan dan Pengerintahan da						l l								
Pergembangan Tata Kelola Penemintahan dan Pelayanan Pulaik dan Tata Lakana Pergembangan Tata Kelola Penemintahan dan Pelayanan Pulaik dan Tata Lakana Pergembangan Tata Kelola Penemintahan dan Pelayanan Pulaik dan Tata Lakana Pergembangan Tata Kelola Penemintahan dan Pelayanan Pulaik dan Tata Lakana Pelayanan Pulaik dan Tata Lakana Pelayanan Pulaik dan Tata Lakana Pelayanan Pulaik dan Tata Lakana Pelayanan Pulaik dan Tata Lakana Pelayanan Pulaik dan Tata Lakana Pelayanan Pulaik dan Tata Lakana Pelayanan Pulaik dan Tata Lakana Pelayanan Pulaik dan Tata Lakana Penemintahan dan Pelayanan Pulaik dan Tata Lakana Penemintahan dan Pelayanan Pulaik dan Tata Lakana Penemintahan dan Pelayanan Pulaik dan Tata Lakana Penemintahan dan Pelayanan Pulaik dan Penemintahan dan Penemintahan dan Pelayanan Pulaik dan Penemintahan dan Penemintahan dan Penemintahan dan Penemintah		1 1												
Pemerintaha dan Pelayaran Publik dan Tata Laksana 4 01 01 2.13 0004 Montroring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayaran Publik dan Tata Laksana 5 2 Dokumen 5 2 Dokume						l l								
4 01 01 2.13 000 Monitoring, Evaluasi dan Pengendialina Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pengendialina Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pelayanan Publik dan											Pengembangan Tata Kelola			
4 01 01 2.13 0004 Nontroining, Fealulusi dan Pengendalian Kullitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Publik dan Tata Laksana Danish Dolumen Kondinang dan Semus Keramatan, Semus Kel/Desa Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Danish Rujitas Pelayan											Pemerintahan dan Pelayanan			
Pergendalian Kusilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Publik dan Tata Laksana Publik dan Tata Laksana Pelayanan Publik dan Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pelayanan Publik														
Pengendalian Kusilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Publik dan Tata Laksana Publik dan Tata Laksana Publik dan Tata Laksana Pelayanan Publik dan Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pelayanan Publik dan Pelayanan Publik dan Komunikasi Pimpinan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4 01	01	2 13	0004	Monitoring Evaluasi dan	Jumlah Dokumen Monitoring		2 Dokumen	200 000 000 00 Kah Kutai Kartanegara	DANA RAGI HASII (DRH)	- 7 Peningkatan tata kelola -		400,000,000,00	SEKRETARIAT DAERAH
Publik dan Tata Laksana Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pelayanan Publik I. Penatsan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintah dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintah dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintah dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintah dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintah dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintah dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintah dan Aprilak Pemerintah dan Aprilak Pemerintah dan Aprilak Pemerintah dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintah dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintah dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintah dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintah Pengembangan Tata Kelola Pemerintah Pengembangan Tata Kelola Pemerintah Pelayanan Publik Pemerintah Pengembangan Tata Kelola Pemerintah Pengembangan Tata Kelola Pemerintah Pengembangan Tata Kelola Pemerintah Pengembangan Tata Kelola Pemerintah Pengembangan Tata Kelola Pemerintah Pengembangan Tata Kelola Pemerintah Pengembangan Tata Kelola Pemerintah Pengembangan Tata Kelola Pemerintah Pengembangan Tata Kelola Pemerintah Pengembangan Tata Kelola Pemerintah Pengembangan Tata Kelola Pemerintah Pengembangan Tata Kelola Pemerintah Pengembangan Tata Kelola Pemerintah Pengembangan Tata Kelola Pemerintah Pengembangan Pen	- 01	01	2.13	0001				2 Dokumen		Driver Bridge (BBH)			100.000.000,00	SERVE TO WAR TO SERVE TO WAR
untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan														
transformasi pelayanan publik 1. Pentanan dan Pelayanan Publik 1. Pentanan dan Pelayanan Publik 1. Pentanan dan Pelayanan Publik 1. Pentanan dan Pelayanan Publik 1. Pentanan dan Pelayanan Publik 1. Pentanan dan Pelayanan Publik 1. Pentanan dan Pelayanan Publik 1. Pentanan dan Pelayanan Publik 1. Pentanan dan Pelayanan Publik 1. Pentanan dan Pelayanan Publik 1. Pentanan dan Pelayanan publik 1. Pentanan dan Pelayanan Publik 1.					Publik dan Tata Laksana	Pelayanan Publik dan Tata Laksana			Semua Kel/Desa					
publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelol														
Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata K														
Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Potik Pengerintahan dan Pelayanan Potik Pengerintahan dan Pelayanan Potik Pengerintahan dan Pelayanan Potik Pengerintahan dan Pelayanan Potik Pengerintahan dan Pelayanan Potik Pengerintahan daren Pengerintahan dare														
Pemerintahan dan Pelayanan Publik 4 01 01 2.13 000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 4 01 01 01 2.13 000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk memdukung transformasi pelayanan Publik 1. Penalasan dan Pelayanan Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk memdukung transformasi pelayanan publik Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk memdukung transformasi pelayanan publik Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk memdukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Tata kelola Pemerintahan daerah yang transformasi pelayanan publik Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk memdukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Tata kelola Pemerintahan daerah yang transformasi pelayanan publik Pengembangan Tata kelola Pemerintahan daerah yang transformasi pelayanan publik Pemerintahan daerah yang transformasi pelayanan publik Pengembangan Tata kelola Pemerintahan daerah yang transformasi pelayanan publik Pengembangan Tata kelola Pemerintahan daerah yang transformasi pelayanan publik Pengembangan Tata kelola Pemerintahan daerah yang transformasi pelayanan publik											1. Penataan dan			
4 01 01 2.13 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Pemerintah Daera											Pengembangan Tata Kelola			
4 01 01 2.13 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Pemerintah Daera											Pemerintahan dan Pelayanan			
4 01 01 2.13 000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Penyusunan Laporan Kinerja Pemerin														
Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Pemerintah Dae	4 01	01	2 13	0005	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan		2 Dokumen	200 000 000 00 Kah Kutai Kartanegara	DANA RAGI HASII (DRH)	- 7 Peningkatan tata kelola -		400 000 000 00	SEKRETARIAT DAERAH
Semua Kel/Desa profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1	- 01	01	2.13	0005				2 Dokumen		Driver Bridge (BBH)			100.000.000,00	SERVE TO WAR TO SERVE TO WAR
untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengeminangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Protokol dan Komun					Laporan Kinerja Pemerintan Daeran									
transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengemintahan dan Pe						Pemerintan Daeran			Seriiua Kei/ Desa					
publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1001 Kegiatan 19.566.489.536,00 - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akhyang profesion														
1. Penataan dan Pengemintahan dan Pelayanan Pendemintahan dan Pelayanan Publik 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Protokol dan Komunikasi Pimpinan - 1001 Kegiatan 19.566.489.536,00 - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik														
Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Protokol dan K														
Pemerinkan dan Pelayanan Publik 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Protokol						l l								
Pemerikan dan Pelayanan Potokol dan Komunikasi Pimpinan - 1001 Kegiatan Potokol dan Komunikasi Pimpinan - 1001 Kegiatan 19.566.489.536,00 - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akhyang profes		1 1									Pengembangan Tata Kelola			
4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Protokol		1 1				l								
Komunikasi Pimpinan Protokol dan Komunikasi Pimpinan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		1 1												
Komunikasi Pimpinan Protokol dan Komunikasi Pimpinan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	4 01	01	2 14		Pelaksanaan Protokol dan	lumlah Kegiatan Pelaksanaan		1001 Kegistan	19 566 489 536 00		- 7 Paningkatan tata kalala	<u> </u>	12 493 941 750 00	SEKRETARIAT DAERAH
profesional dan akuntabel untuk mendukung transformdukung publik	~ UI	V1	2.14					TOOT REGISTRAL	13.300.403.330,00			ľ	12.755.541.750,00	VENNETANIAT DAERAH
untuk mendukung transformasi pelayanan publik					коншикам етпритап	FIOLOKOI dari Komunikasi Pimpinan								
transformasi pelayanan publik		1 1												
		1 1												
		1 1												
		1 1									publik			
1. Penataan dan		1 1									1. Penataan dan			
Pengembangan Tata Kelola		1 1												
Pemerintahan dan Pelayanan		1 1				l								
Publik						l l								
	4 01	01	214	0001	Earilitari Konrotokelan	Jumiah Langran Hasil Feelikeei	+ +	1 Lanores	6 011 993 350 00 Value Vista Vanta	DANA PACILIACII (DD:")		+	4 467 107 250 00	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01	01	2.14	0001	газінтазі керготокоїап			± Lapuran		DAINA BAGI HASIL (DRH)			4.407.197.350,00	SERNETARIAT DAEKAH
Semua Kecamatan, pemerintahan daerah yang		1 1				керготокогап								
Semua Kel/Desa profesional dan akuntabel		1 1							Semua Kel/Desa					
untuk mendukung						l l								
transformasi pelayanan		1 1									transformasi pelayanan			
						l l					publik			
1. Penataan dan		1 1				l					1. Penataan dan			
Pengembangan Tata Kelola		1 1												
		1 1												
Damarintahan dan Dalauranan	1 1													
Pemerintahan dan Pelayanan Publik						l l					Dublik		I	



4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi		1 Laporan	10.814.630.900,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola	_	6.969.744.40	0,00 SEKRETARIAT DAERAH
						Komunikasi Pimpinan			Semua Kecamatan,			pemerintahan daerah yang			-,
						Komanikasi impinan			Semua Kel/Desa			profesional dan akuntabel			
									Schida Kely Besa			untuk mendukung			
												transformasi pelayanan			
												publik			
												1. Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
- 4	. 01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian		1 Laporan	1.839.976.286,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola		1.057.000.00	0,00 SEKRETARIAT DAERAH
						Tugas Pimpinan		.,	Semua Kecamatan,			pemerintahan daerah yang			
						rugas i inipinan			Semua Kel/Desa			profesional dan akuntabel			
									Schida Kely Besa			untuk mendukung			
												transformasi pelayanan			
												publik			
												1. Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
241 4	. 01	02		t	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	Persentase kebijakan Tata	-	100 Persen	77.927.455.400.00	Ì			İ	- 34.789 624 44	3,00 SEKRETARIAT DAERAH
7	"	~		1	KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pemerintahan yang ditindaklanjuti		1		1	1		İ	3-17-05-024-44	
				1	NESCATTERNAN NANTAT	r ememicanan yang unmuaklanjuti							1		
-+		02	2.01	1	Administrati Tata Damanint I	Lumbah Daluman Administra 7-4-		20 Delumer	1.150.000.000,00	1	Manualwat reference:	7 Danisalistas teta k-1-1-	A	1 024 042 2	5,00 SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	1	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata		30 Dokumen	1.150.000.000,00		Memperkuat reformasi	7. Peningkatan tata kelola	Aparatur	1.024.912.24	SEKKETAKIAT DAERAH
						Pemerintahan					politik, hukum dan birokrasi,	pemerintahan daerah yang			
											serta memperkuat	profesional dan akuntabel			
											pencegahan dan	untuk mendukung			
											pemberantasan korupsi,	transformasi pelayanan			
											narkoba, judi, dan	publik			
											penyeludupan.	6. Pengembangan			
											,	konektivitas dan			
												pembangunan infrastruktur			
												secara terpadu dan merata			
												secara terpadu dan merata			
	_														
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan		1 Dokumen	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		7. Peningkatan tata kelola	Aparatur	418.600.00	0,00 SEKRETARIAT DAERAH
					Pemerintahan	Administrasi Pemerintahan			Semua Kecamatan,		politik, hukum dan birokrasi,	pemerintahan daerah yang			
									Semua Kel/Desa		serta memperkuat	profesional dan akuntabel			
											pencegahan dan	untuk mendukung			
											pemberantasan korupsi,	transformasi pelayanan			
											narkoha judi dan	nuhlik			
											narkoba, judi, dan	publik 6 Rongombangan			
											narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Pengembangan			
												6. Pengembangan konektivitas dan			
												6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur			
												6. Pengembangan konektivitas dan			
											penyeludupan.	6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata			
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan		3 Dokumen	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	penyeludupan. Memperkuat reformasi	6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur	Aparatur	355.162.24	5,00 SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		3 Dokumen	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	penyeludupan. Memperkuat reformasi	6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Aparatur	355.162.24	5,00 SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	0002				3 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Aparatur	355.162.24	5,00 SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	0002				3 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)	penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Aparatur	355.162.24	5,00 SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	0002				3 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	Aparatur	355.162.24	5,00 SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	0002				3 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Fengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	Aparatur	355.162.24	5,00 SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	0002				3 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	penyeludupan. Memperkuat reformasi politiki, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Fengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Aparatur	355.162.24	5,00 SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	0002				3 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk menduktung transformasi pelayanan publik Pengembangan	Aparatur	355.162.24	5,00 SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	0002				3 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	penyeludupan. Memperkuat reformasi politiki, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Fengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Fengembangan konektivitas dan	Aparatur	355.162.24	5,00 SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	0002				3 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	penyeludupan. Memperkuat reformasi politiki, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur	Aparatur	355.162.24	5,00 SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	0002				3 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	penyeludupan. Memperkuat reformasi politiki, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Fengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Fengembangan konektivitas dan	Aparatur	355.162.24	5,00 SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	0002				3 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	penyeludupan. Memperkuat reformasi politiki, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur	Aparatur	355.162.24	5,00 SEKRETARIAT DAERAH
					Kewilayahan	Administrasi Kewilayahan			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata			
		02			Kewilayahan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi	Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi		3 Dokumen 3 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 550.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi	6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata 7. Peningkatan tata kelola	Aparatur		5,00 SEKRETARIAT DAERAH D,00 SEKRETARIAT DAERAH
					Kewilayahan	Administrasi Kewilayahan			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 550.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk menduktung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang			
					Kewilayahan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi	Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 550.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		penyeludupan. Memperkuat reformasi politiki, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politiki, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			
					Kewilayahan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi	Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 550.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung			
					Kewilayahan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi	Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 550.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan			
					Kewilayahan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi	Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 550.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik			
					Kewilayahan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi	Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 550.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan			
					Kewilayahan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi	Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 550.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			
					Kewilayahan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi	Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 550.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
					Kewilayahan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi	Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 550.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			



	_				1			·				
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Orang /Lembaga Penerima Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	2584 Orang dan Lembaga	74.818.941.400,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	- 31.331.198.203,00 SEKRETARI	RIAT DAERAH
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	26.698.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik	19.804.473.500,00 SEKRETARI	IAT DAERAH
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	320.941.400,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	62.000.000,00 SEKRETARI	iat daerah
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7 Dokumen	47.600.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10.964.724.703,00 SEKRETARI	IAT DAERAH
4	01	02	2.02	0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100 Keluarga	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	250.000.000,00 SEKRETARI	IAT DAERAH
4	01	02	2.02	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	250.000.000,00 SEKRETARI	IAT DAERAH
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Regulasi hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	562 Dokumen	1.150.000.000,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- 1.025.000.000,00 SEKRETARI	RIAT DAERAH



4	01	02 2.03	3 0001	Fasilitasi Penyusunan Produk	Jumlah Produk Hukum Daerah yang	500 Dokumen	500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	500,000.000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	'	2.00	3001	Hukum Daerah	Disusun	300 Solumen	Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang	355.566.666,00	
				Transam Bacran	J.Sasan		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		
							Serial Rely Sesa		untuk mendukung		
							,		transformasi pelayanan		
							,		publik		
							,				
							,		1. Penataan dan		
							,		Pengembangan Tata Kelola		
							,		Pemerintahan dan Pelayanan		
									Publik		
4	01	02 2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan	6 Kasus	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
					Fasilitasi Bantuan Hukum		Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		
							Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		
									untuk mendukung		
							,		transformasi pelayanan		
									publik		
									1. Penataan dan		
							,				
							,		Pengembangan Tata Kelola		
									Pemerintahan dan Pelayanan		
									Publik		
4	01	02 2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum dan	2 Dokumen	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		1		dan	Pengelolaan Informasi Hukum yang		Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		1
					Didokumentasi		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		
				Pengelolaan Informasi Hukum					untuk mendukung		
		1		J					transformasi pelayanan		1
		1							nublik		1
									1. Penataan dan		
							,		Pengembangan Tata Kelola		
							,		Pemerintahan dan Pelayanan		
									Publik		
4	01	02 2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi -	20 Dokumen	808.514.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola -	- 1.408.514.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
					Kerjasama Daerah		,		pemerintahan daerah yang		
							,		profesional dan akuntabel		
							,		untuk mendukung		
									transformasi pelayanan		
									publik		
							,		1. Penataan dan		
							,				
							,		Pengembangan Tata Kelola		
							,		Pemerintahan dan Pelayanan		
									Publik		
4	01	02 2.04	1 0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	12 Dokumen	240.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	542.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
					Kerja Sama Dalam Negeri		Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		
							Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		
							,		untuk mendukung		
									transformasi pelayanan		
							,		publik		
							,		1. Penataan dan		
		1	1						Pengembangan Tata Kelola		
		1							Pemerintahan dan Pelayanan		1
									Publik		
$-\!\!\!+\!\!\!\!-$	-										
4	01	02 2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	2 Dokumen	298.514.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	548.514.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		1	1		Kerja Sama Luar Negeri		Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		
							Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		
		1							untuk mendukung		1
									transformasi pelayanan		
									publik		
		1							1. Penataan dan		1
									Pengembangan Tata Kelola		
		1							Pemerintahan dan Pelayanan		1
		1							Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1
——	L			 	<u> </u>						
4	01	02 2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	6 Laporan	270.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	318.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		1			Pelaksanaan Kerja Sama		Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		1
							Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		
									untuk mendukung		
									transformasi pelayanan		
									publik		
									1. Penataan dan		
1		1									1
		1							Pengembangan Tata Kelola		1
				1	i	1 1 1	1	i e	Pemerintahan dan Pelayanan		1
					l		- I		l		
									Publik		
242 4	01	03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang - ekonomi yang ditindaklanjuti	100 Persen	4.181.600.385,00		Publik	- 3.646.850.385,00	SEKRETARIAT DAERAH



				_												
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan -	1	30 Dokumen	991.250.000,00		Memperkuat reformasi	7. Peningkatan tata kelola	Aparatur	-	718.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
					Perekonomian	Kebijakan Perekonomian					politik, hukum dan birokrasi,	pemerintahan daerah yang				
											serta memperkuat	profesional dan akuntabel				
											pencegahan dan	untuk mendukung				
											pemberantasan korupsi,	transformasi pelayanan				
											narkoba, judi, dan	publik				
											penyeludupan.	1. Penataan dan				
												Pengembangan Tata Kelola				
												Pemerintahan dan Pelayanan				
												Publik				
_														+		
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring			Dokumen	390.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		7. Peningkatan tata kelola	Aparatur		340.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
					dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan				Semua Kecamatan,		politik, hukum dan birokrasi,	pemerintahan daerah yang				
					BUMD dan BLUD	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan			Semua Kel/Desa		serta memperkuat	profesional dan akuntabel				
						BUMD dan BLUD					pencegahan dan	untuk mendukung				
											pemberantasan korupsi,	transformasi pelayanan				
											narkoba, judi, dan	publik				
											penyeludupan.	Penataan dan				
											penyeludupan.					
												Pengembangan Tata Kelola				
												Pemerintahan dan Pelayanan				
												Publik				
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian	1	Laporan	351.250.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi	7. Peningkatan tata kelola	Aparatur		231.250.000.00	SEKRETARIAT DAERAH
	1	1 1		1	Perekonomian	dan Distribusi Perekonomian		.,	Semua Kecamatan,		politik, hukum dan birokrasi,	pemerintahan daerah yang				
	1			1	i ci ckondililali	dan Distribusi FEIEKUNUNNAN						profesional dan akuntabel				
	1	1 1		1					Semua Kel/Desa	1	serta memperkuat		I	1		
				1					1	1	pencegahan dan	untuk mendukung	Ī			
				1					1	1	pemberantasan korupsi,	transformasi pelayanan	Ī			
	1	1 1		1						1	narkoba, judi, dan	publik	I	1		
	1			1							penyeludupan.	1. Penataan dan				
											p , p	Pengembangan Tata Kelola				
												Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
												1 dbilk				
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil	4	Dokumen	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi	7. Peningkatan tata kelola	Aparatur		147.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
					Ekonomi Mikro Kecil	Perencanaan dan Pengawasan			Semua Kecamatan,		politik, hukum dan birokrasi,	pemerintahan daerah yang				
						Ekonomi Mikro Kecil			Semua Kel/Desa		serta memperkuat	profesional dan akuntabel				
						EKONOMI WIKI O KECII			Sellida Kely Desa		pencegahan dan	untuk mendukung				
											pemberantasan korupsi,	transformasi pelayanan				
											narkoba, judi, dan	publik				
											penyeludupan.	1. Penataan dan				
												Pengembangan Tata Kelola				
												Pengembangan Tata Kelola				
1												Pemerintahan dan Pelayanan				
٠.	-		2.02		Pololium Adulation			4.0-1	705 250 205 20			Pemerintahan dan Pelayanan Publik			555 400 305 00	CENTER DATE DATE DATE
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan -	1	4 Dokumen	706.350.385,00		-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-	-	656.100.385,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan - Administrasi Pembangunan -	1	.4 Dokumen	706.350.385,00		-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	-	656.100.385,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02			Jumlah Dokumen Pelaksanaan - Administrasi Pembangunan	1	4 Dokumen	706.350.385,00		-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-	-	656.100.385,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02			Jumlah Dokumen Pelaksanaan - Administrasi Pembangunan	1	4 Dokumen	706.350.385,00		-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-		656.100.385,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02			Jumlah Dokumen Pelaksanaan - Administrasi Pembangunan	3	4 Dokumen	706.350.385,00		-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	-	656.100.385,00	Sekretariat daerah
4	01	03	2.02			Jumlah Dokumen Pelaksanaan - Administrasi Pembangunan	1	4 Dokumen	706.350.385,00			Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-		656.100.385,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	3	4 Dokumen	706.350.385,00		-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	-	656.100.385,00	sekretariat daerah
4	01	03	2.02			Jumlah Dokumen Pelaksanaan - Administrasi Pembangunan	1	4 Dokumen	706.350.385,00		•	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	-	656.100.385,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	3	4 Dokumen	706.350.385,00			Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	-	656.100.385,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02			Jumlah Dokumen Pelaksanaan - Administrasi Pembangunan		.4 Dokumen	706.350.385,00			Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-	-	656.100.385,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02			Jumlah Dokumen Pelaksanaan - Administrasi Pembangunan		.4 Dokumen	706.350.385,00		•	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	-		
				0001	Pembangunan	Administrasi Pembangunan				DANA BAGI HASII (DRH)		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-		
				0001	Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Program	Administrasi Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi		4 Dokumen	285.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-	-		SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
				0001	Pembangunan	Administrasi Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program			285.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	-		
				0001	Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Program	Administrasi Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi			285.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	-		
				0001	Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Program	Administrasi Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program			285.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	-		
				0001	Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Program	Administrasi Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program			285.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	-		
				0001	Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Program	Administrasi Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program			285.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	-		
				0001	Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Program	Administrasi Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program			285.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	-		
				0001	Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Program	Administrasi Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program			285.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	-		
				0001	Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Program	Administrasi Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program			285.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola	-	-		
				0001	Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Program	Administrasi Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program			285.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah pang pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-			
4	01	03	2.02		Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Administrasi Pembangunan Jumlah Dokumen Hasii Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3	Dokumen	285.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	215.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01		2.02		Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Program	Administrasi Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian	3		285.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 2. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-		215.000.000,00	
4	01	03	2.02		Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Administrasi Pembangunan Jumlah Dokumen Hasii Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3	Dokumen	285.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		215.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02		Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Program	Administrasi Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program	3	Dokumen	285.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang	-	-	215.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02		Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Program	Administrasi Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian	3	Dokumen	285.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-		215.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02		Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Program	Administrasi Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program	3	Dokumen	285.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	-	215.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02		Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Program	Administrasi Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program	3	Dokumen	285.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-		215.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02		Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Program	Administrasi Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program	3	Dokumen	285.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		215.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02		Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Program	Administrasi Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program	3	Dokumen	285.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengenanan publik 1. Penataan dan Pengenanan publik 1. Penataan dan	-		215.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02		Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Program	Administrasi Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program	3	Dokumen	285.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengenanan publik 1. Penataan dan Pengenanan publik 1. Penataan dan	-		215.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02		Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Program	Administrasi Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program	3	Dokumen	285.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan darah yang profesional darah yang profesional darah yang profesional darah pang profesional darah pang profesional darah pang profesional darah pang profesional darah pang profesional darah pang profesional darah pang profesional darah pang profesional darah pang profesional dan pengembangan Tata Kelola	-		215.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02		Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Program	Administrasi Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program	3	Dokumen	285.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengenanan publik 1. Penataan dan Pengenanan publik 1. Penataan dan	-		215.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

4	01 0	3 2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan		1 Laporan	140.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	=	159.750.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
				Pelaksanaan Pembangunan	Evaluasi dan Pelaporan		·	Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		
					Pelaksanaan Pembangunan			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		
					r claisanaan cinsanganan			Serial Kely Sesa		untuk mendukung		
										transformasi pelayanan		
										publik		
										1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		
1	01 0	3 2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang	Jumlah Dokumen Pengelolaan -		595 Dokumen	1.730.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	_	1.325.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
7	01 0	2.03		dan Jasa	Pengadaan Barang dan Jasa		JJJ DOKUMEN	1.730.000.000,00		pemerintahan daerah yang	- I	1.323.000.000,00 SERRETARIAT DALIVATI
				dan Jasa	Pengadaan barang dan Jasa					profesional dan akuntabel		
										untuk mendukung		
										transformasi pelayanan		
										publik		
										1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		
	01 0	3 2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	+	1881 Dokumen	759.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DAMA BACI HASII (DBII)	- 7. Peningkatan tata kelola	+	500.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
4	21 0	2.03	10001				TOOT DOKULIEU		DAINA BAUI FRASIL (DBH)		· [DOU.UUU.UUU,UU DERRETARIAT DAERAH
			1	Jasa	Pengadaan Barang dan Jasa			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang	1	
			1		1			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		
			1							untuk mendukung		
			1					1		transformasi pelayanan	1	
			1					1		publik	1	
			1							1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		
4	01 0	3 2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan		4 Dokumen	521.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		=	300.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
				Secara Elektronik	Pengadaan Secara Elektronik			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		
								Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		
										untuk mendukung		
										transformasi pelayanan		
										publik		
										1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		
4	01 0	3 2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi	Jumlah Orang yang Mengikuti		140 Orang	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola		
				Pengadaan Barang dan Jasa							-	525.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
					Pembinaan dan Advokasi			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang	-	525.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
				r engadam barang dampasa				Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		525.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
				r engodom barang dan sasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	525.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
				r engadon surang dan sasa				Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	525.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
, ,				r engaged in bottom great states				Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	525.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
1 1				· crigation out ong automos				Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		525.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
1				· chiqueun surung uun resu				Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	525.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
				. Congression Coloning Coloning				Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	525.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
				. Constitution of the second				Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-	525.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
					Pengadaan Barang dan Jasa			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
4	01 0	3 2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber			27 Dokumen	Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	· .	525.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 947.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
4	01 0	3 2.04			Pengadaan Barang dan Jasa		27 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
4	01 0	3 2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber	Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Pemantauan		27 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang		
4	01 0	3 2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber	Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Pemantauan		27 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		
4	01 0	3 2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber	Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Pemantauan		27 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		
4	01 0	3 2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber	Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Pemantauan		27 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	· ·	
4	01 0	3 2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber	Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Pemantauan		27 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	· ·	
4	01 0	3 2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber	Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Pemantauan		27 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		
4	01 0	3 2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber	Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Pemantauan		27 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dar Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola	·	
4	01 0	3 2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber	Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Pemantauan		27 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Pemantauan		27 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 754.000.000,00		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	· ·	947.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
		3 2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber	Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Pemantauan		27 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 754.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		947.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,	Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 754.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang		947.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan	Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Jumlah Dokumen Hasii Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan,			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang perofesional dan akuntabel		947.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,	Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 754.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung dan akuntabel untuk mendukung profesional dan akuntabel untuk mendukung		947.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan	Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan,			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 754.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		947.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan	Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 754.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	947.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan	Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan,			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 754.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		947.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan	Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 754.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola	-	947.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan	Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 754.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	947.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH

4														
	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,		8 Dokumen	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	224.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
					Evaluasi Kebijakan Pertambangan	Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			
					dan Lingkungan Hidup	Urusan Pertambangan dan Sumber			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
						Daya Mineral, Lingkungan Hidup,					untuk mendukung			
						Kominfo, Perhubungan, Statistik,					transformasi pelayanan			
						Persandian					publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
4	01	03	2.04	0003		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,		7 Dokumen	204.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	224.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
					Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			
						Urusan Energi dan Air, Pekerjaan			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
						Umum dan Penataan Ruang,					untuk mendukung			
						Perumahan Rakyat dan Kawasan					transformasi pelayanan			
						Permukiman, Pertanahan					publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
$-\!\!\!\!+\!\!\!\!-$						<u> </u>					PUDIIK			
		1 1			Sekretariat Dewan Perwakilan Rak	rat Daeran			123.153.197.019,00				105.427.869.139,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
														DAERAH
4	1	+			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEM	FRINTAHAN			123.153.197.019,00			I	105.427.869.139,00	
"		1 1			S.I.S.A. I ENDORONG OROSAN PEW				123.133.137.013,00			1	103.427.003.139,00	PERWAKILAN RAKYAT
		1 1			1							1	1	DAERAH
4	02	t			SEKRETARIAT DPRD				123.153.197.019,00				105.427.869.139,00	
		1 1			1							1	1	PERWAKILAN RAKYAT
														DAERAH
243 4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP -	-	85 Nilai	95.869.437.019,00			-	74.501.059.139,00	SEKRETARIAT DEWAN
					PEMERINTAHAN DAERAH									PERWAKILAN RAKYAT
					KABUPATEN/KOTA									DAERAH
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Rencana, -	-	14 Dokumen	250.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola		850.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Anggaran, dan Evaluasi Kinerja					pemerintahan daerah yang			PERWAKILAN RAKYAT
						Perangkat Daerah					profesional dan akuntabel			DAERAH
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
\rightarrow											Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
4	02	01	2.01	0001		Jumlah Dokumen Perencanaan		8 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola	-	450.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	450.000.000,00	PERWAKILAN RAKYAT
4	02	01	2.01	0001				8 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	450.000.000,00	
4	02	01	2.01	0001				8 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	450.000.000,000	PERWAKILAN RAKYAT
4	02	01	2.01	0001				8 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	450.000.000,00	PERWAKILAN RAKYAT
4	02	01	2.01	0001				8 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	450.000.000,00	PERWAKILAN RAKYAT
4	02	01	2.01	0001				8 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	450.000.000,00	PERWAKILAN RAKYAT
4	02	01	2.01	0001				8 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	450.000.000,00	PERWAKILAN RAKYAT
4	02	01	2.01	0001				8 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	450.000.000,00	PERWAKILAN RAKYAT
								8 Dokumen	Semua Kecamatan,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-		PERWAKILAN RAKYAT
					Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
					Perangkat Daerah	Perangkat Daerah			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN
					Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
					Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
					Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
					Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
					Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
					Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang			PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	01	2.01		Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Laporan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan erah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	400.000.000,000	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02		2.01		Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan Administrasi			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola		400.000.000,000	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN
4	02	01	2.01		Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang		6 Laporan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang		400.000.000,000	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	01	2.01		Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan Administrasi		6 Laporan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pengembangan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel		400.000.000,000	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN
4	02	01	2.01		Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang		6 Laporan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		400.000.000,000	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	01	2.01		Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang		6 Laporan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik		400.000.000,000	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	01	2.01		Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang		6 Laporan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		400.000.000,000	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	01	2.01		Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang		6 Laporan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan		400.000.000,000	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	01	2.01		Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang		6 Laporan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		400.000.000,000	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT



	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2310 Orang/bulan	43.185.177.063,00 Kab. Kutai Kartanegara, E			40.440.004.000.00	ADETADIAT DELLAM
			Orang/bulan		DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	19.419.724.758,00 SEKF	KKETAKIAT DEWAN
2.02 000				Semua Kecamatan,	` '	pemerintahan daerah yang		RWAKILAN RAKYAT
2.02 000				Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		ERAH
2.02 000						untuk mendukung		
2.02 000						transformasi pelayanan		
2.02 000						publik		
2.02 000								
2.02 000						1. Penataan dan		
2.02 000						Pengembangan Tata Kelola		
2.02 000						Pemerintahan dan Pelayanan		
2.02 000						Publik		
2.02 000.	5 Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	48.118.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, D	DANA BACI HASII (DBH)	7. Peningkatan tata kelola -	48.118.000,00 SEKF	/DETABLAT DEVA/ANI
			1 Laporati		DANA BAGITIASIL (DBII)			
1	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tahun SKPD dan Laporan Hasil		Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		RWAKILAN RAKYAT
	SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel	DAE	ERAH
		Keuangan Akhir Tahun SKPD				untuk mendukung		
						transformasi pelayanan		
						publik		
						Publik		
2.02 000	7 Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	18 Laporan	570.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, F	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	858.628.000,00 SEKF	KRETARIAT DEWAN
					· / [RWAKILAN RAKYAT
								ERAH
	mwulanan/ semesteran SKPD			Semua Kei/ Desa			DAE	LNAI
	1							
	1							
	1	SKPD				publik		
						1. Penataan dan		
						Pengembangan Tata Kelola		
2.02 000			1 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH) -			
	Prognosis Realisasi Anggaran	Analisis Prognosis Realisasi		Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang	PER	RWAKILAN RAKYAT
		Anggaran		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel	DAE	ERAH
						Penataan dan		
						Pengembangan Tata Kelola		
						Pemerintahan dan Pelayanan		
						Publik		
2.02	Administraci Barang Milik Daorah	Jumlah Dakuman Rarang Milik	2 Dokumon	175 000 000 00		7. Boningkatan tata kolola	419 250 000 00 554	VDETADIAT DEWAN
2.03			3 Dokumen	173.000.000,00				RWAKILAN RAKYAT
	pada Perangkat Daeran							
		daerah					I IDAE	ERAH
						untuk mendukung		Livui
1								
						transformasi pelayanan		
						transformasi pelayanan publik		
						transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		
						transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		
						transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		
						transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		
2.03 000	1 Penyusunan Perencanaan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	1 Dokumen	50,000,000,00 Kab. Kutai Kartaneeara T	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	164.000.000 no SFK	
2.03 000	Penyusunan Perencanaan Kehutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, E Semua Keramatan	DANA BAGI HASIL (DBH) -	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	164.000.000,00 SEK	KRETARIAT DEWAN
2.03 000	Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	PER	KRETARIAT DEWAN RWAKILAN RAKYAT
2.03 000			1 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH) -	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel	PER	KRETARIAT DEWAN
2.03 000	Kebutuhan Barang Milik Daerah		1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	PER	KRETARIAT DEWAN RWAKILAN RAKYAT
2.03 000	Kebutuhan Barang Milik Daerah		1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	PER	KRETARIAT DEWAN RWAKILAN RAKYAT
2.03 000	Kebutuhan Barang Milik Daerah		1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	PER	KRETARIAT DEWAN RWAKILAN RAKYAT
2.03 000	Kebutuhan Barang Milik Daerah		1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	PER	KRETARIAT DEWAN RWAKILAN RAKYAT
2.03 000	Kebutuhan Barang Milik Daerah		1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	PER	KRETARIAT DEWAN RWAKILAN RAKYAT
2.03 000	Kebutuhan Barang Milik Daerah		1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darenh yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	PER	KRETARIAT DEWAN RWAKILAN RAKYAT
2.03 000	Kebutuhan Barang Milik Daerah		1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	PER	KRETARIAT DEWAN RWAKILAN RAKYAT
	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Milik Daerah SKPD		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PERI DAE	(RETARIAT DEWAN RWAKILAN RAKYAT ERAH
	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koprdinasi dan Penilaian Barang	Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 25.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, I		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	PERI DAE	(RETARIAT DEWAN RWAKILAN RAKYAT ERAH KETARIAT DEWAN
	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Milik Daerah SKPD		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PERI DAE	(RETARIAT DEWAN RWAKILAN RAKYAT ERAH
	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koprdinasi dan Penilaian Barang	Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 25,000,000,00 Kab. Kutai Kartanegara, E Semua Kecamatan,		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang	PER DAE	KRETARIAT DEWAN RWAKILAN RAKYAT ERAH KRETARIAT DEWAN RWAKILAN RAKYAT
	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koprdinasi dan Penilaian Barang	Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 25.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, I		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel	PER DAE	(RETARIAT DEWAN RWAKILAN RAKYAT ERAH KETARIAT DEWAN
	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koprdinasi dan Penilaian Barang	Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 25,000,000,00 Kab. Kutai Kartanegara, E Semua Kecamatan,		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	PER DAE	KRETARIAT DEWAN RWAKILAN RAKYAT ERAH KRETARIAT DEWAN RWAKILAN RAKYAT
	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koprdinasi dan Penilaian Barang	Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 25,000,000,00 Kab. Kutai Kartanegara, E Semua Kecamatan,		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	PER DAE	KRETARIAT DEWAN RWAKILAN RAKYAT ERAH KRETARIAT DEWAN RWAKILAN RAKYAT
	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koprdinasi dan Penilaian Barang	Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 25,000,000,00 Kab. Kutai Kartanegara, E Semua Kecamatan,		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dareah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	PER DAE	KRETARIAT DEWAN RWAKILAN RAKYAT ERAH KRETARIAT DEWAN RWAKILAN RAKYAT
	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koprdinasi dan Penilaian Barang	Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 25,000,000,00 Kab. Kutai Kartanegara, E Semua Kecamatan,		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan dan kuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan publik 1. Penatayanan publik 1. Penatayanan publik 1. Penatayanan publik 1. Penatayanan publik 1. Penatayanan publik 1. Penatayanan	PER DAE	KRETARIAT DEWAN RWAKILAN RAKYAT ERAH KRETARIAT DEWAN RWAKILAN RAKYAT
	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koprdinasi dan Penilaian Barang	Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 25,000,000,00 Kab. Kutai Kartanegara, E Semua Kecamatan,		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dareah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	PER DAE	KRETARIAT DEWAN RWAKILAN RAKYAT ERAH KRETARIAT DEWAN RWAKILAN RAKYAT
	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Koprdinasi dan Penilaian Barang	Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 25,000,000,00 Kab. Kutai Kartanegara, E Semua Kecamatan,		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan dan kuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan publik 1. Penatayanan publik 1. Penatayanan publik 1. Penatayanan publik 1. Penatayanan publik 1. Penatayanan publik 1. Penatayanan	PER DAE	KRETARIAT DEWAN RWAKILAN RAKYAT ERAH KRETARIAT DEWAN RWAKILAN RAKYAT
2.0		Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Oz 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 03 Administrasi Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Barang Milik	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD OOO Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Daerah (BMD) pada perangkat Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Dokumen 3 Dokumen Daerah (BMD) pada perangkat	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD O08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran D09 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Daerah (BMD) pada perangkat Daeran (BMD) pada perangkat Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Domain Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Domain Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Domain Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Domain Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Domain Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Domain Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Domain Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Domain Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Domain Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Domain Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Domain Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Domain Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Domain Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Domain Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Domain Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Domain Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Domain Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Domain Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Domain Laporan Keulanan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Domain Laporan Keulanan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Domain Laporan Keulanan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Domain Laporan Keulanan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Domain Laporan Keulanan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Domain Laporan Keulanan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Domain Laporan Keulanan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Domain Laporan Keulanan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Domain Laporan Keulanan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Domain Laporan Keulanan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Domain Laporan Keulanan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Domain Laporan Keulanan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Domain Laporan Keulanan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Domain Laporan Keulanan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Domain Laporan Keulanan	1. Penatara dan Pengembangan Tata Kelola Pen	Permissan dan Perpusunan Perpusunan Pelapuran Perpusunan Perpu



Λ													
4	02 01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan		1 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola		204.250.000,00	SEKRETARIAT DEWAN
				Laporan Barang Milik Daerah pada	Penyusunan Laporan Barang Milik		·	Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			PERWAKILAN RAKYAT
				SKPD	Daerah pada SKPD			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			DAERAH
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
4	02 01	2.05		Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi	-	4 Dokumen	197.818.000.00		- 7. Peningkatan tata kelola	_	1 286 065 000 00	SEKRETARIAT DEWAN
7	02 01	2.03		Perangkat Daerah	Kepegawaian		4 Dokumen	137.818.000,00		pemerintahan daerah yang		1.200.003.000,00	PERWAKILAN RAKYAT
				Perangkat Daeran	kepegawaian					pernerintanan daeran yang profesional dan akuntabel			DAERAH
													DAERAH
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
		1	1	ļ <u> </u>	<u> </u>								L
4	02 01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan		3 Dokumen	35.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola		100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN
		1		Administrasi Kepegawaian	Pengolahan Administrasi			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			PERWAKILAN RAKYAT
			1		Kepegawaian			Semua Kel/Desa	1	profesional dan akuntabel			DAERAH
		1		1	. •			1		untuk mendukung			
		1		1				1		transformasi pelayanan			
			1						1	publik			
		1		1				1					
			1						1	1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
4	02 01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah Orang yang Mengikuti		20 Orang	162.818.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola		350,000,000,00	SEKRETARIAT DEWAN
-	02 01	2.03	0011				20 Orang		DANA BAGITIASIL (DBII)			330.000.000,00	
				Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			PERWAKILAN RAKYAT
					Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			DAERAH
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										publik			
										1. Penataan dan			
										1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
										1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
										1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
4	02 01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Layanan Administrasi		7 Layanan	1.799.400.000,00		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	2.958.211.994,00	SEKRETARIAT DEWAN
4	02 01	2.06			Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		7 Layanan	1.799.400.000,00		Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola		2.958.211.994,00	
4	02 01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		7 Layanan	1.799.400.000,00		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang		2.958.211.994,00	PERWAKILAN RAKYAT
4	02 01	2.06					7 Layanan	1.799.400.000,00		Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		2.958.211.994,00	
4	02 01	2.06					7 Layanan	1.799.400.000,00		Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	2.958.211.994,00	PERWAKILAN RAKYAT
4	02 01	2.06				-	7 Layanan	1.799.400.000,00		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	2.958.211.994,00	PERWAKILAN RAKYAT
4	02 01	2.06				-	7 Layanan	1.799.400.000,00		Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	2.958.211.994,00	PERWAKILAN RAKYAT
4	02 01	2.06				-	7 Layanan	1.799.400.000,00		Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		2.958.211.994,00	PERWAKILAN RAKYAT
4	02 01	2.06				-	7 Layanan	1.799.400.000,00		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	2.958.211.994,00	PERWAKILAN RAKYAT
4	02 01	2.06				-	7 Layanan	1.799.400.000,00		Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		2.958.211.994,00	PERWAKILAN RAKYAT
4	02 01	2.06					7 Layanan	1.799.400.000,00		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		2.958.211.994,00	PERWAKILAN RAKYAT
				Daerah	Umum Perangkat Daerah					1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	02 01				Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi		7 Layanan	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola			PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN
				Daerah	Umum Perangkat Daerah				DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
				Daerah	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi			200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola			PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN
				Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan			200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel	-		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
				Daerah Penyediaan Komponen Instalasi	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan			200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung			PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
				Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan			200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Palayanan publik untuk mendukung transformasi pelayanan	-		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
				Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	-		200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
				Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan			200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
				Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	-		200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola	-		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
				Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan			200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
				Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	-		200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola			PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02 01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pemerintahan dan Pelayanan Publik		200.000.000,000	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4		2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola		200.000.000,000	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN
4	02 01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang		200.000.000,000	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02 01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel		200.000.000,000	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN
4	02 01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang		200.000.000,000	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02 01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penatan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Auntabel untuk mendukung		200.000.000,000	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02 01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Palayanan Publik 1. Penataan dan Belayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Belayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 2. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Palayanan Publik 5. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Palayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Palayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Palayanan Publik		200.000.000,000	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02 01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		200.000.000,000	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02 01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Peningkatan tata kelola Pemerintahan darah yang Profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 1. Penataan dan		200.000.000,000	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02 01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Palayanan Publik 1. Penataan dan Alena Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola		200.000.000,000	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02 01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Peningkatan tata kelola Pemerintahan darah yang Profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 1. Penataan dan		200.000.000,000	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT



4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	800.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	1.010.422.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
									Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan			DAERAH
											publik 1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan		2 Paket	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		-	415.924.000.00	SEKRETARIAT DEWAN
					Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan			Semua Kecamatan,	, ,	pemerintahan daerah yang			PERWAKILAN RAKYAT
									Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel untuk mendukung			DAERAH
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan		3 Dokumen	160.900.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		-	160.900.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
					Peraturan Perundang-undangan	dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			DAERAH
						,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,					untuk mendukung			
											transformasi pelayanan publik			
											publik 1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan		12 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)		-	318.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN
					dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	MINYAK DAN GAS OTONOMI KHUSUS ACEH	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
						SKPD			Sellida Kely Desa	OTONOMI KITO303 ACEIT	untuk mendukung			DALKAH
											transformasi pelayanan			
											publik 1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
4	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada	Jumlah Dokumen Penatausahaan		7 Dokumen	70.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		-	136.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN
					SKPD	Arsip Dinamis pada SKPD			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			PERWAKILAN RAKYAT
									Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel untuk mendukung			DAERAH
											transformasi pelayanan			
											publik			
											Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah	-	567 unit	700.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola		2.300.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
					Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah					pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			DAERAH
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik 1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
 		01	2.07	0005	Danasdaan Mahal	Lumbah Dakat Mah - Luma		1 Unit	100,000,000,00, Web Webs West	DANA BACILIACII (BE:"	Publik 7. Peningleten tete kelele		200 000 000 00	SEKRETARIAT DEWAN
	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Unit	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	200.000.000,00	PERWAKILAN RAKYAT
									Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			DAERAH
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	ı	1				<u> </u>	I I	ı	1	l .	LUDIK	1	l	1



4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	308 Unit	400.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	700.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN
					Gedung Kantor atau Bangunan	Gedung Kantor atau Bangunan		Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang	PERWAKILAN RAKYAT
					Lainnya	Lainnya yang Disediakan		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel	DAERAH
										untuk mendukung	
										transformasi pelayanan	
										publik	
										1. Penataan dan	
										Pengembangan Tata Kelola	
										Pemerintahan dan Pelayanan	
										Pemerintanan dan Pelayanan Publik	
	4										
4	02	01	2.07	0011		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	250 Unit	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	800.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN
					Pendukung Gedung Kantor atau	Pendukung Gedung Kantor atau		Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang	PERWAKILAN RAKYAT
					Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel	DAERAH
										untuk mendukung	
										transformasi pelayanan	
										publik	
										1. Penataan dan	
										Pengembangan Tata Kelola	
										Pemerintahan dan Pelayanan	
										Publik	
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		100 Persen	7.099.665.304,00	-	7. Peningkatan tata kelola	8.453.870.000,00 SEKRETARIAT DEWAN
					Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		ĺ	1	pemerintahan daerah yang	PERWAKILAN RAKYAT
					1	Daerah		ĺ	1	profesional dan akuntabel	DAERAH
										untuk mendukung	
										transformasi pelayanan	
					1			ĺ	1	publik	
		1 1			1	1 1			1	1. Penataan dan	
										Pengembangan Tata Kelola	
										Pemerintahan dan Pelayanan	
										Publik	
		-								- same	
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	3.870.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	3.870.000,00 SEKRETARIAT DEWAN
						Surat Menyurat		Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang	PERWAKILAN RAKYAT
								Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel	DAERAH
										untuk mendukung	
										transformasi pelayanan	
										publik	
										1. Penataan dan	
										Pengembangan Tata Kelola	
										Pemerintahan dan Pelayanan	
	4	⊢								Publik	
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	2.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	2.500.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN
					Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan		Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang	PERWAKILAN RAKYAT
						Listrik yang Disediakan		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel	DAERAH
										untuk mendukung	
										transformasi pelayanan	
										publik	
		1 1			1	1 1			1	1. Penataan dan	
		1 1			1	1 1			1	Pengembangan Tata Kelola	
	1				l				1	Pemerintahan dan Pelayanan	
	1	1 1			1	1			1	Pemerintanan dan Pelayanan Publik	
	-	-		0001		l					
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	4.595.795.304,00 Kab. Kutai Kartanegara,		7. Peningkatan tata kelola -	5.950.000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN
		1 1			Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang		Semua Kecamatan,	MINYAK DAN GAS	pemerintahan daerah yang	PERWAKILAN RAKYAT
	1				l	Disediakan		Semua Kel/Desa	OTONOMI KHUSUS ACEH	profesional dan akuntabel	DAERAH
					1			ĺ	1	untuk mendukung	
		1 1			1	1 1			1	transformasi pelayanan	
		1 1			1			ĺ	1	publik	
		1 1			1	1 1			1	1. Penataan dan	
1	1				l				1	Pengembangan Tata Kelola	
					l				1		
					1			ĺ	1	Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
									 		
						Jumlah Barang Milik Daerah -	234 Barang	1.716.505.000,00	[-	7. Peningkatan tata kelola	1.802.553.000,00 SEKRETARIAT DEWAN
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah			1	i l	pemerintahan daerah yang	PERWAKILAN RAKYAT
4	02	01	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan						
4	02	01	2.09							profesional dan akuntabel	DAERAH
4	02	01	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan						DAERAH
4	02	01	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan					profesional dan akuntabel untuk mendukung	DAERAH
4	02	01	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan					profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	DAERAH
4	02	01	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan					profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	DAERAH
4	02	01	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan					profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	DAERAH
4	02	01	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan					profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	DAERAH
4	02	01	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan					profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	DAERAH

4											
	02	01 2.	.09 0	001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan	37 Unit	225.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	311.048.000,00	SEKRETARIAT DEWAN
				Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Dinas atau Kendaraan Dinas		Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		PERWAKILAN RAKYAT
				Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jabatan yang Dipelihara dan		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		DAERAH
				Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya				untuk mendukung		
					,				transformasi pelayanan		
									publik		
									1. Penataan dan		
									Pengembangan Tata Kelola		
									Pemerintahan dan Pelayanan		
									Publik		
4	02	01 2.	.09 0	002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas	37 Unit	311.505.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	311.505.000,00	SEKRETARIAT DEWAN
				Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Operasional atau Lapangan yang		Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		PERWAKILAN RAKYAT
				Perizinan Kendaraan Dinas	Dipelihara dan dibayarkan Pajak		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		DAERAH
				Operasional atau Lapangan	dan Perizinannya				untuk mendukung		
				Operasional acad capangan	dani chemaniya				transformasi pelayanan		
									nublik		
									p==		
									1. Penataan dan		
									Pengembangan Tata Kelola		
									Pemerintahan dan Pelayanan		
									Publik		
4	02	01 2.	.09 0	009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan	11 Unit	800.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	800.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN
				Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang		Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		PERWAKILAN RAKYAT
	1 1				Dipelihara/Direhabilitasi		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		DAERAH
	1 1				,		Serial Rey Sesa		untuk mendukung		1
									transformasi pelayanan		1
									transformasi pelayanan publik		1
											1
									1. Penataan dan		
									Pengembangan Tata Kelola		
									Pemerintahan dan Pelayanan		
									Publik		
4	02	01 2.	.09 0	011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	0 Unit	380.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	380,000,000,00	SEKRETARIAT DEWAN
				dan Prasarana Pendukung Gedung			Semua Kecamatan,	,	pemerintahan daerah yang		PERWAKILAN RAKYAT
				Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		DAERAH
				Kantor atau bangunan taninya	Dipelihara/Direhabilitasi		Jeniua Kely Desa		untuk mendukung		DALIGHT
					Dipelinal a/ Dil enabilitasi				transformasi pelayanan		
									publik		
					1						
									1. Penataan dan		
									Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		
									1. Penataan dan		
									Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		
4	02	01 2.	.15	Layanan Keuangan dan	Jumlah Layanan Keuangan dan -	3 Layanan	36.854.635.652,00	-	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola -	- 31.802.468.387,00) SEKRETARIAT DEWAN
4	02	01 2.	.15		Jumlah Layanan Keuangan dan - Kesejahteraan DPRD	3 Layanan	36.854.635.652,00	-	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola -	- 31.802.468.387,00	D SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	01 2.	.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		3 Layanan	36.854.635.652,00	-	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	- 31.802.468.387,00	PERWAKILAN RAKYAT
4	02	01 2.	.15			3 Layanan	36.854.635.652,00	-	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	- 31.802.468.387,00	
4	02	01 2.	.15			3 Layanan	36.854.635.652,00		Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	- 31.802.468.387,00	PERWAKILAN RAKYAT
4	02	01 2.	.15			3 Layanan	36.854.635.652,00		Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	- 31.802.468.387,00	PERWAKILAN RAKYAT
4	02	01 2.	.15			3 Layanan	36.854.635.652,00		Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	- 31.802.468.387,00	PERWAKILAN RAKYAT
4	02	01 2.	.15			3 Layanan	36.854.635.652,00		Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan	- 31.802.468.387,00	PERWAKILAN RAKYAT
4	02	01 2.	.15			3 Layanan	36.854.635.652,00	-	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	- 31.802.468.387,00	PERWAKILAN RAKYAT
4	02	01 2.	.15			3 Layanan	36.854.635.652,00	-	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penerintahan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	- 31.802.468.387,0C	PERWAKILAN RAKYAT
				Kesejahteraan DPRD	Kesejahteraan DPRD "			-	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		01 2.		Kesejahteraan DPRD DO1 Penyelenggaraan Administrasi	Kesejahteraan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang	3 Layanan 3 Layanan 540 Orang/Bulan	36.454.185.652,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH D SEKRETARIAT DEWAN
				Kesejahteraan DPRD	Kesejahteraan DPRD "			DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
				Kesejahteraan DPRD DO1 Penyelenggaraan Administrasi	Kesejahteraan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang		36.454.185.652,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH D SEKRETARIAT DEWAN
				Kesejahteraan DPRD DO1 Penyelenggaraan Administrasi	Kesejahteraan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang		36.454.185.652,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH D SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
				Kesejahteraan DPRD DO1 Penyelenggaraan Administrasi	Kesejahteraan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang		36.454.185.652,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH D SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
				Kesejahteraan DPRD DO1 Penyelenggaraan Administrasi	Kesejahteraan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang		36.454.185.652,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan yutansi pengembanan publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH D SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
				Kesejahteraan DPRD DO1 Penyelenggaraan Administrasi	Kesejahteraan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang		36.454.185.652,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan elayanan putuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH D SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
				Kesejahteraan DPRD DO1 Penyelenggaraan Administrasi	Kesejahteraan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang		36.454.185.652,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dareah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH D SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
				Kesejahteraan DPRD DO1 Penyelenggaraan Administrasi	Kesejahteraan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang		36.454.185.652,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darearh yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH D SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
				Kesejahteraan DPRD DO1 Penyelenggaraan Administrasi	Kesejahteraan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang		36.454.185.652,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan daurabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH D SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	01 2.	.15 0	Kesejahteraan DPRD 001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	540 Orang/Bulan	36.454.185.652,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	31.402.018.387,00	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH D SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02		.15 0	Kesejahteraan DPRD OO1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD OO2 Penyediaan Pakalan Dinas dan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		36.454.185.652,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Penataan dan pengembangan Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Penataan dan pengembangan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	31.402.018.387,00	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0 SEKRETARIAT DEWAN
4	02	01 2.	.15 0	Kesejahteraan DPRD 001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	540 Orang/Bulan	36.454.185.652,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan darah yang	31.402.018.387,00	D SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH D SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	01 2.	.15 0	Kesejahteraan DPRD OO1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD OO2 Penyediaan Pakalan Dinas dan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	540 Orang/Bulan	36.454.185.652,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 320.450.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Penataan dan pengembangan Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik 1. Penataan dan pengembangan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	31.402.018.387,00	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0 SEKRETARIAT DEWAN
4	02	01 2.	.15 0	Kesejahteraan DPRD OO1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD OO2 Penyediaan Pakalan Dinas dan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	540 Orang/Bulan	36.454.185.652,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	31.402.018.387,00	D SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH D SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	01 2.	.15 0	Kesejahteraan DPRD OO1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD OO2 Penyediaan Pakalan Dinas dan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	540 Orang/Bulan	36.454.185.652,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 320.450.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan putuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan pengembangan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dara Panan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	31.402.018.387,00	D SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH D SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	01 2.	.15 0	Kesejahteraan DPRD OO1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD OO2 Penyediaan Pakalan Dinas dan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	540 Orang/Bulan	36.454.185.652,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 320.450.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	31.402.018.387,00	D SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH D SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	01 2.	.15 0	Kesejahteraan DPRD OO1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD OO2 Penyediaan Pakalan Dinas dan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	540 Orang/Bulan	36.454.185.652,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 320.450.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dareh yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Alelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Alelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Alentabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	31.402.018.387,00	D SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH D SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	01 2.	.15 0	Kesejahteraan DPRD OO1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD OO2 Penyediaan Pakalan Dinas dan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	540 Orang/Bulan	36.454.185.652,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 320.450.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pangembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan	31.402.018.387,00	D SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH D SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	01 2.	.15 0	Kesejahteraan DPRD OO1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD OO2 Penyediaan Pakalan Dinas dan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	540 Orang/Bulan	36.454.185.652,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 320.450.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Auntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan palayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	31.402.018.387,00	D SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH D SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	01 2.	.15 0	Kesejahteraan DPRD OO1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD OO2 Penyediaan Pakalan Dinas dan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	540 Orang/Bulan	36.454.185.652,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 320.450.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pangembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan	31.402.018.387,00	D SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH D SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT



	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up	Jumlah Orang yang Mengikuti	45	Orang	80.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	80.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN
1 -		1 1			DPRD	Medical Check Up DPRD			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			PERWAKILAN RAKYAT
					ST NO	Medical check op 51 N5			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			DAERAH
									Sellida Kely Desa		untuk mendukung			DALKAH
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD -	31	Layanan	3.253.170.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola		4.253.170.000,00	SEKRETARIAT DEWAN
					1						pemerintahan daerah yang			PERWAKILAN RAKYAT
											profesional dan akuntabel			DAERAH
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil	11	Dokumen	136.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	136.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN
	1			l	Keanggotaan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		1	PERWAKILAN RAKYAT
	1			l	1	Keanggotaan DPRD			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		I	DAERAH
1				l	1						untuk mendukung	1		
											transformasi pelayanan			1
											nublik			1
	1			l	1				1		P===		I	1
											1. Penataan dan			1
1				l	1	1					Pengembangan Tata Kelola	1		
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	12	Laporan .	1.973.570.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	2.973.570.000,00	SEKRETARIAT DEWAN
					Konsultasi DPRD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			PERWAKILAN RAKYAT
						DPRD			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			DAERAH
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											nublik			
											paom			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
4	02										Publik			
		01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah	4 F	Paket	1.143.100.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik - 7. Peningkatan tata kelola	-	1.143.100.000,00	SEKRETARIAT DEWAN
		01	2.16	0004			4 F	Paket		DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	1.143.100.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
		01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 F	Paket	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	1.143.100.000,00	PERWAKILAN RAKYAT
		01	2.16	0004			4 F	Paket		DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	1.143.100.000,00	
1		01	2.16	0004			4 F	Paket	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	1.143.100.000,00	PERWAKILAN RAKYAT
		01	2.16	0004			4 5	Paket	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	1.143.100.000,00	PERWAKILAN RAKYAT
		01	2.16	0004			4 f	Paket	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1.143.100.000,00	PERWAKILAN RAKYAT
		01	2.16	0004			4 F	Paket	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	1.143.100.000,00	PERWAKILAN RAKYAT
		01	2.16	0004			4 F	Paket	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		1.143.100.000,00	PERWAKILAN RAKYAT
		01	2.16	0004			4 5	Paket	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-	1.143.100.000,00	PERWAKILAN RAKYAT
			2.16	0004			4 F	Paket	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
244 4	02		2.16	0004		Tangga DPRD yang Disediakan		Paket D0 Persen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-		PERWAKILAN RAKYAT
244 4	02		2.16	0004	Tangga DPRD				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
244 4	02		2.16	0004	Tangga DPRD PROGRAM DUKUNGAN	Tangga DPRD yang Disediakan Persentase Fasilitasi Kegiatan -			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN
		02		0004	Tangga DPRD PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tangga DPRD yang Disediakan Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	10	00 Persen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 27.283.760.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	30.926.810.000,00	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
				0004	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Pembentukan Peraturan Daerah	Tangga DPRD yang Disediakan Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah Peraturan Daerah dan	10		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN
		02		0004	Tangga DPRD PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tangga DPRD yang Disediakan Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	10	00 Persen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 27.283.760.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang	-	30.926.810.000,00	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
		02		0004	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Pembentukan Peraturan Daerah	Tangga DPRD yang Disediakan Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah Peraturan Daerah dan	10	00 Persen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 27.283.760.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	30.926.810.000,00	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN
		02		0004	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Pembentukan Peraturan Daerah	Tangga DPRD yang Disediakan Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah Peraturan Daerah dan	10	00 Persen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 27.283.760.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	30.926.810.000,00	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
		02		0004	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Pembentukan Peraturan Daerah	Tangga DPRD yang Disediakan Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah Peraturan Daerah dan	10	00 Persen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 27.283.760.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	30.926.810.000,00	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
		02		0004	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Pembentukan Peraturan Daerah	Tangga DPRD yang Disediakan Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah Peraturan Daerah dan	10	00 Persen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 27.283.760.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		30.926.810.000,00	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
		02		0004	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Pembentukan Peraturan Daerah	Tangga DPRD yang Disediakan Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah Peraturan Daerah dan	10	00 Persen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 27.283.760.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	30.926.810.000,00	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
		02		0004	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRO Pembentukan Peraturan Daerah	Tangga DPRD yang Disediakan Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah Peraturan Daerah dan	10	00 Persen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 27.283.760.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	30.926.810.000,00	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
		02		0004	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRO Pembentukan Peraturan Daerah	Tangga DPRD yang Disediakan Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah Peraturan Daerah dan	10	00 Persen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 27.283.760.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		30.926.810.000,00	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
		02		0004	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRO Pembentukan Peraturan Daerah	Tangga DPRD yang Disediakan Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah Peraturan Daerah dan	10	00 Persen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 27.283.760.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	30.926.810.000,00	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	02	2.01		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tangga DPRD yang Disediakan Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang Dibuat	28	00 Persen B PERDA	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 27.283.760.000,00 4.005.150.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		30.926.810.000,00 5.511.700.000,00	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02	02	2.01		Tangga DPRD PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tangga DPRD yang Disediakan Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang Dibuat Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan	28	00 Persen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 27.283.760.000,00 4.005.150.000,00 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-	30.926.810.000,00 5.511.700.000,00	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN
4	02	02	2.01		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tangga DPRD yang Disediakan Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang Dibuat Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program	28	00 Persen B PERDA	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 27.283.760.000,00 4.005.150.000,00 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	30.926.810.000,00 5.511.700.000,00	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	02	2.01		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Penyusunan dan Pembahasan Program	Tangga DPRD yang Disediakan Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang Dibuat Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan	28	00 Persen B PERDA	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 27.283.760.000,00 4.005.150.000,00 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	30.926.810.000,00 5.511.700.000,00	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN
4	02	02	2.01		Tangga DPRD PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tangga DPRD yang Disediakan Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang Dibuat Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program	28	00 Persen B PERDA	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 27.283.760.000,00 4.005.150.000,00 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung untuk mendu	-	30.926.810.000,00 5.511.700.000,00	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	02	2.01		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Penyusunan dan Pembahasan Program	Tangga DPRD yang Disediakan Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang Dibuat Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program	28	00 Persen B PERDA	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 27.283.760.000,00 4.005.150.000,00 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		30.926.810.000,00 5.511.700.000,00	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	02	2.01		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Penyusunan dan Pembahasan Program	Tangga DPRD yang Disediakan Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang Dibuat Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program	28	00 Persen B PERDA	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 27.283.760.000,00 4.005.150.000,00 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		30.926.810.000,00 5.511.700.000,00	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	02	2.01		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Penyusunan dan Pembahasan Program	Tangga DPRD yang Disediakan Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang Dibuat Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program	28	00 Persen B PERDA	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 27.283.760.000,00 4.005.150.000,00 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan pengeranan publik 1. Penataan dan pengerananan publik 1. Penataan dan pengerananan publik 1. Penataan dan		30.926.810.000,00 5.511.700.000,00	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	02	2.01		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Penyusunan dan Pembahasan Program	Tangga DPRD yang Disediakan Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang Dibuat Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program	28	00 Persen B PERDA	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 27.283.760.000,00 4.005.150.000,00 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola		30.926.810.000,00 5.511.700.000,00	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	02	2.01		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Penyusunan dan Pembahasan Program	Tangga DPRD yang Disediakan Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang Dibuat Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program	28	00 Persen B PERDA	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 27.283.760.000,00 4.005.150.000,00 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan pengeranan publik 1. Penataan dan pengerananan publik 1. Penataan dan pengerananan publik 1. Penataan dan		30.926.810.000,00 5.511.700.000,00	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT



4														
	02	02 2	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan			15 Dokumen	2.823.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	3.823.500.000,00	
					Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			PERWAKILAN RAKYAT
						Daerah	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			DAERAH
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
1	02	02 2	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-		6 Dokumen	231.650.000,00 Semua Kota/Kab,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	_	231 650 000 00	SEKRETARIAT DEWAN
7	02	02 2	2.01	0003	Undangan	Undangan		o bokumen	Semua Kecamatan,	DAINA DAGITIASIE (DDII)	pemerintahan daerah yang		231.030.000,00	PERWAKILAN RAKYAT
					Orluangan	Orluangan			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			DAERAH
									Sellida Kely Desa		untuk mendukung			DALKAH
											transformasi pelayanan			
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				nublik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
4	02	02 2	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan		6 Dokumen	650.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	- [937.800.000,00	SEKRETARIAT DEWAN
			1		Penjelasan/Keterangan	Penjelasan atau Keterangan			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			PERWAKILAN RAKYAT
	1 1		J			dan/atau Naskah Akademik yang]	Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			DAERAH
			1		Naskah Akademik	Difasilitasi					untuk mendukung			1
			1			1					transformasi pelayanan			1
			1			1					publik			1
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				1. Penataan dan			
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Pengembangan Tata Kelola			
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
4	02	02 2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumah Rapat Pembahasan -		6 Rapat	840.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola		1.050.000.000.00	SEKRETARIAT DEWAN
'		-									pemerintahan daerah yang			PERWAKILAN RAKYAT
											profesional dan akuntabel			DAERAH
											untuk mendukung			DAERAH
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				transformasi pelayanan			
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				publik			
											1. Penataan dan			
											- - - -			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
4	02	02 2	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil		1 Dokumen	270.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola	-	375.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN
4	02	02 2	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang		375.000.000,00	PERWAKILAN RAKYAT
4	02	02 2	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS			1 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	375.000.000,00	
4	02	02 2	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS			1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	375.000.000,00	PERWAKILAN RAKYAT
4	02	02 2	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS			1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		375.000.000,00	PERWAKILAN RAKYAT
4	02	02 2	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS			1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	375.000.000,00	PERWAKILAN RAKYAT
4	02	02 2	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS			1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	375.000.000,00	PERWAKILAN RAKYAT
4	02	02 2	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS			1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		375.000.000,00	PERWAKILAN RAKYAT
4	02	02 2	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS			1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-	375.000.000,00	PERWAKILAN RAKYAT
4	02	02 2	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS			1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	375.000.000,00	PERWAKILAN RAKYAT
						Pembahasan KUA dan PPAS			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		02 2			Pembahasan KUA dan PPAS Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			1 Dokumen	Semua Kecamatan,		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-		PERWAKILAN RAKYAT
					Pembahasan Perubahan KUA dan	Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 270.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola			PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
					Pembahasan Perubahan KUA dan	Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 270.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara,		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
					Pembahasan Perubahan KUA dan	Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 270.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
					Pembahasan Perubahan KUA dan	Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 270.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
					Pembahasan Perubahan KUA dan	Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 270.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
					Pembahasan Perubahan KUA dan	Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 270.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
					Pembahasan Perubahan KUA dan	Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 270.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola	-		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
					Pembahasan Perubahan KUA dan	Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 270.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	02 2	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		1 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 270.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		375.000.000,00	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	02		2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan	Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 270.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 2. Peningkatan tata kelola	-	375.000.000,00	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN
4	02	02 2	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		1 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 270.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daarah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Pensembangan Tata Kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 2. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah pelayanan Publik	-	375.000.000,00	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	02 2	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		1 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 270.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel demerintahan daerah yang profesional dan akuntabel demerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		375.000.000,00	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN
4	02	02 2	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		1 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 270.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan Abuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	375.000.000,00	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	02 2	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		1 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 270.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penatahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Pensingkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik		375.000.000,00	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	02 2	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		1 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 270.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	375.000.000,00	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	02 2	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		1 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 270.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Pensatan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan	-	375.000.000,00	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	02 2	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		1 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 270.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola		375.000.000,00	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	02 2	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		1 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 270.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Pensatan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan	-	375.000.000,00	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT



4													
1 -	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil		1 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	- 100.0	000.000,00 SEKRETARIAT DEWAN
						Pembahasan APBD Perubahan			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		PERWAKILAN RAKYAT
									Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		DAERAH
											untuk mendukung		
											transformasi pelayanan		
											publik		
											1. Penataan dan		
											Pengembangan Tata Kelola		
											Pemerintahan dan Pelayanan		
											Publik		
4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	- 50.0	00.000,00 SEKRETARIAT DEWAN
						Pembahasan Laporan Realisasi			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		PERWAKILAN RAKYAT
						Pelaksanaan APBD Per Semester			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		DAERAH
						r claksandan Ar bo'r cr semester			Schlad Kely Besa		untuk mendukung		DALIGHT
											transformasi pelayanan		
											publik		
											1. Penataan dan		
											Pengembangan Tata Kelola		
											Pemerintahan dan Pelayanan		
											Publik		
		2 02	2.02	0000	Dambahasan Dastangan najarahan	Lumlah Daluman Hasil		1 Delumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BACILIACII (DOLI)		50/	00.000,00 SEKRETARIAT DEWAN
4	1 02	. 02	2.02	ОООБ	Pembahasan Pertanggungjawaban	Jumlah Dokumen Hasil		1 Dokumen		DAINA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	- 50.0	
	1]]	APBD	Pembahasan Pertanggungjawaban			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		PERWAKILAN RAKYAT
	1]]		APBD			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		DAERAH
	1		l			1]		untuk mendukung		
	1										transformasi pelayanan		
	1										publik		
	1										1. Penataan dan		
											Pengembangan Tata Kelola		
											Pemerintahan dan Pelayanan		
											Publik		
4	02	2 02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan	Jumlah Pengawasan DPRD -		18 Kali	1.732.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	- 3.658.	500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN
					Pemerintahan						pemerintahan daerah yang		PERWAKILAN RAKYAT
											profesional dan akuntabel		DAERAH
											untuk mendukung		
											transformasi pelayanan		
											publik		
											1. Penataan dan		
											Pengembangan Tata Kelola		
											Pemerintahan dan Pelayanan		
											Publik		
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan		3 Laporan	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	- 582.5	500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN
					Bidang Pemerintahan dan Hukum	Urusan Pemerintahan Bidang							
									Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		PERWAKILAN RAKYAT
					-	Pemerintahan dan Hukum			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
											profesional dan akuntabel		
											profesional dan akuntabel untuk mendukung		
											profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		
											profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		
											profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		
											profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		
4	02	2 02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan	Pemerintahan dan Hukum		3 Laporan	Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- 5871	DAERAH
4	02	2 02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			3 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	- 582:	
4	02	2 02	2.03	0002		Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang		3 Laporan	Semua Kel/Desa 250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	- 582.	DAERAH 500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	2 02	2.03	0002		Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan		3 Laporan	Semua Kel/Desa 250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dareh yang profesional dan akuntabel	- 582.	DAERAH 500,000,00 SEKRETARIAT DEWAN
4	02	2 02	2.03	0002		Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang		3 Laporan	Semua Kel/Desa 250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	- 582.1	DAERAH 500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	2 02	2.03	0002		Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang		3 Laporan	Semua Kel/Desa 250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dareh yang profesional dan akuntabel	- 582.5	DAERAH 500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	9 02	2.03	0002		Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang		3 Laporan	Semua Kel/Desa 250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	- 582.	DAERAH 500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	9 02	2.03	0002		Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang		3 Laporan	Semua Kel/Desa 250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	- 582.9	DAERAH 500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	2 02	2.03	0002		Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang		3 Laporan	Semua Kel/Desa 250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola	- 582.	DAERAH 500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4	02	9 02	2.03	0002		Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang		3 Laporan	Semua Kel/Desa 250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	- 582.9	DAERAH 500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
					Bidang Infrastruktur	Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			Semua Kel/Desa 250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		DAERAH 500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		2 02		0002	Bidang Infrastruktur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Pengawasan		3 Laporan	Semua Kel/Desa 250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola		DAERAH 500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN
					Bidang Infrastruktur	Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang			Semua Kel/Desa 250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan,		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dara han pelayanan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dara Palayanan Publik		DAERAH 500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
					Bidang Infrastruktur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Pengawasan			Semua Kel/Desa 250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		DAERAH 500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN
					Bidang Infrastruktur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang			Semua Kel/Desa 250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan,		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		DAERAH 500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
					Bidang Infrastruktur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang			Semua Kel/Desa 250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan,		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah kelola Pemerintahan darah velayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik		DAERAH 500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
					Bidang Infrastruktur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang			Semua Kel/Desa 250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan,		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		DAERAH 500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
					Bidang Infrastruktur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang			Semua Kel/Desa 250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan,		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan		DAERAH 500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
					Bidang Infrastruktur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang			Semua Kel/Desa 250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan,		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dareh yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dareh yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola		DAERAH 500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
					Bidang Infrastruktur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang			Semua Kel/Desa 250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan,		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan		DAERAH 500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 500.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT



4	02	2 02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan		3 Laporan	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	582.500.000,	00 SEKRETARIAT DEWAN
					Bidang Perekonomian	Urusan Pemerintahan Bidang		· ·	Semua Kecamatan,	, ,	pemerintahan daerah yang		PERWAKILAN RAKYAT
						Perekonomian			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		DAERAH
											untuk mendukung		
											transformasi pelayanan		
											publik		
											1. Penataan dan		
											Pengembangan Tata Kelola		
											Pemerintahan dan Pelayanan		
	4										Publik		
4	02	2 02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan			3 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	582.500.000,	00 SEKRETARIAT DEWAN
					Bidang Sumber Daya Alam	Urusan Pemerintahan Bidang			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		PERWAKILAN RAKYAT
						Sumber Daya Alam			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		DAERAH
											untuk mendukung transformasi pelayanan		
											publik		
											1. Penataan dan		
											Pengembangan Tata Kelola		
											Pemerintahan dan Pelayanan		
											Publik		
4	02	2 02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	200.000.000.	00 SEKRETARIAT DEWAN
	1				Pemeriksaan Laporan Keuangan	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		PERWAKILAN RAKYAT
	1				oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Laporan Keuangan oleh Badan			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		DAERAH
	1					Pemeriksa Keuangan					untuk mendukung		
	1										transformasi pelayanan		
											publik		
											1. Penataan dan		
											Pengembangan Tata Kelola		
											Pemerintahan dan Pelayanan		
											Publik		
4	02	2 02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran			1 Dokumen	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	364.000.000,	00 SEKRETARIAT DEWAN
						Penggunaan Anggaran			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		PERWAKILAN RAKYAT
									Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		DAERAH
											untuk mendukung		
											transformasi pelayanan		
											publik 1. Penataan dan		
											Pengembangan Tata Kelola		
											Pemerintahan dan Pelayanan		
											Publik		
4	02												
		2 02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan	Jumlah Rekomendasi Hasil		1 Dokumen	182,000,000,00 Kab, Kutai Kartanegara.	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	182,000,000	00 SEKRETARIAT DEWAN
	"	2 02	2.03	8000	Pembahasan Laporan Keterangan	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan		1 Dokumen	182.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	182.000.000,	00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
		2 02	2.03	8000		Pembahasan Laporan Keterangan		1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola - pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	182.000.000,	OO SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	0.2	2 02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			1 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang	182.000.000,	PERWAKILAN RAKYAT
1		2 02	2.03	8000	Pertanggungjawaban Kepala	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala		1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	182.000.000,	PERWAKILAN RAKYAT
		2 02	2.03	0008	Pertanggungjawaban Kepala	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala		1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	182.000,000,	PERWAKILAN RAKYAT
		2 02	2.03	0008	Pertanggungjawaban Kepala	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala		1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	182.000.000,	PERWAKILAN RAKYAT
		2 02	2.03	0008	Pertanggungjawaban Kepala	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala		1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	182.000.000,	PERWAKILAN RAKYAT
		2 02	2.03	0008	Pertanggungjawaban Kepala	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala		1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	182.000.000,	PERWAKILAN RAKYAT
				0008	Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4		2 02		0008	Pertanggungjawaban Kepala	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Persentase Peningkatan Kapasitas -		1 Dokumen	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola -		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 00 SEKRETARIAT DEWAN
4				0008	Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4				0008	Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Persentase Peningkatan Kapasitas -			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan daerah yang profesional dan akuntabel		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 00 SEKRETARIAT DEWAN
4				0008	Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Persentase Peningkatan Kapasitas -			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4				0008	Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Persentase Peningkatan Kapasitas -			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4				0008	Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Persentase Peningkatan Kapasitas -			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4				0008	Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Persentase Peningkatan Kapasitas -			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4				0008	Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Persentase Peningkatan Kapasitas -			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4				0008	Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Persentase Peningkatan Kapasitas -			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
	02	2 02	2.04		Pertanggungjawaban Kepala Daerah Peningkatan Kapasitas DPRD	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Persentase Peningkatan Kapasitas - DPRD		100 Persen	Semua Kezamatan, Semua Kel/Desa 5.541.260.000,00		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- 5.541.260.000,	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
	02	2 02	2.04		Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Persentase Peningkatan Kapasitas -			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dala akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	- 5.541.260.000,	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	02	2 02	2.04		Pertanggungjawaban Kepala Daerah Peningkatan Kapasitas DPRD	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman		100 Persen	Semua Kezamatan, Semua Kel/Desa 5.541.260.000,00 1.274.750.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	- 5.541.260.000,	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 00 SEKRETARIAT DEWAN
	02	2 02	2.04		Pertanggungjawaban Kepala Daerah Peningkatan Kapasitas DPRD	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman		100 Persen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5.541.260.000,00 1.274.750.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	- 5.541.260.000,	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
	02	2 02	2.04		Pertanggungjawaban Kepala Daerah Peningkatan Kapasitas DPRD	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman		100 Persen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5.541.260.000,00 1.274.750.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	- 5.541.260.000,	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
	02	2 02	2.04		Pertanggungjawaban Kepala Daerah Peningkatan Kapasitas DPRD	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman		100 Persen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5.541.260.000,00 1.274.750.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	- 5.541.260.000,	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
	02	2 02	2.04		Pertanggungjawaban Kepala Daerah Peningkatan Kapasitas DPRD	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman		100 Persen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5.541.260.000,00 1.274.750.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	- 5.541.260.000,	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
	02	2 02	2.04		Pertanggungjawaban Kepala Daerah Peningkatan Kapasitas DPRD	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman		100 Persen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5.541.260.000,00 1.274.750.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	- 5.541.260.000,	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
	02	2 02	2.04		Pertanggungjawaban Kepala Daerah Peningkatan Kapasitas DPRD	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman		100 Persen	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5.541.260.000,00 1.274.750.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	- 5.541.260.000,	PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT



4	02	02 2	2.04 000	. City caldair it cloth point and addi	Jumlah Orang dalam Kelompok	7 Orang	g	1.505.300.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	1.505.300.000,00	
				Tim Ahli	Pakar dan Tim Ahli			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			PERWAKILAN RAKYAT
								Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			DAERAH
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
4	02	02 2	2.04 000	5 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	10 Orar	ing	295.750.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DRH)	- 7. Peningkatan tata kelola	_	295 750 000 00	SEKRETARIAT DEWAN
	02	02 2	2.01	i enyedidan rendga riiin raidi	Januar Tenaga / IIII Talas	120 014	6	Semua Kecamatan,	Britter Cortor Torico (BBI-1)	pemerintahan daerah yang		233.730.000,00	PERWAKILAN RAKYAT
								Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			DAERAH
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
4	02	02 2	2.04 000	6 Penyelenggaraan Hubungan	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokur	ımen	182.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola	-	182.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN
				Masyarakat	Penyelenggaraan Hubungan			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			PERWAKILAN RAKYAT
		1 1			Masyarakat			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel untuk mendukung			DAERAH
										transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
4	02	02 2	2.04 000	7 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja	1 Dokur	ımen	159.250.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	159.250.000,00	SEKRETARIAT DEWAN
					DPRD			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			PERWAKILAN RAKYAT
								Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			DAERAH
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
-	02	02 2	2.04 000	8 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan	1 Dokur		2.124.210.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola		2 124 210 000 00	SEKRETARIAT DEWAN
4	02	02 2	2.04	6 Fublikasi dali bokullentasi DFRD	Dokumentasi DPRD	1 bokui	illeli	Semua Kecamatan,	DANA BAGITIASIL (DBII)	pemerintahan daerah yang		2.124.210.000,00	PERWAKILAN RAKYAT
					DOKAMENTASI BI NB			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			DAERAH
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan publik			
1										transformasi pelayanan			
										transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
										transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
										transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
4	02	02 2	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan	Persentase Kegiatan yang -	100 Pe	ersen	4.083.660.000,00		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola		4.083.660.000,00	SEKRETARIAT DEWAN
4	02	02 2	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Kegiatan yang - Terlaksana	100 Pe	ersen	4.083.660.000,00		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang		4.083.660.000,00	PERWAKILAN RAKYAT
4	02	02 2	2.05			100 Pe	ersen	4.083.660.000,00		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	4.083.660.000,00	
4	02	02 2	2.05				ersen	4.083.660.000,00		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	4.083.660.000,00	PERWAKILAN RAKYAT
4	02	02 2	2.05			100 Pe	ersen	4.083.660.000,00		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		4.083.660.000,00	PERWAKILAN RAKYAT
4	02	02 2	2.05			100 Pe	ersen	4.083.660.000,00		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		4.083.660.000,00	PERWAKILAN RAKYAT
4	02	02 2	2.05			100 Pe	ersen	4.083.660.000,00		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		4.083.660.000,00	PERWAKILAN RAKYAT
4	02	02 2	2.05			100 Pe	ersen	4.083.660.000,00		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daren hyang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola		4.083.660.000,00	PERWAKILAN RAKYAT
4	02	02 2	2.05			100 Pe	ersen	4.083.660.000,00		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		4.083.660.000,00	PERWAKILAN RAKYAT
		02 2		Aspirasi Masyarakat		100 Pe		4.083.660.000,00 500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			PERWAKILAN RAKYAT
					Terlaksana				DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
				Aspirasi Masyarakat	Terlaksana Jumlah Laporan Hasil Kunjungan			500.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN
				Aspirasi Masyarakat	Terlaksana Jumlah Laporan Hasil Kunjungan			500.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Palayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Palayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
				Aspirasi Masyarakat	Terlaksana Jumlah Laporan Hasil Kunjungan			500.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daren yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
				Aspirasi Masyarakat	Terlaksana Jumlah Laporan Hasil Kunjungan			500.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik			PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
				Aspirasi Masyarakat	Terlaksana Jumlah Laporan Hasil Kunjungan			500.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
				Aspirasi Masyarakat	Terlaksana Jumlah Laporan Hasil Kunjungan			500.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola	-		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
				Aspirasi Masyarakat	Terlaksana Jumlah Laporan Hasil Kunjungan			500.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-		PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT



4	02	02 2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok		2 Dokumen	129.485.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	129.485	.000,00 SEKRETARIAT DEWAN
				DPRD	Pikiran DPRD yang Disusun			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		PERWAKILAN RAKYAT
					,, ,			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		DAERAH
										untuk mendukung		
										transformasi pelayanan		
										publik		
										1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		
1	02	02 2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan		3 Dokumen	3.454.175.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DRH)		3 /5/ 175	.000,00 SEKRETARIAT DEWAN
	02	02 2.03	0005	relational neses	Reses		5 Bokumen	Semua Kecamatan,	Britis (BBI)	pemerintahan daerah yang	3.13.1273	PERWAKILAN RAKYAT
					neses			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		DAERAH
								Sellida Kely Desa		untuk mendukung		DAERAH
										transformasi pelayanan		
										publik		
										1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		
4	02	02 2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode	Porcontaco Polakcanaan dan	+	100 Persen	333.790.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola -	222 700	.000,00 SEKRETARIAT DEWAN
4	02	2.06	' I	Etik DPRD			TOO LEISEII	333.730.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola - pemerintahan daerah yang	- 333.790	PERWAKILAN RAKYAT
	1 1			ELIK DPKU	Pengawasan					pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		DAERAH
				1	1					profesional dan akuntabel untuk mendukung		DAEKAH
										transformasi pelayanan publik		
										1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
	1				l							
4	02	02 2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara		1 Dokumen	136.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		136.500	.000,00 SEKRETARIAT DEWAN
					DPRD			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		PERWAKILAN RAKYAT
								Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		DAERAH
										untuk mendukung		
										transformasi pelayanan		
										publik		
										1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		
4	02	02 2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan		3 Laporan	197.290.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	197.290	.000,00 SEKRETARIAT DEWAN
					Kode Etik DPRD			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		PERWAKILAN RAKYAT
								Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		DAERAH
										untuk mendukung		
										transformasi pelayanan		
										publik		
										1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		
4	02	02 2.07	'	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan Kerja -		100 Persen	100.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola -	- 100.000	.000,00 SEKRETARIAT DEWAN
	1 1		ı		Sama					pemerintahan daerah yang		PERWAKILAN RAKYAT
				1	1					profesional dan akuntabel		DAERAH
	1 1		ı							untuk mendukung		
				1		1				transformasi pelayanan		
	1 1			1	1					publik		
				1		1				1. Penataan dan		
				1		1				Pengembangan Tata Kelola		
				1	1					Pemerintahan dan Pelayanan		
	1 1		ı							Publik		
4	02	02 2.07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi	Jumlah Dokumen Rekomendasi		1 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	100.000	.000,00 SEKRETARIAT DEWAN
				Persetujuan Kerja Sama Daerah	Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan	1		Semua Kecamatan,	,	pemerintahan daerah yang		PERWAKILAN RAKYAT
	1 1			1	Koordinasi Persetujuan Kerja Sama			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		DAERAH
				1	Daerah			,		untuk mendukung		
	1 1		ı							transformasi pelayanan		
l		1		1	1					publik		
				1	1	1	1					i
										1. Penataan dan		
										Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		
										Pengembangan Tata Kelola		

		1 1			I	T				ı	T	1			
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan		100 persen	10.647.900.000,00		-	7. Peningkatan tata kelola	-	- 10.647.900.000,0	00 SEKRETARIAT DEWAN
						Pimpinan dan Anggota DPRD						pemerintahan daerah yang			PERWAKILAN RAKYAT
												profesional dan akuntabel			DAERAH
												untuk mendukung			
												transformasi pelayanan			
												publik			
												1. Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
4	. 02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi		3 Dokumen	7.594.800.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DRH)	-	7. Peningkatan tata kelola	-	7 594 800 000 0	OO SEKRETARIAT DEWAN
1 .					Pelaksanaan Tugas DPRD	dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas			Semua Kecamatan,			pemerintahan daerah yang			PERWAKILAN RAKYAT
					i ciaksanaan rugas bi kb	DPRD			Semua Kel/Desa			profesional dan akuntabel			DAERAH
						DPKD			Selfiua Kei/ Desa						DAERAH
												untuk mendukung			
												transformasi pelayanan			
												publik			
												1. Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
4	. 02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat		3 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola	-	100.000.000.0	O SEKRETARIAT DEWAN
					,	Kelengkapan dan Kinerja DPRD			Semua Kecamatan,		1	pemerintahan daerah yang		250,550,550,5	PERWAKILAN RAKYAT
1		1 1		1		yang Disusun			Semua Kel/Desa	1	1	profesional dan akuntabel			DAERAH
1		1 1		1		yang Disusun			Semua kei/ Desa	1	1				DAEKAR
				1							1	untuk mendukung			
				1							1	transformasi pelayanan			
1		1 1		l								publik			
				1							1	1. Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
4	. 02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi		3 Dokumen	182.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola	-	182,000,000,0	O SEKRETARIAT DEWAN
					Musyawarah	Pelaksanaan Tugas Badan			Semua Kecamatan,			pemerintahan daerah yang			PERWAKILAN RAKYAT
					Wasyawaran	Musyawarah			Semua Kel/Desa			profesional dan akuntabel			DAERAH
						iviusyawaran			Selfiua Kei/ Desa						DAERAH
												untuk mendukung			
												transformasi pelayanan			
												publik			
												1. Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
4	. 02	02	2 08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi		3 Dokumen	2.771.100.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DRH)	_	7. Peningkatan tata kelola	-	2 771 100 000 0	00 SEKRETARIAT DEWAN
1	02	02	2.00	0001	rasintasi ragas i impinan bi no	Tugas Pimpinan DPRD		5 Boltamen	Semua Kecamatan,	Britis Brieff Block (BBri)		pemerintahan daerah yang		2.771.100.000,0	PERWAKILAN RAKYAT
						rugus i inipinan bi ito			Semua Kel/Desa			profesional dan akuntabel			DAERAH
									Selfiua Kei/ Desa						DAERAH
												untuk mendukung			
												transformasi pelayanan			
				1							1	publik			
1		1 1		1						1	1	1. Penataan dan			
1		1 1		1						1	1	Pengembangan Tata Kelola			
				1							1	Pemerintahan dan Pelayanan			
1		1 1		l								Publik			
	1	1 1			Badan Perencanaan Pembangunan I	Daerah			38.942.454.827,00	•	•	•	•	33.171.845.893.0	00 BADAN PERENCANAAN
															PEMBANGUNAN DAERAH
5	:				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEME	RINTAHAN			38.942.454.827,00					33.171.845.893.0	00 BADAN PERENCANAAN
															PEMBANGUNAN DAERAH
	01	+			PERENCANAAN				38.942.454.827,00		1			33.171.845.893,0	
3	01				PEREINCAINAAIN				38.342.434.627,00					33.171.043.053,0	PEMBANGUNAN DAERAH
45 5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Sakip Perangkat Daerah -		88,85 Nilai	31.017.454.827,00		1			25 225 106 452 0	00 BADAN PERENCANAAN
45 5	01	01			PEMERINTAHAN DAERAH	Milai Sakip Perangkat Daeran -		00,05 NIIdi	31.017.434.827,00					- 25.325.196.453,0	PEMBANGUNAN DAERAH
1				1	KABUPATEN/KOTA										FEIVIDANGUNAN DAEKAH
	+-	+_+		 	·	 									
5	01	01	2.01	1	Perencanaan, Penganggaran, dan			8 document	400.000.000,00		Memperkuat reformasi	7. Peningkatan tata kelola	ASN Bappeda	- 600.000.000,0	00 BADAN PERENCANAAN
				1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	anggaran dan evaluasi kinerja					politik, hukum dan birokrasi,	pemerintahan daerah yang	Kabupaten Kutai		PEMBANGUNAN DAERAH
				1		perangkat daerah					serta memperkuat	profesional dan akuntabel	Kartanegara		
				1							pencegahan dan	untuk mendukung			
				1							pemberantasan korupsi,	transformasi pelayanan			
	1			1							narkoba, judi, dan	publik			
				1	I					1	penyeludupan.	1. Penataan dan			
											p,				
											,,	Pengembangan Tata Kelola			
											,,				

5															
ر	01	01 2	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan		2 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi	7. Peningkatan tata kelola	ASN Bappeda	250.000.000,00	
			J		Perangkat Daerah	Perangkat Daerah			Semua Kecamatan,		politik, hukum dan birokrasi,	pemerintahan daerah yang	Kabupaten Kutai		PEMBANGUNAN DAERAH
					•				Semua Kel/Desa		serta memperkuat	profesional dan akuntabel	Kartanegara		
											pencegahan dan	untuk mendukung	· ·		
											pemberantasan korupsi,	transformasi pelayanan			
												nublik			
											narkoba, judi, dan				
											penyeludupan.	1. Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
- 5	01	01 2	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja		4 Laporan	100.000.000.00 Kab, Kutai Kartanegara.	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi	7. Peningkatan tata kelola	ASN Bappeda	150,000,000,00	BADAN PERENCANAAN
'	01	01 2	2.01	0000				4 Laporari		DANA BAGITIASIE (BBIT)	politik, hukum dan birokrasi,	pemerintahan daerah yang		150.000.000,00	PEMBANGUNAN DAERAH
					Laporan Capaian Kinerja dan	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kecamatan,				Kabupaten Kutai		PEIVIBANGUNAN DAEKAH
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi			Semua Kel/Desa		serta memperkuat	profesional dan akuntabel	Kartanegara		
						Penyusunan Laporan Capaian					pencegahan dan	untuk mendukung			
						Kinerja dan Ikhtisar Realisasi					pemberantasan korupsi,	transformasi pelayanan			
						Kinerja SKPD					narkoba, judi, dan	publik			
											penyeludupan.	Penataan dan			
											, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan			
$oldsymbol{\perp}$								ļ	ļ			Publik			
5	01	01 2	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1 1	1 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi	7. Peningkatan tata kelola	ASN Bappeda	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN
			J			Perangkat Daerah	1 1	1	Semua Kecamatan,	1	politik, hukum dan birokrasi,	pemerintahan daerah yang	Kabupaten Kutai		PEMBANGUNAN DAERAH
			J			-	1 1	1	Semua Kel/Desa	1	serta memperkuat	profesional dan akuntabel	Kartanegara		
						1					pencegahan dan	untuk mendukung			
						1					pemberantasan korupsi,	transformasi pelayanan			
											narkoba, judi, dan	publik			
											penyeludupan.	Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
	01	01 2	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat	Jumlah Berita Acara Hasil Forum		1 Berita Acara	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	Memperkuat reformasi	7. Peningkatan tata kelola	ASN Bappeda	50,000,000,00	BADAN PERENCANAAN
١٠	01	01 2	2.01	0010				1 Delita Atala		DANA BAGITIASIE (DBIT)				30.000.000,00	PEMBANGUNAN DAERAH
					Daerah Berdasarkan Bidang Urusan	Perangkat Daerah Berdasarkan			Semua Kecamatan,		politik, hukum dan birokrasi,	pemerintahan daerah yang	Kabupaten Kutai		PEMBANGUNAN DAERAH
					yang Diampu dalam Rangka	Bidang Urusan yang Diampu dalam			Semua Kel/Desa		serta memperkuat	profesional dan akuntabel	Kartanegara		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan	Rangka Penyusunan Dokumen					pencegahan dan	untuk mendukung			
					Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah					pemberantasan korupsi,	transformasi pelayanan			
											narkoba, judi, dan	publik			
												1 Donataan dan			
											penyeludupan.	1. Penataan dan			
1 1												Pengembangan Tata Kelola			
												Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
												Pengembangan Tata Kelola			
5	01	01 2	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Laporan Keuangan -		6 Laporan	16.992.992.287,00			Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Bappeda	- 17.752.943.365,00	BADAN PERENCANAAN
5	01	01 2	2.02			Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel		6 Laporan	16.992.992.287,00		penyeludupan. Memperkuat reformasi	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola		- 17.752.943.365,00	
5	01	01 2	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan - Perangkat Daerah yang Akuntabel		6 Laporan	16.992.992.287,00		penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Kabupaten Kutai	- 17.752.943.365,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01 2	2.02					6 Laporan	16.992.992.287,00		penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		- 17.752.943.365,00	
5	01	01 2	2.02					6 Laporan	16.992.992.287,00		penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	Kabupaten Kutai	- 17.752.943.365,00	
5	01	01 2	2.02					6 Laporan	16.992.992.287,00		penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	Kabupaten Kutai	- 17.752.943.365,00	
5	01	01 2	2.02					6 Laporan	16.992.992.287,00		penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	Kabupaten Kutai	- 17.752.943.365,00	
5	01	01 2	2.02					6 Laporan	16.992.992.287,00		penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	Kabupaten Kutai	- 17.752.943.365,00	
5	01	01 2	2.02					6 Laporan	16.992.992.287,00		penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Kabupaten Kutai	- 17.752.943.365,00	
5	01	01 2	2.02					6 Laporan	16.992.992.287,00		penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Kabupaten Kutai	- 17.752.943.365,00	
5	01	01 2	2.02					6 Laporan	16.992.992.287,00		penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Kabupaten Kutai	- 17.752.943.365,00	
					Daerah	Perangkat Daerah yang Akuntabel					penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kabupaten Kutai Kartanegara		PEMBANGUNAN DAERAH
		01 2		0001		Perangkat Daerah yang Akuntabel Jumlah Orang yang Menerima Gaji		1860	16.542.992.287,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola	Kabupaten Kutai Kartanegara		PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN
				0001	Daerah	Perangkat Daerah yang Akuntabel				DANA BAGI HASIL (DBH)	penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kabupaten Kutai Kartanegara		PEMBANGUNAN DAERAH
				0001	Daerah	Perangkat Daerah yang Akuntabel Jumlah Orang yang Menerima Gaji		1860	16.542.992.287,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola	Kabupaten Kutai Kartanegara		PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN
				0001	Daerah	Perangkat Daerah yang Akuntabel Jumlah Orang yang Menerima Gaji		1860	16.542.992.287,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Kabupaten Kutai Kartanegara ASN Bappeda Kabupaten Kutai		PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN
				0001	Daerah	Perangkat Daerah yang Akuntabel Jumlah Orang yang Menerima Gaji		1860	16.542.992.287,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	Kabupaten Kutai Kartanegara ASN Bappeda Kabupaten Kutai		PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN
				0001	Daerah	Perangkat Daerah yang Akuntabel Jumlah Orang yang Menerima Gaji		1860	16.542.992.287,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	Kabupaten Kutai Kartanegara ASN Bappeda Kabupaten Kutai		PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN
				0001	Daerah	Perangkat Daerah yang Akuntabel Jumlah Orang yang Menerima Gaji		1860	16.542.992.287,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Kabupaten Kutai Kartanegara ASN Bappeda Kabupaten Kutai		PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN
				0001	Daerah	Perangkat Daerah yang Akuntabel Jumlah Orang yang Menerima Gaji		1860	16.542.992.287,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Kabupaten Kutai Kartanegara ASN Bappeda Kabupaten Kutai		PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN
				0001	Daerah	Perangkat Daerah yang Akuntabel Jumlah Orang yang Menerima Gaji		1860	16.542.992.287,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Kabupaten Kutai Kartanegara ASN Bappeda Kabupaten Kutai		PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN
				0001	Daerah	Perangkat Daerah yang Akuntabel Jumlah Orang yang Menerima Gaji		1860	16.542.992.287,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Kabupaten Kutai Kartanegara ASN Bappeda Kabupaten Kutai		PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN
				0001	Daerah	Perangkat Daerah yang Akuntabel Jumlah Orang yang Menerima Gaji		1860	16.542.992.287,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Kabupaten Kutai Kartanegara ASN Bappeda Kabupaten Kutai		PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN
5	01	01 2	2.02		Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1860 Orang/bulan	16.542.992.287,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kabupaten Kutai Kartanegara ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	17.419.083.565,00	PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01		2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1860	16.542.992.287,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	Kabupaten Kutai Kartanegara ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara ASN Bappeda	17.419.083.565,00	PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN
5	01	01 2	2.02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan		1860 Orang/bulan	16.542.992.287,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 425.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pengembangan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dareah yang	ASN Bappeda Kartanegara ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara ASN Bappeda Kabupaten Kutai	17.419.083.565,00	PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01 2	2.02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1860 Orang/bulan	16.542.992.287,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel	Kabupaten Kutai Kartanegara ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara ASN Bappeda	17.419.083.565,00	PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN
5	01	01 2	2.02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan		1860 Orang/bulan	16.542.992.287,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 425.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pengembangan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dareah yang	ASN Bappeda Kartanegara ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara ASN Bappeda Kabupaten Kutai	17.419.083.565,00	PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN
5	01	01 2	2.02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Kourdinasi Penyusunan Laporan Keuangan		1860 Orang/bulan	16.542.992.287,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 425.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Palayanan Publik	ASN Bappeda Kartanegara ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara ASN Bappeda Kabupaten Kutai	17.419.083.565,00	PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN
5	01	01 2	2.02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		1860 Orang/bulan	16.542.992.287,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 425.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Panganan publik 1. Penataan dan penganan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penatanan dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN Bappeda Kartanegara ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara ASN Bappeda Kabupaten Kutai	17.419.083.565,00	PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN
5	01	01 2	2.02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Kourdinasi Penyusunan Laporan Keuangan		1860 Orang/bulan	16.542.992.287,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 425.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN Bappeda Kartanegara ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara ASN Bappeda Kabupaten Kutai	17.419.083.565,00	PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN
5	01	01 2	2.02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		1860 Orang/bulan	16.542.992.287,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 425.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	ASN Bappeda Kartanegara ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara ASN Bappeda Kabupaten Kutai	17.419.083.565,00	PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN
5	01	01 2	2.02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		1860 Orang/bulan	16.542.992.287,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 425.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Panganan publik 1. Penataan dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	ASN Bappeda Kartanegara ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara ASN Bappeda Kabupaten Kutai	17.419.083.565,00	PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN
5	01	01 2	2.02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		1860 Orang/bulan	16.542.992.287,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 425.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	ASN Bappeda Kartanegara ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara ASN Bappeda Kabupaten Kutai	17.419.083.565,00	PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN



								,						
5	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik	ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Miliik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	8 dokument	350.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7-00m. 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	- 250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Millik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	8 document	365.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	- 500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



5	0:	1 01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	1 01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilalan Kinerja Pegawai	4 Dokumen	60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	75,000,000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	00	1 01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	280.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	1 01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Layanan	2.156.959.800,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	- 1.754.901.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	0:	1 01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	1 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	0:	1 01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	94.901.800,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	94.901.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
										narkoba, judi, dan penyeludupan.	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
5	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	86.250.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5					dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	600.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	725.808.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara		65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	2.328.925.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara		197.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	25 Unit	996.925.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	0	,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	106 Unit	1.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	132.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	70. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	197.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	12 laporan	3.829.920.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	2.272.313.550,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.800.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politiki, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	1.521.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.029.920.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politiki, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	750.413.550,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Millik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen	4.593.657.740,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	1.997.537.738,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	205.870.120,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politiki, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	239.429.620,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	208.122.620,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	233.002.620,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5		L 01			Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	2.800.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	1.354.665.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	719.428.660,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
246 5	01	L 02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Skor Penilaian Dokumen Rencana - Daerah	8,70 Nilai	3.725.000.000,00					4.737.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		02			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Regulasi Daerah Tentang - Dokumen Rencana Daerah Yang Ditetapkan	4 Regulation	1.450.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemangku kepentingan pembangunan daerah		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	L 02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemangku kepentingan pembangunan daerah	00,000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		3 Dokumen	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemangku kepentingan pembangunan daerah	240.000.000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



5	01	. 02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Pemangku kepentingan pembangunan daerah	90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
											Publik			
5	01		2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	59 Berita Acara	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemangku kepentingan pembangunan daerah		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemangku kepentingan pembangunan daerah	250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	. 02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	20 Usulan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemangku kepentingan pembangunan daerah	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	. 02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemangku kepentingan pembangunan daerah	700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	. 02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data yang dipublikasikan dalam SDI Kukar	2 Dokumen	1.050.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemangku kepentingan pembangunan daerah		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	. 02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	400.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemangku kepentingan pembangunan daerah	452.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5	0:	1 02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	200 Orang	500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Pemangku kepentingan pembangunan daerah	480.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
										pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			
										penyeludupan.	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
5	0:	1 02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Pemangku kepentingan pembangunan daerah	102.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
										pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
5	01	1 02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Pengendalian dan Evaluasi	8 Laporan	700.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Pemerintah Daerah, Provinsi dan Nasional	1.052.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	0:	1 02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Pemerintah Daerah, Provinsi dan Nasional	202.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	0:	1 02	2.03	0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	5 Kerja Sama	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Pemerintah Daerah, Provinsi dan Nasional		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
										репуставарит.	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
		1 02			Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah, Provinsi dan Nasional		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	1 02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah Yang dilmplementasikan	6 Sistem Informasi	525.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	525.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



	5	01 02		0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	6 Dokumen	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	75.000.000,0	PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01 02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	6 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	150.000.000,6	00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01 02	2.04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	3,000,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
247	5	01 03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai Komponen Perencanaan Pada Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	25.94 Nilai	4.200.000.000,00					- 3.109.249.440,4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01 03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Penelahaan terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan dokumen rencana Perangkat daerah pada Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	101 document	1.400.000.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran peran perampuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Perangkat Daerah dibawah koordinasi bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	- 1.176.750.000,/	DO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01 03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dibawah koordinasi bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	115.000.000,6	00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01 03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dibawah koordinasi bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		11 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dibawah koordinasi bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	70,000,000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		2 Laporan	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dibawah koordinasi bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		26 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dibawah koordinasi bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	236.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		13 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dibawah koordinasi bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		13 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dibawah koordinasi bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	115.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		3 Laporan	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dibawah koordinasi bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Penelaahan terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan dokumen rencana Perangkat daerah pada Bidang Perekonomian	46 Dokumen	1.400.000.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	Perangkat Daerah dibawah koordinasi bidang Perekonomian dan SDA	- 977.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						dan SDA				air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dibawah koordinasi bidang Perekonomian dan SDA	67.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dibawah koordinasi bidang Perekonomian dan SDA	92.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dibawah koordinasi bidang Perekonomian dan SDA	200.000,000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPIMO pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	400.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dibawah koordinasi bidang Perekonomian dan SDA	00,000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dibawah koordinasi bidang Perekonomian dan SDA	90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kiraedif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dibawah koordinasi bidang Perekonomian dan SDA	92.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



5	01	L 03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RRPD/RPJMD pada Bidang SDA	5 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memantapkan sistem pertahanan keamanan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Perangkat Daerah dibawah koordinasi bidang Perekonomian dan SDA Perangkat Daerah dibawah koordinasi	90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Pembangunan Daeran Bidang SDA	KKPU/KPJMU pada bidang SUA		Semua кеу реза		negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	untuk mendukung transformasi pelayanan	bidang Perekonomian dan SDA		
5	01	L 03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Penelahaan terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan dokumen rencana Perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100 document	1.400.000.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dibawah koordinasi bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	- 954.999.440,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	L 03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		8 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dibawah koordinasi bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dibawah koordinasi bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	92.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	L 03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dibawah koordinasi bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	249,999.620,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		2 Laporan	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegar. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	a, DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Penderintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dibawah koordinasi bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			40 Dokumer	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dibawah koordinasi bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		20 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegar. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	i, DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dibawah koordinasi bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	92.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusuana Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		20 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegar. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	i, DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dalan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dibawah koordinasi bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	249.999.820,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMO pada Bidang Kewilayahan		2 Laporan	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegar. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	, DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dibawah koordinasi bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	90,000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		\dagger			Badan Pendapatan Daerah	<u> </u>		I	70.501.301.193,00		I	1	<u> </u>	49.597.297.941,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEME	RINTAHAN			70.501.301.193,00					49.597.297.941,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02				KEUANGAN				70.501.301.193,00	1				49.597.297.941,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
248 5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah -	-	80 Persen	62.101.301.193,00					- 42.462.297.941,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH



-	02	01	2.01		Poroncanaan Poranasaan dan	Jumlah Dokumon Paranasan	9 Dokumen	525.000.000,00		7 Doningketen teta kalala	- 750.000.000,00 BADAN PEN	ENDADATAN
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	9 Dokumen 9 Dokumen	525.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	- 750.000.000,00 BADAN PEN DAERAH	
						Perangkat Daerah				profesional dan akuntabel		
						Jumlah dokumen rencana,				untuk mendukung		
						anggaran, dan Evaluasi Kinerja				transformasi pelayanan		
						Perangkat Daerah				publik		
										1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		
-	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Lumlah Dalauman Daransanaan	3 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BACILIACII (DDII)	- 7. Peningkatan tata kelola -	300.000.000,00 BADAN PEN	CNIDADATANI
٦	02	01	2.01	0001			3 DOKUMEN		DANA BAGITIASIL (DBIT)			LINDAFATAN
					Perangkat Daerah	Perangkat Daerah		Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang	DAERAH	
										profesional dan akuntabel		
										untuk mendukung		
										transformasi pelayanan		
										publik		
										1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		
-	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	100.000.000,00 BADAN PEN	ENDADATAN
3	02	01	2.01	0000			1 rahoidii		DAMA DAGI HASIL (DDR)		DAERAH	LINDAFA IAIN
	1	1 1		1	Laporan Capaian Kinerja dan	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	i l	Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang	DAERAH	
	1			1	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi				profesional dan akuntabel		
	1	1 1		1		Penyusunan Laporan Capaian	i l			untuk mendukung		
	1	1 1		1		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	i l			transformasi pelayanan		
						Kinerja SKPD				publik		
										1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		
	-	1								1 doing		
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	0 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	100.000.000,00 BADAN PEN	ENDAPATAN
						Perangkat Daerah		Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang	DAERAH	
										profesional dan akuntabel		
										untuk mendukung		
										transformasi pelayanan		
										publik		
										1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
	+	\vdash										
5	02	01	2.01	0009		Jumlah Data Statistik Sektoral	1 Data		DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	50.000.000,00 BADAN PEN	
					Statistik Sektoral Daerah	Daerah yang Telah Dikumpulkan		Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang	DAERAH	
						dan Diperiksa Lingkup Perangkat		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		
						Daerah				untuk mendukung		
										transformasi pelayanan		
										publik		
1	1	1 1	l	1		l l	i l			1. Penataan dan		
	1		l	1					1	Pengembangan Tata Kelola		
	1	1 1		1			i l			Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		
	1	1 1		1			i l					
_	1	1								Publik		
5	02	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat	Jumlah Berita Acara Hasil Forum	1 Berita Acara	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	50.000.000,00 BADAN PEN	ENDAPATAN
	1		l	1	Daerah Berdasarkan Bidang Urusan	Perangkat Daerah Berdasarkan		Tenggarong, Timbau	1	pemerintahan daerah yang	DAERAH	
1	1	1 1	l	1	yang Diampu dalam Rangka	Bidang Urusan yang Diampu dalam	i I			profesional dan akuntabel		
	1	1 1		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Rangka Penyusunan Dokumen	i I			untuk mendukung		
	1	1 1		1	Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah	i I			transformasi pelayanan		
- 1	1	1 1	l	1	i ci dilgnat Daci ali	i ci ciicanaan rerangkat Daeran	i I			publik		
1	1	1 1	l	1		l l	i I					
1	1	1 1	l	1						1. Penataan dan		
	1	1 1		1			i I			Pengembangan Tata Kelola		
	1	1 1		1			i I			Pemerintahan dan Pelayanan		
	Ш_									Publik		
5	02	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	100.000.000,00 BADAN PEN	ENDAPATAN
1	1	1 1	l	1	Urusan Selain Renstra PD dan Renja	Urusan Selain Renstra PD dan Renja		Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang	DAERAH	
1	1	1 1	l	1	PD	PD yang disusun	i I	30. 30		profesional dan akuntabel		
	1	1 1		1	1 =	- 76 41343411	i l			untuk mendukung		
1	1	1 1	l	1		l l	i l					
1	1	1 1	l	1						transformasi pelayanan		
1	1	1 1	l	1		l l	i l			publik		
	1	1 1		1			i l			1. Penataan dan		
		1 1		l					1	Pengembangan Tata Kelola		
								1			1 1	
									J	Pemerintahan dan Pelayanan		
										Pemerintahan dan Pelayanan Publik		



	01 2.07		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi - Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	5	5 Laporan	46.650.355.457,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	30.240.086.941,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 02 (01 2.02	2000	Daerah						profesional dan akuntabel untuk mendukung			DAERAH
5 02 (01 2.02	2000		akuntabel					untuk mendukung			
5 02 (01 2.02											
5 02 (01 2.02	2000							transformasi pelayanan			
5 02 1	01 2.02	2000										
5 02 (01 2.02	12 000:		Į.					publik			
5 02 (01 2.03	12 000:							1. Penataan dan			
5 02 0	01 2.02	2 0001		1					Pengembangan Tata Kelola			
5 02	01 2.00	2 0001	i .						Pemerintahan dan Pelayanan			
5 02	01 2.02	2 2001							Publik			
5 02	01 2.03											
		2 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		26	264 Orang/bulan	46.355.355.457,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	29.940.086.941,00	BADAN PENDAPATAN
				dan Tunjangan ASN			Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang			DAERAH
									profesional dan akuntabel			
	1								untuk mendukung			
									transformasi pelayanan			
									publik			
									1. Penataan dan			
									Pengembangan Tata Kelola			
									Pemerintahan dan Pelayanan			
									Publik			
+-+-		_										
5 02 0	01 2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1	l Laporan	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		-	50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN
			Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tahun SKPD dan Laporan Hasil			Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang			DAERAH
1 1 1	1		SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan				1	profesional dan akuntabel			İ
				Keuangan Akhir Tahun SKPD					untuk mendukung			
									transformasi pelayanan			
				1					publik			1
									1. Penataan dan			
									Pengembangan Tata Kelola			
									Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
+++		_										
5 02 0	01 2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	1	1 Laporan	270.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	=	250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN
			Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan			Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang			DAERAH
			Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan					profesional dan akuntabel			
				Laporan Keuangan					untuk mendukung			
				Bulanan/Triwulanan/Semesteran					transformasi pelayanan			
				SKPD					publik			
				SKFD					1. Penataan dan			
									Pengembangan Tata Kelola			
									Pemerintahan dan Pelayanan			
oxdot									Publik			
5 02 0	01 2.03	13	Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik -	4	1 Laporan	175.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	- -	200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN
			pada Perangkat Daerah	Daerah pada SKPD yang dilakukan					pemerintahan daerah yang			DAERAH
				penatausahaan					profesional dan akuntabel			
									untuk mendukung			
									transformasi pelayanan			
									publik			
									1. Penataan dan			
									Pengembangan Tata Kelola			
									Pemerintahan dan Pelayanan			
									Publik			
+++												ļ
5 02 0	01 2.03	0001	Penyusunan Perencanaan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	1	1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN
		1	Kebutuhan Barang Milik Daerah	Milik Daerah SKPD			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		1	DAERAH
1 1 1	1		SKPD	1			Semua Kel/Desa	1	profesional dan akuntabel			İ
1 1 1	1			1				1	untuk mendukung			İ
1 1 1	1			1				1	transformasi pelayanan			İ
				1					publik			1
				1					1. Penataan dan			1
		1		1					Pengembangan Tata Kelola		1	1
1 1 1				1					Pemerintahan dan Pelayanan			1
				1					Publik			ĺ
	ı	2 2002	Koordinasi dan Penilaian Barang	Lumbah Langson Hasil Da-U-1	- - 	Lanaran	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA DACILIACII (DD::)			F0 000 000 00	BADAN PENDAPATAN
F 02	01 3.0	15 0003		Jumlah Laporan Hasil Penilaian		1 Laporan		DAINA BAGI HASIL (DBH)		-	50.000.000,00	
5 02 0	01 2.03		Milik Daerah SKPD	Barang Milik Daerah dan Hasil			Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			DAERAH
5 02 (01 2.03			Koordinasi Penilaian Barang Milik			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			1
5 02 (01 2.03						l	l	untuk mendukung			
5 02 (01 2.03			Daerah SKPD		1						
5 02 (01 2.03								transformasi pelayanan			
5 02 (01 2.03								transformasi pelayanan publik			
5 02 (01 2.03								transformasi pelayanan			
5 02 (01 2.03								transformasi pelayanan publik			



5	02	01 2	2.03		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
												transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
5	02	01 2	2.03		Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Membangun Ekonomi	-	50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN
					SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			Semua Kecamatan,			Inklusif dan Berkelanjutan			DAERAH
						SAPU			Semua Kel/Desa			Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi			
												pelayanan publik			
5	02	01 2	2.05		Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi -		11 Dokumen	325.000.000,00		-	7. Peningkatan tata kelola		350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN
					Perangkat Daerah	Kepegawaian						pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			DAERAH
												untuk mendukung			
												transformasi pelayanan			
												publik 1. Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
5	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi		11 Dokumen	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	=	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	=	100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Auministrasi kepegawaian	Kepegawaian			Tenggarong, Timbau			profesional dan akuntabel			DAERAH
												untuk mendukung			
												transformasi pelayanan			
												publik 1. Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan			
5	02	01 :	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas		30 Orang	250.000.000,00 Semua Kota/Kab,	DANA BAGI HASIL (DBH)	_	Publik 7. Peningkatan tata kelola	_	250,000,000,00	BADAN PENDAPATAN
	02	01 .	2.03		Berdasarkan Tugas dan Fungsi	dan Fungsi yang Mengikuti		50 Ording	Semua Kecamatan,	Dittar Briding (BBH)		pemerintahan daerah yang		250.000.000,00	DAERAH
						Pendidikan dan Pelatihan			Semua Kel/Desa			profesional dan akuntabel			
												untuk mendukung transformasi pelayanan			
												publik			
												1. Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
5	02	01 2	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Persentase Administrasi umum -		80 Persen	1.850.000.000,00		Memperkuat penyelarasan	7. Peningkatan tata kelola		1.800.000.000,00	BADAN PENDAPATAN
					Daerah	Perangkat					kehidupan yang harmonis	pemerintahan daerah yang			DAERAH
											dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	profesional dan akuntabel untuk mendukung			
											peningkatan toleransi	transformasi pelayanan			
											antarumat beragama untuk	publik			
											mencapai masyarakat yang	1. Penataan dan			
											adil dan makmur.	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
5	02	01 2	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan		1 Paket	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan	7. Peningkatan tata kelola	-	200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN
					Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang			Tenggarong, Timbau		kehidupan yang harmonis	pemerintahan daerah yang			DAERAH
1			1			Disediakan					dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	profesional dan akuntabel untuk mendukung			
						1	1 1				peningkatan toleransi	transformasi pelayanan		l	
											peringidadir toleransi	ti alisioi illasi pelayallali			
											antarumat beragama untuk	publik			
											antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang	publik 1. Penataan dan			
											antarumat beragama untuk	publik			

-															
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	3 Paket	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan	7. Peningkatan tata kelola	-		300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN
						yang Disediakan		Tenggarong, Timbau		kehidupan yang harmonis	pemerintahan daerah yang				DAERAH
						,, ,		1 30 1 3		dengan lingkungan, alam,	profesional dan akuntabel				
										dan budaya serta	untuk mendukung				
										peningkatan toleransi	transformasi pelayanan				
										antarumat beragama untuk	publik				
										mencapai masyarakat yang	1. Penataan dan				
										adil dan makmur.	Pengembangan Tata Kelola				
											Pemerintahan dan Pelayanan				
											Publik				
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	0 Paket	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DRH)	Memperkuat penyelarasan	7. Peningkatan tata kelola	-		200 000 000 00	BADAN PENDAPATAN
	02	01	2.00	0005	Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan	o i uncc	Tenggarong, Timbau	State Control of Control	kehidupan yang harmonis	pemerintahan daerah yang			200.000.000,00	DAERAH
					Pengganuaan	Pengganuaan yang Diseulakan		renggarong, rimbau			pernermanan daeran yang				DAERAH
										dengan lingkungan, alam,	profesional dan akuntabel				
										dan budaya serta	untuk mendukung				
										peningkatan toleransi	transformasi pelayanan				
										antarumat beragama untuk	publik				
										mencapai masyarakat yang	1. Penataan dan				
										adil dan makmur.	Pengembangan Tata Kelola				
										dan dan makman.	Pemerintahan dan Pelayanan				
											Publik				
	 	.			l	 	4		<u> </u>	1					
5	02	01	2.06	0009	. /	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	2 Laporan	1.000.000.000,00 Semua Kota/Kab,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan	7. Peningkatan tata kelola	-	1	1.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN
	1				dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	I	Semua Kecamatan,		kehidupan yang harmonis	pemerintahan daerah yang	1			DAERAH
	1				ĺ	SKPD	I	Semua Kel/Desa		dengan lingkungan, alam,	profesional dan akuntabel	1			
	1				ĺ	1	I			dan budaya serta	untuk mendukung				
	1				ĺ	1	I			peningkatan toleransi	transformasi pelayanan				
	1				ĺ	1	I			antarumat beragama untuk	publik				
	1	1 1		1	1	1							1		
	1	1 1		1	1	1				mencapai masyarakat yang	1. Penataan dan		1		
										adil dan makmur.	Pengembangan Tata Kelola				
											Pemerintahan dan Pelayanan				
											Publik				
5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada	lumlah Dokumen Penatausahaan	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DRH)	Memperkuat penyelarasan	7. Peningkatan tata kelola	-		100 000 000 00	BADAN PENDAPATAN
	02	01	2.00	0010	SKPD	Arsip Dinamis pada SKPD	1 DOKUITICII		DAIVA BAGITIASIE (DDII)		pemerintahan daerah yang			100.000.000,00	DAERAH
					SKPD	Arsip Dinamis pada SKPD		Tenggarong, Timbau		kehidupan yang harmonis					DAERAH
										dengan lingkungan, alam,	profesional dan akuntabel				
										dan budaya serta	untuk mendukung				
										peningkatan toleransi	transformasi pelayanan				
										antarumat beragama untuk	publik				
j,															
										mencapai masyarakat yang	1. Penataan dan				
											Penataan dan Pengembangan Tata Kelola				
										mencapai masyarakat yang	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan				
										mencapai masyarakat yang	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang -	80 Persen	5.000.000,000,00		mencapai masyarakat yang	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-	-	3.800.000.000,00	BADAN PENDAPATAN
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pengadaan Barang - Milik Daerah	80 Persen	5.000.000,000		mencapai masyarakat yang	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	3.800.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07		Penunjang Urusan Pemerintah		80 Persen	5.000.000,000		mencapai masyarakat yang	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	-	3.800.000.000,00	
5	02	01	2.07				80 Persen	5.000.000.000,00		mencapai masyarakat yang	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	-	3.800.000.000,00	
5	02	01	2.07		Penunjang Urusan Pemerintah		80 Persen	5.000.000,000		mencapai masyarakat yang	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	-	3.800.000.000,00	
5	02	01	2.07		Penunjang Urusan Pemerintah		80 Persen	5.000.000.000,00		mencapai masyarakat yang	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pubilk Penerintahan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	-	3.800.000.000,00	
5	02	01	2.07		Penunjang Urusan Pemerintah		80 Persen	5.000.000,000		mencapai masyarakat yang	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		3.800.000.000	
5	02	01	2.07		Penunjang Urusan Pemerintah		80 Persen	5.000.000,000		mencapai masyarakat yang	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pubilik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan pubilik Penataan dan	-	-	3.800.000,000	
5	02	01	2.07		Penunjang Urusan Pemerintah		80 Persen	5.000.000,000		mencapai masyarakat yang	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik			3.800.000.000,00	
5	02	01	2.07		Penunjang Urusan Pemerintah		80 Persen	5.000.000,000		mencapai masyarakat yang	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pubilik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan pubilik Penataan dan			3.800.000.000,00	
5	02	01	2.07		Penunjang Urusan Pemerintah		80 Persen	5.000.000,000		mencapai masyarakat yang	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		-	3.800.000.000,00	
					Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Milik Daerah				mencapai masyarakat yang	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				DAERAH
		01		0006	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Milik Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	80 Persen	2.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	mencapai masyarakat yang	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Penerintahan dar Palayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola	-			DAERAH BADAN PENDAPATAN
				0006	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Milik Daerah		2.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	mencapai masyarakat yang	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan dan				DAERAH
				0006	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Milik Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin		2.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	mencapai masyarakat yang	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	-		DAERAH BADAN PENDAPATAN
				0006	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Milik Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin		2.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	mencapai masyarakat yang	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan dan				DAERAH BADAN PENDAPATAN
				0006	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Milik Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin		2.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	mencapai masyarakat yang	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-			DAERAH BADAN PENDAPATAN
				0006	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Milik Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin		2.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	mencapai masyarakat yang	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel				DAERAH BADAN PENDAPATAN
				0006	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Milik Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin		2.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	mencapai masyarakat yang	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-			DAERAH BADAN PENDAPATAN
				0006	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Milik Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin		2.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	mencapai masyarakat yang	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan 1. Penataan dan 1. Penataan dan 1. Penataan dan 1. Penataan dan 1. Penataan dan	-			DAERAH BADAN PENDAPATAN
				0006	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Milik Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin		2.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	mencapai masyarakat yang	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-			DAERAH BADAN PENDAPATAN
				0006	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Milik Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin		2.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	mencapai masyarakat yang	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-	-		DAERAH BADAN PENDAPATAN
				0006	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Milik Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin		2.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-		500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07	0006	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Milik Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	5 Unit	2.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02		2.07		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola 1. Peningkatan tata kelola 1. Peningkatan tata kelola 1. Peningkatan tata kelola 1. Peningkatan tata kelola 1. Peningkatan tata kelola 1. Peningkatan tata kelola 1. Peningkatan tata kelola 1. Peningkatan tata kelola 1. Peningkatan tata kelola 1. Peningkatan tata kelola			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENDAPATAN
5	02	01	2.07		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	5 Unit	2.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	-	500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	2.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan dan dan dan dan dan dan dan dan d	-		500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENDAPATAN
5	02	01	2.07		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	5 Unit	2.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-		500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENDAPATAN
5	02	01	2.07		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	5 Unit	2.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-		500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENDAPATAN
5	02	01	2.07		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	5 Unit	2.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-		500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENDAPATAN
5	02	01	2.07		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	5 Unit	2.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-		500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENDAPATAN
5	02	01	2.07		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	5 Unit	2.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan denatuhan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	-	500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENDAPATAN
5	02	01	2.07		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	5 Unit	2.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung 1. Penataan dan publik 1. Penataan dan pengembangan publik 1. Penataan dan	-	-	500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENDAPATAN
5	02	01	2.07		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	5 Unit	2.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan denatuhan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-		500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENDAPATAN



1 5		-	2 00			l	42.0-1	2 025 045 725 00		I	1	2.072.244.222.22	
	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	2.925.945.736,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			BADAN PENDAPATAN DAERAH
						, ,				untuk mendukung transformasi pelayanan			
										publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
										Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	1.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	=	1.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN
					Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan		Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang			DAERAH
						Listrik yang Disediakan				profesional dan akuntabel			
										untuk mendukung transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN
					Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			DAERAH
						yang Disediakan				profesional dan akuntabel untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	2 Laporan	1.325.945.736,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	1.772.211.000,00	BADAN PENDAPATAN
					Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			DAERAH
						Disediakan				untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
5	02												BADAN PENDAPATAN
		01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah		80 Persen	4.650.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola	-		
		01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang - milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	80 Persen	4.650.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			DAERAH
		01	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan	milik daerah penunjang urusan	80 Persen	4.650.000.000,00		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-		
		01	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan	milik daerah penunjang urusan	80 Persen	4.650.000.000,00		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan			
		01	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan	milik daerah penunjang urusan	80 Persen	4.650.000.000,00		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik			
		01	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan	milik daerah penunjang urusan	80 Persen	4.650.000.000,00		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan			
		01	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan	milik daerah penunjang urusan	80 Persen	4.650.000.000,00		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			DAERAH
5				0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Jumlah Kendaraan Perorangan	80 Persen	650.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola			DAERAH BADAN PENDAPATAN
5				0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang	-		DAERAH
5				0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		650.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			DAERAH BADAN PENDAPATAN
5				0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		650.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang	-		DAERAH BADAN PENDAPATAN
5				0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		650.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik			DAERAH BADAN PENDAPATAN
5				0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		650.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-		DAERAH BADAN PENDAPATAN
5				0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		650.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola			DAERAH BADAN PENDAPATAN
5				0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		650.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		450.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	02	01	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		650.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola		450.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENDAPATAN
	02	01	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	650.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		450.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	02	01	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	650.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-	450.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENDAPATAN
	02	01	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	650.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dara Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan transformasi pelayanan transformasi pelayanan transformasi pelayanan	-	450.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENDAPATAN
	02	01	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	650.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan ata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik rofesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	450.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENDAPATAN
	02	01	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	650.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daen Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penaganan publik		450.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENDAPATAN
	02	01	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	650.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan ata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik rofesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	450.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENDAPATAN



S	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Ketepatan Penetapan Dana Bagi - Hasil Pusat Perhitungan dan Realisasi - Penerimaan DBH Pusat	80 Persen 80 Persen	3.500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 650.000.000,00 650.000.000,00	Memperkua kehidupan y dengan lingi dan budaya peningkatan antarumat b	ntoleransi transformasi pelayanan publik pasyarakat yang 1. Penataan dan	1.500.000.000,000 BADAN PENDAPATAN DAERAH - 610.000.000,000 BADAN PENDAPATAN DAERAH - 610.000.000,000 BADAN PENDAPATAN DAERAH DAERAH
249 5 02 02	edung Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Ketepatan Penetapan Dana Bagi Hasil Pusat Perhitungan dan Realisasi Penerimaan DBH Pusat Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	80 Persen 80 Persen	Tenggarong, Timbau 650.000.000,00 650.000.000,00	Memperkua kehidupan y dengan lingk dan budaya peningkatan antarumat bu mencapai m	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik at penyelarasan yang harmonis kungan, alam, serta untuk mendukung transformasi pelayanan publik teragama untuk asyarakat yang 1. Penataan dan	- 610.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - 610.000.000,00 BADAN PENDAPATAN
249 5 02 02	ya Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Ketepatan Penetapan Dana Bagi Hasil Pusat Perhitungan dan Realisasi Penerimaan DBH Pusat Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	80 Persen	650.000.000,00 650.000.000,00	kehidupan y dengan lingk dan budaya peningkatan antarumat b mencapai m.	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik at penyelarasan rang harmonis kungan, alam, serta t oleransi transformasi pelayanan publik transformasi pelayanan publik transformasi pelayanan publik transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	- 610.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH - 610.000.000,00 BADAN PENDAPATAN
249 5 02 02	Dipelihara/Direhabilitasi Ketepatan Penetapan Dana Bagi - Hasil Pusat Perhitungan dan Realisasi - Penerimaan DBH Pusat Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	80 Persen	650.000.000,00	kehidupan y dengan lingk dan budaya peningkatan antarumat b mencapai m.	untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik at penyelarasan Ang harmonis kungan, alam, serta toleransi perdesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan peragama untuk kasyarakat yang 1. Penataan dan	- 610.000.000,00 BADAN PENDAPATAN
	Ketepatan Penetapan Dana Bagi Hasil Pusat perhitungan dan Realisasi Penerimaan DBH Pusat Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	80 Persen	650.000.000,00	kehidupan y dengan lingk dan budaya peningkatan antarumat b mencapai m.	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik at penyelarasan yang harmonis kungan, alam, serta ntoleransi teragama untuk asyarakat yang transformasi pelayanan publik yanganan publik itransformasi pelayanan publik jasyarakat yang transformasi pelayanan publik jasyarakat yang	- 610.000.000,00 BADAN PENDAPATAN
S	Hasil Pusat perhitungan dan Realisasi Penerimaan DBH Pusat Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	80 Persen	650.000.000,00	kehidupan y dengan lingk dan budaya peningkatan antarumat b mencapai m.	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik at penyelarasan rang harmonis kungan, alam, serta ntoleransi peragama untuk asayarakat yang tengama untuk asayarakat yang tengaman untuk asayarakat yang tengaman untuk asayarakat yang tengaman publik peneragaman untuk asayarakat yang tengaman untuk asayarakat yang tengaman publik peneragaman publik tengaman publik	- 610.000.000,00 BADAN PENDAPATAN
S	Hasil Pusat perhitungan dan Realisasi Penerimaan DBH Pusat Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	80 Persen	650.000.000,00	kehidupan y dengan lingk dan budaya peningkatan antarumat b mencapai m.	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik st penyelarasan yang harmonis kungan, alam, serta untuk mendukung transformasi pelayanan publik sasyarakat yang 1. Penataan dan	- 610.000.000,00 BADAN PENDAPATAN
S	Hasil Pusat perhitungan dan Realisasi Penerimaan DBH Pusat Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	80 Persen	650.000.000,00	kehidupan y dengan lingk dan budaya peningkatan antarumat b mencapai m.	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik publik asyarakat yang 1. Penataan dan	- 610.000.000,00 BADAN PENDAPATAN
	Hasil Pusat perhitungan dan Realisasi Penerimaan DBH Pusat Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	80 Persen	650.000.000,00	kehidupan y dengan lingk dan budaya peningkatan antarumat b mencapai m.	Pemerintahan dan Pelayanan Publik at penyelarasan rang harmonis kungan, alam, serta untuk mendukung transformasi pelayanan publikanyarakat yang 1. Penataan dan	- 610.000.000,00 BADAN PENDAPATAN
	Hasil Pusat perhitungan dan Realisasi Penerimaan DBH Pusat Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	80 Persen	650.000.000,00	kehidupan y dengan lingk dan budaya peningkatan antarumat b mencapai m.	Pemerintahan dan Pelayanan Publik at penyelarasan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan pedayarakat yang 1. Penataan dan	- 610.000.000,00 BADAN PENDAPATAN
	Hasil Pusat perhitungan dan Realisasi Penerimaan DBH Pusat Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	80 Persen	650.000.000,00	kehidupan y dengan lingk dan budaya peningkatan antarumat b mencapai m.	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik asyarakat yang 1. Penataan dan	- 610.000.000,00 BADAN PENDAPATAN
	Hasil Pusat perhitungan dan Realisasi Penerimaan DBH Pusat Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	80 Persen	650.000.000,00	kehidupan y dengan lingk dan budaya peningkatan antarumat b mencapai m.	nt penyelarasan 7. Peningkatan tata kelola	- 610.000.000,00 BADAN PENDAPATAN
	Hasil Pusat perhitungan dan Realisasi Penerimaan DBH Pusat Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	80 Persen	650.000.000,00	kehidupan y dengan lingk dan budaya peningkatan antarumat b mencapai m.	yang harmonis pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik publik asyarakat yang 1. Penataan dan	- 610.000.000,00 BADAN PENDAPATAN
S 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewanagan Daer	pan Perhitungan dan Realisasi - Penerimaan DBH Pusat -			kehidupan y dengan lingk dan budaya peningkatan antarumat b mencapai m.	yang harmonis pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik publik asyarakat yang 1. Penataan dan	- 610.000.000,00 BADAN PENDAPATAN
Pengelolaan Keuangan Daera	Penerimaan DBH Pusat Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan			kehidupan y dengan lingk dan budaya peningkatan antarumat b mencapai m.	yang harmonis pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik publik asyarakat yang 1. Penataan dan	
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	1 Laporan		dengan lingk dan budaya peningkatan antarumat b mencapai m	kungan, alam, profesional dan akuntabel untuk mendukung noterasa transformasi pelayanan transformasi pelayanan publik asyarakat yang 1. Penataan dan	DAERAH
250 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendap Daerah 5 02 04 2.01 0001 Perencanaan Pengelolaan Pa Daerah 5 02 04 2.01 0001 Perencanaan Pengelolaan Pa Daerah		1 Laporan		dan budaya peningkatan antarumat b mencapai m	serta untuk mendukung t toleransi transformasi pelayanan publik asyarakat yang 1. Penataan dan	
250 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendap Daerah 5 02 04 2.01 0001 Perencanaan Pengelolaan Pa Daerah		1 Laporan		peningkatan antarumat b mencapai m	n toleransi transformasi pelayanan peragama untuk publik pasyarakat yang 1. Penataan dan	
250 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendap Daerah 5 02 04 2.01 0001 Perencanaan Pengelolaan Pa Daerah 5 02 04 2.01 0001 Perencanaan Pengelolaan Pa Daerah		1 Laporan		antarumat be mencapai m	peragama untuk publik lasyarakat yang 1. Penataan dan	
250 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendap Daerah 5 02 04 2.01 0001 Perencanaan Pengelolaan Pa Daerah		1 Laporan		mencapai m	asyarakat yang 1. Penataan dan	
250 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendap Daerah 5 02 04 2.01 0001 Perencanaan Pengelolaan Pa Daerah		1 Laporan		mencapai m	asyarakat yang 1. Penataan dan	
S O2 O4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		1 Laporan				
250 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendap Daerah 5 02 04 2.01 0001 Perencanaan Pengelolaan Pa Daerah		1 Laporan		aun dan mar		
250 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendap Daerah 5 02 04 2.01 0001 Perencanaan Pengelolaan Pa Daerah		1 Laporan		1		
250 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendap Daerah 5 02 04 2.01 0001 Perencanaan Pengelolaan Pa Daerah		1 Laporan	+		Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
S O2 O4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		1 Laporan		 		
250 5 02 04	Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		650.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		t penyelarasan 7. Peningkatan tata kelola .	610.000.000,00 BADAN PENDAPATAN
S O2 O4 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendap Daerah			Tenggarong, Timbau	kehidupan ya	ang harmonis pemerintahan daerah yang	DAERAH
S O2 O4 Z.O1 Kegiatan Pengelolaan Pendap Daerah S O2 O4 Z.O1 O001 Perencanaan Pengelolaan Paj Daerah S O2 O4 Z.O1 O002 Analisa dan Pengembangan Paj Daerah, serta Penyusunan Daerah, serta Penyusunan			_		kungan, alam, profesional dan akuntabel	
S O2 O4 Z.O1 Kegiatan Pengelolaan Pendap Daerah S O2 O4 Z.O1 O001 Perencanaan Pengelolaan Paj Daerah S O2 O4 Z.O1 O002 Analisa dan Pengembangan Paj Daerah, serta Penyusunan Daerah, serta Penyusunan			1 1	dan budaya s		
S D2 O4 Z.O1 Contact Con	ı l			peningkatan		
S O2 O4 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendap Daerah			1 1		publik publik	
S O2 O4 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendap Daerah			1 1		asyarakat yang 1. Penataan dan	
S O2 O4 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendap Daerah						
S O2 O4 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendap Daerah				adil dan mak		
S O2 O4 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendap Daerah			ļ .		Pemerintahan dan Pelayanan	
S O2 O4 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendap Daerah					Publik	
5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendap Daerah 5 02 04 2.01 0001 Perencanaan Pengelolaan Pa Daerah 5 02 04 2.01 0002 Analisa dan Pengembangan F Daerah, serta Penyusunan	Presentasi Kepatuhan Wajib Pajak -	80 Persen	7.750.000.000,00			- 6.525.000.000,00 BADAN PENDAPATAN
Daerah 5 02 04 2.01 0001 Perencanaan Pengelolaan Pal Daerah 5 02 04 2.01 0002 Analisa dan Pengembangan Pal Daerah, serta Penyusunan	Daerah		ļ .			DAERAH
5 02 04 2.01 0001 Perencanaan Pengelolaan Paj Daerah 5 02 04 2.01 0002 Analisa dan Pengembangan F Daerah, serta Penyusunan	patan Jumlah WP yang lapor -	146400 WP	7.750.000.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola -	- 6.525.000.000,00 BADAN PENDAPATAN
5 02 04 2.01 0001 Perencanaan Pengelolaan Paj Daerah 5 02 04 2.01 0002 Analisa dan Pengembangan F					pemerintahan daerah yang	DAERAH
Daerah 5 02 04 2.01 0002 Analisa dan Pengembangan F Daerah, serta Penyusunan					profesional dan akuntabel	
Daerah 5 02 04 2.01 0002 Analisa dan Pengembangan F Daerah, serta Penyusunan					untuk mendukung	
Daerah 5 02 04 2.01 0002 Analisa dan Pengembangan F Daerah, serta Penyusunan						
Daerah 5 02 04 2.01 0002 Analisa dan Pengembangan F Daerah, serta Penyusunan					transformasi pelayanan	
Daerah 5 02 04 2.01 0002 Analisa dan Pengembangan F Daerah, serta Penyusunan			ļ .		publik	
Daerah 5 02 04 2.01 0002 Analisa dan Pengembangan F Daerah, serta Penyusunan					1. Penataan dan	
Daerah 5 02 04 2.01 0002 Analisa dan Pengembangan F Daerah, serta Penyusunan					Pengembangan Tata Kelola	
Daerah 5 02 04 2.01 0002 Analisa dan Pengembangan F Daerah, serta Penyusunan					Pemerintahan dan Pelayanan	
Daerah 5 02 04 2.01 0002 Analisa dan Pengembangan F Daerah, serta Penyusunan					Publik	
Daerah 5 02 04 2.01 0002 Analisa dan Pengembangan F Daerah, serta Penyusunan	jak Jumlah Dokumen Rencana	2 Dokumen	400.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	500.000.000,00 BADAN PENDAPATAN
5 02 04 2.01 0002 Analisa dan Pengembangan F Daerah, serta Penyusunan	Pengelolaan Pajak Daerah		Tenggarong, Timbau	1	pemerintahan daerah yang	DAERAH
Daerah, serta Penyusunan	r engelolaarr ajak baeran		Tenggarong, Timbuu		profesional dan akuntabel	D/ LIV II
Daerah, serta Penyusunan						
Daerah, serta Penyusunan					untuk mendukung	
Daerah, serta Penyusunan					transformasi pelayanan	
Daerah, serta Penyusunan			1 1	1	publik	
Daerah, serta Penyusunan					1. Penataan dan	
Daerah, serta Penyusunan			_	1	Pengembangan Tata Kelola	
Daerah, serta Penyusunan					Pemerintahan dan Pelayanan	
Daerah, serta Penyusunan			1 1	1	Publik	
Daerah, serta Penyusunan		1 Dokumen	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DRH) -	7. Peningkatan tata kelola -	350.000.000,00 BADAN PENDAPATAN
	ajak Tumlah Dokumen Hasil Analis Pajak	1 Dokumen	Semua Kecamatan,	,	pemerintahan daerah yang	DAERAH
Kebijakan Pajak Daerah						DAERAH
	Daerah serta Pengembangan Pajak		Semua Kel/Desa	1	profesional dan akuntabel	
			Kab. Kutai Kartanegara,	,	untuk mendukung	
	Daerah serta Pengembangan Pajak		Tenggarong, Timbau		transformasi pelayanan	
	Daerah serta Pengembangan Pajak		1 1	1	publik	
	Daerah serta Pengembangan Pajak				1. Penataan dan	
	Daerah serta Pengembangan Pajak			1	Pengembangan Tata Kelola	
	Daerah serta Pengembangan Pajak		l l			
	Daerah serta Pengembangan Pajak			1	Pemerintahan dan Pelayanan	
5 02 04 2.01 0003 Penyuluhan dan Penyebarluas	Daerah serta Pengembangan Pajak				Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<u> </u>
	Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	110000	750,000,000,00	DANA RAGI HASII (PRU)	Publik	67E 000 000 00 DADAN DENDARATAN
Kebijakan Pajak Daerah	Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola -	675.000.000,00 BADAN PENDAPATAN
	Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan	1 Laporan	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	675.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	
	Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan	1 Laporan	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	
	Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan	1 Laporan	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	
	Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan	1 Laporan	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	
	Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan	1 Laporan	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	
	Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan	1 Laporan	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	
	Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan	1 Laporan	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	
	Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan	1 Laporan	Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	



5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	450.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
										untuk mendukung transformasi pelayanan publik		
										1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek	Jumlah Laporan Hasil Pendataan	2 Laporan	1.750.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DRH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola -	1500,000,000,00	BADAN PENDAPATAN
	02	04	2.01	0003	Pajak Daerah	dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Esporan	Tenggarong, Timbau	DANA DAGITIASIE (DDII)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	1.500.000.000,00	DAERAH
						Рајак Баеган				transformasi pelayanan publik		
										1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		
5	02	04	2.01	0006		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan,	1 Laporan	500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik - 7. Peningkatan tata kelola -	400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN
					Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		DAERAH
										untuk mendukung transformasi pelayanan publik		
										1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	180000 Obyek Pajak	400.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola - pemerintahan daerah yang	500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,		profesional dan akuntabel untuk mendukung		
								Tenggarong, Timbau		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		
-	02	04	2.01	0000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak	1 Dokumen	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANIA BACILIACII (DDIII)	Publik - 7. Peningkatan tata kelola -	200 000 000 00	BADAN PENDAPATAN
3	02	04	2.01	0008	Репесаран wajib Рајак baeran	Daerah	1 bokumen	Tenggarong, Timbau	DANA BAGI RASIL (DBR)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	200.000.000,00	DAERAH
										untuk mendukung transformasi pelayanan		
										publik 1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Layanan	500.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola - pemerintahan daerah yang	200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
										profesional dan akuntabel untuk mendukung		
										transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
				2010						Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	500.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DAMA RAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola - pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						r enemulari vari irikdSl				untuk mendukung transformasi pelayanan		
										publik 1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		



5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	2 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	-			BADAN PENDAPATAN
						Penagihan Pajak Daerah			Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang				DAERAH
											profesional dan akuntabel				
											untuk mendukung				
											transformasi pelayanan				
											publik				
											1. Penataan dan				
											Pengembangan Tata Kelola				
											Pemerintahan dan Pelayanan				
											Publik				
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak	Jumlah Dokumen Hasil	2 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	-		350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN
					Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak			Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang				DAERAH
						Daerah					profesional dan akuntabel				
											untuk mendukung				
											transformasi pelayanan				
											publik				
											1. Penataan dan				
											Pengembangan Tata Kelola				
											Pemerintahan dan Pelayanan				
											Publik				
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan	Jumlah Dokumen Hasil	2 Dokumen	400.000.000,00		DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	-			BADAN PENDAPATAN
	1	1		1	Pengawasan Pajak Daerah	Pemeriksaan serta Pengendalian			Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang				DAERAH
	1	1		1		dan Pengawasan Pajak Daerah					profesional dan akuntabel				
	1	1		1							untuk mendukung				
	1	1		1							transformasi pelayanan				
	1	1		1							publik				
	1	1		1							Penataan dan				
											Pengembangan Tata Kelola				
											Pemerintahan dan Pelayanan				
											Publik				
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan	2 Laporan	300.000.000,00		DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	-			BADAN PENDAPATAN
					Pengelolaan Pajak Daerah dan	dan Pengawasan Pengelolaan			Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang				DAERAH
					Retribusi Daerah	Retribusi Daerah					profesional dan akuntabel				
											untuk mendukung				
											transformasi pelayanan				
											publik				
											1. Penataan dan				
											Pengembangan Tata Kelola				
											Pemerintahan dan Pelayanan				
											Publik				
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi	Jumlah Laporan Perkembangan	1 Laporan	50.000.000,00		DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	-		100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN
					Pemerintah Daerah	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel				DAERAH
						Pemerintan Daeran									
											untuk mendukung				
											transformasi pelayanan publik				
											1. Penataan dan				
	1	1		1							Pengembangan Tata Kelola				
	1	1		1							Pemerintahan dan Pelayanan				
	1	1		1							Publik				
-+	+	+-	1	+	Badan Pengelola Keuangan dan Ase	at Daerah		1.007.077.032.688,00		<u> </u>		1	' ,	230 UEU E3E U04 U0	BADAN PENGELOLA
	1	1		1	Dadam rengerora Kedangah dan Ase	Daciali		1.007.077.032.000,00					•		KEUANGAN DAN ASET
	1	1		1											DAERAH
-	1	+	1	+	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMI	FRINTAHAN		1.007.077.032.688,00					 	539 050 635 084 00	BADAN PENGELOLA
'	1	1		1	S.155 I ENGINANT GONOSAN FEIVI			1.007.077.032.000,00						33.030.033.004,00	KEUANGAN DAN ASET
	1	1		1	1										DAERAH
- 5	02	+-	1	+	KEUANGAN			1.007.077.032.688,00			+	†	 		BADAN PENGELOLA
'	02	1		1	neo-u-oni			1.007.077.032.000,00							KEUANGAN DAN ASET
	1	1		1											DAERAH
251 5	02	01	1	+-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP -	80 Nilai	150.897.263.014,00			+	<u> </u>	-		BADAN PENGELOLA
3	02	"		1	PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	o will	130.037.203.014,00							KEUANGAN DAN ASET
	1	1		1	KABUPATEN/KOTA	. Crangate Sec. dii									DAERAH
5	02	01	2.01	1	Perencanaan, Penganggaran, dan	Persentase Kesesuaian -	100 Persen	250.000.000,00		Membangun dari desa dan	7. Peningkatan tata kelola	Organisasi Perangkat	1.	484.135 000 00	BADAN PENGELOLA
'	"	"	1.01	1	Evaluasi Kineria Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan	100 1 613617	230.000.000,00		dari bawah untuk	pemerintahan daerah yang	Daerah			KEUANGAN DAN ASET
	1	1		1		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				pertumbuhan ekonomi,	profesional dan akuntabel				DAERAH
	1	1		1		terhadap Target Hasil Program				pemerataan ekonomi dan	untuk mendukung				PARITALI
	1	1		1	1	RPJMD				pemberantasan kemiskinan.					
	1	1		1	1					periodi di kasali keriiskilali.	publik				
1	1	1		1							1. Penataan dan				
	1	1	1	1							Pengembangan Tata Kelola				
											Pemerintahan dan Pelavanan				
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik				



5															
	02	01 2	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan		3 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan	7. Peningkatan tata kelola	Organisasi Perangkat	116.860.000,00	BADAN PENGELOLA
					Perangkat Daerah	Perangkat Daerah			Tenggarong, Timbau		dari bawah untuk	pemerintahan daerah yang	Daerah		KEUANGAN DAN ASET
					· ·	ŭ					pertumbuhan ekonomi,	profesional dan akuntabel			DAERAH
											pemerataan ekonomi dan	untuk mendukung			
											pemberantasan kemiskinan.	transformasi pelayanan			
											periberantasan kemiskinan.				
												publik			
												1. Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
								+							
5	02	01 2	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja		4 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		7. Peningkatan tata kelola	Organisasi Perangkat	69.560.000,00	BADAN PENGELOLA
					Laporan Capaian Kinerja dan	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Tenggarong, Timbau		dari bawah untuk	pemerintahan daerah yang	Daerah		KEUANGAN DAN ASET
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi					pertumbuhan ekonomi,	profesional dan akuntabel			DAERAH
						Penyusunan Laporan Capaian					pemerataan ekonomi dan	untuk mendukung			
						Kinerja dan Ikhtisar Realisasi					pemberantasan kemiskinan.	transformasi pelayanan			
						Kinerja SKPD					,	publik			
						Killerja SKFD						p===			
												1. Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
5	02	01 2	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja		4 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DRH)	Membangun dari desa dan	7. Peningkatan tata kelola	Organisasi Perangkat	83 032 000 00	BADAN PENGELOLA
'	02	J1 Z		3007	Evaluation Killerja i erangkat Daerali			- Laporan		SALAN DAGITIASIE (DBIT)				53.033.000,00	
			J			Perangkat Daerah		1	Tenggarong, Timbau		dari bawah untuk	pemerintahan daerah yang	Daerah		KEUANGAN DAN ASET
	1 1		- 1					1		1	pertumbuhan ekonomi,	profesional dan akuntabel	<u> </u>		DAERAH
	1 1		- 1					1		1	pemerataan ekonomi dan	untuk mendukung	1		
			J					1			pemberantasan kemiskinan.	transformasi pelayanan]		
			J					1			,	publik]		
										I	1	Penataan dan	1		
			J					1			1]		
												Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
5	02	01 2.	2 02		Administrasi Keuangan Perangkat	Presentase penyelenggaraan -	_	100 Persen	144.513.168.934,00		1-	7. Peningkatan tata kelola	-	- 26 144 662 000 00	BADAN PENGELOLA
'	02	V1 2.	2.02		Daerah	administrasi keuangan Perangkat		100 1 613611	144.313.100.334,00		1	pemerintahan daerah yang		20.144.002.000,00	KEUANGAN DAN ASET
					Daeran										
						Daerah secara tepat waktu dan						profesional dan akuntabel			DAERAH
						sesuai dengan ketentuan yang						untuk mendukung			
						berlaku						transformasi pelayanan			
												publik			
												1. Penataan dan			
												1. Penataan dan			
												l			
												Pengembangan Tata Kelola			
												Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
5	02	01 2	2.02	0001	Penyediaan Gaii dan Tuniangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji		186 Orang/bulan	143.617.892.934.00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA RAGI HASII (DBH)	1-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	25,000,000,000,00	BADAN PENGELOLA
5	02	01 2	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			186 Orang/bulan	143.617.892.934,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-	25.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA
5	02	01 2	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		186 Orang/bulan	143.617.892.934,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	25.000.000.000,00	KEUANGAN DAN ASET
5	02	01 2	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			186 Orang/bulan		DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	25.000.000.000,00	
5	02	01 2	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			186 Orang/bulan		DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	25.000.000.000,00	KEUANGAN DAN ASET
5	02	01 2	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			186 Orang/bulan		DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	25.000.000.000,00	KEUANGAN DAN ASET
5	02	01 2	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			186 Orang/bulan		DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	25.000.000.000,00	KEUANGAN DAN ASET
5	02	01 2	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			186 Orang/bulan		DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	25.000.000.000,00	KEUANGAN DAN ASET
5	02	01 2	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			186 Orang/bulan		DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	25.000.000.000,00	KEUANGAN DAN ASET
5	02	01 2	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			186 Orang/bulan		DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	25.000.000.000,00	KEUANGAN DAN ASET
5	02	01 2	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			186 Orang/bulan		DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-	25.000.000.000,00	KEUANGAN DAN ASET
5	02	01 2	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			186 Orang/bulan		DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	25.000.000.000,00	KEUANGAN DAN ASET
						dan Tunjangan ASN			Tenggarong, Timbau		-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		01 2			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	dan Tunjangan ASN		186 Orang/bulan	Tenggarong, Timbau 67.930.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-		KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA
					Pelaksanaan Penatausahaan dan	dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verlilkasi Keuangan			Tenggarong, Timbau		-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daterah yang	-		KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	dan Tunjangan ASN			Tenggarong, Timbau 67.930.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel	-		KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA
				0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verlilkasi Keuangan			Tenggarong, Timbau 67.930.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-		KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verlilkasi Keuangan			Tenggarong, Timbau 67.930.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel	-		KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verlilkasi Keuangan			Tenggarong, Timbau 67.930.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-		KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verlilkasi Keuangan			Tenggarong, Timbau 67.930.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dareh yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verlilkasi Keuangan			Tenggarong, Timbau 67.930.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-		KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verlilkasi Keuangan			Tenggarong, Timbau 67.930.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-		KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verlilkasi Keuangan			Tenggarong, Timbau 67.930.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan darah yang transformasi pelayanan publik 7. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-		KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verlilkasi Keuangan			Tenggarong, Timbau 67.930.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	67.930.000,00	KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01 2	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verlilkasi Keuangan			Tenggarong, Timbau 67.930.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	67.930.000,00	KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5	02		2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		600 Dokumen	Tenggarong, Timbau 67.930.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 62.062.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-	67.930.000,00	KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOIA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOIA
5	02	01 2	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		600 Dokumen	Tenggarong, Timbau 67.930.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	67.930.000,00	KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5	02	01 2	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		600 Dokumen	Tenggarong, Timbau 67.930.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 62.062.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan akuntabel dan akuntabel dan akuntahadan dan akuntahadan dan akuntahadan dan akuntabel dan akuntabel dan akuntabel dan akuntabel dan akuntabel dan akuntabel	-	67.930.000,00	KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOIA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOIA
5	02	01 2	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		600 Dokumen	Tenggarong, Timbau 67.930.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 62.062.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	67.930.000,00	KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5	02	01 2	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		600 Dokumen	Tenggarong, Timbau 67.930.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 62.062.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan akuntabel dan akuntabel dan akuntahadan dan akuntahadan dan akuntahadan dan akuntabel dan akuntabel dan akuntabel dan akuntabel dan akuntabel dan akuntabel	-	67.930.000,00	KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5	02	01 2	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		600 Dokumen	Tenggarong, Timbau 67.930.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 62.062.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Peniataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	67.930.000,00	KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5	02	01 2	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		600 Dokumen	Tenggarong, Timbau 67.930.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 62.062.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	67.930.000,00	KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5	02	01 2	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		600 Dokumen	Tenggarong, Timbau 67.930.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 62.062.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	67.930.000,00	KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5	02	01 2	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		600 Dokumen	Tenggarong, Timbau 67.930.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 62.062.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		67.930.000,00	KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5	02	01 2	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		600 Dokumen	Tenggarong, Timbau 67.930.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 62.062.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	67.930.000,00	KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET



5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir		1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola		91.560.000,00	BADAN PENGELOLA
					Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan			Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					SKI B	Keuangan Akhir Tahun SKPD					untuk mendukung			DALIVAIT
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan		1 Dokumen	42.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANIA DA CILIACII (DDII)	Publik - 7. Peningkatan tata kelola		42.000.000.00	BADAN PENGELOLA
3	02	01	2.02	0006	Tanggapan Pemeriksaan	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut		1 Dokumen	Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang			KEUANGAN DAN ASET
					Tanggapan Femeriksaan	Pemeriksaan			Tenggarong, mibau		profesional dan akuntabel			DAERAH
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/		12 Laporan	648.284.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DRH)	- 7. Peningkatan tata kelola		648 284 000 00	BADAN PENGELOLA
	32	"1	2.02	5507	Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan		II coporan	Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang		0.10.204.000,00	KEUANGAN DAN ASET
					Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan					profesional dan akuntabel			DAERAH
		1 1		l	1	Laporan Keuangan					untuk mendukung			Ì
						Bulanan/Triwulanan/Semesteran					transformasi pelayanan			
						SKPD					publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan		1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola		80.966.000,00	BADAN PENGELOLA
					Prognosis Realisasi Anggaran	Analisis Prognosis Realisasi			Tenggarong, Timbau	, ,	pemerintahan daerah yang		·	KEUANGAN DAN ASET
						Anggaran					profesional dan akuntabel			DAERAH
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik 1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase pemenuhan -		100 Persen	170.000.000,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola			BADAN PENGELOLA
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah	-	100 Persen	170.000.000,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang		•	KEUANGAN DAN ASET
5	02	01	2.03					100 Persen	170.000.000,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		•	
5	02	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah	-	100 Persen	170.000.000,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		•	KEUANGAN DAN ASET
5	02	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah		100 Persen	170.000.000,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	•	KEUANGAN DAN ASET
5	02	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah	-	100 Persen	170.000.000,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	•	KEUANGAN DAN ASET
5	02	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah	-	100 Persen	170.000.000,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	•	KEUANGAN DAN ASET
5	02	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah	-	100 Persen	170.000.000,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		•	KEUANGAN DAN ASET
					pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		01		0001	pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 Persen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola			KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA
				0001	pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang	-		KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				0001	pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA
				0001	pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung			KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				0001	pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				0001	pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				0001	pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola			KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				0001	pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daarah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5	02	01	2.03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100.000.000,00	KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02		2.03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan			50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 35.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola		100.000.000,00	KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA
5	02	01	2.03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5	02	01	2.03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 35.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola		100.000.000,00	KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA
5	02	01	2.03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 35.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel dan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel dan akuntabel dan akuntabel dan akuntabel		100.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5	02	01	2.03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 35.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		100.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5	02	01	2.03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 35.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 2. Penataan dan Pelayanan publik 3. Penataan dan Pelayanan publik 4. Penataan dan		100.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5	02	01	2.03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 35.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dareh pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		100.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5	02	01	2.03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 35.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 2. Penataan dan Pelayanan publik 3. Penataan dan Pelayanan publik 4. Penataan dan		100.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET



1 5	02	01	2.03 0	003 Koordinasi dan Penilaian Barang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian		Laporan	35.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	40.000.000,	00 BADAN PENGELOLA
	02	01	2.03	Milik Daerah SKPD	Barang Milik Daerah dan Hasil		Laporari	Tenggarong, Timbau	DANA BAGITIASIE (DDIT)	pemerintahan daerah yang	40.000.000,	KEUANGAN DAN ASET
				Willik Daerall SKFD	Koordinasi Penilaian Barang Milik			renggarong, milibau		profesional dan akuntabel		DAERAH
					Daerah SKPD					untuk mendukung		DALKAII
					Daeran SKPD							
										transformasi pelayanan		
										publik		
										1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		
5	02	01 :	2.03 0	005 Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	11	2 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	50.000.000,0	00 BADAN PENGELOLA
				Laporan Barang Milik Daerah pada	Penyusunan Laporan Barang Milik		·	Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang	· ·	KEUANGAN DAN ASET
				SKPD	Daerah pada SKPD			30.1		profesional dan akuntabel		DAERAH
										untuk mendukung		
										transformasi pelayanan		
										publik		
										1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		
5	02	01	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah	Tersusunnya Dokumen -	10	00 persen	50.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola -	- 60.000.000,	00 BADAN PENGELOLA
			1	Kewenangan Perangkat Daerah	Administratif Pendapatan					pemerintahan daerah yang		KEUANGAN DAN ASET
	1	1 1	1							profesional dan akuntabel		DAERAH
	1	1 1	1							untuk mendukung		1
										transformasi pelayanan		
										publik		
										1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		
5	02	01	2.04 0	001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi	Jumlah Dokumen Rencana	1	Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	30.000.000,0	00 BADAN PENGELOLA
				Daerah	Pengelolaan Retribusi Daerah			Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang		KEUANGAN DAN ASET
					, and the second					profesional dan akuntabel		DAERAH
										untuk mendukung		
										transformasi pelayanan		
										publik		
										1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		
5	02	01	2.04 0	007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi	Jumlah Laporan Pengelolaan	1	Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	30.000.000,	00 BADAN PENGELOLA
				Daerah	Retribusi Daerah			Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang		KEUANGAN DAN ASET
										profesional dan akuntabel		DAERAH
										untuk mendukung		
										transformasi pelayanan		
										publik		
										1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		
5	02	01 2	2.05	Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan -	10	00 Persen	230.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola -	- 545.000.000,	00 BADAN PENGELOLA
				Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian					pemerintahan daerah yang		KEUANGAN DAN ASET
				_	Perangkat Daerah					profesional dan akuntabel		DAERAH
										untuk mendukung		
- 1										transformasi pelayanan		
										publik		
										publik 1. Penataan dan		
										publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		
										publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		
										publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		
5	02	01 :	2.05 0	00. Peningkatan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Peningkatan Sarana		Unit	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Penerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola	40.000.000,	00 BADAN PENGELOLA
5	02	01 :	2.05 00		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4	Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	40.000.000,	00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5	02	01	2.05 00	001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		4	Unit	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	40.000.000,4	KEUANGAN DAN ASET
5	02	01 :	2.05 00			4	Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	40.000.000,6	
5	02	01 :	2.05 00			4	Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Penerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	40.000.000,6	KEUANGAN DAN ASET
5	02	01	2.05 01			4	Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	40.000.000,	KEUANGAN DAN ASET
5	02	01 :	2.05 0			4	Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	40.000.000,	KEUANGAN DAN ASET
5	02	01 :	2.05 01			4	Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Peneriritahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	40.000.000,4	KEUANGAN DAN ASET
5	02	01 :	2.05 01			4	Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	40.000.000,6	KEUANGAN DAN ASET
5	02	01 :	2.05 01			4	Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	40.000.000,4	KEUANGAN DAN ASET
5	02	01	2.05 01			4	Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	40.000.000,	KEUANGAN DAN ASET



5													
	02 0	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan	1	Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	=	80.000.000,00	BADAN PENGELOLA
				Administrasi Kepegawaian	Pengolahan Administrasi			Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang			KEUANGAN DAN ASET
					Kepegawaian					profesional dan akuntabel			DAERAH
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
5	02 0	1 2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi		Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	50.000.000,00	BADAN PENGELOLA
				Informasi Kepegawaian	dan Pelaksanaaan Sistem Informasi			Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang			KEUANGAN DAN ASET
					Kepegawaian					profesional dan akuntabel			DAERAH
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
5	02 0	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah Orang yang Mengikuti		.5 Orang	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	175.000.000,00	BADAN PENGELOLA
				Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi			Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang			KEUANGAN DAN ASET
				1	Peraturan Perundang-Undangan]		profesional dan akuntabel	1		DAERAH
				1						untuk mendukung			
										transformasi pelayanan	1		
										publik	1		
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
5	02 0	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Persentase pemenuhan -		.00 Persen	1.334.569.680,00		- 7. Peningkatan tata kelola		2.117.918.220,00	BADAN PENGELOLA
				Daerah	Administrasi umum perangkat					pemerintahan daerah yang			KEUANGAN DAN ASET
					daerah					profesional dan akuntabel			DAERAH
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
										Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
5	02 0	1 2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1	. Paket	124.989.680,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola	-	124.989.680,00	BADAN PENGELOLA
5	02 0	1 2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	. Paket	124,989.680,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	124,989.680,00	KEUANGAN DAN ASET
5	02 0	1 2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1	. Paket		DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	124.989.680,00	
5	02 0	1 2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1	. Paket		DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		124.989.680,00	KEUANGAN DAN ASET
5	02 0	1 2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Paket		DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	124.989.680,00	KEUANGAN DAN ASET
5	02 0	1 2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1	Paket		DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		124,989,680,00	KEUANGAN DAN ASET
5	02 0	1 2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			. Paket		DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		124.989.680,00	KEUANGAN DAN ASET
5	02 0	1 2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Paket		DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		124.989.680,00	KEUANGAN DAN ASET
5	02 0	1 2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Paket		DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		124.989.680,00	KEUANGAN DAN ASET
					yang Disediakan			Tenggarong, Timbau		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	02 0			Penyediaan Barang Cetakan dan	yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan		Paket Paket	Tenggarong, Timbau 184.580.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-		KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA
					yang Disediakan			Tenggarong, Timbau		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Palayanan			KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				Penyediaan Barang Cetakan dan	yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan			Tenggarong, Timbau 184.580.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-		KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA
				Penyediaan Barang Cetakan dan	yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan			Tenggarong, Timbau 184.580.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-		KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				Penyediaan Barang Cetakan dan	yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan			Tenggarong, Timbau 184.580.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-		KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				Penyediaan Barang Cetakan dan	yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan			Tenggarong, Timbau 184.580.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				Penyediaan Barang Cetakan dan	yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan			Tenggarong, Timbau 184.580.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				Penyediaan Barang Cetakan dan	yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan			Tenggarong, Timbau 184.580.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				Penyediaan Barang Cetakan dan	yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan			Tenggarong, Timbau 184.580.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-		KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5	02 0	1 2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	Tenggarong, Timbau 184.580.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	184.580.000,00	KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5		1 2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			Tenggarong, Timbau 184.580.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 700.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola		184.580.000,00	KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA
5	02 0	1 2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	Tenggarong, Timbau 184.580.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	184.580.000,00	KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02 0	1 2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Paket	Tenggarong, Timbau 184.580.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 700.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel	-	184.580.000,00	REUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5	02 0	1 2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Paket	Tenggarong, Timbau 184.580.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 700.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung untuk mendukung profesional dan akuntabel untuk mendukung		184.580.000,00	REUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5	02 0	1 2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Paket	Tenggarong, Timbau 184.580.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 700.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Palayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Palayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		184.580.000,00	REUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5	02 0	1 2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Paket	Tenggarong, Timbau 184.580.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 700.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	184.580.000,00	REUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5	02 0	1 2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Paket	Tenggarong, Timbau 184.580.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 700.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		184.580.000,00	REUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5	02 0	1 2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Paket	Tenggarong, Timbau 184.580.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 700.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan		184.580.000,00	REUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET



5 02 01	2.06	0010									
		OUTO	Penatausahaan Arsip Dinamis pada	Jumlah Dokumen Penatausahaan	1	Dokumen	175.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	- 251.857.820	,00 BADAN PENGELOLA
			SKPD	Arsip Dinamis pada SKPD			Tenggarong, Timbau	, ,	pemerintahan daerah yang		KEUANGAN DAN ASET
									profesional dan akuntabel		DAERAH
									untuk mendukung		Di Lei G u i
									transformasi pelayanan		
									publik		
									1. Penataan dan		
1									Pengembangan Tata Kelola		
									Pemerintahan dan Pelayanan		
									Publik		
5 02 01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem	Jumlah Dokumen Dukungan	- 	Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	208 720 000	00 BADAN PENGELOLA
3 02 01	2.00	0011				DOKUITIETI		DANA BAGI HASIL (DBH)		258.720.000	KEUANGAN DAN ASET
			Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan			Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang		
			pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD					profesional dan akuntabel		DAERAH
									untuk mendukung		
									transformasi pelayanan		
									publik		
									1. Penataan dan		
									Pengembangan Tata Kelola		
									Pemerintahan dan Pelayanan		
									Publik		
'									1		
5 02 01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana -	10	00 persen	151.851.400,00	1	- 7. Peningkatan tata kelola	- 428.399.800	,00 BADAN PENGELOLA
1 1 '		1	Penunjang Urusan Pemerintah	Penunjang Kinerja					pemerintahan daerah yang		KEUANGAN DAN ASET
1 1 '		1	Daerah						profesional dan akuntabel		DAERAH
1 1 '		1							untuk mendukung		
									transformasi pelayanan		
									publik		
									1. Penataan dan		
									Pengembangan Tata Kelola		
									Pemerintahan dan Pelayanan		
									Publik		
5 02 01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan	6	Unit	151.851.400,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DRH)	- 7. Peningkatan tata kelola	- 151 851 400	00 BADAN PENGELOLA
3 02 01	2.07	0001	Dinas atau Kendaraan Dinas	Dinas atau Kendaraan Dinas		O.IIIC	Tenggarong, Timbau	State Control of Control	pemerintahan daerah yang	151.051.100	KEUANGAN DAN ASET
							renggarong, rimbau				
			Jabatan	Jabatan yang Disediakan					profesional dan akuntabel		DAERAH
									untuk mendukung		
									transformasi pelayanan		
									publik		
									1. Penataan dan		
									Pengembangan Tata Kelola		
									Pemerintahan dan Pelayanan		
									Publik		
5 02 01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		10	00 Persen	2.789.640.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	- 12.399.394.124	00 BADAN PENGELOLA
			Pemerintahan Daerah	operasional perangkat daerah					pemerintahan daerah yang		KEUANGAN DAN ASET
									profesional dan akuntabel		DAERAH
i									profesional dan akuntabel		DAERAH
									untuk mendukung		DAERAH
									untuk mendukung transformasi pelayanan		DAERAH
									untuk mendukung transformasi pelayanan publik		DAERAH
									untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		DAERAH
									untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		DAERAH
									untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		DAERAH
									untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		DAERAH
5 02 01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		2 Laporan	2.039.640.000.00 Kah. Kutai Kartanee ara	DANA BAGI HASII (DRHI)	untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- 2,039 Fain 0000	
5 02 01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dava Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Dava Air dan	12	2 Laporan	2.039.640.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	- 2.039.640.000	,00 BADAN PENGELOLA
5 02 01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12	2 Laporan	2.039.640.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	- 2.039.640.000	,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01	2.08	0002			12	2 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)	untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	- 2.039.640.000	,00 BADAN PENGELOLA
5 02 01	2.08	0002		Komunikasi, Sumber Daya Air dan		2 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)	untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	- 2.039.640.000	,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01	2.08	0002		Komunikasi, Sumber Daya Air dan		2 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)	untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	- 2.039.640.000	,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01	2.08	0002		Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12	2 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)	untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	- 2.039.640.000	,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01	2.08	0002		Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12	2 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)	untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	- 2.039.640.000	,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01	2.08	0002		Komunikasi, Sumber Daya Air dan		2 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)	untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	- 2.039.640.000	,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01	2.08	0002		Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12	2 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)	untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	- 2.039.640.000	,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5 02 01	2.08	0002		Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12	2 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)	untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	- 2.039.640.000	,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
			Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Tenggarong, Timbau		untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01			Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		2 Laporan	Tenggarong, Timbau 750.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola		,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ,00 BADAN PENGELOLA
			Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Tenggarong, Timbau		untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
			Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa			Tenggarong, Timbau 750.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola		,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ,00 BADAN PENGELOLA
			Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang			Tenggarong, Timbau 750.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel		,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
			Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang			Tenggarong, Timbau 750.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik		,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
			Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang			Tenggarong, Timbau 750.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan transformasi pelayanan		,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
			Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang			Tenggarong, Timbau 750.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
			Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang			Tenggarong, Timbau 750.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
			Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang			Tenggarong, Timbau 750.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola		,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
			Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang			Tenggarong, Timbau 750.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET



5	6 02	2 01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100 Persen	1.408.033.000,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1.208.533.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
											Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
		2 01			Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	2 01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	101.860.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5		2 01		0009	Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	606.173.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
252 5					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	7.5 Skor	851.110.831.324,00						BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	2 02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pemenuhan peraturan dan pedoman penyusunan APBD sesuai pedoman penyusunan APBD sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik Persentase aparatur perencanaan anggaran Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan perencanaan anggaran Persentase konsistensi perencanaan dengan penganggaran Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	3.400.000,000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							 						<u> </u>	
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Organisasi Perangkat Daerah	200.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
											Publik			
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik	Organisasi Perangkat Daerah	200.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5		02			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	60 Dokumen	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	60 Dokumen	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah	250.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	800.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN	Organisasi Perangkat Daerah	00,000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBO dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	800.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah	800.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah	00,000.000.000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN	Organisasi Perangkat Daerah	200.000,000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	116 Orang	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah	300.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penerbitan SP2D sesuai - persyaratan tepat waktu Persentase Realisasi Dana Transfer Persentase Transki Non Tunai Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah	90 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	689.527.455,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah	•	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	79.545.455,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah	79.545.455,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Organisasi Perangkat Daerah	60.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

-													
5	02 (2.02	2 000	5 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	12 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan	7. Peningkatan tata kelola	Organisasi Perangkat	213.075.000,0	
				Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring	Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,		Tenggarong, Timbau		dari bawah untuk	pemerintahan daerah yang	Daerah		KEUANGAN DAN ASET
				dan Evaluasi Pengelolaan Dana	Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi				pertumbuhan ekonomi,	profesional dan akuntabel			DAERAH
				Perimbangan dan Dana Transfer	Pengelolaan Dana Perimbangan				pemerataan ekonomi dan	untuk mendukung			
				Lainnya	dan Dana Transfer Lainnya				pemberantasan kemiskinan.	transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
5	02 (02 2.02	2 000	6 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan	7. Peningkatan tata kelola	Organisasi Perangkat	85.700.000,0	BADAN PENGELOLA
				dan Pemantauan Transaksi Non	Pelaksanaan Kerja Sama dan		Tenggarong, Timbau		dari bawah untuk	pemerintahan daerah yang	Daerah		KEUANGAN DAN ASET
				Tunai dengan Lembaga Keuangan	Pemantauan Transaksi Non Tunai				pertumbuhan ekonomi,	profesional dan akuntabel			DAERAH
				Bank dan Lembaga Keuangan	dengan Lembaga Keuangan Bank				pemerataan ekonomi dan	untuk mendukung			
				Bukan Bank	dan Lembaga Keuangan Bukan				pemberantasan kemiskinan.	transformasi pelayanan			
					Bank					publik			
										Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
5	02 (2.02	2 000	9 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi	10000 Dokumen	49.982.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan	7. Peningkatan tata kelola	Organisasi Perangkat	49.982.000,0	D BADAN PENGELOLA
				Pengeluaran Kas serta Pemungutan	Data Penerimaan dan Pengeluaran		Tenggarong, Timbau		dari bawah untuk	pemerintahan daerah yang	Daerah		KEUANGAN DAN ASET
				dan Pemotongan atas SP2D dengan					pertumbuhan ekonomi,	profesional dan akuntabel			DAERAH
				Instansi Terkait	Pemotongan atas SP2D dengan				pemerataan ekonomi dan	untuk mendukung			
					Instansi Terkait				pemberantasan kemiskinan.	transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
5	02 (2.02	2 001		Jumlah Orang yang Mengikuti	180 Orang	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		7. Peningkatan tata kelola	Organisasi Perangkat	592.609.455,0	0 BADAN PENGELOLA
				Keuangan Pemerintah	Pembinaan Penatausahaan		Tenggarong, Timbau		dari bawah untuk	pemerintahan daerah yang	Daerah		KEUANGAN DAN ASET
				Kabupaten/Kota	Keuangan Pemerintah				pertumbuhan ekonomi,	profesional dan akuntabel			DAERAH
					Kabupaten/Kota				pemerataan ekonomi dan	untuk mendukung			
									pemberantasan kemiskinan.	transformasi pelayanan			
1										publik			
										publik 1. Penataan dan			
										Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
										Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
										Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
5	02 (02 2.03	3	Koordinasi dan Pelaksanaan	Persentase Laporan Keuangan -	100 Persen	1.022.711.800,00		-	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola	-	- 1.308.733.126,0	0 BADAN PENGELOLA
5	02	02 2.03	3	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	disajikan tepat waktu	100 Persen	1.022.711.800,00		-	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	- 1.308.733.126,0	KEUANGAN DAN ASET
5	02 (02 2.03	3		disajikan tepat waktu Persentase Pejabat Penatausahaan		1.022.711.800,00		-	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	- 1.308.733.126,0	
5	02	02 2.03	3	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	disajikan tepat waktu Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah	100 Persen	1.022.711.800,00		-	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		- 1.308.733.126,0	KEUANGAN DAN ASET
5	02 (02 2.03	3	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	disajikan tepat waktu Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan	100 Persen	1.022.711.800,00			Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Penerintahan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		- 1.308.733.126,0	KEUANGAN DAN ASET
5	02 (02 2.03	3	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	disajikan tepat waktu Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP	100 Persen	1.022.711.800,00			Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		- 1.308.733.126,0	KEUANGAN DAN ASET
5	02 (02 2.03	3	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	disajikan tepat waktu Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP Tingkat pemenuhan peraturan dan	100 Persen	1.022.711.800,00			Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pubiik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan		- 1.308.733.126,0	KEUANGAN DAN ASET
5	02 (2.03	3	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	disajikan tepat waktu Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP	100 Persen	1.022.711.800,00			Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Penerintahan dare Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		- 1.308.733.126,0	KEUANGAN DAN ASET
5	02 (02 2.03	3	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	disajikan tepat waktu Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP Tingkat pemenuhan peraturan dan	100 Persen	1.022.711.800,00			Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		- 1.308.733.126,0	KEUANGAN DAN ASET
				Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	disajikan tepat waktu Persentase Pejabat Penastausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi	100 Persen 100 Persen				Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		2.03		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi	disajikan tepat waktu Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi	100 Persen	162.712.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola			KEUANGAN DAN ASET DAERAH D BADAN PENGELOLA
				Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	disajikan tepat waktu Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan	100 Persen 100 Persen		DANA BAGI HASIL (DBH)		Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Penerintahan dan Pelayanan Publik Penerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang			KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi	disajikan tepat waktu Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi	100 Persen 100 Persen	162.712.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Penerintahan dan Pelayanan Publik Penerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			KEUANGAN DAN ASET DAERAH D BADAN PENGELOLA
				Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	disajikan tepat waktu Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan	100 Persen 100 Persen	162.712.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Penningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Palayanan publik Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Palayanan publik Peningkatan tata kelola pemerintahan dan akuntabel untuk mendukung			KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	disajikan tepat waktu Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan	100 Persen 100 Persen	162.712.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Penerintahan dan Pelayanan Publik Penerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	disajikan tepat waktu Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan	100 Persen 100 Persen	162.712.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik			KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	disajikan tepat waktu Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan	100 Persen 100 Persen	162.712.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung Teningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan			KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	disajikan tepat waktu Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan	100 Persen 100 Persen	162.712.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	disajikan tepat waktu Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan	100 Persen 100 Persen	162.712.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan dara Pengembangan Tata Kelola pemerintahan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-		KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	disajikan tepat waktu Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan	100 Persen 100 Persen	162.712.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	162.712.000,0	EUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	02		3 000	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	disajikan tepat waktu Persertase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100 Persen 100 Persen	162.712.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,			1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola		162.712.000,0	BADAN PENGELOIA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOIA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOIA
	02	2.03	3 000	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 2 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,	disajikan tepat waktu Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban,	100 Persen 100 Persen	162.712.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau			1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		162.712.000,0	D BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DARAH D BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DARAH
	02	2.03	3 000	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,	disajikan tepat waktu Persertase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100 Persen 100 Persen	162.712.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,			1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-	162.712.000,0	BADAN PENGELOIA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOIA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOIA
	02	2.03	3 000	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 2 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,	disajikan tepat waktu Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban,	100 Persen 100 Persen	162.712.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,			1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang		162.712.000,0	D BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DARAH D BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DARAH
	02	2.03	3 000	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 2 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan,	disajikan tepat waktu Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,	100 Persen 100 Persen	162.712.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,			1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel dan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel dan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		162.712.000,0	D BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DARAH D BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DARAH
	02	2.03	3 000	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 2 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan,	disajikan tepat waktu Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan, Jo dan	100 Persen 100 Persen	162.712.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,			1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	162.712.000,0	D BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DARAH D BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DARAH
	02	2.03	3 000	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 2 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan,	disajikan tepat waktu Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan, Jo dan	100 Persen 100 Persen	162.712.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,			1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		162.712.000,0	D BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DARAH D BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DARAH
	02	2.03	3 000	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 2 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan,	disajikan tepat waktu Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan, Jo dan	100 Persen 100 Persen	162.712.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,			1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	162.712.000,0	D BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DARAH D BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DARAH
	02	2.03	3 000	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 2 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan,	disajikan tepat waktu Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan, Jo dan	100 Persen 100 Persen	162.712.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,			1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dian akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung 1. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		162.712.000,0	D BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DARAH D BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DARAH

						T T	 In.		I I				. 1
5	02	02	2.03		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 Laporan	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata ke pemerintahan daerah y profesional dan akunta untuk mendukung transformasi pelayanai publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata K	ang bel	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang	3 Laporan	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelar Publik - 7. Peningkatan tata ket pemerintahan daerah y profesional dan akunta	ola - 599.999.800,0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Terkonsolidasi					untuk mendukung transformasi pelayanai publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata K Pemerintahan dan Pela Publik	n elola anan	
					Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kel pemerintahan daerah y profesional dan akunta untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata K. Pemerintahan dan Pela Publik	ong bel) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kel pemerintahan daerah y profesional dan akunta untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata K. Pemerintahan dan Pela- Publik	bel) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa	100 Persen	845.998.592.069,00			- 7. Peningkatan tata ke pemerintahan daerah y profesional dan akuntuntuk mendukung transformasi pelayana publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata K Pemerintahan dan Pelablik	ang ibel n elola	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	27.827.637.058,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kel pemerintahan daerah y profesional dan akunta untuk mendukung transformasi pelayanai publik Penataan dan Pengembangan Tata K. Pemerintahan dan Pelayebik	ng bel	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	193 Laporan	818.170.955.011,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kel pemerintahan daerah y profesional dan akunta untuk mendukung transformasi pelayanai publik Penataan dan Pengembangan Tata K. Pemerintahan dan Pelar Publik Publik	ng bel	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat Kualitas Pengelolaan - Barang Milik Daerah	100 Persen	5.068.938.350,00				- 2.504.537.590,0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET



5	02	03 2	2.01	P	engelolaan Barang Milik Daerah	Pembinaan Pengelolaan Barang -	100 Persen	5.068.938.350,00		- 7. Peningkatan tata kelola -	- 2.504.537.590,0	00 BADAN PENGELOLA
						Milik Daerah Pemerintah	100 Persen			pemerintahan daerah yang		KEUANGAN DAN ASET
						Kabupaten/Kota	100 Persen			profesional dan akuntabel		DAERAH
						Persentase Perangkat Daerah	100 Persen			untuk mendukung		
						melaksanakan perencanaan dan	100 reiseii					
										transformasi pelayanan		
						penatausahaan BMD sesuai				publik		
						ketentuan				1. Penataan dan		
						Persentase Perangkat Daerah yang				Pengembangan Tata Kelola		
						aktif melakukan rekonsiliasi				Pemerintahan dan Pelayanan		
						laporan BMD				Publik		
										Fublik		
						Tingkat pemenuhan peraturan dan						
						pedoman pengelolaan BMD sesuai						
						Permendagri 19/2016						
5	02	03 2	2.01	0001 P	enyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	345.866.000.0	0 BADAN PENGELOLA
					,	, ,		Tenggarong, Timbau	, ,	pemerintahan daerah yang		KEUANGAN DAN ASET
										profesional dan akuntabel		DAERAH
										untuk mendukung		DALIGIT
										transformasi pelayanan		
										publik		
										1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
				1						Pemerintahan dan Pelayanan		
				1						Publik		
5	02	U3 2	2.01		enyusunan Perencanaan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	1 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	100.000.000,0	0 BADAN PENGELOLA
				K	ebutuhan Barang Milik Daerah	Milik Daerah		Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang		KEUANGAN DAN ASET
				1						profesional dan akuntabel		DAERAH
				1						untuk mendukung		
										transformasi pelayanan		
										nuhlik		
										pasiik		
										1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		
-	02	03 2	2.01	0005 0	enatausahaan Barang Milik	Jumlah Laporan Penatausahaan	1 Laporan	125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BACI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	125,000,000,0	0 BADAN PENGELOLA
3	02	05 2	2.01				1 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)		125.000.000,0	
				L	aerah	Barang Milik Daerah		Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang		KEUANGAN DAN ASET
										profesional dan akuntabel		DAERAH
										untuk mendukung		
										transformasi pelayanan		
										publik		
										1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		
5	02	03 2	2.01	0006 II	nventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi	1 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	230.800.000.0	0 BADAN PENGELOLA
					· ·	(LHI) Barang Milik Daerah	· ·	Tenggarong, Timbau	, ,	pemerintahan daerah yang		KEUANGAN DAN ASET
						(,,				profesional dan akuntabel		DAERAH
										untuk mendukung		DALIGIT
			- 1			l l		1		transformasi pelayanan		
						l l				publik		1
						l l				1. Penataan dan		1
			- 1			l l		1		Pengembangan Tata Kelola		
						l l				Pemerintahan dan Pelayanan		1
			1			1				Publik		
5	02	03 2	2.01	U007 P	engamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan	1 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	163.746.000,0	0 BADAN PENGELOLA
			- 1			Barang Milik Daerah		Tenggarong, Semua		pemerintahan daerah yang		KEUANGAN DAN ASET
						l l		Kel/Desa		profesional dan akuntabel		DAERAH
			- 1			l l		1		untuk mendukung		
						l l				transformasi pelayanan		1
			- 1			l l		1		publik		
						l l				1. Penataan dan		1
						l l						1
			1			l l		1		Pengembangan Tata Kelola		1
			1			l l		1		Pemerintahan dan Pelayanan		
			1			1				Publik		
5	02	03 2	2.01	0008 P	enilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian	1 Laporan	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	414.187.240.0	0 BADAN PENGELOLA
1 -		-	-	Ι.		Barang Milik Daerah dan Hasil	.,	Tenggarong, Semua		pemerintahan daerah yang	.241207.12403.	KEUANGAN DAN ASET
			1									
			1			Koordinasi Penilaian Barang Milik		Kel/Desa		profesional dan akuntabel		DAERAH
			1			Daerah				untuk mendukung		1
						l l				transformasi pelayanan		1
1						l l				publik		1
		1				l l		1		1. Penataan dan		
						i I	1		i e	z. i cilataan aan		1
						l l				Donasambangan Tata Kalal-		
										Pengembangan Tata Kelola		
										Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		



5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan,	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi	1 Dokumer	3.668.938.350,00 Kab. Kutai Kartar		-	7. Peningkatan tata kelola	-		749.938.350,00	BADAN PENGELOLA
					Pemanfaatan, Pemindahtanganan,	Penggunaan, Pemanfaatan,		Tenggarong, Tim	au		pemerintahan daerah yang				KEUANGAN DAN ASET
					Pemusnahan, dan Penghapusan	Pemindahtanganan, Pemusnahan,					profesional dan akuntabel				DAERAH
					Barang Milik Daerah	dan Penghapusan Barang Milik					untuk mendukung				
						Daerah					transformasi pelayanan				
											publik 1. Penataan dan				
											Pengembangan Tata Kelola				
											Pemerintahan dan Pelayanan				
											Publik				
-	5 02	2 03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi	1 Laporan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartar	gara. DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola	-		75.000.000,00	BADAN PENGELOLA
					Penyusunan Laporan Barang Milik	dalam rangka Penyusunan Laporan		Tenggarong, Tim			pemerintahan daerah yang				KEUANGAN DAN ASET
					Daerah	Barang Milik Daerah					profesional dan akuntabel				DAERAH
											untuk mendukung				
											transformasi pelayanan				
											publik				
											Penataan dan Pengembangan Tata Kelola				
											Pemerintahan dan Pelayanan				
											Publik				
5	5 02	2 03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik	Jumlah Laporan Barang Milik	1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartar	gara, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLA
			1	1	Daerah	Daerah yang Disusun		Tenggarong, Tim		1	pemerintahan daerah yang				KEUANGAN DAN ASET
			1	1						1	profesional dan akuntabel				DAERAH
			1	1						1	untuk mendukung				
											transformasi pelayanan				
											publik				
											1. Penataan dan				
											Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan				
											Publik				
	02	2 03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang	Jumlah Orang yang Mengikuti	180 Orang	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartar	gara, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola	-		250.000.000,00	BADAN PENGELOLA
					Milik Daerah Pemerintah	Pembinaan Pengelolaan Barang		Tenggarong, Tim	au		pemerintahan daerah yang				KEUANGAN DAN ASET
					Kabupaten/Kota	Milik Daerah Pemerintah					profesional dan akuntabel				DAERAH
						Kabupaten/Kota					untuk mendukung				
											transformasi pelayanan				
											publik 1. Penataan dan				
1 1											Pengembangan Tata Kelola				
											Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan				
											Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
				_	Badan Kepegawaian dan Pengemba	angan Sumber Daya Manusia		59.461.859.981,00			Pemerintahan dan Pelayanan			32.449.656.054,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				<u> </u>				·			Pemerintahan dan Pelayanan			Ť	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				<u></u>	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMI			59.461.859.981,00			Pemerintahan dan Pelayanan			32.449.656.054,00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5		3		<u> </u>				·			Pemerintahan dan Pelayanan			32.449.656.054,00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
5	5 03				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMI	ERINTAHAN		59.461.859.981,00 52.511.859.981,00			Pemerintahan dan Pelayanan			32.449.656.054,00 23.749.656.054,00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMI KEPEGAWAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN		77,85 Nilai	59.461.859.981,00			Pemerintahan dan Pelayanan		-	32.449.656.054,00 23.749.656.054,00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
5	5 03				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMI	ERINTAHAN	77,85 Nilai	59.461.859.981,00 52.511.859.981,00			Pemerintahan dan Pelayanan		-	32.449.656.054,00 23.749.656.054,00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
254 5	6 03 6 03		2.01		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMI KEPEGAWAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ERINTAHAN Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	77,85 Nilai 23 Dokum	59.461.859.981,00 52.511.859.981,00 43.478.859.981,00		Memperkuat reformasi	Pemerintahan dan Pelayanan	Badan Kepegawaian	-	32.449.656.054,00 23.749.656.054,00 11.734.656.054,00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
254 5	6 03 6 03	3 01	2.01		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMI KEPEGAWAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah - Jumlah dokumen rencana, -		59.461.859.981,00 52.511.859.981,00 43.478.859.981,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	-	32.449.656.054,00 23.749.656.054,00 11.734.656.054,00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
254 5	6 03 6 03	3 01	2.01		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMI KEPEGAWAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah - Jumlah dokumen rencana, -		59.461.859.981,00 52.511.859.981,00 43.478.859.981,00		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	32.449.656.054,00 23.749.656.054,00 11.734.656.054,00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
254 5	6 03 6 03	3 01	2.01		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMI KEPEGAWAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah - Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja		59.461.859.981,00 52.511.859.981,00 43.478.859.981,00		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	dan Pengembangan	-	32.449.656.054,00 23.749.656.054,00 11.734.656.054,00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
254 5	6 03 6 03	3 01	2.01		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMI KEPEGAWAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah - Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja		59.461.859.981,00 52.511.859.981,00 43.478.859.981,00		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	32.449.656.054,00 23.749.656.054,00 11.734.656.054,00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
254 5	6 03 6 03	3 01	2.01		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMI KEPEGAWAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah - Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja		59.461.859.981,00 52.511.859.981,00 43.478.859.981,00		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	32.449.656.054,00 23.749.656.054,00 11.734.656.054,00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
254 5	6 03 6 03	3 01	2.01		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMI KEPEGAWAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah - Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja		59.461.859.981,00 52.511.859.981,00 43.478.859.981,00		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	32.449.656.054,00 23.749.656.054,00 11.734.656.054,00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
254 5	6 03 6 03	3 01	2.01		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMI KEPEGAWAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah - Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja		59.461.859.981,00 52.511.859.981,00 43.478.859.981,00		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	32.449.656.054,00 23.749.656.054,00 11.734.656.054,00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
254 5	6 03 6 03	3 01	2.01		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMI KEPEGAWAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah - Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja		59.461.859.981,00 52.511.859.981,00 43.478.859.981,00		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	32.449.656.054,00 23.749.656.054,00 11.734.656.054,00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
254 5	5 03 5 03	3 01			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMI KEPEGAWAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah - Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan		59.461.859.981,00 52.511.859.981,00 43.478.859.981,00 n 435.000.000,00 65.000.000,00 Kab. Kutai Kartar		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara Badan Kepegawaian	-	32.449.656.054,00 23.749.656.054,00 11.734.656.054,00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN BADAN KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN BADAN BADAN KEPEGAWAIAN BADAN BADAN KEPEGAWAIAN BADAN BADAN BADAN KEPEGAWAIAN BADAN BADAN KEPEGAWAIAN BADA
254 5	5 03 5 03	3 01			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMI KEPEGAWAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah - Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokum	59.461.859.981,00 52.511.859.981,00 43.478.859.981,00 n 435.000.000,00		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara Badan Kepegawaian dan Pengembangan	-	32.449.656.054,00 23.749.656.054,00 11.734.656.054,00 350.000.000,00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
254 5	5 03 5 03	3 01			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMI KEPEGAWAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah - Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan	23 Dokum	59.461.859.981,00 52.511.859.981,00 43.478.859.981,00 n 435.000.000,00 65.000.000,00 Kab. Kutai Kartar		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel	dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	32.449.656.054,00 23.749.656.054,00 11.734.656.054,00 350.000.000,00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN BADAN KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN BADAN BADAN KEPEGAWAIAN BADAN BADAN KEPEGAWAIAN BADAN BADAN BADAN KEPEGAWAIAN BADAN BADAN KEPEGAWAIAN BADA
254 5	5 03 5 03	3 01			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMI KEPEGAWAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah - Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan	23 Dokum	59.461.859.981,00 52.511.859.981,00 43.478.859.981,00 n 435.000.000,00 65.000.000,00 Kab. Kutai Kartar		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara Badan Kepegawaian dan Pengembangan	-	32.449.656.054,00 23.749.656.054,00 11.734.656.054,00 350.000.000,00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
254 5	5 03 5 03	3 01			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMI KEPEGAWAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah - Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan	23 Dokum	59.461.859.981,00 52.511.859.981,00 43.478.859.981,00 n 435.000.000,00 65.000.000,00 Kab. Kutai Kartar		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	32.449.656.054,00 23.749.656.054,00 11.734.656.054,00 350.000.000,00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
254 5	5 03 5 03	3 01			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMI KEPEGAWAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah - Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan	23 Dokum	59.461.859.981,00 52.511.859.981,00 43.478.859.981,00 n 435.000.000,00 65.000.000,00 Kab. Kutai Kartar		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	32.449.656.054,00 23.749.656.054,00 11.734.656.054,00 350.000.000,00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
254 5	5 03 5 03	3 01			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMI KEPEGAWAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah - Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan	23 Dokum	59.461.859.981,00 52.511.859.981,00 43.478.859.981,00 n 435.000.000,00 65.000.000,00 Kab. Kutai Kartar		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	32.449.656.054,00 23.749.656.054,00 11.734.656.054,00 350.000.000,00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
254 5	5 03 5 03	3 01			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMI KEPEGAWAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah - Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan	23 Dokum	59.461.859.981,00 52.511.859.981,00 43.478.859.981,00 n 435.000.000,00 65.000.000,00 Kab. Kutai Kartar		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	32.449.656.054,00 23.749.656.054,00 11.734.656.054,00 350.000.000,00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
254 5	5 03 5 03	3 01			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMI KEPEGAWAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah - Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan	23 Dokum	59.461.859.981,00 52.511.859.981,00 43.478.859.981,00 n 435.000.000,00 65.000.000,00 Kab. Kutai Kartar		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	32.449.656.054,00 23.749.656.054,00 11.734.656.054,00 350.000.000,00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	55.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	65.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	200.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara		250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan	12.509.777.677,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara	-	25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1200 Orang/bulan	12.334.777.677,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



					1			<u>. </u>		•	•				
5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	P. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengambangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7-Deningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	5 Dokumen	120.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara	-	75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	45.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi - Kepegawaian	2 Dokumen	100.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
											Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	50 Orang	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi - Umum Perangkat Daerah	8 Layanan	1.162.824.450,00		-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		-	150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	81.962.250,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	94.862.200,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	127 Dokumen	21.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



5 03	01	2.06 00	77 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang		1 P	Paket	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DA
			,	Disediakan				Tenggarong, Timbau	, ,	pemerintahan daerah yang			PENGEMBANGAN SUMBI
										profesional dan akuntabel			DAYA MANUSIA
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
5 03	01	2.06 00	08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi		1 L	aporan	125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DA
				Kunjungan Tamu				Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang			PENGEMBANGAN SUMB
										profesional dan akuntabel			DAYA MANUSIA
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
5 03	01	2.06 00		si Jumlah Laporan Penyelenggaraan		1 L	aporan	315.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DA
			dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi				Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang			PENGEMBANGAN SUMBE
				SKPD						profesional dan akuntabel		1	DAYA MANUSIA
										untuk mendukung		1	1
										transformasi pelayanan			
										publik		1	
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
5 03	01	2.06 00		da Jumlah Dokumen Penatausahaan		450	0 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DA
			SKPD	Arsip Dinamis pada SKPD				Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang			PENGEMBANGAN SUMBE
										profesional dan akuntabel			DAYA MANUSIA
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
5 03	01	2.06 00	Dukungan Pelaksanaan Sistem	Jumlah Dokumen Dukungan		10	Ookumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -		150.000.0	000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DA
			Pemerintahan Berbasis Elektroni					Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang			PENGEMBANGAN SUMBE
			pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD				Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			DAYA MANUSIA
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
_	+			1						Publik			
5 03	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik	-	100	0 Persen	21.869.113.000,00		- - -	-	3.315.511.	200,00 BADAN KEPEGAWAIAN D
			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									PENGEMBANGAN SUMBI DAYA MANUSIA
5 03	01	2.07 00		Jumlah Unit Gedung Kantor atau		3.1	Jnit	21.869.113.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DENIDADATAN ASI I			1146 002	000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DA
J 03	01	2.07	Bangunan Lainnya			31	21116	Z1.869.113.000,00 Rab. Rutai Kartanegara, Tenggarong Seberang,		- -		1.146.082.	PENGEMBANGAN SUMBE
			pangunan taninya	Bangunan Lainnya yang Disediakan				lenggarong Seberang, Bukit Raya	DAERAH (PAU)			1	DAYA MANUSIA
								DUKIL RAYA					DATA IVIANUSIA
5 03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusa	n Jumlah Waktu Penyediaan Jasa	-	12	Bulan	2.980.144.854,00		- 7. Peningkatan tata kelola -	-	2 754 144	854,00 BADAN KEPEGAWAIAN D
J 03	\ \frac{1}{2}		Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan		12	Salan	2.300.177.037,00		pemerintahan daerah yang	[2.734.144.	PENGEMBANGAN SUMB
			. Cciiitailaii Daelaii	Daerah yang disediakan						profesional dan akuntabel			DAYA MANUSIA
				Daeran yang uiseulakan						untuk mendukung			DATAMANOSIA
										transformasi pelayanan		1	1
										publik			
										1. Penataan dan			1
													1
- 1										Pengembangan Tata Kelola		1	1
		1	i	i		1		1		Pemerintahan dan Pelayanan			1
	1 1						1		1	Publik			



-													
5	03	2.08	8 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	22.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
					Suracivicityurac		Tenggarong, Timbau		profesional dan akuntabe				DAYA MANUSIA
									untuk mendukung				
									transformasi pelayanan				
									publik				
									1. Penataan dan				
									Pengembangan Tata Kelo	a			
									Pemerintahan dan Pelayar	an			
									Publik				
5	03 (2.08	8 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	2.354.144.854,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-		2.354.144.854,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN
				Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan		Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yan				PENGEMBANGAN SUMBER
					Listrik yang Disediakan				profesional dan akuntabe				DAYA MANUSIA
									untuk mendukung				
									transformasi pelayanan				
									publik				
									1. Penataan dan				
									Pengembangan Tata Kelo				
									Pemerintahan dan Pelayar	an			
									Publik				
5	03 (2.08	8 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)				400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN
	1 1			Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yan				PENGEMBANGAN SUMBER
					yang Disediakan				profesional dan akuntabe				DAYA MANUSIA
									untuk mendukung				
									transformasi pelayanan publik				
									1. Penataan dan				
									Pengembangan Tata Kelo	_			
									Pemerintahan dan Pelayar				
									Publik	311			
5	03 (01 2.08	8 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	504.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DRH)	- 7. Peningkatan tata keloli	<u> </u>		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN
	03 1	2.00	0004	Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporari	Tenggarong, Timbau	DAINA DAGITIASIE (DBII)	pemerintahan daerah yan			0,00	PENGEMBANGAN SUMBER
				Karico	Disediakan		Tenggarong, Timbau		profesional dan akuntabe				DAYA MANUSIA
					Disculatan				untuk mendukung				DATAWANOSIA
									transformasi pelayanan				
									publik				
1									1. Penataan dan	a			
									Penataan dan Pengembangan Tata Kelo				
5	03 (01 2.09	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah -	18 Unit	4.302.000.000,00		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan dan Pelayar Publik 7. Peningkatan tata kelol	an	-	5.065.000.000,00	D BADAN KEPEGAWAIAN DAN
5	03 (01 2.09	9	Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah -	18 Unit	4.302.000.000,00		Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan dan Pelayar Publik Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yar	an	-	5.065.000.000,00	PENGEMBANGAN SUMBER
5	03 (01 2.09	9		Jumlah Barang Milik Daerah -	18 Unit	4.302.000.000,00		Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan dan Pelayar Publik 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yar profesional dan akuntab	an		5.065.000.000,00	
5	03 (01 2.09	9	Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah -	18 Unit	4.302.000.000,00		Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan dan Pelayar Publik 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yar profesional dan akuntab	an	-	5.065.000.000,00	PENGEMBANGAN SUMBER
5	03 (01 2.09	9	Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah -	18 Unit	4.302.000.000,00		Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan dan Pelayar Publik Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yar profesional dan akuntabi untuk mendukung transformasi pelayanan	an	-	5.065.000.000,00	PENGEMBANGAN SUMBER
5	03 (01 2.09	9	Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah -	18 Unit	4.302.000.000,00		Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan dan Pelayar Publik 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yar profesional dan akuntab untuk mendukung transformasi pelayanan publik	an		5.065.000.000,00	PENGEMBANGAN SUMBER
5	03 (01 2.09	9	Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah -	18 Unit	4.302.000.000,00		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan dan Pelayar Publik 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yar profesional dan akuntab untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	an	•	5.065.000.000,00	PENGEMBANGAN SUMBER
5	03 (01 2.09	9	Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah -	18 Unit	4.302.000.000,00		Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan dan Pelayar Publik Peningkatan tata kelo pemerintahan daerah yar profesional dan akuntab untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kele	an		5.065.000.000,00	PENGEMBANGAN SUMBER
5	03 (01 2.09	9	Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah -	18 Unit	4.302.000.000,00		Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan dan Pelayar Publik 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yar profesional dan akuntabu untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kel	an	•	5.065.000.000,00	PENGEMBANGAN SUMBER
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan dan Pelayar Publik 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yar profesional dan akuntabu untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kel Pemerintahan dan Pelaya Publik	an			PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan	18 Unit	325.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan dan Pelayar Publik 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yar profesional dan akuntabi untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelo Pemerintahan dan Pelaya Publik 7. Peningkatan tata kelol	an		5.065.000.000,00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan dan Pelayan Publik 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yan profesional dan akuntabu untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kele Pemerintahan dan Pelaya Publik - 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan dan Pelaya publik	an			PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		325.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan dan Pelayar Publik 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yar profesional dan akuntabu untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kele Pemerintahan dan Pelaya Publik 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yan profesional dan akuntabu	an			PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		325.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan dan Pelayar Publik 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yar profesional dan akuntab untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelo Pemerintahan dan Pelaya Publik 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan darah yan profesional dan akuntabe untuk mendukung	an			PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		325.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan dan Pelayan Publik 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yar profesional dan akuntab untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelo Pemerintahan dan Pelaya Publik - 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan darah yan profesional dan akuntabe untuk mendukung transformasi pelayanan transformasi pelayanan transformasi pelayanan transformasi pelayanan transformasi pelayanan	an			PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		325.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan dan Pelayar Publik 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yar profesional dan akuntabu untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelo Pemerintahan dan Pelaya Publik 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yan profesional dan akuntabu untuk mendukung transformasi pelayanan publik	an			PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		325.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan dan Pelayan Publik 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yan profesional dan akuntabu untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kele Pemerintahan dan Pelaya Publik 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan darah yan profesional dan akuntabe untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan 1. Penataan dan	an			PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		325.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan dan Pelayar Publik 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yar profesional dan akuntabu untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelo Pemerintahan daerah yar profesional dan akuntabu untuk mendukung transformasi pelayanan publik - 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yan profesional dan akuntabu untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelol publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelol	an			PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		325.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan dan Pelayar Publik - 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yar profesional dan akuntabu untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelo Pemerintahan dan Pelaya Publik - 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan darah yan profesional dan akuntabe untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelo Pemerintahan dan Pelayanan publik	an			PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
5	03 (01 2.09	9 0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	325.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan dan Pelayan Publik 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yan profesional dan akuntab untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kele Pemerintahan dan Pelaya Publik 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan darah yan profesional dan akuntabe untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan dan Pelayan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan dan Pelayan Publik Pemerintahan dan Pelayan Publik	an		0,00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03 (9 0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		325.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 65.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan dan Pelayar Publik 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yar profesional dan akuntabu untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kel Pemerintahan daerah yar profesional dan akuntabu untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata keloli pemerintahan daerah yan profesional dan akuntabu untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelol Pemerintahan dan Pelayar Publik 7. Peningkatan tata keloli Pening	an		0,00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03 (01 2.09	9 0001	Pennyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	15 Unit	325.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan dan Pelayar Publik - 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yar profesional dan akuntabu untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelo Pemerintahan daerah yan profesional dan akuntabe untuk mendukung transformasi pelayanan publik - 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yan profesional dan akuntabe untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelo Pemerintahan daerah yan Publik 7. Peningkatan tata kelol Pemerintahan dan Pelayar Publik - 7. Peningkatan tata kelol Pemerintahan dan Pelayar Publik - 7. Peningkatan tata kelol Pemerintahan daerah yan Publik - 7. Peningkatan tata kelol Pemerintahan daerah yan Pelayar Publik	an		0,00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
5	03 (01 2.09	9 0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	15 Unit	325.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 65.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan dan Pelayar Publik 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yar profesional dan akuntab untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan dan Pelayar Publik - 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan darah yan profesional dan akuntabe untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan daerah yan profesional dan akuntabe untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan dan Pelayar Publik 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan darah yan profesional dan akuntaba dan dan akuntaba dan dan akuntaba dan dan dan dan dan dan dan dan dan da	an		0,00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03 (01 2.09	9 0001	Pennyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	15 Unit	325.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 65.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan dan Pelayar Publik 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yar profesional dan akuntabu untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan dan Pelayar Publik 7. Peningkatan tata keloli pemerintahan darah yan profesional dan akuntabu untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan daerah yan profesional dan akuntabu untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan dan Pelayar Publik 7. Peningkatan tata keloli pemerintahan darah yan profesional dan akuntabu untuk mendukung pengembangan Tata Kelc Pemerintahan darah yan profesional dan akuntabu untuk mendukung untuk mendukung perfesional dan akuntabu untuk mendukung mengembangan Tata Kelc Pemerintahan daerah yan profesional dan akuntabu untuk mendukung	an		0,00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
5	03 (01 2.09	9 0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	15 Unit	325.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 65.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan dan Pelayar Publik - 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yar profesional dan akuntabu untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelo Pemerintahan daerah yan profesional dan akuntabe untuk mendukung transformasi pelayanan publik - 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yan profesional dan akuntabe untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelo Pemerintahan daerah yan profesional dan akuntabe untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yan profesional dan akuntabe untuk mendukung transformasi pelayanan transfo	an		0,00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
5	03 (01 2.09	9 0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	15 Unit	325.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 65.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan dan Pelayar Publik 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yar profesional dan akuntabu untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kel Pemerintahan daerah yar Publik 7. Peningkatan tata keloli pemerintahan daerah yan profesional dan akuntabu untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan daerah yan profesional dan akuntabe untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan darah yan profesional dan akuntabe untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Peningkatan tata keloli pemerintahan darah yang profesional dan akuntabe untuk mendukung transformasi pelayanan publik	an		0,00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
5	03 (01 2.09	9 0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	15 Unit	325.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 65.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelo Pemerintahan dan Pelayar Publik 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yar profesional dan akuntabu untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelo Pemerintahan daerah yan profesional dan akuntabu untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yan profesional dan akuntabu untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelo Pemerintahan daerah yan profesional dan akuntabu untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelol Pemerintahan daerah yan profesional dan akuntabu untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelol Pemerintahan daerah yan profesional dan akuntabu untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	an		0,00	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
5	03 (01 2.09	9 0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	15 Unit	325.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau 65.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelc Pemerintahan dan Pelayar Publik 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yar profesional dan akuntabu untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kel Pemerintahan daerah yar Publik 7. Peningkatan tata keloli pemerintahan daerah yan profesional dan akuntabu untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelol pemerintahan daerah yan profesional dan akuntabu untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelol pemerintahan darah yan profesional dan akuntabu untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yan profesional dan akuntabu untuk mendukung transformasi pelayanan publik	an	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER		



	5 (13 01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan		2 Unit	3.912.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DRH)	- 7. Peningkatan tata kelola	_ 1	5.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN
	٠ ١ ١	01	2.03	0003	Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang		2 Offic	Tenggarong Seberang,	DAIVA BAGITIASIE (BBIT)	pemerintahan daerah yang		3.000.000.000,00	PENGEMBANGAN SUMBER
					Kantor dan bangunan Lainnya				renggarong seperang,					
						Dipelihara/Direhabilitasi			Bukit Raya		profesional dan akuntabel			DAYA MANUSIA
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	_										1 dollk			.
255	5 0	03 02			PROGRAM KEPEGAWAIAN	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan -		96 Persen	9.033.000.000,00			-	12.015.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN
					DAERAH	ASN Kabupaten Kutai Kartanegara								PENGEMBANGAN SUMBER
														DAYA MANUSIA
	5 (03 02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan	Jumlah ASN yang diadakan dan -		1306 ASN	813.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola		900.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN
					Informasi Kepegawaian ASN	diberhentikan					pemerintahan daerah yang		,	PENGEMBANGAN SUMBER
											profesional dan akuntabel			DAYA MANUSIA
														DATAWANOSIA
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
	ı			1		1			 		Pemerintahan dan Pelayanan	I		ĺ
	L		<u> </u>	Ш_	<u> </u>	<u> </u>		<u></u>			Publik		<u> </u>	<u> </u>
	5 (03 02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan,	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	100.000.000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN
	1	1		1	Jenis dan Jumlah Jabatan untuk	Rencana Kebutuhan, Jenis dan			Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang		1	PENGEMBANGAN SUMBER
	ı			1					renggarong, milibau			I		DAYA MANUSIA
		1		1	Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan					profesional dan akuntabel		1	DATA MANUSIA
		1		1		Pengadaan ASN					untuk mendukung		1	1
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	5 (03 02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan	Jumlah Dokumen Kegiatan		1 Dokumen	40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN
					PNS dan PPPK	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan			Tenggarong, Timbau	,	pemerintahan daerah yang		7,7	PENGEMBANGAN SUMBER
					1 NO Gail I I I K	PNS dan PPPK			Teliggalolig, Illibau		profesional dan akuntabel			DAYA MANUSIA
						PNS Udii PPPK								DATA WANUSIA
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	5 (02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan		1 Dokumen	45.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN
					Administrasi	Koordinasi Pelaksanaan			Tenggarong, Timbau	, ,	pemerintahan daerah yang		1	PENGEMBANGAN SUMBER
						Administrasi Pemberhentian			888,		profesional dan akuntabel			DAYA MANUSIA
					Donah ada ada a	Administrasi i embernendan								DATA WANGSIA
					Pemberhentian						untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
	ı			1		1			 		publik	I		ĺ
1 1				1	1	1					1. Penataan dan			ĺ
	ı			1		1			 		Pengembangan Tata Kelola	I		ĺ
		1		1		1					Pemerintahan dan Pelayanan		1	1
1 1				1	1	1								ĺ
\vdash		_			1				ļ		Publik		1	ļ
	5 (03 02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang		1 Lembaga	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN
1 1	ı			1	1	Difasilitasi			Tenggarong, Timbau	· l	pemerintahan daerah yang	l		PENGEMBANGAN SUMBER
	ı			1		1			55 5		profesional dan akuntabel	l		DAYA MANUSIA
		1		1		1					untuk mendukung		1	
1 1	ı			1	1	1			 		transformasi pelayanan	l		ĺ
	ı			1		1			 			l		ĺ
1 1				1	1	1					publik			ĺ
1 1	ı			1	1	1			 		1. Penataan dan	l		ĺ
	ı			1		1			 		Pengembangan Tata Kelola	l		ĺ
1 1				1	1	1					Pemerintahan dan Pelayanan			ĺ
	ı				I	1			 		Publik	I	1	ſ
+		22 02	2.01	0010	Barantalana Ciatana Infansa i	Lundah Daluman Harif Danas lal		1 Delumen	300 000 000 00 Web Web-1//	DANA BACILIACII (DDII)			650,000,000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN
	ء ا د	03 02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan		1 Dokumen	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DAINA RAGI HASIF (DRH)	7. Peningkatan tata kelola	-	650.000.000,00	
1 1	ı			1	Kepegawaian	Sistem Informasi Kepegawaian			Tenggarong, Semua		pemerintahan daerah yang	l		PENGEMBANGAN SUMBER
1 1				1		1			Kel/Desa		profesional dan akuntabel	l		DAYA MANUSIA
		1		1		1			 		untuk mendukung	l		ĺ
				1		1			 		transformasi pelayanan	l		ĺ
						1	i I				u ansionnasi pelayallali	1		1
						1			1		and the latter			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
											1. Penataan dan			
											Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			



5 0.														
	3 02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan		0 Dokumen	60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN
					Data Kepegawaian			Tenggarong, Timbau			pemerintahan daerah yang			PENGEMBANGAN SUMBER
											profesional dan akuntabel			DAYA MANUSIA
											untuk mendukung			
1 1											transformasi pelayanan			
											publik			
											Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
5 03	3 02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data,		70 Laporan	68.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola	-	150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN
				Informasi Kepegawaian	Informasi dan Sistem Informasi			Tenggarong, Timbau			pemerintahan daerah yang			PENGEMBANGAN SUMBER
					Kepegawaian						profesional dan akuntabel			DAYA MANUSIA
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											nublik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
5 03	3 02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang dimutasikan dan -	-	2473 ASN	420.000.000,00		-	7. Peningkatan tata kelola		1.100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN
1 1		1			dipromosikan			1		1	pemerintahan daerah yang			PENGEMBANGAN SUMBER
		1								ĺ	profesional dan akuntabel			DAYA MANUSIA
1		1			1					1	untuk mendukung			Z. IA WANDOJA
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
5 03	3 02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan		4 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DRH)	_	7. Peningkatan tata kelola	_	500,000,000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN
	3 02	2.02	0001	Tengeroraan Matasi 7514	Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi,		- Dokumen	Tenggarong, Timbau	5,110 (5,10) 1,10 (5,5) 1,		pemerintahan daerah yang		300.000.000,00	PENGEMBANGAN SUMBER
					Jabatan Administrasi, Jabatan			Tenggarong, mindad			profesional dan akuntabel			DAYA MANUSIA
														DAYA MANUSIA
					Pelaksana dan Mutasi ASN antar						untuk mendukung			
					Daerah						transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
5 03	2 02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan		1 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BACILIASII (DBII)	1	7. Peningkatan tata kelola		300,000,000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN
5 03	5 02	2.02	0002	Pengelulaan Kenaikan Pangkat Asis			1 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)	-		-	200.000.000,00	
					Pangkat ASN			Tenggarong, Timbau			pemerintahan daerah yang			PENGEMBANGAN SUMBER
											profesional dan akuntabel			DAYA MANUSIA
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
1 1							1			1	i i ci i ci i i i i i i i i i i i i i i			
											Dublik			
											Publik			
5 03	3 02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan		3 Dokumen	120.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola	-	400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN
5 03	3 02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		3 Dokumen	120.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	400.000.000,00	PENGEMBANGAN SUMBER
5 03	3 02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN			3 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola	-	400.000.000,00	
5 03	3 02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN			3 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	400.000.000,00	PENGEMBANGAN SUMBER
5 0:	3 02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN			3 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	400.000.000,00	PENGEMBANGAN SUMBER
5 0:	3 02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN			3 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	400.000.000,00	PENGEMBANGAN SUMBER
5 0:	3 02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN			3 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	400.000.000,00	PENGEMBANGAN SUMBER
5 0:	3 02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN			3 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	400.000.000,00	PENGEMBANGAN SUMBER
5 0:	3 02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN			3 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	400.000.000,00	PENGEMBANGAN SUMBER
5 0:	3 02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN			3 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-	400.000,000,00	PENGEMBANGAN SUMBER
					Promosi ASN			Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03				Pengelolaan Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN	Promosi ASN Jumlah PNS yang mengikuti		3 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)	- Memperkuat reformasi	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	- Badan Kepegawaian		PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
					Promosi ASN			Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	dan Pengembangan		PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
					Promosi ASN Jumlah PNS yang mengikuti			Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola			PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
					Promosi ASN Jumlah PNS yang mengikuti			Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
					Promosi ASN Jumlah PNS yang mengikuti			Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	dan Pengembangan		PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
					Promosi ASN Jumlah PNS yang mengikuti			Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
					Promosi ASN Jumlah PNS yang mengikuti			Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
					Promosi ASN Jumlah PNS yang mengikuti			Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan pelayanan publik 1. Penataan dan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
					Promosi ASN Jumlah PNS yang mengikuti			Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola	dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
					Promosi ASN Jumlah PNS yang mengikuti			Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan pelayanan publik 1. Penataan dan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	9000 Orang	600.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara		2.150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
											Pemerintahan dan Pelayanan				
			L								Publik				
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	800.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		02			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	124 Orang	5.100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	30 Orang	500.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara	0,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	10854 ASN	800.000.000		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara	-	815.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



	5 0.	03 02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara	75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
					Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	300 Orang	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		03 02			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 0.	03 02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	300 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Kartanegara	50,000,000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 0)4			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			6.950.000.000,00					8.700.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
256	5 0	04 02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	27,85 Persen	6.950.000.000,00					- 8.700.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 0	04 02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	200 ASN	3.200.000.000,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	3.700.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 0	04 02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



	5 (04 02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan	Jumlah ASN yang Mengikuti	3000 Orang	3.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	3.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN
					Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan	Pengembangan Kompetensi		Tenggarong, Timbau	` '	pemerintahan daerah yang	· ·	PENGEMBANGAN SUMBER
					Pilihan bagi Jabatan Administrasi					profesional dan akuntabel		DAYA MANUSIA
					Penyelenggara Urusan					untuk mendukung		
					Pemerintahan Konkuren, Perangkat					transformasi pelayanan		
					Daerah Penunjang, dan Urusan					nuhlik		
					Pemerintahan Umum					1. Penataan dan		
					T Cities internal of them					Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		
	5 (04 02	2.04	0004	Daniel and Daniel and and an	Landah Bahasa di Adi Basahisa a	4.8-1	400 000 000 00 K-h K-h-l K-h-l	DANIA DA CILIACII (DDII)		350 000 000 00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN
	5 (04 02	2.01	0004	, ,	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan,	1 Dokumen	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola -	350.000.000,00	
					Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi,	Pengoordinasian, Fasilitasi,		Semua Kecamatan,		pemerintahan daerah yang		PENGEMBANGAN SUMBER
					dan Pelaporan Pengembangan	Pemantauan, Evaluasi, dan		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel		DAYA MANUSIA
					Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan					untuk mendukung		
					Pilihan bagi Jabatan Administrasi	Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan				transformasi pelayanan		
					Penyelenggara Urusan	Pilihan bagi Jabatan Administrasi				publik		
					Pemerintahan Konkuren, Perangkat	Penyelenggara Urusan				1. Penataan dan		
					Daerah Penunjang, dan Urusan	Pemerintahan Konkuren, Perangkat				Pengembangan Tata Kelola		
					Pemerintahan Umum	Daerah Penunjang, dan Urusan				Pemerintahan dan Pelayanan		
						Pemerintahan Umum				Publik		
$\neg \top$	5 (04 02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan,	Jumlah ASN yang mengikuti -	112 ASN	3.750.000.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola -	- 5.000.000.000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DA
					Pengembangan Kompetensi	pengembangan kompetensi			1	pemerintahan daerah yang		PENGEMBANGAN SUMBER
- 1		1	1	1	Manajerial dan Fungsional	manajerial dan fungsional			1	profesional dan akuntabel		DAYA MANUSIA
					*	'			1	untuk mendukung		1
					1				1	transformasi pelayanan		1
										publik		
										1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		
-		04 03	2.02	0003	Dolokonnon Costifikasi Komaratara	Lumlah ACN yang Taragatifikasi	6 Ores -	1.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BACILIASII (DBII)	7. Peningkatan tata kelola -	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN
	5 (04 02	2.02	0003		Jumlah ASN yang Tersertifikasi	6 Orang		DANA BAGI HASIL (DBH)		0,00	
					di Lingkungan Pemerintah	Lingkup Kabupaten/Kota		Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang		PENGEMBANGAN SUMBER
					Kabupaten/Kota					profesional dan akuntabel		DAYA MANUSIA
										untuk mendukung		
										transformasi pelayanan		
										publik		
										1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		
	5 (04 02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil	6 Laporan	2.750.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	5.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN
					Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,	Penyelenggaraan Pengembangan		Tenggarong, Timbau		pemerintahan daerah yang		PENGEMBANGAN SUMBER
					Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan	Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,		00 0		profesional dan akuntabel		DAYA MANUSIA
					Fungsional, Kepemimpinan, dan	Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan				untuk mendukung		
- 1		1	1	1	Prajabatan	Fungsional, Kepemimpinan, dan			1	transformasi pelayanan		1
			1		'	Prajabatan			1	publik		1
- 1		1	1	1	1	'			1	1. Penataan dan		1
			1		1				1	Pengembangan Tata Kelola		1
- 1		1	1	1	1				1	Pemerintahan dan Pelayanan		1
										Publik		
		_	+	-	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1		20.991.849.142,00	1 1	. 202000	39 110 000 000 00	BADAN RISET DAN INOVAS
					Dadaset dan movasi Daeran			25.551.045.142,00			33.110.000.000,00	DAERAH
-+	5	-+	+	1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEME	RINTAHAN		20.991.849.142,00	1	T T	39.110.000.000,00	
	3				ONSOR PENUNJANG URUSAN PENIE	NIN IADAN		20.331.043.142,00	1		59.110.000.000,00	DAERAH
		0.5	-	-	DENIEUTIAN DAN DENGEADANGAN			20 004 040 442 00			39.110.000.000,00	
	5 (05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			20.991.849.142,00			39.110.000.000,00	DAERAH
	_		-	-		I	1					
257	5 (05 01	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP perangkat daerah -	95 Nilai	12.586.849.142,00	1		- 17.110.000.000,00	
					PEMERINTAHAN DAERAH				1			DAERAH
		_	1	<u> </u>	KABUPATEN/KOTA				ļ			
	5 (05 01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan, -	5 Dokumen	350.000.000,00	[-	7. Peningkatan tata kelola -	- 800.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVAS
- 1		1	1	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			1	pemerintahan daerah yang		DAERAH
			1		1	Perangkat Daerah			1	profesional dan akuntabel		1
			1		1				1	untuk mendukung		1
- 1		1	1	1	1				1	transformasi pelayanan		1
		1	1	1	1				1	publik		1
	1				1				1	5. Penguatan infrastruktur		1
					1	1 1 1		l I	1			1
						1				dan penerapan digitalisasi		
										dan penerapan digitalisasi pelayanan publik		



5	0.	5 01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	2	! Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN ASLI -	7. Peningkatan tata kelola -	450.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI
					Perangkat Daerah	Perangkat Daerah			Tenggarong, Timbau	DAERAH (PAD)	pemerintahan daerah yang	DAERAH
									3,000	` '	profesional dan akuntabel	
											untuk mendukung	
											transformasi pelayanan	
											publik	
											5. Penguatan infrastruktur	
											dan penerapan digitalisasi	
											pelayanan publik	
_		F 01	2.01	0000	Koordinasi dan Penyusunan	Lumlah Lanasan Canaian Kinasia		Lanaran	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DENIDADATANIACII	7. Peningkatan tata kelola -	50.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI
3	0:	5 01	2.01	0006		Jumlah Laporan Capaian Kinerja		Laporan				
					Laporan Capaian Kinerja dan	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Tenggarong, Timbau	DAERAH (PAD)	pemerintahan daerah yang	DAERAH
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi					profesional dan akuntabel	
						Penyusunan Laporan Capaian					untuk mendukung	
						Kinerja dan Ikhtisar Realisasi					transformasi pelayanan	
						Kinerja SKPD					publik	
											5. Penguatan infrastruktur	
											dan penerapan digitalisasi	
											pelayanan publik	
5	0.	5 01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1	Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN ASLI -	7. Peningkatan tata kelola -	150.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVAS
						Perangkat Daerah		·	Tenggarong, Timbau	DAERAH (PAD)	pemerintahan daerah yang	DAERAH
						•				` '	profesional dan akuntabel	
											untuk mendukung	
											transformasi pelayanan	
											publik	
											5. Penguatan infrastruktur	
											dan penerapan digitalisasi	
											pelayanan publik	
		- 0-	2.00	0000	Daniel and a Malidate	Lucial Balance Hart	<u> </u>	Delemen	F0.000.000.00 W.b. W.b. W.	PENDAPATAN ASLI -		100.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI
5	0:	5 01	2.01	0008		Jumlah Dokumen Hasil		. Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPA IAN ASLI	7. Peningkatan tata kelola -	
					Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata			Tenggarong, Timbau	DAERAH (PAD)	pemerintahan daerah yang	DAERAH
						Pendukung Statistik Sektoral Daerah					profesional dan akuntabel	
											untuk mendukung	
											transformasi pelayanan	
											publik	
											5. Penguatan infrastruktur	
											dan penerapan digitalisasi	
											pelayanan publik	
5	0	5 01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Laporan Administrasi -	7	' Laporan	11.301.598.055,00	-	7. Peningkatan tata kelola	13.270.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVA
		_			Daerah	Keuangan Perangkat Daerah yang					pemerintahan daerah yang	DAERAH
					Daeran	Akuntabel					profesional dan akuntabel	DALIGHT
						Akulitabel					untuk mendukung	
											transformasi pelayanan	
											publik	
											4. Penguatan regulasi dan	
											tata kelola yang adaptif,	
											konsisten dan implementatif	
	_											
5	0	5 01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			'0 Orang/bulan	11.056.598.055,00 Kab. Kutai Kartanegara,		7. Peningkatan tata kelola -	13.000.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI
						dan Tunjangan ASN			Tenggarong, Timbau	DAERAH (PAD)	pemerintahan daerah yang	DAERAH
					1						profesional dan akuntabel	
	1	1		1	1		1 I			l l	untuk mendukung	
				1	1	1				1	transformasi pelayanan	
	1	1		1	1		1 I			l l	publik	
	1	1		1	1		1 I			l l	4. Penguatan regulasi dan	
				1	1	1				1	tata kelola yang adaptif,	
				1	1	1				1	konsisten dan implementatif	
				1	1					1		
-	, n	5 01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1	. Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	ΡΕΝΠΑΡΑΤΑΝ ΑSII -	7. Peningkatan tata kelola -	50.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI
ا ا		_ 01	2.02	5505	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tahun SKPD dan Laporan Hasil		poru	Tenggarong, Timbau	DAERAH (PAD)	pemerintahan daerah yang	DAERAH
					SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan			renggarong, minuau	DALIGIT (FAD)	profesional dan akuntabel	DALKAII
				1	JNI D					1		
					1	Keuangan Akhir Tahun SKPD					untuk mendukung	
					1						transformasi pelayanan	
	- 1			1	1	1				1	publik 5 December infrastruktura	
			1		1						5. Penguatan infrastruktur	
				1	1					1	dan penerapan digitalisasi	
					Ī						pelayanan publik	
							ı I	Laporan	170.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN ASLI -	7. Peningkatan tata kelola -	170.000.000,00 BADAN RISET DAN INOVASI
5	i 0:	5 01	2.02	0007		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	l l					
5	6 09	5 01	2.02	0007	Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	ľ		Tenggarong, Timbau	DAERAH (PAD)	pemerintahan daerah yang	DAERAH
5	6 09	5 01	2.02	0007					Tenggarong, Timbau	DAERAH (PAD)	profesional dan akuntabel	DAERAH
5	6 09	5 01	2.02	0007	Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan			Tenggarong, Timbau	DAERAH (PAD)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	DAERAH
5	6 09	5 01	2.02	0007	Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan			Tenggarong, Timbau	DAERAH (PAD)	profesional dan akuntabel untuk mendukung	DAERAH
5	i 0:	5 01	2.02	0007	Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran			Tenggarong, Timbau	DAERAH (PAD)	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	DAERAH
5	5 09	5 01	2.02	0007	Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan			Tenggarong, Timbau	DAERAH (PAD)	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	DAERAH
5	6 09	5 01	2.02	0007	Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran			Tenggarong, Timbau	DAERAH (PAD)	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur	DAERAH
5	5 09	5 01	2.02	0007	Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran			Tenggarong, Timbau	DAERAH (PAD)	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	DAERAH



01 2.03 01 2.03	03	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah(BMD) pada Perangkat	1 Dokumen 4 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutal Kartanegara, Tenggarong, Timbau 83.626.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah(BMD) pada	4 Dokumen		DAERAH (PAD)	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	D4	DAERAH
		Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah(BMD) pada	4 Dokumen		-	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik		
			Jumlah Dokumen Administrasi - Barang Milik Daerah(BMD) pada	4 Dokumen	83.626.800,00		untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik		
			Barang Milik Daerah(BMD) pada	4 Dokumen	83.626.800,00		transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik		
			Barang Milik Daerah(BMD) pada	4 Dokumen	83.626.800,00		publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik		
			Barang Milik Daerah(BMD) pada	4 Dokumen	83.626.800,00	-	5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik		
			Barang Milik Daerah(BMD) pada	4 Dokumen	83.626.800,00	-	dan penerapan digitalisasi pelayanan publik		
			Barang Milik Daerah(BMD) pada	4 Dokumen	83.626.800,00	-	pelayanan publik		
			Barang Milik Daerah(BMD) pada	4 Dokumen	83.626.800,00	-		l J	
			Barang Milik Daerah(BMD) pada	4 Dokumen	83.626.800,00	I -			
01 2.03		pada Perangkat Daerah			l l	1 1	7. Fellingkatan tata kelula		BADAN RISET DAN INOVAS
01 2.03			Perangkat				pemerintahan daerah yang	DA	DAERAH
01 2.03					'		profesional dan akuntabel		
01 2.03					'		untuk mendukung		
01 2.03					'		transformasi pelayanan		
01 2.03					'		publik		
01 2.03					'		5. Penguatan infrastruktur		
01 2.03					'		dan penerapan digitalisasi		
01 2.03							pelayanan publik		
	0001	Penyusunan Perencanaan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN ASLI -	7. Peningkatan tata kelola -	50.000.000,00 BA	BADAN RISET DAN INOVASI
		Kebutuhan Barang Milik Daerah	Milik Daerah SKPD		Tenggarong, Timbau	DAERAH (PAD)	pemerintahan daerah yang	DA	DAERAH
		SKPD					profesional dan akuntabel		
					1		untuk mendukung		
					'		transformasi pelayanan		
					'		publik		
					'		5. Penguatan infrastruktur		
					'		dan penerapan digitalisasi		
					'				
04 3.0	2 2002	Kanadia adalah Basilalan Basasa	handali tanana Hadi Badista	4.1	22 525 000 00 Walt Water Water and	DEALDADATANIAGU		75 000 000 00	ADAM DISET DANIMOVASI
01 2.03	J3 UUU3			1 Laporan					DAERAH
		MIIIK Daeran SKPD			Tenggarong, Timbau	DAERAH (PAD)		DA	AERAH
					'				
			Daerah SKPD		'				
					'				
					'				
					'				
					'				
							pelayanan publik		
01 2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	2 Laporan	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN ASLI -	7. Peningkatan tata kelola -	50.000.000,00 BA	BADAN RISET DAN INOVASI
		Laporan Barang Milik Daerah pada	Penyusunan Laporan Barang Milik		Tenggarong, Timbau	DAERAH (PAD)	pemerintahan daerah yang	DA	DAERAH
		SKPD	Daerah pada SKPD				profesional dan akuntabel		
					'		untuk mendukung		
					'		transformasi pelayanan		
					'				
					'				
					'				
					'		pelavanan publik		
01 2.0	ns	Administraci Konogawajan	Jumlah Dakuman Administrasi	2 Dokumen	32 900 420 00	†		300 000 000 00	ADAN DISET DAN INOVAS
2.0.				2 Dominell	32.300.420,00	[DAERAH
		rerangkat Daeran	Kepegawaiaii		'			DF	ALNAH
					'				
					<u> </u>	l I			
					1				
J		1			<u> </u>	į I			
J		1			<u> </u>	į I			
					1				
					1		konsisten dan implementatif		
01 2.05	0010		Jumlah Orang yang Mengikuti	70 Orang			7. Peningkatan tata kelola -		BADAN RISET DAN INOVASI
ı		Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-		Tenggarong, Timbau	DAERAH (PAD)	pemerintahan daerah yang	DA	DAERAH
			Undangan		1		profesional dan akuntabel		
ı		1			1	1	untuk mendukung		
					<u> </u>	l I	transformasi pelayanan		
					1		publik		
					1		4. Penguatan regulasi dan		
					1				
					<u> </u>		konsisten dan implementatif		
			ı	1 1				1	
0:	11 2.0	1 2.03 0005	Milik Daerah SKPD 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penlalain Barang Milik Daerah SKPD 1 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 2 Laporan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Ferangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 70 Orang	Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Tenggarong, Timbau Z Laporan Z Lapora	Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penlilain Barang Milik Daerah SKPD Il 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Il 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Milk Darah SiPD Barrag Milk Darah SiPD Barrag Milk Darah SiPD Penglatan Infastruktur Skeptana Berlainan Barrag Milk Darah SiPD Darah SiPD	12 203 0003 Foodmand denish Sappore Healt Perfeition Brange Milk Devent has 18 Explain and 18 Explain and 18 Exp



						,		<u> </u>				
5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	7 Pelayanan	307.359.308,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif,		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
										konsisten dan implementatif		
5	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	68.248.300,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif	300,000,000,000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	97.548.503,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif	150.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.080.930,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	33.962.575,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif	75.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	69.147.400,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif	250.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	25.371.600,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif	75.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH



5	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	85.455.040,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif	-	400.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	85.455.040,00 Kab. Kutai Kartanega Tenggarong, Timbau	a, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif		400.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 Bula	116.439.519,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif	-	765.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Lapc	an 65.000.000,00 Kab. Kutai Kartanega Tenggarong, Timbau		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif		65.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Lapo	an 51.439.519,00 Kab. Kutai Kartanega Tenggarong, Timbau		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif		700.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah		31 Unit	309.470.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif	-	450.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		30 Unit	239.470.000,00 Kab. Kutai Kartanega Tenggarong, Timbau		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif		300.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

5	05	5 01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit	70.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN ASLI -	7. Peningkatan tata kelola -	150.000.000,00 BADAN RISET DA	DAN INOVASI
"		.			dan Prasarana Pendukung Gedung	Pendukung Gedung Kantor atau		Tenggarong, Timbau	DAERAH (PAD)	pemerintahan daerah yang	DAERAH	5, 11, 11, 10, 17, 15,
					Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang		14.88-14.8/		profesional dan akuntabel		
					Kantor atau bangunan canniya	Dipelihara/Direhabilitasi				untuk mendukung		
						Dipelinal dy Dir Chabilitasi				transformasi pelayanan		
										ti alisioi lilasi pelayallali		
										publik		
										4. Penguatan regulasi dan		
										tata kelola yang adaptif,		
										konsisten dan implementatif		
				<u> </u>			1000					
258 5	05	5 02			PROGRAM PENELITIAN DAN	Persentase Penelitian dan -	100 Persen	8.405.000.000,00			- 22.000.000,000 BADAN RISET D	DAN INOVASI
					PENGEMBANGAN DAERAH	Pengembangan yang					DAERAH	
						termanfaatkan oleh Perangkat						
						Daerah Bidang Penyelenggaraan						
						Pemerintahan dan Pengkajian						
						Peraturan	1001					
5	05	5 02	2.01		Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan -	12 Dokumenn	2.025.000.000,00	-	4. Penguatan regulasi dan -	- 5.850.000.000,00 BADAN RISET D	r dan inovasi
					Bidang Penyelenggaraan	Pengembangan Bidang				tata kelola yang adaptif,	DAERAH	
					Pemerintahan dan Pengkajian	Penyelenggaraan Pemerintahan				konsisten dan implementatif		
					Peraturan	dan Pengkajian Peraturan						
5	05	5 02	2.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	1 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		4. Penguatan regulasi dan -	2.050.000.000,00 BADAN RISET DA	DAN INOVASI
					Penelitian dan Pengembangan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi		Semua Kecamatan,	DAERAH (PAD)	tata kelola yang adaptif,	DAERAH	
	1			1	Bidang Pemerintahan Umum	Penelitian dan Pengembangan		Semua Kel/Desa		konsisten dan implementatif		
			l	1		Bidang Pemerintahan Umum						
5	05	5 02	2.01	0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	3 Laporan	850.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN ASLI -	4. Penguatan regulasi dan -	1.100.000.000,00 BADAN RISET DA	DAN INOVASI
					Penelitian dan Pengembangan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi		Semua Kecamatan,	DAERAH (PAD)	tata kelola yang adaptif,	DAERAH	
					Bidang Kelembagaan dan	Penelitian dan Pengembangan		Semua Kel/Desa		konsisten dan implementatif		
					Ketatalaksanaan	Bidang Kelembagaan dan						
						Ketatalaksanaan						
5	05	5 02	2.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	1 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN ASLI -	4. Penguatan regulasi dan -	500.000.000,00 BADAN RISET DA	DAN INOVASI
					Penelitian dan Pengembangan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi		Semua Kecamatan,	DAERAH (PAD)	tata kelola yang adaptif,	DAERAH	
					Bidang Keuangan dan Aset Daerah,	Penelitian dan Pengembangan		Semua Kel/Desa		konsisten dan implementatif		
					Reformasi Birokrasi	Bidang Keuangan dan Aset Daerah,				' I		
						Reformasi Birokrasi						
5	05	5 02	2.01	0007	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	2 Laporan	375.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN ASLI -	4. Penguatan regulasi dan -	150.000.000,00 BADAN RISET DA	DAN INOVASI
					Penelitian dan Pengembangan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi	.,,,	Semua Kecamatan,	DAERAH (PAD)	tata kelola yang adaptif,	DAFRAH	
					Bidang Penataan Kelembagaan	Penelitian dan Pengembangan		Semua Kel/Desa		konsisten dan implementatif		
					Desa	Bidang Penataan Kelembagaan		Semanti, Sesa		Nonstein auf Implementati		
					DCSa	Desa						
5	05	5 02	2.01	0009	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan	1 Laporan	125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	ΡΕΝΠΑΡΑΤΑΝ ΑSII -	7. Peningkatan tata kelola -	900.000.000,00 BADAN RISET DA	DAN INOVASI
"		.			Penelitian dan Pengembangan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi		Semua Kecamatan,	DAERAH (PAD)	pemerintahan daerah yang	DAERAH	5/11/11/07/51
					Bidang Aparatur Desa	Penelitian dan Pengembangan		Semua Kel/Desa	DALLOW (1710)	profesional dan akuntabel	57121411	
					blading reparatar besa	Bidang Aparatur Desa		Serial Rey Sesa		untuk mendukung		
						Sidding ripuratur Sesa				transformasi pelayanan		
										nuhlik		
										1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		
-	0.5	5 02	2.01	0011	Encilitaci Bolakeanaan dan Eurl	Jumlah Langran Hasil Rolaksanson	1 Lanoran	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DENIDADATAN ASU	1. 22	600.000.000,00 BADAN RISET DA	DANINOVAC
l °	. 03	02	2.01	0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi	1 Laporan	Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	4. Penguatan regulasi dan	DAERAH	DAIN INU VASI
									DAERAH (PAD)	tata kelola yang adaptif,	DAEKAH	
					Bidang Badan Usaha Milik Desa	Penelitian dan Pengembangan		Semua Kel/Desa		konsisten dan implementatif		
			l	1		Bidang Badan Usaha Milik Desa						
-	Or.	- 02	2.01	0012	Dongololoon Doto Kolithong	Issaalah Data Kalithangan dan	1 Lanora =	135 000 000 00 Koh Kutol Kantana	DENIDADATAN ACI I	A Denguetan regulasi dan	350.000.000,00 BADAN RISET DA	DANIBOVAC
5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan	Jumlah Data Kelitbangan dan	1 Laporan	125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		4. Penguatan regulasi dan		DAN INUVASI
	1			1	Peraturan	Peraturan yang Terkelola dengan		Semua Kecamatan,	DAERAH (PAD)	tata kelola yang adaptif,	DAERAH	
	ı		l	1		DdIK		Semua Kel/Desa		konsisten dan implementatif		
- -			2.04	0013	Desumuses Delies	Lumlah Dakamandasi atas Dan	2.5-1	350 000 000 00 Kelt Kestel Kest	DENIDADATAN ACU	A Denguatan seguitari dan	200 000 000 00 000	DANING (AC
5	05	5 02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas	Jumlah Rekomendasi atas Rencana	2 Rekomendasi	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		4. Penguatan regulasi dan -	200.000.000,00 BADAN RISET DA	DAN INOVASI
				1	Rencana Penetapan Peraturan Baru	Penetapan Peraturan Baru		Semua Kecamatan,	DAERAH (PAD)	tata kelola yang adaptif,	DAERAH	
	ı		l	1	dan/atau Evaluasi Terhadap	dan/atau Evaluasi Terhadap		Semua Kel/Desa		konsisten dan implementatif		
			l	1	Pelaksanaan Peraturan	Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan						
- 1 -	+-		2	1	Describbles describe			4.055.000.000.05	 		7	T D A M 1
5	05	5 02	2.02	1	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan -	14 Dokumen	1.855.000.000,00	-	- -	- 7.000.000,000 BADAN RISET D	I DAN INOVASI
	ı		l	1	Bidang Sosial dan Kependudukan	Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan					DAERAH	
	05	- 02	2.02	0001	Donalition dan Dan		1 Paluman	150,000,000,00 Web West West	DENIDADATAN ACU		400,000,000,00	DANING (AC
5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian	1 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,			400.000.000,00 BADAN RISET DA	DAN INOVASI
					Bidang Aspek- Aspek Sosial	dan Pengembangan Bidang Aspek-		Semua Kecamatan,	DAERAH (PAD)		DAERAH	
						Aspek Sosial						
						Aspek Sosiai		Semua Kel/Desa				



5 05	5 02	2 2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Sektor Pendidikan 2. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas	4.800.000.000,00 BADAN RISET DAN IN DAERAH
5 05	5 02	2 2.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian	2 Dokumen	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN ASLI - DAERAH (PAD)	layanan pendidikan 2. Membangun Sektor Kesehatan	600.000.000,00 BADAN RISET DAN IN DAERAH
				kesenatan	dan Pengembangan Kesehatan		Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAEKAH (PAD)	Resenatan 1. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas layanan kesehatan	DAEKAH
5 05	5 02	2 2.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	10 Dokumen	1.305.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	1.200.000,000 BADAN RISET DAN IN DAERAH
5 05	5 02	2 2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	17 Dokumen	3.325.000.000,00	·	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	- 4.350.000.000,00 BADAN RISET DAN DAERAH
5 05	5 02	2 2.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3 Dokumen	425.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	400.000,000,000 BADAN RISET DAN IN DAERAH
5 05	5 02	2 2.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	3 Dokumen	825.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	0,00 BADAN RISET DAN IN DAERAH
5 05	5 02	2 2.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	6 Dokumen	950.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan Berkelanjutan	1.850.000.000,00 BADAN RISET DAN IN DAERAH
5 05	5 02	2 2.03	0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	3 Dokumen	525.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	350.000.000,00 BADAN RISET DAN IN DAERAH
5 05	5 02	2 2.03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	300.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	1.150.000.000,00 BADAN RISET DAN IN DAERAH
5 05	5 02	2 2.03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Infratruktur Konektivitas G. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	600.000.000,00 BADAN RISET DAN IN DAERAH



	5 (05 02	2.04		Pengembangan Inovasi dan	Jumlah Dokumen Penelitian dan -		8 Dokumen	1.200.000.000,00		-	7. Peningkatan tata kelola	-	- 4.800.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI
					Teknologi	Pengembangan Bidang						pemerintahan daerah yang			DAERAH
						Pengembangan Inovasi dan						profesional dan akuntabel			
						Teknologi						untuk mendukung			
												transformasi pelayanan			
												publik			
												5. Penguatan infrastruktur			
												dan penerapan digitalisasi			
												pelayanan publik			
	5 (05 02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian,		2 Dokumen	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI	-	7. Peningkatan tata kelola	-	2,100,000,000,00	BADAN RISET DAN INOVASI
					Perekayasaan di Bidang Teknologi	Pengembangan, dan Perekayasaan			Semua Kecamatan,	DAERAH (PAD)		pemerintahan daerah yang		,	DAERAH
					dan Inovasi	di Bidang Teknologi dan Inovasi			Semua Kel/Desa	` ′		profesional dan akuntabel			
												untuk mendukung			
												transformasi pelayanan			
												publik			
												5. Penguatan infrastruktur			
												dan penerapan digitalisasi			
												pelayanan publik			
	5 (05 02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan		1 Laporan	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	, PENDAPATAN ASLI	_	7. Peningkatan tata kelola		1,000,000,000,000	BADAN RISET DAN INOVASI
	, I ,	03 02	2.01	0002	Bangun/Model Replikasi dan	Uji Coba dan Penerapan Rancang		1 caparan	Semua Kecamatan,	DAERAH (PAD)		pemerintahan daerah yang		1.000.000.000,00	DAERAH
					Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan				Semua Kel/Desa	Briefotti (1718)		profesional dan akuntabel			Di LEIG WI
					Penerapan Teknologi	Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan			Serial Rely Sesa			untuk mendukung			
					r enerapan r eknologi	Penerapan Teknologi						transformasi pelayanan			
						renerapari reknologi						nublik			
												5. Penguatan infrastruktur			
											1	dan penerapan digitalisasi	1		
ļ			1	1		1			1		İ	pelayanan publik	İ	1	
+		05 02	2.04	0002	Diseminasi Jenis, Prosedur dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	+ +	1	400.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI	+	7. Peningkatan tata kelola	 	1 200 000 000 00	BADAN RISET DAN INOVASI
	ء ا د	0.5 0.2	2.04	0003	Metode Penyelenggaraan	Diseminasi Jenis, Prosedur dan		1 Laporan	Semua Kecamatan,	DAERAH (PAD)	1	pemerintahan daerah yang	ľ	1.200.000.000,00	DAERAH
					Pemerintahan Daerah yang Bersifat				Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)		profesional dan akuntabel			DAERAH
					Inovatif	Pemerintahan Daerah yang Bersifat			Sellida Kel/ Desa			untuk mendukung			
					inovatit	Inovatif									
						inovatit						transformasi pelayanan			
												publik			
												1. Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
	5 (05 02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-	Jumlah Laporan Hasil		3 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara		-	7. Peningkatan tata kelola	-	300.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI
					Hasil Kelitbangan	Penyelenggaraan Sosialisasi dan			Semua Kecamatan,	DAERAH (PAD)		pemerintahan daerah yang			DAERAH
						Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			Semua Kel/Desa			profesional dan akuntabel			
												untuk mendukung			
												transformasi pelayanan			
												publik			
												Penguatan infrastruktur			
												dan penerapan digitalisasi			
												pelayanan publik			
	5 (05 02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			1 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara		-	7. Peningkatan tata kelola	-	200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI
						Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			Semua Kecamatan,	DAERAH (PAD)		pemerintahan daerah yang			DAERAH
									Semua Kel/Desa			profesional dan akuntabel			
												untuk mendukung			
												transformasi pelayanan			
												publik			
												5. Penguatan infrastruktur			
												dan penerapan digitalisasi			
											1	pelayanan publik	1		
					Inspektorat Kabupaten		•	•	45.079.247.807,00	•	•	•		38.104.204.398,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PE	MERINTAHAN			45.079.247.807,00						INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 (01			INSPEKTORAT DAERAH				45.079.247.807,00	1					INSPEKTORAT KABUPATEN
		01 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Peningkatan Kapabilitas Aparat -		4 Level	37.879.247.807,00	1				- 23.904.204.398,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
- 1	1		1	1	PEMERINTAHAN DAERAH	Pengawasan Intern Pemerintah		90 Nilai			1		İ	1	
			1	1	KABUPATEN/KOTA	(APIP)		1	1		1		İ	1	
ļ			1	1		Nilai Sakip Perangkat Daerah			1		İ		İ	1	
	6 (01 01	2 01	1	Perencanaan, Penganggaran, dan			6 Dokumen	350.000.000,00	1	Memperkuat pembangunan	7. Peningkatan tata kelola	Inspektorat Daerah	- 750 000 000 00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	ĭ,	52 51	2.01		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen	330.000.000,00		sumber daya manusia (SDM),		Kabupaten Kutai	, 55.000.000,00	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
ļ			1	1	23 augs Kinerja rerangkat Daeran	on boardin, dan Evaluasi Kilici ja			1			profesional dan akuntabel	Kartanegara	1	
			1	1		1		1	1		kesehatan, prestasi olahraga,		tarregara	1	
ļ	į.			1		1		1	1		kesetaraan gender, serta	transformasi pelayanan	İ	1	
							1	1	ı	1	penguatan peran	publik			
						l l			<u>l</u>			1 Damataan d			
											perempuan, pemuda	1. Penataan dan			
											(generasi milenial dan	Pengembangan Tata Kelola			
											(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
											(generasi milenial dan	Pengembangan Tata Kelola			
											(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
											(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			



6 0:	01	01 2.01			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan	nan daerah yang Ka il dan akuntabel Ka dukung asi pelayanan	ispektorat Daerah abupaten Kutai artanegara	450.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
6 0:	01	01 2.01	ı	,	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	50.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, persatasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	nan daerah yang Ka il dan akuntabel dukung asi pelayanan	sspektorat Daerah abupaten Kutai artanegara	50.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
6 0:	01	01 2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, persatasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan	nan daerah yang Ka ul dan akuntabel dukung asi pelayanan	sspektorat Daerah abupaten Kutai artanegara	150.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
6 0:	01	01 2.01			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1 Dokumen	50.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan Pengemba	nan daerah yang Ka ul dan akuntabel dukung asi pelayanan	sspektorat Daerah abupaten Kutai artanegara	50.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
6 0:	01	01 2.02		Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	-	4 Laporan	18.051.055.063,00		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat profesiona pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 1. Penataa Pengemba	han daerah yang Ka al dan akuntabel Ka idukung asi pelayanan	sspektorat Daerah - abupaten Kutai artanegara	15.887.601.894,00	inspektorat Kabupaten
6 0:	01	01 2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1176 Orang/bulan	17.771.724.663,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat profesiona untuk men pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 1. Penataan Pengemba	nan daerah yang Ka il dan akuntabel Ka dukung asi pelayanan	spektorat Daerah abupaten Kutai artanegara	15.608.271.494,00 i	INSPEKTORAT KABUPATEN

6	0:	1 01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		INSPEKTORAT KABUPATEN
6	0:	1 01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	204.330.400,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	204.330.400,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
6	0:	1 01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25,000,000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	25,000,000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
6	0:	1 01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	3 Dokumen	90.800.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	- 115.800.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
6	0:	1 01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25,000,000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	25.000.000,00	inspektorat Kabupaten
6	0:	1 01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	25,000,000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politiki, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	50.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
6	0:	1 01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Millik Daerah pada SKPD	1 Laporan	40.800.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	40.800.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN

6	01		2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen	550.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		ispektorat Kabupaten
6	03	1 01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	500.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	1.000.000.000,000 1	ISPEKTORAT KABUPATEN
6	01	1 01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	75 Orang	50.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	100.000.000,00 li	ISPEKTORAT KABUPATEN
6	01	1 01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	770.833.340,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	981.833.340,00 IN	ISPEKTORAT KABUPATEN
6	01	1 01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politiki, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	15.000.000,00 IN	ispektorat Kabupaten
6	0:	1 01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	150.000.000,00 IN	ispektorat Kabupaten
6	0:	1 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	80.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	166.000.000,00 IN	ispektorat Kabupaten



6	01	01 2.0	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Pa	ket	50.833.340,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		50.833.340,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
6	01	01 2.0	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 L	aporan	500.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		500.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
6	01	01 2.0	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250	Dokumen	50.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		100.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	01	01 2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16 0	Jnit	15.461.784.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		500.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
6	01	01 2.0	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Ur	nit	15.200.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	0,0	00	inspektorat Kabupaten
6	01	01 2.0	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 (Jnit	261.784.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		500.000.000,00	inspektorat Kabupaten
6	01	01 2.0	18	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 E	Sulan	2.004.775.404,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		2.668.969.164,00	INSPEKTORAT KABUPATEN

No. 1															
	6	01 0	2.08	0002		Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12 Laporan			politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Kabupaten Kutai			
Companies of the comp	6	01 0	1 2.08	0003		Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	75.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Kabupaten Kutai		150.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
Participal to the third properties and the third properties of the third properties of the third properties and the third properties of the third properties and the third	6	01 0	1 2.08	0004		Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan	1509.775.404,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Kabupaten Kutai		2.098.969.164,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
Blays Pemeliharan, dan Pajak Kondaran Driosa Jabatian Mondaran Driosa	6	01 0	1 2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan		18 Unit	600.000,000		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Kabupaten Kutai	-	900.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
Bisya Pemeliharaan, Pajak dan Perzirianan Kordaraan Dinas Perzirianan Kordaraan Dinas Dipelhara and dibayarkan Pajak dan Perzirianan Kordanaan Dinas Dipelharaan dan dan Perzirianan Kordan Bangunan Lainnya Dipelharaan dan Pemeliharaan Pajak dan Perzirianan Kordan Bangunan Lainnya Dipelharaan dan Pemeliharaan Pajak dan Perzirianan Kordan Bangunan Lainnya Dipelharaan dan Pemeliharaan Pajak dan Perzirianan Kordan Bangunan Lainnya Dipelharaan dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan Pemendiharaan darah yang Dipelharan Katangara Dipelharaan dan Pemendiharaan darah yang Dipelharan Katangara Dipelharaan Pada Bangunan Lainnya Dipelharan Katangara Dipelharan Pada Bangunan Lainnya Dipelharan Pada Bangunan Dipelharan Dipelhar	6	01 0	1 2.09	0001	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	6 Unit	250.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Kabupaten Kutai		250.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
Rantor dan Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pemerintahan daerah yang politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 260 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN Cakupan Penyelenggaraan - 97 Persen 5.350,000,000,00	6	01 0	1 2.09	0002	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	11 Unit	250.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Kabupaten Kutai		250.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
260 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN Cakupan Penyelenggaraan - 97 Persen 5.350.000.000,00	6	01 0	1 2.09	0009		Bangunan Lainnya yang	1 Unit	100.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Kabupaten Kutai		200.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	260 6	01 0	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Penyelenggaraan -	97 Persen	5.350.000.000,00					-	10.200.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN



6	0				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan - Pengawasan Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Pengawasan Internal	70 Dokumen 242 Dokumen	4.750.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara		NSPEKTORAT KABUPATEN
6	0	1 02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Laporan	750.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	1.250.000.000,00	NSPEKTORAT KABUPATEN
6	0	1 02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	S Laporan	750.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	1.500.000.000,00 li	ISPEKTORAT KABUPATEN
6	0	1 02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	17 Laporan	750.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politiki, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	1.500.000.000,00 li	ISPEKTORAT KABUPATEN
6	0	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	600.000,000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	1.250.000.000,00	ISPEKTORAT KABUPATEN
6	0	1 02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	38 Laporan	1.000.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	1.250.000.000,00 II	NSPEKTORAT KABUPATEN
6	0	1 02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	100.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	250.000.000,00 lt	NSPEKTORAT KABUPATEN

	6 0	01 02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	800.000,000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara		nspektorat Kabupaten
		01 02			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 Dokumen	600.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara		nspektorat Kabupaten
		01 02			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	100.000.000,00 -		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara		nspektorat Kabupaten
	6 0	01 02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	13 Laporan	500.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	1.500.000.000,00	nspektorat Kabupaten
261	6 0	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN	Persentase Perangkat Daerah Yang - Melaksanakan SPIP	100 Persen	1.850.000.000,00				-	4.000.000,000 I	NSPEKTORAT KABUPATEN
		01 03			ASISTENSI Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	2 Dokumen	300.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		NSPEKTORAT KABUPATEN
	6 0	01 03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	150.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	300,000,000,00	nspektorat Kabupaten
	6 0	01 03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	150.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	500.000.000,00	nspektorat Kabupaten



	6	01 03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen Pelaksanaan - Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		79 Dokumen	1.550.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	3.200.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6	01 03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		56 perangkat daerah	750.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		INSPEKTORAT KABUPATEN
	6	01 03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		10 perangkat daerah	200.000,000,000 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	400.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6	01 03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		3 Kegiatan	400.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	1.000.000.000,00	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6	01 03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		10 perangkat daerah	200.000.000,00 -	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	00,000.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
					Kecamatan Tenggarong	·			77.990.000.700,00			•		*	KECAMATAN TENGGARONG
	7				UNSUR KEWILAYAHAN				77.990.000.700,00					74.498.708.838,00	
363		01 01			KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai CAVID Davanakat Davest	1	70 Nilai	77.990.000.700,00 50.157.759.879,00					74.498.708.838,00	KECAMATAN TENGGARONG KECAMATAN TENGGARONG
202		01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -		/ J INIIdi	30.137.733.073,00					50.666.468.017,00	RECAIVIATAIN TENGGAKONG
	7	01 01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		85 Persen	270.000.000,00		-	-	ASN Kecamatan Tenggarong	- 320.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
	7	01 01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Juniah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	ASN Kecamatan Tenggarong	40.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
	7	01 01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel//Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	ASN Kecamatan Tenggarong	30.000,000,00	KECAMATAN TENGGARONG



7	01	01 2.0	1 000		Jumlah Data Statistik Sektoral	200 Data	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN Kecamatan	250.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
				Statistik Sektoral Daerah	Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat		Tenggarong, Semua Kel/Desa		Tenggarong		
					Daerah		nely best				
7	01	01 2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat	Terlaksananya Administrasi -	85 Persen	45.917.985.841,00	-	- ASN Kecamatan -	45.889.298.557,00	KECAMATAN TENGGARON
7	01	01 2.0	2 000	Daerah	Keuangan Perangkat Daerah	350 Orang/hulan	44 030 308 FF7 00 K-L K-L-K-L-K-L-K-L-K-L-K-L-K-L-K-L-K-L	DAMA PACILIACII (PRII)	Tenggarong	44 020 200 557 00	KECAMATAN TENGGARONG
_ /	01	01 2.0	2 000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang/bulan	44.939.298.557,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	- ASN Kecamatan Tenggarong	44.939.298.557,00	KECAMATAN TENGGARUNG
					dan ranjangan Asiv		Kel/Desa		Tenggarong		
7	01	01 2.0	2 000		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	12 Laporan	978.687.284,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN Kecamatan	950.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
				Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan		Tenggarong, Semua Kel/Desa		Tenggarong		
				Triwulanany Semesteran SKPD	Laporan Keuangan		Kely Desa				
					Bulanan/Triwulanan/Semesteran						
					SKPD						
7	24	24 20		Advision of December 1911 December 1911	Todalas and Administration of Bassas	00.0	101.604.584,00		ACAL V	200 000 000 00	KECAMATAN TENGGARONG
,	01	01 2.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	90 Persen	101.604.584,00		- ASN Kecamatan - Tenggarong	200.000.000,00	RECAIVIATAN TENGGARONG
				F	Daerah				13.00		
7	01	01 2.0	3 000		Jumlah Dokumen Pengamanan	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN Kecamatan	50.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
				SKPD	Barang Milik Daerah SKPD		Tenggarong, Semua		Tenggarong		
							Kel/Desa				
7	01	01 2.0	3 000	05 Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	4 Laporan	51.604.584,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN Kecamatan	150.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
				Laporan Barang Milik Daerah pada	Penyusunan Laporan Barang Milik		Tenggarong, Semua	, ,	Tenggarong	•	
				SKPD	Daerah pada SKPD		Kel/Desa				
- 7	01	01 2.0	c	Administrasi Umum Perangkat	Terlaksananya Administrasi Umum -	95 Persen	374.380.456,00		- ASN Kecamatan -	762 200 462 00	KECAMATAN TENGGARONG
	01	01 2.0	•	Daerah	Perangkat Dareah	55 Feisell	374.380.430,00		Tenggarong	703.300.402,00	RECAINATAIN TENGGARONG
7	01	01 2.0	6 000	01 Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	52.999.994,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN Kecamatan	175.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
					Listrik/Penerangan Bangunan		Tenggarong, Semua		Tenggarong		
				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor yang Disediakan		Kel/Desa				
7	01	01 2.0	6 000		Jumlah Paket Peralatan dan	1 Paket	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH) -	- ASN Kecamatan	25,000,000,00	KECAMATAN TENGGARONG
	01	01 2.0	0 000	Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang	1 Taket	Tenggarong, Semua	DANA DAGITIASIE (DDIT)	Tenggarong	23.000.000,00	RECAIVATAIN TENGGARONG
				0 1,1	Disediakan		Kel/Desa				
7	01	01 2.0	6 000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	- ASN Kecamatan Tenggarong	325.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
				Tangga	Tangga yang Disediakan		Kel/Desa		Tenggal ong		
7	01	01 2.0	6 000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1 Paket	125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN Kecamatan	75.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
					yang Disediakan		Tenggarong, Semua		Tenggarong		
							Kel/Desa				
7	01	01 2.0	6 000	95 Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1 Paket	39.365.482,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN Kecamatan	39.365.482,00	KECAMATAN TENGGARONG
				Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan		Tenggarong, Semua		Tenggarong		
							Kel/Desa				
7	01	01 2.0	6 000	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH) -	- ASN Kecamatan	50,000,000,00	KECAMATAN TENGGARONG
'	" '	2.0	_ 000	dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	Tenggarong, Semua		Tenggarong	50.000.000,00	
					SKPD		Kel/Desa				
7	01	01 2.0	6 00:			1 Dokumen	74.014.980,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- ASN Kecamatan	74.014.980,00	KECAMATAN TENGGARONG
				SKPD	Arsip Dinamis pada SKPD		Tenggarong, Semua Kel/Desa		Tenggarong		
							nely best				
7	01	01 2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah -	75 Persen	88.680.000,00	-	- ASN Kecamatan -	88.680.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
				Penunjang Urusan Pemerintah	Penunjang Urusan Pemerintah				Tenggarong		
7	01	01 2.0	7 000	Daerah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya	3 Unit	88.680.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH) -	- ASN Kecamatan	88 680 000 00	KECAMATAN TENGGARONG
'	01	2.0	, 500	. C. Sadadii ASCC Tetap Lailliya	yang Disediakan	3 onic	Tenggarong, Semua	S. W. Co. Co. Findic (DOIT)	Tenggarong	33.333.000,00	
							Kel/Desa		1		
		_ -	_		<u> </u>						
7	01	01 2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang - Urusan Pemerintahan Daerah	90 Persen	3.145.108.998,00	-	- ASN Kecamatan - Tenggarong	3.145.108.998,00	KECAMATAN TENGGARONG
7	01	01 2.0	8 000	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	2.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN Kecamatan	2.500.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Surat Menyurat	.,,,,	Tenggarong, Semua	· ·	Tenggarong		
		1	1	1	i l	I I I	Kel/Desa	1			1
							Kei/ Desa		I		



	7 (01 01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	836.220.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN Kecamatan	836.220.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
					Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan		Tenggarong, Semua	1	Tenggarong		
					,	Listrik yang Disediakan		Kel/Desa				
	7 (01 01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	20.068.998,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN Kecamatan	20.068.998,00	KECAMATAN TENGGARONG
					Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tenggarong, Semua		Tenggarong		
						yang Disediakan		Kel/Desa				
	_											
	7 (01 01	2.08	0004		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	2.286.320.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- ASN Kecamatan	2.286.320.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
					Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang		Tenggarong, Semua		Tenggarong		
						Disediakan		Kel/Desa				
-	7 (01 01	2.00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Taylelysananya Dawelihayaan	85 Persen	260.000.000,00	+	- ASN Kecamatan -	360,000,000,00	KECAMATAN TENGGARONG
	′ `	01	2.03		Penunjang Urusan Pemerintahan	Barang Milik Daerah Penunjang	US Telsell	200.000.000,00		Tenggarong	250.000.000,00	RECAINATAIN TENGGARONG
					Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah				renggarong		
	7 (01 01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan	5 Unit	60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN Kecamatan	60.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
					Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Dinas atau Kendaraan Dinas		Tenggarong, Semua	` '	Tenggarong		
					Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jabatan yang Dipelihara dan		Kel/Desa				
					Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya						
	7 (01 01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas	5 Unit	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN Kecamatan	100.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
					Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Operasional atau Lapangan yang		Tenggarong, Semua		Tenggarong		
					Perizinan Kendaraan Dinas	Dipelihara dan dibayarkan Pajak		Kel/Desa				
	_			00	Operasional atau Lapangan	dan Perizinannya	1		2.11.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.			
	/ (01 01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan	1 Unit	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- ASN Kecamatan	100.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
					Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang		Tenggarong, Semua Kel/Desa		Tenggarong		
						Dipelihara/Direhabilitasi		Kel/Desa				
263	7 (01 02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	2. ingkat Aksesibilitas WIlayah -	100 Persen	13.050.000.000,00			9.050.000.000.00	KECAMATAN TENGGARONG
203	′ I '	01 02			PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Kecamatan	80 Persen	13.030.000.000,00			9.030.000.000,00	RECAIVIATAIN TEINGGAROING
					PUBLIK	1. Persentase Pelayanan Perijinan	or cisc.					
					- OSEIN	dan Non Perijinan yang di						
						laksanakan sesuai SOP						
	7 (01 02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan	Koordinasi Penyelenggaraan -	85 Persen	350.000.000,00	-	- Masyarakat -	350.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
					Kegiatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat				Kecamatan		
						Kecamatan				Tenggarong		
					Pemerintahan di Tingkat							
					Kecamatan							
	7 (01 02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	2 Laporan	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat Kecamatan	200.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
					dan Pelaksanaan Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Tenggarong, Semua		Tenggarong		
					Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi		Kel/Desa				
					Daeran dan instansi vertikai Terkait	Vertikal Terkait						
						Vertikal Terkale						
	7 (01 02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah Dokumen Peningkatan	1 Dokumen	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH) -	- Masyarakat Kecamatan	150,000,000,00	KECAMATAN TENGGARONG
					Pemerintahan di Tingkat	Efektifitas Kegiatan Pemerintahan		Tenggarong, Semua		Tenggarong		
					Kecamatan	di Tingkat Kecamatan		Kel/Desa		1 33 1 3		
	7 (01 02	2.02		Penyelenggaraan Urusan	Terlaksananya Penyelenggaraan -	85 Persen	100.000.000,00	-	- Masyarakat -	100.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
					Pemerintahan yang Tidak	Urusan Pemerintahan yang Tidak				Kecamatan		
					Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Dilaksanakan oleh Unit Kerja				Tenggarong		
					Perangkat Daerah yang Ada di	Perangkat Daerah yang Ada di						
					Kecamatan	Kecamatan						
	′ °	01 02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Jumlah Laporan Peningkatan	2 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Masyarakat Kecamatan	100.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
					Pelayanan kepada Masyarakat di	Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan		Tenggarong, Semua		Tenggarong		
					Wilayah Kecamatan	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kel/Desa				
-+	7 /	01 02	2 0/1		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Tercapainya Pelaksanaan Urusan -	85 Persen	12.600.000.000,00	<u> </u>	- Masyarakat -	8 600 000 000 00	KECAMATAN TENGGARONG
	. ,	- 02	2.04		yang Dilimpahkan kepada Camat	Pemerintahan yang Dilimpahkan	65 Feiseil	12.000.000,00	[- Kecamatan	5.000.000.000,00	TENGGARONG
					yong Dimipuman Kepada camat	kepada Camat				Tenggarong		
	7 (01 02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	2 Laporan	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat Kecamatan	200.000.000.00	KECAMATAN TENGGARONG
					yang terkait dengan Nonperizinan	Nonperizinan pada Urusan		Tenggarong, Semua	1 ' 1	Tenggarong		
						Pemerintahan		Kel/Desa				
	7 (01 02	2.04	0003		Jumlah Laporan Pelaksanaan	60 Laporan	12.400.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat Kecamatan	8.400.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
					yang Terkait dengan Kewenangan	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Tenggarong, Semua		Tenggarong		
			l		Lain yang Dilimpahkan			Kel/Desa				
				1		Persentase Lembaga -	100 5			1 I-	14 387 240 821 00	KECAMATAN TENGGARONG
264	7 (01 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN		100 Persen	14.387.240.821,00			24130712401022700	
264	7 (01 03			MASYARAKAT DESA DAN	Pemberdayaan Masyarakat	100 Persen	14.387.240.821,00			1435/1245/52/55	
			2.01		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif		·		Manusalat		
		01 03	2.01		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Terlaksananya Koordinasi Kegiatan -	100 Persen 90 Persen	14.387.240.821,00 75.000.000,00	-	- Masyarakat - Kecamatan		KECAMATAN TENGGARONG
			2.01		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif		·		- Masyarakat - Kecamatan Tenggarong		



7	0	01 03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	Masyarakat Kecamatan Tenggarong	75.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
7	0	01 03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan - Pemberdayaan Kelurahan	85 Persen	541.640.821,00		-	-	Masyarakat - Kecamatan Tenggarong	541.640.821,00	KECAMATAN TENGGARONG
7	0	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarak	atan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -		Masyarakat Kecamatan Tenggarong	50.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
7	0	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas, Ormas		Kab. Kutai Kartanegara, I Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	Masyarakat Kecamatan Tenggarong	491.640.821,00	KECAMATAN TENGGARONG
7	0	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	85 Persen	13.770.600.000,00		-	-	Masyarakat - Kecamatan Tenggarong	13.770.600.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
7	0	01 03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarak	atan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	Masyarakat Kecamatan Tenggarong	13.570.600.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
7	0	01 03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Lembaga Kemasyarak	atan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	Masyarakat Kecamatan Tenggarong	100.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
7	0	03	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	12 Unit		Kab. Kutai Kartanegara, I Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	Masyarakat Kecamatan Tenggarong	100.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
265 7	0	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi - ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100 Persen	175.000.000,00				-	175.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
7	0	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya - Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	85 Persen	175.000.000,00		-	-	Masyarakat - Kecamatan Tenggarong	175.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
7	0	01 04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	Masyarakat Kecamatan Tenggarong	50.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
7	0	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masvarakat	2 Laporan		Kab. Kutai Kartanegara, I Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	Masyarakat Kecamatan Tenggarong	125.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
266 7	0	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan - Pemerintahan Umum	100 Persen	195.000.000,00				-	195.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
7	0	1 05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	85 Persen	195.000.000,00		-	-	Masyarakat - Kecamatan Tenggarong	195.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
7	0	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	140 Orang		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	Masyarakat Kecamatan Tenggarong	180.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
7	0	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	·	Kab. Kutai Kartanegara, I Tenggarong, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	Masyarakat Kecamatan Tenggarong	15.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG



267	7	01 06	: 1		PROGRAM PEMBINAAN DAN	1. Persentase Desa Yang Memiliki -	100 Persen	25.000.000,00			25 000 000 00	KECAMATAN TENGGARONG
207	′	01 00	'		PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Predikat Penyelenggaraan Kinerja	100 Feiseil	25.000.000,00			23.000.000,00	RECAINATAIN TENGGARONG
					DESA	Pemerintahan Desa Dalam						
						Kategori Baik						
	7	04 05	2.04				05.0	25.000.000,00	+		25 000 000 00	WEGANATAN TENGGARANG
	′	01 06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan	Terlaksananya Fasilitasi,	85 Persen	25.000.000,00		- Masyarakat	- 25.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
					Koordinasi	Rekomendasi dan				Kecamatan		
					Dambiasas das Dansassas	KoordinasiPembinaan dan				Tenggarong		
					Pembinaan dan Pengawasan	Pengawasan Pemerintahan Desa						
			_		Pemerintahan Desa							
	7	01 06	2.01	0017		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	2 Laporan	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Masyarakat Keca	matan 25.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
					Wilayahnya	Pendampingan Desa di Wilayahnya		Tenggarong, Semua		Tenggarong		
								Kel/Desa				
					Kelurahan Jahab			1.865.000.000,00				KELURAHAN JAHAB
	7				UNSUR KEWILAYAHAN			1.865.000.000,00				KELURAHAN JAHAB
	7				KECAMATAN			1.865.000.000,00				KELURAHAN JAHAB
268	7	01 01	L		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	70 Nilai	35.000.000,00			- 35.000.000,00	KELURAHAN JAHAB
					PEMERINTAHAN DAERAH							
					KABUPATEN/KOTA							
	7	01 01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Terlaksananya Administrasi Umum -	95 Persen	25.000.000,00		- ASN Kelurahan	ahab - 25.000.000,00	KELURAHAN JAHAB
					Daerah	Perangkat Dareah						
	7	01 01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	1 Paket	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	- ASN Kelurahan	ahab 10.000.000,00	KELURAHAN JAHAB
					Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang		Tenggarong, Jahab	, ,		· ·	
						Disediakan		1				
	7	01 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1 Paket	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASII (DBH)	- ASN Kelurahan	ahah 15,000,000,00	KELURAHAN JAHAB
	·		2.50	0004	,	yang Disediakan	2 . sixet	Tenggarong, Jahab	(DDI)	ASIVICIOI dilair	13.000.000,00	
						yang bisculakan		Teliggal olig, Janab				
-	7	01 01	2.00		Damaliharaan Barana Milili Daarah	Taylakaananya Dawalihayaan	85 Persen	10.000.000,00	†	ASN Kelurahan	ahah 10,000,000,00	KELURAHAN JAHAB
	′	01 01	2.05		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	os reiseii	10.000.000,00		- ASIA Kelul allali	aliab - 10.000.000,00	KELOKAHAN JAHAB
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah						
-	-	04 04	2.00	0002			4.11-5	40 000 000 00 1/-1-1/-1-1/	DAMA DA CUMACII (DDIII)	A CALIFE Lands of	-1-1-	KELLIDALIANIAN
	7	01 01	2.09	0002	,	Jumlah Kendaraan Dinas	1 Unit	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	- ASN Kelurahan	anab 10.000.000,00	KELURAHAN JAHAB
					Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Operasional atau Lapangan yang		Tenggarong, Jahab				
					Perizinan Kendaraan Dinas	Dipelihara dan dibayarkan Pajak						
			_		Operasional atau Lapangan	dan Perizinannya						
269	7	01 03	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Lembaga -	100 Persen	1.830.000.000,00			- 1.830.000.000,00	KELURAHAN JAHAB
					MASYARAKAT DESA DAN	Pemberdayaan Masyarakat						
					KELURAHAN	Desa/Kelurahan yang Aktif						
	7	01 03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan -	85 Persen	730.000.000,00		- Masyarakat Kel	rahan - 730.000.000,00	KELURAHAN JAHAB
						Pemberdayaan Kelurahan				Jahab		
	7	01 03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Masyarakat Kelu	ahan 10.000.000,00	KELURAHAN JAHAB
					dalam Forum Musyawarah	yang Berpartisipasi dalam Forum	Kemasyarakatan	Tenggarong, Jahab		Jahab		
					Perencanaan Pembangunan di	Musyawarah Perencanaan						
					Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan						
	7	01 03	3 2.02	0002	Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	3 Unit	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Masyarakat Kelu	rahan 450.000.000,00	KELURAHAN JAHAB
					Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun		Tenggarong, Jahab		Jahab		
						, , ,						
	7	01 03	3 2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	1 Pokmas /	270.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Masyarakat Kelu	rahan 270.000.000.00	KELURAHAN JAHAB
	- 1	1	1	1	Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan	Ormas	Tenggarong, Jahab	. , ,	Jahab		1
	J		1	1		Masyarakat di Kelurahan				30.100		1
	7	01 03	2 02	+	Pemberdayaan Lembaga	Terlaksananya Pemberdayaan -	85 Persen	1.100.000.000,00		- Masyarakat Keli	rahan - 1 100 000 000 00	KELURAHAN JAHAB
1 1	٠ ا	52 53	2.03	1	Kemasyarakatan Tingkat	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	os reisell	1.120.000.000,000		Jahab	1.150.000.000,00	
	J		1	1	Kecamatan	Kecamatan		1		Janau		1
\vdash	7	01 03	3 202	0001		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	22 Lembaga	1.100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASII /DDI!\	Masyarakat Kelu	ahan 1 100 000 000 00	KELURAHAN JAHAB
	- '	01 03	2.03	0001	Kemasyarakatan		Kemasyarakatan		DAINA BAGI HASIL (DBH)	Jahab	1.100.000.000,00	RECORMININIATIAD
	J		1	1	nemasydidkdldii	yang Diselenggarakan	kemasyarakatan	Tenggarong, Jahab		Janab		1
\vdash	 -}		+	+	Kelurahan Sukarame		L J	1.401.926.000.00	1		1 401 026 000 00	KELURAHAN SUKARAME
+	7		+	+	UNSUR KEWILAYAHAN			1.401.926.000,00	T			KELURAHAN SUKARAME
	7	01	+	+	KECAMATAN			1.401.926.000,00	+			KELURAHAN SUKARAME
			+	+		Nilei CAVID Devendent Desv	70 4/1-1	41.926.000,00	 			KELURAHAN SUKARAME
2/0	7	01 01	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	70 Nilai	41.926.000,00			- 41.926.000,00	KELUKAHAN SUKAKAME
	- 1			1	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1				İ
\vdash	_+	04 -		+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Todalisassas Administrativ		25 025 000 22	 		*********	WELLINALIAN CONTRACT
1 1	7	01 01	2.06	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum -	95 Persen	26.926.000,00		- ASN Kelurahan	- 26.926.000,00	KELURAHAN SUKARAME
\vdash	+		+	+		Perangkat Dareah				Sukarame	+	+
	7	01 01	2.06	0002		Jumlah Paket Peralatan dan	1 Paket	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	- ASN Kelurahan	10.000.000,00	KELURAHAN SUKARAME
1 1	J		1	1	Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang		Tenggarong, Sukarame		Sukarame		1
1 1	J		1	1		Disediakan						1
	7	01 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1 Paket	6.926.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	ASN Kelurahan	6.926.000,00	KELURAHAN SUKARAME
	- 1			1	1	yang Disediakan		Tenggarong, Sukarame	' '	Sukarame		İ
1 1	J		1	1		[]						1
1 1	- 1			1				1	1		1 1	1
				-	1	1	L L	I				ı



7	7 01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	1 Laporan	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN Kelurahan	10.000.000,00	KELURAHAN SUKARAME
					dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tenggarong, Sukarame		Sukarame		
						SKPD						
7	7 01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah		85 Persen	15.000.000,00	-	- ASN Kelurahan -	15.000.000,00	KELURAHAN SUKARAME
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Sukarame		
7	7 01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas	1 Unit	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN Kelurahan	15.000.000,00	KELURAHAN SUKARAME
					Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Operasional atau Lapangan yang		Tenggarong, Sukarame		Sukarame		
					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						
271 7	7 01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Lembaga -	100 Persen	1.360.000.000,00		-	1.360.000.000,00	KELURAHAN SUKARAME
					MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif						
7	7 01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan -	85 Persen	620.000.000,00	-	- Masyarakat Kelurahan -	620.000.000,00	KELURAHAN SUKARAME
						Pemberdayaan Kelurahan				Sukarame		
7	7 01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	1 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Masyarakat Kelurahan Sukarame	20.000.000,00	KELURAHAN SUKARAME
					Perencanaan Pembangunan di	Musyawarah Perencanaan	incinasyarandan	renggarong, salarame		Salarane		
					Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan						
7	7 01	. 03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	3 Unit	425.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat Kelurahan	425,000,000,00	KELURAHAN SUKARAME
					Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun		Tenggarong, Sukarame		Sukarame		
7	7 01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	1 Pokmas /	175.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat Kelurahan	175.000.000,00	KELURAHAN SUKARAME
					Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan	Ormas	Tenggarong, Sukarame		Sukarame		
						Masyarakat di Kelurahan						
7	7 01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga	Terlaksananya Pemberdayaan -	85 Persen	740.000.000,00	-	- Masyarakat Kelurahan -	740.000.000,00	KELURAHAN SUKARAME
					Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				Sukarame		
7	7 01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga	650.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat Kelurahan	650.000.000,00	KELURAHAN SUKARAME
					Kemasyarakatan	yang Diselenggarakan	Kemasyarakatan	Tenggarong, Sukarame		Sukarame		
7	7 01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga	90.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat Kelurahan	90.000.000,00	KELURAHAN SUKARAME
					Kemasyarakatan	yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kemasyarakatan	Tenggarong, Sukarame		Sukarame		
					Kelurahan Loa Ipuh Darat			1.430.275.000,00		·	1.430.275.000,00	KELURAHAN LOA IPUH
7	,				UNSUR KEWILAYAHAN			1.430.275.000,00	T T		1.430.275.000,00	DARAT KELURAHAN LOA IPUH
	<u> </u>							1.430.273.000,00				DARAT
7	7 01	ı			KECAMATAN			1.430.275.000,00			1.430.275.000,00	KELURAHAN LOA IPUH DARAT
272 7	7 01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	70 Nilai	20.275.000,00		-	20.275.000,00	
					PEMERINTAHAN DAERAH							DARAT
7	7 01	01	2.06		KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Terlaksananya Administrasi Umum -	95 Persen	10.000.000,00		- ASN Kelurahan Loa -	10.000.000,00	KELURAHAN LOA IPUH
′	, 0,	01	2.00		Daerah	Perangkat Dareah	33 Feisell	10.000.000,00	-	Ipuh Darat	10.000.000,00	DARAT
7	7 01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	1 Paket	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN Kelurahan Loa	10.000.000,00	KELURAHAN LOA IPUH
					Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Tenggarong, Loa Ipuh Darat		Ipuh Darat		DARAT
7	7 01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	85 Persen	10.275.000,00	-	- ASN Kelurahan Loa - Ipuh Darat	10.275.000,00	KELURAHAN LOA IPUH DARAT
					Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah				ipun barat		DARAT
7	7 01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas	1 Unit	10.275.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN Kelurahan Loa	10.275.000,00	KELURAHAN LOA IPUH
					Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak		Tenggarong, Loa Ipuh Darat		lpuh Darat		DARAT
					Operasional atau Lapangan	dan Perizinannya						
273 7	7 01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Lembaga -	100 Persen	1.410.000.000,00		-	1.410.000.000,00	
					MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif						DARAT
7	7 01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan -	85 Persen	710.000.000,00	-	- Masyarakat Kelurahan -	710.000.000,00	KELURAHAN LOA IPUH
						Pemberdayaan Kelurahan				Loa Ipuh Darat		DARAT
				•	1	I		45.000.000	5 1 1 1 5 1 6 1 1 1 6 1 1 1 6 1 1 1 1 1	Managed at Malandara	15 000 000 00	KELURAHAN LOA IPUH
7	7 01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat Kelurahan	13.000.000,00	KELUKAHAN LUA IPUH
7	7 01	03	2.02	0001	dalam Forum Musyawarah	yang Berpartisipasi dalam Forum	1 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh	DANA BAGI HASIL (DBH)	Loa Ipuh Darat	13.000.000,00	DARAT
7	7 01	03	2.02	0001					DANA BAGI HASIL (DBH)		13.000.000,00	



7	01 0	3 2.02	0002	Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	3 Unit	425.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat Kelurahan	425.000.000,00	KELURAHAN LOA IPUH
				Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun		Tenggarong, Loa Ipuh		Loa Ipuh Darat		DARAT
							Darat				
7	01 0	3 2.02	0003	,	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	1 Pokmas /	270.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	, DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat Kelurahan	270.000.000,00	KELURAHAN LOA IPUH DARAT
				Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas	Tenggarong, Loa Ipuh Darat		Loa Ipuh Darat		DAKAT
					Wasyarakat di Kelarahan		barat				
7	01 0	3 2.03		Pemberdayaan Lembaga	Terlaksananya Pemberdayaan -	85 Persen	700.000.000,00	-	- Masyarakat Kelurahan -	700.000.000,00	KELURAHAN LOA IPUH
				Kemasyarakatan Tingkat	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat				Loa Ipuh Darat		DARAT
				Kecamatan	Kecamatan						
7	01 0	3 2.03	0001		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga	700.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	, DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat Kelurahan	700.000.000,00	
				Kemasyarakatan	yang Diselenggarakan	Kemasyarakatan	Tenggarong, Loa Ipuh Darat		Loa Ipuh Darat		DARAT
							Dalat				
				Kelurahan Melayu	<u> </u>	'	3.070.000.000,00	<u> </u>	<u> </u>		KELURAHAN MELAYU
7				UNSUR KEWILAYAHAN			3.070.000.000,00				KELURAHAN MELAYU
	01	_		KECAMATAN			3.070.000.000,00				KELURAHAN MELAYU
274 7	01 0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	70 Nilai	10.000.000,00		-	10.000.000,00	KELURAHAN MELAYU
				PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
7	01 0	1 2.06		Administrasi Umum Perangkat	Terlaksananya Administrasi Umum -	95 Persen	10.000.000,00	-	- ASN Kelurahan Melayu -	10.000.000.00	KELURAHAN MELAYU
	-			Daerah	Perangkat Dareah						
7	01 0	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	1 Paket	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN Kelurahan Melayu	10.000.000,00	KELURAHAN MELAYU
				Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang		Tenggarong, Melayu				ĺ
-	101	_	-		Disediakan	400 0	2 050 000 000 00			2 000 000	WELLIDAMAN AND COM
7 7	01 0	³		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Persentase Lembaga - Pemberdayaan Masyarakat	100 Persen	3.060.000.000,00			3.060.000.000,00	KELURAHAN MELAYU
				KELURAHAN	Desa/Kelurahan yang Aktif						
7	01 0	3 2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan -	85 Persen	710.000.000,00	-	- Masyarakat Kelurahan -	710.000.000,00	KELURAHAN MELAYU
					Pemberdayaan Kelurahan				Melayu		
7	01 0	3 2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	, DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat Kelurahan	30.000.000,00	KELURAHAN MELAYU
				dalam Forum Musyawarah	yang Berpartisipasi dalam Forum	Kemasyarakatan	Tenggarong, Melayu		Melayu		
				Perencanaan Pembangunan di	Musyawarah Perencanaan						
				Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan						
7	01 0	3 2.02	0002	Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	3 Unit	425.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH) -	- Masyarakat Kelurahan	425,000,000,00	KELURAHAN MELAYU
'	01 0	2.02	0002	Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun	3 Gine	Tenggarong, Melayu	, SALVESTON SIZE (SSAL)	Melayu	423.000.000,00	RECOID WITH WILD TO
					7-1-8 1-1-1-8		141.66=141.6,111=1				
7	01 0	3 2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	1 Pokmas /	255.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	, DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat Kelurahan	255.000.000,00	KELURAHAN MELAYU
				Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan	Ormas	Tenggarong, Melayu		Melayu		
					Masyarakat di Kelurahan						
'	01 0	3 2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Terlaksananya Pemberdayaan -	85 Persen	2.350.000.000,00	-	- Masyarakat Kelurahan - Melayu	2.350.000.000,00	KELURAHAN MELAYU
				Kecamatan	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				Ivielayu		
7	01 0	3 2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	47 Lembaga	2.350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat Kelurahan	2.350.000.000,00	KELURAHAN MELAYU
				Kemasyarakatan	yang Diselenggarakan	Kemasyarakatan	Tenggarong, Melayu		Melayu		
7		_		Kelurahan Bukit Biru UNSUR KEWILAYAHAN			2.075.000.000,00 2.075.000.000,00				KELURAHAN BUKIT BIRU KELURAHAN BUKIT BIRU
7	01	-		KECAMATAN			2.075.000.000,00				KELURAHAN BUKIT BIRU
	01 0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	70 Nilai	65.000.000,00			<u> </u>	KELURAHAN BUKIT BIRU
	1 1			PEMERINTAHAN DAERAH	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
				KABUPATEN/KOTA							
7	01 0	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Terlaksananya Administrasi Umum -	95 Persen	35.000.000,00	-	- ASN Kelurahan Bukit -	35.000.000,00	KELURAHAN BUKIT BIRU
7				Daerah	Perangkat Dareah			2444	Biru	40.000.000.00	
/	01 0	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1 Paket	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru	, DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN Kelurahan Bukit	10.000.000,00	KELURAHAN BUKIT BIRU
				renengkapan kantoi	Disediakan		Teliggarolig, Bukit Biru		Bild		
7				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1 Paket	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	, DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN Kelurahan Bukit	15.000.000,00	KELURAHAN BUKIT BIRU
	01 0	2.06	0004		yang Disediakan		Tenggarong, Bukit Biru		Biru		ĺ
'	01 0	1 2.06	0004								
	01 0	1 2.06	0004		,,-,						
				Donald and a second 2 1/2 2		110000	10,000,000,00	DANA PAGLHASII (DDH)	ACALVAL TO THE STATE OF THE STA	10,000,000,00	VELLIDALIAN BUILT OO
7	01 0			. /	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	1 Laporan	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- ASN Kelurahan Bukit	10.000.000,00	KELURAHAN BUKIT BIRU
7				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Laporan	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru	DANA BAGI HASIL (DBH)	- ASN Kelurahan Bukit Biru	10.000.000,00	KELURAHAN BUKIT BIRU
7				. /	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	1 Laporan		, DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN Kelurahan Bukit Biru	10.000.000,00	KELURAHAN BUKIT BIRI
7		1 2.06	0009	. /	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Pemeliharaan -	1 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN Kelurahan Bukit Biru - ASN Kelurahan Bukit -	·	
7	01 0	1 2.06	0009	dan Konsultasi SKPD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		Tenggarong, Bukit Biru	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Biru	·	
7	01 0	1 2.06 1 2.09	0009	dan Konsultasi SKPD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85 Persen	Tenggarong, Bukit Biru 30.000.000,00		Biru - ASN Kelurahan Bukit - Biru	30,000,000,00	KELURAHAN BUKIT BIRI
7 7 7	01 0	1 2.06 1 2.09	0009	dan Konsultasi SKPD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas		Tenggarong, Bukit Biru 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Biru	30,000,000,00	KELURAHAN BUKIT BIRI
7	01 0	1 2.06 1 2.09	0009	dan Konsultasi SKPD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85 Persen	Tenggarong, Bukit Biru 30.000.000,00		Biru - ASN Kelurahan Bukit - Biru	30,000,000,00	KELURAHAN BUKIT BIRU KELURAHAN BUKIT BIRU KELURAHAN BUKIT BIRU



PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Lembaga -	100 Persen	2.010.000.000,00		-	2.010.000.000,00	KELURAHAN BUKIT BIRU
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	emberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif						
	eraksananya Kegiatan emberdayaan Kelurahan	85 Persen	710.000.000,00	-	- Masyarakat Kelurahan - Bukit Biru	710.000.000,00	KELURAHAN BUKIT BIRU
Peningkatan Partisipasi Masyarakat	umlah Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat Kelurahan	30.000.000,00	KELURAHAN BUKIT BIRU
	ang Berpartisipasi dalam Forum	Kemasyarakatan	Tenggarong, Bukit Biru	, ,	Bukit Biru		
	Ausyawarah Perencanaan						
Kelurahan	embangunan di Kelurahan						
Pembangunan Sarana dan J	umlah Sarana dan Prasarana	3 Unit	425.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat Kelurahan	425.000.000.00	KELURAHAN BUKIT BIRU
	Celurahan yang Terbangun		Tenggarong, Bukit Biru	, ,	Bukit Biru		
Pemberdayaan Masyarakat di J	umlah Pokmas dan Ormas yang	1 Pokmas /	255.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat Kelurahan	255,000,000,00	KELURAHAN BUKIT BIRU
	Melaksanakan Pemberdayaan	Ormas	Tenggarong, Bukit Biru	, ,	Bukit Biru		
ı	Masyarakat di Kelurahan						
Pemberdayaan Lembaga	erlaksananya Pemberdayaan -	85 Persen	1.300.000.000,00	-	- Masyarakat Kelurahan -	1.300.000.000.00	KELURAHAN BUKIT BIRU
Kemasyarakatan Tingkat	embaga Kemasyarakatan Tingkat				Bukit Biru		
	Gecamatan						
Penyelenggaraan Lembaga	umlah Lembaga Kemasyarakatan	26 Lembaga	1.300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat Kelurahan	1.300.000.000,00	KELURAHAN BUKIT BIRU
Kemasyarakatan	ang Diselenggarakan	Kemasyarakatan	Tenggarong, Bukit Biru		Bukit Biru		
Kelurahan Loa Tebu UNSUR KEWILAYAHAN			1.780.000.000,00 1.780.000.000,00				KELURAHAN LOA TEBU KELURAHAN LOA TEBU
KECAMATAN			1.780.000.000,00				KELURAHAN LOA TEBU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	lilai SAKIP Perangkat Daerah -	70 Nilai	20.000.000,00		-		KELURAHAN LOA TEBU
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Administrasi Umum Perangkat Daerah	erlaksananya Administrasi Umum - Perangkat Dareah	95 Persen	20.000.000,00	-	- ASN Kelurahan Loa - Tebu	20.000.000,00	KELURAHAN LOA TEBU
	umlah Paket Peralatan dan	1 Paket	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN Kelurahan Loa	10.000.000.00	KELURAHAN LOA TEBU
	Perlengkapan Kantor yang		Tenggarong, Loa Tebu		Tebu		
	Disediakan						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	umlah Laporan Penyelenggaraan	1 Laporan	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH) -	- ASN Kelurahan Loa	10.000.000.00	KELURAHAN LOA TEBU
	tapat Koordinasi dan Konsultasi		Tenggarong, Loa Tebu		Tebu		
	KPD						
PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Lembaga -	100 Persen	1.760.000.000,00			1 760 000 000 00	KELURAHAN LOA TEBU
MASYARAKAT DESA DAN	emberdayaan Masyarakat	100 reisen	1.700.000.000,00			1.700.000.000,00	KELOKAHAN LOA 1EBO
KELURAHAN I	Desa/Kelurahan yang Aktif						
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	erlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	85 Persen	710.000.000,00	-	- Masyarakat Kelurahan - Loa Tebu	710.000.000,00	KELURAHAN LOA TEBU
Peningkatan Partisipasi Masyarakat	umlah Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat Kelurahan	15.000.000.00	KELURAHAN LOA TEBU
dalam Forum Musyawarah	ang Berpartisipasi dalam Forum	Kemasyarakatan	Tenggarong, Loa Tebu	, ,	Loa Tebu		
	Ausyawarah Perencanaan						
Kelurahan	embangunan di Kelurahan						
Pembangunan Sarana dan	umlah Sarana dan Prasarana	3 Unit	425.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat Kelurahan	425.000.000,00	KELURAHAN LOA TEBU
	Celurahan yang Terbangun		Tenggarong, Loa Tebu	, ,	Loa Tebu		
Pemberdayaan Masyarakat di	umlah Pokmas dan Ormas yang	1 Pokmas /	270.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- Masyarakat Kelurahan	270,000,000,00	KELURAHAN LOA TEBU
	Melaksanakan Pemberdayaan	Ormas	Tenggarong, Loa Tebu	DANA DAGITIASIE (DBIT)	Loa Tebu	270.000.000,00	KEEDIKAHAN EGA TEBO
	Masyarakat di Kelurahan		,				
Pemberdayaan Lembaga 1	erlaksananya Pemberdayaan -	OF Davison	1.050.000.000,00		- Masyarakat Kelurahan -	1 050 000 000 00	KELURAHAN LOA TEBU
Kemasyarakatan Tingkat	embaga Kemasyarakatan Tingkat	85 Persen	1.050.000.000,00	-	Loa Tebu	1.050.000.000,00	KELUKAHAN LUA TEBU
Kecamatan I	ecamatan						
Penyelenggaraan Lembaga	umlah Lembaga Kemasyarakatan	21 Lembaga	1.050.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat Kelurahan	1.050.000.000,00	KELURAHAN LOA TEBU
Kemasyarakatan	ang Diselenggarakan	Kemasyarakatan	Tenggarong, Loa Tebu		Loa Tebu		
						<u> </u>	
Kelurahan Panji			1.659.253.000,00			1.659.253.000,00	KELURAHAN PANJI
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN			1.659.253.000,00 1.659.253.000,00				KELURAHAN PANJI KELURAHAN PANJI
	Jilai SAKIP Perangkat Daerah	70 Nilai	39.253.000,00				
PEMERINTAHAN DAERAH	- Congress success	, o rendi	33.233.333,03]		33.233.000,00	
KABUPATEN/KOTA		1 10-5	22 252 202 20				WELLINAMAN TOTAL
		95 Persen	32.253.000,00	-	- ASN Kelurahan Panji -	32.253.000,00	KELUKAHAN PANJI
PEMERINTAHA KABUPATEN/K Administrasi U	AN DAERAH OTA mum Perangkat T	AN DAERAH OTA	ND DAERAH 0074 A 074 A 075 A 075 A 076 A 077 A 0	ND DAERAH OOT	NN DAERAH OOT	ND DAERAH OTT AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	ND DAERAH OTTA OTTA mum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum - 95 Persen 32.253.000,00 ASN Kelurahan Panji - 32.253.000,00



7	01	1 01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Pak	et	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH)	- ASN Kelurahan Pa	nji 10.000.000,00	KELURAHAN PANJI
7	01	1 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Pak	et	12.253.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH)	ASN Kelurahan Pa	nji 12.253.000,00	KELURAHAN PANJI
7	01	1 01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	ioran	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH)	ASN Kelurahan Pa	nji 10.000.000,00	KELURAHAN PANJI
7	01	1 01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan - Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85 Pe	ersen	7.000.000,00		ASN Kelurahan Pa	nji - 7.000.000,00	KELURAHAN PANJI
7	01	1 01	2.09	0002		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Uni	it	7.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH)	- ASN Kelurahan Pa	iji 7.000.000,00	KELURAHAN PANJI
281 7	01	1 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga - Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	100 1	Persen	1.620.000.000,00			- 1.620.000.000,00	KELURAHAN PANJI
7	01	1 03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		85 Pe	ersen	655.000.000,00		- Masyarakat Kelur Panji	ahan - 655.000.000,00	KELURAHAN PANJI
7	01	1 03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		nbaga Isyarakatan	40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Masyarakat Kelura Panji	han 40.000.000,00	KELURAHAN PANJI
7	01	1 03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Uni	it	425.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Masyarakat Kelura Panji	han 425.000.000,00	KELURAHAN PANJI
7	0:	1 03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pok Orma		190.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH)	Masyarakat Kelura Panji	han 190.000.000,00	KELURAHAN PANJI
7	01	1 03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan - Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	85 Pe	ersen	965.000.000,00		Masyarakat Kelur. Panji	han - 965.000.000,00	KELURAHAN PANJI
7	01	1 03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		embaga Isyarakatan	950.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH)	Masyarakat Kelura Panji	han 950.000.000,00	KELURAHAN PANJI
7	01	1 03	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang	1 Uni	it	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	DANA BAGI HASIL (DBH)	Masyarakat Kelura Panji	nan 15.000.000,00	KELURAHAN PANJI
					Kelurahan Mangkurawang	Disediakan			1.720.000.000,00		L	1.720.000.000,00) KELURAHAN MANGKURAWANG
7	·				UNSUR KEWILAYAHAN				1.720.000.000,00			1.720.000.000,00	
7	01	1			KECAMATAN				1.720.000.000,00			1.720.000.000,00	KELURAHAN MANGKURAWANG
282 7	01	1 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	70 Ni	ilai	10.000.000,00			- 10.000.000,00	KELURAHAN MANGKURAWANG
7	01	1 01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum - Perangkat Dareah	95 Pe	ersen	10.000.000,00		- ASN Kelurahan Mangkurawang	- 10.000.000,00	KELURAHAN MANGKURAWANG
7	01	1 01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Pak	eet	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang	DANA BAGI HASIL (DBH)	- ASN Kelurahan Mangkurawang	10.000.000,00	KELURAHAN MANGKURAWANG
283 7	01	1 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	100 1	Persen	1.710.000.000,00			- 1.710.000.000,00) KELURAHAN MANGKURAWANG
7	01	1 03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		5 Ke _l 85 Pe		710.000.000,00		- Masyarakat Kelur Mangkurawang	han - 710.000.000,00	KELURAHAN MANGKURAWANG
7	01	1 03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Uni	t	440.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Masyarakat Kelura Mangkurawang	han 440.000.000,00	KELURAHAN MANGKURAWANG
7	' 0:	1 03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pok Orma	xmas /	270.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Masyarakat Kelura Mangkurawang	270.000.000,00	KELURAHAN MANGKURAWANG
7	01	1 03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	85 Pe	ersen	1.000.000.000,00		- Masyarakat Kelur Mangkurawang	han - 1.000.000.000,00	KELURAHAN MANGKURAWANG



7	7 01	1 03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga	1.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- Masyarakat Kelurahan	1.000.000.000,00	KELURAHAN
ı l'	"	1 03	2.03	0001	Kemasyarakatan	yang Diselenggarakan	Kemasyarakatan	Tenggarong,	DANA DAGITIASIE (DBII)	Mangkurawang	1.000.000.000,00	MANGKURAWANG
					Kemasyarakatan	yang Discienggarakan	ikemasyai akatan	Mangkurawang		wangkarawang		WANGKONAWANG
								Than grand wang				
					Kelurahan Timbau		<u>'</u>	2.545.000.000,00				KELURAHAN TIMBAU
7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.545.000.000,00				KELURAHAN TIMBAU
7	7 01	1			KECAMATAN			2.545.000.000,00			2.545.000.000,00	KELURAHAN TIMBAU
284 7	7 01	1 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	70 Nilai	35.000.000,00		-	35.000.000,00	KELURAHAN TIMBAU
					PEMERINTAHAN DAERAH							
					KABUPATEN/KOTA							
7	7 01	1 01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Terlaksananya Administrasi Umum -	95 Persen	35.000.000,00	-	- ASN Kelurahan Timbau -	35.000.000,00	KELURAHAN TIMBAU
					Daerah	Perangkat Dareah						
7	7 01	1 01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	1 Paket	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN Kelurahan Timbau	10.000.000,00	KELURAHAN TIMBAU
					Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang		Tenggarong, Timbau				
						Disediakan						
ı 17	01	1 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1 Paket	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN Kelurahan Timbau	25.000.000,00	KELURAHAN TIMBAU
						yang Disediakan		Tenggarong, Timbau				
285 7	, 01	1 02			PROGRAM PEMBERDAYAAN	Downstern Lowborn	100 Parray	2.510.000.000,00			3 510 000 000 00	KELURAHAN TIMBAU
200 /	01	1 03			MASYARAKAT DESA DAN	Persentase Lembaga - Pemberdayaan Masyarakat	100 Persen	2.510.000.000,00			2.510.000.000,00	KELUKAHAN HIVIDAU
					KELURAHAN	Desa/Kelurahan yang Aktif						
	7 01	1 03	2 02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		85 Persen	710.000.000,00	-	- Masyarakat Kelurahan -	710 000 000 00	KELURAHAN TIMBAU
. '	"	_ 00			regiotali i eliliberadyddii itelaralian	Pemberdayaan Kelurahan	l sa reisen	710.000.000,00		Timbau	71010001000,00	NELOTO II PILE TIMBAO
7	7 01	1 03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga	17.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat Kelurahan	17.000.000.00	KELURAHAN TIMBAU
					dalam Forum Musyawarah	yang Berpartisipasi dalam Forum	Kemasyarakatan	Tenggarong, Timbau	, ,	Timbau		
					Perencanaan Pembangunan di	Musyawarah Perencanaan		30.				
					Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan						
7	7 01	1 03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	3 Unit	425.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat Kelurahan	425.000.000,00	KELURAHAN TIMBAU
					Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun		Tenggarong, Timbau		Timbau		
7	7 01	1 03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	1 Pokmas /	268.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat Kelurahan	268.000.000,00	KELURAHAN TIMBAU
					Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan	Ormas	Tenggarong, Timbau		Timbau		
$\leftarrow \perp$						Masyarakat di Kelurahan						
, 7	01	1 03	2.03		Pemberdayaan Lembaga	Terlaksananya Pemberdayaan -	85 Persen	1.800.000.000,00	-	- Masyarakat Kelurahan -	1.800.000.000,00	KELURAHAN TIMBAU
					Kemasyarakatan Tingkat	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat				Timbau		
-					Kecamatan	Kecamatan						
, 7	7 01	1 03	2.03	0001		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	36 Lembaga	1.800.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat Kelurahan	1.800.000.000,00	KELURAHAN TIMBAU
					Kemasyarakatan	yang Diselenggarakan	Kemasyarakatan	Tenggarong, Timbau		Timbau		
\leftarrow		-			Kelurahan Baru			1.645.000.000,00			1 645 000 000 00	KELURAHAN BARU
	,				UNSUR KEWILAYAHAN			1.645.000.000,00	I I			KELURAHAN BARU
	7 01	1			KECAMATAN			1.645.000.000,00				KELURAHAN BARU
286 7	7 01	1 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	70 Nilai	35.000.000,00		-	35.000.000,00	KELURAHAN BARU
					PEMERINTAHAN DAERAH						•	
					KABUPATEN/KOTA							
7	7 01	1 01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Terlaksananya Administrasi Umum -	95 Persen	25.000.000,00	-	- ASN Kelurahan Baru -	25.000.000,00	KELURAHAN BARU
					Daerah	Perangkat Dareah						
7	7 01	1 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1 Paket	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN Kelurahan Baru	25.000.000,00	KELURAHAN BARU
						yang Disediakan		Tenggarong, Kampung				
								Baru				
$-\!\!\!-\!\!\!\!+$	_				1					1	I	
, 7							- 			1		
, 1	01	1 01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah		85 Persen	10.000.000,00	-	- ASN Kelurahan Baru -	10.000.000,00	KELURAHAN BARU
¹	01	1 01	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan	Barang Milik Daerah Penunjang	85 Persen	10.000.000,00	-	- ASN Kelurahan Baru -	10.000.000,00	KELURAHAN BARU
·				0000	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			- DAMA DAGUMEN (ORM)		,	
7	7 01			0002	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas	85 Persen 1 Unit	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- ASN Kelurahan Baru - ASN Kelurahan Baru	,	KELURAHAN BARU KELURAHAN BARU
7				0002	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang		10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung	DANA BAGI HASIL (DBH)		,	
7				0002	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak		10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -		,	
7	7 01	1 01		0002	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)		10.000.000,00	KELURAHAN BARU
287 7		1 01		0002	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PROGRAM PEMBERDAYAAN	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya		10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung	DANA BAGI HASIL (DBH) -		10.000.000,00	
287 7	7 01	1 01		0002	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Persentase Lembaga - Pemberdayaan Masyarakat	1 Unit	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH) -		10.000.000,00	KELURAHAN BARU
287 7	7 01	1 01	2.09	0002	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desay/Kelurahan yang Aktif	1 Unit	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	- ASN Kelurahan Baru	10.000.000,00	KELURAHAN BARU KELURAHAN BARU
	7 01	1 01	2.09	0002	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Persentase Lembaga - Pemberdayaan Masyarakat	1 Unit 100 Persen	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH) -		10.000.000,00	KELURAHAN BARU KELURAHAN BARU
	7 01 7 01 7 01	1 01 1 03 1 03	2.09	0002	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Terlaksananya Kegiatan -	1 Unit 100 Persen	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	-	- ASN Kelurahan Baru	10.000.000,00	KELURAHAN BARU KELURAHAN BARU
7	7 01 7 01 7 01	1 01 1 03 1 03	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Persentase Lembaga - Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan	1 Unit 100 Persen 85 Persen	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru 1.610.000.000,00	-	- ASN Kelurahan Baru	1.610.000.000,00	KELURAHAN BARU KELURAHAN BARU KELURAHAN BARU
7	7 01 7 01 7 01	1 01 1 03 1 03	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEURAHAM Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	1 Unit 100 Persen 85 Persen 1 Lembaga	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru 1.610.000.000,00 500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	-	- ASN Kelurahan Baru - Masyarakat Kelurahan - Baru - Masyarakat Kelurahan - Masyarakat Kelurahan	1.610.000.000,00 500.000.000,00	KELURAHAN BARU KELURAHAN BARU KELURAHAN BARU
7	7 01 7 01 7 01	1 01 1 03 1 03	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Persentase Lembaga - Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	1 Unit 100 Persen 85 Persen 1 Lembaga	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru 1.610.000.000,00 500.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung	-	- ASN Kelurahan Baru - Masyarakat Kelurahan - Baru - Masyarakat Kelurahan - Masyarakat Kelurahan	1.610.000.000,00 500.000.000,00	KELURAHAN BARU KELURAHAN BARU KELURAHAN BARU
7	7 01 7 01 7 01 7 01	1 01 1 03 1 03 1 03 1 03	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bajak dan Periziana Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PROGRAM PEMBERDAYAAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Persentase Lembaga - Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Terlaksananya Kegiatan - Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	1 Unit 100 Persen 85 Persen 1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru 1.610.000.000,00 500.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	- DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN Kelurahan Baru - Masyarakat Kelurahan - Baru - Masyarakat Kelurahan - Masyarakat Kelurahan	1.610.000.000,00 1.610.000.000,00 500.000.000,00	KELURAHAN BARU KELURAHAN BARU KELURAHAN BARU
7	7 01 7 01 7 01 7 01	1 01 1 03 1 03	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pereiziana Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PROGRAM PEMBERDAYAAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Persentase Lembaga - Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit 100 Persen 85 Persen 1 Lembaga	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru 1.610.000.000,00 500.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung	- DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN Kelurahan Baru - Masyarakat Kelurahan - Baru - Masyarakat Kelurahan - Masyarakat Kelurahan	1.610.000.000,00 1.610.000.000,00 500.000.000,00	KELURAHAN BARU KELURAHAN BARU KELURAHAN BARU
7	7 01 7 01 7 01 7 01	1 01 1 03 1 03 1 03 1 03	2.09	0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemleiharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Teraksananyan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartispasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Unit 100 Persen 85 Persen 1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru 1.610.000.000,00 500.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	- DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN Kelurahan Baru - Masyarakat Kelurahan - Baru - Masyarakat Kelurahan Baru	1.610.000.000,00 1.610.000.000,00 500.000.000,00	KELURAHAN BARU KELURAHAN BARU KELURAHAN BARU
7	7 01 7 01 7 01 7 01	1 01 1 03 1 03 1 03 1 03	2.09	0001	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pereiziana Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PROGRAM PEMBERDAYAAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Persentase Lembaga - Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit 100 Persen 85 Persen 1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru 1.610.000.000,00 500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru 425.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kampung Baru	- DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN Kelurahan Baru - ASN Kelurahan Baru - Masyarakat Kelurahan - Baru - Masyarakat Kelurahan Baru - Masyarakat Kelurahan	1.610.000.000,00 1.610.000.000,00 500.000.000,00	KELURAHAN BARU KELURAHAN BARU KELURAHAN BARU



	7 01	1 03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	1 Pokmas /	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat Kelurahan	50.000.000,00	KELURAHAN BARU
					Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan	Ormas	Tenggarong, Kampung		Baru		
						Masyarakat di Kelurahan		Baru				
			2.02				lor p	4 440 000 000 00			4 440 000 000 00	VELLIDALIANI DADIL
	01	1 03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	85 Persen	1.110.000.000,00	-	- Masyarakat Kelurahan -	1.110.000.000,00	KELURAHAN BARU
					Kecamatan	Kecamatan				Jan d		
	7 01	1 03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	18 Lembaga	900.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat Kelurahan	900.000.000,00	KELURAHAN BARU
					Kemasyarakatan	yang Diselenggarakan	Kemasyarakatan	Tenggarong, Kampung		Baru		
								Baru				
	7 01	1 03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga	210.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH) -	- Masyarakat Kelurahan	210 000 000 00	KELURAHAN BARU
			2.05	0002	Kemasyarakatan	yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kemasyarakatan	Tenggarong, Kampung	Drive Continuous (BBH)	Baru	210.000.000,00	
								Baru				
					Kelurahan Maluhu			1.805.000.000,00			4 005 000 000 00	KELURAHAN MALUHU
	,	+			UNSUR KEWILAYAHAN			1.805.000.000,00				KELURAHAN MALUHU
	7 01	1			KECAMATAN			1.805.000.000,00				KELURAHAN MALUHU
288	7 01	1 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	70 Nilai	80.000.000,00		-	80.000.000,00	KELURAHAN MALUHU
					PEMERINTAHAN DAERAH							
			2.00		KABUPATEN/KOTA	Todalous Administrative	lor p	45 000 000 00		ACM Volumbro Moleko	45 000 000 00	VELLIDALIANI BARLUULI
	01	1 01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum - Perangkat Dareah	95 Persen	45.000.000,00	-	- ASN Kelurahan Maluhu -	45.000.000,00	KELURAHAN MALUHU
	7 01	1 01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	1 Paket	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN Kelurahan Maluhu	10.000.000,00	KELURAHAN MALUHU
					Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang		Tenggarong, Maluhu			,	
						Disediakan						
1	7 01	1 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1 Paket	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN Kelurahan Maluhu	25.000.000,00	KELURAHAN MALUHU
						yang Disediakan		Tenggarong, Maluhu				
	7 01	1 01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	1 Laporan	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN Kelurahan Maluhu	10.000.000,00	KELURAHAN MALUHU
					dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Tenggarong, Maluhu				
						SKPD						
	7 01	1 01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	85 Persen	35.000.000,00	-	- ASN Kelurahan Maluhu -	35.000.000,00	KELURAHAN MALUHU
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah						
	7 01	1 01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas	1 Unit	35.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN Kelurahan Maluhu	35.000.000,00	KELURAHAN MALUHU
					Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Operasional atau Lapangan yang		Tenggarong, Maluhu				
					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						
289	7 01	1 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Lembaga -	100 Persen	1.725.000.000,00			1 725 000 000 00	KELURAHAN MALUHU
205	01	1 03			MASYARAKAT DESA DAN	Pemberdayaan Masyarakat	100 Feiseil	1.725.000.000,00			1.723.000.000,00	KELOKAHAN WALOHO
					KELURAHAN	Desa/Kelurahan yang Aktif						
- 1	7 01	1 03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		85 Persen	525.000.000,00	-	- Masyarakat Kelurahan -	525.000.000,00	KELURAHAN MALUHU
	7 01	1 03	2.02	0001	Desired to Destrict and Management	Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DAMA DA CILIACII (DDIII)	Maluhu	20.000.000,00	KELURAHAN MALUHU
	01	1 03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	yang Berpartisipasi dalam Forum	Kemasyarakatan	Z0.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Masyarakat Kelurahan Maluhu	20.000.000,00	KELUKAHAN MALUHU
					Perencanaan Pembangunan di	Musyawarah Perencanaan	incinasyar and an	renggarong, malana		The state of the s		
					Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan						
1 3	7 01	1 03	2.02	0002		Jumlah Sarana dan Prasarana	2 Unit	340.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Masyarakat Kelurahan	340.000.000,00	KELURAHAN MALUHU
					Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun		Tenggarong, Maluhu		Maluhu		
	7 01	1 03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	1 Pokmas /	165.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat Kelurahan	165.000.000,00	KELURAHAN MALUHU
				l	Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan	Ormas	Tenggarong, Maluhu		Maluhu		
	, .		2.00	<u> </u>	Dombordovoon Levilinia	Masyarakat di Kelurahan	05.0	1 300 000 000 00	1		1 200 000 000 0	KELLIDALIAN ********
1	01	1 03	2.03	l	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	85 Persen	1.200.000.000,00	-	- Masyarakat Kelurahan - Maluhu	1.200.000.000,00	KELURAHAN MALUHU
					Kecamatan	Kecamatan				Indiana		
	7 01	1 03	2.03	0001		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	24 Lembaga	1.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- Masyarakat Kelurahan	1.200.000.000,00	KELURAHAN MALUHU
					Kemasyarakatan	yang Diselenggarakan	Kemasyarakatan	Tenggarong, Maluhu		Maluhu		
		+			Kelurahan Loa Ipuh			4.570.000.000,00			4 570 000 000 00	KELURAHAN LOA IPUH
- 1 :	,				UNSUR KEWILAYAHAN			4.570.000.000,00				KELURAHAN LOA IPUH
	7 01				KECAMATAN			4.570.000.000,00			4.570.000.000,00	
		1 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	70 Nilai	10.000.000,00		-	10.000.000,00	KELURAHAN LOA IPUH
290	01				PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	7 01				KADOL ALENY NO IA	I	1 1 1			- ASN Kelurahan Loa -	10.000.000,00	KELURAHAN LOA IPUH
290			2.06		Administraci Ilmum Parangkat		95 Person					
			2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum - Perangkat Dareah	95 Persen	10.000.000,00		Ipuh	10,000,000,00	
290		1 01	2.06	0002			95 Persen 1 Paket	10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	lpuh - ASN Kelurahan Loa		
290	7 01	1 01		0002	Daerah	Perangkat Dareah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang			DANA BAGI HASIL (DBH) -	Ipuh		
290	7 01	1 01 1 01		0002	Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perangkat Dareah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh	DANA BAGI HASIL (DBH)	Ipuh	10.000.000,00	KELURAHAN LOA IPUH
290	7 01	1 01 1 01		0002	Daerah Penyediaan Peralatan dan	Perangkat Dareah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Ipuh	10.000.000,00	



	7 0	01 03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan -	85 Persen	710.000.000,00			Masyarakat Kelurahan -	710.000.000,00	KELURAHAN LOA IPUH
	7 C	01 03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan	Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana	3 Unit	425.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		Loa Ipuh Masyarakat Kelurahan	425.000.000,00	KELURAHAN LOA IPUH
					Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun		Tenggarong, Loa Ipuh			Loa Ipuh		
	7 0	01 03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	1 Pokmas / Ormas	285.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Masyarakat Kelurahan Loa Ipuh	285.000.000,00	KELURAHAN LOA IPUH
	7 0	01 03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Masyarakat di Kelurahan Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	85 Persen	3.850.000.000,00			Masyarakat Kelurahan - Loa Ipuh	3.850.000.000,00	KELURAHAN LOA IPUH
					Kecamatan	Kecamatan					, ,		
	7 0	01 03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	77 Lembaga Kemasyarakatan	3.850.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Masyarakat Kelurahan Loa Ipuh	3.850.000.000,00	KELURAHAN LOA IPUH
					Kecamatan Tenggarong Seberang		•	34.840.107.359,00				15.156.635.011,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7				UNSUR KEWILAYAHAN			34.840.107.359,00				15.156.635.011,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7 0	01		1	KECAMATAN			34.840.107.359,00				15.156.635.011,00	KECAMATAN TENGGARONG
292	7 (01 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	80 Nilai	9.095.207.359,00			_	11.142.635.011,00	SEBERANG KECAMATAN TENGGARONG
					PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								SEBERANG
		01 01			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan yang terukur	7 Paket	320.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kantor Camat Tenggarong seberang		KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7 C	01 01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumiah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kantor Camat Tenggarong seberang	140000,000	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7 (01 01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kantor Camat Tenggarong seberang	70.000.000,00	SEBERANG
	7 C	01 01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	43 Data	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Publik	ASN Kantor Camat Tenggarong seberang	300.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7 0	01 01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan yang dilaksanakan	12 bulan	7.424.563.599,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kantor Camat Tenggarong seberang	8.351.268.439,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG



7	01	. 01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan Orang/bula	7.314.563.599,00 Kab. Kutai Kartanegar. Tenggarong Seberang Semua Kel/Desa	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	ASN Kantor Camat Tenggarong seberang		KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
7	01	. 01	2.02	0005	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1 Laporan	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegar. Tenggarong Seberang	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	ASN Kantor Camat Tenggarong seberang		KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
					SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Semua Kel/Desa	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7			2.02		Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegar. Tenggarong Seberang Semua Kel/Desa	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kantor Camat Tenggarong seberang		KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
7		. 01			pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah tersusun	1 Paket	90.800.000,00	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kantor Camat Tenggarong seberang		KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
7		01			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Tenggarong Seberang Semua Kel/Desa	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kantor Camat Tenggarong seberang	,	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
7	01	. 01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	40.800.000,00 Kab. Kutai Kartanegar Tenggarong Seberang Semua Kel/Desa	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kantor Camat Tenggarong seberang		KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang masih aktif -	1 Paket	15.000.000,00	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kantor Camat Tenggarong seberang		KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	ASN Kantor Camat Tenggarong seberang	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi perkantoran	8 Paket	338.261.360,00		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Masyarakat - kecamatan Tenggarong seberang	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	29.413.760,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat kecamatan Tenggarong seberang	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat kecamatan Tenggarong seberang	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	130.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Publik	Masyarakat kecamatan Tenggarong seberang	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	31.698.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat kecamatan Tenggarong seberang	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat kecamatan Tenggarong seberang	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG



7	01	01 2	2.06		enyelenggaraan Rapat Koordinasi an Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Masyarakat kecamatan Tenggarong seberang	385.210.560,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
					an Kunsukasi JAP D	SKPD		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tenggarung seuer ang		SEDEMANG
7	01	01 2	2.06		enatausahaan Arsip Dinamis pada KPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50 Dokumen	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat kecamatan Tenggarong seberang	62.720.000,00	KECAMATAN TENGGARONI SEBERANG
7	01	01 2	2.06	P	ukungan Pelaksanaan Sistem emerintahan Berbasis Elektronik ada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen	7.149.600,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat kecamatan Tenggarong seberang	62.720.000,00	KECAMATAN TENGGARON SEBERANG
7	01	01 2	2.08		enyediaan Jasa Penunjang Urusan emerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang digunakan	4 Paket	418.457.400,00	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kantor Camat - Tenggarong seberang	527.000.440,00	KECAMATAN TENGGARON SEBERANG
7	01	01 2	2.08	0001 P	ienyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kantor Camat Tenggarong seberang	6397.440,00	KECAMATAN TENGGARON SEBERANG
7	01	01 2	2.08	0002 P	enyediaan Jasa Komunikasi, umber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	344.457.400,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kantor Camat Tenggarong seberang		KECAMATAN TENGGARON SEBERANG
7	01	01 2	2.08		enyediaan Jasa Pelayanan Umum antor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	72.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kantor Camat Tenggarong seberang	439.040.000,00	KECAMATAN TENGGAROI SEBERANG



7 01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Control of the cont		57 Unit	488.125.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	ASN Kantor Camat Tenggarong seberang	303.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
7 01											renggarong seperang		SEDERANG
7 01				Daeran						profesional dan akuntabei			
7 01										i			
7 01										untuk mendukung			
7 01										transformasi pelayanan			
7 01										publik			
7 01		1								1. Penataan dan			
7 01										Pengembangan Tata Kelola			
7 01										Pemerintahan dan Pelayanan			
7 01													
7 01										Publik			
	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan		18 Unit	60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	ASN Kantor Camat	14.560.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
				Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Dinas atau Kendaraan Dinas			Tenggarong Seberang,		pemerintahan daerah yang	Tenggarong seberang		SEBERANG
				Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jabatan yang Dipelihara dan			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
				Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya					untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
7 01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas		20 Unit	128.125.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	ASN Kantor Camat	175.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
				Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Operasional atau Lapangan yang			Tenggarong Seberang,	, ,	pemerintahan daerah yang	Tenggarong seberang		SEBERANG
				Perizinan Kendaraan Dinas	Dipelihara dan dibayarkan Pajak			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel	renggarong seperang		SEBEIGHIG
					dan Perizinannya			Sellida Kely Desa					
				Operasional atau Lapangan	dan Perizinannya					untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
							20111			1 dbilk			
/ 01	01	2.09	0006				30 Unit	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola	ASN Kantor Camat	31.360.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
				Lainnya	Lainnya yang Dipelihara			Tenggarong Seberang,		pemerintahan daerah yang	Tenggarong seberang		SEBERANG
								Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
7 01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang		1 Unit	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	ASN Kantor Camat	31.360.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
				, ,	Dipelihara			Tenggarong Seberang,	` '	pemerintahan daerah yang	Tenggarong seberang	•	SEBERANG
								Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
								Schild Rely Sesa		untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
7 01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan	- 	1 Unit	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	ASN Kantor Camat	100 160 000 00	KECAMATAN TENGGARONG
, 01	. 01	2.09	0009				± UIIIL		DAINA BAGI FIASIL (DBH)			100.100.000,00	
				Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang			Tenggarong Seberang,		pemerintahan daerah yang	Tenggarong seberang		SEBERANG
					Dipelihara/Direhabilitasi			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										nublik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan		1	
										Publik			<u> </u>
7 01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana		2 Unit	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	ASN Kantor Camat	125.440.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
				dan Prasarana Gedung Kantor atau	Gedung Kantor atau Bangunan			Tenggarong Seberang,	1	pemerintahan daerah yang	Tenggarong seberang	1	SEBERANG
				Bangunan Lainnya	Lainnya yang			Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel	55 1 51 1 1 1	1	
					Dipelihara/Direhabilitasi			Serial Kely Desa		untuk mendukung		1	
	1		1		Dipenial af Direnaulitasi		1					1	
										transformasi pelayanan		1	
					1		1		l J	publik	1	1	
			1			1	1			1. Penataan dan		1	
			1										
										Pengembangan Tata Kelola	 		
										Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			



93 7	01	1 (02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan	-	100 persen 80 Persen	24.863.900.000,00			-	2.128.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
					PUBLIK	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang di laksanakan sesuai SOP								
7	01	1 (02 2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	-	2	400.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat - kecamatan Tenggarong seberang	122.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONI SEBERANG
7		1 (Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Vertikal Terkait		2 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat kecamatan Tenggarong seberang		KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
7	0:	1 (02 2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 Dokumen	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat kecamatan Tenggarong seberang	35.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
7	01	1 (02 2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	-	1 kegiatan 1 Paket	100.000.000,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat - kecamatan Tenggarong seberang	1.023.000.000,00	KECAMATAN TENGGARON SEBERANG
7	01	1 (02 2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat kecamatan Tenggarong seberang	1.023.000.000,00	KECAMATAN TENGGARON SEBERANG
7	01	1 (02 2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	-	2 kegiatan	24.363.900.000,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat - kecamatan Tenggarong seberang	00,000.000.889	KECAMATAN TENGGARONI SEBERANG



	7 (1 02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	3 Laporan	788.900.000,00 Kab. Kutai Kartanegar	, DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat kecamatan	953.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
					yang terkait dengan Nonperizinan	Nonperizinan pada Urusan		Tenggarong Seberang		pemerintahan daerah yang	Tenggarong seberang	,	SEBERANG
					, , , ,	Pemerintahan		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
-	7 (1 02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	35 Laporan	23.575.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegar	DANA BAGI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat kecamatan	30,000,000,00	KECAMATAN TENGGARONG
	′ `	1 02	2.04	0003	yang Terkait dengan Kewenangan	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	35 Eaporan	Tenggarong Seberang		pemerintahan daerah yang	Tenggarong seberang	30.000.000,00	SEBERANG
					Lain yang Dilimpahkan	Keweriangan cam yang bilimpankan		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel	renggarong seperang		SEBEIGING
					cam yang bilinpankan			Semantely Sesa		untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
294	7 (1 02			PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Lembaga -	100 Persen	436.000.000,00		Tublik		E40 000 000 00	KECAMATAN TENGGARONG
254	′ `	1 03			MASYARAKAT DESA DAN	Pemberdayaan Masyarakat	100 Feiseil	430.000.000,00				340.000.000,00	SEBERANG
1 1			1		KELURAHAN	Desa/Kelurahan yang Aktif					1		JEBERANG
	7 /	1 03	2.01		Koordinasi Kegiatan	Jumlah kegiatan dalam kerjasama -	2 Paket	100.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola		140 000 000 00	KECAMATAN TENGGARONG
	′ I '	1 03	2.01				2 Paket	100.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	[140.000.000,00	SEBERANG
			1		Pemberdayaan Desa	antar desa di lingkup kecamatan				pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			SEBEKANG
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan publik			
										p			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	_												
	7 (03	2.01	0001			8 Lembaga	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegar			-	100.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
					dalam Forum Musyawarah	yang Berpartisipasi dalam Forum	Kemasyarak			pemerintahan daerah yang			SEBERANG
					Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
						Pembangunan di Desa				untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
	7 (03	2.01	0003		Jumlah Laporan Peningkatan	2 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegar		- 7. Peningkatan tata kelola	-	40.000.000,00	
					Pemberdayaan Masyarakat di	Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan		Tenggarong Seberang		pemerintahan daerah yang			SEBERANG
					Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
1 1			1							publik			İ
										1. Penataan dan			
1 1			1							Pengembangan Tata Kelola			İ
1 1			1							Pemerintahan dan Pelayanan			İ
										Publik			
	7 (1 03	2.03		Pemberdayaan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan -	100 Persen	336.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat -	400.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
					Kemasyarakatan Tingkat	yang Diselenggarakan				pemerintahan daerah yang	kecamatan Tenggarong		SEBERANG
			1		Kecamatan					profesional dan akuntabel	seberang		İ
			1							untuk mendukung			İ
			1							transformasi pelayanan			İ
			1							publik			İ
										1. Penataan dan			
1 1			1							Pengembangan Tata Kelola			İ
										Pemerintahan dan Pelayanan			
			<u></u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		Publik	<u> </u>		1
	7 (03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga	336.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegar	, DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat kecamatan	400.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
1 1			1		Kemasyarakatan	yang Diselenggarakan	Kemasyarak			pemerintahan daerah yang	Tenggarong seberang		SEBERANG
1 1			1			==		Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			İ
										untuk mendukung			
1 1			1							transformasi pelayanan			İ
										publik			
1 1			1							1. Penataan dan			İ
1 1			1	ı	1				I	Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan Publik			



295	7 0	01 04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi - Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	175.000.000,00				851.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7 0	01 04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase ganguan ketentraman dan keteriban umum yang tertangani	100 Persen	175.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Masyarakat - kecamatan Tenggarong seberang	851.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7 0	01 04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Masyarakat kecamatan Tenggarong seberang	50.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7 0	01 04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat kecamatan Tenggarong seberang	801.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
296	7 0	01 05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan - Pemerintahan Umum Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen 100 Persen	195.000.000,00			-	420.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7 0	01 05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penegasan Kepala Daerah urusan yang dilaksanakan	2 kegiatan	195.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat - kecamatan Tenggarong seberang	420.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7 0	01 05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30 Orang	180.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat kecamatan Tenggarong seberang	380.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7 0	01 05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Masyarakat kecamatan Tenggarong seberang	40.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
297	7 0	01 06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	99 Persen	75.000.000,00			-	75.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
	7 0	01 06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa Yang di fasilitasi -	1118 dede	75.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Masyarakat - kecamatan Tenggarong seberang	75.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG



7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi		18 Laporan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat kecamatan	75.000.000,00	KECAMATAN TENGGARONG
1 1					Wilayahnya	Pendampingan Desa di Wilayahnya			Tenggarong Seberang,			pemerintahan daerah yang	Tenggarong seberang		SEBERANG
					vviiayaiiiiya	rendampingan besa di wilayannya							renggarong seberang		SEBERANG
									Semua Kel/Desa			profesional dan akuntabel			
												untuk mendukung			
												transformasi pelayanan			
												publik			
	+	+ +			Kecamatan Loa Kulu	l L		_l	29.047.896.284,00		I.		1	23 769 503 654 00	KECAMATAN LOA KULU
7	, —	+			UNSUR KEWILAYAHAN				29.047.896.284,00		ı	1			KECAMATAN LOA KULU
		+		1	KECAMATAN				29.047.896.284,00						KECAMATAN LOA KULU
	01					T		I	•						
298 7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -		76 Nilai	9.765.558.284,00					- 9.853.165.654,00	KECAMATAN LOA KULU
					PEMERINTAHAN DAERAH										
					KABUPATEN/KOTA										
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen -		2 Dokumen	340.000.000,00		Memperkuat penyelarasan	7. Peningkatan tata kelola	Kantor Camat Loa Kulu	- 438.927.943,00	KECAMATAN LOA KULU
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perencanaan,penganggaran dan					kehidupan yang harmonis	pemerintahan daerah yang			
						evaluasi kinerja perangkat daerah					dengan lingkungan, alam,	profesional dan akuntabel			
											dan budaya serta	untuk mendukung			
											peningkatan toleransi	transformasi pelayanan			
											antarumat beragama untuk	publik			
											mencapai masyarakat yang	1. Penataan dan			
											adil dan makmur.	Pengembangan Tata Kelola			
											aun uam maximur.	Pemerintahan dan Pelayanan			
	1	1 1		1		1						Pemerintahan dan Pelayanan			
	_	+_+		<u> </u>	ļ	1		1				TUDIK	L		
7	01	01	2.01	0001		Jumlah Dokumen Perencanaan		2 Dokumen	40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan	7. Peningkatan tata kelola	Kantor Camat Loa Kulu	10.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
					Perangkat Daerah	Perangkat Daerah		Dokumen	Loa Kulu, Semua		kehidupan yang harmonis	pemerintahan daerah yang			
	1	1 1		1		1			Kel/Desa		dengan lingkungan, alam,	profesional dan akuntabel			
	1	1 1		1		1					dan budaya serta	untuk mendukung			
											peningkatan toleransi	transformasi pelayanan			
											antarumat beragama untuk	publik			
											mencapai masyarakat yang	Penataan dan			
											adil dan makmur.	Pengembangan Tata Kelola			
											auli uali iliakiliui.	Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
	_											Tubiik			
7	01	01	2.01	0006		Jumlah Laporan Capaian Kinerja		1 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan	7. Peningkatan tata kelola	Kantor Camat Loa Kulu	103.927.943,00	KECAMATAN LOA KULU
					Laporan Capaian Kinerja dan	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Loa Kulu, Semua		kehidupan yang harmonis	pemerintahan daerah yang			
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi			Kel/Desa		dengan lingkungan, alam,	profesional dan akuntabel			
						Penyusunan Laporan Capaian					dan budaya serta	untuk mendukung			
						Kinerja dan Ikhtisar Realisasi					peningkatan toleransi	transformasi pelayanan			
						Kinerja SKPD					antarumat beragama untuk	publik			
						Kinerja siki B					mencapai masyarakat yang	Penataan dan			
											adil dan makmur.	Pengembangan Tata Kelola			
											auli uali iliakiliui.	Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
						ļ						Tubiik			
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja		1 Laporan	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan	7. Peningkatan tata kelola	Kantor Camat Loa Kulu	25.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
						Perangkat Daerah			Loa Kulu, Semua		kehidupan yang harmonis	pemerintahan daerah yang			
									Kel/Desa		dengan lingkungan, alam,	profesional dan akuntabel			
											dan budaya serta	untuk mendukung			
											peningkatan toleransi	transformasi pelayanan			
											antarumat beragama untuk	publik			
		1		1		1					mencapai masyarakat yang	Penataan dan			
	1	1 1		1		1					adil dan makmur.	Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan			
		1		1		1						Publik			
7		1		001	t	t	+				.			***************************************	
7	01	01	2.01	0009		Jumlah Data Statistik Sektoral		2500 Data	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan	7. Peningkatan tata kelola	Kantor Camat Loa Kulu	300.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
		1 1		1	Statistik Sektoral Daerah	Daerah yang Telah Dikumpulkan			Loa Kulu, Semua		kehidupan yang harmonis	pemerintahan daerah yang			
		1 1				dan Diperiksa Lingkup Perangkat			Kel/Desa		dengan lingkungan, alam,	profesional dan akuntabel			
				1		Daerah					dan budaya serta	untuk mendukung			
						1					peningkatan toleransi	transformasi pelayanan			
								1			antarumat beragama untuk	publik	1		
												,			
											mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				
											mencapai masyarakat yang				
7	, 01	01	2.02		Administraci Kayangan Dorandust	lumlah langran Administrasi		1 Janoran	8 7/3 783 284 00		mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7 Peningkatan tata kelela	Kantor Camat Los Vulu	8 521 240 4E0 00	KECAMATAN LOA KIIII
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah laporan Administrasi -		1 Laporan	8.743.783.284,00		mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan	7. Peningkatan tata kelola	Kantor Camat Loa Kulu	- 8.521.240.450,00	KECAMATAN LOA KULU
7	' 01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi - Pelaksanaan Tugas ASN		1 Laporan	8.743.783.284,00		mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis	pemerintahan daerah yang	Kantor Camat Loa Kulu	- 8.521.240.450,00	KECAMATAN LOA KULU
7	01	01	2.02					1 Laporan	8.743.783.284,00		mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Kantor Camat Loa Kulu	- 8.521.240.450,00	KECAMATAN LOA KULU
7	′ 01	01	2.02					1 Laporan	8.743.783.284,00		mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	Kantor Camat Loa Kulu	- 8.521.240.450,00	KECAMATAN LOA KULU
7	01	01	2.02					1 Laporan	8.743.783.284,00		mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Kantor Camat Loa Kulu	- 8.521.240.450,00	KECAMATAN LOA KULU
7	01	01	2.02					1 Laporan	8.743.783.284,00		mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	Kantor Camat Loa Kulu	- 8.521.240.450,00	KECAMATAN LOA KULU
7	01	01	2.02					1 Laporan	8.743.783.284,00		mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	Kantor Camat Loa Kulu	- 8.521.240.450,00	KECAMATAN LOA KULU
7	01	01	2.02					1 Laporan	8.743.783.284,00		mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Kantor Camat Loa Kulu	- 8.521.240.450,00	KECAMATAN LOA KULU
7	01	01	2.02					1 Laporan	8.743.783.284,00		mencapai masyarakat yang adii dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Kantor Camat Loa Kulu	- 8.521,240.450,00	KECAMATAN LOA KULU
7	01	01	2.02					1 Laporan	8.743.783.284,00		mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Kantor Camat Loa Kulu	- 8.521.240.450,00	KECAMATAN LOA KULU



7	01	01 2	2.02 00	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	8.683.783.284,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	Kantor Camat Loa Kulu	8.461.240.450,00	KECAMATAN LOA KULU
									antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	01	01 2	2.02 00	OS Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Loa Kulu	10.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
7	01			07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Loa Kulu		KECAMATAN LOA KULU
7	01	01 2	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) - Pada Perangkat Daerah	1 Laporan	114.800.000,00		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Kantor Camat Loa Kulu	- 114.800.000,00	KECAMATAN LOA KULU
7	01	01 2	2.03 00	02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) MINYAK DAN GAS OTONOMI KHUSUS PAPUA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Kantor Camat Loa Kulu	50.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
7	01	01 2	2.03 00	05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	64.800.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Loa Kulu	64.800.000,00	KECAMATAN LOA KULU
7	01	01 2	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	234.115.000,00		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Kantor Camat Loa Kulu	306.587.261,00	KECAMATAN LOA KULU



7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Kantor Camat Loa Kulu	2.500.000,00	KECAMATAN LOA KULU
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur desa yang berkualitas	Kantor Camat Loa Kulu	25.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
7		01		0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	96.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Loa Kulu		KECAMATAN LOA KULU
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Loa Kulu	5.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Loa Kulu	25,000,000,00	KECAMATAN LOA KULU
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Loa Kulu	163.087.261,00	KECAMATAN LOA KULU
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	Kantor Camat Loa Kulu	20.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU

7														
	01 0	1 2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem	Jumlah Dokumen Dukungan		1 Dokumen	15.615.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DRH)	Memperkuat penyelarasan	7. Peningkatan tata kelola	Kantor Camat Loa Kulu	20,000,000,00	KECAMATAN LOA KULU
	01 0	2.00	0011	Pemerintahan Berbasis Elektronik			1 DOKUMEN	Loa Kulu, Semua	DAIYA BAGITIASIE (DBII)			Kantor Camat Loa Kala	20.000.000,00	RECAIVIATAN EOA ROEG
					Pelaksanaan Sistem Pemerintahan					kehidupan yang harmonis	pemerintahan daerah yang			
				pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD			Kel/Desa		dengan lingkungan, alam,	profesional dan akuntabel			
										dan budaya serta	untuk mendukung			
										peningkatan toleransi	transformasi pelayanan			
										antarumat beragama untuk	nublik			
										mencapai masyarakat yang	Penataan dan			
										adil dan makmur.	Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
7	01 0	1 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah waktu penyediaan Jasa	t_	1 Laporan	256.610.000,00		Memperkuat penyelarasan	7. Peningkatan tata kelola	Kantor Camat Loa Kulu	- 256 610 000 00	KECAMATAN LOA KULU
'	02 0			Pemerintahan Daerah			1 Luporum	23010201000,00				Number Current 200 Manu	23010201000,00	NECTURAL CON NOCO
				Pemerintahan Daeran	Penunjang Urusan Pemerintahan					kehidupan yang harmonis	pemerintahan daerah yang			
					Daerah yang disediakan					dengan lingkungan, alam,	profesional dan akuntabel			
										dan budaya serta	untuk mendukung			
										peningkatan toleransi	transformasi pelayanan			
										antarumat beragama untuk	publik			
										mencapai masyarakat yang	1. Penataan dan			
										adil dan makmur.				
										adii dan makmur.	Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
	I			<u>l</u>	<u>l</u>	<u> </u>				<u> </u>	Publik	L		
7	01 N	1 2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		1 Laporan	2.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan	7. Peningkatan tata kelola	Kantor Camat Loa Kulu	2,000,000.00	KECAMATAN LOA KULU
		1 ~	1		Surat Menyurat	1		Loa Kulu, Semua	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	kehidupan yang harmonis	pemerintahan daerah yang	1		
			1	1	Suraciviciiyurat	1	1					1		
			1	1	1	1 1 1	1	Kel/Desa		dengan lingkungan, alam,	profesional dan akuntabel	I		
			1	1	1	1 1 1	1			dan budaya serta	untuk mendukung	I		
			1	1	ĺ	1	1			peningkatan toleransi	transformasi pelayanan	1		
			1	1	1	1 1 1	1			antarumat beragama untuk	publik	I		
			1	1	ĺ	1	1			mencapai masyarakat yang	Penataan dan	1		
			1	1	1	1 1 1	1					I		
			1	1	1	1 1 1	1			adil dan makmur.	Pengembangan Tata Kelola	I		
											Pemerintahan dan Pelayanan			
L				<u> </u>	<u> </u>	1 1				<u> </u>	Publik	L		
7	01 0	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		1 Laporan	254.610.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan	7. Peningkatan tata kelola	Kantor Camat Loa Kulu	254.610.000,00	KECAMATAN LOA KULU
			1	Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan	1 1 1		Loa Kulu, Semua	- ,,	kehidupan yang harmonis	pemerintahan daerah yang			
			1	bayarın dan Elserik	Listrik yang Disediakan	1	1	Kel/Desa		dengan lingkungan, alam,	profesional dan akuntabel	1		
					Listrik yang Disediakan			kei/Desa						
										dan budaya serta	untuk mendukung			
										peningkatan toleransi	transformasi pelayanan			
										antarumat beragama untuk	publik			
										mencapai masyarakat yang	Penataan dan			
										adil dan makmur.	Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
7	01 0	1 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	-	1 Laporan	76.250.000,00		Memperkuat penyelarasan	7. Peningkatan tata kelola	Kantor Camat Loa Kulu	- 215,000,000,00	KECAMATAN LOA KULU
'	01 0			Penunjang Urusan Pemerintahan	Junior Barang Ivanik Bacran		1 Luporum	7012501000,00		kehidupan yang harmonis	pemerintahan daerah yang	Number Current 200 Marie	213/00/1000/00	NECONINITANI ECON NOEC
				Daerah						dengan lingkungan, alam,	profesional dan akuntabel			
										dan budaya serta	untuk mendukung			
										peningkatan toleransi	transformasi pelayanan			
										antarumat beragama untuk	publik			
											1 Penataan dan			
										mencapai masyarakat yang	1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
										mencapai masyarakat yang	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
										mencapai masyarakat yang	Pengembangan Tata Kelola			
7	01 0	1 2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Perorangan		17 Unit	51.250.000,00 Kab. Kutai Kartanepara	DANA BAGI HASIL (DBH)	mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Loa Kulu	190,000,000,000	KECAMATAN LOA KULU
7	01 0	1 2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		17 Unit	51.250.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	Kantor Camat Loa Kulu	190.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
7	01 0	1 2.09	0001	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Dinas atau Kendaraan Dinas		17 Unit	Loa Kulu, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Kantor Camat Loa Kulu	190.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
7	01 0	1 2.09	0001	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		17 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)	mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Kantor Camat Loa Kulu	190.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
7	01 0	1 2.09	0001	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Dinas atau Kendaraan Dinas		17 Unit	Loa Kulu, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pubilik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	Kantor Camat Loa Kulu	190.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
7	01 0	1 2.09	0001	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		17 Unit	Loa Kulu, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Kantor Camat Loa Kulu	190.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
7	01 0	1 2.09	0001	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		17 Unit	Loa Kulu, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pubilik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	Kantor Camat Loa Kulu	190.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
7	01 0	1 2.09	0001	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		17 Unit	Loa Kulu, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Kantor Camat Loa Kulu	190.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
7	01 0	1 2.09	0001	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		17 Unit	Loa Kulu, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Kantor Camat Loa Kulu	190.000.000,00	Kecamatan loa kulu
7	01 0	1 2.09	0001	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		17 Unit	Loa Kulu, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Kantor Camat Loa Kulu	190.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
7	01 0	1 2.09	0001	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		17 Unit	Loa Kulu, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Kantor Camat Loa Kulu	190.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
7				Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Loa Kulu, Semua Kel/Desa		mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7		1 2.09		Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		17 Unit	Loa Kulu, Semua		mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Kantor Camat Loa Kulu Kantor Camat Loa Kulu		KECAMATAN LOA KULU
7				Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin			Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kel/Desa 25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan loteransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola			
7				Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Loa Kulu, Semua Kel/Desa Z5.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua		mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang			
7				Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin			Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kel/Desa 25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			
7				Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin			Loa Kulu, Semua Kel/Desa Z5.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua		mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung			
7				Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin			Loa Kulu, Semua Kel/Desa Z5.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua		mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			
7				Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin			Loa Kulu, Semua Kel/Desa Z5.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua		mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung			
7				Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin			Loa Kulu, Semua Kel/Desa Z5.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua		mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik			
7				Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin			Loa Kulu, Semua Kel/Desa Z5.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua		mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			
7				Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin			Loa Kulu, Semua Kel/Desa Z5.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua		mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
7				Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin			Loa Kulu, Semua Kel/Desa Z5.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua		mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
	01 0	1 2.09		Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		15 Unit	Loa Kulu, Semua Kel/Desa 25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa		mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		25.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
	01 0	1 2.09		Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin			Loa Kulu, Semua Kel/Desa Z5.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua		mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		25.000.000,00	
		1 2.09		Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		15 Unit	Loa Kulu, Semua Kel/Desa 25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa		mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		25.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU



7	01 (02 2.01	1	Koordinasi Penyelenggaraan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal	-	1 Laporan	400.000.000,00		Memperkuat penyelarasan	7. Peningkatan tata kelola	Kantor Camat Loa Kulu	- 350.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
				Kegiatan	(SPM) yang difasilitasi		1 Laporan			kehidupan yang harmonis	pemerintahan daerah yang			
1 1					Meningkatkan Penyelenggaraan					dengan lingkungan, alam,	profesional dan akuntabel			
				Pemerintahan di Tingkat	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat					dan budaya serta	untuk mendukung			
1 1				Kecamatan	Kecamatan					peningkatan toleransi	transformasi pelayanan			
1 1										antarumat beragama untuk	publik			
1 1										mencapai masyarakat yang	1. Penataan dan			
1 1										adil dan makmur.	Pengembangan Tata Kelola			
1 1										duii daii illakilidi.	Pemerintahan dan Pelayanan			
1 1											Publik			
7	01 (02 2.01	1 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	- +	1 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BACI HACII (DBH)	Memperkuat penyelarasan	7. Peningkatan tata kelola	Kantor Camat Loa Kulu	100,000,000,00	KECAMATAN LOA KULU
'	01	2.03	1 0001	dan Pelaksanaan Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		1 Laporari	Loa Kulu, Semua	DANA BAGITIASIE (DBII)		pemerintahan daerah yang	Kalitoi Calilat Loa Kulu	100.000.000,00	RECAIVIATAN LOA KOLO
								Kel/Desa		kehidupan yang harmonis	profesional dan akuntabel			
1 1				Pemerintahan dengan Perangkat	Kegiatan Pemerintahan dengan			Kel/Desa		dengan lingkungan, alam,				
1 1				Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						dan budaya serta	untuk mendukung			
					Vertikal Terkait					peningkatan toleransi	transformasi pelayanan			
1 1										antarumat beragama untuk	publik			
1 1										mencapai masyarakat yang	1. Penataan dan			
										adil dan makmur.	Pengembangan Tata Kelola			
1 1											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
7	01 (02 2.01	1 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah Dokumen Peningkatan		2 Dokumen	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan	7. Peningkatan tata kelola	Kantor Camat Loa Kulu	250.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
		1		Pemerintahan di Tingkat	Efektifitas Kegiatan Pemerintahan		1	Loa Kulu, Semua		kehidupan yang harmonis	pemerintahan daerah yang			
		1		Kecamatan	di Tingkat Kecamatan		1	Kel/Desa		dengan lingkungan, alam,	profesional dan akuntabel			
		1			"		1	-,		dan budaya serta	untuk mendukung			
		1					1			peningkatan toleransi	transformasi pelayanan			
		1			1		1			antarumat beragama untuk	publik			
										mencapai masyarakat yang	Pengembangan sumber			
										adil dan makmur.	daya manusia yang sehat,			
1 1										duii daii iiiakiiidi.	produktif, terampil			
- - 	01 (02 2.02	. —	Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal	- +	1 Laporan	100.000.000.00		Memperkuat penyelarasan	7. Peningkatan tata kelola	Kantor Camat Loa Kulu	100 000 000 00	KECAMATAN LOA KULU
'	01 (02 2.02	4				1 Laporan	100.000.000,00				Kantor Camat Loa Kulu	- 100.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
1 1				Pemerintahan yang Tidak	(SPM) yang difasilitasi					kehidupan yang harmonis	pemerintahan daerah yang			
				Dilaksanakan oleh Unit Kerja						dengan lingkungan, alam,	profesional dan akuntabel			
				Perangkat Daerah yang Ada di						dan budaya serta	untuk mendukung			
				Kecamatan						peningkatan toleransi	transformasi pelayanan			
										antarumat beragama untuk	publik			
1 1										mencapai masyarakat yang	1. Penataan dan			
1 1										adil dan makmur.	Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
1 1											Publik			
7	01 (02 2.02	2 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Jumlah Laporan Peningkatan		1 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan	7. Peningkatan tata kelola	Kantor Camat Loa Kulu	100,000,000,00	KECAMATAN LOA KULU
				Pelayanan kepada Masyarakat di	Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan			Loa Kulu, Semua	,	kehidupan yang harmonis	pemerintahan daerah yang			
1 1				Wilayah Kecamatan	kepada Masyarakat di Wilayah			Kel/Desa		dengan lingkungan, alam,	profesional dan akuntabel			
1 1				,	Kecamatan			1, 2		dan budaya serta	untuk mendukung			
					Recumulan					peningkatan toleransi	transformasi pelayanan			
1 1										antarumat beragama untuk	publik			
							1			mencapai masyarakat yang	Penataan dan			
		1			1		1			adil dan makmur.	Pengembangan Tata Kelola			
		1			1		1			auil Udii iiidkiTUF.	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
1 1											Pemerintanan dan Pelayanan Publik			
				 	 		+			1	TODIK	L		
7	01 (Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah pelaksanaan kegiatan	·	1 Laporan	17.871.338.000,00				Masyarakat	- 12.251.338.000,00	KECAMATAN LOA KULU
		02 2.04	*					17107113301000,00		Memperkuat penyelarasan	7. Peningkatan tata kelola			
l i		02 2.04	*	yang Dilimpahkan kepada Camat	pemerintahan yang menjadi			17.07.1330.000,00		kehidupan yang harmonis	pemerintahan daerah yang	Kecamatan Loa Kulu		
		02 2.04	•	yang Dilimpahkan kepada Camat				27.67.2555650,60		kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			
		02 2.04	•	yang Dilimpahkan kepada Camat	pemerintahan yang menjadi			17.07.2333.000,00		kehidupan yang harmonis	pemerintahan daerah yang			
		02 2.04	•	yang Dilimpahkan kepada Camat	pemerintahan yang menjadi			1.5.13330,0		kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			
		02 2.04	1	yang Dilimpahkan kepada Camat	pemerintahan yang menjadi			3.0.333334,00		kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung			
		02 2.04		yang Dilimpahkan kepada Camat	pemerintahan yang menjadi			1.0.135555,00		kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan			
		02 2.04	•	yang Dilimpahkan kepada Camat	pemerintahan yang menjadi			3.3.33333,0		kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik			
		02 2.04	1	yang Dilimpahkan kepada Camat	pemerintahan yang menjadi			3.0.333334,0		kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			
		02 2.04	1	yang Dilimpahkan kepada Camat	pemerintahan yang menjadi			3.0.333334,0		kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
7					pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat		1 Japoran		DANA RAGI HASII (DRIII)	kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Loa Kulu	871 338 000 00	KECAMATAN I OA KUUU
7		02 2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan		1 Laporan	871.338.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan buday serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola	Kecamatan Loa Kulu Masyarakat Kecamatan	871338.000,00	KECAMATAN LOA KULU
7					pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan		1 Laporan	871.338.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan buday serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Kecamatan Loa Kulu	871.338.000,00	KECAMATAN LOA KULU
7				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan		1 Laporan	871.338.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan buday serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Kecamatan Loa Kulu Masyarakat Kecamatan	871.338.000,00	KECAMATAN LOA KULU
7				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan		1 Laporan	871.338.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan buday serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	Kecamatan Loa Kulu Masyarakat Kecamatan	871.338.000,00	KECAMATAN LOA KULU
7				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan		1 Laporan	871.338.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	Kecamatan Loa Kulu Masyarakat Kecamatan	871.338.000,00	KECAMATAN LOA KULU
7				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan		1 Laporan	871.338.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Kecamatan Loa Kulu Masyarakat Kecamatan	871.338.000,00	KECAMATAN LOA KULU
7				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan		1 Laporan	871.338.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Kecamatan Loa Kulu Masyarakat Kecamatan	871338.000,00	KECAMATAN LOA KULU
7				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan		1 Laporan	871.338.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Kecamatan Loa Kulu Masyarakat Kecamatan	871.338.000,00	KECAMATAN LOA KULU
7				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan		1 Laporan	871.338.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Kecamatan Loa Kulu Masyarakat Kecamatan	871.338.000,00	KECAMATAN LOA KULU

7										
7	003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan .	umlah Laporan Pelaksanaan	1 Laporan	17.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan	7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat Kecamatan	11.380.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
300 7 01 03 2.01 PROGIMASY KELUR 7 01 03 2.01 COOO1 Pembe 7 01 03 2.01 COO01 Pembe 7 01 03 2.01 COO03 Pembe Wilays 7 01 03 2.03 Pembe Kemas Kecam	yang Terkait dengan Kewenangan	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Loa Kulu, Semua		kehidupan yang harmonis	pemerintahan daerah yang	Loa Kulu		
7	Lain yang Dilimpahkan			Kel/Desa		dengan lingkungan, alam,	profesional dan akuntabel			
7						dan budaya serta	untuk mendukung			
7						peningkatan toleransi	transformasi pelayanan			
7						antarumat beragama untuk	publik			
7						mencapai masyarakat yang	Penataan dan			
7										
7						adil dan makmur.	Pengembangan Tata Kelola			
7							Pemerintahan dan Pelayanan			
7							Publik			
7 01 03 2.01 COO1 Pening dalam Percen 7 01 03 2.01 O001 Pening dalam Percen 7 01 03 2.01 O003 Pening Pembu Wilaya 7 01 03 2.03 Pembu Kemas Kecam	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Lembaga -	64 Persen	436.000.000,00				l l-	480.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
7 01 03 2.01 Moord Pember 7 01 03 2.01 0001 Pening dalam Peren 7 01 03 2.01 0003 Pening Pember 7 01 03 2.03 Pening Pember 7 01 03 2.03 Pember Remark Kecam	MASYARAKAT DESA DAN	Pemberdayaan Masyarakat								
7 01 03 2.01 0001 Pening Pember Pember Pember Perent Perent Perent Perent Perent Perent Pening Penin	KELURAHAN	Desa/Kelurahan Yang Aktif								
7 01 03 2.01 0001 Pening Pember Pember Pember Perent Perent Perent Perent Perent Perent Pening Penin	Koordinasi Kegiatan	Persentase Pembinaan dan -	64 Persen	100.000.000,00		Memperkuat penyelarasan	7. Peningkatan tata kelola	Jumlah Desa Dalam -	100.000.000.00	KECAMATAN LOA KULU
7 01 03 2.01 0001 Pening dalam Peren 7 01 03 2.01 0003 Pening Pemb Wilays 7 01 03 2.03 Pemb Kemas Kecarr		pengawasan Pemerintahan Desa				kehidupan yang harmonis	pemerintahan daerah yang	Kecamatan Loa Kulu		
7 01 03 2.01 0003 Pening Pemb Wilays 7 01 03 2.03 Pemb Kemas Kecam 7 01 03 2.03 0001 Penye Kemas						dengan lingkungan, alam,	profesional dan akuntabel			
7 01 03 2.01 0003 Pening Pemb Wilays 7 01 03 2.03 Pemb Kemas Kecam 7 01 03 2.03 0001 Penye Kemas						dan budaya serta	untuk mendukung			
7 01 03 2.01 0003 Pening Pemb Wilays 7 01 03 2.03 Pemb Kemas Kecam 7 01 03 2.03 0001 Penye Kemas										
7 01 03 2.01 0003 Pening Pemb Wilays 7 01 03 2.03 Pemb Kemas Kecam 7 01 03 2.03 0001 Penye Kemas						peningkatan toleransi	transformasi pelayanan			
7 01 03 2.01 0003 Pening Pemb Wilays 7 01 03 2.03 Pemb Kemas Kecam 7 01 03 2.03 0001 Pempe Kemas						antarumat beragama untuk	publik			
7 01 03 2.01 0003 Pening Pemb Wilays 7 01 03 2.03 Pemb Kemas Kecam 7 01 03 2.03 0001 Pempe Kemas	1					mencapai masyarakat yang	1. Penataan dan			
7 01 03 2.01 0003 Pening Pemb Wilays 7 01 03 2.03 Pemb Kemas Kecam 7 01 03 2.03 0001 Pempe Kemas	1					adil dan makmur.	Pengembangan Tata Kelola			
7 01 03 2.01 0003 Pening Pemb Wilays 7 01 03 2.03 Pemb Kemas Kecam 7 01 03 2.03 0001 Pempe Kemas							Pemerintahan dan Pelayanan			
7 01 03 2.01 0003 Pening Pemb Wilays 7 01 03 2.03 Pemb Kemas Kecam 7 01 03 2.03 0001 Pempe Kemas							Publik			
7 01 03 2.01 0003 Pening Pemb Wilays 7 01 03 2.03 Pemb Kemas Kecam 7 01 03 2.03 0001 Pempe Kemas	001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat	umlah Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DRH)	Memperkuat penyelarasan	7. Peningkatan tata kelola	Jumlah Desa Dalam	50,000,000,00	CECAMATAN LOA KULU
7 01 03 2.03 Pening Pemb Wilays 7 01 03 2.03 Pening Pemb Kemas Kecam	dalam Forum Musyawarah	rang Berpartisipasi dalam Forum	Kemasyarakatan	Loa Kulu, Semua	(DDIT)	kehidupan yang harmonis	pemerintahan daerah yang	Kecamatan Loa Kulu	30.000.000,00	LOA ROLU
7 01 03 2.03 Pening Pemb Wilays 7 01 03 2.03 Pemb Kemas Kecam		Musyawarah Perencanaan	ixciila syal akatali	Kel/Desa		dengan lingkungan, alam,	profesional dan akuntabel	necamatan LUA Kulu		
7 01 03 2.03 Pemb Wilaya 7 01 03 2.03 Pemb Kemac Kecam 7 01 03 2.03 0001 Penye Kemac				Nei/ Desa						
7 01 03 2.03 Pemb Wilaya 7 01 03 2.03 Pemb Kemac Kecam 7 01 03 2.03 0001 Penye Kemac		Pembangunan di Desa				dan budaya serta	untuk mendukung			
7 01 03 2.03 Pemb Wilaya 7 01 03 2.03 Pemb Kemac Kecam 7 01 03 2.03 0001 Penye Kemac						peningkatan toleransi	transformasi pelayanan			
7 01 03 2.03 Pemb Wilaya 7 01 03 2.03 Pemb Kemac Kecam 7 01 03 2.03 0001 Penye Kemac						antarumat beragama untuk	publik			
7 01 03 2.03 Pemb Wilaya 7 01 03 2.03 Pemb Kemac Kecam 7 01 03 2.03 0001 Penye Kemac						mencapai masyarakat yang	 Penataan dan 			
7 01 03 2.03 Pemb Wilaya 7 01 03 2.03 Pemb Kemac Kecam 7 01 03 2.03 0001 Penye Kemac						adil dan makmur.	Pengembangan Tata Kelola			
7 01 03 2.03 Pemb Wilaya 7 01 03 2.03 Pemb Kemac Kecam 7 01 03 2.03 0001 Penye Kemac							Pemerintahan dan Pelayanan			
7 01 03 2.03 Pemb Wilaya 7 01 03 2.03 Pemb Kemac Kecam 7 01 03 2.03 0001 Penye Kemac							Publik			
7 01 03 2.03 Pemb Wilaya 7 01 03 2.03 Pemb Kemac Kecam 7 01 03 2.03 0001 Penye Kemac	003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan .	umlah Laporan Peningkatan	2 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	Memperkuat penyelarasan	7. Peningkatan tata kelola	Jumlah Desa Dalam	E0 000 000 00 la	KECAMATAN LOA KULU
7 01 03 2.03 Pemb Kemas Kecam 7 01 03 2.03 0001 Penye Kemas	Pemberdayaan Masyarakat di	Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	2 Laporari	Loa Kulu, Semua	DANA BAGITIASIL (DBIT)	kehidupan yang harmonis	pemerintahan daerah yang	Kecamatan Loa Kulu	30.000.000,00	RECAIVIATAN LOA KOLO
7 01 03 2.03 Pemb Kemas Kecam								Kecamatan Loa Kulu		
7 01 03 2.03 0001 Penye Kemas	Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kel/Desa		dengan lingkungan, alam,	profesional dan akuntabel			
7 01 03 2.03 0001 Penye Kemas						dan budaya serta	untuk mendukung			
7 01 03 2.03 0001 Penye Kemas						peningkatan toleransi	transformasi pelayanan			
7 01 03 2.03 0001 Penye Kemas						antarumat beragama untuk	publik			
7 01 03 2.03 0001 Penye Kemas						mencapai masyarakat yang	1. Penataan dan			
7 01 03 2.03 0001 Penye Kemas						adil dan makmur.	Pengembangan Tata Kelola			
7 01 03 2.03 0001 Penye Kemas							Pemerintahan dan Pelayanan			
7 01 03 2.03 0001 Penye Kemas							Publik			
7 01 03 2.03 0001 Penye Kemas	Dambardaraan Lambara	umleh Lambasa Kamanusukatan	21 ambasa	336.000.000,00		Managed and a second	7. Peningkatan tata kelola	Manuarakat	200 000 000 00	KECAMATAN LOA KULU
7 01 03 2.03 0001 Penye Kemas		umlah Lembaga Kemasyarakatan -	3 Lembaga	330.000.000,00		Memperkuat penyelarasan	pemerintahan daerah yang	Masyarakat -	380.000.000,00	ALCAMMIAN LOW ROLU
7 01 03 2.03 0001 Penye Kemas	Kemasyarakatan Tingkat	yang Berpartisipasi dalam Forum	Kemasyarakat			kehidupan yang harmonis		Kecamatan Loa Kulu		
Kemas	Kecamatan	Musyawarah Perencanaan				dengan lingkungan, alam,	profesional dan akuntabel			
Kemas	P	Pembangunan di Desa				dan budaya serta	untuk mendukung			
Kemas						peningkatan toleransi	transformasi pelayanan			
Kemas	1					antarumat beragama untuk	publik			
Kemas						mencapai masyarakat yang	1. Penataan dan			
Kemas						adil dan makmur.	Pengembangan Tata Kelola			
Kemas	1						Pemerintahan dan Pelayanan			
Kemas	1						Publik			
Kemas	004 Daniel	and the transfer of Management and the second and t	F1	225 000 000 00	DANIA DA CILITANI (CO. II	Managed	- GDIIK	A Annual and Market	200 200 277 77	CCARATARI I C
	001 Penyelenggaraan Lembaga	umlah Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga	336.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan	7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat Kecamatan	380.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
01 7 01 04	Kemasyarakatan	vang Diselenggarakan	Kemasyarakatan	Loa Kulu, Semua		kehidupan yang harmonis	pemerintahan daerah yang	Loa Kulu		
01 7 01 04	1			Kel/Desa		dengan lingkungan, alam,	profesional dan akuntabel			
01 7 01 04						dan budaya serta	untuk mendukung			
01 7 01 04	1					peningkatan toleransi	transformasi pelayanan			
01 7 01 04						antarumat beragama untuk	publik			
01 7 01 04						mencapai masyarakat yang	1. Penataan dan			
01 7 01 04						adil dan makmur.	Pengembangan Tata Kelola			
201 7 01 04						aan maxmur.	Pemerintahan dan Pelayanan			
201 7 01 04							Pemerintanan dan Pelayanan Publik			
301 7 01 04							PUDIIK			
		Persentase capaian Ketenteraman -	74 Persen	130.000.000,00				-	205.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
KETEN	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	dan Ketertiban Umum								
UMU	UMUM							<u> </u>		



	7	01 04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan		74 Persen	130.000.000,00		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Loa Kulu	- 205.000	0.000,00 KECA	AMATAN LOA KULU
	7	01 04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	5.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Loa Kulu	5.000	0.000,00 KECA	amatan loa kulu
		01 04		0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan	125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Loa Kulu			amatan loa kulu
302	7	01 05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	74 Persen	195.000.000,00					- 380.000	0.000,00 KECA	AMATAN LOA KULU
	7	01 05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		74 Persen	195.000.000,00		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Loa Kulu	- 380.000	0.000,00 KECA	AMATAN LOA KULU
	7	01 05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Jumat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		80 Orang	180.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Loa Kulu	180.000	0.000,00 KECA	amatan loa kulu
	7	01 05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Loa Kulu	200.000	0.000,00 KECA	amatan loa kulu
303	7	01 06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	-	72 Persen	150.000.000,00					- 150.000	0.000,00 KECA	AMATAN LOA KULU



	7	01 06	5 2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi -	15 Desa	150.000.000,00		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Masyarakat Kecamatan Loa Kulu	- 150.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
	7	01 06	6 2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Dokumen	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Loa Kulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Loa Kulu	75.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
	7	01 06	5 2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Loa Kulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Loa Kulu	75.000.000,00	KECAMATAN LOA KULU
-					Kecamatan Loa Janan		I	26.392.635.977,00	1		TUDIK			KECAMATAN LOA JANAN
	7	01			UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN			26.392.635.977,00 26.392.635.977,00					9.518.958.389,00 9.518.958.389,00	KECAMATAN LOA JANAN KECAMATAN LOA JANAN
304	7	01 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	70 Nilai	6.365.987.977,00					-	KECAMATAN LOA JANAN
304					PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			·					·	
	7	01 01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Dokumen	320.000.000,00		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Membangun Infratruktur Konektivitas 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan	- 596.885.086,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	01 01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Membangun Infratruktur Konektivitas 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan	30.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	01 01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Loa Janan, Semua Kel/Desa	, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adii dan makmur.	Membangun Infratruktur Konektivitas 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan	266.885.086,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7	01 01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Loa Janan, Semua Kel/Desa	, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan	300.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN



7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	-	34	6 Laporan	4.970.573.023,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	Konektivitas 1. Penataan dan	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan	-	4.939.778.913,00	KECAMATAN LOA JANAN
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		3;	72 Orang/bulan	4.865.573.023,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	Membangun Infratruktur Konektivitas 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan		4.834.778.913,00	KECAMATAN LOA JANAN
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	Laporan	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	Membangun Infratruktur Konektivitas 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan		25.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1	Laporan	80.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan		80.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	-	5:	5 Unit	102.060.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan	-	102.060.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1	Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan		50.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN



7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Laporan	52.060.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membangun Infratruktur Konektivitas 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan		52.060.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah		9 Jenis	214.648.240,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	1. Penataan dan	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan	-	232.789.050,00	KECAMATAN LOA JANAN
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	7.997.700,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan		7.997.700,00	KECAMATAN LOA JANAN
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan		40.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
7	01	L 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	88.060.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan		38.060.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	5.560.540,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membangun Infratruktur Konektivitas 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan		10.871.350,00	KECAMATAN LOA JANAN



7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 ta	aporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membangun Infratruktur Konektivitas 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan		85.860.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
7	′ 01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 D:	okumen	23.030.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Membangun Infratruktur Konektivitas 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan		50.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2 Ui	nit	423.255.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	1. Penataan dan	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan	-	557.430.336,00	KECAMATAN LOA JANAN
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lz	aporan	205.785.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membangun Infratruktur Konektivitas 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan		205.785.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
7	′ 01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 La	aporan	10.350.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan		10.350.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 ta	aporan	207.120.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	Membangun Infratruktur Konektivitas 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan		341.295.336,00	KECAMATAN LOA JANAN



	7 (01 01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 Bulan	335.451.714,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran peran peran peran peran peran gunda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan		335.451.714,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7 (01 01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		3 Unit	51.250.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan		51.250.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7 (01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		3 Unit	51.250.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahaga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membangun Infratruktur Konektivitas 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan		51.250.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
	7 (01 01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	232.951.714,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Membangun Infratruktur Konektivitas 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan		232.951.714,00	KECAMATAN LOA JANAN
305	7 (01 02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang di laksanakan sesuai SOP	-	100 Persen	19.155.648.000,00					-	1.758.563.290,00	KECAMATAN LOA JANAN
		01 02			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif		2 kegiatan	400.000.000,00		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan	-		KECAMATAN LOA JANAN
	7 (01 02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Keglatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		2 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerinahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan		150.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN



Part Part														
Part Part	000.000,000 KECAMATAN LOA JANAN	250.000.000,00	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi	kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang	DANA BAGI HASIL (DBH)	Loa Janan, Semua	1 Dokumen	Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	Pemerintahan di Tingkat	0002	2.01	01 02	7	
Authorized special designated relative special designation of the special	000.000,000 KECAMATAN LOA JANAN	- 100.000.000,00	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang		100.000.000,00	1 Fasilitasi		Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di		2.02	01 02	7	
yang Dilingahkan kepada Camat kewerangan Camat Cam	000.000,000 KECAMATAN LOA JANAN	100.000.000,00	Konektivitas 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang	DANA BAGI HASIL (DBH)	Loa Janan, Semua	2 Laporan	Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Pelayanan kepada Masyarakat di	0003	2.02	01 02	7	
yang terkait dengan Nonpertianan patal Urusan Pemerintaha	563.290,00 KECAMATAN LOA JANAN	1.258.563.290,00	Konektivitas 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui		18.655.648.000,00	2 kegiatan	pemerintahan yang menjadi			2.04	01 02	7	
yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Lain yang Dilimpahkan Lain yang Dilimpahkan Lain yang Dilimpahkan Lain yang Dilimpahkan Lain yang Dilimpahkan Lain yang Dilimpahkan Lain yang Dilimpahkan Kecamatan Loa Janan Kecamatan Loa Janan Kecamatan Loa Janan Kecamatan Lo	648.000,00 KECAMATAN LOA JANAN	855.648.000,00	Konektivitas 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	DANA BAGI HASIL (DBH)	Loa Janan, Semua	145 Laporan	Nonperizinan pada Urusan		0002	2.04	01 02	7	
	915.290,00 KECAMATAN LOA JANAN	402.915.290,00	Konektivitas 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	DANA BAGI HASIL (DBH)	Loa Janan, Semua	1 Laporan		yang Terkait dengan Kewenangan	0003	2.04	01 02	7	
306 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Lembaga - 436.000.000,00 - 486.000.000,00 - 486.000.000,00 - 486.000.000,00 - 486.000.000,00 - 486.000.000,00 - 486.000.000,00 - 486.000.000,00 - 486.000.000,00 - 486.000.000,00 - 486.000.000,00 - 4	000.000,00 KECAMATAN LOA JANAN	- 486.000.000,00				436.000.000,00	100 Persen					01 03	7	306

	1 0-	03	2.01		Was and the sales	In the Warmeline of		100 Persen	100.000.000,00	T	Industrial Control	La samutana e de de	Industrial Control of the Control of	400 000 000 000	KECAMATAN LOA JANAN
,	01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan		12 Kali			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan		
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	yang Berpartisipasi dalam Forum		3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan	50.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan	50.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	-	12 Kali	336.000.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga kesetaraan gender, serta penguatan peran peramperamperan perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola , pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel , untuk mendukung transformasi pelayanan publik 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan	- 386.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		3 Lembaga Kemasyarakatan	336.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan	386.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
307 7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	-	100 Persen	165.000.000,00					- 215.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		8 kegiatan	165.000.000,00		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan	- 215.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	Masyarakat Di wilayah Kecamatan Loa Janan	40.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN



Total Tota															
Value Valu		7 (01 04	2.01	0002	Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Loa Janan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi		
Part Part	308	7 (01 05					-	100 Persen	195.000.000,00				- 220.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
The control of the co		7 (01 05	2.01		Pemerintahan Umum Sesuai			2 Kegiatan	195.000.000,00		kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi	- 220.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
A		7 (01 05	2.01	0004	dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan		50 Orang	Loa Janan, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi	180.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
PRINCAMASAN PERRIPTAHAN PERSONALASAN PERRIPTAHAN PERSONALASAN PERRIPTAHAN PERSONALASAN PERRIPTAHAN PERSONALASAN PERRIPTAHAN PERSONALASAN PERRIPTAHAN PERSONALASAN PERRIPTAHAN PERSONALASAN PERRIPTAHAN PERSONALASAN PERRIPTAHAN PERSONALASAN PERRIPTAHAN PERSONALASAN PERRIPTAHAN PERSONALASAN PERRIPTAHAN PERSONALASAN PERRIPTAHAN PERSONALASAN PERRIPTAHAN PERSONALASAN PERRIPTAHAN PERSONALASAN PERSONAL		7 (01 05	2.01	8000				1 Dokumen	Loa Janan, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi	40.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
dar bawah untuk pertumbuhan kohonni, pemerataan ekonomidan pemberantaan kemiskinan neberahan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7 01 05 201 07 Variahan dan Pengawasan Pendampingan Desa di Wilayahnya Pendampingan Desa di Wil	309	7 (01 06			PENGAWASAN PEMERINTAHAN		-	100 Persen	75.000.000,00				- 75.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
Wilayahnya Pendampingan Desa di Wilayahnya Loa Janan, Semua Kel/Desa dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan. bublik 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan Kecamatan Loa Janan Kecama		7 (01 06	2.01		Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Desa Yang difasilitasi		8 Desa	75.000.000,00		dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi	- 75.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
Kecamatan Muara Badak		7 (01 06	2.01	0017				1 Laporan	Loa Janan, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 3. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi	75.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN
						Kecamatan Muara Badak		•		17.457.816.557,00	•	•	•	 24.013.736.816,00	KECAMATAN MUARA BADA



										1				I
	1					UNSUR KEWILAYAHAN			17.457.816.557,00				24.013.736.816,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7 (01				KECAMATAN			17.457.816.557,00				24.013.736.816,00	KECAMATAN MUARA BADAK
310	7 (01 0:	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	77 Nilai	6.539.770.657,00				7.638.903.447,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7 (01 0	1 2.0	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	370.000.000,00		-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	785.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7 (1 2.0			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen Dokumen	40.000.000,00	Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		KECAMATAN MUARA BADAK
	7 (01 0:	1 2.0	01		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	130,000,000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7 (01 0:	1 2.0	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	150.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7 (01 00	1 2.0	01		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	300,000,000,000	KECAMATAN MUARA BADAK
	7 (01 0:	1 2.0	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan Administrasi - Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	4 Dokumen	4.720.315.557,00		-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4.045.693.404,00	KECAMATAN MUARA BADAK



7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	4.550.275.557,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengambangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Kecamatan Muara Badak	3.810.653.404,00	KECAMATAN MUARA BADAK
										Pemerintanan dan Pelayanan Publik			
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Kecamatan Muara Badak	40,000,000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	1 Laporan	145.040.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Kecamatan Muara Badak	145.040.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
					Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Kel/Desa		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	tersedianya laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	3 Laporan	115.800.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Muara Badak	- 115.800.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
		01			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Muara Badak		KECAMATAN MUARA BADAK
		01			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Muara Badak		KECAMATAN MUARA BADAK
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	40.800.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Muara Badak	40.800.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK

7 0	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Tercapainya Persentase -	90 Persen	279.126.700,00	I	- 7. Peningkatan tata kelola -	- 855.000.000,00 KECAM	MATAN MIJADA DADA
, 0.	. "	2.00		Daerah	pemenuhan Administrasi umum	30 Feiseii	275.120.700,00		pemerintahan daerah yang	- 833.000.000,00 RECAIV	IVIA IAIN IVIOARA BADA
				Daeran	perangkat daerah				profesional dan akuntabel		
					perangkat daeran				untuk mendukung		
									transformasi pelayanan		
									publik		
									1. Penataan dan		
									Pengembangan Tata Kelola		
									Pemerintahan dan Pelayanan		
									Publik		
7 0:	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	5.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	10.000.000,00 KECAM	MATAN MUARA BADA
					Listrik/Penerangan Bangunan		Muara Badak, Semua	, ,	pemerintahan daerah yang		
				Listrik/Penerangan Bangunan	Kantor yang Disediakan		Kel/Desa		profesional dan akuntabel		
				Kantor	Kuntor yang Discalakan		ney best		untuk mendukung		
				Rantoi					transformasi pelayanan		
									publik		
									1. Penataan dan		
									Pengembangan Tata Kelola		
									Pemerintahan dan Pelayanan		
									Publik		
7 0:	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	1 Paket	20.927.200,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	35.000.000,00 KECAM	MATAN MUARA BADA
			1	Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang	1	Muara Badak, Semua		pemerintahan daerah yang		
				- •	Disediakan		Kel/Desa		profesional dan akuntabel		
							,		untuk mendukung		
					1				transformasi pelayanan		
	1]		publik		
					1						
					1				1. Penataan dan		
									Pengembangan Tata Kelola		
									Pemerintahan dan Pelayanan		
									Publik		
7 0:	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1 Paket	130.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	270.000.000,00 KECAM	MATAN MUARA BADA
					yang Disediakan		Muara Badak, Semua		pemerintahan daerah yang		
					"		Kel/Desa		profesional dan akuntabel		
							114, 2 114		untuk mendukung		
									transformasi pelayanan		
									publik		
									1. Penataan dan		
									Pengembangan Tata Kelola		
									Pemerintahan dan Pelayanan		
									Publik		
7 03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1 Paket	5.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	75.000.000,00 KECAM	MATAN MUARA BADA
				Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan		Muara Badak, Semua		pemerintahan daerah yang		
							Kel/Desa		profesional dan akuntabel		
									untuk mendukung		
									transformasi pelayanan		
									publik		
					1				1. Penataan dan		
					1						
					1				Pengembangan Tata Kelola		
					1				Pemerintahan dan Pelayanan		
_	1								Publik		
7 0:	01	2.06	8000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi	1 Laporan	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	85.000.000,00 KECAM	MATAN MUARA BAD
1			1		Kunjungan Tamu	1	Muara Badak, Semua		pemerintahan daerah yang		
					1		Kel/Desa		profesional dan akuntabel		
J					1		-,		untuk mendukung		
					1				transformasi pelayanan		
					1				publik		
					1						
					1				1. Penataan dan		
			1		1	1			Pengembangan Tata Kelola		
	1]		Pemerintahan dan Pelayanan		
									Publik		
	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi		1 Laporan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	330.000.000,00 KECAM	MATAN MUARA BAD
7 01				dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Muara Badak, Semua		pemerintahan daerah yang		
7 0:					SKPD		Kel/Desa		profesional dan akuntabel		
7 0:					1		-,		untuk mendukung		
7 0:					1				transformasi pelayanan		
7 0:						1		l l			
7 0:											
7 01								I	publik	Į į	
7 0:									1. Penataan dan		
7 0:									1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		
7 0:									1. Penataan dan		



7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokui	men	23.199.500,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel//Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-		50.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	90 Pers	en	714.528.400,00		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	Kecamatan Muara Badak	-	764.423.143,00	KECAMATAN MUARA BADAK
				-								transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayana Publik				KECAMATAN MUARA BADAK
	01		2.08		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Lapon	an	2.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Muara Badak			
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Lapon	an	432.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Publik	Kecamatan Muara Badak		432.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Lapor	an	12.568.400,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Diblik	Kecamatan Muara Badak			KECAMATAN MUARA BADAK
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Lapon	an	267.960.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Muara Badak		269.854.743,00	KECAMATAN MUARA BADAK
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		2 Lapor	an	340.000.000,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayana Publik	Kecamatan Muara Badak	-	612.986.900,00	KECAMATAN MUARA BADAK

	7 0	01 01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Muara Badak	452.986.900,00	KECAMATAN MUARA BADAK
		01 01		0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Muara Badak		KECAMATAN MUARA BADAK
311	7 0	01 02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	100 Persen	9.814.000.000,00			-	14.046.187.469,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7 0	01 02	2.01		PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	3 Kegiatan	400.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Muara - Badak	400.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7 C	01 02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Publik	Kecamatan Muara Badak	150.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7 C	01 02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Keglatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Muara Badak	250.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7 0	01 02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Tercapaianya Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	80 Persen	100.000.000,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Muara - Badak -	100.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7 C	01 02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Muara Badak	100.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK



	7 1	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Terlaksananya pelaksanaan -		41 Kegiatan	9.314.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat -	13,546,187,469.00	KECAMATAN MUARA BA
	′ '	٠.	02	2.04		yang Dilimpahkan kepada Camat	kegiatan pemerintahan yang		41 Registari	3.314.000.000,00		pemerintahan daerah yang	Kecamatan Muara	13.540.107.405,00	RECAMATAN MOANA DA
						yang Dililipankan kepada Camat	menjadi kewenangan Camat					profesional dan akuntabel	Badak		
							menjadi kewenangan camat						bauak		
												untuk mendukung			
												transformasi pelayanan			
												publik			
												1. Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
_	7 (01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan		4 Laporan	924.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DRH)	- 7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat Kecamatan	1 206 358 000 00	KECAMATAN MUARA BAD
	´ `	٠.	02	2.0	0002	yang terkait dengan Nonperizinan	Nonperizinan pada Urusan		- Euporum	Muara Badak, Semua	STATUTE (SSL)	pemerintahan daerah yang	Muara Badak	1.200.330.000,00	The distribution and by the
						yang terkait dengan Nonpenzinan	Pemerintahan			Kel/Desa		profesional dan akuntabel	IVIUAI A BAUAK		
							remembalan			Rely Desa		untuk mendukung			
												transformasi pelayanan			
												publik			
												1. Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan			
Ш	\perp											Publik			
Т	7 (01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan		55 Laporan	8.390.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 4. Membangun Infratruktur	Masyarakat Kecamatan	12.339.829.469,00	KECAMATAN MUARA BAI
						yang Terkait dengan Kewenangan	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		'	Muara Badak, Semua		Konektivitas	Muara Badak		
	- 1	I				Lain yang Dilimpahkan			1	Kel/Desa		3. Percepatan pembangunan			
						·· /·8 -·····p-····-				,		desa dan kawasan perdesaan			
1		ı							1			desa dan kawasan perdesaan			
+	7 (01	03	1	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Lembaga -		80 Persen	659.045.900,00				1,253 645 900 00	KECAMATAN MUARA BA
	· ['		-			MASYARAKAT DESA DAN	Pemberdayaan Masyarakat Desa		00	33310-33300,00				1.25.043.300,00	
						KELURAHAN	/Kelurahan Yang Aktif								
+		01	02	2.01	-				3 Kasistan	323.045.900,00		7 Australia tara tata balah	+	463.645.000.00	KECAMATAN MUARA BA
	′ '	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan	Terlaksanannya kegiatan		2 Kegiatan	323.045.900,00		- 7. Peningkatan tata kelola	l ⁻ l ⁻	462.645.900,00	KECAWATAN WUAKA BA
						Pemberdayaan Desa	pemerintahan di tingkat					pemerintahan daerah yang			
		ı		1	1 1		kecamatan yang melibatkan		1			profesional dan akuntabel			
1		ı					Perangkat Daerah dan Instansi		1			untuk mendukung			
1				1			Vertikal Terkait yang dilaksanakan			1		transformasi pelayanan			
1		I					secara efektif		1			publik			
		I							1			1. Penataan dan			
1		I							1			Pengembangan Tata Kelola			
1		I							1			Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
Т	7 (01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan		100 Lembaga	90.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	190,000,000,00	KECAMATAN MUARA BA
		I				dalam Forum Musyawarah	yang Berpartisipasi dalam Forum		Kemasyarakatan	Muara Badak, Semua	, ,	pemerintahan daerah yang			
		I				Perencanaan Pembangunan di Desa			nemasya adam	Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
1		I				. c. cco.iaaiii ciiibanganali di besa	Pembangunan di Desa		1	Ney Desa		untuk mendukung			
1				1			i cimangunan ui Desa			1		transformasi pelayanan			
				1	1 1		1					transforması pelayanan publik			
1		I		1	1 1		1		1						
		I							1			1. Penataan dan			
				1			1			1		Pengembangan Tata Kelola			
- 1		I							1			Pemerintahan dan Pelayanan			
				1								Publik			
	7 (01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi		1 Dokumen	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	72.600.000,00	KECAMATAN MUARA BA
1				1	1 1	Kegiatan Pemberdayaan	Program Kerja dan Kegiatan			Muara Badak, Semua		pemerintahan daerah yang			
1	- 1	I				Masyarakat yang Dilakukan oleh	Pemberdayaan Masyarakat yang		1	Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
1		I				Pemerintah dan Swasta di Wilayah	Dilakukan oleh Pemerintah dan		1			untuk mendukung			
1				1		Kerja Kecamatan	Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			1		transformasi pelayanan			
1		I					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1			publik			
				1			1			1		1. Penataan dan			
1		I							1						
- 1		I							1			Pengembangan Tata Kelola			
				1	1 1		1					Pemerintahan dan Pelayanan Puhlik			
1	_						l		1			T d bill			
1	7 (01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah Laporan Peningkatan		2 Laporan	158.045.900,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	200.045.900,00	KECAMATAN MUARA BA
				1		Pemberdayaan Masyarakat di	Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan			Muara Badak, Semua		pemerintahan daerah yang			
				1		Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
- 1		I							1			untuk mendukung			
				1			1			1		transformasi pelayanan			
1	- 1	I							1	1		publik			
1		ı		1	1 1		1		1			1. Penataan dan			
		ı		1	1 1		1		1			Pengembangan Tata Kelola			
				1			1			1		Pemerintahan dan Pelayanan			
1	- 1	I		1			1	l l	1	1		Publik			
				1					1	ſ	1	I PUDIIK			1



	7	01 03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tersedianya Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Laporan	336.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Masyarakat Kecamatan Muara Badak	- 791.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7	01 03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	336.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Muara Badak	791.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
313	7	01 04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi - ketentraman dan ketertiban umum yang melibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	81 Persen	175.000.000,00				- 245.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7	01 04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tercapainya Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	76 Persen	175.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Muara Badak	- 245.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7	01 04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Muara Badak	70.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7	01 04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Muara Badak	175.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
314	7	01 05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	74 Persen	195.000.000,00				- 580.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	7	01 05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	2 Kegiatan	195.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Muara Badak	- 580.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK



	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	125 Orang	180.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Masyarakat Kecamatan Muara Badak	530.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
;	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Masyarakat Kecamatan Muara Badak	50.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
315	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki - Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	80 Persen	75.000.000,00		Publik	-	250.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	68 Persen	75.000.000,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintahan Desa -	250.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
3	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Pemerintahan Desa	100.000.000,00	KECAMATAN MUARA BADAK
					Kecamatan Marangkayu			12.622.030.723,00		Tuonk		33.403.751.244,00	KECAMATAN MARANGKAYU
7					UNSUR KEWILAYAHAN			12.622.030.723,00				33.403.751.244,00	KECAMATAN MARANGKAYU
7	01				KECAMATAN			12.622.030.723,00				33.403.751.244,00	KECAMATAN MARANGKAYU
316	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	77 Nilai	6.198.540.723,00			-	10.893.751.244,00	KECAMATAN MARANGKAYU
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	370.000.000,00		-	-	765.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		-	140.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		-	85.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		-	80.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
5	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		-	300.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU



7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan -	1 Laporan	4.386.850.108,00		-		-	-	6.768.012.248,00	KECAMATAN MARANGKAYI
7	01	l 01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4.221.850.108,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	-		6.648.012.248,00	KECAMATAN MARANGKAYU
7	01	l 01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	Marang Kayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			KECAMATAN MARANGKAYU
7	01	L 01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	140.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		-		60.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
7	01	L 01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang Milik Daerah	1 Laporan	55.000.000,00		-		-	-	400.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYI
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
7	01	l 01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-		160.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
7	01	l 01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		-		50.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
7	01	L 01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administarsi - umum	1 Laporan	380.910.200,00				-	-	1.030.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYI
7	01	l 01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
7	01	l 01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
7	01	l 01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	49.622.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
7	01	l 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	130.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-		110.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
7	01	l 01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	31.288.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-		90.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
7	01	l 01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-		350.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
7	01	l 01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-		210.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
7	01	l 01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik - daerah	4 jenis	137.864.415,00			-	-	-	510.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYI
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	97.864.415,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	-		130.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU



	7 0	01 01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana		5 Unit	40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	80.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
					Gedung Kantor atau Bangunan	Gedung Kantor atau Bangunan			Marang Kayu, Semua						
					Lainnya	Lainnya yang Disediakan			Kel/Desa						
	_							<u> </u>							
	7 0	01 01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JUmlah laporan	-	1 laporan	617.916.000,00		-	•	•	- 855.738.996,00	KECAMATAN MARANGKAYI
-	7 0	01 01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		1 Laporan	2.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	5,000,000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Surat Menyurat			Marang Kayu, Semua						
						,			Kel/Desa						
	7 0	01 01	2.08	0002	,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		1 Laporan	393.196.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	400.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
					Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan			Marang Kayu, Semua Kel/Desa						
						Listrik yang Disediakan			Kely Desa						
-	7 0	01 01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		1 Laporan	222.720.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	450.738.996,00	KECAMATAN MARANGKAYU
					Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang		·	Semua Kecamatan,						
						Disediakan			Semua Kel/Desa						
	7 0	01 01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang di pelihara	-	4 Unit	250.000.000,00		-	•	-	- 425.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAY
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pelinara									
	7 0	01 01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan		1 Unit	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		-	85,000,000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
					Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Dinas atau Kendaraan Dinas			Marang Kayu, Semua	, ,				· ·	
					Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jabatan yang Dipelihara dan			Kel/Desa						
					Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya									
	7 0	01 01	2.09	0002	. ,	Jumlah Kendaraan Dinas		1 Unit	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	120.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
					Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak			Marang Kayu, Semua Kel/Desa						
					Operasional atau Lapangan	dan Perizinannya			ikely Desa						
	7 0	01 01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana		3 Unit	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	220.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
					dan Prasarana Gedung Kantor atau	Gedung Kantor atau Bangunan			Marang Kayu, Semua						
					Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Kel/Desa						
317		24 02			PROGRAM PENYELENGGARAAN			00	5.542.490.000,00					24 245 000 000 00	KECAMATAN MARANGKAYI
31/	′ °	01 02			PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	-	88 persen	5.542.490.000,00					- 21.215.000.000,00	KECAWATAN WAKANGKAYO
					PUBLIK	Recamacan									
	7 0	01 02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan	Jumlah Laporan	-	1 Laporan	400.000.000,00		-	-	-	- 420.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYI
					Kegiatan										
					Pemerintahan di Tingkat										
					Kecamatan										
	7 0	01 02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi		1 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	-	-	-	160,000,000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
					dan Pelaksanaan Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan			Marang Kayu, Semua						
					Pemerintahan dengan Perangkat	Kegiatan Pemerintahan dengan			Kel/Desa						
					Daerah dan Instansi Vertikal Terkait										
						Vertikal Terkait									
	7 0	01 02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah Dokumen Peningkatan		1 Dokumen	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DRH)	_	_	_	260,000,000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
	<i>^</i> °	02	2.01	0002	Pemerintahan di Tingkat	Efektifitas Kegiatan Pemerintahan		2 Boltamen	Marang Kayu, Semua	Britist British British (BBI)				200,000,000,00	ALCOHOLINA IN HUMANIA
					Kecamatan	di Tingkat Kecamatan			Kel/Desa						
	7 0	01 02	2.02		Penyelenggaraan Urusan	Jumlah laporan	-	1 Laporan	100.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan		Masyarakat	- 60.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYI
					Pemerintahan yang Tidak						mengembangkan industri		Kecamatan		
					Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di						berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai		Marangkayu		
					Kecamatan						tambah di dalam negeri.				
	7 0	01 02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Jumlah Laporan Peningkatan		1 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan		Masyarakat Kecamatan	60.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
					Pelayanan kepada Masyarakat di	Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan			Marang Kayu, Semua		mengembangkan industri		Marangkayu		
					Wilayah Kecamatan	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kel/Desa		berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai				
						Recarriatari					tambah di dalam negeri.				
	7 0	01 02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Į.	-		5.042.490.000,00		-	-	-	- 20.735.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYI
					yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan		25 Laporan							1
	7 0	01 02	2.04	0002	Palalana Panasi i i	Lundah Lanana Balalana		1 (2000)	903 400 000 00 1/-1-1/	DANA DACILIACII (DDII)				775 000 000 00	KECAMATAN MARANGKAYU
	′ 0	01 02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan		1 Laporan	802.490.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DAMA RAGI HASIL (DRH)	[-	-	/35.000.000,00	KECAIVIATAN MAKANGKAYU
					yang terkait dengan Nonperizinan	Pemerintahan			Marang Kayu, Semua Kel/Desa						İ
									,						
	_	_	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan		100 Laporan	4.240.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	20.000.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
-	7 0	01 02	2.04	0005											
	7 0	01 02	2.04	0003	yang Terkait dengan Kewenangan	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Marang Kayu, Semua						
	7 0	01 02	2.04	0003	yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Marang Kayu, Semua Kel/Desa						



318	7	01 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga - Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	80 Persen	436.000.000,00					-	740.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
	7	01 03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang aktif	100 Persen	100.000.000,00		-	-	-	-	240.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
	7	01 03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	4 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		160.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
	7	01 03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
	7	01 03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga aktif -	4 lembaga	336.000.000,00		-	-	-	-	500.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
	7	01 03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	336.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		500.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
319	7	01 04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan	81,8 Persen	175.000.000,00					-	250.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
	7	01 04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan -	1 Laporan	175.000.000,00		-	-	-	-	250.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
	7	01 04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
	7	01 04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		200.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
320	7	01 05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa yang - melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik	70 persen	195.000.000,00					-		KECAMATAN MARANGKAYU
	7	01 05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan -	1 Laporan	195.000.000,00		-	-	-	-	220.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
	7	01 05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Jumat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	180.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		220.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
	7	01 05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	KECAMATAN MARANGKAYU
321	7	01 06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki - Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	54 Persen	75.000.000,00					-	85.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
	7	01 06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan - pengawasan Desa	11 Laporan	75.000.000,00		-	-	-	-	85.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU
	7	01 06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		85.000.000,00	KECAMATAN MARANGKAYU



					Kecamatan Muara Jawa			40.026.957.638,00				72.171.701.866,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7				UNSUR KEWILAYAHAN			40.026.957.638,00				72.171.701.866,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7 (01			KECAMATAN			40.026.957.638,00				72.171.701.866,00	KECAMATAN MUARA JAWA
322	7 (01 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	67 Nilai	20.140.307.638,00			-	24.144.648.862,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7 (01 01	2.01		NAGUPATEN KU Penganggaran, dan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7 Dokumen	340.000.000,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik	460.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7 (01 01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	40.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7 (01 01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	70.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7 (01 01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	50.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7 (01 01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	300.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
	7 (01 01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi - Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	14 Laporan	16.217.892.420,00		-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	17.546.252.456,00	KECAMATAN MUARA JAWA



7 /	01 01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		924 Orang/bulan	15.731.492.420,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	17.059.852.456,00 KECAMATAN MUARA JAWA
					dan Tunjangan ASN		Muara Jawa, Semua		pemerintahan daerah yang	
							Kel/Desa		profesional dan akuntabel	
									untuk mendukung	
									transformasi pelayanan	
									publik	
									1. Penataan dan	
									Pengembangan Tata Kelola	
									Pemerintahan dan Pelayanan	
									Publik	
-++	01 01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	4.1	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA DA CILIACII (DDIII)	7. Peningkatan tata kelola -	25.000.000,00 KECAMATAN MUARA JAWA
/ '	01 01	2.02	0005			1 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)		25.000.000,00 RECAMATAN MUAKA JAWA
				Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tahun SKPD dan Laporan Hasil		Muara Jawa, Semua		pemerintahan daerah yang	
				SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan		Kel/Desa		profesional dan akuntabel	
					Keuangan Akhir Tahun SKPD				untuk mendukung	
									transformasi pelayanan	
									publik	
									1. Penataan dan	
									Pengembangan Tata Kelola	
									Pemerintahan dan Pelayanan	
									Publik	
7	01 01	2 02	0007	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	12 Laporan	461.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DRH) -	7. Peningkatan tata kelola -	461.400.000,00 KECAMATAN MUARA JAWA
[[] [-1 01	2.02	3307	Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	12 Caporani	Muara Jawa, Semua		pemerintahan daerah yang	TECHNINIAN MOANA JAWA
								1		
[]	1	1		Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan		Kel/Desa	1	profesional dan akuntabel	
					Laporan Keuangan			1	untuk mendukung	
[]	1	1		1	Bulanan/Triwulanan/Semesteran			1	transformasi pelayanan	
[]	1	1		1	SKPD			1	publik	
									1. Penataan dan	
									Pengembangan Tata Kelola	
									Pemerintahan dan Pelayanan	
									Publik	
7	01 01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dikelola -	1017 Unit	130.200.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola	230.200.000,00 KECAMATAN MUARA JAWA
1 - 1 -				pada Perangkat Daerah					pemerintahan daerah yang	
				pada i ciangkat bacian					profesional dan akuntabel	
									untuk mendukung	
									transformasi pelayanan	
									publik	
									1. Penataan dan	
									Pengembangan Tata Kelola	
									Pemerintahan dan Pelayanan	
									Publik	
7 (01 01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	PENDAPATAN BAGI HASIL -	7. Peningkatan tata kelola -	25.000.000,00 KECAMATAN MUARA JAWA
				Kebutuhan Barang Milik Daerah	Milik Daerah SKPD		Muara Jawa, Semua		pemerintahan daerah yang	· I
				SKPD			Kel/Desa		profesional dan akuntabel	
				3.0 5			ney best		untuk mendukung	
									transformasi pelayanan	
									publik	
[]	1	1		1				1	1. Penataan dan	
								1	Pengembangan Tata Kelola	
[]	1	1		1				1	Pemerintahan dan Pelayanan	
		1		I					Publik	
7	01 01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	150.000.000,00 KECAMATAN MUARA JAWA
				SKPD	Barang Milik Daerah SKPD		Muara Jawa, Semua	1	pemerintahan daerah yang	
							Kel/Desa	1	profesional dan akuntabel	
							l .	1	untuk mendukung	
								1	transformasi pelayanan	
								1	nuhlik	
								1	1. Penataan dan	
								1		
								1	Pengembangan Tata Kelola	
								1	Pemerintahan dan Pelayanan	
		1						ļ	Publik	
			0005		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	12 Laporan	55.200.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	55.200.000,00 KECAMATAN MUARA JAWA
7	01 01	2.03		Laporan Barang Milik Daerah pada	Penyusunan Laporan Barang Milik		Muara Jawa, Semua	1	pemerintahan daerah yang	
7	01 01	2.03				1 1	Kel/Desa	1	profesional dan akuntabel	
7	01 01	2.03		SKPD	Daerah pada SKPD					
7	01 01	2.03			Daerah pada SKPD				untuk mendukung	
7	01 01	2.03			Daerah pada SKPD				untuk mendukung transformasi pelayanan	
7	01 01	2.03			Daerah pada SKPD				transformasi pelayanan	
7	01 01	2.03			Daerah pada SKPD				transformasi pelayanan publik	
7	01 01	2.03			Daerah pada SKPD				transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	
7	01 01	2.03			Daerah pada SKPD				transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	
7	01 01	2.03			Daerah pada SKPD				transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	



7														
	01	01	2.05	F	dministrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang	-	170 Orang	50.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola		300.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
				F	erangkat Daerah	mendapatkan pelayanan					pemerintahan daerah yang			
					•	administrasi kepegawaian					profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
7	01	01	2.05		imbingan Teknis Implementasi	Jumlah Orang yang Mengikuti		10 Orang	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		-	300.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
				F	eraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi			Muara Jawa, Semua		pemerintahan daerah yang			
						Peraturan Perundang-Undangan			Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
-	01	01	2.00	-	dministrasi Umum Perangkat	Irraelah Adariaistassi Harria		10 1	400.518.500,00		- 7. Peningkatan tata kelola		1 000 300 000 00	KECAMATAN MUARA JAWA
,	01	01	2.06			Jumlah Administrasi Umum	•	10 Layanan	400.518.500,00				1.099.200.000,00	KECAMATAN MUAKAJAWA
					aerah	Perangkat Daerah Yang Tersedia					pemerintahan daerah yang			
						1		1		I	profesional dan akuntabel			l
				I		1		1	1	1	untuk mendukung			l
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
			0.00	0001					E0.000.000.00 11.11.11.11				50,000,000	
/	01	01	2.06	0001 F	enyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi		1 Paket	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		-	50.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
						Listrik/Penerangan Bangunan			Muara Jawa, Semua		pemerintahan daerah yang			
				L	istrik/Penerangan Bangunan	Kantor yang Disediakan			Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
					antor	, ,					untuk mendukung			
				1.	anto						transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
		L												
7	01	01	2.06		enyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan		1 Paket	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-		KECAMATAN MUARA JAWA
					erlengkapan Kantor				Muara Jawa, Semua				25.000.000,00	
				F		Perlengkapan Kantor yang					pemerintahan daerah yang		25.000.000,00	
				F		Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Kel/Desa		pernermanan daeran yang profesional dan akuntabel		25.000.000,00	
				F							profesional dan akuntabel		25.000.000,00	
				F							profesional dan akuntabel untuk mendukung		25.000.000,00	
				F							profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		25.000.000,00	
				F							profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		25.000.000,00	
				F							profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		25.000.000,00	
				F							profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		25.000.000,00	
				F							profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		25.000.000,00	
				F							profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		25.000.000,00	
						Disediakan			Kel/Desa		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	01	01	2.06		enyediaan Peralatan Rumah	Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah		1 Paket	Kel/Desa 10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		KECAMATAN MUARA JAWA
7	01	01	2.06	0003 F	enyediaan Peralatan Rumah	Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah		1 Paket	Kel/Desa 10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			KECAMATAN MUARA JAWA
7	01	01	2.06	0003 F		Disediakan		1 Paket	Kel/Desa 10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-		KECAMATAN MUARA JAWA
7	01	01	2.06	0003 F	enyediaan Peralatan Rumah	Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah		1 Paket	Kel/Desa 10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-		KECAMATAN MUARA JAWA
7	01	01	2.06	0003 F	enyediaan Peralatan Rumah	Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah		1 Paket	Kel/Desa 10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung			KECAMATAN MUARA JAWA
7	01	01	2.06	0003 F	enyediaan Peralatan Rumah	Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah		1 Paket	Kel/Desa 10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-		KECAMATAN MUARA JAWA
7	01	01	2.06	0003 F	enyediaan Peralatan Rumah	Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah		1 Paket	Kel/Desa 10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik			KECAMATAN MUARA JAWA
7	01	01	2.06	0003 F	enyediaan Peralatan Rumah	Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah		1 Paket	Kel/Desa 10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-		KECAMATAN MUARA JAWA
7	01	01	2.06	0003 F	enyediaan Peralatan Rumah	Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah		1 Paket	Kel/Desa 10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			KECAMATAN MUARA JAWA
7	01	01	2.06	0003 F	enyediaan Peralatan Rumah	Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah		1 Paket	Kel/Desa 10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola			KECAMATAN MUARA JAWA
7	01	01	2.06	0003 F	enyediaan Peralatan Rumah	Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah		1 Paket	Kel/Desa 10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan den Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-		KECAMATAN MUARA JAWA
				0003 F	enyediaan Peralatan Rumah angga	Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			Kel/Desa 10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	25.000.000,00	
		01		0003 F	enyediaan Peralatan Rumah	Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah		1 Paket	Kel/Desa 10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-	25.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
				0003 F	enyediaan Peralatan Rumah angga	Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			Kel/Desa 10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	25.000.000,00	
				0003 F	enyediaan Peralatan Rumah angga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa 125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dapelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daperaken publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daperaken publik	-	25.000.000,00	
				0003 F	enyediaan Peralatan Rumah angga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			Kel/Desa 10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa 125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel	-	25.000.000,00	
				0003 F	enyediaan Peralatan Rumah angga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa 125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	25.000.000,00	
				0003 F	enyediaan Peralatan Rumah angga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa 125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dap Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dap relayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dap relayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan transformasi pelayanan profesional dan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	25.000.000,00	
				0003 F	enyediaan Peralatan Rumah angga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa 125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	25.000.000,00	
				0003 F	enyediaan Peralatan Rumah angga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa 125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik	-	25.000.000,00	
				0003 F	enyediaan Peralatan Rumah angga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa 125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		25.000.000,00	
				0003 F	enyediaan Peralatan Rumah angga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa 125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik - 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola	-	25.000.000,00	
				0003 F	enyediaan Peralatan Rumah angga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa 125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	25.000.000,00	



7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	20.569.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	50.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
									kely Desa		untuk mendukung transformasi pelayanan			
											publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	01	01	2.06	8000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	26.560.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
						Kunjungan ramu			Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung transformasi pelayanan			
											publik 1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	01	01	2.06		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		91 Laporan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	350.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
					uan konsultasi Ski D	SKPD			Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung transformasi pelayanan			
											publik 1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	01	01	2.06		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	39.949.500,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	70.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
					3450	Al sip billalliis pada 3KFD			Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan		1 Dokumen	35.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	52.640.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
					pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD			Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung transformasi pelayanan			
											publik 1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah barang milik daerah - penunjang urusan pemerintah	-	6 Unit	150.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang		273.440.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
					Daerah	daerah yang disediakan					profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung transformasi pelayanan			
											publik 1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang		1 Unit	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	183.440.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
					Operasional atau capangan	Disediakan			Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	1					1	1	Ī	1	l .	FUDIK	<u> </u>	L	1



7	01 0	1 2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang		2 Unit	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	90.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
					Disediakan		1	Muara Jawa, Semua		pemerintahan daerah yang			
								Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
- + , +	01 0	1 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah waktu penyediaan Jasa -		12 Bulan	2.261.696.718,00	 	- 7. Peningkatan tata kelola		2 490 EE6 406 00	KECAMATAN MUARA JAWA
'	01 0	2.08		Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan		12 bulan	2.201.050.718,00		pemerintahan daerah yang	· [3.460.330.400,00	RECAINATAN INIOARA JAWA
				Pemerintahan Daerah	Daerah yang disediakan					profesional dan akuntabel			
					Daeran yang disediakan					untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										nublik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
7	01 0	1 2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	2.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	50.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
					Surat Menyurat		1	Muara Jawa, Semua		pemerintahan daerah yang			
				1			1	Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
							1			untuk mendukung			1
										transformasi pelayanan			
							1			publik			1
				1			1			1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
	01 0	1 2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	1.462.920.394,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	<u> </u>	1 462 020 204 00	KECAMATAN MUARA JAWA
'	01 0	2.00	0002	Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan		12 Laporari	Muara Jawa, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang	-	1.402.920.394,00	RECAIVIATAN IVIOARA JAVVA
				Sumber Daya Air dan Listrik									
					Listrik yang Disediakan			Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
7	01 0	1 2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	796.276.324,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	1.967.636.012,00	KECAMATAN MUARA JAWA
				Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang			Muara Jawa, Semua		pemerintahan daerah yang			
					Disediakan			Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
							1			1. Penataan dan			1
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
				1			1			Publik			
+	01 0	1 2.09	+	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Lumlah Parana Milih Dassah	 	C2 Unit	590.000.000,00	+	- 7. Peningkatan tata kelola		755 000 000 00	KECAMATAN MUARA JAWA
'	01 0	2.09					63 Unit	590.000.000,00			· -	755.000.000,00	KECAWATAN WUAKA JAWA
				Penunjang Urusan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan		1			pemerintahan daerah yang			
1 ,			1	Daerah	Daerah yang dipelihara		1			profesional dan akuntabel			1
1 1	J						1	1		untuk mendukung			
								1	1		I		
									J	transformasi pelayanan			
										publik			
										publik 1. Penataan dan			
										publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
										publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
										publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	01 0	1 2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan		1 Unit	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		50.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
7	01 0	1 2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Paiak			1 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola	-	50,000,000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
7	01 0	1 2.09	0001	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Dinas atau Kendaraan Dinas		1 Unit	Muara Jawa, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang		50.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
7	01 0	1 2.09	0001	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		1 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		50.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
7	01 0	1 2.09	0001	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Dinas atau Kendaraan Dinas		1 Unit	Muara Jawa, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		50.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
7	01 0	1 2.09	0001	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		1 Unit	Muara Jawa, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		50.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
7	01 0	1 2.09	0001	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		1 Unit	Muara Jawa, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		50.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
7	01 0	1 2.09	0001	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		1 Unit	Muara Jawa, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	50,000,000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
7	01 0	1 2.09	0001	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		1 Unit	Muara Jawa, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		50.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
7	01 0	1 2.09	0001	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		1 Unit	Muara Jawa, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	50,000,000,00	KECAMATAN MUARA JAWA

7 0									
1 1	01 01	2.09 0002		Jumlah Kendaraan Dinas	8 Unit	225.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	390.000.000,00 KECAMATAN MUARA JAWA
			Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Operasional atau Lapangan yang		Muara Jawa, Semua		pemerintahan daerah yang	
			Perizinan Kendaraan Dinas	Dipelihara dan dibayarkan Pajak		Kel/Desa		profesional dan akuntabel	
			Operasional atau Lapangan	dan Perizinannya				untuk mendukung	
								transformasi pelayanan	
								publik	
								1. Penataan dan	
								Pengembangan Tata Kelola	
								Pemerintahan dan Pelayanan	
								Publik	
7 0	01 01	2.09 0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara	1 Unit	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASII (DBH)	7. Peningkatan tata kelola -	50.000.000,00 KECAMATAN MUARA JAWA
1 / 1 0	,1 01	2.03	Biaya	dan dibayarkan Perizinannya	1 Onic	Muara Jawa, Semua	DANA BAGITIASIE (DBIT)	pemerintahan daerah yang	SULUDUISMONIA IAN INICAINA IAN
			bldyd	uan uibayarkan Perizinannya					
						Kel/Desa		profesional dan akuntabel	
			Pemeliharaan dan Perizinan Alat					untuk mendukung	
			Besar					transformasi pelayanan	
								publik	
								1. Penataan dan	
								Pengembangan Tata Kelola	
								Pemerintahan dan Pelayanan	
								Publik	
7 0	01 01	2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin	50 Unit	65.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA RAGI HASII (DRH) -	7. Peningkatan tata kelola -	65.000.000,00 KECAMATAN MUARA JAW
$\Gamma'\Gamma'$,1 01	2.05	Lainnya	Lainnya yang Dipelihara	30 01110	Muara Jawa, Semua	S (DOI)	pemerintahan daerah yang	03.000.000,00 RECAMINIAN MONTH JAW.
			Lanniya	Lanniya yang Dipelinara					
		1 1				Kel/Desa		profesional dan akuntabel	
		1 1						untuk mendukung	
								transformasi pelayanan	
								publik	
								1. Penataan dan	
								Pengembangan Tata Kelola	
								Pemerintahan dan Pelayanan	
								Publik	
7 0	01 01	2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan	2 Unit	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASII (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	200.000.000,00 KECAMATAN MUARA JAWA
' '			Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang		Muara Jawa, Semua		pemerintahan daerah yang	
			Kantoi dan banganan Lanniya	Dipelihara/Direhabilitasi		Kel/Desa		profesional dan akuntabel	
				Dipelinara/ Direnabilitasi		Nell/ Desa			
								untuk mendukung	
								transformasi pelayanan	
								publik	
								1. Penataan dan	
								Pengembangan Tata Kelola	
								Pemerintahan dan Pelayanan	
								Publik	
7 0	01 02		PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Pelayanan Perijinan -	100 Persei	12.649.650.000,00			- 39.974.650.000,00 KECAMATAN MUARA JAV
			PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	dan Non Perijinan yang di	87,5 Perse	n '			
			PUBLIK	laksanakan sesuai SOP					
			- ODEIN	Tingkat Aksesibilitas Wllayah					
				Kecamatan					
		201			2 1/2 - 1/2 - 1/2	450 000 000 00	-		475 000 000 00 1/5044474414414141414
	01 02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan	Jumlah Koordinasi -	2 Kegiatan	450.000.000,00] - I-	7. Peningkatan tata kelola -	- 475.000.000,00 KECAMATAN MUARA JAN
′ 0		1 1	Kegiatan	Penyelenggaraan Kegiatan			1	pemerintahan daerah yang	
´ '			1	Pemerintahan di Tingkat			1	profesional dan akuntabel	
´ °				1		1	I I	untuk mendukung	
			Pemerintahan di Tingkat	Kecamatan					
			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan				transformasi pelayanan	
				Kecamatan					
				Kecamatan				transformasi pelayanan publik	
				Kecamatan				transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	
				Kecamatan				transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	
				Kecamatan				transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	
			Kecamatan					transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	01 02	2.01 0001	Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	2 Laporan	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH) -	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	175.000.000,00 KECAMATAN MUARA JAW
	01 02	2.01 0001	Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	2 Laporan	Muara Jawa, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	175.000.000,00 KECAMATAN MUARA JAV
	01 02	2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	2 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH) -	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	175.000.000,00 KECAMATAN MUARA JAV
	01 02	2.01 0001	Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	2 Laporan	Muara Jawa, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) -	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	175.000.000,00 KECAMATAN MUARA JA\
	01 02	2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	2 Laporan	Muara Jawa, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) -	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	175.000.000,00 KECAMATAN MUARA JAN
	01 02	2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	2 Laporan	Muara Jawa, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) -	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darean yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	175.000.000,00 KECAMATAN MUARA JAV
	01 02	2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	2 Laporan	Muara Jawa, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) -	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	175.000.000,00 KECAMATAN MUARA JAW
	01 02	2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	2 Laporan	Muara Jawa, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) -	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	175.000.000,00 KECAMATAN MUARA JAW
	01 02	2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	2 Laporan	Muara Jawa, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) -	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan danerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	175.000.000,00 KECAMATAN MUARA JAW.
	01 02	2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	2 Laporan	Muara Jawa, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) -	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	175.000.000,00 KECAMATAN MUARA JAW.



7	7 0:	1 02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 Dokumen	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		300.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
7	7 0:	1 02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat		2 Kegiatan	12.199.650.000,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		39.499.650.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
7	7 0:	1 02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan		4 Laporan	1.469.650.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	1.499.650.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
						Pemerintahan			Kel/Desa		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	7 0:	1 02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		14 Laporan	10.730.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	-	38.000.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
324 7	7 0:	1 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	-	100 Persen	6.857.000.000,00			-	7.262.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
7		1 03			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	/ Kelurahan		2 Kegiatan	130.000.000,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		KECAMATAN MUARA JAWA
7	7 0:	1 03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		45 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengambangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		160.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA
7	7 0:	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		2 Laporan	70.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-	125.000.000,00	KECAMATAN MUARA JAWA



							-		
7 0	01	03 2.03	Pemberdayaan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan -	246 Lembaga	6.727.000.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola -	6.977.000.000,00 KECAMATAN MUARA JAWA
			Kemasyarakatan Tingkat	tingkat kecamatan	Kemasyarakat			pemerintahan daerah yang	
			Kecamatan					profesional dan akuntabel	
								untuk mendukung	
								transformasi pelayanan	
								publik	
								2. Pengembangan sumber	
								daya manusia yang sehat,	
								produktif, terampil	
7 0	01	03 2.03	0001 Penyelenggaraan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	359 Lembaga	6.627.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- 7. Peningkatan tata kelola -	6.777.000.000,00 KECAMATAN MUARA JAWA
			Kemasyarakatan	yang Diselenggarakan	Kemasyarakatan	Muara Jawa, Semua		pemerintahan daerah yang	
						Kel/Desa		profesional dan akuntabel	
								untuk mendukung	
								transformasi pelayanan	
								publik	
								2. Pengembangan sumber	
								daya manusia yang sehat,	
								produktif, terampil	
7 0	01	03 2.03	0002 Peningkatan Kapasitas Lemb	aga Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- 7. Peningkatan tata kelola -	200.000.000,00 KECAMATAN MUARA JAWA
			Kemasyarakatan	yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kemasyarakatan	Muara Jawa, Semua	, ,	pemerintahan daerah yang	
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Kel/Desa		profesional dan akuntabel	
1 1	1		1 1			,		untuk mendukung	
	1		1 1					transformasi pelayanan	
						1		publik	
1 1						1		2. Pengembangan sumber	
1 1						1		daya manusia yang sehat,	
1 1						1		produktif, terampil	
7 0	01	04	PROGRAM KOORDINASI	Persentase Kegiatan Koordinasi -	100 Persen	125.000.000,00	+	processor, seconds.	- 175.000.000,00 KECAMATAN MUARA JAW
1 ' 1 "			KETENTRAMAN DAN KETERT		100 / 6/36/1	123.000.000,00			2. 3.300.000,00 INCOMPATAN WOARA JAW
			UMUM	Umum yang Melibatkan Kepolisian					
			OMOM	Negara Republik Indonesia dan					
				Instansi Vertikal; serta Tokoh					
				Agama dan Tokoh Masyarakat di					
				Wilayah Kecamatan					
				Wilayan Kecamatan					
7 0	01	04 2.01	Koordinasi Upaya Penyeleng	garaan Jumlah kegiatan dalam Upaya -	1 Kegiatan	125.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola -	- 175.000.000,00 KECAMATAN MUARA JAW
′ °	- -	2.01	Ketenteraman dan Ketertib		1 registali	223.000.000,00	[*	pemerintahan daerah yang	173.000.000,00 RECARRIAN WOARA JAW
			Umum	dan Ketertiban Umum		1		profesional dan akuntabel	
	1		Omum	uan Ketertipan Omum				untuk mendukung	
1 1						1			
1	1		1 1					transformasi pelayanan	
								publik	
								2. Pengembangan sumber	
								daya manusia yang sehat, produktif, terampil	
						405 000 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00			
/ 0	01	04 2.01			3 Laporan	125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola	175.000.000,00 KECAMATAN MUARA JAW
			Tokoh Agama dan Tokoh	Harmonisasi Hubungan dengan		Muara Jawa, Semua		pemerintahan daerah yang	
			Masyarakat	Tokoh Agama dan Tokoh		Kel/Desa		profesional dan akuntabel	
1 1	1		1 1	Masyarakat				untuk mendukung	
1 1	1		1 1					transformasi pelayanan	
						1		publik	
						1		2. Pengembangan sumber	
						1		daya manusia yang sehat,	
			<u> </u>					produktif, terampil	
7 0	01	05	PROGRAM PENYELENGGAR		100 Persen	255.000.000,00			- 615.403.004,00 KECAMATAN MUARA JAW
			URUSAN PEMERINTAHAN U	MUM Pemerintahan Umum]			
7 ^	01	05 2.01	Parcelaneaean Herrari	Jumlah Urusan Pemerintahan yang -	1 Kegiatan	255.000.000,00		7 Davinghatan tata halala	- 615.403.004,00 KECAMATAN MUARA JAW
' 0	01	03 2.01	Penyelenggaraan Urusan		1 Kegiatan	255.000.000,00	-	- 7. Peningkatan tata kelola - pemerintahan daerah yang	- 015.403.004,00 RECAIVIATAN MUARA JAV
	1		Pemerintahan Umum Sesuai	dilaksanakan Kecamatan					
	1		Penugasan Kepala Daerah					profesional dan akuntabel	
	1		1 1					untuk mendukung	
1 1	1		1 1					transformasi pelayanan	
1 1						1		publik	
1 1						1		2. Pengembangan sumber	
]		daya manusia yang sehat, produktif, terampil	1
		05 3.01	0004 Dombines - Karalana	Side Inmish Orang yang Mangilist	400 Orang	180,000,000,00	DANA PAGLHASII (DDII)		532.701.502,00 KECAMATAN MUARA JAW.
7 ^	01	05 2.01	0004 Pembinaan Kerukunan Anta		400 Orang	180.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DAINA BAUI NASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola	552./U1.5U2,UU KECAMATAN MUARA JAW
7 0	01		dan Intra Suku, Umat Berag Ras, dan Golongan Lainnya			Muara Jawa, Semua		pemerintahan daerah yang	
7 0	01			Guna dan Intra Suku , Umat Beragama,		Kel/Desa		profesional dan akuntabel untuk mendukung	
7 0	01								
7 0	01		Mewujudkan Stabilitas Kean				l		
7 0	01			al Mewujudkan Stabilitas Keamanan				transformasi pelayanan	
7 0	01		Mewujudkan Stabilitas Kean					transformasi pelayanan publik	
7 0	01		Mewujudkan Stabilitas Kean	al Mewujudkan Stabilitas Keamanan				transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber	
7 0	01		Mewujudkan Stabilitas Kean	al Mewujudkan Stabilitas Keamanan				transformasi pelayanan publik	



7	01	05	2.01	8000	Pelaksanaan Tugas Forum	Jumlah Dokumen Tugas Forum	2 Dokumen	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	82.701.502,00	KECAMATAN MUARA JAWA
			1		Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Muara Jawa, Semua	, ,	pemerintahan daerah yang		
					Kooramasi i inipinan di Kecamatan	Roof amasi i impinan di Recamatan		Kel/Desa		profesional dan akuntabel		
								Kel/ Desa				
										untuk mendukung		
										transformasi pelayanan		
										publik		
										2. Pengembangan sumber		
										daya manusia yang sehat,		
										produktif, terampil		
					Kelurahan Muara Jawa Ilir			1.940.004.000,00			2.156.250.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA
												ILIR
7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.940.004.000,00			2.156.250.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA
												ILIR
7	01				KECAMATAN			1.940.004.000,00			2.156.250.000.00	KELURAHAN MUARA JAWA
-												IIIR
327 7	- 04				PROGRAM PENUNJANG URUSAN	AUII-I CAMID DII-A DII	67 Nilai	74.004.000,00	-		00 350 000 00	KELURAHAN MUARA JAWA
32/ /	01	01				Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	67 Nilai	74.004.000,00			86.250.000,00	
					PEMERINTAHAN DAERAH							ILIR
					KABUPATEN/KOTA							
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Administrasi Umum -	5 Layanan	43.794.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola -	52,590,000.00	KELURAHAN MUARA JAWA
-	1 -	1 1	1		Daerah	Perangkat Daerah Yang Tersedia		* *	1	pemerintahan daerah yang		IIIR
	1	1 1	J						1	profesional dan akuntabel		I
	1	1 1						1				1
								1		untuk mendukung		1
								1		transformasi pelayanan		1
										publik		
	1	1 1							I I	1. Penataan dan		ĺ
										Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	1.150.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	1.150.000.00	KELURAHAN MUARA JAWA
					,	Listrik/Penerangan Bangunan		Muara Jawa, Muara		pemerintahan daerah yang		II ID
					Listella (Decrease Decrease)							ILIK
					Listrik/Penerangan Bangunan	Kantor yang Disediakan		Jawa Ilir		profesional dan akuntabel		
					Kantor					untuk mendukung		
										transformasi pelayanan		
										publik		
										1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	3 Paket	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DRH) -	7. Peningkatan tata kelola -	10,000,000,00	KELURAHAN MUARA JAWA
'		0.1	2.00	0001	r criyediddir barian cogistik karkor	yang Disediakan	3 Taket	Muara Jawa, Muara	Britter British Colonia	pemerintahan daerah yang	10.000.000,00	II ID
						yang Disediakan						ILIK
								Jawa Ilir		profesional dan akuntabel		
										untuk mendukung		
										transformasi pelayanan		
										publik		
			J						1	1. Penataan dan		1
			J						1			1
	1	1 1						1		Pengembangan Tata Kelola		ĺ
			J						1	Pemerintahan dan Pelayanan		1
								1		Publik		1
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1 Paket	2.644.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DRH) -	7. Peningkatan tata kelola -	3 120 000 00	KELURAHAN MUARA JAWA
Ι΄	01	J. 1	2.00	5555			I I direct	Muara Jawa, Muara		pemerintahan daerah yang	3.120.000,00	II IR
	1	1 1			Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan			I I			ILIN
	1	1 1						Jawa Ilir		profesional dan akuntabel		ĺ
			J						1	untuk mendukung		1
			J						1	transformasi pelayanan		1
	1	1 1						1		publik		ĺ
			J						1			1
			J						1	1. Penataan dan		1
	1	1 1						1		Pengembangan Tata Kelola		ĺ
			J						1	Pemerintahan dan Pelayanan		1
			J						1	Publik		1
7	01	01	2.06	nnna	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	46 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	7. Peningkatan tata kelola -	38 330 000 00	KELURAHAN MUARA JAWA
Ι΄	01	01	2.00	5005			+о сароган		SAME BAGITIASIC (DBIT)		36.320.000,00	ILID
			J		dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Muara Jawa, Muara	1	pemerintahan daerah yang		ILIK
			J			SKPD		Jawa Ilir	1	profesional dan akuntabel		1
	1	1 1						1		untuk mendukung		ĺ
		1 1	J						1	transformasi pelayanan		1
								1				1
						1		í	1	publik		I
										1. Penataan dan		
										Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		
										Pengembangan Tata Kelola		

	7	01 01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-	12 Bulan	15.020.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-		KELURAHAN MUARA JAWA ILIR
						Daeran yang disediakan					untuk mendukung transformasi pelayanan			
											publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
	7	01 01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BACIHASII (DBII)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola		1,050,000,00	KELURAHAN MUARA JAWA
		01 01	2.08	0001	renyeulaan jasa surat ivienyurat	Surat Menyurat		12 Laporan	Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	DANA BAGITIASIE (DBII)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		1.530.000,00	ILIR
											transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	7	01 01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	14.520.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	14.520.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA ILIR
									3000		untuk mendukung transformasi pelayanan nuhlik			
											1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
	7	01 01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	-	15 Unit	15.190.000,00		Publik - 7. Peningkatan tata kelola		17.190.000.00	KELURAHAN MUARA JAWA
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara					pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			ILIR
											untuk mendukung transformasi pelayanan publik			
											1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	7	01 01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang		5 Unit	8.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	10.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA ILIR
					Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Jawa IIII		untuk mendukung transformasi pelayanan			
											publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
	7	01 01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin		10 Unit	7.190.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BACILIACII (DBII)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola		7,100,000,00	KELURAHAN MUARA JAWA
		01 01	2.09	0006	Lainnya	Lainnya yang Dipelihara		10 Onit	7.190.000,00 Rab. Rutal Raftanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		7.190.000,00	ILIR
											untuk mendukung transformasi pelayanan publik			
											Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
220	7	01 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Lembaga		100 Persen	1.856.000.000,00		Publik		3 050 000 000 00	KELURAHAN MUARA JAWA
320					MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	-		·			-	I	ILIR
	7	01 03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	-	3 Kegiatan	756.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-		KELURAHAN MUARA JAWA ILIR
											untuk mendukung transformasi pelayanan publik			
											1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			



	7 0	01 03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan		23 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	10.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA ILIR
					Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan					untuk mendukung transformasi pelayanan publik			
											1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	7 (1 03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana		5 Unit	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DRH)		-	650,000,000,00	KELURAHAN MUARA JAWA
		_			Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun			Muara Jawa, Muara	DAU TAMBAHAN	pemerintahan daerah yang			ILIR
						, , ,			Jawa Ilir	DUKUNGAN PENDANAAN				
										KELURAHAN	untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik 6. Pengembangan			
											konektivitas dan			
											pembangunan infrastruktur			
											secara terpadu dan merata			
											·			
	7 0	01 03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Pokmas dan Ormas yang		15 Pokmas /	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		-	300.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA
					Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan		Ormas	Muara Jawa, Muara Jawa Ilir		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			ILIR
						Masyarakat di Kelurahan			Jawa IIII		untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											2. Pengembangan sumber			
											daya manusia yang sehat, produktif, terampil			
-	7 0	01 03	2.03	1	Pemberdayaan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	-	22 Lembaga	1.100.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola		1.100.000.000.00	KELURAHAN MUARA JAWA
	1	_			Kemasyarakatan Tingkat	tingkat kecamatan		Kemasyarakat			pemerintahan daerah yang			ILIR
					Kecamatan						profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
	7 6	01 03	2.02	0001	Danielangaraan Lambaga	Lumlah Lambaga Kamasususukatan		22 Lomboso	1.100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BACILIACII (DDII)	Publik - 7. Peningkatan tata kelola		1 100 000 000 00	KELURAHAN MUARA JAWA
	′ ′	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		22 Lembaga Kemasyarakatan	Muara Jawa, Muara	DANA BAGITIASIL (DBII)	pemerintahan daerah yang		1.100.000.000,00	ILIR
					,	, ,		,	Jawa Ilir		profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
329	_				PROGRAM PENYELENGGARAAN				10.000.000,00		Publik			KELURAHAN MUARA JAWA
329	/	05			URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	100 Persen	10.000.000,00			-	10.000.000,00	ILIR
	7 0	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan	Jumlah urusan pemerintahan yang	-	1 Kegiatan	10.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola		10.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA
					Pemerintahan Umum Sesuai	dilaksanakan kecamatan					pemerintahan daerah yang			ILIR
					Penugasan Kepala Daerah						profesional dan akuntabel untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	7 C	01 05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku	Jumlah Orang yang Mengikuti		100 Orang	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	10.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA
					dan Intra Suku, Umat Beragama,	Pembinaan Kerukunan Antar Suku			Muara Jawa, Muara		pemerintahan daerah yang			ILIR
					Ras, dan Golongan Lainnya Guna	dan Intra Suku , Umat Beragama,			Jawa Ilir		profesional dan akuntabel			
					Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan					untuk mendukung transformasi pelayanan			
					, regional, dan Hasional	Lokal, Regional, dan Nasional					publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	I		1	1	1	l .				I	FUDIK	l L	l.	1



						Kelurahan Muara Jawa Tengah			1.835.315.000,00				3.017.630.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA
						,			·		,			TENGAH
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.835.315.000,00				3.017.630.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
	7 (01				KECAMATAN			1.835.315.000,00				3.017.630.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
330	7	01 (01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	67 Nilai	75.315.000,00				88.630.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
	7	01 (01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	4 Layanan	46.295.000,00		-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	68.410.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
	7	01 (01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik	36.130.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
	7	01 (01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan Paket	1.295.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.280.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
	7	01 (01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	30,000,000,00	KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
	7	01 (01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	15.020.000,00		-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	13.220.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
	7 (01 (01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan Laporan	500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	DANA BAGI HASIL (DBH) -	PUBINK 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.100.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH

7												
	01	01 2.0	2.08 00	004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Bulan	14.520.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	12.120.000.00	KELURAHAN MUARA JAWA
				Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan	Muara Jawa, Muara		pemerintahan daerah yang			TENGAH
					Disediakan		Jawa Tengah		profesional dan akuntabel			
									untuk mendukung			
									transformasi pelayanan			
									publik			
									1. Penataan dan			
									Pengembangan Tata Kelola			
									Pemerintahan dan Pelayanan			
									Publik			
+	01	01 2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Lumlah Barana Milili Daarah	6 Unit	14.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola		7 000 000 00	KELURAHAN MUARA JAWA
'	01	01 2.	2.09	Penunjang Urusan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan	6 Unit	14.000.000,00		pemerintahan daerah yang	· -		TENGAH
				Daerah					pemerintanan daeran yang profesional dan akuntabel			TENGAH
				Daeran	Daerah yang dipelihara				profesional dan akuntabel untuk mendukung			
									transformasi pelayanan			
									publik			
									1. Penataan dan			
									Pengembangan Tata Kelola			
									Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
						4 1 1 1	40.000.000.000					
7	01	U1 2.0	2.09 00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas	1 Unit	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-		KELURAHAN MUARA JAWA
				Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Operasional atau Lapangan yang		Muara Jawa, Muara		pemerintahan daerah yang			TENGAH
				Perizinan Kendaraan Dinas	Dipelihara dan dibayarkan Pajak		Jawa Tengah		profesional dan akuntabel			
				Operasional atau Lapangan	dan Perizinannya				untuk mendukung			
									transformasi pelayanan			
									publik			
									1. Penataan dan			
									Pengembangan Tata Kelola			
									Pemerintahan dan Pelayanan			
									Publik			
7	01	01 2.0	2.09 00	006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		5 Unit	4.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-		KELURAHAN MUARA JAWA
				Lainnya	Lainnya yang Dipelihara		Muara Jawa, Muara		pemerintahan daerah yang			TENGAH
							Jawa Tengah		profesional dan akuntabel			
									untuk mendukung			
									transformasi pelayanan			
									publik			
									1. Penataan dan			
									Pengembangan Tata Kelola			
									Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
									Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
1 7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Lembaga -	100 Persen	1.750.000.000.00		Pemerintahan dan Pelayanan		2.894.000.000.00	KELURAHAN MUARA JAWA
31 7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Persentase Lembaga - Pemberdayaan Masyarakat	100 Persen	1.750.000.000,00		Pemerintahan dan Pelayanan		2.894.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
31 7	01	03		MASYARAKAT DESA DAN	Pemberdayaan Masyarakat	100 Persen	1.750.000.000,00		Pemerintahan dan Pelayanan	-	2.894.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
			2.02	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif				Pemerintahan dan Pelayanan Publik			TENGAH
		03 2.0	2.02	MASYARAKAT DESA DAN	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa	100 Persen 2 Kegiatan	1.750.000.000,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola			TENGAH KELURAHAN MUARA JAWA
			2.02	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif				Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang			TENGAH
			2.02	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa				Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			TENGAH KELURAHAN MUARA JAWA
			2.02	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa				Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung			TENGAH KELURAHAN MUARA JAWA
			2.02	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa				Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan			TENGAH KELURAHAN MUARA JAWA
			2.02	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa				Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik			TENGAH KELURAHAN MUARA JAWA
			2.02	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa				Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			TENGAH KELURAHAN MUARA JAWA
			2.02	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa				Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			TENGAH KELURAHAN MUARA JAWA
			2.02	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa				Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			TENGAH KELURAHAN MUARA JAWA
7	01	03 2.4		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	2 Kegiatan	750.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1.894.000.000,00	TENGAH KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
7	01	03 2.4		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana		750.000.000,00 450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola		1.894.000.000,00	TENGAH KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH KELURAHAN MUARA JAWA
7	01	03 2.4		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	2 Kegiatan	750.000.000,00 450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA ALOKASI UMUM	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang		1.894.000.000,00	TENGAH KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
7	01	03 2.4		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana	2 Kegiatan	750.000.000,00 450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		1.894.000.000,00	TENGAH KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH KELURAHAN MUARA JAWA
7	01	03 2.4		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana	2 Kegiatan	750.000.000,00 450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA ALOKASI UMUM	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		1.894.000.000,00	TENGAH KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH KELURAHAN MUARA JAWA
7	01	03 2.4		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana	2 Kegiatan	750.000.000,00 450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA ALOKASI UMUM	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		1.894.000.000,00	TENGAH KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH KELURAHAN MUARA JAWA
7	01	03 2.4		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana	2 Kegiatan	750.000.000,00 450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA ALOKASI UMUM	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		1.894.000.000,00	TENGAH KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH KELURAHAN MUARA JAWA
7	01	03 2.4		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana	2 Kegiatan	750.000.000,00 450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA ALOKASI UMUM	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		1.894.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
7	01	03 2.4		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana	2 Kegiatan	750.000.000,00 450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA ALOKASI UMUM	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola		1.894.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH KELURAHAN MUARA JAWA
7	01	03 2.4		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana	2 Kegiatan	750.000.000,00 450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA ALOKASI UMUM	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1.894.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
7	01	03 2.4	2.02 00	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Di Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Kegiatan 5 Unit	750.000.000,00 450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1.894.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
7	01	03 2.4	2.02 00	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang	2 Kegiatan 5 Unit	750.000.000,00 450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa Tengah 300.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dareh yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola		1.894.000.000,00 1.054.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH KELURAHAN MUARA JAWA KELURAHAN MUARA JAWA
7	01	03 2.4	2.02 00	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Di Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	2 Kegiatan 5 Unit	750.000.000,00 450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daarah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 9. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang		1.894.000.000,00 1.054.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
7	01	03 2.4	2.02 00	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang	2 Kegiatan 5 Unit	750.000.000,00 450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa Tengah 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daarah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dareah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel dan pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel dan pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel		1.894.000.000,00 1.054.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH KELURAHAN MUARA JAWA KELURAHAN MUARA JAWA
7	01	03 2.4	2.02 00	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	2 Kegiatan 5 Unit	750.000.000,00 450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		1.894.000.000,00 1.054.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH KELURAHAN MUARA JAWA KELURAHAN MUARA JAWA
7	01	03 2.4	2.02 00	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	2 Kegiatan 5 Unit	750.000.000,00 450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daarah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dareah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel dan pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel dan pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel		1.894.000.000,00 1.054.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH KELURAHAN MUARA JAWA KELURAHAN MUARA JAWA
7	01	03 2.4	2.02 00	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	2 Kegiatan 5 Unit	750.000.000,00 450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		1.894.000.000,00 1.054.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH KELURAHAN MUARA JAWA KELURAHAN MUARA JAWA
7	01	03 2.4	2.02 00	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	2 Kegiatan 5 Unit	750.000.000,00 450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Pensingkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber		1.894.000.000,00 1.054.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH KELURAHAN MUARA JAWA KELURAHAN MUARA JAWA
7	01	03 2.4	2.02 00	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	2 Kegiatan 5 Unit	750.000.000,00 450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		1.894.000.000,00 1.054.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH KELURAHAN MUARA JAWA KELURAHAN MUARA JAWA



	7 01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	20 Lembaga Kemasyarakat	1.000.000.000,00		-	7. Peningkatan tata kelola - pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	1.000.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
											untuk mendukung transformasi pelayanan			
											publik 1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
-	7 01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga	1 000 000 000 00	Kah Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -		1,000,000,000,00	KELURAHAN MUARA JAWA
	, 01	0.5	2.03	0001	Kemasyarakatan	yang Diselenggarakan	Kemasyarakatan	1.000.000,000,000	Muara Jawa, Muara	Shirt Briefin Bic (BBri)	pemerintahan daerah yang		1.000.000.000,00	TENGAH
									Jawa Tengah		profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
332	7 04	0.5			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Colores Development House	400 0	10.000.000,00			Publik		25 000 000 00	KELURAHAN MUARA JAWA
332	/ 01	05			URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan - Pemerintahan Umum	100 Persen	10.000.000,00				-	35.000.000,00	TENGAH
	7 01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang -	1 Kegiatan	10.000.000,00		-	7. Peningkatan tata kelola -	-	35.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA
					Pemerintahan Umum Sesuai	dilaksanakan Kecamatan					pemerintahan daerah yang			TENGAH
					Penugasan Kepala Daerah						profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	7 01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku	Jumlah Orang yang Mengikuti	50 Orang	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -		35.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA
					dan Intra Suku, Umat Beragama,	Pembinaan Kerukunan Antar Suku			Muara Jawa, Muara	` ′	pemerintahan daerah yang			TENGAH
					Ras, dan Golongan Lainnya Guna	dan Intra Suku , Umat Beragama,			Jawa Tengah		profesional dan akuntabel			
					Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan					untuk mendukung transformasi pelayanan			
					Local, Regional, dan Nasional	Lokal, Regional, dan Nasional					publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
					Kelurahan Muara Jawa Ulu	1		2.884.520.000,00		l l			3.099.720.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA ULU
	7				UNSUR KEWILAYAHAN			2.884.520.000,00						KELURAHAN MUARA JAWA ULU
	7 01				KECAMATAN			2.884.520.000,00						KELURAHAN MUARA JAWA ULU
333					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	67 Nilai	68.520.000,00				-		KELURAHAN MUARA JAWA ULU
	7 01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Administrasi Umum -	5 Layanan	39.000.000,00		-	7. Peningkatan tata kelola -	-	49.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA
					Daerah	Perangkat Daerah Yang Tersedia					pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			ULU
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	7 01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	2.000.000,00		DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -		2.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA
					Listrik/Penerangan Bangunan	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Muara Jawa, Muara Jawa Ulu		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			ULU
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Name yang Disediakan			Jawa Ulu		untuk mendukung			
]			transformasi pelayanan]	
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
						l		I.		L			1	l

7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	9.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	19.000.000,00 KELUR ULU	RAHAN MUARA JAWA
									Jawa Ulu		profesional dan akuntabel untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
7	01	01	2.06	0005		Jumlah Paket Barang Cetakan dan		1 Paket	1.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-		IRAHAN MUARA JAWA
					Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan			Muara Jawa, Muara Jawa Ulu		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		ULU	
									Jame old		untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik 1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan		30 Laporan	27.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	27.000.000,00 KELUF	IRAHAN MUARA IAWA
					dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Muara Jawa, Muara		pemerintahan daerah yang		ULU	
			l			SKPD			Jawa Ulu		profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		-	12 Bulan	15.020.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola			JRAHAN MUARA JAWA
					Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan					pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		ULU	
						bacian yang aisealakan					untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik 1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	.	1.200.000,00 KELUF	IRAHAN MUARA JAWA
					, ,	Surat Menyurat		· ·	Muara Jawa, Muara	, ,	pemerintahan daerah yang		ULU	
									Jawa Ulu		profesional dan akuntabel untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang		12 Laporan	14.520.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	14.520.000,00 KELUF	IRAHAN MUARA JAWA
			l		101101	Disediakan			Jawa Ulu		profesional dan akuntabel		0.00	
				1							untuk mendukung			
			l								transformasi pelayanan publik			
											1. Penataan dan			
				1							Pengembangan Tata Kelola			
				1							Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah		-	14 Unit	14.500.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	- -		JRAHAN MUARA JAWA
				1	Penunjang Urusan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan					pemerintahan daerah yang		ULU	
			l		Daerah	Daerah yang dipelihara					profesional dan akuntabel untuk mendukung			
				1							transformasi pelayanan			
			l								publik			
				1							Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
			l								Pemerintahan dan Pelayanan			
	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>							Publik			

	7 (01 01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	4 Unit	8.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		10.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA ULU
					Operasional atau Lapangan	dan Perizinannya		Jawa Otu		untuk mendukung transformasi pelayanan			
										publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
		24 04	2.00	0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin	40.11/2	6.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANIA DA CILIACII (DDIII)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola -		0.000.000.00	KELURAHAN MUARA JAWA
	' '	01	2.09	0006	Lainnya	Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Muara Jawa, Muara Jawa Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		9.000.000,00	ULU
										untuk mendukung transformasi pelayanan publik			
										1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
334	7 (01 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga - Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	100 Persen	2.806.000.000,00			-		KELURAHAN MUARA JAWA ULU
	7 (01 03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	3 Kegiatan	756.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola - pemerintahan daerah yang	-		KELURAHAN MUARA JAWA ULU
										profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan			
										publik 1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	7 (01 03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	50 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang		6.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA
					Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jawa Ulu		profesional dan akuntabel untuk mendukung			
										transformasi pelayanan publik			
										1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
	7 (01 03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	5 Unit	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH),	Publik - 7. Peningkatan tata kelola -		650.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA
					Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun		Muara Jawa, Muara Jawa Ulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung			OLO
										transformasi pelayanan publik			
										6. Pengembangan konektivitas dan			
										pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata			
	7 (01 03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	6 Pokmas / Ormas	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola - pemerintahan daerah yang		300.000.000,000	KELURAHAN MUARA JAWA ULU
						Masyarakat di Kelurahan		Jawa Ulu		profesional dan akuntabel untuk mendukung			
										transformasi pelayanan publik			
										Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil			
	7 (01 03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan - tingkat kecamatan	41 Lembaga Kemasyarakat	2.050.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola - pemerintahan daerah yang	-		KELURAHAN MUARA JAWA ULU
					Kecamatan					profesional dan akuntabel untuk mendukung			
										transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan			
										konektivitas dan pembangunan infrastruktur			
										secara terpadu dan merata			



	7	01 03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	4	1 Lembaga	2.050.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	2.050.000.000.00	KELURAHAN MUARA JAWA
					Kemasyarakatan	yang Diselenggarakan		Cemasyarakatan	Semua Kecamatan,	,	pemerintahan daerah yang		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ULU
					Remosyarakatan	yang biserenggarakan	"	cirio sy ai ana am	Semua Kel/Desa		profesional dan akuntabel			020
									Seriida Kely Desa		untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											6. Pengembangan			
											konektivitas dan			
											pembangunan infrastruktur			
											secara terpadu dan merata			
335		01 05	+	+	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Colores Branches	<u> </u>	.00 Persen	10.000.000,00	+			10 000 000 00	KELURAHAN MUARA JAWA
333	1 ′ 1	01 03				Cakupan Penyelenggaraan Urusan	·	.uu Persen	10.000.000,00				10.000.000,00	
					URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pemerintahan Umum								ULU
	+ - +			_										
	7	01 05	2.01		Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang	- 1	Kegiatan	10.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	- - -	10.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA
					Pemerintahan Umum Sesuai	dilaksanakan Kecamatan					pemerintahan daerah yang			ULU
					Penugasan Kepala Daerah						profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
		1	1							İ	Pengembangan Tata Kelola			
1		J	1							İ	Pemerintahan dan Pelayana			1
			1							1	Publik			
-	+ - +	01 05	3.04	000	Dombinson Kasul	Jumlah Osana uan - * 4 'U*'		I Orana	10,000,000,00	DANA BACLUACU (DC::)	. usin	+ +	10 000 000 00	VELLIDALIANI ANI LADA LAVAGO
	'	01 05	2.01	0004		Jumlah Orang yang Mengikuti]	5 Orang	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DAMA RAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola		10.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA
		1	1		dan Intra Suku, Umat Beragama,	Pembinaan Kerukunan Antar Suku			Muara Jawa, Muara	İ	pemerintahan daerah yang			ULU
			1		Ras, dan Golongan Lainnya Guna	dan Intra Suku , Umat Beragama,			Jawa Ulu	1	profesional dan akuntabel			
			1		Mewujudkan Stabilitas Keamanan	Ras, dan Golongan Lainnya Guna				1	untuk mendukung			
					Lokal, Regional, dan Nasional	Mewujudkan Stabilitas Keamanan					transformasi pelayanan			
						Lokal, Regional, dan Nasional					publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	+ +	_		_						L	FUDIK			
					Kelurahan Muara Jawa Pesisir				2.437.290.000,00				2.464.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR
	7		+		UNSUR KEWILAYAHAN					T		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		KELURAHAN MUARA JAWA
	1 1								2.437.290.000,00				2.464.000.000,00	
-	7	01		-										PESISIR
	7	01			KECAMATAN				2.437.290.000,00					
336					KECAMATAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	- I I I	i7 Nilai	2.437.290.000,00			-	2.464.000.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR
336		01 01 01				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	- 6	7 Nilai				-	2.464.000.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
336					KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	- 6	7 Nilai	2.437.290.000,00			-	2.464.000.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
336	7	01 01			KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	_			2.437.290.000,00 77.290.000,00		. 7 Peningkatan tata kelola	-	2.464.000.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR
336	7				KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Administrasi Umum		7 Nilai Layanan	2.437.290.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	-	2.464.000.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
336	7	01 01			KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	_			2.437.290.000,00 77.290.000,00		pemerintahan daerah yang	-	2.464.000.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR
336	7	01 01			KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Administrasi Umum			2.437.290.000,00 77.290.000,00		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		2.464.000.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
336	7	01 01			KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Administrasi Umum			2.437.290.000,00 77.290.000,00		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	2.464.000.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
336	7	01 01			KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Administrasi Umum			2.437.290.000,00 77.290.000,00		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	2.464.000.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
336	7	01 01			KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Administrasi Umum			2.437.290.000,00 77.290.000,00		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	2.464.000.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
336	7	01 01			KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Administrasi Umum			2.437.290.000,00 77.290.000,00		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	2.464.000.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
336	7	01 01			KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Administrasi Umum			2.437.290.000,00 77.290.000,00		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	2.464.000.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
336	7	01 01			KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Administrasi Umum			2.437.290.000,00 77.290.000,00		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayana	-	2.464.000.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
336	7	01 01			KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Administrasi Umum			2.437.290.000,00 77.290.000,00		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	2.464.000.000,00 104.000.000,00 71.360.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR
336	7	01 01	2.06		KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	- 5		2.437.290.000,00 77.290.000,00 45.450.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayana Publik	-	2.464.000.000,00 104.000.000,00 71.360.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR
336	7	01 01	2.06		KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	- 5	i Layanan	2.437.290.000,00 77.290.000,00 45.450.000,00 12.492.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayana Publik 7. Peningkatan tata kelola	-	2.464.000.000,00 104.000.000,00 71.360.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
336	7	01 01	2.06		KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	- 5	i Layanan	2.437.290.000,00 77.290.000,00 45.450.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayana Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang bemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang	-	2.464.000.000,00 104.000.000,00 71.360.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
336	7	01 01	2.06		KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	- 5	i Layanan	2.437.290.000,00 77.290.000,00 45.450.000,00 12.492.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayana Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel profesional dan akuntabel	-	2.464.000.000,00 104.000.000,00 71.360.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
336	7	01 01	2.06		KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	- 5	i Layanan	2.437.290.000,00 77.290.000,00 45.450.000,00 12.492.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayana Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		2.464.000.000,00 104.000.000,00 71.360.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
336	7	01 01	2.06		KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	- 5	i Layanan	2.437.290.000,00 77.290.000,00 45.450.000,00 12.492.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayana Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	2.464.000.000,00 104.000.000,00 71.360.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
336	7	01 01	2.06		KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	- 5	i Layanan	2.437.290.000,00 77.290.000,00 45.450.000,00 12.492.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayana Publik 7. Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		2.464.000.000,00 104.000.000,00 71.360.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
336	7	01 01	2.06		KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	- 5	i Layanan	2.437.290.000,00 77.290.000,00 45.450.000,00 12.492.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayana Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		2.464.000.000,00 104.000.000,00 71.360.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
336	7	01 01	2.06		KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	- 5	i Layanan	2.437.290.000,00 77.290.000,00 45.450.000,00 12.492.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayana Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola	-	2.464.000.000,00 104.000.000,00 71.360.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
336	7	01 01	2.06		KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	- 5	i Layanan	2.437.290.000,00 77.290.000,00 45.450.000,00 12.492.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayana Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Relola Pengembangan Tata Relola Pengembangan Tata Relola Pengemintahan dan Pelayanan		2.464.000.000,00 104.000.000,00 71.360.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
336	7	01 01 01 01 01 01 01	2.06	0004	KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- 5	i Layanan	2.437.290.000,00 77.290.000,00 45.450.000,00 12.492.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayana Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	2.464.000.000,00 104.000.000,00 71.360.000,00 33.402.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR
336	7	01 01	2.06	0004	KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan	- 5	i Layanan	2.437.290.000,00 77.290.000,00 45.450.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa 2.958.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayana Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 2. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Peningkatan tata kelola		2.464.000.000,00 104.000.000,00 71.360.000,00 33.402.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR
336	7	01 01 01 01 01 01 01	2.06	0004	KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- 5	i Layanan	2.437.290.000,00 77.290.000,00 45.450.000,00 12.492.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayana Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2.464.000.000,00 104.000.000,00 71.360.000,00 33.402.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR
336	7	01 01 01 01 01 01 01	2.06	0004	KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan	- 5	i Layanan	2.437.290.000,00 77.290.000,00 45.450.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa 2.958.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayana Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 2. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Peningkatan tata kelola	-	2.464.000.000,00 104.000.000,00 71.360.000,00 33.402.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA KELURAHAN MUARA JAWA
336	7	01 01 01 01 01 01 01	2.06	0004	KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan	- 5	i Layanan	2.437.290.000,00 77.290.000,00 45.450.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa 2.958.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayana Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan darah yang pemerintahan darah paganan Publik		2.464.000.000,00 104.000.000,00 71.360.000,00 33.402.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA KELURAHAN MUARA JAWA
336	7	01 01 01 01 01 01 01	2.06	0004	KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan	- 5	i Layanan	2.437.290.000,00 77.290.000,00 45.450.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa 2.958.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 1. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		2.464.000.000,00 104.000.000,00 71.360.000,00 33.402.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA KELURAHAN MUARA JAWA
336	7	01 01 01 01 01 01 01	2.06	0004	KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan	- 5	i Layanan	2.437.290.000,00 77.290.000,00 45.450.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa 2.958.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayana Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 2. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		2.464.000.000,00 104.000.000,00 71.360.000,00 33.402.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA KELURAHAN MUARA JAWA
336	7	01 01 01 01 01 01 01	2.06	0004	KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan	- 5	i Layanan	2.437.290.000,00 77.290.000,00 45.450.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa 2.958.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		2.464.000.000,00 104.000.000,00 71.360.000,00 33.402.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA KELURAHAN MUARA JAWA
336	7	01 01 01 01 01 01 01	2.06	0004	KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan	- 5	i Layanan	2.437.290.000,00 77.290.000,00 45.450.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa 2.958.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayana Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penatsan dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		2.464.000.000,00 104.000.000,00 71.360.000,00 33.402.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR
336	7	01 01 01 01 01 01 01	2.06	0004	KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan	- 5	i Layanan	2.437.290.000,00 77.290.000,00 45.450.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa 2.958.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayana Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan darah dengan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan		2.464.000.000,00 104.000.000,00 71.360.000,00 33.402.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR
336	7	01 01 01 01 01 01 01	2.06	0004	KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan	- 5	i Layanan	2.437.290.000,00 77.290.000,00 45.450.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa 2.958.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pemerintahan dan Peme		2.464.000.000,00 104.000.000,00 71.360.000,00 33.402.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR
336	7	01 01 01 01 01 01 01	2.06	0004	KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan	- 5	i Layanan	2.437.290.000,00 77.290.000,00 45.450.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa 2.958.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayana Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan darah degam profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan		2.464.000.000,00 104.000.000,00 71.360.000,00 33.402.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA KELURAHAN MUARA JAWA



7													
	01 0	1 2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan		40 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	I-	35.000.000.00	KELURAHAN MUARA JAWA
	01 0	2.00	0003	dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi		TO Euporum	Muara Jawa, Muara	British Corner I Note (BBIT)	pemerintahan daerah yang		33.000.000,00	PESISIR
				uali kolisultasi SKFD	SKPD			lawa		profesional dan akuntabel			FESISIK
					SKPD			Jawa					
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
7	01 0	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan			12 Bulan	15.020.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	l- -	15.820.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA
				Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan					pemerintahan daerah yang			PESISIR
					Daerah yang disediakan					profesional dan akuntabel			
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										P			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
7	01 0	1 2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		11 Laporan	500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HACII (DDII)	- 7. Peningkatan tata kelola	 	1 200 000 00	KELURAHAN MUARA JAWA
'	01 0	2.08	0001	i ciiyediaan jasa Surat ivienyurat			11 Lapoidii		PAINA DAGI MASIL (UDH)			1.500.000,00	
1 1		1		1	Surat Menyurat		1	Muara Jawa, Muara		pemerintahan daerah yang	1		PESISIR
		1			l l			Jawa		profesional dan akuntabel			
] [1	I			1		1	untuk mendukung			
] [1	I			1		1	transformasi pelayanan			
] [1	I			1		1	publik			
] [1								1. Penataan dan	1		
] [1									1		
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
7	01 0	1 2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	14.520.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	14.520.000.00	KELURAHAN MUARA JAWA
				Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang		.,	Muara Jawa, Muara	,	pemerintahan daerah yang			PESISIR
				Tarreor	Disediakan			leve					Loione
					Disediakan			Jawa		profesional dan akuntabel			
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
7										Publik			
	01 0	1 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah			6 Unit	16.820.000,00		Publik - 7. Peningkatan tata kelola		16.820.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA
	01 0	1 2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan		6 Unit	16.820.000,00		Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang		16.820.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR
	01 0	1 2.09			Penunjang Urusan Pemerintahan		6 Unit	16.820.000,00		Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	16.820.000,00	
	01 0	1 2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan			6 Unit	16.820.000,00		Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	16.820.000,00	
	01 0	1 2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan		6 Unit	16.820.000,00		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		16.820.000,00	
	01 0	1 2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan		6 Unit	16.820.000,00		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akunta bel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	16.820.000,00	
	01 0	1 2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan		6 Unit	16.820.000,00		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	16.820.000,00	
	01 0	1 2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan		6 Unit	16.820.000,00		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	16.820.000,00	
	01 0	1 2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan		6 Unit	16.820.000,00		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	16.820.000,00	
	01 0	1 2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan		6 Unit	16.820.000,00		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-	16.820.000,00	
	01 0	1 2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan		6 Unit	16.820.000,00		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	16.820.000,00	
7				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara				DANA BAGI HASIL (DRH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			PESISIR
7	01 0			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		6 Unit	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-		PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
7				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang			10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang	-		PESISIR
7				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak			10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-		PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
7				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang			10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Penerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-		PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
7				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak			10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan			PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
7				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak			10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik			PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
7				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak			10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan			PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
7				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak			10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
7				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak			10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola			PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
7				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak			10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik			PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
	01 0	1 2.09	0002	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Penerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		10.000.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR
	01 0		0002	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa 6.820.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata delola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-	10.000.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
	01 0	1 2.09	0002	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang publik		10.000.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR
	01 0	1 2.09	0002	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa 6.820.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata delola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola		10.000.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
	01 0	1 2.09	0002	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa 6.820.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penatan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel		10.000.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
	01 0	1 2.09	0002	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa 6.820.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		10.000.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
	01 0	1 2.09	0002	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa 6.820.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara		- Veblik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		10.000.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
	01 0	1 2.09	0002	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa 6.820.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		10.000.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
	01 0	1 2.09	0002	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa 6.820.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara		- Venlingkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dara Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan profesional dan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan 1. Penataan dan		10.000.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
	01 0	1 2.09	0002	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa 6.820.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola		10.000.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
	01 0	1 2.09	0002	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa 6.820.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara		- Venlingkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		10.000.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
	01 0	1 2.09	0002	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa 6.820.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola		10.000.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA
7	01 0	2.09	0002	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1 Unit	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa Jawa 6.820.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa		- Venlingkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		10.000.000,00 6.820.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR
7	01 0	2.09	0002	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa 6.820.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara Jawa, Muara		- Venlingkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		10.000.000,00 6.820.000,00	PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KELURAHAN MUARA JAWA



	7 ^	01 03	2.02		Kogistan Bombordayaan Kalurahaa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa -	2 Koristan	750.000.000,00		1	7. Peningkatan tata kelola		750 000 000 00	KELURAHAN MUARA JAWA
′	/ ")1 U	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Keluranan		2 Kegiatan	/50.000.000,00		-		- -		RELURAHAN MUARA JAWA PESISIR
						/ Kelurahan					pemerintahan daerah yang			PESISIR
											profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											6. Pengembangan			
											konektivitas dan			
											pembangunan infrastruktur			
											secara terpadu dan merata			
											secura cer pada dan merada			
7	7 0	01 03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	5 Unit	450.000.000.00	Kab. Kutai Kartanegara.	DANA BAGI HASIL (DBH), -	7. Peningkatan tata kelola -		450.000.000.00	KELURAHAN MUARA JAWA
					Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun		,	Muara Jawa, Muara	DAU TAMBAHAN	pemerintahan daerah yang			PESISIR
					Trasarana Kelaranan	netaranan yang rerbangan			lawa	DUKUNGAN PENDANAAN	profesional dan akuntabel			LOIDIN
									Jawa	KELURAHAN	untuk mendukung			
										KELUKAHAN				
											transformasi pelayanan			
											publik			
											6. Pengembangan			
											konektivitas dan			
											pembangunan infrastruktur			
											secara terpadu dan merata			
					<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>					<u> </u>		
7	7 0	01 03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	29 Pokmas /	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -		300.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA
	- 1	1			Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan	Ormas		Muara Jawa, Muara		pemerintahan daerah yang	1 1		PESISIR
						Masyarakat di Kelurahan			Jawa		profesional dan akuntabel	1		
	- 1	1				,.					untuk mendukung	1 1		
											transformasi pelayanan			
											publik			
											2. Pengembangan sumber			
											daya manusia yang sehat,			
											produktif, terampil			
7	7 0	01 03	2.03		Pemberdayaan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan -	32 Lembaga	1.600.000.000,00		-	7. Peningkatan tata kelola -	-	1.600.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA
					Kemasyarakatan Tingkat	tingkat kecamatan	Kemasyarakat				pemerintahan daerah yang			PESISIR
					Kecamatan						profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											6. Pengembangan			
											konektivitas dan			
											pembangunan infrastruktur			
											secara terpadu dan merata			
_	7 0	24 01	2.02	0004	December 2011	Luciah Luciah an Kananan datan	221	4 600 000 000 00	N-b Notel Notes and	DANA DA CILIACII (DDII)	7 Bertadotes teta listala		4 600 000 000 00	KELURAHAN MUARA JAWA
Ι ′	′ [0) I ():	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	32 Lembaga	1.000.000.000,00		DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	1 1	1.000.000.000,000	
	- 1	1			Kemasyarakatan	yang Diselenggarakan	Kemasyarakatan		Muara Jawa, Muara		pemerintahan daerah yang	1 1		PESISIR
									Jawa		profesional dan akuntabel	1		
											untuk mendukung	1		
		1									transformasi pelayanan	1		
	- 1	1									publik	1 1		
											6. Pengembangan			
	- 1	1									konektivitas dan	1 1		
											pembangunan infrastruktur			
											secara terpadu dan merata			
	7 0	01 0	;	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Cakupan Penyelenggaraan Urusan -	100 Persen	10.000.000,00				-	10.000.000.00	KELURAHAN MUARA JAWA
338 7					URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pemerintahan Umum								PESISIR
338 7	′ °				I STATE OF THE STA									
338 7	/ 0					Jumlah Urusan Pemerintahan yang -	1 Kegiatan	10.000.000,00			7. Peningkatan tata kelola -	-	10,000,000 00	KELURAHAN MUARA JAWA
			2.01		Penyelenggaraan Urusan		1 Neglatari	10.000.000,00			pemerintahan daerah yang	1	10.000.000,00	PESISIR
			5 2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai		l l					1 1		. 20.011
			5 2.01	,	Pemerintahan Umum Sesuai	dilaksanakan Kecamatan								
			5 2.01								profesional dan akuntabel			
			5 2.01		Pemerintahan Umum Sesuai						untuk mendukung			
			5 2.01		Pemerintahan Umum Sesuai						untuk mendukung transformasi pelayanan			
			5 2.01		Pemerintahan Umum Sesuai						untuk mendukung transformasi pelayanan publik			
			6 2.01		Pemerintahan Umum Sesuai						untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			
			6 2.01		Pemerintahan Umum Sesuai						untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
			i 2.01		Pemerintahan Umum Sesuai						untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			



7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku	Jumlah Orang yang Mengikuti	50 Orang	10.000.000,00		DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	10.000.000,00	KELURAHAN MUARA JAWA
					dan Intra Suku, Umat Beragama,	Pembinaan Kerukunan Antar Suku			Muara Jawa, Muara		pemerintahan daerah yang		PESISIR
					Ras, dan Golongan Lainnya Guna	dan Intra Suku , Umat Beragama,			Jawa		profesional dan akuntabel		
					Mewujudkan Stabilitas Keamanan	Ras, dan Golongan Lainnya Guna					untuk mendukung		
					Lokal, Regional, dan Nasional	Mewujudkan Stabilitas Keamanan					transformasi pelayanan		
					,	Lokal, Regional, dan Nasional					publik		
						Editar, Regionar, administrational					1. Penataan dan		
											Pengembangan Tata Kelola		
											Pemerintahan dan Pelayanan		
											Publik		
					Kelurahan Teluk Dalam			1.182.120.000,00				1.098.220.000,00	KELURAHAN TELUK DALAM
7					UNSUR KEWILAYAHAN			1.182.120.000,00				1.098.220.000,00	KELURAHAN TELUK DALAM
7	01				KECAMATAN			1.182.120.000,00				1.098.220.000,00	KELURAHAN TELUK DALAM
						Tam casura	lan sun s	66.120.000,00					KELURAHAN TELUK DALAM
339 7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	67 Nilai	66.120.000,00				- 80.220.000,00	KELUKAHAN TELUK DALAM
					KABUPATEN/KOTA								
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah layanan Administrasi -	4 Layanan	32.700.000,00		-	7. Peningkatan tata kelola -	- 44.700.000,00	KELURAHAN TELUK DALAM
					Daerah	Umum Perangkat Daerah					pemerintahan daerah yang		
											profesional dan akuntabel		
		1									untuk mendukung		ĺ
	1	1								1	transformasi pelayanan		1
		1									muhlik		ĺ
		1									publik 4. Downtown days		ĺ
	1	1								1	1. Penataan dan		1
		1									Pengembangan Tata Kelola		ĺ
											Pemerintahan dan Pelayanan		
											Publik		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	1,500,000,00	Kab, Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	1,500,000,00	KELURAHAN TELUK DALAM
					,	Listrik/Penerangan Bangunan			Muara Jawa, Teluk	, ,	pemerintahan daerah yang		
					Listrik/Penerangan Bangunan	Kantor yang Disediakan			Dalam		profesional dan akuntabel		
						Kantor yang Diseulakan			Dalaili				
					Kantor						untuk mendukung		
											transformasi pelayanan		
											publik		
											1. Penataan dan		
											Pengembangan Tata Kelola		
											Pemerintahan dan Pelayanan		
											Publik		
H -	01	01	2.00	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	3 Paket	9,000,000,00	Vah Vutai Vartanagara	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	20,000,000,00	KELURAHAN TELUK DALAM
'	01	01	2.00	0004	Penyediaan Banan Logistik Kantor		3 Paket	8.000.000,00		DANA BAGI HASIL (DBH)		20.000.000,00	KELUKAHAN TELUK DALAM
						yang Disediakan			Muara Jawa, Teluk		pemerintahan daerah yang		
									Dalam		profesional dan akuntabel		
											untuk mendukung		
											transformasi pelayanan		
											publik		
1 1		1									1. Penataan dan		1
1 1		1									Pengembangan Tata Kelola		1
1 1		1									Pemerintahan dan Pelayanan		1
		1									Publik		1
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1 Paket	1.500 000 00	Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	1 500 000 00	KELURAHAN TELUK DALAM
	01	31	2.00	5505	Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan	1 i disct	1.300.000,00	Muara Jawa, Teluk		pemerintahan daerah yang	1.560.000,00	
					гспеданиаан	i criggaridaari yarig Disculakari				1	profesional dan akuntabel		1
1 1													
									Dalam				
									Dalam		untuk mendukung		
									Dalam		untuk mendukung transformasi pelayanan		
									Dalam		untuk mendukung		
									Dalam		untuk mendukung transformasi pelayanan		
									Dalam		untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		
									Dalam		untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		
									Dalam		untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		
-	01	01	2.06	0000	Donologgeroon Road Veredies	turelish Laporen Romolegaga yang	77 (2000)	11.700 cm cn		DANA DAGI HASU (DBH)	untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	31 700 000 00	VELLIDAMAN TELLIK DALAM
7	01	01	2.06		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi		27 Laporan	21.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	21.700.000,00	KELURAHAN TELUK DALAM
7	01	01	2.06		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	27 Laporan	21.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk	DANA BAGI HASIL (DBH)	untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	21.700.000,00	KELURAHAN TELUK DALAM
7	01	01	2.06				27 Laporan	21.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	21.700.000,00	KELURAHAN TELUK DALAM
7	01	01	2.06			Rapat Koordinasi dan Konsultasi	27 Laporan	21.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk	DANA BAGI HASIL (DBH) -	untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	21.700.000,00	KELURAHAN TELUK DALAM
7	01	01	2.06			Rapat Koordinasi dan Konsultasi	27 Laporan	21.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk	DANA BAGI HASIL (DBH)	untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	21.700.000,00	KELURAHAN TELUK DALAM
7	01	01	2.06			Rapat Koordinasi dan Konsultasi	27 Laporan	21.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk	DANA BAGI HASIL (DBH) -	untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	21.700.000,00	KELURAHAN TELUK DALAM
7	01	01	2.06			Rapat Koordinasi dan Konsultasi	27 Laporan	21.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk	DANA BAGI HASIL (DBH) -	untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	21.700.000,00	KELURAHAN TELUK DALAM
7	01	01	2.06			Rapat Koordinasi dan Konsultasi	27 Laporan	21.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk	DANA BAGI HASIL (DBH) -	untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	21.700.000,00	KELURAHAN TELUK DALAM
7	01	01	2.06			Rapat Koordinasi dan Konsultasi	27 Laporan	21.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk	DANA BAGI HASIL (DBH) -	untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	21.700.000,00	KELURAHAN TELUK DALAM
7	01	01	2.06			Rapat Koordinasi dan Konsultasi	27 Laporan	21.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk	DANA BAGI HASIL (DBH) -	untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	21.700.000,00	KELURAHAN TELUK DALAM

	7	01 01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 Bulan	15.020.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-	17.120.000,00	KELURAHAN TELUK DALAM
	7	01 01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			KELURAHAN TELUK DALAM
	7	01 01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	14.520.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		14.520.000,00	KELURAHAN TELUK DALAM
	7	01 01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		14 Unit	18.400.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	18.400.000,00	KELURAHAN TELUK DALAM
	7	01 01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		6 Unit	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	10.000.000,00	KELURAHAN TELUK DALAM
	7	01 01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		8 Unit	8.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	8.400.000,00	KELURAHAN TELUK DALAM
340	7	01 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	-	100 Persen	1.106.000.000,00			-	1.008.000.000,00	KELURAHAN TELUK DALAM
	7	01 03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			3 Kegiatan	756.000.000,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik G. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	-	658.000.000,00	KELURAHAN TELUK DALAM



7	01	03 2.02	0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	11 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	8.000.000,00 KELURAHAN TELUK DA
			Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Dalam		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	
								6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur	
								secara terpadu dan merata	
7	01	03 2.02	0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	650.000.000,00 KELURAHAN TELUK DA
								untuk mendukung transformasi pelayanan publik	
								6. Pengembangan konektivitas dan	
								pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	
7	01	03 2.02	0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	6 Pokmas / Ormas	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola - pemerintahan daerah yang	0,00 KELURAHAN TELUK DA
				Masyarakat di Kelurahan		Dalam		profesional dan akuntabel untuk mendukung	
								transformasi pelayanan publik	
								Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	
7	01	03 2.03	Pemberdayaan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan -	7 Lembaga	350.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola -	- 350.000.000,00 KELURAHAN TELUK DA
			Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	tingkat kecamatan	Kemasyarakat			pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	
								untuk mendukung transformasi pelayanan	
								publik 6. Pengembangan	
								konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	
7	01	03 2.03	0001 Penyelenggaraan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	350.000.000,00 KELURAHAN TELUK DA
			Kemasyarakatan	yang Diselenggarakan	Kemasyarakatan	Muara Jawa, Teluk Dalam		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	
								untuk mendukung transformasi pelayanan	
								publik 6. Pengembangan	
								konektivitas dan pembangunan infrastruktur	
								secara terpadu dan merata	
341 7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan - Pemerintahan Umum	100 Persen	10.000.000,00			- 10.000.000,00 KELURAHAN TELUK DA
7	01	05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Jumlah Urusan Pemerintahan yang - dilaksanakan Kecamatan	1 Kegiatan	10.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	- 10.000.000,00 KELURAHAN TELUK DA
			Penugasan Kepala Daerah	anananaran Recamatan				profesional dan akuntabel	
								untuk mendukung transformasi pelayanan	
								publik 1. Penataan dan	
								Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	
								Pemerintahan dan Pelayanan Publik	



1 7	7 01	1 05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku	toodah Oosaa aa Maradhad	50 Orang	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BACILIASII (DBII)	7. Peningkatan tata kelola -	10 000 000 00	KELURAHAN TELUK DALAM
,	/ 01	1 05	2.01	0004		Jumlah Orang yang Mengikuti	50 Orang		DANA BAGI HASIL (DBH)		10.000.000,00	KELUKAHAN TELUK DALAWI
					dan Intra Suku, Umat Beragama,	Pembinaan Kerukunan Antar Suku		Muara Jawa, Teluk		pemerintahan daerah yang		
					Ras, dan Golongan Lainnya Guna	dan Intra Suku , Umat Beragama,		Dalam		profesional dan akuntabel		
					Mewujudkan Stabilitas Keamanan	Ras, dan Golongan Lainnya Guna				untuk mendukung		
					Lokal, Regional, dan Nasional	Mewujudkan Stabilitas Keamanan				transformasi pelayanan		
						Lokal, Regional, dan Nasional				publik		
										1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		
	_	_			Kelurahan Dondang			1.532.800.000,00		FUDIIK	1 744 540 000 00	KELURAHAN DONDANG
	,				UNSUR KEWILAYAHAN			1.532.800.000,00				KELURAHAN DONDANG
7	7 01				KECAMATAN			1.532.800.000,00				KELURAHAN DONDANG
342 7	7 01	1 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	67 Nilai	72.800.000,00		-	84.540.000,00	KELURAHAN DONDANG
					PEMERINTAHAN DAERAH							
					KABUPATEN/KOTA							
7	7 01	1 01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Administrasi Umum -	3 Layanan	39.240.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola	50.240.000,00	KELURAHAN DONDANG
					Daerah	Perangkat Daerah Yang Tersedia		•		pemerintahan daerah yang	•	
										profesional dan akuntabel		
										untuk mendukung		
										transformasi pelayanan		
I			l l							publik		
										The state of the s		
				1						1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		
7	7 01	1 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	3 Paket	11.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	22.000.000,00	KELURAHAN DONDANG
					-	yang Disediakan		Muara Jawa, Dondang		pemerintahan daerah yang		
)g				profesional dan akuntabel		
										untuk mendukung		
										transformasi pelayanan		
										publik		
										1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		
7	7 01	1 01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1 Paket	2.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	2.000.000,00	KELURAHAN DONDANG
					Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan		Muara Jawa, Dondang	, ,	pemerintahan daerah yang	•	
					- criggoriaduri	r enggendam yang bisedialah		maara sawa, bortaang		profesional dan akuntabel		
										untuk mendukung		
										transformasi pelayanan		
										publik		
										1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
				1						Pemerintahan dan Pelayanan		
						<u> </u>				Publik		<u> </u>
7	7 01	1 01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	32 Laporan	26.240.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	26.240.000,00	KELURAHAN DONDANG
			1 1		dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Muara Jawa, Dondang	, , ,	pemerintahan daerah yang		
						SKPD				profesional dan akuntabel		
				1						untuk mendukung		
I			l l							transformasi pelayanan		
			1 1						1			
				1						publik		
I			l l							1. Penataan dan		
				1						Pengembangan Tata Kelola		
I			l l							Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		<u> </u>
7	7 01	1 01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah waktu penyediaan Jasa -	12 Bulan	15.020.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola	15.760.000,00	KELURAHAN DONDANG
					Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan				pemerintahan daerah yang		
				1		Daerah yang disediakan				profesional dan akuntabel		
I			l l							untuk mendukung		
				1						transformasi pelayanan		
			1 1						1	transformasi pelayanan publik		
										1. Penataan dan		
				1						Pengembangan Tata Kelola		
		1 1					1 1		l	Pemerintahan dan Pelayanan	ı	1
										r emerintarian dan relayarian		
			l							Publik		



7	01	1 01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11 Laporan	500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	1.240.000	,00 KELURAHAN DONDANG
7	01	1 01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	14.520.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	14.520.000	00 KELURAHAN DONDANG
					Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Muara Jawa, Dondang		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
		1 01			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	13 Unit	18.540.000,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Publik		,00 KELURAHAN DONDANG
7	01	1 01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		00 KELURAHAN DONDANG
7	01	1 01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	8.540.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	8.540.000	,00 KELURAHAN DONDANG
343 7	01	1 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	100 Persen	1.450.000.000,00			- 1.650.000.000	,00 KELURAHAN DONDANG
7	01	1 03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		2 Kegiatan	750.000.000,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik F. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	- 950.000.000	,00 KELURAHAN DONDANG

1.7	7 0	01 03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	4 Unit	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH).	7. Peningkatan tata kelola -	650.000.000,00 KELU	URAHAN DONDANG
		1	1	1	Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun		Muara Jawa, Dondang		pemerintahan daerah yang		
			1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,, ,, ,, ,, ,		maara sawa, bondang	(DAU)	profesional dan akuntabel		
									(DAO)			
	J		1						1	untuk mendukung		
	J		1						1	transformasi pelayanan		
										publik		
										6. Pengembangan		
										konektivitas dan		
										pembangunan infrastruktur		
										secara terpadu dan merata		
										secara terpada dan merada		
	-		0.00								222 222 222 222	
	/ 0	01 03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	18 Pokmas /	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	300.000.000,00 KELU	UKAHAN DUNDANG
					Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan	Ormas	Muara Jawa, Dondang		pemerintahan daerah yang		
						Masyarakat di Kelurahan				profesional dan akuntabel		
										untuk mendukung		
										transformasi pelayanan		
										publik		
										2. Pengembangan sumber		
										daya manusia yang sehat,		
	J		1						1	produktif, terampil		
	_		+	1	 	1	<u> </u>		 			
1.7	′ º	01 03	2.03		Pemberdayaan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan -	14 Lembaga	700.000.000,00	I-	7. Peningkatan tata kelola -	- 700.000.000,00 KELU	UKAHAN DONDANG
			1		Kemasyarakatan Tingkat	tingkat kecamatan	Kemasyarakat		1	pemerintahan daerah yang		
			1		Kecamatan				1	profesional dan akuntabel		
			1						1	untuk mendukung		
			1						1	transformasi pelayanan		
										publik		
	J		1						1	6. Pengembangan		
										konektivitas dan		
										pembangunan infrastruktur		
										secara terpadu dan merata		
-	7 0	01 03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga	700.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	700.000.000,00 KELU	URAHAN DONDANG
					Kemasyarakatan	yang Diselenggarakan	Kemasyarakatan	Muara Jawa, Dondang		pemerintahan daerah yang		
					nemasyarana an	yang biselenggarakan	nemasyaraka an	induita sawa, bondang		profesional dan akuntabel		
										untuk mendukung		
										transformasi pelayanan		
										publik		
										6. Pengembangan		
										konektivitas dan		
										pembangunan infrastruktur		
										secara terpadu dan merata		
344	7 0	01 05			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Cakupan Penyelenggaraan Urusan -	100 Persen	10.000.000,00			- 10.000.000,00 KELU	LIRAHAN DONDANG
·	. I .	"			URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pemerintahan Umum	100 1 6.56.11	1010001000)00			20100000000	
					OKOSAN PEWEKINTAHAN OWIOW	rememicanan omum						
							4.4.1.					
1 7	7 0	01 05	2.01		Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang -	1 Kegiatan	10.000.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola -	- 10.000.000,00 KELU	URAHAN DONDANG
					Pemerintahan Umum Sesuai	dilaksanakan Kecamatan				pemerintahan daerah yang		
					Penugasan Kepala Daerah					profesional dan akuntabel		
	J		1						1	untuk mendukung		
										transformasi pelayanan		
	J		1						1	publik		
										1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
	J		1						1			
										Pemerintahan dan Pelayanan		
			<u> </u>		1					Publik		
7	7 0	01 05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku	Jumlah Orang yang Mengikuti	25 Orang	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	10.000.000,00 KELU	URAHAN DONDANG
					dan Intra Suku, Umat Beragama,	Pembinaan Kerukunan Antar Suku		Muara Jawa, Dondang		pemerintahan daerah yang		
	J		1		Ras, dan Golongan Lainnya Guna	dan Intra Suku , Umat Beragama,			1	profesional dan akuntabel		
	J		1		Mewujudkan Stabilitas Keamanan	Ras, dan Golongan Lainnya Guna			1	untuk mendukung		
	- 1	1			Lokal, Regional, dan Nasional	Mewujudkan Stabilitas Keamanan				transformasi pelayanan		
			1		, regional, dan Nasional				1	nuhlik		
						Lokal, Regional, dan Nasional						
										1. Penataan dan		
					1					Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan		
									1 1	Publik	1 1	
									1	FUDIK		
					Kelurahan Tama Pole			988.420.000,00		FUDIIK	1.010.000.000,00 KELU	
	7				UNSUR KEWILAYAHAN			988.420.000,00	<u> </u>	FUUIK	1.010.000.000,00 KELU	URAHAN TAMA POLE
	7 7 0	01								FUJIK		URAHAN TAMA POLE
7	7 0				UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67 Nilai	988.420.000,00 988.420.000,00		FUUIN	1.010.000.000,00 KELU 1.010.000.000,00 KELU	URAHAN TAMA POLE URAHAN TAMA POLE
7	7 0	01 01 01			UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	67 Nilai	988.420.000,00		FUUIA	1.010.000.000,00 KELU 1.010.000.000,00 KELU	URAHAN TAMA POLE
7	7 0				UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	67 Nilai	988.420.000,00 988.420.000,00		FUUIN	1.010.000.000,00 KELU 1.010.000.000,00 KELU	URAHAN TAMA POLE URAHAN TAMA POLE



7												
	01 (2.06	i	Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Administrasi Umum -	4 Layanan	45.400.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola	- 6	.480.000,00 KE	LURAHAN TAMA POLE
				Daerah	Perangkat Daerah Yang Tersedia	'	•		pemerintahan daerah yang			
				Dacian	rerangkat baeran rang rersedia				profesional dan akuntabel			
									untuk mendukung			
									transformasi pelayanan			
									publik			
									1. Penataan dan			
									Pengembangan Tata Kelola			
									Pemerintahan dan Pelayanan			
									Publik			
	01 (2.00	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	 1 Paket	1.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BACILIACII (DDII)	7. Peningkatan tata kelola		F00 000 00 VE	LURAHAN TAMA POLE
1 ' 1	01	2.00	0001	renyediaan komponen mstalasi		1 raket		DANA BAGITIASIL (DBII)			L.300.000,00 KE	LUKAHAN TAWA POLL
					Listrik/Penerangan Bangunan		Muara Jawa, Tama		pemerintahan daerah yang			
				Listrik/Penerangan Bangunan	Kantor yang Disediakan		Pole		profesional dan akuntabel			
				Kantor					untuk mendukung			
									transformasi pelayanan			
									publik			
									1. Penataan dan			
									Pengembangan Tata Kelola			
									Pemerintahan dan Pelayanan			
									Publik			
+						 						
7	01 (2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	3 Paket	10.900.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	25	.980.000,00 KE	LURAHAN TAMA POLE
					yang Disediakan	1	Muara Jawa, Tama		pemerintahan daerah yang			
					· ·	1	Pole		profesional dan akuntabel			
					l l	1	1 010		untuk mendukung			
					l L	1						
					l l	1			transformasi pelayanan			
	ı				l l	1			publik			
					l L	1			1. Penataan dan			
					l L	1			Pengembangan Tata Kelola			
									Pemerintahan dan Pelayanan			
									Publik			
7	01 (2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1 Paket	3.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DRH) -	7. Peningkatan tata kelola -		ROOD OOD OO KE	LURAHAN TAMA POLE
1 1	٠. ا	2.00	0005		Penggandaan yang Disediakan	2 i dilet		Driver Driver in tole (DDI)	pemerintahan daerah yang		3.000.000,00	
				Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan		Muara Jawa, Tama					
							Pole		profesional dan akuntabel			
									untuk mendukung			
									transformasi pelayanan			
									publik			
									1. Penataan dan			
									Pengembangan Tata Kelola			
									Pemerintahan dan Pelayanan			
									Publik			
-+						 						
7	01 (2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	42 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	35	.000.000,00 KE	LURAHAN TAMA POLE
				dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Muara Jawa, Tama		pemerintahan daerah yang			
					SKPD		Pole		profesional dan akuntabel			
							1 3 3 3					
									untuk mendukung			
									transformasi pelayanan			
1 1									transformasi pelayanan publik			
									transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			
									transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
									transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
									transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	01 (01 2.08		Penyediaan Jasa Penuniane Urukan	Jumlah waktu penvediaan Jasa	12 Bulan	15,020,000,00		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- 11	.520.000.00 KF	ELURAHAN TAMA POLF
7	01 (01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		12 Bulan	15.020.000,00	·	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	- 20	.520.000,00 KE	ELURAHAN TAMA POLE
7	01 (01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	15.020.000,00	-	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	- 20	.520.000,00 KE	ELURAHAN TAMA POLE
7	01 0	01 2.08	1			12 Bulan	15.020.000,00	-	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darapan profesional dan akuntabel	- 10	.520.000,00 KE	ELURAHAN TAMA POLE
7	01 0	01 2.08			Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	15.020.000,00	•	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	- 20	.520.000,00 KE	ELURAHAN TAMA POLE
7	01 (01 2.08			Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	15.020.000,00	•	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	- 20	.520.000,00 KE	ELURAHAN TAMA POLE
7	01 (01 2.08	1		Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	15.020.000,00	-	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	- 21	.520.000,00 KE	ELURAHAN TAMA POLE
7	01 (01 2.08	1		Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	15.020.000,00	•	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	- 20	.520.000,00 KE	ELURAHAN TAMA POLE
7	01 (2.08	1		Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	15.020.000,00	-	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	- 1	.520.000,00 KE	ELURAHAN TAMA POLE
7	01 0	01 2.08			Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	15.020.000,00	•	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	- 1	.520.000,00 KE	ELURAHAN TAMA POLE
7	01 (2.08			Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	15.020.000,00	-	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	- 11	.520.000,00 KE	ELURAHAN TAMA POLE
7	01 (2.08			Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	15.020.000,00	•	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	- 10	.520.000,00 KE	ELURAHAN TAMA POLE
				Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan				transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Bulan	500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola			ELURAHAN TAMA POLE
				Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang			
				Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang			
				Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dareah yang profesional dan akuntabel			
				Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama	DANA BAGI HASIL (DBH) -	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan dan Pengembangan publik 1. Pensingkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung			
				Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik			
				Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama	DANA BAGI HASIL (DBH) -	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan dan Pengembangan publik 1. Pensingkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung			
				Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik			
				Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama	DANA BAGI HASIL (DBH) -	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			
				Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola			
				Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama	DANA BAGI HASIL (DBH) -	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			

	7	01 01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.520.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	DANA BAGI HASIL (DBH)	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	14.520.000,00 H	KELURAHAN TAMA POLE
										untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	7 (01 01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	17 Unit	18.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	18.000.000,00	KELURAHAN TAMA POLE
										publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	7 (01 01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	10.000.000,00	KELURAHAN TAMA POLE
										Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	7 (01 01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	8.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	DANA BAGI HASIL (DBH)	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	8.000.000,00	KELURAHAN TAMA POLE
										transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
346	7 (01 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga - Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	100 Persen	900.000.000,00		Publik	-	900.000.000,00	KELURAHAN TAMA POLE
	7	01 03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		2 Kegiatan	750.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	-		KELURAHAN TAMA POLE
	7	01 03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	-	450.000.000,00 i	KELURAHAN TAMA POLE
	7	01 03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktf, terampil	-	300.000.000,00	KELURAHAN TAMA POLE



	7	01 03	2.03		Pemberdayaan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan -	3	Lembaga	150.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola		150.000.000,00	KELURAHAN TAMA POLE
					Kemasyarakatan Tingkat	tingkat kecamatan		Kemasyarakat			pemerintahan daerah yang			
					Kecamatan	_					profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											6. Pengembangan			
											konektivitas dan			
											pembangunan infrastruktur			
											secara terpadu dan merata			
	7	01 03	2.02	0001	Penyelenggaraan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola		150,000,000,00	KELURAHAN TAMA POLE
	′	01 03	2.03	0001						DANA BAGITIASIL (DBIT)			130.000.000,00	KELOKAHAN TAWA POLE
					Kemasyarakatan	yang Diselenggarakan		(emasyarakatan	Muara Jawa, Tama		pemerintahan daerah yang			
									Pole		profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											6. Pengembangan			
											konektivitas dan			
											pembangunan infrastruktur			
											secara terpadu dan merata			
			1	1						İ	Secura terpada dan merata			
247	, +	01	+	+-	DDOCDANA DENIVERSE SECTION SEC	Columna Dominilana	- 	OO Dawa	10 000 000 00		-	-	40 000 000 0	VELLIDALIANI TARAA DC: T
347	′	U1 05	' [1	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Cakupan Penyelenggaraan Urusan -		100 Persen	10.000.000,00	1		-	10.000.000,00	KELURAHAN TAMA POLE
			1	1	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pemerintahan Umum				1				
T	7	01 05	2.01		Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang -	1	l Kegiatan	10.000.000,00	I	- 7. Peningkatan tata kelola		10.000.000,00	KELURAHAN TAMA POLE
			1	1	Pemerintahan Umum Sesuai	dilaksanakan Kecamatan		-		İ	pemerintahan daerah yang			
			1	1	Penugasan Kepala Daerah					İ	profesional dan akuntabel			
					renagasan kepala baeran						untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											2. Pengembangan sumber			
											daya manusia yang sehat,			
											produktif, terampil			
	7	01 05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku	Jumlah Orang yang Mengikuti	3	0 Orang	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola		10,000,000,00	KELURAHAN TAMA POLE
	′ I	01 03	2.01	0004	dan Intra Suku, Umat Beragama,	Pembinaan Kerukunan Antar Suku	ا ا	oo orang	Muara Jawa, Tama	DAINA BAGITIASIE (DBIT)	pemerintahan daerah yang		10.000.000,00	RECORDINATION TOLE
					Ras, dan Golongan Lainnya Guna	dan Intra Suku , Umat Beragama,			Pole		profesional dan akuntabel			
					Mewujudkan Stabilitas Keamanan	Ras, dan Golongan Lainnya Guna					profesional dan akuntabel untuk mendukung			
											profesional dan akuntabel			
					Mewujudkan Stabilitas Keamanan	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan					profesional dan akuntabel untuk mendukung			
1					Mewujudkan Stabilitas Keamanan	Ras, dan Golongan Lainnya Guna					profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik			
					Mewujudkan Stabilitas Keamanan	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan					profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber			
					Mewujudkan Stabilitas Keamanan	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan					profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,			
					Mewujudkan Stabilitas Keamanan	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan					profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber		1.816.000.000,00	KELURAHAN MUARA
					Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Muara Kembang	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan			Pole 1.585.298.500,00		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,			KEMBANG
	7				Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan			Pole		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,		1.816.000.000,00	
	7	01			Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Muara Kembang	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan			Pole 1.585.298.500,00		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,		1.816.000.000,00	KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA
		01			Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Muara Kembang UNSUR KEWILAYAHAN	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan			Pole 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,		1.816.000.000,00	KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG
	7	01 01 01			Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Muara Kembang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan		57 Nilai	Pole 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,		1.816.000.000,00	KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA
	7				Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Muara Kembang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		57 Nilai	Pole 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,	-	1.816.000.000,00 1.816.000.000,00 96.000.000,00	KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG
	7				Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Muara Kembang UNSUR KEWILAYAHAN	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		57 Nilai	Pole 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,		1.816.000.000,00 1.816.000.000,00 96.000.000,00	KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA
348	7	01 01			Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Muara Kembang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Pole 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 69.298.500,00		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	-	1.816.000.000,00 1.816.000.000,00 96.000.000,00	KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG
348	7				Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Muara Kembang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum		57 Nilai I Layanan	Pole 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil		1.816.000.000,00 1.816.000.000,00 96.000.000,00	KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG
348	7	01 01			Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Muara Kembang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Pole 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 69.298.500,00		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang		1.816.000.000,00 1.816.000.000,00 96.000.000,00	KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG
348	7	01 01			Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Muara Kembang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum			Pole 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 69.298.500,00		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		1.816.000.000,00 1.816.000.000,00 96.000.000,00	KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG
348	7	01 01			Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Muara Kembang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum			Pole 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 69.298.500,00		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		1.816.000.000,00 1.816.000.000,00 96.000.000,00	KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG
348	7	01 01			Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Muara Kembang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum			Pole 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 69.298.500,00		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		1.816.000.000,00 1.816.000.000,00 96.000.000,00	KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG
348	7	01 01			Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Muara Kembang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum			Pole 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 69.298.500,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		1.816.000.000,00 1.816.000.000,00 96.000.000,00	KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG
348	7	01 01			Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Muara Kembang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum			Pole 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 69.298.500,00		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		1.816.000.000,00 1.816.000.000,00 96.000.000,00	KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG
348	7	01 01			Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Muara Kembang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum			Pole 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 69.298.500,00		rofesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		1.816.000.000,00 1.816.000.000,00 96.000.000,00	KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG
348	7	01 01			Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Muara Kembang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum			Pole 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 69.298.500,00		rofesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		1.816.000.000,00 1.816.000.000,00 96.000.000,00	KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG
348	7	01 01			Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Muara Kembang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum			Pole 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 69.298.500,00		rofesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daer Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-	1.816.000.000,00 1.816.000.000,00 96.000.000,00	KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG
348	7 7 7	01 01	2.06		Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Muara Kembang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	4	I Layanan	Pole 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 69.298.500,00 39.278.500,00		rofesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1.816.000.000,00 1.816.000.000,00 96.000.000,00 64.880.000,00	KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG
348	7 7 7	01 01	2.06		Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Muara Kembang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia Jumlah Paket Komponen Instalasi	4		Pole 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 69.298.500,00 39.278.500,00 4.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	rofesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola		1.816.000.000,00 1.816.000.000,00 96.000.000,00 64.880.000,00	KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG
348	7 7 7	01 01	2.06		Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Muara Kembang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	4	I Layanan	Pole 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 69.298.500,00 39.278.500,00 4.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	rofesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang Pendukung transformasi pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang		1.816.000.000,00 1.816.000.000,00 96.000.000,00 64.880.000,00	KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG
348	7 7 7	01 01	2.06		Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Muara Kembang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia Jumlah Paket Komponen Instalasi	4	I Layanan	Pole 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 69.298.500,00 39.278.500,00 4.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	rofesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	1.816.000.000,00 1.816.000.000,00 96.000.000,00 64.880.000,00	KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG
348	7 7 7	01 01	2.06		Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Muara Kembang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	4	I Layanan	Pole 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 69.298.500,00 39.278.500,00 4.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	rofesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		1.816.000.000,00 1.816.000.000,00 96.000.000,00 64.880.000,00	KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG
348	7 7 7	01 01	2.06		Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Muara Kembang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	4	I Layanan	Pole 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 69.298.500,00 39.278.500,00 4.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung tendu	-	1.816.000.000,00 1.816.000.000,00 96.000.000,00 64.880.000,00	KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG
348	7 7 7	01 01	2.06		Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Muara Kembang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	4	I Layanan	Pole 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 69.298.500,00 39.278.500,00 4.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	rofesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1.816.000.000,00 1.816.000.000,00 96.000.000,00 64.880.000,00	KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG
348	7 7 7	01 01	2.06		Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Muara Kembang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	4	I Layanan	Pole 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 69.298.500,00 39.278.500,00 4.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	rofesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		1.816.000.000,00 1.816.000.000,00 96.000.000,00 64.880.000,00	KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG
348	7 7 7	01 01	2.06		Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Muara Kembang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	4	I Layanan	Pole 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 69.298.500,00 39.278.500,00 4.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	rofesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan 1. Penataan dan 1. Penataan dan 1. Penataan dan 1. Penataan dan 1. Penataan dan 1. Penataan dan 1. Penataan dan		1.816.000.000,00 1.816.000.000,00 96.000.000,00 64.880.000,00	KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG
348	7 7 7	01 01	2.06		Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Muara Kembang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	4	I Layanan	Pole 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 69.298.500,00 39.278.500,00 4.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	rofesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola	-	1.816.000.000,00 1.816.000.000,00 96.000.000,00 64.880.000,00	KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG
348	7 7 7	01 01	2.06		Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Muara Kembang UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	4	I Layanan	Pole 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 1.585.298.500,00 69.298.500,00 39.278.500,00 4.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	rofesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan 1. Penataan dan 1. Penataan dan 1. Penataan dan 1. Penataan dan 1. Penataan dan 1. Penataan dan 1. Penataan dan		1.816.000.000,00 1.816.000.000,00 96.000.000,00 64.880.000,00	KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG KELURAHAN MUARA KEMBANG



7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	6.201.500,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		26.803.000,00	KELURAHAN MUARA KEMBANG
										untuk mendukung transformasi pelayanan publik			
										1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket Paket	2.077.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang		2.077.000,00	KELURAHAN MUARA KEMBANG
					r chaganadan	r enganaum yang bisedalah		Kembang		profesional dan akuntabel			news are
										untuk mendukung transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	01	01	2.06	0009			40 Laporan	27.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -		32.000.000,00	KELURAHAN MUARA
					dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Muara Jawa, Muara Kembang		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			KEMBANG
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
							10.5			Publik			
'	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	15.020.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	16.120.000,00	KELURAHAN MUARA KEMBANG
						Daerah yang disediakan				profesional dan akuntabel			
										untuk mendukung transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -		1.600.000,00	KELURAHAN MUARA
						Surat Menyurat		Muara Jawa, Muara Kembang		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			KEMBANG
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan publik			
										1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	14.520.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik - 7. Peningkatan tata kelola -		14.520.000,00	KELURAHAN MUARA
					Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang	'	Muara Jawa, Muara	. ,	pemerintahan daerah yang			KEMBANG
						Disediakan		Kembang		profesional dan akuntabel untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik 1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah		8 Unit	15.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	-	15.000.000,00	KELURAHAN MUARA KEMBANG
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara				pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			NEWIBANG
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
1										Publik			

	7 (01 01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas		1 Unit	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	10.000.000,00 KELURAH	AHAN MUARA
	′ `	01 01	2.03	0002	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Operasional atau Lapangan yang		1 OIIIC	Muara Jawa, Muara	DAINA BAGITIASIE (BBIT)	pemerintahan daerah yang	KEMBAN	
					Perizinan Kendaraan Dinas	Dipelihara dan dibayarkan Pajak					profesional dan akuntabel	REIVIDAIV	ANG
									Kembang				
					Operasional atau Lapangan	dan Perizinannya					untuk mendukung		
											transformasi pelayanan		
											publik		
											1. Penataan dan		
											Pengembangan Tata Kelola		
											Pemerintahan dan Pelayanan		
											Publik		
	_												
1	7 (01 01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin		7 Unit	5.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	5.000.000,00 KELURAH	
					Lainnya	Lainnya yang Dipelihara			Muara Jawa, Muara		pemerintahan daerah yang	KEMBAN	ANG
									Kembang		profesional dan akuntabel		
											untuk mendukung		
											transformasi pelayanan		
											publik		
											1. Penataan dan		
											Pengembangan Tata Kelola		
											Pemerintahan dan Pelayanan		
											Publik		
349	7 (01 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Lembaga	-	100 Persen	1.506.000.000,00			- 1.710.000.000,00 KELURAH	AHAN MUARA
			1	1	MASYARAKAT DESA DAN	Pemberdayaan Masyarakat						KEMBAN	ANG
					KELURAHAN	Desa/Kelurahan yang Aktif							
- +	7 /	01 03	2.02	1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			3 Kegiatan	756.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola -	- 960.000.000,00 KELURAH	AHAN MIIADA
1	′ I '	O1 03	2.02	1	Regiatan remberdayaan kelurahan		[3 Negiatari	750.000.000,00	1		- 960.000.000,00 KELOKAH	
						/ Kelurahan					pemerintahan daerah yang	KEMBAN	ANG
											profesional dan akuntabel		
											untuk mendukung		
											transformasi pelayanan		
											publik		
											6. Pengembangan		
											konektivitas dan		
											pembangunan infrastruktur		
											secara terpadu dan merata		
	7 (01 03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan		19 Lembaga	6.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	10.000.000,00 KELURAH	AHAN MUARA
					dalam Forum Musyawarah	yang Berpartisipasi dalam Forum		Kemasyarakatan	Muara Jawa, Muara		pemerintahan daerah yang	KEMBAN	ANG
					Perencanaan Pembangunan di	Musyawarah Perencanaan		,	Kembang		profesional dan akuntabel		
					Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan					untuk mendukung		
					Keldidildii	i embanganan di kelalahan							
											transformasi pelayanan		
											publik		
											6. Pengembangan		
											konektivitas dan		
											pembangunan infrastruktur		
			1	1	ĺ	l l					secara terpadu dan merata		
			1	1	ĺ	l l							
	7 /	01 00	2.02	0003	Dombona unon Corono don	Jumlah Sarana dan Prasarana		C I Init	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BACILIACII (DDI.)	- 7. Peningkatan tata kelola -	650.000.000,00 KELURAH	ALIANI NALIADA
1	′ ['	01 03	2.02	0002				6 Unit					
			1	1	Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun			Muara Jawa, Muara	DANA ALOKASI UMUM	pemerintahan daerah yang	KEMBAN	ANG
					1	l l			Kembang	(DAU)	profesional dan akuntabel		
			1	1	ĺ	l l					untuk mendukung		
			1	1	ĺ	l l					transformasi pelayanan		
				1	1	l l		1		1	publik		
				1	1	l l		1		1	6. Pengembangan		
			1	1	ĺ	l l					konektivitas dan		
1		1	1	1	ĺ	l l							
				1	ĺ	l l					pembangunan infrastruktur		
					ĺ						secara terpadu dan merata		
						1							
								6 Pokmas /	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola -	300.000.000,00 KELURAH	AHAN MUARA
	7 (01 03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Pokmas dan Ormas yang			Muara Jawa, Muara	i '	pemerintahan daerah yang	KEMBAN	
:	7 (01 03	2.02	0003				Ormas					-
:	7 (01 03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan		Ormas					
:	7 (01 03	2.02	0003				Ormas	Kembang		profesional dan akuntabel		
:	7 (01 03	2.02	0003		Melaksanakan Pemberdayaan		Ormas			profesional dan akuntabel untuk mendukung		
	7 (01 03	2.02	0003		Melaksanakan Pemberdayaan		Ormas			profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		
	7 (01 03	2.02	0003		Melaksanakan Pemberdayaan		Ormas			profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		
	7 (01 03	2.02	0003		Melaksanakan Pemberdayaan		Ormas			profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		
:	7 (01 03	2.02	0003		Melaksanakan Pemberdayaan		Ormas			profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 2. Pengembangan sumber		
:	7 (01 03	2.02	0003		Melaksanakan Pemberdayaan		Ormas			profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		



	7 0	01 03	2.03		Pemberdayaan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan -		15 Lembaga	750.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola		- 750.000.000,00	KELURAHAN MUARA
					Kemasyarakatan Tingkat	tingkat kecamatan		Kemasyarakat			pemerintahan daerah yang			KEMBANG
					Kecamatan	tinghat hetamatan		nemas y ar anac			profesional dan akuntabel			NE.VIDFUTO
					Recalliatali									
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											6. Pengembangan			
											konektivitas dan			
											pembangunan infrastruktur			
											secara terpadu dan merata			
	7 0	01 03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan		15 Lembaga	750.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DRH)	- 7. Peningkatan tata kelola		750 000 000 00	KELURAHAN MUARA
	′ °	05	2.05	0001	Kemasyarakatan	yang Diselenggarakan		Kemasyarakatan	Muara Jawa, Muara	State Control of Control	pemerintahan daerah yang		750.000.000,00	KEMBANG
					Remasyarakatan	yang Diselenggarakan		Kerridsydr dkatari						KEIVIBANG
									Kembang		profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											6. Pengembangan			
1 1				I						l	konektivitas dan			
			1	I							pembangunan infrastruktur			
1 1			1	1		1				l	secara terpadu dan merata			
1 1			1	1		1				l				
350	7 ^	01 05	1	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Cakupan Penyelenggaraan Urusan -	+	100 Persen	10.000.000,00		 		10 000 000 00	KELURAHAN MUARA
330	′ '	02						100 Persen	10.000.000,00				- 10.000.000,00	
					URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pemerintahan Umum								KEMBANG
\sqcup			1	<u> </u>										
	7 0	01 05	2.01		Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang -		1 Kegiatan	10.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	-	- 10.000.000,00	KELURAHAN MUARA
					Pemerintahan Umum Sesuai	dilaksanakan Kecamatan		-			pemerintahan daerah yang			KEMBANG
					Penugasan Kepala Daerah						profesional dan akuntabel			
					Penugasan Kepala Daeran									
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	7 0	01 05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku	Jumlah Orang yang Mengikuti		50 Orang	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	10,000,000,00	KELURAHAN MUARA
					dan Intra Suku, Umat Beragama,	Pembinaan Kerukunan Antar Suku			Muara Jawa, Semua	, ,	pemerintahan daerah yang			KEMBANG
														KLIVIBANG
					Ras, dan Golongan Lainnya Guna	dan Intra Suku , Umat Beragama,			Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
					Mewujudkan Stabilitas Keamanan	Ras, dan Golongan Lainnya Guna					untuk mendukung			
					Lokal, Regional, dan Nasional	Mewujudkan Stabilitas Keamanan					transformasi pelayanan			
1 1			1	1		Lokal, Regional, dan Nasional				l	publik			
1 1				I						l	1. Penataan dan			
1 1				I						l				
			1	I					1		Pengembangan Tata Kelola			
1 1				I						l	Pemerintahan dan Pelayanan			
			1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		<u></u>	Publik			I
					Kecamatan Samboja				47.521.743.647,00					KECAMATAN SAMBOJA
	7				UNSUR KEWILAYAHAN				47.521.743.647,00				62.473.445.152,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7 0	01	1		KECAMATAN				47.521.743.647,00				62.473.445.152,00	KECAMATAN SAMBOJA
			-	1		Inn terms		1	- 1					
351	7 0	01 01	1	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -		77 Nilai	21.194.235.397,00				- 28.557.774.402,00	KECAMATAN SAMBOJA
1 1				I	PEMERINTAHAN DAERAH					l				
1 1				I	KABUPATEN/KOTA					l				
	7 0	01 01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen rencana, -		11 Dokumen	320.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	ANS Kecamatan	- 450.000.000.00	KECAMATAN SAMBOJA
1 1	- I -	52		1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					l	pemerintahan daerah yang	Samboja	-35.550.000,00	
1 1				I	Lvanuasi Killerja rerangkat Daeran					l		Јанно Оја		
1 1				I		Perangkat Daerah				l	profesional dan akuntabel			
1 1				I						l	untuk mendukung			
1 1			1	1		1				l	transformasi pelayanan			
1 1				I						l	publik			
1 1				I						l				
				I						l	1. Penataan dan			
		1		I						l	Pengembangan Tata Kelola			
						i l	1 1			l	Pemerintahan dan Pelayanan		1	1
						l l								
											Publik			

7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ANS Kecamatan Samboja	50.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ANS Kecamatan Samboja	70.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
7	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ANS Kecamatan Samboja	330.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi - Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabe	14 Laporan	16.351.803.619,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN (PNS dan PPPK) Kecamatan Samboja	- 21.539.512.402,00	KECAMATAN SAMBOJA
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1148 Orang/bulan	15.689.083.619,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN (PNS dan PPPK) Kecamatan Samboja		KECAMATAN SAMBOJA
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN (PNS dan PPPK) Kecamatan Samboja	55,000,000,00	KECAMATAN SAMBOJA
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	652.720.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN (PNS dan PPPK) Kecamatan Samboja	809.040.000,00	KECAMATAN SAMBOJA



7	0	1 01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	9863 Unit 6 Dokumen	00,000,000		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	ASN Kecamatan - Samboja	110.000.000,00 KE	CAMATAN SAMBOJA
7	0	1 01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola	ASN Kecamatan	60.000.000,00 KE	CAMATAN SAMBOJA
					SKPD	Barang Milik Daerah SKPD		Samboja, Kampung Lama		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Samboja		
7		1 01			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	40.800.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Samboja		CAMATAN SAMBOJA
7	0	1 01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang - mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	20 orang	35.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN (PNS dan PPPK) - Kecamatan Samboja	. 150.000.000,00 K8	ecamatan samboja
		1 01			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	35.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN (PNS dan PPPK) Kecamatan Samboja		CAMATAN SAMBOJA
7	0	1 01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	6 Layanan	267.403.630,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan - Samboja		ECAMATAN SAMBOJA
7	0	1 01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Samboja	27.000.000,00 KE	CAMATAN SAMBOJA

7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	ASN Kecamatan Samboja	250.000.000,00 K	ECAMATAN SAMBOJA
										transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
—	04	04	2.00	0000	Daniel de la Daniel de la Daniel	Lucial Delet Bereiter Burel	4 Delet	40.457.000.00 Web West West	DANA DA CILIACII (DDII)	Publik 7. Revisedates total lade	ACNIV	400,000,000,00	FCAAAATAN CAAADOIA
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.457.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Samboja	100.000.000,00 K	ECAMATAN SAMBOJA
		01			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Samboja		ECAMATAN SAMBOJA
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	36.946.630,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Samboja		ECAMATAN SAMBOJA
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Samboja	550.000.000,00 K	ECAMATAN SAMBOJA
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah - Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Unit 0 Persen	270.000.000,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Samboja		ECAMATAN SAMBOJA
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Samboja	513.762.000,00 K	ECAMATAN SAMBOJA

7	01	01 2.0	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Gedung Kantor atau		1 Unit	170.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	ASN Kecamatan	190.000.000,00 KEC	AMATAN SAMBOJA
				Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan			Samboja, Kampung		pemerintahan daerah yang	Samboja		
								Lama		profesional dan akuntabel	•		
										untuk mendukung			
1 '										transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
1 '													
1 '										Pengembangan Tata Kelola			
1 '										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
7	01	01 2.0)8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah waktu penyediaan Jasa -		12 bulan	3.747.978.148,00	-	7. Peningkatan tata kelola	ASN Kecamatan -	4.113.000.000,00 KEC	AMATAN SAMBOJA
1 '				Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan					pemerintahan daerah yang	Samboja		
1 '					Daerah yang disediakan					profesional dan akuntabel			
					Ductum yang aiscalakan					untuk mendukung			
1 '										transformasi pelayanan			
1 '										publik			
1 '										para			
1 '										1. Penataan dan			
1 '										Pengembangan Tata Kelola			
1 '										Pemerintahan dan Pelayanan			
1 '										Publik			
7	01	01 2.0	08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	2.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	ASN Kecamatan	13.000.000,00 KEC	AMATAN SAMBOIA
' '				,	Surat Menyurat			Samboja, Kampung		pemerintahan daerah yang	Samboja	25.555,000,000	
1				ĺ	Sur activicity and t			Lama	1	profesional dan akuntabel	Jumpoja		
1				ĺ				Lama	1				
['				ĺ					1	untuk mendukung			
		1		1			1		1	transformasi pelayanan			
1				ĺ					1	publik			
['				ĺ					1	1. Penataan dan			
1 '										Pengembangan Tata Kelola			
1 '										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
	01	01 2.0	0000	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	- 	12 Laporan	1.634.335.036,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BACILIASII (DDII)	7. Peningkatan tata kelola	ASN Kecamatan	1.700.000.000,00 KEC	A A A A T A B I C A B A D O I A
,	01	01 2.00	0002				12 Laporari		DANA BAGI HASIL (DBH)			1.700.000.000,00 REC	AIVIATAN SAIVIBUJA
				Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan			Samboja, Semua		pemerintahan daerah yang	Samboja		
					Listrik yang Disediakan			Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
1 '										untuk mendukung			
1 '										transformasi pelayanan			
										publik			
1 '										1. Penataan dan			
1 '										Pengembangan Tata Kelola			
1 '													
										Pemerintahan dan Pelayanan			
'										Publik			
7	01	01 2.0	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	2.111.143.112,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	ASN Kecamatan	2.400.000.000,00 KEC	AMATAN SAMBOJA
1 '				Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang			Samboja, Semua		pemerintahan daerah yang	Samboja		
1 '					Disediakan			Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
1 '													
1 '										l untuk mendukung			
1 '										untuk mendukung transformasi pelayanan			
1										transformasi pelayanan			
1										transformasi pelayanan publik			
										transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			
1 .										transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
										transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
										transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	01	01 2.09	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah			24 Unit	111.250.000,00		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	ASN Kecamatan -	174.000.000,00 KEC	CAMATAN SAMBOJA
7	01	01 2.09	99	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		24 Unit	111.250.000,00		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan - Samboja	174.000.000,00 KEC	Camatan Samboja
7	01	01 2.09	99		Penunjang Urusan Pemerintahan		24 Unit	111.250.000,00	-	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola		174.000.000,00 KEC	CAMATAN SAMBOJA
7	01	01 2.09	99	Penunjang Urusan Pemerintahan			24 Unit	111.250.000,00	·	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel		174.000.000,00 KEC	CAMATAN SAMBOJA
7	01	01 2.09	09	Penunjang Urusan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan		24 Unit	111.250.000,00	-	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		174.000.000,00 KEC	TAMATAN SAMBOJA
7	01	01 2.09	09	Penunjang Urusan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan		24 Unit	111.250.000,00		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		174.000.000,00 KEC	TAMATAN SAMBOJA
7	01	01 2.09	09	Penunjang Urusan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan		24 Unit	111.250.000,00		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		174.000.000,00 KEC	CAMATAN SAMBOJA
7	01	01 2.09)9	Penunjang Urusan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan		24 Unit	111.250.000,00		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		174.000.000,00 KEC	TAMATAN SAMBOJA
7	01	01 2.09	09	Penunjang Urusan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan		24 Unit	111.250.000,00		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		174.000.000,00 KEC	TAMATAN SAMBOJA
7	01	01 2.09	99	Penunjang Urusan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan		24 Unit	111.250.000,00	-	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		174.000.000,00 KEC	TAMATAN SAMBOJA
7	01	01 2.09	09	Penunjang Urusan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan		24 Unit	111.250.000,00	·	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		174.000.000,00 KEC	TAMATAN SAMBOJA
7				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan				DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7		01 2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		24 Unit	51.250.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	ASN Kecamatan	174.000.000,00 KEC	
7				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang			51.250.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang pemerintaha	Samboja		
7				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak			51.250.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	ASN Kecamatan		
7				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang			51.250.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Panganan Publik 1. Penataan dan Apelayanan Publik 1. Penataan dan Apelayanan Publik 1. Penataan dan Apelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	ASN Kecamatan		
7				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak			51.250.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung	DANA BAGI HASIL (DBH) -	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik	ASN Kecamatan		
7				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak			51.250.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Panganan Publik 1. Penataan dan Apelayanan Publik 1. Penataan dan Apelayanan Publik 1. Penataan dan Apelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	ASN Kecamatan		
7				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak			51.250.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik	ASN Kecamatan		
7				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak			51.250.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung	DANA BAGI HASIL (DBH) -	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	ASN Kecamatan		
7				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak			51.250.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung	DANA BAGI HASIL (DBH) -	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola	ASN Kecamatan		
7				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak			51.250.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	ASN Kecamatan		

7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin		15 Unit	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	ASN Kecamatan	24.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
					Lainnya	Lainnya yang Dipelihara			Samboja, Kampung		pemerintahan daerah yang	Samboja		
					,	, , , ,			Lama		profesional dan akuntabel	· ·		
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan		1 Unit	45.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DRH)	- 7. Peningkatan tata kelola	ASN Kecamatan	70,000,000,00	KECAMATAN SAMBOJA
'	01	01	2.03	0003	Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang		2 01110	Samboja, Kampung	State Control of Control	pemerintahan daerah yang	Samboja	70.000.000,00	NEG WINTER OF WINDOW
					Kantoi dan bangunan Lamnya							Salliboja		
						Dipelihara/Direhabilitasi			Lama		profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
2 7	01	02		 	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Tingkat Aksesibilitas WIlayah -		100 persen	18.950.108.250,00			 	22 160 670 750 00	KECAMATAN SAMBOJA
· ′	01	02		1	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN				10.530.106.230,00				22.100.070.750,00	RECAIVIM I MIN JAIVIDUJA
- 1	ĺ	1 1		1		Kecamatan		75 persen		1				
	1	1 1		I	PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan								
						dan non perijinan yang								
						dilaksanakan sesuai SOP								
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan	Jumlah kegiatan pemerintahan di -		2 Kegiatan	450.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat -	540.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
					Kegiatan	tingkat kecamatan yang					pemerintahan daerah yang	Kecamatan Samboja		
						melibatkan Perangkat Daerah dan					profesional dan akuntabel			
					Pemerintahan di Tingkat	Instansi Vertikal Terkait yang					untuk mendukung			
					Kecamatan	dilaksanakan secara efektif					transformasi pelayanan			
					Recamatan	dilaksariakan secara elektii					publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	i	2 Laporan	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat Kecamatan	170.000.000.00	KECAMATAN SAMBOJA
			-		dan Pelaksanaan Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan			Samboja, Semua	, ,	pemerintahan daerah yang	Samboja		
					Pemerintahan dengan Perangkat	Kegiatan Pemerintahan dengan			Kel/Desa		profesional dan akuntabel	Samboja		
					Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				Kely Desa					
					Daeran dan Instansi Vertikai Terkait	Perangkat Daerah dan Instansi					untuk mendukung			
						Vertikal Terkait					transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
	ĺ	1 1		1						1	Pemerintahan dan Pelayanan			
	1	1 1		I							Publik			
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah Dokumen Peningkatan	- 	1 Dokumen	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DRH)	- 7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat Kecamatan	370,000,000,00	KECAMATAN SAMBOJA
1 ′	01	02	2.01	0002		Efektifitas Kegiatan Pemerintahan		1 DOKUMEN		SALAN DAGITIASIE (DBIT)	pemerintahan daerah yang		575.500.000,00	IN INIT JAIVIBUJA
	1			1	Pemerintahan di Tingkat				Samboja, Kampung			Samboja		
	1			1	Kecamatan	di Tingkat Kecamatan			Lama		profesional dan akuntabel			
1	1	1 1		I							untuk mendukung			
	ĺ	1 1		1						1	transformasi pelayanan			
1	1	1 1		I							publik			
	ĺ	1 1		1						1	1. Penataan dan			
	ĺ	1 1		1						1	Pengembangan Tata Kelola			
1	1	1 1		I							Pemerintahan dan Pelayanan			
	ĺ	1 1		1						1	Publik			
7		100	2.02	 	B	Lundah Chandes Balanca - *** *	+ +	1 SPM	100.000.000,00			Leader and dec	450 000 000 0	KECAMATAN SAMBOJA
_ /	Ul	02	2.02	I	Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal		1 SPIVI	100.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	Lembaga dan -	150.000.000,00	KECAIVIATAN SAIVIBOJA
	1			1	Pemerintahan yang Tidak	(SPM) yang difasilitasi					pemerintahan daerah yang	Masyarakat		
	1	1 1		I	Dilaksanakan oleh Unit Kerja						profesional dan akuntabel	Kecamatan Samboja		
1		1 1		1	Perangkat Daerah yang Ada di					1	untuk mendukung			
1		1 1		1	Kecamatan					1	transformasi pelayanan			
	1			1	-						publik			
	1	1 1		I							1. Penataan dan			
						1	1 1	1	i	Ī				
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			



	7 0	1 02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah		2 Laporan	100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Lembaga dan Masyarakat Kecamatan Samboja	150.000.000,00 k	KECAMATAN SAMBOJA
						Kecamatan					untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			
											1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	7 0	1 02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	-	101 Kegiatan	18.400.108.250,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	Masyarakat - Kecamatan Samboja	21.470.670.750,00 N	KECAMATAN SAMBOJA
											transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	7 0	1 02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		12 Laporan	980.108.250,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Masyarakat Kecamatan Samboja	1.470.670.750,00	(ECAMATAN SAMBOJA
	7 0	1 02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		97 Laporan	17.420.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Samboja	20.000.000,000 k	KECAMATAN SAMBOJA
353	7 0	1 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	-	72,7 Persen	6.907.400.000,00			-	10.850.000.000,00 k	KECAMATAN SAMBOJA
		1 03			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan		1 kali	25.000.000,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dalan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan - Masyarakat Kecamatan Samboja		KECAMATAN SAMBOJA
	7 0	1 03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat Kecamatan Samboja	30.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
	7 0	1 03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan		10 Kegiatan	101.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan - Masyarakat Kecamatan Samboja	550.000.000,00 N	KECAMATAN SAMBOJA



7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Lembaga dan Masyarakat Kecamatan Samboja	100.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
7	01				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	5.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat Kecamatan Samboja		KECAMATAN SAMBOJA
7			2.02		Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat Kecamatan Samboja		KECAMATAN SAMBOJA
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	45.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat Kecamatan Samboja		KECAMATAN SAMBOJA
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	12 Kali	6.781.400.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat Kecamatan Samboja		KECAMATAN SAMBOJA
7		03			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	10 Lembaga Kemasyarakatan	6.731.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat Kecamatan Samboja		KECAMATAN SAMBOJA
7	01	03	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	4 Unit	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat Kecamatan Samboja	270.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA

354	7	01 04	1		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan		100 Persen	175.000.000,00			-	255.000.000,00 KECAF	MATAN SAMBOJA
	7	01 04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		4 Kegiatan	175.000.000,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Publik	Instansi Terkait dan - Masyarakat dan Lembaga Kecamatan Samboja	255.000.000,00 KECAF	MATAN SAMBOJA
	7	01 04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		4 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Instansi Terkait dan Masyarakat dan Lembaga Kecamatan Samboja	55.000.000,00 KECAN	MATAN SAMBOJA
	7	01 04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		4 Laporan	125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Instansi Terkait dan Masyarakat dan Lembaga Kecamatan Samboja	200.000.000,00 KECAN	Matan Samboja
355	7	01 05	i		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	100 Persen	220.000.000,00			-	595.000.000,00 KECAN	MATAN SAMBOJA
			5 2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan		1 Kegiatan	220.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat Kecamatan Samboja	595.000.000,00 KECAF	
	7	01 05	5 2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Jumat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		500 Orang	180.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat Kecamatan Samboja	550.000.000,00 KECAN	MATAN SAMBOJA
	7	01 05	5 2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		2 Dökumen	40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat Kecamatan Samboja	45.000.000,00 KECAN	MATAN SAMBOJA



March Marc															
Variable Variable	356	7	01 06						70 Persen	75.000.000,00				- 55.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
No. Control															
1						DESA	Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik								
		7	01 06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan			3 Desa	75.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	Aparatur Desa	- 55.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
Process of the control of the cont												pemerintahan daerah yang			
Part															
Mail															
Company						Pemerintahan Desa									
No. 1												p			
Total Tota															
Part												Pemerintahan dan Pelayanan			
Part												I UDIIK			
Control Cont		7	01 06	2.01	0017				3 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)			55.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
Part						Wilayannya	Pendampingan Desa di Wilayahnya						Kecamatan Samboja		
Second Continue Section										ikely best					
No.															
												P==			
7 7 10 10 10 10 10 10															
7 7 1 1 1 1 1 1 1 1						Kelurahan Handil Baru Darat	1	l l	1	1.388.832.000,00	I.	1 **		1.893.700.000,00	KELURAHAN HANDIL BARU
Part Part											1		1		
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		7				UNSUR KEWILAYAHAN				1.388.832.000,00				1.893.700.000,00	DARAT
Part Part		7	01			KECAMATAN				1.388.832.000,00				1.893.700.000,00	
7 01 01 25 Manufacture Normalized Section Promption Prom	357	7	01 01				Nilai SAKIP Perangkat Daerah -		77 Nilai	73.832.000,00				- 163.700.000,00	KELURAHAN HANDIL BARU
pemelitrian dearly was preferred in a polity paral polity in part of the paral polity in part of the paral polity in paral pol						PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									DARAT
Professional fast advantable under the confidence of the confide		7	01 01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Administrasi Umum -		4 Layanan	60.454.500,00		- 7. Peningkatan tata kelola	ASN Kelurahan Handil	- 143.000.000,00	KELURAHAN HANDIL BARU
which mondulung transformation fails (application of the program o						Daerah	Perangkat Daerah yang tersedia						Baru Darat		DARAT
The second control of the second control of															
Public P															
Progression for a feed of Progression and State Component Installation (Institute of Progression (Installation (Institute of Progression (Institute of Progression (Institute of Progression (Institute of Progression (Institute of Progression (Institute of Institute															
Permetritation den Pelapsana Permetritation den Permetritation												1. Penataan dan			
7 01 01 26 000 Percentage Bargurian Conformacy percentage Barg															
7 01 02 206 000 206 20															
Listrii/Prerrangen Bargunan Kantor I Listrii/Prerrangen Bargunan Kantor I Listrii/Prerrangen Bargunan Kantor I Listrii/Prerrangen Bargunan Kantor I Listrii/Prerrangen Bargunan Kantor I Listrii/Prerrangen Bargunan Kantor I Listrii/Prerrangen Bargunan Kantor I Listrii/Prerrangen Bargunan Kantor I Listrii/Prerrangen Bargunan Kantor I Palet I Palet I 1726-500,00 I Data I	-	7	01 01	2.00	0001	Donusian Kampanan Instalasi	Lordon Bolost Konson on Lordon		1 Dalest	15 000 000 00 Web Web Web Western	DANA BACILIACII (DDII)		ACALIKala araba a Haradii	16 000 000 00	KELLIDALIAN HANDII DADII
Listrik/Pereragan Bangsunan Kantor yang Disediakan Darat profesional dan akuntabel spressional d		′	01 01	2.00	0001	Penyediaan Komponen instalasi			1 Paket		DANA BAGI HASIL (DBH)			16.000.000,00	
United Remodukung Terrishment dan Peleparan Terrishment dan Peleparan Terrishment dan Peleparan Terrishment dan Peleparan Terrishment dan Peleparan Terrishment dan Peleparan Terrishment dan Peleparan Terrishment dan Peleparan Terrishment dan Peleparan Terrishment dan Peleparan Terrishment dan Peleparan Terrishment dan Peleparan Terrishment dan Peleparan Terrishment dan Peleparan Terrishment dan Peleparan Terrishment dan Peleparan Terrishment dan Terrishment dan Peleparan Terrishment dan Terrishment dan Peleparan Terrishment dan Terrishment dan Peleparan Terrishment dan Terrishment dan Peleparan Terrishment dan Terrishment dan Terrishment dan Terrishment Terrishment dan Terrishm						Listrik/Penerangan Bangunan							Bai u Dai at		DANAT
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							, , ,								
ASN Kelurahan Handil Pengandaan Bahan Logistik Kantor Vang Disediakan 7 01 01 02 06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Vang Disediakan 7 01 01 02 06 0005 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Vang Disediakan 8 2 Pelet 13.725.500,00 Kab. Kutai Kartanegara, DaNA BAGI HASIL (DBH) Darat 13.726.500,00 Kab. Kutai Kartanegara, DaNA BAGI HASIL (DBH) Darat 14 2 06 0005 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Vang Disediakan 15 000,000,00 KELURAHAN HANDIL BARU DARAT 17 01 01 02 06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan Managara Tata Kelola Pengandaan Managara Tata Kelola Pengandaan Managara Tata Kelola Pengandaan Managara															
Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Pengem															
Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kontor yang Disediakan 7 01 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kontor yang Disediakan 7 01 01 01 2.06 0005 Penyediaan Bahan Logistik Kontor 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2															
Poblik 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 13.726.500,00 Kab, Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat ASN Keturahan Handil Baru Darat ASN Keturahan Handil Baru Darat ASN Keturahan Handil Baru Darat ASN Keturahan Handil Baru Darat ASN Keturahan Handil Baru Darat ASN Keturahan Handil Baru Darat ASN Keturahan Handil Baru Darat ASN Keturahan Handil Baru Darat ASN Keturahan Handil Baru Darat ASN Keturahan Handil Baru Darat ASN Keturahan Handil Baru Darat ASN Keturahan Handil Baru Darat ASN Keturahan Handil Baru Darat ASN Keturahan Handil Baru Darat ASN Keturahan Handil Baru Darat ASN Keturahan Handil Baru Darat ASN Keturahan Handil Baru Darat ASN Keturahan Handil Baru Darat Darat ASN Keturahan Handil Baru Darat Darat ASN Keturahan Handil Baru Darat D															
yang Disediakan yang Disediakan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Pengandaan Penggandaan yang Disediakan DARAT DARAT DARAT pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 1. Penggandaan Pakel Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan DARAT															
Darat profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penggandaan yang Disediakan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penggandaan yang Disediakan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 1. Penataan dan Penggandaan yang Disediakan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penggandaan yang Disediakan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penggandaan yang Disediakan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penggandaan yang Disediakan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penggandaan yang Disediakan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penggandaan yang Disediakan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penggandaan yang Disediakan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penggandaan yang Disediakan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penggandaan yang Disediakan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penggandaan yang Disediakan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penggandaan yang Disediakan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penggandaan yang Disediakan profesional akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penggandaan yang Disediakan profesional akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penggandaan yang Disediakan profesional akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penggandaan profesional akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Penggandaan		7	01 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor		3 Paket		DANA BAGI HASIL (DBH)		ASN Kelurahan Handil	50.000.000,00	
urtuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengemban							yang Disediakan						Baru Darat		DARAT
Transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola										Darat					
Dublik Lependangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan Pengembangan Tata Kelola Penggandaan Penggandaan Pengembangan Tata Kelola Penge												untuk mendukung transformasi pelayanan			
Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengga															
Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7 01 01 2.06 0005 Penggandaan P												1. Penataan dan			
7 01 01 02 03 04 05 05 05 05 05 05 05															
7 01 01 2.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan															
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Penggandaan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Samboja, Handil Baru pemerintahan daerah yang profesional dan akutung untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		7	01 01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan		1 Paket	1.728.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		ASN Kelurahan Handil	2.000.000,00	KELURAHAN HANDIL BARU
untuk mendukung transformasi pelayanan pulayanan pungaman dan Pengemban dan Pengemban dan Pengemban dan Pelayanan			1	1	1					Samboja, Handil Baru		pemerintahan daerah yang			
transformasi pelayanan publik 1. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan										Darat					
publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			1	1	1										
1. Penataan dan Pengembahan Tata Kelola Pemerinbahan dan Pelayanan															
Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			1	1	1										
Pemerintahan dan Pelayanan			1	1	1							Pengembangan Tata Kelola			
			1	1	1							Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			



	7 01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan		28 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	ASN Kelurahan Handil	75.000.000,00	KELURAHAN HANDIL BARU
					dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Samboja, Handil Baru	·	pemerintahan daerah yang	Baru Darat		DARAT
						SKPD			Darat		profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	7 01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan			12 bulan	500.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	ASN Kelurahan Handil -	2.200.000,00	KELURAHAN HANDIL BARU
					Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan					pemerintahan daerah yang	Baru Darat		DARAT
						Daerah yang disediakan					profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
\vdash		1									Publik			
1 1	/ 01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	ASN Kelurahan Handil	2.200.000,00	KELURAHAN HANDIL BARU
						Surat Menyurat			Samboja, Handil Baru		pemerintahan daerah yang	Baru Darat		DARAT
	- 1	1 1				1			Darat		profesional dan akuntabel	1		
	- 1	1 1				1					untuk mendukung	1		
]		transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
-		++							10.000 000					
1 1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah			6 Unit	12.877.500,00		- 7. Peningkatan tata kelola	ASN Kelurahan Handil -	18.500.000,00	KELURAHAN HANDIL BARU
					Penunjang Urusan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan					pemerintahan daerah yang	Baru Darat		DARAT
					Daerah	Daerah yang dipelihara					profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
\vdash	7 01	01	2.00	0000	Domeliharaan Daralatan dan Masin	Jumlah Peralatan dan Mesin		5 Unit	3 000 000 00 Kah Kutai Kartan arasa	DANA DACILIACII (DDII)		ASN Kelurahan Handil	3 500 000 00	KELURAHAN HANDIL BARU
1 1	/ 01	01	2.09	0000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			5 UIIIL	3.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	DAINA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Baru Darat	3.500.000,00	DARAT
					Lainnya	Lainnya yang Dipelihara			Darat		profesional dan akuntabel	Bar u Darat		DARAT
									Darat					
											untuk mendukung transformasi pelayanan			
											nublik			
											1. Penataan dan			
	- 1	1				1			1		Pengembangan Tata Kelola			
]		Pemerintahan dan Pelayanan			
	- 1	1 1				1					Publik	1		
 	7 01	01	2.09	0000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan		1 Unit	9.877.500,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DDU)	- 7. Peningkatan tata kelola	ASN Kelurahan Handil	15,000,000,00	KELURAHAN HANDIL BARU
1 1	. 01	01	2.09	0009	Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang		1 OIIIL	9.877.500,00 Rab. Kutai kartanegara, Samboja, Handil Baru	DAMA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang	Baru Darat	15.000.000,00	DARAT
	- 1	1 1			Namor uan bangulidii Edililiyd	Dipelihara/Direhabilitasi			Darat		pemerintanan daeran yang profesional dan akuntabel	Dai u Dai at		DAIMI
						Siperilar of Differential			Dalat		untuk mendukung			
]					
	- 1	1 1				1					transformasi pelayanan publik	1		
											1. Penataan dan			
]		Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
	1	1				1			1		Publik			
358	7 01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN	Percentace Lembaga		72,7 Persen	1.290.000.000,00		TODIK	+	1 700 000 000 00	KELURAHAN HANDIL BARU
336	, 01	US			MASYARAKAT DESA DAN	Persentase Lembaga - Pemberdayaan Masyarakat		12,1 reisen	1.290.000.000,00				1.700.000.000,00	DARAT
					KELURAHAN	Desa/Kelurahan Yang Aktif]					Polici
 	7 01	03	2 02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1 Kegiatan	690.000.000,00		- 1. Penataan dan	Lembaga dan -	1,050,000,000,00	KELURAHAN HANDIL BARU
1 1	, 01	03	2.02		negiatan remperuayaan nelufahan	/ Kelurahan		1 regiatari	050.000.000,00				1.030.000.000,00	DARAT
						/ Neidi anali					Pemerintahan dan Pelayanan			POINT
	1	1 1				1					Pemerintanan dan Pelayanan Publik	manun baru Darat		
1	7 01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	+ +	6 Unit	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DDII)	- 1. Penataan dan	Lembaga dan	750,000,000,00	KELURAHAN HANDIL BARU
		U.S	2.02	0002				O UTIIL	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	DAINA BAGI HASIL (DRH)	- 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan	/50.000.000,00	DARAT
	. **				Dracarana Kolurahan									
					Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun	I							DAKAT
					Prasarana Kelurahan	Keluranan yang Terbangun			Darat		Pemerintahan dan Pelayanan Publik			DAKAT



	7 (01 03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Pokmas / rmas	240.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Handil Baru Darat	300.000.000,000	KELURAHAN HANDIL BARU DARAT
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	7 (01 03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	11	kali	600.000,000		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Handil Baru Darat	- 650.000.000,00	KELURAHAN HANDIL BARU DARAT
	7 (01 03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		! Lembaga emasyarakatan	600.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Handii Baru Darat	650,000,000,00	KELURAHAN HANDIL BARU DARAT
359	7 (01 05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10	00 Persen	25.000.000,00				- 30.000.000,00	KELURAHAN HANDIL BARU DARAT
	7 (01 05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	11	Kegiatan	25.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Handil Baru Darat		KELURAHAN HANDIL BARU DARAT
	7 (01 05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30) Orang	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Handil Baru Darat	30.000.000,00	KELURAHAN HANDIL BARU DARAT
					Kelurahan Kampung Lama		<u>'</u>		1.231.277.500,00		<u> </u>		1.735.450.000,00	KELURAHAN KAMPUNG
	7		1		UNSUR KEWILAYAHAN				1.231.277.500,00				1.735.450.000,00	LAMA KELURAHAN KAMPUNG
	7 (01	1		KECAMATAN				1.231.277.500,00				1.735.450.000,00	LAMA KELURAHAN KAMPUNG
360	7 (01 01	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	77	⁷ Nilai	66.277.500,00				- 155.450.000,00	LAMA KELURAHAN KAMPUNG LAMA
	7 (01 01	2.06		REWIEIN JAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	4 1	Layanan	51.000.000,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penerahan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Kampung Lama	- 133.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG LAMA



7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	ASN Kelurahan Kampung Lama		KELURAHAN KAMPUNG LAMA
7	0:	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	9.250.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	ASN Kelurahan Kampung Lama	50.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG LAMA
										transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	0:	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.750.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Kampung Lama	2.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG LAMA
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Kampung Lama		KELURAHAN KAMPUNG LAMA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	500.000,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan - Kampung Lama		KELURAHAN KAMPUNG LAMA
7	00	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Kampung Lama	2.250.000,00	KELURAHAN KAMPUNG LAMA
7	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Millik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	6 Unit	14,777.500,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan - Kampung Lama		KELURAHAN KAMPUNG LAMA

	7 (01 01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	4.900.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	DANA BAGI HASIL (DBH)	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	ASN Kelurahan Kampung Lama		LURAHAN KAMPUNG MA
										transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
			2.00				1			Publik		15.000.000.00	
	7 (01 01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.877.500,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Kampung Lama		LURAHAN KAMPUNG MA
361	7 (01 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga - Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	72,7 Persen	1.140.000.000,00		TOOK	-	1.550.000.000,00 KEL LAP	LURAHAN KAMPUNG MA
		01 03			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa - / Kelurahan	2 Kegiatan	690.000.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan - Masyarakat Kelurahan Kampung Lama		MA
	7 (01 03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Kampung Lama		LURAHAN KAMPUNG MA
	7 (01 03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	240.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Kampung Lama		LURAHAN KAMPUNG MA
	7 (01 03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan - yang Diselenggarakan	1 kali	450.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga Kelurahan - Kampung Lama	LAT	LURAHAN KAMPUNG MA
	7 (01 03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga Kelurahan Kampung Lama		LURAHAN KAMPUNG MA
362	7 (01 05			PROGRAM PENYELENGGARAAN	CAKUPAN PENYELENGGARAAN -	100 Persen	25.000.000,00			-		LURAHAN KAMPUNG MA
				1	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							



7														
	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang -		1 Kegiatan	25.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	Lembaga dan -	- 30.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG
					Pemerintahan Umum Sesuai	dilaksanakan Kecamatan					pemerintahan daerah yang	Masyarakat Kelurahan		LAMA
					Penugasan Kepala Daerah						profesional dan akuntabel	Kampung Lama		
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku	Jumlah Orang yang Mengikuti		30 Orang	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DRH)	- 7. Peningkatan tata kelola	Lembaga dan	30,000,000,00	KELURAHAN KAMPUNG
					dan Intra Suku, Umat Beragama,	Pembinaan Kerukunan Antar Suku			Samboja, Kampung		pemerintahan daerah yang	Masyarakat Kelurahan		LAMA
					Ras, dan Golongan Lainnya Guna	dan Intra Suku , Umat Beragama,			Lama		profesional dan akuntabel	Kampung Lama		
					Mewujudkan Stabilitas Keamanan	Ras, dan Golongan Lainnya Guna			Editio		untuk mendukung	nampang zama		
					Lokal, Regional, dan Nasional	Mewujudkan Stabilitas Keamanan					transformasi pelayanan			
					zonar, rregionar, dan reasionar	Lokal, Regional, dan Nasional					publik			
						zonal, riegional, dan riasional					1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
					Kelurahan Teluk Pemedas		l l		1.285.545.500,00	l l	T don't	l l	1.757.700.000,00	KELURAHAN TELUK
7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.285.545.500,00			T	1.757.700.000,00	PEMEDAS KELURAHAN TELUK
					UNSUK KEWILAYAHAN				1.285.545.500,00					PEMEDAS
7	01				KECAMATAN				1.285.545.500,00				1.757.700.000,00	KELURAHAN TELUK PEMEDAS
363 7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -		77 Nilai	70.545.500,00				- 127.700.000.00	KELURAHAN TELUK
					PEMERINTAHAN DAERAH									PEMEDAS
					KABUPATEN/KOTA									
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Administrasi Umum -		4 Layanan	48.078.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	ASN Kelurahan Teluk -	- 98.000.000,00	KELURAHAN TELUK
					Daerah	Perangkat Daerah yang tersedia			·		pemerintahan daerah yang	Pemedas	·	PEMEDAS
											profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
											Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	lumlah Paket Komponen Instalasi		1 Paket	10.500.000.00 Kab. Kutai Kartanegara.	DANA BAGI HASII (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Teluk	12,000,000,00	KELURAHAN TELUK PEMEDA
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan		1 Paket	10.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboia. Teluk	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola	ASN Kelurahan Teluk Pemedas	12.000.000,00	KELURAHAN TELUK PEMEDA
7	01	01	2.06	0001		Listrik/Penerangan Bangunan		1 Paket	Samboja, Teluk	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	ASN Kelurahan Teluk Pemedas	12.000.000,00	KELURAHAN TELUK PEMEDA
7	01	01	2.06		Listrik/Penerangan Bangunan			1 Paket		DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		12.000.000,00	KELURAHAN TELUK PEMEDA
7	01	01	2.06			Listrik/Penerangan Bangunan		1 Paket	Samboja, Teluk	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		12.000.000,00	KELURAHAN TELUK PEMEDA
7	01	01	2.06		Listrik/Penerangan Bangunan	Listrik/Penerangan Bangunan		1 Paket	Samboja, Teluk	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		12,000,000,00	KELURAHAN TELUK PEMEDA
7	01	01	2.06		Listrik/Penerangan Bangunan	Listrik/Penerangan Bangunan		1 Paket	Samboja, Teluk	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		12.000.000,00	KELURAHAN TELUK PEMEDA
7	01	01	2.06		Listrik/Penerangan Bangunan	Listrik/Penerangan Bangunan		1 Paket	Samboja, Teluk	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		12,000,000,00	KELURAHAN TELUK PEMEDA
7	01	01	2.06		Listrik/Penerangan Bangunan	Listrik/Penerangan Bangunan		1 Paket	Samboja, Teluk	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		12,000,000,00	KELURAHAN TELUK PEMEDA
7	01	01	2.06		Listrik/Penerangan Bangunan	Listrik/Penerangan Bangunan		1 Paket	Samboja, Teluk	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		12.000.000,00	KELURAHAN TELUK PEMEDA
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Samboja, Teluk Pemedas		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemedas		
					Listrik/Penerangan Bangunan	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor		1 Paket	Samboja, Teluk Pemedas 4.942.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola			KELURAHAN TELUK PEMEDA
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Samboja, Teluk Pemedas		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang pemerinta	Pemedas ASN Kelurahan Teluk		
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor			Samboja, Teluk Pemedas 4.942.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel	Pemedas ASN Kelurahan Teluk		
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor			Samboja, Teluk Pemedas 4.942.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	Pemedas ASN Kelurahan Teluk		
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor			Samboja, Teluk Pemedas 4.942.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	Pemedas ASN Kelurahan Teluk		
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor			Samboja, Teluk Pemedas 4.942.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Pemedas ASN Kelurahan Teluk		
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor			Samboja, Teluk Pemedas 4.942.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Pemedas ASN Kelurahan Teluk		
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor			Samboja, Teluk Pemedas 4.942.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Pemedas ASN Kelurahan Teluk		
					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor			Samboja, Teluk Pemedas 4.942.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Pemedas ASN Kelurahan Teluk		
7	01	01	2.06	0004	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor			Samboja, Teluk Pemedas 4.942.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas 2.636.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daren yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	Pemedas ASN Kelurahan Teluk	30.000.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	Samboja, Teluk Pemedas 4.942.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas 2.636.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Pemedas ASN Kelurahan Teluk Pemedas	30.000.000,00	KELURAHAN TELUK PEMEDA
7	01	01	2.06	0004	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan		3 Paket	Samboja, Teluk Pemedas 4.942.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas 2.636.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daren yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	ASN Kelurahan Teluk Pemedas ASN Kelurahan Teluk	30.000.000,00	KELURAHAN TELUK PEMEDA
7	01	01	2.06	0004	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan		3 Paket	Samboja, Teluk Pemedas 4.942.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas 2.636.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	ASN Kelurahan Teluk Pemedas ASN Kelurahan Teluk	30.000.000,00	KELURAHAN TELUK PEMEDA
7	01	01	2.06	0004	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan		3 Paket	Samboja, Teluk Pemedas 4.942.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas 2.636.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	ASN Kelurahan Teluk Pemedas ASN Kelurahan Teluk	30.000.000,00	KELURAHAN TELUK PEMEDA
7	01	01	2.06	0004	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan		3 Paket	Samboja, Teluk Pemedas 4.942.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas 2.636.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel dan pengembangan Tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel dan akuntabel dan akuntabel pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel dan akun	ASN Kelurahan Teluk Pemedas ASN Kelurahan Teluk	30.000.000,00	KELURAHAN TELUK PEMEDA
7	01	01	2.06	0004	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan		3 Paket	Samboja, Teluk Pemedas 4.942.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas 2.636.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 1. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Teluk Pemedas ASN Kelurahan Teluk	30.000.000,00	KELURAHAN TELUK PEMEDA
7	01	01	2.06	0004	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan		3 Paket	Samboja, Teluk Pemedas 4.942.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas 2.636.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Teluk Pemedas ASN Kelurahan Teluk	30.000.000,00	KELURAHAN TELUK PEMEDA
7	01	01	2.06	0004	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan		3 Paket	Samboja, Teluk Pemedas 4.942.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas 2.636.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	ASN Kelurahan Teluk Pemedas ASN Kelurahan Teluk	30.000.000,00	KELURAHAN TELUK PEMEDA

	0:	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		28 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	ASN Kelurahan Teluk Pemedas	53.000.000,00	KELURAHAN TELUK PEMEDAS
						SKPD			Pemedas		profesional dan akuntabel untuk mendukung			
											transformasi pelayanan publik			
											1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
-	0:	01 01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah waktu penyediaan Jasa	-	12 bulan	7.760.000,00		Publik - 7. Peningkatan tata kelola	ASN KeKelurahan -	9.700.000,00	KELURAHAN TELUK
					Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan					pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Teluk Pemedas		PEMEDAS
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan publik			
											1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	0:	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	ASN KeKelurahan Teluk Pemedas	2.200.000,00	KELURAHAN TELUK PEMEDAS
						, , , , ,			Pemedas		profesional dan akuntabel untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik 1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	0:	01 01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang		6 Laporan	7.260.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	ASN KeKelurahan Teluk Pemedas	7.500.000,00	KELURAHAN TELUK PEMEDAS
						Disediakan			Pemedas		profesional dan akuntabel untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik 1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
<u> </u>	, 0	01 01	2.00	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	lumlah Parang Milik Daorah		7 Unit	14.707.500,00		Publik - 7. Peningkatan tata kelola	ASN Kelurahan Teluk	20 000 000 00	KELURAHAN TELUK
	"	,1 01	2.03		Penunjang Urusan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan		7 Offic	14.707.500,00		pemerintahan daerah yang	Pemedas	20.000.000,00	PEMEDAS
					Daerah	Daerah yang dipelihara					profesional dan akuntabel untuk mendukung			
											transformasi pelayanan publik			
											5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi			
											pelayanan publik			
;	0:	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		6 Unit	4.830.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	ASN Kelurahan Teluk Pemedas	5.000.000,00	KELURAHAN TELUK PEMEDAS
						. ,			Pemedas		profesional dan akuntabel untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik 5. Penguatan infrastruktur			
											dan penerapan digitalisasi pelayanan publik			
	0:	01 01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan		1 Unit	9.877.500,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	ASN Kelurahan Teluk	15.000.000,00	KELURAHAN TELUK PEMEDAS
					Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Samboja, Teluk Pemedas		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Pemedas		
											untuk mendukung transformasi pelayanan			
											publik 1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
364	0:	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	-	72,7 Persen	1.190.000.000,00				- 1.600.000.000,00	KELURAHAN TELUK PEMEDAS
					KELURAHAN	Desa/Kelurahan Yang Aktif								



											<u>, </u>			
7	01	L 03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan		2 Kegiatan	690.000.000		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan - Masyarakat Kelurahan Teluk Pemedas	1.050.000.000,00	KELURAHAN TELUK PEMEDAS
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		4 Unit	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Teluk Pemedas	750.000.000,00	KELURAHAN TELUK PEMEDAS
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 Pokmas / Ormas	240.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Teluk Pemedas		KELURAHAN TELUK PEMEDAS
7	01	L 03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan		1 kali	500.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga Kelurahan - Teluk Pemedas	550.000.000,00	KELURAHAN TELUK PEMEDAS
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		10 Lembaga Kemasyarakatan	500.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga Kelurahan Teluk Pemedas	550.000.000,00	KELURAHAN TELUK PEMEDAS
365 7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100 Persen	25.000.000,00			-	30.000.000,00	KELURAHAN TELUK PEMEDAS
		05			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan		1 Kegiatan	25.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dalan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan - Masyarakat Kelurahan Teluk Pemedas		KELURAHAN TELUK PEMEDAS
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		30 Orang	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Teluk Pemedas		KELURAHAN TELUK PEMEDAS
		1 1		1	Kelurahan Handil Baru		• •	•	1.480.890.300,00		•		1.962.100.000,00	KELURAHAN HANDIL BARU



1 7	7				UNSUR KEWILAYAHAN			1.480.890.300,00		I			KELURAHAN HANDIL BARI
	7 0:	1		1	KECAMATAN			1.480.890.300,00		İ			KELURAHAN HANDIL BARI
66 7	7 0:	1 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	77 Nilai	65.890.300,00				132.100.000,00	KELURAHAN HANDIL BARI
5	7 0:	1 01	2.06	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	4 Layanan	47.000.000,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	99.200.000,00	KELURAHAN HANDIL BARI
7	7 0:	1 01	2.06	6 00	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	11.000.000,00	KELURAHAN HANDIL BARU
7	7 0:	1 01	2.06	6 00	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	6.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	35.000.000,00	KELURAHAN HANDIL BARU
7	7 0:	1 01	2.06	6 000	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.200.000,00	KELURAHAN HANDIL BAR
5	7 0:	1 01	2.06	6 00	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handii Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	52.000.000,00	KELURAHAN HANDIL BAR
	7 0:	1 01	2.08	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	500.000,00			- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.200.000,00	KELURAHAN HANDIL BAR

7	01	. 01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Handil Baru	2.200.000,00	KELURAHAN HANDIL BARU
7	01	. 01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-	8 Unit	18.390.300,00		1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	ASN Kelurahan Handil	- 30.700.000,00	KELURAHAN HANDIL BARU
					Daerah	Daerah yang dipelihara					profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	balu		
7					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		7 Unit	8.512.800,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Handil Baru		KELURAHAN HANDIL BARU
7	01	. 01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	9.877.500,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Handil Baru	22.000.000,00	KELURAHAN HANDIL BARU
367 7	01	. 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	-	72,7 Persen	1.390.000.000,00				- 1.800.000.000,00	KELURAHAN HANDIL BARU
		. 03			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan		2 Kegiatan	690.000.000,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dal an akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengambangan Tata Kelola Penerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Handil Baru		KELURAHAN HANDIL BARU
7	01	. 03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Handil Baru	750.000.000,00	KELURAHANHANDIL BARU
7	01	. 03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 Pokmas / Ormas	240.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dalan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Handil Baru	300.000,000	KELURAHAN HANDIL BARU



	7	01 03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	1 kali	700.000.	00,000		- 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayana		750.000.000,00	KELURAHAN HANDIL BARU
											Publik			
	7	01 03	3 2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	14 Lembag Kemasyaral		000,00 Kab. Kutai Kartanegara Samboja, Handil Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayana Publik	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Handil Baru	750.000.000,00	KELURAHAN HANDIL BARU
368	7	01 05	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 Persen	25.000.	000,000		PUDIIK	-	30.000.000,00	KELURAHAN HANDIL BARU
	7	01 05	5 2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	1 Kegiatan	25.000.	00,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penatan dan Pengembangan Tata Kelol Pemerintahan dan Pelayana Publik		30,000.000,00	KELURAHAN HANDIL BARU
	7	01 05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30 Orang	25.000.0	00,00 Kab. Kutai Kartanegara Samboja, Handil Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayana Publik Publik	Lembaga Kelurahan Handil Baru	30.000.000,00	KELURAHAN HANDIL BARU
					Kelurahan Sungai Seluang	1	l l	1.633.613.	500,00		[_LU	2.116.700.000,00	KELURAHAN SUNGAI SELUANG
	7				UNSUR KEWILAYAHAN			1.633.613.	500,00				2.116.700.000,00	KELURAHAN SUNGAI SELUANG
	7	01			KECAMATAN			1.633.613.	500,00				2.116.700.000,00	KELURAHAN SUNGAI SELUANG
369	7	01 01	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	77 Nilai	68.613.	500,00			-	136.700.000,00	KELURAHAN SUNGAI SELUANG
	7	01 01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	4 Layanan	49.176.	00,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelol Pemerintahan dan Pelayana Publik		108.700.000,00	KELURAHAN SUNGAI SELUANG
	7	01 01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.554.0	00,00 Kab. Kutai Kartanegara Samboja, Sungai Seluang	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayana Publik	ASN Kelurahan Sungai Seluang	12.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI SELUANG
	7	01 01	1 2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	6.122.	000,00 Kab. Kutai Kartanegara Samboja, Sungai Seluang	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayana Publik	ASN Kelurahan Sungai Seluang	40.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI SELUANG

7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	DANA BAGI HASIL (DBH)	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Sungai Seluang	1.700.000,00	KELURAHAN SUNGAI SELUANG
7	01	01	2.06	0009		Jumlah Laporan Penyelenggaraan	28 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	ASN Kelurahan Sungai	55.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI
					dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Samboja, Sungai Seluang		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Seluang		SELUANG
		01			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	6.560.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Sungai Seluang		KELURAHAN SUNGAI SELUANG
		01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	, ,	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Sungai Seluang		KELURAHAN SUNGAI SELUANG
		01		0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Samboja, Sungai Seluang	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Sungai Seluang		KELURAHAN SUNGAI SELUANG
7		01			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	6 Unit	12.877.500,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Sungai - Seluang		KELURAHAN SUNGAI SELUANG
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengambangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Sungai Seluang	3.500.000,00	KELURAHAN SUNGAI SELUANG

7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.877.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	DANA BAGI HASIL (DBH)		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	ASN Kelurahan Sungai Seluang	15.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI SELUANG
												Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
370 7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Persentase Lembaga - Pemberdayaan Masyarakat	72,7 Persen	1.540.000.000,00					-	1.950.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI
					KELURAHAN	Desa/Kelurahan Yang Aktif									SELUANG
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		2 Kegiatan	690.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola	Lembaga dan -	1.050.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI
						/ Kelurahan						pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	Masyarakat Kelurahan Sungai Seluang		SELUANG
												transformasi pelayanan			
												publik 1. Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	5 Unit	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola	Lembaga dan	750.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI
					Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun			Samboja, Sungai Seluang		1	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	Masyarakat Kelurahan Sungai Seluang		SELUANG
											: 	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	3 Pokmas /	240.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		7. Peningkatan tata kelola	Lembaga dan	300.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI
					Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas		Samboja, Sungai Seluang			pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik	Masyarakat Kelurahan Sungai Seluang		SELUANG
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga	Jumlah Koordinasi yang -	1 kali	850.000.000,00			L.	7. Peningkatan tata kelola	Lembaga Kelurahan -	900.000.000.00	KELURAHAN SUNGAI
					Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	dilaksanakan Desa / Kelurahan						pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Sungai Seluang		SELUANG
												Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	17 Lembaga Kemasyarakatan	850.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	DANA BAGI HASIL (DBH)		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga Kelurahan Sungai Seluang	900.000.000,000	KELURAHAN SUNGAI SELUANG
						II.	 						<u> </u>		
371 7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 Persen	25.000.000,00					-		KELURAHAN SUNGAI SELUANG

7	01 05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan		1 Kegiatan	25.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Lembaga dan - Masyarakat		KELURAHAN SUNGAI SELUANG
				Penugasan Kepala Daerah						profesional dan akuntabel untuk mendukung	Kecamatan Samboja		
										transformasi pelayanan publik			
										1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	01 05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku	Jumlah Orang yang Mengikuti		30 Orang	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		Lembaga dan	30.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI
				dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama,			Samboja, Sungai Seluang		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Masyarakat Kecamatan Samboja		SELUANG
				Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan					untuk mendukung transformasi pelayanan			
				Lokal, Regional, dan Nasional	Lokal, Regional, dan Nasional					publik			
										Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
				Kelurahan Wonotirto	<u> </u>			1.189.959.500,00		Publik			KELURAHAN WONOTIRTO
7	01			UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN				1.189.959.500,00 1.189.959.500,00					KELURAHAN WONOTIRTO KELURAHAN WONOTIRTO
	01 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -		77 Nilai	74.959.500,00			-		KELURAHAN WONOTIRTO
				PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
7	01 01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum - Perangkat Daerah yang tersedia		4 Layanan	54.582.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	ASN Kelurahan - WonotirtoKecamatan	166.500.000,00	KELURAHAN WONOTIRTO
										profesional dan akuntabel	Samboja		
										untuk mendukung transformasi pelayanan			
										publik 1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	01 01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan		1 Paket	12.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	ASN Kelurahan WonotirtoKecamatan	13.000.000,00	KELURAHAN WONOTIRTO
				Listrik/Penerangan Bangunan	Kantor yang Disediakan					profesional dan akuntabel	Samboja		
				Kantor						untuk mendukung transformasi pelayanan			
										publik 1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	01 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	9.582.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	ASN Kelurahan WonotirtoKecamatan	40.000.000,00	KELURAHAN WONOTIRTO
					yang Discalakan			Samboja, Wonotito		profesional dan akuntabel	Samboja		
										untuk mendukung transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	01 01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	3.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	ASN Kelurahan WonotirtoKecamatan	3.500.000,00	KELURAHAN WONOTIRTO
				i ciigganudan	i engganasan yang biseulakan			Samboja, Wollourto		profesional dan akuntabel	Samboja		
										untuk mendukung transformasi pelayanan			
		1								publik			
		1								Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
 	L	1	1	L		1 1		<u> </u>		Publik		L	

	7 0	01 01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	 	28 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	ASN Kelurahan	110,000,000,00	KELURAHAN WONOTIRTO
	<i>'</i> '	01 01	2.00	0005	dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	i l	20 Euporum	Samboja, Wonotirto	Britist British Control	pemerintahan daerah yang	WonotirtoKecamatan	110.000.000,00	KEEGIUUIII III WOO TII TO
					dan konsultasi SKFD	SKPD	i l		Samboja, Wonotii to		profesional dan akuntabel			
						SKPD	i					Samboja		
							i				untuk mendukung			
							i				transformasi pelayanan			
							i				publik			
							i				1. Penataan dan			
							i l				Pengembangan Tata Kelola			
							i				Pemerintahan dan Pelayanan			
							i				Publik			
											1 doing			
7	7 0	01 01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		i-	12 bulan	500.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	ASN Kelurahan	2.700.000,00	KELURAHAN WONOTIRTO
					Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	i				pemerintahan daerah yang	Wonotirto		
						Daerah yang disediakan	i l				profesional dan akuntabel			
						, ,	i				untuk mendukung			
							i				transformasi pelayanan			
							i				publik			
							i				P			
							i				1. Penataan dan			
							i				Pengembangan Tata Kelola			
							i				Pemerintahan dan Pelayanan			
							i				Publik			
	7 n	01 01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	,	12 Laporan	500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DRH)	- 7. Peningkatan tata kelola	ASN Kelurahan	2.700.000.00	KELURAHAN WONOTIRTO
'	. I .		2.00	0001	,	Surat Menyurat	.	Luporum	Samboja, Wonotirto		pemerintahan daerah yang	Wonotirto	2.700.000,00	
				1		our at ivielly ut at	.	i	Samboja, Wonotirto			vvoriourto		
				1		l l	.	i			profesional dan akuntabel			
				1		l l	.	i			untuk mendukung			
				1		l l	.	i			transformasi pelayanan			
		- 1	1	1	I	l l	, I	I	1		publik			
		- 1	1	1	I	l l	, I	I	1		1. Penataan dan			
				1		l l	.	i			Pengembangan Tata Kelola			
							i				Pemerintahan dan Pelayanan			
							i				Pemerintanan dan Pelayanan Publik			
7	7 0	01 01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah		i ⁻	9 Unit	19.877.500,00		- 7. Peningkatan tata kelola	ASN Kelurahan	26.000.000,00	KELURAHAN WONOTIRTO
					Penunjang Urusan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan	i				pemerintahan daerah yang	Wonotirto		
					Daerah	Daerah yang dipelihara	i				profesional dan akuntabel			
						' ' '	i				untuk mendukung			
							i				transformasi pelayanan			
							i				nuhlik			
							i				publik			
							i				1. Penataan dan			
							i				Pengembangan Tata Kelola			
							i				Pemerintahan dan Pelayanan			
							i				Publik			
	7 0	01 01	2.00	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin		8 Unit	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	ASN Kelurahan	11 000 000 00	KELURAHAN WONOTIRTO
'	′ 0	01 01	2.03	0000			i	o orac	Samboja, Wonotirto	DAINA DAGITIASIE (DDIT)	pemerintahan daerah yang	Wonotirto	11.000.000,00	KEEGIKAITAN WONOTIKTO
					Lainnya	Lainnya yang Dipelihara	i		Samboja, Wonotirto		pernerintanan daeran yang	Worldurto		
							i				profesional dan akuntabel			
							i l				untuk mendukung			
							i				transformasi pelayanan			
							i l				publik			
							i				1. Penataan dan			
				1		l l	.	1			Pengembangan Tata Kelola			
1 1		- 1		1	1	ı l	. 1 1	I			Pemerintahan dan Pelayanan			
				1		l l	.	1						
oxdot	_		1	1	ļ .						Publik			
7	7 0	01 01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan	.	1 Unit	9.877.500,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	ASN Kelurahan	15.000.000,00	KELURAHAN WONOTIRTO
1 1	1	01			Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang	ı	I	Samboja, Wonotirto		pemerintahan daerah yang	Wonotirto		
1 1		01 01			Kantor dan banganan caminya			•				1	I I	
		01			Kantor dan banganan Laminya		·					l l		
		01 01			Kantoi dan banganan zannya	Dipelihara/Direhabilitasi					profesional dan akuntabel			
		01 01			Kantoi dan banganan cannya						profesional dan akuntabel untuk mendukung			
		01 01			Kentor dan banganan tahinya						profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan			
					Kantol dan banganan cannya						profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik			
					Nanor dan bangunan Lamnya						profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			
					Nation dan banganan Lamiya						profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
					Name of the second seco						profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
					Name of the state						profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
373	7 0					Dipelihara/Direhabilitasi		72.7 Persen	1,090,000,000,00		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		1,500,000,000,00	KELURAHAN WONOTIRTO
373	7 0				PROGRAM PEMBERDAYAAN	Dipelihara/Direhabilitasi Persentase Lembaga	-	72,7 Persen	1.090.000,000		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		1.500.000.000,00	KELURAHAN WONOTIRTO
373	7 0				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Dipelihara/Direhabilitasi Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	-	72,7 Persen	1.090.000.000,00		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		- 1.500.000.000,00	KELURAHAN WONOTIRTO
		01 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEURAHAN	Dipelihara/Direhabilitasi Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	-		·		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Dipelihara/Direhabilitasi Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa	-	72,7 Persen 2 Kegiatan	1.090.000.000,00		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	Lembaga dan		KELURAHAN WONOTIRTO KELURAHAN WONOTIRTO
		01 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEURAHAN	Dipelihara/Direhabilitasi Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	-		·		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Masyarakat Kelurahan		
		01 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEURAHAN	Dipelihara/Direhabilitasi Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa	-		·		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			
		01 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEURAHAN	Dipelihara/Direhabilitasi Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa	-		·		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Masyarakat Kelurahan		
		01 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEURAHAN	Dipelihara/Direhabilitasi Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa	-		·		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	Masyarakat Kelurahan		
		01 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEURAHAN	Dipelihara/Direhabilitasi Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa	-		·		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	Masyarakat Kelurahan		
		01 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEURAHAN	Dipelihara/Direhabilitasi Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa	-		·		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kelurahan		
		01 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEURAHAN	Dipelihara/Direhabilitasi Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa	-		·		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Masyarakat Kelurahan		
		01 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEURAHAN	Dipelihara/Direhabilitasi Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa	-		·		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Masyarakat Kelurahan		
		01 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEURAHAN	Dipelihara/Direhabilitasi Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa	-		·		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Masyarakat Kelurahan		

7	7 0	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana		4 Unit	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	Lembaga dan	750.000.000,00	KELURAHAN WONOTIRTO
					Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun			Samboja, Wonotirto		pemerintahan daerah yang	Masyarakat Kelurahan		
											profesional dan akuntabel	Wonotirto		
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Puhlik			
H -	7 0	1 03	2.02	0002	Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Pokmas dan Ormas yang		3 Pokmas /	240.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BACI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	Lembaga dan	300,000,000,00	KELURAHAN WONOTIRTO
'	′ ′	1 03	2.02	0003	Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan		Ormas	Samboja, Wonotirto	DANA BAGITIASIL (DBII)	pemerintahan daerah yang	Masyarakat Kelurahan	300.000.000,00	KELOKAHAN WONOTIKTO
					Returnin	Masyarakat di Kelurahan		Offilias	Jamboja, wondarto		profesional dan akuntabel	Wonotirto		
						Wasyarakat ar Kelarahan					untuk mendukung	Worldanto		
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
7	7 0	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga	Jumlah Koordinasi yang -		1 kali	400.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	Lembaga Kelurahan -	450.000.000,00	KELURAHAN WONOTIRTO
					Kemasyarakatan Tingkat	dilaksanakan Desa / Kelurahan					pemerintahan daerah yang	Wonotirto		
					Kecamatan						profesional dan akuntabel			
			1				1				untuk mendukung transformasi pelayanan			
											publik			
			1				1				1. Penataan dan			
			1				1				Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
7	7 0	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga	400.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	Lembaga Kelurahan	450.000.000,00	KELURAHAN WONOTIRTO
					Kemasyarakatan	yang Diselenggarakan		Kemasyarakatan	Samboja, Wonotirto		pemerintahan daerah yang	Wonotirto		
											profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
374 7	7 0	1 05			PROGRAM PENYELENGGARAAN	CAKUPAN PENYELENGGARAAN -		100 Persen	25.000.000,00			-	30.000.000.00	KELURAHAN WONOTIRTO
					URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			·					
7	7 0	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang -		1 Kegiatan	25.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	Lembaga dan -	30.000.000,00	KELURAHAN WONOTIRTO
					Pemerintahan Umum Sesuai	dilaksanakan Kecamatan					pemerintahan daerah yang	Masyarakat Kelurahan		
					Penugasan Kepala Daerah						profesional dan akuntabel	Wonotirto		
											untuk mendukung transformasi pelayanan			
											nublik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
7	7 0	1 05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku	Jumlah Orang yang Mengikuti		30 Orang	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	Lembaga dan	30.000.000,00	KELURAHAN WONOTIRTO
	`		1		dan Intra Suku, Umat Beragama,	Pembinaan Kerukunan Antar Suku		<u> </u>	Samboja, Wonotirto	. ,,	pemerintahan daerah yang	Masyarakat Kelurahan		
			1		Ras, dan Golongan Lainnya Guna	dan Intra Suku , Umat Beragama,					profesional dan akuntabel	Wonotirto		
			1		Mewujudkan Stabilitas Keamanan	Ras, dan Golongan Lainnya Guna					untuk mendukung			
1			1		Lokal, Regional, dan Nasional	Mewujudkan Stabilitas Keamanan					transformasi pelayanan			
				1 1		Lokal, Regional, dan Nasional	1				publik			
						1	I I				1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola	1		1
												l I		
											Pemerintahan dan Pelayanan			
					Kelurahan Tanjung Harapan				1.338.903.000,00				1.817.400.000,00	KELURAHAN TANJUNG
7	7				Kelurahan Tanjung Harapan UNSUR KEWILAYAHAN				1.338.903.000,00 1.338.903.000,00		Pemerintahan dan Pelayanan			HARAPAN KELURAHAN TANJUNG
	7 7 0	11									Pemerintahan dan Pelayanan		1.817.400.000,00	HARAPAN KELURAHAN TANJUNG HARAPAN KELURAHAN TANJUNG
7	7 0				UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		77 Nilai	1.338.903.000,00		Pemerintahan dan Pelayanan		1.817.400.000,00 1.817.400.000,00	HARAPAN KELURAHAN TANJUNG HARAPAN KELURAHAN TANJUNG HARAPAN
	7 0				UNSUR KEWILAYAHAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -		77 Nilai	1.338.903.000,00 1.338.903.000,00		Pemerintahan dan Pelayanan		1.817.400.000,00 1.817.400.000,00	HARAPAN KELURAHAN TANJUNG HARAPAN KELURAHAN TANJUNG



7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum - Perangkat Daerah yang tersedia	4 Layanan	53.535.500,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	ASN Kelurahan Tanjung Harapan		KELURAHAN TANJUNG HARAPAN
										Publik			
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumiah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Tanjung Harapan		KELURAHAN TANJUNG HARAPAN
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.338.500,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Tanjung Harapan		KELURAHAN TANJUNG HARAPAN
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.197.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Tanjung Harapan		KELURAHAN TANJUNG HARAPAN
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Tanjung Harapan		KELURAHAN TANJUNG HARAPAN
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa - Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	7.490.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan - Tanjung Harapan	•	KELURAHAN TANJUNG HARAPAN
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Tanjung Harapan		KELURAHAN TANJUNG HARAPAN

7	01	01 2.00	8 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		6 Laporan	6.990.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	ASN Kelurahan Tanjung Harapan	7.200.000,00	KELURAHAN TANJUNG HARAPAN
										transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	01	01 2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		9 Unit	12.877.500,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan - Tanjung Harapan	18.500.000,00	KELURAHAN TANJUNG HARAPAN
7		01 2.09		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		4 Unit	3.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Tanjung Harapan		KELURAHAN TANJUNG HARAPAN
7	01	01 2.09	9 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	9.877.500,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Tanjung Harapan	15.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG HARAPAN
376 7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	-	72,7 Persen	1.240.000.000,00			-	1.650.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG HARAPAN
		03 2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	/ Kelurahan		2 Kegiatan	690.000.000,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dalan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Tanjung Harapan		KELURAHAN TANJUNG HARAPAN
7	01	03 2.0	2 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		7 Unit	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Tanjung Harapan		KELURAHAN TANJUNG HARAPAN
7	01	03 2.0	2 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 Pokmas / Ormas	240.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Tanjung Harapan	300.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG HARAPAN



	7	01 03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	1 kali	550.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga Kelurahan Tanjung Harapan	600.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG HARAPAN
		01 03		0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	11 Lembaga Kemasyarakatan	550.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga Kelurahan Tanjung Harapan	600,000,000,00	KELURAHAN TANJUNG HARAPAN
377	7	01 05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 Persen	25.000.000,00			-		KELURAHAN TANJUNG HARAPAN
		01 05			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	1 Kegiatan	25.000.000,00		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- Masyarakat Kelurahan Tanjung Harapan		KELURAHAN TANJUNG HARAPAN
	7	01 05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30 Orang	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Tanjung Harapan	30.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG HARAPAN
					Kelurahan Kuala Samboja		•	1.788.147.500,00	•			•	KELURAHAN KUALA SAMBOJA
	7	01			UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN			1.788.147.500,00 1.788.147.500,00					KELURAHAN KUALA SAMBOJA KELURAHAN KUALA
378					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	77 Nilai	73.147.500,00			-	154.900.000,00	SAMBOJA KELURAHAN KUALA SAMBOJA
	7	01 01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	4 Layanan	47.240.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Kuala - Samboja		KELURAHAN KUALA SAMBOJA
	7	01 01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Kuala Samboja	11.000.000,00	KELURAHAN KUALA SAMBOJA



7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	4.240.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengambangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	ASN Kelurahan Kuala Samboja	30.000.000,00	KELURAHAN KUALA SAMBOJA
										Pemerintanan dan Pelayanan Publik			
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1 Paket	3.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BACI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	ASN Kelurahan Kuala	3 200 000 00	KELURAHAN KUALA
,	01	01	2.00	0003	Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan	1 ranet	Samboja, Samboja Kuala	DAMA BAGI INGIL (DOIT)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Samboja		SAMBOJA
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	28 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	ASN Kelurahan Kuala	77.000.000,00	KELURAHAN KUALA
					dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Samboja, Samboja Kuala		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Samboja		SAMBOJA
			2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	8.970.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Kuala - Samboja		KELURAHAN KUALA SAMBOJA
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Kuala Samboja		KELURAHAN KUALA SAMBOJA
			2.08		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8.470.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Kuala Samboja		KELURAHAN KUALA SAMBOJA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	5 Unit	16.937.500,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Kuala - Samboja		KELURAHAN KUALA SAMBOJA

Section Part	7	0:	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin		6 Unit	7.060.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	ASN Kelurahan Kuala	7.500.000,00	KELURAHAN KUALA
Part Part											, ,				SAMBOJA
Value Valu						1	, , , , ,						,		
Value Valu															
Value Valu															
												1. Penataan dan			
Value Valu															
Value Valu															
Part															
Part Part	7	0.	1 01	2.00	0000	Romoliharaan/Rohahilitasi Godung	Jumlah Godung Kantor dan		1 Unit	0.977 E00.00 Kah Kutai Kartanogara	DANA PACI HASII (DBH)		ACM Volumban Vuala	1E 000 000 00	NELLIDA HANI NITALA
Part	′	0.	,1 01	2.05	0003				1 Offic		DANA BAGITIASIL (DBII)			13.000.000,00	
Part						Kantor dan Bangunan Lainnya						pernerimanan daeran yang	Samboja		SAIVIBUJA
Part							Dipelinara/Direnabilitasi			Kudid					
19															
Part															
Value Valu												p			
Processing Confidence of the Processing Con															
Part Part															
20 1 20 1 20 1 20 1 20 20															
Part Part		_			-							Publik			
Part Control Part	379 7	01	1 03					-	72,7 Persen	1.690.000.000,00			-	2.100.000.000,00	
Part Column Part Colum						MASYARAKAT DESA DAN	Pemberdayaan Masyarakat								SAMBOJA
A Value	- -	+-	1 00	2.00	1			 	2 Kanista	500 000 000 00		The state of the s	Lambaga dari	4 070 000	KELLID ALLAN KUALA
which and an abundant for designation and an abundant for designation and an abundant for designation and an abundant for designation and an abundant for designation and an abundant for designation and an abundant for designation and an abundant for designation and an abundant for designation and an abundant for designation and an abundant for designation and an abundant for designation and	7	01	1 03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		⁻	∠ kegiatan	690.000.000,00				1.050.000.000,00	
Part Part							/ Kelurahan								SAMBOJA
Part Part													Kuaia Samboja		
Part Part		1				1									
Part Part															
Programmages Tax solidar frameworks and Programs of Anti-Sarah data Private and Anti-S												p			
Promoticate de Proposition de la Proposition de la Proposition de															
Part Column Part															
Part Part												Pemerintahan dan Pelayanan			
Sambley, Samble, Sam															
For the control of th	7	0:	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana		5 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)		Lembaga dan	750.000.000,00	
untul mendulung transformasi piclopysam based and provided and provided of solution and provided						Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun			Samboja, Samboja		pemerintahan daerah yang	Masyarakat Kelurahan		SAMBOJA
The control of the co										Kuala		profesional dan akuntabel	Kuala Samboja		
Part Part															
Percentage Tass Acids Perc												transformasi pelayanan			
President of the comm															
Permittendant dur Pelyayara Pulak Majarakat di Aprila Kerahan Majarakat di Aprila Kera												1. Penataan dan			
Permittendant dur Pelyayara Pulak Majarakat di Aprila Kerahan Majarakat di Aprila Kera												Pengembangan Tata Kelola			
7 Ol 03 200 000 Permierdenyam Masyarakat di Kuhahan Masyarakat di Kuhahan Pemberdayam Masyarakat di Kuhahan Pemberdayam Masyarakat di Kuhahan Pemberdayam Masyarakat di Kolurahan Masyarakat di Kolura															
Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kefurahan Masyarakat di Kefurahan Masyarakat di Kefurahan Masyarakat di Kefurahan Masyarakat di Kefurahan Masyarakat di Kefurahan Masyarakat di Kefurahan Masyarakat di Kefurahan Pemberdayaan Lembaga Kemanyarakatan Tingkat Kemanyarakatan Tingkat Kemanyarakatan Tingkat Kemanyarakatan Tingkat Kemanyarakatan Tingkat Masamakan Pesay / Kefurahan Masyarakatan Pesay / Kefurahan Masyarakatan Masamakan Pesay / Kefurahan Masyarakatan Masamakan Pesay / Kefurahan Masamakan P												Publik			
Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kefurahan Masyarakat di Kefurahan Masyarakat di Kefurahan Masyarakat di Kefurahan Masyarakat di Kefurahan Masyarakat di Kefurahan Masyarakat di Kefurahan Masyarakat di Kefurahan Pemberdayaan Lembaga Kemanyarakatan Tingkat Kemanyarakatan Tingkat Kemanyarakatan Tingkat Kemanyarakatan Tingkat Kemanyarakatan Tingkat Masamakan Pesay / Kefurahan Masyarakatan Pesay / Kefurahan Masyarakatan Masamakan Pesay / Kefurahan Masyarakatan Masamakan Pesay / Kefurahan Masamakan P	7	0:	1 03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Pokmas dan Ormas yang		3 Pokmas /	240.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	Lembaga dan	300.000.000,00	KELURAHAN KUALA
Masyarakat di Kelurahan Masyarakat mi Kembaga Kelurahan Masyarakat mi Kemasyarakat mi Masyarakat											,	pemerintahan daerah yang		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
untuk mendulung transformasi pelajanan putik 1. Perastaan dan Pengerihangan Tata Kelola Pengerihangan Tata Kelola Pengerihangan Tata Kelola Pengerihangan Tata Kelola Pengerihangan Tata Kelola Pengerihangan Tata kelola Pengerihangan Tata kelola Pengerihangan Tata kelola Pengerihangan Tata kelola Pengerihangan Tata Kelola Pengerihangan Tata Kelola Pengerihangan Tata Kelola Pengerihangan Tata Kelola Pengerihangan Tata kelola Pengerih												profesional dan akuntabel			
To the control of the							· 1						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Pemberdayaan Lembaga Fala Kelola Pemerintahna dan Pelayanan Pulak Kemasyarakatan Tingkat Kemasyarakatan Tingkat Kemasyarakatan Pelayanan Pulak Pemerintahna dan Pelayanan Pelayanan Pemerintahna dan Pelayanan Pelayanan Pemerintahna dan Pelayanan Pe		1	1			1									
1. Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata															
Pengembangan Tat Kelola Pengem		1				1									
Pemberdayaan Lembaga Kelurahan dan Pelayanan Pulaik 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 8 1 kali 1.000.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Kelurahan Pemberdayaan Pulaik 9 20 Lembaga Pemberdayaan Lembaga Kecamatan 9 20 Lembaga Pemberdayaan Lembaga Kecamatan 1 kali 1.000.000.000,00 Pempelenggaraan Lembaga Kecamatan 9 20 Lembaga Pemberdayaan Lembaga Kecamatan 1 kali 1.000.000.000,00 Pempelenggaraan Lembaga Kecamatan Tingkat 1 Pemberdayaan Lembaga Kelurahan Pempermbaga Alumlah Lembaga Kemasyarakatan Pulaik 1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Pulaik 1 Pemberdayaan Lembaga Kelurahan Pempermbaga Alumlah Lembaga Kemasyarakatan Pulaik 1 Pempelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Pulaik 1 Pempelenggaraan Lembaga Kelurahan Pelayanan Pulaik 1 Pempelenggaraan Lembaga Kelurahan Pulaik 2 Dembaga Kemasyarakatan 1 050.000.000,00 KELURAHAN KUALA Samboja pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung taraformasi pelayanan pulaik 1 Pempelenggaraan Lembaga Kelurahan Pelayanan pulaik 1 Pempelenggaraan Lembaga Kelurahan Pelayanan pulaik 1 Pempelenggaraan Lembaga Kelurahan Pelayanan pulaik 1 Pempelenggaraan Lembaga Kelurahan Pelayanan pulaik 1 Pempelenggaraan Lembaga Kelurahan Pelayanan pulaik 1 Pempelenggaraan Lembaga Kelurahan Pelayanan pulaik 1 Pempelenggaraan Lembaga Kelurahan Pelayanan pulaik 1 Pempelenggaraan Lembaga Kelurahan Pelayanan pulaik 1 Pempelenggaraan Lembaga Kelurahan Pelayanan pulaik 1 Pempelenggaraan Lembaga Kelurahan Pelayanan pulaik 1 Pempelenggaraan Lembaga Kelurahan Pelayanan pulaik 1 Pempelenggaraan Lembaga Kelurahan Pelayanan pulaik 1 Pempelenggaraan Lembaga Kelurahan Pelayanan pulaik 1 Pempelenggaraan Lembaga Kelurahan Pelayanan pulaik 1 Pempelenggaraan Lembaga Kelurahan Pelayanan pulaik 1 Pempelenggaraan Lembaga Kelurahan Pelayanan pulaik 1 Pempelenggaraan Lembaga Kelurahan Pelayanan pulaik 1 Pempelenggaraan Lembaga Kelurahan Pelayanan pulaik 1 Pempelenggaraan Lembaga Ke															
Pelibik 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tingkat		1				1									
7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyaraktan Tingkat Kecamutan															
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Makuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penentahan dan Pelayanan Publik 2. Penentahan dan Pelayanan Publik 2. Penentahan dan Pelayanan Publik 2. Penentahan dan Pelayanan Publik 3. Penentahan dan Pelayanan Publik 4. Penentahan dan Pelayanan Publik 4. Penentahan dan Pelayanan Publik 4. Penentahan dan Pelayanan Publik 4. Penentahan dan Pelayanan Publik 4. Penentahan dan Pelayanan Publik 4. Penentahan dan Pelayanan Publik 4. Penentahan dan Pelayanan Publik 4. Penentahan dan Pelayanan Publik 4. Penentahan dan Pelayanan Publik 4. Penentahan dan Pelayanan Publik 4. Penentahan dan Pelayanan Publik 4. Penentahan dan Pelayanan Publik 4. Penentahan dan Pelayanan Publik 4. Penentahan dan Pen	7	n1	1 03	2.03	1	Pemberdayaan Lembaga	Jumlah Koordinasi yang	_	1 kali	1.000.000.000.00	1	L L	Lembaga Kelurahan -	1 050 000 000 00	ΚΕΙ ΙΙΚΑΗΑΝ ΚΙΙΔΙ Δ
Kecamatan	'	"	_ "	2.03						2.000.000,00				1.050.000.000,00	
untu mendukung transformasi pelayanan publik 1. Pengentaan dan Pengentishan dan Pelayanan Publik 1. Pengentaan dan Pengentishan dan Pelayanan Publik 1. Pengentishan dan Pelayanan Publik 1. Pengentishan dan Pelayanan Publik 1. Pengentishan dan Pelayanan Publik 1. Pengentishan dan Pelayanan Publik 1. Pengentishan dan Pelayanan Publik 1. Pengentishan dan Pelayanan Publik 1. Pengentishan dan Pelayanan Publik 1. Pengentishan dan Pelayanan Publik 1. Pengentishan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan darah yang Diselenggarakan 1.000.000.000, Mab. Kutai Kartanegara, DANA BAGI HASIL (DBH) - 7. Pengipatan tata kelola penerinishan dan Pengentishan dan Peng		1													
transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengerintahan dan Pelayanan Publik 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Memasyarakatan yang Diselenggarakan 8 20 Lembaga Kemasyarakatan Memasyarakatan yang Diselenggarakan 8 20 Lembaga Kemasyarakatan Memasyarakatan Memasyarakatan yang Diselenggarakan 8 20 Lembaga Kemasyarakatan Memasyaraka						Recamatan									
publik 1. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7 O1 O3 2.03 O001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Vang Diselenggarakan DANA BAGI HASIL (DBH) Samboja AMBOJIA AMBOJIA DANA BAGI HASIL (DBH) Samboja Vang Diselenggaraan Lembaga Vang Diselenggarakan DANA BAGI HASIL (DBH) Samboja Vang Diselenggaraan Lembaga Vang Diselenggarakan DANA BAGI HASIL (DBH) Samboja Vang Diselenggaraan Lembaga Vang Diselenggarakan DANA BAGI HASIL (DBH) Samboja Vang Diselenggaraan Lembaga Vang Diselenggaraan Lembaga Vang Diselenggarakan Nala Samboja T. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Vang Diselenggarakan Nala Samboja T. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Vang Diselenggarakan Nala Samboja Nala		1				1									
1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Penerintahan dan Pelayanan Publik 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 8 20 Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan 9 20 Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan 9 20 Lembaga Kemasyarakatan Yang Diselenggarakan 1.000.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, DANA BAGI HASIL (DBH) - 7. Peningkatan tata kelola penerintahan dara kelurahan penerintahan dan kantabal penerintahan dan kantabal penerintahan dan kelurahan kuala Samboja 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publi															
Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Memasyarakatan yang Diselenggarakan 8 20 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 8 20 Lembaga Kemasyarakatan 9 20 Lembaga Kemasyarakatan 1.000.000.000,00 Kab. Kutal Kartanegara, DaNA BAGI HASIL (DBH) - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah pangan fransforiansi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan daerah yang biransforiansi pelayanan pengentahan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tat		1	1			1									
Pemeritath and an Pelayanan Pe		1	1			1									
Publik 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Memasyarakatan yang Diselenggarakan 9 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Memasyarakatan yang Diselenggarakan 9 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Memasyarakatan yang Diselenggarakan 9 01 03 2.04 Masayarakatan 9 02 1 2 0 1 2															
7 O1 O3 2.03 O01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Umlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Penyelenggarakan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Penyelenggarakan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang DANA BAGI HASIL (DBH) - 7, Peningkatan tata kelola pemerintahan daera hayang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1, Penataan dan Pengementahan dan Penyelangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan dan Pelayanan dan Pelayanan															
Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kemasyarakatan Samboja kuala Samboja ponenrintahan daerah yang profesinahan daerah ya		-	1 02	2.02	0001	D	Lumbert and a set	 	20.1	1,000,000,000,00	DANA BACILIACII (BC::)		Laurha en Kal	4.050.000.000.00	WELLIDALIAN CO
Kuala profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengemintahan dan Pelayanan	/	0	11 03	2.03	0001						DAINA BAGI HASIL (DBH)			1.050.000.000,00	
untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengeminangan Tata Kelola Pengeminangan dan Pelayanan		1				kemasyarakatan	yang Diselenggarakan		kemasyarakatan				kuala Samboja		SAMBUJA
transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		1				1				Kuala					
publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan															
1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintagan dan Pelayanan															
Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		1	1			1									
Pemerintahan dan Pelayanan															
		1				1									
	1					1									
				1	1	1	1	1 1	1		1	Publik	i I		1



380	7 (01 05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 Persen	25.000.000,00				- 30.000.000,00	KELURAHAN KUALA SAMBOJA
	7	01 05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	1 Kegiatan	25.000.000,00		7. Peningkatan tata kelo pemerintahan daerah yai profesional dan akuntab untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kel Pemerintahan dan Pelays Publik	Masyarakat Kelurahan Kuala Samboja	- 30.000.000,00	KELURAHAN KUALA SAMBOJA
	7	01 05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30 Orang	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yan profesional dan akuntabuntuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kele Pemerintahan dan Pelaya Publik	Masyarakat Kelurahan Kuala Samboja		KELURAHAN KUALA SAMBOJA
					Kelurahan Sanipah			1.692.697.500,00					KELURAHAN SANIPAH
	7	01	-	-	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN			1.692.697.500,00 1.692.697.500.00					KELURAHAN SANIPAH KELURAHAN SANIPAH
		01 01	+	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	77 Nilai	77.697.500,00					KELURAHAN SANIPAH
					PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
		01 01			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	4 Layanan	54.560.000,00		7. Peningkatan tata kelo pemerintahan daerah yai profesional dan akuntab untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kel Pemerintahan dan Pelaya Publik	g Sanipah I Ia Ia		KELURAHAN SANIPAH
	7	01 01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelol pemerintahan daerah yan profesional dan akuntabu untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kele Pemerintahan dan Pelaya Publik	a	13.500.000,00	KELURAHAN SANIPAH
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.280.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah		- 7. Peningkatan tata kelol pemerintahan darah yan profesional dan akuntabi untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kele Pemerintahan dan Pelaya Publik	a an		KELURAHAN SANIPAH
	7	01 01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.280.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelol pemerintahan darah yan profesional dan akuntabi untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kele Pemerintahan dan Pelaya Publik	a	4.500.000,00	KELURAHAN SANIPAH

7	01	01	2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		28 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata ke pemerintahan daerah y profesional dan akunta untuk mendukung transformasi pelayana publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata K Pemerintahan dan Pela	nng bel	75.000.000,00 KELURAHAN SANIPAH
											Publik		
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 bulan	6.560.000,00			T. Peningkatan tata ke pemerintahan daerahy profesional dan akuntuntuk mendukung transformasi pelayana publik Pengembangan Tata ke Pemerintahan dan Pela Publik Publik Publik	ang Sanipah bel n	9.500.000,00 KELURAHAN SANIPAH
7	01	01	2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata ke pemerintahan daerah y profesional dan akunta untuk mendukung transformasi pelayana publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata K Pemerintahan dan Pela Publik	nng bel	2.500.000,00 KELURAHAN SANIPAH
7	01	01	2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		6 Laporan	6.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata ke pemerintahan daerah y profesional dan akunta untuk mendukung transformasi pelayana publik T. Penataan dan Pengembangan Tata K Pemerintahan dan Pela Publik Publik	ng bel	7.000,000,00 KELURAHAN SANIPAH
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	-	7 Unit	16.577.500,00			T. Peningkatan tata ke pemerintahan daerah profesional dan akunt untuk mendukung transformasi pelayana publik Pengembangan Tata K Pemerintahan dan Pelabik Publik	ang SanipahKecamatan Samboja	22.000.000,00 KELURAHAN SANIPAH
7	01	01	2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		6 Unit	6.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata ke pemerintahan daerah y profesional dan akunta untuk mendukung transformasi pelayana publik T. Penataan dan Pengembangan Tata K Pemerintahan dan Pela Publik Publik	sanipahKecamatan Samboja	7.000.000,00 KELURAHAN SANIPAH
7	01	01	2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	9.877.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata ke pemerintahan daerah y profesional dan akunta untuk mendukung transformasi pelayana publik T. Penataan dan Pengembangan Tata K Pemerintahan dan Pela Publik Publik	sanipahKecamatan Samboja	15.000.000,00 KELURAHAN SANIPAH
382 7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	-	72,7 Persen	1.590.000.000,00				-	2.000.000.000,00 KELURAHAN SANIPAH



	7 0	1 03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	2 Kegiatan	690.000.000		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Sanipah	- 1.050.000.000,00	KELURAHAN SANIPAH
;	7 0	1 03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Sanipah	750.000.000,00	KELURAHAN SANIPAH
;	7 0	1 03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	240.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dalan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Sanipah	300.000.000,00	KELURAHAN SANIPAH
	7 0	1 03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	1 kali	00,000.000		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga Kelurahan Sanipah	- 950.000.000,00	KELURAHAN SANIPAH
7	7 0	1 03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	18 Lembaga Kemasyarakatan	900.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga Kelurahan Sanipah	950.000.000,00	KELURAHAN SANIPAH
383	7 0	1 05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN - URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 Persen	25.000.000,00				- 30.000.000,00	KELURAHAN SANIPAH
7	7 0	1 05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	1 Kegiatan	25.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Sanipah	- 30,000,000,00	KELURAHAN SANIPAH
;	7 0	1 05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30 Orang	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Sanipah	30.000.000,00	KELURAHAN SANIPAH

					Kelurahan Muara Sembilang			1.521.261.000,00				2.015.900.000,00	KELURAHAN MUARA SEMBILANG
	7				UNSUR KEWILAYAHAN			1.521.261.000,00				2.015.900.000,00	
	7	01			KECAMATAN			1.521.261.000,00				2.015.900.000,00	KELURAHAN MUARA SEMBILANG
384	7	01 01	ı		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	77 Nilai	106.261.000,00			-	185.900.000,00	KELURAHAN MUARA SEMBILANG
	7	01 01	2.06		KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum - Perangkat Daerah yang tersedia	4 Layanan	67.683.500,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	ASN Kelurahan Muara - Sembilang	138.000.000,00	KELURAHAN MUARA SEMBILANG
	7	01 01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.817.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Muara Sembilang	15.000.000,00	KELURAHAN MUARA SEMBILANG
	7	01 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	17.906.500,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Muara Sembilang	60.000.000,00	KELURAHAN MUARA SEMBILANG
	7	01 01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.960.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Muara Sembilang	5.000.000,00	KELURAHAN MUARA SEMBILANG
	7	01 01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Muara Sembilang	58.000.000,00	KELURAHAN MUARA SEMBILANG
	7	01 01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	12.900.000,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengambangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Publik	ASN Kelurahan Muara - Sembilang	16.900.000,00	KELURAHAN MUARA SEMBILANG

	7 (01 01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	ASN Kelurahan Muara Sembilang	4.500,000,00	KELURAHAN MUARA SEMBILANG
	7 (01 01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		10 Laporan	12.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN Kelurahan Muara Sembilang	12.400.000,00	KELURAHAN MUARA SEMBILANG
	7 (01 01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	-	11 Unit	25.677.500,00		Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	ASN Kelurahan Muara Sembilang	- 31.000.000,00	KELURAHAN MUARA SEMBILANG
	7 (01 01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			10 Unit	15.800.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	ASN Kelurahan Muara	16.000.000,00	KELURAHAN MUARA
					Lainnya	Lainnya yang Dipelihara			Samboja, Muara Sembilang		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sembilang		SEMBILANG
	7 (01 01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	9.877.500,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Muara Sembilang	15.000.000,00	KELURAHAN MUARA SEMBILANG
385	7 (01 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	-	72,7 Persen	1.390.000.000,00		FUJIK		- 1.800.000.000,00	KELURAHAN MUARA SEMBILANG
	7 (01 03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			2 Kegiatan	690.000.000,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Muara Sembilang		KELURAHAN MUARA SEMBILANG
	7 (01 03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		6 Unit	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Muara Sembilang	750.000.000,00	KELURAHAN MUARA SEMBILANG



	7	01 03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 Pokmas / Ormas	240.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Samboja, Muara Sembilang	, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan Muara Sembilang	300.000.000,	00 KELURAHAN MUARA SEMBILANG
												untuk mendukung transformasi pelayanan			
												publik			
												1. Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
	7	01 03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	-	1 kali	700.000.000,00		-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Lembaga Kelurahan Muara Sembilang	750.000.000,	00 KELURAHAN MUARA SEMBILANG
					Kecamatan	,						profesional dan akuntabel			
												untuk mendukung transformasi pelayanan			
												publik			
												Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	7	01 03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga	700.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola	Lembaga Kelurahan	750.000.000,	00 KELURAHAN MUARA
					Kemasyarakatan	yang Diselenggarakan		Kemasyarakatan	Samboja, Muara			pemerintahan daerah yang	Muara Sembilang		SEMBILANG
									Sembilang			profesional dan akuntabel untuk mendukung			
												transformasi pelayanan			
												publik 1. Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
386	7	01 05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	100 Persen	25.000.000,00					30.000.000,	00 KELURAHAN MUARA SEMBILANG
	7	01 05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	-	1 Kegiatan	25.000.000,00		-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan	- 30.000.000,	00 KELURAHAN MUARA SEMBILANG
					Penugasan Kepala Daerah	dilaksanakan kecamatan						profesional dan akuntabel	Muara Sembilang		SEIVIBILAING
												untuk mendukung transformasi pelayanan			
												publik			
												1. Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
	7	01 05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku		30 Orang	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Samboja, Muara	, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Lembaga dan Masyarakat Kelurahan	30.000.000,0	00 KELURAHAN MUARA SEMBILANG
					Ras, dan Golongan Lainnya Guna	dan Intra Suku , Umat Beragama,			Sembilang			profesional dan akuntabel	Muara Sembilang		
					Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan						untuk mendukung transformasi pelayanan			
						Lokal, Regional, dan Nasional						publik			
												Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
			1							1		Pemerintahan dan Pelayanan			
 			1		Kecamatan Sebulu				14.390.770.195,00	1	1	Publik	<u> </u>		00 KECAMATAN SEBULU
	7	01			UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN				14.390.770.195,00 14.390.770.195,00					19.620.500.000, 19.620.500.000,	00 KECAMATAN SEBULU 00 KECAMATAN SEBULU
	7				PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	_	80 Nilai	7.599.668.195,00	+				- 7.075.500.000,	
					PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	7	01 01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen rencana,	-	5 Dokumen	370.000.000,00	1	Memperkuat pembangunan		ASN KECAMATAN	- 140.000.000,	00 KECAMATAN SEBULU
			1		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,		SEBULU		
						i ciangkat Dacian					kesehatan, prestasi olahraga,	untuk mendukung			
											kesetaraan gender, serta penguatan peran	transformasi pelayanan publik			
											penguatan peran perempuan, pemuda	1. Penataan dan			
			1							1	(generasi milenial dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
											generasi 2), dan penyandang disabilitas.	Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
										1		1			
ldot		- 1	1	1	1	l l	L	LL			1	1	I .	<u> </u>	



7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN KECAMATAN SEBULU		0,00	KECAMATAN SEBULU
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN KECAMATAN SEBULU		0,00	KECAMATAN SEBULU
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN KECAMATAN SEBULU		0,00	KECAMATAN SEBULU
7	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		1 Data	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN KECAMATAN SEBULU		140.000.000,00	KECAMATAN SEBULU
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		12 Laporan	5.767.689.438,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	ASN KECAMATAN SEBULU	-	6.410.500.000,00	KECAMATAN SEBULU
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		574 Orang/bulan	5.652.689.438,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi zi), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN KECAMATAN SEBULU		6300.000.000,00	KECAMATAN SEBULU



7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lag	ooran	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN KECAMATAN SEBULU	25.000.000,00	KECAMATAN SEBULU
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 te	aporan	90.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN KECAMATAN SEBULU	85.500.000,00	KECAMATAN SEBULU
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	697 (Unit	83.600.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peram perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	ASN KECAMATAN SEBULU	150.000.000,00	KECAMATAN SEBULU
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dol	kumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN KECAMATAN SEBULU	150.000.000,00	KECAMATAN SEBULU
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Lap	ooran	33.600.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN KECAMATAN SEBULU	0,00	KECAMATAN SEBULU
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38 Pt	ersen	100.000,000		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	ASN KECAMATAN SEBULU	0,00	KECAMATAN SEBULU

7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		6 Orang	100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN KECAMATAN SEBULU		0,00	KECAMATAN SEBULU
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah		92 Persen	309.824.800,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peraman perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	ASN KECAMATAN SEBULU	-	355.000.000,00	KECAMATAN SEBULU
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN KECAMATAN SEBULU		50.000.000,00	KECAMATAN SEBULU
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN KECAMATAN SEBULU		50.000.000,00	KECAMATAN SEBULU
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	130.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN KECAMATAN SEBULU		50.000.000,00	KECAMATAN SEBULU
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	4.824.800,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN KECAMATAN SEBULU		0,00	KECAMATAN SEBULU



7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN KECAMATAN SEBULU			KECAMATAN SEBULU
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN KECAMATAN SEBULU		200.000.000,00	KECAMATAN SEBULU
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN KECAMATAN SEBULU		0,00	KECAMATAN SEBULU
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	1 Unit 1 Unit	160.000.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	ASN KECAMATAN SEBULU	-	0,00	KECAMATAN SEBULU
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN KECAMATAN SEBULU		0,00	KECAMATAN SEBULU
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM),	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN KECAMATAN SEBULU		0,00	KECAMATAN SEBULU



7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	628.553.957,00		penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	ASN KECAMATAN SEBULU	-	10.000.000,00	KECAMATAN SEBULU
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN KECAMATAN SEBULU		5.000.000,00	KECAMATAN SEBULU
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	616.553.957,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN KECAMATAN SEBULU		0,00	KECAMATAN SEBULU
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN KECAMATAN SEBULU		5.000.000,00	KECAMATAN SEBULU
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	24 Unit	180.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN KECAMATAN SEBULU	-	10.000.000,00	KECAMATAN SEBULU
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	170.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN KECAMATAN SEBULU		0,00	KECAMATAN SEBULU

	7 (01 01	L 2.09	0006	Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Sebulu, Sebulu Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN KECAMATAN SEBULU		KECAMATAN SEBULU
388	7 (01 02	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang di laksanakan sesuai SOP Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	41 Persen 91 Persen	5.796.102.000,00					- 11.150.000.000,00	KECAMATAN SEBULU
		01 02			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan - secara efektif	2 Kegiatan	400.000,000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat sebulu		KECAMATAN SEBULU
	7	01 02	2 2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat sebulu	200.000,000,000	KECAMATAN SEBULU
	7 (01 02	2 2.01	. 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat sebulu	250.000.000,00	KECAMATAN SEBULU
	7	01 02	2 2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	5 Fasiitasi	100.000.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat sebulu	- 100.000.000,00	KECAMATAN SEBULU
	7	01 02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat sebulu	100.000.000,000	KECAMATAN SEBULU

	7	01 02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2 Kegiatan	5.296.102.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat sebulu	- 1	0.600.000,00	KECAMATAN SEBULU
	7	01 02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	896.102.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Masyarakat sebulu		600.000.000	KECAMATAN SEBULU
	7	01 02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	45 Laporan	4.400.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat sebulu		10.000.000,000	KECAMATAN SEBULU
389	7	01 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan - Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100 persen	300.000.000,00					-	550.000.000,00	KECAMATAN SEBULU
	7	01 03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan - Pemberdayaan Desa yang dilakukan	14 Desa	100.000.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat sebulu		200.000.000,00	KECAMATAN SEBULU
	7	01 03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	yang Berpartisipasi dalam Forum	7 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat sebulu		150.000.000,00	KECAMATAN SEBULU

	7	01 03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat sebulu		50.000.000,00	KECAMATAN SEBULU
		01 03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang diselenggarakan		7 lembaga	200.000.000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat sebulu	-	·	KECAMATAN SEBULU
	7	01 03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		4 Lembaga Kemasyarakatan	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat sebulu			KECAMATAN SEBULU
390	7	01 04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan		100 persen	175.000.000,00					-	180.000.000,00	KECAMATAN SEBULU
	7	01 04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselenggarakan		14 Desa	175.000.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat sebulu	-	180.000.000,00	KECAMATAN SEBULU
	7 (01 04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat sebulu	0,00		KECAMATAN SEBULU
		01 04		0002	Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan	125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat sebulu			KECAMATAN SEBULU
391	7	01 05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilakukan	-	100 persen	195.000.000,00					-	420.000.000,00	KECAMATAN SEBULU



	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan Camat		5 Kegiati	195.	000.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat sebulu	-	420.000.000,00	KECAMATAN SEBULU
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		85 Orang	180.	000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat sebulu		410.000.000,00	KECAMATAN SEBULU
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokum	n 15.	000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat sebulu		10.000.000,00	KECAMATAN SEBULU
392	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	-	80 Perse	325.	000.000,00					-	245.000.000,00	KECAMATAN SEBULU
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi		14 Desa	325.	000.000,00		kesehatan, prestasi olahraga kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	, pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel , untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Masyarakat sebulu	-	245.000.000,00	KECAMATAN SEBULU
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		1 Dokum	n 75.	000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat sebulu		50.000.000,00	KECAMATAN SEBULU

											•			<u>, </u>	
	7 01	1 06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat sebulu	195.000.000,00	KECAMATAN SEBULU
					Kecamatan Muara Kaman			19.488.119.658,00						53.631.378.362,00	KECAMATAN MUARA
	7		+		UNSUR KEWILAYAHAN			19.488.119.658,00						53.631.378.362,00	KAMAN KECAMATAN MUARA KAMAN
	7 01	1			KECAMATAN			19.488.119.658,00						53.631.378.362,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
393	7 01	1 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	72.5 Nilai	11.739.917.658,00						- 10.706.378.362,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
	7 01	1 01	2.01		NAGUPATEN KU Penganggaran, dan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		16 Dokumen	370.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Muara Kaman		KECAMATAN MUARA KAMAN
	7 01	1 01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Muara Kaman	150.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
	7 01	1 01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	30,000.000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Muara Kaman	70.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
	7 01	1 01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Muara Kaman	60.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
	7 01	1 01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	42 Data	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Muara Kaman	300.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman

7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Adminsitrasi - Keuangan Kec. Muara Kaman	25 Laporan	9.859,917.658,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Muara - Kaman	8.217.878.362,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	9.649.917.658,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Muara Kaman	8.007.878.362,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
7	01	01	2.02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Muara Kaman	10.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Muara Kaman	200.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi - Barang Milik Daerah Pada Kec. Muara Kaman	4 Laporan	105.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Muara - Kaman	205.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
7	01	01	2.03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Muara Kaman	25.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
7	01	01	2.03		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Muara Kaman	150.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN

7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Muara Kaman	30.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah.	55 Laporan	380.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Muara Kaman	- 510.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Muara Kaman	150.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Muara Kaman	50.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Muara Kaman	20.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Muara Kaman	15.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Muara Kaman	250.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN

7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Muara Kaman	25.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah.		1 Unit	25.000.000,00		Memperkuat reformasi politiki, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Muara Kaman	- 25.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ulu	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Muara Kaman	25.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		27 Laporan	300.000,000		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Muara Kaman	- 300.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	270.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politiki, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Muara Kaman	270.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		15 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Muara Kaman	30.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Millik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Unit Barang Milik Daerah Penunjnag Urusan Pemerintah Daerah	-	19 Unit	700.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Muara Kaman	- 868.500.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN

	7 (01 01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Muara Kaman	228.500.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
	7 (01 01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Muara Kaman	75,000,000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
	7 (01 01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Muara Kaman	15.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
	7 (01 01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	500.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Muara Kaman	500.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
	7 (01 01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Muara Kaman	50.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
394	7 (01 02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP; Tingkat aksebilitas wilayah kecamatan	90/90 Persen	7.012.202.000,00					- 42.075.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
	7 (01 02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersedianya Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Laporan	450.000.000,00		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Muara Kaman	- 450.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN

7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	200.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Muara Kaman	200.000.000,00) KECAMATAN MUARA KAMAN
		02			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ilir	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Muara Kaman) KECAMATAN MUARA KAMAN
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Tersedianya Laporan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	2 Laporan	100.000.000,00			, pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Masyarakat Kecamatan Muara Kaman	100.000.000,00	D KECAMATAN MUARA KAMAN
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Muara Kaman	100.000.000,00	D KECAMATAN MUARA KAMAN
7		02			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Laporan	25.000.000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Muara Kaman		KECAMATAN MUARA KAMAN
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Muara Kaman	25.000.000,00) KECAMATAN MUARA KAMAN
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	39 Laporan	6.437.202.000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Muara Kaman	- 41.500.000.000,00) KECAMATAN MUARA KAMAN



	7	01 02	2 2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		1	7 Laporan	1.052.202.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Muara Kaman		1.500.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
			2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			2 Laporan	5.385.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Muara Kaman			KECAMATAN MUARA KAMAN
395	7	01 03	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif	-	1	00 Persen	406.000.000,00					-	450.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
	7	01 03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tersedianya Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	3	Laporan	100.000.000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Muara Kaman	-	100.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
	7	01 03	3 2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	yang Berpartisipasi dalam Forum			D Lembaga emasyarakatan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Muara Kaman		50.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
	7	01 03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2	Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Muara Kaman		50.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
	7	01 03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tersedianya Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	1	6 Laporan	306.000.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	profesional dan akuntabel	Masyarakat Kecamatan Muara Kaman	-	350.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN

	7	01 03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		36 Lembaga Kemasyarakatan	306.000.000,000 Kab. Kutai Kartan Muara Kaman, Si Kel/Desa	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Muara Kaman	350.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
396	7	01 04	1		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	100 Persen	150.000.000,00				- 100.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
	7	01 04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		6 Laporan	150.000.000,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Muara Kaman	- 100.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
	7	01 04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		2 Laporan	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartan Muara Kaman, N Kaman Ulu	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Muara Kaman	25.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
	7	01 04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		4 Laporan	125.000.000,00 Kab. Kutai Kartan Muara Kaman, Si Kel/Desa	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Muara Kaman	75.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
397	7	01 05	•		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	100 Persen	180.000.000,00				- 300.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
	7	01 05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		1 Laporan	180.000.000,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Muara Kaman	- 300.000.000,00	KECAMATAN MUARA KAMAN
	7	01 05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		200 Orang	180.000.000,00 Kab. Kutai Kartan Muara Kaman, Si Kel/Desa	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Muara Kaman	300.000.000,01	KECAMATAN MUARA KAMAN



					Kecamatan Kota Bangun			20.767.311.553,00					21.930.795.881,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
	7				UNSUR KEWILAYAHAN			20.767.311.553,00					21.930.795.881,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
	7	01			KECAMATAN			20.767.311.553,00					21.930.795.881,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
398	7	01 0)1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	68 Nilai	6.402.333.553,00				-	9.089.795.881,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
	7	01 0	2.0	11	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		31 Dokumen	325.000.000,00		-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik		540.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
	7	01 0	01 2.0	000	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Kota Bangun, Semua Kel/Desa	. DANA BAGI HASIL (DBH)		7-Deningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		140.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
	7	01 0	01 2.0	00	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja KPD	4 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Kota Bangun, Semua Kel/Desa	, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	40.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
	7	01 0	01 2.0	000	OT Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Kota Bangun, Semua Kel/Desa	, DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	10.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
	7	01 0	01 2.0	01 000	99 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200 Data	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Kota Bangun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	320.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
	7	01 0	2.00	12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	656 Laporan	4.526.041.725,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan ASN -	5.116.728.594,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
	7	01 0	2.0	001)1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	4.436.041.725,00 Kab. Kutai Kartanegara Kota Bangun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan ASN	4.996.728.594,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
	7	01 0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Kota Bangun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan ASN	10.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN



7	01 0	1 2.02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan Laporan	80.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan ASN		00 KECAMATAN KOTA BANGUN
7	01 0	1 2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	575 Unit	102.278.712,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	- 232.278.712	00 KECAMATAN KOTA BANGUN
7	01 0	1 2.03	0001	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN		00 KECAMATAN KOTA BANGUN
7	01 0	1 2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	150.000.000,	00 KECAMATAN KOTA BANGUN
7	01 0	1 2.03	0005	Rekonsiilasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	47.278.712,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	47.278.712,	00 KECAMATAN KOTA BANGUN
	01 0			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi - Umum yang di sediakan	12 Kegiatan	197.474.160,00		-	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		00 KECAMATAN KOTA BANGUN
	01 0			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00 Kab, Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa		-	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		00 KECAMATAN KOTA BANGUN
	01 0			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	700.000,00 Kab, Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa		-	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		00 KECAMATAN KOTA BANGUN
7	01 0			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa		-	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		00 KECAMATAN KOTA BANGUN
7	01 0			Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13.774.160,00 Kab, Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa		-	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		00 KECAMATAN KOTA BANGUN
7	01 0	1 2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	20.000.000,	KECAMATAN KOTA BANGUN



7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	175.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
7	01	1 01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	350.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.027.788.956,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	- 1.043.788.956,00	KECAMATAN KOTA BANGU
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	4.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	671.097.592,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	685.097.592,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	354.691.364,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	354.691.364,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	223.750.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	- 342.999.619,00	KECAMATAN KOTA BANGU
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	51.250.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	60.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	177.999.619,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	5.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN

7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	70.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Membangun Infratruktur Konektivitas Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja	ASN	100.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
										pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	nompetensi angkatan kerja			
399 7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Perijinan - dan Non Perijinan yang di laksanakan sesuai SOP Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan	100 Persen 88,1 Persen	13.478.978.000,00					- 11.720.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
7	01	L 02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	176 Kegiatan	350.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan ASN	- 420.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan ASN	170.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan ASN	250.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
7	01	L 02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	1 SPM	75.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan ASN	- 100.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan ASN	100.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	80 Kegiatan	13.053.978.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan ASN	- 11.200.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
7	01	1 02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	1.045.978.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan ASN	1.200,000,000	KECAMATAN KOTA BANGUN
7			2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	28 Laporan	12.008.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan ASN	10.000.000.000,000	KECAMATAN KOTA BANGUN
400 7	01	L 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga - Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	66.72 Persen	436.000.000,00					- 586.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN



	7 (01 03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	63 Kali	100.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			KECAMATAN KOTA BANGUN
	7 (01 03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakata	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegar. Kota Bangun, Semua Kel/Desa	a, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan ASN	50.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
	7 (01 03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegar. Kota Bangun, Semua Kel/Desa	3, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan ASN	50.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
	7 (01 03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan - yang Diselenggarakan	5 Lembaga	336.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan ASN	- 486.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
	7 (01 03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakata	n 336.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegar. Kota Bangun, Semua Kel/Desa	B, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan ASN	486.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
401	7 (01 04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi - ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	78 Persen	175.000.000,00					- 230.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
	7 (01 04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Kegiatan	175.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan ASN	- 230.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
	7 (01 04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	50.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegar. Kota Bangun, Semua Kel/Desa	a, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan ASN	55,000,000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
	7 (01 04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegar. Kota Bangun, Semua Kel/Desa	a, DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan ASN	175.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
402	7 (01 05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan - Pemerintahan Umum -	65 Persen	195.000.000,00					- 220.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN



	7 01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	18 Kegiatan	195.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Membangun Infratruktur Konektivitas 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan ASN		KECAMATAN KOTA BANGUN
	7 01	1 05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumiah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	180.000.000,00	Kota Bangun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan ASN	200.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
	7 01	1 05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan ASN		KECAMATAN KOTA BANGUN
403	7 01				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	73 Persen	80.000.000,00						- 85.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
	7 01	1 06	5 2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi -	11 Desa	80.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan ASN	85.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
	7 01	1 06	5 2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan ASN	5.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
	7 01	1 06	5 2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Membangun Infratruktur Konektivitas Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur desa yang berkualitas	Masyarakat dan ASN	80,000,000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
					Kecamatan Muara Muntai			25.119.450.537,00			•	1	l .	14.095.296.707,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
	7				UNSUR KEWILAYAHAN			25.119.450.537,00						14.095.296.707,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
	7 01	1			KECAMATAN			25.119.450.537,00						14.095.296.707,00	MUNTAI
404	7 01	1 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	76 Nilai	7.931.721.539,00						- 7.714.596.707,00	MUNTAI
	7 01	1 01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	320.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	- 380.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI

7	01	01 01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2 Dokumen	40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa 30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	OPD Kecamatan Muara Muntai OPD Kecamatan Muara Muntai	30.000.000,00 50.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI KECAMATAN MUARA MUNTAI
7	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	9 Data	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	OPD Kecamatan Muara Muntai	300.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi - Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	12 Laporan	6.479.534.570,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	OPD Kecamatan Muara Muntai	- 5.733.906.956,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
7		01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	696 Orang/bulan	6.381.358.628,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai		KECAMATAN MUARA MUNTAI
7		01			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai		KECAMATAN MUARA MUNTAI
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	83.175.942,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	83.175.942,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI

				_										
7	01	1 01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada - perangkat daerah yang di administrasikan	25 Dokumen	78.256.100,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	- 78.256.100,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
7	01	1 01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	50,000,000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
7	01	1 01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	28.256.100,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai		KECAMATAN MUARA MUNTAI
7	01	1 01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum - Perangkat Daerah Yang Tersedia	5 Layanan	290.690.524,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	- 508.309.974,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	7.500.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
7	01	1 01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	45.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
7	01	1 01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.380.550,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	15.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI

7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	90.809.974,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	40.809.974,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
7	01	. 01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	10.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
7	01	. 01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	20.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	320.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50 Dokumen	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	50.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
7	01	. 01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	3 Unit	60.000.000,00		Memperkuat reformasi politiki, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	- 200.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	200.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI

7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	604.246.445,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	- 703.379.777,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25 Laporan	2.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7-Deningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	3.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	28 Laporan	365.527.585,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	365.527.585,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Laporan	236.718.860,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	334.852.192,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	6 Unit	98.993.900,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	- 110.743.900,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politiki, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	45.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	52.250.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politiki, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	60.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI

	7 (01 01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		7 Unit	6.743.900,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	5.743.900,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
405	7 (01 02	!		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	-	100 Persen 56 Persen	8.082.700.000,00					- 5.068.700.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
	7 (2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif		3 Kegiatan	400.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai		KECAMATAN MUARA MUNTAI
	7 (01 02	2.01	. 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		2 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	100.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
	7 (01 02	2 2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 Dokumen	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	250.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
	7 (01 02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan		10 Kegiatan	100.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	- 100.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
	7 (01 02	2.02	2 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	100.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI

	7	01 02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	10 Kegiatan	7.582.700.000,00		Memperkuat reformasi politiki, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	- 4.618.700.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
	7	01 02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	958.700.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	958.700.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
		01 02		0003	yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	6.624.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai		KECAMATAN MUARA MUNTAI
406	7	01 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	95 Persen	8.354.028.998,00					- 486.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
	7	01 03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pembedayaan Desa yang dilaksanakan	13 Kegiatan	100.000,000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	- 100.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
	7	01 03			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	yang Berpartisipasi dalam Forum	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai		KECAMATAN MUARA MUNTAI
	7	01 03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	50.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
	7	01 03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang di Fasilitasi -	3 Laporan	8.254.028.998,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	- 386,000,000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI



	7	01 03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	8.254.028.998,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	386.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
407	7	01 04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi - ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100 Persen	175.000.000,00					- 225.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
		01 04			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Laporan	175.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daarah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai		KECAMATAN MUARA MUNTAI
	7	01 04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	50.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
	7	01 04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	175.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
408	7	01 05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan - Pemerintahan Umum -	100 Persen	195.000.000,00					- 220.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
		01 05			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	ndeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	100 Persen	195.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	- 220.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI
	7	01 05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Jumat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30 Orang	180.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Muara Muntai	180.000.000,00	KECAMATAN MUARA MUNTAI

	7 0	1 05	2.01	8000	Pelaksanaan Tugas Forum	Jumlah Dokumen Tugas Forum	4 Dokumen	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi	7. Peningkatan tata kelola	OPD Kecamatan Muara	40.000	00,00 KECAMATAN MUARA
					Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Muara Muntai, Semua	,	politik, hukum dan birokrasi,	pemerintahan daerah yang	Muntai		MUNTAI
					Nooramasir impinari ai necamatan	Noor amasir impinar ar recommend		Kel/Desa		serta memperkuat	profesional dan akuntabel	Triuman.		
								Kel/ Desa						
										pencegahan dan	untuk mendukung			
										pemberantasan korupsi,	transformasi pelayanan			
										narkoba, judi, dan	publik			
										penyeludupan.	1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
409		4 00		+	PROGRAM PEMBINAAN DAN	D	05 0	381.000.000.00	-	+	TUDIK		204.000	00,00 KECAMATAN MUARA
409	/ 0	06				Persentase Desa Yang Memiliki -	95 Persen	381.000.000,00					- 381.000.	
					PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Predikat Penyelenggaraan Kinerja								MUNTAI
					DESA	Pemerintahan Desa Dalam								
						Kategori Baik								
	7 0	1 06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan	Jumlah Desa Yang difasilitasi -	13 Laporan	381.000.000,00		Memperkuat reformasi	7. Peningkatan tata kelola	OPD Kecamatan	- 381.000.	000,00 KECAMATAN MUARA
					Koordinasi					politik, hukum dan birokrasi,	pemerintahan daerah yang	Muara Muntai		MUNTAI
										serta memperkuat	profesional dan akuntabel			
					Pembinaan dan Pengawasan					pencegahan dan	untuk mendukung			
					Pemerintahan Desa					pemberantasan korupsi,	transformasi pelayanan			
					rememicanan besa									
										narkoba, judi, dan	publik			
										penyeludupan.	1. Penataan dan			
1			1								Pengembangan Tata Kelola			
1			1								Pemerintahan dan Pelayanan			
1			1	1							Publik			
	7 0	1 06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	13 Dokumen	306.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DRH)	Memperkuat reformasi	7. Peningkatan tata kelola	OPD Kecamatan Muara	306.000	000,00 KECAMATAN MUARA
1	Ιĭ	1 - 3	1		Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Muara Muntai, Semua		politik, hukum dan birokrasi,	pemerintahan daerah yang	Muntai	500.004	MUNTAI
		1	1	1	Desc dani endayagunaan Aset Desa	Keuangan Desa dan Pendayagunaan		Kel/Desa			profesional dan akuntabel	· · · arrair		WORK
		1	1	1	1			kei/Desa		serta memperkuat				
						Aset Desa				pencegahan dan	untuk mendukung			
										pemberantasan korupsi,	transformasi pelayanan			
										narkoba, judi, dan	publik			
										penyeludupan.	1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	7 0	1 00	2.04	0047			42 1	75 000 000 00 14 1 14 1 14	DAMA DA CUMACII (DDU)		Publik		75.000	000.00
	7 0	1 06	2.01	0017		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	13 Laporan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi	Publik 7. Peningkatan tata kelola	OPD Kecamatan Muara	75.000	000,00 KECAMATAN MUARA
	7 0	1 06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	13 Laporan	Muara Muntai, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi,	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	OPD Kecamatan Muara Muntai	75.000	000,00 KECAMATAN MUARA MUNTAI
	7 0	01 06	2.01	0017			13 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		75.000	
	7 0	01 06	2.01	0017			13 Laporan	Muara Muntai, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		75.000	
	7 0	01 06	2.01	0017			13 Laporan	Muara Muntai, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		75.000	
	7 0	01 06	2.01	0017			13 Laporan	Muara Muntai, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		75.000	
	7 0	01 06	2.01	0017			13 Laporan	Muara Muntai, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		75.000	
	7 0	01 06	2.01	0017			13 Laporan	Muara Muntai, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		75.000	
	7 0	01 06	2.01	0017			13 Laporan	Muara Muntai, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		75.000	
	7 0	01 06	2.01	0017			13 Laporan	Muara Muntai, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		75.000	
	7 0	06	2.01	0017	Wilayahnya		13 Laporan	Muara Muntai, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			MUNTAI
		01 06	2.01	0017	Wilayahnya Kecamatan Kenohan		13 Laporan	Muara Muntai, Semua Kel/Desa 12.298.955.674,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		10.230.56	MUNTAI 947,00 KECAMATAN KENOHAN
	7		2.01	0017	Wilayahnya Kecamatan Kenohan UNSUR KEWILAYAHAN		13 Laporan	Muara Muntai, Semua Kel/Desa 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		10.230.566 10.230.566	MUNTAI 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN
	7 7 0	11	2.01	0017	Wilayahnya Kecamatan Kenohan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN	Pendampingan Desa di Wilayahnya		Muara Muntai, Semua Kel/Desa 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		10.230.565 10.230.565 10.230.565	MUNTAI 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN
	7 7 0		2.01	0017	Kecamatan Kenohan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN		13 Laporan	Muara Muntai, Semua Kel/Desa 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		10.230.565 10.230.565 10.230.565	MUNTAI 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN
	7 7 0	11	2.01	0017	Kecamatan Kenohan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pendampingan Desa di Wilayahnya		Muara Muntai, Semua Kel/Desa 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		10.230.565 10.230.565 10.230.565	MUNTAI 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN
410	7 7 0 7 0	11 01			Kecamatan Kenohan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Pendampingan Desa di Wilayahnya		Muara Muntai, Semua Kel/Desa 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		10.230.565 10.230.565 10.230.565 - 5.837.71	MUNTAI 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 347,00 KECAMATAN KENOHAN
410	7 7 0 7 0	11			Kecamatan Kenohan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pendampingan Desa di Wilayahnya		Muara Muntai, Semua Kel/Desa 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		10.230.565 10.230.565 10.230.565 - 5.837.71	MUNTAI 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN
410	7 7 0 7 0	11 01			Kecamatan Kenohan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	Pendampingan Desa di Wilayahnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen -	70 Nilai	Muara Muntai, Semua Kel/Desa 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 4.697.449.674,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	Muntai Aparatur dan	10.230.565 10.230.565 10.230.565 - 5.837.71	MUNTAI 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 347,00 KECAMATAN KENOHAN
410	7 7 0 7 0	11 01			Wilayahnya Kecamatan Kenohan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pendampingan Desa di Wilayahnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen -	70 Nilai	Muara Muntai, Semua Kel/Desa 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 4.697.449.674,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Muntai	10.230.565 10.230.565 10.230.565 - 5.837.71	MUNTAI 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 347,00 KECAMATAN KENOHAN
410	7 7 0 7 0	11 01			Kecamatan Kenohan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	Pendampingan Desa di Wilayahnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen -	70 Nilai	Muara Muntai, Semua Kel/Desa 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 4.697.449.674,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Muntai Aparatur dan	10.230.565 10.230.565 10.230.565 - 5.837.71	MUNTAI 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 347,00 KECAMATAN KENOHAN
410	7 7 0 7 0	11 01			Kecamatan Kenohan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	Pendampingan Desa di Wilayahnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen -	70 Nilai	Muara Muntai, Semua Kel/Desa 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 4.697.449.674,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	Muntai Aparatur dan	10.230.565 10.230.565 10.230.565 - 5.837.71	MUNTAI 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 347,00 KECAMATAN KENOHAN
410	7 7 0 7 0	11 01			Kecamatan Kenohan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	Pendampingan Desa di Wilayahnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen -	70 Nilai	Muara Muntai, Semua Kel/Desa 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 4.697.449.674,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	Muntai Aparatur dan	10.230.565 10.230.565 10.230.565 - 5.837.71	MUNTAI 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 347,00 KECAMATAN KENOHAN
410	7 7 0 7 0	11 01			Kecamatan Kenohan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	Pendampingan Desa di Wilayahnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen -	70 Nilai	Muara Muntai, Semua Kel/Desa 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 4.697.449.674,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Muntai Aparatur dan	10.230.565 10.230.565 10.230.565 - 5.837.71	MUNTAI 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 347,00 KECAMATAN KENOHAN
410	7 7 0 7 0	11 01			Kecamatan Kenohan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	Pendampingan Desa di Wilayahnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen -	70 Nilai	Muara Muntai, Semua Kel/Desa 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 4.697.449.674,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Muntai Aparatur dan	10.230.565 10.230.565 10.230.565 - 5.837.71	MUNTAI 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 347,00 KECAMATAN KENOHAN
410	7 7 0 7 0	11 01			Kecamatan Kenohan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	Pendampingan Desa di Wilayahnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen -	70 Nilai	Muara Muntai, Semua Kel/Desa 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 4.697.449.674,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Muntai Aparatur dan	10.230.565 10.230.565 10.230.565 - 5.837.71	MUNTAI 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 347,00 KECAMATAN KENOHAN
410	7 7 0 7 0	11 01			Kecamatan Kenohan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	Pendampingan Desa di Wilayahnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen -	70 Nilai	Muara Muntai, Semua Kel/Desa 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 4.697.449.674,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Muntai Aparatur dan	10.230.565 10.230.565 10.230.565 - 5.837.71	MUNTAI 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 347,00 KECAMATAN KENOHAN
410	7 7 0 7 0	11 01			Kecamatan Kenohan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	Pendampingan Desa di Wilayahnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen -	70 Nilai	Muara Muntai, Semua Kel/Desa 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 4.697.449.674,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Muntai Aparatur dan	10.230.565 10.230.565 10.230.565 - 5.837.71	MUNTAI 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 347,00 KECAMATAN KENOHAN
410	7 7 0 7 0 7 0	01 01	2.01		Kecamatan Kenohan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pendampingan Desa di Wilayahnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70 Nilai 6 Dokumen	Muara Muntai, Semua Kel/Desa 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 320.000.000,00		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Muntai Aparatur dan Masyarakat Kenohan	10.230.568 10.230.568 10.230.568 - 5.837.71	MUNTAI 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 347,00 KECAMATAN KENOHAN 000,00 KECAMATAN KENOHAN
410	7 7 0 7 0 7 0	11 01	2.01		Kecamatan Kenohan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pendampingan Desa di Wilayahnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan	70 Nilai	Muara Muntai, Semua Kel/Desa 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 320.000.000,00 4.697.449.674,00		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	Aparatur dan Masyarakat Kenohan Aparatur dan	10.230.568 10.230.568 10.230.568 - 5.837.71	MUNTAI 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 347,00 KECAMATAN KENOHAN
410	7 7 0 7 0 7 0	01 01	2.01		Kecamatan Kenohan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pendampingan Desa di Wilayahnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70 Nilai 6 Dokumen	12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 320.000.000,00 4.697.449.674,00		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Muntai Aparatur dan Masyarakat Kenohan	10.230.568 10.230.568 10.230.568 - 5.837.71	MUNTAI 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 347,00 KECAMATAN KENOHAN 000,00 KECAMATAN KENOHAN
410	7 7 0 7 0 7 0	01 01	2.01		Kecamatan Kenohan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pendampingan Desa di Wilayahnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan	70 Nilai 6 Dokumen	Muara Muntai, Semua Kel/Desa 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 320.000.000,00 4.697.449.674,00		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel dan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel dan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel dan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel dan dan dan dan dan dan dan dan akuntabel dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan	Aparatur dan Masyarakat Kenohan Aparatur dan	10.230.568 10.230.568 10.230.568 - 5.837.71	MUNTAI 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 347,00 KECAMATAN KENOHAN 000,00 KECAMATAN KENOHAN
410	7 7 0 7 0 7 0	01 01	2.01		Kecamatan Kenohan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pendampingan Desa di Wilayahnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan	70 Nilai 6 Dokumen	12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 320.000.000,00 4.697.449.674,00		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Pesingkatan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat Kenohan Aparatur dan	10.230.568 10.230.568 10.230.568 - 5.837.71	MUNTAI 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 347,00 KECAMATAN KENOHAN 000,00 KECAMATAN KENOHAN
410	7 7 0 7 0 7 0	01 01	2.01		Kecamatan Kenohan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pendampingan Desa di Wilayahnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan	70 Nilai 6 Dokumen	12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 320.000.000,00 4.697.449.674,00		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel dan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel dan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel dan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel dan dan dan dan dan dan dan dan akuntabel dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan	Aparatur dan Masyarakat Kenohan Aparatur dan	10.230.568 10.230.568 10.230.568 - 5.837.71	MUNTAI 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 347,00 KECAMATAN KENOHAN 000,00 KECAMATAN KENOHAN
410	7 7 0 7 0 7 0	01 01	2.01		Kecamatan Kenohan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pendampingan Desa di Wilayahnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan	70 Nilai 6 Dokumen	12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 320.000.000,00 4.697.449.674,00		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan penserantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Pesingkatan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat Kenohan Aparatur dan	10.230.568 10.230.568 10.230.568 - 5.837.71	MUNTAI 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 347,00 KECAMATAN KENOHAN 000,00 KECAMATAN KENOHAN
410	7 7 0 7 0 7 0	01 01	2.01		Kecamatan Kenohan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pendampingan Desa di Wilayahnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan	70 Nilai 6 Dokumen	12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 320.000.000,00 4.697.449.674,00		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pengerantasan korupsi, narkoba, judi, dan pengerantasan korupsi, narkoba, judi, dan pengerantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Aparatur dan Masyarakat Kenohan Aparatur dan	10.230.568 10.230.568 10.230.568 - 5.837.71	MUNTAI 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 347,00 KECAMATAN KENOHAN 000,00 KECAMATAN KENOHAN
410	7 7 0 7 0 7 0	01 01	2.01		Kecamatan Kenohan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pendampingan Desa di Wilayahnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan	70 Nilai 6 Dokumen	12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 320.000.000,00 4.697.449.674,00		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan penserantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Aparatur dan Masyarakat Kenohan Aparatur dan	10.230.568 10.230.568 10.230.568 - 5.837.71	MUNTAI 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 347,00 KECAMATAN KENOHAN 000,00 KECAMATAN KENOHAN
410	7 7 0 7 0 7 0	01 01	2.01		Kecamatan Kenohan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pendampingan Desa di Wilayahnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan	70 Nilai 6 Dokumen	12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 320.000.000,00 4.697.449.674,00		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pengerantasan korupsi, narkoba, judi, dan pengerantasan korupsi, narkoba, judi, dan pengerantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Aparatur dan Masyarakat Kenohan Aparatur dan	10.230.568 10.230.568 10.230.568 - 5.837.71	MUNTAI 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 347,00 KECAMATAN KENOHAN 000,00 KECAMATAN KENOHAN
410	7 7 0 7 0 7 0	01 01	2.01		Kecamatan Kenohan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pendampingan Desa di Wilayahnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan	70 Nilai 6 Dokumen	12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 320.000.000,00 4.697.449.674,00		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pengerantasan korupsi, narkoba, judi, dan pengerantasan korupsi, narkoba, judi, dan pengerantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Aparatur dan Masyarakat Kenohan Aparatur dan	10.230.568 10.230.568 10.230.568 - 5.837.71	MUNTAI 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 347,00 KECAMATAN KENOHAN 000,00 KECAMATAN KENOHAN
410	7 7 0 7 0 7 0	01 01	2.01		Kecamatan Kenohan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pendampingan Desa di Wilayahnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan	70 Nilai 6 Dokumen	12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 12.298.955.674,00 320.000.000,00 4.697.449.674,00		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pengerantasan korupsi, narkoba, judi, dan pengerantasan korupsi, narkoba, judi, dan pengerantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Aparatur dan Masyarakat Kenohan Aparatur dan	10.230.568 10.230.568 10.230.568 - 5.837.71	MUNTAI 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 947,00 KECAMATAN KENOHAN 347,00 KECAMATAN KENOHAN 000,00 KECAMATAN KENOHAN

7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Aparatur dan Masyarakat Kenohan	55,000,000,00	KECAMATAN KENOHAN
7	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	43 Data	250.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat Kenohan	330.000.000,00	KECAMATAN KENOHAN
7	01	L 01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan	3.339.919.674,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7- Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat Kenohan	- 4.333.129.347,00	KECAMATAN KENOHAN
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	288 Orang/bulan	3.232.999.674,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat Kenohan	4.215.517.347,00	KECAMATAN KENOHAN
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat Kenohan	16.500.000,00	KECAMATAN KENOHAN
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	91.920.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat Kenohan	101.112.000,00	KECAMATAN KENOHAN
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada - Perangkat Daerah yang diadministrasikan	13 Laporan	84.200.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat Kenohan	92.620.000,00	KECAMATAN KENOHAN

7	01	1 01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Aparatur dan Masyarakat Kenohan	55.000.000,00	KECAMATAN KENOHAN
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	0:	1 01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	34.200.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Aparatur dan Masyarakat Kenohan	37.620.000,00	KECAMATAN KENOHAN
7	0:	1 01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum - Perangkat Daerah	6 Paket	261.280.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat Kenohan	- 232.708.000,00	KECAMATAN KENOHAN
7	01	1 01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat Kenohan	38.800.000,00	KECAMATAN KENOHAN
7	03	1 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat Kenohan	5.500.000,00	KECAMATAN KENOHAN
7	01	1 01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.280.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat Kenohan	2.508.000,00	KECAMATAN KENOHAN
7	0:	1 01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat Kenohan	11.000.000,00	KECAMATAN KENOHAN

7															
	01	l 01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan		12 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi	7. Peningkatan tata kelola	Aparatur dan	165.000.000,00	KECAMATAN KENOHAN
			1	1	dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kenohan, Semua	, ,	politik, hukum dan birokrasi,	pemerintahan daerah yang	Masyarakat Kenohan		
			1	1		SKPD			Kel/Desa		serta memperkuat	profesional dan akuntabel			
						I			1, 2		pencegahan dan	untuk mendukung			
			1	1							pemberantasan korupsi,	transformasi pelayanan			
			1	1							narkoba, judi, dan	nublik			
											penyeludupan.	1. Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
7	01	l 01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada	Jumlah Dokumen Penatausahaan	i i	2 Dokumen	9.000.000.00 Kab. Kutai Kartanegara.	DANA BAGI HASII (DBH)	Memperkuat reformasi	7. Peningkatan tata kelola	Aparatur dan	9,900,000,00	KECAMATAN KENOHAN
					SKPD	Arsip Dinamis pada SKPD			Kenohan, Kahala	, ,	politik, hukum dan birokrasi,	pemerintahan daerah yang	Masyarakat Kenohan		
					SKI D	Al sip billatilis pada ski b			Kenonan, Kanala		serta memperkuat	profesional dan akuntabel	ividayarakat Kerionan		
											pencegahan dan	untuk mendukung			
											pemberantasan korupsi,	transformasi pelayanan			
											narkoba, judi, dan	publik			
											penyeludupan.	1. Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
	01	l 01	2 07	1	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang -	- 	4 Unit	200.000.000,00		Memperkuat reformasi	7. Peningkatan tata kelola	Aparatur Kecamatan	220 000 000 0	KECAMATAN KENOHAN
Ι΄	1 "	"	2.07	1				- OIII	200.000.000,00				Kenohan	220.000.000,00	THE STREET STREET
		1	1	1	Penunjang Urusan Pemerintah	Milik Daerah Penunjang Urusan					politik, hukum dan birokrasi,	pemerintahan daerah yang	Kenonan	1	Ī
		1	1	1	Daerah	Pemerintah Daerah					serta memperkuat	profesional dan akuntabel		1	Ī
		1	1							pencegahan dan	untuk mendukung				
		1	1							pemberantasan korupsi,	transformasi pelayanan				
		1	1							narkoba, judi, dan	publik				
											penyeludupan.	1. Penataan dan			
											l	Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
	04	- 01	2.07	0004	D	Lucial Halia Mandana a Barrara		4.11-76	200 000 000 00 K-b K-b-l K-b	DANA DA CUUACII (DDU)		1 diblin	A W	220,000,000,00	WECANA TANI WENGULAN
_ /	01	01	2.07	0001		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan		4 Unit	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		7. Peningkatan tata kelola	Aparatur Kecamatan	220.000.000,00	KECAMATAN KENOHAN
					Dinas atau Kendaraan Dinas	Dinas atau Kendaraan Dinas			Kenohan, Kahala		politik, hukum dan birokrasi,	pemerintahan daerah yang	Kenohan		
					Jabatan	Jabatan yang Disediakan					serta memperkuat	profesional dan akuntabel			
											pencegahan dan	untuk mendukung			
											pemberantasan korupsi,	transformasi pelayanan			
											narkoba, judi, dan	publik			
											penyeludupan.	Penataan dan			
											penyeradapan.	Pengembangan Tata Kelola			
												Pengembangan rata kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan			
7	_											Publik			
	01	l 01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah waktu penyesiaan Jasa -		48 Laporan	290.800.000,00		Memperkuat reformasi	Publik 7. Peningkatan tata kelola	Aparatur dan	- 319.880.000,00	KECAMATAN KENOHAN
	01	l 01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan		48 Laporan	290.800.000,00		politik, hukum dan birokrasi,	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Aparatur dan Masyarakat Kenohan	- 319.880.000,00	KECAMATAN KENOHAN
	01	l 01	2.08			Penunjang Urusan Pemerintahan		48 Laporan	290.800.000,00			Publik 7. Peningkatan tata kelola		- 319.880.000,00	KECAMATAN KENOHAN
	01	l 01	2.08					48 Laporan	290.800.000,00		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		- 319.880.000,00	KECAMATAN KENOHAN
	01	1 01	2.08			Penunjang Urusan Pemerintahan		48 Laporan	290.800.000,00		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		- 319.880.000,00	KECAMATAN KENOHAN
	01	1 01	2.08			Penunjang Urusan Pemerintahan		48 Laporan	290.800.000,00		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		- 319.880.000,00	KECAMATAN KENOHAN
	01	01	2.08			Penunjang Urusan Pemerintahan		48 Laporan	290.800.000,00		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		- 319.880.000,00	KECAMATAN KENOHAN
	01	01	2.08			Penunjang Urusan Pemerintahan		48 Laporan	290.800.000,00		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		- 319.880.000,00	KECAMATAN KENOHAN
	01	1 01	2.08			Penunjang Urusan Pemerintahan		48 Laporan	290.800.000,00		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		- 319.880.000,00	KECAMATAN KENOHAN
	01	L 01	2.08			Penunjang Urusan Pemerintahan		48 Laporan	290.800.000,00		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		- 319.880.000,00	KECAMATAN KENOHAN
					Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan					politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kenohan		
7		l 01				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		48 Laporan	2.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat Kenohan		KECAMATAN KENOHAN
7					Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan				DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kenohan		
7					Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa			2.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat Kenohan		
7					Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa			2.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Masyarakat Kenohan		
7					Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa			2.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	Masyarakat Kenohan		
7					Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa			2.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	Masyarakat Kenohan		
7					Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa			2.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kenohan		
7					Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa			2.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Masyarakat Kenohan		
7					Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa			2.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Masyarakat Kenohan		
7					Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa			2.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan pengembangan Tata Kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Masyarakat Kenohan		
7					Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa			2.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Masyarakat Kenohan		
7	01	I 01	2.08	0001	Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	2.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik ntuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kenohan Aparatur dan Masyarakat Kenohan	2.200.000,00	KECAMATAN KENOHAN
7	01		2.08	0001	Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa			2.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala 278.800.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat Kenohan Aparatur dan Masyarakat Kenohan Aparatur dan	2.200.000,00	
7	01	I 01	2.08	0001	Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan		12 Laporan	2.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala 278.800.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan pengembangan Tata Kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kenohan Aparatur dan Masyarakat Kenohan	2.200.000,00	KECAMATAN KENOHAN
7	01	I 01	2.08	0001	Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		12 Laporan	2.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala 278.800.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Masyarakat Kenohan Aparatur dan Masyarakat Kenohan Aparatur dan	2.200.000,00	KECAMATAN KENOHAN
7	01	I 01	2.08	0001	Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan		12 Laporan	2.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala 278.800.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan penyeludupan.	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan pelayanan publik 1. Penataan dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Peniataan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan akuntabel untuk mendukung	Masyarakat Kenohan Aparatur dan Masyarakat Kenohan Aparatur dan	2.200.000,00	KECAMATAN KENOHAN
7	01	I 01	2.08	0001	Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan		12 Laporan	2.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala 278.800.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan pelayanan publik 1. Penataan dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik	Masyarakat Kenohan Aparatur dan Masyarakat Kenohan Aparatur dan	2.200.000,00	KECAMATAN KENOHAN
7	01	I 01	2.08	0001	Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan		12 Laporan	2.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala 278.800.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan penyeludupan.	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan pelayanan publik 1. Penataan dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Peniataan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan akuntabel untuk mendukung	Masyarakat Kenohan Aparatur dan Masyarakat Kenohan Aparatur dan	2.200.000,00	KECAMATAN KENOHAN
7	01	L 01	2.08	0001	Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan		12 Laporan	2.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala 278.800.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan pelayanan publik 1. Penataan dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik	Masyarakat Kenohan Aparatur dan Masyarakat Kenohan Aparatur dan	2.200.000,00	KECAMATAN KENOHAN
7	01	L 01	2.08	0001	Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan		12 Laporan	2.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala 278.800.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 2. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Peniataan dan Pelayanan Publik 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Masyarakat Kenohan Aparatur dan Masyarakat Kenohan Aparatur dan	2.200.000,00	KECAMATAN KENOHAN
7	01	L 01	2.08	0001	Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan		12 Laporan	2.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala 278.800.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung dan pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola	Masyarakat Kenohan Aparatur dan Masyarakat Kenohan Aparatur dan	2.200.000,00	KECAMATAN KENOHAN
7	01	L 01	2.08	0001	Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan		12 Laporan	2.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala 278.800.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua		politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 2. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Peniataan dan Pelayanan Publik 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Masyarakat Kenohan Aparatur dan Masyarakat Kenohan Aparatur dan	2.200.000,00	KECAMATAN KENOHAN

	7	01 01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Aparatur dan Masyarakat Kenohan	11.000.000,00	Kecamatan Kenohan
	7 (01 01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah -	12 Unit	201.250.000,00		Memperkuat reformasi	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	Aparatur Kecamatan	- 221.375.000,00	KECAMATAN KENOHAN
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara				politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kenohan		
	7	01 01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	51.250.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Kenohan	56.375.000,00	(ECAMATAN KENOHAN
	7	01 01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Kenohan	165.000.000,00	(ECAMATAN KENOHAN
411	7 (01 02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP Tingkat Aksesibiltas Wilayah Kecamatan	100 Persen 88,46 Persen	6.720.506.000,00					- 3.203.756.600,00	KECAMATAN KENOHAN
	7	01 02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	3 laporan	400.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat Kenohan	- 440.000.000,00	(ECAMATAN KENOHAN
	7	01 02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat Kenohan	165.000.000,00	(ECAMATAN KENOHAN

	7	01 02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	250.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Aparatur dan Masyarakat Kenohan	275.000.000,0	0 KECAMATAN KENOHAN
	7	24 22	200				21,000	100.000.000,00		penyeludupan.	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Acceptant	440,000,000	0 KECAMATAN KENOHAN
			2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	3 Laporan			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat Kenohan		
	7	01 02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat Kenohan		D KECAMATAN KENOHAN
	7	01 02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	15 Laporan	6.220.506.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kenohan dan Apartur	- 2.653.756.600,0	0 KECAMATAN KENOHAN
	7	01 02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	1.012.506.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kenohan dan Apartur	1.113.756.600,0	0 KECAMATAN KENOHAN
	7	01 02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7 Laporan	5.208.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kenohan dan Apartur	1.540.000.000,0	0 KECAMATAN KENOHAN
412	7	01 03	1		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100 Persen	436.000.000,00					- 617.100.000,0	0 KECAMATAN KENOHAN
	7	01 03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	11 Kali	100.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat Kenohan	- 192.500.000,00	KECAMATAN KENOHAN



7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	yang Berpartisipasi dalam Forum	9 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat Kenohan	137.500.000,00	KECAMATAN KENOHAN
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat Kenohan	55.000.000,00	KECAMATAN KENOHAN
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan - Tingkat Kecamatan	35 Lembaga Kemasyarakat	336.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat Kenohan	- 424.600.000,00	KECAMATAN KENOHAN
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	35 Lembaga Kemasyarakatan	336.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat Kenohan	424.600.000,00	KECAMATAN KENOHAN
413 7					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	80 Persen	175.000.000,00						KECAMATAN KENOHAN
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	175.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat Kenohan	- 247.500.000,00	KECAMATAN KENOHAN
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat Kenohan	55.000.000,00	KECAMATAN KENOHAN

	7 0:	01 04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Aparatur dan Masyarakat Kenohan	192.500.000,00	KECAMATAN KENOHAN
414	7 0:	01 05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18 Persen	195.000.000,00			Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		242.000.000,00	KECAMATAN KENOHAN
	7 0:	01 05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	70 Orang	195.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat Kenohan	242.000.000,00	KECAMATAN KENOHAN
	7 0:	01 05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	70 Orang	180.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat Kenohan		KECAMATAN KENOHAN
	7 0:	01 05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat Kenohan	44.000.000,00	KECAMATAN KENOHAN
415	7 0:	01 06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Jumlah Kegiatan - Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	85 Persen	75.000.000,00					82.500.000,00	KECAMATAN KENOHAN
	7 0:	01 06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan - Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Laporan	75.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Desa Kecamatan Kenohan	82.500.000,00	KECAMATAN KENOHAN
	7 0:	01 06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Desa Kecamatan Kenohan	82.500.000,00	KECAMATAN KENOHAN
					Kecamatan Kembang Janggut	<u> </u>		13.729.808.302,00	•	•			13.996.254.107,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7				UNSUR KEWILAYAHAN			13.729.808.302,00					13.996.254.107,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
-	7 0:		 		KECAMATAN			13.729.808.302,00	1	1	1	1		KECAMATAN KEMBANG



416	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	76 Nilai	6.472.314.302,00					-	8.433.010.707,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7	01	01	2.01		KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah2	-	2 Dokumen	320.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahran, keseharan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Kantor Camat Kembang Janggut	499.840.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		15 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM),	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Kembang Janggut	77.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7	01	01	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		24 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Kembang Janggut	92.840.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		100 Data	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Kembang Janggut	330.000.000,000	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		25 Laporan	4.614.534.833,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Kantor Camat Kembang Janggut	6.093.113.291,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

7	01	01 2.02	2 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	4.439.534.833,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Kembang Janggut	5.900.613.291,00	D KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
7	01	01 2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Kembang Janggut	27.500.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
7	01	01 2.02	9 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	150,000,000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Kembang Janggut	165.000,000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
7	01	01 2.03		Administrasi Barang Miliik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	4 Laporan	128.600.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Kantor Camat Kembang Janggut	- 141.460.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
7	01	01 2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Kembang Janggut	27.500.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT



7 0:	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		14 Laporan	53.600.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Kembang Janggut		KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
7 0:	01 01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	-	8 Layanan	362.500.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Kantor Camat Kembang Janggut	-	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
7 0:	01 01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	5.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Kembang Janggut		KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
7 0:	01 01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Kembang Janggut		KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
7 0:	01 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	130.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Kembang Janggut		KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
7 0:	01 01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	7.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Kembang Janggut		KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

7	01	01 2.0	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Kembang Janggut	22.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
7	01	01 2.0	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	130.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Kembang Janggut	275.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
7	01	01 2.0	06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Kembang Janggut	49.500.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
7	01	01 2.0	17	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 Unit	60.000.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Kantor Camat Kembang Janggut	- 110.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
7	01	01 2.0	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Kembang Janggut	110.000,000,000	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
7	01	01 2.0	18	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	383.800.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Kantor Camat Kembang Janggut	- 422.180.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

7	01	01 2	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	2.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan percan perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Kembang Janggut		2.750.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
7	01	01 2	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	381.300.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Kembang Janggut		419.430.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
7	01	01 2	2.09		Pemeliharaan Barang Miliik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara	-	3 Unit	602.879.469,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Kantor Camat Kembang Janggut	-	663.167.416,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
7	01	01 2	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		10 Unit	51.250.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Kembang Janggut		56.375.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
7	01	01 3	2.09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		3 Unit	171.629.469,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, sert penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Kembang Janggut		188.792.416.00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
7	01	01 2	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		11 Unit	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Kembang Janggut		33.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT



	7 0	01 01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Kembang Janggut	165.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7 0	01 01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Kembang Janggut	220.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
417	7 0	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan - dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	6.326.494.000,00					- 4.407.143.400,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7 0	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	3 Kegiatan	400.000,000		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan perampuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Masyarakat Di Kecamatan Kembang Janggut	- 440.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7 0	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Di Kecamatan Kembang Janggut	165.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7 0	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Di Kecamatan Kembang Janggut	275,000,000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

	7	01 02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi		1 SPM	100.000.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Masyarakat Di Kecamatan Kembang Janggut		KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7	01 02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2 Laporan	100.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Di Kecamatan Kembang Janggut		KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7	01 02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat		2 Kegiatan	5.826.494.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Masyarakat Di Kecamatan Kembang Janggut	-	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7	01 02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		15 Laporan	826.494.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Di Kecamatan Kembang Janggut		KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7	01 02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		1 Laporan	5.000.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Di Kecamatan Kembang Janggut		KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
418	7	01 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	-	100 Persen	436.000.000,00					-	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7	01 03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa		12 Kali	100.000.000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Di Kecamatan Kembang Janggut	-	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT



7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	yang Berpartisipasi dalam Forum	50 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan castir.	Masyarakat Di Kecamatan Kembang Janggut	55.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Di Kecamatan Kembang Janggut	55.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5 Kegiatan	336.000.000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Di Kecamatan Kembang Janggut	- 424.600.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	336.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Di Kecamatan Kembang Janggut	424.600.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
419 7					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal, serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	75 Persen	175.000.000,00						KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
7	01	. 04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Kegiatan	175.000.000,00		Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Di Kecamatan Kembang Janggut	247.500.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tehrara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh i deologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Di Kecamatan Kembang Janggut	55.000.000,00	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

	7	01 04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	125.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Masyarakat Di Kecamatan Kembang Janggut	192.500.000,0	0 KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
											Pemerintahan dan Pelayanan			
420	_	04 05			DDGCD ANA DENIVELENCE A DA ANI	Column Brown I construction	00.0	405 000 000 00			Publik		225 500 000 6	NECABATAN WEARANG
420	<u>'</u>	01 05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	80 Persen	195.000.000,00					- 236.500.000,0	0 KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7	01 05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	2 Kegiatan	195.000.000,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Masyarakat Di Kecamatan Kembang Janggut	- 236.500.000,f	0 KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7	01 05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	75 Orang	180.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 27), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Di Kecamatan Kembang Janggut	220.000.000,6	0 KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7	01 05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Di Kecamatan Kembang Janggut	16.500.000,	00 KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
421	7 (01 06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik	80 Persen	125.000.000,00					- 137.500.000	,00 KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7	01 06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	11 Desa	125.000.000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Seluruh Desa Yang Ada Diwilayah Kecamatan	- 137.500.000	.00 KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
	7	01 06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Seluruh Desa Yang Ada Diwilayah Kecamatan	55.000.000,	00 KECAMATAN KEMBANG JANGGUT



7	01	06 2	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi		12 Laporan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASII (DBH)	Membangun dari desa dan	7. Peningkatan tata kelola	Seluruh Desa Yang Ada	82.500.000,00	KECAMATAN KEMBANG
1 1	0.1		2.01	0017	Wilayahnya	Pendampingan Desa di Wilayahnya		zz coporon	Kembang Janggut,	Britist Brigins (BBri)		pemerintahan daerah yang	Diwilayah Kecamatan	02.300.000,00	JANGGUT
i l					wiiayannya	Pendampingan Desa di Wilayannya					dari bawah untuk		Diwilayan Kecamatan		JANGGUT
i l									Semua Kel/Desa		pertumbuhan ekonomi,	profesional dan akuntabel			
i l											pemerataan ekonomi dan	untuk mendukung			
i l											pemberantasan kemiskinan.	transformasi pelayanan			
1												publik			
i l												Penataan dan			
i l															
i l												Pengembangan Tata Kelola			
i l												Pemerintahan dan Pelayanan			
i l												Publik			
	+ +		-		Kecamatan Tabang	l	<u> </u>		9.597.163.533,00	1	1		l	7.913.695.160.00	KECAMATAN TABANG
7	+	+	-+	_	UNSUR KEWILAYAHAN				9.597.163.533,00						KECAMATAN TABANG
- 	- 01	-			KECAMATAN				9.597.163.533,00						KECAMATAN TABANG
	01														
422 7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP perangkat daerah -		90 Nilai	7.588.010.533,00				l l-	6.291.645.160,00	KECAMATAN TABANG
i l					PEMERINTAHAN DAERAH	undefined		undefined							
i l					KABUPATEN/KOTA			undefined							
	01	01 2	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Rencana, -	- +	100 Dokumen	320.000.000,00			7. Peningkatan tata kelola	 	F10 9F0 000 00	KECAMATAN TABANG
i 1'	01	01 2	2.01					100 Dokumen	320.000.000,00		-		T	510.650.000,00	RECAIVIATAIN TABAING
i l					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Anggaran, Evaluasi Kinerja						pemerintahan daerah yang			
1						Perangkat Daerah						profesional dan akuntabel			
i l												untuk mendukung			
ı I]						transformasi pelayanan	l l		1
ı I]						publik	l l		1
ı l							1								
ı l							1					5. Penguatan Daya Saing			
1												Ekonomi Daerah yang			
i l												Unggul, Bernilai tambah dan			
i l												Berkelanjutan			
7	+	 .										•	-		
i '	01	01 4	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan		3 Dokumen	40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola	l- I	111.000.000,00	KECAMATAN TABANG
i l					Perangkat Daerah	Perangkat Daerah			Tabang, Muara			pemerintahan daerah yang			
i l									Pedohon			profesional dan akuntabel			
i l												untuk mendukung			
i l															
1												transformasi pelayanan			
i l												publik			
i l												Penguatan Daya Saing			
1												Ekonomi Daerah yang			
1												Unggul, Bernilai tambah dan			
i l												Berkelanjutan			
$\vdash \vdash$	_	-										· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
1 7	01	01 2	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja		2 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	=	7. Peningkatan tata kelola	l-	55.500.000,00	KECAMATAN TABANG
i l					Laporan Capaian Kinerja dan	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Tabang, Muara			pemerintahan daerah yang			
i l					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi			Pedohon			profesional dan akuntabel			
i l						Penyusunan Laporan Capaian						untuk mendukung			
i l															
i l						Kinerja dan Ikhtisar Realisasi						transformasi pelayanan			
1						Kinerja SKPD						publik			
ı I]						Penguatan Daya Saing	l l		1
ı I]						Ekonomi Daerah yang	l l		1
ı I		1 1					1				1	Unggul, Bernilai tambah dan			
ı l		1]						Berkelanjutan	1		
$\vdash \vdash$	4	\vdash				ļ		_			1		ļ		<u> </u>
7	01	01 2	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja		2 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola	- 	66.600.000,00	KECAMATAN TABANG
ı I		1				Perangkat Daerah			Tabang, Semua		1	pemerintahan daerah yang			
ı I		1							Kel/Desa		1	profesional dan akuntabel			
ı I]			-,			untuk mendukung	l l		1
ı I		1					1				1	transformasi pelayanan			
ı I]							l l		1
ı l							1					publik			
ı I]						Penguatan Daya Saing	l l		1
ı l							1					Ekonomi Daerah yang			
ı I]						Unggul, Bernilai tambah dan	l l		1
ı I]						Berkelanjutan	l l		1
\leftarrow	+					 					 		ļ		
7	01	01 2	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data	Jumlah Data Statistik Sektoral		2 Data	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola	- 	277.750.000,00	KECAMATAN TABANG
ı I					Statistik Sektoral Daerah	Daerah yang Telah Dikumpulkan			Tabang, Semua			pemerintahan daerah yang	l l		1
ı I		1				dan Diperiksa Lingkup Perangkat	1		Kel/Desa		1	profesional dan akuntabel			
ı l						Daerah	1		1,			untuk mendukung			
ı I						Dacian							l l		1
	1]						transformasi pelayanan	l l		1
1			1				1				1	publik			
!															
												Penguatan Daya Saing			
												Ekonomi Daerah yang			



7														
1 '	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Laporan Administrasi -		1 Laporan	6.588.247.533,00		- 7. Peningkatan tata kelola		5.034.069.280,00	KECAMATAN TABANG
					Daerah	Keuangan Perangkat Daerah Yang					pemerintahan daerah yang			
						Akuntabel					profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											5. Penguatan Daya Saing			
											Ekonomi Daerah yang			
											Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
						 								
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			43 Orang/bulan	6.462.887.533,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	4.906.509.280,00	KECAMATAN TABANG
						dan Tunjangan ASN			Tabang, Muara		pemerintahan daerah yang			
									Pedohon		profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											Penguatan Daya Saing			
											Ekonomi Daerah yang			
											Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	 	1 Laporan	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DRH)	- 7. Peningkatan tata kelola	_	22 200 000 00	KECAMATAN TABANG
- 1 ′	01	31	2.02	5505	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tahun SKPD dan Laporan Hasil		2 caporati	Tabang, Semua	(DDII)	pemerintahan daerah yang		22.200.000,00	ATT TO A TABANO
				1	SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan			Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
- 1			l	l	SNI D	Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	Neil Desa		untuk mendukung]	1	
				1		Reudingan Aknir Tanun SKPD]		
				1							transformasi pelayanan			
				1							publik			
											5. Penguatan Daya Saing			
											Ekonomi Daerah yang			
											Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/		3 Laporan	105.360.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	105.360.000,00	KECAMATAN TABANG
					Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan			Tabang, Muara		pemerintahan daerah yang			
					Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan			Pedohon		profesional dan akuntabel			
						Laporan Keuangan					untuk mendukung			
						Bulanan/Triwulanan/Semesteran					transformasi pelayanan			
						SKPD					publik			
						SKI D								
											5. Penguatan Daya Saing			
											Ekonomi Daerah yang			
1											Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan			
											Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah -		100 Kali	70.200.000,00		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola		122.372.000,00	KECAMATAN TABANG
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah -		100 Kali	70.200.000,00		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang		122.372.000,00	KECAMATAN TABANG
7	01	01	2.03			Jumlah Barang Milik Daerah -		100 Kali	70.200.000,00		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tat kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		122.372.000,00	KECAMATAN TABANG
7	01	01	2.03			Jumlah Barang Milik Daerah -		100 Kali	70.200.000,00		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang		122.372.000,00	KECAMATAN TABANG
7	01	01	2.03			Jumlah Barang Milik Daerah -		100 Kali	70.200.000,00		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tat kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		122.372.000,00	KECAMATAN TABANG
7	01	01	2.03			Jumlah Barang Milik Daerah -		100 Kali	70.200.000,00		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	122.372.000,00	KECAMATAN TABANG
7	01	01	2.03			Jumlah Barang Milik Daerah -		100 Kali	70.200.000,00		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	122.372.000,00	KECAMATAN TABANG
7	01	01	2.03			Jumlah Barang Milik Daerah -		100 Kali	70.200.000,00		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing	-	122.372.000,00	KECAMATAN TABANG
7	01	01	2.03			Jumlah Barang Milik Daerah -		100 Kali	70.200.000,00		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang		122.372.000,00	KECAMATAN TABANG
7	01	01	2.03			Jumlah Barang Milik Daerah -		100 Kali	70.200.000,00		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing		122.372.000,00	Kecamatan Tabang
				0001	pada Perangkat Daerah					DANA BAGI HASH (PPOH	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	-		
		01		0001	pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang		100 Kali 1 Dokumen	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola			KECAMATAN TABANG
				0001	pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang			
				0001	pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang			15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-		
				0001	pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang			15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-		
				0001	pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang			15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-		
				0001	pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang			15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik			
				0001	pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang			15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing	-		
				0001	pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang			15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing	-		
				0001	pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang			15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan	-		
				0001	pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang			15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing	-		
	01	01	2.03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kel/Desa		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	-	27.800.000,00	
	01		2.03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kel/Desa		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola	-	27.800.000,00	KECAMATAN TABANG
	01	01	2.03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kel/Desa 20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	27.800.000,00	KECAMATAN TABANG
	01	01	2.03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kel/Desa		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan		27.800.000,00	KECAMATAN TABANG
	01	01	2.03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kel/Desa 20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	27.800.000,00	KECAMATAN TABANG
	01	01	2.03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kel/Desa 20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	27.800.000,00	KECAMATAN TABANG
	01	01	2.03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kel/Desa 20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	27.800.000,00	KECAMATAN TABANG
	01	01	2.03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kel/Desa 20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	27.800.000,00	KECAMATAN TABANG
	01	01	2.03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kel/Desa 20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 8. Penguatan Daya Saing transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang	-	27.800.000,00	KECAMATAN TABANG
	01	01	2.03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kel/Desa 20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing	-	27.800.000,00	KECAMATAN TABANG

7														
	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan		2 Laporan	35.200.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola		39.072.000,00 KE	ECAMATAN TABANG
					Laporan Barang Milik Daerah pada	Penyusunan Laporan Barang Milik			Tabang, Muara		pemerintahan daerah yang			
					SKPD	Daerah pada SKPD			Pedohon		profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											5. Penguatan Daya Saing			
											Ekonomi Daerah yang			
											Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Layanan Administrasi		100 Layanan	296.813.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	+	3E1 022 000 00 VE	ECAMATAN TABANG
'	01	01	2.00		Daerah		·	100 Layanan	250.813.000,00			-	231.933.880,00 Ki	ECAIVIATAN TABANG
					Daeran	Umum Perangkat Daerah					pemerintahan daerah yang			
											profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											5. Penguatan Daya Saing			
											Ekonomi Daerah yang			
											Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi		2 Paket	5.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola		5.000.000,00 KE	ECAMATAN TABANG
	1	1 1		1		Listrik/Penerangan Bangunan			Tabang, Muara		pemerintahan daerah yang			
1	1			1	Listrik/Penerangan Bangunan	Kantor yang Disediakan	1	1	Pedohon		profesional dan akuntabel	[1	
1	1	1 1		1	Kantor	1 1		1			untuk mendukung			
1	1			1	Karicol		1	1	1			[1	
	1			1							transformasi pelayanan	1	l	
	1	1 1		1							publik			
	1	1 1		1							5. Penguatan Daya Saing			
											Ekonomi Daerah yang			
											Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
-	- 04	- 04	2.00	0000	Daniel d'ann Daniel de la des	to a lab Baland Baralana da a		2.0-1	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANIA DA CILIACII (DDIII)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	35 430 000 00 1/5	ECAMATAN TABANG
/	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan		2 Paket		DANA BAGI HASIL (DBH)			25.120.880,00 KE	ECAMATAN TABANG
					Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang			Tabang, Muara		pemerintahan daerah yang			
						Disediakan			Pedohon		profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											5. Penguatan Daya Saing			
											Ekonomi Daerah yang			
											Ekonomi Daerah yang			
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	lumlah Paket Rahan Lopistik Kantor		2 Paket	71.813.000.00 Kab. Kutai Kartanegara.	DANA BAGI HASII (DBH)	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan		21.813.000.00 KF	FCAMATAN TABANG
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor		2 Paket	71.813.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Ekonomi Daerah yang Unggul, Berrilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola		21.813.000,00 KE	ECAMATAN TABANG
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	Tabang, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang		21.813.000,00 KE	ECAMATAN TABANG
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2 Paket		DANA BAGI HASIL (DBH)	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		21.813.000,00 KE	ECAMATAN TABANG
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2 Paket	Tabang, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		21.813.000,00 KE	ECAMATAN TABANG
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2 Paket	Tabang, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		21.813.000,00 KE	ECAMATAN TABANG
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2 Paket	Tabang, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		21.813.000,00 KE	ECAMATAN TABANG
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2 Paket	Tabang, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		21.813.000,00 KE	ECAMATAN TABANG
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2 Paket	Tabang, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing		21.813.000,00 KE	ECAMATAN TABANG
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2 Paket	Tabang, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang		21.813.000,00 KE	ECAMATAN TABANG
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2 Paket	Tabang, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan		21.813.000,00 KE	ECAMATAN TABANG
						yang Disediakan			Tabang, Muara Pedohon		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
		01			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan		2 Paket 2 Paket	Tabang, Muara Pedohon 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola			ECAMATAN TABANG
						yang Disediakan			Tabang, Muara Pedohon		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan			
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan			Tabang, Muara Pedohon 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola			
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Tabang, Muara Pedohon 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Tabang, Muara Pedohon 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang ungul, Bernilai tambah dan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung			
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Tabang, Muara Pedohon 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan			
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Tabang, Muara Pedohon 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik			
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Tabang, Muara Pedohon 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing			
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Tabang, Muara Pedohon 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang			
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Tabang, Muara Pedohon 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang			
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Tabang, Muara Pedohon 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara		Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2 Laporan	Tabang, Muara Pedohon 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Pedohon	DANA BAGI HASIL (DBH)	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan		150.000.000,00 KE	ECAMATAN TABANG
7	01		2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan			Tabang, Muara Pedohon 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Pedohon 20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola		150.000.000,00 KE	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2 Laporan	Tabang, Muara Pedohon 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Pedohon 20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang		150.000.000,00 KE	ECAMATAN TABANG
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan		2 Laporan	Tabang, Muara Pedohon 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Pedohon 20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		150.000.000,00 KE	ECAMATAN TABANG
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan		2 Laporan	Tabang, Muara Pedohon 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Pedohon 20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang		150.000.000,00 KE	ECAMATAN TABANG
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan		2 Laporan	Tabang, Muara Pedohon 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Pedohon 20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		150.000.000,00 KE	ECAMATAN TABANG
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan		2 Laporan	Tabang, Muara Pedohon 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Pedohon 20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan daerah yang unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 1. Peningkatan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		150.000.000,00 KE	ECAMATAN TABANG
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan		2 Laporan	Tabang, Muara Pedohon 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Pedohon 20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		150.000.000,00 KE	ECAMATAN TABANG
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan		2 Laporan	Tabang, Muara Pedohon 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Pedohon 20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		150.000.000,00 KE	ECAMATAN TABANG
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan		2 Laporan	Tabang, Muara Pedohon 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Pedohon 20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang		150.000.000,00 KE	ECAMATAN TABANG
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan		2 Laporan	Tabang, Muara Pedohon 150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Pedohon 20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		150.000.000,00 KE	ECAMATAN TABANG

7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Surat Menyurat -		12 Bulan	61.500.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	- 60.0	00.000,00 K	ECAMATAN TABANG
											profesional dan akuntabel				
											untuk mendukung				
											transformasi pelayanan				
											publik 5. Penguatan Daya Saing				
											S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang				
											Unggul, Bernilai tambah dan				
											Berkelanjutan				
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		2 Laporan	61.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DRH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	60.0	00 000 00 K	CAMATAN TABANG
	0.	01	2.00	2002	Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan		L Luporum	Tabang, Muara	DATE (DDIT)	pemerintahan daerah yang		00.0	30.000,00	
						Listrik yang Disediakan			Pedohon		profesional dan akuntabel				
											untuk mendukung				
											transformasi pelayanan				
											publik				
											5. Penguatan Daya Saing				
											Ekonomi Daerah yang				
											Unggul, Bernilai tambah dan				
-		1									Berkelanjutan				
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah			100 Unit	251.250.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	-	- 312.4	20.000,00 K	ECAMATAN TABANG
	1				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas atau Kendaraan Dinas		1			pemerintahan daerah yang				
					Daeran	Jabatan Yang Mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan					profesional dan akuntabel untuk mendukung				
						dan Pajak					transformasi pelayanan				
						uan rajak					publik				
											5. Penguatan Daya Saing				
											Ekonomi Daerah yang				
											Unggul, Bernilai tambah dan				
											Berkelanjutan				
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan		2 Unit	51.250.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	112.4	20.000,00 K	CAMATAN TABANG
					Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Dinas atau Kendaraan Dinas			Tabang, Muara		pemerintahan daerah yang				
					Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jabatan yang Dipelihara dan			Pedohon		profesional dan akuntabel				
					Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya					untuk mendukung				
											transformasi pelayanan				
											publik				
											5. Penguatan Daya Saing				
											Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan				
											Berkelaniutan				
7	01	01	2.00	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas		2 Unit	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola		200.0	00 000 00 K	CAMATAN TABANG
'	01	01	2.03	0002	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Operasional atau Lapangan yang		2 Offic	Tabang, Muara	DANA BAGITIASIE (DBIT)	pemerintahan daerah yang		200.0	JO.000,00 IK	CAMATAN TABANG
					Perizinan Kendaraan Dinas	Dipelihara dan dibayarkan Pajak			Pedohon		profesional dan akuntabel				
					Operasional atau Lapangan	dan Perizinannya					untuk mendukung				
					.,	,					transformasi pelayanan				
											publik				
											5. Penguatan Daya Saing				
											Ekonomi Daerah yang				
											Unggul, Bernilai tambah dan				
											Berkelanjutan				
423 7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Pelayanan Perijinan -		82 Persen	1.179.153.000,00				- 550.0	00.000,00 K	ECAMATAN TABANG
	1				PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	dan Non Perijinan yang di		89.5 Persen							
	1				PUBLIK	laksanakan sesuai SOP		1							
	1	1)				Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan		1							
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Di -	+	2 Kegiatan	350.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	Kantor Kecamatan	- 350.0	00.000.00 K	ECAMATAN TABANG
1 1	"				Kegiatan	Tingkat Kecamatan Yang		_ // // // // // // // // // // // // //	330,000,000,000		pemerintahan daerah yang	Tabang	350.0		
	1	1)				Melibatkan Perangkat Daerah dan		1			profesional dan akuntabel				
	1		l		Pemerintahan di Tingkat	Instansi Vertikal Terkait Yang					untuk mendukung				
	1				Kecamatan	Dilaksanakan Secara Efektif		1			transformasi pelayanan				
	1		l								publik				
	1		l								1. Penataan dan				
	1	1)						1			Pengembangan Tata Kelola				
	1	1 1						1			Pemerintahan dan Pelayana	1			
											Publik				
					-	·									

7 01 0:												
	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi		2 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DRH)	- 7. Peningkatan tata kelola	Kantor Kecamatan	100.000.000,00 KE	FCAMATAN TARANG
	,2 2.01	. 0001	dan Pelaksanaan Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		2 Euporum	Tabang, Semua	DANA BAGITIASIE (DDIT)	pemerintahan daerah yang	Tabang	100.000.000,00	ECAMATAN TABANG
				Kegiatan Pemerintahan dengan			Kel/Desa		pernermanan daeran yang profesional dan akuntabel	Tabang		
			Pemerintahan dengan Perangkat				Kei/Desa					
			Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perangkat Daerah dan Instansi					untuk mendukung			
				Vertikal Terkait					transformasi pelayanan			
									publik			
									1. Penataan dan			
									Pengembangan Tata Kelola			
									Pemerintahan dan Pelayanan			
									Publik			
7 01 02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah Dokumen Peningkatan		1 Dokumen	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BACILIACII (DDIII)	- 7. Peningkatan tata kelola	Kantor Kecamatan	250.000.000,00 KE	CCANAATANI TADANC
/ 01 02	2.01	. 0002	Pemerintahan di Tingkat	Efektifitas Kegiatan Pemerintahan		1 DOKUITIETI	Tabang, Semua	DANA BAGITIASIL (DBIT)	pemerintahan daerah yang		230.000.000,00	LCAIVIATAIN TABAING
										Tabang		
			Kecamatan	di Tingkat Kecamatan			Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
									untuk mendukung			
									transformasi pelayanan			
									publik			
									5. Penguatan Daya Saing			
									Ekonomi Daerah yang			
									Unggul, Bernilai tambah dan			
									Berkelanjutan			
7 04 0	2 2 22	+	B	Local de Character De Lacrosco Matteland		02 5	20 200 200 20			V	400 000 000 00	ECAMATAN TABANG
7 01 02	2.02	·	Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal	<u></u>	92 Fasilitasi	80.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	Kantor Kecamatan -	100.000.000,00 KE	ECAIVIATAN TABANG
	- 1		Pemerintahan yang Tidak	(SPM) Yang Difasilitasi					pemerintahan daerah yang	Tabang		
	- 1		Dilaksanakan oleh Unit Kerja						profesional dan akuntabel			
	- 1		Perangkat Daerah yang Ada di						untuk mendukung			
	1		Kecamatan		. 1				transformasi pelayanan			
	1				. 1				publik			
	1				. 1				5. Penguatan Daya Saing			
	1				. 1				Ekonomi Daerah yang			
									Unggul, Bernilai tambah dan			
									Berkelanjutan			
7 01 02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Jumlah Laporan Peningkatan		2 Laporan	80.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	Kantor Kecamatan	100.000.000,00 KE	ECAMATAN TABANG
			Pelayanan kepada Masyarakat di	Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan			Tabang, Semua		pemerintahan daerah yang	Tabang		
			Wilayah Kecamatan	kepada Masyarakat di Wilayah			Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Kecamatan					untuk mendukung			
				Recuiridan					transformasi pelayanan			
									nublik			
									paom			
									5. Penguatan Daya Saing			
									Ekonomi Daerah yang			
									Unggul, Bernilai tambah dan			
									Berkelanjutan			
7 01 02	2.04	ı	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Pelaksanan Kegiatan -	-	92 Kegiatan	749.153.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola		100.000.000,00 KE	ECAMATAN TABANG
			yang Dilimpahkan kepada Camat	Pemerintahan Yang Menjadi			·		pemerintahan daerah yang			
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Kewenangan Camat					profesional dan akuntabel			
				newenangan camac					untuk mendukung			
									transformasi pelayanan			
									publik			
									5. Penguatan Daya Saing			
									Ekonomi Daerah yang			
	- 1				. 1		1		Unggul, Bernilai tambah dan			
	- 1								Berkelanjutan			
7 01 02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan		3 Laporan	749.153.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DRH)	- 7. Peningkatan tata kelola	I- 1	100.000.000,00 KE	ECAMATAN TABANG
1 1 - 1 - 1	1		yang terkait dengan Nonperizinan	Nonperizinan pada Urusan		,	Tabang, Muara	(1)	pemerintahan daerah yang			
	1		, and a serial recorded the serial se	Pemerintahan			Pedohon		profesional dan akuntabel			
	- 1			remembanan			Pedonon					
	- 1				. 1		1		untuk mendukung			
	- 1								transformasi pelayanan			
	1								publik			
1 1 1	- 1				. 1		1		5. Penguatan Daya Saing			
	- 1								Ekonomi Daerah yang			
	1								Unggul, Bernilai tambah dan			
	1				. 1				Berkelanjutan			
	13	+	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Lembaga -		100 Persen	436.000.000,00		1 ,	t	E22 000 000 00	ECAMATAN TABANG
4 7 01 03	<i>1</i> 3		MASYARAKAT DESA DAN	Pemberdayaan Masyarakat	.*	100 Persen	450.000.000,00			[555.900.000,00 KE	ECAIVIATAN TADANG
24 7 01 03					. 1							
4 7 01 03				Desa/Kelurahan yang Aktif					1	ļ		
			KELURAHAN			92 Kali	100.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	19 Desa Wilayah -	105.500.000,00 KE	ECAMATAN TABANG
7 01 03	03 2.01	L	Koordinasi Kegiatan	Jumlah Koordinasi Yang -		1	l l		pemerintahan daerah yang	Kecamatan Tabang		
	03 2.01	ı		Jumlah Koordinasi Yang Dilaksanakan Desa/ Kelurahan								
	03 2.01	ı	Koordinasi Kegiatan						profesional dan akuntabel			
	03 2.01	L	Koordinasi Kegiatan						profesional dan akuntabel untuk mendukung			
	03 2.01	L	Koordinasi Kegiatan						untuk mendukung			
	03 2.01	1	Koordinasi Kegiatan						untuk mendukung transformasi pelayanan			
	03 2.01	ļ	Koordinasi Kegiatan						untuk mendukung transformasi pelayanan publik			
	03 2.01	1	Koordinasi Kegiatan						untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing			
	03 2.01	1	Koordinasi Kegiatan						untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang			
	03 2.01	l l	Koordinasi Kegiatan						untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing			

7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	yang Berpartisipasi dalam Forum	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Tabang, Muara Pedohon	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelaniutan	19 Desa Wilayah Kecamatan Tabang	50.000.000,00	KECAMATAN TABANG
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Tabang, Muara Pedohon	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	19 Desa Wilayah Kecamatan Tabang	55.500.000,00	KECAMATAN TABANG
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan - Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	336.000.000,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik F. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	19 Desa Wilayah Kecamatan Tabang	428.400.000,00	KECAMATAN TABANG
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	336.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Tabang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik F. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelaniutah	19 Desa Wilayah Kecamatan Tabang	428.400.000,00	KECAMATAN TABANG
425 7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 Persen	175.000.000,00			-		KECAMATAN TABANG
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Ketentraman - dan Ketertiban Umum	92 Persen	175.000.000,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik F. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan		244.250.000,00	KECAMATAN TABANG
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Tabang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik S. Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	-	50.000.000,00	KECAMATAN TABANG

7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	2 Lac	poran	125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	_	194.250,000,00	KECAMATAN TABANG
					Tokoh Agama dan Tokoh	Harmonisasi Hubungan dengan		,	Tabang, Semua		pemerintahan daerah yang			
					Masyarakat	Tokoh Agama dan Tokoh			Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
					iviasyai akat	Masyarakat			Kely Desa		untuk mendukung			
						iviasyai akat								
											transformasi pelayanan			
		1 1						J			publik			
											5. Penguatan Daya Saing			
											Ekonomi Daerah yang			
											Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
426 7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Cakupan Penyelenggaraan Urusan -	100	Persen	144.000.000,00				- 248.900.000,00	KECAMATAN TABANG
					URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pemerintahan Umum								
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan -	2 Lap	poran	144.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	Kantor Kecamatan	- 248.900.000,00	KECAMATAN TABANG
					Pemerintahan Umum Sesuai	Urusan Pemerintaan Umum					pemerintahan daerah yang	Tabang		
					Penugasan Kepala Daerah						profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											5. Penguatan Daya Saing			
											Ekonomi Daerah yang			
		1 1						J			Unggul, Bernilai tambah dan			
		1)									Berkelanjutan			
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku	Jumlah Orang yang Mengikuti	50 O	rang	129.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DRH)	- 7. Peningkatan tata kelola	Kantor Kecamatan	198 900 000 00	KECAMATAN TABANG
Ι΄	31	~	2.01	0004	dan Intra Suku, Umat Beragama,	Pembinaan Kerukunan Antar Suku		B	Tabang, Muara		pemerintahan daerah yang	Tabang	136.300.000,00	J I ADAING
		1 1			Ras, dan Golongan Lainnya Guna	dan Intra Suku , Umat Beragama,			Pedohon		profesional dan akuntabel	Tabang		
		1 1							Pedonon					
					Mewujudkan Stabilitas Keamanan	Ras, dan Golongan Lainnya Guna					untuk mendukung			
		1 1			Lokal, Regional, dan Nasional	Mewujudkan Stabilitas Keamanan					transformasi pelayanan			
						Lokal, Regional, dan Nasional					publik			
											5. Penguatan Daya Saing			
											Ekonomi Daerah yang			
											Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
7	01	05	2.01	8000	Pelaksanaan Tugas Forum	Jumlah Dokumen Tugas Forum	1 Dol	kumen	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	Kantor Kecamatan	50.000.000,00	KECAMATAN TABANG
					Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Tabang, Muara		pemerintahan daerah yang	Tabang		
									Pedohon		profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											nublik			
											5. Penguatan Daya Saing			
											Ekonomi Daerah yang			
											Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
427 7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN	Persentase Desa Yang Memiliki -	85 Pe	ersen	75.000.000,00				- 45,000,000,00	KECAMATAN TABANG
	01	"			PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Predikat Penyelenggaraan Kinerja		e.se	7510001000300				4515551555,555	neo anna mercano
					DESA	Pemerintahan Desa Dalam								
					2237	Kategori Baik								
7	01	06	2 01		Fasilitasi, Rekomendasi dan	Jumlah Desa Yang Difasilitasi -	19 De	okumen	75.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	-	- 45,000,000,00	KECAMATAN TABANG
'		-			Koordinasi						pemerintahan daerah yang		15.550.000,00	
		1 1						J			profesional dan akuntabel			
		1 1			Dombinson dan Bangawaran			J			untuk mendukung			
		1 1			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1					untuk mendukung transformasi pelayanan			
		1 1			rememutanan pesa	1								
		1 1						J			publik			
		1 1									5. Penguatan Daya Saing			
		1 1				1					Ekonomi Daerah yang			
		1 1				1					Unggul, Bernilai tambah dan			
		لـــــا									Berkelanjutan			
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	1 Lap	ooran	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	45.000.000,00	KECAMATAN TABANG
		1 1			Wilayahnya	Pendampingan Desa di Wilayahnya			Tabang, Muara		pemerintahan daerah yang			
		1)]			Pedohon		profesional dan akuntabel			
		1 1									untuk mendukung			
		1)									transformasi pelayanan			
		1 1									publik			
		1 1				1					5. Penguatan Daya Saing			
		1)									Ekonomi Daerah yang			
		1)									Unggul, Bernilai tambah dan			
											Berkelanjutan			
	1	+	-+		Kecamatan Muara Wis	l l	<u> </u>		14.787.787.259,00		- Jerneurjatur	1	13.091.919.965,00	KECAMATAN MUARA WIS
7					UNSUR KEWILAYAHAN				14.787.787.259,00					KECAMATAN MUARA WIS
7	01				KECAMATAN				14.787.787.259,00					KECAMATAN MUARA WIS
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	70.00	0 Nilai	7.210.585.259,00				- 8.944.717.965.00	KECAMATAN MUARA WIS
	01	01	J				70,00				l l			
	01	01			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		70,00							



7	01	01 2.0	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	320.000.000,00	-	- ASN di Kecamatan - Muara Wis	380.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
7	01	01 2.0	01 00	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN di Kecamatan Muara Wis	30.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
7	01	01 2.0	01 00	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN di Kecamatan Muara Wis	50.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
7	01	01 2.0	01 00	O9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200 Data	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN di Kecamatan Muara Wis	300.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
7	01	01 2.0	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi - Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	14 Laporan	5.332.275.259,00	-	- ASN di Kecamatan - Muara Wis	5.243.127.965,00	KECAMATAN MUARA WIS
7	01	01 2.0	02 00	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	372 Orang/bulan	5.221.635.259,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	DANA BAGI HASIL (DBH) -	- ASN di Kecamatan Muara Wis		KECAMATAN MUARA WIS
7	01	01 2.0	02 00	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis		- ASN di Kecamatan Muara Wis	15.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
7	01	01 2.0	02 00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	95.640.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis		- ASN di Kecamatan Muara Wis	95.640.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
7	01	01 2.0	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik - Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	4 Dokumen	00,000.008.00	-	- ASN di Kecamatan - Muara Wis	74.080.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
7	01	01 2.0	00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis		- ASN di Kecamatan Muara Wis	50.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
7	01	01 2.0	03 00	03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	40.800.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis		- ASN di Kecamatan Muara Wis	20.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
7	01	01 2.0	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang - mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	35 Orang	50.000.000,00		- ASN di Kecamatan - Muara Wis	180.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
7	01	01 2.0	05 00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis		- ASN di Kecamatan Muara Wis		KECAMATAN MUARA WIS
7	01	01 2.0	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum - Perangkat Daerah	11 Jenis	331.000.000,00	-	- ASN di Kecamatan - Muara Wis	981.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
7	01	01 2.0	06 00	O1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis		- ASN di Kecamatan Muara Wis	5.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
7	01	01 2.0	06 00	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis		- ASN di Kecamatan Muara Wis		KECAMATAN MUARA WIS
7	01	01 2.0	06 00	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	130.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis		- ASN di Kecamatan Muara Wis	85.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
7		01 2.0		05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis		- ASN di Kecamatan Muara Wis		KECAMATAN MUARA WIS
7		01 2.0		08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis		- ASN di Kecamatan Muara Wis	·	KECAMATAN MUARA WIS
7		01 2.0		dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	. ,	- ASN di Kecamatan Muara Wis	375.000.000,00	
7	01	01 2.0	06 00	10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis		- ASN di Kecamatan Muara Wis	50.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS



7	01	1 01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 Dokumen	23.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	ASN di Kecamatan Muara Wis	50.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
7	01	1 01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 Bulan	296.510.000,00			ASN di Kecamatan Muara Wis	296.510.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
7	0:	1 01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	5.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	ASN di Kecamatan Muara Wis	5.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
7	0:	1 01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	291.510.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	ASN di Kecamatan Muara Wis	291.510.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
7	01	1 01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		•	64 Unit	790.000.000,00			ASN di Kecamatan Muara Wis	790.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
7	01	1 01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		13 Unit	120.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	ASN di Kecamatan Muara Wis	120.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
7	01	1 01	2.09	0006		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		20 Unit	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	ASN di Kecamatan Muara Wis	20.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
7	01	1 01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit	650.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	DANA BAGI HASIL (DBH)		ASN di Kecamatan Muara Wis	650.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
429 7	01	1 02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang di laksanakan sesuai SOP Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan		100 Persen 78,5 Persen	6.741.202.000,00			-	3.141.202.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
7	01	1 02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif		1 Kegiatan	400.000.000,00		-	-	400.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
7	01	1 02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		2 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	150.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
7	01	1 02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 Dokumen	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	250.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
7	0:	1 02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi		1 SPM	100.000,000		-	-	100.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
7	01	1 02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	100.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat		2 Kegiatan	6.241.202.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Masyarakat di Kecamatan Muara Wis	2.641.202.000,00	KECAMATAN MUARA WIS

	7	01 02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	15 Laporan	841.202.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Masyarakat di Kecamatan Muara Wis	841.202.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
	7	01 02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9 Laporan	5.400.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Masyarakat di Kecamatan Muara Wis	1.800.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
430	7	01 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga - Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	100 Persen	436.000.000,00			-	486.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
	7	01 03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	100.000.000,00		-	Masyarakat di Kecamatan Muara Wis	100.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
	7	01 03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	yang Berpartisipasi dalam Forum	5 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Masyarakat di Kecamatan Muara Wis	50.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
	7	01 03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Masyarakat di Kecamatan Muara Wis	50.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
	7	01 03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan - Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	336.000.000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Muara Wis	386.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
	7	01 03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	336.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Muara Wis	386.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
431	7	01 04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertiksi serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100 Persen	130.000.000,00				225.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
	7	01 04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	130.000.000,00		-		225.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
	7	01 04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	DANA BAGI HASIL (DBH)			50.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS



	7	01 04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	80.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	-	175.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
432	7	01 05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan - Pemerintahan Umum	100 Persen	195.000.000,00			-	220.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
	7	01 05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	2 Kegiatan	195.000.000,00	-	-	Masyarakat di - Kecamatan Muara Wis	220.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
	7	01 05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamana Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60 Orang	180.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	Masyarakat di Kecamatan Muara Wis	180.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
	7	01 05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	Masyarakat di Kecamatan Muara Wis	40.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
433	7	01 06	1		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki - Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Bala	85,7 Persen	75.000.000,00			-	75.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
	7	01 06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi -	7 Desa	75.000.000,00	-	-	Masyarakat di Kecamatan Muara Wis	75.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
	7	01 06	2.01	0017		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7 Laporan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	Masyarakat di Kecamatan Muara Wis	75.000.000,00	KECAMATAN MUARA WIS
					Kecamatan Sanga Sanga			26.824.812.885,00		<u> </u>		26.256.954.781,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7				UNSUR KEWILAYAHAN			26.824.812.885,00				26.256.954.781,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01			KECAMATAN			26.824.812.885,00				26.256.954.781,00	KECAMATAN SANGA SANGA
434	7	01 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	85 Nilai	12.499.716.885,00			-	13.056.858.781,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01 01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen 1 Laporan	340.000.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publisasi pelayanan publisasi	ASN Kantor Kecaatan - Sangasanga	503.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01 01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publis	ASN Kantor Kecaatan Sangasanga	73.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7	01 01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	ASN Kantor Kecaatan Sangasanga	70.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA

7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	ASN Kantor Kecaatan Sangasanga	60.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
7	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data	Jumlah Data Statistik Sektoral	2 Data	250.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DBH)	publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola	ASN Kantor Kecaatan	300,000,000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
					Statistik Sektoral Daerah	Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		Sanga Sanga, Semua Kel/Desa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publa	Sangasanga		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	59 Orang 2 Laporan 12 Laporan	10.657.764.125,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dalan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	ASN Kantor Kecaatan Sangasanga	10.521.568.781,00	KECAMATAN SANGA SANGA
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1190 Orang/bulan	10.265.684.125,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	ASN Kantor Kecaatan Sangasanga	10.129.488.781,00	KECAMATAN SANGA SANGA
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	ASN Kantor Kecaatan Sangasanga	25,000,000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
		01			Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	367.080.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dalan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	ASN Kantor Kecaatan Sangasanga		KECAMATAN SANGA SANGA
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Daerah Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	1 Dokumen 2 Laporan	100.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dalan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	ASN Kantor Kecaatan Sangasanga		KECAMATAN SANGA SANGA
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Miliik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dalan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	ASN Kantor Kecaatan Sangasanga	25.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA



7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	ASN Kantor Kecaatan Sangasanga	75.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
											transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik			
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		6 Laporan	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	ASN Kantor Kecaatan Sangasanga	25.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
											transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik			
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	-	66 Orang 0 Unit	50.000.000,00		Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	350.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah Orang yang Mengikuti		66 Orang	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA PAGI HASII (DDH)	S. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola		350,000,000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	01	. 01	2.05	0011	Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		oo Orang	Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	DAINA BAGI MASIL (UBN)	pemerintahan darah yang pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur		350,000,000,00	RECAIVATAN SANGA SANGA
	01	01	2.06		Administraci I Imum Borangkat	lumlah Arsin Dinamir pada SKRD	-	50 Ignis	297 000 000 00		dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	ASN Kantor Kocaatan	537 000 000 00	KECAMATAN SANGA SANGA
		01			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Barang Cetakan dan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitas Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		50 Jenis 1382 Unit 2 Unit 1 Dokumen 25 Unit 340 Kali 12 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	297.000.000,00	DANA BAGI HASII (PBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	ASM Kantor Kecaatan - Sangasanga		KECAMATAN SANGA SANGA
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	7.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	ASN Kantor Kecaatan Sangasanga	7.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA



7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi	ASN Kantor Kecaatan Sangasanga	100.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi	ASN Kantor Kecaatan Sangasanga	50.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	pelayanan publik 7. Peningikatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi	ASN Kantor Kecaatan Sangasanga	135.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	ASN Kantor Kecaatan Sangasanga	20.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97 Laporan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	ASN Kantor Kecaatan Sangasanga	175.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publis	ASN Kantor Kecaatan Sangasanga	50.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	965.712.760,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	ASN Kantor Kecaatan Sangasanga		KECAMATAN SANGA SANGA
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	ASN Kantor Kecaatan Sangasanga	3.600.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA



7 (01 01	1 2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	317.780.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	ASN Kantor Kecaatan	317.780.000.00	KECAMATAN SANGA SANGA
				Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Sanga Sanga, Semua Kel/Desa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Sangasanga		RECAINATAN SANGA SANGA
					,,,,,				untuk mendukung transformasi pelayanan			
									publik 5. Penguatan infrastruktur			
	04 04	1 2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	421,000	645.432.760,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANIA DACILIACII (DDIII)	dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	ASN Kantor Kecaatan	270,000,000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	01 01	1 2.06	0004	Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Sangasanga	\$70.000.000,00	RECAIVIATAN SANGA SANGA
					- Sectional I		ney see		untuk mendukung transformasi pelayanan			
									publik 5. Penguatan infrastruktur			
									dan penerapan digitalisasi pelayanan publik			
7 0	01 01	1 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Operasional atau Lapangan yang	15 Unit 10 Unit	89.240.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	328.910.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
				Daeran	mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Jumlah Peralatan dan Mesin				profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan			
					Lainnya yang dipelihara				publik 5. Penguatan infrastruktur			
									dan penerapan digitalisasi pelayanan publik			
7 0	01 01	1 2.09	0001	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	7 Unit	60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Sanga Sanga, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	299.670.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
				Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Kel/Desa		profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan			
									publik 5. Penguatan infrastruktur			
									dan penerapan digitalisasi pelayanan publik			
7 0	01 01	1 2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	29.240.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Sanga Sanga, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	29.240.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
							Kel/Desa		profesional dan akuntabel untuk mendukung			
									transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur			
									dan penerapan digitalisasi pelayanan publik			
435 7 0	01 02	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Tingkat Aksebilitas Wilayah Kecamatan	100 persen 100 Persen	9.588.696.000,00				8.318.696.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
				PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP							
7 0	01 02	2 2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah Dokumen Peningkatan - Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	1 Laporan 2 Laporan	450.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Masyarakat Kecamatan	400.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
				Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan				profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	Sangasanga		
				incommutation.	Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi				publik 5. Penguatan infrastruktur			
					Vertikal Terkait				dan penerapan digitalisasi pelayanan publik			
7 0	01 02	2 2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	2 Laporan	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Sanga Sanga, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Masyarakat Kecamatan Sangasanga	100.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
				Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi		Kel/Desa		profesional dan akuntabel untuk mendukung			
					Vertikal Terkait				transformasi pelayanan publik			
									5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik			

7 01	1 02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah Dokumen Peningkatan		1 Dokumen	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat Kecamatan	300.000.000,00 KECAMATAN SANGA S
				Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Efektifitas Kegiatan Pemerintahan			Sanga Sanga, Semua		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Sangasanga	
				kecamatan	di Tingkat Kecamatan			Kel/Desa				
										untuk mendukung		
										transformasi pelayanan		
										publik		
										5. Penguatan infrastruktur		
										dan penerapan digitalisasi		
										pelayanan publik		
7 01	1 02	2.02		Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non		2 Laporan	100.000.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat -	100.000.000,00 KECAMATAN SANGA
				Pemerintahan yang Tidak	Perizinan pada Urusan		,	·		pemerintahan daerah yang	Kecamatan	· I
				Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Pemerintahan					profesional dan akuntabel	Sangasanga	
				Perangkat Daerah yang Ada di						untuk mendukung		
				Kecamatan						transformasi pelayanan		
				Recamatan						publik		
										5. Penguatan infrastruktur		
										dan penerapan digitalisasi		
	_									pelayanan publik		
7 01	1 02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Jumlah Laporan Peningkatan		2 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat Kecamatan	100.000.000,00 KECAMATAN SANGA S
				Pelayanan kepada Masyarakat di	Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	1		Sanga Sanga, Semua		pemerintahan daerah yang	Sangasanga	
				Wilayah Kecamatan	kepada Masyarakat di Wilayah	1		Kel/Desa		profesional dan akuntabel		
					Kecamatan	1				untuk mendukung		
					1	1				transformasi pelayanan		
					1	1				publik		
					1	1				5. Penguatan infrastruktur		
										dan penerapan digitalisasi		
										pelayanan publik		
7 01	1 03	2 2.04	-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan -	+	55 Laopran	9.038.696.000,00		7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat -	7.818.696.000,00 KECAMATAN SANGA
, 01	1 02	2.04						9.038.696.000,00	-		Kecamatan -	7.616.696.000,00 RECAMATAN SANGA
				yang Dilimpahkan kepada Camat	Kewenangan Lain yang		12 Laporan			pemerintahan daerah yang		
					Dilimpahkan					profesional dan akuntabel	Sangasanga	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Non					untuk mendukung		
					Perizinan pada Urusan					transformasi pelayanan		
					Pemerintahan					publik		
										5. Penguatan infrastruktur		
										dan penerapan digitalisasi		
										pelayanan publik		
7 01	1 02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan		14 Laporan	818.696.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat Kecamatan	818.696.000,00 KECAMATAN SANGA S
				yang terkait dengan Nonperizinan	Nonperizinan pada Urusan			Sanga Sanga, Semua		pemerintahan daerah yang	Sangasanga	
				,	Pemerintahan			Kel/Desa		profesional dan akuntabel	g g-	
								110, 2 111		untuk mendukung		
										transformasi pelayanan		
										publik		
										5. Penguatan infrastruktur		
					1	1				dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	1	
					ļ						1	
7 01	1 02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	1	55 Laporan	8.220.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat Kecamatan	7.000.000.000,00 KECAMATAN SANGA S
				yang Terkait dengan Kewenangan	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1		Sanga Sanga, Semua		pemerintahan daerah yang	Sangasanga	
				Lain yang Dilimpahkan	1	1		Kel/Desa		profesional dan akuntabel	1	
					1	1				untuk mendukung		
					1	1				transformasi pelayanan		
					1	1				publik		
1 1					1	1				5. Penguatan infrastruktur	1	
					1	1				dan penerapan digitalisasi		
					1	1				pelayanan publik		
7 01	1 02		1 1	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Lembaga -	+	100 Persen	3.706.400.000,00	 	padjordir padiik	† <u> </u>	3.756.400.000,00 KECAMATAN SANGA
' "	- "	'		MASYARAKAT DESA DAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		100 reiseil	3.700.400.000,00				5.750.400.000,00 RECAIVIATAN SANGA
				MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Desa/Kelurahan yang Aktif	1						
							0	50 000 000 05			 	F0 000 000 00
7 01	1 03	2.01		Koordinasi Kegiatan	Jumlah koordinasi dalam rangka	1	0 Kegiatan	50.000.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola	-	50.000.000,00 KECAMATAN SANGA
				Pemberdayaan Desa	pemberdayaan desa yang	1	2 Laporan			pemerintahan daerah yang	1	
					dilaksanakan.	1				profesional dan akuntabel		
					Jumlah Laporan Peningkatan	1				untuk mendukung		
					Efektivitas Kegiatan	1				transformasi pelayanan		
1 1					Pemberdayaan Masyarakat di	1				publik	1	
					Wilayah Kecamatan	1				5. Penguatan infrastruktur		
					1	1				dan penerapan digitalisasi		
		1	1 1		1				l l		1	1
										pelayanan publik		



-													
/	01 0	3 2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah Laporan Peningkatan		2 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	-	50.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
				Pemberdayaan Masyarakat di	Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan			Sanga Sanga, Semua	, ,	pemerintahan daerah yang		·	
				Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
				Wildydi Recalliatan	Wasyarakat ar Wilayan Kecamatan			nely Desa		untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										5. Penguatan infrastruktur			
										dan penerapan digitalisasi			
										pelayanan publik			
7	01 0	3 2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan -		5 Lembaga	50.000.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola	_	50.000.000.00	KECAMATAN SANGA SANGA
					yang Berpartisipasi dalam Forum		Kemasyarakat			pemerintahan daerah yang			
					Musyawarah Perencanaan		300 Peserta			profesional dan akuntabel			
					Pembangunan di Kelurahan		366 Peserta			untuk mendukung			
					Jumlah Partisipasi Peserta yang		3 Unit			transformasi pelayanan			
					mengikuti Forum Musyawarah					publik			
					Perencanaan Pembangunan di					5. Penguatan infrastruktur			
					Kelurahan					dan penerapan digitalisasi			
					Jumlah Peserta yang mengikuti					pelayanan publik			
					Bimtek dan Pelatihan di					F			
					Desa/Kelurahan								
1					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana								
1					desa dan Kelurahan yang dibangun								
1													
7	01 N	3 2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	-	50.000.000.00	KECAMATAN SANGA SANGA
1		1 ~	1	dalam Forum Musyawarah	yang Berpartisipasi dalam Forum		Kemasyarakatan	Sanga Sanga, Semua		pemerintahan daerah yang			
	l I	1		Perencanaan Pembangunan di	Musyawarah Perencanaan		incinia sy ai ana tail	Kel/Desa	1	profesional dan akuntabel			
	l I	1						Kei/Desa	1				
				Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan					untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										5. Penguatan infrastruktur			
										dan penerapan digitalisasi			
										pelayanan publik			
-	01 0	3 2.03	_	Pemberdayaan Lembaga	Jumlah Honor RT, Jumlah Honor -	- +	161100 Orang	3.606.400.000,00		7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat -	3 656 400 000 00	KECAMATAN SANGA SANGA
'	01 0	3 2.03	'					3.808.400.000,00	-			3.636.400.000,00	RECAIVIATAN SANGA SANGA
				Kemasyarakatan Tingkat	Linmas yang terbayar, Jumlah		207 Lembaga			pemerintahan daerah yang	Kecamatan		
				Kecamatan	Lembaga Ormas yang di fasilitasi,		Kemasyarakat			profesional dan akuntabel	Sangasanga		
					Jumlah Posyandu yang Aktif					untuk mendukung			
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan					transformasi pelayanan			
					yang Diselenggarakan					publik			
										5. Penguatan infrastruktur			
										dan penerapan digitalisasi			
										pelayanan publik			
								0.000.000.000.000				2 575 100 000 00	
7	01 0	3 2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan		207 Lembaga	3.606.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat Kecamatan	3.656.400.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
				Kemasyarakatan	yang Diselenggarakan		Kemasyarakatan	Sanga Sanga, Semua		pemerintahan daerah yang	Sangasanga		
								Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
	l I	1							1	untuk mendukung			
	l I								1	transformasi pelayanan			
	1 1			l	1	1 1		1			1		
1					1			1		publik			
										publik			
										publik 5. Penguatan infrastruktur			
										publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi			
										publik 5. Penguatan infrastruktur			
437 7	01 0	4		PROGRAM KOORDINASI	persentase kegiatan koordinasi -		100 Persen	175.000.000,00		publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi	-	225.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
437 7	01 0	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	persentase kegiatan koordinasi - ketentraman dan ketertiban umum		100 Persen	175.000.000,00		publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi	-	225.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
437 7	01 0	4					100 Persen	175.000.000,00		publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi	-	225.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
437 7	01 0	4		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian		100 Persen	175.000.000,00		publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi	-	225.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANG
437 7	01 0	4		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia,		100 Persen	175.000.000,00		publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi	-	225.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANG
437 7	01 0	4		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan		100 Persen	175.000.000,00		publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi	-	225.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANG
437 7	01 0	4		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh		100 Persen	175.000.000,00		publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi	-	225.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANG/
437 7	01 0	4		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di		100 Persen	175.000.000,00		publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi	-	225.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
437 7	01 0	4		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh		100 Persen	175.000.000,00		publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi	-	225.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANG
				KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan					publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	-		
437 7	01 0			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas -		100 Persen	175.000.000,00 175.000.000,00	-	publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola	- Masyarakat -		
				KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan				-	publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	- Masyarakat - Kecamatan		
				KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas -				-	publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola			
				KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikaj serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasii Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional				-	publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Kecamatan		
				KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di				-	publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	Kecamatan		
				KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikaj serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasii Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional				-	publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	Kecamatan		
				KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di				-	publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Kecamatan		KECAMATAN SANGA SANG/ KECAMATAN SANGA SANG/
				KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di				-	publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur	Kecamatan		
				KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di				-	publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Kecamatan		

	7 (01 04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur	Masyarakat Kecamatan Sangasanga	50.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
	7 (01 04	2.01	0002		Jumlah Laporan Pelaksanaan		2 Laporan	125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	dan penerapan digitalisasi pelayanan publik - 7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat Kecamatan	175.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
					Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Sanga Sanga, Semua Kel/Desa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	Sangasanga		
438	7 (01 05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100 Persen	855.000.000,00				- 900.000.000,00	KECAMATAN SANGA SANGA
		01 05			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Jumat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-	1 Dokumen 1500 Orang	855.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Sangasanga		KECAMATAN SANGA SANGA
	7 (01 05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		1500 Orang	830.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Sangasanga		KECAMATAN SANGA SANGA
	7 (01 05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kelurahan Jawa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Sangasanga		KECAMATAN SANGA SANGA
-	7	_	1		UNSUR KEWILAYAHAN				1.269.520.000,00		1	I		KELURAHAN JAWA
	7 (01	1	1	KECAMATAN				1.269.520.000,00					KELURAHAN JAWA
		01 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	85 Nilai	69.520.000,00				- 110.665.000,00	KELURAHAN JAWA
	7 (01 01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Laporan	14.520.000,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	ASN Kantor Kecaatan Sangasanga		KELURAHAN JAWA
	7 (01 01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Laporan	14.520.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Jawa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	ASN Kantor Kecaatan Sangasanga	14.520.000,00	KELURAHAN JAWA



	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	39 Laporan 1 Paket	55.000.000,00		Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan uublik	ASN Kantor Kecaatan - Sangasanga	96.145.000,00	KELURAHAN JAWA
											5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik			
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Jawa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi	ASN Kantor Kecaatan Sangasanga	49.945.000,00	KELURAHAN JAWA
											pelayanan publik			
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Jawa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi	ASN Kantor Kecaatan Sangasanga	46.200.000,00	KELURAHAN JAWA
440	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Lembaga -	100 Persen	1.200.000.000,00		pelayanan publik	<u> </u>	1.200.000.000,00	KELLIBAHAN IAWA
440						MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif		·				·	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang - Melaksanakan Pemberdayaan	5 Pokmas / Ormas	750.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Masyarakat - Kecamatan	750.000.000,00	KELURAHAN JAWA
							Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit			penienianan udea nyang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	Sangasanga		
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Jawa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dalan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Sangasanga	450.000.000,00	KELURAHAN JAWA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Jawa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik S. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Sangasanga	300.000.000,00	KELURAHAN JAWA
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan - yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakat	450.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	Masyarakat - Kecamatan Sangasanga	450.000.000,00	KELURAHAN JAWA

	7 01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat Kecamatan	450,000,000,00	KELURAHAN JAWA
	.	-			Kemasyarakatan	yang Diselenggarakan	Kemasyarakatan	Sanga Sanga, Jawa		pemerintahan daerah yang	Sangasanga		
					Kemasyarakatan	yang biscienggarakan	Kemasyarakatan	Janga Janga, Jawa		profesional dan akuntabel	Sangasanga		
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										Penguatan infrastruktur			
										dan penerapan digitalisasi			
										pelayanan publik			
-		+	+	1	Kelurahan Pendingin		<u> </u>	1.427.120.000,00	l	F,	l l	1 480 000 000 00	KELURAHAN PENDINGIN
	7	-			UNSUR KEWILAYAHAN			1.427.120.000,00	T T		1	1.480.000.000.00	KELURAHAN PENDINGIN
	7 01	+	-		KECAMATAN			1.427.120.000,00				1.480.000.000,00	KELURAHAN PENDINGIN
	, 01					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
441	7 01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	85 Nilai	77.120.000,00			-	130.000.000,00	KELURAHAN PENDINGIN
					PEMERINTAHAN DAERAH								
					KABUPATEN/KOTA								
	7 01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja -	12 Laporan	12.120.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola	ASN Kantor Kecaatan -	12.120.000,00	KELURAHAN PENDINGIN
					Daerah	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				pemerintahan daerah yang	Sangasanga		
						dan Laporan Hasil Koordinasi				profesional dan akuntabel			
						Penyusunan Laporan Capaian				untuk mendukung			
						Kinerja dan Ikhtisar Realisasi				transformasi pelayanan			
						Kinerja SKPD				publik			
						Kinerja SKPD				F			
		1	1	1					1	5. Penguatan infrastruktur			
		1	1	1						dan penerapan digitalisasi			
		Ш_		<u> </u>						pelayanan publik	<u> </u>		
	7 01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	12 Laporan	12.120.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	ASN Kantor Kecaatan	12.120.000,00	KELURAHAN PENDINGIN
		1	1	1	Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan		Sanga Sanga, Pendingin		pemerintahan daerah yang	Sangasanga	, , ,	
		1	1	1	Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan		1		profesional dan akuntabel	" "		
						Laporan Keuangan				untuk mendukung			
						Bulanan/Triwulanan/Semesteran				transformasi pelayanan			
						SKPD				publik			
										Penguatan infrastruktur			
										dan penerapan digitalisasi			
										pelayanan publik			
	7 01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan -	39 Laporan	65.000.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola	ASN Kantor Kecaatan -	117.880.000.00	KELURAHAN PENDINGIN
					Daerah	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Paket			pemerintahan daerah yang	Sangasanga		
						SKPD	1 Paket			profesional dan akuntabel			
						Jumlah Paket Bahan Logistik	1 Tunce			untuk mendukung			
						Kantor yang Disediakan				transformasi pelayanan			
						Jumlah Paket Peralatan dan				publik			
						Perlengkapan Kantor yang				5. Penguatan infrastruktur			
						Disediakan				dan penerapan digitalisasi			
										pelayanan publik			
	7 01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	1 Paket	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	ASN Kantor Kecaatan	36.968.000,00	KELURAHAN PENDINGIN
					Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang		Sanga Sanga, Pendingin		pemerintahan daerah yang	Sangasanga		
						Disediakan		0.000		profesional dan akuntabel			
						Discussion 1				untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										5. Penguatan infrastruktur			
		1	1	1						dan penerapan digitalisasi			
			1	<u> </u>						pelayanan publik			
	7 01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1 Paket	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	ASN Kantor Kecaatan	33.942.000,00	KELURAHAN PENDINGIN
		1	1	1		yang Disediakan		Sanga Sanga, Pendingin		pemerintahan daerah yang	Sangasanga		
		1	1	1				J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J		profesional dan akuntabel			
		1	1	1						untuk mendukung	I I		
		1	1	1						transformasi pelayanan	I I		
		1	1	1						nublik			
		1	1	1						5. Penguatan infrastruktur	I I		
		1	1	1									
		1	1	1						dan penerapan digitalisasi	I I		
		1	_	ļ						pelayanan publik	ļļ		
	7 01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	39 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara		Peningkatan tata kelola	ASN Kantor Kecaatan	46.970.000,00	KELURAHAN PENDINGIN
		1	1	1	dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Sanga Sanga, Pendingin		pemerintahan daerah yang	Sangasanga		
		1	1	1		SKPD			1	profesional dan akuntabel			
		1	1	1						untuk mendukung			
		1	1	1						transformasi pelayanan			
		1	1	1					1	nublik	1	1	
		1	1	1						5. Penguatan infrastruktur	I I		
		1	1	1					1		1	1	
		1							1	dan penerapan digitalisasi pelayanan publik		1	
\vdash		4—	1	<u> </u>					 	peiayanan publik	ļ		
442	7 01	03	1	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Lembaga -	100 Persen	1.350.000.000,00			-	1.350.000.000,00	KELURAHAN PENDINGIN
		1	1	1	MASYARAKAT DESA DAN	Pemberdayaan Masyarakat					I I		
	L	L		<u>L_</u>	KELURAHAN	Desa/Kelurahan yang Aktif	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u></u>
									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•			



7	7 (01 03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		5 Pokmas /	750.000.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat -	750.000.000,00	KELURAHAN PENDINGIN
						Melaksanakan Pemberdayaan	Ormas			pemerintahan daerah yang	Kecamatan		
						Masyarakat di Kelurahan	5 Unit			profesional dan akuntabel	Sangasanga		
						Jumlah Sarana dan Prasarana				untuk mendukung			
						Kelurahan yang Terbangun				transformasi pelayanan			
										publik			
										5. Penguatan infrastruktur			
										dan penerapan digitalisasi			
										pelayanan publik			
- 7	7 (01 03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	4 Unit	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat Kecamatan	450,000,000,00	KELURAHAN PENDINGIN
					Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun		Sanga Sanga, Pendingin		pemerintahan daerah yang	Sangasanga		
						1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0				profesional dan akuntabel			
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										nuhlik			
										5. Penguatan infrastruktur			
										dan penerapan digitalisasi			
										pelayanan publik			
	_ +												
	7 (01 03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	5 Pokmas /	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat Kecamatan	300.000.000,00	KELURAHAN PENDINGIN
					Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan	Ormas	Sanga Sanga, Pendingin		pemerintahan daerah yang	Sangasanga		
						Masyarakat di Kelurahan				profesional dan akuntabel			
										untuk mendukung			
					1					transformasi pelayanan			
			1		1					publik			
					1					5. Penguatan infrastruktur			
										dan penerapan digitalisasi			
I			<u> </u>	<u></u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			pelayanan publik	<u> </u>		<u> </u>
7	7 (01 03	2.03		Pemberdayaan Lembaga	Jumlah Honor RT, Jumlah Honor -	161100 Orang	600.000.000.00	-	7. Peningkatan tata kelola		600,000,000.00	KELURAHAN PENDINGIN
					Kemasyarakatan Tingkat	Linmas yang terbayar, Jumlah	12 Lembaga	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		pemerintahan daerah yang		,	
					Kecamatan	Lembaga Ormas yang di fasilitasi,	Kemasyarakat			profesional dan akuntabel			
						Jumlah Posyandu yang Aktif				untuk mendukung			
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan				transformasi pelayanan			
						yang Diselenggarakan				publik			
						yang Diselenggalakan				5. Penguatan infrastruktur			
										dan penerapan digitalisasi			
										pelayanan publik			
	_		1							. , .			
1 7	7 (01 03	2.03	0001		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga	600.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	-	600.000.000,00	KELURAHAN PENDINGIN
					Kemasyarakatan	yang Diselenggarakan	Kemasyarakatan	Sanga Sanga, Pendingin		pemerintahan daerah yang			
										profesional dan akuntabel			
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										Penguatan infrastruktur			
										dan penerapan digitalisasi			
										pelayanan publik			
					Kelurahan Sangasanga Dalam	·		2.025.100.000,00		·		2.080.000.000,00	KELURAHAN SANGASANGA DALAM
	7				UNSUR KEWILAYAHAN			2.025.100.000,00				2,080,000,000,00	KELURAHAN SANGASANGA
												,	DALAM
7	7 (01			KECAMATAN			2.025.100.000,00				2.080.000.000,00	KELURAHAN SANGASANGA DALAM
443 7	, .	01 04	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	85 Nilai	75.100.000,00			 	420,000,000	
443	′ ['	01 01				Milai SAKIP Perangkat Daeran	85 Niiai	75.100.000,00			-	130.000.000,00	KELURAHAN SANGASANGA
					PEMERINTAHAN DAERAH								DALAM
	_+				KABUPATEN/KOTA		<u> </u>			_			
7	7 (01 01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja -	12 Laporan	10.100.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola	ASN Kantor Kecaatan -	10.100.000,00	KELURAHAN SANGASANGA
					Daerah	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				pemerintahan daerah yang	Sangasanga		DALAM
					1	dan Laporan Hasil Koordinasi				profesional dan akuntabel			
			1		1	Penyusunan Laporan Capaian				untuk mendukung			
						Kinerja dan Ikhtisar Realisasi				transformasi pelayanan			
			1		1	Kinerja SKPD				publik			
			1		1					5. Penguatan infrastruktur			
			1		1					dan penerapan digitalisasi			
				1	1					pelayanan publik			
						Lundah Lananan Kanananan Bulanan /	12 Laporan	10.100.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	ASN Kantor Kecaatan	10.100.000.00	KELURAHAN SANGASANGA
1	7 (01 01	2.02	0007	Koordinasi dan Penvusunan	Jumian Laporan Keuangan Bulanan/ I		Sanga Sanga, Sanga-	· ` '	pemerintahan daerah yang	Sangasanga		
7	7 (01 01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan							IDALAM
7	7 (01 01	2.02	0007	Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan					Sangasanga		DALAM
	7 (01 01	2.02	0007		Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan		Sanga Dalam		profesional dan akuntabel	Jangasanga		DALAM
;	7 (01 01	2.02	0007	Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan				profesional dan akuntabel untuk mendukung	Sangasanga		DALAM
;	7 (01 01	2.02	0007	Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran				profesional dan akuntabel	Juligasunga		DALAM
;	7 (01 01	2.02	0007	Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan				profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Juligasunga		DALAM
1	7 (01 01	2.02	0007	Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran				profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur	Juli gasai ga		DALAM
5	7 (01 01	2.02	0007	Laporan Keuangan Bulanan/	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran				profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Jangusunga		DALAM



					,			T 1		1		1			1
	7 0	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan -	39 Laporan	65.000.000,00		-	7. Peningkatan tata kelola	ASN Kantor Kecaatan -	119.900.000,00	KELURAHAN SANGASANGA
						Daerah	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Paket				pemerintahan daerah yang	Sangasanga		DALAM
							SKPD	1 Paket				profesional dan akuntabel			
							Jumlah Paket Bahan Logistik					untuk mendukung			
							Kantor yang Disediakan					transformasi pelayanan			
							Jumlah Paket Peralatan dan					publik			
							Perlengkapan Kantor yang					5. Penguatan infrastruktur			
							Disediakan								
							Disediakan					dan penerapan digitalisasi			
												pelayanan publik			
	7 0	01 (01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Peningkatan tata kelola	ASN Kantor Kecaatan	48.569.000,00	
						Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang			Sanga Sanga, Sanga-		pemerintahan daerah yang	Sangasanga		DALAM
							Disediakan			Sanga Dalam		profesional dan akuntabel			
										0		untuk mendukung			
												transformasi pelayanan			
												publik			
												5. Penguatan infrastruktur			
												dan penerapan digitalisasi			
												pelayanan publik			
	7 0	01 (01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1 Paket	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	ASN Kantor Kecaatan	29.751.000,00	KELURAHAN SANGASANGA
						•	yang Disediakan			Sanga Sanga, Sanga-		pemerintahan daerah yang	Sangasanga		DALAM
ļ				J	l		/- 0			Sanga Dalam		profesional dan akuntabel			1
ļ				J	l					Sunga Dalaili			1		1
ļ				J	l							untuk mendukung	1		1
												transformasi pelayanan			
ļ				J	l							publik	1		1
												5. Penguatan infrastruktur			
												dan penerapan digitalisasi			
												pelayanan publik			
	7 0	01 (01	2.06	0000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	39 Laporan	30.000.000,00	Kah Kutai Kartanogara	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	ASN Kantor Kecaatan	41 590 000 00	KELURAHAN SANGASANGA
	, 0	01 1	01	2.00		dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	35 Laporati	30.000.000,00		DANA BAGITIASIE (DBIT)	pemerintahan daerah yang		41.380.000,00	DALAM
						dan konsultasi SKPD				Sanga Sanga, Sanga-			Sangasanga		DALAM
							SKPD			Sanga Dalam		profesional dan akuntabel			
												untuk mendukung			
												transformasi pelayanan			
												publik			
												5. Penguatan infrastruktur			
												dan penerapan digitalisasi			
												pelayanan publik			
	_											pelayarian publik			
444	7 0	01 (03			PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Lembaga -	100 Persen	1.950.000.000,00				-	1.950.000.000,00	KELURAHAN SANGASANGA
						MASYARAKAT DESA DAN	Pemberdayaan Masyarakat								DALAM
						KELURAHAN	Desa/Kelurahan yang Aktif								
	7 0	01 (03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang -	5 Pokmas /	750.000.000,00		-	7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat -	750.000.000,00	KELURAHAN SANGASANGA
						-	Melaksanakan Pemberdayaan	Ormas				pemerintahan daerah yang	Kecamatan		DALAM
							Masyarakat di Kelurahan	4 Unit				profesional dan akuntabel	Sangasanga		
							Jumlah Sarana dan Prasarana	4 Olik				untuk mendukung	Sangasanga		
							Kelurahan yang Terbangun					transformasi pelayanan			
												publik			
												5. Penguatan infrastruktur			
												dan penerapan digitalisasi	1		1
												pelayanan publik	1		1
- 1	7 0	01 (03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	4 Unit	450.000.000,00	Kah Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat Kecamatan	450.000.000,00	KELURAHAN SANGASANGA
	1	I '	'			Prasarana Kelurahan		T Grint	-35.553.000,00			pemerintahan daerah yang		-35.550.000,00	DALAM
						ri asai aila Keluranan	Kelurahan yang Terbangun			Sanga Sanga, Sanga-			Sangasanga		DALAM
										Sanga Dalam		profesional dan akuntabel	1		1
ļ				J	l						1	untuk mendukung	1		1
												transformasi pelayanan	1		1
												publik	1		1
ļ			l l								1	5. Penguatan infrastruktur	1		1
				J								dan penerapan digitalisasi	1		1
									1			pelayanan publik	1		1
										I					+
	7 0	01 (03 :	2.02		Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	5 Pokmas /	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat Kecamatan	300.000.000,00	KELURAHAN SANGASANGA
	7 0	01 (03 :	2.02		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	5 Pokmas / Ormas	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-	DANA BAGI HASIL (DBH) -	 Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang 	Masyarakat Kecamatan Sangasanga	300.000.000,00	KELURAHAN SANGASANGA DALAM
	7 0	01 (03	2.02			Melaksanakan Pemberdayaan		300.000.000,00	Sanga Sanga, Sanga-	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang		300.000.000,00	
	7 0	01 (03 :	2.02					300.000.000,000		DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		300.000.000,00	
	7 0	01 (03 :	2.02			Melaksanakan Pemberdayaan		300.000.000,00	Sanga Sanga, Sanga-	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		300.000.000,00	
	7 0	01 (03	2.02			Melaksanakan Pemberdayaan		300.000.000,00	Sanga Sanga, Sanga-	DANA BAGI HASIL (DBH) -	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		300.000.000,00	
	7 0	01 (03	2.02			Melaksanakan Pemberdayaan		300.000.000,000	Sanga Sanga, Sanga-	DANA BAGI HASIL (DBH) -	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		300.000.000,00	
	7 0	01 (03	2.02			Melaksanakan Pemberdayaan		300.000.000,00	Sanga Sanga, Sanga-	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur		300,000.000	
	7 0	01 (03	2.02			Melaksanakan Pemberdayaan		300.000.000,00	Sanga Sanga, Sanga-	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		300.000.000,00	
	7 0	01 (03	2.02			Melaksanakan Pemberdayaan		300.000.000,00	Sanga Sanga, Sanga-	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur		300.000.000	



	7 0	01 03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan - yang Diselenggarakan		4 Lembaga emasyarakat	1.200.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur	Masyarakat Kecamatan Sangasanga		KELURAHAN SANGASANGA DALAM
	7 0	01 03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga	1.200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	dan penerapan digitalisasi pelayanan publik - 7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat Kecamatan	1.200.000.000,00	KELURAHAN SANGASANGA
					Kemasyarakatan	yang Diselenggarakan	Ke	emasyarakatan	Sanga Sanga, Sanga Sanga Dalam		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	Sangasanga		DALAM
					Kelurahan Sangasanga Muara				1.377.120.000,00					KELURAHAN SANGASANGA MUARA
	7				UNSUR KEWILAYAHAN				1.377.120.000,00					KELURAHAN SANGASANGA MUARA
	7 0	01			KECAMATAN				1.377.120.000,00					KELURAHAN SANGASANGA MUARA
445	7 0	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	8:	5 Nilai	77.120.000,00			-		KELURAHAN SANGASANGA MUARA
	7 C	01 01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.	2 Laporan	12.120.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	ASN Kantor Kecaatan Sangasanga	12.120.000,00	KELURAHAN SANGASANGA MUARA
	7 0	01 01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11	2 Laporan	12.120.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga Sanga Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	ASN Kantor Kecaatan Sangasanga	12.120.000,00	KELURAHAN SANGASANGA MUARA
		01 01			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Pesengkapan Kantor yang Disediakan	1	9 Laporan Paket Paket	65.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dalan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik			KELURAHAN SANGASANGA MUARA
	7 C	01 01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga Sanga Muara	DAÑA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dalan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	-	52.706.000,00	KELURAHAN SANGASANGA MUARA
	7 C	01 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga- Sanga Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dalan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	-	29.754.000,00	KELURAHAN SANGASANGA MUARA



	7 (01 01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	39 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	35.420.000,00	KELURAHAN SANGASANGA
					dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Sanga Sanga, Sanga-	, ,	pemerintahan daerah yang		,	MUARA
					dan konsultasi siki s	SKPD		Sanga Muara		profesional dan akuntabel		ı	10,000
						SKI D		Janga Wudi a		untuk mendukung		· '	
										transformasi pelayanan		· '	
										nublik		· '	
										P		· '	
										5. Penguatan infrastruktur		· '	
										dan penerapan digitalisasi		· '	
										pelayanan publik			
446	7 (01 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Lembaga -	100 Persen	1.300.000.000,00				- 1.300.000.000,00	KELURAHAN SANGASANGA
					MASYARAKAT DESA DAN	Pemberdayaan Masyarakat						ı	MUARA
	_				KELURAHAN	Desa/Kelurahan yang Aktif						,	
	7 (01 03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		5 Pokmas /	750.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat	- 750.000.000,00	KELURAHAN SANGASANGA
						Melaksanakan Pemberdayaan	Ormas			pemerintahan daerah yang	Kecamatan	ı	MUARA
						Masyarakat di Kelurahan	5 Unit			profesional dan akuntabel	Sangasanga	· '	
						Jumlah Sarana dan Prasarana				untuk mendukung		· '	
						Kelurahan yang Terbangun				transformasi pelayanan		· '	
										publik		ı	
										5. Penguatan infrastruktur		· '	
										dan penerapan digitalisasi		· '	
	1									pelayanan publik		, l '	
	7 (01 03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	4 Unit	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat Kecamatan	450.000.000.00	KELURAHAN SANGASANGA
			1	1	Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun		Sanga Sanga, Sanga-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	pemerintahan daerah yang	Sangasanga		MUARA
	1					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Sanga Muara		profesional dan akuntabel	J	,	
										untuk mendukung		, l '	
		1			1					transformasi pelayanan		.	
										publik		, l '	
										5. Penguatan infrastruktur		, l '	
										dan penerapan digitalisasi		ı	
										pelayanan publik		· '	
	7 (01 03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	5 Pokmas /	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara	DANA BACILIASII (DBII)	- 7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat Kecamatan	300,000,000,00	KELURAHAN SANGASANGA
	′ '	01 03	2.02	0003	Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan			DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang		300.000.000,00	MUARA
					Kelurahan		Ormas	Sanga Sanga, Sanga-			Sangasanga	ı	MUARA
						Masyarakat di Kelurahan		Sanga Muara		profesional dan akuntabel		· '	
										untuk mendukung		ı	
										transformasi pelayanan		ı	
										publik		ı	
										5. Penguatan infrastruktur		ı	
										dan penerapan digitalisasi		ı	
										pelayanan publik		ı	
	7 (01 03	2.03		Pemberdayaan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan -	11 Lembaga	550.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat	- 550.000.000,00	KELURAHAN SANGASANGA
					Kemasyarakatan Tingkat	yang Diselenggarakan	Kemasyarakat			pemerintahan daerah yang	Kecamatan	ı	MUARA
					Kecamatan					profesional dan akuntabel	Sangasanga	ı	
										untuk mendukung		ı	
										transformasi pelayanan		· '	
										publik		· '	
										5. Penguatan infrastruktur		· '	
												i '	
										dan penerapan digitalisasi		'	
	7 (dan penerapan digitalisasi pelayanan publik		¹	
1	1 '	01 03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga	550.000.000,00 Kah. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	pelayanan publik	Masvarakat Kecamatan	550,000,000.00	KELURAHAN SANGASANGA
		01 03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	11 Lembaga Kemasyarakatan	550.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga	DANA BAGI HASIL (DBH)	pelayanan publik - 7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat Kecamatan Sangasanga	550.000.000,00	KELURAHAN SANGASANGA MUARA
		01 03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	11 Lembaga Kemasyarakatan	Sanga Sanga, Sanga-	DANA BAGI HASIL (DBH)	pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Masyarakat Kecamatan Sangasanga	550.000.000,00	KELURAHAN SANGASANGA MUARA
		01 03	2.03	0001					DANA BAGI HASIL (DBH)	pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		550.000.000,00	
		01 03	2.03	0001				Sanga Sanga, Sanga-	DANA BAGI HASIL (DBH)	pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		550.000.000,00	
		01 03	2.03	0001				Sanga Sanga, Sanga-	DANA BAGI HASIL (DBH)	pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		550.000.000,00	
		01 03	2.03	0001				Sanga Sanga, Sanga-	DANA BAGI HASIL (DBH)	pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		550.000.000,00	
		01 03	2.03	0001				Sanga Sanga, Sanga-	DANA BAGI HASIL (DBH)	pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur		550.000,000,00	
		01 03	2.03	0001				Sanga Sanga, Sanga-	DANA BAGI HASIL (DBH)	pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi		550.000.000,00	
		01 03	2.03	0001	Kemasyarakatan			Sanga Sanga, Sanga Sanga Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur			MUARA
	7	01 03	2.03	0001	Kemasyarakatan Kelurahan Sarijaya			Sanga Sanga, Sanga-Sanga Muara 1.327.120.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi		1.380.000.000,00	MUARA KELURAHAN SARIJAYA
	7 7		2.03	0001	Kemasyarakatan			Sanga Sanga, Sanga Sanga Muara	DANA BAGI HASIL (DBH)	pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi		1.380.000.000,00 1.380.000.000,00	MUARA
	7 (01		0001	Kemasyarakatan Kelurahan Sarijaya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN	yang Diselenggarakan	Kemasyarakatan	Sanga Sanga, Sanga- Sanga Muara 1.327.120.000,00 1.327.120.000,00 1.327.120.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi		1.380.000.000,00 1.380.000.000,00 1.380.000.000,00	MUARA KELURAHAN SARIJAYA KELURAHAN SARIJAYA KELURAHAN SARIJAYA
	7 (01		0001	Kelurahan Sarijaya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN			Sanga Sanga, Sanga- Sanga Muara 1.327.120.000,00 1.327.120.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi		1.380.000.000,00 1.380.000.000,00 1.380.000.000,00	MUARA KELURAHAN SARIJAYA KELURAHAN SARIJAYA
	7 (01		0001	Kelurahan Sarijaya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	yang Diselenggarakan	Kemasyarakatan	Sanga Sanga, Sanga- Sanga Muara 1.327.120.000,00 1.327.120.000,00 1.327.120.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi		1.380.000.000,00 1.380.000.000,00 1.380.000.000,00	MUARA KELURAHAN SARIJAYA KELURAHAN SARIJAYA KELURAHAN SARIJAYA
447	7 (01 01 01			Kelurahan Sarijaya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENYKOTA	yang Diselenggarakan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kemasyarakatan	Sanga Sanga, Sanga- Sanga Muara 1.327.120.000,00 1.327.120.000,00 77.120.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	Sangasanga	1.380.000.000,00 1.380.000.000,00 1.380.000.000,00 - 130.000.000,00	MUARA KELURAHAN SARIJAYA KELURAHAN SARIJAYA KELURAHAN SARIJAYA KELURAHAN SARIJAYA
447	7 (01			Kelurahan Sarijaya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat	yang Diselenggarakan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Kemasyarakatan	Sanga Sanga, Sanga- Sanga Muara 1.327.120.000,00 1.327.120.000,00 1.327.120.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	Sangasanga ASN Kantor Kecaatan	1.380.000.000,00 1.380.000.000,00 1.380.000.000,00 - 130.000.000,00	MUARA KELURAHAN SARIJAYA KELURAHAN SARIJAYA KELURAHAN SARIJAYA
447	7 (01 01 01			Kelurahan Sarijaya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENYKOTA	yang Diselenggarakan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kemasyarakatan	Sanga Sanga, Sanga- Sanga Muara 1.327.120.000,00 1.327.120.000,00 77.120.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Sangasanga	1.380.000.000,00 1.380.000.000,00 1.380.000.000,00 - 130.000.000,00	MUARA KELURAHAN SARIJAYA KELURAHAN SARIJAYA KELURAHAN SARIJAYA KELURAHAN SARIJAYA
447	7 (01 01 01			Kelurahan Sarijaya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat	yang Diselenggarakan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kemasyarakatan	Sanga Sanga, Sanga- Sanga Muara 1.327.120.000,00 1.327.120.000,00 77.120.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Sangasanga ASN Kantor Kecaatan	1.380.000.000,00 1.380.000.000,00 1.380.000.000,00 - 130.000.000,00	MUARA KELURAHAN SARIJAYA KELURAHAN SARIJAYA KELURAHAN SARIJAYA KELURAHAN SARIJAYA
447	7 (01 01 01			Kelurahan Sarijaya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Kemasyarakatan	Sanga Sanga, Sanga- Sanga Muara 1.327.120.000,00 1.327.120.000,00 77.120.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	Sangasanga ASN Kantor Kecaatan	1.380.000.000,00 1.380.000.000,00 1.380.000.000,00 - 130.000.000,00	MUARA KELURAHAN SARIJAYA KELURAHAN SARIJAYA KELURAHAN SARIJAYA KELURAHAN SARIJAYA
447	7 (01 01 01			Kelurahan Sarijaya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat	yang Diselenggarakan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kemasyarakatan	Sanga Sanga, Sanga- Sanga Muara 1.327.120.000,00 1.327.120.000,00 77.120.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	Sangasanga ASN Kantor Kecaatan	1.380.000.000,00 1.380.000.000,00 1.380.000.000,00 - 130.000.000,00	MUARA KELURAHAN SARIJAYA KELURAHAN SARIJAYA KELURAHAN SARIJAYA KELURAHAN SARIJAYA
447	7 (01 01 01			Kelurahan Sarijaya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Kemasyarakatan	Sanga Sanga, Sanga- Sanga Muara 1.327.120.000,00 1.327.120.000,00 77.120.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Sangasanga ASN Kantor Kecaatan	1.380.000.000,00 1.380.000.000,00 1.380.000.000,00 - 130.000.000,00	MUARA KELURAHAN SARIJAYA KELURAHAN SARIJAYA KELURAHAN SARIJAYA KELURAHAN SARIJAYA
447	7 (01 01 01			Kelurahan Sarijaya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat	yang Diselenggarakan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kemasyarakatan	Sanga Sanga, Sanga- Sanga Muara 1.327.120.000,00 1.327.120.000,00 77.120.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik - 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur	Sangasanga ASN Kantor Kecaatan	1.380.000.000,00 1.380.000.000,00 1.380.000.000,00 - 130.000.000,00	MUARA KELURAHAN SARIJAYA KELURAHAN SARIJAYA KELURAHAN SARIJAYA KELURAHAN SARIJAYA
447	7 (01 01 01			Kelurahan Sarijaya UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat	yang Diselenggarakan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kemasyarakatan	Sanga Sanga, Sanga- Sanga Muara 1.327.120.000,00 1.327.120.000,00 77.120.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Sangasanga ASN Kantor Kecaatan	1.380.000.000,00 1.380.000.000,00 1.380.000.000,00 - 130.000.000,00	MUARA KELURAHAN SARIJAYA KELURAHAN SARIJAYA KELURAHAN SARIJAYA KELURAHAN SARIJAYA



7	7 C	01 01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12.120.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sari Jaya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN Kantor Kecaatan Sangasanga	12.120.000,00	KELURAHAN SARIJAYA
	7 0	01 01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan -	39 Laporan	65.000.000,00		Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola	ASN Kantor Kecaatan -	117.880.000,00	KELURAHAN SARIJAYA
					Daerah	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPO Jumlah Paket Bahan Logistiik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket 1 Paket			pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	Sangasanga		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sari Jaya		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	ASN Kantor Kecaatan Sangasanga		KELURAHAN SARIJAYA
	7 (01 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disedlakan	1 Paket	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sari Jaya	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daeral yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	ASN Kantor Kecaatan Sangasanga	29.236.000,00	KELURAHAN SARIJAYA
7	7 C	01 01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sari Jaya	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	ASN Kantor Kecaatan Sangasanga	53.640.000,00	Kelurahan Sarijaya
448	7 0	01 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga - Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	100 Persen	1.250.000.000,00			-	1.250.000.000,00	KELURAHAN SARIJAYA
	7 0	01 03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Pokmas / Ormas 5 Unit	750.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Sangasanga	750.000.000,00	KELURAHAN SARIJAYA
2	7 C	01 03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sari Jaya	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Sangasanga	450.000.000,00	KELURAHAN SARIJAYA



7 0														
	01 (03 2	2.02	0003 F	Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	5 Pokmas /	300.000.000.00	Kah Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat Kecamatan	300.000.000.00	KELURAHAN SARIJAYA
	·- ·	-			Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan	Ormas		Sanga Sanga, Sari Jaya		pemerintahan daerah yang	Sangasanga		
				- 1"	Cidialian	Masyarakat di Kelurahan	Offilias		Janga Janga, Jan Jaya		profesional dan akuntabel	Sangasanga		
						iviasyarakat ur keluranan								
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											Penguatan infrastruktur			
											dan penerapan digitalisasi			
											pelayanan publik			
_						1								
7 0	01 0	03 2.	2.03		Pemberdayaan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan -	10 Lembaga	500.000.000,00		-	7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat -	500.000.000,00	KELURAHAN SARIJAYA
				K	Kemasyarakatan Tingkat	yang Diselenggarakan	Kemasyarakat				pemerintahan daerah yang	Kecamatan		
				K	Kecamatan						profesional dan akuntabel	Sangasanga		
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											5. Penguatan infrastruktur			
											dan penerapan digitalisasi			
											pelayanan publik			
7 0	01 (03 2	2.03	0001 F	Penyelenggaraan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga	500.000.000.00	Kab. Kutai Kartanegara.	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat Kecamatan	500,000,000,00	KELURAHAN SARIJAYA
. -					Kemasyarakatan	yang Diselenggarakan	Kemasyarakatan		Sanga Sanga, Sari Jaya		pemerintahan daerah yang	Sangasanga		
				, , ,	C	70.15 Discienggarakan	ikemasyai akatan		Junga Junga, Jun Jaya		profesional dan akuntabel	San Basan Iga		
												1		
											untuk mendukung	1		
											transformasi pelayanan	1		
											publik	1		
											5. Penguatan infrastruktur	1		
											dan penerapan digitalisasi	1		
											pelayanan publik	1	[
	+	-			Kecamatan Anggana	1		22.064.229.586,00		l l	F==1==30 poom	ı	22 664 272 627 00	KECAMATAN ANGGANA
7	-	_			UNSUR KEWILAYAHAN			22.064.229.586,00		T T		T	22.004.372.327,00	KECAMATAN ANGGANA
•								22.064.229.586,00					22.664.372.527,00	KECAMATAN ANGGANA
	01				KECAMATAN									
7 0	01 (01				Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	85 Nilai	6.380.939.586,00				l -	6.706.082.527,00	KECAMATAN ANGGANA
				F	PEMERINTAHAN DAERAH									
				K	KABUPATEN/KOTA									
7 0	01 (01 2.	.01	F	Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen rencana, -	10 Dokumen	320.000.000,00		-	7. Peningkatan tata kelola		380.000.000.00	KECAMATAN ANGGANA
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						pemerintahan daerah yang			
				- 1	evaluasi Killerja i erangkat Daeran	Perangkat					profesional dan akuntabel			
						Perangkat								
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											6. Pengembangan			
											konektivitas dan			
											pembangunan infrastruktur			
											pembangunan inirastruktur			
											secara terpadu dan merata			
											secara terpadu dan merata			
7 0	01 (01 2	2.01 (0001 F	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	secara terpadu dan merata 7. Peningkatan tata kelola	-	30.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
7 0	01 (01 2	2.01 (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	30.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
7 0	01 (01 2	2.01				2 Dokumen	40.000.000,00	Anggana, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	30.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
7 0	01 (01 2	2.01				2 Dokumen	40.000.000,00		DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	30.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
7 0	01 (01 2	2.01 (2 Dokumen	40.000.000,00	Anggana, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	30.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
7 0	01 (01 2	2.01				2. Dokumen	40.000.000,00	Anggana, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	30.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
7 0	01 (01 2	2.01 (2 Dokumen	40.000.000,00	Anggana, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	30.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
7 0	01 (01 2	2.01 (2 Dokumen	40.000.000,00	Anggana, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan	-	30.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
7 0	01 (01 2	2.01 (2 Dokumen	40.000.000,00	Anggana, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	30.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
7 0	01 (01 2	2.01 (2 Dokumen	40.000.000,00	Anggana, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan	-	30.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
7 0	01 (01 2	2.01 (2 Dokumen	40.000.000,00	Anggana, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur	-	30.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
7 0	01 (01 2	2.01				2 Dokumen	40.000.000,00	Anggana, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan	-	30.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
				F	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah			Anggana, Semua Kel/Desa		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur	-		
		01 2		0006 k	Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja	2 Dokumen 6 Laporan		Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) - DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur	-		KECAMATAN ANGGANA
				0006 k	Perangkat Daerah (oordinasi dan Penyusunan aporan Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur	-		
				0006 k	Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi			Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur	-		
				0006 k	Perangkat Daerah (oordinasi dan Penyusunan aporan Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian			Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur	-		
				0006 k	Perangkat Daerah (oordinasi dan Penyusunan aporan Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian			Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur	-		
				0006 k	Perangkat Daerah (oordinasi dan Penyusunan aporan Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi			Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur	-		
7 0	01 (01 2	2.01 (0006 k	Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan aporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	30.000.000,00	Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur	-	50.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
7 0	01 (01 2	2.01 (0006 k	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Data Statistik Sektoral		30.000.000,00	Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur	-	50.000.000,00	
7 0	01 (01 2	2.01 (0006 k	Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan aporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan	6 Laporan	30.000.000,00	Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur	-	50.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
7 0	01 (01 2	2.01 (0006 k	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (SPD) Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiska Lingkup Perangkat	6 Laporan	30.000.000,00	Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur	-	50.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
7 0	01 (01 2	2.01 (0006 k	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan	6 Laporan	30.000.000,00	Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur	-	50.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
7 0	001 (01 2	2.01 (0006 k L II	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6 Laporan 1 Data	30.000.000,00	Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur	-	50.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA KECAMATAN ANGGANA
7 0	001 (01 2	2.01 (0006 k L III	Coordinasi dan Penyusunan aporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD Pelaksanaan Pengumpulan Data tatistik Sektoral Daerah	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kealisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ah Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah laporan Administrasi -	6 Laporan	30.000.000,00	Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur	-	50.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA KECAMATAN ANGGANA
7 0	001 (01 2	2.01 (0006 k L III	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (SPP) Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6 Laporan 1 Data	30.000.000,00	Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur	-	50.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
7 0	D1 (2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2.01 (0006 k L III	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Japoran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6 Laporan 1 Data 14 Laporan	30.000.000,00 250.000.000,00 5.124.732.900,00	Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) - DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur		50.000.000,00 300.000.000,00 5.192.715.890,00	KECAMATAN ANGGANA KECAMATAN ANGGANA KECAMATAN ANGGANA
7 0	001 (2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2.01 (0006 k L III	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Japoran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel Jumlah Jorang yang Menerima Gaji	6 Laporan 1 Data	30.000.000,00 250.000.000,00 5.124.732.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur		50.000.000,00 300.000.000,00 5.192.715.890,00	KECAMATAN ANGGANA KECAMATAN ANGGANA
7 0	D1 (2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2.01 (0006 k L III	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Japoran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6 Laporan 1 Data 14 Laporan	30.000.000,00 250.000.000,00 5.124.732.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH) - DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur		50.000.000,00 300.000.000,00 5.192.715.890,00	KECAMATAN ANGGANA KECAMATAN ANGGANA KECAMATAN ANGGANA
7 0	D1 (2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2.01 (0006 k L III	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Japoran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel Jumlah Jorang yang Menerima Gaji	6 Laporan 1 Data 14 Laporan	30.000.000,00 250.000.000,00 5.124.732.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) - DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur	-	50.000.000,00 300.000.000,00 5.192.715.890,00	KECAMATAN ANGGANA KECAMATAN ANGGANA KECAMATAN ANGGAN



7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	103.320.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		- 103.320.000,6	0 KECAMATAN ANGGANA
						SKFU						
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah -	331 unit	80.000.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		0 KECAMATAN ANGGANA
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- 50.000.000,0	0 KECAMATAN ANGGANA
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	- 30.000.000,0	0 KECAMATAN ANGGANA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum - Perangkat Daerah	8 Jenis	230.304.986,00	-	-	- 304.291.923,0	0 KECAMATAN ANGGANA
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.304.986,00 Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	5.304.986,0	00 KECAMATAN ANGGANA
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	130.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	- 126.000.000,0	0 KECAMATAN ANGGANA
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	- 5.000.000,6	00 KECAMATAN ANGGANA
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102 Laporan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	152,986,937,0	0 KECAMATAN ANGGANA
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	- 15.000.000,0	0 KECAMATAN ANGGANA
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pengadaan Barang - Milik Daerah -	100 persen	50.000.000,00	-	-	- 50.000.000,0	0 KECAMATAN ANGGANA
7	01	01	2.07	0006	Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	50,000,000,0	0 KECAMATAN ANGGANA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	500.071.700,00	-	-	623.244.714,í	00 KECAMATAN ANGGANA
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	436.801.700,00 Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	436.801.700,0	0 KECAMATAN ANGGANA
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	63.270.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -	-	186.443.014,0	0 KECAMATAN ANGGANA



	7 01	. 01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Peralatan dan Mesin - Lainnya yang dipelihara	11	unit 75.	830.000,00			-	-	-	-	75.830.000,00	KECAMATAN ANGGANA
	7 04	. 01	2.09		Daerah			Unit 253	330.000,00 H	W-b W-b-! W-b	DANA DA CILIACII (DDII)					25 020 000 00	KECAMATAN ANGGANA
	/ 01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	1 1	Jnit 25.		Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		25.830.000,00	KECAMATAN ANGGANA
					Perizinan Kendaraan Dinas	Dipelihara dan dibayarkan Pajak				Kel/Desa							
					Operasional atau Lapangan	dan Perizinannya											
	7 01	. 01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan	1	nit 50.			DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
					Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Anggana, Semua Kel/Desa							
						Dipelinaray Direnabilitasi				Nely Desa							
450	7 01	. 02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Pelayanan Perijinan -			290.000,00						-	15.018.290.000,00	KECAMATAN ANGGANA
					PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	dan Non Perijinan yang di	81	3 Persen									
					PUBLIK	laksanakan sesuai SOP Tingkat Aksesibilitas Wilayah											
						Kecamatan											
	7 01	. 02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan	Jumlah kegiatan pemerintahan di -	5	egiatan 400.	000.000,00			-	-	-	-	400.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
					Kegiatan	tingkat kecamatan yang											
					Pemerintahan di Tingkat	melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang											
					Kecamatan	dilaksanakan secara efektif											
	7 01	. 02	2.01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	3	aporan 150.			DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		150.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
					Pemerintahan dengan Perangkat	Kegiatan Pemerintahan dengan				Anggana, Semua Kel/Desa					1		
					Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					,							
						Vertikal Terkait											
-	7 01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah Dokumen Peningkatan	1	okumen 250.	200 000 00	Kah Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	_	_	_	+	250 000 000 00	KECAMATAN ANGGANA
	, 01	02	2.01	0002	Pemerintahan di Tingkat	Efektifitas Kegiatan Pemerintahan		SKUTTETT ESS.		Anggana, Semua	DATE (DDIT)					230.000.000,00	The contract of the contract
					Kecamatan	di Tingkat Kecamatan				Kel/Desa							
	7 01	02	2.02		Danielanggaraan Haisan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal -		esilitasi 100.	00,000,00							100 000 000 00	KECAMATAN ANGGANA
	/ 01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	(SPM) yang difasilitasi		ISIIITASI 100.	000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	KECAWATAN ANGGANA
					Dilaksanakan oleh Unit Kerja	(, ,,											
					Perangkat Daerah yang Ada di												
	7 01	02	2.02		Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Jumlah Laporan Peningkatan	12	aporan 100.	200 000 00	Kah Kutai Kartanogara	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-		+	100,000,000,00	KECAMATAN ANGGANA
	, 01	02	2.02		Pelayanan kepada Masyarakat di	Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan		iporari 100.		Anggana, Semua	DAINA DAGITIASIE (DBIT)					100.000.000,00	RECAIVIATAIV AIVOGAIVA
					Wilayah Kecamatan	kepada Masyarakat di Wilayah				Kel/Desa							
	_					Kecamatan											
	7 01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan - pemerintahan yang menjadi		egiatan 14.368.	290.000,00			-	-	-	-	14.518.290.000,00	KECAMATAN ANGGANA
					yang simipankan kepada camat	kewenangan Camat											
	7 01	. 02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	1	aporan 768.			DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		768.290.000,00	KECAMATAN ANGGANA
					yang terkait dengan Nonperizinan	Nonperizinan pada Urusan				Anggana, Semua							
						Pemerintahan			l'	Kel/Desa							
	7 01	. 02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	4	aporan 13.600	00,000,00	Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		13.750.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
					yang Terkait dengan Kewenangan	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				Anggana, Semua							
					Lain yang Dilimpahkan				l'	Kel/Desa							
451	7 01	. 03	1		PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Lembaga -	90	Persen 370.	00,000,00			1		1	1-	420.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
					MASYARAKAT DESA DAN	Pemberdayaan Masyarakat										•	
 	7 01	0.5	2.01		KELURAHAN Koordinasi Kegiatan	Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Koordinasi yang -	110	kali 100.	000.000,00			1-	<u> </u>	1_	1	100 000 000 00	KECAMATAN ANGGANA
	, 11	03	2.01		Pemberdayaan Desa	dilaksanakan Desa / Kelurahan		100.	220.000,00						1	100.000.000,00	MESANTATAN ANGGANA
	7 01	. 03	2.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan					DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
					dalam Forum Musyawarah	yang Berpartisipasi dalam Forum	Ke	nasyarakatan		Anggana, Semua					1		
					Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				Kel/Desa					1		
		\perp	L			. cbanganan ar besa									<u> </u>		
	7 01	. 03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah Laporan Peningkatan	4	aporan 50.			DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
					Pemberdayaan Masyarakat di	Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan				Anggana, Semua					1		
					Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan			['	Kel/Desa							
	7 01	. 03	2.03		Pemberdayaan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan -	5	mbaga 270.	000.000,00			-	-	-	-	320.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
					Kemasyarakatan Tingkat	yang Diselenggarakan	Ke	nasyarakat									
\vdash	7 01	U3	2.03		Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	-	embaga 270.	000.000	Kah Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-	+ +	320 000 000 00	KECAMATAN ANGGANA
	, 01	03	2.03	5501	Kemasyarakatan	yang Diselenggarakan		nasyarakatan 270.		Anggana, Semua					1	320.000.000,00	
										Kel/Desa					1		



452	7	01 04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi - Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 Persen	175.000.000,00				225.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
		01 04			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Kegiatan	175.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		KECAMATAN ANGGANA
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			KECAMATAN ANGGANA
	7	01 04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	175.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
453	7	01 05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan - Pemerintahan Umum	100 Persen	195.000.000,00			-	220.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
	7	01 05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	2 Kegiatan	195.000.000,00		-	-	220.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
	7	01 05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 Orang	180.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	180.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
	7	01 05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Publik	-		KECAMATAN ANGGANA
454	7	01 06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki - Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	90 Persen	75.000.000,00			-	75.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
	7	01 06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi -	8 Desa	75.000.000,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	75.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA



												1	1		1
	7 01	1 06	5 2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) -		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	75.000.000,00	KECAMATAN ANGGANA
												Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
					Kecamatan Kota Bangun Darat			15.357.167.046,00				Publik	I	29.953.825.648,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
	7				UNSUR KEWILAYAHAN			15.357.167.046,00						29.953.825.648,00	
-	7 01	1			KECAMATAN			15.357.167.046,00						29.953.825.648,00	DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN
455	7 01	1 01	ı		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	62 Nilai	4.399.609.046,00						- 5.832.475.648,00	DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7 01	1 01	2.01		NADUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Laporan	275.000.000,00		da pe pe	nembangun dari desa dan ari bawah untuk ertumbuhan ekonomi, emerataan ekonomi dan emberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat	- 570.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7 01	1 01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	pe pe	Aembangun dari desa dan ari bawah untuk ertumbuhan ekonomi, emerataan ekonomi dan emberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat	140.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7 01	1 01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	da pe pe	rlembangun dari desa dan ari bawah untuk ertumbuhan ekonomi, emerataan ekonomi dan emberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat	70,000,000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7 01	1 01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	da pe pe	fembangun dari desa dan ari bawah untuk ertumbuhan ekonomi, emerataan ekonomi dan emberantasan kemiskinan.	70.Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat	60.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7 01	1 01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200 Data	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	da pe pe	fembangun dari desa dan ari bawah untuk ertumbuhan ekonomi, emerataan ekonomi dan emberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat	300,000,000,000	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	25 Laporan	3.240.109.046,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat	- 3.792.475.648,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	3.139.389.046,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat	3.592.475.648,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat	25.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	90.720.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan kenomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat	175.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	37 Laporan	48.200.000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat	- 225.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	5.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat	25.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat	150,000,000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT



7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	28.200.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat	50.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	31 Laporan	210.000.000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat	- 510.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat	25.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat	75.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat	50.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat	10.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat	00,000.000.000	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT



7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12 Dokumen	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat		50.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
									Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa		pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan				
												Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
7	01	. 01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-	4 Unit	115.000.000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat	-	0,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
7	01	. 01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	90.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat		0,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
7	01	. 01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		4 Unit	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat		0,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		25 Laporan	310.550.000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat	-	305.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
7	01	. 01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	1.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat			KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
7	01	. 01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	309.550.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat		300.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		4 Unit	200.750.000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat	-	430.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT



7	0	01 01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	51.250.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat	100.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
								Semua Kel/Desa			publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	0	01 01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	119.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat	180.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
7	0	01 01	2.09	0006	Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat		KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
456 7	0	01 02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan - dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	10.026.558.000,00					- 23.110.350.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
		01 02			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Laporan	400.000.000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat		KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
7	0	01 02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat	150.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
7	0	01 02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat	250.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
7	0	01 02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2 Laporan	100.000,000		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat	- 100.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT



		7 (01 02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Jumlah Langran Peningkatan		2 Lanoran	100 000 000 00 Kah Kutai Kartanegara	DANA RAGI HASII (DRH)	Membangun dari desa dan	7 Peningkatan tata kelola	Degawai dan		100 000 000 00	KECAMATAN KOTA BANGLIN
Part		′ I `	01 02	2.02	0003				2 Laporani		DANA BAGITIASIE (DBIT)					100.000.000,00	
A							Elektilitas Pelaksallaali Pelayallali										DARAT
Part of the control o						Wilayah Kecamatan								Kota Bangun Darat			
Mary Mary							Kecamatan										
Page Page												pemberantasan kemiskinan.	transformasi pelayanan				
Part Part										Semua Kel/Desa			publik				
Total Tota													1. Penataan dan				
Part Part																	
Part Part																	
Part																	
Part Part													1 dbiik				
Part Part		7 0	01 02	2.04			Jumlah pelaksanaan kegiatan	-	2 Kegiatan	9.526.558.000,00		-		-	-	22.610.350.000,00	
Part Part						yang Dilimpahkan kepada Camat	pemerintahan yang menjadi						pemerintahan daerah yang				DARAT
Part Part							kewenangan Camat						profesional dan akuntabel				
Part Part													untuk mendukung				
Part Part																	
Part Part																	
													F				
Part Part																	
Part Part																	
Part													Pemerintahan dan Pelayanan				
Second Configuration Second Configuration													Publik				
Second Configuration Second Configuration		7 (01 02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	i i i	4 Lanoran	962,478,000,00 Kah. Kutai Kartanegara	DANA BAGI HASII (DRH)	1-	7. Peningkatan tata kelola	-	i i	935.350.000 00	KECAMATAN KOTA BANGLIN
Total Continues Continues	1 1	· `	52	2.04	0002				- Laporon							333.333.000,00	
Part Part	1 1			1	1	yang terkait dengan Nonperizinan			[[I						DANAT
Section of the continue of t	1 1			1	1	1	remerintahan		[[I						
Some Anglicus Procession P	1 1			1	1	1			[[I						
Part Part	1 1			1	1	1			[[I		transformasi pelayanan				
Part Part				1	1	1				Semua Kel/Desa	İ	1	publik	1			1
Proceedings of the Note of Proceedings of the Note of Proceedings of Procedings of Proceedings of Procedings of Proceedings of Proceedings of Proceedings				1	1	1					İ	1	1. Penataan dan	1			1
Project Proj																	
Part Column Part Colum																	
Part																	
Public Syland, Private Services (Company) Public Syland, Syland, Private Services (Company) Public Syland, Syland, Private Services (Company) Public Syland, Syland, Private Services (Company) Public Syland, Syland, Private Syland, Private Services (Company) Public Syland, Syland, Private Sylan																	
Activation of the control of the c		7 (01 02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan		13 Laporan	8.564.080.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan tata kelola	-		21.675.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
So. R. Co. B. Co						yang Terkait dengan Kewenangan	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Pulau Seluan, Semua			pemerintahan daerah yang				DARAT
SSD Registration print, See See Seege During. During Registrates and Production and Programma Seege Seege During Seege Seege During Seege Seege During Seege Seege During Seege Seeg																	
Casil Engine Durit, Semina 46/(Decay) Proceedings of the Process of the Proce						, 8											
Somus Kei/Pices Somus Kei/																	
Freedom Free																	
Programmage in its sciols Programmage in its										Semua Kel/Desa			paom				
Fig. Fig.													Penataan dan				
40 10 10 10 10 10 10 10																	
Fig. Fig.																	
MASYMANATORSA DAN Pemberdayaan Mayayahat DasyMorthan Trag Affel Pemberdayaan Mayayahat DasyMorthan Trag Affel Pemberdayaan Mayayahat DasyMorthan Trag Affel Pemberdayaan Mayayahat DasyMorthan Dasy Mort													Pengembangan Tata Kelola				
Membargun dari desa dan permetratana hemistra													Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan				
To 1 1 1 1 1 1 1 1 1	457	7 (01 03			DROGRAM DEMREDDAYAAN	Parcentace Lembara		100 Person	400 000 000 00			Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			486 000 000 00	KECAMATAN KOTA RANGLIN
Permitted and program from the program from program from the program from the program from the program from program from the program from the program from the program from program from the program from the program from the program from program from the program from the program from the program from program from the program from the program from the program from program from the program from the program from the program from program from the program from the program from the program from program from the progr	457	7 (01 03					-	100 Persen	400.000.000,00			Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		-	486.000.000,00	
dari bawayan tunkung pemerataan kenomori dan pemberatyaan Desa dilaksanakan Desa / Keburahan dan kenama kenomori dan pemberatyaan kenomori dan pemberatyaan kenomori dan pemberatyaan kenomori dan pemberatyaan kenomori dan pemberatyaan kenomori dan pemberatyaan kenomori dan pemberatyaan kenomori dan pemberatyaan kenomori dan pemberatyaan kenomori dan pemberatyaan kenomori dan pemberatyaan pemberatyaan dan pembera	457	7 (01 03			MASYARAKAT DESA DAN	Pemberdayaan Masyarakat	-	100 Persen	400.000.000,00			Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		-	486.000.000,00	
pertumbuhan ekonomi, permetatan kemiskinan dan akuntabel memberarkan kemiskinan palak 1. Permitan dan akuntabel memberarkan kemiskinan palak 1. Permitan dan akuntabel memberarkan kemiskinan palak 1. Permitan dan akuntabel memberarkan kemiskinan palak 1. Permitan dan akuntabel memberarkan kemiskinan palak 1. Permitan dan akuntabel memberarkan kemiskinan palak 1. Permitan dan akuntabel memberarkan kemiskinan palak 1. Permitan dan akuntabel memberarkan kemiskinan palak 1. Permitan dan akuntabel memberarkan kemiskinan kerakan palak 1. Permitan dan akuntabel memberarkan kemiskinan kerakan palak 1. Permitan dan akuntabel memberarkan kemiskinan kerakan palak 1. Permitan dan akuntabel memberarkan kemiskinan kerakan palak 1. Permitan kerakan palak 1. Permitan kerakan permitan kerakan permitan kerakan permitan kerakan palak 1. Permitan kerakan pala						MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	-		·			Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		-		DARAT
pemeratana ckonomi dia pemberatana nemisikanan pemberatanan pemberatanan pemberatanan pemberatanan pemberatanan pemberatanan pemberatanan pemberatanan nemisikanan pemberatanan nemisikanan pemberatanan nemisikanan pemberatanan nemisikanan pemberatanan nemisik						MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Laporan Koordinasi yang	-		·			Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola		-		DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN
Pemberantsana kemiskinan. 7 01 03 201 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat III Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Pembangunan di Desa 8 1 2 1 0001 000000000000000000000000000						MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Laporan Koordinasi yang	-		·		dari bawah untuk	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Masyarakat	-		DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN
Pemberantsaan kemiskinan Pemberantsaan kemiski						MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Laporan Koordinasi yang	-		·		dari bawah untuk	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Masyarakat	-		DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN
publik 1. Pennatan dan Pengembangan Tata Kelola Pennerirahan dan Pengembangan Tata Kelola Pennerirahan dan Pengembangan Tata Kelola Pennerirahan dan Pengembangan Tata Kelola Pennerirahan dan Pengembangan Tata Kelola Pennerirahan dan Pengembangan Tata Kelola Pennerirahan dan Pengembangan dan dari bawah untuk Menyawan Penberanan Penberanan Pembangunan di Desa Total OS 201 003 Peningkatan Penberanan Penberanan Pembangunan di Desa Total OS 201 003 Peningkatan Penberanan						MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Laporan Koordinasi yang	-		·		dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Masyarakat Kecamatan Kota	-		DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN
Pengentahan dan Pelayarah Permerintahan dan Pelayarah Pulau Seluan, Semus Kel/Desa Seluan						MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Laporan Koordinasi yang	-		·		dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	Masyarakat Kecamatan Kota	-		DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN
Pengembangan Tata Kelola Peningkatan Partisipasi Masyarakat Jumilah Lembaga Kemasyarakatan Peliku Sebuan, Semua Ke/Desa Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penbangunan di Desa Penngkatan Fetitifias Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Canada Penngenbangan Tata Kelola Pengemba						MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Laporan Koordinasi yang	-		·		dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Kota	-		DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN
Total Control of the Periodic Remarks of the Periodic Remarks (Pasa) Periodic Remarks (Pasa)						MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Laporan Koordinasi yang	-		·		dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Kota	-		DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN
Pulsus Sulari Partisipasi Masyarakatan Vandalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sulari Masurakatan Vandalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sulari Masurakatan Vandalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sulari Masurakatan Vandalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sulari Masurakatan Vandalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sulari Masurakatan Vandalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sulari Masurakatan Vandalam Forum Musyawarakatan Vandalam Forum Vandalam Vandalam Forum Vandalam Vandalam Forum Vandalam Vandal						MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Laporan Koordinasi yang	-		·		dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Masyarakat Kecamatan Kota	-		DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN
7 01 03 2.01 000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Perencanaan Pembangunan Pemba						MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Laporan Koordinasi yang	-		·		dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Masyarakat Kecamatan Kota	-		DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN
dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Perencanaan Pembangunan di Desa Pembangunan dari desa dari pampan putahis kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pembangunan di Desa Pembangunan di Desa Pembangunan di Desa Pemberahasan kemiskinan Pembangun dari desa dari pampan putahis kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Masyarakat Kecamatan Masyarakat Kecamatan Masyarakat Kecamatan Masyarakat Kecamatan Masyarakat Kecamatan Masyarakat Kecamatan Masyarakat Kecamatan Masyarakat Kecamatan Masyarakat Kecamatan Masyarakat Kecamatan Masyarakat Kecamatan Masyarakat Kecamatan						MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Laporan Koordinasi yang	-		·		dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Masyarakat Kecamatan Kota	-		DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN
dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Perencanaan Pembangunan di Desa Pembangunan dari desa dari pampan putahis kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pembangunan di Desa Pembangunan di Desa Pembangunan di Desa Pemberahasan kemiskinan Pembangun dari desa dari pampan putahis kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Masyarakat Kecamatan Masyarakat Kecamatan Masyarakat Kecamatan Masyarakat Kecamatan Masyarakat Kecamatan Masyarakat Kecamatan Masyarakat Kecamatan Masyarakat Kecamatan Masyarakat Kecamatan Masyarakat Kecamatan Masyarakat Kecamatan Masyarakat Kecamatan						MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Laporan Koordinasi yang	-		·		dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Masyarakat Kecamatan Kota	-	100.000.000,00	DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
Ref/Desa Ref/Ref/Ref/Ref/Ref/Ref/Ref/Ref/Ref/Ref/		7 (01 03	2.01		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Laporan Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	-	12 Laporan	100.000.000,00	DANA BAGI HASII (DRH)	dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat	-	100.000.000,00	DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
Pembangunan di Desa Kab. Kutal Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Pembangunan di Desa Kab. Kutal Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Pentatan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Pelayanan Publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Pelayanan Publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Pelayanan Publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Pelayanan		7 (01 03	2.01		MASYARAKAT DESA DAN KEURAHAN KOOrdinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Laporan Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	-	12 Laporan	100.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Membangun dari desa dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat	-	100.000.000,00	DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN
Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Tansformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Penmerintahan dar Pelayanan Publik Tansformasi pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Penmerintahan dan Pelayanan Publik Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tansformasi pelayanan Publik Tansformasi		7 (01 03	2.01		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KOordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Laporan Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	-	12 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Membangun dari desa dan dari bawah untuk	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat Pegawai dan Masyarakat Kecamatan	-	100.000.000,00	DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN
Semua Kel/Desa Semua Kel/Desa Semua Kel/Desa Semua Kel/Desa Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Dana Bagi Hasil (DBH) Pemberdayaan Masyarakat talelola pemerintahan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan. Nota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Abagi Hasil (DBH) Pengembangan Tata Kelola pemerintahan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan. Nota Bangun Darat Vita Kartanegara, Kota Bangun Darat Vita Kartanegara, Kota Bangun Darat Vita Kartanegara, Kota Bangun Darat Vita Kartanegara, Kota Bangun Darat Vita Kartanegara, Kota Bangun Darat Vita Kartanegara, Kota Bangun Darat Vita Kartanegara, Vita Kartanegara, Pemberataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Nota Bangun Darat Vita Bangu		7 (01 03	2.01		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KOordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Laporan Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	-	12 Laporan	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat Pegawai dan Masyarakat Kecamatan	-	100.000.000,00	DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN
1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Penge		7 (01 03	2.01		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KOordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Laporan Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	-	12 Laporan	50.000.000,00 So.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat Pegawai dan Masyarakat Kecamatan	-	100.000.000,00	DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN
Pengembangan Tata Kelola Pemintahan dan Pelayanan Publik 7 O1 O3 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Wilayah Kecamatan 9 Pengembangan Tata Kelola Pemintahan dan Pelayanan Publik 8 Pengembangan Tata Kelola Pemintahan dan Pelayanan Publik 9 Pengembangan Tata Kelola Pemintahan dan Pelayanan Publik 9 Pengembangan Tata Kelola Pemintahan dan Pelayanan Publik 9 Pengembangan Tata Kelola Pemintahan dan Pelayanan Publik 9 Pengembangan Tata Kelola Pemintahan dan Pelayanan Publik 1 Pengamanan Tata Kelola Pemintahan dan Pelayanan Publik 1 Pengembangan Tata Kelola Pemintahan dan Publik 1 Pengembangan Tata Ke		7 (01 03	2.01		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KOordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Laporan Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan		12 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat,	DANA BAGI HASIL (DBH)	dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat Pegawai dan Masyarakat Kecamatan	-	100.000.000,00	DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN
Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 2 Laporan 5 0.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Ke/Desa 8 2 Laporan 5 0.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Ke/Desa 8 2 Laporan 5 0.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, DANA BAGI HASIL (DBH) Agri bawah untuk pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 8 2 Laporan 5 0.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, DANA BAGI HASIL (DBH) Agri bawah untuk pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah		7 (01 03	2.01		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KOordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Laporan Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	-	12 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat,	DANA BAGI HASIL (DBH)	dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat Pegawai dan Masyarakat Kecamatan	-	100.000.000,00	DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN
Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 2 Laporan 5 0.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Ke/Desa 8 2 Laporan 5 0.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Ke/Desa 8 2 Laporan 5 0.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, DANA BAGI HASIL (DBH) Agri bawah untuk pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 8 2 Laporan 5 0.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, DANA BAGI HASIL (DBH) Agri bawah untuk pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah		7 (01 03	2.01		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KOordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Laporan Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan		12 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat,	DANA BAGI HASIL (DBH)	dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat Pegawai dan Masyarakat Kecamatan	-	100.000.000,00	DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN
7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Wilayah Wilayah Kecamatan Wilayah Wilayah Kecamatan Wilayah Wilayah Kecamatan Wilayah Wilayah Kecamatan Wilayah Wilayah Wilayah Kecamatan Wilayah Wila		7 (01 03	2.01		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KOordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Laporan Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	-	12 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat,	DANA BAGI HASIL (DBH)	dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat Pegawai dan Masyarakat Kecamatan	-	100.000.000,00	DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN
7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Masyarakat Kecamatan pemberantasan kemiskinan. Varian dari bawah untuk mendukung profesional alarak yang profesional ana kuntapi untuk mendukung transifik 1. Penataan dan Pelayanan Pemberangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pemberangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pemberangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pemberangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pemberangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pemberangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pemberangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pemberangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pemberangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pemberangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pemberangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pemberangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pemberangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pemberangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pemberangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pemberangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pemberangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pemberangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pemberangan Tata Kelola Pemerintahan dan Penangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pemberangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pemberangan Tata Kelola Pemerintahan da		7 (01 03	2.01		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KOordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Laporan Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	-	12 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat,	DANA BAGI HASIL (DBH)	dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat Pegawai dan Masyarakat Kecamatan	-	100.000.000,00	DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Wil		7 (01 03	2.01		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KOordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Laporan Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	-	12 Laporan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat,	DANA BAGI HASIL (DBH)	dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat Pegawai dan Masyarakat Kecamatan	-	100.000.000,00	DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN
Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kel/Desa pertumbuhan ekonomi, profesional dan akuntabel utunsformendukung trunsformendukung trunsformendukung trunsformendukung pemberantasan kemiskinan. Semua Kel/Desa pertumbuhan ekonomi, profesional dan akuntabel utunsformendukung trunsformendukung trunsformendukung trunsformendukung trunsformendukung pemberantasan kemiskinan. Semua Kel/Desa pemberantasan kemiskinan. Semua Kel/Desa pemberantasan kemiskinan. Pengerabanan dan Pengerabangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		7 (01 03	2.01	0001	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KOordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Laporan Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	12 Laporan 3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa		dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penatanan dan Pelayanan publik 1. Penatanan dan Pelayanan publik 1. Penatanan dan Pelayanan publik 1. Penatahan dan Pelayanan publik 1. Penatahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat	-	50.000.000,00	DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
Kab. Kutai Kartanegara, pemerataan ekonomi dan kota Bangun Darat, pemberantasan kemiskinan tambul pemberantasan kemiskinan tambul publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		7 (01 03	2.01	0001	MASYARAKAT DESA DAN KEURAHAN KOordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Laporan Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Laporan Peningkatan	-	12 Laporan 3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Fulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Sol.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kota Karta		dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Peniataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat	-	50.000.000,00	DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN
Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Femberantasan kemiskinan. transformasi pelayanan publik 1. Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		7 (01 03	2.01	0001	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Laporan Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	-	12 Laporan 3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa		dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat Pegawai dan Masyarakat Kecamatan	-	50.000.000,00	DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN
Semua Kel/Desa publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		7 (01 03	2.01	0001	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Laporan Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan		12 Laporan 3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00 Sab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Sol.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa		dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan akuntabel pemerintahan dan akuntabel dan dan kuntabel dan akuntabel dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan	Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat Pegawai dan Masyarakat Kecamatan		50.000.000,00	DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN
Semua Kel/Desa publik 1. Penataan dan Pengembaangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		7 (01 03	2.01	0001	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Laporan Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	-	12 Laporan 3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00 Sab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Sol.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa		dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan akuntabel pemerintahan dan akuntabel dan dan kuntabel dan akuntabel dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan	Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat Pegawai dan Masyarakat Kecamatan	-	50.000.000,00	DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN
1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerinthah dan Pelayanan		7 (01 03	2.01	0001	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Laporan Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	-	12 Laporan 3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa Sab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara,		dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peniataan dan Pelayanan Publik 1. Peniataan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat Pegawai dan Masyarakat Kecamatan		50.000.000,00	DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN
Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		7 (01 03	2.01	0001	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Laporan Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	-	12 Laporan 3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Kota Bangun Darat, Kota Bangun Darat,		dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat Pegawai dan Masyarakat Kecamatan	-	50.000.000,00	DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN
Pemerintahan dan Pelayanan		7 (01 03	2.01	0001	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Laporan Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan		12 Laporan 3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Kota Bangun Darat, Kota Bangun Darat,		dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat Pegawai dan Masyarakat Kecamatan	-	50.000.000,00	DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN
		7 (01 03	2.01	0001	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Laporan Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan		12 Laporan 3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Kota Bangun Darat, Kota Bangun Darat,		dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat Pegawai dan Masyarakat Kecamatan	-	50.000.000,00	DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN
		7 (01 03	2.01	0001	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Laporan Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan		12 Laporan 3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Kota Bangun Darat, Kota Bangun Darat,		dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat Pegawai dan Masyarakat Kecamatan	-	50.000.000,00	DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN
		7 (01 03	2.01	0001	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Laporan Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan		12 Laporan 3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa 50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Kota Bangun Darat, Kota Bangun Darat,		dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 2. Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan pengemintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat Pegawai dan Masyarakat Kecamatan	-	50.000.000,00	DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT KECAMATAN KOTA BANGUN



	7 0	01 0	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Laporan	300.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat		KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7 0	01 0	3 2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan	386.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
						yang Diselenggarakan	Kemasyarakatan		Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa		dari bawan untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	pemerintanan daeran yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat		
458	7 0	01 0	14		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketertaman - dan Ketertiban Umum	100 Persen	261.000.000,00						- 225.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7 0	01 0	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	261.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat		KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7 0	01 0	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat	50.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7 0	01 0	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	211.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan kekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat		KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
459	7 0	01 0	15		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Peyelenggaraan urusan - pemerintahan Umum	100 Persen	195.000.000,00							KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
	7 0	01 0	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	2 Kegiatan	195.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat		KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

7													
	01	05 2.0	.01 00	4 Pembinaan Kerukunan Antar Suku	Jumlah Orang yang Mengikuti	50 Orang	180.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan	7. Peningkatan tata kelola	Pegawai dan	200.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
				dan Intra Suku, Umat Beragama,	Pembinaan Kerukunan Antar Suku		Pulau Seluan, Semua		dari bawah untuk	pemerintahan daerah yang	Masyarakat Kecamatan		DARAT
				Ras, dan Golongan Lainnya Guna	dan Intra Suku , Umat Beragama,		Kel/Desa		pertumbuhan ekonomi,	profesional dan akuntabel	Kota Bangun Darat		
				Mewujudkan Stabilitas Keamanan	Ras, dan Golongan Lainnya Guna		Kab. Kutai Kartanegara,		pemerataan ekonomi dan	untuk mendukung			
				Lokal, Regional, dan Nasional	Mewujudkan Stabilitas Keamanan		Kota Bangun Darat,		pemberantasan kemiskinan.	transformasi pelayanan			
					Lokal, Regional, dan Nasional		Semua Kel/Desa			publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
1 1										Publik			
7	01	05 2.0	.01 00	18 Pelaksanaan Tugas Forum	Jumlah Dokumen Tugas Forum	3 Dokumen	15.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan	7. Peningkatan tata kelola	Pegawai dan	25.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
				Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Pulau Seluan, Semua	,	dari bawah untuk	pemerintahan daerah yang	Masyarakat Kecamatan		DARAT
							Kel/Desa		pertumbuhan ekonomi,	profesional dan akuntabel	Kota Bangun Darat		
							Kab. Kutai Kartanegara,		pemerataan ekonomi dan	untuk mendukung			
							Kota Bangun Darat,		pemberantasan kemiskinan.	transformasi pelayanan			
							Semua Kel/Desa			publik			
										Penataan dan			
1 1										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
160 7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN	Cakupan Pembinaan dan -	 100 Persen	75.000.000,00		+			- 75 000 000 0C	KECAMATAN KOTA BANGUN
٠ / ١	01	00		PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Pengawasan Pemerintahan Desa	100 1 613611	73.000.000,00					73.000.000,00	DARAT
				DESA	Pengawasan Pemerintahan Desa								DARAT
7	01	06 2.0	.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan -	 12 Laporan	75.000.000,00		Mambanan dari dasa dan	7. Peningkatan tata kelola	Pegawai dan	- 75.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
'	01	06 2.	.01	Koordinasi	Koordinasi Pembinaan dan	12 Laporan	75.000.000,00		Membangun dari desa dan	pemerintahan daerah yang		- 75.000.000,00	DARAT
1 1				Koordinasi					dari bawah untuk		Masyarakat Kecamatan Kota		DARAT
				Donald Donas de Donas	Pengawasan Pemerintahan Desa				pertumbuhan ekonomi,	profesional dan akuntabel			
				Pembinaan dan Pengawasan					pemerataan ekonomi dan	untuk mendukung	Bangun Darat		
				Pemerintahan Desa					pemberantasan kemiskinan.	transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
1 1										Pemerintahan dan Pelayanan			
\bot										Publik			
7	01	06 2.0	.01 00	7 Koordinasi Pendampingan Desa di		12 Laporan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan	7. Peningkatan tata kelola	Pegawai dan	75.000.000,00	KECAMATAN KOTA BANGUN
				Wilayahnya	Pendampingan Desa di Wilayahnya		Pulau Seluan, Semua		dari bawah untuk	pemerintahan daerah yang	Masyarakat Kecamatan		DARAT
							Kel/Desa		pertumbuhan ekonomi,	profesional dan akuntabel	Kota Bangun Darat		
							Kab. Kutai Kartanegara,		pemerataan ekonomi dan	untuk mendukung			
1 1							Kota Bangun Darat,		pemberantasan kemiskinan.	transformasi pelayanan			
1 1							Semua Kel/Desa			publik			
1 1										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
				Kecamatan Samboja Barat			45.119.082.465,00					69.013.763.302,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
7				UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01			ON SON REVIEW DATE			45.119.082.465,00					69.013.763.302,00	KECAMATAN SAMBOJA
				KECAMATAN			45.119.082.465,00 45.119.082.465,00						KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA
	01	01		KECAMATAN	Nila: SAKIB Beransket Doorsh	60 Person	45.119.082.465,00					69.013.763.302,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT
161 7	01	01		KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	60 Persen	·					69.013.763.302,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA
161 7	01	01		KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	60 Persen	45.119.082.465,00					69.013.763.302,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT
			01	KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			45.119.082.465,00 19.296.811.715,00			7. Daningkatan tata kalal-	-	69.013.763.302,00 - 25.827.254.293,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT
		01 01 2.0	.01	KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen rencana, -	60 Persen 10 Dokumen	45.119.082.465,00			7. Peningkatan tata kelola	-	69.013.763.302,00 - 25.827.254.293,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT
			.01	KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen rencana, - anggaran, dan Evaluasi Kinerja		45.119.082.465,00 19.296.811.715,00			pemerintahan daerah yang	-	69.013.763.302,00 - 25.827.254.293,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT
			.01	KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen rencana, -		45.119.082.465,00 19.296.811.715,00		-	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	69.013.763.302,00 - 25.827.254.293,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT
			.01	KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen rencana, - anggaran, dan Evaluasi Kinerja		45.119.082.465,00 19.296.811.715,00			pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		69.013.763.302,00 - 25.827.254.293,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT
			.01	KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen rencana, - anggaran, dan Evaluasi Kinerja		45.119.082.465,00 19.296.811.715,00			pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	69.013.763.302,00 - 25.827.254.293,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT
			.01	KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen rencana, - anggaran, dan Evaluasi Kinerja		45.119.082.465,00 19.296.811.715,00		-	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	69.013.763.302,00 - 25.827.254.293,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT
			.01	KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen rencana, - anggaran, dan Evaluasi Kinerja		45.119.082.465,00 19.296.811.715,00		-	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	69.013.763.302,00 - 25.827.254.293,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT
			.01	KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen rencana, - anggaran, dan Evaluasi Kinerja		45.119.082.465,00 19.296.811.715,00			pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	69.013.763.302,00 - 25.827.254.293,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT
			.01	KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen rencana, - anggaran, dan Evaluasi Kinerja		45.119.082.465,00 19.296.811.715,00		-	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-	69.013.763.302,00 - 25.827.254.293,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT
7	01	01 2.4		KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	45.119.082.465,00 19.296.811.715,00 340.000.000,00		-	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	- 25.827.254.293,00 - 570.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT O KECAMATAN SAMBOJA BARAT
7	01			KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan		45.119.082.465,00 19.296.811.715,00 340.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-	- 25.827.254.293,00 - 570.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT
7	01	01 2.4		KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	45.119.082.465,00 19.296.811.715,00 340.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	- 25.827.254.293,00 - 570.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT O KECAMATAN SAMBOJA BARAT
7	01	01 2.4		KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan	10 Dokumen	45.119.082.465,00 19.296.811.715,00 340.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	- 25.827.254.293,00 - 570.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT
7	01	01 2.4		KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan	10 Dokumen	45.119.082.465,00 19.296.811.715,00 340.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	- 25.827.254.293,00 - 570.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT
7	01	01 2.4		KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan	10 Dokumen	45.119.082.465,00 19.296.811.715,00 340.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani	DANA BAGI HASIL (DBH)		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	- 25.827.254.293,00 - 570.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT
7	01	01 2.4		KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan	10 Dokumen	45.119.082.465,00 19.296.811.715,00 340.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	- 25.827.254.293,00 - 570.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT
7	01	01 2.4		KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan	10 Dokumen	45.119.082.465,00 19.296.811.715,00 340.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	- 25.827.254.293,00 - 570.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT
7	01	01 2.4		KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan	10 Dokumen	45.119.082.465,00 19.296.811.715,00 340.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani	DANA BAGI HASIL (DBH)		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	- 25.827.254.293,00 - 570.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT
7	01	01 2.4		KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan	10 Dokumen	45.119.082.465,00 19.296.811.715,00 340.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani	DANA BAGI HASIL (DBH)		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	- 25.827.254.293,00 - 570.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT KECAMATAN SAMBOJA BARAT



7	01	01 2.0	01 00	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			KECAMATAN SAMBOJA BARAT
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani		untuk mendukung transformasi pelayanan			
					Kinerja SKPD		Bhakti		publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
									Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	01	01 2.0	01 00	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang			KECAMATAN SAMBOJA BARAT
							Bhakti Kab. Kutai Kartanegara,		profesional dan akuntabel untuk mendukung			
							Kute Siantan, Tani Bhakti		transformasi pelayanan publik			
									Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
7	01	01 2.0	01 00	09 Pelaksanaan Pengumpulan Data	Jumlah Data Statistik Sektoral	2 Data	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	Publik - 7. Peningkatan tata kelola -		300.000.000.00 K	KECAMATAN SAMBOJA
				Statistik Sektoral Daerah	Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat		Samboja Barat, Tani Bhakti	,	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			BARAT
					Daerah		Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani		untuk mendukung transformasi pelayanan			
							Bhakti		publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
									Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	01	01 2.0	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keuangan Perangkat Daerah yang	12 Laporan	15.610.670.715,00	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-		KECAMATAN SAMBOJA BARAT
					akuntabel				profesional dan akuntabel untuk mendukung			
									transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			
									Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
7	01	01 2.0	02 00	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan AS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	73 Orang/bulan	15.135.670.715,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik - 7. Peningkatan tata kelola -		18.998.789.696.00 K	KECAMATAN SAMBOJA
				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	dan Tunjangan ASN		Samboja Barat, Semua Kel/Desa	,	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			BARAT
							Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Semua		untuk mendukung transformasi pelayanan			
							Kel/Desa		publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
									Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	01	01 2.0	02 00	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1 Laporan	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang			KECAMATAN SAMBOJA BARAT
				SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Bhakti Kab. Kutai Kartanegara,		profesional dan akuntabel untuk mendukung			
							Kute Siantan, Tani Bhakti		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			
									Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
7	01	01 2.0	02 00	07 Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	12 Laporan	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik - 7. Peningkatan tata kelola -		475.000.000,00 K	KECAMATAN SAMBOJA
				Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan		Samboja Barat, Semua Kel/Desa		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		В	BARAT
					Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Semua Kel/Desa		untuk mendukung transformasi pelayanan publik			
					סארט		Kel/ Desa		1. Penataan dan			
1 1			J					l l	Pengembangan Tata Kelola			



7	_													
	01	1 01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen administrasi -	15	5 Dokumen	180.600.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	-	- 280.600.000,0	00 KECAMATAN SAMBOJA
					pada Perangkat Daerah	barang milik daerah pada					pemerintahan daerah yang			BARAT
						perangkat daera					profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
7	01	1 01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	1	Dokumen	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BACI HACII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola		35 000 000 0	00 KECAMATAN SAMBOJA
′	01	1 01	2.03	0001	Kebutuhan Barang Milik Daerah	Milik Daerah SKPD		DOKUITIETI	Samboja Barat, Tani	DANA BAGITIASIL (DBII)	pemerintahan daerah yang	-	23.000.000,0	BARAT
					SKPD	Willik Daerali SKPD			Bhakti		perferituatian daeran yang profesional dan akuntabel			BARAT
					SKPD				Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
									Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani		transformasi pelayanan			
									Bhakti		nublik			
									blidku		1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
7	01	1 01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan	2	Dokumen	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	150.000.000,0	00 KECAMATAN SAMBOJA
	1		1	1	SKPD	Barang Milik Daerah SKPD			Samboja Barat, Tani		pemerintahan daerah yang			BARAT
	1		1	1	1				Bhakti		profesional dan akuntabel			
	1		1	1	1				Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
	1		1	1	1				Kute Siantan, Tani		transformasi pelayanan			
	1		1	1	1				Bhakti		publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
7	01	1 01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	12	2 Laporan	105.600.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	105,600,000,0	00 KECAMATAN SAMBOJA
		_			Laporan Barang Milik Daerah pada	Penyusunan Laporan Barang Milik			Samboja Barat, Tani		pemerintahan daerah yang			BARAT
					SKPD	Daerah pada SKPD			Bhakti		profesional dan akuntabel			57 40 11
					SKFD	Daeran pada 3KFD			Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
									Kute Siantan, Tani		transformasi pelayanan			
									Bhakti					
									впакт		publik 1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
_											Pemerintahan dan Pelayanan			
7	4										Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	01	1 01	2.05		Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Administrasi -	2	kegiatan	50.000.000,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola	-	- 150.000.000,0	00 KECAMATAN SAMBOJA
	01	1 01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi - Kepegawaian Perangkat Daerah	2	kegiatan	50.000.000,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	- 150.000.000,¢	00 KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	01	1 01	2.05				2	kegiatan	50,000.000,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	- 150.000.000,¢	
	01	1 01	2.05				2	kegiatan	50.000.000,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	- 150.000.000,0	
	01	1 01	2.05				2	kegiatan	50.000.000,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	- 150.000.000,¢	
	01	1 01	2.05				2	kegiatan	50.000.000		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	- 150.000.000,¢	
	01	1 01	2.05				2	kegiatan	50.000.000		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	- 150.000.000,0	
	01	1 01	2.05				2	kegiatan	50.000.000,00		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	- 150.000.000,¢	
	01	1 01	2.05				2	kegiatan	50,000.000		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-	- 150.000.000,¢	
	01	1 01	2.05				2	kegiatan	50.000.000		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	- 150.000.000,¢	
7					Perangkat Daerah	Kepegawaian Perangkat Daerah				DANA BAGI HASIL (DRHI)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		BARAT
7		1 01			Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi			kegiatan D Orang	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-		
7					Perangkat Daerah	Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi			50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang	-		BARAT DO KECAMATAN SAMBOJA
7					Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi	Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti			50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-		BARAT DO KECAMATAN SAMBOJA
7					Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi	Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi			50.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-		BARAT DO KECAMATAN SAMBOJA
7					Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi	Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi			50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan transformasi pelayanan	-		BARAT DO KECAMATAN SAMBOJA
7					Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi	Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi			50.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		BARAT DO KECAMATAN SAMBOJA
7					Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi	Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi			50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-		BARAT DO KECAMATAN SAMBOJA
7					Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi	Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi			50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-		BARAT DO KECAMATAN SAMBOJA
7					Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi	Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi			50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-		BARAT DO KECAMATAN SAMBOJA
	01	1 01	2.05	0011	Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	O Orang	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	150.000.000,0	BARAT DO KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	01		2.05	0011	Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20		50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	- Jumlah layanan	150.000.000,0	BARAT DO KECAMATAN SAMBOJA BARAT DO KECAMATAN SAMBOJA
	01	1 01	2.05	0011	Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	O Orang	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang	Administrasi Umum	150.000.000,0	BARAT DO KECAMATAN SAMBOJA BARAT
	01	1 01	2.05	0011	Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	O Orang	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik		150.000.000,0	BARAT DO KECAMATAN SAMBOJA BARAT DO KECAMATAN SAMBOJA
	01	1 01	2.05	0011	Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	O Orang	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	Administrasi Umum	150.000.000,0	BARAT DO KECAMATAN SAMBOJA BARAT DO KECAMATAN SAMBOJA
	01	1 01	2.05	0011	Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	O Orang	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik	Administrasi Umum	150.000.000,0	BARAT DO KECAMATAN SAMBOJA BARAT DO KECAMATAN SAMBOJA
	01	1 01	2.05	0011	Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	O Orang	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	Administrasi Umum	150.000.000,0	BARAT DO KECAMATAN SAMBOJA BARAT DO KECAMATAN SAMBOJA
	01	1 01	2.05	0011	Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	O Orang	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	Administrasi Umum	150.000.000,0	BARAT DO KECAMATAN SAMBOJA BARAT DO KECAMATAN SAMBOJA
	01	1 01	2.05	0011	Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	O Orang	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan darah Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Auntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan	Administrasi Umum	150.000.000,0	BARAT DO KECAMATAN SAMBOJA BARAT DO KECAMATAN SAMBOJA
	01	1 01	2.05	0011	Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	O Orang	50.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Administrasi Umum	150.000.000,0	BARAT DO KECAMATAN SAMBOJA BARAT DO KECAMATAN SAMBOJA

7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	38.838.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.455.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Publik	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	236.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	115.860.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	75.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KECAMATAN SAMBOJA BARAT



7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	3 Jenis	384.000.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	- 384.000.000,00 KECAMATAN SAMBOJA BARAT
										transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit	180.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	180.000.000,00 KECAMATAN SAMBOJA BARAT
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	204.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	204.000.000,00 KECAMATAN SAMBOJA BARAT
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa - Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bukan	1.693.188.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- 2.191.739.597,00 KECAMATAN SAMBOJA BARAT
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	33.750.000,00 KECAMATAN SAMBOJA BARAT
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	750.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	776.598.777,00 KECAMATAN SAMBOJA BARAT
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	940.688.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.381.390.820,00 KECAMATAN SAMBOJA BARAT



7	01	1 01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik - Daerah		100 Unit	510.200.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	877.940.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
					Daerah						profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
7	0:	1 01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas		58 Unit	100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	467.740.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
					Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Operasional atau Lapangan yang			Samboja Barat, Semua	, ,	pemerintahan daerah yang			BARAT
					Perizinan Kendaraan Dinas	Dipelihara dan dibayarkan Pajak			Kel/Desa		profesional dan akuntabel			
					Operasional atau Lapangan	dan Perizinannya			Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
									Kute Siantan, Semua Kel/Desa		transformasi pelayanan publik			
									Rely Desa		1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
7	0:	1 01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin		30 Unit	60.200.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	60.200.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
					Lainnya	Lainnya yang Dipelihara			Samboja Barat, Tani		pemerintahan daerah yang			BARAT
					1				Bhakti		profesional dan akuntabel			
			l		1				Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani		untuk mendukung transformasi pelayanan		1	
			l		1				Rute Siantan, Tani Bhakti		transformasi pelayanan publik		1	
			l		1				Dilaku		1. Penataan dan		1	
					1						Pengembangan Tata Kelola		1	
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
7	0:	1 01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan		1 Unit	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	200.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
					Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang			Samboja Barat, Tani		pemerintahan daerah yang			BARAT
						Dipelihara/Direhabilitasi			Bhakti		profesional dan akuntabel			
									Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani		untuk mendukung transformasi pelayanan			
									Bhakti		nublik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
7	0:	1 01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana		1 Unit	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	150.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
					dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang			Samboja Barat, Tani Bhakti		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			BARAT
					Bangunan Lanniya	Dipelihara/Direhabilitasi			Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
						Dipelinara di Chabintasi			Kute Siantan, Tani		transformasi pelayanan			
									Bhakti		publik			
											1. Penataan dan			
			l		1						Pengembangan Tata Kelola			
			l		1						Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	
462 7		1 02		<u> </u>	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Percentace polavanan periinan		75 PERSEN	16.411.870.750,00		Publik		22 709 500 000 00	KECAMATAN SAMBOJA
40Z /	"	02			PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP		75 PERSEIN	10.411.670./30,00				32.708.309.009,00	BARAT
7	01	1 02	2.01	<u> </u>	Koordinasi Penyelenggaraan	Laporan Koordinasi/Sinergi -		2 LAPORAN	500.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola		750.000.000.00	KECAMATAN SAMBOJA
1 1	"				Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan					pemerintahan daerah yang		12212301000,00	BARAT
					1 -		1				profesional dan akuntabel		1	
						Kegiatan Pemerintahan dengan								1
					Pemerintahan di Tingkat	Perangkat Daerah dan Instansi					untuk mendukung			
					Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						transformasi pelayanan			
						Perangkat Daerah dan Instansi					transformasi pelayanan publik			
						Perangkat Daerah dan Instansi					transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			
						Perangkat Daerah dan Instansi					transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
						Perangkat Daerah dan Instansi					transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			
7	7 02	1 02	2.01	0001		Perangkat Daerah dan Instansi		2 Laporan	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara.	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-	200.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
7	′ 0:	1 02	2.01	0001	Kecamatan	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		2 Laporan	200.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	200.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA BARAT
7	7 03	1 02	2.01	0001	Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan		2 Laporan	Samboja Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	200.000.000,00	
7	7 03	1 02	2.01	0001	Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegidan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi		2 Laporan	Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	200.000.000,00	
7	7 02	1 02	2.01	0001	Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan		2 Laporan	Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	200.000.000,00	
7	7 02	1 02	2.01	0001	Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegidan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi		2 Laporan	Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	200.000.000,00	
7	, 0:	1 02	2.01	0001	Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegidan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi		2 Laporan	Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	200.000.000,00	
7	7 02	1 02	2.01	0001	Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegidan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi		2 Laporan	Samboja Barat, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	200.000.000,00	



	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Lumlah Daluuman Baningkatan		2 Dokumen	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA PACI HASII (DDH)	- 7. Peningkatan tata kelola		550.000.000,00 KECAMAT	AATANICANADOIA
	′	01	02	2.01	0002		Jumlah Dokumen Peningkatan		2 Dokumen		DANA BAGI HASIL (DBH)		-	BARAT	
						Pemerintahan di Tingkat	Efektifitas Kegiatan Pemerintahan			Samboja Barat, Tani		pemerintahan daerah yang		BARAT	
						Kecamatan	di Tingkat Kecamatan			Bhakti		profesional dan akuntabel			
										Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
										Kute Siantan, Tani		transformasi pelayanan			
										Bhakti		publik			
										bliaka		1. Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal -		11	10.000.000,00	†	- 7. Peningkatan tata kelola		10.000.000,00 KECAMA	AATANI CANADOLA
	′	01	02	2.02					1 Laporan	10.000.000,00			- -		
						Pemerintahan yang Tidak	(SPM) yang disfaslitasi					pemerintahan daerah yang		BARAT	
						Dilaksanakan oleh Unit Kerja						profesional dan akuntabel			
						Perangkat Daerah yang Ada di						untuk mendukung			
						Kecamatan						transformasi pelayanan			
												publik			
												1. Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian	Jumlah Laporan Fasilitasi		1 Laporan	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DRH)	- 7. Peningkatan tata kelola	1-	10.000.000,00 KECAMAT	IATAN SAMROIA
	·	01	02	2.02	0002				Laporan		or man brott insit (DBH)		1		
1			1 1			Standar Pelayanan Minimal di	Percepatan Pencapaian Standar		1	Samboja Barat, Tani	I	pemerintahan daerah yang	1	BARAT	
1			1			Wilayah Kecamatan	Pelayanan Minimal di Wilayah		1	Bhakti	İ	profesional dan akuntabel	1	1	
1			1		l		Kecamatan			Kab. Kutai Kartanegara,	1	untuk mendukung			
1			1 1						1	Kute Siantan, Tani	I	transformasi pelayanan	1		
			1 1						1	Bhakti	I	publik	1		
			1 1						1	Dilaku	I	P	1		
1			1				l l		1	1	İ	1. Penataan dan	1	1	
1			1 1						1		I	Pengembangan Tata Kelola	1		
												Pemerintahan dan Pelayanan			
												Publik			
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan -		30 Kegiatan	15.901.870.750,00	t	- 7. Peningkatan tata kelola	 	31.948.509.009,00 KECAMA	MATANI CANADOLA
	′	01	02	2.04					30 Regiatari	15.901.870.750,00			- -		
						yang Dilimpahkan kepada Camat	Pemerintahan yang Menjadi					pemerintahan daerah yang		BARAT	
							Kewenangan Camat					profesional dan akuntabel			
												untuk mendukung			
												transformasi pelayanan			
												nuhlik			
												Pasin			
												1. Penataan dan			
												Pengembangan Tata Kelola			
												Pemerintahan dan Pelayanan			
	-											Pemerintahan dan Pelayanan Puhlik			
	/											Publik			
		01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan		4 Laporan	917.870.750,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik - 7. Peningkatan tata kelola	-	917.870.750,00 KECAMA	
		01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nonperizinan pada Urusan		4 Laporan	Samboja Barat, Tani	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	917.870.750,00 KECAMAT BARAT	
		01	02	2.04	0002				4 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-		
		01	02	2.04	0002		Nonperizinan pada Urusan		4 Laporan	Samboja Barat, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-		
		01	02	2.04	0002		Nonperizinan pada Urusan		4 Laporan	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-		
		01	02	2.04	0002		Nonperizinan pada Urusan		4 Laporan	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-		
		01	02	2.04	0002		Nonperizinan pada Urusan		4 Laporan	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		
		01	02	2.04	0002		Nonperizinan pada Urusan		4 Laporan	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-		
		01	02	2.04	0002		Nonperizinan pada Urusan		4 Laporan	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-		
		01	02	2.04	0002		Nonperizinan pada Urusan		4 Laporan	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-		
		01	02	2.04	0002		Nonperizinan pada Urusan		4 Laporan	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-		
	7					yang terkait dengan Nonperizinan	Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan			Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	BARAT	
	7			2.04	0002	yang terkait dengan Nonperizinan	Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan		4 Laporan 15 Laporan	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti		- Vehilk 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola	-	31.030.638.259,00 KECAMA	1ATAN SAMBOJA
	7					yang terkait dengan Nonperizinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan	Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan			Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 14.984.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengambangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	BARAT	IATAN SAMBOJA
:	7					yang terkait dengan Nonperizinan	Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan			Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 14.984.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Vehing 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	31.030.638.259,00 KECAMA	1ATAN SAMBOJA
	7					yang terkait dengan Nonperizinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan	Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan			Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 14.984.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengambangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang		31.030.638.259,00 KECAMA	IATAN SAMBOJA
	7					yang terkait dengan Nonperizinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan	Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan			Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 14.984.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	31.030.638.259,00 KECAMA	IATAN SAMBOJA
	7					yang terkait dengan Nonperizinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan	Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan			Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 14.984.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan putasi pelayanan putasi pengengan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	31.030.638.259,00 KECAMA	1ATAN SAMBOJA
	7					yang terkait dengan Nonperizinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan	Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan			Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 14.984.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Vehing 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	31.030.638.259,00 KECAMA	1ATAN SAMBOJA
	7					yang terkait dengan Nonperizinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan	Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan			Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 14.984.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	31.030.638.259,00 KECAMA	1ATAN SAMBOJA
	7					yang terkait dengan Nonperizinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan	Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan			Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 14.984.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola	-	31.030.638.259,00 KECAMA	IATAN SAMBOJA
	7					yang terkait dengan Nonperizinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan	Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan			Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 14.984.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	31.030.638.259,00 KECAMA	IATAN SAMBOJA
	7					yang terkait dengan Nonperizinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan	Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan			Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 14.984.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola	-	31.030.638.259,00 KECAMA	1ATAN SAMBOJA
462		01	02			yang terkait dengan Nonperizinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		15 Laporan	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 14.984.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik	-	31.030.638.259,00 KECAMAT BARAT	NATAN SAMBOJA
463		01	02			yang terkait dengan Nonperizinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan PROGRAM PEMBERDAYAAN	Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 14.984.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik		31.030.638.259,00 KECAMA1 BARAT 9.803.000.000,00 KECAMA2	IATAN SAMBOJA
463		01	02			yang terkait dengan Nonperizinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		15 Laporan	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 14.984.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik		31.030.638.259,00 KECAMAT BARAT	IATAN SAMBOJA
	7	01	02	2.04		yang terkait dengan Nonperizinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEURAHAN	Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan yang Aktif	-	15 Laporan 15 Persen	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 14.984.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dar Pelayanan Publik		9.803.000.000,00 KECAMA' BARAT	IATAN SAMBOJA
463	7	01	02	2.04		yang terkait dengan Nonperizinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	-	15 Laporan	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 14.984.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik		31.030.638.259,00 KECAMA1 BARAT 9.803.000.000,00 KECAMA2	IATAN SAMBOJA
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KOOrdinasi Kegiatan	Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Koordinasi yang		15 Laporan 15 Persen	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 14.984.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola		9.803.000.000,00 KECAMA' BARAT 210.000.000,00 KECAMA'	IATAN SAMBOJA IATAN SAMBOJA
	7	01	02	2.04		yang terkait dengan Nonperizinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEURAHAN	Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan yang Aktif	-	15 Laporan 15 Persen	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 14.984.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Vehing - Publik - Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - Penerintahan dan Pelayanan Publik - Penerintahan dan Pelayanan Publik - Penerintahan dan Pelayanan Publik		9.803.000.000,00 KECAMA' BARAT	IATAN SAMBOJA IATAN SAMBOJA
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KOOrdinasi Kegiatan	Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Koordinasi yang	-	15 Laporan 15 Persen	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 14.984.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		9.803.000.000,00 KECAMA' BARAT 210.000.000,00 KECAMA'	IATAN SAMBOJA IATAN SAMBOJA
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KOOrdinasi Kegiatan	Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Koordinasi yang	-	15 Laporan 15 Persen	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 14.984.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung untuk mendukung		9.803.000.000,00 KECAMA' BARAT 210.000.000,00 KECAMA'	IATAN SAMBOJA IATAN SAMBOJA
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KOOrdinasi Kegiatan	Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Koordinasi yang	-	15 Laporan 15 Persen	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 14.984.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		9.803.000.000,00 KECAMA' BARAT 210.000.000,00 KECAMA'	IATAN SAMBOJA IATAN SAMBOJA
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KOOrdinasi Kegiatan	Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Koordinasi yang	-	15 Laporan 15 Persen	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 14.984.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Vehilik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 1. Penataan dan Pelayanan Publik - 2. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 3. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 3. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		9.803.000.000,00 KECAMA' BARAT 210.000.000,00 KECAMA'	IATAN SAMBOJA IATAN SAMBOJA IATAN SAMBOJA
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KOOrdinasi Kegiatan	Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Koordinasi yang	-	15 Laporan 15 Persen	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 14.984.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Pelayanan Publik		9.803.000.000,00 KECAMA' BARAT 210.000.000,00 KECAMA'	IATAN SAMBOJA IATAN SAMBOJA
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KOOrdinasi Kegiatan	Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Koordinasi yang	-	15 Laporan 15 Persen	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 14.984.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Veningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik - V. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		9.803.000.000,00 KECAMA' BARAT 210.000.000,00 KECAMA'	IATAN SAMBOJA IATAN SAMBOJA
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KOOrdinasi Kegiatan	Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Koordinasi yang		15 Laporan 15 Persen	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 14.984.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang berjaman publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola		9.803.000.000,00 KECAMA' BARAT 210.000.000,00 KECAMA'	IATAN SAMBOJA IATAN SAMBOJA
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KOOrdinasi Kegiatan	Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif Jumlah Koordinasi yang	-	15 Laporan 15 Persen	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 14.984.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	- Veningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik - V. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		9.803.000.000,00 KECAMA' BARAT 210.000.000,00 KECAMA'	IATAN SAMBOJA IATAN SAMBOJA



7	01 (03 2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga	185.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	185.000.000,00 KECAMA	MATAN SAMBOJA
				dalam Forum Musyawarah	yang Berpartisipasi dalam Forum		Kemasyarakatan	Samboja Barat, Tani	, ,	pemerintahan daerah yang		BARAT	
				Perencanaan Pembangunan di Desa			,	Bhakti		profesional dan akuntabel			
					Pembangunan di Desa			Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
								Kute Siantan, Tani		transformasi pelayanan			
								Bhakti		publik			
								DIIdKU					
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
7	01 (03 2.01	1 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah Laporan Peningkatan		1 Laporan	25.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	25.000.000,00 KECAM/	AATAN SAMBOJA
				Pemberdayaan Masyarakat di	Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan			Samboja Barat, Tani	1	pemerintahan daerah yang		BARAT	r
				Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Bhakti		profesional dan akuntabel		574411	
				vviiayan kecamatan	iviasyarakat ar vviiayari kecamatan			Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
								Kute Siantan, Tani					
										transformasi pelayanan			
								Bhakti		publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
7	01 (03 2.02	12	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti -		23 Kegiatan	240.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola		240.000.000,00 KECAM	MATAN SAMBOJA
'			-		Desa/Kelurahan		gatan	2-1010001000,00		pemerintahan daerah yang		BARAT	
			1		Desay result distant					profesional dan akuntabel		DARAI	•
			1						1				
			1						1	untuk mendukung			
			1					1		transformasi pelayanan			
			1					1	1	publik			
			1					1		1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
	01 (03 2.02	2 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Lumbah Lambaga Kamasusyakatan		1 Lembaga	150.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BACILIASII (DDII)	- 7. Peningkatan tata kelola		150.000.000,00 KECAM	AA TANI CANADOJA
/ /	01 (03 2.02	12 0001						DANA BAGI HASIL (DBH)		-		
				dalam Forum Musyawarah	yang Berpartisipasi dalam Forum		Kemasyarakatan	Samboja Barat, Tani		pemerintahan daerah yang		BARAT	
				Perencanaan Pembangunan di	Musyawarah Perencanaan			Bhakti		profesional dan akuntabel			
				Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan			Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
								Kute Siantan, Tani		transformasi pelayanan			
								Bhakti		publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	01 (03 2.02	12 0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi		2 Laporan	90.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola	-	90.000.000,00 KECAMA	
7	01 (03 2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		2 Laporan	Samboja Barat, Tani	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	90.000.000,00 KECAM/ BARAT	
7	01 0	03 2.02	0004	Evaluasi Kelurahan			2 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola	-		
7	01 (03 2.02	0004	Evaluasi Kelurahan			2 Laporan	Samboja Barat, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-		
7	01 (03 2.02	0004	Evaluasi Kelurahan			2 Laporan	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-		
7	01 0	03 2.02	0004	Evaluasi Kelurahan			2 Laporan	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-		
7	01 0	03 2.02	0004	Evaluasi Kelurahan			2 Laporan	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		
7	01 0	03 2.02	12 0004	Evaluasi Kelurahan			2 Laporan	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			
7	01 (03 2.02	12 0004	Evaluasi Kelurahan			2 Laporan	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-		
7	01 (03 2.02	0004	Evaluasi Kelurahan			2 Laporan	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
					Kelurahan			Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Pemataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	BARAT	r
		03 2.02		Pemberdayaan Lembaga	Kelurahan Jumlah Koordinsai yang -		2 Laporan	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-	9.353.000.000,00 KECAM.	MATAN SAMBOJA
					Kelurahan			Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Pemataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	BARAT	MATAN SAMBOJA
				Pemberdayaan Lembaga	Kelurahan Jumlah Koordinsai yang -			Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-	9.353.000.000,00 KECAM.	MATAN SAMBOJA
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Kelurahan Jumlah Koordinsai yang -			Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	9.353.000.000,00 KECAM.	MATAN SAMBOJA
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Kelurahan Jumlah Koordinsai yang -			Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	9.353.000.000,00 KECAM.	MATAN SAMBOJA
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Kelurahan Jumlah Koordinsai yang -			Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darakelola pemerintahan darakelola untuk mendukung transformasi pelayanan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	9.353.000.000,00 KECAM.	MATAN SAMBOJA
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Kelurahan Jumlah Koordinsai yang -			Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	9.353.000.000,00 KECAM.	MATAN SAMBOJA
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Kelurahan Jumlah Koordinsai yang -			Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	9.353.000.000,00 KECAM.	MATAN SAMBOJA
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Kelurahan Jumlah Koordinsai yang -			Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	9.353.000.000,00 KECAM.	MATAN SAMBOJA
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Kelurahan Jumlah Koordinsai yang -			Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-	9.353.000.000,00 KECAM.	MATAN SAMBOJA
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Kelurahan Jumlah Koordinsai yang -			Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	9.353.000.000,00 KECAM. BARAT	MATAN SAMBOJA T
7	01 (33	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Jumlah Koordinsai yang -			Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	9.353.000.000,00 KECAM.	MATAN SAMBOJA T
7	01 (03 2.03	33	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinsai yang dilaksanakan Desa/Kelurahan		11 Kali 13 Lembaga	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 8.565,400.000,00 7.815,400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola	-	9.353.000.000,00 KECAM. BARAT	MATAN SAMBOJA T
7	01 (03 2.03	33	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinsai yang dilaksanakan Desa/Kelurahan		11 Kali	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 8.565.400.000,00 7.815.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - Pensingkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang	-	9.353.000.000,00 KECAM. BARAT	MATAN SAMBOJA T
7	01 (03 2.03	33	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinsai yang dilaksanakan Desa/Kelurahan		11 Kali 13 Lembaga	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 8.565.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darelayanan profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel demerintahan daerah yang profesional dan akuntabel demerintahan daerah yang profesional dan akuntabel demerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	9.353.000.000,00 KECAM. BARAT	MATAN SAMBOJA T
7	01 (03 2.03	33	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinsai yang dilaksanakan Desa/Kelurahan		11 Kali 13 Lembaga	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 8.565,400.000,00 7.815,400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara,		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dara Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik	-	9.353.000.000,00 KECAM. BARAT	MATAN SAMBOJA
7	01 (03 2.03	33	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinsai yang dilaksanakan Desa/Kelurahan		11 Kali 13 Lembaga	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 8.565.400.000,00 7.815.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	9.353.000.000,00 KECAM. BARAT	MATAN SAMBOJA
7	01 (03 2.03	33	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinsai yang dilaksanakan Desa/Kelurahan		11 Kali 13 Lembaga	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 8.565,400.000,00 7.815,400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara,		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		9.353.000.000,00 KECAM. BARAT	MATAN SAMBOJA T
7	01 (03 2.03	33	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinsai yang dilaksanakan Desa/Kelurahan		11 Kali 13 Lembaga	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 8.565.400.000,00 7.815.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	9.353.000.000,00 KECAM. BARAT	MATAN SAMBOJA T
7	01 (03 2.03	33	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinsai yang dilaksanakan Desa/Kelurahan		11 Kali 13 Lembaga	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 8.565.400.000,00 7.815.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani		Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	9.353.000.000,00 KECAM. BARAT	MATAN SAMBOJA T
7	01 (03 2.03	33	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinsai yang dilaksanakan Desa/Kelurahan		11 Kali 13 Lembaga	Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti 8.565.400.000,00 7.815.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Tani Bhakti Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Tani		Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik - 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan	-	9.353.000.000,00 KECAM. BARAT	MATAN SAMBOJA T

Part															
Part	7	01	03	2.03	0002						DANA BAGI HASIL (DBH)		-	500.000.000,00	
No.						Kemasyarakatan	yang Ditingkatkan Kapasitasnya		Kemasyarakatan						BARAT
Part										Bhakti		profesional dan akuntabel			
March Marc										Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
March Marc										Kute Siantan, Tani		transformasi pelayanan			
Part			1 1		l			I						1	
Part Part															
Value Valu															
Vis. Vis.															
Total															
Model Programmer Conference Confe	7	01	02	2.02	0002	Doniedioon Corono don Drassiano	Lumlah Carana dan Drasarana		4 Unit	FF0 000 000 00 Keb Kutei Kerten egere	DANA DACILIACII (DDII)			FF0 000 000 00	VECA MARTANI CA MADO IA
		01	03	2.03	0003				4 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)		-	550.000.000,00	
A						Lembaga Kemasyarakatan									BARAT
Section Sect							Disediakan								
Part Part															
Solid Control Solid Contro										Kel/Desa		p==			
Part Part															
Service Control of the Control of															
March Marc															
MAXI VICTOR OF THE PROPERTY OF												Publik			
Weight of the control	464 7	01	04			PROGRAM KOORDINASI	Persentase kegiatan koordinasi -		80 Persen	125.000.000,00			-	175.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
Weight of the control						KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	ketentraman dan ketertiban umum								BARAT
Registration of the control to the c							vang melibatkan Kepolisian								
Framework in the control and t															
Part Part															
Agency and Total Management of Management															
Value Valu			1 1												
2 to 1 to 2 to 2 to 2 to 2 to 2 to 2 to			1 1												
Septiment of the control of the cont			1 1				wilayan Kecamatan								
Septiment of the control of the cont	-	01	04	2.01		Koordinasi Unava Romyolonasasasa	lumlah kaciatan dalam Unava		2 Lanoran	135 000 000 00		7 Paningkatan tata kalala		175 000 000 00	VECAMATAN SAMPOIA
with the control of t	′	01	04	2.01					2 Laporan	125.000.000,00			· -	175.000.000,00	
winds managed wing transformed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed programmed polysystem programmed programmed programmed programmed programmed programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed polysystem programmed pr															BARAT
Part Part						Umum	dan Ketertiban Umum								
Particular of the control of the c															
Part Part															
Progression growth and relevance to the control of															
Part Company Part Part Company															
Total Control Total Contro												Pengembangan Tata Kelola			
Properties and processes in the processes of the proces												Pemerintahan dan Pelayanan			
Takin Agama dan Takin Mayarabat Maya												Publik			
Takin Agama dan Takin Mayarabat Maya	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan		2 Laporan	125.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	175.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
Books (Approximate Control Approximate Control Approximate Control Approximate Control Approximate Control Approximate Control Approximate Control Approximate Control Approximate Control Approximate Control Approximate Control Approximate Control Approximate Control Approximate Control Approximate Control Approximate Control Approximate Control Approximate Control Approximate Control Approximation Control					ŀ		Harmonisasi Hubungan dengan			Samboja Barat, Tani		pemerintahan daerah yang			BARAT
Mayurakat Mayura							Tokoh Agama dan Tokoh					profesional dan akuntabel			
Act Santan, Tari Profession of the Profess						, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,									
## Broad Bro							,								
465 7 01 05 WINDOWN PERCENTANAN UNION WILSON PENGENTAN UNION WILSON PENGENTANAN UNION WILSON PENGENTANAN UNION WILSON PENGENTANAN UNION WILSON PENGENTANAN UNION WILSON PENGENTANAN UNION WILSON PENGENTANAN UNION WILSON PENGENTANAN UNION WILSON PEN															
Perpendiangan Tata Kelola Pengenhana Kerukuman Antar Suku Malamakan Kecamanan Najakan Kecamanan Na										Briakti					
465 7 01 05 2.01 Penylenggaran Urusan Penerintahan dan Pelayanan Philik Urusan Pemerintahan Urusan Penerintahan Penerintahan Urusan Penerintahan Urusan Penerintahan Penerinta															
ACTION OF THE PROGRAM PRIVELENGGARAAN UNUM PRIVELEN															
466 7 01 05 PROCERAM FENYELINGGARAAN UNUMUM URUSAN PEMERINTAHAN UNUMUM URUSAN URUSA															
URUSAN PEMERIRATAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Publik Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Pe	ACE -	01	05			DDOCD AND DENIVELENCE AREA AND	CAKLIDAN DENIVELENCOADAAS:		75 Dames	370 000 000 00		FUUIK		F00 000 000 00	VECANATAN CANADOTA
7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Unum Sesual Penugasan Kepala Daerah dilaksanakan Kecamatan 3 kegiatan 270.000.000,00 KECAMATAN SAMBOJA Penugasan Kepala Daerah dilaksanakan Kecamatan 3 kegiatan 270.000.000,00 Kab. Kutal Kartanegara, Penugasan Kepala Daerah dilaksanakan Kecamatan 3 kegiatan 270.000.000,00 Kab. Kutal Kartanegara, Penugasan Kepala Daerah dilaksanakan Kecamatan 3 kegiatan 270.000.000,00 Kab. Kutal Kartanegara, Penugasan Kepala Daerah 4 Penugasan Kerukunan Antar Suku, dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Laimya Guna Mewujudian Silaki Kecamanan Lokal, Regional, dan Nasional Nasi	465 7	Ul	US						/5 Persen	270.000.000,00			-	500.000.000,00	
Pemerintahan Umum Sesual Pemugsan Kepala Daerah Pemugsan Repusan Pemugsan Pambusan Publik Pemugsan Rep			1 1			ONUJAN PEWERINTAMAN UWUM	ONUSAIN PEIVIERIIN I AMAIN UIVIUVI								DARAI
Pemerintahan Umum Sesual Pemugsan Kepala Daerah Pemugsan Repusan Pemugsan Pambusan Publik Pemugsan Rep	-	01	UE .	2.01		Ponyolonggaraan Harres	Jumlah Urusan Rome sintahan wans	+ +	3 kagistan	270 000 000 00		7 Danimahatan tata kalala	_	E00 000 000 00	VECAMATAN CANADOLA
Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah Pengembangan Tata kelola Pengembangan Tata kelola Pengembangan Tata kelola Pengembangan Tata kelola Pengembangan Tata kelola Pengembangan Tata kelola Pengembangan Tata kelola Pengembangan Tata kelola Pengembangan Tata kelola Pengembangan Tata kelola Pengembangan Tata kelola Pengembangan Tata kelola Pengembangan Tata kelola Pengembangan Tata kelola Pengembangan Tata kelola Pengembangan Tata Kel	Ι΄	91	03	2.01	l.			I	3 regiatari	270.000.000,00			·	500.000.000,00	
untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Lokal, Regional, dan Nasional Lokal, Regional, dan Nasional Lokal, Regional, dan Nasional Lokal, Regional, dan Nasional I Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel Nakuti Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti Demerintahan daerah yang profesional dan akuntabel Nakuti Kartanegara, Kute Siantan, Tani Bhakti Demerintahan daerah yang profesional dan akuntabel Nakuntabel Nakuntake Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Nakuntahan Demerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Demerintahan dan Pelayanan			1 1		ľ		aliaksanakan Kecamatan	I						1	BARAT
To the second of			1 1			Penugasan Kepala Daerah								1	
publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 4. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Dana Dana Dana Dana Dana Dana Lokal, Regional, dan Nasional Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana			1 1											1	
1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembang			1 1											1	
RECAMATAN SAMBOJA BARAT To black a bl			1 1											1	
Total Control of the Control of th			1 1											1	
Total Control of the Control of th			1 1		l							Pengembangan Tata Kelola		1	
Publik P			1 1		l							Pemerintahan dan Pelayanan		1	
dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Mewijudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			1 1												
dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Mewijudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku	Jumlah Orang yang Mengikuti		5000 Orang	270.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara.	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	500.000.000,00	KECAMATAN SAMBOJA
Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Lokal, Regional, dan Nasional Lokal, Regional, dan Nasional Lokal, Regional, dan Nasional Lokal, Regional, dan Nasional Lokal, Regional, dan Nasional Lokal, Regional, dan Nasional Lokal, Regional, dan Nasional Lokal, Regional, dan Nasional Lokal, Regional, dan Nasional Lokal, Regional, dan Nasional Lokal, Regional, dan Nasional Lokal, Regional, dan Nasional Lokal, Regional, dan Nasional Lokal, Regional, dan Nasional Bhakti Rute Siantan, Tani Bhakti Bhakti Lokal, Regional, dan Nasional Lokal, Regional, dan Nasional Pengembangan Tata Kelola Permerintahan dan Pelayanan Publik			1 1							Samboja Barat, Tani	·				
Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Lokal, Regional, dan Nasional Lokal, Regional, dan Nasional Lokal, Regional, dan Nasional Lokal, Regional, dan Nasional Lokal, Regional, dan Nasional Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional Lokal, Regional Lokal, Regional Lokal, Regional Lokal, Regional Lokal, Regional Lokal, Regional Lokal, Regional Lokal, Regional Lokal, Regional Lokal, Regional Lokal, Regional Lokal, Regional Lokal, Regional Lokal, Regional Lokal, Regional Lokal, Regional Lokal, Regional Lokal, Region			1 1											1	
Lokal, Regional, dan Nasional Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kute Siantan, Tani Bhakti 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1 1											1	
Lokal, Regional, dan Nasional Bhakti Dengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1 1		l									1	
1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemgemthan dan Pelayanan Putilik			1 1		l	conar, regional, dall Nasional								1	
Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1 1		l		Lokal, Negional, uan NdSIUIIdi			Dilaku				1	
Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1	1 1		l									1	
Publik														1	
													1		



	7				UNSUR KEWILAYAHAN			1.166.608.000,00			1.200.089.000,00	KELURAHAN MARGOMULY
	7	01			KECAMATAN			1.166.608.000,00			1.200.089.000,00	KELURAHAN MARGOMULY
466	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	60 Persen	66.608.000,00			- 100.089.000,00	KELURAHAN MARGOMUL
	7	01	01 2	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	5 Laporan	63.108.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- 95.989.000,00	KELURAHAN MARGOMUL'
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.380.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Samboja Barat, Margo Mulyo Kab. Kutai Kartanegara Kute Siantan, Margo Mulyo		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dalan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		KELURAHAN MARGOMULY
	7	01	01 2	2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Samboja Barat, Margo Mulyo Kab. Kutai Kartanegara Kute Siantan, Margo Mulyo	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	14.015.000,00	KELURAHAN MARGOMULY
	7	01	01 2	2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Samboja Barat, Margo Mulyo Kab. Kutai Kartanegara Kute Siantan, Margo Mulyo	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Publik	14.866.000,00	KELURAHAN MARGOMUL'
	7	01	01 2	2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.728.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Samboja Barat, Margo Mulyo Kab. Kutai Kartanegara Kute Siantan, Margo Mulyo	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Publik	1.728.000,00	KELURAHAN MARGOMUL
	7	01	01 2	2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara Samboja Barat, Margo Mulyo Kab. Kutai Kartanegara Kute Siantan, Margo Mulyo	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	64.000.000,00	KELURAHAN MARGOMUL'



7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		3 Bulan	500.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	1.100.000,00	KELURAHAN MARGOMULYO
											transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	01	l 01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Margo Mulyo Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Margo Mulyo	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		1.100.000,00	KELURAHAN MARGOMULYO
	. 01	l 01	3.00		Donaliharan Parana Milih Davah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik		10 Kegiatan	3.000.000,00		Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola		3 000 000 00	KELURAHAN MARGOMULYO
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah					pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	3.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Margo Mulyo Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Margo Mulyo	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3.000.000,00	KELURAHAN MARGOMULYO
467 7	01	L 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	-	72 Persen	1.100.000,000			-		KELURAHAN MARGOMULYO
		1 03			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	/ Kelurahan		8 Kegiatan	750.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			KELURAHAN MARGOMULYO
7	03	1 03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		4 Unit	450.000,000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Margo Mulyo Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Margo Mulyo	DANA BAGI HASIL (DBH) MINYAK DAN GAS OTONOMI KHUSUS ACEH	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		450.000,000,00	KELURAHAN MARGOMULYO
7	01	L 03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas / Ormas	300.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Margo Mulyo Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Margo Mulyo	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		300.000.000,00	KELURAHAN MARGOMULYO



7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga	Jumlah Koordinasi yang -	2 Lembaga	350.000.000,00		-	7. Peningkatan tata kelola -	-	350.000.000,00	KELURAHAN MARGOMULYO
					Kemasyarakatan Tingkat	dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kemasyarakat				pemerintahan daerah yang			
					Kecamatan						profesional dan akuntabel			
					nccamatan.						untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga	350,000,000,00	Kab, Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -		350.000.000.00	KELURAHAN MARGOMULYO
					Kemasyarakatan	yang Diselenggarakan	Kemasyarakatan	,,,,,	Samboja Barat, Margo	, ,	pemerintahan daerah yang			
					Kemasyarakatan	yang biselenggarakan	Kemasyai akatan		Mulyo		profesional dan akuntabel			
									Kab. Kutai Kartanegara,					
											untuk mendukung			
									Kute Siantan, Margo		transformasi pelayanan			
									Mulyo		publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
1 1		1 1									Publik			
\vdash	1				Kelurahan Argosari	l L	L	1.088.440.000,00		1	I	·	1.125.200.000.00	KELURAHAN ARGOSARI
 7	+	+	-+		UNSUR KEWILAYAHAN			1.088.440.000,00		T I	ı			KELURAHAN ARGOSARI
7		\vdash			KECAMATAN			1.088.440.000,00		 				KELURAHAN ARGOSARI
						AUT CAMID Described Describ	T 72.0			 				
468 7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	72 Persen	63.440.000,00				-	100.200.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
1 1		1 1			PEMERINTAHAN DAERAH					1				1
					KABUPATEN/KOTA			<u> </u>	l					<u>l</u>
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah layanan Administrasi -	4 Laporan	61.540.000,00		-	7. Peningkatan tata kelola -	-	98.300.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
					Daerah	Umum Perangkat Daerah		,			pemerintahan daerah yang			
											profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	1 Paket	10.000.000,00	Vah Viitai Vartanaana	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	+	22 000 000 00	KELURAHAN ARGOSARI
1 1 '	01	01	2.00				1 raket	10.000.000,00		DANA BAGITIASIL (DBII)			22.000.000,00	KELOKAHAN ANGOSANI
					Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang			Samboja Barat,		pemerintahan daerah yang			
						Disediakan			Argosari		profesional dan akuntabel			
									Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
									Kute Siantan, Argosari		transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
				J							Pengembangan Tata Kelola			
1 1				J							Pemerintahan dan Pelayanan			
1 1		1 1								1	Publik			1
- -	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1 Paket	20.000.000,00	Vala Vistai Vastano	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	+	12 770 000 00	KELURAHAN ARGOSARI
1 1'	01	01	2.00	0004	renyeuradii banan Lugistik Kantor		1 Paket	20.000.000,00		DAINA BAGI FIASIL (DBF)			13.770.000,00	KELUKAHAN ARGUSAKI
1 1				J		yang Disediakan			Samboja Barat,		pemerintahan daerah yang			
1 1				J					Argosari		profesional dan akuntabel			
1 1		1 1							Kab. Kutai Kartanegara,	1	untuk mendukung			1
1 1		1 1							Kute Siantan, Argosari	1	transformasi pelayanan			1
1 1		1 1							1	1	publik			1
1 1		1 1									1. Penataan dan			
1 1				J							Pengembangan Tata Kelola			
1 1		1 1									Pemerintahan dan Pelayanan			1
1 1				J							Publik			
\vdash	-	l	2.00			 								
		O1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1 Paket	1.540.000,00		DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -		1.540.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
7	01	01			Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan			Samboja Barat,		pemerintahan daerah yang			
7	01	01							Argosari		profesional dan akuntabel			
7	01								Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung	1		1
7	01	01												
7	01	01												
7	01	01							Kute Siantan, Argosari		transformasi pelayanan			
7	01	01									transformasi pelayanan publik			
7	01										transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			
7	01	01									transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
7	01										transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			

A		7 01	01	2.06	nnna	Renyelenggaraan Ranat Koordinasi	Jumiah Lanoran Ronyolonggaraan	10 Lanorar	30,000,000,00 Kah Kutai Kartanon	DANA BAGI HASII (DBH)	7 Daningkatan tata kolola	-	60 990 000 00	KELLIBAHANI ARGOSARI
Part Part		′ 👊	01	2.00	0003	den Kensultasi CKDD	Danet Kaardinesi dan Kansultasi	10 Eaporai		ila, DANA BAGITIASIE (BBIT)			00.550.000,00	RELOTATIAN ANGOSAN
A						dan konsultasi SKPD								
							SKPD							
1														
1									Kute Siantan, Argos	ari	transformasi pelayanan			
Part Part														
No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No.														
Value Valu														
2 10 10 10 10 10 10 10											Pemerintahan dan Pelayanan			
Part											Publik			
Part	—	7 01	01	2.00		Romolibaraan Parang Milik Daorah	Jumlah Romoliharaan Parang Milik	E Kogistan	1 000 000 00		7. Boningkatan tata kalala		1 000 000 00	KELLIDAHAN ADGOSADI
Control Cont		, 01		2.05				5 Regiatan	1.500.000,00				1.900.000,00	KELOKAHAN AKGOSAKI
Second Processing Control of the C							Daerah							
Part Part						Daerah								
Part											untuk mendukung			
Part											transformasi pelayanan			
Part														
											para			
Part														
Part Part														
2 7 7 7 7 7 7 7 7 7											Pemerintahan dan Pelayanan			
Lamburg and Lamburg and Section Sectio											Publik			
Lamburg and Lamburg and Section Sectio		7 01	01	2.00	nnne	Pemeliharaan Peralatan dan Morin	Jumlah Peralatan dan Mecin	10 Unit	1 900 000 00 Kah Kutai Kartanoo	DANA BAGI HASII (DDU)	7 Peningkatan tata kalala	l_	1 900 000 00	KELLIBAHAN ARGOSAPI
Part Part		, 11	01	2.03	0000			10 Onit		III DANA BAGI HASIL (DBII)			1.500.000,00	RELONALIAN ANGUSARI
And The Contract of the Contra					l	Lainnya	Lainnya yang Dipelinara			1]		
Act 2 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4			1 1											
Act 2 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4			1 1						Kab. Kutai Kartaneg	ara,	untuk mendukung			
200 200			1 1											
Part Part			1 1						nace Statitati, Aigo.					
Formation Form			1 1		l					1	p			
Process 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0					l					1				
Process 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0					l					1				
Part											Pemerintahan dan Pelayanan			
Material Material														
MAXAMAKAT DISA DAN Non-Reformation Mayor and a Maxamatan American Mayor and American Mayo		-	 _ 								TODIK			
Part Part	469	/ 01	03					70 Persen	1.025.000.000,00			-	1.025.000.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
Fig. 22 St. 22 St. Septime Printerdepase Relaturation (Author Relaturation (Author Printerdepase Relaturation (Author Pri							Pemberdayaan Masyarakat							
A continue of the continue o						KELURAHAN	Desa/Kelurahan Yang Aktif							
A continue of the continue o		7 01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa -	4 Kegiatan	775.000.000.00		- 7. Peningkatan tata kelola		775.000.000.00	KELURAHAN ARGOSARI
professed dan shumbed und merchange with the standard on shumbed und merchange with the standard of the standa														
Section Sect							/ Kelul allali							
Transformer perfugurant purpose and purpos														
Provided from the proposed of the provided from the proposed of the provided from the proposed from														
Provided from the proposed of the provided from the proposed of the provided from the proposed from											untuk mendukung			
President Participal Management Pres														
Percentage and Province of American Appearanc											transformasi pelayanan			
Processing Control of the Control											transformasi pelayanan publik			
Public P											transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			
Processing Continues Processing Continues											transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
Processing Continues Processing Continues											transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
datem Forum Mayayawarih Percanaana Pembangunari di Kelurahan Perbangunari di Kelurahan Penbangunari di Kelurahan Penbangunari di Kelurahan Penbangunari di Kelurahan Penbangunari di Kelurahan Penbangunari di Kelurahan Penbangunari di Kelurahan Penbangunari di Kelurahan Penbangunari di Kelurahan Penbangunari di Kelurahan Penbangunari di Kelurahan Penbangunari di Kelurahan Penbangunari di Kelurahan Penbangunari di Kelurahan Penbangunari Sarana dan Penbangunari											transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
Perencanaan Pembangunan di Relurahan Pembangunan di Kelurahan 7 01 03 202 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Relurahan 4 Unit 450,000,00000 Kabi Kutai Kartanegara, Sanboga Barat, Agosari Sanboga Barat, Agosari Nabi Kutai Kartanegara, OANA BAGI HASIL (08H) - 7 01 03 202 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Relurahan Asia Kutai Kartanegara, OANA BAGI HASIL (08H) - 7 01 03 202 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Relurahan Asia Kutai Kartanegara, OANA BAGI HASIL (08H) - 7 01 03 202 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Relurahan Asia Kutai Kartanegara, OANA BAGI HASIL (08H) - 8 0000,000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 0000,000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 0000,000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 0000,000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 0000,000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 0000,000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 0000,000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 0000,000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 0000,000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 0000,000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 0000,000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 0000,000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 0000,000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 0000,000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 0000,000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 0000,000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 0000,000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 00000,000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 0000,000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 0000,000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 00000,000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 00000,000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 00000,000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 00000,000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 00000,000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 00000,000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 00000,000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 00000,000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 00000,000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 00000,000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 00000,000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 00000,000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 00000,000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 00000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 00000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 00000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 00000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 00000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 00000,000 RELURAHAN ARGOSARI - 9 00000,000 RELURAHAN ARGOS		7 04		202	0004						transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5.000.000	WELLIN HAND ADOCUMENT
Kab, Kutal Kartanegara, Kute Siantan, Argosari 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Prasarana Kelurahan Prasarana Kelurahan Prasarana Auto Santan, Argosari 9 Unit 450,000,000,00 Katu Kata Kartanegara, Kute Siantan, Argosari 4 Unit 450,000,000,00 Katu Kata Kartanegara, Kute Siantan, Argosari 9 Unit 450,000,000,00 Katu Kata Kartanegara, Kute Siantan, Argosari 9 Unit 450,000,000,00 Katu Kata Kartanegara, Kute Siantan, Argosari 9 Unit 450,000,000,00 Katu Kata Kartanegara, Kute Siantan, Argosari 9 Unit 450,000,000,00 Katu Kata Kartanegara, Kute Siantan, Argosari 9 Unit 50 Unit 5		7 01	03	2.02	0001					ora, DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-	5.000.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
Kufe Siantan, Argosari 7 OI 03 2.02 0002 Pembangunan Strana dan Prasarana Kelurahan Angosari 4 Unit 450.000.000,00 Kati, Kutai Kartanegara, DaNA BAGI HASIL (108H) - 7 Pemingatan tatai kelola pemerintahan dian Pelayanan Kelurahan Angosari sahusuhan Kelurahan Angosari sahusuhan Kelurahan Angosari sahusuhan Angosari s		7 01	03	2.02	0001	dalam Forum Musyawarah	yang Berpartisipasi dalam Forum		katan Samboja Barat,	ora, DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	5.000.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
Kufe Siantan, Argosari 7 OI 03 2.02 0002 Pembangunan Strana dan Prasarana Kelurahan Angosari 4 Unit 450.000.000,00 Kati, Kutai Kartanegara, DaNA BAGI HASIL (108H) - 7 Pemingatan tatai kelola pemerintahan dian Pelayanan Kelurahan Angosari sahusuhan Kelurahan Angosari sahusuhan Kelurahan Angosari sahusuhan Angosari s		7 01	. 03	2.02	0001	dalam Forum Musyawarah	yang Berpartisipasi dalam Forum		Samboja Barat, Argosari		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	5.000.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
Total Tota		7 01	03	2.02	0001	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan		Samboja Barat, Argosari		transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	5.000.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
1. Perpatan dan Pengembangan Tata Kelola Penge		7 01	03	2.02	0001	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan		Katan Samboja Barat, Argosari Kab. Kutai Kartaneg	ara,	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	5.000.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kel		7 01	03	2.02	0001	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan		Katan Samboja Barat, Argosari Kab. Kutai Kartaneg	ara,	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	5.000.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
Pemerinatan dan Pelayanan Replatan Perakanan Pelayanan Pemberinatan dan Perakanan Pelayanan Pemberinatan dan Perakanan Pelayanan Pemberinatan dan Perakanan Pemberinatan dan Perakanan Pemberinatan dan Perakanan Pemberinatan dan Perakanan Pemberinatan dan Perakanan Pemberinatan d		7 01	03	2.02	0001	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan		Katan Samboja Barat, Argosari Kab. Kutai Kartaneg	ara,	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	5.000.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
Pemerinatan dan Pelayanan Replatan Perakanan Pelayanan Pemberinatan dan Perakanan Pelayanan Pemberinatan dan Perakanan Pelayanan Pemberinatan dan Perakanan Pemberinatan dan Perakanan Pemberinatan dan Perakanan Pemberinatan dan Perakanan Pemberinatan dan Perakanan Pemberinatan d		7 01	. 03	2.02	0001	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan		Katan Samboja Barat, Argosari Kab. Kutai Kartaneg	ara,	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	5.000.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
7 01 03 2.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahana Prasarana Kelurahan Prasarana Kelurahan Prasarana Kelurahan Pra		7 01	. 03	2.02	0001	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan		Katan Samboja Barat, Argosari Kab. Kutai Kartaneg	ara,	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	5,000,000,00	KELURAHAN ARGOSARI
7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan IJumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan IJumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan IJumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan IJumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan IJumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan IJumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan IJumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan IJumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan IJumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan IJumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan IJumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan IJumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan IJumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan IJumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan IJumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan IJumlah Sarana dan Prasarana IJumlah Sarana IJumlah Sarana IJumlah Sarana IJumlah Sarana IJumlah Sarana IJumlah Sarana IJumlah Sarana IJumlah Sarana IJUmlah Sar		7 01	03	2.02	0001	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan		Katan Samboja Barat, Argosari Kab. Kutai Kartaneg	ara,	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	5.000.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
Prasarana Kelurahan Kelurahan Makurahan Kelurahan yang Terbangun Samboja Barat, Argosari profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Masyarakat di Kelu		7 01	. 03	2.02	0001	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan		Katan Samboja Barat, Argosari Kab. Kutai Kartaneg	ara,	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-	5.000.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
Argosari Kab. Kutal Kartanegara, Kute Siantan, Argosari Unutu. mendukung Uransformasi pelayanan Dublik 1. Penatsan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Nelaksanakan Pemberdayaan Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Masyarakat di Ke						dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kemasyara	Samboja Barat, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argos	ara, ari	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Penerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		
Argosari profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Peng						dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana	Kemasyara	Samboja Barat, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argos	ara, ari	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-		
Kute Siantan, Argosari transformasi pelayanan publik 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 0 DANA BAGI HASIL (DBH) - Pemberdayaan Masyarakat di Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7 1 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 DANA BAGI HASIL (DBH) - Pemerintahan daren yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan pemberdayaan pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan pemberdayaan pemberdayaan pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan						dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana	Kemasyara	Asamboja Barat, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argos 450.000.000,00 Kab. Kutai Kartaneg Samboja Barat,	ara, ari	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan	-		
Kute Siantan, Argosari transformasi pelayanan publik 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 0 DANA BAGI HASIL (DBH) - Pemberdayaan Masyarakat di Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7 1 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 DANA BAGI HASIL (DBH) - Pemerintahan daren yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan pemberdayaan pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan pemberdayaan pemberdayaan pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan						dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana	Kemasyara	Agosari A50.000.000,00 Kab. Kutai Kartaneg Samboja Barat, Argosari Kab. Vutai Kartaneg Kute Siantan, Argos Argosari Argosari	ara, Dana Bagi Hasil (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang rubik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-		
publik 1. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Pendiahan dan Pelayanan Publik 1. Pendiahan dan Pelayanan Publik 1. Pendiahan dari dan Pelayanan Masyarakat di Kelurahan						dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana	Kemasyara	Agosari A50.000.000,00 Kab. Kutai Kartaneg Samboja Barat, Argosari Kab. Vutai Kartaneg Kute Siantan, Argos Argosari Argosari	ara, Dana Bagi Hasil (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang rubik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-		
1. Penatanan dan Pengemanan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana	Kemasyara	Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argos 450.000.000,00 Kab. Kutai Kartaneg Samboja Barat, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kab. Kutai Kartaneg Kab. Kutai Kartaneg	ara, ari DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-		
Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengemintahan dan Pengemintahan dan Pelayanan Pengemintahan da						dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana	Kemasyara	Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argos 450.000.000,00 Kab. Kutai Kartaneg Samboja Barat, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kab. Kutai Kartaneg Kab. Kutai Kartaneg	ara, ari DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-		
Pemeintahan dan Pelayanan Publik 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana	Kemasyara	Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argos 450.000.000,00 Kab. Kutai Kartaneg Samboja Barat, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kab. Kutai Kartaneg Kab. Kutai Kartaneg	ara, ari DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		
Total Control of the Control of th						dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana	Kemasyara	Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argos 450.000.000,00 Kab. Kutai Kartaneg Samboja Barat, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kab. Kutai Kartaneg Kab. Kutai Kartaneg	ara, ari DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik	-		
Total Control of the Control of th						dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana	Kemasyara	Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argos 450.000.000,00 Kab. Kutai Kartaneg Samboja Barat, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kab. Kutai Kartaneg Kab. Kutai Kartaneg	ara, ari DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Penerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-		
7 01 03 2.02 003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana	Kemasyara	Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argos 450.000.000,00 Kab. Kutai Kartaneg Samboja Barat, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kab. Kutai Kartaneg Kab. Kutai Kartaneg	ara, ari DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Penerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
Kelurahan Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ormas Samboja Barat, pemerintahan daerah yang profesiotahan daerah daerah daerah daerah yang profesiotahan daerah yang profesiotahan daerah yang profesiotahan daerah						dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana	Kemasyara	Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argos 450.000.000,00 Kab. Kutai Kartaneg Samboja Barat, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kab. Kutai Kartaneg Kab. Kutai Kartaneg	ara, ari DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-		
Masyarakat di Kelurahan Argosari Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Argosari Untuk mendukung Untuk menduku		7 01	. 03	2.02	0002	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kemasyara 4 Unit	Asamboja Barat, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argos 450.000.000,00 Kab. Kutai Kartaneg Samboja Barat, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argos	ari Jari Jara, DANA BAGI HASIL (DBH) Jara,	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		450.000.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Argosari untuk mendukung transforasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Penemintahan dan Pelayanan		7 01	. 03	2.02	0002	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang	Kemasyara 4 Unit 4 Pokmas /	Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argos	ari Jari Jara, DANA BAGI HASIL (DBH) Jara,	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Penerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-	450.000.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Argosari untuk mendukung transforasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Penemintahan dan Pelayanan		7 01	. 03	2.02	0002	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Kemasyara 4 Unit 4 Pokmas /	Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argos	ari Jari Jara, DANA BAGI HASIL (DBH) Jara,	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dare Palayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang Pengintahan daerah yang		450.000.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
Kute Siantan, Argosari transformasi pelayanan publik 1. Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		7 01	. 03	2.02	0002	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Kemasyara 4 Unit 4 Pokmas /	Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argos	ari Jari Jara, DANA BAGI HASIL (DBH) Jara,	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dare Palayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang Pengintahan daerah yang	-	450.000.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		7 01	. 03	2.02	0002	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Kemasyara 4 Unit 4 Pokmas /	Agosari 450.000.000,000 Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Samboja Barat, Argosari	ora, DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel demerintahan daerah yang demerintahan daerah yang profesional dan akuntabel demerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	450.000.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
1. Penataan dan Pengemangan Tata Kelola Pengemintahan dan Pelayanan		7 01	. 03	2.02	0002	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Kemasyara 4 Unit 4 Pokmas /	Argosari Afgosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Kataneg Kute Kataneg Kute Kataneg Kutai Kartaneg Kutai Kartaneg Kutai Kartaneg Kutai Kartaneg	ara, DANA BAGI HASIL (DBH) ara, DANA BAGI HASIL (DBH) ara, DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	450.000.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		7 01	. 03	2.02	0002	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Kemasyara 4 Unit 4 Pokmas /	Argosari Afgosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Kataneg Kute Kataneg Kute Kataneg Kutai Kartaneg Kutai Kartaneg Kutai Kartaneg Kutai Kartaneg	ara, DANA BAGI HASIL (DBH) ara, DANA BAGI HASIL (DBH) ara, DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 2. Penataan dan Pelayanan Publik 3. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 4. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 4. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik	-	450.000.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
Pemerintahan dan Pelayanan		7 01	. 03	2.02	0002	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Kemasyara 4 Unit 4 Pokmas /	Argosari Afgosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Kataneg Kute Kataneg Kute Kataneg Kutai Kartaneg Kutai Kartaneg Kutai Kartaneg Kutai Kartaneg	ara, DANA BAGI HASIL (DBH) ara, DANA BAGI HASIL (DBH) ara, DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Penerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	450.000.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
Pemerintahan dan Pelayanan		7 01	. 03	2.02	0002	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Kemasyara 4 Unit 4 Pokmas /	Argosari Afgosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Kataneg Kute Kataneg Kute Kataneg Kutai Kartaneg Kutai Kartaneg Kutai Kartaneg Kutai Kartaneg	ara, DANA BAGI HASIL (DBH) ara, DANA BAGI HASIL (DBH) ara, DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		450.000.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
		7 01	. 03	2.02	0002	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Kemasyara 4 Unit 4 Pokmas /	Argosari Afgosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Kataneg Kute Kataneg Kute Kataneg Kutai Kartaneg Kutai Kartaneg Kutai Kartaneg Kutai Kartaneg	ara, DANA BAGI HASIL (DBH) ara, DANA BAGI HASIL (DBH) ara, DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	450.000.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
The state of the s		7 01	. 03	2.02	0002	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Kemasyara 4 Unit 4 Pokmas /	Argosari Afgosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Kataneg Kute Kataneg Kute Kataneg Kutai Kartaneg Kutai Kartaneg Kutai Kartaneg Kutai Kartaneg	ara, DANA BAGI HASIL (DBH) ara, DANA BAGI HASIL (DBH) ara, DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola		450.000.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
		7 01	. 03	2.02	0002	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di	yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Kemasyara 4 Unit 4 Pokmas /	Argosari Afgosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Siantan, Argosari Kab. Kutai Kartaneg Kute Kataneg Kute Kataneg Kute Kataneg Kutai Kartaneg Kutai Kartaneg Kutai Kartaneg Kutai Kartaneg	ara, DANA BAGI HASIL (DBH) ara, DANA BAGI HASIL (DBH) ara, DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Penerintahan dan Pelayanan Publik -	-	450.000.000,00	KELURAHAN ARGOSARI



7													
	01	1 03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	1 Laporan	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanega	ra. DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	20.000.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
						Kelurahan		Samboja Barat,		pemerintahan daerah yang		·	
								Argosari		profesional dan akuntabel			
								Kab. Kutai Kartanega	ra.	untuk mendukung			
								Kute Siantan, Argosi		transformasi pelayanan			
								nate stantan, ragosi		publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	01	1 03	2.03		Pemberdayaan Lembaga	Jumlah Koordinasi yang -	5 Lembaga	250.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	-	250.000.000,00	KELURAHAN ARGOSARI
					Kemasyarakatan Tingkat	dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kemasyara	at		pemerintahan daerah yang			
					Kecamatan					profesional dan akuntabel			
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
7	01	1 03	2.02	0001	Penyelenggaraan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga	250.000.000,00 Kab. Kutai Kartanega	DANA BACILIASII (DDII)		+	350,000,000,00	KELURAHAN ARGOSARI
Ι΄	01	1 03	2.03	0001					I a, DAINA BAGI HASIL (DBH)		[250.000.000,00	KLLUKATIAN ARGUSAKI
					Kemasyarakatan	yang Diselenggarakan	Kemasyara			pemerintahan daerah yang	1		
	1		1	1	1			Argosari	Ī	profesional dan akuntabel	1	1	
				1				Kab. Kutai Kartanega		untuk mendukung			
				1				Kute Siantan, Argosi	ri	transformasi pelayanan			
				1						publik			
				1						1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
					Kelurahan Amborawang Darat	•	'	1.536.373.000,00	1	1	'	1.549.385.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG
					-			·					DARAT
7	'				UNSUR KEWILAYAHAN			1.536.373.000,00				1.549.385.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
7	01	1			KECAMATAN			1.536.373.000,00				1.549.385.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG
470 7													DARAT
	1 01	1 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	60 Persen	136.373.000,00			-		
	01	1 01			PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	60 Persen	136.373.000,00			-	149.385.000,00	
					PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						-	149.385.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
7		1 01 1 01	2.06		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Jumlah layanan Administrasi -	60 Persen	136.373.000,00 73.033.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola		149.385.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG
7			2.06		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					pemerintahan daerah yang		149.385.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
7			2.06		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Jumlah layanan Administrasi -						149.385.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG
7			2.06		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Jumlah layanan Administrasi -				pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		149.385.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG
7			2.06		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Jumlah layanan Administrasi -				pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	149.385.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG
7			2.06		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Jumlah layanan Administrasi -				pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	149.385.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG
7			2.06		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Jumlah layanan Administrasi -				pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	149.385.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG
7			2.06		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Jumlah layanan Administrasi -				pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		149.385.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG
7			2.06		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Jumlah layanan Administrasi -				pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	149.385.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG
7			2.06		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Jumlah layanan Administrasi -				pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-	149.385.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG
	01	1 01			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi - Umum Perangkat Daerah	6 Laporan	73.033.000,00	DAN DALIME (SS)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	149.385.000,00 85.545.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
	01	1 01			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi		73.033.000,00 73.033.000,00 3.072.700,00 Kab. Kutai Kartanega	ra, DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola	-	149.385.000,00 85.545.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
	01	1 01			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	6 Laporan	73.033.000,00 73.033.000,00 3.072.700,00 Kab. Kutai Kartaneg: Samboja Barat,	ra, DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang	-	149.385.000,00 85.545.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
	01	1 01			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi	6 Laporan	73.033.000,00 3.072.700,00 Kab. Kutai Kartanega Samboja Barat, Amborawang Darat		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	149.385.000,00 85.545.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG
	01	1 01			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	6 Laporan	3.072.700,00 Kab. Kutai Kartanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanega		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	149.385.000,00 85.545.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG
	01	1 01			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	6 Laporan	3.072.700,00 Kab. Kutai Kartaneg: Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartaneg: Kute Siantan,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	149.385.000,00 85.545.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
	01	1 01			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	6 Laporan	3.072.700,00 Kab. Kutai Kartanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanega		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	149.385.000,00 85.545.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
	01	1 01			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	6 Laporan	3.072.700,00 Kab. Kutai Kartaneg: Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartaneg: Kute Siantan,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	149.385.000,00 85.545.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
	01	1 01			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	6 Laporan	3.072.700,00 Kab. Kutai Kartaneg: Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartaneg: Kute Siantan,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola	-	149.385.000,00 85.545.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
	01	1 01			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	6 Laporan	3.072.700,00 Kab. Kutai Kartaneg: Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartaneg: Kute Siantan,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dare Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-	149.385.000,00 85.545.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
	01	1 01			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	6 Laporan	3.072.700,00 Kab. Kutai Kartaneg: Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartaneg: Kute Siantan,		pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola	-	149.385.000,00 85.545.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
7	01	1 01	2.06	0001	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Laporan 1 Paket	3.072.700,00 Kab. Kutai Kartanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanega Kute Siantan, Amborawang Darat	ra,	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		149.385.000,00 85.545.000,00 3.072.700,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
7	01	1 01	2.06	0001	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	3.072.700,00 Kab. Kutai Kartanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanega Kute Siantan, Amborawang Darat	ra,	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola	-	149.385.000,00 85.545.000,00 3.072.700,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
7	01	1 01	2.06	0001	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	6 Laporan 1 Paket	3.072.700,00 Kab. Kutai Kartanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanega Kute Siantan, Amborawang Darat Di.0.000.000,00 Kab. Kutai Kartanega Samboja Barat, Samboja Barat, Samboja Barat,	ra,	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang		149.385.000,00 85.545.000,00 3.072.700,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
7	01	1 01	2.06	0001	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Laporan 1 Paket	3.072.700,00 Kab. Kutai Kartanegi Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanegi Kute Siantan, Amborawang Darat Samboja Barat, Amborawang Darat Amborawang Darat Amborawang Darat Amborawang Darat Amborawang Darat	ra, DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		149.385.000,00 85.545.000,00 3.072.700,00	KELURAHAN AMBORAWANI DARAT KELURAHAN AMBORAWANI DARAT KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
7	01	1 01	2.06	0001	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	6 Laporan 1 Paket	3.072.700,00 Kab. Kutai Kartanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanega Kute Siantan, Amborawang Darat Ol.000.000,00 Kab. Kutai Kartanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Katanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Katanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Katanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Katanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Katanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Katanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Katanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Katanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Katanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Katanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Katan	ra, DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		149.385.000,00 85.545.000,00 3.072.700,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
7	01	1 01	2.06	0001	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	6 Laporan 1 Paket	3.072.700,00 Kab. Kutai Kartanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanega Kute Siantan, Amborawang Darat Amborawang Darat Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanega Kute Siantan,	ra, DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung 1. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung 1. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		149.385.000,00 85.545.000,00 3.072.700,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
7	01	1 01	2.06	0001	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	6 Laporan 1 Paket	3.072.700,00 Kab. Kutai Kartanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanega Kute Siantan, Amborawang Darat Ol.000.000,00 Kab. Kutai Kartanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Katanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Katanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Katanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Katanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Katanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Katanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Katanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Katanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Katanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Katanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Katan	ra, DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		149.385.000,00 85.545.000,00 3.072.700,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
7	01	1 01	2.06	0001	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	6 Laporan 1 Paket	3.072.700,00 Kab. Kutai Kartanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanega Kute Siantan, Amborawang Darat Amborawang Darat Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanega Kute Siantan,	ra, DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		149.385.000,00 85.545.000,00 3.072.700,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
7	01	1 01	2.06	0001	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	6 Laporan 1 Paket	3.072.700,00 Kab. Kutai Kartanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanega Kute Siantan, Amborawang Darat Amborawang Darat Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanega Kute Siantan,	ra, DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan publik 1. Penatnan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan darah pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola		149.385.000,00 85.545.000,00 3.072.700,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
7	01	1 01	2.06	0001	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	6 Laporan 1 Paket	3.072.700,00 Kab. Kutai Kartanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanega Kute Siantan, Amborawang Darat Amborawang Darat Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanega Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanega Kute Siantan,	ra, DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		149.385.000,00 85.545.000,00 3.072.700,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG DARAT KELURAHAN AMBORAWANG DARAT

7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan Rumah		1 Paket	6.060.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	=	6.060.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG
					Tangga	Tangga yang Disediakan			Samboja Barat,		pemerintahan daerah yang			DARAT
'									Amborawang Darat		profesional dan akuntabel			
'									Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
, ,									Kute Siantan,		transformasi pelayanan			
, ,									Amborawang Darat		publik			
'											1. Penataan dan			
, ,											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor		1 Paket	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BACI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola		14 71 2 000 00	KELURAHAN AMBORAWANG
' '	01	01	2.00	0004	Penyeulaan Bahan Logistik Kantoi	yang Disediakan		1 Faket	Samboja Barat,	DANA BAGITIASIL (DBII)	pemerintahan daerah yang		14.712.000,00	DARAT
						yang Disediakan			Amborawang Darat		profesional dan akuntabel			DARAT
									Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
									Kute Siantan,		transformasi pelayanan			
									Amborawang Darat		publik			
									Amborawang Darat					
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
'											Pemerintahan dan Pelayanan			
'											Publik			
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	. 1	1 Paket	3.900.300,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	3.900.300,00	KELURAHAN AMBORAWANG
1 '					Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan	. 1		Samboja Barat,		pemerintahan daerah yang			DARAT
- '							. 1		Amborawang Darat		profesional dan akuntabel			
'			l	Į			. 1		Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
1 '							. 1		Kute Siantan,		transformasi pelayanan			
'									Amborawang Darat		publik			
1 '							. 1				1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
'											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
7	01	01	2.06	0000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan		10 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BACI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola		42 900 000 00	KELURAHAN AMBORAWANG
'	01	01	2.00		dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi		10 Laporan	Samboja Barat,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang	-	42.800.000,00	DARAT
'					dan Konsultasi SKPD									DARAT
'						SKPD			Amborawang Darat		profesional dan akuntabel			
									Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
									Kute Siantan,		transformasi pelayanan			
									Amborawang Darat		publik			
'											1. Penataan dan			
'											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah waktu penyediaan Jasa	.=	3 bulan	500.000,00				1.000.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG
'					Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan								DARAT
'						Daerah yang disediakan								
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		1 Laporan	500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		-	1.000.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG
, ,						Surat Menyurat			Samboja Barat,					DARAT
'									Amborawang Darat					I
'									Kab. Kutai Kartanegara,					
, ,									Kute Siantan,					
'									Amborawang Darat					
'											I I			
1 '									7 mborawang barat					
									7 moortuung Sarat					
	01	01	2.00		Domaliharaan Davara Milil Davara	Lundah Damaliharaan Parang Marin		2 kogistan			7 Davinskate von halde		62 940 000 00	VELUDALIANI AMPODAMANI
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah		-	2 kegiatan	62.840.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola		62.840.000,00	
7	01	01	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	2 kegiatan			pemerintahan daerah yang		62.840.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
7	01	01	2.09				-	2 kegiatan			pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		62.840.000,00	
7	01	01	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan		-	2 kegiatan			pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		62.840.000,00	
7	01	01	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan		-	2 kegiatan			pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		62.840.000,00	
7	01	01	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan		-	2 kegiatan			pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		62.840.000,00	
7	01	01	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan		-	2 kegiatan			pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		62.840.000,00	
7	01	01	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan		-	2 kegiatan			pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		62.840.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
7	01	01	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan		·	2 kegiatan			pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		62.840.000,00	
7	01	01	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan		-	2 kegiatan			pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		62.840.000,00	
					Penunjang Urusan Pemerintahan	Daerah	-	2 kegiatan		DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			DARAT
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin	-		62.840.000,00 2.840.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			DARAT
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Daerah	-		62.840.000,00 2.840.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang			DARAT KELURAHAN AMBORAWANG
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin			62.840.000,00 2.840.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			DARAT KELURAHAN AMBORAWANG
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin	-		2.840.000,00 Lab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-		DARAT KELURAHAN AMBORAWANG
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin	-		2.840.000,00 2.840.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan			DARAT KELURAHAN AMBORAWANG
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin	-		2.840.000,00 Lab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		DARAT KELURAHAN AMBORAWANG
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin	-		2.840.000,00 2.840.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			DARAT KELURAHAN AMBORAWANG
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin	-		2.840.000,00 2.840.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola	-		DARAT KELURAHAN AMBORAWANG
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin	-		2.840.000,00 2.840.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-		DARAT KELURAHAN AMBORAWANG



	7 0	01 01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan		1 Unit	60.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	- 60.000.000,0	00 KELURAHAN AMBORAWANG
					Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang			Samboja Barat,		pemerintahan daerah yang		DARAT
						Dipelihara/Direhabilitasi			Amborawang Darat		profesional dan akuntabel		
									Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung		
									Kute Siantan,		transformasi pelayanan		
									Amborawang Darat		publik		
											1. Penataan dan		
											Pengembangan Tata Kelola		
											Pemerintahan dan Pelayanan		
											Publik		
471	7 0	01 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Lembaga	-	72 Persen	1.400.000.000,00			- 1.400.000.000,	00 KELURAHAN AMBORAWANG
					MASYARAKAT DESA DAN	Pemberdayaan Masyarakat							DARAT
	_				KELURAHAN	Desa/Kelurahan Yang Aktif							
	7 0	01 03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	-	8 kegiatan	750.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	- 750.000.000)	00 KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
						/ Kelurahan					profesional dan akuntabel		DARAT
											untuk mendukung		
											transformasi pelayanan		
											publik		
											1. Penataan dan		
											Pengembangan Tata Kelola		
											Pemerintahan dan Pelayanan		
											Publik		
	7 0	01 03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana		4 Unit	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	- 450.000.000,	00 KELURAHAN AMBORAWANG
		- 1	1		Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun		į I	Samboja Barat,		pemerintahan daerah yang		DARAT
									Amborawang Darat		profesional dan akuntabel		
		1						1	Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung		
									Kute Siantan,		transformasi pelayanan		
									Amborawang Darat		publik		
											1. Penataan dan		
											Pengembangan Tata Kelola		
											Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
			0.00					1.5.					
	/ 0	01 03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang		4 Pokmas /	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	- 300.000.000,0	00 KELURAHAN AMBORAWANG DARAT
					Keluranan	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Ormas	Samboja Barat, Amborawang Darat		profesional dan akuntabel		DARAT
						ividsyarakat di Keluralian			Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung		
									Kute Siantan,		transformasi pelayanan		
									Amborawang Darat		publik		
									7 mborawang barat		1. Penataan dan		
											Pengembangan Tata Kelola		
											Pemerintahan dan Pelayanan		
											Publik		
	7 0	01 03	2.03		Pemberdayaan Lembaga	Jumlah Koordinasi yang	-	10 Kegiatan	650.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	650.000.000,	00 KELURAHAN AMBORAWANG
					Kemasyarakatan Tingkat	dilaksanakan Desa / Kelurahan					pemerintahan daerah yang		DARAT
					Kecamatan						profesional dan akuntabel		
											untuk mendukung		
											transformasi pelayanan		
											publik		
											1. Penataan dan		
		1						[Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		
											Publik		
+	7 0	1 02	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan		13 Lembaga	650.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DRH)	- 7. Peningkatan tata kelola	- 650,000,000	00 KELURAHAN AMBORAWANG
	<i>'</i> °	. 03	2.03	0001	Kemasyarakatan	yang Diselenggarakan		Kemasyarakatan	Samboja Barat,	S DAGITIASIE (DBII)	pemerintahan daerah yang	030.000.000,	DARAT
		1			, 31 010 011	,		nerrasya akatan	Amborawang Darat		profesional dan akuntabel		
		1						1	Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung		
		- 1	1		1			į I	Kute Siantan,		transformasi pelayanan		1
		- 1	1		1			į I	Amborawang Darat		publik		1
		1						[1. Penataan dan		
		- 1	1		1			ĺ			Pengembangan Tata Kelola		1
		1						[Pemerintahan dan Pelayanan		
	_	_ _	1	<u> </u>							Publik		
					Kelurahan Amborawang Laut				1.376.975.000,00				00 KELURAHAN AMBORAWANG LAUT
	7				UNSUR KEWILAYAHAN				1.376.975.000,00			1.380.000.000)	00 KELURAHAN AMBORAWANG LAUT
	7 0	01			KECAMATAN				1.376.975.000,00			1.380.000.000 /	00 KELURAHAN AMBORAWANG LAUT
472	7 0	01 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	60 Persen	126.975.000,00			- 130.000.000,	
		1			PEMERINTAHAN DAERAH								LAUT
					KABUPATEN/KOTA			1					



7												
1 '	0:	01 01	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah layanan Administrasi -	6 kegiatan	73.025.000,00		7. Peningkatan tata kelola -	- 75.659.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG
					Daerah	Umum Perangkat Daerah				pemerintahan daerah yang		LAUT
										profesional dan akuntabel		
										untuk mendukung		
										transformasi pelayanan		
										publik		
										1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		
- 7	0	01 01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	1.252.300,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA PAGI HASII (DBH)	7. Peningkatan tata kelola -	1 252 200 00	KELURAHAN AMBORAWANG
,	0.	01	2.00	0001	renyediaan komponen mstalasi		1 Faket		DANA BAGITIASIL (DBTI)		1.232.300,00	LAUT
						Listrik/Penerangan Bangunan		Samboja Barat,		pemerintahan daerah yang		LAUI
					Listrik/Penerangan Bangunan	Kantor yang Disediakan		Amborawang Laut		profesional dan akuntabel		
					Kantor			Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung		
								Kute Siantan,		transformasi pelayanan		
								Amborawang Laut		publik		
								-		1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		
	4		1	1					ļ			1
7	0:	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	1 Paket	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	10.000.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG
			1		Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang		Samboja Barat,		pemerintahan daerah yang		LAUT
			1			Disediakan		Amborawang Laut		profesional dan akuntabel		
			1					Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung		
			1					Kute Siantan,		transformasi pelayanan		
		- 1	1						1			
		- 1	1					Amborawang Laut	1	publik		
			1							1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan		
										Publik		
-	-	24 04	2.00	0000	Daniel dia an Daniel de la Daniel	tourish Balant Barrelator Brownia	4 Police	7.300,000,00 K-h K-t-l Kt	DANIA DA CILIACII (DDII)	7 Desiredates totalists	7.260.000.00	WELLINALIAN ANADODANIANO
/	0.	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan Rumah	1 Paket	7.260.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	7.260.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG
					Tangga	Tangga yang Disediakan		Samboja Barat,		pemerintahan daerah yang		LAUT
								Amborawang Laut		profesional dan akuntabel		
								Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung		
								Kute Siantan,		transformasi pelayanan		
								Amborawang Laut		publik		
								Alliborawang Laut				
										1. Penataan dan		
										Pengembangan Tata Kelola		
										Pemerintahan dan Pelayanan		
7										Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
	0.	01 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1 Paket	20.000.000.00 Kab. Kutai Kartanegara.	DANA BAGI HASII (DBH) -	Publik	11.394.000.00	KELURAHAN AMBORAWANG
	0:	01 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1 Paket	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola -	11.394.000,00	
	0:	01 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Samboja Barat,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola - pemerintahan daerah yang	11.394.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT
	0:	01 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	Samboja Barat, Amborawang Laut	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	11.394.000,00	
	0:	01 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	11.394.000,00	
	0:	01 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	Samboja Barat, Amborawang Laut	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	11.394.000,00	
	0:	01 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	11.394.000,00	
	0:	01 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	11.394.000,00	
	0:	01 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	11.394.000,00	
	0:	01 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	11.394.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT
	0:	01 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	11.394.000,00	
						yang Disediakan		Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutali Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		LAUT
7			2.06		Penyediaan Barang Cetakan dan	yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1 Paket	Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut 4.512.700,00 Kab. Kutai Kartanegara,		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola -		LAUT
7						yang Disediakan		Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutali Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		LAUT
7					Penyediaan Barang Cetakan dan	yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan		Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut 4.512.700,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat,		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola -		LAUT KELURAHAN AMBORAWANG
7					Penyediaan Barang Cetakan dan	yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan		Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut 4.512.700,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		LAUT KELURAHAN AMBORAWANG
7					Penyediaan Barang Cetakan dan	yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan		Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut 4.512.700,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara,		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		LAUT KELURAHAN AMBORAWANG
7					Penyediaan Barang Cetakan dan	yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan		Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut 4.512.700,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan,		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dareh yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		LAUT KELURAHAN AMBORAWANG
7					Penyediaan Barang Cetakan dan	yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan		Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut 4.512.700,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara,		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		LAUT KELURAHAN AMBORAWANG
7					Penyediaan Barang Cetakan dan	yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan		Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut 4.512.700,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan,		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		LAUT KELURAHAN AMBORAWANG
7					Penyediaan Barang Cetakan dan	yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan		Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut 4.512.700,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan,		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		LAUT KELURAHAN AMBORAWANG
7					Penyediaan Barang Cetakan dan	yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan		Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut 4.512.700,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan,		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		LAUT KELURAHAN AMBORAWANG
7					Penyediaan Barang Cetakan dan	yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan		Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut 4.512.700,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan,		Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pengembangan Tata Kelola		LAUT KELURAHAN AMBORAWANG
	0:	01 01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut 4.512.700,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4.512.700,00	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT
	0:	01 01		0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan		Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut 4.512.700,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut 30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	4.512.700,00	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT KELURAHAN AMBORAWANG
	0:	01 01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Paket	Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut 4.512.700,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut Sab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut 30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Samboja Barat,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	4.512.700,00	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT
	0:	01 01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan	1 Paket	Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut 4.512.700,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut 30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	4.512.700,00	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT KELURAHAN AMBORAWANG
	0:	01 01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Paket	Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut 4.512.700,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut Sab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut 30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Samboja Barat,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	4.512.700,00	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT KELURAHAN AMBORAWANG
	0:	01 01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Paket	Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut 4.512.700,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kuta Siantan, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kutai Kartanegara, Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan Tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	4.512.700,00	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT KELURAHAN AMBORAWANG
	0:	01 01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Paket	Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut 4.512.700,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut Sab. Kutai Kartanegara, Kuta Siantan, Amborawang Laut Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik	4.512.700,00	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT KELURAHAN AMBORAWANG
	0:	01 01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Paket	Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut 4.512.700,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kuta Siantan, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kutai Kartanegara, Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	4.512.700,00	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT KELURAHAN AMBORAWANG
	0:	01 01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Paket	Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut 4.512.700,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut Sab. Kutai Kartanegara, Kuta Siantan, Amborawang Laut Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	4.512.700,00	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT KELURAHAN AMBORAWANG
	0:	01 01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Paket	Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut 4.512.700,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut Sab. Kutai Kartanegara, Kuta Siantan, Amborawang Laut Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	4.512.700,00	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT KELURAHAN AMBORAWANG
	0:	01 01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Paket	Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut 4.512.700,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut Sab. Kutai Kartanegara, Kuta Siantan, Amborawang Laut Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	4.512.700,00	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT KELURAHAN AMBORAWANG



	7 (01 01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah waktu penyediaan Jasa	- 3	3 bulan	500.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola		891.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG
					Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan			,		pemerintahan daerah yang			LAUT
						Daerah yang disediakan					profesional dan akuntabel			
						Ductum yang aiscalakan					untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	7 (01 01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		1 Laporan	500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	891.000.00	KELURAHAN AMBORAWANG
					,	Surat Menyurat			Samboja Barat,	,	pemerintahan daerah yang			LAUT
						Saratmenyarat			Amborawang Laut		profesional dan akuntabel			5.61
									Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
									Kute Siantan,		transformasi pelayanan			
									Amborawang Laut		publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	7 (01 01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik	- 1	2 kegiatan	53.450.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola		53.450.000.00	KELURAHAN AMBORAWANG
	· ·	-			Penunjang Urusan Pemerintahan	Daerah					pemerintahan daerah yang			LAUT
					Daerah	Daeran					profesional dan akuntabel			LAGI
					Daeran									
						1					untuk mendukung		1	
						1					transformasi pelayanan			
						1					publik		1	
						1					1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	7 (01 01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin		10 Unit	3.050.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	_	3.050.000.00	KELURAHAN AMBORAWANG
	´ `	,_ 01	2.03	0000	Lainnya	Lainnya yang Dipelihara		20 01110	Samboja Barat,	Britist British Siz (BBri)	pemerintahan daerah yang		5.050.000,00	LAUT
					Laiiiiya	Lailillya yalig Dipeliliara								LAUI
									Amborawang Laut		profesional dan akuntabel			
									Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
									Kute Siantan,		transformasi pelayanan			
									Amborawang Laut		publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	7 (1 01	2.00	0000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan	 	1 Unit	50.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA DACILIACII (DDII)	- 7. Peningkatan tata kelola		FO 400 000 00	KELURAHAN AMBORAWANG
	/ ')1 01	2.09	0009				1 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)		=	50.400.000,00	LAUT
					Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang			Samboja Barat,		pemerintahan daerah yang			LAUI
						Dipelihara/Direhabilitasi			Amborawang Laut		profesional dan akuntabel			
									Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
									Kute Siantan,		transformasi pelayanan			
									Amborawang Laut		publik			
											1. Penataan dan			
						1					Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
						1					Publik		1	
477	, I.	11 22	1	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Damantasa Lambi	 	73 Dame:	1.250.000.000,00		TODIK	 	1 250 000 000 00	KELURAHAN AMBORAWANG
473	7 1	03				Persentase Lembaga	- - -	72 Persen	1.250.000.000,00			-	1.250.000.000,00	
					MASYARAKAT DESA DAN	Pemberdayaan Masyarakat								LAUT
					KELURAHAN	Desa/Kelurahan Yang Aktif								
	7 (01 03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa	-	8 kegiatan	750.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola		750.000.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG
						/ Kelurahan					pemerintahan daerah yang		1	LAUT
				1		l					profesional dan akuntabel			
						1					untuk mendukung			
						1					transformasi pelayanan		1	
				1		l					publik			
						1								
						1					1. Penataan dan			
						1					Pengembangan Tata Kelola			
						1					Pemerintahan dan Pelayanan			
			<u></u>	<u></u>							Publik			
	7 (01 03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana		4 Unit	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	450.000.000,00	KELURAHAN AMBORAWANG
					Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun			Samboja Barat,		pemerintahan daerah yang			LAUT
						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			Amborawang Laut		profesional dan akuntabel		1	
				1		l			Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
						1								
						1			Kute Siantan,		transformasi pelayanan		1	
						1			Amborawang Laut		publik			
						1					1. Penataan dan			
				1		l					Pengembangan Tata Kelola			
						1					Pemerintahan dan Pelayanan		1	
	- 1	1	1	1		1					Publik			
1 1														



	7	01 03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas / Ormas	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	- 300.000.000	0,00 KELURAHAN AMBORAWANG LAUT
											Publik		
		01 03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan		10 kegiatan	500.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata		0,00 KELURAHAN AMBORAWANG LAUT
	7	01 03	2.03	0001	Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		10 Lembaga Kemasyarakatan	500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Amborawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Amborawang Laut	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 6. Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	- 500.000.000	LAUT
					Kelurahan Salok Api Darat		· ·	•	1.324.573.000,00			1.340.000.000	0,00 KELURAHAN SALOK API DARAT
	7				UNSUR KEWILAYAHAN				1.324.573.000,00			1.340.000.000	0,00 KELURAHAN SALOK API
	7	01	+	1	KECAMATAN				1.324.573.000,00			1.340.000.000	
474	7	01 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	60 Nilai	74.573.000,00			- 90.000.000	DARAT D,00 KELURAHAN SALOK API DARAT
	7	01 01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		6 Laporan	67.004.000,00		T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	80.731.00d	0,00 KELURAHAN SALOK API DARAT
	7	01 01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- 10.000.000),00 KELURAHAN SALOK API DARAT
	7	01 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- 8.527.000	0,00 KELURAHAN SALOK API DARAT



		04 04												
1 1 '	7 (1 2.06	0005	Danuadiaan Barana Catalyan dan	Lumlah Daliat Darana Catalian dan		1 Paket	7.004.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BACI HACII (DBH)	7 Deninglaten tota kalala		7,004,000,00	KELURAHAN SALOK API
	′ ' '	01 01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan		1 Paket		DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-		
					Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan			Samboja Barat, Salok		pemerintahan daerah yang		l l	DARAT
									Api Darat		profesional dan akuntabel			
									Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
									Kute Siantan, Salok Api		transformasi pelayanan			
									Darat Darat		publik			
									Darat					
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	_										1			
1 1 3	7 (01 01	2.06	0009		Jumlah Laporan Penyelenggaraan		10 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-		KELURAHAN SALOK API
					dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Samboja Barat, Salok		pemerintahan daerah yang		l.	DARAT
						SKPD			Api Darat		profesional dan akuntabel			
									Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
									Kute Siantan, Salok Api		transformasi pelayanan			
									Darat		publik			
									Darat		P==			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
 	7 .	01 01	1 2.08	+	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	lumlah waktu nenyediaan lasa	 	3 bulan	500.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola		3 300 000 00	KELURAHAN SALOK API
1 1	′ ['	01 0	2.08	1				o Dulan	500.000,00			[-		
1 1			- [1	Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan		1	1		pemerintahan daerah yang			DARAT
1 1			- [1		Daerah yang disediakan		1	1		profesional dan akuntabel			
			- [1				1	1		untuk mendukung			
1 1			- [1		[1	1		transformasi pelayanan			
1 1			- [1		[1	1					
1 1			- [1		[1	1		publik			
1 1			- [1		[1	1		1. Penataan dan			
			- [1		[1	1		Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	_													
	7 (01 01	1 2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		1 Laporan	500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		=		KELURAHAN SALOK API
						Surat Menyurat			Samboja Barat, Salok		pemerintahan daerah yang			DARAT
									Api Darat		profesional dan akuntabel			
									Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
									Kute Siantan, Salok Api		transformasi pelayanan			
									Darat		publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	_													
	7 (01 01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik	-	2 kegiatan	7.069.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola			KELURAHAN SALOK API
					Penunjang Urusan Pemerintahan	Daerah					pemerintahan daerah yang		l l	DARAT
					Daerah						profesional dan akuntabel			
					Ducium									
											and the second section in			
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											transformasi pelayanan publik			
											transformasi pelayanan			
											transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			
											transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
											transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
											transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	7 (01 01	1 2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin		10 Unit	7.069.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-	7.069.000,00	KELURAHAN SALOK API
	7 (01 01	1 2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola	-		KELURAHAN SALOK API DARAT
	7 (01 01	1 2.09	0006		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	Samboja Barat, Salok	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-		
:	7 (01 01	1 2.09	0006				10 Unit	Samboja Barat, Salok Api Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-		
:	7 (01 01	1 2.09	0006				10 Unit	Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-		
	7	01 01	1 2.09	0006				10 Unit	Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-		
	7	01 01	1 2.09	0006				10 Unit	Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung			
	7	01 01	1 2.09	0006				10 Unit	Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		
	7 (01 01	1 2.09	0006				10 Unit	Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			
:	7 (01 01	1 2.09	0006				10 Unit	Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-		
	7 (01 01	1 2.09	0006				10 Unit	Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dae Pelayanan	-		
:				0006	Lainnya	Lainnya yang Dipelihara			Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			DARAT
475				0006				10 Unit	Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dae Pelayanan	-		
475				0006	Lainnya PROGRAM PEMBERDAYAAN	Lainnya yang Dipelihara Persentase Lembaga			Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dae Pelayanan	-	1.250.000.000,00	DARAT KELURAHAN SALOK API
475				0006	Lainnya PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Lainnya yang Dipelihara Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat			Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dae Pelayanan	-	1.250.000.000,00	DARAT
	7 (01 03	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Lainnya yang Dipelihara Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	-	72 Persen	Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Penerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-	1.250.000.000,00	DARAT KELURAHAN SALOK API DARAT
	7 (01 03			Lainnya PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Lainnya yang Dipelihara Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Kegiatan yang dikuti Desa	-		Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1.250.000.000,00	DARAT KELURAHAN SALOK API DARAT KELURAHAN SALOK API
	7 (01 03	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Lainnya yang Dipelihara Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	-	72 Persen	Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Penerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		1.250.000.000,00	DARAT KELURAHAN SALOK API DARAT
	7 (01 03	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Lainnya yang Dipelihara Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Kegiatan yang dikuti Desa	·	72 Persen	Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang pemerintahan daerah yang		1.250.000.000,00	DARAT KELURAHAN SALOK API DARAT KELURAHAN SALOK API
	7 (01 03	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Lainnya yang Dipelihara Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Kegiatan yang dikuti Desa	-	72 Persen	Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Penmerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel		1.250.000.000,00	DARAT KELURAHAN SALOK API DARAT KELURAHAN SALOK API
	7 (01 03	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Lainnya yang Dipelihara Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Kegiatan yang dikuti Desa	·	72 Persen	Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	1.250.000.000,00	DARAT KELURAHAN SALOK API DARAT KELURAHAN SALOK API
	7 (01 03	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Lainnya yang Dipelihara Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Kegiatan yang dikuti Desa	-	72 Persen	Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Penerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan transformasi pelayanan transformasi pelayanan		1.250.000.000,00	DARAT KELURAHAN SALOK API DARAT KELURAHAN SALOK API
	7 (01 03	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Lainnya yang Dipelihara Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Kegiatan yang dikuti Desa	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	72 Persen	Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1.250.000.000,00	DARAT KELURAHAN SALOK API DARAT KELURAHAN SALOK API
	7 (01 03	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Lainnya yang Dipelihara Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Kegiatan yang dikuti Desa	-	72 Persen	Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Penerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan transformasi pelayanan transformasi pelayanan	-	1.250.000.000,00	DARAT KELURAHAN SALOK API DARAT KELURAHAN SALOK API
	7 (01 03	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Lainnya yang Dipelihara Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Kegiatan yang dikuti Desa	-	72 Persen	Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	1.250.000.000,00	DARAT KELURAHAN SALOK API DARAT KELURAHAN SALOK API
	7 (01 03	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Lainnya yang Dipelihara Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Kegiatan yang dikuti Desa	-	72 Persen	Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Penerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	1.250.000.000,00	DARAT KELURAHAN SALOK API DARAT KELURAHAN SALOK API
	7 (01 03	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Lainnya yang Dipelihara Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif Jumlah Kegiatan yang dikuti Desa	-	72 Persen	Samboja Barat, Salok Api Darat Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Darat	DANA BAGI HASIL (DBH)	transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		1.250.000.000,00	DARAT KELURAHAN SALOK API DARAT KELURAHAN SALOK API



Part	7													
A		7 0	01 03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	4 Unit	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola		450.000.000,00	KELURAHAN SALOK API
Part														DARAT
A							,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,							
A														
Part														
Part									Darat					
7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
1														
Section for Section of Section											Publik			
August A	7	7 0	01 03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	4 Pokmas /	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola	=	300.000.000,00	KELURAHAN SALOK API
August A						Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan	Ormas	Samboja Barat, Salok		pemerintahan daerah yang			DARAT
Part Part														
Residence Section Se														
Part Part														
									Darat					
Part Part														
7 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2														
7 61 7 7 7 7 7 7 7 7 7														
Comparison Tight Comparison Comparis											Publik			
Part Part	7	7 0	01 03	2.03		Pemberdayaan Lembaga	Jumlah Koordinasi yang -	2 Lembaga	500.000.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola	. -	500.000.000,00	KELURAHAN SALOK API
Part Part						Kemasyarakatan Tingkat	dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kemasyarakat			pemerintahan daerah yang			DARAT
Part Part														
	1 1	1	- 1	1									1	
Part														
Programme				1									[
Part	1 1	1	- 1	1		I							1	
Project Continue of the Cont														
Name											Pengembangan Tata Kelola			
Part														
Names principle Names prin											Publik			
Sambag Bart, Solid Agricust Ag	7	7 0	01 03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga	500.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola		500.000.000,00	KELURAHAN SALOK API
Ap Drast Ash Cold Facilitations (Ash State Facilitations) and Applications (Ash State Facilitations) and Applications (Ash State Facilitations) and Applications (Ash State Facilitations) and Applications (Ash State Facilitations) and Applications (Ash State Facilitations) and Applications (Ash State Facilitations) and Applications) and Applications (Ash State Facilitations) and Applications) and Applications (Ash State Facilitations) and Applications) and Applications (Ash State Facilitations) and Applications) and Applications (Ash State Facilitations) and Applications) and Applications (Ash Applications) and Applications) and Applications (Ash Applications) and Applications) and Applications) and Applications (Ash Applications) and Applications) and Applications) and Applications (Ash Applications) and Applications) and Applications) and Applications) and Applications (Ash Applications) and Applic								Kemasyarakatan	Samboia Barat, Salok	, ,	pemerintahan daerah yang			DARAT
Web Note Formangers Cate Strain, Sold Ap Carrier Cate Strain, Sold Ap Carrier Cate Strain, Sold Ap Carrier Cate Strain, Sold Ap Carrier Cate Strain, Sold Ap Carrier Cate Strain, Sold Ap Carrier Cate Strain, Sold Ap Carrier Cate Strain, Sold Ap Carrier Cate Strain, Sold Ap Carrier Cate Strain, Sold Ap Carrier Cate Strain, Sold Ap Carrier Cate Strain, Sold Ap Carrier Cate Strain, Sold Ap Carrier Cate Strain, Sold Ap Cate S							,							
Life Sixtus, Salok Ap Cored Co														
Date														
1.178.366.000,00 1.189.366.0														
									Darat					
1.178.366.000,00														
1.178.366.000,00 1.189.366.0														
1.179.366.000.00 1.189.366.0														
1.178.368.000,00											Dublik			
Total Tota											FUDIK			
1.183 58.000,00 1.183 58.0						Kelurahan Salok Api Laut			1.178.368.000,00		FUUIK	·	1.189.368.000,00	
Affe 7 01 01 1 PROGRAM PENUNIANG URUSAN PRINCENTAL ADARRAH PRINCENTAL ADARRAM PRINCENTAL ADARRAM PRINCENTAL ADARRAM PRINCENTAL ADARRAM PRINCENTAL ADARRAM PRINCENTAL ADARRAM PRINCENTAL ADARRAM PRINCENTAL ADARRAM PRINCENTAL ADARRAM PRINCENTAL ADARRAM	7	7				_			•		FULIA		•	LAUT KELURAHAN SALOK API
PMERINTAHAN DAERAH KABUPATRAYKOTA						UNSUR KEWILAYAHAN			1.178.368.000,00		FUUIK		1.189.368.000,00	LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT
Total Continue Con	7	7 0				UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN			1.178.368.000,00		FUUIK		1.189.368.000,00	LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT
7 01 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Daerah Daer	7	7 0				UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	60 Nilai	1.178.368.000,00		FUUIK	-	1.189.368.000,00	LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API
Daerah Umum Perangkat Daerah Daerah Umum Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah Daerah Umum Perangkat Daerah Daerah Umum Perangkat Daerah Daerah	7	7 0				UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	GO Nilai	1.178.368.000,00		FUUIK	-	1.189.368.000,00	LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API
profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7 O1 O1 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, DaNA BAGI HASIL (DBH) - 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daserah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Nab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Laut Nah. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Laut 1. Penataan dan Pelayanan publik Nab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Laut 1. Penataan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	7 476 7	7 0	01 01			UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.178.368.000,00 1.178.368.000,00 78.368.000,00			-	1.189.368.000,00 1.189.368.000,00 89.368.000,00	LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT
untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dare Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dare Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dare Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dare Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daren yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daren yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	7 476 7	7 0	01 01			UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Jumlah layanan Administrasi -		1.178.368.000,00 1.178.368.000,00 78.368.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola	-	1.189.368.000,00 1.189.368.000,00 89.368.000,00	LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API
untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. 400.000,00 Katurangan, Samboja Barat, Salok Api Lustrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4. Arator 4. A	7 476 7	7 0	01 01			UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Jumlah layanan Administrasi -		1.178.368.000,00 1.178.368.000,00 78.368.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	1.189.368.000,00 1.189.368.000,00 89.368.000,00	LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API
transformasi pelayanan publik 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 2.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Laut 1 Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7 01 01 Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Laut 1 Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	7 476 7	7 0	01 01			UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Jumlah layanan Administrasi -		1.178.368.000,00 1.178.368.000,00 78.368.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	1.189.368.000,00 1.189.368.000,00 89.368.000,00	LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API
Publik Li. Penatana dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Penatangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Penatangan Tata Kelola Pemerintahan darah tanganan Publik Penatangan Bangunan Publik Publik Penatangan Bangunan Publik Publik Penatangan Bangunan Publik Publik Penatangan Bangunan Publik Publik Publik Publik Penatangan Bangunan Publik Publik Publik Publik Publik Penatangan Bangunan Publik	7 476 7	7 0	01 01			UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Jumlah layanan Administrasi -		1.178.368.000,00 1.178.368.000,00 78.368.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	1.189.368.000,00 1.189.368.000,00 89.368.000,00	LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API
1. Penatana dan Pengembangan Tata Kelola Pengemiritahan dan Pelayanan Publik 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kantor yang Disediak	7 476 7	7 0	01 01			UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Jumlah layanan Administrasi -		1.178.368.000,00 1.178.368.000,00 78.368.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	1.189.368.000,00 1.189.368.000,00 89.368.000,00	LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API
Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sambolaur Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Sambolaur Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Listrik/Penerangan Bangunan Pengeminahan dar Pelayanan Pengeminahan dan Pelayanan 2.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Listrik/Penerangan Bangunan Pengeminahan dan Pelayanan 2.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Listrik/Penerangan Bangunan Pengeminahan dan Pelayanan 2.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan Salok Api Listrik/Penerangan Bangunan Pengeminahan dan Pelayanan 2.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan Salok Api Listrik/Penerangan Bangunan Pengeminahan dan Pelayanan 2.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kantor Vang Disediakan 2.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Kantor Vang Disediakan 2.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Candon Vang Disediakan 2.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Candon Vang Disediakan 2.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Candon Vang Disediakan 2.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Candon Vang Disediakan 2.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Candon Vang Disediakan 2.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Candon Vang Disediakan 2.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Candon Vang Disediakan 2.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Candon Vang Disediakan 2.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Candon Vang Disediakan 2.400	7 476 7	7 0	01 01			UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Jumlah layanan Administrasi -		1.178.368.000,00 1.178.368.000,00 78.368.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	1.189.368.000,00 1.189.368.000,00 89.368.000,00	LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API
Pembelikat dan Pelayanan Publik 7 01 01 2.06 0001 Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 2.400.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Salok Api Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.400.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Salok Api Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8 DANA BAGI HASIL (DBH) - Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengerintahan dan Pelayanan Pengerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan Pengerintahan dan Pelayanan	7 476 7	7 0	01 01			UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Jumlah layanan Administrasi -		1.178.368.000,00 1.178.368.000,00 78.368.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1.189.368.000,00 1.189.368.000,00 89.368.000,00	LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API
Variable Variable	7 476 7	7 0	01 01			UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Jumlah layanan Administrasi -		1.178.368.000,00 1.178.368.000,00 78.368.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	1.189.368.000,00 1.189.368.000,00 89.368.000,00	LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API
7 01 02 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 476 7	7 0	01 01			UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Jumlah layanan Administrasi -		1.178.368.000,00 1.178.368.000,00 78.368.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-	1.189.368.000,00 1.189.368.000,00 89.368.000,00	LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Experimation derah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengerinbangan Tata Kelola Pengerinbangan Tata Kelola Pengerinbangan Tata Kelola Pengerinbangan Tata Kelola Pengerinbangan Tata Kelola Pengerinbangan Tata Kelola Pengerinbangan Tata Kelola Pengerinbangan Tata Kelola Pengerinbangan Tata Kelola Pengerinbangan Tata Kelola	7 476 7	7 0	01 01			UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat	Jumlah layanan Administrasi -		1.178.368.000,00 1.178.368.000,00 78.368.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-	1.189.368.000,00 1.189.368.000,00 89.368.000,00	LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor Api Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Laut Laut Laut Profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penartaan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	7 476 7	7 0	01 01	2.06		UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Laporan	1.178.368.000,00 1.178.368.000,00 78.368.000,00 70.799.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1.189.368.000,00 1.189.368.000,00 89.368.000,00 80.599.000,00	IAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor Api Laut Frank Kata Kartanegara, Kuta Ka	7 476 7	7 0	01 01	2.06		UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi	6 Laporan	1.178.368.000,00 1.178.368.000,00 78.368.000,00 70.799.000,00 2.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola		1.189.368.000,00 1.189.368.000,00 89.368.000,00 80.599.000,00	IAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT
Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api Laut 1. Penataan dan Pengeminbangan Tata Kelola Peneminbangan dan Pelayanan	7 476 7	7 0	01 01	2.06		UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi	6 Laporan	1.178.368.000,00 1.178.368.000,00 78.368.000,00 70.799.000,00 2.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-	1.189.368.000,00 1.189.368.000,00 89.368.000,00 80.599.000,00	IAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT
Kute Siantan, Salok Api Laut Laut 1. Pengembangan Tata Kelola Pengemintahan dan Pelayanan	7 476 7	7 0	01 01	2.06		UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	6 Laporan	1.178.368.000,00 1.178.368.000,00 78.368.000,00 70.799.000,00 2.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	1.189.368.000,00 1.189.368.000,00 89.368.000,00 80.599.000,00	IAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT
Laut publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	7 476 7	7 0	01 01	2.06		UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	6 Laporan	1.178.368.000,00 1.178.368.000,00 78.368.000,00 70.799.000,00 Lab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Laut	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel		1.189.368.000,00 1.189.368.000,00 89.368.000,00 80.599.000,00	IAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT
1. Penataan dan Pengerinbangan Tata Kelola Pengerinbandan dan Pelayanan	7 476 7	7 0	01 01	2.06		UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	6 Laporan	1.178.368.000,00 1.178.368.000,00 78.368.000,00 70.799.000,00 2.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Laut Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		1.189.368.000,00 1.189.368.000,00 89.368.000,00 80.599.000,00	IAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT
Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	7 476 7	7 0	01 01	2.06		UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	6 Laporan	1.178.368.000,00 1.178.368.000,00 78.368.000,00 70.799.000,00 2.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan		1.189.368.000,00 1.189.368.000,00 89.368.000,00 80.599.000,00	IAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT
Pemerintahan dan Pelayanan	7 476 7	7 0	01 01	2.06		UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	6 Laporan	1.178.368.000,00 1.178.368.000,00 78.368.000,00 70.799.000,00 2.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik		1.189.368.000,00 1.189.368.000,00 89.368.000,00 80.599.000,00	IAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT
	7 476 7	7 0	01 01	2.06		UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	6 Laporan	1.178.368.000,00 1.178.368.000,00 78.368.000,00 70.799.000,00 2.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		1.189.368.000,00 1.189.368.000,00 89.368.000,00 80.599.000,00	IAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	7 476 7	7 0	01 01	2.06		UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	6 Laporan	1.178.368.000,00 1.178.368.000,00 78.368.000,00 70.799.000,00 2.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Penataan dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		1.189.368.000,00 1.189.368.000,00 89.368.000,00 80.599.000,00	IAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT
	7 476 7	7 0	01 01	2.06		UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	6 Laporan	1.178.368.000,00 1.178.368.000,00 78.368.000,00 70.799.000,00 2.400.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		1.189.368.000,00 1.189.368.000,00 89.368.000,00 80.599.000,00	IAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT KELURAHAN SALOK API LAUT



7	7 01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan		1 Paket	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	10.000.000,00	KELURAHAN SALOK API LAUT
					Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang			Samboja Barat, Salok		pemerintahan daerah yang			
						Disediakan			Api Laut		profesional dan akuntabel			
									Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
									Kute Siantan, Salok Api		transformasi pelayanan			
									Laut		publik			
									2000		1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
7	7 01	01	2.06	0003	. ,	Jumlah Paket Peralatan Rumah		1 Paket	7.260.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		-	7.260.000,00	KELURAHAN SALOK API LAUT
					Tangga	Tangga yang Disediakan			Samboja Barat, Salok		pemerintahan daerah yang			
									Api Laut		profesional dan akuntabel			
									Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
									Kute Siantan, Salok Api		transformasi pelayanan			
									Laut		publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
 			2.00	0001	Daniel Balance Balance Committee	Lordala Balant Balant Balant		4 Police	20,000,000,00	DANIA BACILLIAN (BS:				WELLIN ALLAN CO. CO. CO. CO.
]] 7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1 1	1 Paket	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		-	5.000.000,00	KELURAHAN SALOK API LAUT
						yang Disediakan			Samboja Barat, Salok		pemerintahan daerah yang			
1 1								1	Api Laut		profesional dan akuntabel			
									Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
1 1								1	Kute Siantan, Salok Api		transformasi pelayanan			
									Laut		publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan Puhlik			
											1 dom			
7	7 01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan		1 Paket	1.139.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		-	1.139.000,00	KELURAHAN SALOK API LAUT
					Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan			Samboja Barat, Salok		pemerintahan daerah yang			
									Api Laut		profesional dan akuntabel			
									Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
									Kute Siantan, Salok Api		transformasi pelayanan			
									Laut		publik			
									Eddi		1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
7	7 01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan		10 Laporan		DANA BAGI HASIL (DBH)		-	54.800.000,00	KELURAHAN SALOK API LAUT
					dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Samboja Barat, Salok		pemerintahan daerah yang			
						SKPD			Api Laut		profesional dan akuntabel			
									Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
									Kute Siantan, Salok Api		transformasi pelayanan			
									laut		publik			
									Laut		1. Penataan dan			
1 1								1			1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
						1								
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan			3 bulan	500.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	- -	1.700.000,00	KELURAHAN SALOK API
1 1					Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan		1			pemerintahan daerah yang			LAUT
						Daerah yang disediakan					profesional dan akuntabel			
						' -					untuk mendukung			
1 1								1			transformasi pelayanan			
1 1								1			nublik			
						1					Pasin			
						1					1. Penataan dan			
						1					Pengembangan Tata Kelola			
						1					Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
		01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		1 Laporan	500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)		-	1.700.000,00	KELURAHAN SALOK API LAUT
7	01	01				Surat Menyurat			Samboja Barat, Salok		pemerintahan daerah yang			
7	01	01				1		1	Api Laut		profesional dan akuntabel			
7	, 01	01				1			Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
7	, 01	01												
7	, 01	01							Vista Clanton Calab Ant		transformasi nolausasa			
7	, 01								Kute Siantan, Salok Api		transformasi pelayanan			
7	, 01								Kute Siantan, Salok Api Laut		publik			
7	, 01	. 01									publik 1. Penataan dan			
7	, 01	. 01									publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
7	, 01	01									publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
7	01										publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			

,	7 0	01 01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik -	2 kegiatan	7.069.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola		7.069.000,00	KELURAHAN SALOK API
					Penunjang Urusan Pemerintahan	Daerah		•		pemerintahan daerah yang			.AUT
					Daerah					profesional dan akuntabel			
										untuk mendukung			
										transformasi pelayanan			
										publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
7	7 0	01 01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin	10 Unit	7.069.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	7.069.000,00	KELURAHAN SALOK API LAUT
					Lainnya	Lainnya yang Dipelihara		Samboja Barat, Salok		pemerintahan daerah yang			
					-			Api Laut		profesional dan akuntabel			
								Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
								Kute Siantan, Salok Api		transformasi pelayanan			
								laut		publik			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
	_						 			PUDIIK			
477 7	7 0	01 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Lembaga -	72 Persen	1.100.000.000,00			-		KELURAHAN SALOK API
					MASYARAKAT DESA DAN	Pemberdayaan Masyarakat							.AUT
			1		KELURAHAN	Desa/Kelurahan Yang Aktif							
7	7 0	01 03	2.02	1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa -	2 kegiatan	750.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola		750.000.000,00	KELURAHAN SALOK API
	- 1		1	1		/ Kelurahan	1 1			pemerintahan daerah yang			.AUT
	- 1		1	1			1 1			profesional dan akuntabel			
	- 1		1	1			1			untuk mendukung			
	- 1		1	1			1			transformasi pelayanan			
										nublik			
										p			
										1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola			
										Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
7	7 0	01 03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	4 Unit	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	450.000.000,00	KELURAHAN SALOK API LAUT
					Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun		Samboja Barat, Salok		pemerintahan daerah yang			
								Api Laut		profesional dan akuntabel			
								Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
								Kute Siantan, Salok Api		transformasi pelayanan			
								Laut		publik			
								Educ		1. Penataan dan			
										Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
										Publik			
7	7 0	01 03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	4 Pokmas /	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	300.000.000,00	KELURAHAN SALOK API LAUT
					Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan	Ormas	Samboja Barat, Salok		pemerintahan daerah yang			
						Masyarakat di Kelurahan		Api Laut		profesional dan akuntabel			
								Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
								Kute Siantan, Salok Api		transformasi pelayanan			
			1	1			1	Laut		publik			
	- 1		1	1			1			1. Penataan dan			
	- 1		1	1			1			Pengembangan Tata Kelola			
	- 1			1			1			Pemerintahan dan Pelayanan			
	- 1						1		I	rememuanan uan relayanan		1	
										Dublik			
	_						ļ			Publik			
7	7 0	01 03	2.03		Pemberdayaan Lembaga	Jumlah Koordinasi yang -	 10 kegiatan	350.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola			KELURAHAN SALOK API
7	7 0	01 03	2.03		Kemasyarakatan Tingkat	Jumlah Koordinasi yang - dilaksanakan Desa / Kelurahan	10 kegiatan	350.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang			KELURAHAN SALOK API AUT
7	7 0	01 03	2.03				10 kegiatan	350.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-		
7	7 0	01 03	2.03		Kemasyarakatan Tingkat		10 kegiatan	350.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-		
7	7 0	01 03	2.03		Kemasyarakatan Tingkat		10 kegiatan	350.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-		
7	7 0	01 03	2.03		Kemasyarakatan Tingkat		10 kegiatan	350.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung			
7	7 0	01 03	2.03		Kemasyarakatan Tingkat		10 kegiatan	350.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik			
7	7 0	01 03	2.03		Kemasyarakatan Tingkat		10 kegiatan	350.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			
7	7 0	01 03	2.03		Kemasyarakatan Tingkat		10 kegiatan	350.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
7	7 0	01 03	2.03		Kemasyarakatan Tingkat		10 kegiatan	350.000.000,00		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
					Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	dilaksanakan Desa / Kelurahan	-		DANA BACILIASII IPPIN	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			AUT
		01 03 01 03			Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga	dilaksanakan Desa / Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola			AUT
					Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	dilaksanakan Desa / Kelurahan	-	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang			AUT
					Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga	dilaksanakan Desa / Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Laut	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel			AUT
					Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga	dilaksanakan Desa / Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Laut Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-		AUT
					Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga	dilaksanakan Desa / Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-		AUT
					Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga	dilaksanakan Desa / Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Laut Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		AUT
					Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga	dilaksanakan Desa / Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan			AUT
					Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga	dilaksanakan Desa / Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-		AUT
					Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga	dilaksanakan Desa / Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-		AUT
					Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga	dilaksanakan Desa / Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-		
					Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga	dilaksanakan Desa / Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga	350.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Salok Api Laut Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Salok Api	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan			AUT



					Kelurahan Karya Merdeka			2.369.614.000,00					2.389.943.000,00	KELURAHAN KARYA MERDEKA
	7				UNSUR KEWILAYAHAN			2.369.614.000,00					2.389.943.000,00	
	7 0	01			KECAMATAN			2.369.614.000,00					2.389.943.000,00	KELURAHAN KARYA MERDEKA
478	7 0	01 0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	60 Nilai	69.614.000,00				-	89.943.000,00	KELURAHAN KARYA MERDEKA
	7 0	01 0	11 2.00	6	KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Kegiatan	69.114.000,00			7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		88.843.000,00	KELURAHAN KARYA MERDEKA
	7 C	01 0	11 2.00	6 000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.554.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH) -	Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1.554.000,00	KELURAHAN KARYA MERDEKA
	7 C	01 0	1 2.00	6 000	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		17.455.000,00	KELURAHAN KARYA MERDEKA
	7 0	01 0	2.00	6 000	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.060.000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		6.060.000,00	KELURAHAN KARYA MERDEKA
	7 0	01 0	2.00	6 000	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		7.244.000,00	KELURAHAN KARYA MERDEKA
	7 0	01 0	2.00	6 000	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1.500.000,00	KELURAHAN KARYA MERDEKA



	7 (01 01	2.06	0009	Danuelanggaraan Danat Kaardinasi	Lumlah Lanasan Danualan agaraan		10 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA PACI HASII (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola		55.030.000,00	KELURAHAN KARYA
	′ '	01 01	2.00	0003	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan		10 Laporari		DANA BAGI HASIL (DBH)			33.030.000,00	MERDEKA
					dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Samboja Barat, Karya		pemerintahan daerah yang			MERDEKA
						SKPD			Merdeka		profesional dan akuntabel			
									Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
									Kute Siantan, Karya		transformasi pelayanan			
									Merdeka		publik			
									Wici della		1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	7 (01 01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah waktu penyediaan Jasa -		3 bulkan	500.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola		1 100 000 00	KELURAHAN KARYA
	′ I `	01 01			Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan		5 Danian	3001000,00		pemerintahan daerah yang		1,100,000,00	MERDEKA
					Pemerintahan Daeran						pemerintanan daeran yang			IVIERDERA
						Daerah yang disediakan					profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	7 (01 01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		1 Laporan	500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DRH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	1,100,000.00	KELURAHAN KARYA
	Ι,	.	1	1	,	Surat Menyurat			Samboja Barat, Karya		pemerintahan daerah yang			MERDEKA
1 1		1	1			Juraciviciiyurat								IVILIDLINA
			1						Merdeka	1	profesional dan akuntabel			
			1						Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
1 1		1	1						Kute Siantan, Karya		transformasi pelayanan			
1 1		1	1						Merdeka		publik			
1 1		1	1						THE GENE		1. Penataan dan			
			1						 					
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
479	7 (01 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Lembaga -		72 Persen	2.300.000.000,00			-	2.300.000.000.00	KELURAHAN KARYA
4,,5	´ `	01 00			MASYARAKAT DESA DAN	Pemberdayaan Masyarakat		72 1 0.50.1	2130010001000,00				2.500.000.000,00	MERDEKA
					KELURAHAN	Desa/Kelurahan Yang Aktif								WIENDERA
	_	_												
	7 0	01 03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			10 Kegiatan	750.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	- -	750.000.000,00	KELURAHAN KARYA
						/ Kelurahan					pemerintahan daerah yang			MERDEKA
											profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
							1							
											transformasi pelayanan			
											publik			
											publik 1. Penataan dan			
											publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola			
											publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			
											publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	7 (01 03	2.02	0002		Jumlah Sarana dan Prasarana		4 Unit	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-	450.000.000,00	KELURAHAN KARYA
	7 (01 03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4 Unit	Samboja Barat, Karya	DANA BAGI HASIL (DBH)	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	450.000.000,00	KELURAHAN KARYA MERDEKA
	7 (01 03	2.02	0002		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		4 Unit		DANA BAGI HASIL (DBH)	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-	450.000.000,00	
	7 (01 03	2.02	0002				4 Unit	Samboja Barat, Karya Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH)	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	-	450.000.000,00	
	7 (01 03	2.02	0002				4 Unit	Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	450.000.000,00	
	7 (01 03	2.02	0002				4 Unit	Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya	DANA BAGI HASIL (DBH)	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-	450,000,000,00	
	7 (01 03	2.02	0002				4 Unit	Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	450.000.000,00	
	7 (01 03	2.02	0002				4 Unit	Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya	DANA BAGI HASIL (DBH)	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	450,000,000,00	
	7 (01 03	2.02	0002				4 Unit	Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya	DANA BAGI HASIL (DBH)	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	450.000.000,00	
	7 (01 03	2.02	0002				4 Unit	Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya	DANA BAGI HASIL (DBH)	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-	450,000,000,00	
	7 (01 03	2.02	0002				4 Unit	Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya	DANA BAGI HASIL (DBH)	publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	-	450.000.000,00	
					Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun			Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka		publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		MERDEKA
	7 (Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di	Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang		4 Pokmas /	Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,		publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-		MERDEKA KELURAHAN KARYA
					Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan			Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya		publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang	-		MERDEKA
					Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di	Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang		4 Pokmas /	Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka 300.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka		publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola	-		MERDEKA KELURAHAN KARYA
					Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di	Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan		4 Pokmas /	Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka 300.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka		publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Palayanan Publik an Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Palayanan Publik	-		MERDEKA KELURAHAN KARYA
					Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di	Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan		4 Pokmas /	Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara,		publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan Palayanan publik untuk mendukung	-		MERDEKA KELURAHAN KARYA
					Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di	Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan		4 Pokmas /	Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya		publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan	-		MERDEKA KELURAHAN KARYA
					Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di	Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan		4 Pokmas /	Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara,		publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		MERDEKA KELURAHAN KARYA
					Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di	Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan		4 Pokmas /	Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya		publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-		MERDEKA KELURAHAN KARYA
					Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di	Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan		4 Pokmas /	Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya		publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-		MERDEKA KELURAHAN KARYA
					Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di	Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan		4 Pokmas /	Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya		publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola	-		MERDEKA KELURAHAN KARYA
					Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di	Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan		4 Pokmas /	Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya		publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan	-		MERDEKA KELURAHAN KARYA
	7 (01 03	2.02	0003	Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas / Ormas	Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka		publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	300.000.000,000	MERDEKA KELURAHAN KARYA MERDEKA
	7 (2.02	0003	Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Lembaga	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas /	Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya		publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola		300.000.000,000	MERDEKA KELURAHAN KARYA MERDEKA KELURAHAN KARYA
	7 (01 03	2.02	0003	Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas / Ormas	Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka		publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang	-	300.000.000,000	MERDEKA KELURAHAN KARYA MERDEKA
	7 (01 03	2.02	0003	Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Lembaga	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas / Ormas	Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka		publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola		300.000.000,000	MERDEKA KELURAHAN KARYA MERDEKA KELURAHAN KARYA
	7 (01 03	2.02	0003	Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas / Ormas	Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka		publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dareha yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan da Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel	-	300.000.000,000	MERDEKA KELURAHAN KARYA MERDEKA KELURAHAN KARYA
	7 (01 03	2.02	0003	Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas / Ormas	Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka		publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		300.000,000,000	MERDEKA KELURAHAN KARYA MERDEKA KELURAHAN KARYA
	7 (01 03	2.02	0003	Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas / Ormas	Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka		publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		300.000,000,000	MERDEKA KELURAHAN KARYA MERDEKA KELURAHAN KARYA
	7 (01 03	2.02	0003	Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas / Ormas	Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka		publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik		300.000,000,000	MERDEKA KELURAHAN KARYA MERDEKA KELURAHAN KARYA
	7 (01 03	2.02	0003	Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas / Ormas	Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka		publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung		300.000,000,000	MERDEKA KELURAHAN KARYA MERDEKA KELURAHAN KARYA
	7 (01 03	2.02	0003	Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas / Ormas	Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka		publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemmerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemmerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		300.000,000,000	MERDEKA KELURAHAN KARYA MERDEKA KELURAHAN KARYA
	7 (01 03	2.02	0003	Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas / Ormas	Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka		publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan darah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola		300.000,000,000	MERDEKA KELURAHAN KARYA MERDEKA KELURAHAN KARYA
	7 (01 03	2.02	0003	Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas / Ormas	Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka 300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Karya Merdeka		publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemmerintahan dan Pelayanan Publik 7. Peningkatan tata kelola pemmerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan		300.000,000,000	MERDEKA KELURAHAN KARYA MERDEKA KELURAHAN KARYA



7 01 03 2	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	31 Lembaga Kemasyarakatan	1.550.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Karya Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	1.550.000.000,00	KELURAHAN KARYA MERDEKA
7			Kemasyarakatan	yang Diselenggarakan	Kemasyarakatan					MERDEKA
7						Merdeka	1	profesional dan akuntabel		
7				i I I						
7						Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung		
7		1	İ			Kute Siantan, Karya	l I	transformasi pelayanan		
7						Merdeka		publik		
7		1				IVICI GENE		1. Penataan dan		
7		1					l I			
7		1					l I	Pengembangan Tata Kelola		
7		1						Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
7		<u> </u>						PUDIIK		
7			Kelurahan Sungai Merdeka			2.312.500.000,00			2.340.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI MERDEKA
			UNSUR KEWILAYAHAN			2.312.500.000,00			2.340.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI MERDEKA
7 01			KECAMATAN			2.312.500.000,00			2.340.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI MERDEKA
80 7 01 01		+	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	60 Nilai	62.500.000,00			90.000.000,00	
			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Iviidi SAKIF Ferangkat Daeran	OU Milai	02.300.000,00			50.000.000,00	MERDEKA
7 01 01 2	2.06		Administrasi Umum Perangkat	Jumlah layanan Administrasi -	6 Laporan	62.000.000,00	-	7. Peningkatan tata kelola -	89.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI
		1	Daerah	Umum Perangkat Daerah				pemerintahan daerah yang		MERDEKA
		1						profesional dan akuntabel		
		1					l I	untuk mendukung		
		1					l I	transformasi pelayanan		
		1						publik		
		1					l I	1. Penataan dan		
		1								
		1						Pengembangan Tata Kelola		
								Pemerintahan dan Pelayanan		
+	1	1						Publik		
7 01 01 2	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	1 Paket	10.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	10.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI
		1	Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang		Samboja Barat, Sungai		pemerintahan daerah yang		MERDEKA
		1		Disediakan		Merdeka		profesional dan akuntabel		
		1				Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung		
		1				Kute Siantan, Sungai		transformasi pelayanan		
		1				Merdeka	l I	publik		
		1						1. Penataan dan		
		1					l I	Pengembangan Tata Kelola		
		1						Pemerintahan dan Pelayanan		
		1					l I	Publik		
7 01 01 2	200	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1 Paket	20.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DDII)	7. Peningkatan tata kelola -	15 000 000 00	KELURAHAN SUNGAI
/ 01 01 7	2.06	0004	Penyeulaan Banan Logistik Kantor		1 Paket		DAINA BAGI HASIL (DBH)		15.000.000,00	
		1		yang Disediakan		Samboja Barat, Sungai	l I	pemerintahan daerah yang		MERDEKA
		1				Merdeka		profesional dan akuntabel		
		1				Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung		
		1				Kute Siantan, Sungai		transformasi pelayanan		
		1				Merdeka		publik		
		1						1. Penataan dan		
		1					l I	Pengembangan Tata Kelola		
		1						Pemerintahan dan Pelayanan		
		1					l I	Publik		
7 01 01 2	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1 Paket	2.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASII (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	2 000 000 00	KELURAHAN SUNGAI
' " " "	2.00	0003	Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan	1 i divec	Samboja Barat, Sungai	S. I. V. S. IGITIASIE (DDIT)	pemerintahan daerah yang	2.000.000,00	MERDEKA
		1	. cpgaridaari	. chabanadan yang bisculakan		Merdeka	l I	profesional dan akuntabel		
		1								
		1				Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung		
		1				Kute Siantan, Sungai	l I	transformasi pelayanan		
		1				Merdeka		publik		
		1					l I	1. Penataan dan		
		1						Pengembangan Tata Kelola		
		1					l I	Pemerintahan dan Pelayanan		
		1						Publik		
7 01 01 2	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	10 Laporan	30.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola -	62,000,000,00	KELURAHAN SUNGAI
		1 2003	dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	10 2000.011	Samboja Barat, Sungai		pemerintahan daerah yang	32.000.000,00	MERDEKA
		1	Garrian Salasi Salasi	SKPD		Merdeka		profesional dan akuntabel		
		1		JN D						
		1				Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung		
		1				Kute Siantan, Sungai		transformasi pelayanan		
		1				Merdeka		publik		
		1						1. Penataan dan		
		1						Pengembangan Tata Kelola		
	1	1					1	Pemerintahan dan Pelayanan		1
								Publik		



7	7 0	01 01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa - Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 bulan	500.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung	-	1.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI MERDEKA
										transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
7	7 C	01 01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Sungai Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Sungai Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH)	pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		1.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI MERDEKA
481	7 0	01 03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga - Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	72 Persen	2.250.000.000,00		Publik	- 2.25	50.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI MERDEKA
		01 03			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa - / Kelurahan	8 Kegiatan	750.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			KELURAHAN SUNGAI MERDEKA
7	7 C	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Sungai Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Sungai Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH)	T. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik T. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- 45	0.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI MERDEKA
7	7 C	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Sungai Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Sungai Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- 30	0.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI MERDEKA
7	7 0	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	10 Kegiatan	1.500.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.50	0.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI MERDEKA
7	7 C	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	30 Lembaga Kemasyarakatan	1.500.000.000,000 Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Sungai Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Sungai Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- 1.50	00.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI MERDEKA



					Kelurahan Bukit Merdeka			1.912.353.000,00				1.905.880.000,00	KELURAHAN BUKIT MERDEKA
	7				UNSUR KEWILAYAHAN			1.912.353.000,00				1.905.880.000,00	KELURAHAN BUKIT MERDEKA
	7 (01			KECAMATAN			1.912.353.000,00				1.905.880.000,00	KELURAHAN BUKIT MERDEKA
482	7	01 01	ı		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah -	60 Nilai	62.353.000,00				55.880.000,00	KELURAHAN BUKIT MERDEKA
	7	01 01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi - Umum Perangkat Daerah	4 Kegiatan	61.853.000,00		•	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	55.330.000,00	KELURAHAN BUKIT MERDEKA
	7	01 01	L 2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Bukit Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Bukit Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.700.000,00	KELURAHAN BUKIT MERDEKA
	7	01 01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Bukit Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Bukit Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	15.677.000,00	KELURAHAN BUKIT MERDEKA
	7	01 01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.853.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Bukit Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Bukit Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.853.000,00	KELURAHAN BUKIT MERDEKA
	7	01 01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Bukit Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Bukit Merdeka	DANA BAGI HASIL (DBH) -	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional da kuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 1. Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	32.100.000,00	KELURAHAN BUKIT MERDEKA
	7	01 01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 Bulan	500.000,00			7 - Peningkatan tata kelola	550.000,00	KELURAHAN BUKIT MERDEKA

7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Lapora	ran	500.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	550,000,00	KELURAHAN BUKIT MERDEK
					,	Surat Menyurat			Samboja Barat, Bukit	,	pemerintahan daerah yang			
						Sarativicityarat			Merdeka		profesional dan akuntabel			
									Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
									Kute Siantan, Bukit		transformasi pelayanan			
									Merdeka		publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
		1									Publik			
483 7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Lembaga -	72 Perse	sen	1.850.000.000,00			-	1.850.000.000,00	KELURAHAN BUKIT
					MASYARAKAT DESA DAN	Pemberdayaan Masyarakat								MERDEKA
					KELURAHAN	Desa/Kelurahan Yang Aktif								
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa -	8 Kegiat	atan	750.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola		750.000.000,00	KELURAHAN BUKIT
					,	/ Kelurahan			•		pemerintahan daerah yang		•	MERDEKA
						,					profesional dan akuntabel			
											untuk mendukung			
											transformasi pelayanan			
											publik			
											1. Penataan dan			
J		1		l l							Pengembangan Tata Kelola			1
		1		J							Pemerintahan dan Pelayanan			1
1	1	1 1		l							Publik		1	İ
	+										1 =====	———		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	4 Unit		450.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA BAGI HASIL (DBH)	- 7. Peningkatan tata kelola	-	450.000.000,00	KELURAHAN BUKIT MERDEK
		1		J	Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun			Samboja Barat, Bukit		pemerintahan daerah yang			1
									Merdeka		profesional dan akuntabel			
									Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
									Kute Siantan, Bukit		transformasi pelayanan			
											publik			
									Merdeka					
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	4 Pokma	nas /	300.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DRH)	- 7. Peningkatan tata kelola	_	300,000,000,00	KELURAHAN BUKIT MERDEK
'	01	05	2.02	0005	Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan	Ormas		Samboja Barat, Bukit	5,110,15,1011,1512 (5511)	pemerintahan daerah yang		300.000.000,00	NECOTO UTILITADO NATIVIENDE IO
					Kelulaliali		Offilias							
						Masyarakat di Kelurahan			Merdeka		profesional dan akuntabel			
									Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			
									Kute Siantan, Bukit		transformasi pelayanan			
									Merdeka		publik			
											1. Penataan dan			
											Pengembangan Tata Kelola			
											Pemerintahan dan Pelayanan			
											Publik			
	1	+											-	Į
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga	Jumlah Koordinasi yang -	10 Kegia	iatan	1.100.000.000,00		- 7. Peningkatan tata kelola	-	1.100.000.000,00	KELURAHAN BUKIT
		1			Kemasyarakatan Tingkat	dilaksanakan Desa / Kelurahan					pemerintahan daerah yang			MERDEKA
J		1		l	Kecamatan						profesional dan akuntabel			1
J		1		l l							untuk mendukung			1
		1		J							transformasi pelayanan			1
		1		J										1
		1		J							publik			1
	1	1 1		J		l l					1. Penataan dan		1	1
		1		J							Pengembangan Tata Kelola			1
		1		J							Pemerintahan dan Pelayanan			1
		1		J							Publik			1
7	01	03	2 03	0001	Penyelenggaraan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	22 Lemb	nhaga	1.100.000.000,00 Kab. Kutai Kartanegara,	DANA RAGI HASII (DDU)	- 7. Peningkatan tata kelola	_	1 100 000 000 00	KELURAHAN BUKIT MERDEK
	01	03	2.03	0001					Samboja Barat, Bukit	DAINA BAGI HASIL (DBIT)	pemerintahan daerah yang		1.100.000.000,00	RELONALIAN BORTI WERDER
J		1		l l	Kemasyarakatan	yang Diselenggarakan	Kemasya	yarakatan						1
		1		J					Merdeka		profesional dan akuntabel			1
		1		J					Kab. Kutai Kartanegara,		untuk mendukung			1
J		1		l					Kute Siantan, Bukit		transformasi pelayanan			1
	1	1 1		J		l l			Merdeka		publik		1	1
		1		J							1. Penataan dan			1
J		1		l										1
1		1		l							Pengembangan Tata Kelola			1
			- 1			l l					Pemerintahan dan Pelayanan			I
								IUMLAH	7.502.883.259.000,00		Publik		9.845.192.673.482,00	

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026

Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik outcome ataupun output pada instansi atau lembaga pemerintahan. Setiap indikator kinerja yang ditetapkan harus mampu mengikuti perkembangan dinamika global manajemen kinerja Pemerintah Daerah sehingga setiap permasalahan maupun prakondisi pembangunan dapat dianalisis melalui capaian target indikator kinerja. Indikator kinerja Daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator "hasil" lebih sekedar "keluaran" karena "hasil" utama daripada menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.

Penetapan indikator kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala Daerah dan wakil kepala Daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. indikator kinerja Daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Dalam implementasinya, suatu indikator kinerja Daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja Daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Indikator kinerja Daerah dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun pelaksanaan RKPD Indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel VI-1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026

NT -	INDIKATOD	REALISASI	TARGET
No	INDIKATOR	2024	RKPD 2026
1	Indeks Reformasi Birokrasi	BB(71,51)	BB (71,60)
2	Nilai SAKIP	CC(65,93)	B (70)
3	Indeks Persepsi Anti Korupsi	8,38	8,50
4	Indeks Persepsi Kualitas	9,81	9,90
	Pelayanan Publik		
5	Indeks Pembangunan Manusia	76,57	77,00-77,47
6	Indeks Pendidikan	0,688	0.706
7	Indeks Pembangunan	57,42	58,00
	Kebudayaan		
8	Indeks Kesehatan	0,836	0.840
9	Indeks Pembangunan Gender	81,08	81,50
10	Tingkat Kebahagiaan	79,60	80
11	Tingkat Kemiskinan	7,28	6,10 - 6,60
12	Indeks Gini	0,307	0,274 - 0,290
13	Indeks Desa Membangun	0,797	0.850
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,11	3,70 - 3,90
15	PDRB Per Kapita	259,19	265,00 -
			270,00
16	Laju Pertumbuhan PDRB Non	7,88	7,75
	Migas dan Batubara		
17	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor	2,94	7,50
	Pertanian, Kehutanan dan		
	Perikanan		
18	Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,85	7,90
	Sektor Pariwisata		
19	Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,7	7,90
	Kreatif		
20	Tingkat Pertumbuhan Investasi	10,85	12,00
21	Indeks Kesulitan Geografis	16,183	31.8
22	Persentase Kawasan Kumuh	0,0046	0.0054
23	Cakupan layanan air bersih	80,2	95,00
24	Persentase rumah layak huni	98,64	99,00
25	Indeks Aksesibilitas Wilayah	76,49	88.18
26	Persentase Penurunan Emisi	6,16	5%
	GRK		
27	Indeks Kualitas Lingkungan	73,59	74.51
	Hidup	<u> </u>	
28	Indeks Risiko Bencana	118,80	108,25

Tabel VI-2. Penetapan Indikator Utama Pembangunan (IUP) Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026

No	Indikator Utama Pembangunan	Capaian			Targ	et		
INO	mdikator Otama Fembangunan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,33	74,24	74,60	74,96	75,32	75,66	76,01
	Kesehatan Ibu dan Anak:							
2	Jumlah Kematian Ibu (jiwa)	13,00	10,00	9,00	9,00	8,00	8,00	7,00
3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	14,20	16,00	15,28	14,56	13,84	13,13	12,40
	Penanganan Tuberkulosis:							
4	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (%)	n.a	47,06	49,06	49,56	52,06	57,04	55,68
5	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	n.a	91,64	92,04	92,44	92,84	93,23	93,62
6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	n.a	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50
	Hasil Pembelajaran:							
7	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :							
	i) Literasi Membaca (%)							
	SD	n.a	71,76	72,30	72,84	73,38	73,92	74,46
	SMP	n.a	74,26	74,72	75,18	75,64	76,10	76,56
	ii) Numerasi (%)							
	SD	n.a	61,11	62,24	63,37	64,50	65,63	66,76
	SMP	n.a	73,67	74,11	74,55	74,99	75,43	75,87
8	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun (tahun)	9,27	9,40	9,60	9,80	10,01	10,21	10,41
9	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,65	13,67	13,84	14,02	14,19	14,36	14,53



No	Indikator Utama Pembangunan	Capaian			Targ	get		
110	manator otama rembanganan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi (%)	n.a	8,50	8,58	8,66	8,75	8,83	8,91
11	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi (%)	n.a	55,41	56,99	58,56	60,14	61,71	63,29
12	Tingkat Kemiskinan (%)	7,28	6,97 - 7,03	6,56 - 6,74	6,15 - 6,45	5,73 - 6,16	5,32 - 5,86	4,90 - 5,56
13	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	n.a	75,82	76,38	76,94	77,49	78,05	78,60
14	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	3,71	4,29	5,41	6,53	7,65	8,78	9,89
	Pengembangan Pariwisata:							
15	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,30	0,31	0,49	0,67	0,85	1,03	1,21
16	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang)	3796	1618	1893	2168	2443	2718	2993
17	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif (orang)	4386	246	257	268	279	289	300
	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD							
18	Presentase Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas (%)	n.a	0,17	0,27	0,37	0,47	0,57	0,67
19	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	n.a	1,51	1,81	2,11	2,40	2,70	2,99
20	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	n.a	0,22	0,24	0,26	0,27	0,28	0,29
21	Return on Asset (ROA) BUMD (%)	n.a	13,08	13,24	13,40	13,56	13,72	13,88
22	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,11	3,85 - 3,91	3,75 - 3,87	3,65 - 3,83	3,54 - 3,79	3,44 - 3,75	3,33 - 3,71
23	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	n.a	50,95	53,39	55,83	58,27	60,71	63,15
24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	44,86	49,08	49,80	50,52	51,24	51,97	52,68
	Tingkat Penguasaan IPTEK dan Inovasi							
25	Indeks Inovasi Daerah	58,59	60,00	61,60	62,60	63,59	64,58	65,29





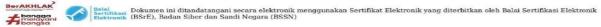
No	Indikator Utama Pembangunan	Capaian			Targ	get		
110	manator otama remoangunar	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau							
26	Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas yang pernah menggunakan internet selama 3 bulan terakhir	n.a	75,00	76,25	77,50	78,75	80,00	81,25
27	Disparitas Harga (%)	n.a	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10
28	Kontribusi PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	44,83	38,83	38,95	39,07	39,19	39,31	39,43
29	Kontribusi PDRB Net Ekspor Barang dan Jasa (%)	38,01	44,87	45,02	45,17	45,32	45,47	45,62
	Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan							
30	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	89,10	75,71	77,23	78,75	80,27	81,78	83,29
31	Persentase Desa Mandiri (%)	45,08	40,41	42,58	44,75	46,91	49,08	51,24
32	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,09	3,00	3,09	3,19	3,29	3,38	3,47
33	Indeks Pelayanan Publik	4,35	4,39	4,42	4,45	4,48	4,51	4,54
34	Indeks Integritas Pemerintah	n.a	72,50	73,03	73,55	74,08	74,60	75,13
35	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	n.a	0,02	0,0375	0,0550	0,0725	0,09	0,11
36	Indeks Perkembangan Harga (%)		2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3
	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan							
37	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)*	n.a	5,03	9,05	13,07	17,08	21,10	25,11
38	Total Kredit/PDRB (%)	n.a	1,49	5,63	9,77	13,91	18,05	22,19
39	Indeks Daya Saing Daerah	n.a	3,20	3,24	3,28	3,31	3,35	3,38
40	Tingkat Kriminalitas (Crime Rate)	n.a	66,00	65,25	64,50	63,75	63,00	62,25
	a. Jumlah kejadian tindak kriminal (kasus)	n.a	600	587	575	562	550	537
41	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	57,42	55,11	56,45	57,79	59,13	60,46	61,79





No	Indikator Utama Pembangunan	Capaian			Targ	et		
110	maixator otama rembanganan	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
42	Jumlah Kejadian Konflik SARA	n.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	66.96	71,25	72,27	73,28	74,30	75,31	76,33
44	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	81,08	0,45	0,445	0,440	0,435	0,43	425
	Kualitas Lingkungan Hidup							
45	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	73,59	78,83	74,51	79,17	79,34	79,51	79,68
46	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)	n.a	90,00	90,63	91,25	91,88	92,50	93,13
47	Timbulan SampahTerolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	n.a	30,00	30,81	31,62	32,43	33,23	34,04
	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan							
48	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	n.a	9,32	8,78	8,25	7,71	7,17	6,63
	Ketahanan Air							
49	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	n.a	2,66	2,81	2,96	3,10	3,25	3,39
	Cakupan Layanan Perkotaan terhadap Air Minum Aman							
50	Cakupan Layanan Air Minum Layak Perpipaan	96,98	80,00	81,25	82,50	83,75	85,00	86,25
51	Indeks Risiko Bencana (IRB)	118,80	108,53	108,25	107,98	107,70	107,42	107,14
52	PersentasePenurunan Emisi GRK (%)							
	a) Kumulatif	n.a	16,27	17,71	19,15	20,60	22,04	23,48
	b) Tahunan	6,16	18,18	25,71	33,24	40,77	48,29	55,81





Tabel VI-3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026

No	IKK Outcome	Realisasi 2024	Target 2026
	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar		
a) I	Pendidikan		
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	80.70	96,00%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100.22	101,20%
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	97.21	100,90%
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	42.81	53,50%
b) 1	Kesehatan		
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	0.990	0,12%
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100.000	100%
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	93.754	100%
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	90.188	100%
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98.219	100%
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	95.160	100%
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97.945	100%
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	91.878	100%
9	Persentase Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	87.825	100%
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100.000	100%
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100.000	100%
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100.000	100%
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100.000	100%
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100.000	100%
c) I	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0	6,00
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0	4,50
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	70.108	85,00
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	80.202	95,00%
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	89.097	90.00%
6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	100.000	5,00
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	63.20	80.00%
8	Rasio tenaga operator/teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	3.429	25,00
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100.00	10,00

No	IKK Outcome	Realisasi 2024	Target 2026
d) l	Perumahan Rakyat		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	0.00	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	100	100%
3	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	77.419	15.42%
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH(Rumah Tidak Layak Huni)	1.362	6.12%
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	16.209	19.68%
e) I	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100%
2	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	61.667	100%
3	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	33.708	20,00%
4	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0.110	100,00%
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100,00%
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	87.719	100,00%
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	11.100	15 Menit
f) S	Sosial		
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	100%
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	100	100%
	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar		
a) '	Геnaga Kerja		
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100.00	100%
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	14.337	28,19
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	18528575 8250.510	52,00%
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	8.917	100%
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	49.433	14,33%
b) 1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	24.474	16,20%
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100.000	0,37%
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000penduduk perempuan)	9.062	46%
c) I	Pangan		
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	123.70	130 ton
d) 1	Pertanahan		
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100.00	100
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100.00	100
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	16.71	100
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100.00	100
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	100.00	100



No	IKK Outcome	Realisasi 2024	Target 2026
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100.00	100
e) I	Lingkungan Hidup		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	73.59	74.51
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota		86
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	54.63	85.59
f) A	dministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
1	perekaman KTP elektronik	99.38	0,99
2	persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	67.50	99%
3	kepemilikan akta kelahiran	99.16	74%
4	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janjian kerjasama	67.27	11
g) I	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	100	0
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	52.08	14,30
h) 1	pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana		
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,24	2,12
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	71,69	77,25
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,92	10
i) P	erhubungan		
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	0,614	100
2	Kinerja lalu lintas kabupaten /kota	0,38	423
j) K	omunikasi dan Informatika		
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	58
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	27
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	92,21	488,055
k) I	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	51,82	19%
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha/naik kelas	74,84	13.28%
1) P	enanaman Modal		
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	10,85	1,79
m)	Kepemudaan dan Olahraga		
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1.133	0,32
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0.887	4,89
3	Peningkatan prestasi olahraga	175	5.92
n) S	Statistik		
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100
o) I	Persandian		
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	62,17	200
p) I	Kebudayaan		
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	100	8
	Perpustakaan		



No	IKK Outcome	Realisasi 2024	Target 2026			
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	68,17	64			
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	62,52	24			
r) K	r) Kearsipan					
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	83,05	100			
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100	100			
	Urusan Pilihan					
a) I	Kelautan dan Perikanan					
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	281.950,7	350,920			
- :	Pariwisata	140 5601	4.60			
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	148.5621	4,62			
3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota Tingkat hunian akomodasi	-20.57 11.828	13,00 35.28			
5	Kontribusi sektor pariwisata Terhadap PDRB harga berlaku	0.374 7.271	3,39% 1.756.287			
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	7.271	.036			
	Pertanian	F0F 000				
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	505.202	42.0			
	Padi		43.9			
	Jagung		67.36			
	Ubi kayu		337.45			
	Durian		84.64			
	Jahe		197.04			
	Bawang Merah		62.57			
	Cabe		110.38			
	Pisang		620.47			
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	-6.976				
	Brucellosis		90			
	Jembrana		90			
	Rabies		70			
1) 7	Scabies		70			
	Kehutanan					
,	Energi dan Sumber Daya Mineral	0	,			
	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di kab/kota	0	n/a			
	erdagangan	00.500	14.00			
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	92.592	14,29			
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	62.682	98,57			
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	41.985	20,00			
	Perindustrian	0	F 00			
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	0	5,08			
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	7.384	00.05			
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	0	98,25			



No	IKK Outcome	Realisasi 2024	Target 2026
	dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0,1
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota	65	0,1
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	-	100%
h) 7	Transmigrasi		
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan		
a) I	Perencanaan dan Keuangan		
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	5.90	15,82%
2	Rasio PAD	6.20	0,40%
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	4
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	4
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	47.638	66,02%
6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP
7	Indikator Akses Keuangan Daerah (IKAD)	3.63	3.75
b) I	Pengadaan		
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	15
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	67.57	65%
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	71.51	60%
c) I	Kepegawaian		
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	50.312	90
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	10.06	24
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	50.31	13
d) I	Manajemen Keuangan		
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalani APBD	11.85	-16,00%
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	7.46	1,13%
3	Manajemen Aset	Ya	YA
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya		20,00%
e) 7	ransparansi dan Partisipasi Publik		
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	65.65	100%
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100	100%

6.2. TARGET PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026

Dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya untuk mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Diharapkan dengan adanya implementasi tersebut, pelayanan publik menjadi lebih baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara secara merata dan berkelanjutan. Berikut target SPM Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan pembangunan

tahun 2026.

Penetapan Indikator SPM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026

No	Jenis Urusan Pelayanan Dasar/ Jenis Layanan	Indikator	Capaian 2024	Target 2026
1	PENDIDIKAN		2021	2020
	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi Dalam PAUD	99.96%	100%
	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTS)	100%	100%
	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)	100%	100%
2	KESEHATAN		<u> </u>	
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	95.53%	100%
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	82.95%	100%
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan	90.94%	100%
	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	94.53%	100%
	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	94.54%	100%
	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Persentase orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan layanan kesehatan	96.93%	100%
	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan Layanan Kesehatan	93.52%	100%
	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	93.61%	100%
	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	92.70%	100%
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Jumlah orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	95.93%	100%
	Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis	Persentase Jumlah orang orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	94.61%	100%
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemah daya tahan tubuh manusia (HIV)	Persentase Jumlah orang orang dengan risiko terinfeksi virus yang Melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	94.20%	100%
3	PERUMAHAN DAN PERMUKI	I	1000	10001
	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%
	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan layanan pengelolaan air limbah domestik	100%	100%
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	100%	100%

No	Jenis Urusan Pelayanan Dasar/ Jenis Layanan	Indikator	Capaian 2024	Target 2026
	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan Rumah Layak Huni	100%	100%
4	KETENTRAMAN DAN KETER?	ΓΙΒΑΝ		
	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penegakan Perda dan Perkada Sesuai Mutu	100%	100%
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%
5	SOSIAL			
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%
	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota	Persentase (%) Korban Bencana alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten	100%	100%

BAB VII PENUTUP

Penyusunan **RKPD** Tahun 2026 dengan tema "Pencapaian Pembangunan Kukar yang Inovatif, Daya Saing, dan Mandiri" merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam merancang pembangunan yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan. RKPD ini diharapkan menjadi pedoman strategis untuk mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional, sehingga visi besar pembangunan daerah dapat tercapai.

Melalui dokumen ini, Kabupaten Kutai Kartanegara bertekad untuk menjadikan inovasi sebagai fondasi utama dalam meningkatkan daya saing Daerah. Dukungan terhadap sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur strategis, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan akan menjadi fokus utama pembangunan. Dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, RKPD ini juga mengutamakan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mendorong kemandirian daerah dalam menghadapi tantangan global dan lokal.

Dokumen RKPD Tahun 2026 menjadi acuan resmi dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam KUA serta PPAS dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja-PD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan pada setiap bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi pondasi bagi kesinambungan dan terintegrasinya pelaksanaan program - program pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan rencana kerja pembangunan ini, berbagai program dan kegiatan yang telah dirumuskan akan dilaksanakan dengan konsisten oleh stakeholders sehingga target kinerja sebagai indikator pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat terealisasi dan terlaksana secara optimal.

7.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget intervention), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu Perangkat Daerah dan antar-Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RKPD Tahun 2026 ini merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Pelaksanaan RKPD Tahun 2026 juga memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target akhir pembangunan Daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2026 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subjek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

- 1. Seluruh perangkat daerah dan pelaku pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 tanpa terkecuali dengan tetap menjaga konsistensi, integrasi, dan sinergitas dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan pembangunan jangka menengah periode tahun 2021-2026.
- 2. Bagi Pemerintah Daerah dan lembaga Daerah, RKPD Tahun 2026 merupakan langkah awal penyusunan RAPBD sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen KUA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan PPAS Tahun 2026 (hasil kesepakatan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara).
- 3. Dalam rangka koordinasi perencanaan guna mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, integrasi, sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan setiap kebijakan, program dan kegiatan, masing-masing Perangkat Daerah harus membuat Renja-PD Tahun 2026 yang menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2026 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN/BLN/sumber dana lainnya) sebagai berikut:

- a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2026, merupakan anggaran program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/Daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Uraian tentang rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2026, merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya;
- c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir di atas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, sebagai tugas Pemerintah Daerah, sebagai tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah provinsi dari pemerintah pusat, atau sebagai tugas pembantuan yang diterima pemerintah kabupaten dari pemerintah pusat; serta
- d. Pemerintah daerah wajib menyampaikan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dari masing-masing Perangkat Daerah, yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah.
- 4. Setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di RKPD Tahun 2026 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Upaya pengendalian dan pengawasan ini akan merevisi setiap kekurangan, kemudian mengakselerasi dan mengoptimalkan capaian positif kinerja pembangunan Daerah.
- 5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subjek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan Daerah.
- 6. Setiap Kepala Perangkat Daerah pada akhir tahun 2026 wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2026 yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

- 7. Bupati, melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah Daerah secara berkala (3 (tiga) bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2026 sebagai tahun awal pada periode pembangunan jangka menengah saat ini.
- 8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.
- 9. RKPD Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2026. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI